



Facing **New Business** Horizon



PLTS Terapung Cirata
Cirata Floating SPP

2019
Laporan Tahunan
Annual Report

Facing **New Business** Horizon



Sebagai salah satu produsen listrik nasional, kehadiran PJB dituntut tidak sekedar membangkitkan energi listrik, namun juga beradaptasi dengan perkembangan tren bisnis global yang terjadi. Untuk itulah, Kami terus menjaga komitmen dalam menciptakan pertumbuhan bisnis berkelanjutan melalui kegiatan investasi dan pengembangan usaha secara berhati-hati, berpegang teguh pada prinsip-prinsip GCG, inovasi dan kreatifitas tiada henti serta meningkatkan nilai Perusahaan melalui kinerja profitabilitas. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PJB memiliki 3 peran utama, sebagai pemilik pembangkit sendiri, sebagai pengelola pembangkit PLN dan IPP (Independent Power Producer) serta sebagai investor dalam IPP. Mindset terhadap ketiga peran tersebut akan terus Kami tingkatkan implementasinya dengan cara merumuskan strategi dan eksekusi yang tepat serta sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

Bisnis inti akan terus Kami pertahankan, terbukti dengan pencapaian penting tahun 2019 yakni diperolehnya predikat Pencapaian Terbaik Unit Eksisting. Disamping itu, PJB juga mendapatkan Pencapaian Terbaik Operasi PLTU FTP-1 Jawa dan Pencapaian Terbaik UBJOM Jawa >50 MW yang merupakan hasil dari proses penguatan perubahan paradigma Managing to Orchestrating. Pengembangan bisnis jasa O&M serta EAM untuk pembangkit dan distribusi juga semakin meningkat. Sejumlah proyek pembangkit dalam tahap konstruksi sedang dilakukan. Dengan dukungan teknologi informasi melalui PJB iCORE, hadir dalam mewujudkan harapan pelanggan dan masyarakat secara luas sehingga kinerja unit pembangkit tercapai lebih optimal sekaligus solusi meminimalisasi emisi gas rumah kaca.

Kami terus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, di tingkat nasional maupun global guna mendorong portofolio bisnis yang semakin besar, mengembangkan bisnis baru dengan menciptakan nilai tambah untuk mendukung kesinambungan korporasi dalam jangka panjang. Berbagai upaya dan pencapaian penting di atas menunjukkan bahwa PJB berada pada jalur yang tepat dalam membangun horizon bisnis baru guna mencapai bisnis pembangkitan terintegrasi, sehingga dapat terus meningkatkan nilai Perusahaan, bagi pemegang saham maupun segenap pemangku kepentingan lainnya.

As one of the national electricity producers, the presence of PJB is not only required to generate electricity, but also to adapt to the development of the current global business trend. Therefore, we continue to uphold our commitment to the sustainable business growth through prudent investment and business development activities; upholding GCG principles; continuous innovation and creativity; and increasing the value of the Company through profitability performance. In its business activities, PJB has 3 main roles: as the powerplant owner, as the powerplant management of the PLN and IPP (Independent Power Producer), and as IPP's investor. The mindset of the three roles will be continuously improved by formulating appropriate strategies and executions as well as synergy and collaboration with various parties.

We always manages our core business, reflected by the significant achievement in 2019 which successfully received the title of the Best Achievement of the Existing Unit. Besides that, PJB also received the Best Achievement in the Operations of the Java FTP-1 CFPP and the Best Achievement of the Java>50MW OMSBU as the result of strengthening the Managing to Orchestrating paradigm shift. The development of O&M and EAM service businesses for power plant and distribution also increases. Some powerplant projects are under construction. With the support of PJB iCORE's information technology, it supports to meet the expectations of customers and wider society so that the performance of the generation unit can be achieved more optimally as well as a solution to minimize greenhouse gas emissions.

We continue to establish cooperations with various parties, both nationally and globally, to drive a growing business portfolio, new business development by creating added value to support corporate sustainability in the long run. Those important efforts and achievements above show PJB's clear vision in building a new business horizon to achieve an integrated power generation business; therefore, it can continuously increase the value of the Company, for shareholders and all other stakeholders.

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

4	Daftar Isi Table of Contents
8	Kesinambungan Tema Themes Continuity
10	Ringkasan Kinerja Utama 2019 2019 Key Performance
12	Peran dan Kontribusi Terbaik PJB Untuk Indonesia The Best Roles and Contributions of PJB to Indonesia
20	Horizon Bisnis Baru PJB: Own – Manage – Invest PJB's New Business Horizon: Own – Manage – Invest
26	Ikhtisar Data Keuangan Penting Summary of Financial Statements
34	Penghargaan dan Sertifikasi 2019 Awards and Certification in 2019
48	Peristiwa Penting 2019 Significant Events of 2019
56	Skema Bisnis Penyediaan Energi Listrik Terintegrasi PJB Grup Business Plan For Integrated Electricity Supply by PJB Group

02



LAPORAN MANAJEMEN

MANAGEMENT REPORT

60	Laporan Dewan Komisaris Report of The Board of Commissioners
72	Laporan Direksi Report of The Board of Directors
89	Surat Pernyataan Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2019 PT Pembangkitan Jawa-Bali The Responsibility Statement of the Board of Commissioners for 2019 Annual Report of PT Pembangkitan Jawa-Bali
90	Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2019 PT Pembangkitan Jawa-Bali The Responsibility Statement of the Board of Directors for 2019 Annual Report of PT Pembangkitan Jawa-Bali
91	Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Internal PT Pembangkitan Jawa-Bali Statement From Board of Directors Regarding The Responsibility Risk Management and Internal Control System PT Pembangkitan Jawa-Bali

03



PROFIL PERUSAHAAN

COMPANY PROFILE

94	Identitas Perusahaan Company Identity
96	Riwayat Singkat PJB PJB's Brief History
96	Jejak Langkah Milestone
98	Keterangan Perubahan Nama Perusahaan Description of Company Name Change
98	PJB Saat Ini Current PJB
100	Bidang Usaha Line of Business
100	Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar Business Activities based on Article of Association
100	Kegiatan Usaha yang Dijalankan Saat ini The Current Business Activities
101	Produk dan Jasa Products and Services
101	Unit Pembangkitan (UP) Generation Unit (GU)
102	Unit Bisnis Jasa Operasi & Pemeliharaan (O&M) O&M Service Business Unit
108	Skema Penyaluran Energi Listrik Scheme of Electricity Transmission
109	Visi, Misi dan Budaya Perusahaan Vision, Mission, and Corporate Culture
114	Struktur Organisasi Organizational Structure
116	Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profile
122	Profil Direksi Board of Directors Profile
128	Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Kepala SPI Education and Training of Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Head of Internal Control System
138	Profil dan Pengembangan Kompetensi SDM Human Capital Profile and Competency Development
155	Struktur dan Komposisi Pemegang Saham Structure and Composition of Shareholders

- 157** Struktur Grup Perusahaan, Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Perusahaan Patungan
Corporate Group Structure, Subsidiaries, Associated Entities, and Joint Venture Company
- 162** Sekilas Kinerja Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Entitas Afiliasi
Performance Overview Of Subsidiary, Associated and Affiliated Entities
- 176** Peta Wilayah Kerja
Operational Region Map
- 178** Alamat Kantor Perwakilan dan Unit Usaha
Representative Office and Business Unit Address
- 181** Lembaga Profesi Penunjang Perusahaan
Supporting Institutions & Professionals of the Company
- 183** Kronologis Pencatatan Saham
Chronology of Shares Listing
- 183** Kronologis Pencatatan Efek Lainnya
Chronology of Other Securities
- 184** Informasi Website PJB
Information on Company Website

03



- 188** PJB *Integrated Management System* (PJB IMS)
PJB Integrated Management System (PJB-IMS)
- 193** Manajemen Aset
Asset Management
- 199** Pengembangan Usaha
Business Development
- 202** Teknologi Informasi (TI)
Information Technology
- 209** Sumber Daya Manusia
Human Capital (HC)



04



- 230** Analisis Industri
Industry Analysis
- 230** Tinjauan Ekonomi Global
Global Economic Review
- 232** Tinjauan Ekonomi Nasional
National Economic Review
- 236** Industri Energi Listrik Nasional
National Electricity Industry
- 238** Kontribusi PJB dalam Industri Pembangkit Listrik Indonesia
PJB's Contribution to Power Generation Industry of Indonesia
- 240** Analisis Operasi per Segmen Usaha
Operating Analysis of Each Segment
- 261** Profitabilitas Per Segmen
Profitability for Each Segment
- 266** Analisis Kinerja Keuangan
Financial Performance Analysis
- 267** Analisis Laba Rugi Komprehensif
Comprehensive Profit and Loss Statement Analysis
- 278** Analisis Posisi Keuangan
Financial Position Analysis
- 295** Analisis Arus Kas
Cash Flow Analysis
- 298** Analisis Kemampuan Membayar Utang, Tingkat Kolektibilitas Piutang dan Rasio Keuangan Lainnya
Analysis of Solvency And Receivables Collectibility Rate as Well as Other Financial Ratios
- 307** Struktur Modal
Capital Structure
- 309** Ikatan Material Untuk Investasi Barang Modal
Material Commitment for Capital Expenditure Investment
- 322** Realisasi Investasi Barang Modal
Realization of Capital Goods Investment
- 325** Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Perusahaan Tahun 2019 dan Proyeksi Tahun 2020
Comparison Between Company's Performance Target and Realization in 2019 and Projection in 2020
- 334** Kebijakan Dividen
Dividend Policy





- 336** Kontribusi Kepada Negara
Contributions to the State
- 337** Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan Manajemen
Management and Employee Stock Option Program
- 337** Realisasi Dana Hasil Penawaran Umum
Realization of Public Offering Proceeds
- 338** Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Dengan Pihak Afiliasi/Berelasi
Information of Material Transactions Related to Conflict of Interest or Transactions with Affiliated/Related Parties
- 343** Informasi Material Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi dan Restrukturisasi Hutang/Modal
Material Information on Investment, Expansion, Divestment, Acquisition, and Debt/Capital Restructuring
- 346** Perubahan Kebijakan Akuntansi
Changes in Accounting Policy
- 348** Perubahan Peraturan dan Dampaknya terhadap Perusahaan
Changes in the Regulations and their Impact to the Company
- 352** Informasi dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan
Information and Material Fact After Accountant Reporting Date
- 352** Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian Luar Biasa dan Jarang Terjadi
Financial Information Related to Extraordinary and Rare Events
- 353** *Key Performance Indicators* dan Tingkat Kesehatan Perusahaan
Key Performance Indicator and Company's Soundness Level
- 355** Informasi Kelangsungan Usaha
Information concerning Business Continuity
- 359** Dampak Perubahan Harga Terhadap Pendapatan dan Laba Perusahaan
The Impacts of Selling Price Changes on Revenue and Profit of Company
- 360** Aspek Pemasaran dan Pangsa Pasar
Marketing Aspects and Market Share
- 363** Prospek Usaha
Business Prospect



05



TATA KELOLA PERUSAHAAN CORPORATE GOVERNANCE

- 372** Komitmen Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan
Commitment to Implementation of Sustainable Good Corporate Governance
- 388** Struktur Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Structure
- 390** Informasi Mengenai Pemegang Saham Utama dan Pengendali
Information on Majority and Controlling Shareholders
- 391** Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders
- 408** Dewan Komisaris
Board of Commissioners
- 428** Direksi
Board of Directors
- 446** Hubungan Afiliasi dan Hubungan Kerja Dewan Komisaris Dengan Direksi
Affiliation and Work Relationship Between the Board of Commissioners and the Board of Directors
- 450** Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi
Policy on Composition Diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors
- 453** Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
Remuneration Policy of the Board of Commissioners and the Board of Directors
- 459** Komite Audit
Audit Committee
- 471** Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan
Risk Management and Compliance Committee
- 484** Komite SDM dan Organisasi
HC and Organization Committee
- 496** Pelaksana Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee Functions Implementer
- 498** Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary of the Board of Commissioners
- 502** Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary
- 510** Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System

- 515** Audit Internal
Internal Audit
- 528** Auditor Eksternal
External Auditor
- 531** Manajemen Risiko
Risk Management
- 550** Standar Etika Perusahaan
Code of Conduct
- 562** PJB Bersih
PJB Bersih
- 576** Whistleblowing System
Whistleblowing System
- 585** Perkara Penting
Important Cases
- 589** Pengadaan Barang dan Jasa
Goods and Services Procurement
- 598** Akses Informasi dan Data Perusahaan
Corporate Information and Data Access



07

LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN 2019

2019 ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS

- 692** Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun 2019
Consolidated Financial Statements of 2019

06



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY

- 608** Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial
Corporate Social Responsibility Governance
- 619** Tanggung Jawab Sosial terkait Hak Asasi Manusia (HAM)
Corporate Social Responsibility To the Human Rights
- 626** Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terkait
Operasi yang Adil
Corporate Social Responsibility to the Fair Operation
- 631** Tanggung Jawab Sosial terhadap Lingkungan
Corporate Social Responsibility to the Environment
- 648** Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Praktik
Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Corporate Social Responsibility to Labor Practices and
Occupational Health and Safety
- 664** Tanggung Jawab terhadap Pelanggan
Responsibilities to Customers
- 671** Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap
Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan
Corporate Social Responsibility to the Community
Development

08



REFERENSI KRITERIA ARA 2019

REFERENCE OF ARA 2019

- 808** Kriteria Penilaian ARA Tahun 2019
Assessment Criteria of ARA 2019





FACING NEW BUSINESS HORIZON

Kami terus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak guna mendorong portofolio bisnis yang semakin besar. Selain itu, juga mengembangkan bisnis untuk membangun horizon bisnis baru mewujudkan bisnis pembangkitan terintegrasi dalam mendukung kesinambungan korporasi dalam jangka panjang. Kami berupaya untuk terus meningkatkan nilai Perusahaan, baik bagi pemegang saham maupun segenap pemangku kepentingan lainnya.

PJB continues to establish cooperations with various parties to drive a growing business portfolio. PJB also develops business to build a new business horizon to realize integrated power generation business in supporting the long-term corporate sustainability. PJB strives to continuously improve the value of the Company, both for shareholders and all other stakeholders.



2018



MENGHADIRKAN NILAI TAMBAH DAN HARAPAN BARU, WUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BAGI PEMANGKU KEPENTINGAN PRESENTING ADDED VALUE AND NEW HOPE FOR STAKEHOLDERS THROUGH SUSTAINABLE DEVELOPMENT

PJB hadir untuk mewujudkan harapan pelanggan, mitra kerja, masyarakat dan pemegang saham dengan kinerja nyata, inovasi, kreatifitas, konsistensi penerapan tata kelola perusahaan serta komitmen atas tanggung jawab sosial untuk senantiasa mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

PJB exists to realize the expectations of customers, partners, society, and shareholders through excellent performance, innovation, creativity, consistent implementation of GCG, and commitment of Corporate Social Responsibility to always supporting the realization of sustainable development.

2017



ENERGIZING COMPANY STRUCTURE FOR GROWTH

Sejalan dengan strategi jangka panjang, PJB terus memperkuat struktur perusahaan sebagai langkah strategis untuk terciptanya pertumbuhan usaha yang solid dan berkelanjutan. Dengan struktur perusahaan yang kuat, PJB meyakini siap menghadapi setiap tantangan bisnis yang semakin dinamis dan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi stakeholders dan shareholders.

Along with the long-term strategy, PJB continuously improves its structure as a strategic effort to establish a solid and sustainable business development. With a solid corporate structure, PJB believes that it is prepared well to face dynamic business challenges and to provide significant added values to the stakeholders and shareholders.

RINGKASAN KINERJA UTAMA 2019

2019 KEY PERFORMANCE HIGHLIGHTS



Pendahuluan
Introduction



Laporan Manajemen
Management Report



Profil Perusahaan
Company Profile



Tinjauan Pendukung Bisnis
Business Support Review



Analisis dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis

COD

Commercial Operation Date

PLTU Cilacap Ekspansi Unit 4
PLTU Jawa 7 Unit 1
PLTU Mamuju

Cilacap CFPP Expansion Unit 4
Java 7 CFPP Unit 1
Mamuju CFPP



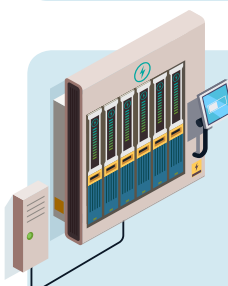
Produksi Listrik Electricity Production

23.312,9 GWh



Penjualan Listrik Electricity Sales

22.404,11 GWh



Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

PLTU Sumbagsel 1
PLTS Terapung Cirata

Power Purchase Agreement (PPA)

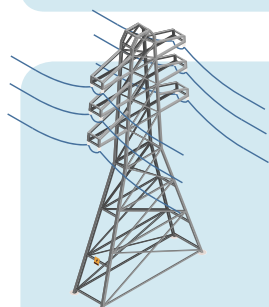
Southern Sumatera 1 CFPP
Cirata Floating SPP



Pendapatan Usaha Revenues



Rp39.757.951 juta million



Penugasan Pengembangan Bisnis Jasa O&M O&M Services Business Development Project

Total Kapasitas Total Capacity 1.580 MW



Konstruksi Pembangunan Pembangkit

Muara Tawar add-on
PLTU Jawa 7 Unit 2
PLTA Batang Toru

Power Plant Construction

Muara Tawar Add-on
Java 7 CFPP Unit 2
Batang Toru HPP



Capaian Investasi Investment

Rp1.028,16
miliar billion

Skor GCG
Predikat Sangat Baik
Tertinggi di PLN Group
GCG Score - Excellent
The Best Score in
The PLN Group



94,45

Prestasi dan Penghargaan Awards and Achievements



- Juara 1 Annual Report Award Tahun 2019 kategori Perusahaan Non Keuangan Non Listed
- Best Companies to Work For in Asia pada HR Asia Awards 2019
- Power Utility of the Year dan Gas Power Project of the Year pada Asian Power Awards 2019
- IT Team of The Year oleh Stevie International Business Award 2019
- Subroto Award di Bidang Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan Efisiensi Energi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- First Winner of the 2019 Annual Report Award in the category of Non-Listed Non-Financial Companies
- Best Companies to Work For in Asia at the 2019 HR Asia Awards
- Power Utility of the Year and Gas Power Project of the Year at the 2019 Asian Power Awards
- IT Team of The Year at the 2019 Stevie International Business Award
- Subroto Award in the Category of Electricity Safety and Energy Efficiency from the Ministry of Energy and Mineral Resources



Laba Perusahaan Asosiasi Profit from Associates

Rp 891 miliar billion

Sinergi Antar Anak Perusahaan PLN Lain Synergy among Other PLN Subsidiaries



Rp 1.005,07
miliar billion



2

PROPER Emas
Gold PROPER

4

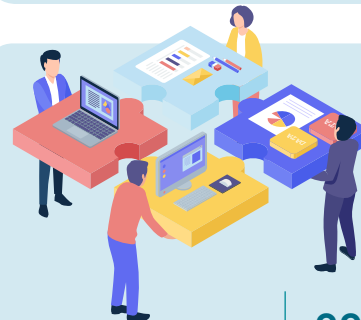
PROPER Hijau
Green PROPER

11

PROPER Biru
Blue PROPER

Realisasi Dana CSR CSR Budget Realization

Rp32,23 miliar billion



HCR 4,45

Tingkat kesiapan karyawan yang baik dalam menjalankan strategi Perusahaan dilihat dari proses dan hasil. Excellent employee readiness in applying the Company's strategy is indicated by the process and results.

OCR 4,45

Kesiapan organisasi yang baik berdasarkan aspek budaya kerja, kepemimpinan, alignment dan team work. Excellent organizational readiness indicated by work culture, leadership, alignment and team work aspects.



Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan Audit
Audited Financial Statements



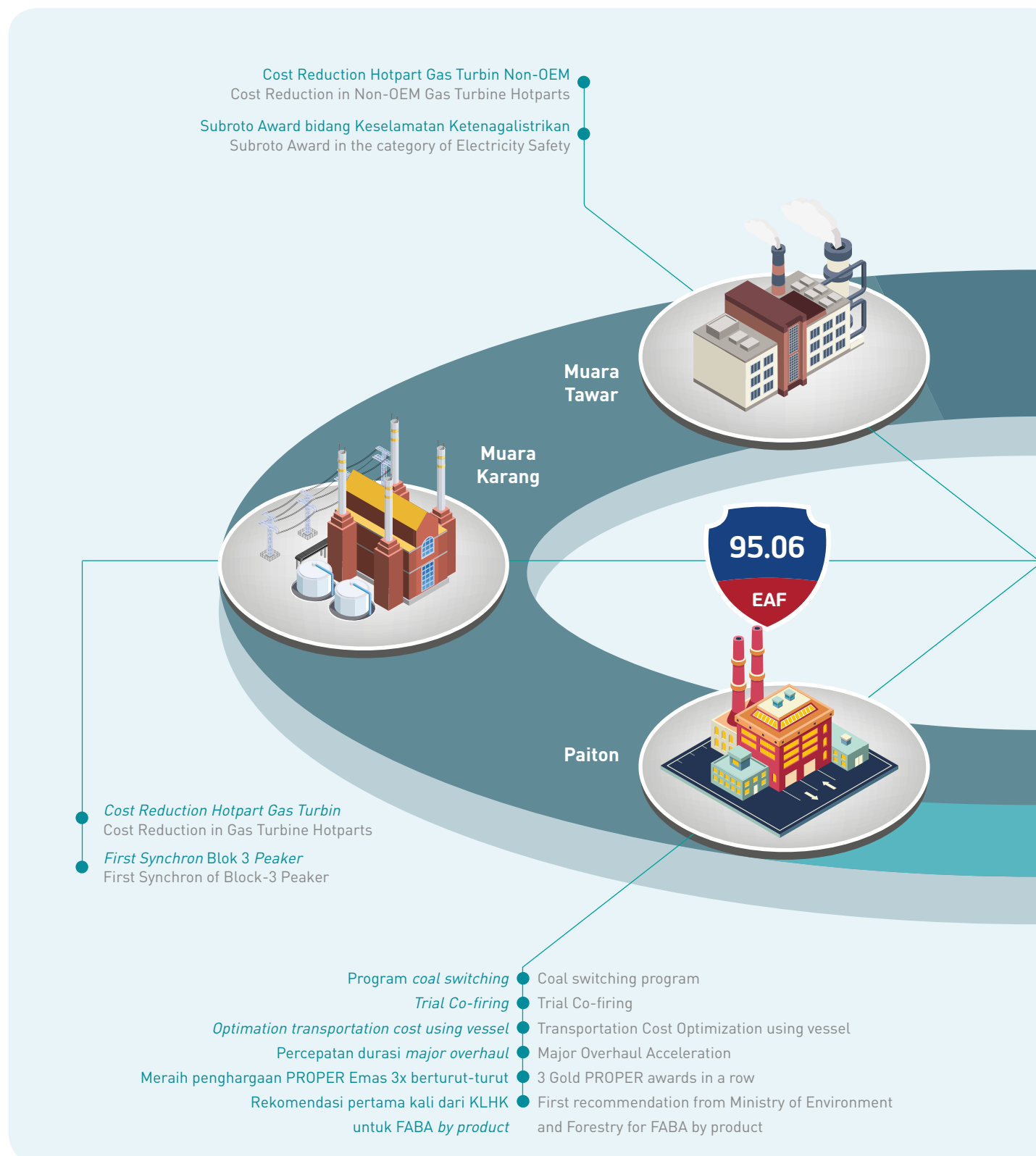
Referensi Kriteria AR
ARA Criteria Reference

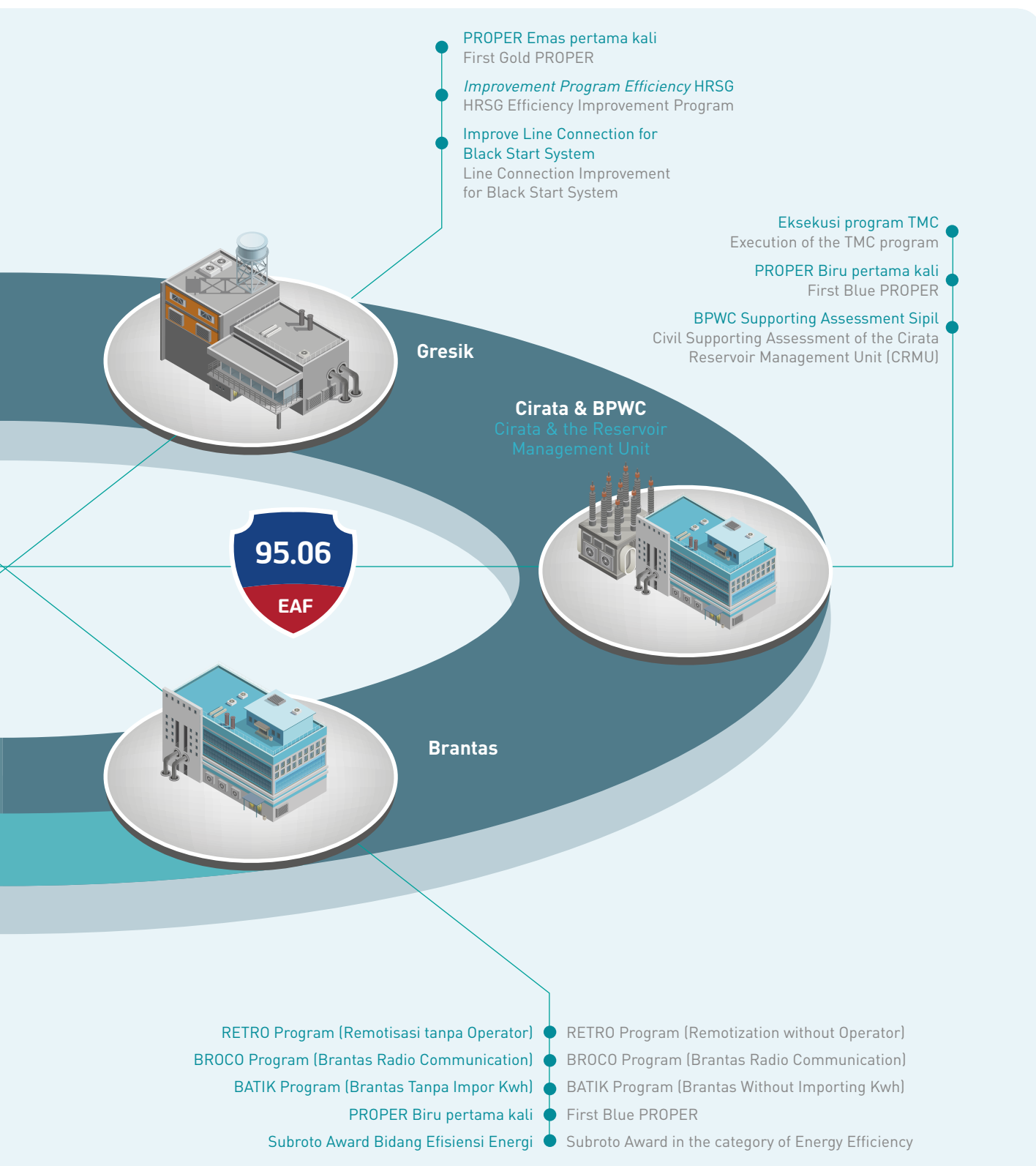
PERAN DAN KONTRIBUSI TERBAIK PJB UNTUK INDONESIA

PJB'S ROLE AND CONTRIBUTION TO INDONESIA

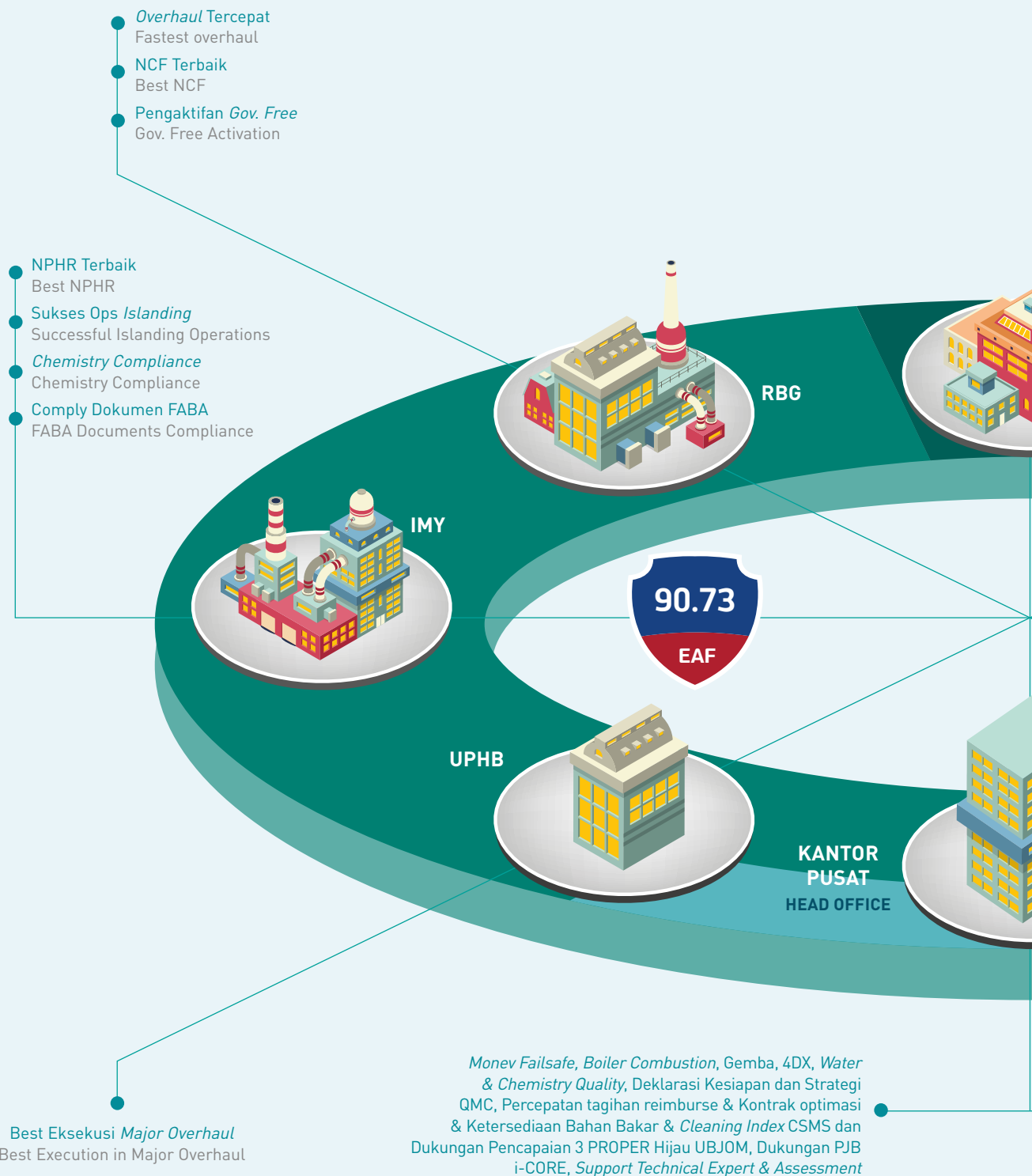
Pencapaian Terbaik Unit Eksisting Tahun 2019

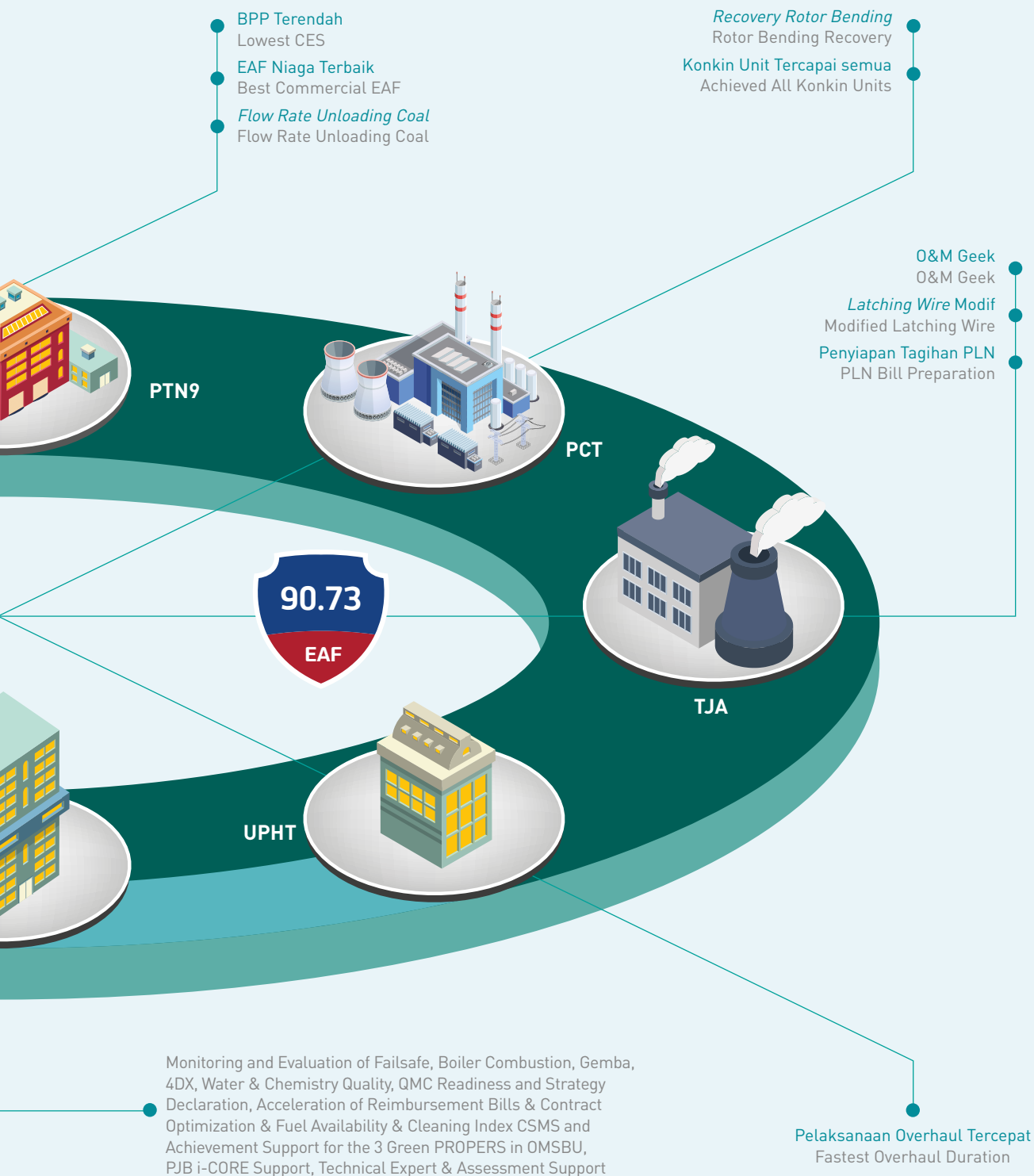
2019 Best Achievements of Existing Units





Pencapaian Terbaik Operasi PLTU FTP-1 Jawa Tahun 2019 The Best Achievement of Java FTP-1 CFPP Operation in 2019





Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

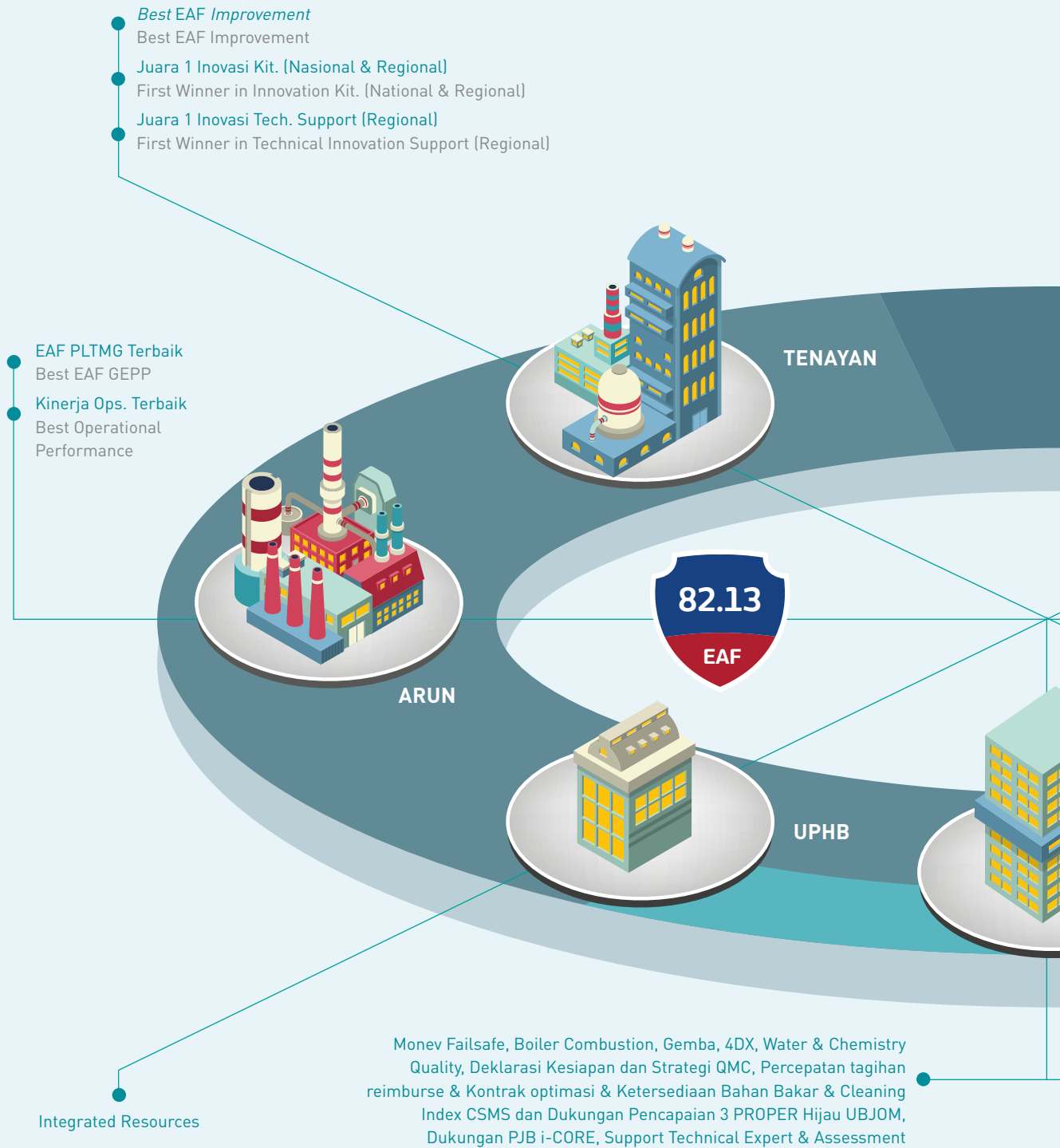


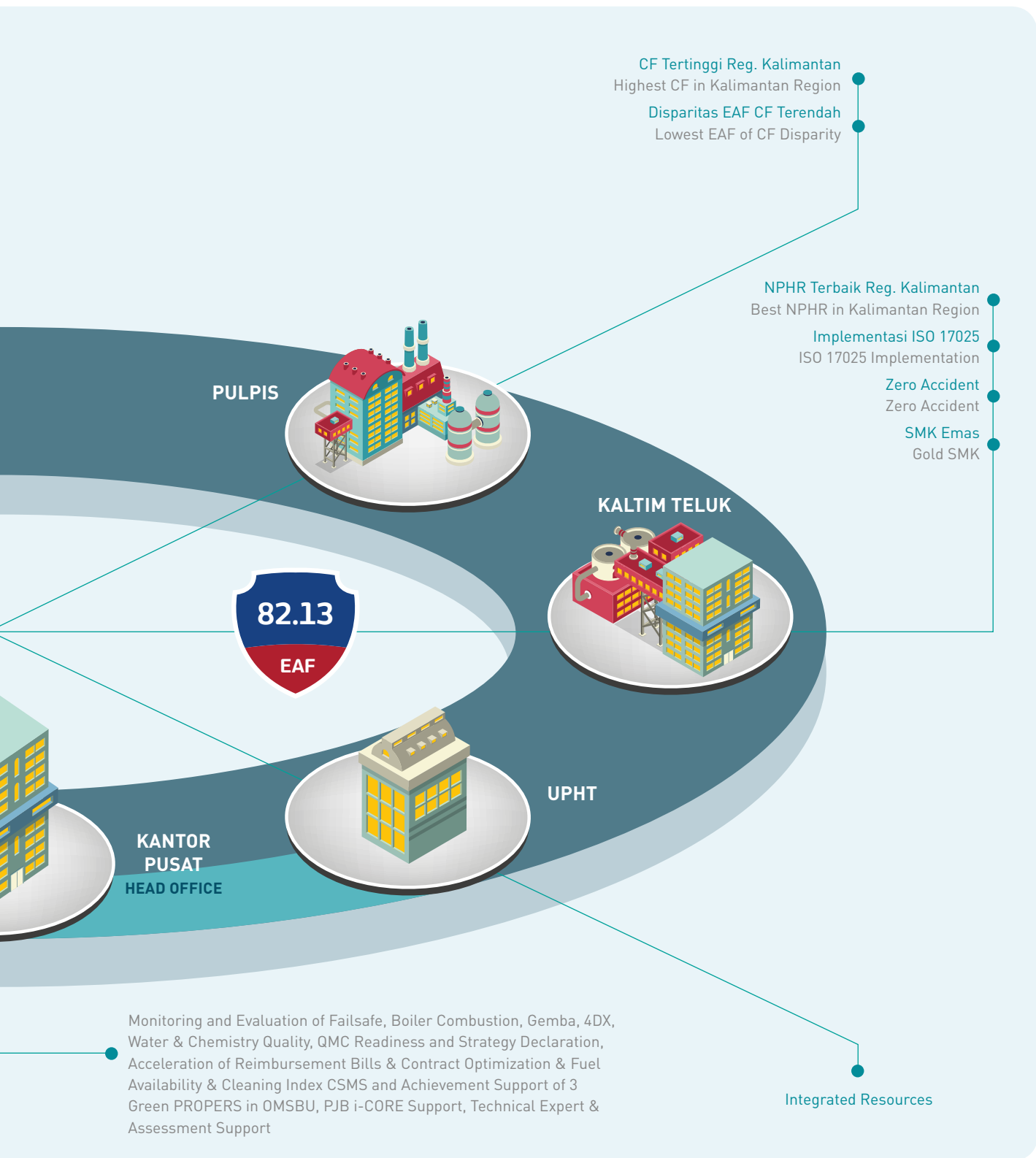
Laporan Keuangan Audit
Audited Financial Statements



Referensi Kriteria ARA
ARA Criteria Reference

Pencapaian Terbaik UBJOM Luar Jawa >50 MW Tahun 2019 The Best Achievements of Outer Java >50MW OMSBU in 2019





Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

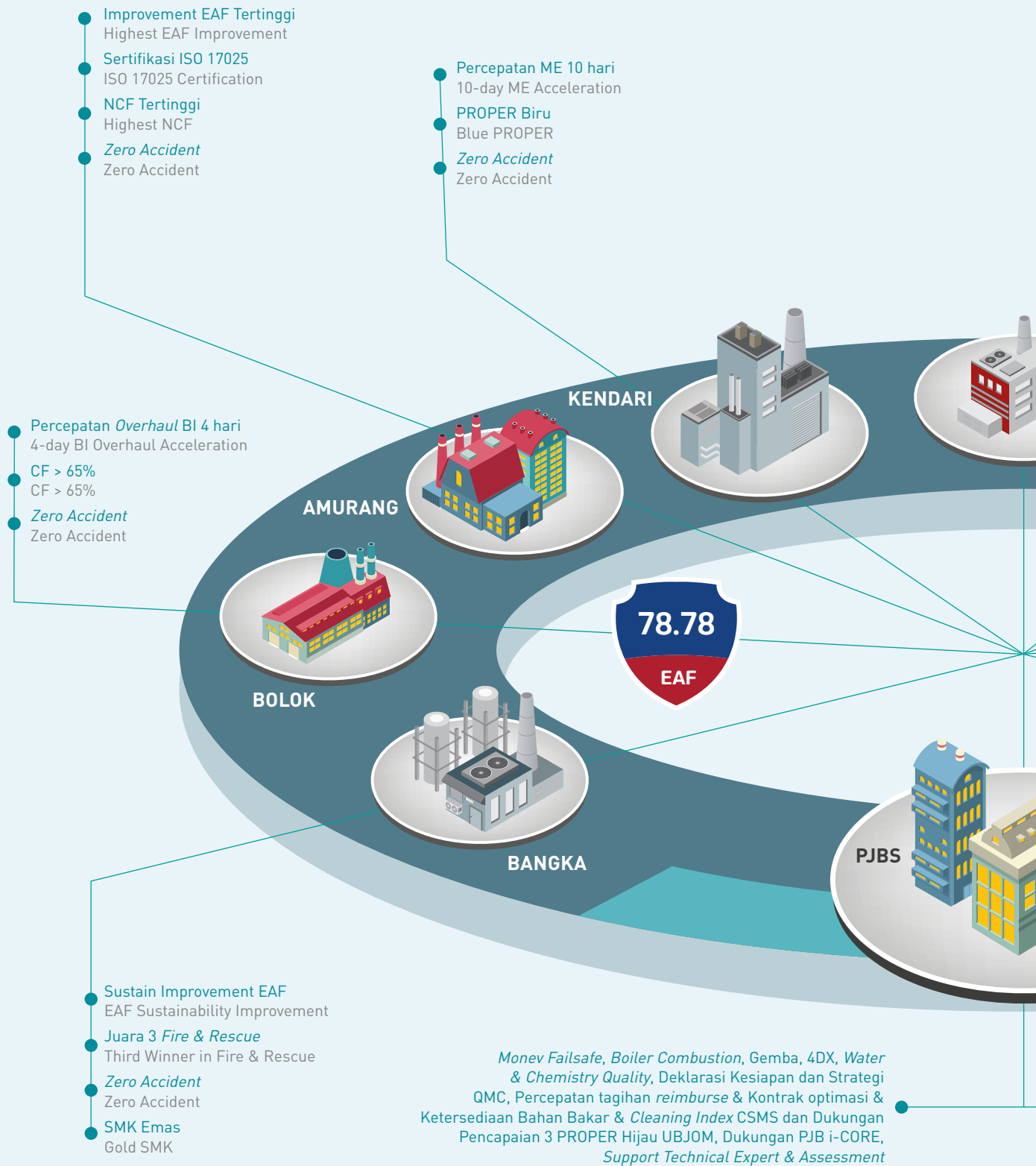


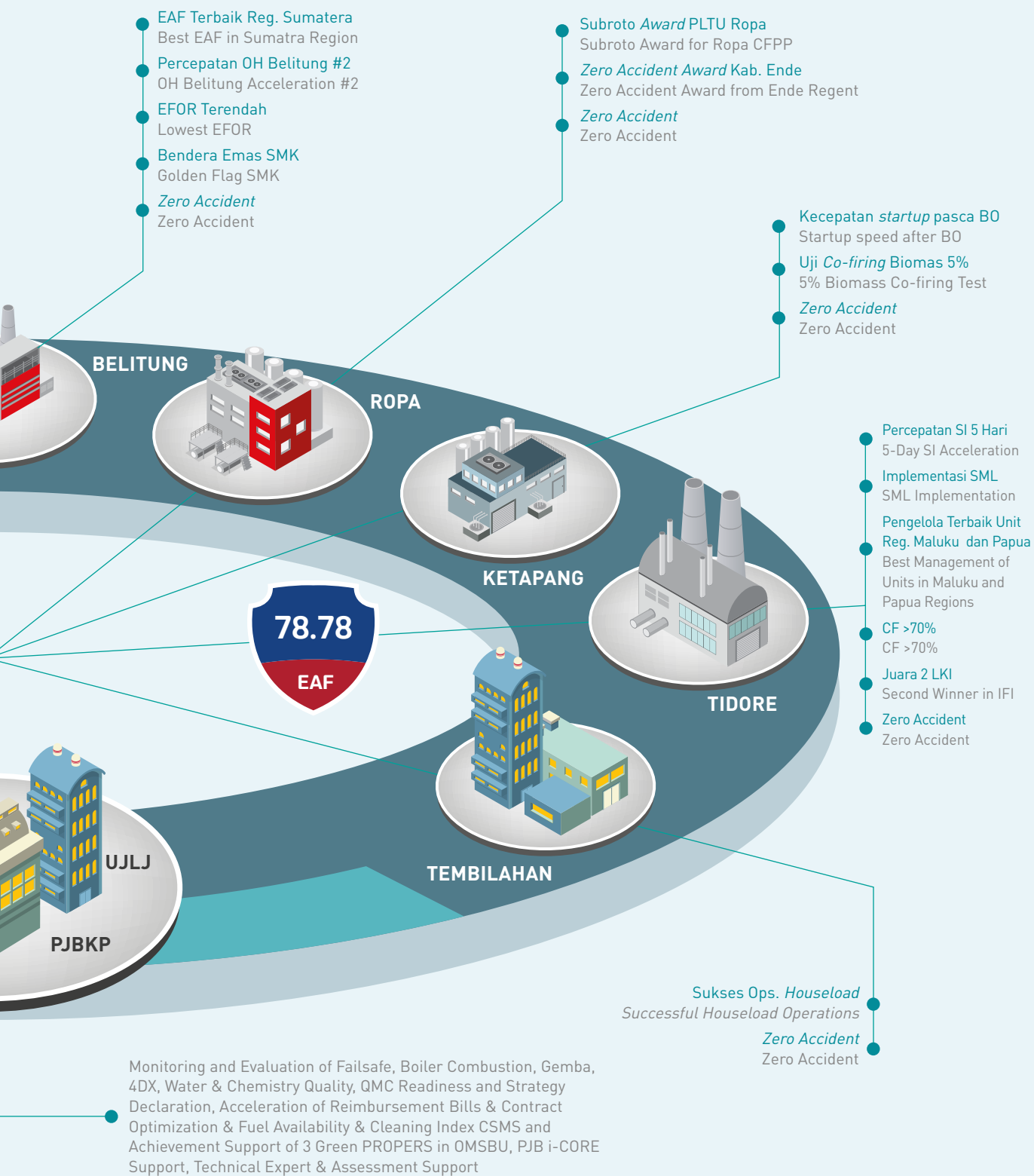
Laporan Keuangan Audit
Audited Financial Statements



Referensi Kriteria ARK
ARK Criteria Reference

Pencapaian Terbaik UBJOM Luar Jawa >50 MW Tahun 2019 The Best Achievements of Outer Java >50MW OMSBU in 2019





Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan Audit
Audited Financial Statements



Referensi Kriteria ARA
ARA Criteria Reference

HORIZON BISNIS BARU PJB: OWN – MANAGE – INVEST

PJB NEW BUSINESS HORIZON: OWN—MANAGE—INVEST

Mempertahankan dan Memperluas Bisnis Inti Dengan Pencapaian Terbaik Unit Eksisting 2019

Maintaining and Expanding Core Business with the Best Achievement in the Existing Unit 2019

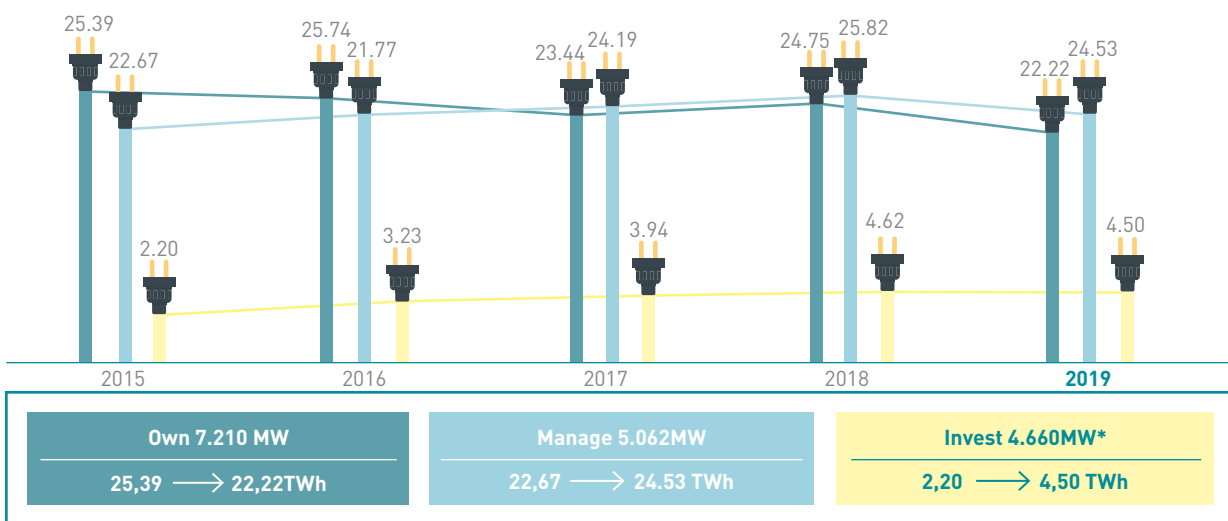


Kami terus berupaya mengelola unit eksisting agar dapat menghasilkan pencapaian terbaiknya, dengan kinerja keandalan pembangkit dan penanganan gangguan, sesuai dengan standar pembangkit kelas dunia.

We continuously strive to manage our existing units to achieve the best performance of the powerplant reliability and outage handling based on world-class standards of power generation.

Grafik Penjualan TWh Pembangkit PJB

Graph of PJB's TWh Power Plant Sales



Porsi penjualan listrik PJB seiring berjalannya waktu mengalami perubahan yang cukup signifikan, baik dalam menjalankan perannya sebagai pemilik, pengelola maupun investor pembangkit tenaga listrik. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, penjualan dari pembangkit eksisting semakin menurun dari 23,39 TWh menjadi 22,22 TWh. Namun demikian Kami terus berupaya mengelola unit eksisting hingga mendapatkan pencapaian terbaiknya, termasuk co-firing PLTU Paiton menuju green power plant.

The portion of PJB's electricity sales has experienced significant changes over time, both as owner, manager, and investor of power plants. In the last 5 years, the sale from existing power plants has declined from 23.39 TWh to 22.22 TWh. However, we continue to manage our existing units to achieve the best performance, including co-firing the Paiton CFPP towards a green power plant.

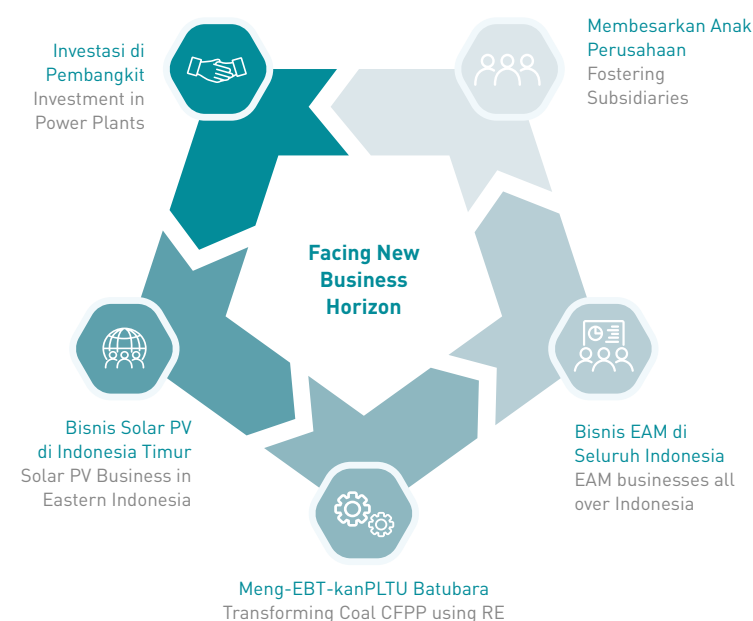


Untuk itulah PJB mengubah strategi bisnisnya dengan meningkatkan penjualan dari pembangkit, dimana PJB sebagai pengelola dan investor. Hasilnya positif, dimana penjualan listrik dari pembangkit yang dikelola maupun dari IPP PJB terus meningkat, bahkan sejak tahun 2017 penjualan dari pembangkit yang dikelola PJB lebih besar dari pembangkit yang dimiliki.

Therefore PJB changed its business strategy by increasing sales from power plants, in which PJB acts as manager and investor. The results were positive which the electricity sales from managed power plants and PJB's IPP power plants continued to increase; moreover, since 2017, the sales from the PJB-managed power plants were greater than the owned power plants.

5 (Lima) Fokus Utama dalam Facing New Business Horizon

5 (Five) Main Focuses in Facing New Business Horizon



PJB meyakini bahwa perusahaan hanya dapat tumbuh berkelanjutan dengan mengimplementasikan siklus 3 (tiga) horizon pertumbuhan, mencakup tahapan mempertahankan dan memperluas bisnis inti, mengembangkan bisnis baru, serta membuat opsi dengan pengembangan ide dan gagasan baru. Untuk menghadapi hal tersebut PJB merumuskan 5 (lima) fokus dan strategi utama yang dijalankan dengan tagline Execution without Excuse.

PJB believes that the Company can grow sustainably as supported by the implementation of the cycle of 3 (three) growth horizons, including the stages of maintaining and expanding core businesses, developing new businesses, and making options with the development of new ideas and strategies. Therefore, PJB has formulated 5 (five) main focus and strategies that were applied with the tagline of Execution without Excuse.

Membangun Bisnis Baru, Menjaga Kelangsungan Korporasi Creating New Businesses, Maintaining Corporate Sustainability

PJB berupaya membangun bisnis baru dan mengembangkan ide serta gagasan hingga menjadi karya nyata dalam mendukung pertumbuhan kinerja Perusahaan dan juga kelangsungan usaha dalam jangka panjang. Sinergi dan kolaborasi dengan perusahaan global kelas dunia menjadi kebutuhan agar dapat mendorong portofolio bisnis PJB semakin luas.

PJB strives to create new businesses and develop ideas and strategies until it becomes real work to support the growth of the Company's performance and business continuity in the long run. Synergy and collaboration with world-class global companies are required to widen PJB business portfolio.

PLTU Jawa 7 menjadi PLTU Batubara Terbesar dan Pertama di Indonesia dengan Teknologi USC Boiler
Java 7 CFPP is the Largest and First Coal CFPP in Indonesia supported with USC Boiler Technology



Direktur Utama PJB, Iwan Agung Firstantara meninjau terminal batubara PLTU Jawa 7 mendampingi Direktur Bisnis Regional Jawa Barat PLN.
President Director of PJB, Iwan Agung Firstantara reviewed the Java 7 CFPP coal terminal accompanied by the Business Director of West Java Regional PLN.

Proyek Project	PLTU Jawa 7 Coal Fired Steam Power Plant Jawa 7 Coal Fired Steam Power Plant
Kapasitas Capacity	2 X 1000 MW (based on PPA) 2 X 1000 MW (based on PPA)
Peraturan Decree	Permen ESDM 0074.K/21/MEM/2015 Permen ESDM 0074.K/21/MEM/2015
Lokasi Location	Desa Terate, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang Prov. Banten Desa Terate, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang Prov. Banten
Luas Lahan Area	170 Ha, milik PT PLN (Persero) dengan status HGB 170 Ha, owned by PT PLN (Persero) with HGB status
Teknologi Technology Support	Ultra Super Critical Ultra Super Critical
Bahan Bakar Fuel	Coal (4000-4600 kkal/kg AR) Coal (4000-4600 kkal/kg AR)
Skema PPA PPA Scheme	25 tahun - BOOT 25 years - BOOT
IPP	PT Shenhua Guohua Pembangkita Jawa Bali (SGPJB)
Target COD sesuai PPA COD Target Based on PPA	Unit #1: & April 2020 dan Unit #2 7 Okt 2020 Unit #1: & April 2020 dan Unit #2 7 Okt 2020
Nilai Proyek Project Value	USD 1.879.138.531 USD 1.879.138.531
Kreditur Creditor	China Development Bank

PLTU Jawa 7 merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan 35.000 MW, yang rencana pembangunannya tercantum dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2015-2024 guna mengantisipasi pertumbuhan permintaan listrik di Jawa yang masih tinggi yaitu sekitar 6,7 persen per tahun. PLTU Jawa 7 dibangun dengan skema Independent Power Producer (IPP) oleh konsorsium China Shenhua Energy Company Limited (70%) dan PT PJB Investasi (30%), Anak Perusahaan PJB dengan membentuk Special Purpose Company dengan nama PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali (SGPJB). PPA PLTU Jawa 7 ditandatangani 7 April 2016 dengan harga jual ke PLN sebesar 4,21 sen Dollar AS per kWh. Teknologi yang digunakan memiliki efisiensi yang tinggi dan lebih ramah lingkungan, yaitu Ultra Super Critical (USC) Boiler, dan dilengkapi Sea Water Fuel Gas Desulfurization (SWFGD) yang berfungsi menangkap gas sulfur sehingga tidak mencemari lingkungan.

Java 7 CFPP is part of the electricity infrastructure development of 35,000 MW, whose construction plans are outlined in the 2015-2024 PLN Electricity Supply Business Plan to anticipate the growth of electricity demand in Java, which is still around 6.7 percent per year. The Java 7 CFPP was built under the scheme of Independent Power Producer (IPP) by the consortium of China Shenhua Energy Company Limited (70%) and PT PJB Investasi (30%), a PJB subsidiary by forming a Special Purpose Company under the name PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali (SGPJB). Java 7 CFPP's PPA was signed on April 7, 2016, with a selling price to PLN of 4.21 USD per kWh. The technology used is highly efficient and more environmentally friendly, namely Ultra Super Critical (USC) Boilers, and equipped with Sea Water Fuel Gas Desulfurization (SWFGD) which functions to obtain sulfur gas that can prevent environmental pollution.



PLTS Terapung Cirata
Cirata Floating SPP

PJB terus melakukan pengembangan bisnis untuk menjaga sustainability korporasi. Sejumlah proyek telah kami selesaikan selama 2019 dengan hasil yang menggembirakan. Tiga proyek telah COD meliputi PLTU Cilacap Ekspansi Unit 4, PLTU Jawa 7 Unit 1, dan PLTU Mamaju. Dua proyek telah memasuki tahap PPA yakni PLTU Sumbagsel 1 dan PLTS Terapung Cirata. Selama tahun 2019 kita mendapatkan penugasan pengembangan bisnis jasa O&M dengan total kapasitas 1.580 MW dan EAM untuk pembangkit serta distribusi. Saat ini kita masih menuntaskan konstruksi Muara Tawar add-on, PLTU Jawa 7 unit 2 dan PLTA Batang Toru.

PJB continues to develop its business to maintain corporate sustainability. PJB has completed various projects in 2019 with encouraging results. Three projects that have commercially operated include Cilacap Expansion CFPP Unit 4, Java 7 CFPP Unit 1, and Mamaju CFPP. Two projects have entered the PPA phase: Sumbagsel 1 CFPP and Cirata Floating SPP. In 2019, PJB was tasked to develop the O&M service business with a total capacity of 1,580 MW and EAM for power generation and distribution. Currently, PJB is still completing the construction of Muara Tawar Add-on, Java 7 CFPP unit 2, and Batang Toru HPP.



Kontribusi Kami Untuk Pembangunan Berkelanjutan Our Contribution to Sustainable Development

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



PJB terus berupaya meningkatkan penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT), guna mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Untuk itulah, Kami berkomitmen mengurangi penggunaan sumber energi fosil menjadi Energi Baru Terbarukan (EBT) melalui berbagai inovasi di bidang pembangkitan dengan *co-firing* PLTU. PJB continues to increase the use of new and renewable energy (RE), to support the achievement of Sustainable Development Goals. Therefore, PJB is committed to reducing the consumption of fossil energy sources by using renewable energy (RE) through various innovations in the field of power generation with CFPP co-firing.



Co-firing PLTU Paiton Upaya Menuju Green Power Plant
Paiton CFPP Co-firing Efforts to Become a Green Power Plant



PROPER Emas
Gold PROPER



Bawean Eco-Edu Tourism merupakan program CSR PJB UP Gresik berupa program konservasi Kawasan Wisata Pantai Pasir Putih di Desa Sukaoneng Kecamatan Tambak. Program ini dikelola oleh Kelompok Masyarakat Pengawas Hijau Daun di Desa Daun, Pulau Bawean bukti adanya sinergisitas antara masyarakat, pemerintah dan PJB selaku korporasi untuk bersama-sama melakukan konservasi pesisir, mengedukasi masyarakat untuk menjaga alam, juga membuka kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui program pemberdayaan dalam bidang wisata berbasis lingkungan dan masyarakat. Pantai yang dulunya rusak parah akibat aktivitas penambangan pasir dan menebangan pohon mangrove secara ilegal, sekarang berubah menjadi ekowisata mangrove yang eksotis. Program tersebut dinobatkan sebagai juara dalam **Asia Responsible Enterprise Awards 2019** untuk kategori **Social Empowerment**.

Bawean Eco-Edu Tourism is a CSR program of PJB's Gresik GU in the form of a conservation program of Pasir Putih Beach Tourism Area in Sukaoneng Village, Tambak District. This program is managed by Hijau Daun Oversight Group in Daun Village, Bawean Island to show the synergy between the community, the government and PJB as a corporation that jointly conducts coastal conservation, educate the community to preserve the environment, as well as open opportunities to improve welfare through empowerment programs in the aspect of the environment and community-based tourism. The beach which was heavily damaged due to sand mining activities and illegal mangrove cutting has now turned into exotic mangrove ecotourism. The program was named the winner in the **2019 Asia Responsible Enterprise Awards** in the category of **Social Empowerment**.



Kawasan Bawean Eco-Edu Tourism
Bawean Eco-Edu Tourism Area



Sebagai salah satu tempat bekerja dengan tingkat kenyamanan yang tinggi, PJB telah berhasil menciptakan iklim kerja yang seimbang antara pekerjaan, pengembangan dan kehidupan pribadi. Level keterikatan dan kepuasan karyawan telah meningkat hingga PJB dinobatkan sebagai *Best Companies to Work in Asia 2019*. As a comfortable place to work, PJB has succeeded in creating a work circumstance that focuses on the work-life balance. The level of employee engagement and satisfaction keeps increasing which leads PJB to be named the Best Companies to Work in Asia 2019.



Penghargaan Best Companies to Work in Asia 2019
Award of Best Companies to Work in Asia 2019



Co-Working Space Kantor PJB UJJPJ-2
Co-Working Space at PJB UJJPJ-2 Office



PLTU Tenayan 2 X 110 MW
Tenayan CFPP 2 X 110 MW

Kampung Okura terletak bersebelahan dengan PLTU Tenayan, dibatasi Sungai Siak, sungai terdalam di Indonesia yang menjadi sumber air utama bagi operasional PLTU Tenayan. Kampung Okura memiliki beberapa potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program CSR PJB terutama pemberdayaan masyarakat setempat. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat ini memadukan pemanfaatan lahan untuk peternakan, pertanian, dan perkebunan yang ramah lingkungan, perbaikan infrastruktur serta menjaga ekosistem melalui agrosilvopastura.

PLTU Tenayan dengan kapasitas 2 x 110 MW merupakan penyangga sistem kelistrikan di Sumatera Bagian Tengah, menyuplai 31% dari energi listrik yang dibutuhkan Riau dan menyuplai 4% dari energi listrik yang dibutuhkan pulau Sumatera. PLTU Tenayan beroperasi sejak 22 September 2017, pada tahun 2018 menghasilkan listrik sebesar 461,2 GWh. Keberadaan PLTU Tenayan diharapkan mampu meningkatkan keandalan sistem kelistrikan Sumatera menuju Sumatera terang serta mendukung penyediaan energi listrik yang murah dan efisien. Sebagai komitmen dalam mewujudkan PLTU yang ramah lingkungan, UBJOM Tenayan melaksanakan program Greenesia (Grow up Together for Tenayan Green Power Plant Indonesia). Pemerintah setempat memberikan apresiasi dengan menyebut UBJOM Tenayan sebagai pelopor Industri yang ramah lingkungan. Greenesia diharapkan menjadikan PLTU Tenayan sebagai pembangkit listrik yang hijau dan ramah lingkungan serta menumbuhkan sinergi yang baik. Baik dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat dalam membangun Kawasan Industri Tenayan yang maju dan berkembang.



DPR Melakukan Kunjungan Kerja Untuk Memantau Limbah PLTU Tenayan
Work Visit of People's Representative Council to Monitor Tenayan PLTU Waste

Okura village is located next to the Tenayan CFPP which is divided by the Siak River, the deepest river in Indonesia as the main water source for the operation of the Tenayan CFPP. Okura village has several potentials that can be developed to improve the local welfare through the PJB CSR program especially the empowerment of the local community. The economic empowerment program for this community combines the use of land for livestock, agriculture, and green plantations, infrastructure development, and ecosystem preservation through agrosilvopastura.

Tenayan CFPP with a capacity of 2x110 MW is a buffer of the electricity system in Central Sumatra, supplying 31% of the electricity for Riau and 4% for the entire Sumatra. Tenayan CFPP has operated since September 22, 2017, which since 2018, has generated electricity reaching 461.2 GWh. The existence of Tenayan CFPP is expected to improve the reliability of the Sumatra electricity system towards Sumatra Terang and support the supply of affordable and efficient electricity. As a commitment to realize a green CFPP, Tenayan OMSBU implements the Greenesia Program (Grow up Together for Tenayan Green Power Plant Indonesia). The local government gave appreciation by stating that Tenayan OMSBU as a pioneer of the green industry. Greenesia is expected to make Tenayan CFPP a green and environmentally friendly power plant and create good synergy, both with the local government and the local community to achieve an advanced Tenayan Industrial Estate.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

SUMMARY OF FINANCIAL STATEMENTS

Ikhtisar Kinerja Keuangan

Financial Overview

Posisi Keuangan

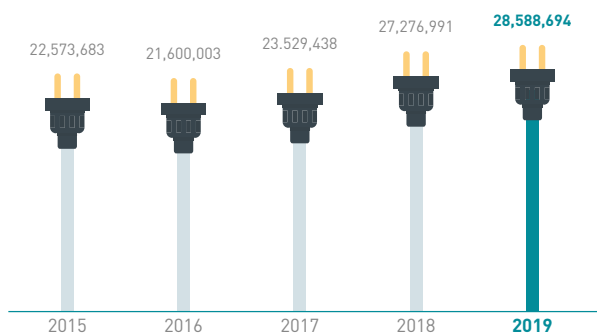
Financial Position

Rp juta Rp million

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Remark
Aset Lancar	22,573,683	21,600,003	23,529,438	27,276,991	28,588,694	Current Assets
Aset Tidak Lancar	172,972,155	170,138,392	169,791,672	147,113,916	144,634,671	Non-Current Assets
Jumlah Aset	195,545,838	191,738,394	193,321,110	174,390,907	173,223,365	Total Assets
Liabilitas Jangka Pendek	7,602,509	3,772,224	4,033,059	4,862,490	5,056,332	Current Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang	1,701,798	2,183,875	3,438,069	2,519,730	4,393,938	Non-Current Liabilities
Jumlah Liabilitas	9,304,307	5,956,100	7,471,128	7,382,220	9,450,270	Total Liabilities
Jumlah Ekuitas	186,241,531	185,782,295	185,849,982	167,008,687	163,773,095	Total Equity
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	195,545,838	191,738,394	193,321,110	174,390,907	173,223,365	Total Liabilities and Equity
Investasi pada Entitas Asosiasi/ Ventura Bersama	2,566,330	3,130,778	5,801,036	7,445,759	7,880,576	Investments in associate/ joint ventures

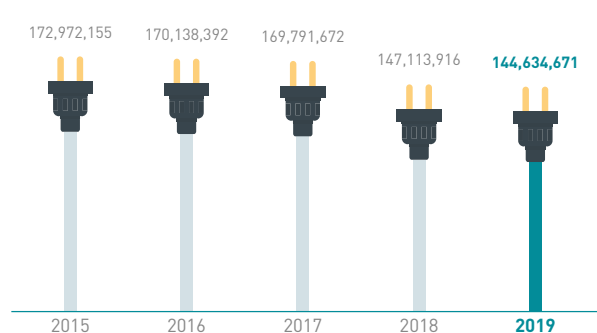
Aset Lancar

Current Assets



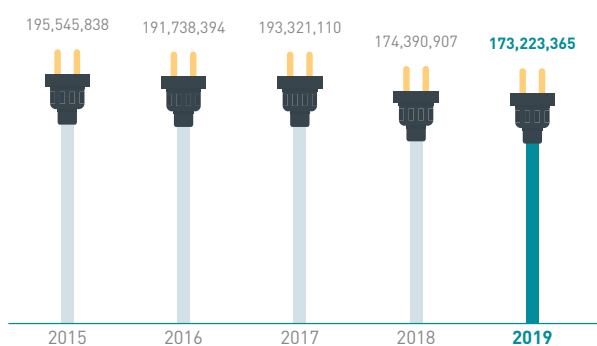
Aset Tidak Lancar

Non-Current Assets



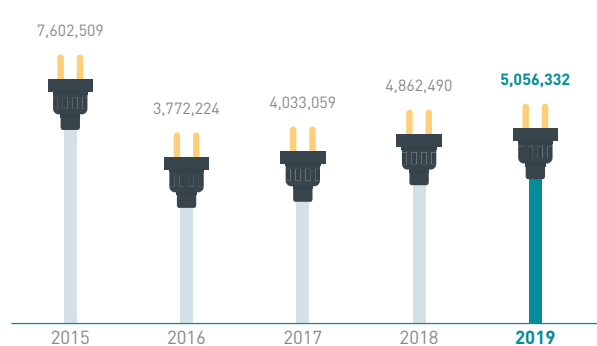
Jumlah Aset

Total Assets

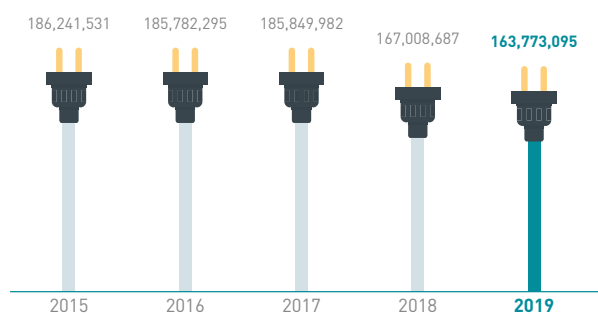


Liabilitas Jangka Pendek

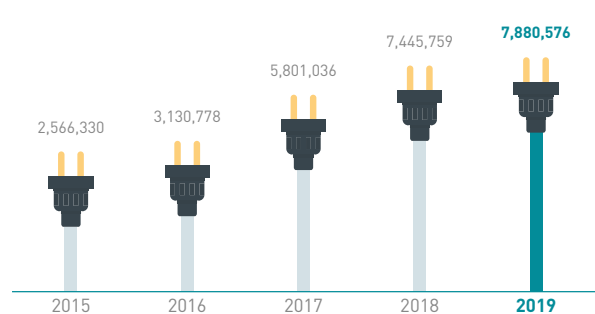
Current Liabilities



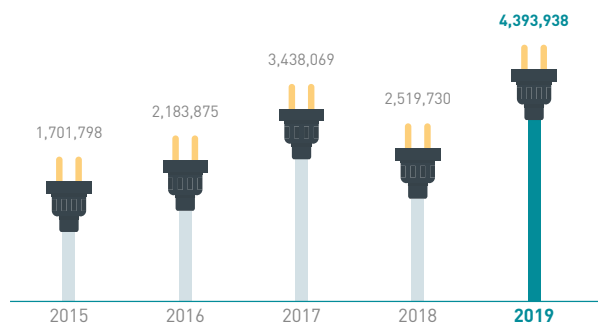
Jumlah Ekuitas Total Equity



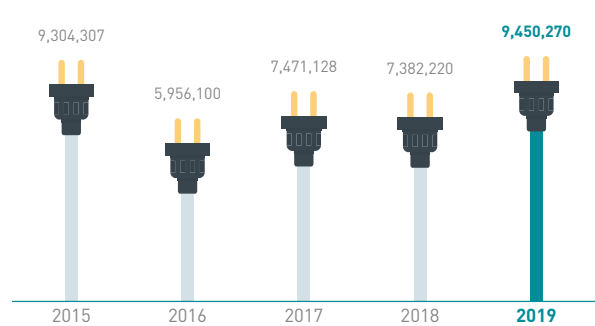
Investasi Pada Entitas Asosiasi/Ventura Bersama Investments in Associate/Joint Ventures



Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities



Jumlah Liabilitas Total Liabilities



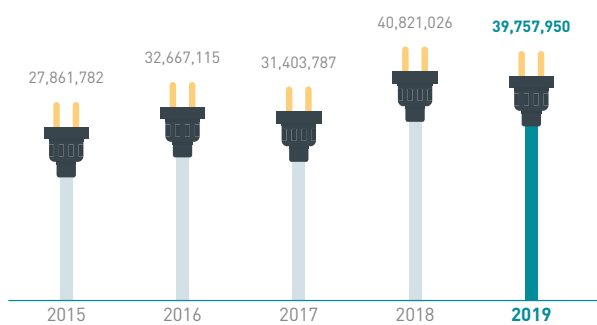
Laba Rugi Komprehensif Comprehensive Income

Rp juta Rp million

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Remark
Pendapatan Usaha	27,861,782	32,667,115	31,403,787	40,821,026	39,757,950	Operating Revenues
Penjualan Tenaga Listrik	25,616,708	28,576,666	26,378,159	34,757,316	33,681,317	Electricity Sales
Jasa Operasi & Pemeliharaan	1,552,887	2,916,793	3,506,459	4,255,967	4,422,238	O&M Service
Konstruksi	404,588	821,496	1,102,092	1,492,640	1,396,106	Construction
Lainnya	287,599	352,16	417,077	315,103	258,289	Others
Beban Usaha	(26,392,684)	(29,207,248)	(27,946,839)	(34,334,181)	(31,062,892)	Operating Expenses
Laba Usaha	1,469,098	3,459,867	3,456,948	6,486,845	8,695,058	Profit
Pos Keuangan dan Lain-lain (Bersih)	781,083	1,200,359	1,184,930	1,173,839	918,280	Net Financial Items and others
Beban Pajak	977,575	(883,782)	(960,206)	(1,743,252)	(2,950,016)	Tax Expenses
Laba Tahun Berjalan	3,227,756	3,776,444	3,681,672	5,917,432	6,663,322	Profit for the Year
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain Tahun Berjalan setelah Pajak	148,950,190	(1,381,518)	73,726	(21,088,224)	(490,848)	Other Comprehensive Income (expenses) for the Year after Taxes
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	148,950,190	(1,381,518)	3,755,398	(15,170,792)	6,172,474	Total Comprehensive Income for the Year
Laba Tahun Berjalan Diatribusikan kepada:					Profit for the Year Attributable to:	
Pemilik Entitas Induk	3,219,630	3,759,932	3,668,635	5,904,512	6,645,392	The Owner of the Parent
Kepentingan Non-Pengendali	8,126	16,512	13,037	12,920	17,930	Non-controlling Interests
Penghasilan Komprehensif Diatribusikan kepada:					Total Comprehensive Income Attributable to:	
Pemilik Entitas Induk	152,169,820	2,378,340	3,742,804	(15,190,703)	6,159,853	The Owner of the Parent
Kepentingan Non-Pengendali	8,126	16,586	12,594	19,911	12,621	Non-controlling Interests
Laba Per Saham Dasar	537	627	611	984	1,108	Basic Earnings per Share

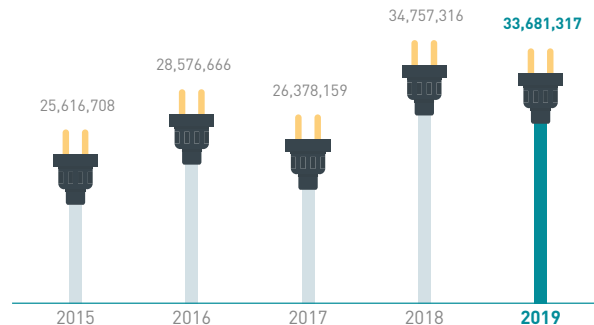
Pendapatan Usaha

Operating Revenue



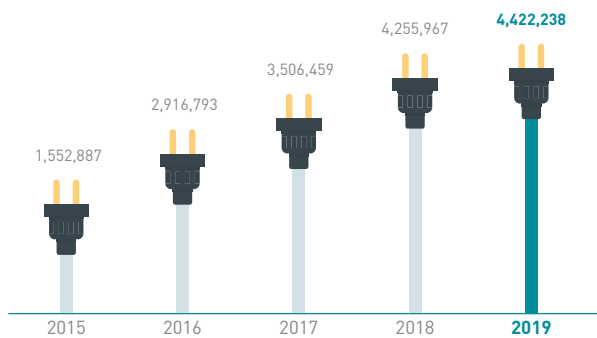
Penjualan Tenaga Listrik

Electricity Sales



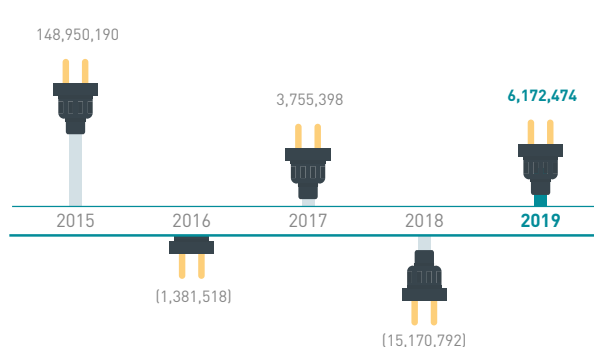
Pendapatan Jasa Operasi & Pemeliharaan

O&M Service Revenue



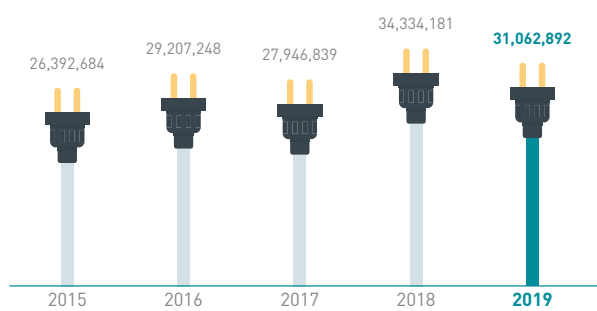
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Total Comprehensive Income for the Year



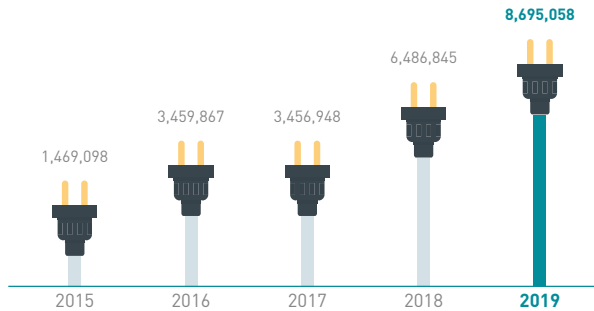
Beban Usaha

Operating Expense



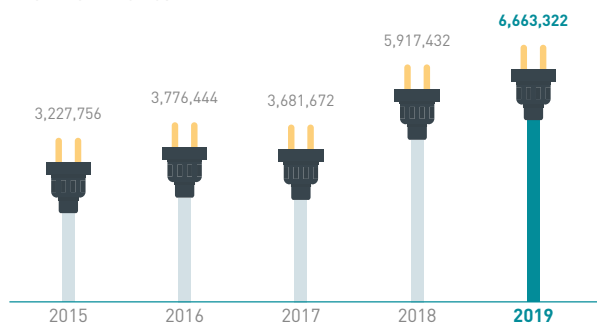
Laba Usaha

Profit



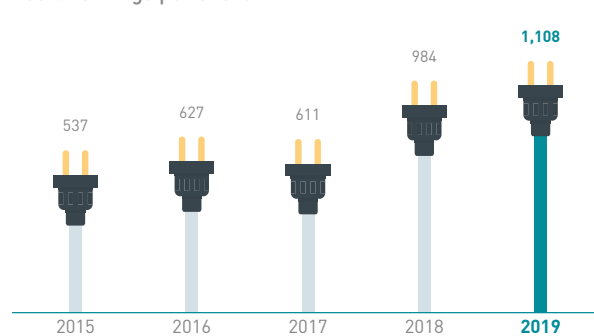
Laba Tahun Berjalan

Profit for The Year



Laba per Saham Dasar

Basic Earnings per Share



Informasi Arus Kas

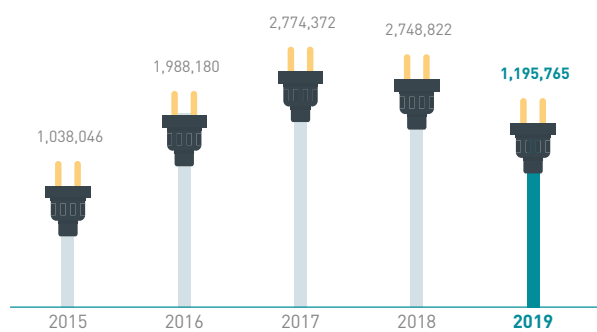
Cash Flow Statements

Rp juta Rp million

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Remark
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	1,038,046	1,988,180	2,774,372	2,748,822	1,195,765	Cash Flow from Operating Activities
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(2,025,637)	(2,025,637)	(2,038,741)	(4,153,893)	(2,523,516)	Cash Flow from Investing Activities
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	-	(702)	(1,279)	209,562	1,480,894	Cash Flow from Financing Activities
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	766,075	(38,159)	740,352	(1,195,509)	153,143	Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalent
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	1,397,904	2,177,209	2,135,475	2,879,830	1,688,004	Cash and Cash Equivalent at the beginning of the Year
Pengaruh Perubahan Kurs Mata Uang Asing	-	(3,575)	4,003	3,683	(2,289)	Effect of the Change in Foreign Currency
Jumlah Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	2,177,209	2,135,475	2,879,830	1,688,004	1,838,858	Cash and Cash Equivalent at the End of the Year

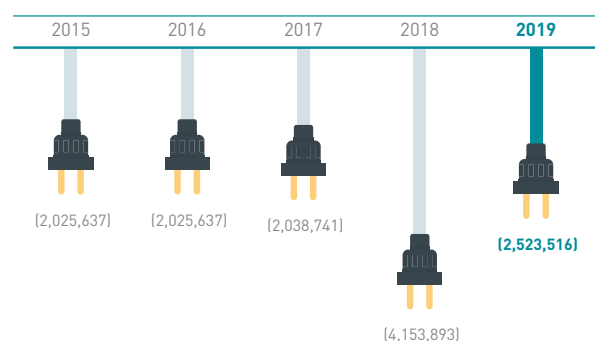
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi

Cash Flow from Operating Activities



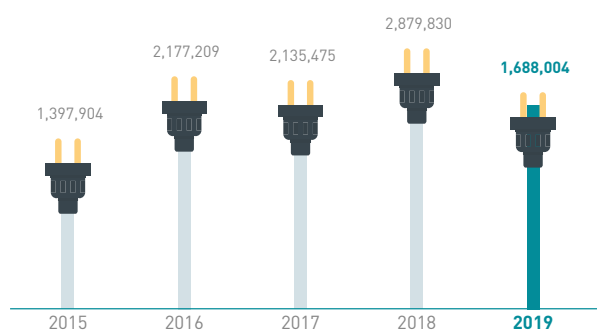
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi

Cash Flow from Investing Activities



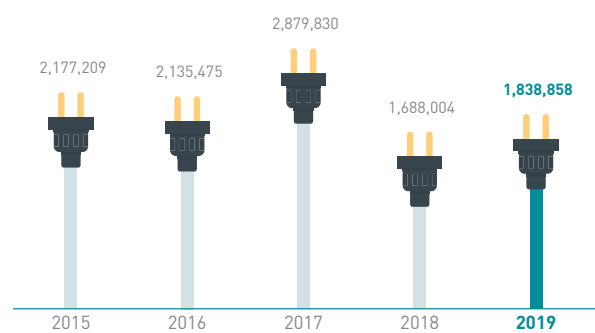
Kas dan Setara Kas Awal Tahun

Cash and Cash Equivalent at the beginning of the Year



Kas dan Setara Kas Akhir Tahun

Cash and Cash Equivalent at the End of the Year



Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan Audit
Audited Financial Statements

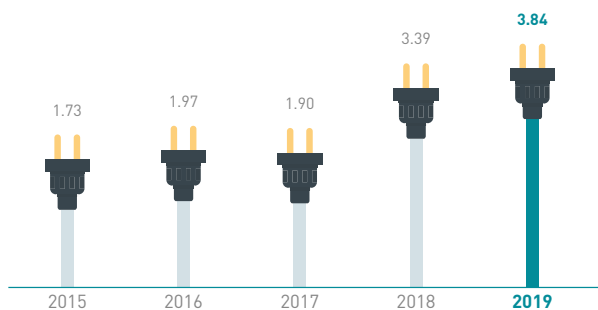


Referensi Kriteria ARA
ARA Criteria Reference

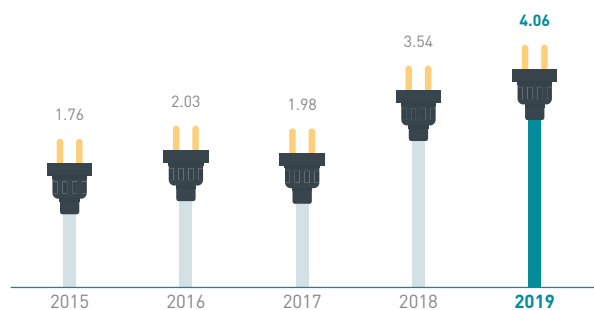
Rasio Keuangan Financial Ratio

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Remark
Rasio Profitabilitas						Profitability Ratios
Rasio Laba (Rugi) terhadap Aset (%)	1.73	1.97	1.90	3.39	3.84	Return on Assets (%)
Rasio Laba (Rugi) terhadap Ekuitas (%)	1.76	2.03	1.98	3.54	4.06	Return on Equity (%)
Rasio Laba (Rugi) terhadap Investasi (%)	2.07	4.58	4.40	6.70	7.83	Return on Investment (%)
Rasio Laba (Rugi) terhadap Pendapatan (%)	11.58	11.56	11.72	14.50	16.76	Net Profit Margin (%)
Rasio Pertumbuhan Penjualan (%)	(3.76)	11.55	(7.69)	31.77	(9.48)	Sales Growth Ratio (%)
Rasio Likuiditas						Liquidity Ratio
Rasio Lancar (%)	301.60	572.61	583.41	560.97	565.40	Current Ratio (%)
Rasio Kas (%)	30.66	56.61	71.41	34.71	36.37	Cash Ratio (%)
Rasio Cepat (%)	276.84	540.98	549.67	518.21	529.15	Quick Ratio (%)
Rasio Solvabilitas						Solvency Ratio
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (%)	5.00	3.21	4.02	4.42	5.77	Liabilities to Equity Ratio (%)
Rasio Liabilitas terhadap Total Aset (%)	4.76	3.11	3.86	4.23	5.46	Liabilities to Total Assets Ratio (%)
Rasio Aktivitas						Activity Ratio
Collection Period (hari)	258	183	197	180	203	Collection Period (days)
Perputaran Total Aset (%)	0.20	0.17	0.16	0.23	0.23	Total Assets Turnover (%)

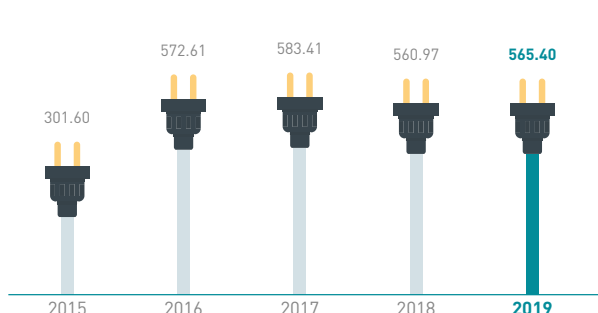
Rasio Laba (Rugi) Terhadap Aset (%) Return on Assets (%)



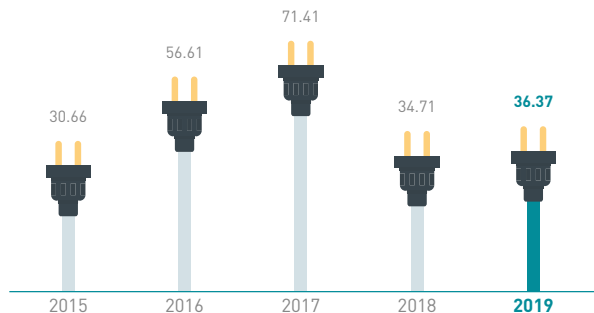
Rasio Laba (Rugi) Terhadap Ekuitas (%) Return on Equity (%)



Rasio Lancar (%) Current Ratio (%)

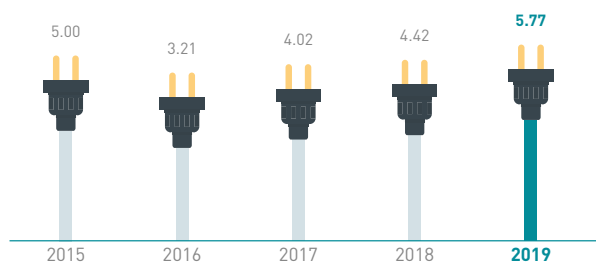


Rasio Kas (%) Cash Ratio (%)



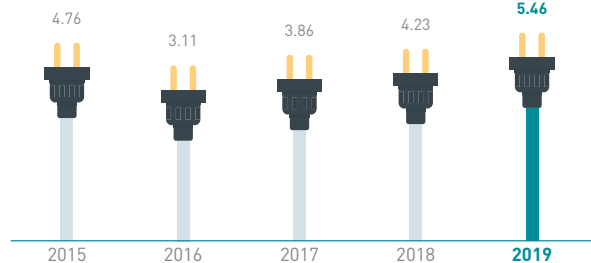
Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas (%)

Liabilities to Equity Ratio (%)



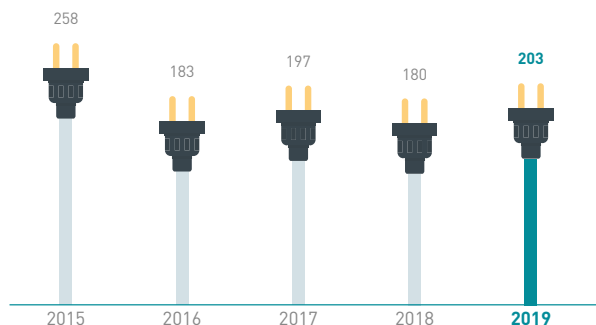
Rasio Liabilitas Terhadap Total Aset (%)

Liabilities to Total Assets Ratio (%)



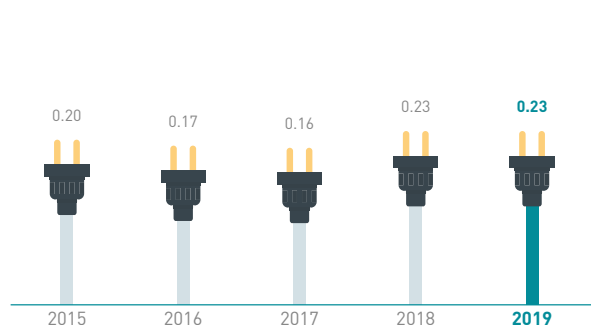
Collection Period (Hari)

Collection Period (Day)



Perputaran Total Aset (%)

Total Assets Turnover (%)

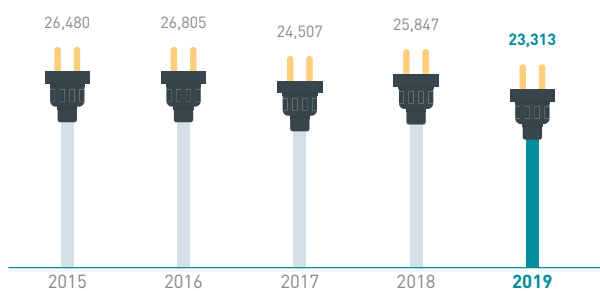


Ikhtisar Kinerja Operasional

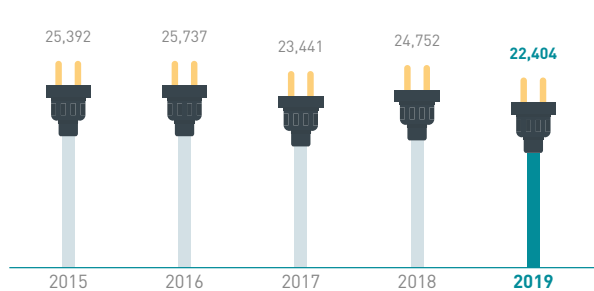
Performance Overview

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Remark
Produksi Energi Listrik (GWh)	26,480	26,805	24,507	25,847	23,313	Electricity Production (GWh)
Penjualan Energi Listrik (GWh)	25,392	25,737	23,441	24,752	22,404	Electricity Sales (GWh)
EAF Eksisting (%)	93.42	93.46	94.68	94.09	95.06	EAF of Existing Units (%)
EAF FTP-1 atau UBJOM Wilayah Jawa (%)	79.38	72.14	76.33	77.20	91.06	EAF of FTP-1 Units (%)
EFOR Eksisting (%)	1.21	1.90	1.10	1.01	0.80	EFOR of Existing Units (%)
EFOR FTP-1 atau UBJOM Wilayah Jawa (%)	12.95	20.33	8.58	10.34	1.94	EFOR of FTP-1 Units (%)
Tara Kalor Neto Eksisting (kcal/KWh)	2,445.27	2,487.14	2,409.06	2,464.36	2,490.62	Net Plant Heat Rate of Existing Units (kcal/KWh)
Tara Kalor Neto FTP-1 atau UBJOM Wilayah Jawa (kcal/KWh)	2,741.59	2,795.95	2,692.18	2,676.67	2,530.20	Net Plant Heat Rate of FTP-1 Units (kcal/KWh)
Jumlah Daya Mampu Neto (MW)	6,375	10,443	10,515	10,815	10,597	Net Total Capacity (MW)
Jumlah Karyawan (orang)	2,808	2,952	3,172	3,085	3,186	Total Employees
Skor Assessment GCG (skor)	92.45	93.01	93.64	94.17	94.45	GCG Assessment Score
Tingkat Kesehatan	97.72	90.09	95.79	92.72	93.17	Soundness Level
	AAA	AA	AAA	AA	AA	

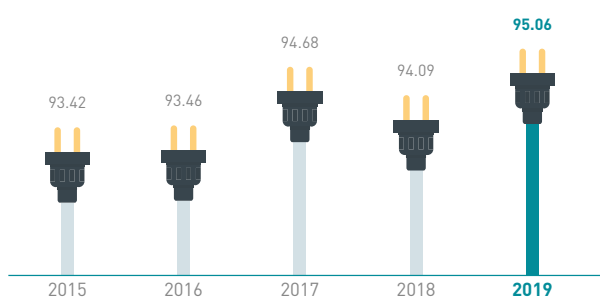
Produksi Energi Listrik (GWh)
Electricity Production (GWh)



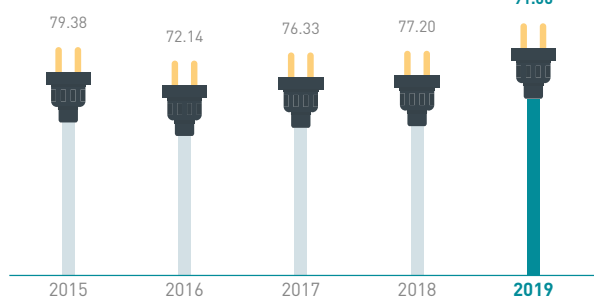
Penjualan Energi Listrik (GWh)
Electricity Sales (GWh)



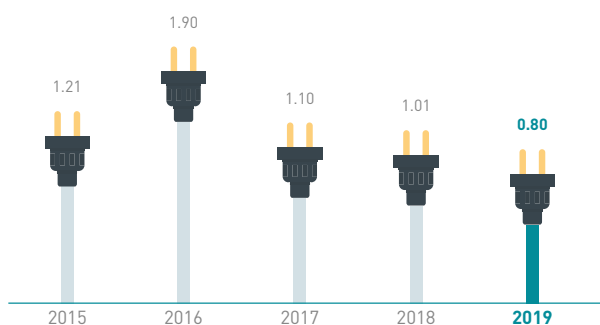
EAF Eksisting (%)
EAF of Existing Units (%)



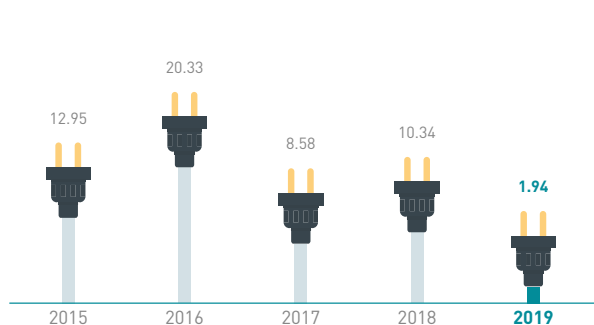
EAF FTP-1 atau UBJOM Wilayah Jawa (%)
EAF of FTP-1 Units (%)



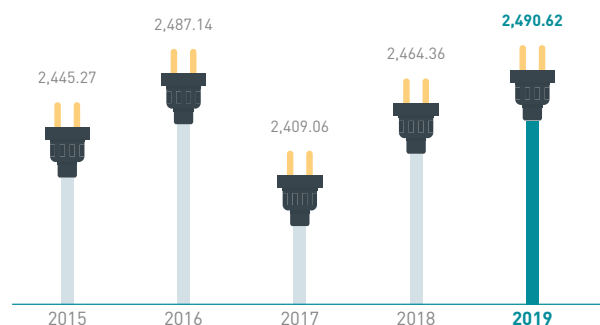
EFOR Eksisting (%)
EFOR of Existing Units (%)



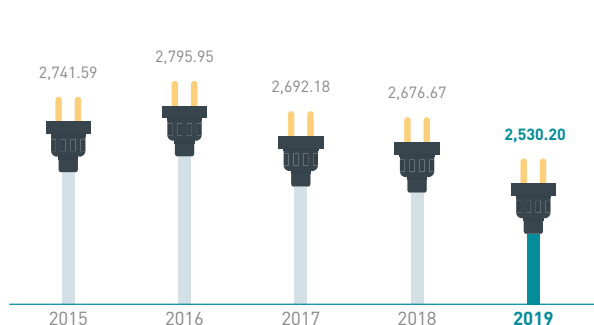
EFOR FTP-1 atau UBJOM Wilayah Jawa (%)
EFOR of FTP-1 Units (%)



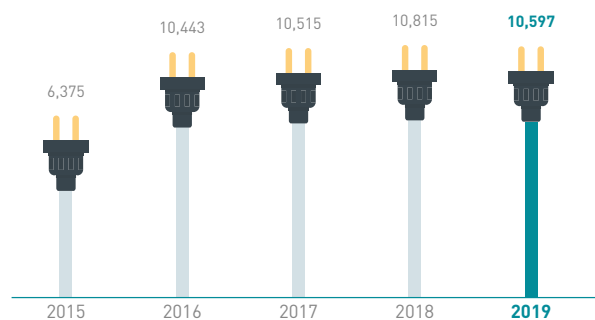
Tara Kalor Neto Eksisting(kcal/KWh)
Net Plant Heat Rate of Existing Units (kcal/KWh)



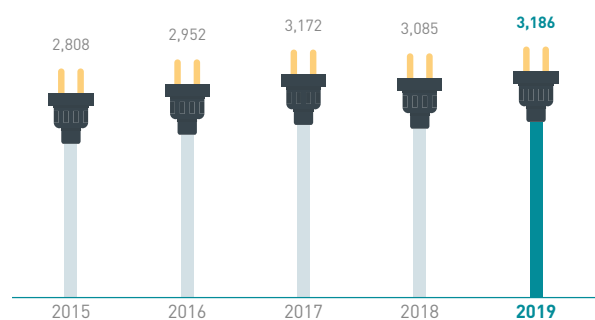
Tara Kalor Neto FTP-1 atau UBJOM Wilatah Jawa (kcal/KWh)
Net Plant Heat Rate of FTP-1 Units (kcal/KWh)



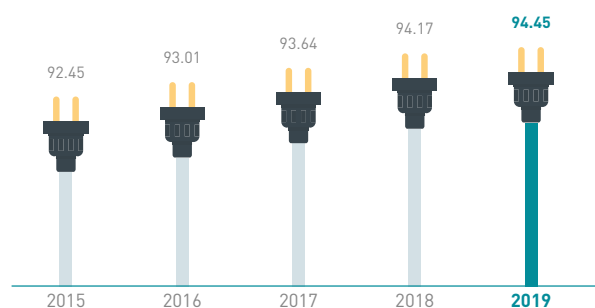
Jumlah Daya Mampu Neto (MW) Net Total Capacity (MW)



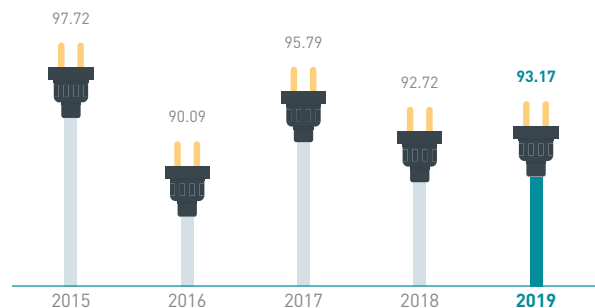
Total Karyawan (Orang) Total Employees (People)



Skor Assessment GCG (Skor) GCG Assessment Score



Tingkat Kesehatan Soundness Level



Ikhtisar Saham Investment Overview

Sampai dengan akhir tahun 2019, PJB tidak melakukan perdagangan saham sehingga tidak ada informasi harga saham tertinggi, harga saham terendah dan harga saham penutupan serta volume saham yang diperdagangkan.

As of the end of 2019, PJB does not conduct stock trading; therefore, there is no information on the highest share price, lowest stock price, and closing stock price as well as the volume of shares.

Ikhtisar Obligasi Investment Overview

Sampai dengan akhir tahun 2019, PJB tidak menerbitkan obligasi, sukuk dan obligasi konversi sehingga tidak ada informasi terkait dengan jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar, tingkat bunga/imbalan, tanggal jatuh tempo dan peringkat obligasi/sukuk.

As of the end of 2019, PJB does not issue bonds, sukuk, and convertible bonds; therefore, there is no information related to the number of bonds/sukuk/convertible bonds issued, interest/port rates, due dates, and bond/sukuk ratings.

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI 2019

AWARDS AND CERTIFICATION IN 2019



Pendahuluan
Introduction



Laporan Manajemen
Management Report



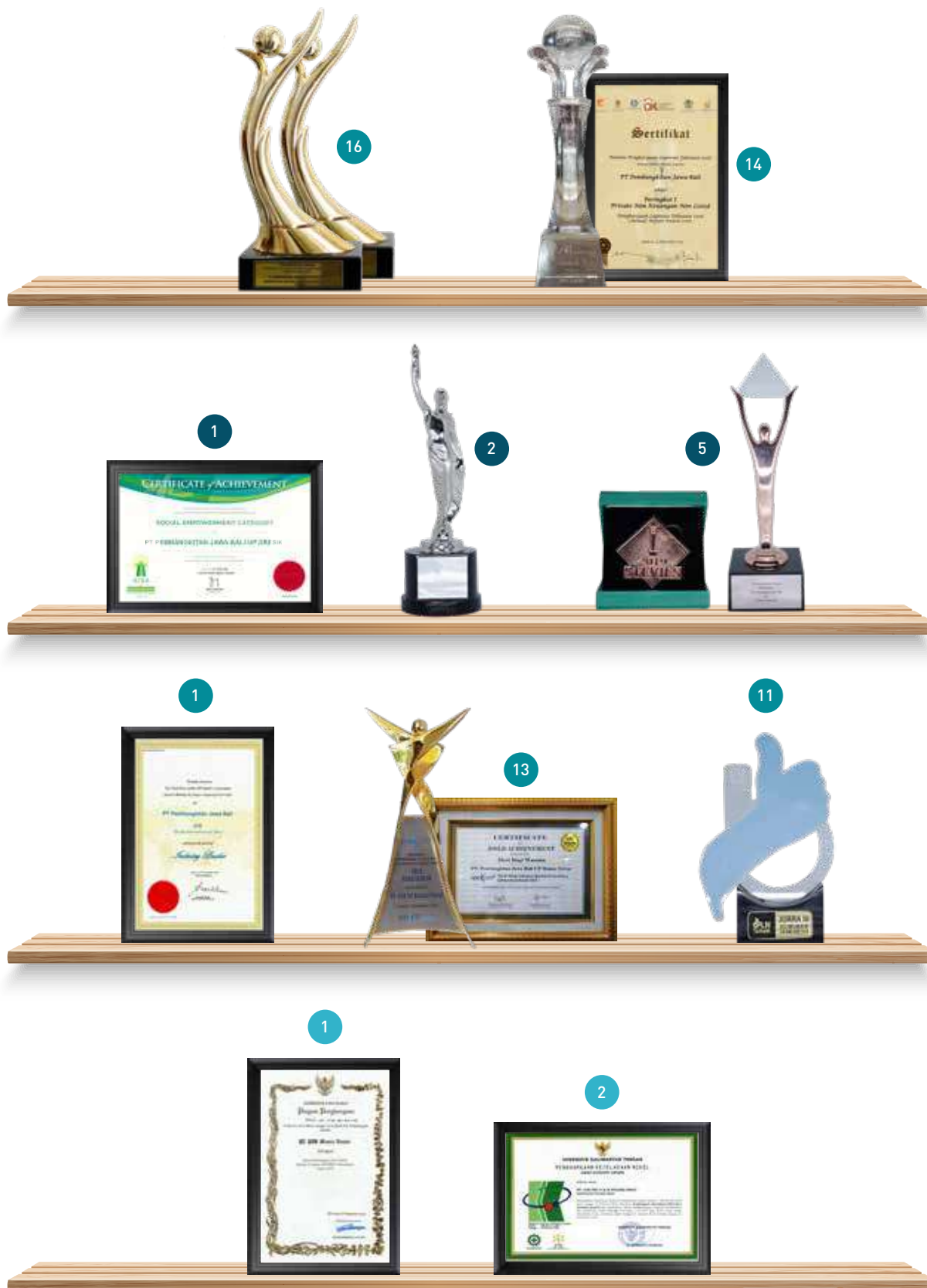
Profil Perusahaan
Company Profile



Tinjauan Pendukung Bisnis
Business Support Review



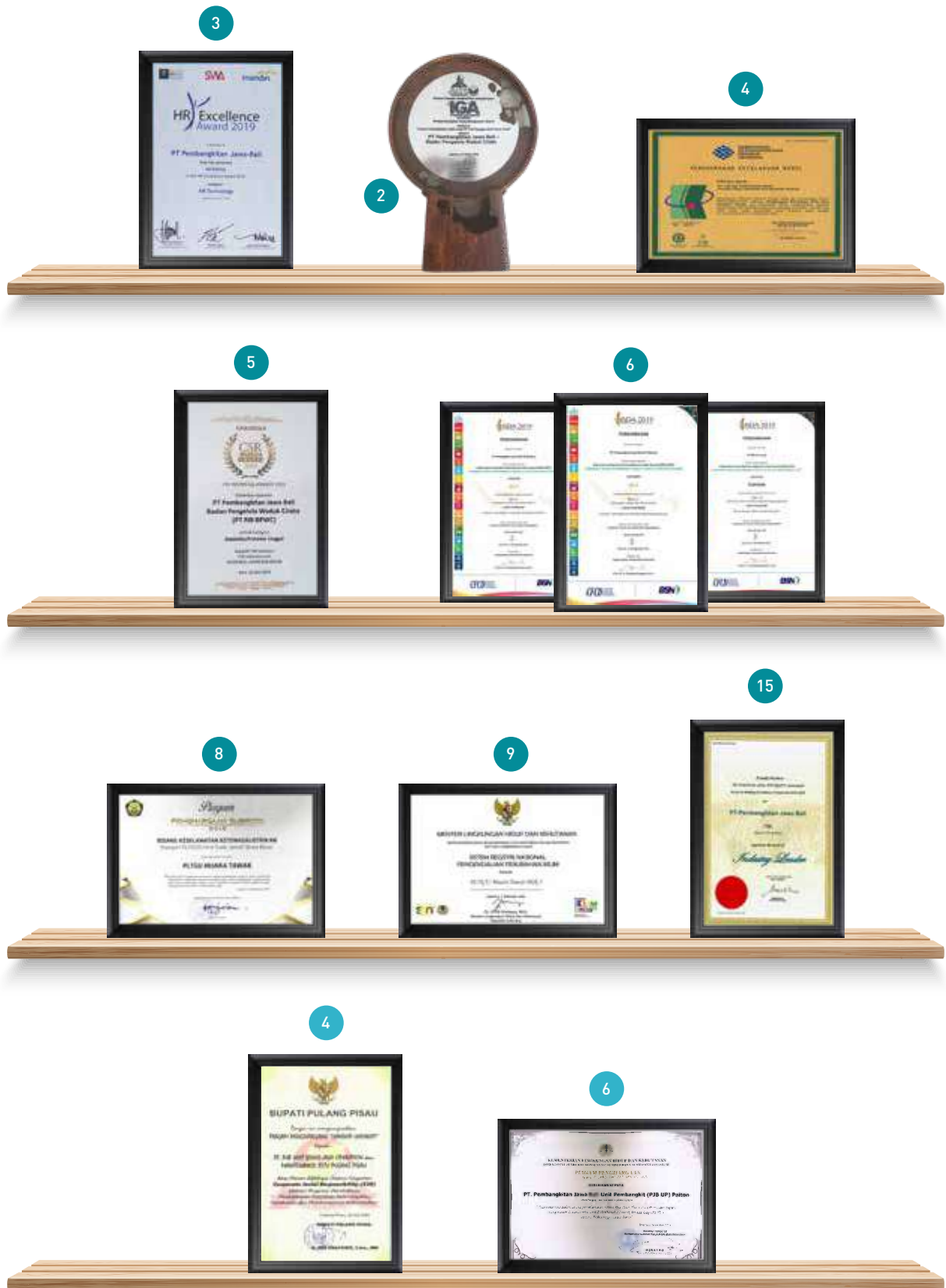
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis



Tingkat Internasional
International Awards

Tingkat Nasional
National Awards

Tingkat Regional
Regional Awards



Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan Audit
Audited Financial Statements



Referensi Kriteria AR
ARA Criteria Reference

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI 2019

AWARDS AND CERTIFICATION IN 2019

Penghargaan 2019

Awards 2019

No	Jenis Penghargaan Awards	Tanggal Perolehan Date	Lembaga/Badan Pemberi Penghargaan Award Organizer	Foto Photo
Tingkat Internasional Internasional Awards				
1.	UP Gresik menjadi juara untuk kategori <i>Social Empowerment</i> selama 3 tahun berturut-turut dalam Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2019 Gresik GU won the Asia Responsible Enterprise Award (AREA) 2019 in the Social Empowerment category for 3 years in a row	24 Mei 2019 May 24, 2019	Enterprise Asia	
2.	Meraih predikat sebagai " <i>Best Companies to Work For in Asia</i> " pada HR Asia Awards 2019 Awarded as "Best Companies to Work For in Asia" on HR Asia Awards 2019	14 Juni 2019 June 14, 2019	Business Media International Sdn Bhd.	
3.	Meraih gelar ' <i>Best Paper</i> ' dalam ajang <i>The 4th International Tropical Renewable Energy Conference (i-TREC 2019)</i> Received the title of 'Best Paper' in The 4th International Tropical Renewable Energy Conference (i-TREC 2019)	14-16 Agustus 2018 14-16 Agustus 2018	The Faculty of Engineering Universitas Indonesia and The Faculty of Engineering Chulalongkorn University	
4.	Meraih 2 (dua) penghargaan Asian Power Awards 2019. PJB mendapatkan penghargaan pada kategori <i>Power Utility of the Year</i> dan <i>Gas Power Project of the Year</i> Received 2 (two) 2019 Asian Power Awards. PJB won an award in the category of Power Utility of the Year and Gas Power Project of the Year	4 September 2019 September 4, 2019	Asian Power Magazine	
5.	Mendapatkan penghargaan <i>Bronze Stevie International Business Award 2019</i> kategori <i>IT Team of The Year</i> Received the Bronze Stevie International Business Award 2019 IT Team of the Year category	19 Oktober 2019 October 19, 2019	The Stevie Organization	
Tingkat Nasional National Awards				
1.	Hasil <i>Assessment Baldrige Excellence Criteria (BEC)</i> tahun 2018 dengan skor 679 yang menempatkan PJB dalam <i>band Industry Leader</i> . The 2018 Baldrige Excellence Criteria (BEC) Assessment with a score of 679 placed PJB in the Industry Leader band.	15 Januari 2019 January 15, 2019	IQAF (Indonesian Quality Award Foundation)	
2.	PJB BPWC meraih penghargaan <i>Indonesia Green Award (IGA)</i> tahun 2019 pada kategori Pengembangan Keanekaragaman Hayati PJB CRMU won the Indonesia Green Award (IGA) of 2019 in the category of Biodiversity Development	27 Maret 2019 March 27, 2019	The La Tofi School of CSR	
3.	Penghargaan pada tiga kategori <i>HR Excellence Awards</i> dengan <i>rating AA</i> bagi PJB dalam kategori: <i>Learning & Development Strategy</i> , <i>HR Transformation Strategy</i> , dan <i>HR Technology Strategy</i> . Awards in three categories of HR Excellence Awards with AA rating for PJB in the categories: Learning & Development Strategy, HR Transformation Strategy, and HR Technology Strategy.	10 April 2019 April 10, 2019	Majalah SWA bekerja sama dengan LMFEUI Majalah SWA bekerja sama dengan LMFEUI	

No	Jenis Penghargaan Awards	Tanggal Perolehan Date	Lembaga/Badan Pemberi Penghargaan Award Organizer	Foto Photo
4.	Penghargaan SMK3 untuk UP Paiton, UBJOM Indramayu, UBJOM Arun, UBJOM Tenayan, UBJOM Bangka, UBJOM Belitung Penghargaan <i>Zero Accident</i> untuk UP Gresik, UP Paiton, UP Muara Karang, UP Muara Tawar, UP Cirata, UP Brantas, PJB Kantor Pusat, UPHT, UPHB, BPWC, UBJOM Indramayu, UBJOM Paiton, UBJOM Pacitan, UBJOM Tanjung Awar-awar, UBJOM Kaltim Teluk. OHSMS Award for Paiton GU, Indramayu OMSBU, Arun OMSBU, Tenayan OMSBU, Bangka OMSBU, Belitung OMSBU; Zero-Accident Award for Gresik GU, Paiton GU, Muara Karang GU, Muara Tawar GU, Cirata GU, Brantas GU, PJB Head Office, UPHT, UPHB, CRMU, Indramayu OMSBU, Paiton OMSBU, Pacitan OMSBU, Tanjung Awar-awar OMSBU, Kaltim Teluk OMSBU.	22 April 2019 April 22, 2019	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ministry of Manpower	
5.	BPWC meraih penghargaan tanggung jawab sosial perusahaan atau <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dalam ajang CSR Indonesia Award 2019 pada kategori Didaktika Pratama Unggul CRMU won an award on Corporate Social Responsibility (CSR) in the CSR Indonesia Award 2019 in the category of Superior Primary Dictation	30-31 Juli 2019 July 30-31, 2019	Majalah CSR Indonesia & Media Online Csr-Indonesia.com serta Meprindo Communications Majalah CSR Indonesia & Media Online Csr-Indonesia.com serta Meprindo Communications	
6.	Menerima 11 penghargaan pada <i>Indonesia Sustainable Development Goals Awards</i> (ISDA) 2019 berupa 2 buah <i>Platinum Award</i> , 5 <i>Gold Award</i> , 3 <i>Silver Award</i> , dan 1 gelar terbaik kategori Perorangan tingkat lapangan Received 11 awards at Indonesia Sustainable Development 2019 Goals Awards (ISDA) in the form of 2 Platinum Awards, 5 Gold Awards, 3 silver awards, and 1 best degree in the Individual level category	16 September 2019 September 16, 2019	Business News Indonesia bekerjasama dengan KNKG dan CSR Society Indonesia Business News Indonesia bekerjasama dengan KNKG dan CSR Society Indonesia.	
7.	Apresiasi Karya Inovasi Regional PLN: • Juara 1 dalam kategori <i>Non Technical Supporting</i> (NTS) PT PJBS yg merupakan anak usaha PJB mendapatkan gelar sebagai juara umum melalui 3 penghargaan yaitu Juara 1 dan 3 dalam bidang pembangkitan dan Juara 2 bidang NTS Appreciation for PLN Regional Innovation: • First Winner in PT PJBS Non-Technical Supporting (NTS) category, as a subsidiary of PJB, won the title as general champion through 3 awards: First and Third Winners in the field of generation and Runner-up in the NTS field	24-25 September 2019 September 24-25, 2019	PT PLN Pusat Pendidikan dan Pelatihan (PLN Pusdiklat) PT PLN Pusat Pendidikan dan Pelatihan (PLN Pusdiklat)	
8.	Subroto Award Tahun 2019: • Tiga penghargaan Bidang Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) pada Kategori PLTU/GU: PLTU Paiton 1 & 2, PLTGU Muara Tawar, PLTU Ropa • Satu penghargaan Bidang Efisiensi Energi: UP Brantas 2019 Subroto Award: • Three awards in the Field of Electricity Safety (K2) in CFPP / GU Category: Paiton 1 & 2 CFPP, Muara TawarCCPP, Ropa CFPP • One award in the field of Energy Efficiency: Brantas GU	27 September 2019 September 27, 2019	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)	
9.	UP Muara Tawar mendapatkan apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atas kontribusi dan aksi mitigasinya dalam upaya menurunkan emisi gas ruang kaca Muara Tawar GU was awarded by the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) for the contribution and mitigations to reduce greenhouse gas emissions	2 Oktober 2019 October 2, 2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Ministry of Environment and Forestry	

Penghargaan dan Sertifikasi 2019

Awards and Certification 2019

No	Jenis Penghargaan Awards	Tanggal Perolehan Date	Lembaga/Badan Pemberi Penghargaan Award Organizer	Foto Photo
10.	Meraih Juara Umum pada PLN English Olympiad 2019 The General Champion of PLN English Olympiad 2019	7-11 Oktober 2019 October 7-11, 2019	PT PLN (Persero) PT PLN (Persero)	
11.	Meraih Juara III <i>Best Implementator Culture Leap</i> dan Juara III <i>Best Promotor Culture Leap</i> dalam ajang <i>Culture Leap Promotion</i> PLN Tahun 2019 Third Winner in the Best Implementator of Culture Leap and the Third Winner in the Best Promoter Culture Leap during PLN Culture Leap Promotion of 2019	15-16 Oktober 2019 October 15-16, 2019	PT PLN (Persero) PT PLN (Persero)	
12.	Meraih penghargaan pada ajang <i>International Conference Learning, Innovation, Knowledge and Exhibition (LIKE)</i> 2019: - Juara 1 Inovasi kategori Pembangkitan dari UBJOM Tenayan - Juara 1 Inovasi kategori <i>Technical Supporting</i> dari UPHT - Juara 1 Inovasi kategori <i>Non-Technical Supporting</i> dari DIVOSK-2 - Juara Favorit 2 <i>International Conference</i> kategori <i>Policy</i> dari UBANG Received an award at the International Conference & Learning event, Innovation, Knowledge and Exhibition (LIKE) 2019: - First Winner for the Innovation in the Generating category from Tenayan OMSBU - First Winner for the Innovation in the Technical Supporting category from UPHT - First Winner for the Innovation in the Non-Technical Supporting category from DIVOSK-2 - Runner-up in the International Conference in Policy category from UBANG	21 – 24 Oktober 2019 October 21-24, 2019	PT PLN (Persero) PT PLN (Persero)	
13.	Meraih penghargaan tertinggi "GOLD Achievement" pada kategori Manufaktur dan Energi dalam ajang <i>Indonesian Operational Excellence Conference and Award (OPEXCON) Project Competition</i> 2019 Received the highest GOLD Achievement award in the category Manufacturing and Energy in the Indonesian Operational Excellence event Project Competition and Award (OPEXCON) 2019	7 November 2019 November 7, 2019	SHIFT Indonesia	
14.	Juara 1 <i>Annual Report Award</i> 2018 pada kategori <i>Private Non Keuangan Non Listed</i> Winner of the 2018 Annual Report Award in the Private Non-Financial category Non Listed categories	14 November 2019 November 14, 2019	Komite Nasional Kebijakan <i>Governance</i> (KNKG), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian BUMN, Direktorat Jenderal Pajak, Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia National Governance Policy Committee (KNKG), Financial Authority (OJK), SOE Ministry, Directorate General of Taxes, Bank Indonesia, Indonesia Stock Exchange and Indonesian Accountants Association	

No	Jenis Penghargaan Awards	Tanggal Perolehan Date	Lembaga/Badan Pemberi Penghargaan Award Organizer	Foto Photo
15.	Menerima piagam hasil <i>assessment Baldrige Excellence Criteria</i> (BEC) tahun 2019 dengan skor 700 yang memantapkan posisi PJB dalam <i>Band Industry Leader</i> . Certified with the Baldrige Excellence Criteria (BEC) assessment results in 2019 with a score of 700, leading the position of PJB in the Band Industry Leader.	27 Desember 2019 December 27, 2019	IQAF (Indonesian Quality Award Foundation)	
16.	Dua unit pembangkitan (UP) PJB yaitu UP Paiton dan UP Gresik meraih peringkat emas dalam PROPER 2019 oleh KLHK. Two PJB generation units (UP) namely UP Paiton and UP Gresik won gold rank in PROPER 2019 by KLHK.	9 Januari 2020 January 9, 2020	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Ministry of Environment and Forestry	
Tingkat Regional Regional Awards				
1.	Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan dua penghargaan kepada PT PJB UP Muara Tawar atas komitmennya dalam bersinergi membangun Provinsi Jawa Barat melalui Program CSR The Government of West Java Province gave two awards to PT PJB Muara Tawar GU for its commitment to synergize developing the West Java Province through the CSR Program	18 November 2019 November 18, 2019	Pemerintah Provinsi Jawa Barat West Java Provincial Government	
2.	PJB UBJOM Pulang Pisau berhasil meraih penghargaan <i>Zero Accident</i> tahun 2018 PJB Pulang Pisau OMSBU won Zero-Accident award of 2018	18 Februari 2019 February 18, 2019	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan	
3.	Penghargaan dari Gubernur Jawa Timur terkait dukungan pada SMK Jawa Timur pada acara 'Kelas Industri Sebagai Kekuatan SMK PGRI 3 Malang' The award from the Governor of East Java on the support for East Java's vocational schools at the 'Kelas Industri Sebagai Kekuatan SMK PGRI 3 Malang'	13 April 2019 April 13, 2019	Pemerintah Provinsi Jawa Timur East Java Provincial Government	
4.	UBJOM Pulang Pisau mendapatkan penghargaan Handep Hapakat dari Bupati Pulang Pisau, Kalimantan Barat. UBJOM Pulang Pisau won the Handep Hapakat award from the Regent of Pulang Pisau, West Kalimantan	2 Juli 2019 July 2, 2019	Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Pulau Pisang Regency Government	
5.	UP Paiton menerima penghargaan dari Gubernur Jawa Timur atas pengelolaan PLTU Paiton unit 1 dan 2 yang dinilai sangat baik dalam implementasi pengelolaan perusahaan berbasis lingkungan hidup pada kategori PLTU Paiton GU was awarded by the Governor of East Java for the management of Paiton CFPP unit 1 and 2 titled as excellent in the implementation of environmental-based company management in the category of CFPP	28 Juli 2019 July 28, 2019	Pemerintah Provinsi Jawa Timur East Java Provincial Government	
6.	Keberhasilan evakuasi satwa hiu paus yang terjebak dalam kanal inlet unit 2 PLTU Paiton pada September 2019 lalu mendapatkan apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) The successful evacuation of whale sharks caught in the inlet unit canal 2 PLTU Paiton in September 2019 then received appreciation from Ministry of Environment and Forestry (KLHK)	12 Desember 2019 December 12, 2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Ministry of Environment and Forestry	

Sertifikasi Korporat 2019

Corporate Certification 2019

No	Unit	Ruang Lingkup yang Disertifikasi Certification Scope	Pemberi Sertifikasi Certification Institution	Tanggal Perolehan Date of Acquisition	Berlaku Hingga Valid until	Masa Berlaku Valid period	Keterangan Description
1	Kantor Pusat Head Office	Energy Management System - ISO 50001:2011	BSI	8 November 2017 November 8, 2017	7 November 2020 November 7, 2020	3 Tahun 3 years	Sertifikat ini adalah Multi-Site Certificate yaitu: - Kantor Pusat - 6 Unit Pembangkit Eksisting (Gresik, Muara Karang, Muara Tawar, Paiton, Cirata & Brantas) - 5 UBJOM Jawa (Indramayu, Rembang, Paiton 9, Pacitan dan Tanjung Awar-Awar) This certificate is a Multi-Site Certificate: - Head office - 6 Existing Generation Units (Gresik, Muara Karang, Muara Tawar, Paiton, Cirata & Brantas) - 5 OMSBU in Java (Indramayu, Rembang, Paiton 9, Pacitan and Tanjung Awar-Awar)
2	Kantor Pusat Head Office	Asset Management System - ISO 55001:2014	BSI	5 Maret 2018 March 5, 2018	4 Maret 2021 March 4, 2021	3 Tahun 3 years	Sertifikat ini adalah Multi-Site Certificate yaitu: - Kantor Pusat - 6 Unit Pembangkit Eksisting (Gresik, Muara Karang, Muara Tawar, Paiton, Cirata & Brantas) This certificate is a Multi-Site Certificate: - Head office - 6 Existing Generation Units (Gresik, Muara Karang, Muara Tawar, Paiton, Cirata & Brantas)
3	Kantor Pusat Head Office	Environmental Management System - ISO 14001:2015	BSI	8 November 2017 November 8, 2017	7 November 2020 November 7, 2020	3 Tahun 3 years	Sertifikat ini adalah Multi-Site Certificate yaitu: - Kantor Pusat - 6 Unit Pembangkit Eksisting (Gresik, Muara Karang, Muara Tawar, Paiton, Cirata & Brantas) - 5 UBJOM Jawa (Indramayu, Rembang, Paiton 9, Pacitan dan Tanjung Awar-Awar) - 4 UBJOM Luar Jawa (Kaltim Teluk, Tenayan, Arun, dan Pulang Pisau) This certificate is a Multi-Site Certificate: - Head office - 6 Existing Generation Units (Gresik, Muara Karang, Muara Tawar, Paiton, Cirata & Brantas) - 5 OMSBU in Java (Indramayu, Rembang, Paiton 9, Pacitan and Tanjung Awar-Awar) - 4 OMSBU Outside Java (East Kalimantan, Tenayan, Arun, and Pulang Pisau)
4	Kantor Pusat Head Office	Quality Management System - ISO 9001:2015	BSI	8 November 2017 November 8, 2017	7 November 2020 November 7, 2020	3 Tahun 3 years	Sertifikat ini adalah Multi-Site Certificate yaitu: - Kantor Pusat - 6 Unit Pembangkit Eksisting (Gresik, Muara Karang, Muara Tawar, Paiton, Cirata & Brantas) - Unit Pemeliharaan (UPHT & UPHB) - BPWC - 5 UBJOM Jawa (Indramayu, Rembang, Paiton 9, Pacitan dan Tanjung Awar-Awar) - 4 UBJOM Luar Jawa (Kaltim Teluk, Tenayan, Arun, dan Pulang Pisau) This certificate is a Multi-Site Certificate: - Head office - 6 Existing Generation Units (Gresik, Muara Karang, Muara Tawar, Paiton, Cirata & Brantas) - Maintenance Unit (UPHT & UPHB) - CRMU - 5 UBJOM Jawa (Indramayu, Rembang, Paiton 9, Pacitan and Tanjung Awar-Awar) - 4 UBJOM Outside Java (East Kalimantan, Tenayan, Arun, and Pulang Pisau)

No	Unit	Ruang Lingkup yang Disertifikasi Certification Scope	Pemberi Sertifikasi Certification Institution	Tanggal Perolehan Date of Acquisition	Berlaku Hingga Valid until	Masa Berlaku Valid period	Keterangan Description
5	Kantor Pusat Head Office	Integrated Management Registration - PAS 99 : 2012	BSI	8 November 2017 November 8, 2017	7 November 2020 November 7, 2020	3 Tahun 3 years	Sertifikat ini adalah Multi-Site Certificate yaitu: - Kantor Pusat - 6 Unit Pembangkit Eksisting (Gresik, Muara Karang, Muara Tawar, Paiton, Cirata & Brantas) - Unit Pemeliharaan (UPHT & UPHB) - BPWC - 5 UBJOM Jawa (Indramayu, Rembang, Paiton 9, pacitan dan Tanjung Awar-Awar) - 4 UBJOM Luar Jawa (Kaltim Teluk, Tenayan, Arun, dan Pulang Pisau) This certificate is a Multi-Site Certificate, namely: - Headquarters - 6 Existing Power Plant Units (Gresik, Muara Karang, Muara Tawar, Paiton, Cirata & Brantas) - Maintenance Unit (UPHT & UPHB) - CRMU - 5 UBJOM Jawa (Indramayu, Rembang, Paiton 9, Pacitan and Tanjung Awar-Awar) - 4 UBJOM Outside Java (East Kalimantan, Tenayan, Arun, and Pulang Pisau)
6	Kantor Pusat Head Office	Occupational Health & Safety Management System	BSI	8 November 2017 November 8, 2017	7 November 2020 November 7, 2020	3 Tahun 3 years	Sertifikat ini adalah Multi-Site Certificate yaitu: - Kantor Pusat - 6 Unit Pembangkit Eksisting (Gresik, Muara Karang, Muara Tawar, Paiton, Cirata & Brantas) - Unit Pemeliharaan (UPHT & UPHB) - BPWC - 5 UBJOM Jawa (Indramayu, Rembang, Paiton 9, pacitan dan Tanjung Awar-Awar) - 4 UBJOM Luar Jawa (Kaltim Teluk, Tenayan, Arun, dan Pulang Pisau) This certificate is a Multi-Site Certificate, namely: - Headquarters - 6 Existing Power Plant Units (Gresik, Muara Karang, Muara Tawar, Paiton, Cirata & Brantas) - Maintenance Unit (UPHT & UPHB) - CRMU - 5 UBJOM Jawa (Indramayu, Rembang, Paiton 9, Pacitan and Tanjung Awar-Awar) - 4 UBJOM Outside Java (East Kalimantan, Tenayan, Arun, and Pulang Pisau)
7	Kantor Pusat Head Office	IT Service Management System - ISO/IEC 20000-1:2011	BSI	12 November 2017 November 12, 2017	11 November 2020 November 11, 2020	3 Tahun 3 years	
8	Kantor Pusat Head Office	Information Security Management System - ISO/IEC 27001:2013	BSI	8 Januari 2019 January 8, 2019	7 Januari 2022 January 7, 2022	3 Tahun 3 years	
9	Kantor Pusat Head Office	Business Continuity Management System - ISO 22301:2012	BSI	16 September 2019 September 16, 2019	15 September 2022 September 15, 2022	3 Tahun 3 years	Sertifikat ini adalah Multi-Site Certificate yaitu: - Kantor Pusat - 6 Unit Pembangkit Eksisting (Gresik, Muara Karang, Muara Tawar, Paiton, Cirata & Brantas) - BPWC This certificate is a Multi-Site Certificate: - Head office - 6 Existing Generation Units (Gresik, Muara Karang, Muara Tawar, Paiton, Cirata & Brantas) - CRMU



Sertifikasi Unit Eksisting

Existing Unit Certification

Unit	Ruang Lingkup yang Disertifikasi Certification Scope	Pemberi Sertifikasi Certification Institution	Tanggal Perolehan Date of Acquisition	Berlaku Hingga Valid until	Masa Berlaku Valid period
UP Gresik Gresik GU					
UP Gresik Gresik GU	Occupational Health & Safety Management System	Minister of Employment of The Republic of Indonesia	16 Mei 2016 May 16, 2016	16 Mei 2019 May 16, 2019	Dalam proses perpanjangan In the process of extension
	SMK3	SUCOFINDO	Sudah dilaksanakan sertifikasi SMK3 pada 24-26 April 2019 dengan hasil 95.18% dari 166 kriteria audit sesuai dg PPRI 50/2012 (penyerahan sertifikat menyusul) Has been OHSMS certified since April 24-26, 2019 with the results of 95.18% of 166 audit criteria according to PPRI 50/2012		
UP Muara Karang Muara Karang GU					
UP Muara Karang Muara Karang GU	Sistem Manajemen Keselamatan & kesehatan Kerja Occupational Health & Safety Management System	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ministry of Manpower of Republic of Indonesia	14 Juli 2017 July 14, 2017	13 Juli 2020 July 13, 2020	3 Tahun 3 years
UP Paiton Paiton GU					
UP Paiton Paiton GU	Akreditasi Laboratorium dari KAN Laboratory Accreditation from KAN	Komite Akreditasi Nasional National Accreditation Committee			Dalam proses akreditasi In the process of accreditation
	Sistem Manajemen Keselamatan & kesehatan Kerja Occupational Health & Safety Management System	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ministry of Manpower of Republic of Indonesia	29 Maret 2019 March 29, 2019	29 Maret 2022 March 29, 2022	3 Tahun 3 years
UP Muara Tawar Muara Tawar GU					
UP Muara Tawar Muara Tawar GU	Laboratorium Penguji dengan ruang lingkup dengan komposisi gas alam, nilai kalor, <i>specific gravity</i> Testing Laboratory with a scope of natural gas composition, heating value, specific gravity	KAN (Komite Akreditasi Nasional) KAN (National Accreditation Committee)	28 Juni 2018 June, 28 2018	27 Juni 2022 June 27, 2022	4 Tahun 4 years
UP Brantas Brantas GU					
UP Brantas Brantas GU	Sistem Manajemen Keselamatan Kerja (SMK3) Occupational Health and Safety Management System (OHSMS)	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ministry of Manpower of Republic of Indonesia	14 Juli 2017 July 14, 2017	13 Juli 2019 July 13, 2019	2 Tahun 2 years *dalam proses perpanjangan, namun belum menerima sertifikatnya * in the extension process, but has not yet received the certificate
	Ampelgading Unit 1	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Ministry of Energy and Mineral Resources	3 April 2018 April 3, 2018	3 April 2023 April 3, 2023	5 Tahun 5 years
	Ampelgading Unit 2		3 April 2018 April 3, 2018	3 April 2023 April 3, 2023	5 Tahun 5 years
	Sengguruh Unit 1		28 November 2017 November 28, 2017	28 September 2022 September 28, 2022	5 Tahun 5 years
	Sengguruh Unit 2		28 November 2017 November 28, 2017	28 September 2022 September 28, 2022	5 Tahun 5 years
	Sutami Unit 1	PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi PT PLN (Persero) Certification Center	2 Desember 2013 December 2, 2013	1 Januari 2024 January 1, 2024	11 Tahun 11 years
	Sutami Unit 2		2 Februari 2015 February 2, 2015	2 Februari 2020 February 2, 2020	5 Tahun 5 years
	Sutami Unit 3		2 September 2008 September 2, 2008	11 April 2021 April 11, 2021	15 Tahun 15 years
	Wlingi Unit 1		7 Desember 2017 December 7, 2017	7 Desember 2022 December 7, 2022	5 Tahun 5 years



Unit	Ruang Lingkup yang Disertifikasi Certification Scope	Pemberi Sertifikasi Certification Institution	Tanggal Perolehan Date of Acquisition	Berlaku Hingga Valid until	Masa Berlaku Valid period
UP Brantas Brantas GU	Wlingi Unit 2	PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi PT PLN (Persero) Certification Center	7 Desember 2017 December 7, 2017	7 Desember 2022 December 7, 2022	5 Tahun 5 years
	Lodoyo		20 Oktober 2017 October 20, 2017	20 Oktober 2022 October 20, 2022	5 Tahun 5 years
	Tulungagung Unit 1		7 Desember 2017 December 7, 2017	7 Desember 2022 December 7, 2022	5 Tahun 5 years
	Tulungagung Unit 2		7 Desember 2017 December 7, 2017	7 Desember 2022 December 7, 2022	5 Tahun 5 years
	Wonorejo		20 Oktober 2017 October 20, 2017	20 Oktober 2022 October 20, 2022	5 Tahun 5 years
	Selorejo		7 Desember 2017 December 7, 2017	7 Desember 2022 December 7, 2022	5 Tahun 5 years
	Mendalan Unit 1	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Ministry of Energy and Mineral Resources	2 Juli 2018 July 2, 2018	2 Juli 2023 July 2, 2023	5 Tahun 5 years
	Mendalan Unit 2		2 Juli 2018 July 2, 2018	2 Juli 2023 July 2, 2023	5 Tahun 5 years
	Mendalan Unit 3		2 Juli 2018 July 2, 2018	2 Juli 2023 July 2, 2023	5 Tahun 5 years
	Mendalan Unit 4		2 Juli 2018 July 2, 2018	2 Juli 2023 July 2, 2023	5 Tahun 5 years
	Siman Unit 1		10 April 2018 April 10, 2018	10 April 2023 April 10, 2023	5 Tahun 5 years
	Siman Unit 2		26 Desember 2018 26 Desember 2018	26 Desember 2023 26 Desember 2023	5 Tahun 5 years
	Siman Unit 3		12 Agustus 2018 August 12, 2018	12 Agustus 2023 August 12, 2023	5 Tahun 5 years
	Giringan Unit 1		31 Agustus 2018 August 31, 2018	31 Agustus 2023 August 31, 2023	5 Tahun 5 years
	Giringan Unit 2		26 Desember 2018 December 26, 2018	26 Desember 2023 December 26, 2023	5 Tahun 5 years
	Giringan Unit 3		23 April 2018 April 23, 2018	23 April 2023 April 23, 2023	5 Tahun 5 years
	Golang Unit 1		23 April 2018 April 23, 2018	23 April 2023 April 23, 2023	5 Tahun 5 years
	Golang Unit 2		23 April 2018 April 23, 2018	23 April 2023 April 23, 2023	5 Tahun 5 years
	Golang Unit 3		23 April 2018 April 23, 2018	23 April 2023 April 23, 2023	5 Tahun 5 years
	Ngebel	PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi PT PLN (Persero) Certification Center	22 Desember 2017 December 22, 2017	22 Desember 2022 December 22, 2022	5 Tahun 5 years
UP Cirata Cirata GU					
UP Cirata Cirata GU	Sistem Manajemen K3 Sistem Manajemen K3	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ministry of Manpower of Republic of Indonesia	30 Juli 2018 July 30, 2018	30 Juli 2021 July 30, 2021	3 Tahun 3 years
	Sertifikat Zero Accident Sertifikat Zero Accident		29 Maret 2019 March 29, 2019	29 Maret 2020 March 29, 2020	1 Tahun 1 year

Unit	Ruang Lingkup yang Disertifikasi Certification Scope	Pemberi Sertifikasi Certification Institution	Tanggal Perolehan Date of Acquisition	Berlaku Hingga Valid until	Masa Berlaku Valid period
PLTD Suppa Suppa DEPP					
PLTD Suppa Suppa DEPP	Sertifikat layak operasi instalasi pembangkit (SLO) Unit #1 Commissioning Certificate (SLO) for Unit #1 power plant installation	Kementerian/ Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM) Ministry/Department of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia (ESDM)	1 April 2015 April 1, 2015	1 April 2020 April 1, 2020	5 Tahun 5 years
	Sertifikat layak operasi instalasi pembangkit (SLO) Unit #2 Commissioning Certificate (SLO) for Unit #2 power plant installation		1 April 2015 April 1, 2015	1 April 2020 April 1, 2020	5 Tahun 5 years
	Sertifikat layak operasi instalasi pembangkit (SLO) Unit #3 Commissioning Certificate (SLO) for Unit #3 power plant installation		1 April 2015 April 1, 2015	1 April 2020 April 1, 2020	5 Tahun 5 years
	Sertifikat layak operasi instalasi pembangkit (SLO) Unit #4 Commissioning Certificate (SLO) for Unit #4 power plant installation		1 April 2015 April 1, 2015	1 April 2020 April 1, 2020	5 Tahun 5 years
	Sertifikat layak operasi instalasi pembangkit (SLO) Unit #5 Commissioning Certificate (SLO) for Unit #5 power plant installation		1 April 2015 April 1, 2015	1 April 2020 April 1, 2020	5 Tahun 5 years
	Sertifikat layak operasi instalasi pembangkit (SLO) Unit #6 Commissioning Certificate (SLO) for Unit #6 power plant installation		1 April 2015 April 1, 2015	1 April 2020 April 1, 2020	5 Tahun 5 years
	Sertifikat layak operasi Satu Bay Line 150 KV Arah Parepare 1, Line 2 & Bay Couple Commissioning Certificate (SLO) for Satu Bay Line KV Arah Parepare 1, Line 2 & Bay Couple		1 Januari 2015 January 1, 2015	16 Januari 2025 January 16, 2025	10 Tahun 10 years
	Sistem Manajemen K3 OHS Management System	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ministry of Manpower of Republic of Indonesia	30 Juli 2018 July 30, 2018	30 Juli 2021 July 30, 2021	3 Tahun 3 years
	Sistem Manajemen Lingkungan Environmental Management System	LMK - KAN	3 April 2019 April 3, 2019	3 April 2021 April 3, 2021	2 Tahun 2 years

Sertifikasi UBJOM

OMSBU Certification

Unit	Ruang Lingkup yang Disertifikasi Certification Scope	Pemberi Sertifikasi Certification Institution	Tanggal Perolehan Date of Acquisition	Berlaku Hingga Valid until	Masa Berlaku Valid period
UBJOM Indramayu Indramayu OMSBU					
UBJOM Indramayu Indramayu OMSBU	Sertifikasi Laik Operasi #1 Commissioning Certificate 1	PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi PT PLN (Persero) Certification Center	10 Februari 2017 February 10, 2017	10 Februari 2022 February 10, 2022	5 Tahun 5 years
	Sertifikasi Laik Operasi #2 Commissioning Certificate 2		10 Februari 2017 February 10, 2017	10 Februari 2022 February 10, 2022	5 Tahun 5 years
	Sertifikasi Laik Operasi #3 Commissioning Certificate 3		10 Februari 2017 February 10, 2017	10 Februari 2022 February 10, 2022	5 Tahun 5 years
	SNI ISO/IEC 17025:2008 (Laboratorium Pengujian) SNI ISO/IEC 17025:2008 (Testing Laboratory)	Komite Akreditasi Nasional National Accreditation Committee	25 Oktober 2017 October 25, 2017	25 Oktober 2020 October 25, 2020	3 Tahun 3 years



Unit	Ruang Lingkup yang Disertifikasi Certification Scope	Pemberi Sertifikasi Certification Institution	Tanggal Perolehan Date of Acquisition	Bertaku Hingga Valid until	Masa Berlaku Valid period
UBJOM Tanjung Awar-Awar Tanjung Awar-Awar OMSBU					
UBJOM Tanjung Awar-Awar Tanjung Awar-Awar OMSBU	Sistem Manajemen Keselamatan Kerja (SMK3) OHSMS	Gubernur Jawa Timur East Jawa's Governor	21 Februari 2017 February 21, 2017	20 Februari 2020 February 20, 2020	3 Tahun 3 years
	Sistem Manajemen Keamanan (SMP) Security Management System	MABES POLRI Police Headquarters	22 Maret 2017 March 22, 2017	21 Maret 2020 March 21, 2020	3 Tahun 3 years
	Pengoperasian Terminal Khusus Special Terminal Operation	Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Ministry of Transportation Directorate General of Sea Transportation	12 Oktober 2018 October 12, 2018	12 Oktober 2023 October 12, 2023	5 Tahun 5 years
	SNI ISO/IEC 17025:2008 (ISO/IEC 17025:2005)	Komite Akreditasi Nasional National Accreditation Committee	5 Desember 2017 December 5, 2017	4 Desember 2021 December 4, 2021	3 Tahun 3 years
	Laik Operasi PLTU Tanjung Awar-Awar Unit 1 Commissioning Certificate of Tanjung Awar-awar Unit 1 CFPP	PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi	22 Februari 2019 February 22, 2019	22 Februari 2024 February 22, 2024	5 Tahun 5 years
	Laik Operasi PLTU Tanjung Awar-Awar Unit 2 Commissioning Certificate of Tanjung Awar-awar Unit 2 CFPP	PT PLN (PERSERO) Certification Services	30 Juni 2016 June 30, 2016	30 Juni 2021 June 30, 2021	5 Tahun 5 years
UBJOM Rembang Rembang OMSBU					
UBJOM Rembang Rembang OMSBU	Sertifikat Laik Operasi Unit 10 Commissioning Certificate of Unit 10	PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi	14 Februari 2017 February 14, 2017	14 Februari 2022 February 14, 2022	5 Tahun 5 years
	Sertifikat Laik Operasi Unit 20 Commissioning Certificate of Unit 20	PT PLN (Persero) Certification Center	14 Februari 2017 February 14, 2017	14 Februari 2022 February 14, 2022	5 Tahun 5 years
	Sertifikat Penghargaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Certification Award for Occupational Health and safety	Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ministry of Manpower of Republic of Indonesia	14 Juli 2017 July 14, 2017	14 Juli 2020 July 14, 2020	5 Tahun 5 years
	Sertifikat Akreditasi Laboratorium Penguji Testing Laboratory Accreditation Certificate	Komite Akreditasi Nasional National Accreditation Committee	14 Juni 2017 June 14, 2017	13 Juni 2021 June 13, 2021	4 Tahun 4 years
	Sertifikat Kalibrasi Meter Statik Energi Unit 10 Certification of electrostatic field meters calibration of unit 10	PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi	2 Oktober 2019 October 2, 2019	2 Oktober 2024 October 2, 2024	5 Tahun 5 years
	Sertifikat Kalibrasi Meter Statik Energi Unit 20 Certification of electrostatic field meters calibration of unit 20	PT PLN (Persero) Certification Center	2 Oktober 2019 October 2, 2019	2 Oktober 2024 October 2, 2024	5 Tahun 5 years

Unit	Ruang Lingkup yang Disertifikasi Certification Scope	Pemberi Sertifikasi Certification Institution	Tanggal Perolehan Date of Acquisition	Berlaku Hingga Valid until	Masa Berlaku Valid period
UBJOM Paiton 9 Paiton 9 OMSBU					
UBJOM Paiton 9 Paiton 9 OMSBU	Sertifikasi Laik Operasi Commissioning Certificate	PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi PT PLN (Persero) Certification Center	7 Agustus 2017 August 7, 2017	7 Agustus 2022 August 7, 2022	5 Tahun 5 years
	Sertifikasi ISO 17025 ISO 17025 Certificate	Komite Akreditasi Nasional National Accreditation Committee	23 Agustus 2017 August 23, 2017	22 Agustus 2021 August 22, 2021	4 Tahun 4 years
	SMP Security Management System	Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Chief of the Indonesian National Police	20 Januari 2016 January 20, 2016	19 Januari 2019 January 20, 2019	Dalam proses perpanjangan in the process of extension
	SMK3 OHSMS	Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ministry of Manpower of Republic of Indonesia	29 Maret 2019 March 29, 2019	29 Maret 2022 March 29, 2022	3 Tahun 3 years
UBJOM Pacitan Pacitan OMSBU					
UBJOM Pacitan Pacitan OMSBU	Sertifikat Laik Operasi (SLO) #Unit 1 Commissioning Certificate of Unit 1	PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi PT PLN (Persero) Certification Center	6 November 2017 November 6, 2017	6 November 2022 November 6, 2022	5 Tahun 5 years
	Sertifikat Laik Operasi (SLO) #Unit 2 Commissioning Certificate of Unit 2	PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi PT PLN (Persero) Certification Center	29 Juni 2018 June 29, 2018	29 Juni 2023 June 29, 2023	5 Tahun 5 years
	SNI ISO / IEC 17025:2008 (ISO/ IEC 17025 : 2005) Kompetensi Laboratorium Pengujian & Laboratorium Kalibrasi SNI ISO / IEC 17025:2008 (ISO/ IEC 17025 : 2005) Competency of Testing Laboratory and Calibration Laboratory	Komite Akreditasi Nasional National Accreditation Committee	20 Desember 2017 December 20, 2017	19 Desember 2021 December 19, 2021	4 Tahun 4 years
	SNI ISO / IEC 17025:2017 Kompetensi Laboratorium Pengujian & Laboratorium Kalibrasi SNI ISO / IEC 17025:2017 Competency of Testing Laboratory and Calibration Laboratory		12 Desember 2018 December 12, 2018	19 Desember 2021 December 19, 2021	3 Tahun 3 years
	Sertifikat Penghargaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Certification Award for Occupational Health and safety	Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ministry of Manpower of Republic of Indonesia	14 Juli 2017 July 14, 2017	14 Juli 2020 July 14, 2020	3 Tahun 3 years
	Sertifikat Audit Sistem Manajemen Pengamanan Certification of Audit for Security Management System	Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Chief of the Indonesian National Police	22 Maret 2017 March 22, 2017	22 Maret 2020 March 22, 2020	3 Tahun 3 years
UBJOM Tenayan Tenayan OMSBU					
UBJOM Tenayan Tenayan OMSBU	Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Certification Award for Occupational Health and safety	Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ministry of Manpower of Republic of Indonesia	28 Desember 2018 December 28, 2018	28 Desember 2021 December 28, 2021	3 Tahun 3 years

Sertifikasi Unit Bisnis Lain

Other Business Unit Certification

Unit	Ruang Lingkup yang Disertifikasi Certification Scope	Pemberi Sertifikasi Certification Institution	Tanggal Perolehan Date of Acquisition	Berlaku Hingga Valid until	Masa Berlaku Valid period
BPWC Cirata Reservoir Management Unit (CRMU)					
BPWC CWRMU	Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Kerja Implementation of Occupational Health and Safety Management Systems	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ministry of Manpower of Republic of Indonesia	30 Juli 2018 July 30, 2018	30 Juli 2021 July 30, 2021	3 Tahun 3 years
Unit Pemeliharaan Wilayah Barat (UPHB) Maintenance Service Unit of West Area (MSUWA)					
UPHB MSUWA	Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Kerja Implementation of Occupational Health and Safety Management Systems	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ministry of Manpower of Republic of Indonesia	14 Juli 2017 July 14, 2017	14 Juli 2020 July 14, 2020	3 Tahun 3 years
	Laboratorium Kalibrasi Alat-alat kelistrikan Pembangkit Calibration Laboratory for Power Plant Equipment Calibration	Komite Akreditasi Nasional National Accreditation Committee	2 September 2019 September 2, 2019	1 September 2024 September 1, 2024	5 Tahun 5 years
Unit Pemeliharaan Wilayah Timur (UPHT) Maintenance Service Unit of East Area (MSUEA)					
UPHT MSUEA	Sertifikasi SMK3 OHSMS Certification	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ministry of Manpower of Republic of Indonesia	14 Juli 2017 July 14, 2017	7 November 2020 November 7, 2020	3 Tahun 3 years
PJB Academy PJB Academy					
Pearson Certificate	Managing The Organization, Managing Learning, dan Managing Assesment Managing The Organization, Managing Learning, and Managing Assesment	Pearson UK	21 November 2019 November 21, 2019	21 November 2020 November 21, 2020	1 Tahun 1 year



Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan Audit
Audited Financial Statements



Referensi Kriteria ARA
ARA Criteria Reference

PERISTIWA PENTING 2019

SIGNIFICANT EVENTS OF 2019

01



14 JANUARI 2019
JANUARY 14, 2019

PJB menggelar peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional 2019 di Unit Pembangkitan (UP) Paiton. Dalam peringatan Bulan K3 tersebut, para perwakilan dari unit PJB mengikuti berbagai macam perlombaan yang dimulai 14 Januari hingga 18 Februari 2019. PJB commemorated the 2019 National Occupational Health and Safety Month in Paiton Generation Unit (GU). In commemoration of the OHS Month, representatives of PJB units participated in various kinds of competitions which began on January 14 to February 18, 2019.

02



19 FEBRUARI 2019
FEBRUARY 19, 2019

PJB melalui BPWC berperan aktif dalam program Citarum Harum yang diluncurkan pemerintah setahun lalu. Aneka program digelar pada sektor 12 yang menjadi wilayah BPWC dalam program revitalisasi sungai Citarum tersebut, diantaranya penghijauan di green belt waduk Cirata, pembersihan dan pengelolaan gulma eceng gondok, termasuk bagaimana upaya BPWC membersihkan gulma itu menggunakan mesin harvester dan pengelolaan eceng gondok menjadi pupuk kompos, pakan ikan, kerajinan serta biogas.

PJB through the head of the Cirata Reservoir Management Unit (CRMU) participated in the Citarum Harum program launched by the government a year ago. Various programs are held in sector 12 which is the CRMU region in the Citarum revitalization program, including greening in the Cirata reservoir's green belt, cleaning and management of water hyacinth weeds, including the method used by CRMU in cleaning the weeds using harvester machines and managing water hyacinth into compost fertilizer, fish feed, crafts and biogas.

03



23 FEBRUARI 2019
FEBRUARY 23, 2019

PJB UBJOM Indramayu bekerjasama dengan PWI Indramayu menggelar lomba menulis feature dan foto terkait pengembangan wisata Pantai Plentong. Lomba merupakan bagian dari peringatan Hari Pers Nasional 2019 di Kabupaten Indramayu. "Pesona Pantai Plentong Kini, Masa Lalu yang Getir, dan Harapan Masa Depan yang Gemilang" menjadi tema dalam lomba tersebut. Pesertanya terbuka untuk semua insan media yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Indramayu. Mereka diharapkan dapat mengangkat kisah-kisah historikal dan success story pengembangan wisata Pantai Plentong sebagai ajang publikasi dan promosi keberadaan pantai itu.

PJB's Indramayu OMSBU in collaboration with PWI Indramayu held a feature writing competition and photos related to the development of Plentong Beach. The competition is a part to commemorate the 2019 National Press Day in Indramayu Regency. "The Enchantment of Plentong Beach Today, Bitter Past, and Bright Future Hope" became the theme of the competition. The participants are from all media members who are members of the Indramayu Regency Indonesian Journalists Association (PWI). They are expected to be able to bring up historical stories and success stories of the development of Plentong Beach tourism as a venue for publication and promotion.

04



25 FEBRUARI 2019
FEBRUARY 25, 2019

Presiden RI Joko Widodo meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Ekspansi 1x660 MW yang terletak di Desa Karangandri, Slarang dan Manganti, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Peresmian PLTU ini juga dihadiri oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini M. Soemarno, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Cilacap Totto Suwanto Pamuji, Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah PLN Amir Rosidin, Direktur Utama PT Sumber Segara Primadaya Agus Nurwahyudi dan Direktur Utama PJB Iwan Agung Firstantara. Pembangkit yang menempati area seluas kurang lebih 38,28 hektar tersebut dikembangkan oleh anak perusahaan PLN, yakni PJB dengan saham sebesar 49% dan juga dikembangkan oleh PT Sumberenergi Sakti Prima (S2P) dengan saham 51%. Indonesian President, Joko Widodo, inaugurated the 1x660 MW Expansion Coal-fired Power Plant (CFPP) located in Karangandri, Slarang and Manganti Villages, Cilacap Regency, Central Java. The inauguration of the CFPPs was also attended by ESDM Minister, Ignasius Jonan; SOE Minister, Rini M. Soemarno; Central Java Governor, Ganjar Pranowo; Cilacap Regent, Totto Suwanto Pamuji; PLN's Central Java Regional Business Director, Amir Rosidin; President Director of PT Sumber Segara Primadaya, Agus Nurwahyudi; and PJB's President Director, Iwan Agung Firstantara. The power plant, which occupies an area of approximately 38.28 hectares, was developed by a PLN subsidiary, PJB, with a 49% share and also developed by PT Sumberenergi Sakti Prima (S2P) with a 51% share.

05


8 MARET 2019
 MARCH 8, 2019

PJB BPWC telah menandatangani perjanjian kerja sama pengembangan riset perikanan tangkap berbasis budidaya (Culture Base Fisheries - CBF) di perairan Waduk Cirata Pusat Riset Perikanan. Perjanjian kerjasama dimaksudkan untuk mengimplementasikan Program Citarum Harum secara berkelanjutan melalui upaya alih profesi dan pemberdayaan masyarakat yang memanfaatkan Waduk Cirata sebagai sumber penghasilan usaha dari Keramba Jaring Apung menjadi usaha perikanan tangkap berbasis budidaya.

PJB CRMU signed a cooperation agreement to develop culture-based fisheries (CBF) in the Cirata Fisheries Research Center. The cooperation agreement aimed to implement "Harum" Citarum Program continuously through efforts to profession change and community empowerment that utilizes the Cirata Reservoir as a source of business income from the floating net cages to aquaculture-based fisheries.

06


11 MARET 2019
 MARCH 11, 2019

Penandatanganan dokumen serah terima antara Direktur Engineering PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali (PT SGPJB), Mr Cui Yukui dan General Manager Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Barat PT PLN (Persero) Bapak Warsono. PT SGPJB selaku perusahaan afiliasi PJB melakukan serah terima GIS 500 kV PLTU Jawa 7 kepada PT PLN (Persero) di PLTU Jawa 7, Kramatwatu, Banten.

The signing of the handover document between the Engineering Director of PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali (PT SGPJB), Mr. Cui Yukui and the General Manager of the West Java Main Transmission Unit of PT PLN (Persero) Mr. Warsono. PT SGPJB as an affiliate of PT PJB handed over the 500 kV GIS Java-7 CFPP to PT PLN (Persero) in the Java-7 CFPP, Kramatwatu, Banten.

07


11-12 MARET 2019
 MARCH 11-12, 2019

Pembukaan Apresiasi Karya Inovasi 2019 bertempat di PJB Academy Kampus Paiton dihadiri oleh Direktur SDM & Administrasi, Suharto, GM PJB Academy, Agus Bagyo Hartadi, serta beberapa juri internal dan eksternal. Acara yang menyelaraskan tema strategis PLN yaitu "SOLID PLN" Securing Primary Energy & Parts, Optimizing Cost Efficiency, Leading Industry Capabilities, Increasing Profit / Margin Contribution, Developing New Edge, berhasil menampung sebanyak 125 usulan ide dan menseleksi menjadi 72 ide.

The opening of the 2019 Innovation Work Appreciation took place at the PJB Academy Campus in Paiton attended by the Director of HC & Administration, Suharto; GM of PJB Academy, Agus Bagyo Hartadi; as well as several internal and external judges. The event that reflected PLN's strategic theme "SOLID PLN" Securing Primary Energy & Parts, Optimizing Cost Efficiency, Leading Industry Capabilities, Increasing Profit/Margin Contribution, Developing New Edge, has managed to create 125 ideas which were selected into 72 ideas.

08


26 MARET 2019
 MARCH 26, 2019

Direktur Keuangan PJB, Tjutju Kurnia didampingi Direktur Utama PT PJB Services A. Djati Prasetyo meresmikan Fire Station Building PJB UBJOM PLTU Tanjung Awar-Awar (UJTA).

PJB's Director of Finance, Tjutju Kurnia, accompanied by the President Director of PT PJB Services, A. Djati Prasetyo, inaugurated Tanjung Awar-Awar CFPP's Fire Station Building.


Tata Kelola Perusahaan
 Good Corporate Governance

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
 Corporate Social Responsibility

Laporan Keuangan Audit
 Audited Financial Statements

Referensi Kriteria AR
 AR Criteria Reference

Peristiwa Penting 2019

Significant Events of 2019



09

26 MARET 2019
MARCH 26, 2019

Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Manajemen PJB dengan Serikat Pekerja PJB.

Collective Labor Agreement (CLA) signing between PJB Management and PJB Workers Union.



10

4 APRIL 2019
APRIL 4, 2019

Satuan Pengamanan PJB yang berjumlah lebih dari 60 personil melakukan Latihan Gabungan (Latgab) di pelataran PLTA Sengguruh. Para personil yang terbagi dalam 14 wilayah pengamanan berbeda tersebut dikumpulkan dalam satu kegiatan Latgab. Tujuannya untuk mendukung terciptanya situasi aman dan kondusif di masing-masing wilayah PLTA UP Brantas yang tersebar di lima Kabupaten berbeda, mulai dari Malang, Blitar, Tulungagung, Madiun, hingga Ponorogo.

PJB's Security Unit of more than 60 personnel conducts a Joint Training in the Sengguruh HPP. The personnel who are divided into 14 different security areas are gathered in one joint training. It aimed to support the creation of a safe and conducive situation in each of Brantas GU's HPP areas, which are spread in five different districts, from Malang, Blitar, Tulungagung, Madiun, to Ponorogo.



11

15 APRIL 2019
APRIL 15, 2019

PJB dan PT PLN (Persero) UIKL Sulawesi menandatangani perjanjian jasa operasi dan pemeliharaan PLTU Anggrek 2x25 MW di Gorontalo, serta perjanjian implementasi EAM di UPRK Minahasa dan UL PLTG Gorontalo.

PJB and PT PLN (Persero) Sulawesi UIKL signed an operation and maintenance agreement for the 2x25 MW Anggrek CFPP in Gorontalo, as well as an EAM implementation agreement in UPRK Minahasa and Gorontalo UL GPP.



12

25 APRIL 2019
APRIL 25, 2019

Peresmian Kantor Perwakilan PJB yang baru diperingati secara sederhana dengan gunting pita, office tour, disertai doa bersama dan ramah tamah. Semula bertempat di Gedung PT PLN Lt.2 Jalan Gatot Subroto kav 18, Kuningan Jakarta Selatan, kemudian berpindah ke Menara Bidakara 2 Lt.16, Jalan Gatot Subroto kav. 71-73, Pancoran, Jakarta Selatan.

The inauguration of the new PJB Representative Office was commemorated by ribbon-cutting ceremony, office tour, accompanied by prayer and togetherness. Initially located at PT PLN Building FL.2 Jalan Gatot Subroto kav 18, Kuningan, South Jakarta, it then moved to Menara Bidakara 2 Lt.16, Jalan Gatot Subroto kav. 71-73, Pancoran, South Jakarta.



13

29 APRIL 2019
APRIL 29, 2019

PJB UBJOM Pacitan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Bupati Kabupaten Pacitan didampingi Forkopinca (Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan) terkait pengembangan Wana Wisata Cagak Telu Pacitan.

PJB's Pacitan OMSBU signed a memorandum of understanding (MoU) with the Regent of Pacitan accompanied by Forkopinca (Regents Communication Forum) related to the development of the Tourism Area in Cagak Telu Pacitan.



14

8 - 9 MEI 2019
MAY 8-9, 2019

Workshop dan FGD Tata Kelola Pembangkit yang berlangsung di Gedung PT PJBS, Sidoarjo. Workshop dan FGD diikuti oleh 70 peserta dari PLN, Indonesia Power dan PJB. Mereka merupakan asset operator dan asset manager pembangkit perwakilan dari seluruh regional PLN. Acara ini menjadi ajang sharing knowledge terkait pengelolaan unit. Peserta memaparkan implementasi tata kelola di unitnya dan mendiskusikan permasalahan serta ide-ide baru untuk perbaikan ke depan. Dalam acara yang diadakan oleh PLN ini, PJB menghadirkan ahli dari masing-masing pilar tata kelola pembangkit.

Workshop and FGD of Power Plant Management which took place at PT PJBS Office Building, Sidoarjo. The workshop and FGD were attended by 70 participants from PLN, Indonesia Power and PJB. They are the asset operators and asset managers of power plant representative from all PLN regions. This event was a place to share knowledge related to unit management. Participants explained the implementation of governance in their units and discussed problems and new ideas for future improvement. During this event, PJB presented experts from each of the power plant governance pillars.



15

15 MEI 2019
MAY 15, 2019

Peresmian proyek remotisasi sistem yaitu Brantas Remotisasi Tanpa Operator (RE-TRO) merupakan sistem pengoperasian pembangkit dari jarak jauh yang dikembangkan oleh UP Brantas sejak tahun 2017. Sistem pengoperasian ini telah berhasil menjadikan kontrol sistem di 13 PLTA menjadi terpusat pada 1 ROC.

The Inauguration of the system remotization project, namely Brantas Remote Operation (RE-TRO) is a remote plant operating system developed by Brantas GU since 2017. This operating system has succeeded in making the control system in 13 hydropower stations centralized in 1 ROC.



16

23 JUNI 2019
JUNI 23, 2019

Delapan ribu orang di 36 lokasi pada 33 kecamatan di sepanjang aliran Sungai Ciliwung melakukan aksi bersih sungai (bebersih) secara serentak. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya memimpin dan turut serta dalam kegiatan ini di Yayasan Bambu Indonesia, Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Bebersih Ciliwung diadakan sebagai rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2019. Aksi kampanye serta edukasi lingkungan ini melibatkan sejumlah pihak, diantaranya komunitas peduli Ciliwung, masyarakat, Pemda, instansi pemerintah, lembaga pendidikan, Pramuka, serta dunia usaha. PJB bersama PLN Grup berpartisipasi dalam aksi Bebersih Ciliwung dengan mengirim 182 peserta.

Eight thousand people from 36 locations in 33 different sub-districts along the Ciliwung River carried out river-cleaning activity simultaneously. The Minister of Environment and Forestry, Siti Nurbaya, led and participated in this activity at the Bambu Indonesia Foundation, Cibinong, Bogor, West Java. Ciliwung cleaning activity was held as a series of commemoration of World Environment Day 2019. The campaign action and environmental education involve a number of parties, including the Ciliwung care community, community, local government, government agencies, educational institutions, Scouts, and the business world. PJB together with the PLN Group participated in Ciliwung cleaning activity by sending 182 participants.





Peresmian kantor administrasi PJB UJLJ-2 di jalan Jemursari, Surabaya, yang mengusung konsep co-working space dengan nuansa nyaman dan dinamis.

The Inauguration of PJB's UJLJ-2 administration office at Jemursari Street, Surabaya, which carries the concept of co-working space with a comfortable and dynamic circumstances.



Peresmian operasi perdana terminal batubara PLTU Jawa 7 oleh Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat PLN, Haryanto W.S. sebagai simbol kesiapan pasokan batubara dalam mendukung pengoperasian PLTU Jawa 7. Pembangkit bagian dari program 35.000 MW itu rencananya akan mulai beroperasi secara komersial untuk mendukung pasokan sistem Jawa - Bali pada Oktober 2019 untuk Unit 1 dan April 2020 untuk Unit 2.

The Inauguration of the first operation of the Java-7 CFPP Coal Terminal by PLN West Java's Regional Business Director, Haryanto W.S., as a symbol of coal supply readiness in supporting the operation of the Java-7 CFPP. The power plant part of the 35,000 MW program is planned to begin commercial operations to support the supply of the Java-Bali system in October 2019 for Unit 1 and April 2020 for Unit 2.



PJB dan PLN menggelar kegiatan Media Family Gathering sebagai salah satu bentuk keseriusan perusahaan dalam upaya menjalin relasi yang baik dengan media. Para jurnalis selanjutnya merupakan bagian dari insan perusahaan.

PJB and PLN held a Media Family Gathering as a form of the company's commitment to the media relation. Journalists should be part of the Company's individual.



Memperingati Hari Mangrove Sedunia Tahun 2019, Pokmaswas Hijau Daun melakukan penanaman 500 bibit mangrove di area Ekowisata Mangrove Hijau Daun, Pulau Bawean. Kegiatan itu melibatkan sekitar 328 siswa dan mahasiswa. Selain menghijaukan pantai, dilakukan juga aksi bersih-bersih di sepanjang pesisir Pantai Daun. Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Hijau Daun merupakan mitra PJB UP Gresik dalam mengembangkan Ekowisata Mangrove Hijau Daun. Ecowisata ini mengintegrasikan program konservasi mangrove, terumbu karang dan penyu, program eco-edu-wisata mangrove, program pengelolaan sampah terpadu, serta program alih fungsi lahan sawah terdegradasi menjadi lahan pertanian garam. Hari Mangrove Sedunia diperingati setiap tanggal 26 Juli.

Commemorating World Mangrove Day 2019, Pokmaswas Hijau Daun planted 500 mangrove seeds in Hijau Daun's Mangrove Ecotourism area, Bawean Island. The activity involved around 328 students. Besides greening the beach, the clean-up activity is also carried out along the coast of Daun Beach. Hijau Daun's Oversight Community (POKMASWAS) is a partner of PJB's Gresik GU in developing Hijau Daun's Mangrove Ecotourism. This ecotourism program integrates conservation programs for mangroves, coral reefs and turtles, an eco-edu-mangrove tourism program, an integrated waste management program, and a conversion program for degraded paddy fields to a salt farm. World Mangrove Day is celebrated every July 26.

21



12 SEPTEMBER 2019
SEPTEMBER 12, 2019

PJB menggelar acara Supplier Gathering 2019 di Bandung dengan menampilkan kesenian angklung kelompok kesenian binaan CSR PJB BPWC. Ini merupakan ajang pentas pertama kali kelompok tersebut tampil dalam acara yang cukup besar, setelah diresmikan pada tanggal 29 Agustus 2019 lalu. Angklung merupakan kesenian Jawa Barat yang sudah diresmikan dan dikukuhkan oleh UNESCO sebagai mata budaya Indonesia yang menjadi warisan budaya dunia.

PJB held the 2019 Supplier Gathering in Bandung by presenting the angklung arts of the PJB BPWC CSR-manifested arts group. This was the first stage the group performed in a quite large event, after it was inaugurated on August 29, 2019. Angklung is an art of West Java that has been inaugurated and confirmed by UNESCO as an Indonesian cultural instrument that has become a world cultural heritage.

23



26 SEPTEMBER 2019
SEPTEMBER 26, 2019

Prof. Rhenald Kasali diundang dalam seminar khusus bagi jajaran Direksi dan seluruh Senior Leaders PJB. Ia menjadi mentor yang memberikan perspektif baru agar para petinggi PJB dapat mengembangkan pola kepemimpinannya, dengan tema "Marketing Effective in Disruption Era for Electricity Industry".

Prof. Rhenald Kasali was invited to a special seminar for the Board of Directors and all PJB Senior Leaders. He became a mentor who provided a new perspective so that PJB officials could develop their leadership patterns, with the theme "Marketing Effective in the Disruption Era for Electricity Industry".

22



12-13 SEPTEMBER 2019
SEPTEMBER 12-13, 2019

PJB UP Paiton menggelar festival 1000 cangkir kopi untuk mengenalkan kopi Lang Baling pada masyarakat luas. Acara digelar di kawasan Pantai Bhinor, kawasan wisata binaan CSR UP Paiton. Kopi produksi Desa Andung Biru, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo ini pun memiliki cita rasa yang khas. Lang Baling disematkan sebagai nama kopi produksi masyarakat binaan CSR UP Paiton itu. Pengolahannya memanfaatkan energi listrik yang dihasilkan dari Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Andung Biru. Itulah mungkin yang melatari nama Lang Baling. Nama yang mengingatkan pada baling-baling pemutar PLTMH, sumber listrik andalan bagi Desa Andung Biru. Sebanyak 1000 cangkir kopi disajikan secara cuma-cuma bagi para pengunjung, dengan menghadirkan pameran 11 produk kelompok binaan CSR yang lain.

PJB Paiton GU held a 1000-cup-coffee festival to introduce Lang Baling coffee to the wider community. The event was held in the Bhinor Coast area, Paiton GU's CSR-manifested tourist areas. Coffee produced by Andung Biru Village, Tiris District, Probolinggo Regency also has a distinctive taste. Lang Baling is pinned as the name of coffee produced by Paiton GU's CSR-manifested community. The processing utilizes electrical energy generated from Andung Biru Micro-Hydro Power Plant (MHPP). It originates the name Lang Baling. The name is reminiscent of MHPP propeller rotors (Blaing-Baling), a reliable source of electricity for Andung Biru Village. 1000 free cups of coffee were served only for visitors, by presenting 11 other CSR group's products.



Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan Audit
Audited Financial Statements



Referensi Kriteria ARS
ARS Criteria Reference



24

3 OKTOBER 2019
OCTOBER 3, 2019

PJB merayakan ulang tahun yang ke-24 dengan semangat senantiasa membangun dan mengokohkan pilar-pilar perusahaan hingga dapat tumbuh, berkembang dengan berbagai prestasi dan pencapaiannya saat ini. Pada momen peringatan HUT PJB ke-24 di Kantor Pusat PJB Surabaya, Direktur Utama PJB, Iwan Agung Firstantara mengajak karyawan berefleksi melihat perjalanan perusahaan di masa lalu, saat ini dan tantangan ke depan. Seluruh unit dan anak perusahaan PJB yang tersebar di berbagai wilayah nusantara mengikuti acara ini melalui video conference.

PJB celebrates its 24th anniversary with the spirit to consistently build and strengthen the pillars of the company to grow, develop with today's various achievements. During PJB's 24th anniversary at PJB Head Office in Surabaya, PJB's President Director, Iwan Agung Firstantara, invited employees to reflect on the company's past, current and future challenges. All PJB units and subsidiaries spread across various regions joined the event through video conferencing.



25

9 OKTOBER 2019
OCTOBER 9, 2019

Peresmian UPHB Calibration Laboratorium (U-LAB) oleh Direktur Utama PJB didampingi oleh Direktur SDM dan Direktur Operasi-2 PJB. Laboratorium Kalibrasi pertama PJB ini telah mendapatkan akreditasi dari KAN (Komite Akreditasi Nasional) pada tanggal 2 September 2019 dengan nomor LK-284-IDN.

The inauguration of UPHB Laboratory Calibration (U-LAB) by the Principal Director of PJB was accompanied by PJB's Director of HC and Director of Operations-2. This first PJB Calibration Laboratory was accredited by KAN (National Accreditation Committee) on September 2, 2019, No. LK-284-IDN.



26

14 OKTOBER 2019
OCTOBER 14, 2019

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara PJB UBJOM Kaltim Teluk dengan Pemerintah Kota Balikpapan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran di lingkup PLTU Teluk Balikpapan.

The signing of the Memorandum of Understanding (MoU) between PJB OMSBU of Kaltim Teluk with Balikpapan Government in the Prevention and Management of Fire Disasters around Teluk Balikpapan CFPP.



27

18 OKTOBER 2019
OCTOBER 18, 2019

PJB dan PT PLN (Persero) UIKL Sulawesi menandatangani kontrak jasa Operasi dan Maintenance (O&M) PLTU Anggrek 2x25 MW dan PLTU Ampara 2x3 MW di Kantor PLN UP3 Gorontalo, Sulawesi.

PJB and PT PLN (Persero) Sulawesi UIKL signed an Operation and Maintenance (O&M) Contract for the 2x25 MW Anggrek CFPP and 2x3 MW Ampara CFPP at PLN's GU-3 Office Gorontalo, Sulawesi.

28



29-30 OKTOBER 2019
OCTOBER 29-30, 2019

PJB kembali menggelar seminar dan pameran PJB CONNECT (Conference & Exhibition of Technology) 2019 yang merupakan forum untuk mempertemukan berbagai pihak yang terlibat dalam dunia kelistrikan baik dari dalam maupun luar negeri. Sejumlah ahli dan vendor dari 12 negara berpartisipasi dalam acara tahunan ini. Mereka berbagi pengetahuan dan teknologi terkini untuk menghadapi tantangan energi di masa mendatang dan operational excellent di bidang pembangkitan.

PJB held a seminar and exhibition of PJB CONNECT (Conference & Exhibition of Technology) 2019 as a forum to bring together various parties involved in the electricity world both from nationally and internationally. Several experts and vendors from 12 countries participated in this annual event. They shared the latest knowledge and technology to face the future challenges of energy and operational excellence in the field of power plant.

29



13 NOVEMBER 2019
NOVEMBER 13, 2019

PJB menggelar acara PJB Talks Seminar bagi para Change Agents PJB dari seluruh unit. Acara dengan peserta ratusan insan muda PJB ini menghadirkan beberapa pembicara muda yang sarat pengalaman, seperti Yoris Sebastian, founder OMG Consulting serta kreatif thinker; Gisneo Pratata, seorang pemuda berusia 22 tahun yang telah menjadi Vice President of IT Citilink; Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur; serta Wisnoe Satrijono, EVP Change Management PT PLN Kantor Pusat. Selain insan PJB, Change Agents dari PLN UID Jawa Timur juga hadir dalam kesempatan ini.

PJB held a PJB Talks Seminar for PJB Change Agents from all units. The event which was participated by hundreds of PJB juniors presented several junior speakers who were full of experience, such as Yoris Sebastian, founder of OMG Consulting and kreatif thinkers; Gisneo Pratata, a 22-year-old young man who has become Vice President of IT Citilink; Emil Dardak, Deputy Governor of East Java; and Wisnoe Satrijono, EVP Change Management of PT PLN Head Office. Besides PJB employees, Change Agents from PLN UID East Java also attended the event.

30



13 DESEMBER 2019
DECEMBER 13, 2019

Penandatanganan berita acara antara PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali (PT SGJJB) dengan PT PLN (Persero) bahwa PLTU Jawa 7 1x1.000 MW telah berhasil dioperasikan secara komersial (commercial operation date/COD) pada Jumat 13 Desember 2019. Pembangkit terbesar dan pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi boiler Ultra Super Critical (USC) ini tercatat memasuki masa COD lima bulan lebih cepat dari yang ditargetkan. PLTU Jawa 7 Unit 1 memasuki COD setelah berhasil menuntaskan masa uji coba operasi selama 160 jam.

The signing of the minutes between PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali (PT SGJJB) and PT PLN (Persero) that the Java-7 1x1,000 MW CFPP has operated commercially (COD) on Friday, December 13, 2019. The largest and first power plant in Indonesia that uses the Ultra Super Critical (USC) boiler technology, it is noted that the COD is five months ahead of the target. The Java-7 CFPP Unit 1 operates after successfully completing a 160-hour operating trial period.



Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan Audit
Audited Financial Statements

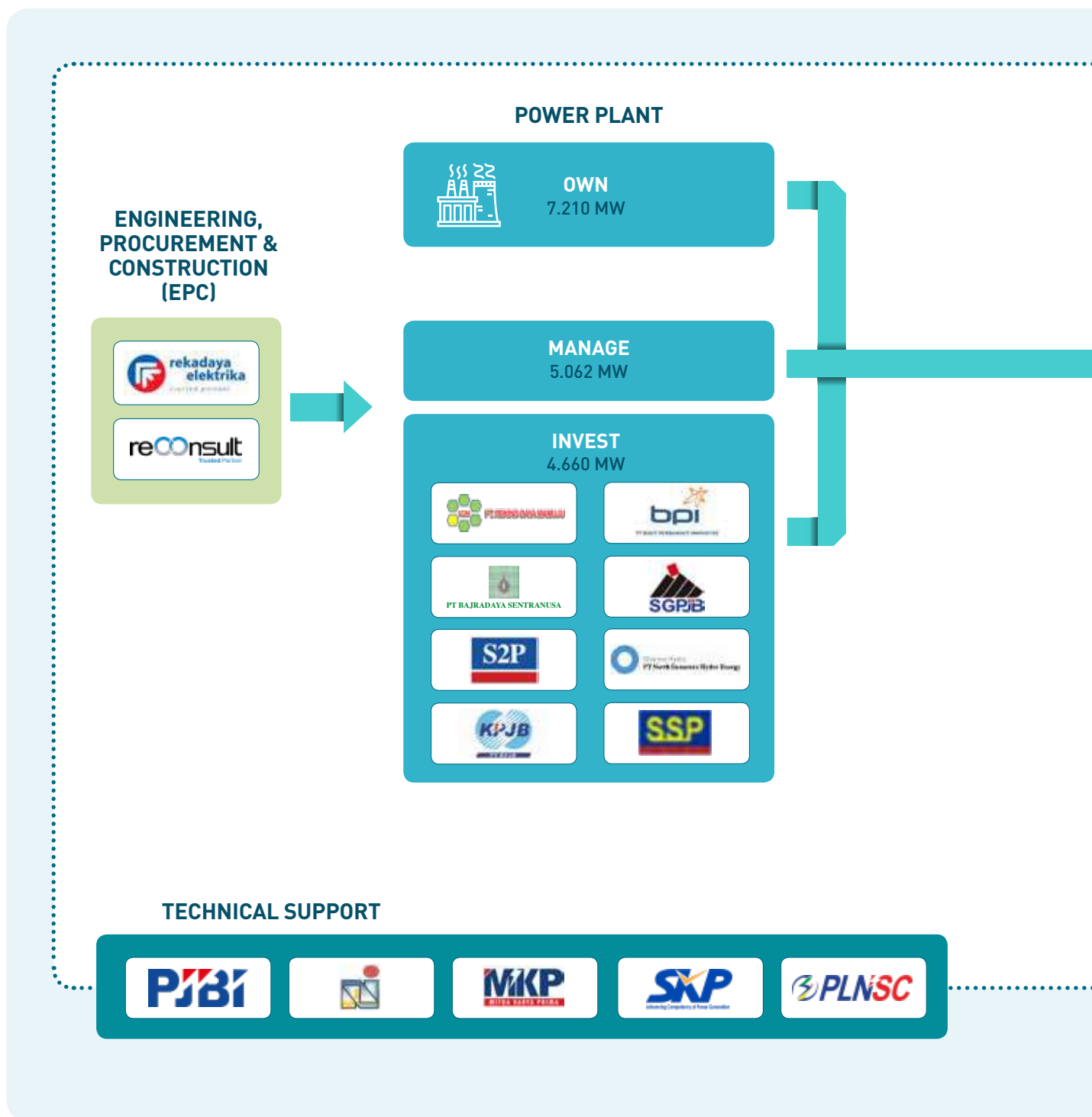


Referensi Kriteria AR
AR Reference

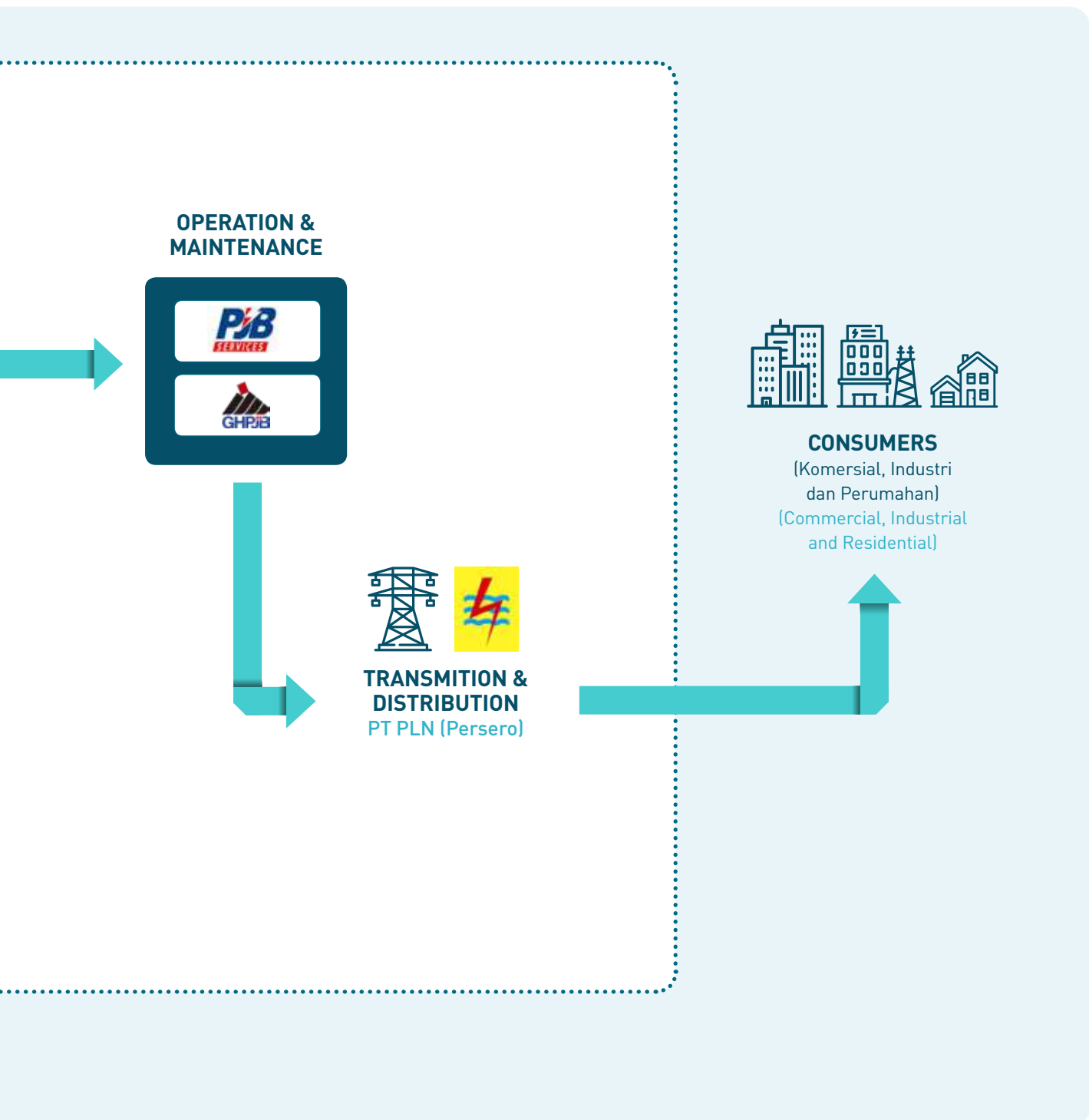
SKEMA BISNIS PENYEDIAAN ENERGI LISTRIK TERINTEGRASI PJB GRUP

BUSINESS PLAN FOR INTEGRATED ELECTRICITY SUPPLY BY PJB GROUP

PJB dan Entitas Anak serta Afiliasinya sebagai bagian dari *holding* grup PT PLN (Persero) dalam mendukung kelistrikan nasional yang memberikan nilai tambah. Penyediaan energi listrik yang berkualitas dan handal dapat terjadi berkat dukungan dari Entitas Anak dan Afiliasi dalam bidang operasional dan keahlian bidang rekayasa teknik (EPC), pembangkit tenaga listrik baik yang dimiliki sendiri, dikelola ataupun berupa investasi, penyediaan jasa operasi & pemeliharaan, penyediaan suku cadang pembangkit, pendanaan, penyediaan SDM untuk jasa operasi & pemeliharaan, serta sertifikasi kompetensi SDM ketenagalistrikan.



PJB and its Subsidiaries and Affiliates are in the holding group of PT PLN (Persero) to support national electricity that provides added value. The high-quality and reliable electricity supply is supported by Subsidiaries and Affiliates in the field of operations and Engineering, Procurement and Construction (EPC); power plants both owned, managed or invested; the operations & maintenance services; the supply of powerplant spare parts; funding; HR Vendors for operations & maintenance services; and HR Certification in Electrical Competency.





Pendahuluan
Introduction



Laporan Manajemen
Management Report

LAPORAN MANAJEMEN MANAGEMENT REPORT



Profil Perusahaan
Company Profile



Tinjauan Pendukung Bisnis
Business Support Review



Analisis dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis



Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan Audit
Audited Financial Statements



Referensi Kriteria ARK
ARK Criteria Reference

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

REPORT OF BOARD OF COMMISSIONERS



Sriyono D. Siswoyo
Komisaris Utama
President Commissioner

Dewan Komisaris mendukung setiap langkah Direksi dalam meningkatkan efisiensi operasional yang tercermin dari menurunnya beban usaha tahun 2019 sebesar 9,53% menjadi Rp31.062.892 juta. Disamping itu, Direksi perlu terus memperkuat strategi yang dilakukan dengan meningkatkan kepuasan pelanggan dan pertumbuhan *revenue mix* dengan mengembangkan horizon bisnis baru, meningkatkan *strategic partnership*, memperkuat integrasi sistem manajemen dan kompetensi sumber daya manusia guna mewujudkan aspirasi untuk menjadi perusahaan energi global kelas dunia (*global energy company*).

The Board of Commissioners supports every initiative by the Board of Directors in improving operational efficiency as reflected in the decreased operating expenses in 2019 by 9.53% which became Rp31,062,892 million. Also, the Board of Directors is required to continuously strengthen the strategy by increasing customer satisfaction and revenue mix growth through the development of new business horizons, strategic partnerships, management system integration, and human resource competencies to become a world-class global energy company.

Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nyalah, PJB dapat melalui tahun 2019 dengan berbagai pencapaian penting korporasi di tengah tantangan yang dihadapi dan tuntutan beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Pada kesempatan ini, kami, Dewan Komisaris menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pengawasan kepada Pemegang Saham dan seluruh pemangku kepentingan atas kepengurusan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk tahun buku 2019.

Dear Shareholders and Stakeholders,

In the name of God, the Merciful, the Compassionate, and praise be to God in which by His grace, PJB was able to pass 2019 with significant corporate achievement amid challenges and demands to adapt to the changes in business environments. In this report, we as the Board of Commissioners, submit the implementation of supervisory tasks to the Shareholders and all stakeholders regarding management and recommendation to the Board of Directors for the fiscal year 2019.



Di tengah gejolak perekonomian global yang belum sepenuhnya stabil dimana perekonomian global masih berjalan lambat dan dibayangi oleh berbagai risiko dan ketidakpastian. Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2019 tercatat 5,02% melambat bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya sebesar 5,17% dengan tingkat inflasi cukup rendah, berada pada level 2,72%. Adapun tingkat kurs Rupiah terhadap Dolar menguat hingga akhir Desember 2019 yaitu mencapai Rp13.900/USD. Faktor-faktor tersebut di atas tentunya mempengaruhi perkembangan industri kelistrikan nasional, terutama dalam mengelola kinerja PJB agar tetap dapat memberikan yang terbaik bagi Pemegang Saham maupun segenap pemangku kepentingan lainnya.

Atas nama Dewan Komisaris, perkenankan kami menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pengawasan kepada Direksi PJB dalam menjalankan kegiatan usaha sepanjang tahun 2019. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris ini mencakup aspek penilaian atas kinerja Direksi dan dasar penilaiannya, tata cara dan frekuensi pemberian nasihat kepada Direksi, pandangan atas prospek usaha yang disusun Direksi, pandangan atas penerapan tata kelola Perusahaan termasuk pengelolaan terhadap *Whistleblowing System* (WBS), perubahan komposisi Dewan Komisaris dan alasan perubahannya.

Amid global economic turmoil that is still unstable where the global economy is still running slowly and followed by various risks and uncertainties. The national economic growth of 2019 was recorded at 5.02% slowing when compared to the previous year's economic growth of 5.17% with a fairly low inflation rate, at the level of 2.72%. Rupiah-to-Dollar exchange rate strengthened until the end of December 2019, reaching Rp13,900/USD. Those factors certainly affect the development of the national electricity industry, especially in managing PJB performance to continuously provide the best for all shareholders and stakeholders.

On behalf of the Board of Commissioners, we submit the accountability report on the implementation of supervisory duties towards the Board of Directors of PJB's business activities throughout 2019. The Board of Commissioners' supervisory report includes aspects of the Board of Directors' performance assessment and the indicator of the assessment, procedures, and frequency of recommendations to the Board of Directors reviews on business prospects compiled by the Board of Directors reviews on the implementation of corporate governance including management of the *Whistleblowing System* (WBS), the change in the composition of the Board of Commissioners, and its background.

Penilaian Atas Kinerja Direksi dan Dasar Penilaiannya Board of Directors' Performance Assessment and Indicators

Di tengah kondisi yang penuh tantangan, PJB telah berhasil menutup tahun 2019 dengan pencapaian dan prestasi yang menggembirakan. Hal tersebut tercermin dari pencapaian indikator kinerja keuangan maupun operasional PJB yang sebagian besar telah mencapai target sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan KPI Perusahaan 2019. Dasar penilaian kinerja Direksi adalah *Key Performance Indicator* (KPI) sesuai Kontrak Manajemen tahun 2019 yang ditandatangani oleh Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham, mencakup indikator penilaian (1) fokus pelanggan, (2) efektivitas produk dan layanan, (3) fokus tenaga kerja, (4) keuangan dan pasar serta (5) kepemimpinan, tata kelola dan tanggung jawab kemasyarakatan.

Secara umum, Dewan Komisaris menilai kinerja Direksi dalam mengelola PJB selama tahun 2019 adalah "Baik" yang tercermin dari tingkat kesehatan Perusahaan berada pada level "AA" dengan skor 93,17 dan termasuk dalam kategori "Sehat". Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah menjalankan pengelolaan PJB sesuai dengan KPI Perusahaan 2019, RKAP dan Kontrak Manajemen 2019, serta selaras dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan.

Amid challenging conditions, PJB has succeeded in overcoming 2019 with satisfying achievements. This is reflected in the achievement of PJB's financial and operational performance indicators with mostly achieving targets from the 2019 Annual Budget and Operational Plan (ABOP) and KPI of the Company. The basis for assessing the performance of the Board of Directors is the *Key Performance Indicator* (KPI) based on the 2019 Management Contract signed by the Board of Directors, Board of Commissioners and Shareholders includes assessment indicators (1) customer focus, (2) effectiveness of products and services, (3) workforce focus, (4) finance and market and (5) leadership, corporate governance, and corporate social responsibility.

In general, the Board of Commissioners assesses the performance of the Board of Directors in managing PJB during 2019 is "Good" reflected by the Company's soundness level with "AA" or 93.17 scores which are categorized as "Sound". The Board of Commissioners ensures that the Board of Directors has performed PJB management following the 2019 KPI, the 2019 ABOP and Management Contract, as well as the Company's Long-Term Plan.

Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan atas pengelolaan Perusahaan melalui *review* kinerja keuangan dan operasional secara berkala termasuk isu penting terkait di bidang ekonomi, lingkungan, sosial maupun perubahan peraturan perundang-undangan. Sesuai hasil evaluasi atas kinerja operasional, Dewan Komisaris mengamanatkan Direksi untuk terus memperkuat landasan dan menggali potensi yang memungkinkan semakin meningkatnya sinergi antar grup dalam PJB.

Realisasi produksi energi listrik tahun 2019 mencapai sebesar 23.312,99 GWh atau 90,91% dari target RKAP 2019 sebesar 26.126,80 GWh dan menurun 9,81% dibandingkan tahun 2018 sebesar 25.847,33 GWh, terutama dipengaruhi oleh menurunnya produksi pembangkit berbahan bakar gas terkait kebutuhan sistem (*dispatch*) dan pembangkit berbahan bakar air dengan pola air yang direncanakan normal ternyata pola kering, sehingga mengurangi produksi PLTA. Adapun pemakaian bahan bakar untuk pembangkit atau bauran energi primer di tahun 2019 masih didominasi oleh pembangkit berbahan bakar gas alam sebesar 139.852 BBTU; batubara sebanyak 3.293.951 ton; HSD sebesar 24.223 kL dan MFO sebanyak 33.589 kL. Dewan Komisaris mendukung sepenuhnya upaya Direksi dalam meng-EBT-kan PLTU batubara dengan metode *co-firing* dalam rangka meningkatkan bauran energi primer yang aman dan ramah lingkungan berbasis energi terbarukan (EBT).

Pencapaian indikator kinerja operasi PJB tahun 2019 sangat baik, yang ditunjukkan dengan stabilnya kinerja pembangkit yang dikelola, mencakup faktor keandalan (*Equivalent Availability Factor/EAF*), faktor gangguan (*Equivalent Forced Outage Rate/EFOR*), pemakaian bahan bakar, dan ketepatan pelaksanaan serta durasi pemeliharaan. Nilai EAF tahun 2019 mencapai sebesar 95,06% atau 101,83% dari target RKAP 2019 sebesar 93,35% dan lebih tinggi dari realisasi tahun 2018 sebesar 94,09% terutama disebabkan oleh jumlah *overhaul* yang jatuh tempo di tahun 2019 dan pelaksanaan pekerjaan dengan status *Maintenance Outage* lebih sedikit daripada tahun lalu sehingga tidak membutuhkan unit untuk *shutdown*. Adapun nilai SOF tahun 2019 mencapai sebesar 4,22% atau 116,09% dari target RKAP 2019 sebesar 5,03% dan lebih baik dari realisasi tahun 2018 sebesar 4,42% disebabkan oleh adanya *overhaul* yang jatuh tempo lebih sedikit dibandingkan dengan lalu dan pelaksanaannya lebih cepat dari yang direncanakan. Pencapaian *Equivalent Forced Outage Rate (EFOR)* tahun 2019 sebesar 0,80% atau 155,91% dari target RKAP 2019 dan lebih baik dari realisasi tahun 2018 sebesar 1,01% terutama dipengaruhi oleh pelaksanaan *overhaul*, *predictive* dan preventif *maintenance* yang efektif sehingga dapat meminimalisir terjadinya *breakdown* atau gangguan selama interval *overhaul*.

The Board of Commissioners performs the supervisory function over the management of the Company through periodic financial and operational performance reviews including important issues related to the economic, environmental, social aspects as well as regulatory changes. By the results of the evaluation of operational performance, the Board of Commissioners assigns the Board of Directors to continue to develop and explore to increase the synergy in PJB Group.

The realization of electricity production in 2019 reached 23,312.99 GWh or 90.91% of the 2019 ABOP target of 26,126.80 GWh and decreased by 9.81% compared to 2018 by 25,847.33 GWh, mainly influenced by the decline in gas-fired power plant production related to the dispatch system requirement and water-fueled power plant with normal planned water patterns turned out to be dry patterns that result in the reduced hydro-electric power plant production. The fuel consumption for power plants or primary energy mix in 2019 is still dominated by natural gas-fueled power plants at 139,852 BBTU; 3,293,951 tons of coal; HSD of 24,223 kL and MFO of 33,589 kL. The Board of Commissioners fully supports the efforts of the Board of Directors in coal-fired power plants using the co-firing method to improve the mix of primary energy that is safe and environmentally friendly based on renewable energy.

PJB's performance achievement in 2019 is excellent, as indicated by the stable performance of the managed plants, including the Equivalent Availability Factor/EAF, the Equivalent Forced Outage Rate/EFOR, fuel consumption, and the accuracy and duration of maintenance. The EAF value in 2019 reached 95.06% or 101.83% of the 2019 ABOP target of 93.35% and was higher than the realization in 2018 of 94.09% mainly due to the number of overhauls matured in 2019 and the work with the status of Maintenance Outage is shorter than the previous year; therefore, it doesn't require any unit to shut down. The SOF value of 2019 reached 4.22% or 116.09% of the 2019 ABOP target of 5.03% and is better than the realization of 2018 of 4.42% due to overhaul due less than before and the implementation was faster than planned. Achievement of the Equivalent Forced Outage Rate (EFOR) in 2019 of 0.80% or 155.91% of the 2019 ABOP target and better than the realization in 2018 with 1.01% was mainly influenced by the implementation of effective overhaul, predictive and preventive maintenance so that it can minimize the breakdown or interruption during the overhaul interval.



Adapun realisasi penjualan energi listrik pada tahun 2019 mencapai sebesar 22.404,11 GWh atau 89,73% dari target RKAP 2019 sebesar 24.968,11 GWh, dibandingkan tahun 2018 sebesar 24.751,71 GWh menurun 9,48%. Hal tersebut terutama disebabkan karena optimalisasi BPP oleh UIP2B sehingga ada beberapa unit pembangkit yang diposisikan *standby* dan beroperasi sebagai peaker saja. Untuk gangguan yang bersifat teknis, Dewan Komisaris berpendapat bahwa Direksi perlu terus melakukan upaya perbaikan dan meningkatkan keandalan pembangkit serta berkoordinasi dengan semua instansi terkait guna mendapat dukungan PLN terkait gangguan pasokan gas dan menjaga kesinambungan usaha.

Terkait dengan pencapaian kinerja keuangan selama tahun 2019, PJB mencapai pertumbuhan kinerja keuangan yang positif dilihat dari segi perolehan laba tahun berjalan dibandingkan tahun lalu. Walaupun pendapatan usaha tahun 2019 mencapai 89,44% dari target RKAP 2019 dan menurun 2,60% menjadi Rp39.757.951 juta dari tahun 2018 sebesar Rp40.821.026 juta, terutama disebabkan oleh penjualan energi listrik yang lebih rendah karena menurunnya produksi PJB, dalam rangka mendukung optimasi di sistem Jawa Bali. Perolehan pendapatan usaha tersebut berasal dari kontribusi penjualan tenaga listrik sebesar 84,72%, jasa operasi dan pemeliharaan sebesar 11,12%, konstruksi sebesar 3,51%, dan pendapatan lainnya sebesar 0,65%. Namun demikian, Direksi telah berhasil melakukan eksekusi program efisiensi dimana beban usaha tahun 2019 berhasil ditekan, dan mengalami penurunan sebesar 9,53% dari tahun sebelumnya. Dewan Komisaris mendukung setiap langkah Direksi dalam program efisiensi yang tercermin dari menurunnya beban usaha menjadi sebesar Rp31.062.892 juta dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp34.334.180 juta. Penurunan terutama disebabkan oleh penurunan beban bahan bakar secara signifikan akibat menurunnya penggunaan BBM. Hal tersebut mendorong peningkatan perolehan laba tahun berjalan 2019 sebesar 12,60% menjadi Rp6.663.322 juta dari tahun 2018 sebesar Rp5.917.432 juta, dan mencapai 107,24% dibandingkan dengan target RKAP 2019.

Kami sependapat dengan Direksi bahwa PJB perlu terus memperkuat strategi yang dilakukan dengan meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan, meningkatkan pertumbuhan *revenue mix* untuk mengoptimalkan pendanaan pengembangan usaha, meningkatkan *strategic partnership* dan pemasaran produk, memperkuat integrasi sistem manajemen dan implementasi *Enterprise Risk Management* (ERM), dan memperkuat kesiapan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia. Kami mendukung sepenuhnya semangat kerja yang fokus mewujudkan aspirasi untuk menjadi perusahaan energi global kelas dunia (*global energy company*) di masa mendatang.

Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada Direksi beserta jajaran manajemen di bawahnya atas berbagai prestasi yang diperoleh PJB sepanjang tahun 2019 yang menunjukkan bahwa eksistensi PJB dalam industri kelistrikan nasional memiliki peranan penting.

The realization of electricity sales in 2019 reached 22,404.11 GWh or 89.73% of the 2019 ABOP target of 24,968.11 GWh, compared to 2018 of 24,751.71 GWh, decreasing 9.48%. This was mainly due to the optimization of cost of electricity supply by UIP2B so that there were several generating units which were standby and in the peaker mode. For technical outage, the Board of Commissioners believes that the Board of Directors is required to improve the reliability of the plant and coordinate with all relevant agencies to be supported by PLN concerning gas supply availability and business continuity.

Related to the achievement of the financial performance of 2019, PJB achieved positive financial performance growth in terms of earnings for the year compared to the previous year. Although the revenue in 2019 reached 89.44% of the 2019 ABOP target and decreased 2.60% to Rp39,757,951 million from 2018 of Rp40,821,026 million, mainly due to lower electricity sales due to PJB's lower production, to support optimization in the Java-Bali system. The revenue was contributed by electricity sales by 84.72%, operation and maintenance services by 11.12%, construction by 3.51%, and other revenues by 0.65%. However, the Board of Directors has successfully carried out an efficiency program in which operating expenses in 2019 were successfully suppressed, and decreased by 9.53% from the previous year. The Board of Commissioners supports every initiative by the Board of Directors for the efficiency program which is reflected in the decreased operating expenses to Rp31,062,892 million compared to the previous year of Rp34,334,180 million. The decrease was mainly supported by the significant decrease in fuel consumption. This led to an increase in profit for the year of 2019 by 12.60% to Rp6,663,322 million from 2018 of Rp5,917,432 million and reached 107.24% compared to the 2019 ABOP target.

We agree with the Board of Directors that PJB should continuously enhance the strategy by increasing operational efficiency and customer satisfaction, increasing revenue mix growth to optimize funding for business development, increasing strategic partnership and product marketing, strengthening management system integration and implementing Enterprise Risk Management (ERM), and strengthen the readiness of the number and competence of human resources. We fully support the spirit of work that is focused on becoming a world-class global energy company in the future.

The Board of Commissioners appreciates the Board of Directors as well as its committees for the various achievements in 2019 which shows that PJB's existence in the national electricity industry has an important role.

Prestasi tersebut antara lain terkait dengan bidang kinerja ekselen, tata kelola perusahaan, lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan antara lain dengan dinobatkannya PJB sebagai *Industry Leader* versi *Malcolm Baldrige*, meraih peringkat 1 *Annual Report Award* 2019 kategori *Private Non Keuangan Non Listed*, memperoleh penghargaan *Best Companies to Work for in Asia* 2019, dan *Asia Responsible Enterprise Awards* 2019 serta 2 PROPER Emas.

Seiring meningkatnya kompleksitas dinamika industri listrik nasional, Dewan Komisaris semakin meningkatkan fungsi pengawasan dan penasihat yang diperlukan terutama dalam mendorong peningkatan kinerja perusahaan secara berkelanjutan. Dewan Komisaris terus memonitor Direksi untuk melakukan pengembangan usaha dengan tetap mengedepankan aspek pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku maupun prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

These achievements are related to the fields of excellence in performance, corporate governance, environment, and corporate social responsibility represented in PJB awarded as *Industry Leader* by *Malcolm Baldrige*, 1st winner in the 2019 *Annual Report Award* in the category of *Non-Listed Non-Financial Private Company* and the *Best Companies To Work For in Asia* 2019, *Asia Responsible Enterprise Awards* 2019, and 2 Gold PROPERs.

Along with the increasing complexity in the national electricity industry, the Board of Commissioners emphasizes the supervisory and advisory functions required, especially in promoting sustainable company performance. The Board of Commissioners continues to monitor the Board of Directors to conduct business development while maintaining aspects of risk management, compliance with applicable regulations, and the principles of Good Corporate Governance.

Tata Cara dan Frekuensi Pemberian Nasihat Kepada Direksi Recommendation Procedure and Frequency to the Board of Directors

Dewan Komisaris secara berkesinambungan melakukan pemantauan atas jalannya Perusahaan yang dilaksanakan oleh Direksi beserta jajarannya yang mengacu pada *Key Performance Indicator* (KPI) Korporat. Selain itu, Dewan Komisaris juga memberikan saran dan masukan yang disampaikan dalam Rapat Dewan Komisaris yang dihadiri oleh Direksi atau Rapat Pengawasan. RKAP dan KPI Perusahaan merupakan salah satu acuan penting bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan, dengan melakukan evaluasi atas pencapaian RKAP melalui telaah terhadap Laporan Manajemen (triwulanan) dan Laporan Kinerja (bulanan) secara berkala dalam Rapat Pengawasan bulanan.

Dewan Komisaris telah memberikan arahan kepada Direksi dalam berbagai aspek operasional maupun finansial serta pengembangan usaha Perusahaan, termasuk pengembangan Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi. Fungsi pengawasan dan penasihat Dewan Komisaris kepada Direksi dilakukan baik secara formal dalam Rapat, maupun secara informal serta melalui kunjungan lapangan ke unit bisnis bersama dengan Komite. Selama tahun 2019, Dewan komisaris telah mengadakan rapat internal Dewan Komisaris dan Rapat Pengawasan bersama dengan Direksi masing-masing sebanyak 12 (dua belas) kali.

Disamping itu, Dewan Komisaris juga melakukan evaluasi atas kinerja operasional pembangkit secara bulanan dan mendorong upaya Direksi dalam peningkatan aset tetap melalui pengalihan aset PLN yang dikonversi menjadi piutang serta memantau pelaksanaan sistem pengendalian internal dan perkembangan pelaksanaan *risk based audit*.

The Board of Commissioners continuously monitors the Company's operation managed by the Board of Directors and their staff that refers to the Corporate Key Performance Indicator (KPI). Also, the Board of Commissioners provides advice and recommendation submitted during the Board of Commissioners Meeting attended by the Board of Directors or the Supervisory Meeting. The Company's ABOP and KPI are important references for the Board of Commissioners in performing the supervisory function, by evaluating the achievement of the ABOP through a review of Management Reports (quarterly) and Performance Reports (monthly) periodically in monthly Supervisory Meetings.

The Board of Commissioners has provided directives to the Directors in various operational and financial aspects as well as the business development of the Company, including the development of Subsidiaries and Affiliates. The supervisory and advisory function of the Board of Commissioners to the Board of Directors is presented both formally in the Meeting, as well as informally and through business visits to the business units together with the Committee. In 2019, the Board of Commissioners held an internal meeting of the Board of Commissioners and a Supervisory Meeting together with the Board of Directors 12 (twelve) times.

Additionally, the Board of Commissioners also evaluates the operational performance of the plant every month and encourages the efforts of the Board of Directors in increasing fixed assets through the transfer of PLN assets that are converted into receivables and monitors the implementation of the internal control system and the development of risk-based audits.



Pandangan atas Prospek Usaha Perspective on Business Prospects

Kajian prospek ekonomi global oleh sejumlah lembaga internasional menyebutkan bahwa pertumbuhan global pada tahun 2020 masih belum kondusif mengingat merebaknya pandemi Covid-19 yang melanda hampir di seluruh negara. Bank Indonesia meralat proyeksi pertumbuhan ekonomi yang telah dirilisnya, pertumbuhan ekonomi global dari 3,0% menjadi 2,5% sementara pertumbuhan ekonomi nasional dikoreksi dari kisaran 5,1-5,5% menjadi 4,2-4,6%. Tentunya kondisi tersebut perlu dilakukan langkah antisipasi oleh Direksi dan segenap jajaran manajemen di bawahnya.

Realisasi kapasitas terpasang pembangkit listrik tahun 2019 mencapai sebesar 69,1 GW atau meningkat 4,2 GW dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun target kapasitas terpasang pembangkit tahun 2020 direncanakan sebesar 74,8 GW, realisasinya hanya 14% telah beroperasi dalam mendukung Program 35.000 MW, sisanya 62% masih dalam tahap konstruksi. Guna mendukung program pemerintah tersebut sekaligus memenuhi kebutuhan listrik, Dewan Komisaris berpendapat PJB akan dapat mengambil peran dan kontribusi yang semakin besar.

Rasio elektrifikasi untuk tahun 2019 meningkat menjadi 98,89% yang artinya terjadi peningkatan akses terhadap energi listrik yang tentunya akan mendorong konsumsi listrik menuju tren konsumsi negara maju dan pertumbuhan ekonomi secara lebih luas. Dewan Komisaris memandang bahwa faktor-faktor tersebut merupakan peluang usaha yang perlu terus dioptimalkan hasilnya.

Dewan Komisaris menilai bahwa tren industri kelistrikan dunia yang dikenal dengan sebutan 3D (Dekarbonisasi, Digitalisasi dan Desentralisasi) menjadi tantangan tersendiri yang perlu terus dikaji dan menurunkan menjadi strategi yang nyata. Dewan Komisaris mendukung sepenuhnya langkah dan strategi Direksi dalam hal dekarbonisasi antara lain dengan meng-EBT-kan PLTU batubara. Dengan kekuatan yang dimiliki sebagai perusahaan pembangkitan dengan sistem manajemen terintegrasi yang diakui secara Internasional menjadi kombinasi yang tepat dalam mengoptimalkan prospek usaha yang positif untuk terus tumbuh dan berkembang.

Some reviews of the global economic prospects by several international institutions state that global growth in 2020 is still not conducive given the outbreak of the Covid-19 pandemic which is affecting almost all countries in the world. Bank Indonesia corrected the previous projected economic growth, global economic growth from 3.0% to 2.5% while national economic growth was corrected from the range of 5.1-5.5% to 4.2-4.6%. Surely these conditions need to be taken in anticipation by the Board of Directors and all levels of management.

The realization of the installed capacity of power plants in 2019 reached 69.1 GW, an increase of 4.2 GW compared to the previous year. The planned installed capacity of the plant in 2020 is planned to be 74.8 GW, with only 14% realization operating in support of the 35,000 MW Program, with the remaining 62% still under construction. To support the government program while fulfilling electricity demands, the Board of Commissioners believes that PJB can take a more strategic role and bigger contribution.

The electrification ratio for 2019 increased to 98.89%, which means that there is an increase in access to electricity which will certainly drive electricity consumption towards the trend of consumption in developed countries and wider economic growth. The Board of Commissioners considers these factors as business opportunities that are required to be optimized.

The Board of Commissioners considers that the global electricity industry trend known as 3D (Decarbonization, Digitalisation, and Decentralization) is a challenge that needs to be continually reviewed and reduced to a concrete strategy. The Board of Commissioners fully supports the steps and strategies of the Board of Directors in the matter of decarbonization, among others by applying coal-fired power plants. With the title of an international power generation company with an integrated management system, it fits in optimizing positive business prospects to continue to grow and develop.

Monitoring Implementasi Tata Kelola Perusahaan Secara Berkelanjutan

Sustainable Corporate Governance Monitoring

Dewan Komisaris senantiasa mendorong Direksi dan seluruh jajaran Perusahaan untuk selalu bertindak memenuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang diterapkan di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi Perusahaan. Komitmen tersebut diwujudkan dengan adanya pembagian tugas yang jelas antar anggota Dewan Komisaris, dimana salah seorang anggota Dewan Komisaris ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam pengawasan implementasi GCG.

Road Map GCG 2016-2021 merupakan *grand strategy* implementasi GCG dengan visi di tahun 2019 fokus menjadi *Good Corporate Company*, yaitu dengan menerapkan standar tata kelola setara dengan perusahaan terbuka. Tujuannya tidak lain untuk membentuk budaya dan manajemen internal kontrol yang semakin baik terutama dalam hal pengelolaan risiko bisnis yang efektif. Beberapa program implementasi yang dilakukan antara lain adalah membangun budaya perusahaan sesuai *Code of Conducts*, melakukan pemutakhiran sistem dan prosedur agar sejalan dengan perkembangan proses bisnis dan regulasi yang berlaku, *monitoring* Program RJPP dan RKAP melalui *Corporate Strategic Review Meeting* (CSRM) dan *Strategic Review Meeting* (SRM) Bisnis, serta menjalankan strategi bisnis yang terintegrasi dengan tanggung jawab sosial Perusahaan dengan menjadi "*green company*".

Hasil penilaian tata kelola perusahaan PJB pada tahun 2019 memperoleh mencapai predikat kategori "Sangat Baik", dengan skor aktual 94,45 dari skor maksimal 100 mengacu pada parameter Surat Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. 16/S.MBU/2012 tentang Parameter/ Indikator Pengukuran Penerapan GCG. Dewan Komisaris memandang bahwa berbagai upaya penguatan implementasi GCG perlu terus dilakukan secara berkesinambungan, termasuk bekerjasama dan sinergi dengan berbagai instansi guna mendapatkan masukan yang membangun bagi PJB, termasuk dengan Anak Perusahaan dalam lingkungan PJB grup.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dewan Komisaris senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pengawasan terhadap jalannya Perusahaan, serta bekerja sama secara harmonis dengan jajaran Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

The Board of Commissioners continues to support the Board of Directors and all levels of the Company to always follow the principles of corporate governance that are applied at all organizational levels. This commitment is manifested by the clear division of tasks between members of the Board of Commissioners, where one member of the Board of Commissioners is appointed as the person responsible for monitoring the GCG implementation.

The 2016-2021 GCG Road Map is a grand strategy for implementing GCG with the vision of 2019 which is to focus on becoming a Good Corporate Company, namely by implementing governance standards equivalent to public companies. It is aimed to establish a better culture and internal control management, especially in terms of effective risk management. Some implementation programs include building a corporate culture based on the Code of Conducts, updating systems and procedures to comply with the development of business processes and regulations, monitoring the CLP and ABOP Program through the Corporate Strategic Review Meeting (CSRM) and Strategic Review Meeting (SRM) Business, as well as applying business strategies that are integrated with corporate social responsibility by becoming a "green company".

Based on PJB's corporate governance assessment in 2019, PJB achieved the "Excellent" criteria, with an actual score of 94.45 from the maximum score of 100 referring to the parameters of the Decree of the Secretary of SOE Ministry No. 16/S.MBU / 2012 concerning Parameters/Indicators of GCG Assessment. The Board of Commissioners considers that various efforts to strengthen the implementation of GCG requires continuous implementation, including cooperation and synergy with various agencies to obtain constructive input for PJB, including with subsidiaries within the PJB group environment.

In performing these tasks, the Board of Commissioners strives to improve the quality of the supervisory duties towards the Company's operations, as well as to work in harmony with the Board of Directors as stipulated in the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations.



Pandangan Atas Penerapan Kebijakan *Whistleblowing System* Perspective on the Implementation of Whistleblowing System Policy

Kebijakan *Whistleblowing System* (WBS) merupakan sarana dan jalur komunikasi bagi karyawan, pelanggan, mitra dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan adanya indikasi pelanggaran kode etik, pelanggaran kebijakan maupun tindakan fraud yang melibatkan segenap jajaran PJB. Kebijakan WBS ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor 095.K/010/DIR/2012 dan Nomor: 007.K/DK/PJB/2012.

Komite WBS melakukan *review* dan menganalisa kecukupan bukti pendukung atas laporan yang disampaikan untuk memastikan ada/tidaknya indikasi kerugian Perusahaan. Direksi dan Dewan Komisaris merupakan pihak yang menindaklanjuti hasil analisa tersebut. Selama tahun 2019, terdapat 4 (empat) pengaduan yang masuk melalui jalur WBS, dimana 2 (dua) pengaduan telah selesai ditindaklanjuti, 1 (satu) pengaduan tidak dapat ditindaklanjuti dan 1 (satu) pengaduan masih dalam proses penyelesaian. Adapun kategori pelanggaran yang disampaikan terkait dengan proses pengadaan dan dugaan praktik gratifikasi.

The Whistleblowing System (WBS) Policy is a communication facility and channel for employees, customers, partners, and other stakeholders to report violations against the code of conduct, policies, and fraud that involve any PJB employee. The WBS policy is stipulated in the Joint Decree of the Board of Commissioners and the Board of Directors No. 095.K/010/DIR/2012 and No. 007.K/DK/PJB/ 2012.

The WBS Committee reviews and analyzes the adequacy of supporting evidence to ensure there are indications of the Company's losses. The Board of Directors and Board of Commissioners are then authorized to follow up on the results of the analysis. In 2019, there were 4 (four) reports from the WBS channel, where 2 (two) reports had been followed up, 1 (one) report could not be followed up and 1 (one) report was still in process. The category of violations reported is related to the procurement process and gratification.

Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris Performance Assessment of the Board of Commissioners' Committees

Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris PJB dibantu oleh 3 Komite yaitu Komite Audit, Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan, serta Komite SDM dan Organisasi. Ketiga komite tersebut telah melaksanakan peran dan tanggung jawab masing-masing dengan baik serta memberikan dukungan yang positif terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

Komite Audit, Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan serta Komite SDM dan Organisasi menyampaikan laporan komite secara triwulanan dan tahunan kepada Dewan Komisaris sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya sesuai dengan pedoman kerja yang ditetapkan. Dewan Komisaris secara periodik melakukan penilaian terhadap kinerja setiap komite berdasarkan laporan komite dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Adapun aspek penilaian kinerja setiap komite mencakup (a) kontribusi terhadap pencapaian target, (b) jumlah kajian, analisis, rekomendasi yang dihasilkan, (c) tingkat keaktifan dalam kegiatan, (d) kerjasama serta (e) mutu dan kualitas konsep.

In performing its supervisory function, PJB's Board of Commissioners is assisted by 3 Committees: the Audit Committee, the Risk Management, and Compliance Committee, and the HC and Organization Committee. Those three committees have performed their respective roles and responsibilities properly and provided positive support for the implementation of the supervisory function by the Board of Commissioners.

The Audit Committee, the Risk Management and Compliance Committee, as well as the HC and Organization Committee submit reports quarterly and annually to the Board of Commissioners as a form of accountability for carrying out their duties based on the established work guideline. The Board of Commissioners periodically assesses the performance of every committee based on committee reports and established performance indicators. The performance assessment aspects include (a) contributions to the target achievement, (b) the number of studies, analyzes, and recommendations, (c) the level of activity, (d) cooperation, and (e) the quality of concepts.

Komite Audit

Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas pengendalian internal yang dilakukan oleh audit internal maupun auditor eksternal serta memastikan kebenaran dan keandalan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya dalam rangka memastikan kesesuaian dengan standar dan aturan yang berlaku. Selama tahun 2019 Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 21 (dua puluh satu) kali sesuai rencana kerjanya antara lain membahas telaah atas informasi keuangan Perusahaan, telaah program kerja audit tahunan, evaluasi kinerja operasi dan investasi, kecukupan pemeriksaan oleh auditor internal maupun eksternal. Secara berkala (triwulanan) Komite Audit melakukan evaluasi atas Laporan Kegiatan Pengawasan Intern (LKPI) dan Laporan Hasil Audit (LHA) dari Satuan Pengawasan Intern (SPI) pada Unit-unit dan Subdit di Kantor Pusat, serta mencermati temuan penting atau temuan berulang beserta monitoring tindak lanjutnya.

Seluruh temuan, catatan dan rekomendasi dari hasil pelaksanaan kegiatan, penelaahan dan analisa Komite Audit selama tahun 2019 telah dikomunikasikan dan didiskusikan dengan Manajemen, Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan auditor eksternal, serta telah dilaporkan kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan dan tindak lanjut oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan bertanggungjawab untuk menilai dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas kebijakan dan strategi PJB dalam pengelolaan risiko berdasarkan kerangka *Enterprise Risk Management* (ERM) maupun kepatuhan termasuk analisa risiko dan kepatuhan pada kegiatan investasi. Selama tahun 2019 Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan telah melaksanakan rapat sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali sesuai rencana kerjanya antara lain membahas telaah (a) hasil *review* implementasi ERM, (b) evaluasi pengelolaan manajemen portofolio dan Investasi mencakup evaluasi RJPP/RKAP Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi, (c) evaluasi *unit cost* pembangkitan, (d) kebijakan korporat manual pengelolaan Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi, (e) Kebijakan korporat tata kelola niaga, (f) kebijakan investasi untuk perbaikan unit eksisting dan (g) kebijakan implementasi dan pengembangan teknologi informasi.

Audit Committee

The Audit Committee is tasked to assist the Board of Commissioners in ensuring the effectiveness of internal controls by internal auditors and external auditors as well as ensuring the accountability and reliability of financial statements and other financial information to comply with applicable standards and regulations. In 2019, the Audit Committee held 21 (twenty-one) meetings based on the operational plan, which included reviewing the Company's financial information, reviewing the annual audit work program, performance assessment of the operation and investment, adequacy of audits by internal and external auditors. Quarterly, the Audit Committee assesses the Internal Supervision Activity Report (LKPI) and Audit Report (LHA) from the Internal Control Unit in the Units and Sub-divisions at the Head Office and examines significant findings or repeated findings along with monitoring the follow-up.

All findings, records, and recommendations from the results of the activity, reviews, and analysis of the Audit Committee during 2019 have been discussed with Management, the Internal Control Unit and external auditors, and have been reported to the Board of Commissioners to be evaluated and followed up by the relevant parties.

Risk Management and Compliance Committee

The Risk Management and Compliance Committee is responsible for assessing and providing recommendations to the Board of Commissioners on PJB policies and strategies in risk management based on the Enterprise Risk Management (ERM) framework and compliance including risk analysis and compliance with investment activities. During 2019, the Risk Management and Compliance Committee held 36 (thirty-six) meetings based on the operational plan, including reviewing (a) the results of ERM implementation reviews, (b) evaluating portfolio management and Investment management including CLP/ABOP evaluations of Subsidiaries and Affiliated Companies, (c) evaluation of unit cost generation, (d) corporate manual management policies of Subsidiaries and Affiliated Companies, (e) Corporate governance policies, (f) investment policies to improve existing units and (g) implementation policies and information technology development.



Komite SDM dan Organisasi

Komite SDM dan Organisasi bertugas membantu Dewan Komisaris untuk mengevaluasi, memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas usulan-usulan Direksi dalam hal program pengembangan organisasi, nominasi pejabat satu tingkat di bawah Direksi, remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi termasuk kesesuaiannya dengan kebijakan PT PLN (Persero) jika diperlukan. Selama tahun 2019, Komite SDM dan Organisasi telah melaksanakan 15 (lima belas) kali rapat dengan membahas antara lain (1) evaluasi RJPP dan RKAP bidang SDM dan organisasi, (2) merespon saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari *stakeholders* (pelanggan, pemasok, kreditur, dan karyawan) terkait bidang SDM, (3) memastikan sistem pengembangan karir berjalan sesuai ketentuan SDM Pusat yang sudah diratifikasi PJB dan (4) melakukan evaluasi dan mengkaji *board manual* terkait peran Dewan Komisaris dalam pemilihan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan.

HC and Organization Committee

The HC and Organization Committee is tasked to assist the Board of Commissioners in evaluating, advising, and recommending the Board of Commissioners on the Board of Directors' proposals in terms of organizational development programs, the nomination for officials one level below the Board of Directors, remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors including compliance with PT PLN (Persero)'s policies if required. In 2019, the HR and Organization Committee held 15 (fifteen) meetings which discussed: (1) CLP and ABOP evaluations in HC and organization division, (2) responding to suggestions, expectations, problems, and complaints from stakeholders (customers, suppliers, creditors, and employees) related to the HC & Organization division, (3) ensuring that the career development system runs following the provisions of the HC Center that has been ratified by PJB and (4) evaluating and reviewing the Board manual related to the role of the Board of Commissioners in the appointment of prospective members of the Board of Directors and Board of Commissioners in subsidiaries/joint ventures

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Changes in the Composition of the Board of Commissioners

Pada tahun 2019, telah terjadi satu kali perubahan komposisi Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Sirkuler tanggal 11 Maret 2019, yaitu pemberhentian dengan hormat Sdr. Alihuddin Sitompul sebagai Komisaris dan pengangkatan Sdr. Jisman P. Hutajulu sebagai Plt. Komisaris. Atas nama Dewan Komisaris, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Sdr. Alihuddin Sitompul atas kerja keras dan kontribusinya saat menjalankan tugas sebagai Komisaris PJB.

Dewan Komisaris akan terus meningkatkan soliditas internal secara berkesinambungan, melalui peran aktif pengawasan dan penasehatan terhadap pengelolaan Perusahaan untuk meningkatkan pencapaian kinerja PJB di tahun-tahun mendatang.

There is a change in the composition of the Board of Commissioners in 2019, determined based on the Circular Decree of Shareholder Decision on March 11, 2019, which honorably dismissed Mr. Alihuddin Sitompul as Commissioner and appointed Mr. Jisman P. Hutajulu as Acting Commissioner. On behalf of the Board of Commissioners, We would like to express the highest gratitude to Mr. Alihuddin Sitompul for his dedication and contribution during his term as PJB's Commissioner.

The Board of Commissioners will continuously improve internal solidity through active supervision and advice on the Company's management to improve the achievement of PJB performance in the future.

Apresiasi Letter of Appreciation

Kami akan senantiasa menjaga profesionalisme dan independensi dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penasihat agar dapat mendorong peningkatan kinerja PJB di masa mendatang. Perkenankan saya atas nama Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Direksi dan seluruh karyawan PJB atas segenap upaya, dedikasi dan kerja kerasnya dalam pencapaian kinerja tahun 2019 ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para pemegang saham, pelanggan, mitra kerja dan seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan dan dukungannya terhadap PJB.

Selanjutnya, Dewan Komisaris mengajak segenap jajaran Direksi dan karyawan PJB untuk bersama-sama menyatukan langkah, segenap kemampuan dan kompetensi yang dimiliki untuk mengatasi berbagai tantangan dan mengoptimalkan peluang yang tersedia, agar PJB dapat memaksimalkan daya saingnya dan mendukung ketahanan energi nasional.

We will always ensure our professionalism and independence in performing supervisory and advisory functions to support the improvement of PJB's performance in the future. We, on behalf of the Board of Commissioners, would like to express our gratitude and appreciation to the Board of Directors and all PJB employees for the effort, dedication, and hard work in achieving this excellent performance of 2019. We also express our gratitude to the shareholders, customers, business partners, and all stakeholders for the trust and support.

Furthermore, the Board of Commissioners calls all members of the Board of Directors and PJB employees to jointly contribute with all capabilities and competencies to overcome various challenges and optimize available opportunities so that PJB can optimize its competitiveness to support national energy security.

Surabaya, 27 Mei 2020
Surabaya, May 27, 2020

Dewan Komisaris
Board of Commissioners


Sriyono D. Siswoyo
Komisaris Utama
President Commissioner


Defy Indiyanto Budiarto
Komisaris Independen
Independent Commissioner


Suharsip
Komisaris Independen
Independent Commissioner


Jisman P. Hutajulu
Plt. Komisaris
Acting Commissioner


Benny M.M. Marbun
Plt. Komisaris
Acting Commissioner


Hendra Iswahyudi
Plt. Komisaris
Acting Commissioner

LAPORAN DIREKSI

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS

Di tahun 2019 PJB berhasil menyelesaikan pengembangan proyek pembangkit dengan progress yang menggembirakan. Tiga pembangkit telah resmi beroperasi komersial (COD), 2 (dua) proyek telah memasuki tahap penandatanganan perjanjian jual beli listrik (*Power Purchase Agreement/ PPA*), penugasan pengembangan bisnis jasa O&M dengan total kapasitas 1.580 MW berhasil dijalankan dan pengembangan jasa Enterprise Asset Management (EAM) untuk mengelola aset pembangkit agar memberikan kontribusi yang optimal serta 3 (tiga) proyek pembangkit dalam tahap konstruksi pembangunan yakni Muara Tawar add-on, PLTU Jawa 7 Unit 2 dan PLTA Batang Toru. Pencapaian tersebut menjadi tonggak penting PJB untuk terus membangun sinergi bersama segenap pemangku kepentingan guna mendukung pengembangan horizon bisnis baru, mengoptimalkan peluang usaha dan menjaga *sustainability* korporasi dalam jangka panjang.

In 2019, PJB's power plant development project was successfully finished with satisfying progress. Three power plants have officially operated commercially (COD), 2 (two) projects have entered the stage of signing the Power Purchase Agreement (PPA), the assignment of O&M service business development with a total capacity of 1,580 MW has been successfully implemented and the development of Enterprise Asset Management (EAM) to manage the plant assets to contribute optimally as well as 3 (three) power plant projects in the construction phase of development, namely Muara Tawar Add-on, Java 7 CFPP Unit 2 and Batang Toru HPP. This achievement is a significant milestone for PJB to continue establishing long-term synergy with all stakeholders to support the development of new business horizons, optimize business opportunities, and maintain corporate sustainability.

Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat-Nyalah PJB dapat melalui tahun 2019 yang penuh tantangan ini dengan tetap catatan prestasi yang membanggakan. Tahun 2019 menjadi tonggak penting bagi PJB sekaligus tahun penuh tantangan mengingat perekonomian nasional maupun iklim usaha industri kelistrikan belum sepenuhnya membaik seperti yang diperkirakan. Direksi dan segenap jajaran manajemen di bawahnya beserta seluruh karyawan PJB telah berhasil menghadapi tahun 2019 yang penuh tantangan tersebut dengan menorehkan sejumlah prestasi dan pencapaian penting sebagai bekal melangkah PJB di masa depan.

Dear Shareholders and Stakeholders,

In the name of God, the Merciful, the Compassionate, Praise and gratitude of God, which by His grace, PJB was able to face the challenging 2019 with a satisfying record of achievement. 2019 became an important milestone for PJB as well as a year full of challenges considering that the national economy and the business climate of the electricity industry have not fully improved as predicted. The Board of Directors and all levels of management under it and all PJB employees have successfully faced the challenging 2019 with some important achievements for PJB to move forward in the future.



Iwan Agung Firstantara
Direktur Utama
President Director



Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan Audit
Audited Financial Statements



Referensi Kriteria AR
AR Criteria Reference

Atas nama Direksi, perkenankanlah saya untuk menyampaikan ringkasan kinerja PJB untuk tahun buku 2019 yang memuat analisis kinerja dan prospek usaha Perusahaan, termasuk kendala yang dihadapi dan mitigasi yang dilakukan, perkembangan tata kelola perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan serta perubahan komposisi Direksi jika ada.

Kondisi Ekonomi Makro 2019

Macroeconomic Conditions in 2019

Sepanjang tahun 2019, perekonomian global tidak memperlihatkan perbaikan yang signifikan. Secara umum, perekonomian global masih mengalami perlambatan, pertumbuhan ekonomi dunia hanya tumbuh 3,0% dari tahun sebelumnya sebesar 3,6%. Aktivitas ekonomi dunia yang mengalami perlambatan dipengaruhi oleh adanya peningkatan risiko dari normalisasi kuantitatif kebijakan moneter AS serta peningkatan tensi perang dagang antara AS dan Tiongkok. Kondisi tersebut juga mempengaruhi pergerakan arus modal menjadi tidak menentu sebagai respon dari ketidakpastian prospek likuiditas global dan risiko keuangan. Pelemahan ekonomi global juga terus menekan harga komoditas, termasuk harga minyak dan batu bara.

Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2019 tercatat sebesar 5,02% melambat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun lalu sebesar 5,17%. Tingkat inflasi cukup terkendali di level 2,72%. Tingkat kurs Rupiah terhadap Dolar cenderung menguat di akhir tahun, mencapai Rp13.900,-/USD. Tren harga minyak dunia cenderung meningkat dan mempengaruhi harga minyak Indonesia (Indonesia Crude Price atau ICP), pada Desember 2019 merupakan level tertinggi yaitu sebesar USD67,18 per barel. Faktor-faktor di atas mempengaruhi perkembangan dan kinerja industri kelistrikan nasional.

Analisis Atas Kinerja Perusahaan Tahun 2019

Analysis of Company Performance in 2019

Pada tahun 2019 kami mampu mencapai kinerja dan prestasi membanggakan di berbagai bidang baik operasi, keuangan, di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Kinerja pembangkit existing PJB di tahun 2019 adalah membanggakan atau bahkan terbaik dengan pencapaian rata-rata di atas 100% dari target yang ditetapkan. Indikator keandalan pembangkit yang tercermin dalam kinerja *Equivalent Availability Factor* (EAF), *Equivalent Forced Outage Rate* (EFOR) dan Tara Kalor Neto (NPHR) pembangkit eksisting masing-masing mencapai sebesar 95,06%, 0,80% dan 2.491 kCal/kWh atau mampu mempertahankan kinerja dalam standar kinerja kelas dunia (*world class standard*) karena capaian kinerja EAF lebih dari 92% dan kinerja EFOR mencapai kurang dari 2%.

On behalf of the Board of Directors, allow me to submit a summary of PJB performance for the 2019 fiscal year which includes the analysis of the Company's performance and business prospects, including the risks and their mitigation, developments in corporate governance, corporate social responsibility and every change in the composition of the Board of Directors.

Throughout 2019, the global economy did not show significant improvements. In general, the global economy is still in a slowdown, world economic growth only grew 3.0% from 3.6% in the previous year. The slowing world economic activity is influenced by the increased risk of quantitative normalization of US monetary policy and the increasing tension of trade war between the US and China. This condition also affected the movement of capital flows to become uncertain in response to the uncertain outlook for global liquidity and financial risk. The weakening of the global economy also continued to depress commodity prices, including oil and coal prices.

National economic growth in 2019 was recorded at 5.02%, slower than the previous year's growth which was 5.17%. The inflation rate was stable at 2.72%. Rupiah-to-Dollar exchange rate tends to strengthen at the end of the year, reaching Rp13,900/USD. The trend of world oil prices also tends to increase and affect the price of Indonesia Crude Price or ICP. In December 2019, the highest level was USD 67.18 per barrel. The above factors influence the development and performance of the national electricity industry.

In 2019, we successfully achieved an excellent performance in various fields of operations, finance in the middle of various challenges. The performance of PJB's existing plants in 2019 is satisfying and excellent with an average achievement of over 100% from the target set. Indicators of plant reliability reflected in the performance of *Equivalent Availability Factor* (EAF), *Equivalent Forced Outage Rate* (EFOR) and Tara Kalor Net (NPHR) of existing plants, respectively reached 95.06%, 0.80% and 2.491 kCal/kWh or able to maintain performance in the world-class standard since EAF performance achievements are more than 92% and EFOR performance is less than 2%.

Dari sisi kinerja organisasi berdasarkan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU), PJB berhasil menempatkan diri sebagai *Industry Leader* dengan capaian skor 700. Prestasi lain yang patut dibanggakan adalah keberhasilan PJB meraih 2 PROPER Emas oleh pembangkit eksisting, *cost reduction program* dalam pengadaan *hotpart* gas turbin di UP Muara Karang dan UP Muara Tawar, eksekusi program Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) di UP Cirata dan BPWC serta program Retro dan Subroto Award bidang efisiensi energi di UP Brantas. Prestasi kinerja pembangkit PJB juga dapat dipertahankan dalam 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu 10 (sepuluh) pembangkit unit eksisting masuk dalam standar kinerja kelas dunia yaitu Top 10% kinerja EAF dari North America *Electricity Reliability Council* (NERC). Adapun kinerja 4 (empat) Unit pembangkit FTP-1 Jawa dan 1 Unit Pembangkit FTP-2 Luar Jawa berkinerja EAF Top 25% NERC.

Sejumlah proyek telah PJB selesaikan sepanjang tahun 2019 dengan *progress* yang menggembirakan, dimana 3 (tiga) proyek telah COD yakni PLTU Cilacap Ekspansi Unit 4, PLTU Jawa 7 Unit 1, dan PLTU Mamuju. Dua proyek telah memasuki tahap penandatanganan perjanjian jual beli listrik (*Power Purchase Agreement/PPA*) yakni PLTU Sumbagsel 1 dan PLTS Terapung Cirata. Adapun penugasan pengembangan bisnis jasa O&M selama tahun 2019 dengan total kapasitas 1.580 MW telah berhasil dijalankan dan pengembangan jasa *Enterprise Asset Management* (EAM) untuk mengelola aset pembangkit agar memberikan kontribusi yang optimal serta distribusi juga telah menunjukkan hasil yang positif. Selain itu, terdapat 3 (tiga) proyek pembangkit yang masih dalam tahap konstruksi pembangunan yakni Muara Tawar *add-on*, PLTU Jawa 7 Unit 2 dan PLTA Batang Toru. Untuk itulah, PJB meyakini bahwa dengan terus membangun sinergi bersama segenap pemangku kepentingan telah berada pada jalur yang tepat guna mendukung pengembangan horizon bisnis baru PJB mewujudkan keberlangsungan usaha korporasi dalam jangka panjang.

Kendala yang Dihadapi dan Solusinya

Terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi PJB sepanjang tahun 2019, diantaranya adalah fluktuasi harga energi primer dibandingkan tarif dasar listrik yang belum dapat mengimbangnya, hadirnya pemain baru di bidang energi listrik baik di tingkat nasional maupun regional Asean, disrupsi sumberdaya manusia, dan tantangan tren industri kelistrikan dunia yang disingkat dengan 3D (Dekarbonisasi, Desentralisasi dan Digitalisasi). Dekarbonisasi menuntut pengembangan pembangkit yang lebih ramah lingkungan. Desentralisasi membuat distribusi listrik tak lagi terpusat, namun bisa tersebar pada beberapa kawasan dengan skala yang lebih kecil. Digitalisasi mendorong pengelolaan bisnis pembangkit listrik dijalankan lebih efisien.

In terms of organizational performance based on the Superior Performance Assessment Criteria (KPKU), PJB managed to position itself as an *Industry Leader* with a score of 700. Another achievement is PJB's success in achieving 2 Gold PROPERs by existing power plants, *cost reduction programs* in the procurement of gas-turbine hot parts in Muara Karang GU and Muara Tawar GU, Weather Modification Technology (TMC) program in Cirata GU and CRMU as well as the Retro and Subroto Award in the energy efficiency category in Brantas GU. The performance of PJB's power plants can also be maintained in the last 3 (three) years which in 10 (ten) existing units were nominated in the world-class performance standards, the Top 10% EAF performance of the North America Electricity Reliability Council (NERC). Additionally, the performance of 4 (four) Java FTP-1 generation units and 1 outside Java FTP-2 generation unit performs as EAF Top 25% NERC.

Several projects have been completed during the 2019 PJB with encouraging progress, where 3 (three) projects have been commercially operated, namely Cilacap Expansion Unit 4, Jawa 7 CFPP Unit 1, and Mamuju CFPP. Two projects have entered the stage of signing the power purchase agreement (PPA), namely Sumbagsel 1 CFPP and Cirata Floating SPP. The assignment of O&M service business development of 2019 with a total capacity of 1,580 MW has been successfully implemented and the development of Enterprise Asset Management (EAM) services to manage generation assets to provide optimal contribution and distribution has also shown positive results. Also, there are 3 (three) power plant projects which are still under construction, namely Muara Tawar *add-on*, Jawa 7 CFPP Unit 2, and Batang Toru HPP. Therefore, PJB continues to build synergies with all stakeholders which is on the right track to support the development of a new business horizon. PJB realizes the long-term sustainability of the corporate business.

Risks and Mitigation

There are various challenges faced by PJB throughout 2019, including the fluctuations in primary energy prices compared to basic electricity tariffs that cannot compensate, the presence of new players in the electricity factor both at the national and international levels in ASEAN, disruption of human resources, and challenges in the global electricity industry trends. which is abbreviated as 3D (Decarbonization, Decentralization, and Digitalisation). Decarbonization demands the development of more environmentally friendly plants. Decentralization makes electricity distribution no longer centralized but can be spread over several regions on a smaller scale. Digitalization drives the management of the power generation business to be run more efficiently.



Menghadapi kendala dan tantangan di atas, PJB dituntut untuk beradaptasi dengan menciptakan keunggulan kompetitif dalam melaksanakan ketiga perannya dengan cakupan dan kualitas yang semakin luas, baik sebagai pemilik sekaligus pengelola pembangkit sendiri (*Own*), pengelola pembangkit milik PLN dan IPP (*Manage*) maupun sebagai investor dalam perusahaan IPP (*Invest*). Untuk itulah, PJB menetapkan strategi yang fokus untuk menciptakan pertumbuhan berkelanjutan melalui 3 (tiga) horizon pertumbuhan. Pertama, mempertahankan dan meningkatkan bisnis inti dengan berfokus pada optimalisasi kinerja pembangkit, peningkatan fungsi *fast response*, pemanfaatan lahan tak terpakai dan menyelesaikan proyek yang sedang dikembangkan yang semuanya akan bermuara pada keamanan pasokan listrik, BPP listrik, serta keselamatan kerja dan keandalan. Kedua, PJB melakukan investasi, bisnis jasa O&M termasuk *Maintenance Repair & Overhaul* (MRO), *biomass co-firing*, *rooftop solar PV* dan EAM yang kelak akan memberikan potensi bisnis baru dengan pembentukan IPP, pembangkit EBT dan model operasi baru. Ketiga, PJB melakukan inisiasi pengembangan bisnis baru, berkolaborasi dengan berbagai pihak yang kompeten di bidangnya, seperti *water treatment*, *digital light house*, efisiensi dan manajemen industri, *virtual power plan* dan sebagainya. Ketiga horizon tersebut akan menjadi siklus yang terus mengalir guna mendorong pertumbuhan kinerja PJB tumbuh secara berkelanjutan.

Keamanan pasokan energi primer berperan penting dalam menjaga kelangsungan operasional pembangkit, untuk itulah PJB berupaya memastikan transportasi dan logistik batubara dan gas sebagai energi primer pembangkit terus terjaga pasokannya. PJB juga meminta dukungan PLN maupun pemerintah untuk memprioritaskan alokasi energi primer bagi sektor ketenagalistrikan. Adapun kendala terkait peralatan kritikal pembangkit yang tidak memiliki cadangan, maka fungsi terkait melakukan analisis dan mitigasi risiko pada saat penyusunan RKA Unit, agar dapat terus dimonitor hasilnya dalam laporan manajemen risiko secara triwulanan serta tersedianya asuransi yang efektif.

Terkait dengan keterbatasan pendanaan untuk membangun pembangkit baru, PJB membangun sinergi dan kolaborasi dengan mitra strategis yang kompeten di bidangnya, baik dari dalam maupun luar negeri. Disamping itu, PJB juga berupaya memanfaatkan piutang PLN menjadi pembangkit sendiri yakni melalui akuisisi atau pengalihan aset pembangkit PLN ke PJB. Tantangan lain yang dihadapi tidak lain adalah peningkatan kompetensi SDM secara berkesinambungan, dengan senantiasa melakukan akselerasi kompetensi bidang O&M, kompetensi *problem-solving* serta melakukan kerjasama strategis dengan berbagai perguruan tinggi dalam penyediaan tenaga kerja terampil dengan keahlian teknis pembangkit.

In facing the risks and challenges, PJB is required to adapt by creating a competitive advantage in carrying out its three roles with broader scope and quality, both as owner and manager of the plant itself, PLN and IPP (Manage) and as investors in the IPP (Invest) company. Therefore, PJB sets a strategy that focuses on creating sustainable growth through 3 (three) growth horizons. First, maintaining and improving the core business by focusing on optimizing plant performance, improving the fast response function, unused land use, and completing projects that are being developed which will all lead to electricity supply security, electricity CES, as well as work safety and reliability. Second, PJB invests, O&M service businesses including Maintenance Repair & Overhaul (MRO), biomass co-firing, rooftop solar PV, and EAM which will provide new business potential by establishing IPP, Renewable Energy plants, and new operating models. Third, PJB initiates new business development, collaborating with various competent parties in their sectors, such as water treatment, digital lighthouses, efficiency, and industrial management, virtual power plans, and so on. These three horizons will become a continuous cycle to encourage the growth of PJB's performance sustainably.

The availability of primary energy supply plays an important role in maintaining the plant's operational continuity; therefore, PJB seeks to ensure the transportation and logistics of coal and gas as the primary energy of the power plant to be maintained. PJB also requested PLN and the government to prioritize the allocation of primary energy for the electricity sector. While for challenges related to critical plant equipment that does not have reserves, the related function is to carry out risk analysis and mitigation during the preparation of the Work Plan & Unit Budget, so that results can be monitored continuously in quarterly risk management reports and the availability of effective insurance.

Related to the limited funding to build new power plants, PJB builds synergy and collaboration with competent strategic partners in their sectors, both nationally and internationally. Also, PJB seeks to utilize PLN's receivables into its power generation, namely through the acquisition or transfer of PLN's generation assets to PJB. Another challenge faced is continuous improvement of HR competencies, by continuously accelerating O&M competencies, problem-solving competencies, and strategic collaboration with various universities in providing skilled workers with technical expertise in power generation.

Implementasi Kebijakan dan Strategi

Dalam menghadapi berbagai tantangan sepanjang tahun 2019, Direksi dan segenap jajaran manajemen PJB telah melakukan berbagai inisiatif strategis dengan menjalankan 3 (tiga) peran PJB secara optimal, baik sebagai pemilik, pengelola maupun investor pembangkit. Seiring berjalannya waktu, porsi penjualan listrik dari ketiga peran tersebut mengalami perubahan yang cukup signifikan. Sejak tahun 2014 hingga kini, penjualan dari pembangkit eksisting makin menurun dari 29,66 TWh menjadi 20,48 TWh. Tentunya hal ini perlu perlu diimbangi dengan peningkatan penjualan dari pembangkit yang dikelola oleh PJB baik sebagai pengelola maupun sebagai investor. Dalam perkembangan selama beberapa tahun terakhir, penjualan listrik dari pembangkit yang dikelola maupun IPP yang PJB memiliki kepemilikan saham di dalamnya menunjukkan tren yang terus meningkat. Bahkan sejak tahun 2017 penjualan dari pembangkit yang dikelola PJB lebih besar dari pembangkit yang dimiliki PJB. Untuk itulah, eksekusi PJB dalam menjalankan peran sebagai pengelola dan investor pembangkit terus ditingkatkan.

Salah satu strategi penting yang dilakukan secara terus-menerus adalah mengokohkan pondasi (*strengthen the basic*) dengan berpegang teguh pada integritas dan prinsip-prinsip GCG, implementasi budaya pelayanan prima, bekerja dengan penuh tanggung jawab dan menghasilkan kinerja keuangan yang sehat. Selain itu, PJB juga menerapkan strategi yang fokus untuk (1) meningkatkan keamanan dan keandalan pembangkit; (2) optimasi operasional pembangkit; (3) efisiensi operasi dengan menurunkan BPP listrik; (4) pengembangan usaha dengan prioritas investasi; (5) pengelolaan human capital berbasis digital dan (6) pengelolaan K3L untuk menjamin tidak terjadinya kecelakaan kerja fatal (*zero accident*) maupun gangguan pembangkit (*zero breakdown*).

Di bidang jasa operasi dan pemeliharaan, PJB terus berupaya memperbaiki proses bisnis operasi dan pemeliharaan pembangkit, baik pembangkit yang dimiliki oleh PJB maupun pihak-pihak lain dengan menerapkan Manajemen Aset Pembangkitan guna meningkatkan kualitas aset dengan hasil yang lebih tinggi dengan nilai biaya pokok produksi yang semakin baik. Di bidang jasa konstruksi (EPC), PJB menerapkan strategi *Improvement 2019 Acceleration 5 Days*, mulai dari penguatan *project planning and controlling* dengan implementasi PROMIS (*Project Management Integrated System*), mengembangkan standarisasi pengelolaan proyek guna meningkatkan kualitas proyek agar kompetitif dan tentunya dengan dukungan kapasitas serta kapabilitas SDM yang memadai. Keseluruhan strategi tersebut, diharapkan dapat mendorong terciptanya kinerja pembangkit yang ekselen guna mewujudkan pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan. Selain itu, kapasitas pembangkit PJB di tahun 2019 ini ditargetkan meningkat dua kali lipat agar mampu menopang pertumbuhan yang direncanakan. Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya Direksi perlu merumuskan kebijakan dan strategi yang tepat.

Policy and Strategy Implementation

In facing various challenges throughout 2019, PJB's Board of Directors and management have carried out various strategic initiatives by optimally performing 3 (three) PJB roles, both as the owner, manager, and investor. Eventually, the portion of electricity sales from these three roles experienced significant changes. Since 2014, sales from existing power plants have declined from 29.66 TWh to 20.48 TWh. This certainly needs to be balanced with increased sales from power plants managed by PJB both as managers and as investors. In the development of the last few years, electricity sales from managed plants and IPP which PJB has a shareholding in are showing an increasing trend. In fact, since 2017 sales from PJB-managed generators are greater than PJB-owned power generations. Therefore, the execution of PJB in running its role as manager and investor can continue to be improved.

One significant strategy that is continuously applied is to strengthen the foundation by strengthening the integrity and principles of GCG, implementing a culture of excellent service, working responsibly, and achieving sound financial performance. Also, PJB applies a strategy that focuses on (1) increasing plant safety and reliability; (2) optimization of plant operations; (3) operating efficiency by reducing CES; (4) business development with investment priority; (5) digital-based human capital management and (6) HSE management to achieve zero accidents or zero breakdowns.

In the operation and maintenance services, PJB continues to strive to improve the business operations and maintenance processes of the plant, both plants owned by PJB and other parties by implementing Generating Asset Management to improve asset quality with higher returns with an increasingly higher cost of production. In the construction services (EPC), PJB applies the 2019's 5-Day Acceleration Improvement strategy, starting from strengthening project planning and controlling with the implementation of the PROMIS (Project Management Integrated System), developing project management standards to improve project quality so that it is competitive and of course with capacity support and adequate HR capabilities. Those strategies are expected to support the achievement of excellent plant performance to achieve sustainable revenue growth. Also, PJB's power plant capacity in 2019 is targeted two times by sustaining planned growth. To achieve these objectives, the Board of Directors is required to formulate appropriate policies and strategies.



Pengembangan SDM secara berkesinambungan terus ditingkatkan agar dapat bersaing dengan SDM dari negara-negara ASEAN, dengan dilakukannya berbagai program pelatihan, sertifikasi, *benchmarking*, penugasan, *coaching*, *mentoring*, *counseling* dan pembelajaran.

Perbandingan Hasil Kinerja dengan Target 2019

Realisasi produksi energi listrik PJB tahun 2019 mencapai sebesar 23.312,99 GWh atau 90,91% dari target RKAP 2019 sebesar 26.126,80 GWh dan menurun 9,81% dibandingkan tahun 2018 sebesar 25.847,33 GWh. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh menurunnya produksi pembangkit berbahan bakar gas terkait kebutuhan sistem (*dispatch*) dan pembangkit berbahan bakar air dengan pola air yang direncanakan normal ternyata pola kering, sehingga mengurangi produksi PLTA. Kami terus berupaya mengatasi berbagai kendala yang menjadi faktor penyebab penurunan tersebut. Kinerja pemakaian bahan bakar atau bauran energi primer di tahun 2019 masih didominasi oleh pembangkit berbahan bakar gas alam sebesar 139.852 BBTU; batubara sebanyak 3.293.951 ton; HSD sebesar 24.223 kL dan MFO sebanyak 33.589 kL. Untuk itulah, Direksi terus meningkatkan eksekusi program EBT PLTU batubara dengan metode *co-firing* guna meningkatkan bauran energi pada pembangkit eksisting agar lebih ramah lingkungan.

Pembangkit PJB dikelola dengan standar kelas dunia mengacu pada PAS 55 dan sertifikasi ISO 55001:2014, agar keamanan dan keandalannya dapat terus dijaga. Tahun 2019 PJB berhasil mengelola kinerja operasi pembangkit dengan capaian terbaik pada indikator keandalan (*Equivalent Availability Factor/ EAF*), faktor gangguan (*Equivalent Forced Outage Rate/ EFOR*), pemakaian bahan bakar, dan ketepatan pelaksanaan serta durasi pemeliharaan. Kinerja EAF tahun 2019 mencapai sebesar 95,06% atau 101,83% dari target RKAP sebesar 93,35% dan lebih tinggi dari realisasi tahun 2018 sebesar 94,09% terutama disebabkan oleh jumlah overhaul yang jatuh tempo dan pelaksanaan pekerjaan dengan status *Maintenance Outage* lebih sedikit daripada tahun lalu sehingga tidak membutuhkan unit untuk *shutdown*. Sedangkan kinerja EFOR tahun 2019 sebesar 0,80% atau 155,91% dari target RKAP dan lebih baik dari realisasi tahun 2018 sebesar 1,01% terutama dipengaruhi oleh pelaksanaan *overhaul*, *predictive* dan *preventif maintenance* yang efektif sehingga dapat meminimalisir terjadinya *breakdown* atau gangguan selama *interval overhaul*. Adapun nilai SOF tahun 2019 mencapai sebesar 4,22% atau 116,09% dari target RKAP sebesar 5,03% dan lebih baik dari realisasi tahun 2018 sebesar 4,42% yang disebabkan oleh adanya overhaul yang jatuh tempo lebih sedikit dibanding tahun lalu dan pelaksanaannya lebih cepat dari yang direncanakan.

The HC development continues to be improved to compete with HC among ASEAN countries, by conducting various training programs, certification, benchmarking, assignments, coaching, mentoring, counseling, and learning.

Comparison of Performance and Target of 2019

The realization of PJB electricity production in 2019 reached 23,312.99 GWh or 90.91% of the 2019 ABOP target of 26,126.80 GWh and decreased by 9.81% compared to 2018 of 25,847.33 GWh. The decline was mainly influenced by the decrease in the production of gas-fired power plants related to dispatch system requirements and water-fueled plants with normal planned water patterns turned out to be dry patterns that result in reduced hydropower production. We continue to work to overcome various challenges as the factors of these declines. The performance of the use of fuel or primary energy mix in 2019 is still dominated by natural gas-fueled power plants at 139,852 BBTU; 3,293,951 tons of coal; HSD of 24,223 kL and MFO of 33,589 kL. Therefore, the Board of Directors continues to improve the execution of the coal-fired renewable energy program by co-firing methods to increase the energy mix of the existing power plants to be more environmentally friendly.

PJB's power plants are managed with the world-class standard based on PAS 55 and ISO 55001: 2014 certification so that their safety and reliability can be assured. In 2019, PJB managed to manage the operating performance of the plant with the best performance on the Equivalent Availability Factor/EAF, the Equivalent Forced Outage Rate/EFOR, fuel consumption, and the accuracy of implementation and duration of maintenance. The EAF performance in 2019 reached 95.06% or 101.83% of the ABOP target of 93.35% and was higher than the realization in 2018 of 94.09% mainly due to the number of overhauls due and the implementation of work with Maintenance Outage status less than last year; therefore, it does not require any unit to shut down. While the performance of EFOR in 2019 amounted to 0.80% or 155.91% of the ABOP target which was better than the 2018 realization of 1.01%, mainly influenced by the effective overhaul, predictive and preventive maintenance to minimize the occurrence of breakdowns or disturbances during the overhaul interval. The SOF value of 2019 reached 4.22% or 116.09% of the ABOP target of 5.03% which was better than the realization in 2018 of 4.42% due to overhauls that were due less than last year and the implementation was faster than planned.

Kinerja keandalan pembangkit eksisting tentu akan terus kami pertahankan agar tetap masuk dalam standar kinerja kelas dunia yaitu Top 10% kinerja EAF dari *North America Electricity Reliability Council* (NERC). Sedangkan kinerja keandalan pembangkit FTP-1 Jawa dan pembangkit FTP-2 Luar Jawa berada pada level EAF TOP 25% NERC atau dikenal dengan #AvailabilityOverNinety. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja keandalan pembangkit PJB berada pada level yang sangat baik.

Realisasi penjualan listrik tahun 2019 PJB untuk sistem Jawa Bali mencapai sebesar 22.404,11 GWh atau 89,73% dari target RKAP sebesar 24.968,11 GWh, menurun 9,48% dibandingkan tahun 2018 sebesar 24.751,71 GWh. Hal tersebut terutama disebabkan oleh optimalisasi BPP oleh UIP2B sehingga terdapat sejumlah unit pembangkit yang diposisikan *standby* dan beroperasi sebagai *peaker* saja.

Realisasi pendapatan usaha pada tahun 2019 mencapai 89,44% dari target RKAP dan menurun 2,60% menjadi Rp39.757.951 juta dari tahun 2018 sebesar Rp40.821.026 juta dengan kontribusi terbesar berasal dari segmen penjualan listrik sebesar 84,72%, pada peringkat kedua segmen jasa operasi dan pemeliharaan sebesar 11,12%, konstruksi sebesar 3,51% dan pendapatan lainnya sebesar 0,65%. Penurunan pendapatan usaha terutama disebabkan oleh menurunnya produksi dan penjualan PJB dalam rangka mendukung optimasi di sistem Jawa Bali. Walaupun realisasi produksi dan penjualan listrik mengalami penurunan, namun kinerja keuangan atau *bottom line* PJB tetap dapat terjaga. Hal tersebut terutama didukung oleh keberhasilan eksekusi program efisiensi dimana beban usaha tahun 2019 berhasil ditekan, dan mengalami penurunan sebesar 9,53% dari tahun sebelumnya. Realisasi beban usaha tahun 2019 menjadi sebesar Rp31.062.892 juta dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp34.334.180 juta yang disebabkan oleh penurunan beban bahan bakar secara signifikan dengan menurunnya penggunaan BBM. Keberhasilan dalam menekan laju beban usaha di tengah realisasi pendapatan usaha yang menurun, mampu mendorong peningkatan terhadap perolehan laba tahun berjalan sebesar 12,60% menjadi Rp6.663.322 juta dari tahun 2018 sebesar Rp5.917.432 juta, dan mencapai 107,24% dibandingkan dengan target RKAP 2019.

Adapun posisi keuangan PJB tahun 2019 dari sisi aset mengalami penurunan 0,67% menjadi Rp173.223.365 juta dari tahun lalu sebesar Rp174.390.907 juta atau 87,12% dari target RKAP sebesar Rp198.821.892 juta yang disebabkan oleh penurunan wajar atas penyusutan aset tetap tahun berjalan. Rasio keuangan PJB tahun 2019 menunjukkan hasil yang semakin baik, tercermin dari pencapaian rasio profitabilitas sebagai indikator kemampuan PJB menghasilkan laba yang mengalami peningkatan. Kinerja ROA dan ROE tahun 2019 masing-masing mencapai sebesar 3,84% dan 4,06% meningkat 0,45% dan 0,52% dibandingkan tahun sebelumnya dengan realisasi masing-masing sebesar 3,39% dan 3,54%.

We will continue to maintain the reliability performance of our existing plants to position ourselves in the world-class performance standard as the Top 10% EAF performance of the North America Electricity Reliability Council (NERC). While the reliability performance of the Java FTP-1 Power Plant and the Outer Java FTP-2 Power Plant is at the EAF TOP 25% NERC level or known as #AvailabilityOverNinety. This shows that the performance of PJB's power plant reliability is at an excellent level.

The realization of PJB's electricity sales in 2019 for the Java-Bali system reached 22,404.11 GWh or 89.73% of the ABOP target of 24,968.11 GWh, 9.48% lower than in 2018 of 24,751.71 GWh. This was mainly due to the optimization of CES by UIP2B so that there were several generating units which were standby and in peaker mode.

Realization of operating revenues in 2019 reached 89.44% of the ABOP target and decreased 2.60% to Rp39,757,951 million from 2018 of Rp40,821,026 million with the largest contribution coming from the electricity sales segment at 84.72%, ranking second operation and maintenance services segment by 11.12%, construction by 3.51% and other revenues by 0.65%. The decline in operating income was mainly due to the decline in PJB production and sales to support optimization in the Java-Bali system. Although the realization of electricity production and sales has decreased, financial performance or the bottom line of PJB can still be maintained. This was mainly supported by the successful execution of the efficiency program in which operating expenses in 2019 were successfully suppressed, and decreased by 9.53% from the previous year. Realization of operating expenses in 2019 amounted to Rp31,062,892 million compared to the previous year amounting to Rp34,334,180 million due to a significant decrease in fuel costs with a decrease in fuel usage. The success in suppressing the rate of operating expenses amid the realization of declining business revenues was able to drive an increase in profit for the current year by 12.60% to Rp6,663,322 million from 2018 of Rp5,917,432 million and reached 107.24% compared to the 2019 ABOP target.

The financial position of PJB in 2019 from the asset side decreased by 0.67% to Rp173,223,365 million from the previous year of Rp174,390,907 million or 87.12% of the ABOP target of Rp198,821,892 million due to a reasonable decrease in fixed assets depreciation current year. The financial ratio of PJB in 2019 showed better results, reflected in the achievement of profitability ratios as an indicator of PJB's ability to generate increased profits. ROA and ROE performance in 2019 reached 3.84% and 4.06%, increasing 0.45% and 0.52% compared to the previous year with the realization of 3.39% and 3.54%, respectively.

Direksi dan segenap jajaran manajemen PJB akan terus berupaya untuk meningkatkan program efisiensi dan kepuasan pelanggan, meningkatkan pertumbuhan *revenue mix*, membangun *strategic partnership*, memperkuat integrasi sistem manajemen dan implementasi *Enterprise Risk Management* (ERM), serta memperkuat kompetensi SDM sesuai kebutuhan perkembangan usaha. Ke depannya, PJB akan terus meningkatkan pengelolaan kinerja yang belum mencapai target antara lain *monitoring contractor safety management system* di lapangan, pelibatan seluruh karyawan unit, pemerintah daerah setempat, rekanan dan mitra bisnis. Peningkatan kinerja PROPER Unit perlu terus dilakukan, terutama kinerja operasi unit di luar Jawa walaupun trennya naik tetapi belum memenuhi yang ditargetkan serta mengokohkan peran dan kontribusi Anak Perusahaan dengan memenuhi kepuasan pelanggan.

Inovasi teknologi pembangkitan merupakan tantangan sekaligus peluang bagi PJB. Meningkatnya program inovasi yang dilakukan telah mengubah cara PJB menjalankan bisnis. Dalam tiga tahun terakhir, PJB dinobatkan sebagai juara umum LIKE (*Learning, Innovation, Knowledge & Exhibition*) 2019 atau terdepan dalam inovasi teknologi pembangkitan di grup PLN. Kami akan senantiasa mengembangkan berbagai peluang dengan memperkuat inovasi di berbagai bidang.

Eksistensi PJB sebagai produsen listrik nasional terus mendapat pengakuan baik di dalam negeri maupun di luar negeri menjadi bukti bahwa kami terus berupaya memberikan yang terbaik bagi segenap pemangku kepentingan. Pencapaian kinerja di bidang ekonomi, sosial maupun lingkungan di tingkat nasional mendapatkan apresiasi dan penghargaan oleh berbagai pihak, diantaranya peringkat 1 Kategori Private Non-keuangan Non-listed dalam ajang *Annual Report Award* (ARA) 2019 sebagai penghargaan tertinggi di bidang keterbukaan informasi dan transparansi yang diselenggarakan oleh sejumlah regulator; PROPER Emas UP Paiton dan UP Gresik sebagai penghargaan tertinggi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Subroto Award sebagai penghargaan tertinggi dari Kementerian ESDM. Adapun penghargaan internasional yang diraih PJB tahun 2019 diantaranya adalah *IT Team of The Year* oleh Stevie *International Business Award* 2019 di Austria, serta *Power Utility & Gas Power Project of The Year* dalam ajang *Asian Power Awards* 2019 di Malaysia. Dengan strategi yang tepat dan semangat optimisme, kami yakin bahwa PJB dapat terus mencapai pertumbuhan kinerja di masa depan dengan memenuhi harapan pemegang saham maupun pemangku kepentingan.

PJB's Board of Directors and management will continue to strive to improve efficiency and customer satisfaction programs, increase revenue mix growth, build strategic partnerships, strengthen management system integration and implement Enterprise Risk Management (ERM), and strengthen HR competencies according to business development needs. Going forward, PJB will continue to improve performance management that has not yet reached the target, including monitoring the contractor safety management system in the field, involving all unit employees, local government, partners, and business partners. The improvement of PROPER Unit performance needs to be continued, especially the operational performance of units outside Java, following the trend with unachieved targets and has confirmed the role and contribution of the Subsidiaries by meeting customer satisfaction.

The power plant's technological innovation can be both a challenge and an opportunity for PJB. The increasing innovation program undertaken has changed the direction of the PJB business. In the last three years, PJB has been named the 2019's winner (*Learning, Innovation, Knowledge & Exhibition*) or a power plant's technological innovation leader in the PLN group. We always develop various opportunities by strengthening innovation in various fields.

The existence of PJB as a national electricity provider continues to be recognized both nationally and internationally which empowers to provide the best for all stakeholders. The performance achievement in the economic, social and environmental sectors at the national level is appreciated by various parties, including the first rank in the category of Non-Financial Non-listed Private Company in the 2019 Annual Report Award (ARA) as the highest award in the field of information disclosure and transparency organized by various regulators; Gold PROPER for Paiton GU and Gresik GU as the highest award from the Ministry of Environment and Forestry, Subroto Award as the highest award from the Ministry of Energy and Mineral Resources. The international awards won by the 2019 PJB include the IT Team of the Year by the 2019 Stevie International Business Award in Austria, as well as the Power Utility & Gas Power Project of the Year at the 2019 Asian Power Awards in Malaysia. With the proper strategy and optimism, we believe that PJB can continuously achieve performance growth in the future by meeting the expectations of shareholders and stakeholders.

Pengelolaan Human Capital Secara Berkelanjutan

Sustainable Management of Human Capital

PJB berkomitmen meningkatkan kapasitas, integritas, dan kapabilitas internal karyawan sebagai salah satu aset penting Perusahaan. Pengelolaan human capital yang tepat, disertai dengan organisasi yang responsif diyakini menjadi faktor yang menentukan keberhasilan PJB untuk mencapai kinerja positif secara berkelanjutan. PJB secara progresif melaksanakan pengelolaan SDM berdasarkan kebutuhan dan perkembangan industri pembangkitan listrik.

Peran strategis SDM dalam perspektif Learning & Growth fokus pada peningkatan kemampuan leadership, peningkatan kapabilitas organisasi, membangun strategi kompetensi dan produktivitas untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi. Selama tahun 2019, realisasi anggaran pendidikan dan pelatihan karyawan meningkat 6,95% menjadi Rp97,66 miliar dibandingkan tahun lalu sebesar Rp91,31 miliar, yang menunjukkan tingginya komitmen PJB dalam meningkatkan kualitas SDM secara berkelanjutan. Jumlah karyawan yang menjadi peserta pendidikan dan pelatihan juga meningkat menjadi sebanyak 12.040 karyawan dibandingkan target RKAP 2019 sebanyak 10.693 karyawan, terutama didorong adanya pelatihan pengembangan kompetensi di bidang teknologi baru serta kegiatan pengembangan leadership. Direksi optimis bahwa pengetahuan dan keterampilan karyawan PJB akan mampu mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing SDM di era kompetisi regional saat ini.

Untuk memastikan bahwa seluruh karyawan berkontribusi secara maksimal terhadap kemajuan Perusahaan, maka PJB berupaya untuk mengukur keterikatan karyawan terhadap Perusahaan secara berkala melalui *Employee Engagement Survey* terhadap seluruh elemen karyawan yang mendapatkan skor 82,94 meningkat dari skor tahun lalu sebesar 82,78. Hal tersebut dikukuhkan dengan dinobatkannya PJB sebagai *Best Companies to Work for in Asia* dalam ajang *Human Resources Asia Awards 2019*. Indikator penilaian dalam ajang tersebut diantaranya adalah berdasarkan hasil engagement survey model yang dilakukan kepada karyawan meliputi aspek kenyamanan tempat kerja, program Perusahaan maupun keseimbangan pekerjaan dengan kehidupan pribadi karyawan.

PJB is committed to increasing the capacity, integrity, and internal capabilities of employees as one of the Company's important assets. Appropriate human capital management, accompanied by a responsive organization, is believed to be a factor determining the success of PJB in achieving positive performance on an ongoing basis. PJB progressively carries out HR management based on the needs and development of the electricity generation industry.

The strategic role of HR in the Learning & Growth perspective focuses on improving leadership abilities, increasing organizational capabilities, building competency, and productivity strategies to overcome gaps. During 2019, the realization of employee education and training budgets increased by 6.95% to Rp97.66 billion compared to last year's Rp91.31 billion, which shows the high commitment of PJB in continuously improving the quality of human resources. The number of employees participating in education and training also increased to as many as 12,040 employees compared to the 2019 ABOP target of 10,693 employees, mainly encouraged by the development of competency development training in new technology and leadership development activities. The Board of Directors is optimistic that the knowledge and skills of PJB employees will be able to drive increased productivity and competitiveness of human resources in the current era of regional competition.

To ensure that all employees contribute maximally to the progress of the Company, PJB strives to periodically measure employee engagement through the Employee Engagement Survey to all elements of employees who score 82.94, up from last year's score of 82.78. This was confirmed by the awarding of PJB as the Best Companies to Work for in Asia in the 2019 Human Resources Asia Awards. The assessment indicators in the event were based on the results of an engagement survey model conducted for employees covering aspects of workplace comfort, Company programs, and work-life balance.



Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan Audit
Audited Financial Statements



Referensi Kriteria AR
ARA Criteria Reference

Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko Internal Control System and Risk Management

Implementasi dan efektivitas sistem pengendalian internal senantiasa dilakukan PJB secara menyeluruh dengan mengacu pada prinsip COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*). Yakni pelaksanaan pengendalian internal atas pelaporan keuangan dengan implementasi *Internal Control Over Financial Reporting* (ICOFR) pada seluruh proses bisnis di PJB. Hal tersebut dilakukan agar proses pencatatan dan pelaporan keuangan didukung dengan pengendalian internal yang efektif. Selain itu, Satuan Pengawasan Internal berperan sebagai *third line of defense* dengan melaksanakan evaluasi kepatuhan secara rutin guna meningkatkan pengendalian internal Perusahaan.

Manajemen risiko sebagai salah satu pilar GCG diperlukan untuk memberikan jaminan yang wajar dalam pencapaian sasaran Perusahaan. Implementasi manajemen risiko akan terus ditingkatkan penerapannya mengacu pada kerangka ISO 31000:2018 (*Risk Management Guidelines*), baik dari sisi kualitas maupun cakupan pengelolaannya. Hal ini dibuktikan dengan membaiknya hasil *assessment maturity level* Implementasi ERM baik di tingkat Unit Pembangkit maupun di tingkat korporat. Untuk tahun 2019, nilai *assessment maturity level* risiko PJB secara korporat mencapai sebesar 3,36 yang berarti bahwa tingkat kematangan pengelolaan risiko korporasi PJB semakin baik dan dipandang telah terdefinisi dengan baik hingga tingkat operasional.

Dengan adanya aplikasi manajemen risiko berbasis web pada PJB ERM *Dashboard* maka setiap karyawan dapat mengaksesnya sesuai dengan tingkat otorisasi masing-masing sehingga integrasi proses bisnis pengelolaan risiko dapat dipantau secara *real time*.

Implementation and effectiveness of the internal control system are always applied by PJB concerning the principles of the COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*); namely, the implementation of internal control over financial reporting with the implementation of *Internal Control Over Financial Reporting* (ICOFR) in all business processes in PJB. This is to support the process of financial recording and reporting by effective internal control. Also, the Internal Audit Unit acts as the third line of defense by conducting regular compliance evaluations to improve the Company's internal control.

Risk management as one of the pillars of GCG is required which is to provide reasonable guarantees in achieving the Company's goals. The implementation of risk management will continue to be improved, according to the ISO 31000: 2018 (*Risk Management Guidelines*) framework, both in terms of quality and scope of its management. This is evidenced by the improved results of the maturity level assessment of ERM Implementation at both the Generating Unit and the corporate level. For 2019, the corporate maturity level assessment value of PJB risk will reach 3.36, which means that the maturity level of PJB corporate risk management is getting better and is deemed to have been well defined to the operational level.

With the web-based risk management application on PJB's ERM Dashboard, each employee can access based on their respective authorization levels so that the integration of risk management business processes can be monitored in real-time.

Komitmen Menjaga Kualitas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Commitment to Maintaining Quality in Implementing Corporate Governance

Kami yakin bahwa pencapaian kinerja yang baik hanya dapat dipertahankan dalam jangka panjang dan target yang ditetapkan dalam RKAP dapat dicapai, melalui implementasi praktik tata kelola perusahaan (GCG) secara konsisten. Untuk itulah, penerapan GCG menjadi bagian dari rencana strategis PJB untuk mewujudkan kinerja yang transparan, efisien dan bertanggung jawab dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran.

We believe that the achievement of excellent performance can only be maintained in the long term and the targets set in the ABOP can be achieved, through the consistent implementation of corporate governance practices. Therefore, the GCG implementation is part of the PJB's strategic plan to achieve transparent, efficient, and responsible performance by increasing the principles of openness, accountability, responsibility, independence, and fairness.

Pentingnya arti kepemimpinan dalam proses tata kelola perusahaan ditunjukkan dengan adanya peran Direksi, Dewan Komisaris dan para *Senior Leaders* dalam memberi keteladanan dan komitmen terkait praktik tata kelola perusahaan pada tingkatan organisasi masing-masing. Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi dibangun atas dasar prinsip saling menghormati dan memahami tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Anggaran Dasar Perusahaan. Pedoman kerja Dewan Komisaris dan Direksi yang diatur dalam Board Manual yang telah ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.

Tahun 2019 PJB telah melakukan *assessment* GCG berdasarkan parameter Kementerian BUMN dengan pencapaian skor 94,45 dari skor maksimal 100, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 94,17 dan mendapatkan predikat 'Sangat Baik'. Selain itu, peningkatan kualitas implementasi GCG di lingkungan PJB Grup juga senantiasa dilakukan dengan arahan PJB selaku pemegang saham untuk melaksanakan *assessment* GCG Anak Perusahaan setiap tahun. Hal tersebut diyakini dapat mendorong efisiensi operasi, peningkatan nilai dan reputasi Perusahaan di lingkungan PJB Grup secara keseluruhan.

Sejak tahun 2010, PJB telah memiliki kebijakan pengaduan pelanggaran (*whistleblowing system*) sebagai sarana dan jalur komunikasi bagi karyawan, pelanggan, mitra dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan adanya indikasi pelanggaran terkait dengan kode etik, kebijakan Perusahaan maupun tindakan *fraud*. Saat ini, kebijakan WBS yang berlaku telah dimutakhirkan dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor 095.K/010/DIR/2012 dan Nomor: 007.K/DK/PJB/2012. Komite WBS bertugas menerima laporan yang masuk dan melakukan *review* serta menganalisa kecukupan bukti pendukung atas laporan yang disampaikan untuk memastikan ada/tidaknya indikasi kerugian Perusahaan. Di tahun 2019, Komite WBS menerima 4 (empat) pengaduan yang masuk, 2 (dua) pengaduan telah selesai ditindaklanjuti, 1 (satu) pengaduan tidak dapat ditindaklanjuti dan 1 (satu) pengaduan masih dalam proses penyelesaian.

The importance of leadership in the corporate governance process is demonstrated by the role of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Senior Leaders in providing role models and commitments related to corporate governance practices at all organizational levels. The working relationship of the Board of Commissioners and Directors is built on the principle of mutual respect and understanding of their respective duties, responsibilities, and authorities based on applicable laws and regulations as well as the Company's Articles of Association. The Board Manual is reviewed and updated regularly.

In 2019, PJB has conducted a GCG assessment based on the parameters proposed by the SOE Ministry with a score of 94.45 from the maximum score of 100, higher than in the previous year of 94.17 and earned the title "Excellent". Also, improvement in the quality of GCG within the PJB Group is always implemented under the direction of PJB as a shareholder to conduct GCG assessment of Subsidiaries annually. It is believed to drive operating efficiency, increase the value, and company image for the entire PJB Group.

PJB has established a whistleblowing system since 2010 which is a means and channel of communication for employees, customers, partners, and other stakeholders to report violations related to the code of conduct, Company policy, and fraud. Currently, the applicable WBS policy has been updated in the Joint Decree of the Board of Commissioners and Board of Directors No. 095.K/010/DIR/2012 and No: 007.K/DK/PJB/2012. The WBS Committee is tasked to receive incoming reports and then review and analyze the adequacy of supporting evidence to ensure there are indications of the Company's losses. In 2019, the WBS Committee received 4 (four) reports in which 2 (two) reports had been followed up, 1 (one) report could not be followed up and 1 (one) report was still in process.



Analisis Prospek Usaha Business Prospect Analysis

Berdasarkan kajian prospek ekonomi global IMF dalam *World Economic Outlook* memprediksi bahwa ekonomi global di tahun 2020 akan tumbuh lebih baik dibandingkan proyeksi tahun sebelumnya. Namun demikian adanya pandemi covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia maka sebagian lembaga telah meralat proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut. Salah satunya adalah Bank Indonesia meralat proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 3,0% menjadi 2,5% sementara pertumbuhan ekonomi nasional dikoreksi dari kisaran 5,1-5,5% menjadi 4,2-4,6%. Untuk itulah, Direksi memandang bahwa faktor yang mempengaruhi prospek usaha tahun 2020 perlu disikapi dengan kewaspadaan yang tinggi. Bersama dengan segenap jajaran manajemen di bawahnya, Direksi berupaya merumuskan langkah antisipasi agar peran yang diemban oleh PJB tetap memberi arti dan bahkan bernilai tambah.

Total kebutuhan energi listrik mengacu pada RUPTL PLN 2019-2027 diperkirakan akan meningkat menjadi 480,0 TWh pada tahun 2026, atau tumbuh rata-rata 8,3% per tahun dengan rasio elektrifikasi mencapai 98,89% di tahun 2019. Artinya bahwa akses masyarakat terhadap ketersediaan energi listrik sudah semakin baik. Jumlah pelanggan diproyeksikan juga terus meningkat. Untuk tahun 2019 jumlah pelanggan diprediksi mencapai 71.046 dan 92.974 pelanggan di tahun 2027. Target kapasitas terpasang pembangkit listrik di tahun 2020 direncanakan sebesar 74,8 GW, sedangkan realisasinya dalam mendukung Program 35.000 MW berada pada tahapan dan status sebagai berikut, yaitu 14% telah beroperasi, 62% dalam tahap konstruksi, 2% dalam proses perencanaan dan pengadaan dan sisanya 20% dalam tahap kontrak belum konstruksi. PJB berkomitmen terus mendukung suksesnya Program 35.000 MW dengan meningkatkan peran dan kontribusi yang semakin besar. Ketersediaan energi listrik diyakini mampu mendorong terciptanya kesempatan kerja, mengubah struktur ekonomi suatu daerah serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Tren industri kelistrikan dunia 3D (Dekarbonisasi, Digitalisasi dan Desentralisasi) tentunya menjadi tantangan tersendiri yang perlu dikaji dampaknya terhadap proses bisnis eksisting sekarang dan merumuskan strategi yang tepat. Dalam hal Dekarbonisasi, Direksi melakukan langkah dan strategi antara lain pengembangan pembangkit baru berbahan bakar EBT dengan porsi yang lebih besar dengan rencana pembangunan PLTS Terapung Cirata berkapasitas 145 MW, meng-EBT-kan PLTU batubara dengan metode *co-firing*, dan mengoptimalkan kinerja keandalan pembangkit eksisting. Dalam hal Digitalisasi, PJB telah membangun sistem REMDO (*Remote, Engineering, Monitoring, Diagnostic and Optimization*) sehingga kondisi dan *performance* pembangkit dapat dimonitor secara *real time*. Saat ini, generasi REMDO akan digantikan dengan yang terbaru, yakni PJB iCORE merupakan aplikasi *digital expert* untuk memastikan kinerja keandalan dan efisiensi pembangkit tercapai secara optimal.

According to the IMF's global economic prospects in the *World Economic Outlook*, it is predicted that the global economy in 2020 will grow better than the previous year's projection. However, with the COVID-19 pandemic affecting most of the world, some institutions have rectified the projected economic growth. One is that Bank Indonesia corrected the projected global economic growth from 3.0% to 2.5% while national economic growth was corrected from the range of 5.1-5.5% to 4.2-4.6%. Therefore, the Board of Directors considers that the factors affecting business prospects in 2020 are required to be highly concerned. Together with all levels of management, the Board of Directors seeks to formulate anticipatory measures so that the role assumed by PJB continues to provide benefits and added values.

Total electricity requirements referring to PLN's 2019-2027 Electricity Supply Business Plan are expected to increase to 480.0 TWh in 2026 or grow by an average of 8.3% per year with an electrification ratio reaching 98.89% in 2019. This can also be understood that public access to the availability of electrical energy is getting better. The number of customers is projected to increase. For the 2019 period, the number of customers is predicted to reach 71,046 and 92,974 customers in 2027. The target of installed capacity of power plants in 2020 is planned to reach 74.8 GW, while the realization in support of the 35,000 MW Program is at the following stages and status, with 14% operating, 62% were in the construction phase, 2% were in the planning and procurement process and the rest 20% were in the contract stages but not constructed yet. PJB is committed to supporting the success of the 35,000 MW Program by enhancing its role and increasing contribution. The availability of electricity is believed to encourage job recruitment, change the regional economic structure, and increase the income and welfare of the community.

The trends in the electricity industry in the 3D world (Decarbonization, Digitalization, and Decentralization) are certainly a challenge that is required to be assessed for their impact on existing business processes and formulating appropriate strategies. In the case of Decarbonization, the Board of Directors takes some initiatives and strategies including the development of a new Renewable Energy-fueled power plant with a larger portion with the planned 145 MW Cirata Floating SPP, Renewable Energy Coal-fired Power Plant with the *co-firing* method, and optimizing the reliability performance of the power plant existing. In terms of Digitalization, PJB has built a REMDO (Remote, Engineering, Monitoring, Diagnostic, and Optimization) system so that the plant's condition and performance can be monitored in real-time. Currently, the REMDO power generation will be refined, i.e. PJB's iCORE is a digital expert application to ensure optimum reliability and plant efficiency performance.

Dalam hal Desentralisasi, di bidang pembangkit tenaga listrik (*distributed generation*) PJB telah mengembangkan *energy storage system* guna memanfaatkan EBT yang dihasilkan untuk kepentingan rumah tinggal, pabrik, perkebunan, pertambangan dan industri berupa *Green Smart Power* (GSP) dengan produk solar PV. Masyarakat sebagai pelanggan energi listrik akan self-generation yaitu sebagai konsumen pengguna listrik sekaligus pada saat yang sama juga berperan sebagai produsen listrik.

Dilihat dari sisi eksternal, prospek usaha PJB dipengaruhi oleh 5 (lima) aspek pembentuk industri yang terdiri dari persaingan dalam industri listrik, supplier, produk pengganti, pemain baru dalam industri, dan pembeli. Pada sisi persaingan, terjadi bukan hanya di dalam competition market, tapi juga di *capital market* memperebutkan dana dari investor maupun pinjaman dari lender, serta persaingan di *competency market* memperebutkan SDM-SDM terbaik. Pada sisi supplier, pemasok energi primer tetap menjadi kunci kelangsungan operasi pembangkit. Pada sisi produk pengganti, listrik masih menjadi produk utama untuk memenuhi kebutuhan energi dalam kehidupan. Berbekal kekuatan yang dimiliki sebagai produsen listrik dengan sistem manajemen terintegrasi yang diakui secara Internasional, dengan portofolio pembangkit yang lengkap dan beragam menjadi kombinasi tepat dalam mengoptimalkan prospek usaha yang positif untuk terus tumbuh dan berkembang.

PJB meyakini bahwa prospek lingkungan eksternal yang positif tetap dapat dimanfaatkan secara optimal tentunya dengan peningkatan kualitas sejumlah aspek seperti: (a) dukungan SDM di bidang Operasi dan Pemeliharaan (O&M berbasis sistem teknologi informasi), (b) menerapkan tata kelola pembangkitan yang mengadopsi kaidah *best practices* dengan konsisten menerapkan PAS 55 dan ISO 55001:2014, (c) keberadaan pembangkit yang dekat dengan pusat beban dan potensi peningkatan kapasitas melalui program *repowering* maupun *extension*, (d) penguatan *knowledge management* sebagai budaya pembelajaran dan (e) dukungan anak perusahaan di PJB Grup yang bergerak di usaha pendukung jasa kelistrikan, termasuk EPC dan *stockist* pembangkit untuk menjadi perusahaan pembangkitan terintegrasi (*integrated power company*).

Prospek Usaha yang disusun telah mempertimbangkan berbagai faktor eksternal, kekuatan internal maupun tantangan yang dihadapi agar dapat mendorong terciptanya kesinambungan nilai Perusahaan dalam jangka panjang. Dalam rangka menjawab peluang dan tantangan tersebut, Direksi menetapkan 5 (lima) fokus utama dalam menyongsong horizon bisnis baru PJB, meliputi (a) investasi di pembangkit, (b) meng-EBT-kan PLTU batubara, (c) membesarkan Anak Perusahaan, (d) mengembangkan bisnis solar PV di Indonesia Timur, dan (e) membangun bisnis EAM di seluruh Indonesia. Kelima fokus tersebut tentunya perlu didukung oleh strategi dan program kerja yang tepat sasaran agar mampu mengoptimalkan peluang usaha dan menjaga sustainability korporasi dalam jangka panjang.

In the case of Decentralization, in the field of power generation (*distributed generation*), PJB has developed an energy storage system to utilize the Renewable Energy generated for the benefit of homes, factories, plantations, mining and industry in the form of Green Smart Power (GSP) with solar PV products. The community as electricity customers will be self-generation, namely as electricity users while acting as a producer.

Externally, PJB's business prospects are influenced by 5 (five) aspects of forming industry which consists of competition in the electricity industry, suppliers, substitute products, new players in the industry, and buyers. In the market competition, it occurs not only in the competitive market but also in the capital market for funds from investors and loans from lenders, as well as competition in the competency market for the best HR. On the market supply, the primary energy supplier remains the key to the continuity of plant operations. On the side of substitute products, electricity is still the main product to meet the energy needs of life. Supported with the power of an electricity producer with an internationally recognized integrated management system, with a complete and diverse power plant portfolio, it becomes the right combination in optimizing positive business prospects to continue to grow and develop.

PJB believes that the prospect of a positive external environment can still be utilized optimally, of course, by improving the quality of several aspects such as (a) HR support in the field of Operations and Maintenance (O&M based on information technology systems), (b) implementing generation governance that adopts best practices by consistently applying PAS 55 and ISO 55001: 2014, (c) the existence of power plants close to the load center and the potential for capacity building through repowering and extension programs, (d) strengthening knowledge management as a learning culture and (e) support of subsidiaries in PJB Group engaged in the business of supporting electricity services, including EPC and generation stockists to become an integrated power company.

The Business Prospects that have been prepared have considered various external factors, internal strengths and challenges faced encouraging the creation of the Company's long-term value sustainability. To respond to these opportunities and challenges, the Board of Directors sets 5 (five) main focuses in welcoming the PJB's new business horizon, including (a) investing in power plants, (b) focusing on Renewable Energy coal-fired power plants, (c) fostering subsidiaries, (d) developing the solar PV business in Eastern Indonesia, and (e) building EAM businesses throughout Indonesia. The five focuses are required to support strategies and work programs that are well targeted to optimize business opportunities and maintain corporate long-term sustainability.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility

PJB meyakini bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan wujud komitmen dan kontribusi PJB untuk pembangunan berkelanjutan yang meliputi aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Untuk itulah, PJB senantiasa mendorong terciptanya sinergi dan tumbuh bersama dengan para pemangku kepentingan guna mewujudkan keseimbangan antara harapan pemangku kepentingan dan tujuan PJB untuk menjadi *"most trusted and preferred company"*. Acuan PJB dalam melaksanakan tanggung jawab sosial agar sistematis dan terarah mengacu pada *Roadmap CSR 2018-2022*. Pelibatan dan pengembangan masyarakat menjadi fokus CSR PJB yang dirancang dengan pendekatan *Community Involvement & Development (CID)* berbasis ISO 26000 SR. Strategi CSR PJB saat ini adalah "Energi Pembangkit Negeri" dengan 2 (dua) pilar penting yaitu mengelola dampak operasi dengan memberikan manfaat sesuai kompetensi inti PJB serta fokus pada energi (hijau) berkelanjutan dengan melakukan komunikasi dan pembinaan hubungan yang efektif.

Realisasi dana CSR tahun 2019 meningkat 36,74% menjadi Rp32,23 miliar atau 94,5% dari target RKAP, dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp23,57 miliar, yang terbagi menjadi 4 bidang, yaitu (1) pemberdayaan, (2) pengembangan kapasitas, (3) infrastruktur dan (4) donasi. Realisasi dana CSR didominasi oleh bidang pemberdayaan sebesar 46,32%; dilanjutkan porsi CSR bidang infrastruktur sebesar 23,05%; CSR bidang pengembangan kapasitas sebesar 18,40% dan porsi dana CSR donasi menjadi 12,22%. Indikator keberhasilan program CSR diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), yang menunjukkan seberapa besar tingkat kepuasan masyarakat terhadap program CSR yang dilaksanakan oleh PJB.

PJB melaksanakan program tanggung jawab sosial di bidang lingkungan merupakan wujud kontribusi terhadap pelestarian lingkungan untuk mengelola dampak yang ditimbulkan dari kegiatan operasional sebagai penyedia tenaga listrik. Kebijakan Sistem Manajemen PJB mengatur bahwa penggunaan sumber daya energi dan sumber daya alam dalam kegiatan operasional dan pemeliharaan unit pembangkit dilakukan secara efisien mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta ISO 14001 tentang Sistem Manajemen Lingkungan.

Disamping itu, pelaksanaan CSR PJB yang melebihi kewajiban diantaranya dilakukan dengan pemberian upah di atas UMR sebagai cerminan program tanggung jawab kepada karyawan; pengembangan *green power plant* dalam program tanggung jawab sosial terhadap lingkungan; pembuatan desa wisata binor *harmony*, kampung setrum (sentra energi terbarukan untuk masyarakat), daun *sustainable village*, dan program pijar berdaya dalam program tanggung jawab terhadap pengembangan sosial dan kemasyarakatan; dan lain-lain.

PJB believes that the implementation of corporate social responsibility is a form of PJB's commitment and contribution to sustainable development that includes economic, social, and environmental aspects. Therefore, PJB always encourages the creation of synergy and grows together with stakeholders to create a balance between stakeholder expectations and the PJB's goal to become the "most trusted and preferred company". PJB's reference for systematic corporate social responsibility refers to the CSR Roadmap 2018-2022. Community involvement and development are the focus of PJB CSR, which is designed with an ISO 26000 SR Community Involvement & Development (CID) approach. PJB's current CSR strategy is "State Power Energy" with 2 (two) important pillars: managing the impact of operations by providing benefits in line with PJB's core competencies and focusing on sustainable (green) energy by communicating and fostering effective relationships.

The realization of CSR funds in 2019 increased by 36.74% to Rp32.23 billion or 94.5% of the ABOP target, compared to the previous year of Rp23.57 billion, which is divided into 4 areas: (1) empowerment, (2) capacity development, (3) infrastructure, and (4) charity. The realization of CSR funds was dominated by the empowerment sector by 46.32%; followed by the portion of CSR in the infrastructure sector by 23.05%; CSR in the sector of capacity development was 18.40%; the portion of charity was 12.22%. Indicators of the success of CSR programs are measured by the Community Satisfaction Index (IKM), which shows how much the level of community satisfaction with CSR programs implemented by PJB.

PJB establishes corporate social responsibility programs in the environmental aspect as a form of a contribution to environmental preservation to managing the impacts arising from operational activities as a provider of electricity. PJB's Management System Policy regulates that the use of energy and natural resources in operations and maintenance of generation units is performed efficiently following Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Preservation and Management and ISO 14001 concerning Environmental Management Systems.

Additionally, PJB CSR that exceeds the responsibility criteria includes the provision of salary above the minimum rate as a reflection of the employee's responsibility program; development of green power plants in social responsibility programs for the environment; the creation of a Binor Harmony Tourism Village, Setrum Village (public renewable energy center), Daun Sustainable Village, and Pijar Berdaya program as corporate responsibility for social and community development; and others.

Komitmen dan konsistensi PJB dalam menerapkan CSR telah diakui secara nasional maupun internasional, diantaranya *Social Empowerment* dalam ajang *Asia Responsible Enterprise Awards 2019* di Taiwan, Indonesia *Sustainable Development Goals Awards* (ISDA) 2019 dengan membawa 11 penghargaan maupun CSR Indonesia Award 2019 terutama di bidang edukasi melalui TK Elekrika binaan. Ke depannya, CSR PJB akan terus ditingkatkan kualitas dan cakupannya guna memberikan dampak terhadap peningkatan dan perbaikan dari segi ekonomi, sosial dan lingkungan yang semakin besar.

PJB's commitment and consistency in implementing CSR have been recognized nationally and internationally, including Social Empowerment in the 2019 Asia Responsible Enterprise Awards in Taiwan, the 2019 Indonesia Sustainable Development Goals Awards (ISDA) by bringing 11 awards and the 2019 CSR Indonesia Award especially in the field of education through Elekrika fostered kindergarten. In the future, PJB CSR will continue to be improved in terms of quality and scope to increase the benefit on economic, social, and environmental aspects.

Perubahan Komposisi Direksi

Changes in Board of Directors Composition

Pada tahun 2019, jumlah dan komposisi Direksi PJB tidak mengalami perubahan, yaitu tetap berjumlah 6 (enam) orang sebagaimana ditetapkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler tanggal 21 Maret 2016 dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler tanggal 10 Agustus 2016.

In 2019, there is no change in the composition of PJB's Board of Directors with 6 (six) persons as stipulated in the Circular Decree of Shareholders Decision on March 21, 2016, and the Circular Decree of Shareholders Decision on August 10, 2016.

Nama Name	Jabatan Position
Iwan Agung Firstantara	Direktur Utama President Director
Sugiyanto	Plt. Direktur Operasi- 1 Act. Director of Operations-1
Miftahul Jannah	Direktur Operasi - 2 Director of Operations-2
Henky Heru Basudewo	Direktur Pengembangan dan Niaga Director of Business and Commerce
Tjutju Kurnia Sutjningsih	Direktur Keuangan Director of Finance
Suharto	Direktur SDM dan Administrasi Director of HC and Administration

Segenap Jajaran Direksi diharapkan dapat terus meningkatkan soliditas internal guna meningkatkan kinerja PJB secara berkelanjutan sekaligus mendukung program pemerintah menjaga ketahanan dan kedaulatan energi nasional. Kami berkomitmen untuk melaksanakan peran, tugas dan tanggung jawab sebagai Direksi PJB secara independen dan akuntabel agar dapat meningkatkan capaian kinerja yang lebih besar dan lebih bernilai di masa depan serta memberikan yang terbaik kepada seluruh pemegang saham dan segenap pemangku kepentingan.

The entire Board of Directors is expected to continuously improve internal solidity for PJB's continued performance improvement while supporting the government's program to maintain national energy availability. We are committed to the role, duties, and responsibilities of PJB's Board of Directors independently and accountably to increase the achievement of better and more valuable performance in the future and provide the best for all shareholders and all stakeholders.

Apresiasi Letter of Appreciation

Dengan segala keberhasilan yang dicapai PJB di tahun 2019, Direksi menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada Dewan Komisaris atas arahan dan kemitraan strategis yang telah terjalin selama ini. Pencapaian ini merupakan hasil dari sinergi dan kerja keras semua pihak yang berkepentingan dan tentunya dukungan dari Pemegang Saham dan Dewan Komisaris dalam mengarahkan langkah PJB.

Kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas kepercayaan dan arahan Pemegang Saham, *monitoring* dan penasihat Dewan Komisaris, dedikasi seluruh karyawan serta mitra usaha atas kepercayaan, kontribusi dan dukungan yang telah diberikan. Kami yakin PJB dapat terus melaju menghadapi berbagai tantangan dengan meraih berbagai peluang positif untuk pertumbuhan kinerja yang optimal.

With all the achievements of PJB in 2019, the Board of Directors expressed their gratitude and respect to the Board of Commissioners for the directives and strategic partnerships that have been well established. This achievement is the result of the synergy and dedication of all parties and certainly, the support of the Shareholders and the Board of Commissioners in encompassing PJB.

We express our appreciation and gratitude for the trust and direction of the Shareholders, the monitoring and advisory of the Board of Commissioners, the dedication of all employees, and the trust of business partners as well as the contribution and support that has been presented. We believe that PJB can continue to face challenges by achieving positive opportunities for optimal performance growth.

Surabaya, 27 Mei 2020
Surabaya, May 27, 2020

Direksi
Board of Directors



Iwan Agung Firstantara
Direktur Utama
President Director



Plt. Direktur Operasi - 1
Acting Director of Operations - 1



Miftahul Jannah
Direktur Operasi - 2
Director of Operations - 2



Henky Heru Basudewo
Direktur Pengembangan dan Niaga
Director of Development
and Commerce



Tjutju Kurnia S.
Direktur Keuangan
Director of Finance



Suharto
Direktur SDM dan Administrasi
Director of Human Capital
and Administration

SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2019 PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI

STATEMENT FROM BOARD OF COMMISSIONERS ON ACCOUNTABILITY OVER ANNUAL REPORT 2019 PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI

Laporan Tahunan 2019 PT Pembangkitan Jawa-Bali menyajikan informasi mengenai kinerja Perusahaan, penerapan tata kelola perusahaan, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan informasi lainnya yang relevan dan signifikan bagi para pemangku kepentingan.

Kami, segenap Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa-Bali yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan 2019 PT Pembangkitan Jawa-Bali.

PT Pembangkitan Jawa-Bali Annual Report 2019 presents information on the Company's performance, implementation of corporate governance, implementation of corporate social responsibility, Financial Statements for the period ended on December 31, 2019, and other information relevant and significant for the stakeholders.

We, the undersigned, the entire Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa-Bali, declare full accountability for the accuracy of the content of PT Pembangkitan Jawa-Bali Annual Report 2019.

Surabaya, 27 Mei 2020
Surabaya, May 27, 2020

Dewan Komisaris
Board of Commissioners


Sriyono D. Siswoyo
Komisaris Utama
President Commissioner


Defy Indiyanto Budiarto
Komisaris Independen
Independent Commissioner


Sunarsip
Komisaris Independen
Independent Commissioner


Jisman P. Hutajulu
Plt. Komisaris
Acting Commissioner


Benny M.M. Marbun
Plt. Komisaris
Acting Commissioner


Hendra Iswahyudi
Plt. Komisaris
Acting Commissioner

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2019 PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI STATEMENT FROM BOARD OF DIRECTORS ON ACCOUNTABILITY OVER ANNUAL REPORT 2019 PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI

Laporan Tahunan 2019 PT Pembangkitan Jawa-Bali menyajikan informasi mengenai kinerja Perusahaan, penerapan tata kelola perusahaan, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan informasi lainnya yang relevan dan signifikan bagi para pemangku kepentingan.

Kami, segenap Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan 2019 PT Pembangkitan Jawa-Bali.

PT Pembangkitan Jawa-Bali Annual Report 2019 presents information on the Company's performance, implementation of corporate governance, implementation of corporate social responsibility, Financial Statements for the period ended on December 31, 2019, and other information relevant and significant for the stakeholders.

We, the undersigned, the entire Board of Directors of PT Pembangkitan Jawa-Bali, declare full accountability for the accuracy of the content of PT Pembangkitan Jawa-Bali Annual Report 2019.

Surabaya, 27 Mei 2020
Surabaya, May 27, 2020

Direksi
Board of Directors



Iwan Agung Firstantara
Direktur Utama
President Director



Sugiyo
Plt. Direktur Operasi - 1
Acting Director of Operations - 1



Miftahul Jannah
Direktur Operasi - 2
Director of Operations - 2



Henky Heru Basudewo
Direktur Pengembangan dan Niaga
Director of Development
and Commerce



Tjutju Kurnia S.
Direktur Keuangan
Director of Finance



Suharto
Direktur SDM dan Administrasi
Director of Human Capital
and Administration

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI

STATEMENT FROM BOARD OF DIRECTORS REGARDING THE RESPONSIBILITY RISK MANAGEMENT AND INTERNAL CONTROL SYSTEM PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI

Atas nama Direksi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Iwan Agung Firstantara
Jabatan : Direktur Utama
Alamat Kantor : Jl. Ketintang Baru No.11 Surabaya 60231

Alamat Domisili : Dharmahusada Indah Timur 4 Blok M203, Surabaya
2. Nama : Tjutju Kurnia S.
Jabatan : Direktur Keuangan
Alamat Kantor : Jl. Ketintang Baru No.11 Surabaya 60231

Alamat Domisili : Manyar Kertoadi W101, Surabaya

Menyatakan bahwa:

Sehubungan dengan tanggung jawab terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pembangkitan Jawa-Bali dan Entitas Anak Perusahaan untuk tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018, yang ditandatangani pada tanggal 31 Maret 2020 dalam kaitannya dengan integritas laporan keuangan telah disusun dengan menerapkan sistem manajemen risiko dan pengendalian internal perusahaan secara efektif dan efisien dalam seluruh aspek yang material.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

On behalf of the Board of Directors, we the undersigned:

1. Name : Iwan Agung Firstantara
Position : President Director
Office Address : Jl. Ketintang Baru No.11 Surabaya 60231
Address of Domicile : Dharmahusada Indah Timur 4 Blok M203, Surabaya
2. Name : Tjutju Kurnia S.
Position : Director of Finance
Alamat Kantor : Jl. Ketintang Baru No.11 Surabaya 60231
Address of Domicile : Manyar Kertoadi W101, Surabaya

Declare that:

The statement of The Board of Directors regarding the responsibility for the Consolidated Financial Statements of PT Pembangkitan Jawa-Bali and Subsidiaries as at December 31, 2019 and December 31, 2018, which we signed on March 31, 2020 is founded on sound system of risk management and internal control system are operating efficiently and effectively in all material aspect.

The declaration has been made truthfully.

Atas Nama Direksi
For and behalf of the Board of Directors

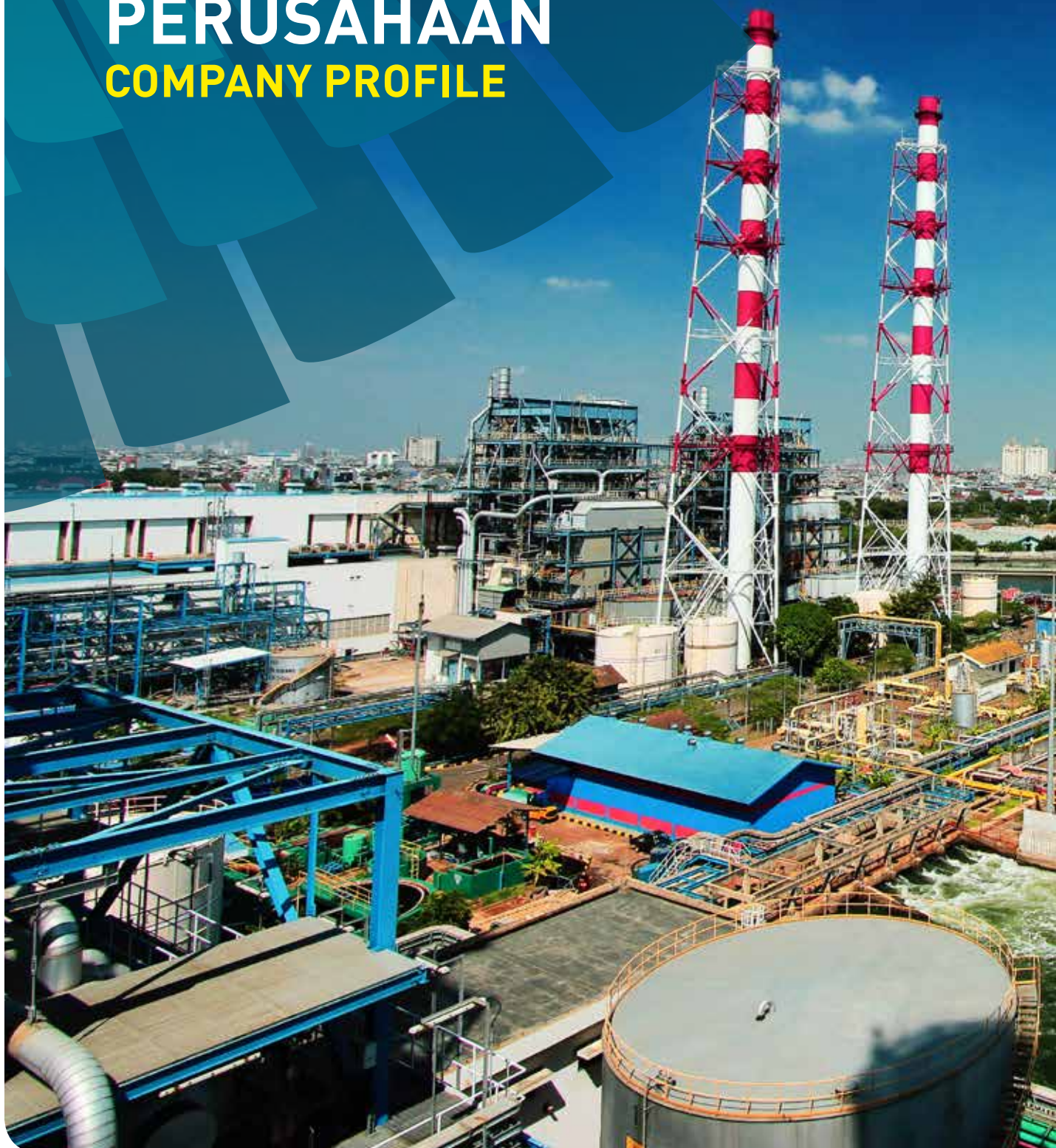
Surabaya, 27 Mei 2020
Surabaya, May 27, 2020


Iwan Agung Firstantara
Direktur Utama
President Director


Tjutju Kurnia S.
Direktur Keuangan
Director of Finance



PROFIL PERUSAHAAN COMPANY PROFILE





Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan Audit
Audited Financial Statements



Referensi Kriteria AR
AR Criteria Reference

IDENTITAS PERUSAHAAN

COMPANY IDENTITY

Menyadari sepenuhnya bahwa saat ini dunia usaha memasuki era *flat competition*, dimana persaingan tak lagi memandang besar kecilnya perusahaan, PJB berupaya terbuka dan adaptif dengan perubahan tersebut. Strategi usaha untuk menjadi pemain penting industri pembangkit listrik dilakukan dengan mengedepankan kerja sama dan kolaborasi dengan mitra kerja baik di tingkat nasional, regional maupun global.

Fully considering that the recent world of business is approaching the era of flat competition, where competition is no longer on companies' capacity; PJB strives to be open and adaptive to these changes. The business strategy to become a key player in the power plant industry is realized by promoting cooperation and collaboration with business partners both national, regional, and global partners.

	Nama Perusahaan Company Name	PT Pembangkitan Jawa-Bali	PT Pembangkitan Jawa-Bali
	Tanggal Pendirian Date of Establishment	3 Oktober 1995	October 3, 1995
	Bidang Usaha Lines of Business	1. Penyediaan tenaga listrik yang berupa kegiatan pembangkitan tenaga listrik yang ekonomis, bermutu tinggi, dan dengan keandalan yang baik; 2. Penunjang tenaga listrik yang meliputi kegiatan: a) Pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan b) Pemeliharaan dan pengoperasian peralatan ketenagalistrikan 3. Usaha lainnya yang berkaitan dengan usaha Perusahaan dalam rangka memanfaatkan secara maksimal potensi yang dimiliki.	1. Provision of electricity in form of economical, high-quality, and reliable power generation activities 2. Supports of electricity that covers the activity of: a) Development and installation of electricity equipment b) Maintenance and operation of electricity equipment 3. Other businesses related to the Company's business in order to utilize optimally its owned potentials.
	Status Perusahaan Company Status	Anak Perusahaan PT PLN (Persero)	Subsidiary of PT PLN (Persero)
	Pemegang Saham Shareholders	1. PT PLN (Persero) sebanyak 1 Saham Seri 1 dan 5.999.999.998 Saham Seri 2 (99,99%) dan 2. Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) sebanyak 1 Saham Seri 2 (0,01%)	1. PT PLN (Persero) owns 1 (one) Series-1 Shares and 5.999.999.998 Series-2 Shares (99,99%) and 2. Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) owns 1 (one) Series-1 Shares (0,01%)
	Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment	1. Akta Pendirian PT PLN Pembangkitan Jawa-Bali II, Nomor 16 tanggal 3 Oktober 1995 2. Akta Perubahan Nama menjadi PT Pembangkitan Jawa-Bali, dibuat dihadapan notaris Henny Singgih dengan Akta Nomor 34 tanggal 20 Februari 2001	1. Deed of Establishment of PT PLN Pembangkitan Jawa-Bali II No. 16, dated October 3, 1995 2. Deed of Name Change to PT Pembangkitan Jawa-Bali by a Notary, Henny Singgih, No. 34, on February 20, 2001
	Modal Dasar Authorized Capital	Rp12.000.000.000.000,- (Dua belas triliun Rupiah)	Rp12.000.000.000.000,- (Twelve trillion Rupiah)
	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid-in Capital	Rp3.000.000.000.000,- (Tiga triliun Rupiah)	Rp3.000.000.000.000,- (Three trillion Rupiah)



	Jumlah Karyawan Total Employees	3.186 orang	3.186 employees
	Kantor Pusat Head Office	Jl. Ketintang Baru No.11 Surabaya 60231 - Indonesia ☎ (62-31) 828 3180 (Hunting) 📠 (62-31) 828 3183 ✉ info@ptpjb.com	Jl. Ketintang Baru No.11 Surabaya 60231 - Indonesia ☎ (62-31) 828 3180 (Hunting) 📠 (62-31) 828 3183 ✉ info@ptpjb.com
	Kantor Perwakilan Representative Office	Gedung Menara Bidakara 2 Lantai 16 Jl. Jend Gatot Subroto Kav 71-73 Pancoran – Jakarta Selatan 12870 ☎ (021) 8370 8764-65 📠 (021) 8370 8746 ✉ ptpjbkt@ptpjb.com	Bidakara Tower 2 Building Floor 16 Jl. Jend Gatot Subroto Kav 71-73 Pancoran – Jakarta Selatan 12870 ☎ (021) 8370 8764-65 📠 (021) 8370 8746 ✉ ptpjbkt@ptpjb.com
	Contact Center Contact Center	☎ (62-31) 828 3180 (Hunting) ☎ (62-31) 828 3183 🌐 www.facebook.com/ptpjb 📱 @ptpjb 📺 @ptpjb	☎ (62-31) 828 3180 (Hunting) ☎ (62-31) 828 3183 🌐 www.facebook.com/ptpjb 📱 @ptpjb 📺 @ptpjb
	Wilayah Kerja Operational Area	- 8 (delapan) Unit Pembangkit dan 1 (satu) Unit Pembangkit Riset (PLTS Cirata) - 5 (lima) Unit Bisnis Jasa Operasi dan Pemeliharaan FTP-1 Jawa - 16 (enam belas) Unit Bisnis Jasa Operasi dan Pemeliharaan Luar Jawa - 1 (satu) Unit Bisnis Jasa Operasi dan Pemeliharaan IPP - 5 (lima) Unit Bisnis Jasa Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit PLN di Site PJB - Kepemilikan saham pada 8 (Delapan) Unit Pembangkit IPP - Kepemilikan saham di Perusahaan Operasi dan Pemeliharaan - 3 (tiga) Unit Sewa Pembangkit - 2 (dua) Unit Pelayanan Pemeliharaan - 1 (satu) Unit Badan Pengelola Waduk Cirata - 1 (satu) Unit Bisnis Jasa O&M Luar Jawa - 1 (satu) Unit PJB Academy - 5 (lima) Anak Perusahaan dan 4 (empat) Perusahaan Asosiasi	- 8 (eight) Generation Unit (GU) and 1 (one) Unit of Research Power Plant (Cirata SPP) - 5 (nine) Operation & Maintenance Service Business Units FTP-1 Java - 16 (sixteen) Operation & Maintenance Service Business Units outside Java - 1 (one) Operation & Maintenance Service Business Units for IPP - 5 (two) Operation & Maintenance Service Business Units for PLN Power Plant at PJB Site - Share ownership in 8 (eight) Units of IPP - Share ownership in Operational and Maintenance Companies - 3 (three) Generation Units for Lease - 2 (two) Units of Maintenance Services - 1 (one) Cirata Reservoir Management Unit - 1 (one) Unit of O&M Services outside Java - 1 (one) Unit of PJB Academy - 5 (five) Subsidiaries and 4 (four) Associated Companies
	Website Website	www.ptpjb.com	www.ptpjb.com

RIWAYAT SINGKAT PJB

PJB BRIEF HISTORY

Jejak Langkah Milestones

**Pendirian
Perusahaan**
Corporate
Establishment

1995

Stable Growth
Stable Growth

2000 – 2010

- 2000** Perubahan nama menjadi PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali
The name changing to PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali
- 2001** Mendirikan anak perusahaan PT PJB Services dengan bidang jasa O&M pembangkit
Established a subsidiary namely PT PJB Services engaged in the power plant operations and maintenance services
- 2003** Penyertaan saham di PT Rekadaya Elektrika, bergerak di bidang jasa Engineering, Procurement And Construction (EPC) pembangkit listrik
Shares investment at PT Rekadaya Elektrika (RE), a company engaging in EPC services for electricity industry
- 2004 - 2006** Penyertaan saham untuk pengembangan pembangkit di sejumlah perusahaan
Shares investment for power plant development at few companies
- 2009** Mendirikan Unit Bisnis Jasa jasa O&M (UBJOM)
Established O&M Service Business Unit (OMSBU)

Perkembangan usaha pembangkit listrik semakin kompetitif dan PJB terus berupaya mengambil peran serta kontribusi yang semakin luas dalam mendukung ketahanan energi listrik nasional.

The development of the power-plant business becomes more competitive and PJB continues to take a broader role and contribution in supporting national electricity.



Operational Excellence
Operational Excellence

2011 – 2016

- 2012** Implementasi Manajemen Aset PAS 55
PAS 55 Asset Management Implementation
- 2013** Raih Sertifikasi PAS 55 di seluruh Unit Pembangkit
Achieved PAS 55 Certification for all Power Plant Units
- 2014** Integrasi sistem manajemen PJB IMS dan Kinerja ekselen tertinggi di Indonesia
PJB Integrated Management System (PJB IMS) and the highest excellence performance in Indonesia
- 2015** Pendirian Anak Perusahaan PT PJB Investasi
The establishment of PJB Investasi (PJB I) as a subsidiary
- 2016** Perubahan Visi dan Misi Perusahaan
Changes of Company's Vision and Mission

Transformasi Korporat
Corporate Transformation

2017 - 2020

- 2017** Proper Emas PLTU Paiton (2017)
Gold Proper of Paiton CFPP
- 2018** Meraih *Band Industry Leader Baldrige Excellence Framework* pertama di Indonesia
Achieved Band Industry Leader of Baldrige Excellence Framework, the first one in Indonesia
- 2019** *Commercial Operation Date (COD)* PLTU Jawa 7 Unit 1 1.000 MW menjadi pembangkit terbesar dan pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi *boiler Ultra Super Critical*
The Java-7 1x1,000 MW CFPP has operated commercially (COD) is the largest and first power plant in Indonesia that uses the Ultra Super Critical boiler technology

PT Pembangkitan Jawa-Bali selanjutnya disingkat PJB memiliki sejarah yang cukup panjang di dunia pembangkit listrik nasional. Sejarah berdirinya PJB tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang PT PLN (Persero). Sejarah PJB berawal dari restrukturisasi yang dilakukan PLN (Perusahaan Listrik Negara) pada tahun 1982, dengan melakukan pemisahan unit sesuai fungsinya, yaitu Unit PLN Distribusi dan Unit PLN Pembangkitan serta Unit PLN Penyaluran. Selanjutnya pada 3 Oktober 1995, PLN melakukan restrukturisasi khusus bidang pembangkitan dengan mendirikan dua anak perusahaan, yaitu PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I yang berkantor pusat di Jakarta dan PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II yang berkantor pusat di Surabaya.

PT Pembangkitan Jawa-Bali, hereinafter abbreviated PJB, has a long history in the world of national power generation. The history of PJB is in line with the existence of PT PLN (Persero). The history of PJB began with the restructuring by Perusahaan Listrik Negara (PLN) in 1982, by separating units based on their functions, namely PLN Distribution Unit and PLN Power Plant Unit and PLN Transmission Unit. Furthermore, on October 3, 1995, PLN conducted a special restructuring in the field of power generation by establishing two subsidiaries: PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I, headquartered in Jakarta and PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II, headquartered in Surabaya.

Keterangan Perubahan Nama Perusahaan Description of Company Name Change

Sejak tahun 2001, PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali berganti nama menjadi PT Pembangkitan Jawa-Bali yang dicatat dalam akta Perubahan Nama Perusahaan Nomor 34 tanggal 20 Februari 2001 oleh Notaris Henny Singgih.

Since 2001, PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali has changed its name to PT Pembangkitan Jawa-Bali which was stated in the Notarial Deed on the Company's Name Change No. 34 on February 20, 2001, by Henny Singgih.

Pendirian PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II dicatat dalam akta pendirian Perseroan Terbatas No 16 tanggal 3 Oktober 1995 oleh Notaris Poerbaningsih Adiarsito. Pada tahun 2000, PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I berganti nama menjadi PT Indonesia Power (IP), sedangkan PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II berganti nama menjadi PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali yang dicatat dalam akta Perubahan Nama Perusahaan Nomor 9 tanggal 3 Agustus 2000 oleh Notaris Henny Singgih.

The establishment of PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II was stated in the notarial deed on the establishment of Limited Liability Company No. 16 on October 3, 1995, by Poerbaningsih Adiarsito. In 2000, PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I changed its name to PT Indonesia Power (IP), while PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II changed its name to PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali stated in the notarial deed on Company Name Change No. 9 on August 3, 2000, by Henny Singgih.

PJB Saat Ini Current PJB

Saat ini, PJB telah menjadi salah satu perusahaan yang cukup disegani di tanah air, khususnya di bidang ketenagalistrikan. Seiring dengan perkembangan dunia usaha dan tuntutan pasar, PJB kini juga melaksanakan kegiatan usaha pembangunan dan/atau pemasangan peralatan ketenagalistrikan, pemeliharaan dan/atau pengoperasian peralatan ketenagalistrikan, serta usaha yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan dalam rangka memanfaatkan secara maksimal potensi yang dimiliki. Dalam rentang waktu hingga 2021, PJB telah menetapkan transformasi korporat yang fokus pada 5 (lima) strategi utama yang terdiri dari *business excellence*, *digitalization & customization service* manajemen aset, PJB Raya Terintegrasi, *Go-to-Market*, dan *Investment Based*.

PJB memiliki pembangkit listrik yang tersebar di Jawa Timur, Jawa Barat, dan DKI Jakarta dengan total kapasitas terpasang 6.992 MW. Sejak tahun 2016, PJB telah memperluas jangkauan pembangkitnya ke luar Jawa, dengan masuknya PLTD Suppa 62,4 MW ke dalam sistem sehingga total kapasitas terpasang milik PJB pada akhir tahun 2019 menjadi sebesar 7.054 MW. Selain pembangkit eksisting, PJB memiliki 1 Pembangkit Riset PLTS Cirata 1 MW yang diresmikan pada tahun 2015.

Currently, PJB has become one of the most respected companies in Indonesia, especially in the sector of electricity. Along with the development of the business world and market demands, PJB also runs business activities of the construction and/or installation of electrical equipment, maintenance, and/or operation of electrical equipment, as well as businesses related to company potential-optimization. During 2021, PJB has established a corporate transformation that focuses on 5 (five) main strategies consisting of business excellence, digitalization & customization of asset management services, Integrated PJB Raya, Go-to-Market, and Investment Based.

PJB has power plants spread across East Java, West Java, and DKI Jakarta with a total installed capacity of 6,992 MW. Since 2016, PJB has expanded its power plant outside Java; with the existence of the 62.4-MW DEPP Suppa into the system, the total installed capacity of PJB at the end of 2019 reached 7,054 MW. In addition to the existing power plant, PJB has 1 Cirata 1-MW SPP Research Plant which was inaugurated in 2015.

Kegiatan Usaha Menurut Anggaran Dasar

Business Activities based on Article of Association

Berdasarkan Anggaran Dasar pasal 3, disebutkan bahwa bidang usaha PJB adalah menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan yang meliputi:

1. Usaha penyediaan tenaga listrik berupa kegiatan pembangkitan tenaga listrik yang ekonomis, bermutu tinggi dengan keandalan yang baik;
2. Pembangunan dan/atau pemasangan peralatan ketenagalistrikan;
3. Pemeliharaan dan/atau pengoperasian peralatan ketenagalistrikan; dan
4. Melakukan usaha yang berkaitan dengan kegiatan Perusahaan dalam rangka memanfaatkan secara maksimal potensi yang dimiliki Perusahaan.

According to Article 3 of the Company's Articles of Association, PJB's business line is running a business in the sector of electricity which consists of:

1. Electricity provision through economical, high-quality and reliable power plant activities;
2. Construction and/or installation of electrical power equipment;
3. Maintenance and/or operations of electrical power equipment; and
4. Business activities that are related to company potential-optimization.

Kegiatan Usaha yang Dijalankan Saat Ini

The Current Business Activities

Adapun kegiatan usaha PJB yang dijalankan saat ini adalah penyediaan tenaga listrik dengan keandalan yang baik melalui mekanisme Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBT) dengan PT PLN (Persero) sebagai *single buyer*. Sedangkan kegiatan usaha lainnya, baik dilakukan langsung oleh PJB maupun melalui Anak Perusahaan, Perusahaan Asosiasi maupun perusahaan terafiliasi untuk menuju *integrated power company*, mencakup bidang usaha berikut:

1. Pembangkit tenaga listrik melalui kepemilikan dalam *Independent Power Producer (IPP)*;
2. Jasa *Operation and Maintenance O&M* pembangkit termasuk jasa penunjangnya;
3. Jasa *Technical Supporting (TS) assessment* dan *overhaul* pembangkit;
4. Penyedia material cadang pembangkit (*stockist*);
5. Jasa *Engineering, Procurement and Construction (EPC)* pembangkit, transmisi dan gardu induk;
6. Jasa *Enterprise Asset Management (EAM)*;
7. Pendanaan/investasi di bidang pembangkitan;
8. Jasa konsultasi ketenagalistrikan;
9. Jasa penyediaan tenaga kerja (SDM) untuk *Operation & Maintenance (O&M)* pembangkit listrik; dan
10. Jasa sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.

The business activities carried out by PJB currently are the provision of electricity with good reliability through the Power Purchase Agreement (PPA) with PT PLN (Persero) as a single buyer. Meanwhile, other business lines conducted by PJB directly or by the Subsidiaries and Associated Companies towards integrated power company, cover business as follows:

1. Power plants through the ownership in the independent Power Producer (IPP);
2. O&M Services of the Power Plants including the supporting services;
3. Technical Supporting (TS) assessment services and power plant overhaul;
4. Power plant spare-part provider (stockist);
5. Engineering, Procurement, and Construction (EPC) services of transmission power plant with the main station;
6. Enterprise Asset Management (EAM) service;
7. Investment in power generation;
8. Electricity consultation service;
9. Human Resources provider for O&M electricity generation;
10. Competency certification service for electricity personnel.

Uraian Segmen Operasi

Operation Segment Description

Segmen utama operasi PJB dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kegiatan usaha utama berdasarkan pelanggannya, yakni (a) pelanggan jual beli tenaga listrik dan (b) pelanggan bisnis lainnya. Pelanggan jual beli listrik terdiri dari segmen pelanggan *grid* dan segmen pelanggan *embedded*. Di samping itu, PJB juga memiliki pelanggan jasa O&M, EPC, EAM dan Jasa Lainnya pada pembangkit milik PT PLN (Persero) maupun pembangkit IPP. Direksi menggunakan ukuran pendapatan untuk menilai kinerja segmen operasi ini.

The main segments of PJB operations can be divided into 2 (two) main business activities in accordance with the customers as follows: (a) customers on electricity sales and (b) customers on other business. The electricity-sales customer consists of the grid customer segment and the embedded customer segment. Additionally, PJB also has O&M, EPC, EAM, and Other Service customers in PT PLN (Persero) and IPP power plants. The Board of Directors measures the revenue to assess the performance of this operational segment.

PRODUK DAN JASA PRODUCTS AND SERVICES

Sebagai produsen listrik, produk utama PJB adalah kesiapan operasi Unit Pembangkit dan energi listrik yang dihasilkan oleh Unit Pembangkit melalui mekanisme saluran transmisi langsung kepada pelanggan berdasarkan kontrak jual beli yang dinyatakan dengan EAF *Declare*.

PJB memiliki segmen usaha utama sebagai penyedia tenaga listrik serta penyediaan jasa operasi dan pemeliharaan (*Operation and Maintenance/O&M*) pembangkit dengan mengelola pembangkit milik sendiri maupun pihak lain yang tersebar di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, NTB, NTT dan Papua yang terdiri dari:

1. 8 (delapan) Unit Pembangkit yang dimiliki dan dioperasikan oleh PJB, serta 1 (satu) Unit Pembangkit Riset (PLTS Cirata) yang dimiliki oleh PJB;
2. 27 (dua puluh tujuh) Unit Pembangkit sebagai penyedia jasa O&M pembangkit yang dikelola PJB Grup;
3. 2 (dua) Unit Pembangkit sebagai penyedia jasa O&M pembangkit di IPP;
4. 1 (satu) Unit Pembangkit sebagai penyedia jasa O&M pembangkit melalui perusahaan patungan;
5. 7 (tujuh) Unit pembangkit melalui usaha kepemilikan *Independent Power Producer* (IPP);
6. 3 (tiga) Unit Pembangkit yang dimiliki oleh PJB namun disewa dan dioperasikan oleh pihak lain;
7. 7 (tujuh) lokasi pembangunan pembangkit baru melalui jasa EPC;
8. 23 (dua puluh tiga) lokasi *stockist* sebagai penyedia cadangan material pembangkit;
9. Usaha pengelolaan aset pembangkit serta usaha pendukung lainnya.

Unit Pembangkitan (UP) Generation Unit (GU)

Penyediaan tenaga listrik dilakukan melalui pembangkitan energi listrik dari pembangkit milik sendiri pada 8 (delapan) UP dengan total kapasitas terpasang sebesar 7.054 MW yang tersebar di pulau Jawa dan di luar Jawa. PJB juga memiliki 1 (satu) Pembangkit Riset PLTS Cirata dengan kapasitas 1 MW yang berlokasi di Purwakarta, Jawa Barat. Selain pembangkit yang telah beroperasi, PJB juga memiliki unit pembangkit dalam tahap pengembangan yaitu *Add On* MTW 2-3-4 dengan kapasitas 650 MW.

As an electricity producer company, main product of PJB is the Power Plant operation and electricity power readiness generated by those Power Plants through mechanism of direct transmission channel to the customers according to trading contract stated in EAF *declare*.

PJB owns main business segments as electricity provider and Power Plant's O&M service provider by managing the power plants owned or not owned by the Company spread throughout Java, Sumatera, Kalimantan and Sulawesi, NTB, NTT, and Papua which consist of:

1. 8 (eight) Generating Units owned and operated by PJB, and 1 (one) Research Generating Unit (Cirata SPP) owned by PJB;
2. 27 (twenty seven) Generating Units as providers of generator O&M services managed by PJB Group;
3. 2 (two) Generating Units as providers of O&M services for generators at IPP;
4. 1 (one) Generating Unit as O&M services provider through a Joint Venture Company;
5. 7 (seven) generating units through an Independent Power Producer (IPP) ownership business;
6. 3 (three) Generating Units owned by PJB but leased and operated by other parties;
7. 7 (seven) new plants construction sites through EPC services;
8. 23 (twenty three) stockist locations as power plant spare part provider;
9. Management business of power plant assets as well as other supporting business.

Provision of electrical power is carried out through electrical power generation from the power plants owned by PJB at 8 (eight) GU with total installed capacity of 7.054 MW, distributed all over Java and outside Java. PJB also has 1 (one) Cirata SPP Research Plant with a capacity of 1 MW located in Purwakarta, West Java. In addition to the already operating power plants, PJB also has a power plant unit in the development stage, namely *Add On* MTW 2-3-4 with a capacity of 650 MW.



Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan Audit
Audited Financial Statements



Referensi Kriteria AR
AR Criteria Reference

Unit Pembangkitan PJB terdiri dari:

Power Plant of PJB consists of the following:

TABEL UNIT PEMBANGKITAN
TABLE OF GENERATION UNIT

No.	Unit Pembangkitan Generation Unit	Kapasitas Terpasang Installed Capacity (MW)	Bahan Bakar Fuel	Lokasi Location
Unit Pembangkit Eksisting Existing Generation Unit				
1	UP Gresik Gresik GU	2.219	Minyak dan gas Oil and gas	Gresik, Jawa Timur Gresik, East Java
2	PLTMG Bawean Bawean GEPP	3	Gas Gas	Bawean, Jawa Timur Bawean, East Java
3	UP Muara Tawar Muara Tawar GU	1.778	Minyak dan gas Oil and gas	Bekasi, Jawa Barat Bekasi, West Java
4	UP Cirata Cirata GU	1.008	Tenaga air Hydro	Purwakarta, Jawa Barat Purwakarta, West Java
5	UP Muara Karang Muara Karang GU	909	Minyak dan gas Oil and gas	Pluit, Jakarta Pluit, Jakarta
6	UP Paiton Paiton GU	800	Batubara Coal	Probolinggo, Jawa Timur Probolinggo, East Java
7	UP Brantas Brantas GU	275	Tenaga air Hydro	Malang, Jawa Timur Malang, East Java
8	PLTD Suppa Suppa DEPP	62,4	Diesel Diesel	Sulawesi Selatan South Sulawesi
Unit Pembangkit Riset Research Generation Unit				
9	PLTS Cirata Cirata SPP	1	Tenaga surya Solar	Purwakarta, Jawa Barat Purwakarta, West Java
Unit Dalam Tahap Pengembangan In Development Units				
10	Add On MTW 2-3-4	650	Gas Gas	Bekasi, Jawa Barat Bekasi, West Java

Unit Bisnis Jasa *Operation & Maintenance* Pembangkit (O&M) O&M Service Business Unit for Power Plants

Pelayanan jasa operasi dan pemeliharaan (O&M) dilakukan dengan mekanisme penyampaian langsung ke pelanggan berdasarkan kontrak O&M. Bidang usaha jasa O&M dilakukan oleh PJB secara langsung maupun melalui Anak Perusahaan (PT PJB Services) dan perusahaan patungan (PT Komipo PJB).

O&M Service is performed by mechanism of direct distribution to customers according to O&M contract. O&M service business is conducted by PJB directly or by Subsidiary Entities (PT PJB Services) and joint ventures (PT Komipo PJB).

Total pembangkit yang dikelola PJB melalui jasa O&M sebesar 6.170,6 MW yang tersebar di 27 (dua puluh tujuh) lokasi. Selain itu, PJB juga mengelola Jasa O&M pada unit pembangkit IPP (terdapat kepemilikan saham PJB) sebesar 400 MW yang tersebar di 2 (dua) lokasi.

Total of the power plants managed by PJB through O&M services is 6.170,6 MW spread over in 27 (twenty seven) locations. In addition, PJB also manages O&M Services in the IPP generating unit (there is a PJB share ownership) of 400 MW spread over 2 (two) locations.

Jasa O&M yang dioperasikan oleh PJB sebesar 5.822,6 MW berlokasi di Jawa atau Luar Jawa tersebar di 14 (Empat belas) lokasi, berikut:

O&M Services operated by PJB reaches 5,822.6 MW distributed in 14 (fourteen) locations in Java and outside Java that can be seen as follows:

**TABEL UNIT BISNIS DAN JASA O&M**
TABLE OF BUSINESS AND O&M SERVICE UNIT

No.	Unit Pembangkitan Generation Unit	Kapasitas Terpasang Installed Capacity (MW)	Bahan Bakar Fuel	Lokasi Location	UBJOM OMSBU
1	PLTU Rembang Rembang CFPP	2x315	Batubara Coal	Rembang, Jawa Tengah Rembang, Central Java	Jawa Java
2	PLTU Indramayu Indramayu CFPP	3x330	Batubara Coal	Indramayu, Jawa Timur Indramayu, East Java	Jawa Java
3	PLTU Pacitan Pacitan CFPP	2x315	Batubara Coal	Pacitan, Jawa Timur Pacitan, East Java	Jawa Java
4	PLTU Paiton 9 Paiton 9 CFPP	1x660	Batubara Coal	Probolinggo, Jawa Timur Probolinggo, East Java	Jawa Java
5	PLTU Tanjung Awar-awar Tanjung Awar-awar CFPP	2x350	Batubara Coal	Tuban, Jawa Timur Tuban, East Java	Jawa Java
6	PLTGU Muara Karang Blok 2 Muara Karang Blok 2 CCPP	710	Gas Gas	Pluit, Jakarta Pluit, Jakarta	Jawa Java
7	PLTGU Muara Tawar Blok 5 Muara Tawar Blok 5 CCPP	242	Gas Gas	Bekasi, Jawa Barat Bekasi, West Java	Jawa Java
8	PLTGU Muara Karang Blok 5 Muara Karang Blok 5 CCPP	500	Gas Gas	Pluit, Jakarta Pluit, Jakarta	Jawa Java
9	PLTA Ampel Gading Ampel Gading HPP	2x5	Tenaga air Hydro	Malang, Jawa Timur Malang, East Java	Jawa Java
10	PLTA Wonorejo Wonorejo HPP	1x6,3	Tenaga air Hydro	Tulungagung, Jawa Timur Tulungagung, East Java	Jawa Java
11	PLTMG Arun Arun GEPP	19x9,7	Gas Gas	Aceh Aceh	Luar Jawa Outside Java
12	PLTU Tenayan Tenayan CFPP	2x100	Batubara Coal	Riau Riau	Luar Jawa Outside Java
13	PLTU Teluk Balikpapan Teluk Balikpapan CFPP	2x110	Batubara Coal	Kalimantan Timur East Kalimantan	Luar Jawa Outside Java
14	PLTU Pulang Pisau Pulang Pisau CFPP	2x60	Batubara Coal	Kalimantan Tengah Central Kalimantan	Luar Jawa Outside Java

Jasa O&M yang dikelola PJB melalui Anak Perusahaan PT PJB Services dan berada di luar Jawa sebesar 348 MW tersebar di 13 (tiga belas) lokasi sebagai berikut:

O&M services organized by PJB through Subsidiary Entity, PT PJB Services, and located outside Java reach 348 MW spread over in 13 (thirteen) locations as follows:

TABEL UNIT JASA PEMBANGKITAN
TABLE OF GENERATION UNIT SERVICE

No.	Unit Pembangkitan Generation Unit	Kapasitas Terpasang Installed Capacity (MW)	Bahan Bakar Fuel	Lokasi Location
1	PLTU Ampana Ampana CFPP	2x3	Batubara Coal	Sulawesi Tengah Central Sulawesi
2	PLTU Amurang Amurang CFPP	2x25	Batubara Coal	Sulawesi Utara North Sulawesi
3	PLTU Anggrek Anggrek CFPP	2x25	Batubara Coal	Gorontalo Gorontalo
4	PLTU Bangka Bangka CFPP	2x30	Batubara Coal	Bangka Belitung Bangka Belitung
5	PLTU Belitung Baru Belitung Baru CFPP	2x16,5	Batubara Coal	Bangka Belitung Bangka Belitung
6	PLTU Bolok Bolok CFPP	2x16,5	Batubara Coal	Nusa Tenggara Timur East Nusa Tenggara
7	PLTU Kendari Unit 1 & 2 Kendari Unit 1 & 2 CFPP	2x20	Batubara Coal	Sulawesi Tenggara Southeast Sulawesi
8	PLTU Kendari Unit 3 Kendari Unit 3 CFPP	1x10	Batubara Coal	Sulawesi Tenggara Southeast Sulawesi
9	PLTU Ketapang Ketapang CFPP	2x10	Batubara Coal	Kalimantan Barat West Kalimantan
10	PLTU Ropa (Ende) Ropa (Ende) CFPP	2x7	Batubara Coal	Nusa Tenggara Timur East Nusa Tenggara
11	PLTU Tembilahan Tembilahan CFPP	2x7	Batubara Coal	Riau Riau
12	PLTU Tidore Tidore CFPP	2x7	Batubara Coal	Maluku Utara North Maluku
13	PLTU KKA KKA CFPP	2x18	Batubara Coal	Aceh

Jasa O&M pada IPP (terdapat kepemilikan saham PJB) melalui Anak Perusahaan yaitu PT PJB Services dan berada di luar Jawa sebesar 400 MW tersebar di 2 (dua) lokasi sebagai berikut:

O&M services in IPP (there is PJB share ownership) through a subsidiary namely PT PJB Services and located in Outside Java of 400 MW spread over 2 (two) locations as follows:

No.	Unit Pembangkitan Generation Unit	Kapasitas Terpasang Instaled Capacity (MW)	Bahan Bakar Fuel	Lokasi Location
1	PLTA Asahan Asahan HPP	2x90	Air Hydro	Sumatera Utara North Sumatera
2	PLTU Banjarsari Banjarsari CFPP	2x110	Batubara Coal	Sumatera Utara North Sumatera

Usaha Kepemilikan Saham di Perusahaan O&M Share Ownership Business at O&M Company

PJB memiliki perusahaan patungan, yakni PT Komipo PJB yang melakukan jasa O&M pada unit pembangkit milik PT PLN (Persero) di Tanjung Jati B #3 dan #4 dengan kapasitas 2x660 MW.

PJB owns joint venture company, namely PT Komipo PJB which performs O&M services at power plant unit owned by PT PLN (Persero) in Tanjung Jati B #3 and #4 with the capacity of 2x660 MW.

Usaha Kepemilikan *Independent Power Producer* (IPP) Independent Power Producer (IPP) Business Ownership

PJB mengembangkan pembangkit IPP melalui perusahaan patungan sebesar 5.665 MW sebagai berikut:

PJB as IPP develops power plants through joint ventures with capacity of 5.665 MW as follows:

No.	Unit Pembangkitan Generation Unit	Kapasitas Terpasang Instaled Capacity (MW)	Bahan Bakar Fuel	Lokasi Location
Pembangkit IPP Beroperasi Operating IPP Power Plants				
1	PLTA Asahan Asahan HPP	2x90	Tenaga air Hydro	Sumatera Utara North Sumatera
2	PLTU Banjarsari Banjarsari CFPP	2x110	Batubara Coal	Sumatera Utara North Sumatera
3	PLTU Jawa 7 Unit 1 Jawa 7 Unit 1 CFPP	1x1.000	Batubara Coal	Serang, Banten Serang, Banten
4	PLTU Cilacap #1 dan #2 Cilacap #1 and #2 CFPP	2x300	Batubara Coal	Cilacap, Jawa Tengah Cilacap, Central Java
5	PLTU Cilacap Unit #3 Cilacap Unit #3 CFPP	1x660	Batubara Coal	Cilacap, Jawa Tengah Cilacap, Central Java
6	PLTU Cilacap Ekspansi 4 Cilacap Expansion 4 CFPP	1x1.000	Batubara Coal	Cilacap, Jawa Tengah Cilacap, Central Java
7	PLTU Mamuju Mamuju CFPP	2x25	Batubara Coal	Mamuju, Sulawesi Barat Mamuju, West Sulawesi
Unit Dalam Tahap Pengembangan In Development				
8	PLTU Jawa 7 Unit 2 Jawa 7 Unit 2 CFPP	1x1.000	Batubara Coal	Serang, Banten Serang, Banten
9	PLTA Batang Toru Batang Toru HPP	4x127,5	Tenaga air Hydro	Tapanuli Selatan South Tapanuli
10	PLTS Terapung Cirata Cirata Floating SPP	145	Surya Solar	Purwakarta, Jawa Barat Purwakarta, West Java
11	PLTU Sumbagsel 1 Sumbagsel 1 SPP	2x150	Batubara Coal	Sumatera Selatan South Sumatera

Usaha Jasa Pembangunan Pembangkit Baru (EPC) Engineering, Procurement, and Construction (EPC) Services

Jasa pembangunan pembangkit baru (*Engineering Procurement And Construction/EPC*) dilakukan PJB melalui Anak Perusahaan, PT Rekadaya ElektriKA. Proyek pengembangan pembangkit baru sampai dengan tahun 2019 tersebar di 7 (tujuh) lokasi berikut:

The new Power Plant Construction (*Engineering Procurement and Construction/EPC*) service is carried out through Subsidiary of PJB, PT Rekadaya ElektriKA. The new Power Plant Construction until 2019 spread over 7 (seven) locations as follows:

No.	Unit Pembangkitan Generation Unit	Kapasitas Terpasang Instaled Capacity (MW)	Bahan Bakar Fuel	Lokasi Location
1	PLTU Kepulauan Riau Riau Islands CFPP	2x7	Batubara Coal	Kepulauan Riau Riau Islands
2	PLTU Kendari Kendari CFPP	2x10	Batubara Coal	Sulawesi Tenggara Southeast Sulawesi
3	PLTU Gorontalo Gorontalo CFPP	2x25	Batubara Coal	Gorontalo Gorontalo
4	PLTU Tidore Tidore CFPP	2x7	Batubara Coal	Maluku Utara North Maluku
5	PLTU Timika Timika CFPP	2x7	Batubara Coal	Papua Papua
6	PLTU Bima Bima CFPP	2x10	Batubara Coal	Nusa Tenggara Barat West Nusa Tenggara
7	PLTU Ende Ende CFPP	2x7	Batubara Coal	Nusa Tenggara Timur East Nusa Tenggara

Usaha Penyedia Material Cadang Pembangkit (*Stockist*) Power Plant Spare Parts Provider (*Stockist*)

Bidang usaha jasa stockist saat ini dikelola langsung oleh Anak Perusahaan PJB yaitu PT PLN SC dimaksudkan untuk melayani pengadaan material cadang pembangkit yang tersebar di 23 (dua puluh tiga) lokasi sebagai berikut:

The business of stockiest service is currently managed directly by Subsidiary of PJB, namely PT PLN SC, which is intended to provide the procurement of power plant spare parts which spread over 23 (twenty three) locations as follows:

No.	Unit Pembangkitan Generation Unit	Kapasitas Terpasang Instaled Capacity (MW)	Bahan Bakar Fuel	Lokasi Location
1	PLTU Suralaya Suralaya CFPP	1x625	Batubara Coal	Merak, Jawa Barat Merak, West Java
2	PLTU Labuan Labuan CFPP	2x315	Batubara Coal	Pandeglang, Banten
3	PLTU Pelabuhan Ratu Pelabuhan Ratu CFPP	3x330	Batubara Coal	Sukabumi, Jawa Barat Sukabumi, West Java
4	PLTU Adipala Adipala CFPP	2x660	Batubara Coal	Cilacap, Jawa Tengah Cilacap, Central Java
5	PLTU Lontar Lontar CFPP	3x315	Batubara Coal	Tangerang, Jawa Barat Tangerang, West Java
6	PLTU Bolok Bolok CFPP	2x16,5	Batubara Coal	Kupang, Nusa Tenggara Timur Kupang, East Nusa Tenggara
7	PLTU Indramayu Indramayu CFPP	3x330	Batubara Coal	Indramayu, Jawa Barat Indramayu, West Java
8	PLTU Kaltim Teluk Kaltim Teluk CFPP	2x110	Batubara Coal	Kalimantan Timur East Kalimantan
9	PLTU Pacitan Pacitan CFPP	2x315	Batubara Coal	Pacitan, Jawa Timur Pacitan, East Java
10	PLTU Paiton 9 Paiton 9 CFPP	1x660	Batubara Coal	Probolinggo, Jawa Timur Probolinggo, East Java
11	PLTU Pangkalan Susu Pangkalan Susu CFPP	2x220	Batubara Coal	Sumatera Utara North Sumatera

No.	Unit Pembangkitan Generation Unit	Kapasitas Terpasang Installed Capacity (MW)	Bahan Bakar Fuel	Lokasi Location
12	PLTU Rembang Rembang CFPP	2x315	Batubara Coal	Rembang, Jawa Tengah Rembang, Central Java
13	PLTU Ropa Ropa CFPP	2x7	Batubara Coal	Nusa Tenggara Timur East Nusa Tenggara
14	PLTU Tanjung Awar-awar Tanjung Awar-awar CFPP	2x350	Batubara Coal	Tuban, Jawa Timur Tuban, East Java
15	PLTU Tanjung Jati B Tanjung Jati B CFPP	2x660	Batubara Coal	Jepara, Jawa Tengah Jepara, Central Java
16	PLTU Tenayan Tenayan CFPP	2x100	Batubara Coal	Pekanbaru, Riau
17	PLTU Bangka (Air Anyir #3) Bangka (Air Anyir #3) CFPP	2x30	Batubara Coal	Bangka Belitung
18	PLTU Pulang Pisau Pulang Pisau CFPP	2x60	Batubara Coal	Kalimantan Tengah Central Kalimantan
19	PLTU Amurang Amurang CFPP	2x25	Batubara Coal	Sulawesi Utara North Sulawesi
20	PLTU Kendari Unit 1 & 2 Kendari Unit 1 & 2 CFPP	2x20	Batubara Coal	Konawe, Sulawesi Tenggara Konawe, Southeast Sulawesi
21	PLTU TJBPS TJBPS CFPP	2x660	Batubara Coal	Jepara, Jawa Tengah Jepara, Central Java
22	PLTU Barru Barru CFPP	2x50	Batubara Coal	Barru, Sulawesi Selatan Barru, South Sulawesi
23	PLTU Jeranjang Jeranjang CFPP	2x25	Batubara Coal	Lombok Barat, NTB West Lombok, West Nusa Tenggara

Usaha Jasa *Enterprise Asset Management (EAM)* Enterprise Asset Management (EAM) Services

EAM merupakan upaya mengelola suatu aset Perusahaan agar memberikan kontribusi yang optimal melalui penerapan tata kelola aset yang disesuaikan dengan kebutuhan proses bisnis pada suatu Unit Kerja. Tahun 2019, PJB telah melaksanakan implementasi EAM di beberapa unit PLN, antara lain: EAM Distribusi (UID Jawa Timur), EAM Pembangkitan (PLTU Pangkalan Susu, UPDK Gorontalo, UPDK Kalimantan, dan PLTU Punagaya).

EAM is an effort to manage a Company asset in order to provide an optimal contribution through the asset management implementation adjusted to the needs of business processes in a Work Unit. In 2019, PJB has implemented EAM in several PLN units, including: Distribution EAM (UID East Java), Generating EAM (Pangkalan Susu CFPP, Gorontalo Generation Control Unit (UPDK), Kalimantan UPDK, and Punagaya CFPP).

Usaha Jasa *Assessment & Supervisi Overhaul* Pembangkit Power Plant Overhaul Supervision & Assessment Service

Jasa pelaksanaan pekerjaan *Assessment* Pembangkit dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi pembangkit saat akan ataupun setelah dilakukan *overhaul* sehingga sesuai dan tepat sasaran. Selain itu, PJB juga melakukan Jasa Supervisi dalam pelaksanaan *overhaul* untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi serta membantu memberikan rekomendasi penanganan secara langsung saat *overhaul* dilakukan. Tahun 2019, PJB telah melaksanakan jasa *Assessment Overhaul* Pembangkit pada PLTU Pangkalan Susu.

Power plant assessment service is implemented to identify the condition of the power plants when it will be or after overhaul so that it is appropriate and right on target. In addition, PJB also implements Supervision Services in the overhauls implementation to minimize errors that occur and provides recommendations for direct handling when overhauls are carried out. In 2019, PJB has carried out a Plant Overhaul Assessment service at the Pangkalan Susu CFPP.

Usaha Jasa *Overhaul* Pembangkit Power Plant Overhaul Service

Jasa *Overhaul* pembangkit merupakan pekerjaan pemeliharaan unit pembangkit sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mengembalikan kondisi pembangkit kepada performa terbaiknya. Pada tahun 2019, PJB bekerja sama dengan Anak Perusahaan yaitu PT PJB Services melakukan pekerjaan Jasa *Overhaul* Pembangkit yaitu *Overhaul* PLTU Tanjung Jati Unit #3.

Power plants overhaul service is a maintenance work of generation units in accordance with needs in order to restore the condition of the power plants to the best performance. In 2019, PJB in collaboration with a subsidiary, PT PJB Services, conducted the Overhaul of power plant, namely Tanjung Jati Unit # 3 CFPP Overhaul.

Usaha Jasa Relokasi Pembangkit Power Plant Relocation Service

Jasa relokasi pembangkit merupakan pekerjaan memindahkan Unit Pembangkit di suatu lokasi ke lokasi lain guna mengakomodir kebutuhan atau berdasarkan tujuan tertentu. Tahun 2019, PJB melakukan pekerjaan relokasi 6 mesin PLTD dari pulau-pulau di area Jawa Timur khususnya Madura, dan dipindahkan ke Pulau Bawean. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi Pulau Bawean.

Power plants relocation services is a work of moving a Generation Unit in one location to another location to accommodate needs or according to the specific objectives. In 2019, PJB relocated 6 DEPP machines from islands in the East Java area, especially Madura, and moved to Bawean Island. It purposes to increase the electrification ratio of Bawean Island.

Usaha Optimalisasi Aset Asset Optimization Business

Kegiatan usaha yang bertujuan untuk mengoptimalkan aset yang ada di area unit milik PJB agar memiliki nilai guna dan memberikan pemasukan terhadap pendapatan *Non-Core* PJB. Kegiatan usaha yang dilakukan antara lain adalah sewa lahan, bangunan, fasilitas pendukung, serta tools yang dimiliki PJB. Dari usaha optimalisasi aset yang dilakukan di tahun 2019, 65% pendapatan didominasi dari hasil optimalisasi aset melalui sewa Lahan.

Selain itu, PJB memiliki 5 (lima) Anak Perusahaan serta 4 (empat) Perusahaan Patungan dalam menunjang kegiatan usaha yang dijalankannya yang akan diuraikan lebih lanjut pada bagian Daftar dan Alamat Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Perusahaan Patungan dalam Bab ini.

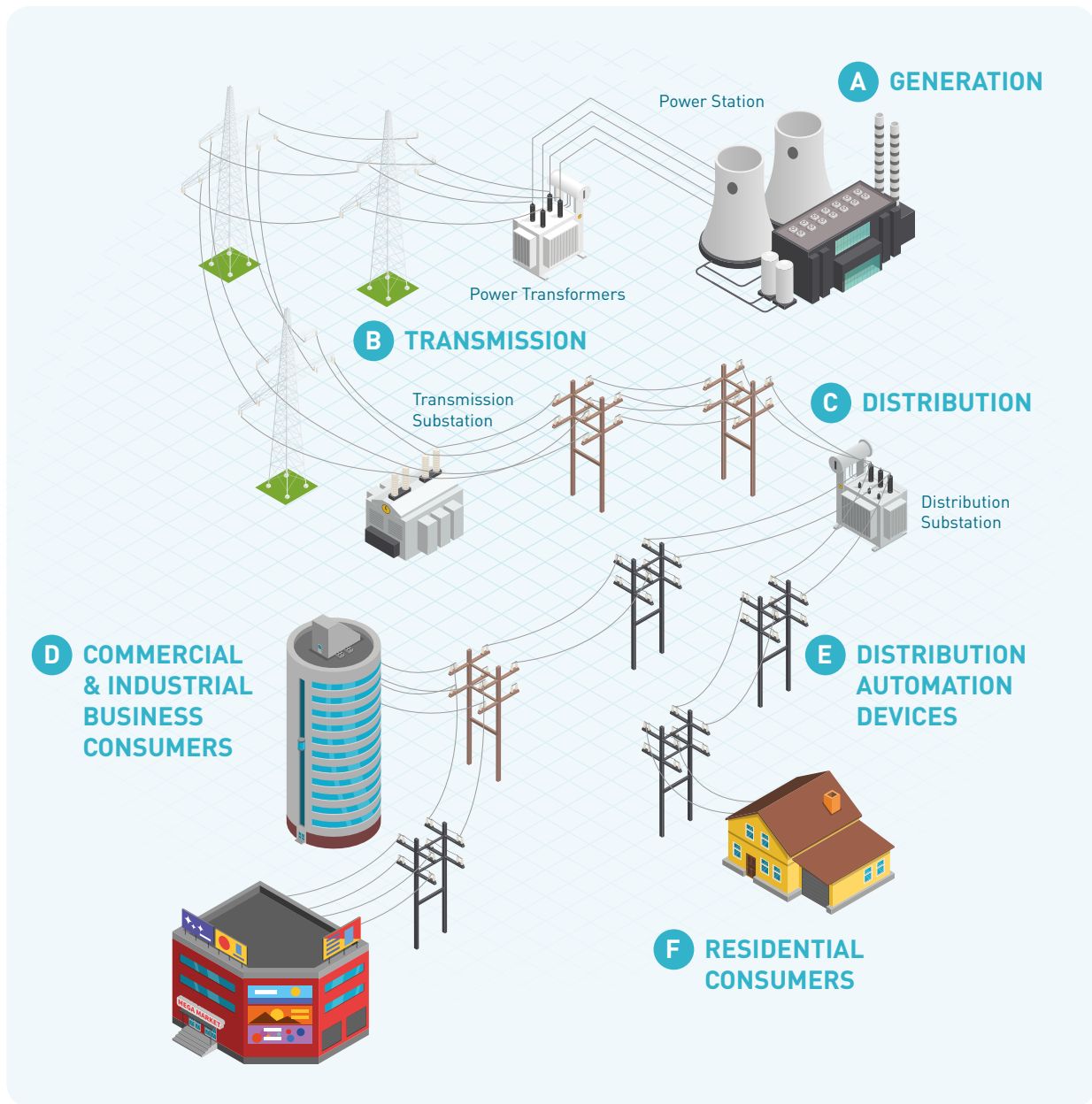
Business activities purposed to optimize the existing assets in the PJB unit area in order to have a use value and provide income to PJB Non-Core revenues. Business activities carried out include leasing of land, buildings, supporting facilities, and tools owned by PJB. Of the asset optimization business carried out in 2019, 65% of revenue is dominated by the results of asset optimization through land leases.

In addition, PJB has 5 (five) Subsidiaries and 4 (four) Joint Ventures in supporting the business activities which will be further explained in the List and Address of Subsidiaries, Associate Entities and Joint Venture Companies in this Chapter.



SKEMA PENYALURAN ENERGI LISTRIK

SCHEME OF ELECTRICITY TRANSMISSION



Pada dasarnya, bisnis pembangkit tenaga listrik terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu pembangkitan, transmisi, dan distribusi. Tenaga listrik yang diperlukan oleh konsumen akhir dihasilkan oleh pembangkit, disalurkan melalui sistem penyaluran (transmisi) dan didistribusikan melalui jaringan distribusi. Energi yang dihasilkan Unit Pembangkitan PJB dijual atau disalurkan melalui Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sistem Jawa-Bali yang dikelola oleh PT PLN (Persero) dan didistribusikan kepada pelanggan industri maupun rumah tangga.

The power generation business is generally divided into 3 (three) parts: power plant, transmission, and distribution. The electricity needed by the final consumer is generated by the power plant, channeled through a distribution system (transmission), and then distributed through the distribution network. The energy produced by the PJB Power Generation Unit is sold or transmitted through the High Voltage Air Line (SUTT) of the Java-Bali system managed by PT PLN (Persero) and transmitted to industrial and domestic customers.

VISI, MISI DAN BUDAYA PERUSAHAAN

VISION, MISSION, AND CORPORATE CULTURE

Dasar Pengesahan Visi dan Misi

Ratification Basis of Vision and Mission

Dalam menghadapi tantangan eksternal dan kondisi internal, PJB melakukan penyesuaian terhadap strategi termasuk Visi dan Misi Perusahaan untuk lebih mengedepankan sinergi dan integrasi bisnis antar Anak Perusahaan di lingkungan PJB grup. Visi dan Misi PJB telah dikaji dan disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana ditetapkan RKAP Tahun 2019.

To deal with external challenges and internal conditions, PJB aligns strategies including the Company's Vision and Mission to prioritize business synergy and integration between subsidiaries in the PJB group. PJB's vision and mission have been reviewed and approved by the Board of Directors and Board of Commissioners as stipulated in the 2019 ABOP.

VISI

Vision



MENJADI PERUSAHAAN TERPERCAYA DALAM BISNIS PEMBANGKITAN TERINTEGRASI DENGAN STANDAR KELAS DUNIA

To become a trusted company in
integrated generation business
with world-class standards

Makna Visi

Vision Definition

1. **Perusahaan Terpercaya**, PJB merupakan perusahaan yang menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai dengan tata kelola perusahaan dan performa finansial yang baik sehingga meningkatkan kredibilitas Perusahaan untuk menjadi pilihan utama dalam melakukan bisnis.
 2. **Bisnis**, PJB selain berfokus pada *operational excellence* juga fokus pada business excellence.
 3. **Pembangkitan**, PJB memiliki kompetensi inti di bidang pembangkitan dengan lini usaha meliputi penjualan tenaga listrik, investasi di bidang pembangkitan dan jasa-jasa lainnya. Namun hal ini tidak menutup PJB untuk masuk ke bidang usaha sejenis seperti *asset intensive industries area* maupun usaha yang memiliki *core capabilities/competencies* yang sama.
 4. **Terintegrasi**, PJB bergerak dalam bisnis pembangkitan tenaga listrik yang terintegrasi (*integrated power company*) secara *horizontal end-to-end* pembangkit dan vertikal energy primer-pembangkit-transmisi. Pengembangan Perusahaan akan fokus pada bidang pembangkitan sebagai kompetensi utama PJB. Pengembangan portofolio usaha akan dilakukan melalui indikator PJB Raya baik dalam hal pengembangan pasar maupun sumber daya yang diperlukan.
 5. **Standar Kelas Dunia**, PJB bertekad untuk mampu tumbuh dan mencapai kinerja kelas dunia baik dari sisi operasional, keuangan dan bisnis pada tingkat regional maupun global.
1. Trusted Company, can be defined that PJB is a company that runs and develops its business following good corporate governance and good financial performance; so, it increases the credibility of the company to be the primary choice in doing business.
 2. Business, PJB does not only focus on operational excellence but also business excellence.
 3. Generation, can be defined that PJB has core competencies in the generation field with business lines covering sales of electricity, investment in generating field; and other services. However, this does not limit PJB's capability to go into similar business sectors, such as the Asset Intensive Industries Area, and businesses that have the same Core Capabilities/Competencies.
 4. Integrated, PJB is engaged in an integrated power company business, horizontally (end-to-end generation) and vertically (primary energy - generation - transmission). The development of the Company will focus and be based on generation business as PJB's main expertise. The development of the business portfolio will be conducted through the indicators of PJB Group, both in terms of market development and necessary resources.
 5. World-Class Standards, PJB is committed to grow and achieve world-class performance in operational, financial, and business sectors, at both the regional and global levels.

MISI

Mission

- Memberi solusi dan nilai tambah dalam bisnis pembangkitan terintegrasi untuk menjaga kedaulatan listrik nasional.
- Menjalankan bisnis pembangkitan secara berkualitas, berdaya saing dan ramah lingkungan.
- Mengembangkan kompetensi dan produktivitas *human capital* untuk pertumbuhan yang berkesinambungan.
- To provide solutions and added values in integrated generation business to maintain national electricity sovereignty
- To conduct a quality, competitive, and environmentally-friendly generation business.
- To develop Human Capital competency and productivity for sustainable growth.

Makna Misi

Mision Meaning

- PJB akan menjadi solusi bagi Indonesia dan PLN untuk pekerjaan *Operation & Maintenance* (O&M) serta *Engineering, Procurement & Construction* (EPC) pembangkit-pembangkit milik PLN, Non-PLN, dan juga EPC transmisi dan distribusi milik PLN, dimana investasi diarahkan untuk memelihara keandalan dan kapasitas. PJB juga akan membentuk kerjasama dengan perusahaan lain untuk berpartisipasi dalam pemenuhan kebutuhan listrik nasional melalui skema IPP. Hal tersebut dilakukan agar PLN dapat menjaga kedaulatan listrik di Indonesia. Pemangku kepentingan untuk misi ini adalah PLN sebagai perusahaan induk PJB.
- PJB akan menjalankan bisnis secara patuh terhadap peraturan, memperhatikan aspek keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan aman dari sisi karyawan dan aset. Pembangkit yang berkualitas tinggi dengan indikator EAF yang tinggi, EFOR yang rendah, dan tetap menawarkan harga yang kompetitif. Selain itu, PJB juga akan membangun proyek-proyek EBT yang ramah lingkungan. Pemangku kepentingan terkait dengan misi ini adalah pelanggan atau PLN, IPP dan pemain di *captive power*.
- PJB will be the solution for Indonesia and PLN for the operation & maintenance (O&M) service, Engineering, Procurement & Construction (EPC) business of PLN and Non-PLN power plants, as well as PLN's EPC transmission and distribution, in which investments shall be directed to maintain reliability and capacity. PJB will also establish cooperation with other companies to participate in the fulfillment of national electricity needs through the IPP scheme. These activities are conducted by PJB so that PLN can maintain the sovereignty of electricity owned by Indonesia. The stakeholder for this mission is PLN as the holding company of PJB.
- PJB will conduct business in compliance with regulations and by taking into account safety, health, and environmental aspects from the perspective of employees and assets, as well as high-quality generators with high EAF and low EFOR indicators and competitive prices. Also, PJB will develop environmentally-friendly RE projects. Stakeholders related to this mission are Customers or PLN, IPP, and captive power players.

- PJB akan berfokus dalam meningkatkan kompetensi karyawan PJB Raya sesuai kebutuhan strategi pengembangan usaha dalam bidang pengembangan bisnis dan teknologi pembangkitan. Pengembangan kompetensi bisnis ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas yang pada akhirnya membantu PJB untuk terus tumbuh. Pemangku kepentingan untuk misi ini adalah karyawan PJB.

- PJB will focus on improving the competence of PJB Group employees according to the needs of business development strategy in the field of business and technology development. The development of business competence is expected to increase the Company's productivity and ultimately can help the Company to grow sustainably. Stakeholders for this mission are PJB employees.

Budaya Perusahaan Corporate Culture

PJB meyakini bahwa untuk menggerakkan setiap individu karyawan menuju suatu tujuan yang sama, yakni Visi Perusahaan maka diperlukan sistem makna bersama yang dapat memandu karyawan bertindak dan bertingkah laku yang dikenal sebagai PJB WAY. PJB WAY merupakan spirit, nilai dan perilaku yang melekat di seluruh insan PJB dalam melaksanakan Misi untuk mencapai Visi. PJB WAY diharapkan dapat menjadi karakter insan PJB dalam bersikap dan berinteraksi baik di dalam maupun di luar Perusahaan.

Sejak tanggal 3 Oktober 2017, PJB telah meresmikan berlakunya Budaya Perusahaan dengan latar belakang transformasi korporat perubahan Visi, Misi, dan RJPP. Budaya Perusahaan tersebut tentu merupakan upaya untuk menyelaraskan spirit, nilai, dan perilaku karyawan sesuai dengan strategi baru yang dimiliki PJB. Perubahan budaya Perusahaan menekankan pada orientasi bisnis dan manajemen risiko (*business mindset & risk culture*) sebagai bagian dari pola pikir insan PJB dalam bekerja, memperluas relasi yang mendukung tercapainya tujuan Perusahaan, dan beradaptasi untuk meningkatkan skala bisnis tidak hanya bagi PJB grup namun juga bagi PLN grup.

PJB believes that to encourage every person to reach a particularly similar objective, namely the Company's Vision, the Company must build a universal meaning system that will guide employees' actions and behavior. The system of universal meaning is referred to as Corporate Culture which is well-known as PJB WAY. PJB WAY is spirit, values, and behaviors expected to be the character of PJB personnel in taking actions and communicating either inside or outside the Company.

Since October 3, 2017, PJB has refined and inaugurated the New Corporate Culture which is a result of the Corporate Transformation, the changes of PJB's vision, mission, and Corporate Long-Term Strategic Plan. The transformation of Corporate Culture is an attempt to harmonize the spirit, values, and behaviors of the person following the new strategy owned by PJB. The changes of corporate culture emphasize the business mindset and risk culture as a part of PJB's personnel mindset in working, expand relation to support the company's goal achievement, and adapt to increase business scale not only for the PJB group but also for PLN Group.



BERKARYA, MENGABDI, BERIBADAH

Berkarya untuk Perusahaan, Mengabdikan untuk Bangsa dan Negara, Beribadah pada Tuhan Yang Maha Esa.

WORK, DEDICATE, PRAY

Work for the Company, Dedicate to the Nation and the State, Pray to the Almighty God.



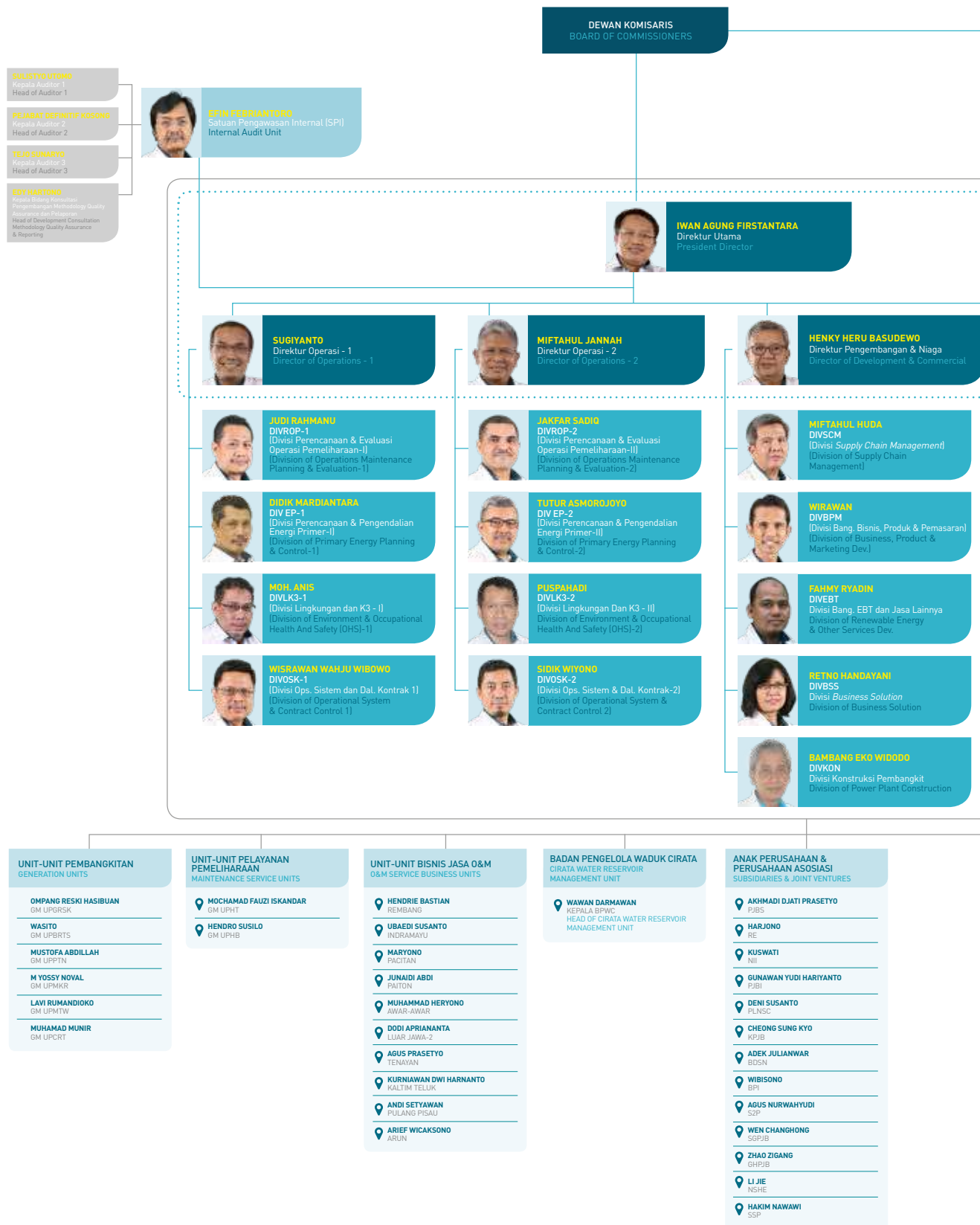
Spirit Spirit	Tata Nilai Inti Core Values	Perilaku Utama Key Behaviors
Berkarya Mengabdikan Beribadah Work, Dedicate, Pray	Integrity Menjunjung tinggi etika, jujur, dan amanah memegang teguh kaidah tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) Upholding ethics, honest and trusted in maintaining Good Corporate Governance	- Etis (Ethics) bertindak sesuai dengan standard, aturan, dan etika. Acting by following standards, regulations, and ethics. - Jujur (Honest) Keselarasan antara perkataan dengan perbuatan dalam menyampaikan kebenaran. The matching of words and actions in conveying the truth - Amanah (Trusted) Menjaga kepercayaan dengan selalu bersikap transparan, adil, akuntabel, dan loyal. Maintaining trust by keeping transparent, fair, accountable, and loyal.
	Professional Bertanggungjawab terhadap tugas dan wewenang dengan mengutamakan keselamatan dan keharmonisan lingkungan, serta senantiasa percaya diri dengan terus mengembangkan kompetensi. Being responsible for duties and authorities by prioritizing safety and environmental harmony, as well as always being confident by constantly developing competencies	- Bertanggungjawab (Responsible) Melaksanakan kewajiban berdasarkan jabatan atau peran dalam organisasi. Carrying out obligations based on positions or roles in the organization - Mengutamakan Keselamatan dan Lingkungan (Safety & Environment Oriented) Berorientasi terhadap keselamatan dan keharmonisan lingkungan. Prioritizing safety and environmental-harmony-oriented in carrying out duties and roles. - Kompeten (Competent) Percaya pada kemampuan diri, berpikir secara holistik, serta senantiasa mengembangkan kompetensi bidang pekerjaan dan tanggungjawab. Believing in self-competent, thinking holistically, and constantly improving competencies in the scope of works and responsibilities.
	Join Collaboration Melakukan kerjasama melalui integrasi, membangun jejaring, dan sinergi dengan berbagai pihak untuk bersama-sama meningkatkan skala bisnis PJB Raya dan PLN Group Collaborating through integration, building networks, and synergy with multiple parties to expand the business scale of PJB Raya and PLN Group.	- Integrasi (Integration) Saling menyelaraskan sistem, menyederhanakan proses, dan aktivitas PJB Raya dan PLN Group. Integrating systems, simplifying processes and activities within the scope of PJB Group and PLN Group - Membangun Jejaring (Networking) Memperluas relasi internal & eksternal untuk membangun kemitraan demi pencapaian tujuan PJB Raya secara berkesinambungan. Extending internal and external relations to develop a partnership for the achievement of PJB Group's goals continuously - Sinergi (Synergy) Menciptakan nilai tambah bagi PJB Raya dan PLN Group dengan mengelola interaksi internal maupun eksternal. Creating added-values for PJB Group and PLN Group by managing both internal and external interactions.
	Business Excellence Menerapkan praktik bisnis terbaik dalam mengelola dan mencapai tujuan PJB Raya secara berkesinambungan dengan senantiasa berorientasi pada pelanggan, berpikir bisnis dan mengambil risiko terukur, inovatif, gesit, simpel, dan adaptif. Implementing the best business practices in managing and achieving PJB Group's goals continuously by constantly being customer-oriented, having a business mindset, and taking a calculated risk, innovative, agile, simple, and adaptive.	- Berorientasi Pelanggan (Customer Driven) Fokus mewujudkan kepuasan, hubungan jangka panjang, serta loyalitas para stakeholders internal maupun eksternal PJB Raya. Focusing on the efforts to realize satisfaction, long-term relations, and loyalty of the internal and external PJB Raya's stakeholders. - Berpikir Bisnis & Mengambil Risiko Terukur (Business Mindset & Calculated RiskTaking) Jeli menangkap peluang serta mengambil risiko yang terukur dalam melaksanakan proses bisnis. Being sharp in seizing opportunities and calculating risks in conducting business processes. - Inovatif (Innovative) Kreatif menciptakan nilai tambah dan perbaikan berkelanjutan. Being creative to create added-values and continuous improvement. - Gesit, Sempel, dan Adaptif (Agile, Simple, and Adaptive) Bergerak gesit melalui proses bisnis serta mampu beradaptasi dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis dan teknologi. Being agile through simplification of the business process and able to adapt to the changes in business and technology environment.



STRUKTUR ORGANISASI

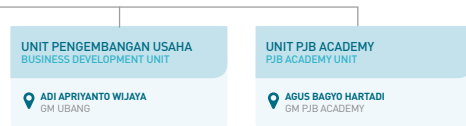
ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Sejalan dengan dinamika bisnis yang terjadi sekaligus mendukung penguatan organisasi Perusahaan, pada tahun 2019 dilakukan perubahan struktur organisasi PJB yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 010.P/019/DIR/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja PJB tanggal 16 Juli 2019.



In line with the business dynamics as well as to support the improvement of the Company's organization, a change in the organizational structure of the PJB was stipulated in 2019 by the Decree of the Board of Directors No. 010.P/019/DIR/2019 concerning PJB Organization and Work Procedure on July 16, 2019.

SHAREHOLDERS (PT PLN & YKP)



PROFIL DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE



Sriyono D. Siswoyo

Komisaris Utama (2017- Sekarang)

President Commissioner (2017- Present)



Warga Negara Indonesia, berusia 60 tahun. Lahir di Jakarta, 1 November 1959. Berdomisili di Tangerang. Lulusan Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (1984) dan Pascasarjana di bidang Project Management dari Melbourne University (1996).

Indonesian citizen, 60 years old. Born in Jakarta on November 1, 1959. Based in Tangerang. Graduated in Civil Engineering from ITB Bandung (1984) and Post-graduated in Project Management from Melbourne University (1996).

Dasar Hukum Penunjukkan Sebagai Dewan Komisaris

Diangkat sejak pertama kali sebagai Plt Komisaris Utama berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Sirkuler tanggal 2 Desember 2016 dan diangkat kembali menjadi Komisaris Utama melalui Rapat Umum Pemegang Saham Secara Sirkuler tanggal 18 September 2017.

Riwayat Jabatan

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Utama PJB, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Pengembangan Organisasi PT PLN (Persero) (2012-2016). Memulai karier di PT PLN (Persero) sejak tahun 1984 dan 15 (lima belas) tahun pertama ikut serta membangun PLTU Suralaya 3 dan 4, PLTP Kamojang serta PLTGU Gresik. Pernah menduduki jabatan-jabatan penting di PT PLN (Persero) dan Anak Perusahaan PLN antara lain sebagai Direktur Utama PT PLN Batam (2010 - 2012), Direktur SDM PT PLN Batam (2008-2010) dan Manajer Senior Pengembangan Unit di PLN Pusat (2005-2008).

Rangkap Jabatan

-

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, dengan anggota Direksi maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Decree of Appointment as a Member of Board of Commissioners

First appointed as Act. President Commissioner through the Circular General Meeting of Shareholders on December 2, 2016 and reappointed as President Commissioner through the Circular General Meeting of Shareholders on September 18, 2017

Career History

Before appointed as President Commissioner of PJB, he once served as Head of Organizational Development Division of PT PLN (Persero) (2012-2016). His career started at PT PLN (Persero) since 1984 and the first 15 (fifteen) years participating in Suralaya CFPP 3 and 4 construction, Kamojang GPP and Gresik CCPP. Significant positions were also occupied at PT PLN (Persero) and PLN Subsidiaries such as President Director of PT PLN Batam (2010 - 2012), HC Director of PT PLN Batam (2008-2010) and Senior Manager of Development Unit at PLN Head Office (2005 -2008).

Concurrent Positions

-

Affiliation

Not affiliated with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the Majority and Controlling Shareholders.



Defy Indiyanto Budiarto

Komisaris Independen (2017- Sekarang)
Independent Commissioner (2017- Present)

Warga Negara Indonesia, berusia 38 tahun. Lahir di Jakarta, 14 Oktober 1981. Berdomisili di Jakarta. Memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional dari Universitas Nasional (Tahun 2003) dan Pascasarjana di bidang Ilmu Politik dari National University Malaysia (Tahun 2006).

Indonesian citizen, 38 years old. Born in Jakarta on October 14, 1981. Based in Jakarta. Earned a Bachelor of International Relations from Universitas Nasional (2003) and Post-graduated in Political Science from National University Malaysia (2006).



Dasar Hukum Penunjukkan Sebagai Dewan Komisaris

Diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris pertama kali berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Sirkuler tanggal 18 September 2017.

Riwayat Jabatan

Memulai karir di PT Rediss Papua selama 8 tahun sejak 2006 hingga 2014, sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Utama PT Wirelles One Nusantara (2010-2013), Komisaris Utama PT Bara Inti Surya (2007-2012), Direktur PT Bara Inti Surya (2012-2014), Direktur PT Definisi Bumi Resource (2011-2014) dan Komisaris PT Definisi Bumi Resource (2014-2015).

Rangkap Jabatan

- Wakil Ketua Komite Audit PJB (2017 - sekarang)
- Ketua Komite SDM dan Organisasi PJB (2019 - sekarang)

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, dengan anggota Direksi maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Decree of Appointment as a Member of Board of Commissioners

First appointed as Commissioner through the Circular General Meeting of Shareholders on September 18, 2017.

Career History

His career was started at PT Rediss Papua for 8 years (2006-2014), previously served as President Commissioner of PT Wirelles One Nusantara (2010-2013), President Commissioner of PT Bara Inti Surya (2007-2012), Director of PT Bara Inti Surya (2012-2014), Director of PT Definisi Bumi Resource (2011-2014), and Commissioner of PT Definisi Bumi Resource (2014-2015).

Concurrent Positions

- Deputy Head of PJB Audit Committee (2017-present)
- Head of HC and Organization Committee of PJB (2019-present)

Affiliation

Not affiliated with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the Majority and Controlling Shareholders.





Sunarsip

Komisaris Independen (2017- Sekarang)
Independent Commissioner (2017- Present)

Warga Negara Indonesia, 46 tahun. Lahir di Tuban, 25 Mei 1973. Berdomisili di Jakarta. Memperoleh gelar di bidang Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) (2000) dan Pascasarjana di bidang Ekonomi dari Universitas Indonesia (2006).

Indonesian citizen, 46 years old. Born in Tuban, May 25, 1973. Based in Jakarta. Earned a Bachelor of Accounting from the Indonesian State College of Accountancy (ISCA) (2000) and Post-graduated in Economics from the University of Indonesia (2006).



Dasar Hukum Penunjukkan Sebagai Dewan Komisaris

Diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris pertama kali melalui Rapat Umum Pemegang Saham Secara Sirkuler tanggal 18 September 2017.

Decree of Appointment as a Member of Board of Commissioners

Appointed as Commissioner through the Circular General Meeting of Shareholders on September 18, 2017.

Riwayat Jabatan

Beliau mengawali karir di Kementerian Keuangan RI (1994-2007) dan memiliki pengalaman profesional antara lain sebagai Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Bank BNI Tbk (2004), Komisaris PT Bank BRI Indonesia Tbk (2005-2007), Tenaga Ahli Dewan Komisaris PT Pertamina (2010-2014), Komisaris Independen PT Bank Syariah BRI (2008-2015), Chief Economist PT Bank BNI Tbk (2015-2016) dan PT Bank Bukopin Tbk (2016-sekarang). Selain itu, juga aktif sebagai Dosen Program Magister Ekonomi Universitas Trisakti dan STAN serta Tenaga Ahli Anggota DPR, Konsultan Pemerintah Daerah dan Konsultan Bank Dunia.

Career History

His career was started at the Ministry of Finance of Indonesia (1994-2007) and various professional experiences such as the Risk Management Monitoring Committee of PT Bank BNI Tbk (2004), Commissioner of PT Bank BRI Indonesia Tbk (2005-2007), Expert Commissioner of PT Pertamina (2010-2014), Independent Commissioner of PT Bank Syariah BRI (2008-2015), Chief Economist of PT Bank BNI Tbk (2015-2016) and PT Bank Bukopin Tbk (2016-present). In addition, he is also an Active Lecturer in Economics Masters Program at Trisakti University and ISCA and also Expert Members of the House of Representatives, Regional Government Consultants, and World Bank Consultants.

Rangkap Jabatan

- Ketua Komite Audit PJB (2017 - Sekarang)
- Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan PJB (2018 - Sekarang)

Concurrent Positions

- Head of PJB Audit Committee (2017-present)
- Member of PJB Risk Management and Compliance Committee (2018-present)

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, dengan anggota Direksi maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Affiliation

Not affiliated with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the Majority and Controlling Shareholders.



Benny M.M. Marbun

Plt. Komisaris (2017- Sekarang)
Act. Commissioner (2017- Present)

Warga Negara Indonesia, berusia 59 tahun. Lahir di Tanjung Balai, 27 Juni 1960. Berdomisili di Jakarta. Memperoleh gelar Elektro dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1985) dan gelar Pascasarjana dari dari Melbourne University (Master of Engineering Science) (1994).

Indonesian citizen, 59 years old. Born in Tanjung Balai on June 27, 1960. Based in Jakarta. Earned a Bachelor of Electrical Engineering from Gadjah Mada University, Yogyakarta (1985) and a Post-graduated from Melbourne University (Master of Engineering Science) (1994).



Dasar Hukum Penunjukkan Sebagai Dewan Komisaris

Diangkat sebagai Plt. Komisaris melalui Rapat Umum Pemegang Saham Secara Sirkuler tanggal 2 Desember 2016 dan diangkat kembali melalui Rapat Umum Pemegang Saham Secara Sirkuler tanggal 18 September 2017.

Riwayat Jabatan

Memulai karier di PT PLN (Persero) sejak tahun 1986 dan pernah menduduki jabatan penting antara lain sebagai Manager Cabang Kebayoran (1995-1997), Manager Cabang Fak-Fak (1997-1999), Manager Cabang Jayapura (1999-2000), Manager Cabang Surabaya Selatan (2000-2002), Ahli Layanan Pelanggan di Kantor Pusat (2003-20008), General Manager PLN Wilayah Papua (2008-2010), Kepala Divisi Komersial PT PLN (Persero) (2010) dan Kepala Divisi Niaga PLN (Maret 2010).

Rangkap Jabatan

- Ketua Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan PJB (2017 - Sekarang)

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, dengan anggota Direksi maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Decree of Appointment as a Member of Board of Commissioners

Appointed as Act. Commissioner through the Circular General Meeting of Shareholders on December 2, 2016 and reappointed through the Circular General Meeting of Shareholders on September 18, 2017

Career History

His Career was started at PT PLN (Persero) since 1986 and some significant positions were occupied including Kebayoran Branch Manager (1995-1997), Fak-Fak Branch Manager (1997-1999), Jayapura Branch Manager (1999-2000), South Surabaya Branch Manager (2000-2002), Customer Service Expert at Head Office (2003-20008), General Manager of PLN Papua Region (2008-2010), Head of Commercial Division of PT PLN (Persero) (2010), and Head of PLN Business Division (March 2010).

Concurrent Positions

- Head of PJB Risk Management and Compliance Committee (2017-Present)

Affiliation

Not affiliated with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the Majority and Controlling Shareholders.



Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan Audit
Audited Financial Statements



Referensi Kriteria AR
AR Criteria Reference



Hendra Iswahyudi

Plt. Komisaris (2017- Sekarang)
Act. Commissioner (2017- Present)

Warga Negara Indonesia, berusia 51 tahun. Lahir di Banyuwangi, 30 November 1968. Berdomisili di Jakarta. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Fisika dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (1993), Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia (2003) dan Doktor Ilmu Ekonomi dari Universitas Indonesia (2013).

Indonesian citizen, 51 years old. Born in Banyuwangi on November 30, 1968. Based in Jakarta. Earned a Bachelor of Physics Engineering from the Sepuluh Nopember Institute of Technology (1993), Masters of Planning and Public Policy from the University of Indonesia (2003) and a Doctor of Economics from the University of Indonesia (2013).



Dasar Hukum Penunjukkan Sebagai Dewan Komisaris

Diangkat sebagai Plt. Komisaris pertama kali melalui Rapat Umum Pemegang Saham Secara Sirkuler tanggal 19 Desember 2017.

Riwayat Jabatan

Memulai karier di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan sejak tahun 1998 dan pernah menduduki jabatan penting antara lain sebagai Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan (2017-2019), Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (2016-2017), dan Kepala Bagian Rencana dan Laporan (2011-2016).

Rangkap Jabatan

- Wakil Ketua Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan (2018 - Sekarang)

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, dengan anggota Direksi maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Decree of Appointment as a Member of Board of Commissioners

First appointed as Act. Commissioner through the Circular General Meeting of Shareholders on December 19, 2017.

Career History

His career was started in Directorate General of Electricity at the Electricity Business Development Directorate since 1998 and important positions were occupied such as Director of Electricity Business Development (2017-2019); Director of Planning and Development of New, Renewable, and Energy Conservation Infrastructure (2016-2017); and Head of Plan and Report Department (2011-2016).

Concurrent Positions

- Deputy Head of PJB Risk Management and Compliance Committee (2018-Present)

Affiliation

Not affiliated with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the Majority and Controlling Shareholders.



Jisman Parada Hutajulu

Plt. Komisaris (2019 - Sekarang)

Act. Commissioner (2019 - Present)

Warga Negara Indonesia, berusia 52 tahun. Lahir di Tapanuli, 18 Januari 1967. Berdomisili di Jakarta. Memperoleh gelar Sarjana Elektro dari Institut Sains dan Teknologi Nasional, Jakarta (1992) dan gelar Pascasarjana bidang Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen Labora Jakarta (2004).

Indonesian citizen, 52 years old. Born in Tapanuli on January 18, 1967. Based in Jakarta. Earned a Bachelor of Electrical Engineering from the National Institute of Science and Technology, Jakarta (1992) and post-graduated in Management from STML Jakarta (2004).



Dasar Hukum Penunjukkan Sebagai Dewan Komisaris

Diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Komisaris melalui Rapat Umum Pemegang Saham Secara Sirkuler tanggal 11 Maret 2019.

Riwayat Jabatan

Memulai karier di di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sejak tahun 2000 dan menduduki berbagai posisi penting antara lain sebagai Kasubdit Standardisasi Ketenagalistrikan (2011), Kasubdit Harga dan Subsidi Listrik (2015), Kasubdit Harga Tenaga Listrik (2016), Kepala Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Ketenagalistrikan (2014-sekarang), dan Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan (2018-sekarang).

Rangkap Jabatan

- Kepala Penyidik PPNS Bidang Ketenagalistrikan merangkap Kasubdit Huga dan Subsidi Listrik (Kementerian ESDM 2014 - Sekarang)
- Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan (Kementerian ESDM 2018 - Sekarang)
- Wakil Ketua Komite SDM dan Organisasi (2019 - Sekarang)

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, dengan anggota Direksi, namun memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Decree of Appointment as a Member of Board of Commissioners

Appointed as Act. Commissioner through the Circular General Meeting of Shareholders on March 11, 2019.

Career History

His career was started at the Ministry of Energy and Mineral Resources since 2000 and various important positions were also occupied such as Head of Sub-Directorate of Electricity Standardization (2011), Head of Sub-directorate of Electricity Price and Subsidy (2015), Head of Sub-directorate of Electricity Prices (2016), Head of PPNS Electricity Section (2014-present), and Director of Electricity Program Development (2018-present).

Concurrent Positions

- Audit Head of PPNS in Electricity Sector and Head of Subdirectorate of Electricity Price and Subsidy (Ministry of Energy and Mineral Resources, 2014-Present)
- Director of Electricity Program Development (Ministry of Energy and Mineral Resources, 2018-Present)
- Deputy Head of HC and Organization Committee (2019 - Present)

Affiliation

Not affiliated with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the Majority and Controlling Shareholders.



Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan Audit
Audited Financial Statements



Referensi Kriteria AR
ARA Criteria Reference

PROFIL DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS PROFILE



Iwan Agung Firstantara

Direktur Utama (2016 – Sekarang)

President Director (2016 - Present)

Warga Negara Indonesia, berusia 50 tahun. Lahir di Yogyakarta, 4 Oktober 1969. Berdomisili di Surabaya. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Gadjah Mada (1993) dan Master Bidang Manajemen dari Universitas yang sama (2005).

Indonesian citizen, 50 years old. Born in Yogyakarta on October 4, 1969. Based in Surabaya. Earned a Bachelor of Mechanical Engineering from Gadjah Mada University (1993) and a Masters in Management also from Gadjah Mada University (2005).



Dasar Hukum Penunjukkan Sebagai Anggota Direksi

Diangkat secara definitif sebagai Direktur Utama melalui Rapat Umum Pemegang Saham Secara Sirkuler tanggal 14 Juli 2016.

Decree of Appointment as a Member of Board of Directors
Definitively Appointed as President Director through the Circular General Meeting of Shareholders on July 14, 2016.

Riwayat Jabatan

Memulai karier di PT PLN (Persero) sejak tahun 1994 dan ditempatkan di PJB serta menduduki jabatan penting antara lain sebagai Expert Niaga pada Direktorat Niaga PJB (2015-2016), Senior Specialist I Niaga PJB (2013-2015), Senior Manajer Perencanaan SDM & Fasilitas (2012), General Manager UP Gresik (2012), dan General Manager UPHT (2011-2012).

Career History

His career started at PT PLN (Persero) since 1994 and was assigned at PJB and held important positions such as a Commercial Expert at the Commercial Directorate of PJB (2015-2016), PJB Senior Business Specialist-1 (2013-2015), Senior HC Planning Manager & Facilities (2012), General Manager of Gresik GU (2012), and General Manager of MSUWA (2011-2012).

Rangkap Jabatan

-

Concurrent Positions

-

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, dengan anggota Dewan Komisaris maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Affiliation

Not affiliated with other members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Majority and Controlling Shareholders.



Sugiyanto

Plt. Direktur Operasi – 1 (2017 – Sekarang)

Act. Director of Operations – 1 (2017 – present)

Warga Negara Indonesia, berusia 51 tahun. Lahir di Trenggalek, 9 Januari 1968. Berdomisili di Surabaya. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Nuklir dari Universitas Gajah Mada (1992) dan Master Bidang Teknik Mesin dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Indonesian citizen, 51 years old. Born in Trenggalek, January 9, 1968. Based in Surabaya. Earned a Bachelor of Nuclear Engineering from the University of Gajah Mada (1992) and a Master in Mechanical Engineering from Sepuluh Nopember Institute of Technology.



Dasar Hukum Penunjukkan Sebagai Anggota Direksi

Diangkat secara definitif sebagai Plt. Direktur Operasi – 1 melalui Rapat Umum Pemegang Saham Secara Sirkuler tanggal 8 September 2017.

Decree of Appointment as a Member of Board of Directors Definitively appointed as Act. Director of Operations – 1 through the Circular General Meeting of Shareholders on September 8, 2017.

Riwayat Jabatan

Mengawali karir di PT PLN (Persero) sejak tahun 1993 kemudian melanjutkan karir di PLN Kitlur Jawa Bagian Timur dan Bali pada tahun berikutnya, yang berubah menjadi PT PLN PJB II di tahun berikutnya. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai General Manager PLN Unit Pembangkitan Sumatera Bagian Utara (2015-2018), Senior Specialist I Niaga PJB (2015-2017), General Manager UP Gresik (2013-2015), dan Senior Manajer Rendal OP dan Pemeliharaan (2012-2013).

Career History

His career started at PT PLN (Persero) since 1993, then continued at PLN Kitlur in East Java and Bali which changed to PT PLN PJB II in the following year. Previously appointed as General Manager of PLN's North Sumatra Power Plant Unit (2015-2018), PJB's Senior Business Specialist-1 (2015-2017), General Manager of Gresik GU (2013-2015), and Senior Manager of Planning Control and Operations and Maintenance (2012 -2013).

Rangkap Jabatan

-

Concurrent Positions

-

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, dengan anggota Dewan Komisaris maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Affiliation

Not affiliated with other members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Majority and Controlling Shareholders.





Miftahul Jannah

Direktur Operasi - 2 (2016 – Sekarang)

Director of Operations - 2 (2016 - present)

Warga Negara Indonesia, berusia 53 tahun. Lahir di Trenggalek, 20 Maret 1966. Berdomisili di Surabaya. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Fisika dari ITS Surabaya pada tahun 1999 dan Master di Bidang Manajemen dari ITB Bandung (2002).

Indonesian citizen, 53 years old. Born in Trenggalek on March 20, 1966. Based in Surabaya. Earned a Bachelor of Physics Engineering from ITS Surabaya in 1999 and a Masters of Management from ITB Bandung (2002).



Dasar Hukum Penunjukkan Sebagai Anggota Direksi

Diangkat secara definitif sebagai Direktur Operasi - 2 melalui Rapat Umum Pemegang Saham Secara Sirkuler tanggal 14 Juli 2016.

Decree of Appointment as a Member of Board of Directors

Definitively appointed as Director of Operations - 2 through the Circular General Meeting of Shareholders on July 14, 2016.

Riwayat Jabatan

Memulai karier di PT PLN (Persero) sejak tahun 1992 dan ditugaskan di Unit Pembangkitan Muara Tawar, Jakarta. Pernah menduduki jabatan penting antara lain sebagai Expert Niaga pada Direktorat Niaga PJB (2015-2016), Senior Specialist Niaga I PJB, Senior Manajer Teknologi Pembangkit PJB (2012-2013), Vice President Enjiniring (2012) dan General Manager Unit Pembangkitan Muara Karang (2010-2012).

Career History

His career started at PT PLN (Persero) since 1992 and assigned to Muara Tawar GU, Jakarta. Appointed to occupy important positions such as a Commercial Expert at the PJB Directorate of Commerce (2015-2016), PJB Senior Business Specialist-1, Senior Manager of PJB Power Plant Technology (2012-2013), Vice President Engineering (2012), and General Manager of Muara Karang GU (2010-2012).

Rangkap Jabatan

-

Concurrent Positions

-

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, dengan anggota Dewan Komisaris maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Affiliation

Not affiliated with other members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Majority and Controlling Shareholders.



Henky Heru Basudewo

Direktur Pengembangan & Niaga (2016 – Sekarang)

Director of Business Development & Commerce (2016 - present)

Warga Negara Indonesia, 62 tahun. Lahir di Sidoarjo, 25 Maret 1957. Berdomisili di Surabaya. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Diponegoro (1983) dan Master di bidang Geo-Technical dari ITB Bandung (1997).

Indonesian citizen, 62 years old. Born in Sidoarjo on March 25, 1957. Based in Surabaya. Earned a Bachelor of Civil Engineering from Diponegoro University (1983) and a Masters of Geo-Technical from ITB Bandung (1997).



Dasar Hukum Penunjukkan Sebagai Anggota Direksi

Diangkat secara definitif sebagai Direktur Pengembangan & Niaga melalui Rapat Umum Pemegang Saham Secara Sirkuler tanggal 14 Juli 2016.

Riwayat Jabatan

Memulai karier di PT PLN (Persero) sejak tahun 1984. Selama berkarier pernah menduduki jabatan penting antara lain sebagai Principal Engineer PT PLN (Persero) (2013), Kepala Divisi Konstruksi dan IPP Jawa-Bali PT PLN (Persero) (2010-2013), Direktur Utama PT Rekadaya ElektriKA (2013-2016) dan Senior Specialist I Perencanaan PT PLN Geothermal (2009-2010).

Rangkap Jabatan

-

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, dengan anggota Dewan Komisaris maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Decree of Appointment as a Member of Board of Directors
Definitively appointed as Director of Business Development through the Circular General Meeting of Shareholders on July 14, 2016.

Career History

His career started at PT PLN (Persero) since 1984. Various significant positions were occupied including Principal Engineer of PT PLN (Persero) (2013), Division Head of Construction and IPP Java-Bali of PT PLN (Persero) (2010-2013), President Director of PT Rekadaya ElektriKA (2013-2016) and Senior Specialist-1 Planning of PT PLN Geothermal (2009-2010).

Concurrent Positions

-

Affiliation

Not affiliated with other members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Majority and Controlling Shareholders.



Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan Audit
Audited Financial Statements



Referensi Kriteria ARA
ARA Criteria Reference



Tjutju Kurnia Sutjiningsih

Direktur Keuangan (2016 – Sekarang)

Director of Finance (2016 - present)

Warga Negara Indonesia, 60 tahun. Lahir di Kuningan, 30 September 1959. Berdomisili di Surabaya. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Perusahaan dari Universitas Padjadjaran (1983).

Indonesian citizen, 60 years old. Born in Kuningan, 30 September 1959. Based in Surabaya. Earned a Bachelor of Corporate Economics from Padjadjaran University (1983).



Dasar Hukum Penunjukkan Sebagai Anggota Direksi

Diangkat secara definitif sebagai Direktur Keuangan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Secara Sirkuler tanggal 14 Juli 2016.

Decree of Appointment as a Member of Board of Directors
Definitively appointed as Director of Finance through the Circular General Meeting of Shareholders on July 14, 2016.

Riwayat Jabatan

Memulai karier pada bidang keuangan dan akuntansi di PT PLN (Persero) sejak tahun 1984. Pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Perbendaharaan PT PLN (Persero) (2010-2015), Dept. Dir. Perbendaharaan PT PLN (Persero) (2008-2010), dan Ahli Utama Pengelolaan Kas PT PLN (Persero) (2004-2008).

Career History

Her career started in finance and accounting at PT PLN (Persero) since 1984. Appointed as Head of Treasury Division of PT PLN (Persero) (2010-2015), Deputy Director of Treasury of PT PLN (Persero) (2008-2010), and Main Expert in Cash Management of PT PLN (Persero) (2004-2008).

Rangkap Jabatan

-

Concurrent Positions

-

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, dengan anggota Dewan Komisaris maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Affiliation

Not affiliated with other members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Majority and Controlling Shareholders.



Suharto

Direktur SDM & Administrasi (2016 – Sekarang)

Director of Human Capital and Administration (2016 - present)

Warga Negara Indonesia, berusia 58 tahun. Lahir di Batang Serangan, 3 Juli 1961. Berdomisili di Surabaya. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Listrik dari Universitas Sumatera Utara (1986) dan Magister di bidang Kelistrikan dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (2001).

Indonesian citizen, 58 years old. Born in Batang Serangan on July 3, 1961. Based in Surabaya. Earned a Bachelor of Electrical Engineering from Sumatra Utara University (1986) and a Masters of Electricity from Sepuluh Nopember Institute of Technology (2001).



Dasar Hukum Penunjukkan Sebagai Anggota Direksi

Diangkat secara definitif sebagai Direktur SDM & Administrasi melalui Rapat Umum Pemegang Saham Secara Sirkuler tanggal 14 Juli 2016.

Riwayat Jabatan

Memulai karier di PT PLN (Persero) sejak tahun 1987 dan pernah menduduki jabatan strategis di antaranya Kepala Divisi Pengembangan Talenta PT PLN (Persero) (2015), Kepala Divisi Pengembangan SDM & Talenta PT PLN (Persero) (2014-2016), Kepala Kantor Induk Pusat Pendidikan dan Pelatihan PT PLN Pusdiklat (2011-2014) dan Kepala Kantor Induk PT PLN Corporate University (2012-2014).

Rangkap Jabatan

-

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, dengan anggota Dewan Komisaris maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Decree of Appointment as a Member of Board of Directors
Definitively appointed as Director of Human Capital and Administration through the Circular General Meeting of Shareholders on July 14, 2016.

Career History

His career started at PT PLN (Persero) since 1987 and strategic positions were occupied including the Head of Talent Development Division of PT PLN (Persero) (2015), Head of HR & Talent Development Division of PT PLN (Persero) (2014-2016), Head of Education and Training Center of PT PLN Pusdiklat (2011-2014), and Head of Office Center of PT PLN Corporate University (2012-2014).

Concurrent Positions

-

Affiliation

Not affiliated with other members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Majority and Controlling Shareholders.



Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan Audit
Audited Financial Statements



Referensi Kriteria ARA
ARA Criteria Reference

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE-KOMITE, SEKRETARIS PERUSAHAAN, DAN KEPALA SPI

EDUCATION AND TRAINING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS, BOARD OF DIRECTORS, COMMITTEES, CORPORATE SECRETARY, AND HEAD OF IAU

Sebagai bagian dari implementasi tata kelola perusahaan, PJB memfasilitasi setiap organ Perusahaan mendapatkan program pengembangan sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Adapun Informasi mengenai pendidikan dan pelatihan bagi Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Kepala SPI selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

As the representation of Corporate Governance, PJB accommodates every company organ to join development programs based on their respective duties. Information concerning education and training for the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary and Head of IAU in 2019 is as follows:

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Jabatan Position	Pelatihan/Seminar/Workshop Training/Seminar/Workshop	Waktu Date	Penyelenggara & Lokasi Organizer and Location
Sriyono D. Siswoyo	Komisaris Utama President Commissioner	Directorship	22 - 23 Agustus 2019 August 22-23, 2019	IICD, Bogor
		European Utility Week Conference	12 - 14 November 2019 November 12-14, 2019	Synergy Clarion, Paris
Jisman Parada Hutajulu	Komisaris Commissioner	Directorship	22 - 23 Agustus 2019 August 22-23, 2019	IICD, Bogor
Benny MM. Marbun	Komisaris Commissioner	Directorship	22 - 23 Agustus 2019 August 22-23, 2019	IICD, Bogor
		European Power & Strategy Summit	27 - 29 November 2019 November 27-29, 2019	EPG Summit LTD, Ceko
Sunarsip	Komisaris Commissioner	Fundamental Of Project Finance	14 - 15 Maret 2019 March 14-15, 2019	Fitch Learning, Singapura
		Directorship	22 - 23 Agustus 2019 August 22-23, 2019	IICD, Bogor
		Corporate Credit Rating Analysis	9 - 11 Oktober 2019 October 9-11, 2019	Moody's Analytics, Hongkong
Defy Indiyanto Budiarto	Komisaris Commissioner	Directorship	22 - 23 Agustus 2019 August 22 - 23, 2019	IICD, Bogor

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI COMPETENCE DEVELOPMENT PROGRAM FOR THE BOARD OF DIRECTORS

Direksi Board of Directors	Jabatan Position	Pelatihan/Seminar/Workshop Training/Seminar/Workshop	Waktu Date	Penyelenggara & Lokasi Organizer and Location
Iwan Agung Firstantara	Direktur Utama President Director	Seminar Nasional BPK BPK National Seminar	22 Juli 2019 July 22, 2019	BPK, Jakarta
		Directorship	22 - 23 Agustus 2019 August 22-23, 2019	IICD, Bogor
		European Utility Week Conference	12 - 14 November 2019 November 12-14, 2019	Synergy Clarion, Paris
Tjutju Kurnia S.	Direktur Keuangan Director of Finance	Mandiri Investment Forum	29 Januari 2019 January 29, 2019	PT Bank Mandiri (Tbk), Jakarta
		Workshop Refreshment Indenture Global Bond	11 - 13 April 2019 April 11-13, 2019	PT PLN (Persero), Bali
		Directorship	22 - 23 Agustus 2019 August 22-23, 2019	IICD, Bogor
		Seminar GCG Seminar GCG	29 - 30 Agustus 2019 August 29-30, 2019	PT PLN (Persero), Batam



Direksi Board of Directors	Jabatan Position	Pelatihan/Seminar/Workshop Training/Seminar/Workshop	Waktu Date	Penyelenggara & Lokasi Organizer and Location
Henky Heru Basudewo	Direktur Pengembangan Dan Niaga Director of Development and Commerce	Workshop Skema Pendanaan Dengan Potensial Leader Workshop on Funding Scheme for Potential Leaders	13 - 15 Mei 2019 May 13-15, 2019	Asian Development Bank & Japan Bank For International Cooperation, Jepang
		Workshop Renewable Energy	21 - 25 Juli 2019 July 21-25, 2019	Jakarta
		Directorship	22 - 23 Agustus 2019 August 22-23, 2019	IICD, Bogor
		Powergen Asia	3 - 5 September 2019 September 3-5, 2019	CLARION ENERGY, Malaysia
Suharto	Direktur SDM & Administrasi Director of Human Capital and Administration	Digital HR Summit	2 - 3 APRIL 2019 April 2-3, 2019	STAMFORD GLOBAL, Belanda
		Directorship	22 - 23 AGUSTUS 2019 August 22-23, 2019	IICD, Bogor
Sugiyanto	Direktur Operasi 1 Director of Operations-1	Directorship	22 - 23 AGUSTUS 2019 August 22-23, 2019	IICD, Bogor
Miftahul Jannah	Direktor Operasi 2 Director of Operations-2	AI & Big Data for a Smarter Future	19 - 20 Juni 2019 June 19-20, 2019	Encore Media Group, Amsterdam
		Directorship	22 - 23 Agustus 2019 August 22-23, 2019	IICD, Bogor
		Global Customer Summit	25 - 29 Agustus 2019 August 25-29, 2019	General Electric, New York
		The 35 th HAPUA Council & Associated Meeting	27 - 30 Oktober 2019 October 27-30, 2019	HAPUA, Singapura

PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE AUDIT COMPETENCE DEVELOPMENT PROGRAM FOR AUDIT COMMITTEE

Komite Audit Audit Committee	Jabatan Position	Pelatihan/Seminar/Workshop Training/Seminar/Workshop	Waktu Date	Penyelenggara & Lokasi Organizer and Location
Sigit Djalur Purwoko	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	Workshop APQC Workshop APQC	2019	PT PLN (Persero) Divisi Organisasi di Jakarta Organization Division of PT PLN (Persero) in Jakarta
		Workshop All ISO Workshop All ISO	2019	PT Talenta Dinamika di Jakarta PT Talenta Dinamika di Jakarta
		FGD tentang 4DX FGD on 4DX	2019	PT PLN (Persero) Kantor Pusat di Jakarta Headquarter of PT PLN (Persero) in Jakarta
		Forum Konsensus Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Forum on Electrical Engineering Competency Standards Consensus	20 Nov 2019 November 20, 2019	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan di Jakarta Directorate General of Electricity in Jakarta
Andar Sudiar Sukma	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	Workshop KPK KPK Workshop	29 Maret 2019 March 29, 2019	PT PJB, Jakarta
		Certified Governance Professional (CGP)	17 - 18 Juni 2019 June 17-18, 2019	LSP MKS, Jakarta
		Certified Audit Committee Practices (CACP) Certified Audit Committee Practices (CACP)	6 - 8 Agustus August 6-8, 2019	Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI), Jakarta Indonesian Audit Committee Association (IKAI), Jakarta

PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE SDM & ORGANISASI
COMPETENCE DEVELOPMENT PROGRAM FOR HC & ORGANIZATION COMMITTEE

Komite Audit Audit Committee	Jabatan Position	Pelatihan/Seminar/Workshop Training/Seminar/Workshop	Waktu Date	Penyelenggara & Lokasi Organizer and Location
Chaerudin Darsa	Anggota Komite (Pihak Independen) Committee Member (Independent Party)	Training Standar Sistem Manajemen Energi ISO 50001:2018 Training of Energy Management System Standard ISO 50001: 2018	20-21 Feb 2019 February 20-21, 2019	KAN (Komite Akreditasi Nasional) KAN (National Accreditation Committee)
		Training Asessor Skema Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lengkungan (LSSML) Training of Accreditation Scheme Accreditation Institution Management System Certification Scheme	6-7 Mei 2019 May 6-7, 2019	KAN (Komite Akreditasi Nasional) KAN (National Accreditation Committee)
		Training SNI ISO 45001: 2018 Occupational Health and Safety Management Systems Training SNI ISO 45001: 2018 of Occupational Health and Safety Management Systems	16-17 Mei 2019 May 16-17, 2019	KAN (Komite Akreditasi Nasional) KAN (National Accreditation Committee)
		Workshop Training ISO/IEC 17021-2:2016 Persyaratan Kompetensi Untuk Audit dan Sertifikasi SML (Sistem Manajemen Lingkungan) Training Workshop on ISO/IEC 17021-2: 2016: Competency Requirements for Audit and SML Certification (Environmental Management system)	9-10 Juli 2019 July 9-10, 2019	KAN (Komite Akreditasi Nasional) KAN (National Accreditation Committee)
		Training Asessor Preparation Course (APC) KPU Tahun 2019 KPU Assessor Preparation Course (APC) 2019	13-14 Feb 2019 February 13-15, 2019	FEB (Forum Ekselen BUMN) FEB (SOE Excellent Forum)
		Training Finance for Non Finance Manager	12 April 2019 April 12, 2019	BSN (Badan Standardisasi Nasional) BSN (National Standardization Agency)
		Workshop SMT (Sistem Manajemen Terpadu) Untuk Pembangkit Workshop on Integrated Management System for Power Plants	5-6 Maret 2019 March 5-6, 2019	PLN Pusdiklat PLN Training Center
Rahardjo Setyo Budi	Sekretaris Komite (Pihak Independen) Committee Secretary (Independent Party)	-	-	-

PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE MANAJEMEN RISIKO & KEPATUHAN
COMPETENCE DEVELOPMENT PROGRAM FOR RISK MANAGEMENT & COMPLIANCE COMMITTEE

Manajemen Risiko & Kepatuhan Risk Management and Compliance Committee	Jabatan Position	Pelatihan/Seminar/Workshop Training/Seminar/Workshop	Waktu Date	Penyelenggara & Lokasi Organizer and Location
Bambang Istianto	Sekretaris Komite Committee Secretary	1Workshop KPK Workshop on KPK	29 Maret 2019 March 29, 2019	PJB
		Refreshment CRMP	1- 2 Agustus 2019 August 1-2, 2019	PT RAP
		Meningkatkan Kinerja Program melalui Monitoring & Evaluasi Improving Program Performance through Monitoring & Evaluation	18 – 21 November 2019 November 18-21, 2019	SOLIDARITAS
Eko Prijatno Kestianto B	Anggota Komite Committee Member	Workshop KPK Workshop KPK	29 Maret 2019 March 29, 2019	PJB

PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI SEKRETARIS PERUSAHAAN
COMPETENCE DEVELOPMENT PROGRAM FOR CORPORATE SECRETARY

No	Pelatihan/Seminar/Workshop Training/Seminar/Workshop	Waktu date	Penyelenggara & Lokasi Organizer and Location
1	FGD Self Assesment GCG Tahun 2019 FGD Self Assesment GCG 2019	Desember December	Surabaya
2	Pelatihan Malcolm Baldrige PJB 2019 Malcolm Baldrige PJB 2019 Training	Juli July	Sidoarjo
3	<i>Refreshment Indenture Global Bond</i>	April April	Surabaya
4	Workshop Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Workshop on Corruption Prevention	Maret March	Surabaya

PROGRAM PENINGKATAN KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERNAL DAN AUDITOR SATUAN PENGAWASAN INTERNAL
DEVELOPMENT PROGRAM FOR THE HEAD OF INTERNAL AUDIT UNIT AND INTERNAL AUDITOR

No	Name Name	Pelatihan/Seminar/Workshop Training/Seminar/Workshop	Waktu Date	Penyelenggara & Lokasi Organizer & Location
1	Efin Febriantoro R.	Workshop Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Workshop on Corruption Prevention	Maret March	Surabaya
		Pelatihan Malcolm Baldrige PJB 2019 PJB's Malcolm Baldrige Training 2019	Juli July	Surabaya
		Seminar Literasi Keuangan Muda Happy, Tua Makin Happy Financial Literacy Seminar Happy Young, Old Happier	Oktober October	Surabaya
2	Edy Hartono	<i>Refreshment dan Capacity Building PJB Transformation Agent Tahun 2019 Batch VI</i> Refreshment and Capacity Building PJB Transformation Agent 2019 Batch VI	Juli July	Kubik, Jakarta
		Sertifikasi Asesor Kompetensi Muda Bidang Pembangkit Tenaga Listrik Certification of Young Competence Assessor in the Field of Electrical Power Plant	Agustus August	Kementrian ESDM, Gresik
		Program Profesi Insinyur Engineer Professional Program	Desember December	UGM, Yogyakarta
		Sharing Session: Asset Management Sharing Session: Asset Management	Desember December	Yogyakarta
3	Kasbullah Subekti	Uji Kompetensi Asesor Muda Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Certification of Young Competence Assessor in the Field of Electrical Generation	Juni June	
		Program Profesi Insinyur Engineer Professional Program	Desember December	UGM, Yogyakarta
		Workshop Sharing Knowledge Sharing Knowledge Workshop	Desember December	
		Sharing Session: Asset Management Sharing Session: Asset Management	Desember December	Yogyakarta
4	Sulistyo Utomo	Workshop Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Workshop on Corruption Prevention	Maret March	Surabaya
		Sertifikasi Asesor Kompetensi Muda Bidang Pembangkit Tenaga Listrik Certification of Young Competence Assessor in the Field of Electrical Generation	Agustus August	Kementrian ESDM, Gresik
		Program Profesi Insinyur Engineer Professional Program	Desember December	UGM, Yogyakarta
		Sharing Session: Asset Management Sharing Session: Asset Management	Desember December	Yogyakarta



No	Name Name	Pelatihan/Seminar/Workshop Training/Seminar/Workshop	Waktu Date	Penyelenggara & Lokasi Organizer & Location
5	Ali Umar Sjafi'i	Workshop Persiapan Pelatihan Logistik Logistics Training Preparation Workshop	Januari January	Internal, Gresik
		Pelatihan HPE & HPS Training HPE & HPS	Februari February	Internal, Gresik
		Workshop Contractor Safety Management System Contractor Safety Management System Workshop	Juni June	Internal, Sidoarjo
6	Sugito	Pelatihan ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Training of ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety	Mei May	Intertek, Surabaya
		Refreshment dan Capacity Building PJB Transformation Agent Tahun 2019 Batch VII Refreshment and Capacity Building PJB Transformation Agent 2019 Batch VII	Juli July	Kubik, Jakarta
7	Sumantri	Cert Risk Management Assurance Cert Risk Management Assurance	April April	Institute of Internal Auditors, Jakarta
8	Lahmsa Alkautsa Harysa	Workshop Data Mining dalam PJB-IMS 2.0 Mining Data in PJB-IMS 2.0 Workshop	Januari January	Internal, Surabaya
		Refreshment dan Capacity Building PJB Transformation Agent Tahun 2019 Batch VII Refreshment and Capacity Building PJB Transformation Agent 2019 Batch VII	Juli July	Kubik, Jakarta
9	Agus Budi Santoso	Workshop Risk Fraud Assessment Risk Fraud Assessment Workshop	Oktober October	Surabaya
		Pelatihan Persiapan Masa Pensiun Oleh IKPLN Dengan Tema Progra Pelatihan: Budidaya Ayam Sehat Skala Rumah Tangga Retirement Preparation Training by IKADIN with the theme of the Training Program: Healthy Chicken Farming on a Household Scale	Desember December	Surabaya
10	Ricardo	Refresh Manajemen Risiko ISO 31000 Refresh on Risk Management ISO 31000	Juni June	Internal, Surabaya
		Pelatihan dan Sertifikasi Business Continuity Management Certified Professional (BCMP) Business Continuity Management Certified Professional (BCMP) Training and Certification	Desember December	PT Pratama Indomitra Konsultan, Muara Tawar
11	Therry Widya Laksmi	Refresh Manajemen Risiko ISO 31000 ISO 31000 Risk Management Refresh	Juni June	Internal, Surabaya
12	Rina Febyanasari	Refresh Manajemen Risiko ISO 31000 ISO 31000 Risk Management Refresh	Juni June	Internal, Surabaya
		Workshop Risk Fraud Assessment Risk Fraud Assessment Workshop	Oktober October	Surabaya
13	Bahrudin Ishak	Workshop Contractor Safety Management System Contractor Safety Management System Workshop	Juni June	Sidoarjo
		Workshop Risk Fraud Assessment Risk Fraud Assessment Workshop	Oktober October	Surabaya
14	Suherman	Workshop Penyusunan Dokumen Untuk Sertifikasi ISO 22301:2012 BCMS Batch II Workshop on Documents Compilation for ISO 22301: 2012 BCMS Certification Batch II	Juli July	Yogyakarta
		Pelatihan Hukum Lingkungan Environmental Law Training	November November	IGR, Brantas
15	Ahmad Syaiful Zuhri	Refreshment dan Capacity Building PJB Transformation Agent Tahun 2019 Batch VII Refreshment and Capacity Building of PJB Transformation Agent 2019 Batch VII	Juli July	Kubik, Jakarta

No	Name	Pelatihan/Seminar/Workshop Training/Seminar/Workshop	Waktu Date	Penyelenggara & Lokasi Organizer & Location
16	Fitratus Shiddiq Swastika Putra	Workshop Penyusunan Dokumen Untuk Sertifikasi ISO 22301:2012 BCMS Batch I Workshop on Documents Compilation for ISO 22301:2012 BCMS Batch I Certification	Juli July	Yogyakarta
		Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Certification of Goods and Services Procurement of PT PLN	Agustus August	PLN, Jakarta
17	Lisna Mery Teodora	Pelatihan & Workshop Perpajakan (PSAK 71, PSAK 72 & PSAK 73 serta Implikasi PPH-nya) Taxation Training & Workshop (SFAS 71, SFAS 72 & SFAS 73 and its Income Tax Implications)	Desember December	PT Pratama Indomitra Konsultan, Muara Tawar
18	Elvira Saris Virmania	Pelatihan & Workshop Perpajakan (PSAK 71, PSAK 72 & PSAK 73 serta Implikasi PPH-nya) Taxation Training & Workshop (SFAS 71, SFAS 72 & SFAS 73 and its Income Tax Implications)	Desember December	PT Pratama Indomitra Konsultan, Muara Tawar



PROGRAM PENGEMBANGAN SATUAN MANAJEMEN RISIKO
DEVELOPMENT PROGRAM FOR RISK MANAGEMENT UNIT

No	Nama Name	Pelatihan/Seminar/Workshop Training/Seminar/Workshop	Waktu Date	Penyelenggara & Lokasi Organizer & Location
1	Purwono Jati Agung	Uji Kompetensi Calon Assessor Muda Bidang Pembangkit Tenaga Listrik Competency Test for Young Assessor Candidates in Power Plants	Juli July	Surabaya; Gresik
		Workshop Penyusunan Dokumen Untuk Sertifikasi ISO 22301:2012 BCMS Batch II Workshop on Documenting ISO 22301: 2012 BCMS Certification Batch II	Juli July	Yogyakarta
		Pelatihan Malcolm Baldrige PJB 2019 PJB's Malcolm Baldrige Training 2019	Juli July	PJBS
		Program Profesi Insinyur Engineer Professional Program	Desember December	UGM, Yogyakarta
		Sharing Session: Asset Management Sharing Session: Asset Management	Desember December	Yogyakarta
2	Mochammad Agustian	Training Persiapan Sertifikasi Certified Reliability Engineer (CRE) Preparation Training for Certified Reliability Engineer (CRE)	Januari January	Surabaya
		Workshop Penyusunan Dokumen Untuk Sertifikasi ISO 22301:2012 BCMS Batch II Workshop on Documenting ISO 22301: 2012 BCMS Certification Batch II	Juli July	Yogyakarta
		Workshop <i>Change Agent</i> Change Agent Workshop	Juli July	Muara Karang
		Pelatihan <i>Budget Risk Based Management</i> Training of Budget Risk Based Management	Agustus August	Bandung
		Program Profesi Insinyur Engineer Professional Program	Desember December	UGM, Yogyakarta
		Sharing Session: Asset Management Sharing Session: Asset Management	Desember December	Yogyakarta
3	Dyah Maya Safithri	Workshop Pengisian CSA Manual ICOFR PJB Workshop on Filling in the PJB's ICAFR CSA Manual	Juni June	Internal, Surabaya
		Pelatihan GRC GRC Training	Juli July	Jakarta
		Pelatihan Malcolm Baldrige PJB 2019 PJB's Malcolm Baldrige Training 2019	Juli July	PJBS
		Workshop <i>Change Agent</i> Change Agent Workshop	Juli July	Muara Karang
		Forum GRC PLN GRC PLN Forum	Oktober October	Bogor
		Workshop <i>Risk Fraud Assessment</i> Risk Fraud Assessment Workshop	Oktober October	PJB Academy, Kantor Pusat
		Perizinan Ketenagalistrikan Electricity Licensing	November November	PJB Academy, Muara Karang
		Workshop PSAK 71, 72, 73 PSAK 71, 72, 73 Workshop	Desember December	Surabaya
4	Rusminto	Pembelajaran Pra Executive Education III (Pra EE III) Batch 4 Anak Perusahaan Tahun 2018 Learning of Pre-Executive Education III (Pra EE III) Batch 4 of Subsidiary 2018	Januari January	IPC Corpu, Bogor
		Pembelajaran Executive Education III (EE III) Training of Executive Education III (EE III)	Juli July	Jakarta
		International Conference: Risk Beyond 2019 International Conference: Risk Beyond 2019	Desember December	Bali

No	Nama Name	Pelatihan/Seminar/Workshop Training/Seminar/Workshop	Waktu Date	Penyelenggara & Lokasi Organizer & Location
5	Andrie Darma Nugroho	Training Persiapan Sertifikasi Certified Reliability Engineer (CRE) Preparation Training for Certified Reliability Engineer (CRE)	Januari January	Surabaya
		Training Persiapan Sertifikasi <i>Certified Reliability Engineer</i> (CRE) Preparation Training for Certified Reliability Engineer (CRE)	Mei May	Isti Surjandari, Surabaya
		<i>Certified Reliability Engineer</i> Certified Reliability Engineer	Mei May	American Society For Quality, Jakarta
		Workshop Penyusunan Dokumen Untuk Sertifikasi ISO 22301:2012 BCMS Batch I Workshop on Documenting ISO 22301: 2012 BCMS Certification Batch I	Juli July	Yogyakarta
		Pelatihan <i>Budget Risk Based Management</i> Training on Budget Risk Based Management	Agustus August	Bandung
		Entry Certificate in Business Analyst Entry Certificate in Business Analyst	September September	Multimatics, Jakarta
6	Dwi Handoko	Pelatihan <i>Financial Statement Analysis</i> 2019 Training Financial Statement Analysis 2019	Juli July	MM UGM, Surabaya
		Workshop Penyusunan Dokumen Untuk Sertifikasi ISO 22301:2012 BCMS Batch III Workshop on Documenting ISO 22301: 2012 BCMS Certification Batch III	Juli July	Muara Karang
		Pelatihan Asesor Kontrak Kinerja Unit PJB Training of PJB Unit Performance Contract Assessors	September September	Internal, Brantas
7	Supriyatno	Workshop Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Corruption Prevention	Maret March	Surabaya
		Forum Kepatuhan dan Hukum Tahap 2 Tentang Pemenuhan Perizinan Compliance and Legal Forum Regarding Licensing Compliance Stage-2	Mei May	Muara Karang
		<i>Refreshment dan Capacity Building</i> PJB <i>Transformation Agent</i> Tahun 2019 Batch I Refreshment and Capacity Building of PJB Transformation Agent 2019 Batch I	Juli July	Muara Karang
		Refresh Manajemen Risiko ISO 31000:2018 Refresh the Risk Management of ISO 31000:2018	Juli July	Surabaya
		Workshop Risk Fraud Assessment Risk Fraud Assessment Workshop	Oktober October	Surabaya
8	Bimo Hani Basuki	Pembelajaran Pra <i>Executive Education</i> III (Pra EE III) Batch 4 Anak Perusahaan Tahun 2018 Learning of Pre-Executive Education III (Pra EE III) Batch 4 of Subsidiary 2018	Januari January	IPC Corpu, Bogor
		Pembelajaran <i>Executive Education</i> III (EE III) Learning on Executive Education III (EE III)	Juli July	Jakarta



Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan Audit
Audited Financial Statements



Referensi Kriteria ARA
ARA Criteria Reference

No	Nama Name	Pelatihan/Seminar/Workshop Training/Seminar/Workshop	Waktu Date	Penyelenggara & Lokasi Organizer & Location
9	Riana Pratiwiningrum	Workshop <i>Data Mining</i> dalam PJB-IMS 2.0 Data Mining in PJB-IMS 2.0 Workshop	Januari January	Surabaya
		Training Pengelola PJB-IMS 2.0 PJB-IMS 2.0 Management Training	Maret March	Surabaya
		Workshop Penyusunan Dokumen Untuk Sertifikasi ISO 22301:2012 BCMS Batch II Workshop on Documenting ISO 22301: 2012 BCMS Certification Batch II	Juli July	Yogyakarta
		Pelatihan Malcolm Baldrige PJB 2019 Malcolm Baldrige PJB 2019 Training	Juli July	PJBS
		Pelatihan dan Sertifikasi <i>Business Continuity Management Certified Professional</i> (BCMP) Batch 2 Training and Certification of Business Continuity Management Certified Professional (BCMP) Batch 2	Agustus August	Jakarta
		Workshop Lanjutan Pelatihan <i>Asset Management</i> Workshop on Advanced Asset Management Training	September September	Surabaya
		Workshop <i>Risk Fraud Assessment</i> Risk Fraud Assessment Workshop	Oktober October	Surabaya
10	Juwita Hariyani	Workshop <i>Risk Fraud Assessment</i> Risk Fraud Assessment Workshop	Oktober October	Surabaya
		Pelatihan Pengukuran Progress Fisik & Pembayaran Pada Konstruksi Training on Measurement of Physical Progress & Payment in Construction	November November	Muara Karang
11	Hariyati	Workshop <i>Change Agent</i> Change Agent Workshop	Juli July	Muara Karang
		Perizinan Ketenagalistrikan Electricity Licensing	November November	Muara Tawar
12	Abie Rezanto	Workshop <i>Process Safety Management</i> Pembakuan Kerangka Acuan kerja (KAK) Program Kerja Material, Jasa, dan Sistem Proteksi Kebakaran Process Safety Management Workshop: Standardization of Terms of Reference (KAK) Work Program for Materials, Services and Fire Protection Systems	Maret March	Internal, Brantas
		Training Pengelola PJB-IMS 2.0 PJB-IMS 2.0 Management Training	Maret March	Surabaya
		Sosialisasi Dokumen Manajemen Risiko Dissemination of Risk Management Documents	Maret March	Gresik
		<i>Refresh</i> Manajemen Risiko ISO 31000 Refresh of Risk Management of ISO 31000	Juni June	Gresik
		<i>Refreshment</i> dan <i>Capacity Building</i> PJB <i>Transformation Agent</i> Tahun 2019 Batch VII Refreshment and Capacity Building of PJB Transformation Agent 2019 Batch VII	Juli July	Muara Karang, Jakarta
		Workshop Penyusunan Dokumen Untuk Sertifikasi ISO 22301:2012 BCMS Batch II Workshop on Documenting ISO 22301: 2012 BCMS Certification Batch II	Juli July	PLN UIP JBT II, Yogyakarta
		Pelatihan dan Sertifikasi <i>Business Continuity Management Certified Professional</i> (BCMP) Batch 2 Training and Certification of Business Continuity Management Certified Professional (BCMP) Batch 2	Agustus August	Muara Karang, Jakarta
		Pelatihan <i>Financial Modeling</i> Training of Financial Modeling	September September	PJB Academy, Surabaya
		Pelatihan <i>Dispute Management</i> Training Dispute Management	November November	Muara Karang, Jakarta
		International Conference: Risk Beyond 2019 International Conference: Risk Beyond 2019	Desember December	Bali

No	Nama Name	Pelatihan/Seminar/Workshop Training/Seminar/Workshop	Waktu Date	Penyelenggara & Lokasi Organizer & Location
13	Kharisma Ningrum	Workshop <i>Data Mining</i> dalam PJB-IMS 2.0 Data Mining in PJB-IMS 2.0 Workshop	Januari January	Surabaya
		Training Basic Financial Accounting Basic Financial Accounting Training	Februari - Juni February - June	Surabaya
		Sosialisasi Dokumen Manajemen Risiko Dissemination of Risk Management Documents	Maret March	Gresik
		Workshop Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Corruption Prevention Workshop	Maret March	Surabaya
		Workshop Pengisian CSA Manual ICOFR PJB Filling in the ICAFR PJB Manual CSA Workshop	Juni June	Internal, Surabaya
		<i>Refresh</i> Manajemen Risiko ISO 31000 Refresh of Risk Management of ISO 31000	Juni June	Gresik
		Pelatihan GRC GRC Training	Juni June	Jakarta
		<i>Refreshment</i> ISO 31000 Refreshment ISO 31000	Juni June	Gresik
		<i>Refreshment</i> dan <i>Capacity Building</i> PJB <i>Transformation Agent</i> Tahun 2019 Batch II Refreshment and Capacity Building of PJB <i>Transformation Agent</i> 2019 Batch II	Juli July	Jakarta
		Pelatihan dan Sertifikasi <i>Business Continuity Management Certified Professional</i> (BCMP) Batch 2 Training and Certification of Business Continuity Management Certified Professional (BCMP) Batch 2	Agustus August	Yogyakarta
		Workshop Risk Fraud Assessment Workshop on Risk Fraud Assessment	Oktober October	Surabaya
		Forum GRC PLN GRC PLN Forum	Oktober October	Bogor
14	Helmi Hamzah	Workshop Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Workshop on Corruption Prevention	Maret March	Surabaya
		Workshop Pengisian CSA Manual ICOFR PJB Filling in the ICAFR PJB Manual CSA Workshop	Juni June	Internal, Surabaya
		Pelatihan FIDIC Silver Book FIDIC Silver Book Training	Agustus August	Muara Karang
		Pelatihan Asesor Kontrak Kinerja Unit PJB Training of PJB Unit Performance Contract Assessors	September September	Internal, Brantas
		Workshop <i>Risk Fraud Assessment</i> Workshop on Risk Fraud Assessment	Oktober October	Surabaya
15	Sylvia Mega Astuti	Perizinan Ketenagalistrikan Electricity Licensing	November November	Muara Tawar
		FGD Asesor Konkin Konkin Assessor FGD	Desember Desember	UP Paiton Paiton GU
16	Leni Khairani	Persiapan & Workshop Tindak Lanjut PGD Forum Manajemen Risiko PT PJB tahun 2019 Preparation & Workshop on the follow up of PGD Risk Management Forum of PT PJB in 2019	November November	Semarang
		<i>In House Training</i> antara PT PJB dengan PT BRI In House Training between PT PJB with PT BRI	November November	Jakarta
		Workshop Forum Manajemen Risiko Anak Perusahaan PLN Group PLN Group Subsidiary Risk Management Forum Workshop	November November	Bogor
		International Conference: Risk Beyond 2019 International Conference: Risk Beyond 2019	Desember Desember	Bali
		FGD Asesor Konkin Unit PJB 2019 FGD Assessor Konkin Unit PJB 2019	Desember Desember	UP Paiton Paiton GU

PROFIL DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM

HUMAN CAPITAL PROFILE AND COMPETENCY DEVELOPMENT



Strategi *Corporate Learning* Dalam Mendukung Penyiapan SDM Untuk Proyek Kelistrikan Nasional telah menobatkan PJB dengan *rating AA* dalam ajang *Human Resources Excellence Award 2019*. Selain itu, PJB juga dinobatkan sebagai *Best Companies to Work for in Asia* dalam ajang *Human Resources Asia Awards 2019* yang dinilai berdasarkan *engagement survey* model kepada karyawan meliputi kenyamanan tempat kerja, program Perusahaan maupun keseimbangan pekerjaan dengan kehidupan pribadi karyawan.

The Corporate Learning Strategy in Supporting the Preparation of Human Capital for the National Electricity Project has led PJB to obtain the 'AA' rating in the 2019 Human Resources Excellence Award. Also, PJB was nominated as "Best Companies to for Work in Asia" during Human Resources Asia Awards 2019 based on engagement survey models for employees including workplace comfort, Company programs, and work-life balance.

Sampai dengan akhir tahun 2019, jumlah karyawan PJB tercatat sebanyak 3.186 orang mengalami peningkatan 3,24% dibandingkan tahun 2018 sebanyak 3.085 orang, yang didominasi dengan jumlah karyawan laki – laki sebanyak 2.770 orang (87,42%) dan karyawan perempuan sebanyak 415 orang (13%).

Berdasarkan usia, jumlah karyawan aktif PJB rata-rata berusia 26-30 tahun dengan jumlah sebanyak 1.106 orang (35%) dengan tingkat pendidikan didominasi oleh tingkat Sarjana (55,6%). Guna menunjang kegiatan operasionalnya, PJB mengalokasikan SDM berdasarkan kebutuhan Divisi, Unit Bisnis yang dimilikinya maupun Anak Perusahaan. Selama tahun 2019, jumlah karyawan terbesar di Kantor Pusat sebanyak 559 karyawan, Unit Pembangkitan Gresik sebanyak 332 orang, dan UBJOM Jawa sebanyak 173 orang.

Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

Number of Employees By Gender

Tabel jumlah karyawan PJB berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

By the end of 2019, the number of PJB's employees was recorded at 3,186 persons, increasing by 3.24% compared to 2018 by 3,085 persons, dominated by male employees of 2,770 persons (87.42%) and female employees of 415 persons (13%).

Based on age, the number of PJB's active employees is in the range of 26-30 years with a total of 1,106 persons (35%) with an education level dominated by Bachelor graduate (55.6%). To support its operational activities, PJB allocates HR based on the needs of its Divisions, Business Units, and Subsidiaries. In 2019, the largest number of employees at the Head Office was 559 employees, Gresik Generation Unit was 332 employees, and OMSBU in Java was 173 employees.

Table of PJB's employees by gender:

dalam satuan orang in the number of people

Jenis Kelamin Gender	2018	2019	Perubahan 2019 Terhadap 2018 Changes
Laki-laki Male	2.697	2.770	73
Perempuan Female	388	416	28
Jumlah Total	3.085	3.186	101

Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Number of Employees By Position Level

Tabel jumlah karyawan PJB berdasarkan Jenjang Jabatan adalah sebagai berikut:

Table of PJB's employees by Position Level:

dalam satuan orang in the number of people

Jenjang Jabatan Position Level	2018	2019	Perubahan 2019 Terhadap 2018 Changes
F1	7	20	13
F2	24	24	0
F3	64	79	15
F4	514	506	-8
F5	1123	1.309	186
F6	675	549	-126
Manajemen Atas Top Management	2	2	0
Manajemen Menengah Middle-level Management	55	55	-87
Manajemen Dasar Basic-level Management	142	153	98
Supervisor Senior Senior Supervisor	401	405	0
Supervisor Dasar Basic Supervisor	78	84	327
Jumlah Total	3.085	3.186	101

Jumlah Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Number of Employees By Educational Level

Tabel jumlah karyawan PJB berdasarkan Tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut:

Table of PJB's employees by Educational Level:

dalam satuan orang in the number of people

Tingkat Pendidikan Educational Level	2018	2019	Perubahan 2019 Terhadap 2018 Changes
Sarjana S3 Doctorate Degree	1	1	0
Sarjana S2 Master Degree	141	199	58
Sarjana S1 Bachelor Degree	1.705	1.774	69
Sarjana Muda Freshgraduate	590	590	0
D1 Associate Degree	35	31	-4
SMA High-school Degree	608	586	-22
SLTP Middle-school Degree	5	5	0
Jumlah Total	3.085	3.186	101

Jumlah Karyawan Berdasarkan Usia

Number of Employees Based on Age

Tabel jumlah karyawan PJB berdasarkan Usia adalah sebagai berikut:

Table of PJB's employees by Age:

dalam satuan orang in the number of people

Usia Age	2018	2019	Perubahan 2019 Terhadap 2018 Changes
<26 Th years old	388	340	-48
26 - 30 Th years old	1.028	1.106	78
31 - 35 Th years old	444	471	27
36 - 40 Th years old	300	388	88
41 - 45 Th years old	206	132	-74
46 - 50 Th years old	451	488	37
51 - 56 Th years old	268	261	-7
Jumlah Total	3.085	3.186	101

Jumlah Karyawan Berdasarkan Status Karyawan

Number of Employees By Employment Status

Tabel jumlah karyawan PJB berdasarkan status karyawan adalah sebagai berikut:

Table of PJB's employees by Employment Status:

dalam satuan orang in the number of people

Status Karyawan Employment Status	2018	2019	Perubahan 2019 Terhadap 2018 Difference
Karyawan Tetap Permanent Employee	3.085	3.186	101
Siswa OJT OJT Student	29	28	-1
Jumlah Total	3.114	3.214	100

Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan Masing-masing Unit Kerja

Number of Employees by Position Level of Each Unit

Tabel jumlah karyawan PJB berdasarkan jenjang jabatan di masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut:

Table of PJB's employees by Position Level of Each Unit:

dalam satuan orang in the number of people

Jenjang Jabatan Masing-masing Unit Kerja Position Level of Each Unit	2018	2019	Perubahan 2019 Terhadap 2018 Changes
A. Struktural Structural			
Kantor Pusat Head office	108	115	7
Unit Pembangkitan Generation unit	237	232	-5
UPHT Maintenance Service Unit of East Area	20	18	-2
UPHB Maintenance Service Unit of West Area	19	18	-1
Unit CNG CNG Unit	0	0	0
BPWC Cirata Reservoir Management Unit	12	11	-1
UBJOM Jawa OMSBU in Java	170	173	3
UBJOM Luar Jawa OMSBU outside Java	104	111	7
Unit Pengembangan Bisnis Business Development Unit	9	11	2
PJB Academy	11	12	1
Anak Perusahaan Subsidiary	0	0	0
Jumlah A Total A	690	701	11
B. Fungsional Functional			
Kantor Pusat Head Office	384	444	60
Unit Pembangkitan Generation Unit	1345	1.302	-43
UPHT Maintenance Service Unit of East Area	196	243	47
UPHB Maintenance Service Unit of West Area	162	185	23
Unit CNG CNG Unit	0	0	0
BPWC Cirata Reservoir Management Unit	35	33	-2
UBJOM Jawa OMSBU in Java	0	0	0
UBJOM Luar Jawa OMSBU outside Java	33	37	4
Unit Pengembangan Bisnis Business Development Unit	22	25	3
PJB Academy	36	36	0
Anak Perusahaan Subsidiary	182	180	-2
Jumlah B Total B	2.395	2.485	90
Total (A+B) Total (A+B)	3.085	3.186	101



Pengembangan Kompetensi Karyawan Employee Competency Development

PJB menyadari sepenuhnya bahwa sumber daya manusia merupakan aset penting dalam peningkatan kinerja Perusahaan sehingga harus dikelola dan dikembangkan terus-menerus. Dengan pendekatan Human Capital, PJB senantiasa meningkatkan kapasitas dan kapabilitas setiap karyawan dalam mendukung kinerja organisasi secara berkelanjutan.

PJB believes that human resources are an important asset to improve the Company's performance; therefore, it must be managed and developed continuously. With the Human Capital approach, PJB continues to increase the capacity and capability of every employee to support sustainable organizational performance.

Kebijakan Policy

Kesetaraan dan Kesempatan yang Sama Dalam Pendidikan dan Pelatihan

PJB memberikan kesempatan yang sama bagi pengembangan kompetensi seluruh karyawan tanpa memandang gender, suku, agama dan ras (SARA) maupun level jabatan. Untuk itulah, PJB berkomitmen meningkatkan kapasitas dan kapabilitas setiap karyawan pada seluruh jenjang organisasi dalam mendukung kinerja Perusahaan saat ini dan di masa depan.

Penyelenggaraan pendidikan dilakukan dengan memperhatikan kualitas berdasarkan efisiensi dan efektivitas. Peningkatan keahlian teknis, operasional, manajemen, soft skills dan kepemimpinan menjadi tujuan. Kualitas SDM yang unggul dan berintegritas menjadi kunci dalam bersaing dalam era revolusi industri 4.0

Pengembangan karir maupun evaluasi kinerja karyawan juga dilakukan secara fair dan transparan berdasarkan Pedoman yang ditetapkan, diantaranya melalui performance dan assessment karyawan. Untuk informasi lebih lengkap terkait pengelolaan Sumber Daya Manusia dapat dilihat dalam Bab Fungsi Pendukung Bisnis bagian Sumber Daya Manusia dalam Laporan Tahunan ini.

Fair and Equal Opportunities in Education and Training

PJB provides equal opportunities to participate in the competency development for all employees regardless of gender, ethnicity, religion, and race (SARA) or position level. Therefore, PJB is committed to the increased capacity and capability of every employee at all organizational levels to support the Company's current and future performance.

Education is provided based on efficiency and effectiveness quality. To increase the technical, operational, management, soft skills and leadership skills is the objective. Superior quality and integrity of human resources are key in competing in the industry 4.0

Career development and employee performance assessment are also conducted fairly and transparently based on established guidelines, including employee performance and assessment. For more specific information concerning the management of Human Capital, it can be found in the Business Support Functions Chapter in the Human Resources section of this Annual Report.

Anggaran Pengembangan Kompetensi Competency Development Budget

Pada tahun 2019, realisasi anggaran untuk pengembangan kompetensi karyawan sebesar Rp97,66 miliar, mengalami kenaikan sebesar 6,95% jika dibandingkan dengan tahun 2018. Hal ini disebabkan kenaikan nilai SPPD berdasarkan Surat Keputusan No.039.P/019/DIR/2019 tentang Perjalanan Dinas Karyawan.

In 2019, the realization of the budget for employee competency development was recorded at Rp97.66 billion, an increase of 6.95% when compared to 2018. This was due to an increase in SPPD value based on Decree No.039.P/019/DIR/2019 concerning Employee's Business Trip.

	Tahun (Rp Juta) Year (Rp Million)		Perubahan 2019 Terhadap 2018 Changes
	2018	2019	
Realisasi Anggaran Pendidikan & Pelatihan Education & Training Budget Realization	91,315	97,66	106,95%

Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Level Jabatan Competency Development By Position Level

Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan untuk memastikan karyawan mampu melakukan pekerjaannya atau memiliki kapabilitas sesuai kebutuhan kompetensi jabatan yang diembannya sehingga tercipta lingkungan kerja yang kondusif. Jenis pengembangan kompetensi karyawan yang diselenggarakan oleh PJB Academy terdiri dari pengembangan kompetensi mulai dari jenjang Pelaksana, Supervisor, Manajemen Dasar sampai dengan Manajemen Atas.

Education and training are held to ensure that employees can perform their jobs or have capabilities in accordance with their position's required competency to create a conducive work environment. The type of employee competency development organized by PJB Academy consists of competency development starting from the level of Officer, Supervisor, Basic-level Management to the Top Management.

Rencana dan Realisasi Pengembangan Karyawan 2019

Sampai dengan akhir tahun 2019 sebagian besar program yang direncanakan telah terealisasi. Berikut adalah gambaran pencapaian rencana program training, seminar & workshop, serta sertifikasi yang telah dilakukan adalah:

Employee Development Plan and Realization 2019

By the end of 2019, most of the planned programs had been realized. The following is an illustration of the achievement of planned training programs, seminars & workshops, and certifications that have been carried out:

No.	Jenis Pembelajaran Learning Category		Rencana 2019 2019 Plan		Realisasi 2019 2019 Realization	
			Jumlah Batch Total Batches	Jumlah Peserta Total Participants	Jumlah Batch Total Batches	Jumlah Peserta Total Participants
1	Pelatihan Training	Teknik Engineering	232	3.957	200	3.118
		Non-Teknik Non-Engineering	141	2.880	92	1.876
2	Sertifikasi Certification	Teknik Engineering	58	2.492	85	1.554
		Non-Teknik Non-Engineering	44	467	21	239
3	Workshop Workshop	Teknik Engineering	0	0	52	1.156
		Non-Teknik Non-Engineering	0	0	79	1.810
4	Program Pendukung Supporting Program	Teknik Engineering	0	0	17	277
		Non-Teknik Non-Engineering	0	0	20	557
5	Program Purna Retirement Program		4	100	5	81
6	Soft Leadership Soft Leadership		17	347	22	472
7	Stakeholders (PJB Class) Stakeholders (PJB Class)		8	0	0	0
8	PGD (Peer Group Discussion) PGD (Peer Group Discussion)		0	0	26	884
Jumlah Total			504	10.693	619	12.024

Pada tahun 2019, PJB telah melaksanakan program pembelajaran kepada 12.040 karyawan dengan jumlah batch mencapai 619 batch.

In 2019, PJB has established learning programs for 12,040 employees with 619 batches



Tabel Jenis, Tujuan dan Peserta Pelatihan Teknik Tahun 2018-2019
Table of Category, Objectives and Technical Training Participants 2018-2019

No.	Level Jabatan Position	2018				2019			
		Jenis Pelatihan Training Category	Tujuan Pelatihan Training Objectives	Jumlah Peserta Total Participants	Persentase (%) Percentage (%)	Jenis Pelatihan Training Category	Tujuan Pelatihan Training Objectives	Jumlah Peserta Total Participants	Persentase (%) Percentage (%)
1.	Manajemen Atas Top Management	Teknik Engineering	Pemenuhan gap kompetensi dan pengembangan kompetensi karyawan dalam menjalankan program-program strategis korporat maupun program Unit atau Bidang	0	0,00	Teknik Engineering	Pemenuhan gap kompetensi dan pengembangan kompetensi karyawan dalam menjalankan program-program strategis korporat maupun program Unit atau Bidang	8	0,12
2.	Manajemen Menengah Middle-level Management			2	0,06			68	1,03
3.	Manajemen Dasar Basic-level Management			30	0,93			177	2,68
4.	Supervisor Supervisor			133	7,18			877	13,27
5.	Fungsional 1 Functional 1			0	0,00			1	0,02
6.	Fungsional 2 Functional 2			0	0,00			4	0,06
7.	Fungsional 3 Functional 3			5	0,15			54	0,82
8.	Fungsional 4 Functional 4			136	4,19			387	5,85
9.	Fungsional 5 Functional 5			1.021	31,48			2.197	33,23
10.	Fungsional 6 Functional 6			1.816	56,00			2.838	42,93
Total Total				3.243	100			6.611	100

Tabel Jenis, Tujuan dan Peserta Pelatihan Non-Teknik Tahun 2018-2019
Table of Types, Objectives and Non-Technical Training Participants 2018-2019

No.	Level Jabatan Position	2018				2019			
		Jenis Pelatihan Training Category	Tujuan Pelatihan Training Objectives	Jumlah Peserta Total Participants	Persentase (%) Percentage (%)	Jenis Pelatihan Training Category	Tujuan Pelatihan Training Objectives	Jumlah Peserta Total Participants	Persentase (%) Percentage (%)
1.	Manajemen Atas Top Management	Non- Teknik Non-Engineering	Pemenuhan gap kompetensi dan pengembangan kompetensi karyawan dalam menjalankan program-program strategis korporat maupun program Unit atau Bidang Fulfilling competency gaps and developing employee competencies in conducting corporate strategic programs and Unit or Field programs	0	0,00	Non- Teknik Non-Engineering	Pemenuhan gap kompetensi dan pengembangan kompetensi karyawan dalam menjalankan program-program strategis korporat maupun program Unit atau Bidang Fulfilling competency gaps and developing employee competencies in conducting corporate strategic programs and Unit or Field programs	25	0,51
2.	Manajemen Menengah Middle-level Management			30	1,86			198	4,08
3.	Manajemen Dasar Basic-level Management			88	5,47			405	8,34
4.	Supervisor Supervisor			146	9,07			1121	23,08
5.	Fungsional 1 Functional 1			0	0,00			3	0,06



No.	Level Jabatan Position	2018				2019			
		Jenis Pelatihan Training Category	Tujuan Pelatihan Training Objectives	Jumlah Peserta Total Participants	Persentase (%) Percentage (%)	Jenis Pelatihan Training Category	Tujuan Pelatihan Training Objectives	Jumlah Peserta Total Participants	Persentase (%) Percentage (%)
6.	Fungsional 2 Functional 2	Non- Teknik Non-Engineering	Pemenuhan gap kompetensi dan pengembangan kompetensi karyawan dalam menjalankan program-program strategis korporat maupun program Unit atau Bidang	2	0,12	Non- Teknik Non-Engineering	Pemenuhan gap kompetensi dan pengembangan kompetensi karyawan dalam menjalankan program-program strategis korporat maupun program Unit atau Bidang	22	0.45
7.	Fungsional 3 Functional 3		Fulfilling competency gaps and developing employee competencies in conducting corporate strategic programs and Unit or Field programs	63	3,91		Fulfilling competency gaps and developing employee competencies in conducting corporate strategic programs and Unit or Field programs	72	1.48
8.	Fungsional 4 Functional 4			132	8,20			372	7.66
9.	Fungsional 5 Functional 5			556	34,53			1961	40.38
10.	Fungsional 6 Functional 6			593	36,83			677	13.94
Total				1.610	100			4.856	100

PJB Academy

PJB Academy dibentuk sebagai upaya dalam meningkatkan kompetensi karyawan di lingkungan PJB Raya, saat ini terus memperkuat kelembagaannya dengan diperolehnya sertifikat internasional dari Pearson UK sejak tahun 2017 dan berlaku hingga tahun 2020.

PJB Academy was established as a contribution to improve employee competence of PJB Raya, currently continuing to strengthen its institutions by obtaining international certificates from Pearson UK since 2017 that valid until 2020.



Sertifikasi Pearson UK merupakan bentuk pengakuan bahwa PJB Academy dapat memastikan *Learning & Knowledge Management* dibangun dalam arah dan proses yang benar, serta meyakinkan pemangku kepentingan bahwa kehadiran *Learning & Knowledge Management* dalam PJB Academy menjadi kebutuhan dalam dinamika transformasi di PJB. Pembelajaran di PJB Academy meliputi pembelajaran kepemimpinan, pembelajaran profesional dan sertifikasi (*Operation & Maintenance*, Manajemen Aset Pembangkitan dan Bisnis Pembangkitan Terintegrasi), dan pembelajaran *corporate strategic*.

Pearson UK certification is a form of recognition that PJB Academy can ensure *Learning & Knowledge Management* is built in the right direction and process, as well as assuring stakeholders that the presence of *Learning & Knowledge Management* in PJB Academy is a necessity in the dynamic of transformation at PJB. Learning at PJB Academy includes leadership learning, professional learning and certification (*Operation & Maintenance*, Generating Asset Management, and Integrated Business Awakening), and strategic corporate learning.

Adapun program PJB Academy untuk meningkatkan kualitas SDM dan kinerja Perusahaan antara lain:

1. *Performance Based Learning* (PBL), yakni pembelajaran dilakukan berdasarkan permasalahan yang terjadi yang mengakibatkan kinerja unit tidak tercapai akibat dari karyawan atau SDM.
2. *Competence Based Learning* (CBL), adalah pembelajaran yang dilakukan untuk menutup gap kompetensi berdasarkan assessment job competency oleh atasan dan kebutuhan pengembangan terhadap kebutuhan perusahaan yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang.

Sepanjang tahun 2019, PJB Academy telah memberikan pembelajaran terhadap 12.150 karyawan atau 113,63% dari target 10.693 karyawan berdasarkan jenis pembelajaran sebagai berikut:

Also, the PJB Academy program to improve the quality of HR and the Company's performance includes:

1. Performance-Based Learning (PBL), which is learning based on problems that occur that result in unit performance not being achieved due to employees or HR.
2. Competence-Based Learning (CBL), is learning conducted to close competency gaps based on the assessment of job competency by superiors and the development needs of short-term and long-term corporate needs.

Throughout 2019, PJB Academy has accommodated learning for 12,150 employees or 113.63% of the target of 10,693 employees based on the following types of learning:

No.	Jenis Pembelajaran Learning Category		Jumlah Peserta Total Participants	
			Target	Realisasi
1.	Pelatihan Training	Teknik Engineering	3.957	3.118
		Non-Teknik Non-Engineering	2.880	1.876
2.	Sertifikasi Certification	Teknik Engineering	2.492	1.680
		Non-Teknik Non-Engineering	467	239
3.	Workshop Workshop	Teknik Engineering	0	1.090
		Non-Teknik Non-Engineering	0	1.810
4.	Program Pendukung Supporting Program	Teknik Engineering	0	343
		Non-Teknik Non-Engineering	0	557
5.	Program Purna Retirement Program		100	81
6.	Soft Leadership Soft Leadership		347	472
7.	PGD Peer Group Discussion		0	884

Untuk memperkuat kelembagaan PJB Academy, sedikitnya terdapat 8 karyawan telah mendapatkan sertifikat *Corporate Learning Technologist* (CLT) sebagai pengakuan dan kemampuan mereka dalam mengelola *learning process* dan *content* berstandar internasional.

To strengthen PJB Academy's institutions, 8 employees have received Corporate Learning Technologist (CLT) certificates as their recognition and ability to manage international-standard learning processes and content.



Selain itu, PJB Academy memiliki program pembelajaran rutin yang merupakan hasil dari Learning Need Analysis yang dilakukan setiap tahun dalam bentuk Kalender Akademik, dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi karyawan sesuai gap kompetensi masing-masing karyawan, temuan audit, regulasi baru atau pun menunjang tujuan Perusahaan.

Diklat Penjenjangan

Training for promotion

Diklat Penjenjangan merupakan diklat yang bersifat mandatory untuk diikuti oleh seluruh karyawan sebagai persyaratan kenaikan level atau penyetaraan level kompetensi dengan tanggung jawab pekerjaan. Hal tersebut berlaku bagi seluruh Anak Perusahaan yang telah meratifikasi sistem pembinaan karir dan kompetensi PT PLN (Persero) terdiri dari 2 jenis, yaitu:

1. *Executive Education* (EE), merupakan diklat bagi karyawan yang akan menduduki jabatan struktural dengan persyaratan kebutuhan kompetensi jabatan di atas level kompetensinya, terdiri dari level EE 4 sampai dengan level EE 1.
2. *Strategic Specialist Education* (SSE), merupakan diklat bagi karyawan yang berada pada grade tertinggi pada suatu level kompetensi dan akan pindah level kompetensi di atasnya, atau ditujukan bagi karyawan yang akan menduduki jabatan fungsional dengan persyaratan kebutuhan kompetensi jabatan di atas level kompetensinya, terdiri dari level SSE IV sampai dengan level SSE I.

Selama tahun 2019 terdapat serangkaian program *Executive Education* (EE) sebagai upaya peningkatan kompetensi karyawan dalam hal kepemimpinan maupun bidang khusus tertentu, antara lain terkait dengan:

- a. Adanya program *Individual Development Plan* (IDP);
- b. Durasi Pelaksanaan *Executive Education* (EE) yang semakin singkat;
- c. Perubahan Konsep *Leadership Management Training* (LMT); dan
- d. PJB Academy diberi wewenang sebagai tempat penyelenggaraan Diklat EE III.

Pendidikan Formal

Formal education

Salah satu program pengembangan pendidikan formal kepada karyawan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kader sesuai dengan tuntutan perkembangan bisnis perusahaan. Adapun program belajar pendidikan formal tahun 2019 yang dilakukan sebagai berikut:

Additionally, PJB Academy has a routine learning program which is the result of the Learning Need Analysis which is carried out annually in the form of an Academic Calendar, with the aim of increasing employee competencies according to each employee's competency gap, audit findings, new regulations or supporting the Company's goals.

Training for promotion is mandatory training to be followed by all employees as a requirement to increase levels or equalize competency levels with job responsibilities. This applies to all subsidiaries that have ratified the career development and competency system of PT PLN (Persero) consisting of 2 types, namely:

1. *Executive Education* (EE), is a training program for employees who will occupy structural positions with requirements for occupational competency requirements above their competency level, consisting of EE level 4 to level EE 1.
2. *Strategic Specialist Education* (SSE), is training for employees who are at the highest grade at a competency level and will move competency levels above or are intended for employees who will occupy functional positions with requirements for occupational competency requirements above their competency level, consisting from level SSE IV to level SSE I.

In 2019, *Executive Education* (EE) programs were held as an effort to improve employee competency in leadership and certain specific fields, including related to:

- a. *Individual Development Plan* (IDP) program;
- b. The shorter duration of *Executive Education* (EE) implementation;
- c. Change in the Concept of *Leadership Management Training* (LMT); and
- d. PJB Academy is authorized as the venue for EE III Education and Training.

One of the formal education development programs for employees aims to improve the competency of cadres following the demands of the company's business development. The formal education learning program in 2019 is carried out as follows:



No.	Lembaga Pendidikan Educational Institutions	Jurusan Majors	Karyawan sebagai Peserta Employees as Participants
1.	PPM Manajemen Management PPM	S2 Magister Manajemen kekhasan pengembangan bisnis ketenagalistrikan Master Degree in Management in the field of electricity business development distinctiveness	26 orang (23 karyawan organik PJB dan tiga karyawan anak perusahaan) 26 persons (23 PJB organic employees and three subsidiary employees)
2.	Institut Teknologi Surabaya Surabaya Institute of Technology	Magister (S2) Teknik Mesin Bidang Keahlian Manajemen Energi ITS Master of Mechanical Engineering ITS Energy Management Expertise	29 Orang sebagai peserta (16 orang PJB, 13 orang IP) 29 persons as participants (16 PJBs, 13 IPs)



Wisuda sarjana & Pasca sarjana Sekolah Tinggi Manajemen PPM
Undergraduate & Postgraduate Graduation College of Management PPM



Pembukaan Program S2 Manajemen Energi kerjasama ITS - PLN Group
Opening of Energy Management S2 Program in collaboration with ITS - PLN Group

Program ini dibuka bagi seluruh karyawan termasuk Anak Perusahaan yang memenuhi persyaratan administrasi sesuai keputusan Direksi PLN di Luar Rapat (Sirkuler) tentang Pendidikan Formal Penghargaan Tingkat S2 dan S3 Serta Program *Internship* dan *Short Course*.

Setelah melalui persetujuan pada Rapat Direksi PJB, penawaran atas program Pendidikan Formal Penghargaan Direksi PLN Tingkat Magister dibuka bagi seluruh karyawan PJB. Selain pemenuhan persyaratan administrasi peserta yang mengajukan pendaftaran sebagai calon peserta harus mendapatkan surat rekomendasi dari atasan setara GM Unit/Kepala Bidang/Kepala Divisi. Seluruh peserta mengikuti program selama 2 tahun dan selanjutnya wajib melaksanakan program ikatan dinas sesuai dengan Peraturan Perusahaan.

This program is open to all employees, including Subsidiaries who meet administrative requirements in accordance with the decision of the Directors of PLN Outside the Meeting (Circular) regarding Formal Education Award for Masters and Doctoral Degrees as well as the Internship and Short Course Programs.

After passing approval at the PJB Board of Directors Meeting, offers for the Formal Education Program for the PLN Board of Directors' Degree are open to all PJB employees. In addition to fulfilling administrative requirements, participants who submit registration as prospective participants must obtain a letter of recommendation from GM's superior unit / Division Head / Division Head. All participants follow the program for 2 years and are subsequently required to carry out official bond programs in accordance with Company Regulations.

PJB memberikan apresiasi kepada karyawan yang sedang menempuh pendidikan formal dalam bentuk skema penggantian biaya pendidikan yang telah dikeluarkan oleh karyawan secara pribadi mengacu pada Perdir No.007/019/DIR/2019 tentang Program Pendidikan Formal dan Sertifikasi Profesi. Tahapan proses restitusi biaya pendidikan adalah sebagai berikut:



Untuk tahun 2019 terdapat 13 karyawan yang mengajukan restitusi biaya pendidikan dan 10 karyawan sudah ditetapkan mendapatkan hal tersebut.

PJB gives appreciation to employees who are pursuing formal education in the form of a tuition reimbursement scheme that has been incurred by employees personally referring to Perdir No.007 / 019 / DIR / 2019 regarding Formal Education Programs and Professional Certification. The stages of the education fee restitution process are as follows:

For 2019 there were 13 employees who applied for tuition fees and 10 employees were determined to get it.

Internship dan Scholarship

Internship and Scholarship

Program Internship atau Magang di PJB ada 2 macam, pertama sebagai *reward* bagi peserta *scholarship* agar dapat mengembangkan diri sesuai tujuan PJB dalam membentuk SDM unggul dan yang kedua, diinisiasi oleh PJB sesuai dengan kebutuhan Perusahaan. Selama tahun 2019 telah dilakukan program internship sebagai berikut:

1. Program Magang ke Taishan, Cina

Diperuntukkan bagi peserta manajemen bisnis ketenagalistrikan PPM dengan Indeks Prestasi terbaik dalam rangka meningkatkan kompetensi manajerial dan *mindset* bisnis PJB *Future Leader*.

2. Program Magang Proyek PLTU Jawa 7

Program ini bertujuan untuk menyiapkan SDM yang kompeten di bidang pengelolaan proyek pembangkit, dengan berbagai metode mencakup *meeting*, *in class*, *coaching*, *shadowing* dan pelaporan secara berkala.

3. Program Magang Bidang Konstruksi PLN Group

Bertujuan meningkatkan budaya kerja, sistem manajemen, prosedur kerja dan kompetensi keahlian dalam manajemen proyek dan manajemen konstruksi terkait dengan pengurusan izin, pengelolaan administrasi kontrak dan sebagainya.

There are 2 types of Internship or Internship program in PJB, firstly as a reward for scholarship participants to be able to develop themselves according to the goals of PJB in creating superior human resources and secondly, initiated by PJB following Company needs. During 2019 the following internship programs were carried out:

1. Internship Program to Taishan, China

Intended for PPM electricity business management participants with the best Performance Index to improve managerial competence and business mindset of PJB *Future Leader*

2. Java Power Plant Project Internship Program 7

This program aims to prepare competent human resources in the field of power plant project management, with various methods including meeting, in-class, coaching, shadowing, and periodic reporting.

3. PLN Group Internship Program

Aims to improve work culture, management systems, work procedures, and competency expertise in project management and construction management related to permitting management, contract administration management, and so on.

Benchmarking

Benchmarking

Program benchmarking merupakan upaya PJB dalam menduplikasi dan menerapkan keunggulan perusahaan yang menjadi *benchmark* agar dapat diimplementasikan, telah dilakukan baik di dalam maupun ke luar negeri, selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Benchmarking program is an effort of PJB in duplicating and implementing company excellence as a benchmark so that it can be implemented, both domestically and internationally, during 2019 is as follows:



Benchmarking ke Telkom
Benchmarking to Telkom



Benchmarking ke Angkasa Pura II
Benchmarking to Angkasa Pura II



Benchmarking ke Chromalloy & Glow, Thailand
Benchmarking to Chromalloy & Glow, Thailand



Benchmarking ke TEPCO, Jepang
Benchmarking to TEPCO, Jepang



Benchmarking ke SHRDC & Learning Minds, Selangor
Benchmarking to SHRDC & Learning Minds, Selangor

1. PT Telkom Indonesia Tbk terkait *sharing* mengenai pengelolaan *digital mindset* dan kendala yang dihadapi dalam mengelola isu tersebut.
2. PT Angkasa Pura II terkait *sharing* mengenai cara mengelola generasi milenial dilihat dari sudut pandang budaya kerja dan pengelolaan *talent*.
3. TEPCO, MHPS dan GAMA Power Plant di Jepang, sebagai upaya dalam menambah wawasan inovasi di bidang teknologi pembangkitan dan menjajaki peluang pengembangan bisnis PJB ke depan.
4. SHRDC & *E-Learning Minds* di Selangor, Malaysia untuk mendapatkan wawasan teknologi dan metode pembelajaran digital learning.
5. *Chromalloy & Glow* di Thailand, untuk mempelajari *best practices* terkait pengelolaan pembangkit berbahan bakar pelet kayu yang akan diterapkan dalam *pilot project* pengoperasian biomas *co-firing* PLTU Paiton, Indramayu dan Tenayan.

1. PT Telkom Indonesia Tbk related to sharing on digital mindset management and challenges in managing the issue.
2. PT Angkasa Pura II related to sharing about how to manage millennials from the perspective of work culture and talent management.
3. TEPCO, MHPS, and GAMA Power Plant in Japan, to increase innovation in the field of generation technology and explore opportunities for PJB business development going forward.
4. SHRDC & E-Learning Minds in Selangor, Malaysia to gain insight into digital learning technologies and learning methods.
5. Chromalloy & Glow in Thailand, to learn the best practices related to the management of a wood pellet-fueled plant that will be applied in the pilot project for the operation of the biomass co-firing of Paiton, Indramayu and Tenayan CFPP.

Program Sertifikasi Certification Program

Dalam rangka memenuhi kebutuhan Unit maupun Korporat terkait isu keinsinyuran yang berkembang dewasa ini sebagaimana Undang-undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran yang menyebutkan bahwa bagi pekerja di bidang pembangkit wajib memiliki sertifikasi, jika tidak maka dianggap sebagai kegiatan malpraktek. Untuk itulah, PJB Academy menjalin kerjasama dengan UGM untuk melakukan pendampingan dan sertifikasi keinsinyuran bagi karyawan PJB di bidang teknik agar dapat diakui sebagai anggota Persatuan Insinyur Indonesia (PII).



Selain itu, terdapat sertifikasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan DJK yang diwajibkan oleh pemerintah sebagai perusahaan yang bergerak di bidang usaha ketenagalistrikan. Sebagai bentuk komitmen dan kepatuhan tersebut, PJB Academy juga telah melakukan sertifikasi bagi seluruh karyawan di bidang teknik mengacu pada Permen ESDM Nomor 46 Tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan.

Sertifikasi merupakan pengakuan terhadap kompetensi seorang profesional yang telah memenuhi standar profesi pada bidangnya masing-masing. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam industri pembangkitan serta penyediaan jasa operasi dan pemeliharaan kelistrikan, melakukan sertifikasi kepada karyawannya guna menjaga standar kompetensi yang dimiliki dalam bekerja.

Selama tahun 2019, PJB melakukan sertifikasi (Teknik) karyawan sebanyak 2.492 karyawan meningkat dibandingkan tahun 2018 sebanyak 2.025 karyawan, yang didorong adanya kebutuhan peningkatan kompetensi jabatan yang tinggi tetapi belum semua dapat terakomodir baik oleh Internal PJB sendiri maupun oleh pihak ketiga yang kompeten dalam menyelenggarakan sertifikasi serta peningkatan pemenuhan regulasi yang ditentukan oleh pemerintah maupun PT PLN (Persero).

To meet the Unit and Corporate needs related to the current issue on engineering as Law No. 11 of 2014 concerning Engineering states that workers in the power plant sector must have certification, if not then it is considered as illegal activities. Therefore, PJB Academy collaborates with UGM to provide engineering assistance and certification for PJB employees in the engineering field so that they can be recognized as members of the Indonesian Engineers Association (PII).



Additionally, there is a Directorate-General of Electricity (DJK) certification that is required by the government for companies engaged in the electricity business. As a form of commitment and compliance, PJB Academy has also conducted certification for all employees in the field of engineering, referring to the Ministry of Energy and Mineral Resources Decree No. 46 of 2017 concerning Standardization of Competency in Electrical Engineering.

Certification is a professional acknowledgment of the respective competence. As a company engaged in the power generation industry as well as electricity operational and maintenance services provider, the Company certifies its employees to maintain the core competence

In 2019, PJB accommodated 2,492 employees (Engineering) to obtain certifications, an increase compared to 2018 which was 2,025 employees, driven by the need to increase higher competency but not all of them could be accommodated either by Internal PJB itself or by third parties competent in certification as well as to increase compliance with regulations determined by the government and PT PLN (Persero).

Tabel Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
Table of Electrical Engineering Competency Certification

Jenis Sertifikasi Certification Category	Jumlah yang Disertifikasi Total Certifications	
	2018	2019
Core Competence Core Competence		
Sertifikasi PMK (Kelas B, C & D) PMK Certification	256	74
Sertifikasi K3 (Listrik, Umum, Kimia, Ketinggian, Ruang Terbatas) HSE Certification	108	108
Sertifikasi Operator Boiler Boiler Operation Certification	20	23
Supporting Competence Supporting Competence		
Sertifikasi Process Safety Management (PSM) Process Safety Management (PSM) Certification	0	0
Sertifikasi Manajemen Pelatihan - BNSP Management Training Certification - BNSP	20	0
Sertifikasi Training for Trainer Training for Trainer Certification	41	17
CHRPE CHRPE	13	0
Sertifikasi Auditor SMK3 OHSMS Auditor Certification	0	0

Tabel Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Tahun 2018-2019
Table of Electrical Engineering Competency Certification in 2018-2019

Jenis Sertifikasi Competency Certification Program	Ukuran Measurement	2018			2019		
		Target Target	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement	Target Target	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement
Sertifikasi DJK DJK Certification	Jumlah Pegawai Total Employee	713 Karyawan 713 Employee	534 Karyawan 534 Employee	74,89%	1530 Karyawan 1530 Employee	1157 Karyawan 1157 Employee	75,62%

Pada tahun 2019, Realisasi Program Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan mencapai 75,62% dibandingkan target 2019. Pencapaian ini di bawah target 2019 karena terdapat beberapa *gap* yaitu Karyawan yang telah tercatat pada rencana sertifikasi baik sertifikasi baru atau perpanjangan, yang bersangkutan sudah dipindah bidang/divisi kerja sehingga tidak membutuhkan sertifikasi DJK yang direncanakan. Oleh karena itu, terdapat penyesuaian realisasi selama tahun 2019 secara berkala.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan efektivitas pelatihan, PJB secara berkala melaksanakan *assessment Human Capital Readiness* (HCR) pada tahun 2019 tercapai dengan target Maturity Level Index (MLI) sebesar 4,00 dan target *Key Performance Indicator* (KPI) sebesar 5,00 dengan target SKOR sebesar 4,45.

In 2019, the Realization of the Electrical Engineering Competency Certification Program reaches 75.62% compared to the 2019 target. This achievement is below the 2019 target because there are several gaps, namely Employees who have been recorded in the certification plan, either new or extended certification, concerned has been transferred / division of work so that it does not require the planned DJK certification. Therefore, there are periodic adjustments to the realization of 2019.

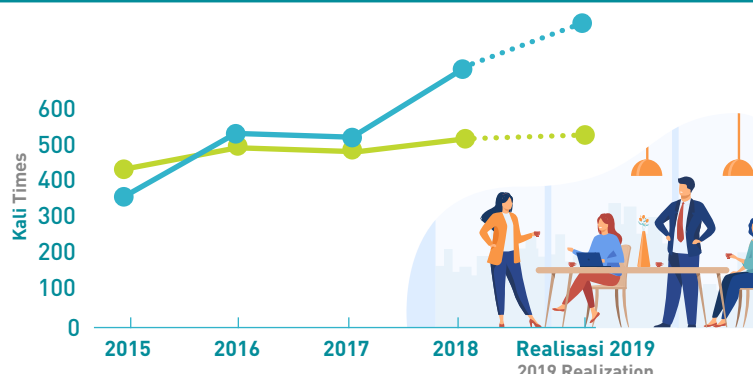
Additionally, to improve training effectiveness, PJB periodically conducts a Human Capital Readiness (HCR) assessment in 2019 with the achievement of the Maturity Level Index (MLI) target of 4.00 and the Key Performance Indicator (KPI) target of 5.00 from the targeted SCORE of 4.45.



Program Knowledge Sharing Forum (KFS) Knowledge Sharing Forum (KFS) Program

Perbandingan target dan realisasi untuk Program *Knowledge Sharing Forum* (KSF) tahun 2016 hingga tahun 2019

Comparison of targets and realization for the *Knowledge Sharing Forum* (KSF) Program from 2016 to 2019

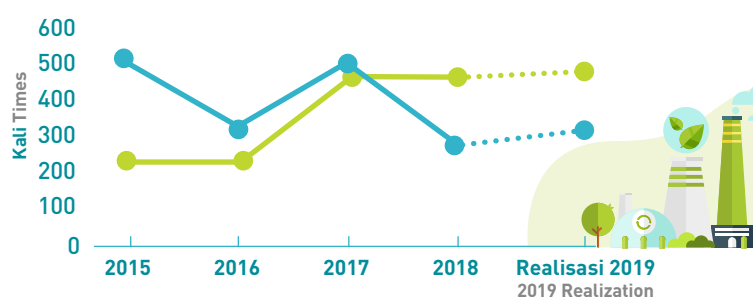


Target	419	500	500	510	525
Realisasi	374	520	525	729	829

Program Community of Practices Community of Practices Program

Perbandingan target dan realisasi dari tahun 2015 hingga tahun 2018 untuk Program *Community of Practices* Community of Practices (COP)

Comparison of targets and realization from 2015 to 2018 for the *Community of Practices* Community of Practices (COP) Program

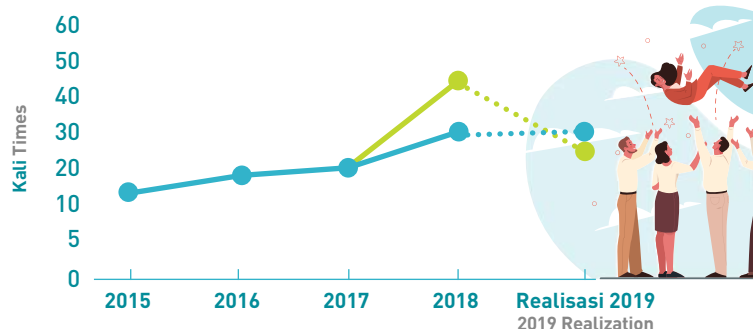


Target	240	240	480	480	490
Realisasi	495	333	496	271	310

Program Dokumen Expert Teknik Technical Document Expert Program

Perbandingan target dan realisasi dari tahun 2015 hingga tahun 2018 untuk Program *Dokumen Expert Teknik*

Comparison of targets and realization from 2015 to 2018 for the *Technical Document Expert* Program



Target	12	18	20	30	30
Realisasi	12	18	20	45	26

Di tahun 2019, PJB menyempurnakan Kebijakan Sistem *Expert* yang ditetapkan dalam Peraturan Direksi Nomor: 009.P/019/DIR/2019 tanggal 19 Juni 2019 yang didorong adanya kebutuhan *Expert* di bidang *Operation, Maintenance, dan Engineering* (OME) PJB serta dalam rangka menjaring dan mempersiapkan kader-kader terbaik Perusahaan untuk menduduki jenjang jabatan *Expert*.

In 2019, PJB revised the Expert System Policy outlined in the Board of Directors' Decree No: 009.P/019/DIR/2019 on June 19, 2019 due to the need for Expert of PJB's Operation, Maintenance, and Engineering (OME) and to find and prepare the Company's best talents to occupy the Expert level.

Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Evaluation of the Competency Development Program

Evaluasi kegiatan pembelajaran dilakukan secara berkesinambungan guna mendapatkan tanggapan, masukan dan penyempurnaan dalam meningkatkan efektifitas dan produktifitas karyawan, meliputi aspek sebagai berikut:

1. Penguatan kompetensi berfokus pada OME;
2. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM untuk mendukung kesiapan PJB dalam menghadapi peluang bisnis melalui penguatan kompetensi bisnis dengan model pembelajaran yang bekerja sama dengan pihak eksternal;
3. Penguatan *leadership* untuk level MM, MD, SPVA melalui model pembelajaran *leadership* yang berfokus pada praktek dengan skema *role played*, grup diskusi, pembelajaran interaktif dan sebagainya;
4. Membangun *Mindset Digital Worker* untuk menghadapi era disruptif teknologi melalui pembelajaran digital dalam bentuk materi interaktif, *web confrence*, uji *online* dan sebagainya.

Evaluation of learning activities is carried out continuously to receive feedback, input, and improvements to develop employee effectiveness and productivity, including the following aspects:

1. Strengthening OME competency;
2. Increasing the capacity and capability of HR to support the readiness of PJB in facing business opportunities through strengthening business competencies with learning models that associate with external parties;
3. Enhancing leadership for MM, MD, SPVA through leadership learning models that focus on practice with role-play schemes, group discussion, interactive learning and so on;
4. Building a Digital Worker Mindset to face the disruptive era of technology through digital learning in the form of interactive materials, web conferences, online tests, and so on.

Rencana Pengembangan Karyawan Tahun 2020 Employee Development Plan for 2020

Pada tahun 2020, PJB merencanakan kegiatan pengembangan dan pembelajaran karyawan sebagai berikut:

In 2020, PJB plans employee development and learning activities as follows:

No.	Jenis Pembelajaran Learning Category		Rencana 2020 2020 Projections	
			Jumlah Batch Total Batches	Jumlah Peserta Total Participants
1.	Pelatihan Training	Teknik Engineering	281	5.030
		Non-Teknik Non-Engineering	166	2.198
2.	Sertifikasi Certification	Teknik Engineering	90	1.568
		Non-Teknik Non-Engineering	39	431
3.	Workshop Workshop	Teknik Engineering	34	374
		Non-Teknik Non-Engineering	13	130
4.	Program Pendukung Supporting Program	Teknik Engineering	18	180
		Non-Teknik Non-Engineering	6	60
5.	Program Purna Retirement Program		2	50
6.	Soft Leadership		34	707
7.	PGD (Peer Group Discussion)		8	450
Total Total			691	11.178

STRUKTUR DAN KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

STRUCTURE AND COMPOSITION OF SHAREHOLDERS

Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Information on the Majority and Controlling Shareholders

Pemegang saham PJB yaitu PT PLN (Persero) dengan kepemilikan saham sebesar 99,99% dan YPK PLN dengan kepemilikan saham sebesar 0,01%. PT PLN (Persero) merupakan pemegang saham utama dan pengendali PJB. Direktur Utama PT PLN (Persero) merupakan representasi pemegang saham utama dan pengendali, secara teknis hubungan dengan pemegang saham berada di bawah Sekretaris Perusahaan PT PLN (Persero) fungsi Hubungan Investor.

Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait dengan (a) Rincian 20 pemegang saham terbesar dan persentase kepemilikannya, (b) nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham maupun kelompok pemegang saham masyarakat yang kurang dari 5%.

PJB's shareholders are PT PLN (Persero) with 99.99% share ownership and PLN YPK with 0.01% share ownership. PT PLN (Persero) is the majority and controlling shareholder of PJB. The President Director of PT PLN (Persero) is the representation of majority and controlling shareholder, and technically the relationship with the shareholder is under the Corporate Secretary of PT PLN (Persero) of Investor Relation function.

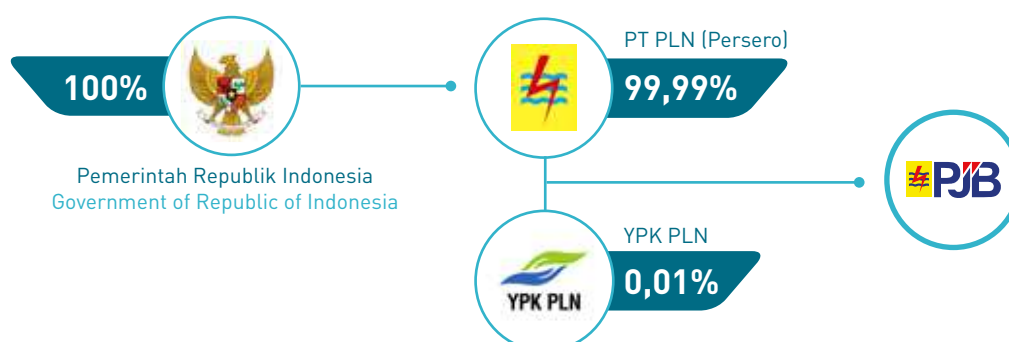
Therefore, there is no information on (a) Details of the 20 largest shareholders and their share percentage, (b) the names of shareholders with 5% or more shares or public below 5%.

Komposisi Pemegang Saham

Composition of Shareholders

Skema komposisi pemegang saham PJB, termasuk pemegang saham utama dan pengendali adalah sebagai berikut:

The scheme of composition of PJB's shareholders, including the majority and controlling shareholders is as follows:



Berdasarkan pasal 4 Anggaran Dasar, modal dasar Perusahaan ditetapkan sebesar Rp12.000.000.000.000,- (dua belas triliun Rupiah) terbagi dalam 24.000.000.000 saham, terdiri atas 1 Saham Seri 1 dan 23.999.999.999 Saham Seri 2, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah).

According to Article 4 of Company's Articles of Association, PJB's authorized capital is set at Rp12.000.000.000.000,- (twelve trillion Rupiah), divided into 24.000.000.000 shares, consisting of 1 Series-1 share and 23.999.999.999 Series-2 shares, each share has a nominal value of Rp500,- (five hundred Rupiah).

Modal tersebut telah ditempatkan dengan komposisi sebagai berikut:

1. PT PLN (Persero) sebanyak 1 Saham Seri 1 dan 5.999.999.998 Saham Seri 2 dengan nilai nominal sebesar Rp2.999.999.999.500,- (dua triliun sembilan ratus sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah);
2. Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) sebanyak 1 Saham Seri 2 dengan nilai nominal sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah).

The capital has been set with the following composition:

1. PT PLN (Persero) has 1 Series-1 share and 5.999.999.998 Series-2 shares with a nominal value of Rp2.999.999.999.500, (two trillion nine hundred ninety-nine billion, nine hundred ninety-nine million, nine hundred ninety-nine thousand, five hundred Rupiah),
2. Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) has 1 Series-2 shares with nominal value of Rp500,- (five hundred Rupiah).

Kepemilikan Saham oleh Direksi dan Dewan Komisaris Shares Ownership by Board of Directors and Board Of Commissioners

Seluruh Direktur dan Dewan Komisaris PJB tidak memiliki saham baik secara langsung maupun tidak langsung di Perusahaan.

PJB's Board of Directors and Board of Commissioners do not own any share either directly or indirectly in the Company.



STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN, ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI DAN PERUSAHAAN PATUNGAN

CORPORATE GROUP STRUCTURE, SUBSIDIARIES, ASSOCIATED ENTITIES, AND JOINT VENTURE COMPANY

PJB terus mengembangkan diri untuk memperluas kontribusi dan peran aktif dalam industri ketenagalistrikan nasional.

PJB keeps developing the company to actively participate in the national electricity industry.

Sampai dengan akhir tahun 2019, PJB telah memiliki 5 (lima) Entitas Anak, 3 (tiga) Cucu Perusahaan, 4 (empat) Entitas Asosiasi dan memiliki 5 (lima) Entitas Patungan (*Joint Venture Company/JVC*) dengan kepemilikan saham oleh Anak Perusahaan.

By the end of 2019, PJB has owned 5 (five) Subsidiaries, 3 (three) Second-Tier Subsidiaries, 4 (four) Associated Entities, and has 5 (five) Joint Venture Company with the shares are owned by the Subsidiaries

Entitas Anak adalah suatu perusahaan yang dikendalikan oleh PJB, memiliki kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasionalnya untuk memperoleh manfaat dari aktivitas entitas tersebut.

Subsidiary Entities are the companies controlled by PJB and have an authority to manage financial policies and operational to gain benefits from those entities' activity.

Entitas Asosiasi adalah suatu entitas dimana PJB dan entitas anak mempunyai pengaruh yang signifikan, dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian partisipasi dalam ventura bersama. Definisi "Pengaruh Signifikan" adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investee, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

Associated Entities are the entities in which PJB and its Subsidiaries have a significant influence. These entities are not subsidiary entities or the part of joint venture companies. "Significant Influence" definition is the authority to participate in making decision on financial policy and investee operational, but do not have any control over the policy.

Entitas Patungan (*Joint Venture Company/JVC*) merupakan perusahaan bersama dimana para pihak mempunyai bagian partisipasi, dan diatur oleh persetujuan untuk berbagi pengendalian atas suatu aktivitas. Pada Entitas Patungan, keputusan keuangan dan operasional strategis terkait dengan aktivitasnya, dipersyaratkan secara konsensus dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

Joint Venture Company/JVC is a joint company in which the parties have a participation, and is regulated by an agreement to share control or activities. In the Joint Venture Company, strategic financial and operational decisions related to the activities are required by consensus from all parties sharing control.

Adapun struktur grup PJB beserta Entitas Anak dan Entitas Asosiasi dapat digambarkan pada skema gambar di bawah ini:

The structure of the PJB group along with its Subsidiaries and Associates can be illustrated in the schematic pictures below:



Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan Audit
Audited Financial Statements

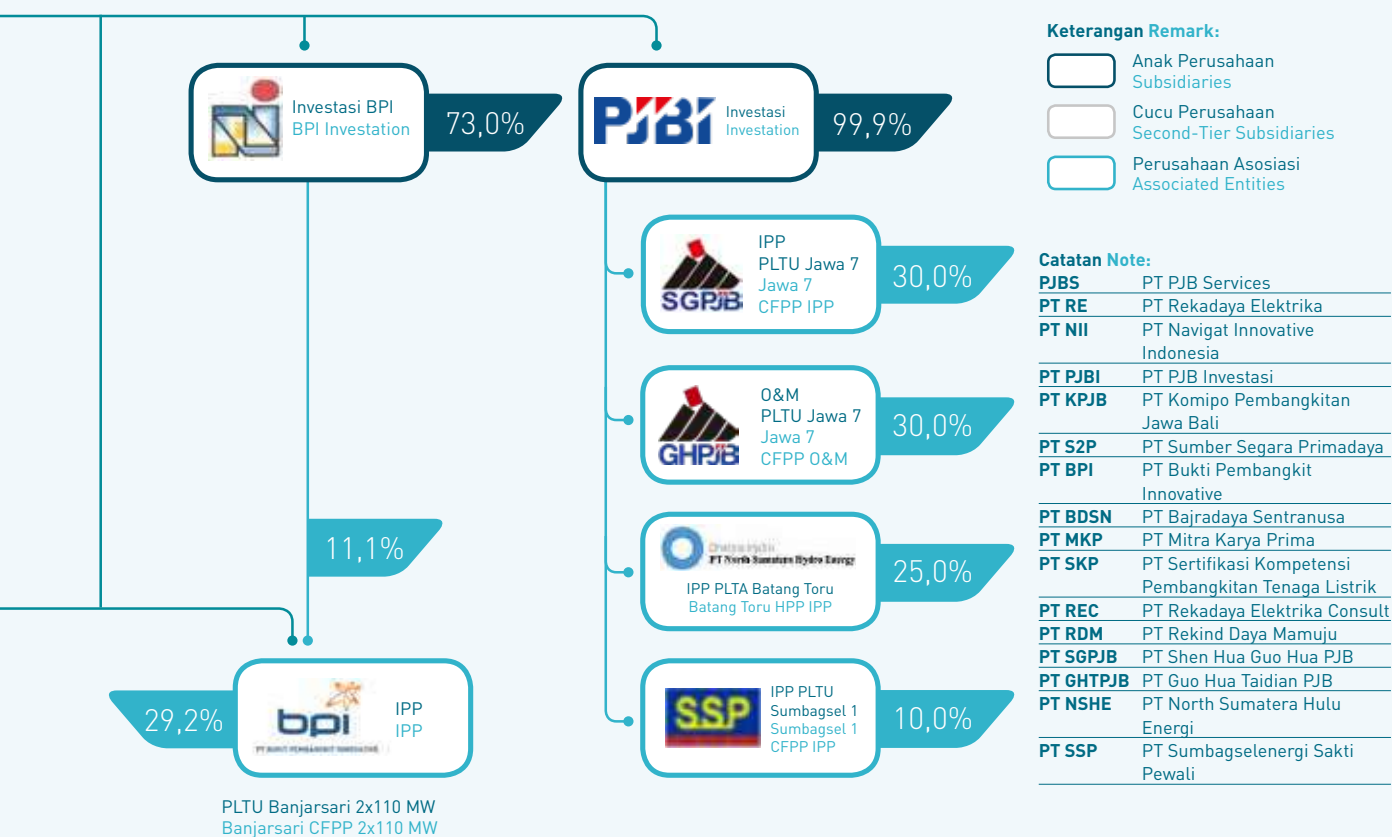


Referensi Kriteria AR
ARA Criteria Reference

Struktur Grup Perusahaan, Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Perusahaan Patungan

Corporate Group Structure, Subsidiaries, Associated Entities, And Joint Venture Company





Daftar Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi List of Subsidiary Entities and/or Associated Entities

Berikut daftar Entitas Anak, Cucu Perusahaan, Entitas Asosiasi dan Perusahaan Patungan PJB sampai dengan akhir tahun 2019 adalah:

The following is the list of PJB's current Subsidiary Entities, Secondtier Subsidiaries, Associated Entities and Joint Venture Companies of PJB:

ENTITAS ANAK SUBSIDIARY ENTITIES

No.	Perusahaan Company	Tanggal Pendirian Date of Establishment	Status Operasi Perusahaan Operation Status of the Company	Kepemilikan Saham PJB PJB Shares Ownership		Bidang Usaha Line of Business
				Penyertaan Modal Capital Investment	Saham Share	
1	PT PJB Services	30 Maret 2001 March 30, 2001	Beroperasi Operating	Rp102,9 miliar Rp102.9 billion	98,00%	Jasa <i>Operation & Maintenance</i> (O&M) O&M Services
2	PT Rekadaya Elektrika	20 Oktober 2000 October 20, 2000	Beroperasi Operating	Rp710,7 miliar Rp710.7 billion	98,91%	Jasa <i>Engineering Procurement Construction</i> (EPC) EPC Services
3	PT Navigat Innovative Indonesia	21 Oktober 2002 October 21, 2002	Beroperasi Operating	Rp99,8 miliar Rp99.8 billion	72,98%	Investasi pada pembangkit <i>Independent Power Producer</i> (IPP) Investment on IPP Power Plant
4	PT PJB Investasi	18 Desember 2015 December 18, 2015	Beroperasi Operating	Rp4.141 miliar Rp4,141 billion	99,99%	Investasi pada pembangkit <i>Independent Power Producer</i> (IPP) Investment on IPP Power Plant
5	PT Prima Layanan Suku Cadang (PLN SC)	16 Juni 2017 June 16, 2017	Beroperasi Operating	Rp76,5 miliar Rp76.5 billion	51,00%	Penyediaan suku cadang pembangkit Power Plant Spare Part Provision

Cucu Perusahaan Second-Tier Subsidiaries

1	PT Mitra Karya Prima	23 September 2004 September 23, 2004	Beroperasi Operating	Rp2,5 miliar Rp2.5 billion	92,00%	Penyediaan SDM untuk O&M Human resources provision for O&M
2	PT Sertifikasi Kompetensi Pembangkitan Tenaga Listrik	6 Mei 2015 May 6, 2015	Beroperasi Operating	Rp0,95 miliar Rp0.95 billion	95,00%	Sertifikasi kompetensi SDM bidang ketenagalistrikan Human Capital Competency Certification in Electricity Sector
3	PT Rekadaya Elektrika Consult	13 April 2010 April 13, 2010	Beroperasi Operating	Rp9,9 miliar Rp9.9 billion	99,8%	Jasa konsultasi bidang teknik, disain, manajemen SDM, studi perencanaan dan konstruksi Consultation Services in engineering, design, Human Capital management, planning studies and construction

Entitas Asosiasi Associated Companies

1	PT Sumber Segara Primadaya	12 Mei 2003 May 12, 2003	Beroperasi Operating	Rp437,5 miliar Rp437.5 billion	49,00%	<i>Independent Power Producer</i> (IPP) PLTU Cilacap Unit 1,2,3, Expansi Unit 4 Independent Power Producer (IPP) of CFPP Cilacap Unit 1,2,3, Expansion of Unit 4
2	PT Bajradaya Sentranusa	30 Oktober 1995 October 30, 1995	Beroperasi Operating	Rp388,5 miliar Rp388.5 billion	36,61%	<i>Independent Power Producer</i> (IPP) PLTA Asahan 1 (2x90 MW) Independent Pwer Producer (IPP) of HPP Asahan 1 (2x90MW)
3	PT Bukti Pembangkit Innovative	28 Agustus 2006 August 28, 2006	Beroperasi Operating	Rp332,1 miliar Rp332.1 billion	29,15%	<i>Independent Power Producer</i> (IPP) PLTU Banjarsari Unit 1-2 (2x110 MW) Independent Power Producer (IPP) of CFPP banjarsari Unit 1-2 (2x110MW)
4	PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali	30 September 2010 September 30, 2010	Beroperasi Operating	Rp11,1 miliar Rp11.1 billion	49,00%	Jasa <i>Operation & Maintenance</i> (O&M) PLTU Tanjung Jati B Unit 3-4 (2x660 MW) O&M Service of CFPP Tanjung Jati Unit 3-4 (2x660 MW)

No.	Perusahaan Company	Tanggal Pendirian Date of Establishment	Status Operasi Perusahaan Operation Status of the Company	Kepemilikan Saham PJB PJB Shares Ownership		Bidang Usaha Line of Business
				Penyertaan Modal Capital Investment	Saham Share	
Entitas Patungan (Joint Venture Company/Jvc) Joint Venture Company						
1	PT Rekind Daya Mamuju	21 Februari 2013 February 21, 2013	Beroperasi Operating	Rp 24,6 miliar Rp 24.6 billion	10,0%	Pembangkitan Tenaga Listrik Power Plants
2	PT Shenhua Guo Hua PJB	08 Maret 2016 March 08, 2016	Tahap Konstruksi In Construction	USD113.033.467,2	30,00%	Pembangkit PLTU Jawa 7 (2x1000 MW) CFPP Jawa 7 (2x1000MW)
3	PT Guo Hua Taidian PJB	23 September 2016 September 23, 2016	Belum beroperasi Not Operating	USD350.000	30,00%	Jasa Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik PLTU Jawa 7 (2x1000 MW) Power Plant O&M Service of CFPP Jawa 7 (2x1000MW)
4	PT North Sumatera Hulu Energy	30 April 2008 April 30, 2008	Tahap Konstruksi In Construction	USD76.330.820	25,00%	Pembangkit PLTA Batang Toru (3x125) MW HPP Batang Toru (3x125MW)
5	PT Sumbagse Ienergi Sakti Pewali	6 Juni 2018 June 6, 2018	Tahap Konstruksi In Construction	USD1.860.000	10,00%	Pembangkit PLTU MT Sumbagsel 1 (2x150 MW) CFPP MT Sumbagsel 1 (2x150MW)



SEKILAS KINERJA ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI DAN ENTITAS AFILIASI PERFORMANCE OVERVIEW OF SUBSIDIARY, ASSOCIATED AND AFFILIATED ENTITIES

Anak Perusahaan Subsidiary Companies

PT PJB SERVICES (PJBS)	
	
Profil Perusahaan PT PJB Services (PJBS) bergerak di bidang penyediaan Jasa Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit Listrik, pengadaan peralatan ketenagalistrikan, dan pembangunan atau pemasangan peralatan energi listrik. PJBS didirikan pada tanggal 30 Maret 2001 dengan kepemilikan saham PJB sebesar 98% dan Yayasan Kesejahteraan dan Pendidikan PJB sebesar 2%.	Company Profile PT PJB Services (PJBS) engages in O&M Services for Power Plants, procurement of electricity equipments, or construction and installation of electrical power equipment. PJBS was established on March 30th, 2001 with the ownership of PJB shares reaches 98% and Yayasan Kesejahteraan dan Pendidikan owns 2% of the shares.
Alamat Address Kantor Pusat Head Office Jl. Raya Juanda No. 17 Sidoarjo 61253	Kantor Perwakilan Representative Office Jl. Tebet Mas Indah VI / VII Blok C No. 16 Jakarta Selatan 12810 Email : Info@pjbservices.com Website : www.pjbservices.com

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PJBS Tahun 2019

The composition of Board of Commissioners and Board of Directors in 2019

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Komisaris Utama President Commissioner	Bagio Riawan	20-03-2017 s.d. definitif 20-03-2017 to definitive
Komisaris Commissioner	Sidik Wiyono	20-03-2017 s.d. definitif 20-03-2017 to definitive
Komisaris Commissioner	Toto Priyanto	20-03-2017 s.d. definitif 20-03-2017 to definitive

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Direktur Utama President Director	Akhmadi Djati Presetyo (Plt) (Act)	05-08-2018 s.d. definitif 05-08-2018 to definitive
Direktur Perencanaan dan Pemasaran Director of Planning and Marketing	I Nyoman Awatara (Plt) (Act)	05-08-2018 s.d. definitif 05-08-2018 to definitive
Direktur Keuangan Director of Finance	Rudy Hertanto (Plt) (Act)	05-08-2018 s.d. definitif 05-08-2018 to definitive
Direktur Proyek Director of Project	Thommi Haposan	03-07-2017 s.d. to 02-07-2020
Direktur Operation & Maintenance Director of Operation & Maintenance	Nur Hidayat	03-07-2017 s.d. to 02-07-2020
Direktur Human Capital Director of Human Capital	Dedi Budi Utomo	03-07-2017 s.d. to 02-07-2020

Kinerja Keuangan Tahun 2017-2019 (Rp miliar)

Financial Performance in 2017-2019 (in Rp billion)

Keterangan Description	2017	2018	2019
Total Aset Total Assets	992,87	1.277,35	1.219,00
Pendapatan Usaha Operating Revenue	1.625,60	1.777,87	1.740,35
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) of the Year	157,66	129,53	130,55

PT REKADAYA ELEKTRIKA (RE)	
Profil Perusahaan PT Rekadaya ElektriKA (RE) bergerak di bidang <i>Engineering, Procurement and Construction</i> (EPC) sektor ketenagalistrikan yang melaksanakan pembangunan pembangkitan, serta fasilitas transmisi dan distribusi. RE berdiri sejak 20 Oktober 2000 dengan nama PT Delta Rekadaya Mandiri dan kemudian berganti nama menjadi PT Rekadaya ElektriKA setelah PJB masuk sebagai pemegang saham pada 20 Desember 2002. Kepemilikan Saham RE adalah PJB sebesar 98,91%, PT Rekayasa Industri 1,04% dan YPK PLN 0,05%.	Company Profile PT Rekadaya ElektriKA (RE) engages in Engineering, Procurement, and Construction (EPC) of electricity that performs the construction of power plants, also transmission and distribution facilities. RE was established on October 20th, 2000 with its original name, PT Delta Rekadaya Mandiri, then have its name changed into PT Rekadaya ElektriKA after PJB became the shareholder on December 20th, 2002. The ownership of RE Shares is divided into: 98,91% of PJB shares, 1,04% of PT Rekayasa Industri shares and 0,05 % of YPK PLN shares.
Alamat Address Gedung Bank Mandiri Lt. 6, Jl. TanjungKarang No.3-4A, Jakarta 10230, Indonesia. Phone : 021-39838929 Fax. : 021-39838930 Email : rekadaya@rekadaya.com Website : www.rekadaya.co.id	

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi RE Tahun 2019

The composition of Board of Commissioners and Board of Directors in 2019

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Komisaris Utama President Commissioner	Hari Suharso	17-03-2017 s.d. to 17-03-2020
Komisaris Commissioner	Idian	01-08-2018 s.d. to 01-08-2021
Komisaris Commissioner	M. Yossy Noval A	03-13-2017 s.d. to 03-13-2020
Komisaris Commissioner	Iskandar	03-17-2017 s.d. to 03-17-2020

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Direktur Utama President Director	Harjono	2017-03-17 s.d. definitif 2017-03-17 to definitive
Direktur Bisnis 1 Director of Business 1	Ochairialdy	01-07-2019 s.d. Definitif 01-07-2019 to definitive
Direktur SDM & Umum Director of HC & General Affairs	Ova Kurniawan	08-01-2018 s.d. to 08-01-2021
Direktur Bisnis 2 Director of Business 2	Puguh Wedatomo	17-03-2017 s.d. to 17-03-2020
Direktur Keuangan dan Pemasaran Director of Finance and Marketing	Hadeyanti Sylviani	17-03-2017 s.d. to 17-03-2020

Kinerja Keuangan Tahun 2017-2019 (Rp miliar)

Financial Performance in 2017-2019 (in Rp billion)

Keterangan Description	2017	2018	2019
Total Aset Total Assets	1.130,35	1.513,29	2.229,77
Pendapatan Usaha Operating Revenue	1.242,98	1.940,07	1.705,70
Labarugi Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) of the Year	112,39	130,48	51,29

PT NAVIGAT INNOVATE INDONESIA (NII)



Profil Perusahaan

PT Navigat Innovate Indonesia (NII) bergerak di bidang perdagangan, konstruksi dan pertambangan. NII didirikan pada 21 Oktober 2002 dan PJB menjadi pemegang saham mayoritas NII sejak 12 Januari 2012. Kegiatan usaha NII saat ini berupa penyertaan saham sebesar 11,10% di PT Bukit Pembangkit Innovative (BPI) sebagai pengembang IPP PLTU Banjarsari 2x110 MW. Kepemilikan Saham NII adalah PJB sebesar 72,98%, Moh Soleh Thamrin 13,51% dan Sri Andini 13,51%

Company Profile

PT Navigat Innovate Indonesia (NII) engages in the field of trading, construction, and mining. NII was established on October 21, 2002 and PJB became NII majority shareholder since January 12, 2012. The current NII business activities cover: shares investment amounting to 11,10% in PT Bukit Pembangkit Innovative (BPI), as IPP developer in Banjarsari CFPP of 2x110MW. The ownership of NII shares belongs to PJB (72,98%), Moh Saleh Thamrin (13,51%) and Sri Andini (13,51%)

Alamat Address

Gedung PT PLN (Persero) Lantai 2
Jl Gatot Subroto Kav 18 Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi,
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Phone : (021) 29023779

Kantor Perwakilan Representative Office

PT PJB Jl. Ketintang Baru No. 11, Surabaya 60231.
Phone : (031) 8283180 ext 540
Fax : (031) 8283183

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi NII Tahun 2019

The composition of Board of Commissioners and Board of Directors in 2019

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Komisaris Utama President Commissioner	Sulistyo Utomo	21-03-2017 s.d. to 21-03-2020
Komisaris Commissioner	M. Soleh Thamrin	21-03-2017 s.d. to 21-03-2020

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Direktur Utama President Director	Paminto Adi Basuki	21-03-2017 s.d. to 21-03-2020
Direktur Director	Sri Andini	21-03-2017 s.d. to 21-03-2020

Kinerja Keuangan Tahun 2017-2019 (Rp juta)

Financial Performance in 2017-2019 (in Rp million)

Keterangan Description	2017	2018	2019
Total Aset Total Assets	253.220	307.590	304.643
Pendapatan atas Investasi Revenue from investment	33.599	22.340	22.671
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) of the Year	25.202	16.755	17.003



PT PJB INVESTASI (PJBI)	
Profil Perusahaan PT PJB Investasi (PJBI) merupakan anak perusahaan PT PJB yang berfokus pada investasi di bidang Pembangkit tenaga listrik, Fasilitas pembangkit tenaga listrik, OM pembangkit dan usaha Penunjang pembangkit tenaga listrik, Pembuatan dan peralatan ketenagalistrikan, Penyediaan energi primer dan transportasinya, serta Perdagangan peralatan pembangkit listrik. PT PJBI didirikan pada tanggal 18 Desember 2015 dengan persentase kepemilikan PJB sebesar 99,99% dan Yayasan Kesejahteraan dan Pendidikan PJB sebesar 0,01%.	Company Profile PT PJB Investasi (PJBI) is a subsidiary company of PT PJB Services which focuses on investment in the Power Plants sector, power plants facilities, power plants OM and power plants support business, electricity preparation and equipment, supply of primary energy and its transportation, as well as trade of power plant equipment. PT PJBI was established on December 18, 2015, with share ownership percentage as follows: 99.99% of PT PJB Service shares and 0.01% of YKP PJB shares.
Alamat Address Menara Bidakara-2 Lt 8 Jl Gatot Subroto Kav. 71-73 Jakarta Selatan, 12870. Phone : (021) 83708760 Fax : (021) 83708761 Email : info@pjbinvest.com Website : www.pjbinvest.com	

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2019

The composition of Board of Commissioners and Board of Directors in 2019

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Komisaris Utama President Commissioner	Zulfarida Faluzy	13-03-2017 s.d. Definitif 13-03-2017 to definitive
Komisaris Commissioner	Eny Wulansari	7-05-2019 s.d. Definitif 7-05-2019 to definitive

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Direktur Utama President Director	Gunawan Yudi Hariyanto	13-03-2017 s.d. to 13-03-2020
Direktur Operasi Director of Operation	Dwi Hartono	13-03-2017 s.d. to 13-03-2020
Direktur Keuangan Director of Finance	Amir Faisal	13-03-2017 s.d. to 13-03-2020

Kinerja Keuangan Tahun 2017-2019 (Rp miliar)

Financial Performance in 2017-2019 (in Rp billion)

Keterangan Description	2017	2018	2019
Total Aset Total Assets	3.036,73	4.444,43	4.559,45
Pendapatan Usaha Operating Revenue	23,59	219,64	170,99
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) of the Year	28,05	221,47	125,14

PT PRIMA LAYANAN NIAGA SUKU CADANG (PLNSC)



Profil Perusahaan

PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang (PLN SC) merupakan anak perusahaan PJB yang bergerak di bidang Penyediaan spareparts pembangkit dari pabrikan, *Reverse engineering*, Standarisasi dan *Product Catalogue Database*. PLN SC didirikan pada tanggal 16 Juni 2017 dengan persentase kepemilikan saham PJB sebesar 51% dan PT Indonesia Power sebesar 49%.

Company Profile

PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang (PLN SC) is a subsidiary company of PJB engages in manufactured power plant spare-part supply, Reverse engineering, Standardization and Product Catalogue Database. PLN SC was established on June 16th, 2017, with shares ownership percentage as follows: 51% PJB shares and 49% of PT Indonesia Power shares.

Alamat Address

Kantor Pusat Head Office

Recapital Building, 3rd Floor Jl Adityawarman No. 55,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12160

Email : info@plnsc.co.id

Website : www.plnsc.co.id

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2019

The composition of Board of Commissioners and Board of Directors in 2019

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Komisaris Utama President Commissioner	Sulaeman Daud	07-03-2017 s.d. to 07-03-2020
Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Direktur Utama President Director	Deni Susanto	07-03-2017 s.d. to 07-03-2020
Direktur Bisnis dan Keuangan Director of Business and Finance	Amran Sattu	07-03-2017 s.d. to 07-03-2020
Direktur Enjinering & Layanan Director of Engineering and Service	Andi Adam	07-03-2017 s.d. to 07-03-2020

Kinerja Keuangan Tahun 2017-2019 (Rp juta)

Financial Performance in 2017-2019 (in Rp million)

Keterangan Description	2017	2018	2019
Total Aset Total Assets	150.759	197.359	287.615
Pendapatan Operasional Operating Revenue	-	118.370	410.195
Laba (Rugi) Bersih Net Profit (Loss)	200	4.759	17.496

Cucu Perusahaan Second-Tier Subsidiaries

PT MITRA KARYA PRIMA (MKP)	
Profil Perusahaan PT Mitra Karya Prima (PT MKP) merupakan anak perusahaan PT PJB Services yang bergerak dibidang penyediaan Tenaga Kerja atau SDM untuk <i>Operation & Maintenance</i> (O&M) pembangkit listrik. PT Mitra Karya Prima (PT MKP) adalah anak perusahaan PT PJB Services yang didirikan pada tanggal 23 September 2004 dengan struktur kepemilikan saham PT PJB Services sebesar 92 % dan YK PJB sebesar 8%.	Company Profile PT Mitra Karya Prima (PT MKP) is a subsidiary company of PT PJB Services engages in Human Resources provision for Power Plant O&M. PT Mitra Karya Prima (PT MKP) is a subsidiary of PT PJB Services which was established on September 23rd, 2004 with shares ownership structure as follows: 92% of PT PJB Services shares and 8% of TY PJB shares.
Alamat Address Kantor Pusat Head Office Juanda Business Center (JBC) Blok A, No. 4,5 dan 6 Jl. Raya Juanda No. 1 – Sidoarjo (61253) Telp : 031-8548595 Fax : 031-8548596 Email : Info@mitrakaryaprima.com Website : www.mitrakaryaprima.com	

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2019

The composition of Board of Commissioners and Board of Directors in 2019

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Komisaris Utama President Commissioner	Kesti Irawati	09-04-2018 s.d to 09-04-2021
Komisaris Commissioner	Vodegel ignatius R. D	09-04-2018 s.d to 09-04-2021
Komisaris Commissioner	Yugo Riatmo	01-08-2018 s.d to 01-08-2021

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Direktur Utama President Director	Saptono	14-12-2016 s.d to 14-12-2019
Direktur SDM dan Keuangan Director of HC and Finance	Kunto Wibisono	01-07-2019 s.d to 01-07-2021
Direktur Pemasaran & Operasi Director of Marketing and Operation	Abu Hasan	09-04-2018 s.d to 09-04-2022

Kinerja Keuangan Tahun 2017-2019 (Rp miliar)

Financial Performance in 2017-2019 (in Rp billion)

Keterangan Description	2017	2018	2019
Total Aset Total Assets	81,79	86,64	105,21
Pendapatan Usaha Operating Revenue	206,65	216,18	278,02
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) of the Year	19,04	20,12	20,30

PT SERTIFIKASI KOMPETENSI PEMBANGKITAN TENAGA KERJA (SKP)



Profil Perusahaan

PT Sertifikasi Kompetensi Pembangkitan Tenaga Listrik (SKP) merupakan anak perusahaan PT PJB Services yang bergerak di bidang jasa sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dengan klasifikasi usaha besar dan ruang lingkup bidang pembangkitan tenaga listrik dan sub bidang pengoperasian dan pemeliharaan. PT SKP didirikan pada tanggal 6 Mei 2015 dengan persentase kepemilikan saham PT PJB Services sebesar 95% dan Yayasan Kesejahteraan dan Pendidikan PJB sebesar 5%.

Company Profile

PT Sertifikasi Kompetensi Pembangkitan Tenaga Listrik (SKP) is a subsidiary of PT PJB Services engages in Human Capital Competency Certification in Electricity Sector with large business classification and in the electric power generation division and sub division of Operation and Maintenance sector. PT SKP was established on May 6th, 2015 with share ownership percentage as follows: 95% of PT PJB Service shares and 5% of YKP PJB shares.

Alamat Address

Kantor Pusat Head Office

Jl. Tebet Raya No.44D, RT.4/RW.4, Tebet Timur
Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan – 40115
Telp : 021-22831822
Email : halo@skptenagalistrik.com
Website : www.skptenagalistrik.co.id

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2019

The composition of Board of Commissioners and Board of Directors in 2019

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Komisaris Commissioner	Dicky Maryono	06-05-2018 s.d to 06-05-2021
Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Direktur Director	Mudjiono	06-05-2018 s.d to 06-05-2021

Kinerja Keuangan Tahun 2017-2019 (Rp miliar)

Financial Performance in 2017-2019 (in Rp billion)

Keterangan Description	2017	2018	2019
Total Aset Total Assets	5,35	5,65	8,13
Pendapatan Usaha Operating Revenue	8,11	7,86	11,35
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) of the Year	2,66	1,72	3,21

PT REKADAYA ELEKTRIKA CONSULT (RECONSULT)	
Profil Perusahaan PT Rekadaya Elekrika Consult (reCONSult) merupakan anak perusahaan PT Rekadaya Elekrika yang bergerak di bidang penyediaan Jasa konsultasi ketenagalistrikan mulai dari penyusunan studi kelayakan hingga proses produksi yang meliputi proses <i>procurement</i> , proses <i>pra-construction</i> , proses konstruksi, dan periode produksi. PT reCONSult didirikan pada tanggal 13 April 2010 dengan persentase kepemilikan saham PT Rekadaya Elekrika sebesar 99,8% dan Koperasi Karyawan Rekadaya Elekrika sebesar 0,02%.	Company Profile PT Rekadaya Elekrika Consult (reCONSult) is a subsidiary of PT Rekadaya Elekrika engages in the consultation service in electricity starting from fit and proper study preparation up to production process including procurement process, preconstruction process, construction process and production period. PT ReCONSult was established on April 13, 2010 with PT Rekadaya Elekrika shares ownership is 99.8% and Koperasi Karyawan Rekadaya Elekrika is 0.02%.
Alamat Address Kantor Pusat Head Office Gedung Wisma 46, Kota BNI Lt. 17, Jl. Jend Sudirman Kavling 1 Jakarta Pusat – 10220 Telp : 021- 572 1375 Fax : 021- 573 1377 Email : marketing@reconsult.co.id, corsec@reconsult.co.id Website : www.reconsult.co.id	

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2019

The composition of Board of Commissioners and Board of Directors in 2019

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Komisaris Utama President Commissioner	Bernadus Sudarmanta	01-10-2017 s.d to 30-09-2020
Komisaris Commissioner	Basuki Rachmad	01-10-2017 s.d to 30-09-2020
Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Direktur Utama President Director	Adang Sudrajat	01-10-2017 s.d to 30-09-2020
Direktur Bisnis Director of Business	Iwan Slamet Triawan	01-10-2017 s.d to 30-09-2020
Direktur Keuangan & Umum Director of Finance & General Affairs	Iffah F. Rahmawati	01-10-2017 s.d to 30-09-2020

Kinerja Keuangan Tahun 2017-2019 (Rp miliar)

Financial Performance in 2017-2019 (in Rp billion)

Keterangan Description	2017	2018	2019
Total Aset Total Assets	141,46	172,29	156,15
Pendapatan Usaha Operating Revenue	230,54	258,17	215,87
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) of the Year	39,21	57,27	30,82

PT REKIND DAYA MAMUJU	
Profil Perusahaan PT Rekind Daya Mamuju (PT RDM) adalah perusahaan asosiasi PT Rekadaya ElektriKA sebagai IPP PLTU Mamuju 2x25 MW yang didirikan pada tanggal 21 Februari 2013 dengan struktur kepemilikan saham PT Rekadaya Industri sebesar 90 % dan PT Rekadaya ElektriKA sebesar 10 %. IPP PLTU Mamuju 2x25 MW telah COD sejak tanggal 19 September 2018.	Company Profile PT Rekind Daya Mamuju (RDM) is an Associated Company of PT Rekadaya ElektriKA operated in IPP generation at Mamuju CFPP with capacity of 2x25 MW located in Mamuju Regency, West Sulawesi Province. PT RDM was established on February 21, 2013 with PT Rekadaya Industri ownership percentage is 90% and PT Rekadaya ElektriKA is 10%. IP generation at Mamuju CFPP of 2x25MW has got COD since September 19, 2018.
Alamat Address Kantor Pusat Head Office Gedung Nucira Lt 4, Jl. MT. Haryono Kav 27 Jakarta Selatan 12820 Telp : 021-83787760, 021-83785961 Fax : 021-8307578 Email : info@rdm.co.id Website : https://www.rdm.co.id/	Kantor PLTU CFPP Office Dusun Talaba, Desa Belang-Belang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2019

The composition of Board of Commissioners and Board of Directors in 2019

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Plt Komisaris Utama Act. President Commissioner	Triyani Utaminingsih	29-05-2019 s.d Definitif 29-05-2019 to Definitive
Plt Komisaris Act. Commissioner	Desfinar Jaelani Madjid	29-05-2019 s.d Definitif 29-05-2019 to Definitive

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Plt Direktur Utama Act. President Director	Harry Fardiman	05-02-2018 s.d Definitif 05-02-2018 to Definitive
Plt Direktur Keuangan Act. Director of Finance	Harry Fardiman	05-02-2018 s.d Definitif 05-02-2018 to Definitive
Plt Direktur Operasi Act. Director of Operation	Akmaludin	01-04-2019 s.d Definitif 01-04-2019 to Definitive

Kinerja Keuangan Tahun 2017-2019 (dalam USD)

Financial Performance in 2017-2019 (in USD)

Keterangan Description	2017	2018	2019
Total Aset Total Assets	117.371.114	129.278.806	125.413.814
Pendapatan Usaha Operating Revenue	37.936.721	18.542.935	21.103.496
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) of the Year	4.202.916	2.538.082	939.739

Entitas Asosiasi Associated Entities

PT SUMBER SEGARA PRIMADAYA (S2P) 	
Profil Perusahaan PT Sumber Segara Primadaya (S2P) adalah Perusahaan Asosiasi PT PJB yang didirikan pada 12 Mei 2003 dengan struktur kepemilikan saham PT PJB sebesar 49,00% dan PT Sumberenergi Sakti Prima 51,00%. PT S2P bergerak dalam bidang penyediaan tenaga listrik (IPP) dengan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga uap Cilacap 2x300 MW dan ekspansi Unit 3 dengan kapasitas 1x660 MW.	Company Profile PT Sumber Segara Primadaya (S2P) is an associated company of PT PJB, established on May 12, 2003 with share ownership of PT PJB is amounting to 49% while PT Sumberenergi Sakti Prima (SSP) owns 51% of the shares. PTS2P engages in Independent Power Plant (IPP) business by operating coal-fuel Cilacap Steam Power Plant of 2,260 MW and Unit 3 expansion with capacity of 1x660 MW.
Alamat Address Kantor Pusat Head Office Office 8, 9 th FL, SCBD LOT 28 Jl. Senopati Raya 8B, Jakarta Selatan 12190 Telp : 021-29126888 Fax : 021-29126886 Email : jakarta@ssprimadaya.co.id Website : www.ssprimadaya.co.id	Kantor PLTU Cilacap Cilacap CFPP Office Jl. Lingkar Timur Karang Kandri, Kecamatan Kesugihan, Cilacap

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2019

The composition of Board of Commissioners and Board of Directors in 2019

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Komisaris Utama President Commissioner	Dewi Kam	05-03-2017 s.d. to 05-03-2020
Komisaris Commissioner	Mohamad Abdullah Jasin	05-03-2017 s.d. to 05-03-2020
Komisaris Commissioner	Muhammad Bardan	05-03-2017 s.d. to 05-03-2020
Komisaris Commissioner	Achmad Ilham Rasyid	05-03-2017 s.d. to 05-03-2020

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Direktur Utama President Director	Agus Nurwahyudi	05-03-2017 s.d. to 05-03-2020
Direktur Teknologi & Operasi Director of Technology & Operation	Irvan Rahmat	05-03-2017 s.d. to 05-03-2020
Direktur Keuangan & Umum Director of Finance & General Affairs	Lifransyah Gumay	15-01-2018 s.d. to 15-01-2020
Direktur Proyek Director of Project	Harry Satria	15-01-2018 s.d. to 15-01-2020

Kinerja Keuangan Tahun 2017-2019 (Rp juta)

Financial Performance in 2017-2019 (in Rp million)

Keterangan Description	2017	2018	2019
Total Aset Total Assets	15.107,13	24.446,84	26.035,15
Pendapatan Operasi Operating Revenue	6.650,39	7.549,10	5.353,39
Jumlah Laba Tahun Berjalan Total Profit of the Year	586,76	109,95	363,11

PT BAJRADAYA SENTRANUSA (BDSN)



PT BAJRADAYA SENTRANUSA

Profil Perusahaan

PT Bajradaya sentranusa (BDSN) merupakan perusahaan Asosiasi PJB yang bergerak di bidang penyediaan tenaga listrik (IPP) mengoperasikan PLTA Asahan-I 2x90 MW. PT BDSN didirikan pada tanggal 30 Oktober 1995 dan PT PJB masuk sebagai pemegang saham pada tanggal 30 November 1996 dengan persentase kepemilikan saham saat ini PT PJB sebesar 36,61%; Fareast Green Energy (FGE) sebesar 49,89%; CHDHK sebesar 4,75%, Nusa Konstruksi Engineering sebesar 3,32%; PT Bajragraha Sentranusa sebesar 0,42%; dan International Finance Corporation sebesar 5%.

Company Profile

PT Bajradaya Sentranusa (BDSN) is an Associated Company of PT PJB operating in Independent Power Plant (IPP) sector by operating Asahan HPP-1 2x90 MW. PT BDSN was established on October 30, 1995 and PT PJB joined as shareholder on November 30, 1996 with ownership percentage is currently held by PT PJB with 36.61% ownership; Fareast Green Energy (FGE) with 49.89% ownership; CHDHK with 4.75% ownership; Nusa Konstruksi Engineering with 3.32% ownership; PT Bajragraha Sentranusa with 0.42% ownership and International Finance Corporation with 5% ownership.

Alamat Address

Kantor Pusat Head Office

Jl Dharmawangsa Raya No.23, Kebayoran Baru, Jakarta 12160
Telp : (021) 7202117
Email : bdsn.ho@bajradaya.co.id

Kantor Sementara Temporary Office

Jl. Wijaya III no. 5, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12160

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2019

The composition of Board of Commissioners and Board of Directors in 2019

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Komisaris Utama President Commissioner	Noesita Indriani	07-05-2019 s.d Definitif 07-05-2019 to Definitive
Komisaris Commissioner	Muhammad Husni Noor	08-02-2018 s.d to 11-04-2020
Komisaris Commissioner	Suwarno Kusumaatmaja	07-05-2019 s.d to 07-05-2022
Komisaris Commissioner	Samiudin	17-03-2016 s.d to 16-03-2019
Komisaris Commissioner	Li Yuanzhi	17-03-2016 s.d to 16-03-2019
Komisaris Commissioner	Thana Boonyasirikul	-
Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Direktur Utama President Director	Adek Julianwar	17-03-2016 s.d to 16-03-2019
Direktur Keuangan Director of Finance	Bambang Tedjo Narsoyo	12-04-2017 s.d to 11-04-2020
Direktur (General & Administration) Director (General & Administration)	Sakchai Chaiyawan	-

Kinerja Keuangan Tahun 2017-2019 (USD)

Financial Performance in 2017-2019 (in USD)

Keterangan Description	2017	2018	2019
Total Aset Total Assets	443.937.497	444.599.882	444.989.974
Pendapatan Operasi Operational Revenue	45.105.677	45.021.424	47.146.579
Jumlah Laba Tahun Berjalan Total Profit of the Year	17.224.870	17.989.674	27.640.459



PT BUKIT PEMBANGKIT INNOVATIVE (BPI)	
Profil Perusahaan PT Bukit Pembangkit Innovative (BPI) merupakan perusahaan Asosiasi PJB yang bergerak di bidang penyediaan tenaga listrik (IPP) dengan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga uap Banjarsari 2x110 MW di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. PT BPI didirikan pada tanggal 28 Agustus 2006 dengan persentase kepemilikan saham PJB sebesar 29,15%, PT Bukit Asam Tbk sebesar 59,75% dan PT Navigat Innovate Indonesia sebesar 11,10%.	Company Profile PT Bukit Pembangkit Innovative (BPI) is an Associated Company of PT PJB engaging in Independent Power Plant (IPP) sector by operating Banjarsari Steam Power Plant of 2x110 MW in Lahat Regency, South Sumatera. PT BPI was established on August 28, 2006 with PT PJB ownership percentage is 29.15%; PT Bukit Asam Tbk. is 59,75% and PT Navigat Innovate Indonesia is 11,10%.
Alamat Address Kantor Pusat Head Office Graha Surveyor Indonesia Building, 17 th Floor, Suite 1703 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 56 Jakarta 12950 Telp : 021-5212463, 021-5212470 Fax : 021-5210725 Email : secretary@bpi-ipp.com Website : www.bpi-ipp.com	Kantor PLTU Banjarsari Banjarsari CFPP Office Jl. Lintas Tengah Sumatera, Sirah Pulau Village & Gunung Kembang Village

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2019

The composition of Board of Commissioners and Board of Directors in 2019

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Komisaris Utama President Commissioner	Muhammad Sholeh Thamrin	11-01-2016 s.d. Definitif 11-01-2016 to Definitive
Komisaris Commissioner	Suryo Eko Hadianto	09-08-2018 s.d. to 09-08-2022
Komisaris Commissioner	Sri Andini	08-07-2019 s.d. to 08-07-2021

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Direktur Utama President Director	Wibisono	15-11-2017 s.d. to 14-11-2021
Direktur Director	Hairul Aswad	14-06-2019 s.d. Definitif 14-06-2019 to Definitive
Direktur Keuangan Director of Finance	Ishvandono Yunaini	14-06-2019 s.d. Definitif 14-06-2019 to Definitive

Kinerja Keuangan Tahun 2017-2019 (USD)

Financial Performance in 2017-2019 (in USD)

Keterangan Description	2017	2018	2019
Total Aset Total Assets	440.947.491	437.731.818	437.570.172
Pendapatan Revenue	63.918.488	68.289.895	75.979.714
Jumlah Laba Tahun Berjalan Total Profit of the Year	17.968.635	13.494.467	24.508.405

PT KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA-BALI (KPJB)	
Profil Perusahaan PT Komipo Pembangkitan Jawa-Bali (KPJB) merupakan perusahaan Asosiasi PJB yang bergerak di bidang jasa <i>Operation & Maintenance, coal handling, jetty dan port management</i> pada PLTU Tanjung Jati B unit 3 & 4 yang berkapasitas 2x660 MW. PT KPJB didirikan pada tanggal 24 November 2010 dengan persentase kepemilikan saham PJB sebesar 49% dan Korea Midland Power sebesar 51%.	Company Profile PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali (KPJB) is an Associated Company of PT PJB operating in Operation & Maintenance Service, Coal Handling, Jetty and Port Management at CFPP Tanjung Jati B Unit 3 & 4 with capacity of 2 x 660 MW. PT KPJB was established on November 24, 2010 with PT PJB ownership percentage is 49% and Korea Midland Power is 51%.
Alamat Address Kantor Pusat Head Office PLTU Tanjung Jati B Jawa Bali Unit 3 & 4, Desa Tubanan, Kec. Kembang, Kab. Jepara, Jawa Tengah. Telp : 0291-4270493 Fax : 0291-4270601 Website : www.kpjb.co.id	

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2019

The composition of Board of Commissioners and Board of Directors in 2019

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Komisaris Utama President Commissioner	Ari Basuki	14-01-2019 s.d. Definitif 14-01-2019 to Definitive
Komisaris Commissioner	Noh Woong Hwan	16-08-2018 s.d. to 16-08-2021
Komisaris Commissioner	Sim Kab Young	13-12-2018 s.d. to 13-12-2021

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Direktur Utama President Director	Cheong Sung Kyo	01-01-2019 s.d. to 01-01-2022
Direktur Director	Kim Jonghyun	08-06-2018 s.d. to 08-06-2021
Direktur Director	Rudi Jauhar Musyafa	01-07-2019 s.d. Definitif 01-07-2019 to Definitive

Kinerja Keuangan Tahun 2017-2019 (Rp miliar)

Financial Performance in 2017-2019 (in Rp million)

Keterangan Description	2017	2018	2019
Total Aset Total Assets	125,19	150,43	149,12
Pendapatan Operasi Operating Revenue	213,66	223,38	230,17
Laba (Rugi) Usaha Operation Profit (Loss)	54,34	48,61	52,33



Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan Audit
Audited Financial Statements



Referensi Kriteria AR
AR Criteria Reference

PETA WILAYAH KERJA

OPERATIONAL REGION MAP



Index:

PLTA HPP
 PLTU CFPP
 PLTU Batubara CFPP
 PLTU Non Batubara Non-CFPP
 PLTU Gas/BBM Gas/Fuel FPP
 PLTG GTPP
 PLTGU CCPP
 PLTD DPP
 PLTS SPP
 PLTMG GEPP



Pembangkit Milik PJB

7.054 MW (8 Pembangkit)
 1 MW (Pembangkit Riset - PLTS Cirata)
 650 MW (Add On MTW 2-3-4)
 PJB's Generation Unit
 7.054 MW (8 Power Plants)
 1 MW (Research Plants - Cirata SPP)
 650 MW (Add-on MTW 2-3-4)

Beroperasi (7.054 MW)

1. Muara Karang
 PLTGU
 PLTU Gas/BBM
 909 MW
2. Muara Tawar
 PLTGU
 PLTU Gas/BBM
 1.778 MW
3. Cirata
 PLTA
 1.008 MW
4. Brantras
 PLTA
 275 MW
5. Gresik
 PLTGU, PLTU Gas/BBM
 2.219 MW
6. Paiton
 PLTU Batubara
 800 MW

7. Bawean

PLTMG
 3 MW
 8. Suppa
 PLTD
 62,4 MW

Pembangkit Riset (1 MW)

Research Plant (1 MW)
 9. Cirata
 PLTS 1 MW

Tahap Pengembangan

Konstruksi (650 MW)
 Construction Development
 Stage (650 MW)
 10. Add On MTW 2-3-4
 PLTGU 650 MW
 *Under construction,
 COD 2021



Jasa O&M Pembangkit PLN di Site PJB

1.468,3 MW (5 Pembangkit)
 O&M Service for PLN
 Power Plant at PJB Site
 1.468,3 MW (5 Power Plants)

1. Muara Karang Blok 2
 PLTGU
 710 MW
2. Muara Tawar Blok 5
 PLTGU
 242 MW
3. Ampel Gading
 PLTA
 2x5 MW
4. Wonorejo
 PLTA
 1x6,3 MW
5. Muara Karang Blok 3
 PLTGU
 500 MW



Jasa O&M FTP-1 Jawa

3.610 MW (5 Pembangkit)
 O&M Service FTP-1 Jawa
 3,610 MW (5 Power Plants)

1. Indramayu
 PLTU Batubara
 3x330 MW
2. Pacitan
 PLTU Batubara
 2x315 MW
3. Tanjung Awar-Awar
 PLTU Batubara
 2x350 MW
4. Rembang
 PLTU Batubara
 2x315 MW
5. Paiton 9
 PLTU Batubara
 1x660 MW



Jasa O&M Luar Jawa

1.068,3 MW (16 Pembangkit)
 Jasa O&M Luar Jawa
 1.068,3 MW (16 Pembangkit)

1. Arun
 PLTMG Gas
 19x9,7 MW
2. Tenayan
 PLTU Batubara
 2x110 MW
3. Tembilahan
 PLTU Batubara
 2x7 MW
4. Bangka
 PLTU Batubara
 2x30 MW
5. Belitang Baru
 PLTU Batubara
 2x16,5 MW
6. Ketapang
 PLTU Batubara
 2x10 MW
7. Pulau Pisau
 PLTU Batubara
 2x60 MW
8. Kaltim Teluk
 PLTU Batubara
 2x110 MW
9. Kendari 1-2
 PLTU Batubara
 2x10 MW
10. Kendari 3
 PLTU Batubara
 1x10 MW
11. Amurang
 PLTU Batubara
 2x25 MW
12. Tidore
 PLTU Batubara
 2x7 MW
13. Ropa (Ende)
 PLTU Batubara
 2x7 MW
14. Bolok
 PLTU Batubara
 2x16,5 MW
15. Anggrek
 PLTU Batubara
 2x25 MW
16. Ampana
 PLTU Batubara
 2x3 MW



Jasa O&M IPP 24 MW (1 Pembangkit)

IPP's O&M Service 24 MW (1 Power Plant)

1. Lhokseumawe
 PLTU GAS KKA
 2x12MW



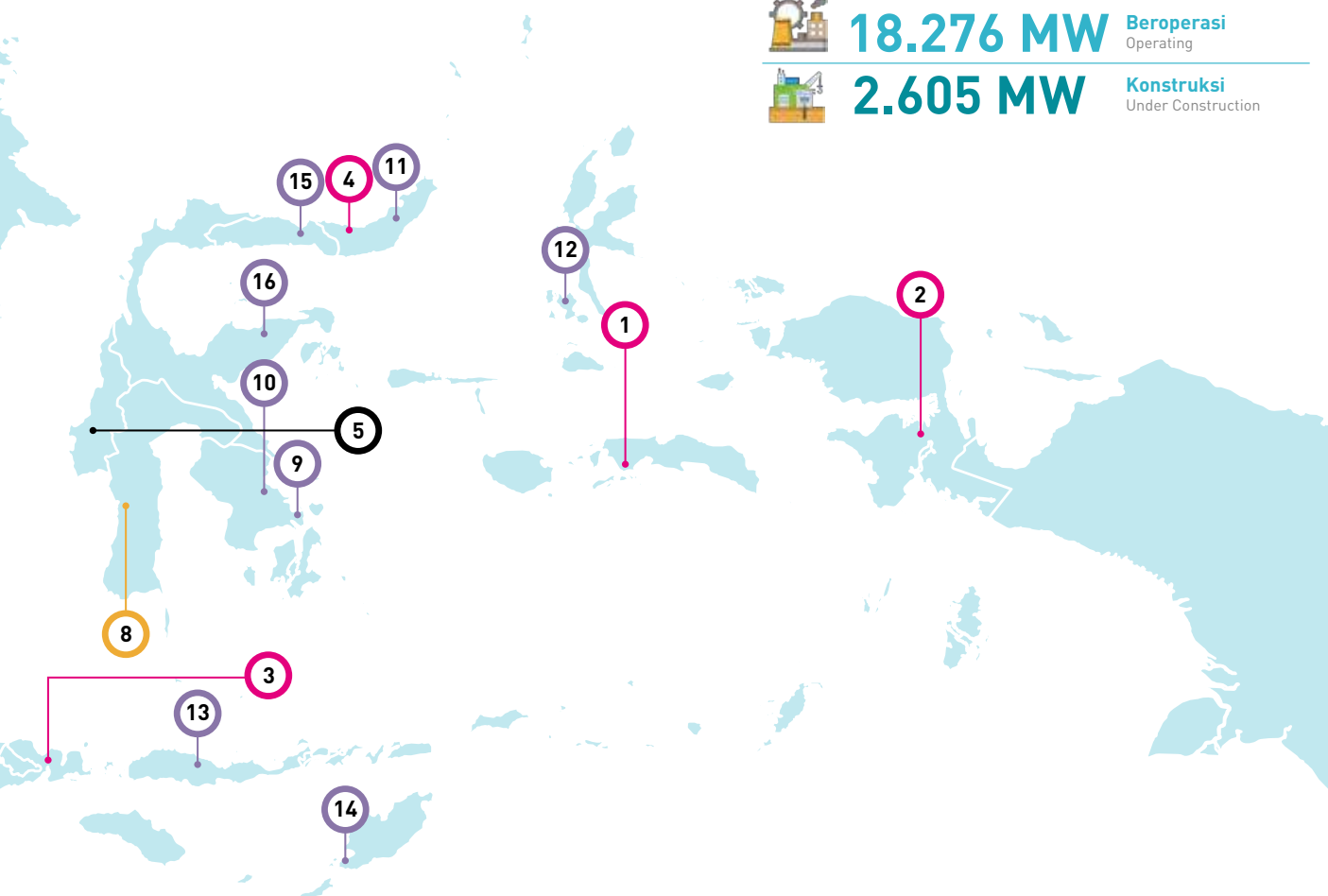
PJB Mengelola PJB Manage **20.881 MW** Pada Tahun 2019 In 2019



18.276 MW Beroperasi
Operating



2.605 MW Konstruksi
Under Construction



Kepemilikan Saham di IPP 5.665 MW (8 Pembangkit) Share Ownership in IPP 5,665 MW (8 Power Plants)

Beroperasi (3.710 MW) Operating (3,710 MW)

1. Asahan
PLTA 2x90 MW
(Saham PJB Shareownership 36,61%)
*termasuk Jasa O&M Pembangkit
*including O&M service provider
2. Banjarsari
PLTU Batubara 2x110 MW
(Saham PJB Shareownership 29,15%)
*termasuk Jasa O&M Pembangkit
*including O&M service provider
3. Jawa 7, Serang
PLTU Batubara 2x1.000 MW
(Saham PJB Shareownership 30%)
*Underconstruction
(PJB 30%)
*Underconstruction
4. Cilacap
PLTU Batubara 2x300 MW
Ekspansi 1, 1x660 MW
Ekspansi 2, 1x1.000 MW
(Saham Shareownership PJB 49%)
5. Mamuju
PLTU Batubara 2x25 MW
(Saham PJB Shareownership 10%)
PLTU Batubara 2x25 MW
(Saham PJB Shareownership 10%)

Tahap Pengembangan Konstruksi (1.955 MW) Construction Development Stage (1,955 MW)

6. Jawa 7 (Unit 2), Serang
PLTU Batubara 1x1.000 MW
(Saham PJB 30%)
*Underconstruction
(PJB Shareownership 30%)
*Under construction
7. Batang Toru
PLTA 4x127,5
(Saham PJB Shareownership 25%)
*Underconstruction, COD 2020
8. PLTS Terapung Cirata
PLTS 145 MW
(Konsorsium PJB - Masdar)
*PPA
(Consortium between PJB -
Masdar)
*PPA
9. Sumbagsel 1
PLTU Batubara 2x150 MW
(Saham PJB Shareownership 10%)

Jasa EPC [5 Pembangkit] Jasa EPC [5 Pembangkit]

1. Timika
PLTU 4x7 MW
*Nunggu Amandemen PLN
(saat ini konstruksi)
(underconstruction)
2. Bima
PLTU 2x10 MW
*fase konstruksi
underconstruction
3. Kepulauan Riau
PLTU 2x7 MW
4. Gorontalo
PLTU 2x25 MW
5. Banda Aceh (MPP)
PLTG 50 MW

Sewa Pembangkit Power Plant for Lease

1. Duri
PLTG 1x20 MW

Kepemilikan Saham di Perusahaan O&M 1.320 MW [1 Pembangkit] Share Ownership in O&M Companies 1,320 MW [1 Power Plant]

1. Tanjung Jati B #3 dan #4
PLTU Batubara 2x660 MW
(Jasa O&M dikelola oleh
KPJB - perusahaan JVC
dengan Komipo)
(O&M Services Managed by
KPJB - JVC company with
Komipo)

Unit Bisnis Pendukung [5 Unit Bisnis] Unit Bisnis Pendukung [5 Unit Bisnis]

1. PJB Academy
Surabaya, Jawa Timur
Surabaya, East Java
2. Unit Pelayanan Pemeliharaan
Wilayah Timur
Gresik, Jawa Timur
Maintenance Service Unit
of East Area
Gresik, East Java
3. Unit Pelayanan Pemeliharaan
Wilayah Barat
Jakarta
Maintenance Service Unit
of West Area
Jakarta
4. Badan Pengelola Waduk Cirata
Purwakarta, Jawa Barat
Cirata Reservoir Management Unit
Purwakarta, West Java
5. Unit Bisnis Jasa O&M Luar Jawa
Surabaya, Jawa Timur
O&M Service Business
Unit outside Java
Surabaya, East Java

ALAMAT KANTOR PERWAKILAN DAN UNIT USAHA

REPRESENTATIVE OFFICE AND BUSINESS UNIT ADDRESS

Kantor Perwakilan Representative Office



Gedung Menara Bidakara 2 Lantai 16 Menara Bidakara 2 Building Floor 16
Jl Jend Gatot Subroto Kav 71-73 Pancoran – Jakarta Selatan 12870
Phone : (021) 8370 8764-65
Fax : (021) 8370 8746
Email : ptpjbjkt@ptpjb.com

Alamat Unit Usaha Business Unit Address

Unit Pembangkitan (UP) PJB PJB Generation Unit (GU)

Unit Pembangkitan Gresik Gresik Generation Unit Jl. Harun Tohir Gresik 61112 Telp. : (62-31) 3981569, 3984540 Fax. : (62-31) 3981568 Email : upgrk@ptpjb.com	Unit Pembangkitan Muara Karang Muara Karang Generation Unit Jl. Raya Pluit Utara Nomor 2A Jakarta Utara 14450 Telp. : 62-21-6600054, 6692784 Fax. : 62-21-6692806 Email : upmkr@ptpjb.com
Unit Pembangkitan Muara Tawar Muara Tawar Generation Unit Desa Segara Jaya, Kec. Taruma Jaya Bekasi, Jawa Barat Telp. : (62-21) 88990052 Fax. : (62-21) 88990052 Email : upmtw@ptpjb.com	Unit Pembangkitan Cirata Cirata Generation Unit Desa Cadas Sari, Kec. Tegal Waru, Plered Purwakarta 41162 Telp. : (62-264) 270840, 270928 Fax. : (62-264) 270859 Email : upcrt@ptpjb.com
Unit Pembangkitan Brantas Brantas Generation Unit Jl. Basuki Rakhmad No.271 Karangates Sumberpucung, Malang 65165 Telp. : (62-341) 385545, 385546 Fax. : (62-341) 385462 Email : upbrs@ptpjb.com	Unit Pembangkitan Paiton Paiton Generation Unit Jl. Raya Surabaya – Situbondo KM 142 Paiton, Probolinggo 67291 Telp. : (62-335) 771805-9 Fax. : (62-335) 771810 Email : upptn@ptpjb.com
PLTD Suppa Suppa DEPP Watang Suppa, Pinrang Regency, Sulawesi Selatan	PLTMG Bawean Bawean GEPP Perikanan Bawean, Sungai Tlk. Sangkapura, Bawean, Jawa Timur 61181
PLTS Cirata (Pembangkit Riset) Cirata SPP (Research Generation) Desa Cadas Sari, Kec. Tegal Waru, Plered Purwakarta 41162 Telp. : (62-264) 270840, 270928 Fax. : (62-264) 270859	

Unit Pelayanan Pemeliharaan Maintenance Unit

Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah Timur (UPHT) Maintenance Service Unit of East Area (MSUEA) Jl. Harun Tohir Gresik 61112 Telp. : (62-31) 3975580-84 Fax. : (62-31) 3972940 Email : upht@ptpjb.com	Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah Barat (UPHB) Maintenance Service Unit of West Area (MSUWA) Jl. Raya Pluit Utara Nomor 2A Jakarta Utara 14450 Telp. : 62-21-6620594, 6620595 Fax. : 62-21-6613190 Email : uphb@ptpjb.com

Jasa O&M (Operation & Maintenance) Operation & Maintenance Service	
UBJOM (Unit Bisnis Jasa O&M) Rembang Rembang Operation & Maintenance Services Business Unit (OMSBU) Jalan Raya Semarang-Surabaya Km. 130, Sluke-Rembang 59272, Jawa Tengah-Indonesia Telp. : (0295) 4552792, (0295) 4552791 Fax. : (0295) 4552791	UBJOM (Unit Bisnis Jasa O&M) Indramayu Indramayu Operation & Maintenance Services Business Unit (OMSBU) Desa Sumur Adem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu 45257 Telp. : (0234) 5613236 Fax. : (0234) 5613236
UBJOM (Unit Bisnis Jasa O&M) Pacitan Pacitan Operation & Maintenance Services Business Unit (OMSBU) Jalan Raya Pacitan-Trenggalek Km. 55, Desa Sukorejo, Kec. Sudimoro, Kab. Pacitan Telp./Fax. : (0357) 442311	UBJOM (Unit Bisnis Jasa O&M) Paiton Paiton Operation & Maintenance Services Business Unit (OMSBU) Jalan Surabaya-Situbondo Km. 141, Paiton-67291 Telp. : (0335) 771668 Fax. : (0335) 771669
UBJOM (Unit Bisnis Jasa O&M) Tanjung Awar-awar Tanjung Awar-awar Operation & Maintenance Services Business Unit (OMSBU) Jalan Tanjung Awar-awar, Desa Wadung, Kec. Jenu, Kab Tuban 62352, Jawa Timur Telp. : (62-356) 320320 Fax. : (62-356) 329090	Jasa O&M PLTGU Muara Karang Blok 2 Muara Karang Block 2 CFPP O&M Service Jl. Raya Pluit Utara Nomor 2A Jakarta Utara 14450 Telp. : 62-21-6600054, 6692784 Fax. : 62-21-6692806 Email : upmkr@ptpjb.com
Jasa O&M PLTGU Muara Tawar Blok 5 Muara Tawar Block 5 CFPP O&M Service Desa Segara Jaya, Kec. Taruma Jaya Bekasi, Jawa Barat Telp. : (62-21) 88990052 Fax. : (62-21) 88990052 Email : upmtw@ptpjb.com	Jasa O&M PLTA Ampel Gading Ampel Gading HPP O&M Services Kalituri, Wonorejo, Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66262
Jasa O&M PLTA Wonorejo Wonorejo HPP O&M Service Purwoharjo, Ampelgading, Malang, Jawa Timur 65183	Jasa O&M PLTGU Muara Karang Blok 5 Muara Karang Block 5 CFPP O&M Service Jl. Raya Pluit Utara Nomor 2A Jakarta Utara 14450 Telp. : 62-21-6600054, 6692784 Fax. : 62-21-6692806 Email : upmkr@ptpjb.com
UBJOM (Unit Bisnis Jasa O&M) IPP – PLTU Lhokseumawe Lhokseumawe IPP – PLTU Operation & Maintenance Services Business Unit (OMSBU) Ds. Jamuan, Kec. Banda Baro, Kab, Aceh Utara, Prov Aceh 24352	UBJOM (Unit Bisnis Jasa O&M) PLTMG Arun Arun Gas GEPP OMSBU Jl. Medan Banda Aceh Komp PT ARUN NGL Gate 53, Kec. Muara Satu, Lhokseumawe, NAD
UBJOM (Unit Bisnis Jasa O&M) PLTU Tenayan Tenayan CFPP OMSBU Kawasan Industri Tenayan, Kel. Sail, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru <i>Temporary Office</i> Jl. Hangtuah No. 29 Pekanbaru-Riau Fax : (0761) 7870013	UBJOM (Unit Bisnis Jasa O&M) PLTU Tembilahan Tembilahan CFPP OMSBU Sungai Perak, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir
UBJOM (Unit Bisnis Jasa O&M) PLTU Bangka Bangka CFPP OMSBU Jl. Lintas Timur Desa Air Anyir, Kec. Merawang Kab. Bangka - Bangka Belitung, Kode Pos 33172	UBJOM (Unit Bisnis Jasa O&M) PLTU Belitung Baru Belitung Baru CFPP OMSBU Desa Pengantungan, Kec. Badau Kab. Belitung
UBJOM (Unit Bisnis Jasa O&M) PLTU Ketapang Ketapang CFPP OMSBU Suka Bangun Dalam, Delta Pawan, Ketapang, Kalimantan Barat 78813	UBJOM (Unit Bisnis Jasa O&M) PLTU Pulang Pisau Pulang Pisau CFPP OMSBU Desa Buntoi, Jl. Trans kalimantan, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau
UBJOM (Unit Bisnis Jasa O&M) PLTU Teluk Balikpapan Teluk Balikpapan CFPP OMSBU Jl. PLTU No 1 Kawasan Industri Karangriau KM .13 Kel. Karangriau, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	UBJOM (Unit Bisnis Jasa O&M) PLTU Kendari Kendari CFPP OMSBU Desa Nii Tanasa, Kec. Lalonggasumeeto Kab. Kendari - Sulawesi Tenggara, Kode Pos 93126
UBJOM (Unit Bisnis Jasa O&M) PLTU Amurang Amurang CFPP OMSBU Jl. Raya Trans Sulawesi, Amurang – Tawang Kab. Minahasa Selatan - Sulawesi Utara, Kode Pos 95954	UBJOM (Unit Bisnis Jasa O&M) PLTU Tidore Tidore CFPP OMSBU Desa Rum Balibunga, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara

Jasa O&M (Operation & Maintenance) Operation & Maintenance Service	
UBJOM (Unit Bisnis Jasa O&M) PLTU Ropa Ropa CFPP OMSBU Jl. Trans Utara, Dusun Ropa, Desa Kaliwumbu Kec. Mourole, Kab. Ende - Flores NTT, Kode Pos 86351	UBJOM (Unit Bisnis Jasa O&M) PLTU Bolok Bolok CFPP OMSBU Kawasan Industri Bolok Desa Bolok, Kec. Alak, Kab. Kupang - NTT, Kode Pos 85231
UBJOM (Unit Bisnis Jasa O&M) PLTU Anggrek Anggrek CFPP OMSBU Ilangata, Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo 96525	UBJOM (Unit Bisnis Jasa O&M) PLTU Ampana Ampana CFPP OMSBU Jalan trans sulawesi, Sabo, Ampana Tete, Tojo Una-Una Regency, Central Sulawesi

Kepemilikan Saham di IPP Share Ownership in IPP	
PLTA Asahan Asahan HPP Komplek PT Bajradaya Sentranusa Simangkuk - Desa Tangga Batu, Kecamatan Permakian, Porse Kab. Toba Samosir, Sulawesi Utara	PLTU Banjarsari Banjarsari CFPP Jl. Lintas Tengah Sumatera, Sirah Pulau Village & Gunung Kembang Village, East Merapi District, Lahat Regency, South Sumatera Province, Indonesia
PLTU Jawa 7 Jawa 7 CFPP Desa Terate, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten	PLTU Cilacap Cilacap CFPP Jl. Lingkar Timur Karang Kandri, Kecamatan Kesugihan, Cilacap Telp. : (0282) 538863 Fax. : (0282) 538863
PLTU Mamuju Mamuju CFPP Belang-Belang, Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat 91561	PLTA Batang Toru Batang Toru HPP Desa Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara
PLTS Terapung Cirata Cirata Floating SPP Desa Cadas Sari, Kec. Tegal Waru, Plered Purwakarta 41162 Telp. : (62-264) 270840, 270928 Fax. : (62-264) 270859	PLTU MT Sumbagsel 1 MT Southern Sumatera 1 CFPP Jalan Cideng Barat 32-33, Jakarta Pusat 10150. Telp. : +62 21 63858 999 Fax. : +62 21 63860 823

Kepemilikan Saham di Perusahaan O&M Share Ownership in O&M Companies
PLTU Tanjung Jati B #3 dan #4 Tanjung Jati B CFPP #3 and #4 Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Sekuping, Tubanan, Kembang, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59453 Telp. : (0291) 772121

Bisnis Penunjang Supporting Business	
Badan Pengelola Waduk Cirata (BPWC) Cirata Reservoir Management Unit (CRMU) Jl. Raya Cirata, Kecamatan Cipundeuy, Kabupaten Bandung 40558, Jawa Barat Telp. : (62-22) 6970818-9 Fax. : (62-22) 6970720	Unit Pengembangan (UBANG) Business Development Unit (UBANG) Gedung Menara Bidakara 2 Lantai 16 Jl Jend Gatot Subroto Kav 71-73 Pancoran - Jakarta Selatan 12870 Telp. : (62-21) 83708764-65 Fax. : (62-21) 83708746 Email : upas@ptpjb.com
PJB Academy Jl. Raya Jemursari No.185, Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota SBY, Jawa Timur 60237 Telp. : (031) 99841946 Fax. : (62-21) 29023227	Unit Bisnis Jasa O&M Luar Jawa - 2 O&M Service Business Unit of Outside Java-2 Raya Jemursari No.216 Surabaya, 60239 Telp. : 031-99845628

LEMBAGA PROFESI PENUNJANG PERUSAHAAN

SUPPORTING INSTITUTIONS & PROFESSIONALS OF THE COMPANY

Kantor Akuntan Publik

Public Accounting Firm

Nama Lembaga Institution Name	Alamat Address	Kontak Contact
Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM)	Plaza Asia Level 10 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 56, Jakarta 12190	Telp. : 021-51401340 Fax. : 021-51401350 Website : www.rsm.id

Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)

Public Appraiser

Nama Lembaga Institution Name	Alamat Address	Kontak Contact
KJPP MBPRU (Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan)	Kindo Office Square AS Jl. Duren Tiga Raya No. 101 Jakarta Selatan 12760 Indonesia	Telp. : 021-791-84336 Fax. : 021-791-84287 Website : www.kjpp-mbpru.com Email : pusat@mbpru.co.id

Notaris

Notary

Nama Lembaga Institution Name	Alamat Address	Kontak Contact
Lenny Janis Ishak, S.H.	Jl. Hang Lekir IX No.1 Kebayoran Baru Jakarta 12120	Telp. : 021-7221077 Fax. : 021-7233855
H. Achmad Salis, S.H.	Ruko Ngagel Jaya Indah A-63 Surabaya	Telp. : 031-5037649 Fax. : 031-5037649
Rooswahyono, S.H.	Jl. Gubeng Kertajaya 1 E No. 8, Surabaya	Telp. : 031-8121626298

Konsultan Keuangan

Financial Consultant

Nama Lembaga Institution Name	Alamat Address	Kontak Contact
SF Consulting (Konsultan Pajak)	Menara Karya 21 st Floor Jl. H. Rasuna Said Blok X - 5 Kav. 1-2, Jakarta 12950	Telp. : 021-57944548 Website : www.sfconsulting.co.id
TGA+AU Partners (Konsultan Penerapan PSAK 71,72&73)	Wisma Staco 6th Floor Jl. Casablanca Kav. 18, Jakarta 12960	Telp. : 021-8319609 Website : www.au-partners.com
PT Prima Wahana Caraka	Plaza 89, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. X-7 No. 6 Jakarta 12940	Telp. : 021-5212901
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	3 Temasek Ave, No.3 #06-01 039190 Centennial Tower, Singapore 039190	Telp. : +65 - 6882 0001
MUFG (The Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ, Ltd.	#23-01 Marina One East Tower	Telp. : +65 - 6538 3388
Mizuho Bank, Ltd.	1-5-5 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, Jepang	Telp. : +81 3-3214-1111
Deloitte	The Plaza Office Tower 32 nd floor, Jl. M. H. Thamrin Kav. 28-30, Jakarta 10350	Telp. : 021-2992 3100



Konsultan Bisnis Business Consultant

Nama Lembaga Institution Name	Alamat Address	Kontak Contact
PT LETMI ITB	Komplek Sabuga, Jln. Taman Sari No. 73 Bandung, Jawa Barat, Indonesia 40132	Telp. : (022) 2511546 Fax. : (022) 2509336 Website : www.letmi-itb.com
PT Bakti Infranesia Bimasakti	Graha Tirtadi, 2 floor Jl. Wolter Monginsidi No. 71 Kebayoran Baru, Jakarta 12810	Telp. : 021 - 27515208 Fax. : 021 - 27515225 Website : www.infranesia.id
PT Resolusi Risiko Indonesia	Tifa Arum Realty, Lt 3 Ruang 306 Jl. Kuningan Barat 1 No. 26 Mampang Prapatan, Kuningan Barat Jakarta Selatan 12710	Telp. : (021) 522 3935 Email : info@myriskresolution.com Website : www.myriskresolution.com
PT Indonesia Comnet Plus	JL. KH. Abdul Rochim No.1 Kuningan Barat, Mampang, Jakarta Selatan 12710	Telp. : 021 - 5253019 Fax. : 021 - 5253659 Website : www.iconpln.co.id
PT McKinsey Indonesia	Wisma GKBI, Lt. 40 Jl. Jendral Sudirman No.28, Jakarta 10210	Telp. : 021 - 57986600 Website : www.mckinsey.com
PT Rekadaya Elektriika Consult	BNI Wisma 46 Kota Jl. Jendral Sudirman No.Kav.1, Jakarta 10220	Telp. : 021 - 5721375 Website : https://www.reconsult.co.id/
PT PricewaterhouseCoopers Indonesia Advisory	Plaza 89 Jl. H.R. Rasuna Said kav. X-7 No. 6 Jakarta 12940, Indonesia	Telp. : 021-5212901
KPMG Siddharta Advisory	Wisma GKBI Lt 35 Jl. Jendral Sudirman no. 28, Jakarta, 10210	Telp. : 021-5740877/5740313
PT POYRY Indonesia	Graha CIMB Niaga 8 th Floor Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Senayan, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Jakarta 12190	Telp. : 021 - 2526668
PT Marsh Indonesia	World Trade Center 3, 16 th Floor Jl. Jend. Sudirman No.Kav 29-31, Kuningan, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920	Telp. : 021 - 57978100
Poyry Energy Ltd.	Vanit Building II ,22 nd floor New Petchburi Road, Rajchthewi, Bangkok 10400	Telp. : +66 - 2657 1000
Kwarsa Hexagon	Jl. Rancabolang No. 36, Bandung 40286	Telp. : 022 - 7562107
PT Worley Parsons Indonesia	Jl. K.H. Mas Mansyur No.12, Karet Tengsin, Jakarta Pusat 10220	Telp. : (021) 5746218
SS&A Power Consultancy GmbH	Landstrasse 99, CH-5430 Wettingen, Switzerland	Telp. : +41 (0)56 222 8009 Website : www.ssa-power.com
Bonum Engineering and Consultancy GmbH	Rathaussestrasse 7, CH-6430 Baar, Switzerland	Telp. : +41 (0) 41 768 91 23 Website : www.bonumec.com

Konsultan Hukum Legal Consultant

Nama Lembaga Institution Name	Alamat Address	Kontak Contact
Murdon Lawfirm	Mitra Building 9th floor, Suite 902 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 21 Jakarta 12930	Telp. : 021-5220027
Kantor Hukum Citra Lentera Hukum	Gedung Akaba Jalan Sunan Kalijaga No. 63A Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160	Telp. : 021 7263058 Email : ayu.riyanto@gmail.com sirianlho@gmail.com
Prime Solution Associate	Radio Dalam Square Jl. Radio Dalam No. 4 Gandaria Utara Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12140	Telp. : 021 – 27933023 Website : www.primesolution.co.id
UMBRA Partnership	Telkom Landmark Tower, Tower 2, 49th Floor, Jakarta	Telp. : (+62) 21 5082 0999
HHP Law Firm	Pacific Century Place Lt. 35 Sudirman Central Business District Lot 10, Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190	Telp. : (+62) 2129608888
Ginting & Reksodiputro in association with Allen & Overy	The Energy Building, 15F SCBD Lot 11A Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53, Jakarta, 12190	Telp. : 021 - 29951700
Lubis Ganie Surowidjojo	Menara Imperium Lt. 30 Jl. H. Rangkayo Rasuna Said Kav. 1, Kuningan, Jakarta, 12980	Telp. : 021- 8315005
Latham & Watkins (Internasional)	9 Raffles Place #42-02 Republic Plaza, Singapura 048619	Telp. : +65 - 6536 1161
Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro (ABNR)	Graha CIMB Niaga Lt.24, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190, Indonesia	Telp. : 021 – 250 5125/5136

KRONOLOGIS PENCATATAN SAHAM CHRONOLOGY OF SHARE LISTING

Sampai dengan tahun 2019, PJB belum pernah mencatatkan saham di Bursa Saham dan di Bursa Efek, sehingga tidak ada informasi terkait kronologis pencatatan, jenis tindakan korporasi (*corporate action*), perubahan jumlah saham, maupun nama bursa tempat saham dicatatkan.

As of 2019, PJB has not listed its shares on any Stock Exchange. Therefore, there is no information on listing chronology, types of corporate action, change in the number of shares as well as name of the exchange on which the share is listed.

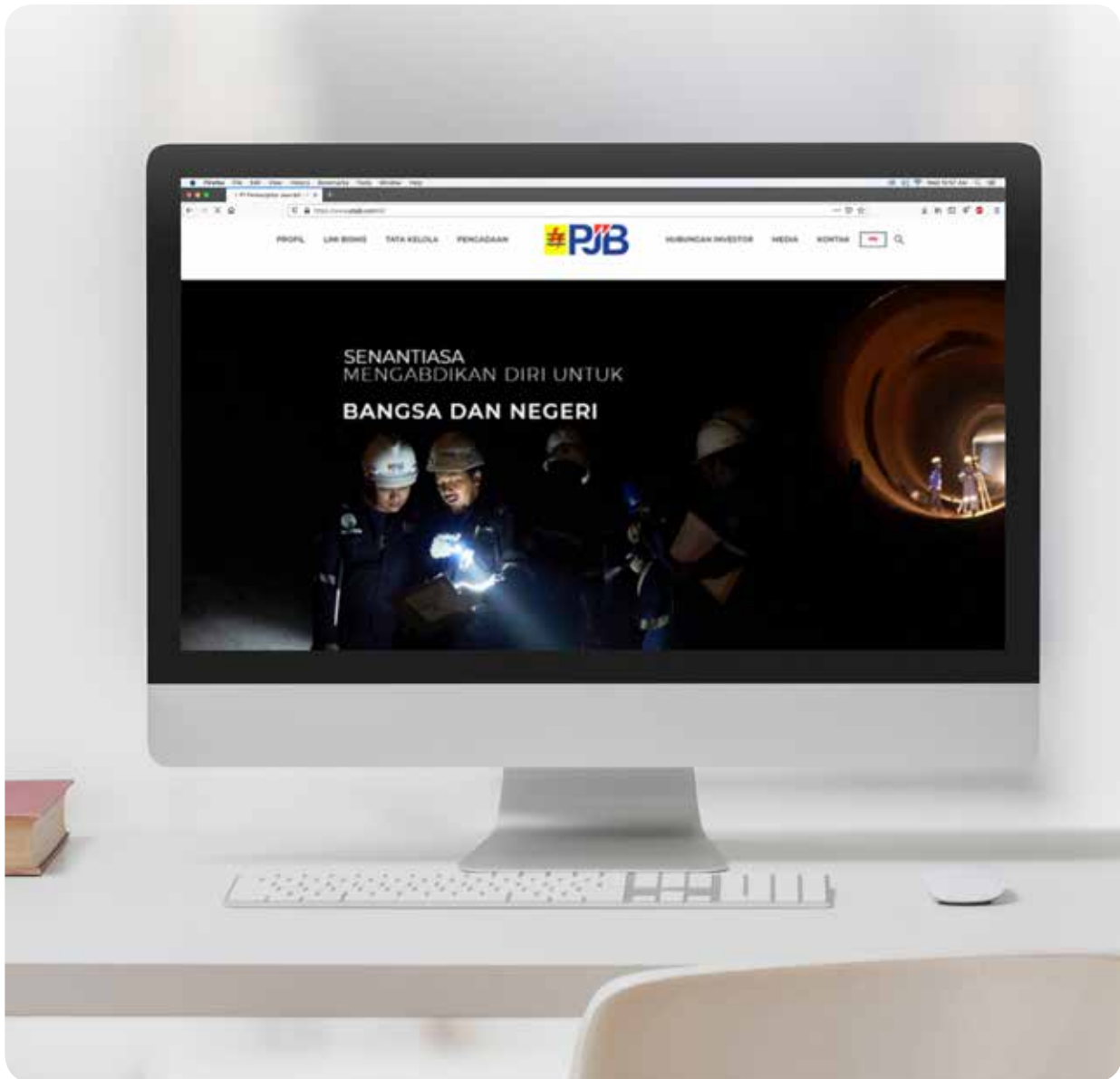
KRONOLOGIS PENCATATAN EFEK LAINNYA CHRONOLOGY OF OTHER SECURITIES

Sampai dengan tahun 2019, PJB belum pernah mencatatkan efek lainnya di Bursa Saham dan di Bursa Efek, sehingga tidak ada informasi terkait kronologis pencatatan efek, jenis tindakan korporasi (*corporate action*), perubahan jumlah efek, nama bursa maupun peringkat efek.

As of 2019, PJB has not listed other securities on any Stock Exchange. Therefore, there is no information on securities listing chronology, types of corporate action, change in the number of securities as well as name of the exchange and securities rating.



INFORMASI *WEBSITE* PJB INFORMATION ON COMPANY WEBSITE



PJB berkomitmen untuk terus meningkatkan keterbukaan informasi bagi publik sebagaimana amanat Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik yang sejalan dengan implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik melalui penyampaian informasi dalam *website* korporasi.

PJB is committed to the continuous improvement of public information disclosure as mandated in Law on Public Information Disclosure which is in line with the principles of Good Corporate Governance through the information delivery on the corporate website.

Situs web resmi PJB dapat diakses di <http://www.ptpjb.com>, tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Situs web PJB menyajikan informasi secara komunikatif dan *update* mengenai PJB yang diperlukan oleh segenap pemangku kepentingan maupun masyarakat umum sesuai dengan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi bagi publik.

Website PJB dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat luas, mencakup informasi antara lain:

1. Informasi terkait Perusahaan

Profil Perusahaan, Profil Manajemen, Struktur Kepemilikan Saham, PJB Group, Perjalanan PJB, Struktur Organisasi, Budaya Perusahaan, dan Penghargaan serta Sertifikasi.

2. Informasi terkait Lini Bisnis

Unit Pembangkit, Jasa Operasi dan Pemeliharaan, Pendanaan Investasi, *Engineering, Procurement & Construction*, Layanan Suku Cadang.

3. Informasi terkait LK 3 dan CSR

Kebijakan K3, Praktek K3, Kebijakan CSR, Program CSR

4. Informasi terkait Tata Kelola Perusahaan

Whistle Blowing System, Pedoman Kerja Direksi dan Dekom, Pedoman Tata Kelola Perusahaan, Standar Etika Perusahaan, PJB Bersih, Informasi RUPS, Penilaian Tata Kelola Perusahaan, Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa, dan Piagam Internal Audit.

5. Informasi Pengadaan

E-Procurement dan Pendaftaran Daftar Penyedia Perusahaan

6. Informasi tentang Media PJB

Info PJB, *Flash News* dan *Event*, *Press Release* serta *Complain Management*.

7. Informasi terkait Tata Kelola Perusahaan

Pedoman Kinerja Direksi dan Dekom, Pedoman Tata Kelola Perusahaan, Pedoman Perilaku, PJB Bersih, Penilaian Tata Kelola Perusahaan.

8. Informasi terkait Hubungan Investor:

Laporan Keuangan, Laporan Tahunan, Ikhtisar Data Keuangan, Laporan Keberlanjutan, Statistik Perusahaan dan Publikasi Posisi Keuangan.

Informasi tambahan dapat dilihat di bagian Akses Informasi dan Data Perusahaan pada Bab Tata Kelola Perusahaan.

PJB's official website can be accessed at <http://www.ptpjb.com>, available in Indonesian and English. The PJB website presents communicative information and updates about PJB that are needed by all stakeholders and the general public following the principles of transparency and information disclosure for the public.

The PJB website can be accessed easily by the wider community, including information including:

1. Information Related to Company

Company Profile, Management Profile, Shares Ownership Structure, PJB Group, PJB Milestone, Organization Structure, Business Strategy, Corporate Culture and Awards, and Certifications.

2. Information related to Lines of Business

Generation Unit, Operation and Maintenance Service, Investment Financing, Engineering, Procurement & Construction, Spare-Part Service.

3. Information Related to HSE and CSR

HSE Policy, HSE Practice, CSR Policy, CSR Program.

4. Information Related to Corporate Governance

Whistleblowing System, Board of Directors and Board of Directors Work Manual, Corporate Governance Codes, Code of Conduct, PJB Bersih, GMS Information, Assessment of Good Corporate Governance, General Guidelines for Procurement of Goods and Services, and Internal Audit Charter.

5. Information Related to Procurement

E-Procurement and Registration of Companies Providers

6. Information Related to PJB Media

Info PJB, Flash News dan Event, Press Release and Complain Management.

7. Information Related to Corporate Governance

Whistleblowing System, Board of Directors and Board of Directors Work Manual, Corporate Governance Codes, Code of Conduct, PJB Bersih, GMS Information, Assessment of Good Corporate Governance

8. Information Related to Investor Relation

Financial Statements, Annual Report, Financial Highlights, Sustainability Report, and Corporate Statistics.

Additional information can be seen in the Access to Corporate Information and Data section in the Corporate Governance Chapter.





Pendahuluan
Introduction



Laporan Manajemen
Management Report



Profil Perusahaan
Company Profile



Tinjauan Pendukung Bisnis
Business Support Review



Analisis dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis



TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS

BUSINESS SUPPORT REVIEW





Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan Audit
Audited Financial Statements



Referensi Kriteria AR
AR Criteria Reference

PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM (PJB-IMS)

PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM (PJB-IMS)

PJB menjadi perusahaan pertama di Indonesia yang meraih Sertifikasi PAS 99, sebuah penghargaan internasional terhadap kualitas implementasi sistem manajemen terintegrasi.

PJB became the first company in Indonesia to achieve PAS 99 Certification, an international award for the integrated management system implementation quality.

Sertifikasi PAS 99 PJB membuktikan bahwa penerapan PJB-IMS di lingkungan Perusahaan mempunyai andil dalam memaksimalkan efektivitas dan efisiensi roda operasional Perusahaan. Melalui implementasi PJB-IMS, seluruh sistem yang diimplementasikan di PJB dapat terpadu dan selaras. Selain itu, implementasi PJB IMS membuat dokumentasi sistem manajemen menjadi lebih ringkas serta memudahkan pemeliharaan atas berbagai sistem manajemen dengan mengeliminasi dan mengurangi dokumentasi serta mengurangi duplikasi. Proses audit juga dapat diintegrasikan dan frekuensinya dapat dikurangi. Secara keseluruhan, implementasi PJB-IMS menghadirkan efisiensi bagi Perusahaan melalui penghematan waktu, biaya, dan minimalisasi gangguan kegiatan bisnis.

PJB-IMS mengintegrasikan standar internasional *Baldrige Excellence Framework* (BEF), ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001, ISO 55001, ISO 20000-1, ISO 27001, ISO 22301, ISO 17025, ISO 19600, ISO 31001, ISO 9001, ISO 22301, ISO 26001, SMK3, SMP, Sistem Manajemen lain yang terintegrasi dengan PJB-IMS.

PAS 99 PJB certification proves that the PJB-IMS implementation within the Company has a role in maximizing the effectiveness and efficiency of the Company's operations. Through PJB-IMS implementation, all systems implemented in PJB can be integrated and harmonious. In addition, the IMS PJB implementation makes management system documentation more concise and facilitates various management systems maintenance by eliminating and reducing documentation and reducing duplication. The audit process can also be integrated and the frequency can be reduced. Overall, PJB-IMS implementation brings efficiency to the Company through time, cost savings, and business disruption minimization.

PJB-IMS integrates the international standard *Baldrige Excellence Framework* (BEF), ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001, ISO 55001, ISO 20000-1, ISO 27001, ISO 22301, ISO 17025, ISO 19600, ISO 31001, ISO 9001, ISO 22301, ISO 26001, SMK3, SMP, other Management Systems integrated with PJB-IMS.

Pengelola PJB-IMS

PJB-IMS Management

Pengelola PJB-IMS adalah Satuan Kinerja Korporat dan Pengembangan Sistem Manajemen khususnya Bidang Pengembangan Sistem Manajemen. Hal ini berdasarkan Peraturan Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali Nomor 010.P/019/DIR/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pembangkitan Jawa-Bali. Pengelola PJB-IMS berada dibawah Satuan Kinerja Korporat & Pengembangan Sistem Manajemen dan membawahi 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Kinerja Korporat, Bidang Teknologi Informasi, Bidang Pengembangan Sistem Manajemen dan Manajemen Aset.

The PJB-IMS Management is the Corporate Performance Unit and Management System Development specifically Department of Management System Development. This is in accordance with the Board of Directors of PT Pembangkitan Jawa-Bali No. 010.P / 019 / DIR / 2019 concerning the Organization and Work Procedure of PT Pembangkitan Jawa-Bali. The PJB-IMS Management is under the Corporate Performance Unit & Management System Development and supervises 3 (three) Departments, namely Corporate Performance Department, Information Technology Department, Asset Management and Development Systems Department.

Tata Kelola dan Lingkup PJB-IMS

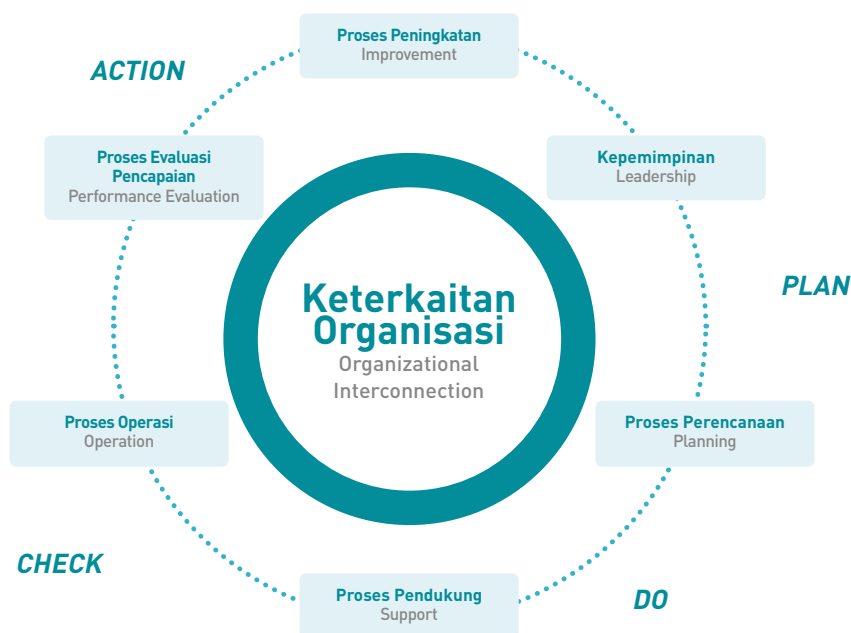
PJB-IMS Governance and Scope

PJB-IMS merupakan penyempurnaan dari berbagai proses sistem integrasi termasuk interelasi diantara proses-proses yang digambarkan dalam bagan Proses Bisnis atau Sistem Kerja menurut *Baldrige Excellence Framework*. PJB menetapkan, mengimplementasikan, mendistribusikan, memelihara, meninjau ulang, dan menyempurnakan PJB-IMS sesuai kebutuhan. Hal ini sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 028.K/020/ DIR/2016 tentang Implementasi PJB *Integrated Management System* (PJB-IMS) PT Pembangkitan Jawa-Bali. Dalam proses penyusunan PJB-IMS, PJB merujuk pada konsep *Plan Do Check Action* (PDCA) ISO 9001:2008 sebagai kerangka *Integrated Process*.

PJB-IMS is a refinement of various systems integration processes including interrelation among the processes described in the Business Process or Work System chart in accordance with the Baldrige Excellence Framework. PJB establishes, implements, distributes, maintains, reviews, and completes PJB-IMS as needed. This is in accordance with Board of Directors Decree Number 028.K/020/DIR/2016 concerning the PJB Integrated Management System (PJB-IMS) Implementation of PT Pembangkitan Jawa-Bali. In the process of preparing PJB-IMS, PJB refers to the Plan Do Check Action (PDCA) of ISO 9001: 2008 concept as the Integrated Process framework.

Skema Proses Plan Do Check Action

Plan Do-Check Action Scheme



Dalam skema di atas dihasilkan dan dikendalikan melalui delapan langkah-langkah proses integrasi sebagai berikut:

- Pemetaan Bisnis Proses dan Interaksi prosesnya,
- Identifikasi Diagram Konteks dan kesesuaian dengan Tupoksi Organisasi dan masing-masing Unit,
- Alignment standard* yang digunakan dengan menghilangkan duplikasi Prosedur dan Format, Uji dan Review proses-proses,
- Pengembangan Kebijakan, *objective*, *target* dan *Action Plan* Sistem Integrasi,
- Menetapkan Manual Integrasi dan pengembangan *Generic Procedure* yang berlaku dalam sistem integrasi,
- Melaksanakan pelatihan pemahaman dan sosialisasi sebelum Penerapan PJB-IMS,

Based on the scheme above, it is generated and controlled through eight steps of integration process as follows:

- Business Processes and Process Interaction Mapping,
- Identification of Context Diagrams and suitability with the main tasks and function for the organization and each Unit,
- Applied alignment standard through eliminating duplication of Procedure and Format, Test, and, Review of processes,
- Policy Development, Objective, Target, and Action Plan Integrated System,
- Establishment of Integrated Manual and Generic Procedure development that apply in integrated systems,
- Implementation of knowledge and socialization training prior to the Implementation of PJB-IMS,

- g. Melaksanakan pemantauan dan peningkatan berkelanjutan terhadap Sistem Integrasi,
- h. Penjaminan *conformance* proses Sistem Integrasi terkait pemenuhan persyaratan standar-standar manajemen, melalui suatu badan sertifikasi.

- g. Implementation of continuous monitoring and improvement towards Integrated System,
- h. Conformance process Guarantee for the Integrated System process related to the fulfillment of management standard requirements through a Certification department.

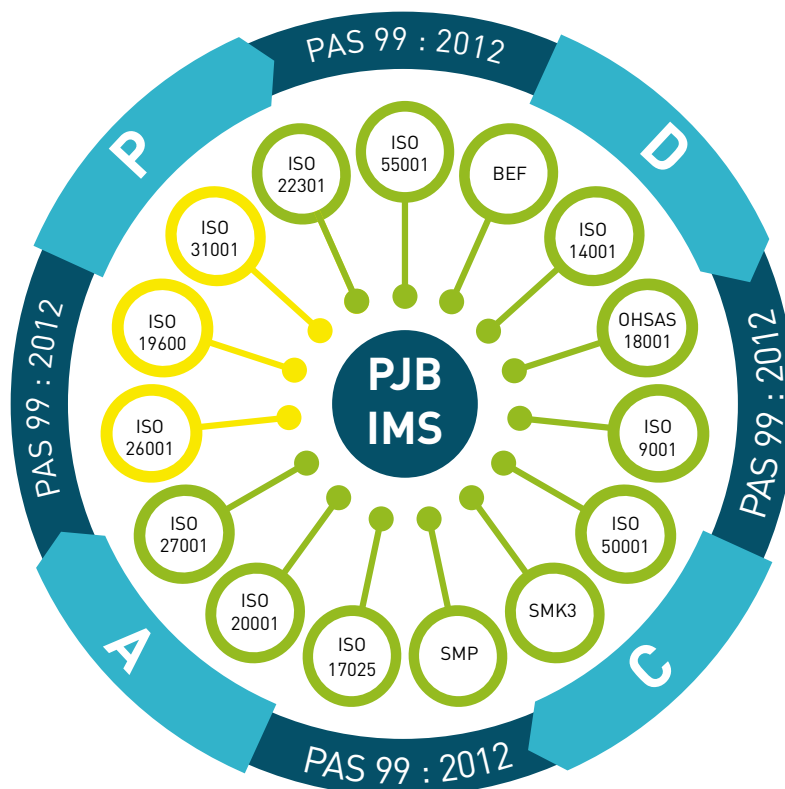
Adapun sistem manajemen yang diadopsi PJB dalam PJB-IMS meliputi beberapa sistem manajemen sebagai berikut:

The management system adopted by PJB in the PJB-IMS includes several management systems as follows:

Tabel Sistem Manajemen yang Diadopsi dalam PJB-IMS

Table of Management Systems Adopted in PJB-IMS

Sistem Manajemen Management System	Keterangan Penerapan Application Description
Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Quality management system ISO 9001: 2008	Seluruh persyaratan klausul diterapkan kecuali Klausul 7.3 Design and Development, dikarenakan kegiatan ini tidak dilakukan oleh PJB All requirement clauses are applied except Clause 7.3 on Design and Development since this activity is not conducted by PJB
Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2004 Environmental Management System ISO 14001: 2004	seluruh persyaratan klausul diterapkan All requirement clauses are applied
Sistem Manajemen K3 OHSAS 18001:2007 OHS Management System OHSAS 18001: 2007	seluruh persyaratan klausul diterapkan All requirement clauses are applied
Sistem Manajemen Energi ISO 50001:2011 Energy Management System ISO 50001: 2011	seluruh persyaratan klausul diterapkan All requirement clauses are applied
Sistem Manajemen Aset ISO 55001:2014 Asset Management System ISO 55001:2014	seluruh persyaratan klausul diterapkan All requirement clauses are applied
Sistem Manajemen Keberlangsungan Usaha/Bisnis ISO 22301:2012 Business Continuity Management System ISO 22301:2012	seluruh persyaratan klausul diterapkan All requirement clauses are applied
Kriteria Baldrige Baldrige Criteria	seluruh dokumen kriteria All criteria documents





Level Dokumentasi PJB-IMS

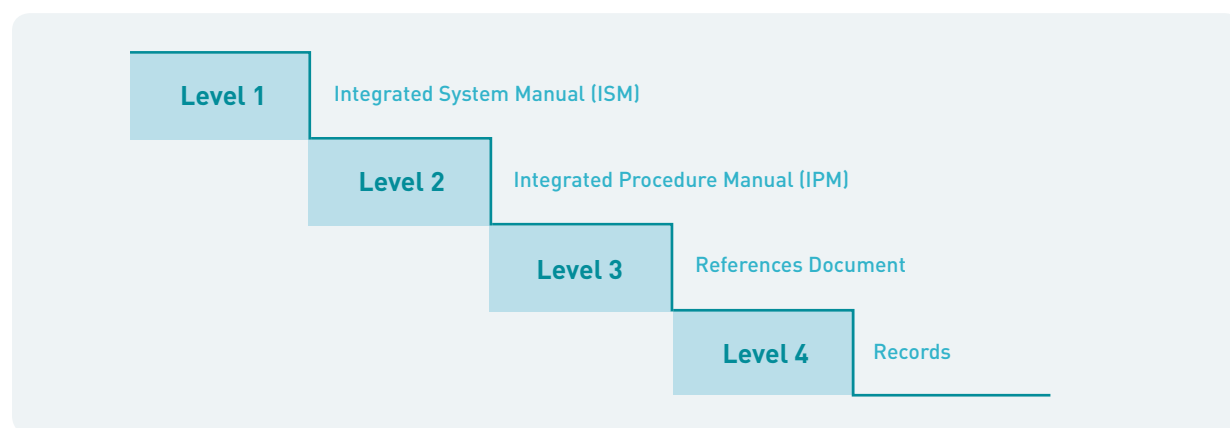
PJB-IMS Documentation Level

PJB-IMS yang berbasiskan Persyaratan Standar Manajemen sebagai ukuran Kinerja Organisasi, memiliki *Documented Information* yang disusun dalam 4 (empat) hierarki Sistem Dokumentasi dan dikendalikan secara elektronik melalui *Web e-IMS* sebagai berikut:

PJB-IMS which is based on Management Standard Requirements as a measure of Organizational Performance has Documented Information compiled in 4 (four) Documentation System hierarchies and electronically controlled through the e-IMS Web as follows:

Hierarki Sistem Dokumentasi

Documentation System Hierarchy



Tabel Hierarki Sistem Dokumentasi
Table of Documentation System Hierarchy

Level	Nama Dokumen Document Name	Deskripsi Description
I	<i>Integrated System Manual (ISM)</i>	1. Dokumen yang berisi di dalamnya, Documents contained in it, 2. Keterkaitan Organisasi, Organizational Involvement, 3. Kepemimpinan, Leadership, 4. Proses Perencanaan, Planning Process, 5. Proses Pendukung, Supporting Process, 6. Proses Operasi, Operational Process, 7. Proses Evaluasi Pencapaian, Achievement Evaluation Process, 8. Proses Peningkatan. Improvement Proses.
II	<i>Integrated Procedure Manual (IPM)</i>	Dokumen yang berisi sekumpulan rincian prosedur kerja beserta interaksinya terkait aliran aktivitas beserta Instruksi Kerja, sebagai bukti dari implementasi kebijakan. Documents that contain a set of work procedures details and their interactions related to the flow of activities along with the Work Instructions, as Evidence of policy implementation.
III	Dokumen Referensi References Document	Dokumen yang digunakan sebagai referensi dalam melaksanakan prosedur kerja. Documents used as a reference in implementing work procedures.
IV	Dokumen Catatan Records	Dokumen yang berisikan lembar kerja berupa surat, formulir-formulir dan yang sejenisnya, sebagai bukti bahwa suatu aktivitas dilaksanakan. Documents that contain worksheets in the form of letters, forms, and others related, as evidence of activity implementation.

PJB menjamin bahwa kebijakan, program, sasaran dan proses-proses selalu mutakhir (*up-to-date*) sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam rangka pemenuhan masing-masing standar sistem manajemen yang diimplementasikan. Selain itu, persyaratan standar sistem manajemen ditetapkan, diimplementasikan dan dipelihara sesuai standar terbaru.

PJB guarantees that policies, programs, targets and processes are always up-to-date in accordance with the needs of company in order to meet each of the implemented management system standards. In addition, management system standard requirements are established, implemented and maintained according to the latest standards.

Realisasi Program Kerja PJB-IMS Tahun 2019

PJB-IMS Performance Realization in 2019

PJB telah melakukan beberapa program kerja dalam rangka menjaga kualitas PJB-IMS selama tahun 2019, diantaranya adalah Sertifikasi ISO 22301: Sistem Manajemen Keberlangsungan Usaha/Bisnis dan PJB-IMS 2.0 *Enterprise Architecture*.

PJB has implemented several work programs in maintaining PJB-IMS quality during 2019, including ISO 22301 Certification: Business Continuity Management System and PJB-IMS 2.0 Enterprise Architecture.

Rencana Program Kerja PJB-IMS Tahun 2020

PJB-IMS 2020 Work Plan

Rencana Program Kerja PJB-IMS di tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Re-Sertifikasi PJB-IMS,
2. *Update version OHSAS 18001:2007 menjadi ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management System,*
3. *Update version ISO 50001: 2018 menjadi ISO 50001:2018 Asset Management System,*
4. Sertifikasi ISO 37001:2016 *Anti-Bribery Management System,*
5. Integrasi ISO 22301 : 2012 *Business Continuity Management System* ke dalam PJB-IMS,
6. Rapat Tinjauan Manajemen Tahun 2020,
7. Validasi Proses Bisnis PJB-IMS 2.0 *Enterprise Architecture,*
8. *Review Proses Bisnis Pengelolaan Pembangkit Model 3 dan identifikasi Proses Bisnis Pengelolaan Pembangkit Model 2.*

The PJB-IMS Work Program Plan for 2020 is as follows:

1. PJB-IMS Re-Certification,
2. Update OHSAS 18001:2007 version to be ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management System,
3. Update ISO 50001: 2018 version to be ISO 50001:2018 Asset Management System,
4. Certification of ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System,
5. Integrated ISO 22301 : 2012 Business Continuity Management System into PJB-IMS,
6. Management Review Meeting of 2020,
7. PJB-IMS 2.0 Enterprise Architecture Business Process Validation,
8. Reviewing the Business Process of Generators Model 3 Management and identifying the Business Processes Management of Model 2 Generators.



PLTU Tenayan
Tenayan CFPP

Penerapan Manajemen Aset kelas dunia membawa PJB menjadi Perusahaan pembangkitan pertama di Indonesia yang meraih sertifikat ISO 55001:2014. Manajemen Aset merumuskan keputusan, rencana, dan kegiatan terkait dengan aset menggunakan pendekatan berbasis risiko.

The world-class Asset Management implementation brought PJB to be the first power plant company in Indonesia to achieve ISO 55001: 2014 certificate. Asset Management formulates decisions, plans, and activities related to assets using a risk-based approach.

Manajemen Aset merupakan kegiatan dan praktik yang sistematis dan terkoordinasi atas pengelolaan Aset Penunjang Usaha (APU) dalam rangka mendukung bisnis Perusahaan agar lebih efektif dan efisien, sehingga memberikan nilai tambah yang optimal. Manajemen Aset PJB menggunakan ISO 55001:2014 tentang Sistem Manajemen Aset. Dengan penerapan ISO 55001:2014 ini PJB menjadi perusahaan pertama di wilayah Asia Pasifik yang mampu mendapatkan sertifikasi ISO 55001:2014.

Asset Management is a systematic and coordinated activity and practice of managing Business Support Assets (APU) in order to support the business of Company to be more effective and efficient, so that it would be able to provide optimal added value. Asset management of PJB uses ISO 55001:2014 concerning Asset Management Systems. With the implementation of ISO 55001:2014, PJB becomes the first company in Asia Pacific region that achieves ISO 55001:2014 certification.

Pengelola Manajemen Aset

Asset Management Organizational

Satuan Kinerja Korporat dan Pengembangan Sistem Manajemen merupakan unit organisasi di Perusahaan yang bertanggung jawab mengelola manajemen aset PJB sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali Nomor 010.P/019/DIR/2019 tentang Organ dan Tata Kerja PT Pembangkitan Jawa-Bali, pengelola Aset Manajemen adalah Satuan Kinerja Korporat dan Pengembangan Sistem Manajemen.

Pengelolaan Manajemen Aset berada di bawah wewenang Satuan Pengembangan Sistem Manajemen dan membawahi 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Kinerja Korporat, Bidang Teknologi Informasi, Bidang Pengembangan Sistem Manajemen dan Manajemen Aset.

The Corporate Performance and Management System Development Unit is an organizational unit in the Company responsible for managing asset management of PJB as stipulated in the Directors Regulation of PT Pembangkitan Jawa-Bali Number 010.P/019/DIR/2019 regarding Organs and Work Procedures of PT Pembangkitan Jawa-Bali, manager of Asset Management is the Corporate Performance Unit and Management System Development.

Asset Management is under the authority of the Management System Development Unit and supervises 3 (three) departments, namely Corporate Performance Departments, Information Technology Departments, Asset Management and Management System Development Departments.

Sistem Manajemen Aset

Asset Management System

Kerangka Kerja Manajemen Aset Pembangkitan di PJB dirancang secara terstruktur untuk mendukung pelaksanaan rencana strategis perusahaan dengan tujuan untuk mencapai apa yang diharapkan oleh *stakeholder*. Rencana strategis Perusahaan dimulai dari pembuatan kebijakan, perumusan strategi, penetapan tujuan, dan penyusunan program.

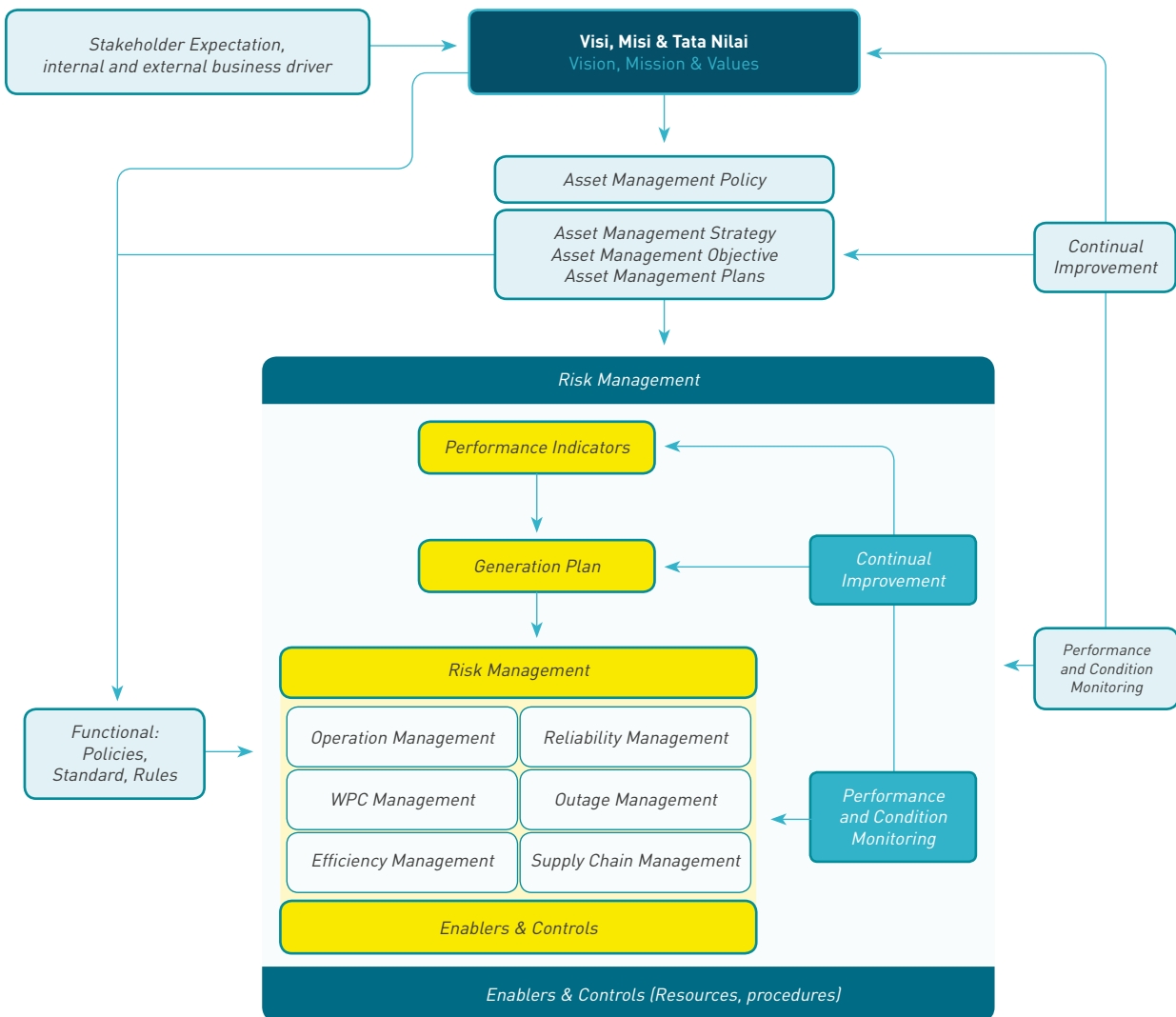
Asset Management framework of PJB structurally designed to support the Company's strategic plan implementation and to achieve the target established by stakeholders. The Company's strategic plan covers policy preparation, strategy formulation, target establishment, and programming.



Dalam mengimplementasikan Rencana Strategi dan Program tersebut, perlu dipertimbangkan aspek risiko dan *asset life cycle* dengan didukung berbagai sumber daya dan prosedur dalam menjalankan seluruh aktivitas pengelolaan aset. Hasil kinerja pengelolaan aset diukur dan diawasi secara intensif sebagai masukan untuk menjalankan perbaikan yang berkelanjutan. Pelaksanaan konsep manajemen aset di PJB, dituangkan dalam Kerangka Kerja Manajemen Aset Pembangkitan sebagaimana ditunjukkan melalui bagan berikut:

In implementing the Strategy and Program Plan, risk aspects and asset life cycles have to be considered with the support of various resources and procedures in performing all asset management activities. The results of asset management performance are measured and monitored intensively as an input for continuous improvements. The asset management concept implementation in PJB is stated in Power Plant Asset Management framework as follows:

Kerangka Kerja Manajemen Aset Pembangkitan di PJB
PJB Power Plant Asset Management Framework



Strategi Manajemen Aset Asset Management Strategy

Manajemen aset Perusahaan dijalankan melalui perencanaan yang matang guna terwujudnya tata kelola aset yang andal sesuai dinamika industri pembangkitan listrik terkini. PJB menerapkan *Asset Management Strategy* sebagai kebijakan Perusahaan dalam pengelolaan aset, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen serta menyediakan dan mempertahankan aset sehingga mencapai hasil layanan yang *excellence*. *Asset Management Strategy* membantu elemen-elemen Perusahaan dalam membuat keputusan atas aset guna mencapai hasil yang diinginkan secara efektif dan efisien diantaranya:

1. Pemanfaatan seoptimal mungkin aset yang ada,
2. Pemanfaatan nilai uang saat dilakukan investasi aset baru,
3. Pembuatan keputusan untuk berinvestasi, mempertahankan, atau divestasi aset dengan memperhatikan serta melindungi kebutuhan generasi sekarang dan masa depan.

Area yang menjadi sasaran strategis implementasi Manajemen Aset di PJB adalah sebagai berikut:

1. *Plant Availability & Reliability*,
2. Peningkatan efisiensi *thermal*,
3. Kepemimpinan yang *sustainable*,
4. *Sustainable Human & Knowledge Asset Performance*.

Pengelolaan aset ditujukan untuk mencapai kinerja ekselen pada area strategis di atas dengan menerapkan Strategi Manajemen Aset sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan kesiapan dan keandalan pembangkit,
2. Mengoptimalkan efisiensi pembangkit,
3. Menyelaraskan *Supply Chain Management* dengan seluruh kegiatan pembiayaan dan kinerja pembangkit berdasarkan prinsip *life cycle cost*,
4. Mengoptimalkan komunikasi internal dan eksternal,
5. Mengembangkan kapasitas organisasi dalam mencapai dan mempertahankan pencapaian kinerja,
6. Mengoptimalkan *Knowledge Management*.

Proses Manajemen Aset Asset Management Process

Proses Manajemen Aset yang diterapkan di PJB dimulai dari penetapan kebijakan dan perencanaan strategi yang mencakup penyusunan sasaran strategis, ukuran dan target serta penetapan prioritas program untuk mencapai sasaran Manajemen Aset. Proses Manajemen Aset di PJB ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut:

Asset Management of Company is performed through careful planning, in order to realize reliable asset management in accordance with the current dynamics of power plant industry. PJB applies Asset Management Strategy as the Company's policy in asset management which purposes to fulfill consumer needs as well as to provide and maintain assets for excellent services. The Asset Management Strategy then will help the Company elements in taking decisions on assets to achieve the expected results effectively and efficiently, including:

1. Optimally existing assets utilization;
2. Utilization of the money value for investing in new assets;
3. Deciding whether to invest, maintain, or divest the assets by considering and protecting current and future generations needs.

The strategic targets areas for implementing Asset Management in PJB are as follows:

1. Plant Availability & Reliability,
2. Thermal efficiency enhancement,
3. Sustainable Leadership,
4. Sustainable Human & Knowledge Asset Performance.

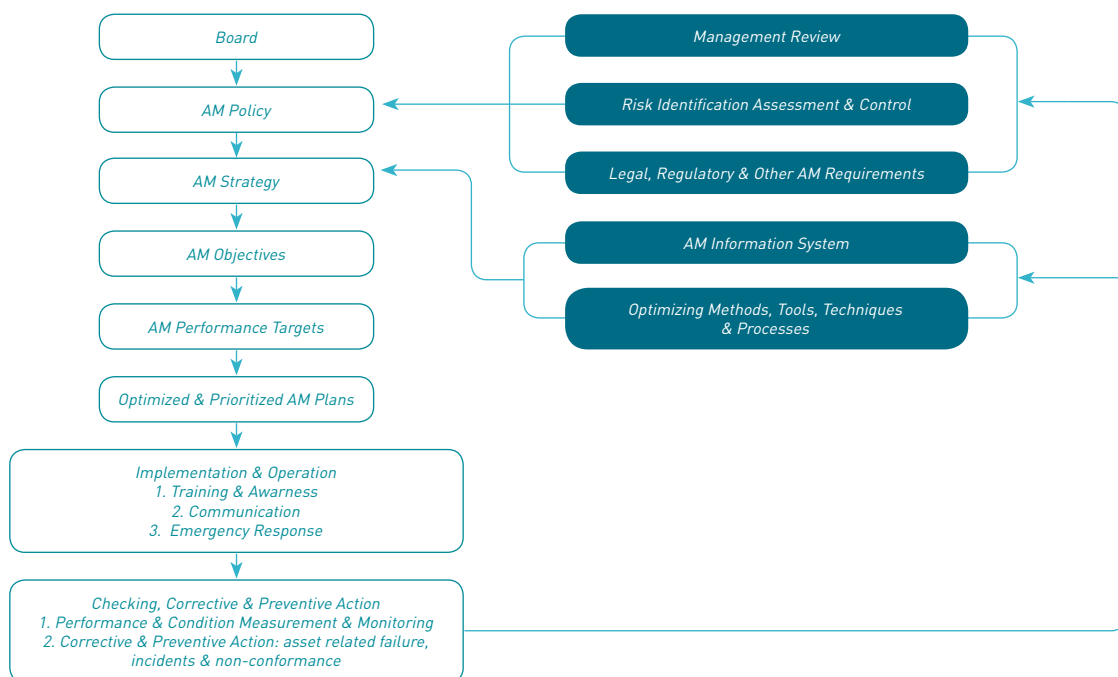
Asset management is purposed to achieve excellent performance in the aforementioned strategic areas by implementing the Asset Management Strategy as follows:

1. Optimizing power plant readiness and reliability;
2. Optimizing power plant efficiency;
3. Aligning Supply Chain Management with all financing activities and power plant performance in accordance with the life cycle cost principle;
4. Optimizing internal and external communication;
5. Developing organizational capacity in achieving and maintaining performance achievements;
6. Optimizing Knowledge Management.

The Asset Management process applied in PT PJB covers policy establishment and strategy planning which includes the preparation of strategic targets, measurement, and targets as well as prioritizing programs to achieve Asset Management targets. The PJB Asset Management process is as follows.



Diagram Proses Manajemen Aset PJB PJB's Asset Management Process Diagram



PLTD Suppa
Suppa DEPP

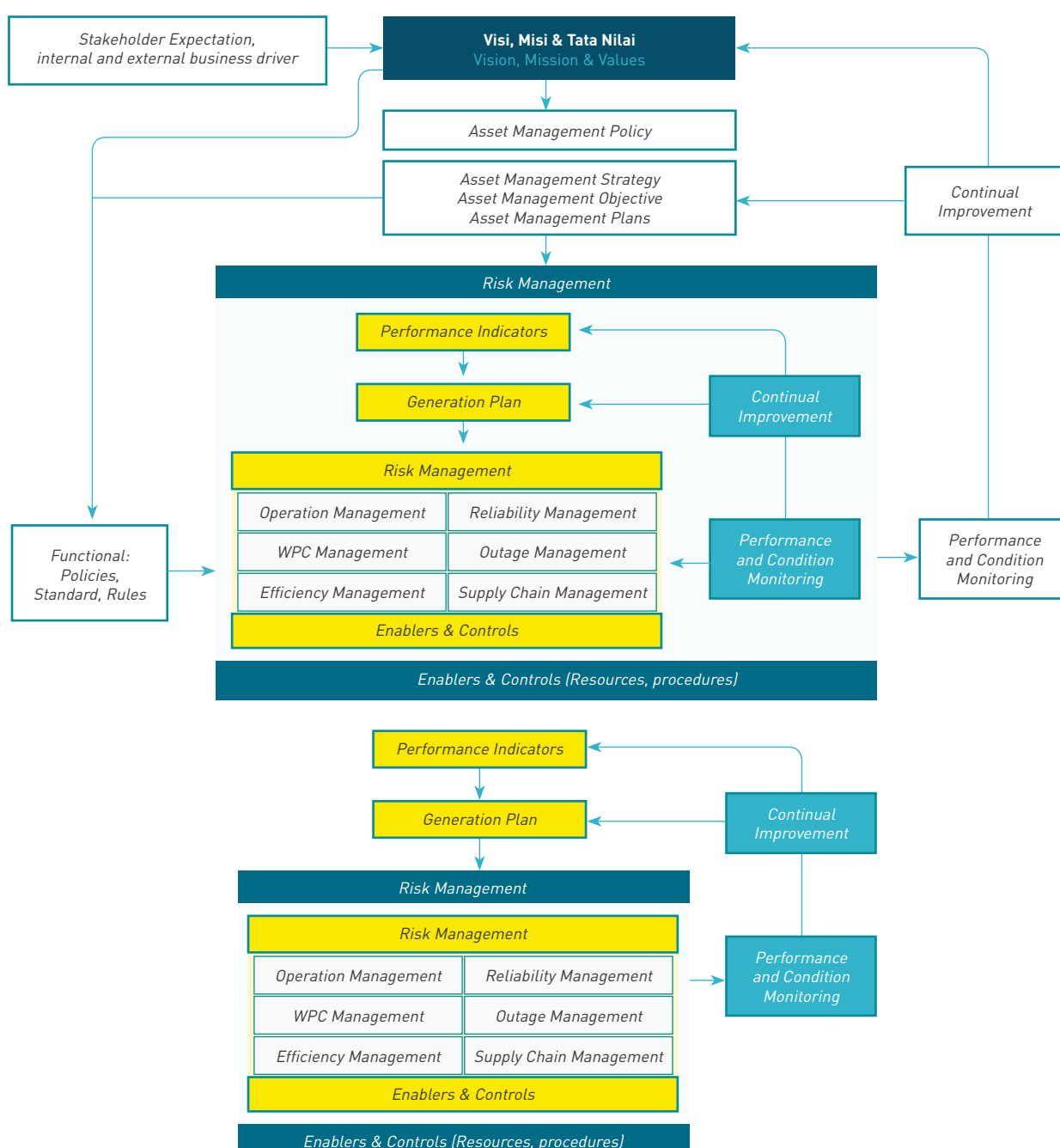
Eksekusi Manajemen Aset

PJB menerapkan prinsip *life cycle* dan kaidah manajemen risiko dalam menjalankan program dan kegiatan pengelolaan aset. Selain itu, pengelolaan aset PJB juga didukung oleh berbagai sumber daya dan prosedur pengelolaan aset yang dilakukan oleh seluruh unit. Pengelolaan tersebut diwujudkan dengan melakukan *cascading* sebagaimana ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut:

PJB applies the life cycle and risk management principles in conducting programs and activities concerning asset management. In addition, PJB asset management is also supported by various resources and procedures performed by all units. Management is represented through cascading as shown in the following chart:

Cascading Manajemen Aset

Cascading of Asset Management



Resertifikasi ISO 55001 ISO 55001 Re-certification

PJB senantiasa mengimplementasikan manajemen aset yang memenuhi standar internasional. PJB melakukan *assessment* terhadap seluruh proses manajemen asetnya berdasarkan standar ISO 55001, dan berhasil menjadi yang pertama meraih sertifikat ISO 55001 di Asia Pasifik pada tahun 2015. Di tahun 2018, PJB melakukan surveillance audit ISO 55001 untuk memastikan bahwa manajemen aset PJB masih sesuai dengan standar yang berlaku dan mengintegrasikan dengan PAS 99.

PJB consistently implements asset management that meets international standards. In 2015, PJB assessed all of asset management processes in accordance with ISO 55001 standards in which successfully led PJB to be the first to achieve ISO 55001 certification in Asia Pacific. In 2018, PJB implemented ISO 55001 audit surveillance to ensure that PJB asset management was still aligned with applicable standards and integrated with PAS 99.

Realisasi Program Kerja Manajemen Aset Tahun 2019 Realization of the Asset Management Work Program in 2019

PJB telah melakukan beberapa program kerja dalam rangka menjaga kualitas Manajemen Aset selama tahun 2019, diantaranya adalah Penetapan Model Pengelolaan O&M melalui Standarisasi Produk 2.0 dan Pengembangan Pengelolaan O&M Model 3.

PJB has carried out several work programs in order to maintain the quality of Asset Management during 2019, including the Establishment of the O&M Management Model through Product Standardization 2.0 and the Development of the O&M Management Model 3.

Rencana Program Kerja Manajemen Aset Tahun 2020 Asset Management Work Plan for 2020

Rencana Program Kerja Manajemen Aset di tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Me-review Pedoman Manajemen Aset yang sesuai untuk diterapkan di masing-masing model pembangkit,
2. Me-review kesesuaian Pedoman Manajemen Aset dengan ISO 55001:2014.

The Asset Management Work Plan in 2020 is as follows:

1. Reviewing the Asset Management Guidelines adjusted to be applied in each power plant model,
2. Reviewing the Asset Management Guidelines compatibility with ISO 55001: 2014.



PLTU Paiton
Paiton CFPP

***Business Sustainability* menjadi salah satu pendukung kuat dalam pencapaian visi menjadi world class company. Melalui pengembangan usaha, PJB melakukan penguatan prospek usaha kedepan yang membutuhkan *planning* yang tepat dan strategis.**

Business Sustainability is one of strong supporters in achieving the vision of becoming a world class company. Through business development, PJB will strengthen future business prospects require appropriate and strategic planning.

Memaksimalkan operational dan *business excellence* serta menjadi *best practices* perusahaan sejenis pada operasi bisnis yang eksisting menjadi fokus utama pengelolaan usaha PJB. Selain itu, PJB juga melaksanakan pengembangan usaha melalui salah satunya adalah melakukan investasi-investasi. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan menangkap peluang-peluang pengembangan bisnis guna memaksimalkan kontribusi PJB dalam pengembangan industri pembangkitan tenaga listrik.

Maximizing operational and business excellence and becoming best practices of similar companies in existing business operations are the main focus of PJB business management. In addition, PJB also performs business development through including making investments. It is implemented with the purpose to capture business development opportunities in order to maximize the contribution of PJB in the electricity generation industry development.

Pengelola Pengembangan Usaha Business Development Organizational

Pengelola Pengembangan Usaha PJB dilakukan oleh Direktorat Pengembangan dan Niaga sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali Nomor 010.P/019/DIR/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pembangkitan Jawa-Bali. Berdasarkan struktur organisasi PJB, pengelola pengembangan usaha berada di bawah Direktorat Pengembangan dan Niaga, yang membawahi 5 divisi yaitu Divisi IPP & Pengembangan Pembangkit, Divisi Pengembangan EBT, Divisi Business Solution, Divisi Konstruksi Pembangkit, dan Divisi Supply Chain Management. Di dalam pelaksanaan pengembangan usaha, divisi-divisi tersebut didukung oleh Unit Bisnis Pengembangan Usaha yang berdomisili di Jakarta dan juga Anak Perusahaan di bidang Investasi yaitu PT PJBI yang berdomisili di Jakarta.

PJB Business Development is carried out by the Directorate of Development and Commerce as stipulated in the Directors Regulation of PT Pembangkitan Jawa-Bali Number 010.P/019/DIR/2019 concerning the Organization and Work Procedure of PT Pembangkitan Jawa-Bali. In accordance with organizational structure of PJB, the business development manager is under the Directorate of Development and Commerce, which oversees 5 divisions namely the IPP & Power Plant Development Division, Renewable Energy Development Division, Business Solution Division, Power Plant Construction Division, and Supply Chain Management Division. In carrying out business development, these divisions are supported by the Business Development Unit domiciled in Jakarta and also a Subsidiary in the field of Investment, namely PT PJBI domiciled in Jakarta.



Tata Kelola Pengembangan Usaha Business Development Governance

Divisi IPP & Pengembangan Pembangkit PJB, saat ini sedang mengembangkan ± 23 Proyek Pembangkit IPP dan MPP dari total proyek yang dikembangkan oleh PJB dengan total ± 31 Proyek. Proyek dengan PIC DIVIPP diantaranya merupakan penugasan pengembangan 9 proyek IPP melalui Surat RUPS Penugasan tanggal 15 Mei 2017 dengan total kapasitas sebesar 6000 MW. Selain itu PJB juga mengembangkan bisnis jasa O&M Pembangkit listrik baik yang dimiliki oleh PLN maupun oleh IPP di berbagai wilayah di Indonesia.

PJB saat ini juga mengembangkan bisnisnya dalam pengembangan Proyek Pembangkit Listrik yang memanfaatkan Energi Baru dan Terbarukan, diantaranya yaitu PJB telah memiliki pembangkit listrik tenaga surya skala *utility* sejak tiga tahun lalu dengan kapasitas sebesar 1 MWp di area Unit Pembangkitan Cirata, dan PJB juga saat ini sedang mengembangkan Proyek Pembangkit IPP diantaranya 200 MW *Floating Photovoltaic* di waduk Cirata dan akan mengembangkan 70 MW lebih Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di berbagai wilayah Indonesia.

PJB telah memiliki kebijakan tata kelola pengembangan usaha untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengembangan usaha oleh divisi terkait di PJB. Sedangkan untuk melaksanakan fungsi monitoring dan kontrol atas proyek-proyek yang dikembangkan oleh PJB tersebut, maka PJB mengembangkan suatu aplikasi yaitu PMO (*Program Management Office*), yang mana aplikasi ini dapat membantu *Project Manager* dalam melakukan fungsi kontrol dan monitor proyek mulai dari tahap inisiasi hingga tahap penyelesaian proyek tersebut.

The IPP & Power Plant Development Division of the PJB is currently developing ± 23 IPP and MPP Power Projects from the total projects developed by the PJB with a total of ± 31 Projects. Projects with Independent Power Producer Division as Person In Charge include assignment for the development of 9 IPP projects through an Assignment GMS Letter on May 15, 2017 with a total capacity of 6000 MW. In addition, PJB also develops O&M service business of power plants both owned by PLN and IPP in various regions in Indonesia.

Currently, PJB is also developing its business in Power Plant Project development which utilizes New and Renewable Energy. PJB also has owned solar power plant in utility scale since two years ago with a capacity of 1 MWp in Cirata GU area. PJB is also building IPP GU Projects, one of them is 200 MW Floating Photovoltaic in Cirata reservoir and is going to establish Wind Power Plant (WPP) with capacity over 70 MW across various regions in Indonesia.

PJB had established business development governance as a manual in implementing business development by related divisions at PJB. While to perform control and monitoring function over those projects developed by PJB, the Company creates an application, namely PMO (*Program Management Office*). This application could help Project Manager in conducting control and monitoring function over the projects, from initiation to completion phase of those projects.

Realisasi Program Kerja Pengembangan Usaha Tahun 2019 Business Development Performance Realization in 2019

PJB telah melakukan beberapa program kerja Pengembangan Usaha selama tahun 2019, diantaranya adalah:

1. Pada tanggal 09 November 2019, Proyek PLTU Jawa 8 telah COD dengan kapasitas 1000 MW,
2. Pada tanggal 13 Desember 2019, Proyek PLTU Jawa 7 Unit 1 telah COD dengan kapasitas 1000 MW,
3. Penandatanganan Kontrak Jasa O&M Pembangkit, diantaranya PLTU Kendari, PLTU Teluk Balikpapan, PLTU Bolok & Ropa, dll,
4. Penyusunan Peraturan Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali Nomor 002.P/019/DIR/2018 tentang Tata Kelola Pengembangan Bisnis Pembangkit Listrik.

PJB has implemented several Business Development work programs during 2019, including the following:

1. On November 9, 2019, the Java 8 CFPP Project has COD with a capacity of 1000 MW,
2. On December 13, 2019, the Unit 1 Java 7 CFPP Project had COD with a capacity of 1000 MW,
3. Signing of Plant O&M Services Contracts, including Kendari CFPP, Balikpapan Bay CFPP, Bolok & Ropa CFPP, and so on,
4. Compilation of Directors' Regulations for PT Pembangkitan Jawa-Bali Number 002.P/019/DIR /2018 concerning Governance of Business Development for Power Plants.

Rencana Program Kerja Pengembangan Usaha Tahun 2020

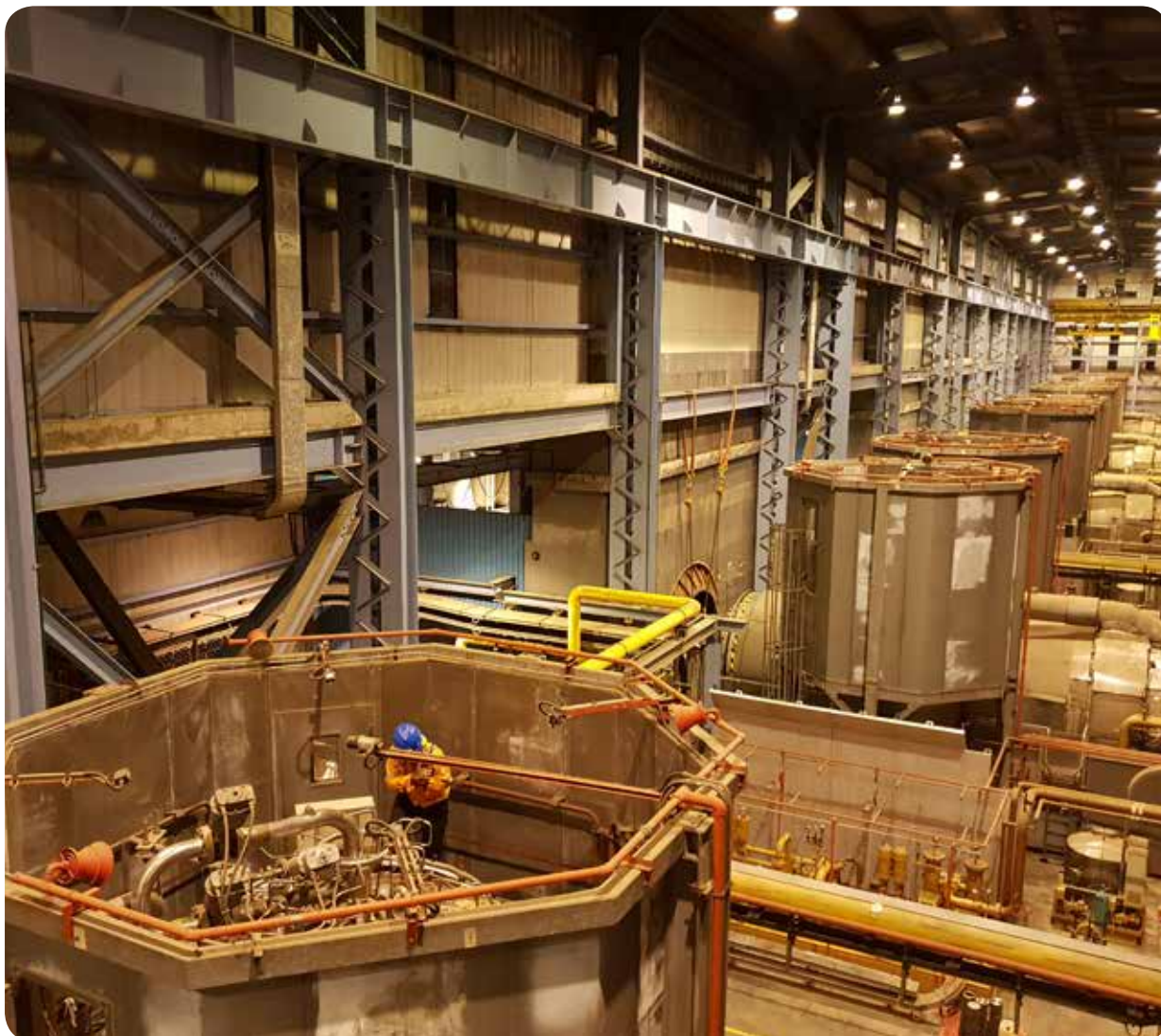
Business Development Work Plan for 2020

Rencana Program Kerja Pengembangan Usaha di tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan usaha IPP sesuai RUPTL (lokasi di luar Jawa),
2. Mengembangkan pembangkit baru selain RUPTL (IPP atau *Captive Power*) yang murah di lokasi Sumatera/Kalimantan (Timur dan calon Ibu Kota baru)/Jawa Timur serta pasar Luar Negeri,
3. Prioritisasi Pengembangan IPP dan disesuaikan dengan rencana pengembangan PLN & RUPTL,
4. Pembagian pasar dan proyek PJB Group,
5. Melakukan *review* terkait kebijakan, tata kelola dan prosedur dalam pengembangan bisnis,
6. Memastikan *progress* proyek pengembangan sesuai dengan target,
7. Melakukan penyelesaian kontrak jasa O&M.

The Business Development Work Program Plan for 2020 is as follows:

1. Developing IPP business according to RUPTL (location outside Java),
2. Developing new power plants other than cheap RUPTL (IPP or *Captive Power*) in Sumatra/Kalimantan (East and new Capital candidate)/East Java and Foreign markets,
3. Prioritizing the IPP Development and adjusting it to the PLN & RUPTL development plan,
4. The division of markets and PJB Group projects,
5. Reviewing policies, governance and procedures in business development,
6. Ensuring the progress of the development project in accordance with the target,
7. Completing O&M service contracts.



Menjadi salah satu *key enabler* operasional Perusahaan, pengelolaan Teknologi Informasi (TI) menjadi fokus penting ditengah era digitalisasi. TI dapat menjadi keunggulan kompetitif untuk mewujudkan *world class company*.

Being one of the key enablers of the Company's operational, the management of Information Technology (IT) has become an important focus in the middle of digitalization. IT can be a competitive advantage to realize a world class company.

Pengelolaan TI secara umum adalah memastikan kesiapan pengelolaan strategi dan kebijakan sistem informasi terpadu Perusahaan secara optimal dan terintegrasi dalam mendukung kinerja Perusahaan. Dengan TI yang terintegrasi, diharapkan dapat menciptakan proses bisnis yang efisien, efektif dan berdaya saing tinggi.

Generally, IT management is to ensure the readiness for managing the strategy and policies of the Company's integrated information system optimally and integrated in supporting the performance of Company. With integrated IT, it is expected to create business processes that are efficient, effective and highly competitive.

Pengelola Teknologi Informasi

Information Technology Organizational

Pengelolaan Teknologi Informasi dilakukan oleh Bidang Teknologi Informasi yang merupakan sub organisasi PJB sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 10.P/019/DIR/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pembangunan Jawa-Bali. Bidang Teknologi Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Teknologi Informasi yang bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kinerja Korporat & Pengembangan Sistem Manajemen. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Bidang Teknologi Informasi dapat dibantu Manajer dan staf yang formasi jabatannya sesuai kebutuhan dan ditetapkan oleh Keputusan Direksi. Bidang Teknologi Informasi membawahi 3 (tiga) Fungsi yaitu Perencanaan & Kebijakan Teknologi Informasi, Pengembangan Teknologi Informasi & Analisa Bisnis dan Operasi Layanan Teknologi Informasi.

Information Technology Management is carried out by the Information Technology Department which is a PJB sub-organization as stated in the Decree of the Board of Directors Number 10.P/019/DIR/2019 concerning the Organization and Work Procedure of PT Pembangunan Jawa-Bali. The Information Technology Department is led by a Head of Information Technology Division who is responsible to the Head of the Corporate Performance Unit & Management System Development. In implementing the main duties and functions, the Head of Information Technology Department can be assisted by Managers and staff whose job formation is as needed and determined by the Decree of the Board of Directors. Information Technology Department supervises 3 (three) Functions, including Information Technology Planning & Policy, Information Technology Development & Business Analysis, and Information Technology Service Operations.



Tata Kelola Teknologi Informasi Information Technology Governance

Sebagai *business enabler*, TI PJB memerlukan pengelolaan dengan perencanaan terstruktur dan mencakup seluruh proses bisnis yang berdasar pada *Capability Architecture* pada RJPP 2017-2021, IT Governance PJB yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 067.K/010/DIR/2017 tentang Pedoman dan Kebijakan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi PT Pembangunan Jawa-Bali, dan *best practice* lainnya seperti Control Objectives for Information and related Technology (COBIT). Secara garis besar pelaksanaan Tata Kelola TI PJB dapat dilihat pada gambar berikut:

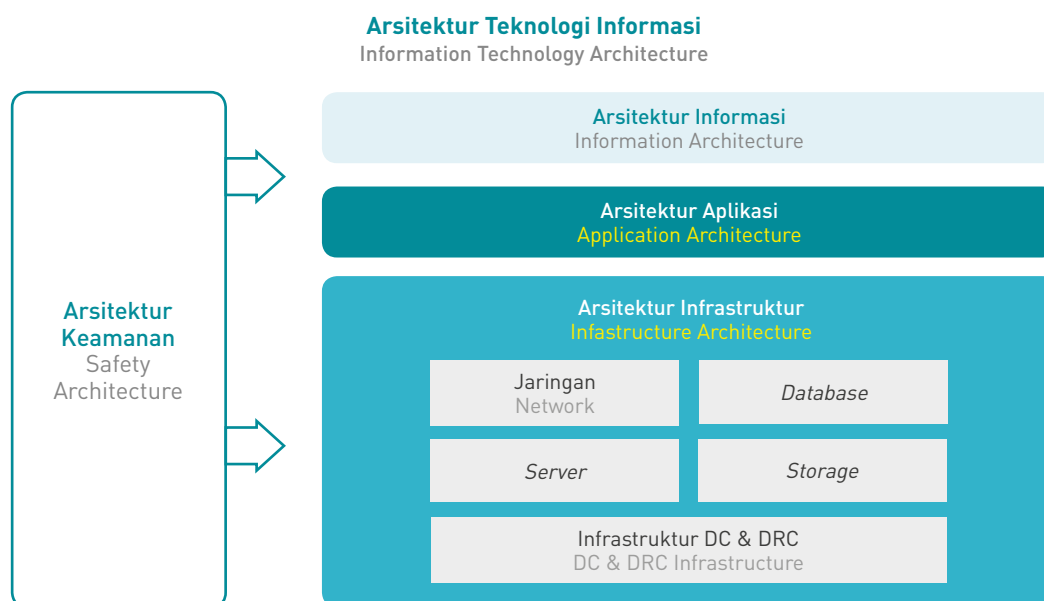
As a business enabler, PJB IT requires management with structured planning and covers all business processes in accordance with Capability Architecture in RJPP 2017-2021, IT Governance of PJB regulated in Directors Decree Number 067.K/010/DIR/2017 concerning Guidelines and Policies General Information Technology Governance of PT Pembangunan Jawa-Bali, and other best practices such as Control Objectives for Information and related Technology (COBIT). Broadly speaking, the PJB IT Governance implementation can be seen in the following picture:



Arsitektur Teknologi Informasi Information Technology Architecture

Arsitektur TI menggambarkan bangunan teknologi informasi, baik aplikasi maupun infrastruktur yang akan dibangun oleh PJB sebagai arah pengembangan aplikasi Teknologi Informasi di lingkungan Perusahaan, sebagaimana dalam gambar berikut:

The IT architecture represents the building of information technology, both applications, and infrastructure that will be built by PJB as a direction for developing Information Technology applications in the Company, as follows:



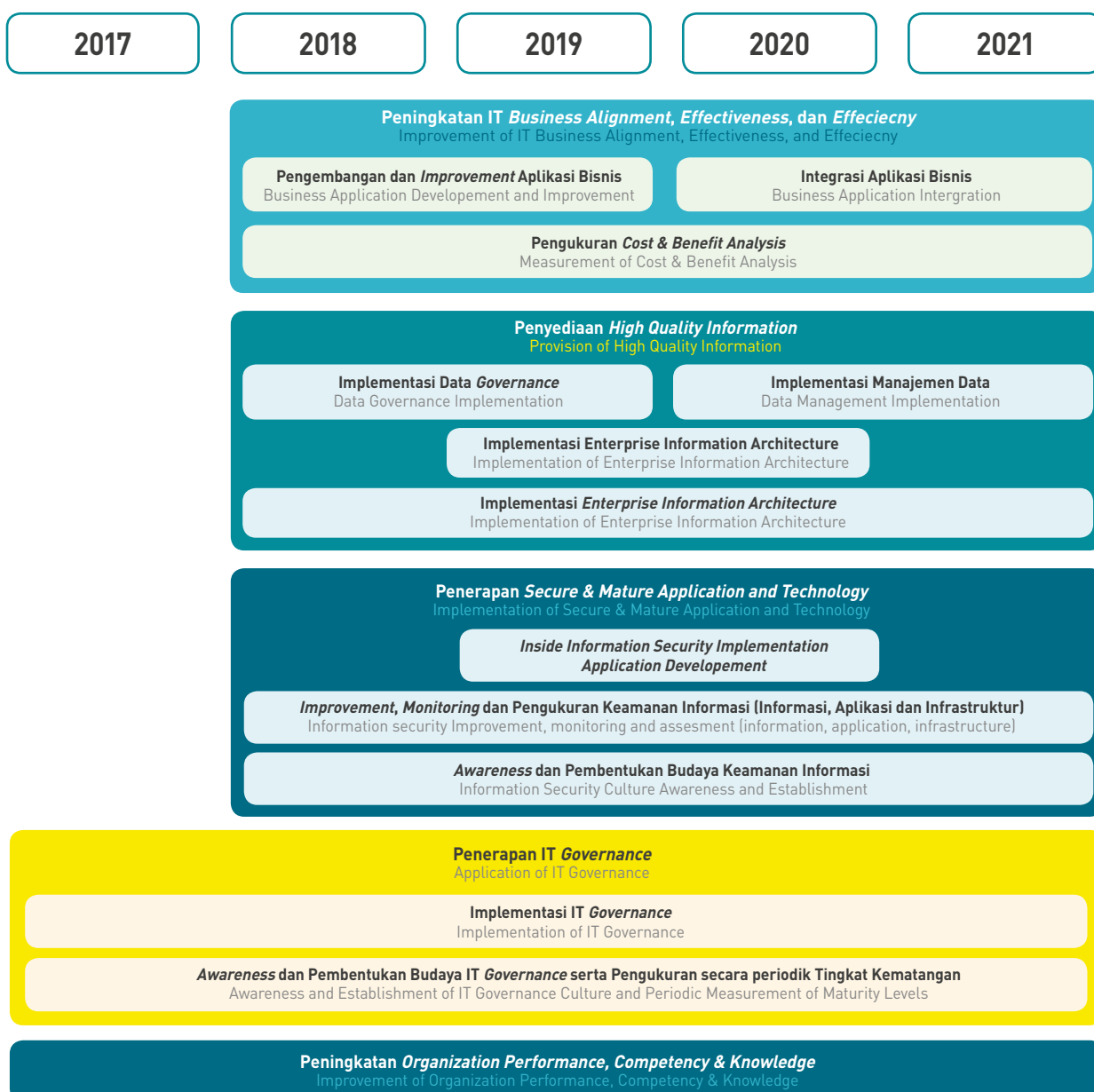


Roadmap Teknologi Informasi Information Technology Roadmap

Sesuai dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) PT Pembangkitan Jawa-Bali 2017-2021, PJB secara berkelanjutan mengembangkan TI Perusahaan dari tahun ke tahun sebagaimana dalam gambar berikut:

In accordance with the Information Technology Strategic Plan (ITSP) of PT Pembangkitan Jawa-Bali for 2017-2021, PJB continuously develops the Company's IT annually as presented in the following picture:

Roadmap Teknologi Informasi Information Technology Roadmap



Realisasi Program Kerja Teknologi Informasi Tahun 2019 Realization of Information Technology Work Program in 2019

PJB telah melakukan beberapa program kerja TI selama tahun 2019, diantaranya adalah:

1. Realisasi Program Kerja Fungsi Perencanaan dan Kebijakan TI:
 - a. Pengembangan IT *Enterprise Architecture* (PJB-IMS 2.0) 2019,
 - b. Review Rencana Strategis Teknologi Informasi 2019,
 - c. Penyusunan IT Portfolio 2020,
 - d. Penyusunan *Training Need Analysis* 2020,
 - e. *Peer Group Discussion* IT PJB Raya 2019,
 - f. Penyusunan RKAP Teknologi Informasi 2020,
 - g. Koordinasi Tindak Lanjut LHA 2019,
 - h. *Surveillance* ISO 27001,
 - i. *Surveillance* ISO 20000-1:2011,
 - j. *Review dan Update* Tata Kelola Teknologi Informasi PT PJB,
 - k. *Stevie International IT Awards* 2019,
 - l. Survei Kepuasan Pelanggan Teknologi Informasi 2019,
 - m. Survei Keamanan Informasi 2019,
 - n. *Monitor* adan *Review* Risiko Teknologi Informasi PT PJB 2019.

PJB has implemented several IT work programs during 2019, including:

1. Realization of Work Program Planning and IT Policy Functions:
 - a. Development of IT Enterprise Architecture (PJB-IMS 2.0) 2019,
 - b. Information Technology Strategic Plan Review 2019,
 - c. Preparation of the IT Portfolio 2020,
 - d. Preparation of Training Need Analysis 2020,
 - e. Peer Group Discussion IT PJB Raya 2019
 - f. Preparation of the Information Technology ABOP 2020,
 - g. Coordination of LHA 2019 Follow Up,
 - h. ISO 27001 Surveillance,
 - i. ISO 20000-1: 2011 Surveillance,
 - j. Review and Update on PT PJB Information Technology Governance,
 - k. Stevie International IT Awards 2019,
 - l. Information Technology Customer Satisfaction Survey 2019,
 - m. Information Security Survey 2019,
 - n. Monitor and Review of Information Technology Risk of PT PJB 2019.

2. Realisasi Program Kerja Fungsi Pengembangan Teknologi Informasi dan Analisa Bisnis:

2. Realization of Work Program for Information Technology Development and Business Analysis Functions:

IT Inisiatif	IT Initiative	Realisasi Program Kerja	Program
a. Penyesuaian aplikasi EAM <i>Finance</i> dengan COA PJB Raya	a. Adjustment of EAM Finance application with COA PJB Raya	Pengembangan Aplikasi <i>Financial Consolidation</i> (FiCo) untuk PJB Raya	Development of Financial Consolidation (FiCo) Applications for PJB Raya
b. Pengembangan Aplikasi <i>Monitoring</i> Peralatan K3 (Keselamatan, Kesehatan, Keamanan Kerja) dan Lingkungan	b. Development of OHS Equipment (Safety, Health, Work Safety) and Environmental Monitoring Application	- Pengembangan Aplikasi - Pemantauan Lingkungan Unit <i>Existing</i> (SIPLAH) - CSMS - Deteksi dini perilaku dan kondisi tidak aman (<i>i-Diagnostic</i>) - <i>Zero Accident Assistant</i> (iZat)	- Application Development - Monitoring of Environmental Existing Units (SIPLAH) - CSMS - Early detection of unsafe behavior and conditions (<i>i-Diagnostic</i>) - Zero Accident Assistant (iZat)
c. Pengembangan Aplikasi Untuk <i>Monitoring</i> Program CSR	c. Application Development for CSR Program Monitoring	Pengembangan Aplikasi <i>Monitoring</i> Program CSR	Development of CSR Program Monitoring Applications
d. <i>Improvement</i> IMS dan <i>business process</i>	d. Improvement of IMS and business process	Pengembangan <i>Enterprise Architecture</i> (PJB-IMS 2.0)	Enterprise Architecture Development (PJB-IMS 2.0)

IT Inisiatif	IT Initiative	Realisasi Program Kerja	Program
e. Pengembangan Aplikasi <i>Governance, Risk and Compliance</i>	e. Development of Governance, Risk and Compliance Application	Pengembangan Aplikasi : - <i>Internal Controls over Financial Reporting</i> (iCOFR) - Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) - Dokumen Perizinan dan <i>Legal Mapping</i> (SISMINDOKUM) - <i>Compliance Online System</i> (COS) - <i>Enterprise Risk Management</i> (ERM)	Application Development of : - Internal Controls over Financial Reporting (iCOFR) - Legal Documentation and Information Network (JDIH) - Licensing and Legal Mapping Documents (SISMINDOKUM) - Compliance Online System (COS) - Enterprise Risk Management (ERM)
f. Pengembangan aplikasi EAM HR	f. EAM HR Application Development	Mobile Presensi	Mobile Presence
g. Pengembangan Aplikasi <i>Project Management</i>	g. Project Management Application Development	Pengembangan Aplikasi <i>Website Project Management</i>	Website Project Management Application Development
h. <i>Improvement</i> aplikasi EIS <i>Finance & Operation</i>	h. Improvement of EIS Finance & Operation Application	Pengembangan Aplikasi: - Penghitungan Pajak Terpadu - <i>Corporate Receive</i> - <i>Prepayment</i> dan <i>Additional Payment</i>	Application Development of: - Integrated Tax Calculation - Corporate Receive - Prepayment and Additional Payment
i. <i>Technical Upgrade Ellipse</i>	i. Technical Upgrade Ellipse	<i>Upgrade</i> versi dari 8.56 ke versi 9	Upgrade from 8.56 version to 9 version
j. <i>Technical Upgrade Maximo</i>	j. Technical Upgrade Maximo	<i>Upgrade</i> versi dari 7.1 ke versi 7.51	Upgrade from 7.1 version to 7.51 version

3. Realisasi Program Kerja Fungsi Operasi Layanan Teknologi Informasi:

- Pengelolaan Infrastruktur IT PT PJB 2019,
- Perpindahan DRC (*Disaster Recovery Center*),
- Pengelolaan BCP / DRP 2019,
- Service Reporting* 2019,
- Pengembangan Infrastruktur *Data Center* dan DRC sesuai standar ISO 27001:2013,
- Pengelolaan Infrastruktur *Video Conference* untuk seluruh unit PJB,
- Penguatan Jaringan Kampus - kampus PJB *Academy* dan UJLJ2,
- Capacity Planning* 2019-2020,
- Pengelolaan Layanan IT 2019,
- Penguatan Keamanan Siber (*Cyber Security*) PT PJB,
- Peremajaan Server Aplikasi Korporat.

3. Realization of Work Programs for Information Technology Services Operation Functions:

- Infrastructure Management of PT PJB IT 2019,
- Displacement DRC (*Disaster Recovery Center*),
- BCP / DRP 2019 Management,
- Service Reporting* 2019,
- Development of Data Center Infrastructure and DRC according to ISO 27001: 2013 standards,
- Infrastructure Management of Video Conference for all PJB unit,
- Strengthening the Campuses Network of PJB Academy and UJLJ2,
- Capacity Planning 2019-2020,
- Services Management of IT 2019,
- Strengthening of PT PJB Cyber Security,
- Corporate Application Server Rejuvenation.

Audit Teknologi Informasi Information Technology Audit

Salah satu upaya pengembangan TI adalah melalui hasil rekomendasi dari audit TI. Pada tahun 2019 dilaksanakan audit terhadap praktik TI di PJB sebagai berikut:

One effort to develop IT is through the recommendations results from IT audits. In 2019, an audit of IT practices in PJB was carried out as follows:

Tabel Temuan dan Tindak Lanjut Audit TI Tahun 2019

Table of IT Audit Findings and Follow Up in 2019

No	Auditor	Waktu Time	Jumlah Temuan Total Findings	Status
1.	KAP	Q1	0	Closed
2.	SPI PJB	Q3	7	Closed
3.	ISO 20000 dan ISO 27001	Q3	1	Closed
4.	SPI PLN	Q3	8	Closed

Rencana Program Kerja Teknologi Informasi Tahun 2020 Information Technology Work Program Plan for 2020

Rencana Program Kerja TI di tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Implementasi *Compliance Online System* (COS),
2. Pengembangan Aplikasi *Smart Grid* untuk PLTS,
3. Pengembangan Layanan Teknologi Informasi untuk Blok 3 Muara Karang,
4. Implementasi *Preventive Budget Control*,
5. Integrasi Maximo dan Ellipse.

The IT Work Plan in 2020 is as follows:

1. Compliance Online System (COS) Implementation,
2. Smart Grid Application Development for SPP,
3. Development of Information Technology Services for Muara Karang Block 3,
4. Preventive Budget Control Implementation,
5. Integrated Maximo and Ellipse.



SUMBER DAYA MANUSIA

HUMAN CAPITAL (HC)

Menjadi *key enabler* utama dan operator bisnis Perusahaan, aspek Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi perhatian khusus PJB. Keandalan SDM PJB memegang peranan kunci dalam mewujudkan PJB sebagai *world class company*. Peningkatan kualitas SDM mampu meningkatkan kapasitas SDM dalam menghadapi tuntutan industri dan persaingan usaha.

Being the main key enabler and business operator of Company, Human Capital (HC) is a particular concern of PJB. Reliability of PJB HC plays a key role in realizing PJB as a world class company. Improvement of the human capital quality can increase the capacity of human capital in facing of industry demands and business competition.

PJB mengelola SDM dengan berbasis pada strategi dan rencana bisnis yang terintegrasi dengan visi dan misi Perusahaan. PJB secara progresif melaksanakan tata kelola pengembangan karyawan berdasarkan kebutuhan Perusahaan dan perkembangan industri pembangkitan listrik. Salah satu upaya yang dilakukan oleh PJB dalam menyelaraskan strategi korporat dalam mendukung industri perkembangan listrik adalah dengan melakukan *cascading* ke dalam *Key Performance Indicator* (KPI) dan target kinerja sebagai dasar untuk pengukuran kinerja karyawan serta sistem *reward & punishment*.

PJB manages HC based on business strategies and plans integrated with the vision and mission of Company. The Directorate of PJB Human Capital and Administration progressively implements employee development governance in accordance with the Company needs and the power plan industry development. One of the efforts performed by PJB in aligning corporate strategy in supporting the electricity development industry by cascading into the Key Performance Indicator (KPI) and performance targets as a basis for measuring employee performance and reward & punishment systems.

Pengelola Sumber Daya Manusia

Human Capital Organizational

Pengelolaan SDM di lingkungan PJB diatur dalam Peraturan Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali Nomor 010.P/019/DIR/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pembangkitan Jawa-Bali. Dalam mengelola SDM, Direktorat SDM dan Administrasi terdiri dari 3 (tiga) Divisi dan 1 (satu) Unit yaitu Divisi Sistem Human Capital & Organisasi, Divisi Pengembangan Talenta, dan Divisi Performance Management & Sistem Informasi Human Capital serta Unit PJB Academy. Fungsi utama Direktorat SDM adalah memastikan pengelolaan Human Capital baik dari sisi kapasitas dan kapabilitas yang meliputi perencanaan dan pengendalian Sistem Manajemen Human Capital, Pelatihan dan Pengembangan Human Capital serta Administrasi SDM sesuai dengan strategi yang menunjang pengembangan bisnis Perusahaan.

HC management in the PJB environment is regulated in the Directors Regulation of PT Pembangkitan Jawa-Bali No. 010.P/019/DIR/2019 concerning Organization and Work Procedure of PT Pembangkitan Jawa-Bali. In managing Human Capital, HC and Administration Directorate consists of 3 (three) Divisions and 1 (one) Unit, which are Human Capital & Organization System Division, Talent Development Division, and Performance Management & Human Capital Information Systems Division, as well as PJB Academy Unit. The main function of Human Capital Directorate is to ensure the management of Human Capital both in the capacity and capability of Human Capital Management System, Training, Human Capital Development, and Human Capital and General Administration in accordance with the Company's strategy which supports business development of Company.



Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan Audit
Audited Financial Statements



Referensi Kriteria AR
AR Criteria Reference

Tata Kelola Sumber Daya Manusia HC Governance

Pengelolaan SDM meliputi perencanaan dan pengendalian sistem manajemen, pelatihan dan pengembangan, serta administrasi SDM. Pengelolaan tersebut diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 009.P/019/DIR/2020 tentang *Human Capital Management System* (HCMS), yang terdiri dari tujuh sistem yaitu dijelaskan sebagai berikut:

Human Capital Management covers planning and control of Human Capital Management system, training, and development of human capital, and HC administration. The management is regulated in the Board of Directors Decree No. 009.P/019/DIR/2020 concerning Human Capital Management System (HCMS) which consists of seven systems as follows:

Sistem Pengembangan Organisasi dan Perencanaan Tenaga Kerja Organizational Development and Manpower Planning System

Pengembangan organisasi adalah penjabaran strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang sesuai dengan visi, misi dan tata nilai. Perencanaan tenaga kerja digunakan sebagai dasar pelaksanaan rekrutmen yang mengacu pada kebutuhan organisasi dan Strategi Perusahaan.

Organizational development is short-term, mid-term, and long-term elaboration of strategies in line with the vision, mission, and values. Manpower planning is used as the basis for the implementation of recruitment that refers to organizational needs and Strategy of the Company.

Sistem Rekrutmen Karyawan Employee Recruitment System

Rekrutmen dilakukan untuk mendapatkan karyawan yang memenuhi persyaratan kompetensi yang dibutuhkan untuk mengisi Formasi Tenaga Kerja yang kosong atau akan kosong dalam rangka menjamin kontinuitas ketersediaan Karyawan untuk mendukung operasional, peningkatan kinerja dan pencapaian visi perusahaan.

Recruitment is conducted to hire employees who fulfill the competency required to occupy vacant positions that are unoccupied or will be unoccupied in order to guarantee continuity of Employee availability by referring to internal and external sources.

Sistem Pembinaan Kompetensi dan Karir Competency and Career Development System

Pembinaan Kompetensi dan Karir karyawan telah dilakukan secara sistemik dan dibuat menarik untuk dapat memacu peningkatan kinerja karyawan. Pembinaan kompetensi dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria talenta yang diperoleh dan merupakan hasil pencapaian kinerja serta penilaian kompetensi yang ditetapkan periodik semester. Bagi karyawan yang memiliki penilaian kinerja baik akan lebih cepat mendapatkan kenaikan *grade*. Dalam setiap tingkatan levelnya diberikan pembekalan yang tersistematis dan komprehensif dalam suatu Diklat Penjenjangan untuk mempersiapkan kompetensi dalam menjalankan tugas yang lebih tinggi. Sedangkan kesempatan karir disusun untuk memberikan kesempatan percepatan karir bagi karyawan yang *star performer* untuk dapat menjalankan *fast track program*. Alur penempatan karyawan disusun dengan mempertimbangkan pengkayaan kompetensi secara berjenjang melalui mekanisme *career path*.

Employee Competency and Career Coaching has been carried out systemically and made interesting to be able to push ahead the improvement in employee performance. Competency coaching is implemented by considering the talent criteria obtained and is the result of performance achievement and competency assessment set periodically in the semester. For employees who have good performance appraisals, will get faster grades. At each level, a systematic and comprehensive debriefing in an Education Training is given to prepare competencies in carrying out higher tasks. While career opportunities are prepared to provide career acceleration opportunities for star performers employees to be able to run the fast track program. The flow of employee placement is prepared by considering the gradual enrichment of competencies through the career path mechanism. To improve the company competitiveness in order to highlight the advantages of competence, career path expertise is given.

Untuk meningkatkan daya saing perusahaan dalam rangka menonjolkan keunggulan kompetensi diberikan jalur karir kepakaran. Hal ini juga untuk memfasilitasi kemampuan karyawan yang memiliki kompetensi teknis yang baik namun memiliki keterbatasan kemampuan *leadership*. Kedua hal tersebut dibuat untuk meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan yang mayoritas merupakan generasi millennial.

Sistem Pendidikan dan Pelatihan Education and Training System

Pendidikan dan pelatihan karyawan dilakukan dengan prinsip berkesinambungan. Adapun jenis pendidikan dan pelatihan adalah:

- Diklat Seleksi Karyawan Baru,
- Diklat Profesi,
- Diklat Penjejaran,
- Diklat Penunjang,
- Diklat Stratejik Korporat,
- Diklat Pembekalan Masa Purnabakti.

This is also to facilitate the employees ability who have good technical competence but have limited leadership abilities. Both are implemented to improve motivation and performance of employees which the majority are millennial generation.

Employee education and training is implemented with sustainability principles. The types of education and training are as follows:

- New Employee Selection Training,
- Professional Training
- Tracking Training,
- Supporting Training,
- Corporate Strategic Training,
- Retirement Preparation Training.

Sistem Manajemen Kinerja Performance Management System

Manajemen kinerja karyawan dilakukan untuk menyelaraskan target kinerja Perusahaan dan Unit dengan target kinerja Karyawan sekaligus memotivasi karyawan dalam meningkatkan kompetensi dan kontribusinya bagi Perusahaan dengan mengoptimalkan sumber daya untuk mencapai visi Perusahaan. Prinsip Manajemen Kinerja Karyawan adalah fokus, terukur, transparan dan obyektif. Manajemen Kinerja Karyawan terdiri atas 3 siklus yaitu Perencanaan, Pemantauan dan Penilaian Kinerja yang dilakukan setiap 1 (satu) semester.

Employee performance management is performed to adjust the Company and Unit performance targets with employee performance targets while motivating employees to improve their competence and contribution to the Company by optimizing resources to achieve the visions of Company. Principles of Employee Performance Management are focus, measurable, transparent, and objective. Employee Performance Management consists of three cycles, including Planning, Monitoring, and Performance Assessment conducted every 1 (one) semester.

Sistem Penghargaan Reward System

Sistem penghargaan yang diberikan berupa:

- Penghargaan Intrinsik: pendidikan formal, sertifikasi profesi, fasilitas kerja khusus, program keseimbangan hidup, bantuan hukum dan pengakuan (*recognition*).
- Penghargaan Ekstrinsik: kompensasi baik yang bersifat tetap maupun tidak tetap serta manfaat karyawan.

The reward system provided is in the form of:

- Intrinsic awards: formal education, professional certification, special work facilities, work-life balance programs, legal assistance, and recognition.
- Extrinsic Award: both permanent and non-permanent compensation and employee benefits.

Sistem Hubungan Industrial Industrial Relations System

Prinsip yang dipegang dalam sistem hubungan industrial adalah profesional, harmonis, dan transparan. Permasalahan yang dibahas dalam hubungan industrial adalah permasalahan yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan hubungan kerja antara karyawan, manajemen, dan pemerintah.

The principles held in the industrial relations system are professional, harmonious, and transparent. The problems discussed in industrial relations are issues which are directly and indirectly related to work relations between employees, management, and the government.

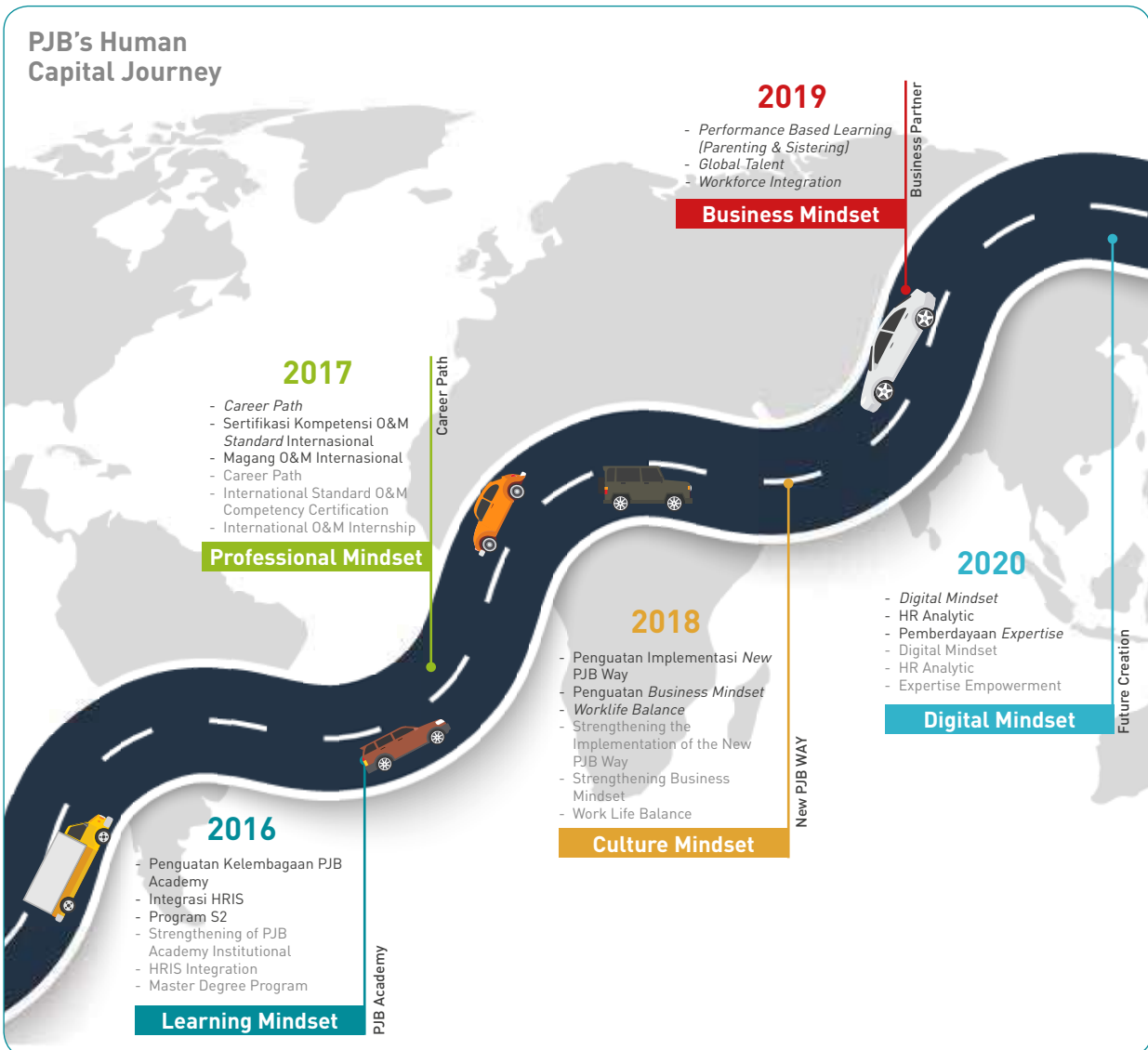


Roadmap Sumber Daya Manusia HC Roadmap

Roadmap SDM disusun sesuai dengan RJPP dan ditinjau secara berkala. Mengacu kepada tema strategis tahunan dari PJB dimana Tahun 2019 merupakan *The Year of Growth*, yaitu perusahaan fokus pada pengembangan usaha melalui percepatan pertumbuhan dengan mengedepankan strategi pengembangan bisnis. Di tahun 2019, Direktorat Sumber Daya Manusia PJB memberikan dukungan melalui berbagai program strategis dengan tema besar *BUSINESS MINDSET* dengan sasaran utama menciptakan insan PJB tidak hanya memiliki kemampuan teknis tinggi, tetapi juga memiliki kemampuan manajerial dengan pola pikir *intrapreneur* (*business mindset*).

The HC Roadmap is prepared in accordance with the CLP and is regularly reviewed. Referring to the annual strategic theme of PJB, 2019 is The Year of Growth, which is Company focused on business development through accelerating growth by prioritizing business development strategies. In 2019, the PJB Directorate of HC provides support through various strategic programs with the theme *BUSINESS MINDSET* with the main goal of creating PJB people not only having high technical abilities, but also having managerial skills with an intrapreneur mindset (*business mindset*).

Roadmap SDM HC Roadmap



Untuk mewujudkan hal itu, program strategis yang menjadi fokus utama SDM di tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM
 - a. Strategi Rekrutmen dan Optimalisasi *Resource* untuk mendukung PLN SOLID,
 - b. Implementasi *Program Performance Based Learning*,
 - c. Penguatan kelembagaan PJB Academy.
2. Peningkatan Integrasi Pengelolaan SDM
 - a. Integrasi *Resource* di internal PJB dan di lingkungan PLN Grup,
 - b. Peningkatan Maturitas Implementasi Budaya Perusahaan,
 - c. Peningkatan Produktivitas SDM dengan cara menempatkan SDM pada Proyek Baru dan Bisnis Penunjang,
 - d. *Human Resource Analytic* berbasis HRIS.
3. Penguatan Efektivitas Organisasi
 - a. Pengembangan *Work Life Balance Organization Culture*,
 - b. Peningkatan kesiapan dan efektivitas organisasi untuk mendukung penugasan PLN dan pengembangan bisnis.

To realize these, the strategic programs as the main focus of HC in 2019 are as follows:

1. HC Capacity and Capability Improvement
 - a. Strategy of Recruitment and Resource Optimization to support PLN SOLID,
 - b. Implementation of Performance Based Learning Programs,
 - c. Institutional strengthening of PJB Academy.
2. Integration Improvement of HR Management
 - a. Resource integration within the PJB internally and within the PLN Group environment,
 - b. Improvement of the Corporate Culture Implementation Maturity,
 - c. Improvement of HC Productivity by placing HC in New Projects and Supporting Businesses,
 - d. HRIS-based Human Resource Analytic.
3. Strengthening Organizational Effectiveness
 - a. Development of Work Life Balance Organization Culture,
 - b. Improvement of organizational readiness and effectiveness to support PLN assignments and business development.

Rekrutmen Sumber Daya Manusia HC Recruitment

Sebagai salah satu program strategis yang dapat mendukung kesiapan kapasitas dan kapabilitas SDM, PJB melakukan *resourcing strategy* melalui *Build, Buy, and Borrow* yang merupakan kombinasi pemenuhan SDM yang berasal dari internal PJB, Tugas karya PLN Group serta rekrutmen *Fresh Graduate*.

- **Build:** mengembangkan talent yang ada di perusahaan, dengan cara merekrut talent-talent baru (*fresh graduate*) dan mengembangkan kompetensi mereka agar dapat memenuhi persyaratan.
- **Buy:** merekrut karyawan yang sudah kompeten dibidang tertentu dari eksternal perusahaan (*expert hiring*).
- **Borrow:** mendatangkan sementara karyawan yang kompeten dari luar perusahaan, diantaranya dengan tugas karya dari dan ke PLN atau ke anak perusahaan PJB.

As one of the strategic programs that can support readiness of HC capacity and capability, PJB conducts a resourcing strategy through Build, Buy, and Borrow which is a combination of fulfilling HC from internal PJB, the work of the PLN Group as well as Fresh Graduate recruitment.

- **Build:** developing talents within the company, including recruiting new talents (fresh graduates) and developing their competencies in order to meet the requirements
- **Buy:** recruiting employees who are competent in certain fields of expertise from external companies (expert hiring)
- **Borrow:** temporary bringing in competent employees from outside the company, including work assignments from and to PLN or to PJB subsidiaries.

Dalam merencanakan kebutuhan karyawan, atau yang disebut dengan *manpower planning*, setidaknya ada tiga faktor yang menjadi pertimbangan, yaitu:

1. Karyawan yang akan pensiun,
2. Pengembangan unit bisnis/usaha perusahaan,
3. Pengembangan organisasi.

In planning employee needs or manpower planning, there are at least three factors to be considered as follows:

1. Employees who will retire
2. Development of business units/business enterprises.
3. Organizational development

Sesuai dengan prosedur yang tertuang dalam PJB IMS (IPM 7.2.2) yaitu merekrut/mengambil kandidat, landasan dari rekrutmen adalah adanya kebutuhan pengadaan human capital yang telah disesuaikan dengan rencana strategi tenaga kerja divisi/unit bisnis. Setelah adanya daftar kebutuhan karyawan baru dari bidang Organisasi, maka bidang rekrutmen dapat melakukan tahap selanjutnya yaitu merencanakan tahapan rekrutmen sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan.

In accordance with the procedures stated in the PJB-IMS (IPM 7.2.2), Recruiting/Taking Candidates, the basis of recruitment is the need for human capital procurement that has been adjusted to workforce strategic plan of the business division/unit. After new employee lists from the Organizational unit are prepared, the recruitment unit can proceed to the next stage, namely the recruitment stage planning in accordance with the applicable rules in the company.

Pada tahun 2019 terdapat beberapa jenis rekrutmen yang dilaksanakan yaitu *Joint Recruitment* PLN Group dan Rekrutmen *Direct Shopping*.

Joint Recruitment PLN Group PLN Group's Joint Recruitment

Pelaksanaan rekrutmen di PLN dan Anak Perusahaannya terpusat melalui mekanisme *Joint Recruitment* PLN Group. Sinergi pelaksanaan rekrutmen ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan integrasi SDM di PLN Group. Proses ini dimulai dengan:

1. PJB mengirimkan data kebutuhan *Manpower Planning* (MPP) ke PLN,
2. PLN melakukan *Joint Recruitment* untuk pemenuhan kebutuhan setiap PLN Group.

Melalui jalur rekrutmen *Joint Recruitment* PLN Group, jumlah karyawan yang direkrut pada tahun 2019 adalah sebanyak 137 karyawan dengan latar belakang pendidikan S2 sebanyak 3 karyawan, S1 sebanyak 110 karyawan dan berpendidikan D3 sebanyak 24 karyawan.

Rekrutmen Direct Shopping SMK Direct Shopping of Vocational Recruitment

Untuk memenuhi kebutuhan karyawan jenjang SMK, PLN Pusat menugaskan PJB untuk bekerjasama dengan PLN Distribusi Jawa Timur dan PLN Batam/Bright. Rekrutmen dilaksanakan dengan metode *Direct Shopping* ke sekolah-sekolah di area Jawa Timur yang sudah bekerjasama dalam program PJB Class dan sekolah-sekolah terpilih berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Jawa Timur. Rekrutmen diawali dengan *roadshow* sosialisasi rekrutmen ke sekolah-sekolah tersebut untuk kemudian dibuka pendaftaran melalui web rekrutmen milik PLN. Perluasan sumber rekrutmen dilakukan selain untuk memenuhi kebutuhan internal perusahaan juga sebagai bentuk kerjasama dan kepedulian PJB terhadap dunia Pendidikan.

Pada tahun 2019, jumlah karyawan yang direkrut melalui jalur rekrutmen *Direct Shopping* SMK adalah sebanyak 6 karyawan.

In 2019 there are several types of recruitment carried out, namely the PLN Group Joint Recruitment and Direct Shopping Recruitment.

Recruitment implementation at PLN and its subsidiaries has been centralized through a single channel of PLN Group's Joint Recruitment. The synergy of the implementation of this recruitment is applied in order to improve the efficiency and integration of PLN Group Human Capital. This process starts with the following:

1. PJB sends Manpower Planning (MPP) needs data to PLN,
2. PLN conducts a Joint Recruitment to meet each PLN Group needs.

Through the PLN Group Recruitment Joint Recruitment channel, total employees recruited in 2019 was 137 employees with Masters education background of 3 employees, bachelor of 110 employees and diploma of 24 employees.

To meet the needs of Vocational High School level employees, the Central PLN assigned PJB to collaborate with PLN East Java Distribution and PLN Batam/Bright. Recruitment is carried out by the Direct Shopping method to schools in the East Java area that have collaborated in the PJB Class program and selected schools based on recommendations from the East Java Education Authorities. Recruitment begins with a recruitment socialization roadshow to these schools to open registration through the recruitment website owned by PLN. The recruitment source is expanded in addition to meeting the internal needs of company as well as a form of cooperation and awareness of PJB towards the Education world.

In 2019, total employees recruited through the Vocational High School Direct Shopping recruitment channel is 6 employees.



Jumlah dan Komposisi Sumber Daya Manusia

Total and Composition of HC

Jumlah SDM pada tahun 2019 adalah sebanyak 3.186 karyawan. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2018 sebanyak 3.085 karyawan. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya penambahan karyawan baru dari *joint recruitment* dengan PLN. Komposisi karyawan berdasarkan tingkat pendidikan, jenjang jabatan, kelompok usia, dan jenis kelamin telah diuraikan pada bagian Profil Perusahaan sub bab Profil SDM PJB.

Total HC in 2019 was 3,186 employees. This number increased compared to 2018 of 3,085 employees. The increase was caused by the addition of new employees from joint recruitment with PLN. The composition of employees in accordance with education level, position level, age group, and gender has been described in the Company Profile section of the HC Profile sub-section.

Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia

Education and Training of HC

Selama tahun 2019, pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan adalah sebanyak 619 *batch* dengan jumlah peserta yang diikutsertakan sebanyak 12.024 orang. Seluruh karyawan memiliki kesempatan yang sama dalam ikut serta dalam pelatihan dan pendidikan. Namun dalam pelaksanaannya tetap disesuaikan dengan bidang jabatan, tingkat kebutuhan dan kemampuan Perusahaan saat ini.

During 2019, the Education and Training implementation was 619 batches with a total of 12,024 participants. All employees have the same opportunity to participate in training and education. However, the implementation is still adjusted to the current position, needs and capability of the Company.

Pendidikan dan pelatihan SDM secara lebih lengkap telah diuraikan pada bagian Profil Perusahaan sub bab Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal.

Further complete HC education and training has been described in the Company Profile section of the Education and Training sub-section of the Board of Commissioners, Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit.

PJB Academy

PJB Academy

PJB Academy, dibentuk seiring dengan proses transformasi PJB Group berdasarkan Surat Keputusan Direksi PJB Nomor 041 tanggal 1 Juli 2016. Terbentuknya PJB Academy dilatarbelakangi oleh perlunya untuk membangun dan memperkuat kembali kejayaan PJB dalam keseimbangan, yaitu kompetensi *Operation & Maintenance* (O&M) serta Manajemen Aset Pembangkitan sebagai modal utama untuk memberikan pelayanan terbaik kepada *stakeholder*, sementara di sisi lain, untuk menjamin keberlanjutan dan pertumbuhan korporasi, maka PJB harus berkembang maju dalam *competitive market*, seiring dengan dinamika bisnis ketenagalistrikan di Indonesia yang utamanya sebagai dampak *multiplier effect* dari proyek 35 GW.

PJB Academy, established along with the transformation process of PJB Group based on Decree of PJB's Board of Directors No. 041 on July 1, 2016. The establishment of PJB Academy is according to the needs to rebuild and enhance the glory of PJB in balance, namely Operation & Maintenance competence and Power Plant Asset Management as the main capital to provide best services to stakeholders; while on the other hand, to guarantee corporate growth, PJB has to develop in the competitive market, in line with the dynamics of the electricity business in Indonesia which is mainly the impact of the multiplied effect of the 35 GW project.

Sejak tahun 2017, PJB Academy mendapatkan *International Certificate* dari PEARSON UK. Sertifikat tersebut sebagai pengakuan bahwa perangkat pembelajaran di PJB Academy sudah berstandar kelas dunia dan menjadi rujukan *best practice*. Hal ini berarti kualitas proses pembelajaran PJB Academy sudah memenuhi standar PEARSON UK.

Since 2017, PJB Academy has received an International Certificate from PEARSON UK. The certificate is a recognition that the learning tools at PJB Academy already have world class standard and become a reference for best practices. It means that the quality of PJB Academy's learning process has met PEARSON UK standards.

Pada tahun 2019, sudah ketiga kalinya PJB Academy mendapatkan *International Certificate* dari PEARSON UK.

In 2019, PJB Academy has received the International Certificate from PEARSON UK for the third time.

Di Tahun 2019, sedikitnya 8 (delapan) Civitas PJB Academy telah memiliki sertifikat *Learning Technologist*, sebagai pengakuan atas kemampuan dan pengetahuan mereka untuk mengelola *learning process & content*.

Selain itu, tahun 2019 ini PJB juga melakukan penguatan kelembagaan PJB Academy dengan menempatkan direktur Utama PJB sebagai *Dean* dan anggota direksi sebagai *Vice Dean*. Jajaran Direksi PJB menjadi pengajar, mengingat proses pembelajaran bukan hanya soal kompetensi, namun masalah manajerial. Keberadaan Direksi PJB sebagai *Dean* dan pengajar diharapkan semua karyawan menjadi *aware*, *update* dan *engage* terhadap peningkatan kinerja perusahaan.

In 2019, at least 8 (eight) PJB Academies Civitas have obtained Learning Technologist certificates as recognition of their ability and knowledge to manage learning processes & content.

In addition, in 2019 PJB also strengthened the PJB Academy institution by placing the President Director of PJB as Dean and members of the board of directors as Vice Dean. PJB's Directors become instructors, considering that the learning process is not on competence only, but also the managerial problems. The existence of PJB Directors as Dean and instructors is expected that all employees will aware, update and engage towards improving company performance.

Realisasi Program Kerja Sumber Daya Manusia Tahun 2019 Realization of the HC Work Program in 2019

Direktorat SDM PJB mempunyai beberapa indikator dalam mengukur kinerja pengembangan SDM melalui pencapaian sasaran strategis PJB SDM, di antaranya adalah kesiapan *Human Capital Readiness (HCR)*, *Organization Capital Readiness (OCR)* dan *Information Capital Readiness (ICR)* dalam mengukur kematangan atau maturitas proses bisnis serta hasil kinerja yang dicapai. Pada tahun 2019, pencapaian pemenuhan target tersebut adalah sebagai berikut:

PJB HC Directorate has several indicators in measuring HC development performance through the achievement of PJB HC strategic objectives, including the readiness of Human Capital Readiness (HCR), Organization Capital Readiness (OCR) and Information Capital Readiness (ICR) in measuring the business processes maturity and performance results achieved. In 2019, the achievement of meeting these targets will be as follows:

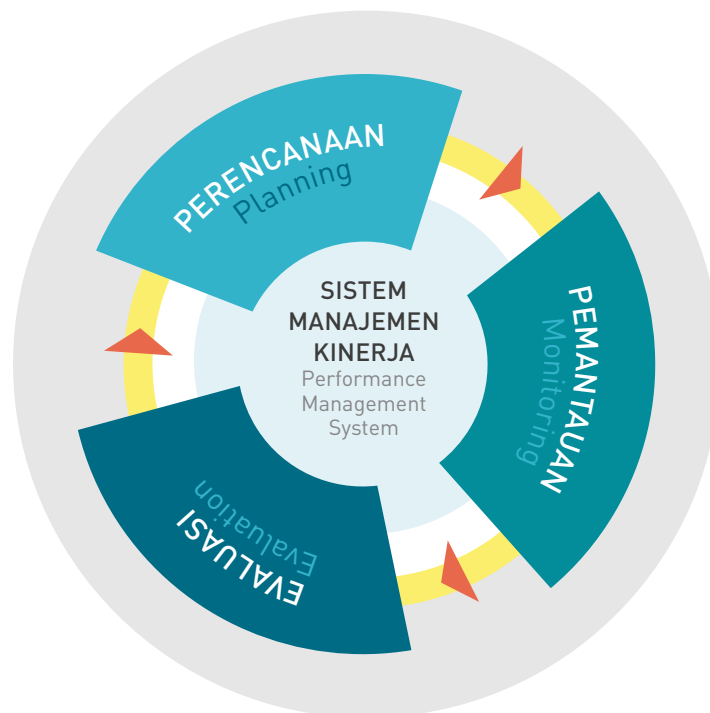
Indikator Kinerja SDM Tahun 2019 HC Performance Indicators in 2019

Aspek Aspects	Target	Realisasi Realization	
		Level	Pencapaian Achievement
HCR	4,45	4,45	100%
OCR	4,45	4,45	100%
ICR	4,03	4,26	106%

Sistem Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia Performance of Management System of HC

Sistem Manajemen Kinerja Karyawan (SIMKK) PJB menggunakan sistem online yang terbagi dalam beberapa periode untuk memastikan terjadinya komunikasi, diskusi, dan bimbingan yang efektif dari atasan kepada para staf. Pelaksanaan SIMKK mengacu pada prinsip fokus, terukur, transparan, dan objektif. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, SIMKK dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu tahapan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja karyawan.

PJB's Employee Performance Management System (SIMKK) uses an online system that is divided into several periods to ensure effective communication, discussion, and guidance from higherlevel to lower-level employees. The implementation of SIMKK refers to the principle of focus, measurable, transparent, and objective. In accordance with these principles, SIMKK is divided into 3 (three) stages: planning, monitoring, and evaluating employee performance.



1. Perencanaan

Persetujuan antara Atasan dan Bawahan terkait pekerjaan dan target yang harus diselesaikan

2. Pemantauan

Atasan memonitor progres pencapaian target bawahannya dan melakukan kegiatan *coaching/mentoring/counseling*.

3. Evaluasi

Atasan melakukan pengukuran nilai sasaran kinerja perorangan dan kompetensi individu karyawan.

PJB melaksanakan penilaian kinerja terhadap karyawan pada setiap semester yang dilakukan oleh Divisi *Performance Management & Sistem Informasi Human Capital*.

1. Planning

Agreement between higher-level and lower-level employees on job description and target to accomplish

2. Monitoring

The higher-level employee monitors the lower-level employee's job completion progress and conducts coaching/mentoring/counseling

3. Evaluation

The higher-level employee assesses the individual performance results and competency of the lower-level employee.

PJB carries out employee performance appraisals every semester implemented by the Human Capital Performance Management & Information System Division.

Indeks Keterikatan Kerja Karyawan Employee Engagement Index

PJB mengukur keterikatan karyawan terhadap Perusahaan melalui *Employee Engagement Survey* terhadap seluruh elemen tenaga kerjanya secara berkala, guna memastikan bahwa seluruh SDM berkontribusi maksimal terhadap kemajuan Perusahaan.

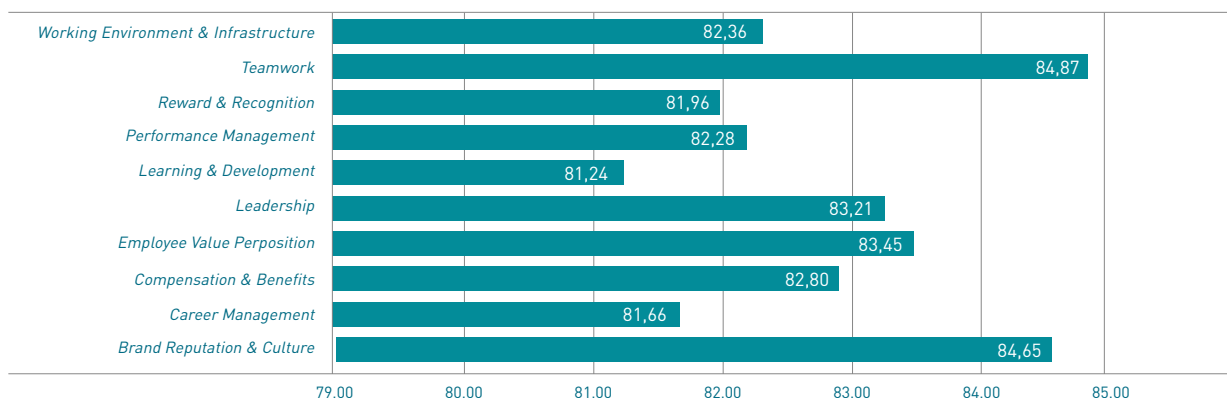
Hasil *Employee Engagement Survey* pada tahun 2019 adalah sebesar 82,94 (**SANGAT TERIKAT**). Hasil tersebut meningkat dibandingkan tahun 2018 sebesar 82,78 (**SANGAT TERIKAT**). Berikut adalah rincian hasil *Employee Engagement Survey* pada tahun 2019:

PJB measures employee engagement to the Company through a Workforce Engagement Survey on all elements of its workforce on a regular basis, to ensure that all human capital has contributed optimally for the Company's progress.

The results of the Employee Engagement Survey in 2019 were 82.94 (**VERY ENGAGE**). These results increased compared to 2018 which was 82.78 (**VERY ENGAGE**). The following are the details of the Employee Engagement Survey results in 2019:

Hasil Employee Engagement Survey Tahun 2019

Employee Engagement Survey Results in 2019



Indeks Kepuasan Kerja Karyawan

Job Satisfaction Index

PJB senantiasa berupaya memperhatikan dan meningkatkan kepuasan karyawan melalui penerapan berbagai kebijakan seperti remunerasi dan penghargaan. PJB secara rutin melakukan evaluasi terhadap kepuasan karyawan melalui *Job Satisfaction Survey* yang dilakukan secara online. Hasil survei tersebut kemudian dianalisis untuk kemudian dirumuskan tindak lanjutnya, baik tindak lanjut yang bersifat korporat maupun yang menjadi kewenangan unit/unit di struktur organisasi Perusahaan.

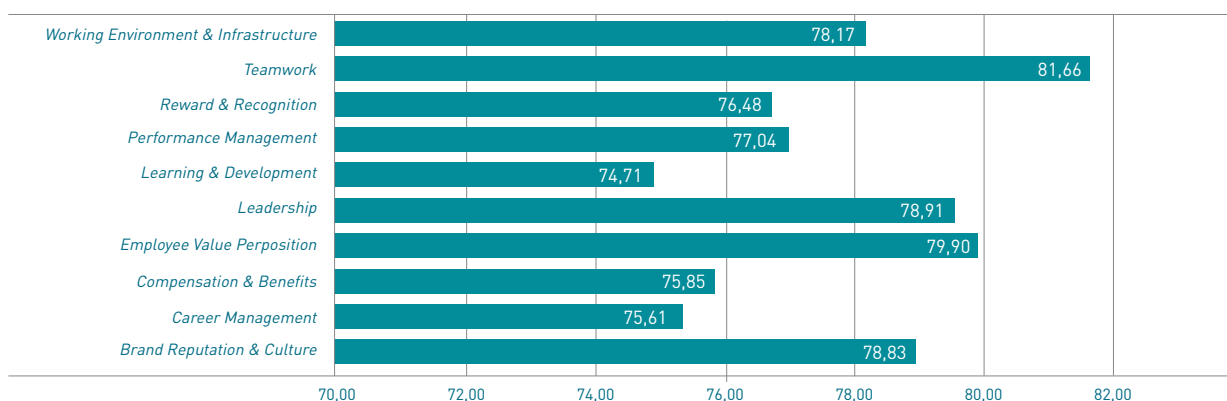
PJB always strives to pay attention and increase employee satisfaction through the implementation of various policies such as remuneration and rewards. PJB routinely evaluates the employee satisfaction through online *Job Satisfaction Survey*. The results of the survey are then analyzed to formulate follow-up actions, both follow-up from the Company and other units in the Company's organization structure.

Hasil *Job Satisfaction Survey* pada tahun 2019 adalah sebesar 77,72. **(SANGAT PUAS)**. Hasil tersebut meningkat dibandingkan tahun 2018 sebesar 77,22 **(SANGAT PUAS)**. Berikut adalah rincian hasil *Job Satisfaction Survey* pada tahun 2019:

The results of the *Job Satisfaction Survey* in 2019 were 77.72. **(VERY SATISFIED)**. These results increased compared to 2018 amounting to 77.22 **(VERY SATISFIED)**. The following are details of the results of the *Job Satisfaction Survey* in 2019:

Hasil Job Satisfaction Survey Tahun 2019

Job Satisfaction Survey Results in 2019



Pengembangan Karir dan *Talent Management* Career Development and Talent Management

PJB memfasilitasi pengembangan karir melalui program kaderisasi yang mengacu pada Surat Keputusan Direksi Nomor 059.K/010/DIR/2015 tentang Program Kaderisasi di Lingkungan PT PJB. Program kaderisasi dilaksanakan setiap tahun di seluruh jenjang jabatan struktural, yaitu Supervisor Dasar, Supervisor Atas, Manajemen Dasar, Manajemen Menengah, dan Manajemen Atas. Untuk mendapatkan kader yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan dilakukan serangkaian penilaian yang meliputi:

1. Seleksi Administrasi: memenuhi persyaratan dari sisi grade, penilaian kinerja, pendidikan, usia.
2. Seleksi Potensi: serangkaian tes potensi dengan mengacu pada standar persyaratan minimum psikogram.
3. Seleksi Kompetensi: serangkaian *assessment* kompetensi mengacu pada standar kompetensi.
4. Panel Manajemen: penilaian yang dilakukan oleh manajemen untuk memvalidasi potensi dan kompetensi pegawai berdasarkan penilaian kinerja dan *track record* yang ditunjukkan.

Perusahaan akan mengelompokkan sejumlah kader sesuai kategorisasi, yang digolongkan berdasarkan tinggi rendahnya potensi dan kompetensi yang dimiliki. Kategorisasi kader dipergunakan dalam prioritas pengembangan dan percepatan karirnya

PJB facilitates career development through regeneration programs refers to Directors Decree No. 059.K/010/ DIR/2015 concerning the Regeneration Program at PT PJB. The regeneration program is held annually for all structural positions, including Basic Supervisor, Top Level Supervisor, Basic Management, Middle Level Management, and Top Level Management. To obtain talents who fulfill the required qualifications, a series of assessments are conducted which include:

1. Administrative Selection: fulfilling the requirements in terms of grade, performance assessment, education, and age.
2. Potential Selection: a series of potential tests referring to the minimum standard requirements of psychograms.
3. Competency Selection: a series of competence assessments referring to competence standards.
4. Management Panel: assessment conducted by management to validate employee potential and competency in accordance to performance assessment and track record.

The Company then classifies a number of talents according to categorization, which are classified based on potential and competencies level. The categorization of talents is applied in the development priorities and career acceleration.



PJB mengikutsertakan seluruh karyawan dalam program kaderisasi tanpa membedakan *gender* ataupun faktor-faktor lain seperti suku, agama, dan antar golongan. Aspek yang dinilai dalam program pengembangan karir karyawan adalah potensi, kompetensi, dan keterampilan individual karyawan, dengan mempertimbangkan kesesuaian profil jabatan.

Talent Management merupakan program percepatan pengembangan karier bagi karyawan yang memiliki level kompetensi melebihi persyaratan kompetensi pada levelnya. Kader akan melalui serangkaian penugasan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh panel manajemen sebelum dinyatakan mampu naik jabatan. Serangkaian penugasan tersebut terdiri atas:

1. **Job Enlargement** berupa pengkayaan pada penugasan pada jabatan setara yang selevel pada rumpun jabatan yang sama.
2. **Job Enrichment** berupa penugasan yang mendalam pada bidangnya.
3. **Coaching, Mentoring and Counselling** merupakan pengembangan bagi kader yang memiliki bawahan atau jabatan ekspertis satu tingkat diatas staf pelaksana.
4. **Pelatihan diberikan baik bersifat *soft skill* maupun *hard skill*.** Bagi kader pada jabatan struktural lebih diarahkan pada pelatihan *Managerial Skill* maupun *Directorship Program* sedangkan pada kader *expertise* diarahkan pada pelatihan yang mengutamakan peningkatan kompetensi teknis.

Pada tahun 2019, PJB telah melakukan serangkaian kegiatan Kaderisasi untuk berbagai level jabatan. Ketersediaan kader untuk jabatan Struktural seperti tergambar dibawah ini:

Tabel Pemenuhan Jabatan Struktural
Table of Structural Position Fulfillment

Deskripsi Description	Jumlah Kader Total Talents	Jumlah Formasi Total Formations
Manajemen Atas Top Level Management	6	2
Manajemen Tengah Middle Level Management	54	59
Manajemen Dasar Basic Management	266	153
Supervisor Atas Top Level Supervisor	273	440

Sebagai bagian dari program pengembangan karir karyawan dan mendukung roadmap SDM tahun 2019 melalui Integrasi *Resource* di Internal PJB dan di lingkungan PLN Group, PJB memberikan penugasan kepada karyawan untuk berkarir baik ke anak perusahaan dan perusahaan afiliasi PJB serta ke PLN Group melalui Sistem Tugas Karya. Selain itu PJB juga menerima karyawan tugas karya dari PLN group untuk memenuhi jabatan yang membutuhkan kompetensi khusus yang belum dapat dipenuhi oleh PJB. Berikut jumlah karyawan tugas karya masuk PJB dan tugas karya keluar PJB pada tahun 2019 :

PJB assigns all employees in to join the regeneration program regardless of gender or other factors such as ethnicity, religion, and groups. Aspects assessed in the employee career development program are individual potential, competencies, and skills by considering the job profile suitability.

Talent Management is a career acceleration development program for employees with high-level competency that exceeds the standard. The talents then go through a series of assignments and evaluations conducted by the management panel before declared as capable of promotion. The series of assignments consists of the following:

1. **Job Enlargement** is in the form of enrichment on assignments to positions that are equal to the same position group.
2. **Job Enrichment** is in the form of deep assignments on the field concerned.
3. **Coaching, Mentoring and Counselling** are the development of talents who have subordinates or expert positions which ar one level above the operation staff.
4. **Training provided both in a form of soft skill and hard skill.** For talents in structural positions, it is more specifically directed to training on Managerial Skills and Directorship Programs, while the expertise talents are directed to training that prioritizes improving technical competence

In 2019, PJB has conducted a series of talent activities for various position levels. Availability of talents for Structural positions is illustrated as follows:

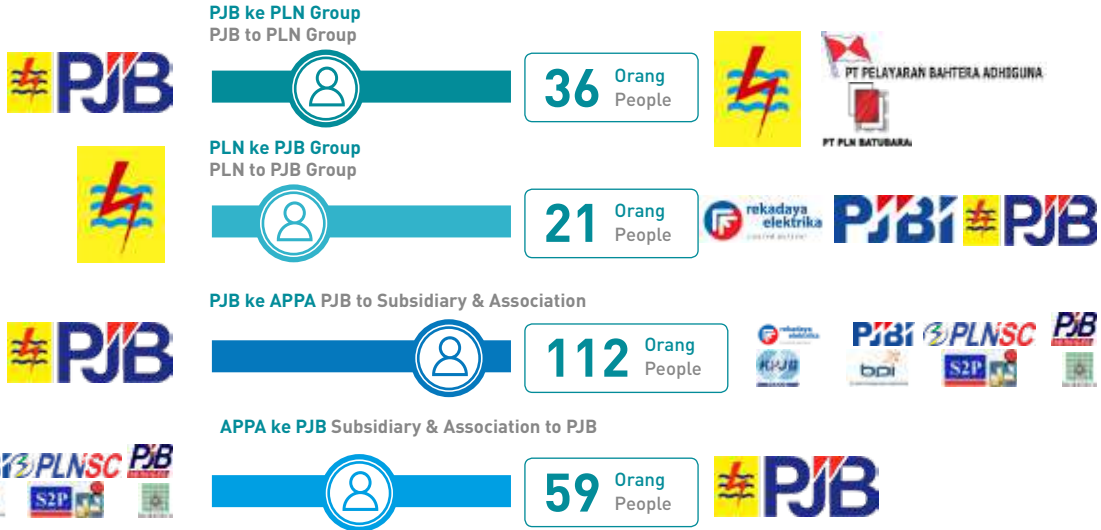
As part of the employee career development program and supporting the 2019 HC roadmap through the Resources Integration in the Internal PJB and within the PLN Group, PJB assigns employees to careers both with subsidiaries and PJB affiliated companies as well as to the PLN Group through the Work Assignment System. In addition, PJB also accepts work assignments from PLN group to fulfill positions requiring special competencies that PJB cannot fulfill. The following are the number of PJB entry work assignments and PJB exit assignments in 2019:

Jumlah Karyawan Tugas Karya dari dan ke PLN
Number of Employees of Work Tasks from and to PLN



Karyawan PT PJB
PT PJB Employees **3154**

Status Tugas Karya
Job Status Status **228**



Remunerasi Sumber Daya Manusia HC Remuneration

PJB senantiasa mengimplementasikan strategi remunerasi yang kompetitif di industri tenaga listrik guna menarik, memotivasi individu-individu terbaik yang dimiliki PJB. PJB memiliki kebijakan remunerasi yang berlandaskan pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2019-2021 Nomor PT PJB: 003.K/021/DIR/2019 serta disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sesuai PKB 2019-2021, dalam nomenklatur kebijakan remunerasi di PJB terdapat istilah Kompensasi dan Sistem Remunerasi 3P. Kompensasi merupakan imbalan yang diberikan oleh Perusahaan kepada Karyawan dalam bentuk uang yang diberikan pada kurun waktu tertentu (bulanan, semesteran, tahunan, winduan, dan lainnya). Sementara Sistem Remunerasi 3P adalah sistem remunerasi sebagai Kompensasi atas kompetensi individu, tanggung jawab dalam Jabatan, dan prestasi kerja yang diberikan kepada Karyawan dalam bentuk *Pay for Person*, *Pay for Position*, dan *Pay for Performance*. PJB menetapkan besaran remunerasi karyawan dengan mengacu pada Keputusan Direksi PJB. Berdasarkan keputusan Direksi tersebut, terdapat 3 jenis remunerasi yang diuraikan sebagai berikut:

PJB always implements competitive remuneration strategies in the electricity industry to attract, motivate the best individuals owned by PJB. PJB has a remuneration policy in accordance with the Collective Labor Agreement (PKB) for the period 2019-2021 PT PJB No. 003.K/021/DIR/2019 and adjusted to Law No. 13 of 2003 concerning Employment.

According to Collective Labor Agreement (CLA) 2019-2021, in the nomenclature of PJB's remuneration policy, there is a term of 3P Compensation and Remuneration System. Compensation is a remuneration given by the Company to the Employee in the cash that is granted for a certain period of time (monthly, semiannual, annual, and others). While the 3P Remuneration System is a remuneration system as Compensation for individual competencies, Responsibilities in Position, and job performance given to employees in the form of *Pay for Person*, *Pay for Position*, and *Pay for Performance*. PJB determines the amount of employee's remuneration by referring to PJB's Board of Directors. In accordance with the Decree of the Board of Directors, there are three types of remuneration as follows:

Pay for Person (P1)

Tarif *Grade* (*Pay for Person*) adalah Kompensasi dalam bentuk uang setiap bulan, untuk menghargai kompetensi, pengalaman kerja, dan masa kerja yang besarnya ditentukan berdasarkan *Grade* dan Skala dengan mengikuti kenaikan remunerasi PT PLN (Persero).

Pay for Position (P2)

Tunjangan Posisi (*Pay for Position*) adalah Kompensasi yang melekat pada jabatan yang besarnya ditentukan berdasarkan pengetahuan yang dibutuhkan, kompleksitas permasalahan yang dihadapi, tanggung jawab jabatan, tingkat kemahalan daerah dan faktor industri/indeks pembeda pasar/kompetensi khusus/keunggulan komparatif perusahaan, serta diberikan dalam bentuk uang setiap bulan yang bersifat tetap.

Pay for Performance (P3)

Pay for Performance adalah Kompensasi atas prestasi kerja Karyawan, penghargaan dari Perusahaan berdasarkan hasil kinerja yang dicapai, baik kinerja individu, kinerja unit maupun kinerja korporat yang merupakan kontribusi nyata dan terukur. PJB menerapkan kebijakan sistem remunerasi dengan berpedoman pada konsep *Merit System*. Perusahaan juga selalu memastikan telah mentaati seluruh aturan yang berlaku yang terkait dengan sistem remunerasi. Terkait dengan remunerasi, PJB senantiasa berupaya agar tidak terjadi gap remunerasi terlalu tinggi.

Pay for Person (P1)

The tariff for Pay for Person is a monthly compensation in cash, to appreciate the competence, work experience, and term of office which the amount is determined in accordance with Grade and Scale by following the increase in remuneration of PT PLN (Persero).

Pay for Position (P2)

Position Allowances (*Pay for Position*) is inherent to a position which is determined in accordance with the knowledge required, the complexity of the problems encountered, job responsibilities, regional cost, and industrial/market differentiator/special competency/comparative advantage of the company, in the fixed monthly allowances.

Pay for Performance (P3)

Pay for Performance is Compensation for Employee's performance, reward from the Company is according to the performance results achieved, whether individual performance, unit performance or corporate performance as a tangible and measurable contribution. PJB implements remuneration system policy based on merit system concept. The Company also always ensures that it complies with all applicable rules related to the remuneration system. Related to remuneration, PJB always strives to avoid sharp remuneration gap.

Penerapan Reward and Punishment Reward and Punishment Implementation

Bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan dibedakan dalam dua jenis, yaitu penghargaan ekstrinsik dan intrinsik. Penghargaan ekstrinsik diberikan dalam bentuk kompensasi dan manfaat karyawan terdiri dari:

1. Tunjangan-tunjangan bagi Pegawai yang mencakup: tambahan tunjangan posisi, tunjangan hari raya (THR), tunjangan cuti tahunan, tunjangan cuti besar, tunjangan winduan, premi piket shift, pakaian dinas, bantuan pengganti fasilitas perumahan (BPFP), program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bantuan pinjaman pembelian rumah pegawai (BPPR), rumah dinas, kendaraan dinas, bantuan alat komunikasi, bantuan uang makan, dan lain-lain.
2. Insentif prestasi kinerja semesteran.
3. Bonus/jasa produksi dan benefit lain.

Dan penghargaan Intrinsik yang diberikan berupa:

1. Program pendidikan formal dan sertifikasi profesi.
2. Fasilitas kerja khusus diberikan kepada Pegawai yang berhasil membuat inovasi yang berdampak pada efisiensi biaya dan peningkatan pendapatan.
3. Program prestasi kerja khusus yang dapat meningkatkan loyalitas pada perusahaan.

Awards presented to employees are divided into two types, namely extrinsic and intrinsic rewards. Extrinsic awards are given in the form of compensation and employee benefits consist of the following:

1. Allowances for Employees, including: additional position allowances, holiday allowances (THR), annual leave allowances, sabbatical leave allowances, eight-year-work allowances, shift picket premiums, clothing allowance, housing substitute assistance, pension plans benefit, employee housing loan assistance, official housing, official vehicles, communication aids, food allowances, etc.;
2. Performance achievement incentives for each semester;
3. Bonus/production services and other benefits.

Intrinsic reward presented in the form of:

1. Formal education and professional certification program;
2. Specific work facilities are provided to employees who succeed in making innovations that affect cost efficiency and increased revenue;
3. Specific work performance programs that can enhance loyalty to the company;

4. Bantuan hukum berupa pembelaan atas tuntutan hukum dari pihak lain terkait tugas dan tanggung jawab di perusahaan.
5. Penghargaan Karyawan berprestasi.
Pada tahun 2019, terdapat 25 karyawan yang mendapatkan penghargaan yaitu sebagai berikut:

4. Legal assistance in the form of a defense of lawsuits from other parties regarding tasks and responsibilities to the company;
5. Employee achievement awards.
In 2019, there were 25 employees received awards as follows:

Tabel Penghargaan kepada Karyawan Tahun 2019

Table of Awards to Employees in 2019

Jumlah Karyawan Total Employees	Jenis Penghargaan Type of Award
12 orang 12 employees	<i>Benchmarking sebagai Reward Pemenang Lomba Karya Inovasi PLN Tahun 2018 Tingkat Nasional</i> Benchmarking as the National Award for 2018 National Innovation Competition Winners
10 orang 10 employees	<i>Benchmarking sebagai Reward Beberapa Pemenang Lomba Karya Inovasi PLN Tahun 2019 Tingkat Nasional</i> Benchmarking as the National Award for Reward for Several 2019 National Innovation Competition Winners
3 orang 3 employees	<i>Benchmarking sebagai Reward Beberapa Tim Malcolm Baldrige kategori Band Industry Leader</i> Benchmarking as a Reward for Several Malcolm Baldrige Team in the Band Industry Leaders category

Sedangkan bentuk-bentuk sanksi yang diberikan berupa:

1. Penundaan kenaikan grade,
2. Pemotongan tunjangan posisi (P2),
3. Pemotongan atau penghapusan insentif prestasi kinerja,
4. Demosi,
5. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

While the forms of sanctions provided are as follows:

1. Grade promotion delay,
2. Reduction of Pay for Position (P2),
3. Reduction or elimination of performance achievement incentives,
4. Demotion,
5. Work termination (PHK).

Pada tahun 2019, tidak ada karyawan yang mendapatkan sanksi.

In 2019, there were no employees got sanctions.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Occupational Health and Safety (OHS)

PJB memandang bahwa kesehatan dan keselamatan kerja bagi karyawan merupakan aspek penting yang berpengaruh terhadap keberlangsungan aktivitas operasional Perusahaan. Tingkat kesehatan dan keselamatan karyawan memiliki dampak yang signifikan terhadap performa dan hasil kerja karyawan, serta berdampak terhadap hubungan karyawan dengan karyawan lain. Uraian lebih lanjut mengenai K3 akan dijelaskan kembali di bagian *Corporate Social Responsibility* sub bab Tanggung Jawab kepada Tenaga Kerja.

PJB considers that occupational health and safety for employees is an important aspect that influences the sustainability of the Company's operational activities. The level of health and safety has a significant impact on employee performance and achievement, and has an impact on the relations among employees. Further description of OHS can be found in the Corporate Social Responsibility section, Responsibility to Employee sub-section.

Hubungan Industrial Industrial Relations

Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Industrial relations are a system of relationships established between parties in the process of producing goods and/or services consist of the elements, including employers, workers/ laborers, and the government according to the principles of Pancasila and the 1945 Constitution of Indonesia.



Tujuan hubungan industrial adalah mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, kondusif dan berkeadilan di perusahaan. Sedangkan serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. PKB antara Manajemen PJB dengan Serikat Pekerja yang berlaku di tahun 2019 adalah PKB 2019-2021.

Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruhnya mempunyai fungsi:

1. Menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya.
2. Menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi.
3. Menyalurkan aspirasi secara demokratis.
4. Mengembangkan keterampilan, dan keahliannya.
5. Ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya

Hubungan industrial dilaksanakan melalui sarana: serikat pekerja/serikat buruh, organisasi pengusaha, Lembaga kerja sama bipartit, lembaga kerja sama tripartit, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, dan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Kegiatan Hubungan Industrial antara PJB dan Serikat Pekerja di tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Perundingan dan Penandatanganan PKB PJB 2019-2021
Setelah melalui perundingan hingga empat tahap, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Manajemen PJB dengan Serikat Pekerja PJB akhirnya berhasil ditandatangani. Penandatanganan dilakukan oleh Dirut PJB Iwan Agung Firstantara dan Ketua DPP SP PJB Agus Wibawa pada Selasa tanggal 26 Maret 2019 di Batam. PKB yang telah disepakati tersebut mengatur tentang hak serta kewajiban PJB dan SP PJB.

The purpose of industrial relations is to establish harmonious, dynamic, conducive, and fair industrial relations in the company. While Worker Unions are organizations that are established from, by, and for workers/laborers both internal and external which are free, transparent, independent, democratic, and responsible to hold, defend, and protect rights and interests of workers/laborers and improve the welfare of workers / laborers and their families. The Collective Labor Agreement between PJB and the Workers Union effective in 2019 is the Collective Labor Agreement 2019-2021.

In establishing industrial relations, workers and Worker Unions have the following functions:

1. Working in accordance with their obligations.
2. Maintaining discipline for the continuity of production.
3. Aspiring democratically.
4. Developing skills and expertise.
5. Participating in developing the company and promoting the welfare of members and their families.

Industrial relations are established through Worker Unions/ Worker Unions, employer organizations, bipartite cooperated institutions, tripartite cooperated institutions, company regulations, collective labor agreements, labor legislation, and Conflict Settlement on Industrial Relations institutions.

Industrial relations activities between PJB and Worker Unions in 2019 are as follows:

1. Discussion and Signing of PJB 2019-2021 CLA
After negotiating through four stages, the Collective Labor Agreement (CLA) between PJB Management and Worker Unions was finally signed. The signing was conducted by the Director of PJB, Iwan Agung Firstantara and the Chairman of the DPP Worker Unions PJB, Agus Wibawa on Tuesday, March 26, 2019 in Batam. The agreed PKB regulates the rights and obligations of PJB and SP PJB.



2. Rapat LKS Bipartit

- Lembaga Kerja Sama Bipartit (LKS Bipartit) adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh.
- PJB telah melaksanakan LKS Bipartit secara berkala dengan SP PJB, dalam kurun waktu 1 bulan sekali, sesuai jadwal yang telah disepakati dalam Rencana Kerja (*Workplan*).



2. Bipartite LKS Meeting

- Bipartite Cooperation Institution is a communication and consultation forum on matters relating to industrial relations in a company whose members consist of employers and Worker Unions/Worker Unions that have been registered at the agency responsible for manpower or workers/laborers.
- PJB has carried out Bipartite Cooperation Institutions regularly with Worker Unions PJB, within a period of once a month, according to the schedule agreed in the Work Plan



3. Rapat Manajemen Berkala

- Pertemuan Berkala antara Manajemen dan SP ini dilakukan sebagai rapat monitoring periodik untuk saling mengevaluasi bersama agar PKB terjamin pelaksanaannya sesuai dengan kesepakatan.
- Pertemuan ini dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun. Pada tahun 2019, pertemuan berkala ini dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2019 dan 19 Desember 2019.



3. Periodic Management Meeting

- This Periodic Meeting between Management and SP is conducted as a periodic monitoring meeting to mutually evaluate each other so that CLA is guaranteed to be carried out in accordance with the agreement.
- This meeting is held 2 (two) times a year. In 2019, this periodic meeting held on July 23, 2019 and December 19, 2019.



4. Pelaksanaan HUT SP PJB Tahun 2019

HUT PJB Tahun 2019 diperingati pada tanggal 23 Oktober 2019 dengan diwarnai pelaksanaan Talkshow dengan tema "Privatisasi Energi dan *Energy Outlook* Indonesia".



4. PJB Worker Unions Anniversary in 2019

SP PJB Anniversary in 2019 was commemorated on October 23, 2019 with the implementation of the Talkshow with the theme "Energy Privatization and Energy Outlook in Indonesia".



PLTS Cirata
Cirata SPP

Rencana Program Kerja Sumber Daya Manusia Tahun 2020

HC Work Program Plan for 2020

Rencana Program Kerja SDM di tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan Organisasi Fleksibel & Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia,
2. Mobilitas Bakat sebagai Strategi Peningkatan Kemampuan,
3. Mengelola *Expertise Talent*,
4. Peningkatan kompetensi pengelolaan digital mindset,
5. Program Pembelajaran Holistik & Pervasif,
6. Penyeragaman Budaya Perusahaan,
7. *HR Analytics* sebagai pendekatan berbasis data (*data driven*) untuk peningkatan kinerja SDM dan Organisasi.

Work Program Plan for 2020 is as follows:

1. Creating Flexible Organizations & Optimizing HC,
2. Talent Mobility as a Strategy for Capability Enhancement,
3. Managing the Expertise Talent,
4. Increasing digital mindset management competence,
5. Holistic & Pervasive Learning Program,
6. Aligning Corporate Culture,
7. HC Analytics as a data-driven approach (*data driven*) to improve HC and Organizational performance.





ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS



Pendahuluan
Introduction



Laporan Manajemen
Management Report



Profil Perusahaan
Company Profile



Tinjauan Pendukung Bisnis
Business Support Review



Analisis dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis



Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan Audit
Audited Financial Statements



Referensi Kriteria ARK
ARK Criteria Reference

Sebagai perusahaan yang mengedepankan keberlanjutan usaha dan memiliki Visi menjadi *World Class Company*, PJB berkomitmen untuk senantiasa mengikuti perkembangan ekonomi, baik nasional maupun global demi terwujudnya kontribusi yang maksimal dalam bisnis utama Perusahaan.

As a company promotes business sustainability with a vision to be a World-Class Company, PJB is committed to always following economic developments, both nationally and internationally, to contribute optimally in the Company's main business.

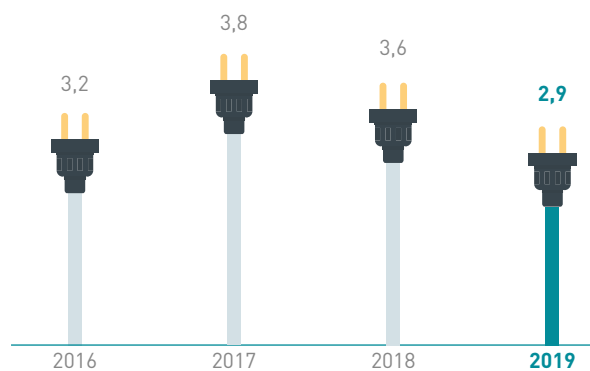
Tinjauan Perekonomian Dunia

World Economy Overview

Pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2019 adalah sebesar 2,9%. Nilai tersebut menurun jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang tumbuh sebesar 3,6%. Pertumbuhan ekonomi global menunjukkan penurunan tajam. Di Amerika Serikat (AS), penurunan suku bunga oleh Federal Reserve AS dapat memberikan dukungan untuk kegiatan ekonomi. Namun, mengingat ketidakpastian kebijakan yang terus-menerus, kepercayaan bisnis yang lemah, dan memudarnya stimulus fiskal, pertumbuhan PDB di AS diperkirakan melambat yaitu sebesar 2,3% pada 2019. Di Uni Eropa, manufaktur akan terus terganjal oleh ketidakpastian global sehingga pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 1,4%. Di Asia Timur tetap menjadi wilayah dengan pertumbuhan tercepat di dunia dan kontributor terbesar bagi pertumbuhan global. Di China, pertumbuhan PDB diproyeksikan turun moderat secara bertahap yaitu sebesar 6,1% pada tahun 2019 lebih kecil dibandingkan tahun 2018 adalah sebesar 6,7%. Kondisi tersebut juga termasuk negara-negara berkembang besar lainnya seperti Brazil, India, Meksiko, Rusia, dan Turki.

World economic growth in 2019 was 2.9%. This value decreased when compared to 2018 which grew by 3.6%. Global economic growth showed a sharp decline. In the United States (US), a reduction in interest rates by the US Federal Reserve could support economic activity. However, the ongoing policy uncertainty, weak business confidence, and waning fiscal stimulus; GDP growth in the US were expected to slow down by 2.3% in 2019. In the European Union, manufacturing would continue to be hampered by global uncertainty so that economic growth was by 1.4%. In East Asia, it remained the fastest-growing region in the world and the biggest contributor to global growth. In China, GDP growth was projected to decline moderately by 6.1% in 2019, lower than in 2018 of 6.7%. The condition also included other large developing countries such as Brazil, India, Mexico, Russia, and Turkey.

Grafik Pertumbuhan Ekonomi Dunia (%)
Chart of Global Economic Growth (%)



Sumber: International Monetary Fund (IMF), *World Economic Outlook* April, 2020
Source: International Monetary Fund (IMF), *World Economic Outlook* April, 2020



Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



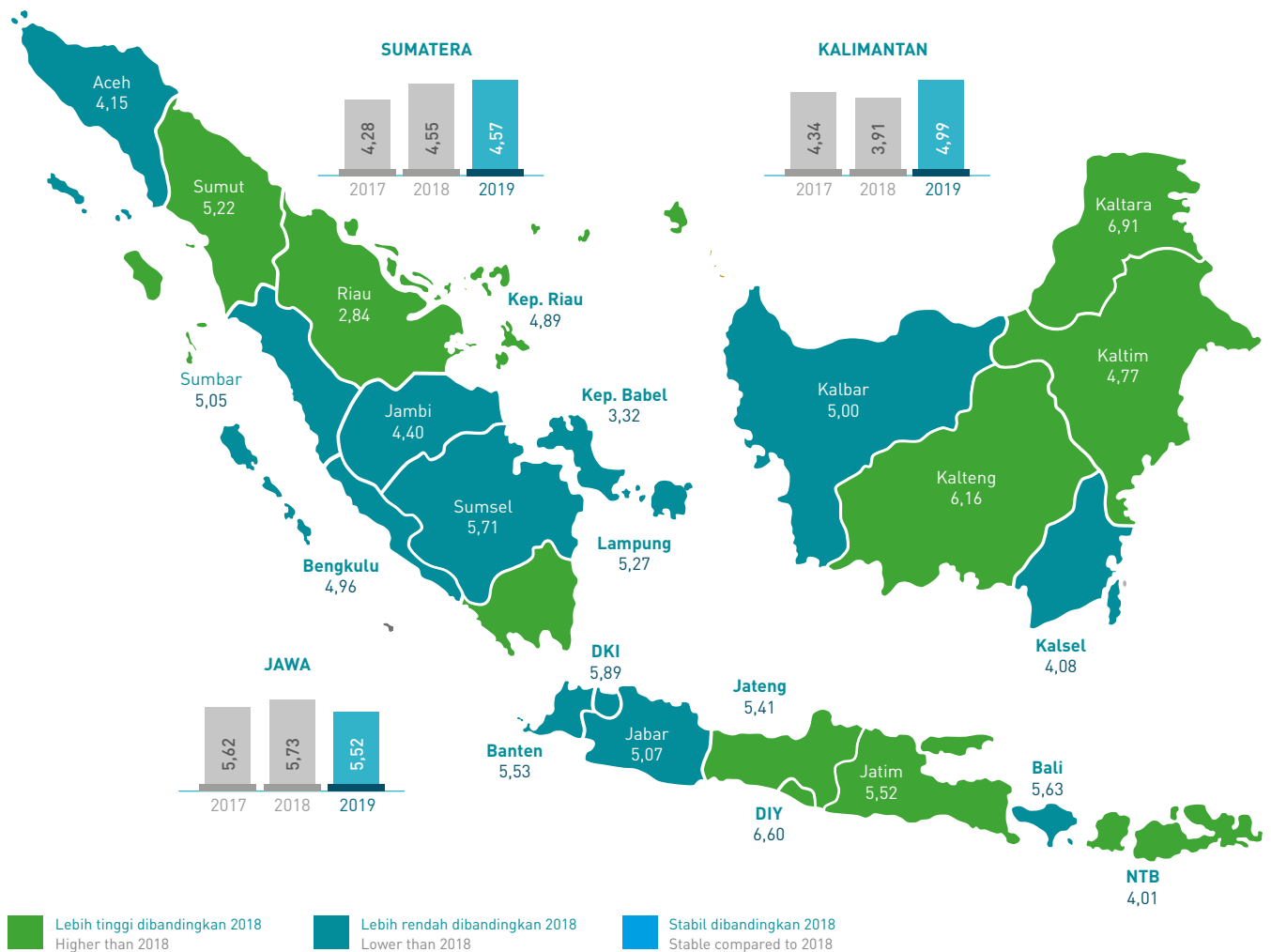
Laporan Keuangan Audit
Audited Financial Statements



Referensi Kriteria AR
AR Criteria Reference

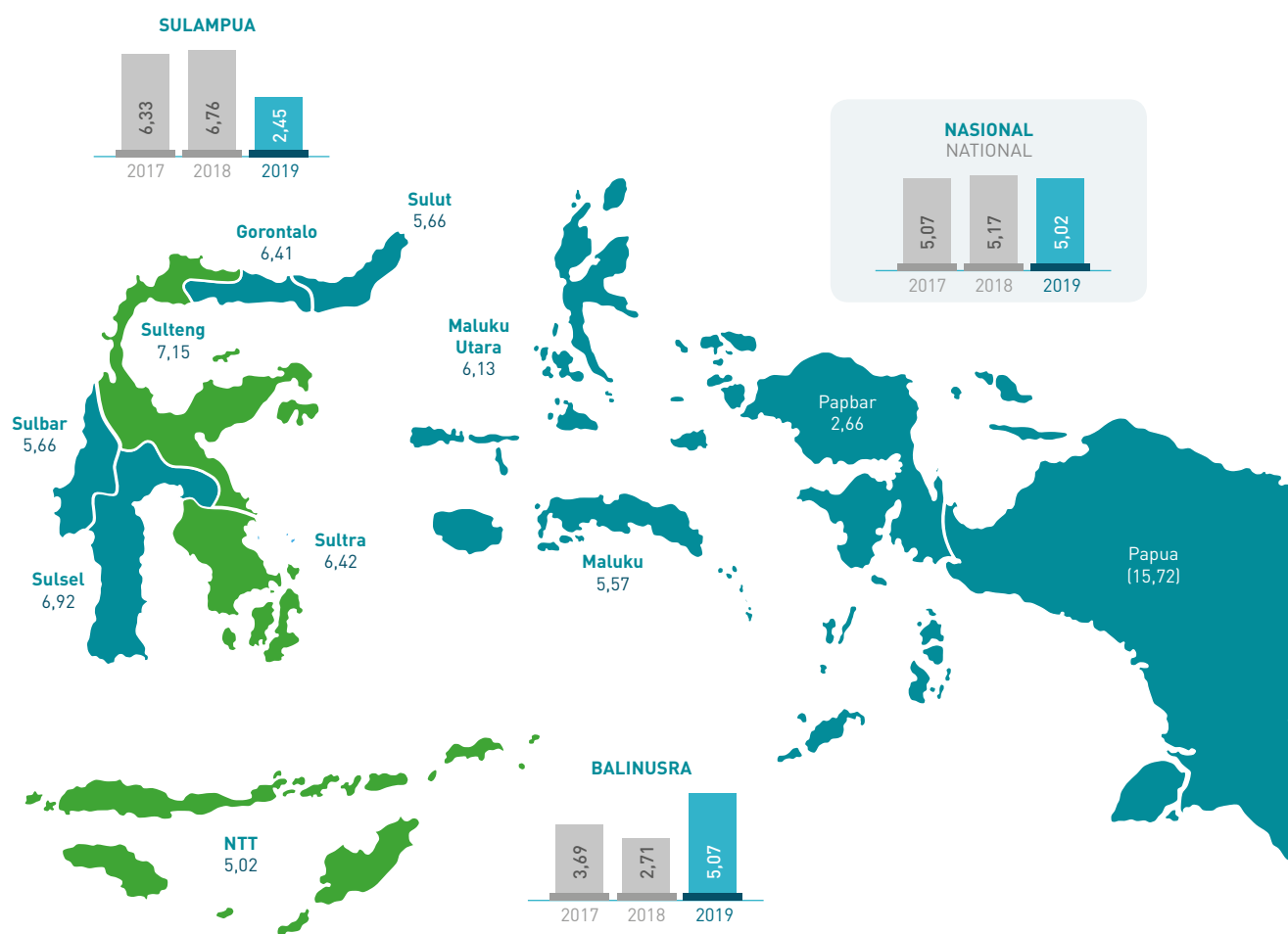
Analisis Perekonomian Indonesia Economy Overview of Indonesia

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Economic Growth of Indonesia



Ekonomi Indonesia tahun 2019 tumbuh 5,02%, lebih rendah dibanding capaian tahun 2018 sebesar 5,17%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 10,55%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-profit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 10,62%.

Indonesia's economy in 2019 grew 5.02%, lower than the achievements in 2018 of 5.17%. In terms of production, the highest growth was achieved by Other Services Business Field at 10.55%. In terms of expenditure, the highest growth was achieved by the Non-Profit Institution Consumption Component Serving Households (PK-LNPRT) of 10.62%.

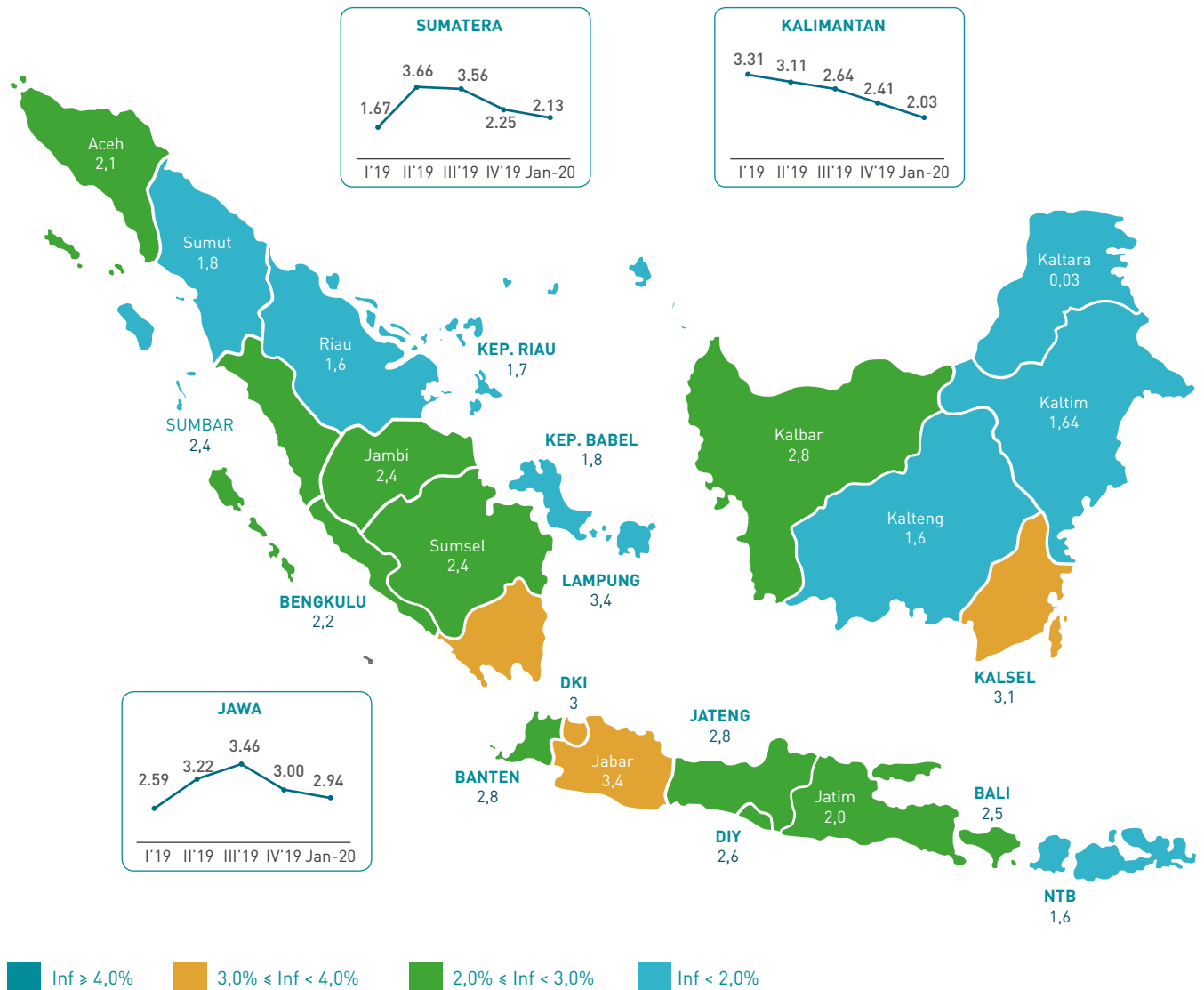


Struktur ekonomi Indonesia secara spasial tahun 2019 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto, yakni sebesar 59,00%, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,32%, dan Pulau Kalimantan 8,05%.

Indonesia's spatial economic structure in 2019 is dominated by provincial groups in Java and Sumatra. Java Island had the largest contribution to Gross Domestic Product, at 59.00%, followed by Sumatra with 21.32%, and Kalimantan with 8.05%.

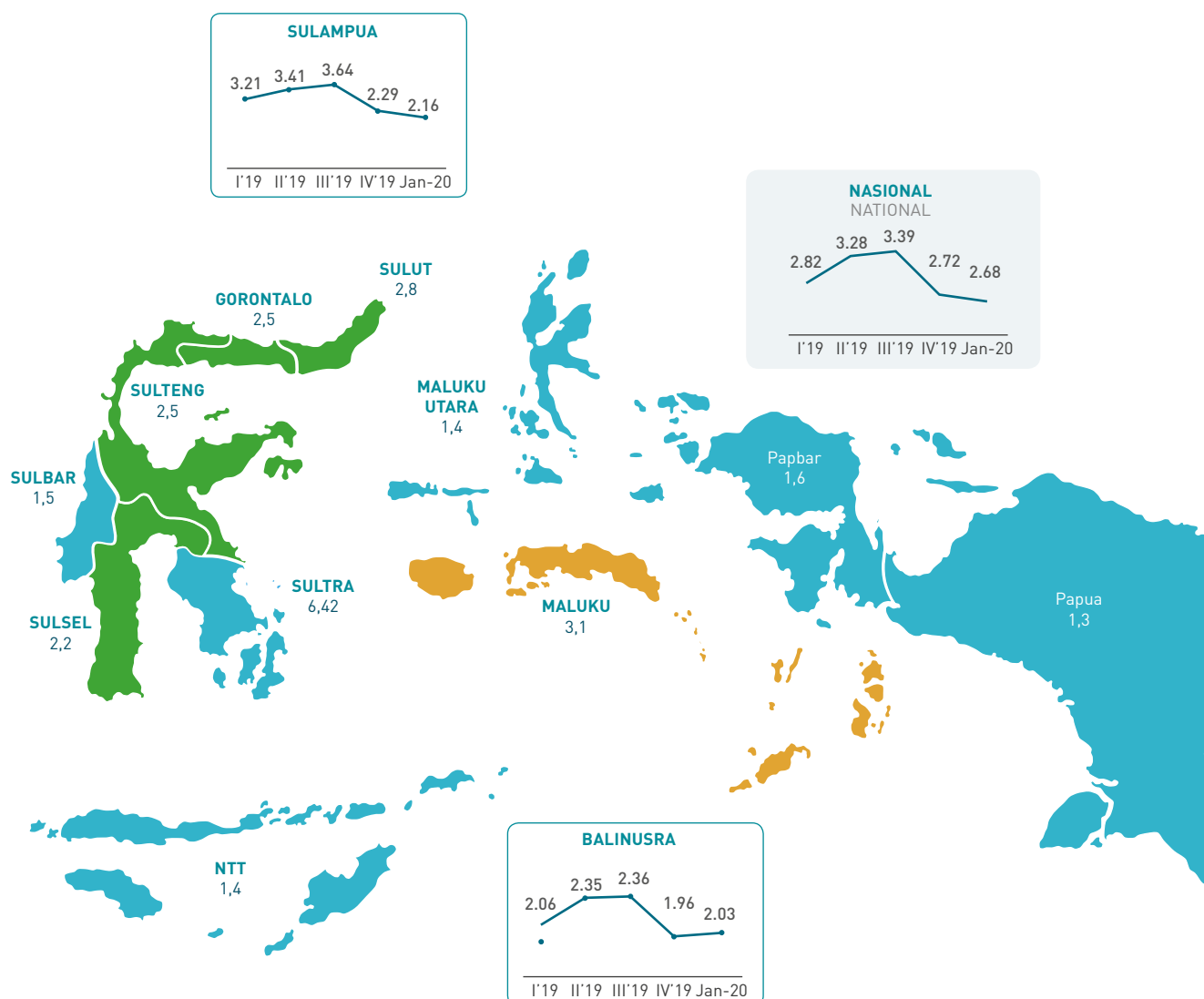
Sumber: Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia No. 17/02/Th. XXIV, 5 Februari 2020
Source: Official Gazette of Indonesia's Economic Growth Statistics No.17/02/Th. XXIV on February 5, 2020.

Tingkat Inflasi Indonesia Inflation Rate of Indonesia



Tingkat inflasi tahun kalender (Januari-Desember) 2019 dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2019 terhadap Desember 2018) masing-masing sebesar 2,72%. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok bahan makanan sebesar 0,78%; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,29%; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,09%; kelompok sandang sebesar 0,05%; kelompok kesehatan sebesar 0,29%; dan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,58%.

The inflation rate for the calendar year (January-December) 2019 and the Year-on-Year Inflation Rate (December 2019 to December 2018) were 2.72% respectively. Inflation occurred due to an increase in prices as indicated by an increase in most of the expenditure group index, namely: the foodstuffs group by 0.78%; processed foods, beverages, cigarettes, and tobacco by 0.29%; housing, water, electricity, gas, and fuel group of 0.09%; clothing group by 0.05%; health group of 0.29%; and the transportation, communication, and financial services group by 0.58%.

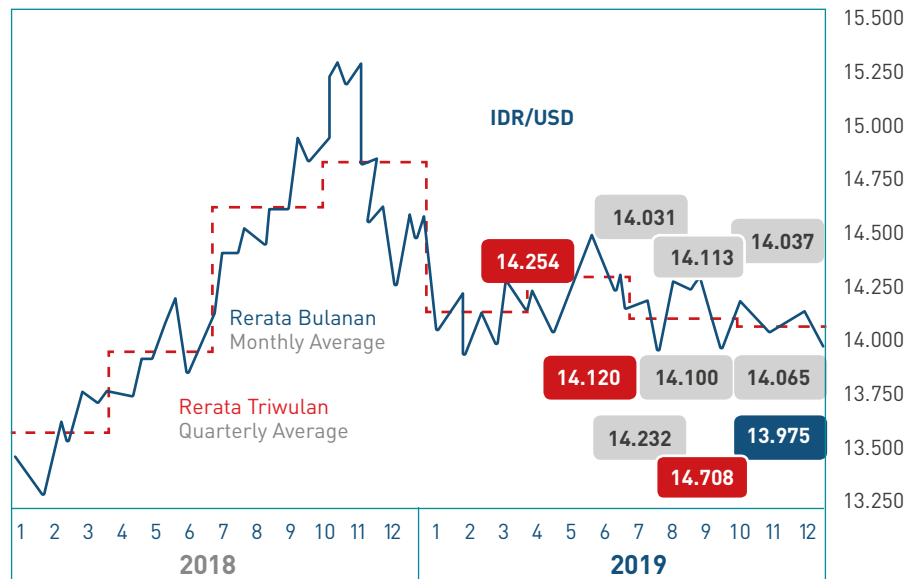


Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,05%.

While the expenditure groups that experienced a decline in the index, namely: the education, public amusement, and sports group by 0.05%.

Sumber: Berita Resmi Statistik Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi No. 01/01/Th. XXIII, 02 Januari 2020
Source: Official Gazette of Consumer Price/Inflation Development Statistics No. 01/01/Th. XXIII, on January 2, 2020

Nilai Tukar Mata Uang Foreign Exchange Rates



Secara rata-rata Rupiah menguat 0,34% walaupun secara *point to point* (ptp) melemah 0,48%. Penguatan Rupiah berlanjut memasuki bulan Desember 2019 (sampai dengan 18 Desember 2019) sebesar 0,93% (ptp) dibandingkan dengan level November 2019. Dengan perkembangan tersebut, sejak awal tahun sampai dengan 18 Desember 2019, Rupiah telah menguat secara rata-rata sebesar 0,72% (ytd) dan secara *point to point* sebesar 2,90% (ytd). Apresiasi Rupiah tersebut selaras dengan pasar valas domestik yang mencatatkan *net supply* terutama bersumber dari non-residen dan residen kecuali Pertamina dan PLN.

Nilai tukar Rupiah menguat didukung oleh pasokan valas dari para eksportir dan aliran masuk modal asing yang tetap berlanjut sejalan dengan prospek ekonomi Indonesia yang tetap terjaga, daya tarik pasar keuangan domestik yang tetap besar, serta ketidakpastian pasar keuangan global yang mereda.

On average, the Rupiah strengthened 0.34% although point-to-point (ptp) weakened 0.48%. The strengthening of the Rupiah continues to begin in December 2019 (to December 18, 2019) by 0.93% (ptp) compared to the level in November 2019. With these developments, from the beginning of the year until December 18, 2019, the Rupiah has strengthened on average by 0.72 % (ytd) and point to point 2.90% (ytd). The currency appreciation of the Rupiah is in line with the domestic foreign exchange market which recorded net-supply mainly sourced from non-residents and residents except Pertamina and PLN.

The rupiah exchange rate strengthened supported by the supply of foreign exchange from exporters and the continued inflow of foreign capital in line with Indonesia's economic prospects that are maintained, the attractiveness of the domestic financial market remains large, and the uncertainty of global financial markets is easing.

Sumber: Bank Indonesia, Tinjauan Kebijakan Moneter Desember 2019
Source: Bank Indonesia, Monetary Policy Review in December 2019

Kondisi Industri Listrik Indonesia Condition of Indonesia's Electricity Industry

Sesuai dengan target RPJMN terdapat project Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA yang diharapkan dapat bermanfaat diantaranya:

1. Berlanjutnya penyelesaian target program 35.000 MW
2. Mendukung target EBT pada bauran energi primer pada akhir tahun 2024 sebesar 19,5%

According to the target of the National Long-Term Development Plan (RPJMN), there are 27,000 MW Power Plant projects, 19,000 KMS Transmission and 38,000 MVA substations which are expected to be profitable including:

1. Continued target completion of the 35,000 MW program
2. The Renewable Energy target support in the primary energy mix at the end of 2024 by 19.5%

3. Tersedianya pasokan listrik untuk target penggunaan listrik 1.400 kWh per kapita di 2024
4. Penurunan Emisi CO2 Pembangkit sebesar 3,5 juta ton CO2 pada 2024
5. Menurunnya tingkat pemadaman listrik (SAIDI) menjadi 1 jam/pelanggan di 2024
6. Terpenuhinya kebutuhan listrik di kawasan prioritas nasional

Sumber: RPJMN 2020-2024

Source: The 2020-2024 National Long-Term Development Plan (RPJMN)

Perkembangan EBT di Indonesia, untuk solar, angin dan hidro akan menjadi relevan dengan renewable energy services (RES) dalam 10 tahun ke depan. Energi solar memiliki potensi hingga 200 GW dengan radiasi solar tertinggi berada di Jawa Timur, kepulauan Nusa Tenggara dan Sulawesi. Di sisi teknologi dan biaya, pembangkit solar dapat menurunkan tagihan listrik pada konsumen komersial dan industri, namun untuk konsumen rumah tangga terjadi kenaikan hingga 4% per tahun antara tahun 2002 – 2018. Levelised Cost of Electricity (LCOE) untuk PV surya diperkirakan menurun dalam 30 tahun kedepan sampai angka 3-4%. LCOE dari PV surya diproyeksikan melampaui gas PLTGU dan batubara yang baru di bangun pada 2025 - 2030.

Tambahan kapasitas dari energi angin di Indonesia diperkirakan mencapai 1,1 GW hingga tahun 2028 dengan potensi teknis di Indonesia yang dapat mencapai 60 GW. Potensi terbesar berada di Jawa Barat dan Sulawesi. Tantangan terbesar berada pada biaya penyediaan pembangkit yang perlu turun lebih jauh lagi agar kompetitif.

Energi air merupakan sumber energi terbarukan terbesar saat ini. Pembangkit listrik tenaga air skala besar dan kecil memungkinkan untuk diterapkan dalam industri pembangkitan, tetapi masalah pembiayaan tidak jarang terjadi pada pembangunan proyek PLTMH. Tantangan, Masalah lingkungan baik hulu dan hilir dari pembangkit listrik tenaga air dan pembatasan kepemilikan asing (dan karenanya ekuitas). Energi panas bumi saat ini masih terkendala dengan investasi awal yang diperlukan tinggi dengan risiko yang juga tinggi karena ditanggung sepenuhnya oleh developer. Selain itu konsesi yang sedang dikembangkan juga terbatas.

Saat ini, Sumatera dan Kalimantan memiliki lebih dari 10 GW potensi biomassa. Energi biomassa mulai diinisiasi dengan aplikasi co-firing di PLTU eksisting dengan capex yang sudah lebih siap. Tantangan pengembangan energi biomassa berada pada biaya yang kurang kompetitif apabila dibandingkan dengan batubara. Selain itu, rantai pasok yang belum dikembangkan meskipun terdapat industri pertanian dengan hasil sisa biomassa dalam jumlah besar.

Sumber: Rencana Jangka Panjang PJB 2020-2024

Source: The PJB 2020-2024 Long-term Plan

3. The availability of electricity supply for the electricity consumption target of 1,400 kWh per capita in 2024
4. Reduced CO2 Emissions by 3.5 million tons by 2024
5. Reduced level of power outages (SAIDI) to 1 hour/customer in 2024
6. The fulfillment of electricity needs in national priority areas

The development of Renewable Energy in Indonesia in solar, wind, and hydro will become relevant to renewable energy services (RES) in the next 10 years. Solar energy has the potential by reaching 200 GW with the highest solar radiation in East Java, Nusa Tenggara, and Sulawesi. In terms of technology and cost, the solar power plant can reduce electricity costs for commercial and industrial consumers; however, for household consumers, the cost can be 4% higher per year between 2002-2018. Levelized Cost of Electricity (LCOE) for solar PV is estimated to decrease in the next 30 years by 3-4%. LCOE from solar PV is projected to exceed Gas CCPP and CFPP established in 2025-2030.

The additional capacity of wind energy in Indonesia is estimated to reach 1.1 GW by 2028 along with Indonesia's technical potential reaching 60 GW. The biggest potential is in West Java and Sulawesi. The biggest challenge lies in the cost of power plant procurements that are required to be lowered for a competitive advantage.

Hydro energy is currently the largest renewable energy source. Large-and-small scale hydroelectric power plants are possible to be applied in the power plant industry, but financing problems often arise in the construction of MHPP projects. The challenges are environmental problems both upstream and downstream from hydroelectric power plants and restrictions on foreign ownership (equity).

Geothermal energy is currently constrained by the higher initial investment required with higher risks since it is entirely on the developer's risk. Additionally, developed concessions are also limited.

Currently, Sumatra and Kalimantan have more than 10 GW of biomass potential. Biomass energy began to be initiated with the application of co-firing in existing power plants with a more capable capex. The challenge of developing biomass energy is the less competitive cost when compared to coal. Also, the supply chain has not been developed even though there is an agricultural industry with large amounts of residual biomass.



Kontribusi PJB dalam Industri Pembangkit Listrik Indonesia PJB's Contribution to Power Generation Industry of Indonesia

Sebagai Perusahaan dalam industri pembangkitan terkemuka, PJB menjadi Perusahaan yang sangat berkontribusi pada penyediaan tenaga listrik nasional. Bentuk kontribusi PJB terhadap penyediaan listrik nasional dan pembangkitan adalah sebagai berikut:

As a leading company in the power generation industry, PJB is a company that greatly contributes to the supply of national electricity. The manifestation of PJB contribution to the national electricity supply and generation is as follows:

Kontribusi PJB terhadap Penyediaan Listrik Nasional dan Pembangkitan

PJB contribution to The National Electricity Supply and Generation

2



Unit Pembangkit sebagai penyedia jasa O&M pembangkit di IPP
Generating Units as power plant O&M service providers at IPP

7



Lokasi pembangunan pembangkit baru melalui jasa EPC
New power plant construction sites through EPC services

8



Unit Pembangkit yang dimiliki dan dioperasikan oleh PJB, serta 1 (satu) Unit Pembangkit Riset (PLTS Cirata) yang dimiliki oleh PJB
Generating Units owned and operated by PJB, and 1 (one) Research Generating Unit (Cirata SPP) owned by PJB

23



Lokasi *stockist* sebagai penyedia cadangan material pembangkit
Stockist locations as power plant material reserves suppliers

1



Unit Pembangkit sebagai penyedia jasa O&M pembangkit melalui perusahaan patungan
Generating Unit as O&M services provider through joint venture company

27



Unit Pembangkit sebagai penyedia jasa O&M pembangkit yang dikelola PJB Grup
Generating Units as power plant O&M service provider managed by PJB Group

3



Unit Pembangkit yang dimiliki oleh PJB namun disewa dan dioperasikan oleh pihak lain
Generating Units owned by PJB but leased and operated by other parties

7



Unit pembangkit melalui usaha kepemilikan *Independent Power Producer* (IPP)
Generating units through an Independent Power Producer (IPP) ownership business

PJB Pemilik dan Pengelola Pembangkit Listrik berkapasitas 7,055 MW

PJB telah memiliki dan mengelola 8 (delapan) Unit Pembangkit Eksisting yang berkapasitas 7.054 MW dan 1 (satu) Unit Pembangkit Riset (PLTS Cirata) berkapasitas 1 MW. Selain pembangkit yang telah beroperasi, PJB juga memiliki unit pembangkit dalam tahap pengembangan yaitu *Add On* MTW 2-3-4 dengan kapasitas 650 MW.

PJB as the 7,055 MW-Power Plant Owners and Managers

PJB already owns and manages 8 (eight) Existing Generation Units with a capacity of 7,054 MW and 1 (one) Research Generation Unit (Cirata SPP) with a capacity of 1 MW. Besides the existing power plant, PJB also has an under-development power plant unit, Add-On MTW 2-3-4 with a capacity of 650 MW.

PJB Penyedia Jasa Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit

Selain mengelola pembangkit sendiri, PJB juga berkontribusi memberikan layanan jasa operasi dan pemeliharaan (*Operation and Maintenance*/O&M) tenaga listrik untuk pembangkit lain. Total pembangkit yang dikelola PJB melalui jasa O&M (Jawa dan Luar Jawa) bersama dengan anak perusahaannya, PT PJB Services dengan kapasitas sebesar 6.170,6 MW yang tersebar di 27 (dua puluh tujuh) lokasi.

PJB as a Provider of Operations and Maintenance Services for Power Generation

Besides managing the power plant, PJB also contributes to providing electricity for Operation and Maintenance (O&M) services for other plants. The total power plant managed by PJB through O&M services (Java and Outside Java) together with its subsidiary, PT PJB Services with a capacity of 6,170.6 MW, spread over 27 (twenty-seven) locations.

Selain itu, PJB juga mengelola Jasa O&M pada unit pembangkit IPP (terdapat kepemilikan saham PJB) sebesar 400 MW yang tersebar di 2 (dua) lokasi.

PJB Miliki Saham Perusahaan O&M

PJB memiliki perusahaan patungan, yakni PT Komipo PJB yang melakukan jasa O&M pada unit pembangkit milik PT PLN (Persero) di Tanjung Jati B #3 dan #4 dengan kapasitas 1.320 MW.

PJB Kembangkan Pembangkit IPP

PJB juga memiliki pembangkit yang dikembangkan sebagai IPP melalui perusahaan patungan dengan kapasitas sebesar 5.665 MW baik pembangkit yang sudah beroperasi maupun yang sedang dalam tahap pengembangan (konstruksi).

PJB Penyedia Material Cadang Pembangkit

Kontribusi PJB tidak hanya melalui operasional pembangkit, namun juga melayani pengadaan material cadang pembangkit yang tersebar di 23 (dua puluh tiga) baik pembangkit milik PLN, Indonesia Power maupun IPP.

PJB Bangun Pembangkit Baru

PJB juga melakukan layanan jasa pembangunan pembangkit baru (*Engineering Procurement And Construction/EPC*) melalui anak perusahaannya, PT Rekadaya ElektriKA di 7 (Tujuh) lokasi dengan kapasitas sebesar 146 MW.

PJB Kembangkan Pembangkit EBT

PJB juga tengah mengembangkan pembangkit ekonomis dan ramah lingkungan, salah satunya yang saat ini sudah masuk dalam masa konstruksi yaitu mega proyek PLTS Floating Cirata 145 MWAC yang berlokasi di Waduk Cirata, Jawa Barat. PLTS dengan model terapung ini akan menjadi PLTS terapung terbesar di Indonesia. Selain pengembangan IPP PLTS, PJB juga telah menginisiasi beberapa proyek EBT dari pengembangan PLTB skala besar sampai dengan inisiasi membangun PLTS di wilayah kepulauan.

Additionally, PJB also manages O&M Services in IPP's generation unit (PJB's share ownership) spread over 2 (two) locations.

PJB Owns O&M Company Shares

PJB has a joint venture company, PT Komipo PJB, which performs O&M services to the power plant owned by PT PLN (Persero) in Tanjung Jati B#3 and #4 with a capacity of 1,320 MW.

PJB Develops IPP Power Plant

PJB also has a power plant that was developed as an IPP through a joint venture with a capacity of 5,665 MW, both power plants that are already in operation and that are under development (construction).

PJB as a Provider of Power Plant's Spare Parts

The contribution of PJB is not only through the power plant operation, but also serves the procurement of spare parts for power plants that are spread over 23 (twenty-three) plants, both PLN, Indonesia Power, and IPP.

PJB Builds New Power Plants

PJB also carries out new construction services (Engineering Procurement and Construction or EPC) through its subsidiary, PT Rekadaya ElektriKA, in 7 (Seven) locations with a capacity of 146 MW.

PJB Develops Renewable Energy Power Plant

PJB is also developing an economical and green power plant, one of which is currently in the construction period, namely the 145 MWAC Cirata Floating SPP's megaproject located in Cirata Reservoir, West Java. A Solar Power Plant (SPP) with this floating model will be the largest floating SPP in Indonesia. In addition to developing IPP's SPP, PJB has also initiated several Renewable Energy projects from the development of large-scale Wind Power Plants (WPP) to the initiation of building SPP in the islands.



ANALISIS OPERASI PER SEGMENT USAHA

REVIEW OF EACH OPERATING SEGMENT

Kontribusi masing-masing segmen usaha menjadi penentu keberhasilan dalam pencapaian pendapatan yang optimal. Kinerja operasi yang maksimal mendorong Perusahaan menjadi Perusahaan Pembangkit yang andal dan berkelas dunia.

The contribution of each business segment become the determinants of success in achieving optimal revenues. The optimal operational performance leads the Company to become a reliable and world-class Company.

Segmen Usaha PJB PJB'S Operating Segment



Segmen Usaha Penjualan Tenaga Listrik Electricity Sale Segment

Segmen usaha penjualan tenaga listrik mencakup kegiatan pembangkitan tenaga listrik, sampai dengan penyaluran listrik kepada pelanggan. Dalam segmen usaha ini, PJB memperhatikan beberapa indikator kinerja yaitu kinerja pembangkit, produksi, dan penjualan tenaga listrik.

The electricity sales segment covers from electricity power plant activities to electricity distribution to customers. In this operating segment, PJB focuses on several performance indicators, including the performance of power plant, production, and sales.

Kinerja Pembangkit Eksisting Existing Power Plant Performance

Indikator kinerja pembangkit mencakup faktor ketersediaan, faktor gangguan, efisiensi pembangkit, pemeliharaan pembangkit, dan kapasitas daya terpasang. Kinerja operasi PJB tahun 2019 dinilai memuaskan, terlihat dari beberapa indikator kinerja pembangkit yang mencakup efisiensi pembangkit, dan ketepatan pelaksanaan serta durasi pemeliharaan.

The indicators of power plant performance include availability factor, outage factor, plant efficiency, plant maintenance, and installed power capacity. The performance of PJB operations for 2019 is considered satisfying as seen from several power plant performance indicators covering power plant efficiency and the accuracy of maintenance implementation and duration.

Faktor Ketersediaan Pembangkit Eksisting

Faktor ketersediaan mesin pembangkit diukur berdasarkan indikator *Equivalent Availability Factor* (EAF) dan *Scheduled Outage Factor* (SOF).

EAF Pembangkit Eksisting

EAF adalah indikator yang menunjukkan tingkat kesiapan suatu pembangkit untuk beroperasi menghasilkan energi listrik. EAF menjadi indikator utama Perusahaan dalam mewujudkan pelayanan kepada pelanggan. Nilai EAF korporat berfungsi untuk mengetahui faktor ketersediaan pembangkit secara korporat untuk beroperasi dengan Daya Mampu Netto (DMN) pada periode tertentu. Semakin tinggi nilai EAF menunjukkan kinerja pembangkit yang semakin baik.

Nilai EAF pembangkit eksisting PJB pada tahun 2019 adalah 95,06% meningkat dibandingkan tahun 2018 sebesar 94,09%. Peningkatan tersebut terutama disebabkan jumlah *overhaul* yang jatuh tempo di tahun 2019 lebih sedikit daripada tahun 2018. Selain itu pelaksanaan pekerjaan dengan status *Maintenance Outage* juga lebih sedikit dibanding tahun 2018 karena optimasi dari *predictive* dan *preventive maintenance* sehingga tidak membutuhkan unit untuk *shutdown*.

Tabel EAF Pembangkit Eksisting Berdasarkan Jenis Pembangkitan (%)

Table of EAF of Existing Power Plant by Power Plant Types (%)

Jenis Pembangkitan Power Plant Types	2016	2017	2018	2019	Naik/(Turun) Increased/ (Decreased) (%)
PLTA HPP	98,09	97,62	93,22	98,03	5,16
PLTU Batubara CFPP	92,12	92,01	94,47	90,28	(4,44)
PLTU Non-Batubara Non-CFPP	94,09	92,17	89,20	96,86	8,59
PLTG GTPP	98,49	98,71	96,90	93,57	(3,44)
PLTGU CCPP	89,16	93,08	94,05	95,17	1,19
EAF Pembangkit Eksisting EAF of Existing Power Plant	93,46	94,68	94,09	95,06	1,03

Tabel EAF Pembangkit Eksisting Berdasarkan Unit Pembangkitan (%)

Table of EAF of Existing Power Plant by Power Plant Units (%)

Unit Pembangkitan Generation Units	2016	2017	2018	2019	Naik/(Turun) Increased/ (Decreased) (%)
UP Brantas Brantas GU	99,41	97,01	86,08	98,19	14,07
UP Cirata Cirata GU	97,82	97,74	97,57	97,99	0,43
UP Gresik Gresik GU	95,26	92,21	94,00	97,36	3,57
UP Paiton Paiton GU	92,12	92,01	94,47	90,28	(4,44)
UP Muara Karang Muara Karang GU	88,48	92,55	89,43	92,10	2,99
UP Muara Tawar Muara Tawar GU	91,02	97,58	96,00	93,76	(2,33)
EAF Pembangkit Eksisting EAF of Existing Power Plant	93,46	94,68	94,09	95,06	1,03

Existing Power Plant Availability Factor

The availability factor of power plant engine is measured in accordance with the Equivalent Availability Factor (EAF) and Scheduled Outage Factor (SOF) as indicators.

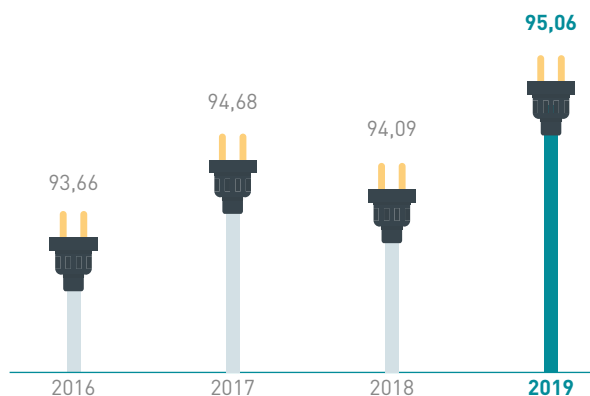
EAF of Existing Power Plant

EAF is an indicator that shows the level of readiness of a power plant to operate and produce electricity. EAF is the main indicator of Company in presenting customer service. Corporate EAF value functions to determine the availability of power plants in a company to operate with Net Capability for a certain period. The higher EAF value, the better power plant performance.

The EAF value of PJB's existing power plant for 2019 was 95.06% or increased compared to 2018 which was 94.09%. The increased was mainly due to the frequency of overhaul that are matured in 2019 was fewer than in 2018. In addition, the work implementation with the status of Maintenance Outage also fewer than in 2018 due to the optimization of predictive and preventive maintenance, so that it does not requires the unit to shutdown.



Grafik EAF Pembangkit Eksisting (%)
Chart of EAF of Existing Power Plant (%)



SOF Pembangkit Eksisting

SOF adalah indikator untuk mengukur tingkat pembangkit keluar sistem karena pemeliharaan terencana, yaitu *Planned Outage Hour* dan *Maintenance Outage Hour* yang sudah direncanakan sebelumnya. Semakin tinggi nilai SOF menunjukkan pemeliharaan terencana yang dilakukan pada mesin pembangkit lebih banyak (dari sisi durasi).

Nilai SOF pembangkit eksisting PJB pada tahun 2019 adalah 4,22% yaitu lebih rendah dibandingkan tahun 2018 sebesar 4,42%. Hal tersebut terutama disebabkan terutama oleh *overhaul* yang jatuh tempo di tahun 2019 lebih sedikit dibandingkan dengan 2018. Selain itu juga terdapat optimasi *overhaul* yaitu pelaksanaan *overhaul* yang lebih cepat dari yang direncanakan, diantaranya:

1. UP Paiton #2 : SE+ terlaksana 45 hari dari rencana 60 hari.
2. UP Muara Tawar GT 2.2 : *Recovery Tula* terlaksana 16 hari dari rencana 25 hari.
3. UP Muara Karang #4 : SI terlaksana 22 hari dari rencana 26 hari.
4. UP Cirata #8 : AI+ terlaksana 21 hari dari rencana 25 hari.

SOF of Existing Power Plant

SOF is an indicator to measure the level of power plant out of the system due to planned maintenance known as *Planned Outage Hour* and *Maintenance Outage Hour* which have been planned in advance. The higher the SOF value appears, the more planned maintenance is conducted—on power plant engine (in terms of duration).

The SOF of Existing Power Plant value of PJB for 2019 was 4.22%, higher than in 2018 which was 4.42%. This was mainly due to overhaul that are matured in 2019 was fewer than in 2018. In addition, there is also the optimization of overhaul, which is overhaul implementation that was higher than the plan, including:

1. Paiton GU #2 : SE + implemented in 45 days of 60 days' plan.
2. Muara Tawar GT GU 2.2 : *Tula Recovery* implemented in 16 days of 25 days' plan.
3. Muara Karang GU #4 : SI implemented in 22 days of 26 days' plan.
4. Cirata GU #8 : AI+ implemented in 21 days of 25 days' plan.

Tabel SOF Pembangkit Eksisting Berdasarkan Jenis Pembangkitan (%)

Table of SOF of Existing Power Plant by Power Plant Types (%)

Jenis Pembangkitan Power Plant Types	2016	2017	2018	2019	Naik/(Turun) Increased/ (Decreased) [%]
PLTA HPP	1,87	1,06	2,96	1,67	(43,58)
PLTU Batubara CFPP	7,28	5,64	4,58	8,11	77,07
PLTU Non-Batubara Non-CFPP	5,57	7,28	8,17	3,01	(63,16)
PLTG GTPP	0,36	1,27	2,76	6,28	127,54
PLTGU CCPP	6,87	4,51	5,09	3,71	(27,11)
SOF Pembangkit Eksisting SOF of Existing Power Plant	4,66	3,79	4,42	4,22	(4,52)

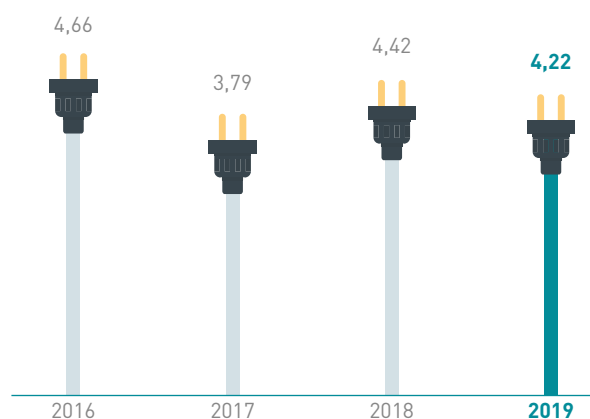
**Tabel SOF Pembangkit Eksisting Berdasarkan Unit Pembangkitan (%)**

Table of SOF of Existing Power Plant by Power Plant Units (%)

Unit Pembangkitan Generation Units	2016	2017	2018	2019	Naik/(Turun) Increased/ (Decreased) [%]
UP Brantas Brantas GU	0,58	0,94	4,12	1,81	(56,07)
UP Cirata Cirata GU	2,13	1,08	2,25	1,64	(27,11)
UP Gresik Gresik GU	3,56	5,47	4,63	1,71	(63,07)
UP Paiton Paiton GU	7,28	5,64	4,58	8,11	77,07
UP Muara Karang Muara Karang GU	7,63	6,28	9,47	7,31	(22,81)
UP Muara Tawar Muara Tawar GU	5,41	1,86	3,38	5,80	71,60
SOF Pembangkit Eksisting SOF of Existing Power Plant	4,66	3,79	4,42	4,22	(4,52)

Grafik SOF Pembangkit Eksisting (%)

Chart of SOF of Existing Power Plant (%)



Faktor Gangguan Pembangkit Eksisting

Faktor gangguan mesin pembangkit diukur berdasarkan indikator *Equivalent Forced Outage Rate* (EFOR), dan *Sudden Outage Frequency* (SdOF).

EFOR Pembangkit Eksisting

EFOR merupakan indikator untuk mengukur tingkat mesin pembangkit keluar paksa atau ketidaksiapan unit untuk beroperasi karena gangguan. Semakin rendah nilai EFOR menunjukkan penanganan gangguan semakin cepat.

Nilai EFOR pembangkit eksisting PJB pada tahun 2019 adalah 0,80% yaitu lebih rendah dibandingkan tahun 2018 sebesar 1,01% yang menunjukkan perbaikan kinerja. Pencapaian tersebut terutama disebabkan oleh pelaksanaan *overhaul*, *predictive* dan preventif *maintenance* yang efektif sehingga dapat meminimalisir terjadinya *breakdown* atau gangguan selama *interval overhaul*.

Outage Factors of Existing Power Plant

Outage factor is measured in accordance with Equivalent Forced Outage Rate (EFOR), and Sudden Outage Frequency (SdOF) indicators.

EFOR of Existing Power Plant

EFOR is an indicator to measure the level of a power plant's reliability to operate during outage or the inability of unit to operate due to interference. Lower EFOR value indicates more rapid handling of outage.

The value of EFOR of PJB Existing Power Plant for 2019 was 0.80%, higher than in 2018 which was 1.01% which shows performance enhancement. This achievement was mainly due to the overhaul execution, predictive and preventive maintenance in order to minimize breakdown or disruptions during interval overhaul.

Tabel EFOR Pembangkit Eksisting Berdasarkan Jenis Pembangkitan (%)

Table of EFOR of Existing Power Plant by Power Plant Types (%)

Jenis Pembangkitan Power Plant Units	2016	2017	2018	2019	Naik/(Turun) Increased/ (Decreased) [%]
PLTA HPP	0,06	2,06	0,75	0,92	22,67
PLTU Batubara CFPP	0,63	2,40	0,98	1,78	81,63
PLTU Non-Batubara Non-CFPP	0,33	0,53	2,82	0,18	(93,62)
PLTG GTPP	3,58	0,06	0,65	0,95	46,15
PLTGU CCPP	3,40	0,76	0,49	0,58	18,37
EFOR Pembangkit Eksisting EFOR of Existing Power Plant	1,90	1,10	1,01	0,80	(20,79)

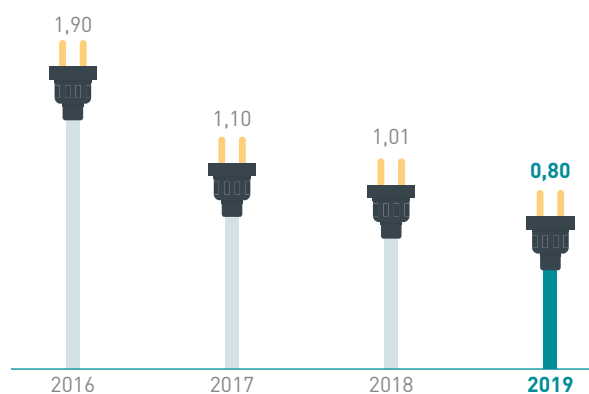
Tabel EFOR Pembangkit Eksisting Berdasarkan Unit Pembangkitan (%)

Table of EFOR of Existing Power Plant by Power Plant Units (%)

Unit Pembangkitan Generation Units	2016	2017	2018	2019	Naik/(Turun) Increased/ (Decreased) [%]
UP Brantas Brantas GU	0,01	2,29	1,37	0,00	(100,00)
UP Cirata Cirata GU	0,08	1,95	0,05	1,41	2,720,00
UP Gresik Gresik GU	0,62	0,49	1,51	1,41	(6,62)
UP Paiton Paiton GU	0,63	2,41	0,98	1,78	81,63
UP Muara Karang Muara Karang GU	3,16	0,94	1,07	0,63	(41,12)
UP Muara Tawar Muara Tawar GU	6,65	0,66	0,58	0,95	63,79
EFOR Pembangkit Eksisting EFOR of Existing Power Plant	1,90	1,10	1,01	0,80	(20,79)

Grafik EFOR Pembangkit Eksisting (%)

Chart of EFOR of Existing Power Plant (%)



SdOF Pembangkit Eksisting

SdOF merupakan indikator yang menunjukkan jumlah gangguan yang terjadi dalam periode tertentu, terutama frekuensi terjadinya gangguan yang berulang. Semakin rendah nilai SdOF maka semakin baik.

SdOF of Existing Power Plant

SdOF is an indicator that shows the total amount of outage occurs within a certain period, especially the frequency of recurring outage. The lower the SdOF value is considered as better.

Nilai SdOF pembangkit eksisting PJB pada tahun 2019 adalah 0,83 kali/unit yaitu lebih rendah dibandingkan tahun 2018 sebesar 0,99 kali/unit yang menunjukkan perbaikan kinerja pembangkit.

The value of SdOF of Existing Power Plant in 2019 was 0.83 times/unit or lower than the value in 2018 which was 0.99 times/unit which shows power plants performance enhancement.

Tabel SdOF Pembangkit Eksisting Berdasarkan Jenis Pembangkitan (kali/unit)

Table of SdOF of Existing Power Plant by Power Plant Types (times/unit)

Jenis Pembangkitan Power Plant Types	2016	2017	2018	2019	Naik/(Turun) Increased/ (Decreased) (%)
PLTA HPP	0,58	0,70	0,45	0,58	28,89
PLTU Batubara CFPP	0,50	2,50	3,00	1,50	(50,00)
PLTU Non-Batubara Non-CFPP	0,67	0,83	0,50	0,17	(66,00)
PLTG GTPP	1,50	0,10	1,30	0,50	(61,54)
PLTGU CCPP	2,10	2,10	1,65	1,55	(6,06)
SdOF Pembangkit Eksisting SdOF of Existing Power Plant	1,14	1,07	0,99	0,83	(16,16)

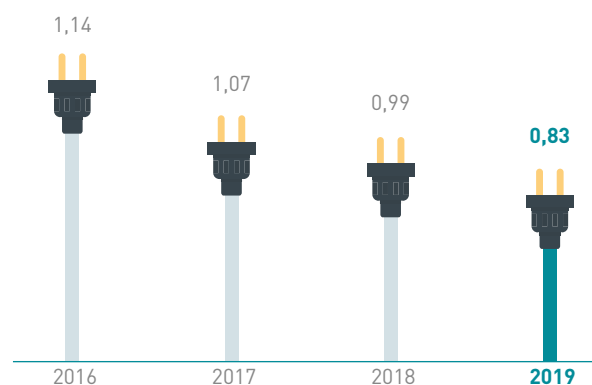
Tabel SdOF Pembangkit Eksisting Berdasarkan Unit Pembangkitan (kali/unit)

Table of SdOF of Existing Power Plant by Power Plant Units (times/unit)

Unit Pembangkitan Generation Units	2016	2017	2018	2019	Naik/(Turun) Increased/ (Decreased) (%)
UP Brantas Brantas GU	0,52	0,60	0,48	0,40	(16,67)
UP Cirata Cirata GU	0,75	1,00	0,38	1,13	197,37
UP Gresik Gresik GU	1,22	0,94	0,72	0,33	(54,17)
UP Paiton Paiton GU	0,50	2,50	3,00	1,50	(50,00)
UP Muara Karang Muara Karang GU	2,17	2,33	2,67	2,17	(18,73)
UP Muara Tawar Muara Tawar GU	2,17	1,42	1,67	1,50	(10,18)
SdOF Pembangkit Eksisting SdOF of Existing Power Plant	1,14	1,07	0,99	0,83	(16,16)

Grafik SdOF Pembangkit Eksisting (kali/unit)

Chart of SdOF of Existing Power Plant (times/unit)



Faktor Efisiensi Pembangkit Eksisting

Efisiensi mesin pembangkit diukur berdasarkan indikator Tara Kalor Neto (*Net Plant Heat Rate/NPHR*). Indikator Tara Kalor Neto bertujuan untuk mengukur efisiensi pemakaian bahan bakar yang dikonversikan ke dalam nilai kalori yang dibutuhkan untuk setiap kWh produksi neto yang dibangkitkan oleh unit pembangkit pada suatu periode. Semakin rendah nilai Tara Kalor Neto menunjukkan bahwa pembangkit tersebut semakin efisien.

Nilai Tara Kalor Neto pembangkit eksisting PJB pada tahun 2019 adalah 2.490,62 kCal/kWh yaitu lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 sebesar 2.464,36 kCal/kWh. Pencapaian tersebut terkait oleh pola operasi pada pembangkit PJB yang terdiri dari PLTA, PLTU, PLTG dan PLTGU, dimana pada tahun 2019 PLTGU beroperasi dengan *capacity factor* yang lebih rendah dibanding tahun 2018 disebabkan oleh kebutuhan sistem. Selain itu PJB menjalankan program *coal switching* pada PLTU Paiton yaitu menurunkan nilai kalor batubara yang dipakai dari 5000 kcal/kg menjadi 4500 kcal/kg dengan tujuan untuk berkontribusi dalam penurunan BPP PLN pada umumnya dan BPP PJB pada khususnya. Penurunan nilai kalor ini berdampak pada naiknya NPHR PLTU Paiton dan juga menaikkan NPHR PJB.

Efficiency Factors of Existing Power Plant

Power plant efficiency is measured by Net Plant Heat Rate (NPHR). The Net Plant Heat Rate aims to measure the fuel consumption efficiency which is converted into heat rate required in every net kWh production generated by power plant in one period. The lower the NPHR value the more efficient the power plants.

The Net Plant Heat Rate of PJB Existing Power Plant Units in 2019 was 2,490,62 kcal/kWh, higher than in 2018 which was 2,464.36 kcal/kWh. The achievement related to operational pattern on PJB Power Plants consisting of HPP, CFPP, GTPP and CCPP, where CCPP operated with a lower capacity factor in 2019 than in 2018 was caused by the system needs. In addition, PJB implements coal switching program at Paiton CFPP by reducing the calorific value of coal used from 5000 kcal/kg to 4500 kcal/kg with aims to contribute in reducing CES PLN in general and CES PJB especially. The reducing of calorific value affects on increasing NPHR of Paiton CFPP and also NPHR of PJB.

Tabel Tara Kalor Neto Pembangkit Eksisting Berdasarkan Jenis Pembangkitan (kali/unit)

Table of NPHR of Existing Power Plant by Power Plant Types (times/unit)

Jenis Pembangkitan Power Plant Types	2016	2017	2018	2019	Naik/(Turun) Increased/ (Decreased) (%)
PLTA HPP	2.647,25	2.579,59	2.689,94	2.742,66	1,96
PLTU Batubara CFPP	2.719,66	2.737,98	2.707,70	2.687,05	(0,76)
PLTU Non-Batubara Non-CFPP	3.222,00	3.512,17	3.278,24	3.400,39	3,73
PLTG GTPP	2.224,06	2.164,79	2.179,19	2.195,47	0,75
PLTGU CCPP	-	2.275,90	2.232,83	2.195,55	(1,67)
Tara Kalor Neto Pembangkit Eksisting NPHR of Existing Power Plant	2.487,14	2.409,06	2.464,36	2.490,62	1,07

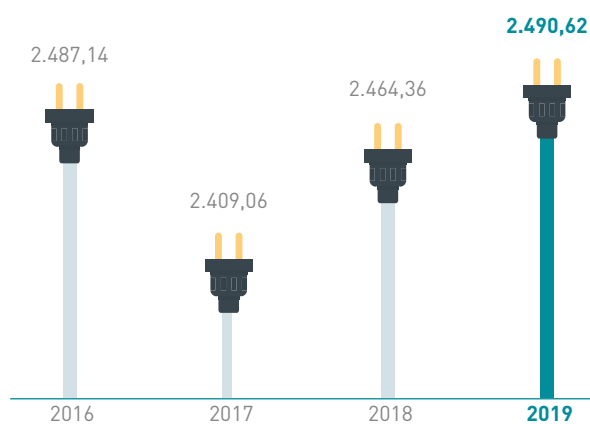
Tabel Tara Kalor Neto Pembangkit Eksisting Berdasarkan Unit Pembangkitan (kali/unit)

Table of NPHR of Existing Power Plant by Power Plant Units (times/unit)

Unit Pembangkitan Generation Units	2016	2017	2018	2019	Naik/(Turun) Increased/ (Decreased) (%)
UP Gresik Gresik GU	2.376,05	2.335,85	2.323,45	2.294,29	(1,26)
UP Paiton Paiton GU	2.647,25	2.579,59	2.689,94	2.742,66	1,96
UP Muara Karang Muara Karang GU	2.507,02	2.460,22	2.540,33	2.512,64	(1,09)
UP Muara Tawar Muara Tawar GU	2.535,79	2.285,12	2.434,37	2.495,05	2,49
Tara Kalor Neto Pembangkit Eksisting NPHR of Existing Power Plant	2.487,14	2.409,06	2.464,36	2.490,62	1,07



Grafik Tara Kalor Neto Pembangkit Eksisting (kali/unit)
Chart of NPHR of Existing Power Plant (times/unit)



Faktor Pemeliharaan Pembangkit Eksisting

Tingkat kesiapan pembangkit sangat dipengaruhi oleh pemeliharaan yang diterapkan. Oleh karena itu ketepatan pelaksanaan dan durasi pemeliharaan menjadi faktor yang sangat penting bagi tingkat kesiapan pembangkit.

Jumlah pemeliharaan pembangkit eksisting PJB pada tahun 2019 adalah sebanyak 33 *overhaul* yaitu lebih sedikit dibandingkan tahun 2018 sebanyak 36 *overhaul*. Jumlah *overhaul* ini terkait oleh jatuh tempo pelaksanaan yang didasarkan pada pencapaian EOH (*Equivalent Operating Hour*) dari setiap mesin pembangkit.

Overhaul Factors of Existing Power Plant

The readiness level of a power plant is strongly influenced by the maintenance implemented. Therefore, the accuracy and duration of maintenance is a very significant factor for the level of the power plant readiness.

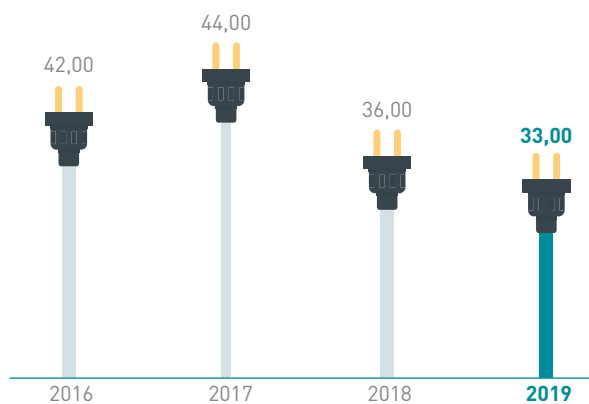
Total Maintenance of PJB Existing Power Plant in 2019 was 33 overhauls or fewer than in 2018 which was 36 overhauls. This number of overhauls related to maturity date of the implementation in accordance with EOH (*Equivalent Operating Hour*) achievement of each power plant engine.

Tabel Overhaul Pembangkit Eksisting Berdasarkan Jenis Pembangkitan (kali)

Table of Overhaul of Existing Power Plant by Power Plant Types (times)

Jenis Pembangkitan Power Plant Types	2016	2017	2018	2019	Naik/(Turun) Increased/ (Decreased) [%]
PLTA HPP	18	19	13	12	(7,69)
PLTU CFPP	4	5	3	1	(66,67)
PLTG GTPP	2	8	4	7	75,00
PLTGU CCPP	18	12	16	13	(18,75)
Overhaul Pembangkit Eksisting Overhaul of Existing Power Plant	42	44	36	33	(8,33)

Grafik Overhaul Pembangkit Eksisting (kali)
Chart of Overhaul of Existing Power Plant (times)



Daya Terpasang Pembangkit Eksisting

Daya Terpasang Pembangkit (DTP) merupakan daya yang tertera sesuai dengan setiap mesin pembangkit. Dari total DTP sistem Jawa-Bali 34.550 MW, saat ini PJB memiliki DTP sebesar 6.992 MW, yaitu mencapai 20,24% dari DTP Sistem Jawa-Bali. Daya terpasang ini belum termasuk PLTD SUPPA karena bukan merupakan bagian sistem Jawa-Bali. Daya terpasang PJB eksisting secara keseluruhan sebesar 7.054 MW.

Installed Capacity of Existing Power Plant

Installed Capacity is the power listed in accordance with each generator engine. From the total Installed Capacity of Java-Bali system which is 34,550 MW, current PJB's Installed Capacity is 6,992 MW which reaches 20.24% of Java-Bali System. This installed capacity has not included the Suppa DPP due to the plant is not included in Java-Bali system. The installed capacity in PJB's existing units comprehensively is 7,054 MW.

Tabel DTP Pembangkit Eksisting Berdasarkan Unit Pembangkitan Tahun 2016-2019
Table of Installed Capacity of Existing Power Plant by Power Plant Units for 2016-2019

Unit Pembangkitan Generation Units	DTP IC	
	MW	%
UP Brantas Brantas GU	275	3,90
UP Cirata Cirata GU	1.008	14,29
UP Gresik Gresik GU	800	11,34
UP Paiton Paiton GU	2.219	31,46
UP Muara Karang Muara Karang GU	909	12,89
UP Muara Tawar Muara Tawar GU	1.778	25,21
PLTD Suppa Suppa DPP	62,4	0,88
UP Bawean Bawean GU	3	0,04
DTP Pembangkit Eksisting Installed Capacity of Existing Power Plant	7.054	100,00

Kapasitas Daya Mampu Netto (DMN) Sistem Jawa Bali adalah sebesar 37.033 MW, sedangkan DMN PJB sebesar 10.597 MW, atau memberikan kontribusi di Sistem Jawa Bali sebesar 28,62%.

Net Dependable Capacity of Java-Bali System is 37,033 MW while DMN of PJB is 10,597 MW, or contribute in Java-Bali System by 28.62%.

Pemakaian Bahan Bakar Fuel Consumption

Pemakaian bahan bakar untuk pembangkit di tahun 2019 masih didominasi bahan bakar gas sebanyak 139.852 BBTU, batubara yaitu 3.293.951 ton, HSD sebanyak 24.223 kL dan MFO sebanyak 33.589 kL, dengan *energy mix* sebagai berikut:

Fuel consumption for power plant in 2019 is still dominated by gas fuel of 139,852 BBTU, coal of 3,293,951 ton, HSD of 24,223 kL and MFO of 33,589 kL, with the following energy mix:

Tabel Pemakaian Bahan Bakar

Table of Fuel consumption

Jenis Bahan Bakar Fuel Types	Satuan Unit	2016	2017	2018	2019	Naik/(Turun) Increased/ (Decreased) (%)
Batubara Coal	ton	2.420.034	2.658.368	3.217.981	3.293.951	2,36
Gas Alam Natural Gas	BBTU	169.519	142.452	149.751	139.852	(6,61)
HSD	kL	44.219	3.672	218.963	24.223	(88,94)
MFO	kL	10.864	26.806	119.121	33.589	(71,80)

Produksi Tenaga Listrik Electricity Production

Produksi tenaga listrik unit eksisting PJB pada tahun 2019 adalah sebesar 23.312,99 GWh yaitu lebih rendah dari tahun 2018 sebesar 25.847,33 GWh. Penurunan tersebut didominasi pada pembangkit hydro yang disebabkan oleh pola musim kering, dan pembangkit berbahan bakar gas terkait kebutuhan system (*dispatch*).

Electricity production of PJB existing units in 2019 was 23,312.99 GWh or lower than in 2018 which was 25,847.33 GWh. The decreased was dominated on hydro power plant due to the dry season, and gas-fueled power plant related to the system needs (*dispatch*).

Tabel Produksi Tenaga Listrik Pembangkit Eksisting Berdasarkan Jenis Pembangkitan (GWh)

Table of Electricity Production of Existing Power Plant by Power Plant Types (GWh)

Jenis Pembangkitan Power Plant Types	2016	2017	2018	2019	Naik/(Turun) Increased/ (Decreased) (%)
PLTA HPP	3.507,04	2.914,51	2.308,14	2.106,28	(8,75)
PLTU Batubara CFPP	4.992,72	5.613,93	5.856,20	5.836,13	(0,34)
PLTU BBM Fuel CFPP	54,05	36,45	458,92	121,87	(73,44)
PLTU Gas GFPP	4.793,20	4.159,01	3.734,68	3.494,48	(6,43)
PLTG HSD HSD GTTP	89,67	0,79	450,19	45,83	(89,82)
PLTG Gas Gas GTTP	1.597,16	466,01	980,31	1.089,85	11,17
PLTGU HSD HSD CCPP	32,80	149,81	229,38	32,41	(85,87)
PLTGU Gas Gas CCPP	11.737,98	11.069,13	11.797,08	10.556,00	(10,52)
PLTMG Gas Gas GEPP	-	7,46	11,66	17,76	52,32
PLTD DPP	-	89,12	18,40	12,38	(32,72)
PLTS SPP	-	1,09	-	-	-
Jumlah Produksi Tenaga Listrik Pembangkit Eksisting Total Electricity Production of Existing Power Plant	26.804,61	24.507,30	25.847,33	23.312,99	(9,81)



Tabel Produksi Tenaga Listrik Pembangkit Eksisting Berdasarkan Unit Pembangkitan (GWh)

Table of Electricity Production of Existing Power Plant by Power Plant Units (GWh)

Unit Pembangkitan Generations Units	2016	2017	2018	2019	Naik/(Turun) Increased/ (Decreased) [%]
UP Brantas Brantas GU	1.349,87	1.289,18	1.080,61	920,05	(14,86)
UP Cirata Cirata GU	2.157,17	1.625,32	1.227,53	1.186,23	(3,36)
UP Gresik Gresik GU	9.710,92	9.416,82	9.753,22	7.642,00	(21,65)
UP Paiton Paiton GU	4.998,69	5.620,53	5.856,20	5.837,58	(0,32)
UP Muara Karang Muara Karang GU	3.762,47	3.279,35	3.349,87	3.804,44	13,57
UP Muara Tawar Muara Tawar GU	4.825,99	3.186,06	4.549,84	3.892,55	(14,45)
PLTMG Bawean Bawean GEPP	-	7,46	11,66	17,76	52,32
PLTD SUPPA SUPPA DPP	-	89,12	18,40	12,38	(32,72)
Jumlah Produksi Tenaga Listrik Pembangkit Eksisting Total Electricity Production of Existing Power Plant	26.804,61	24.507,30	25.847,33	23.312,99	(9,81)

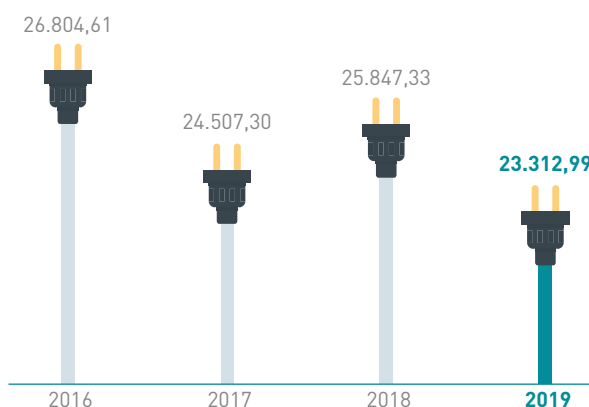
Tabel Produksi Tenaga Listrik Pembangkit Eksisting Berdasarkan Jenis Bahan Bakar (GWh)

Table of Electricity Production of Existing Power Plant by Fuel Types (GWh)

Jenis Bahan Bakar Fuel Types	2016	2017	2018	2019	Naik/(Turun) Increased/ (Decreased) [%]
Hidro Hydro	3.507	2.914	2.308	2.106	(8,75)
Batubara Coal	4.993	5.614	5.847	5.836	(0,19)
Gas Alam Natural Gas	18.128	5.614	16.525	15.158	(8,27)
HSD HSD	151	161	694	82,15	(88,16)
MFO MFO	25	115	474	130,34	(72,50)
Jumlah Produksi Tenaga Listrik Pembangkit Eksisting Total Electricity Production of Existing Power Plant	26.804,61	24.507,30	25.847,33	23.312,99	(9,81)

Grafik Produksi Tenaga Listrik Pembangkit Eksisting (GWh)

Chart of Electricity Production of Existing Power Plant (GWh)





Peningkatan/Penurunan Kapasitas Produksi

Produksi tenaga listrik unit eksisting PJB pada tahun 2019 adalah sebesar 23.312,99 GWh yaitu lebih rendah dari tahun 2018 sebesar 25.847,33 GWh.

The Increase/Decrease In Production Capacity

Electricity production of PJB existing units in 2019 was 23,312.99 GWh or lower than in 2018 which was 25,847.33 GWh.

Tabel Pencapaian Realisasi Produksi Tenaga Listrik

Table of the Achievement of Electricity Production Realization

Produksi Production	Realisasi 2018 (GWh) 2018 Realization (GWh)	Target RKAP 2019 (GWh) 2019 ABOP Target (GWh)	Realisasi 2019 (GWh) 2019 Realization (GWh)	Persentase Percentage (%)	
				terhadap 2018 to 2018	Pencapaian RKAP ABOP Achievement
Tenaga Listrik Electricity	25.847,33	26,126.80	23.312,99	(9,81)	90,19

Produksi tenaga listrik di tahun 2019 lebih rendah dibandingkan tahun 2018, hal ini berpengaruh terhadap kapasitas tenaga listrik yang dijual. Penjualan Tenaga Listrik terealisasi dibawah RKAP terutama karena realisasi produksi pada tahun 2019 dibawah RKAP untuk mendukung optimasi Sistem Jawa Bali. Meskipun demikian, PJB optimis bahwa pencapaian produksi di tahun 2019 mencukupi kebutuhan permintaan listrik.

Electricity production in 2019 was lower than in 2018, this have an effect to the capacity of electricity sold. Electricity Sales realized under ABOP was mainly due to production realization in 2019 under ABOP to support the optimization of Java-Bali System. Nevertheless, PJB believes that production achievement in 2019 meet the needs of electricity demand.

Pemakaian Sendiri Self Consumption

Pemakaian sendiri merupakan energi listrik yang digunakan untuk aktivitas operasional unit pembangkit. Jumlah pemakaian sendiri pada tahun 2019 adalah sebesar 908,88 GWh atau 3,90%. Pemakaian sendiri tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2018 sebesar 1.095,61 GWh atau 4,24%.

Self Consumption is electricity power used for operational activities at power plant unit. Total self consumption in 2019 was 908.88 GWh or 3.90%. The self consumption was lower than in 2018 which was 1,095.61 GWh or 4.24%.

Tabel Pemakaian Sendiri Berdasarkan Unit Pembangkitan (GWh)

Table of Self Consumption by Power Plant Units (GWh)

Unit Pembangkit Generation Units	2017		2018		2019		Naik/(Turun) Increased/ (Decreased) (%)
	GWh	%	GWh	%	GWh	%	
UP Brantas Brantas GU	19,90	0,08	15,96	0,06	11,66	0,05	(26,94)
UP Cirata Cirata GU	48,16	0,20	35,62	0,14	22,76	0,10	(36,10)
UP Gresik Gresik GU	223,36	0,91	308,14	1,19	186,65	1,79	(39,43)
UP Paiton Paiton GU	411,63	1,68	434,87	1,68	418,12	0,80	(3,85)
UP Muara Karang Muara Karang GU	140,10	0,57	169,32	0,66	179,77	0,77	6,17
UP Muara Tawar Muara Tawar GU	220,04	0,90	130,61	0,51	88,55	0,38	(32,20)
PLTMG Bawean Bawean GEPP	0,51	0,00	0,74	0,00	1,09	0,00	47,30
PLTD SUPPA SUPPA DPP	2,79	0,01	1,10	0,004	0,29	0,00	(73,64)
Jumlah Pemakaian Sendiri Total Self Consumption	1.065,99	4,33	1.095,61	4,24	908,88	3,90	(17,04)



Penjualan Tenaga Listrik Electricity Sales

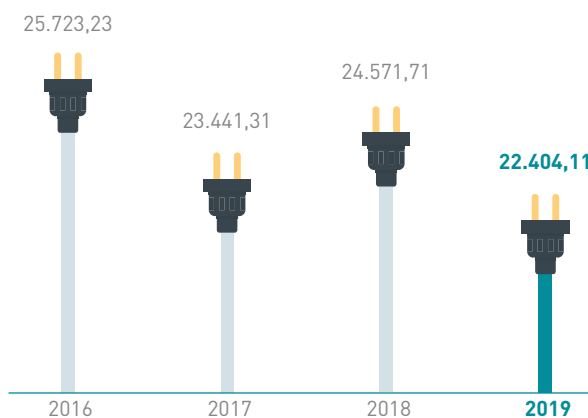
Penjualan tenaga listrik unit eksisting PJB pada tahun 2019 adalah sebesar 22.404,11 GWh yaitu lebih rendah dari tahun 2018 sebesar 24.751,71 GWh. Pencapaian tersebut terutama disebabkan oleh rendahnya realisasi produksi pada tahun 2019 untuk mendukung optimasi Sistem Jawa Bali.

Electricity sales of PJB's existing units in 2019 was 22,404.11 GWh or lower than in 2019 which was 24,751.71 GWh. The achievement was mainly due to the low of production in 2019 to support the optimization of Java-Bali System.

Tabel Penjualan Tenaga Listrik Pembangkit Eksisting Berdasarkan Jenis Pembangkitan (GWh)
Table of Electricity Sales of Existing Power Plant by Power Plant Types (GWh)

Unit Pembangkit Generation Units	2016	2017	2018	2019	Naik/(Turun) Increased/ (Decreased) [%]
PLTA HPP	3.436,15	2.846,53	2.256,56	2.071,86	(8,19)
PLTU Batubara CFPP	4.617,72	5.202,76	5.412,76	5.419,46	0,12
PLTU BBM Fuel CFPP	50,95	34,57	438,45	113,63	(74,08)
PLTU Gas GFPP	4.487,60	3.887,86	3.497,59	3.280,38	(6,21)
PLTG HSD HSD GTPP	99,05	0,76	440,05	45,12	(89,75)
PLTG Gas Gas GTPP	1.565,87	455,98	968,61	1.072,87	10,76
PLTGU HSD HSD CCPP	13,77	138,70	223,54	31,75	(85,80)
PLTGU Gas Gas CCPP	11.449,02	10.786,81	11.496,84	10.340,27	(10,06)
PLTMG Gas Gas GEPP	-	6,94	10,91	16,68	52,89
PLTD DPP	15,90	86,32	17,30	12,10	(30,06)
PLTS SPP	1,21	1,01	-	-	-
Jumlah Penjualan Tenaga Listrik Pembangkit Eksisting Total Electricity Sales of Existing Power Plant	25.737,23	23.441,31	24.751,71	22.404,11	(9,48)

Grafik Penjualan Tenaga Listrik Pembangkit Eksisting (GWh)
Chart of Electricity Sales of Existing Power Plant (GWh)



Segmen Usaha Jasa *Operation and Maintenance* (O&M) Operation And Maintenance (O&M) Service Segment

PJB menyediakan jasa *operation and maintenance* (O&M) sebagai bentuk pengembangan Perusahaan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki secara maksimal. Bidang usaha jasa O&M dilakukan oleh PJB secara langsung (wilayah Jawa dan luar Jawa) maupun melalui anak perusahaan (PT PJB Services) dan perusahaan patungan (PT Komipo PJB). Total pembangkit yang dikelola PJB melalui jasa O&M adalah sebesar 6.170,6 MW.

PJB provides Operation and Maintenance (O&M) services as a Company's development and maximal opportunistic. The O&M service segment is performed by PJB directly (Java and outside Java) or through subsidiaries (PT PJB Services) and joint ventures (PT Komipo PJB). The total power plant managed by PJB under O&M services is 6,170.6 MW.

Jasa O&M Wilayah Jawa O&M Services in Java

Unit Bisnis Jasa O&M (UBJOM) yang dikelola oleh PJB di wilayah Jawa sebesar 5.078,3 MW tersebar di 10 (sepuluh) unit pembangkit, namun yang dikelola kinerjanya oleh PJB adalah 7 (tujuh) unit pembangkit.

O&M Services Business Unit (OMSBU) managed by PJB in Java was 5,078.3 MW spread in 10 (ten) power plant units, however, the power plants which performance is managed by PJB are 7 power plant units.

Tabel EAF Pembangkit UBJOM Wilayah Jawa (%)

Table of EAF of OMSBU Power Plant in Java (%)

Pembangkit Power Plant	2016	2017	2018	2019	Naik/(Turun) Increased/ (Decreased) (%)
PLTGU Muara Karang Blok 2 Muara Karang Block 2 Gas CCGP	93,53	93,85	92,44	90,03	(2,61)
PLTGU Muara Tawar Blok 5 Muara Tawar Block 5 Gas CCGP	94,65	96,88	96,40	98,31	1,98
PLTU Indramayu Indramayu CFPP	61,57	80,90	88,50	89,22	0,81
PLTU Rembang Rembang CFPP	85,76	78,56	78,50	87,43	11,38
PLTU Paiton 9 Paiton 9 CFPP	73,58	86,63	70,87	99,73	40,72
PLTU Pacitan Pacitan CFPP	66,85	70,85	60,60	84,78	39,90
PLTU Tanjung Awar Awar Tanjung Awar Awar CFPP	80,10	63,17	79,14	92,58	16,98
EAF Pembangkit UBJOM Wilayah Jawa EAF of OMSBU Power Plant in Java	72,14	76,33	77,20	91,06	17,95

Tabel SOF Pembangkit UBJOM Wilayah Jawa (%)

Table of SOF of OMSBU Power Plant in Java (%)

Pembangkit Power Plant	2016	2017	2018	2019	Naik/(Turun) Increased/ (Decreased) (%)
PLTGU Muara Karang Blok 2 Muara Karang Block 2 Gas CCGP	6,20	5,71	6,14	8,18	33,22
PLTGU Muara Tawar Blok 5 Muara Tawar Block 5 Gas CCGP	4,80	3,06	3,33	1,53	(54,05)
PLTU Indramayu Indramayu CFPP	6,22	12,31	7,97	9,36	17,44
PLTU Rembang Rembang CFPP	10,94	13,42	11,80	8,94	(24,24)
PLTU Paiton 9 Paiton 9 CFPP	11,36	7,46	22,26	0,00	(100,00)
PLTU Pacitan Pacitan CFPP	13,79	15,13	18,15	12,41	(31,63)
PLTU Tanjung Awar Awar Tanjung Awar Awar CFPP	1,47	30,87	12,72	4,18	(67,14)
SOF Pembangkit UBJOM Wilayah Jawa SOF of OMSBU Power Plant in Java	8,79	15,76	13,56	6,92	(48,97)

Tabel EFOR Pembangkit UBJOM Wilayah Jawa (%)

Table of EFOR of OMSBU Power Plant in Java (%)

Pembangkit Power Plant	2016	2017	2018	2019	Naik/(Turun) Increased/ (Decreased) [%]
PLTGU Muara Karang Blok 2 Muara Karang Block 2 Gas CCPP	0,01	0,25	0,69	0,66	(4,35)
PLTGU Muara Tawar Blok 5 Muara Tawar Block 5 Gas CCPP	0,56	0,66	0,36	0,20	(44,44)
PLTU Indramayu Indramayu CFPP	33,94	6,98	3,52	1,50	(57,39)
PLTU Rembang Rembang CFPP	3,23	9,15	11,02	3,96	(64,07)
PLTU Paiton 9 Paiton 9 CFPP	13,17	5,95	8,81	0,67	(92,40)
PLTU Pacitan Pacitan CFPP	22,24	16,45	25,71	2,99	(88,37)
PLTU Tanjung Awar Awar Tanjung Awar Awar CFPP	18,66	13,78	8,31	3,01	(63,78)
EFOR Pembangkit UBJOM Wilayah Jawa EFOR of OMSBU Power Plant in Java	20,33	8,58	10,34	1,94	(81,24)

Tabel SdOF Pembangkit UBJOM Wilayah Jawa (kali/unit)

Table of SdOF of OMSBU Power Plant in Java (times/unit)

Pembangkit Power Plant	2016	2017	2018	2019	Naik/(Turun) Increased/ (Decreased) [%]
PLTGU Muara Karang Blok 2 Muara Karang Block 2 Gas CCPP	0,40	1,20	1,20	0,80	(33,33)
PLTGU Muara Tawar Blok 5 Muara Tawar Block 5 Gas CCPP	7,00	0,00	1,50	4,50	200
PLTU Indramayu Indramayu CFPP	1,33	2,00	2,33	1,67	(28,33)
PLTU Rembang Rembang CFPP	4,00	1,00	6,00	3,50	(41,67)
PLTU Paiton 9 Paiton 9 CFPP	4,00	3,00	1,00	1,00	-
PLTU Pacitan Pacitan CFPP	4,00	5,00	2,50	1,00	(60,00)
PLTU Tanjung Awar Awar Tanjung Awar Awar CFPP	2,50	2,00	2,50	0,00	(100,00)
SdOF Pembangkit UBJOM Wilayah Jawa SdOF of OMSBU Power Plant in Java	2,90	2,50	3,00	1,94	(35,33)

Tabel Tara Kalor Neto Pembangkit UBJOM Wilayah Jawa (kCal/kWh)

Table of NPHR of OMSBU Power Plant in Java (kCal/kWh)

Pembangkit Power Plant	2016	2017	2018	2019	Naik/(Turun) Increased/ (Decreased) [%]
PLTGU Muara Karang Blok 2 Muara Karang Block 2 Gas CCPP	1.990,28	2.009,07	1.944,63	1.948,11	0,18
PLTGU Muara Tawar Blok 5 Muara Tawar Block 5 Gas CCPP	1.894,74	1.872,03	1.893,06	1.858,87	(1,81)
PLTU Indramayu Indramayu CFPP	2.792,62	2.679,74	2.635,39	2.629,50	(0,22)
PLTU Rembang Rembang CFPP	2.753,29	2.703,47	2.683,41	2.654,60	(1,07)
PLTU Paiton 9 Paiton 9 CFPP	2.810,40	2.659,96	2.659,45	2.678,38	0,71
PLTU Pacitan Pacitan CFPP	2.857,75	2.721,34	2.764,64	2.691,97	(2,63)
PLTU Tanjung Awar Awar Tanjung Awar Awar CFPP	2.783,82	2.717,88	2.696,94	2.678,00	0,70
Tara Kalor Neto Pembangkit UBJOM Wilayah Jawa NPHR of OMSBU Power Plant in Java	2.795,95	2.692,18	2.676,67	2.530,20	(5,47)

**Tabel NCF Pembangkit UBJOM Wilayah Jawa (%)**

Table of NCF of OMSBU Power Plant in Java (%)

Pembangkit Power Plant	2016	2017	2018	2019	Naik/(Turun) Increased/ (Decreased) [%]
PLTGU Muara Karang Blok 2 Muara Karang Block 2 Gas CCPP	63,04	61,27	69,80	61,90	(11,32)
PLTGU Muara Tawar Blok 5 Muara Tawar Block 5 Gas CCPP	86,69	26,08	55,33	75,45	36,36
PLTU Indramayu Indramayu CFPP	55,47	75,08	84,02	85,33	1,56
PLTU Rembang Rembang CFPP	79,14	76,43	84,11	85,68	1,87
PLTU Paiton 9 Paiton 9 CFPP	57,72	81,32	64,66	76,87	18,88
PLTU Pacitan Pacitan CFPP	54,26	62,68	48,94	75,68	56,64
PLTU Tanjung Awar Awar Tanjung Awar Awar CFPP	43,36	55,23	74,47	85,31	14,56
NCF Pembangkit UBJOM Wilayah Jawa NCF of OMSBU Power Plant in Java	59,80	66,62	71,12	78,46	10,32

Jasa O&M Wilayah Luar Jawa

O&M Services outside Java

Unit Bisnis Jasa O&M (UBJOM) yang dikelola oleh PJB di wilayah Luar Jawa sebesar 744,3 MW tersebar di 4 (empat) lokasi dengan kinerja sebagai berikut:

O&M Services Business Unit (OMSBU) managed by PJB outside Java is 744.3 MW spread in 4 (four) locations with the following performance:

Tabel EAF Pembangkit UBJOM Wilayah Luar Jawa (%)

Table of EAF of OMSBU Power Plant in Outside Java (%)

Pembangkit Power Plant	2016	2017	2018	2019	Naik/(Turun) Increased/ (Decreased) [%]
PLTMG Arun Arun GEPP	93,50	92,65	94,58	93,91	(0,71)
PLTU Tenayan Tenayan CFPP	28,27	32,85	60,38	78,33	29,73
PLTU Kaltim Teluk Kaltim Teluk CFPP	-	73,73	53,49	71,31	33,31
PLTU Pulang Pisau Pulang Pisau CFPP	-	76,47	53,41	83,82	56,94
EAF Pembangkit UBJOM Wilayah Luar Jawa EAF of OMSBU Power Plant in Outside Java	88,53	81,44	68,33	81,53	19,32

Tabel EFOR Pembangkit UBJOM Wilayah Luar Jawa (%)

Table of EFOR of OMSBU Power Plant Outside Java (%)

Pembangkit Power Plant	2016	2017	2018	2019	Naik/(Turun) Increased/ (Decreased) [%]
PLTMG Arun Arun GEPP	2,05	2,71	0,86	0,40	(53,49)
PLTU Tenayan Tenayan CFPP	71,28	44,01	17,11	10,64	(37,81)
PLTU Kaltim Teluk Kaltim Teluk CFPP	-	8,06	25,43	15,43	(39,32)
PLTU Pulang Pisau Pulang Pisau CFPP	-	11,50	13,09	6,59	(49,66)
EFOR Pembangkit UBJOM Wilayah Luar Jawa EFOR of OMSBU Power Plant Outside Java	6,65	6,64	12,41	8,68	(30,06)

Tabel SOF Pembangkit UBJOM Wilayah Luar Jawa (%)

Table of SOF of OMSBU Power Plant in Outside Java (%)

Pembangkit Power Plant	2016	2017	2018	2019	Naik/(Turun) Increased/ (Decreased) [%]
PLTMG Arun PLTMG Arun GEPP	5,15	5,51	4,77	5,77	20,96%
PLTU Tenayan Tenayan CFPP	0,00	41,33	27,76	18,96	(31,70)
PLTU Kaltim Teluk Kaltim Teluk CFPP	-	19,48	24,94	13,76	(44,83)
PLTU Pulang Pisau Pulang Pisau CFPP	-	12,95	33,30	9,83	(70,48)
SOF Pembangkit UBJOM Wilayah Luar Jawa SOF of OMSBU Power Plant in Outside Java	4,90	13,09	20,27	10,39	(48,74)

Tabel SdOF Pembangkit UBJOM Wilayah Luar Jawa (kali/unit)

Table of SdOF of OMSBU Power Plant in Outside Java (times/unit)

Pembangkit Power Plant	2016	2017	2018	2019	Naik/(Turun) Increased/ (Decreased) [%]
PLTMG Arun PLTMG Arun GEPP	100,79	28,42	3,68	26,58	622,28
PLTU Tenayan Tenayan CFPP	16,50	6,50	7,00	4,00	(42,86)
PLTU Kaltim Teluk Kaltim Teluk CFPP	-	6,00	3,00	1,50	(50,00)
PLTU Pulang Pisau Pulang Pisau CFPP	-	2,00	2,00	3,00	50,00
SdOF Pembangkit UBJOM Wilayah Luar Jawa SdOF of OMSBU Power Plant in Outside Java	93,86	22,40	3,76	4,08	8,51

Tabel Tara Kalor Neto Pembangkit UBJOM Wilayah Luar Jawa (kCal/kWh)

Table of NPHR of OMSBU Power Plant in Outside Java (kCal/KWh)

Pembangkit Power Plant	2016	2017	2018	2019	Naik/(Turun) Increased/ (Decreased) [%]
PLTMG Arun PLTMG Arun GEPP	1.855,22	1.919,35	2.233,21	2.222,70	(0,47)
PLTU Tenayan Tenayan CFPP	3.688,32	3.915,52	3.747,36	4.159,03	10,99
PLTU Kaltim Teluk Kaltim Teluk CFPP	-	3.878,83	3.689,93	3.430,08	(7,04)
PLTU Pulang Pisau Pulang Pisau CFPP	-	4.011,24	4.148,71	3.865,17	(6,83)
Tara Kalor Neto Pembangkit UBJOM Wilayah Luar Jawa NPHR of OMSBU Power Plant in Outside Java	1.937,87	3.089,81	3.215,25	3.367,28	4,73

Tabel NCF Pembangkit UBJOM Wilayah Luar Jawa (%)

Table of NPHR of OMSBU Power Plant in Outside Java (%)

Pembangkit Power Plant	2016	2017	2018	2019	Naik/(Turun) Increased/ (Decreased) [%]
PLTMG Arun PLTMG Arun GEPP	59,06	51,22	71,90	77,34	7,57
PLTU Tenayan Tenayan CFPP	23,92	28,15	53,33	73,05	36,98
PLTU Kaltim Teluk Kaltim Teluk CFPP	-	23,40	37,75	68,65	81,85
PLTU Pulang Pisau Pulang Pisau CFPP	-	32,20	40,25	84,20	109,19
NCF Pembangkit UBJOM Wilayah Luar Jawa NPHR of OMSBU Power Plant in Outside Java	41,49	35,84	50,58	73,93	46,16

Jasa O&M melalui Anak Perusahaan O&M Services through Subsidiaries

Unit Bisnis Jasa O&M (UBJOM) melalui Anak Perusahaan (PT PJB Services) sebesar 833,4 MW yang tersebar di 18 lokasi.

O&M Services Business Unit (OMSBU) through Subsidiaries (PT PJB Services) is 833.4 MW spread in 18 locations.

Kinerja Pembangkit UBJOM yang dikelola Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan

OMSBU Power Plant Performance Managed by Subsidiaries and Joint Ventures

Pembangkit Power Plant	EAF (%)		SOF (%)		EFOR (%)		SdOF (kali/unit) (times/unit)		Tara Kalor Neto NPHR (kCal/kWh)		NCF (%)	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Jasa O&M Luar Jawa O&M Services outside Java												
PLTU Amurang Amurang CFPP	39,73	84,82	59,34	12,81	2,28	2,69	3,00	4,50	4.261,06	4.027,73	34,99	78,65
PLTU Bangka Bangka CFPP	50,47	69,01	13,41	8,65	42,39	24,46	4,00	2,00	5.162,48	4.626,07	46,46	56,22
PLTU Belitung Belitung CFPP	83,20	90,02	8,95	8,50	8,46	1,46	10,00	4,00	4.111,50	4.367,07	67,41	77,19
PLTU Bolok Bolok CFPP	81,15	79,63	12,71	16,62	7,04	2,30	1,00	3,5	4.474,37	4.148,25	45,77	68,02
PLTU Kendari Unit 1 & 2 Kendari Unit 1 & 2 CFPP	69,12	53,40	23,51	28,42	7,61	6,48	6,00	5,00	5.080,56	6.517,89	63,19	32,20
PLTU Ketapang Ketapang CFPP	76,03	79,01	22,81	16,13	1,15	4,82	3,00	6,00	4.871,43	6089,55	49,60	67,49
PLTU Ropa Ropa CFPP	70,57	87,71	23,07	9,47	10,35	5,00	3,00	2,00	6.057,40	5440,19	19,24	35,69
PLTU Tembilahan Tembilahan CFPP	61,84	62,78	20,09	28,05	23,70	18,52	3,50	5,00	-	7.220,72	41,41	23,22
PLTU Tidore Tidore CFPP	82,22	78,36	8,42	13,66	10,18	9,24	6,00	4,00	5.288,32	4.644,78	41,41	68,98
Jasa O&M IPP IPP O&M Services												
PLTU KKA* KKA CFPP*	91,84	-	7,38	-	1,56	-	33,00	-	2.955,68	-	39,35	-
PLTA Asahan Asahan HPP	88,77	96,11	10,87	2,75	0,41	1,18	0,00	0,00	-	-	53,33	88,03
PLTU Banjarsari Banjarsari CFPP	62,47	62,41	25,60	5,34	17,99	34,07	5,00	3,00	3.419,93	4322,95	45,30	57,10
Pembangkit Sewa Lease Power Plant												
PLTG Duri Duri GTPP	95,91	86,90	1,76	5,41	9,84	28,25	10,00	0	4.365,93	4.566,69	19,05	17,73
Pembangkit Eksisting Existing Power Plant												
PLTD Suppa Suppa DPP	95,67	83,21	5,17	0	13,12	44,18	1,83	3	2128	2.182,51	3,31	2,22
PLTMG Bawean Bawean GEPP	98,92	98,69	0,00	1,18	0,05	0,01	2,33	1,33	2.820,39	2.775,24	41,50	63,46

*) PLTU KKA Tahun 2019 menjadi sewa pembangkit PLTMG dengan transaksi jual beli listrik
KKA CFPP in 2019 become lease of GEPP power plant with electricity trading



Segmen Usaha Jasa *Engineering, Procurement and Construction* (EPC) Engineering, Procurement, and Construction (EPC) Service Segment

PJB menyediakan Jasa *Engineering, Procurement and Construction* (EPC) untuk mengembangkan pembangkit-pembangkit baru, khususnya di luar Pulau Jawa yang didukung tenaga profesional dan kemampuan dalam penguasaan teknologi pembangkitan, serta jaringan yang luas. Dalam melaksanakan jasa EPC, PJB dibantu oleh Anak Perusahaan yaitu PT Rekadaya ElektriKA (PT RE).

PJB provides *Engineering, Procurement and Construction* (EPC) services to develop new power plants, especially for outside Java region, which are supported by professionals and experts in power plant technology, as well as wide networks. In performing EPC services, PJB is assisted by its Subsidiary, namely PT Rekadaya ElektriKA (PT RE).

Tabel Jasa EPC Fast Track Program-1 Luar Jawa
Table of EPC Services Fast Track Program-1 outside Java

Pembangkit Power Plant	Kapasitas Terpasang Installed Capacity	Lokasi Location	Progress Pekerjaan Working Progress (%)
PLTU Kepulauan Riau Riau Islands CFPP	2 x 7 MW	Kepulauan Riau Riau Islands	96,64
PLTU Kendari Kendari CFPP	2 x 10 MW	Sulawesi Tenggara Southeast Sulawesi	95,01
PLTU Tidore Tidore CFPP	2 x 7 MW	Maluku Utara North Maluku	100,00
PLTU Ende Ende CFPP	2 x 7 MW	Nusa Tenggara Timur East Nusa Tenggara	95,62

Tabel Jasa EPC Penugasan dan Merah Putih
Table of EPC Services of Assignment and Merah Putih

Pembangkit Power Plant	Kapasitas Terpasang Installed Capacity	Lokasi Location	Progress Pekerjaan Working Progress (%)
PLTU Gorontalo Gorontalo CFPP	2 x 25 MW	Gorontalo	96,28
PLTU Timika Timika CFPP	2 x 7 MW	Papua	35,98
PLTU Bima Bima CFPP	2 x 10 MW	Nusa Tenggara Barat West Nusa Tenggara	22,66

Segmen Usaha Jasa Lainnya Other Business Segments

Segmen Usaha Lainnya terdiri dari Usaha Jasa Implementasi Manajemen Aset Pembangkit (*Enterprise Asset Management/ EAM*), Usaha Jasa Penyedia Material Cadang Pembangkit (*Stockist*)

Other Business Segments consist of Enterprise Asset Management (EAM) Service, Sparepart Procurement (Stockist) Service

Usaha Jasa Implementasi *Enterprise Asset Management* (EAM) Enterprise Asset Management (EAM) Implementation Service

EAM Distribusi Jawa Timur

Implementasi EAM Distribusi Jawa Timur dilaksanakan berdasarkan 2 (dua) tahap kontrak, kontrak Tahap I mulai dari Oktober 2018 hingga April 2020 dan kontrak Tahap II mulai dari Oktober 2019 hingga Oktober 2020. Pada Maret 2020 akan dilaksanakan kegiatan *User Acceptance Training* (UAT) dan *Training* untuk modul *Health Index*. Selanjutnya akan dilakukan *sharing knowledge* Pembuatan Form PM JTM & Gardu untuk menyelesaikan modul *Work Management*.

EAM Pangkalan Susu

Kick Off Meeting implementasi EAM Pangkalan Susu telah dilaksanakan pada 9-11 Juli 2019, dilanjutkan dengan melakukan *mapping security role* dan data *gathering*. Tahapan *Operation Maintenance Engineering* (OME) pada proyek ini sudah selesai. *Go Live* OME telah dilakukan pada bulan Oktober 2019 dan dilanjutkan dengan Tahapan *setting Material Management* yang telah dilakukan pada bulan November 2019. Pekerjaan selanjutnya akan diteruskan di tahun 2020 dan diproyeksikan selesai pada bulan Juli 2020.

EAM Kalimantan

Kick Off Meeting implementasi EAM Kalimantan telah dilaksanakan pada 5-9 Agustus 2019, dilanjutkan kegiatan *Asset Management Awareness*. Tahapan *Operation Maintenance Engineering* (OME) pada proyek ini sudah selesai dan akan *Go Live* OME pada akhir Maret 2020. Tahapan saat ini sedang dilakukan *setting Material Management* dengan lingkup *gathering material management*, dan ditargetkan pekerjaan selesai di bulan Desember 2020.

EAM Sulawesi

Telah dilakukan kontrak pada November 2019, posisi pekerjaan saat ini sedang dilakukan data *gathering* untuk bidang OME. Proyeksi pekerjaan akan selesai pada bulan Desember 2020 dengan rencana *Go Live* pada bulan yang sama.

East Java Distribution EAM

Implementation of East Java Distribution EAM was in accordance with 2 (two) contract phases, Stage I Contract from October, 2018 to April, 2020 and Stage II Contract from October, 2019 to October, 2020. User Acceptance Training (UAT) and Training for Health Index modules will be held on March 2020. Sharing knowledge of PM JTM & Gardu Form Making will then be conducted to complete Work Management modules.

Pangkalan Susu EAM

Kick Off Meeting on Pangkalan Susu EAM implementation has been implemented on July 9-11, 2019, proceed with mapping security role and data gathering. The stage of Operation Maintenance Engineering (OME) on this project has been completed. Go Live OME has been carried out on October, 2019 and proceed with the stage of Setting Material Management conducted on November, 2019. The next project will be forwarded in 2020 and projected to be completed in July, 2020.

Kalimantan EAM

Kick Off Meeting on EAM Kalimantan implementation has been implemented on August 5-9, 2019, proceed with Assets Management Awareness. The stage of Operation Maintenance Engineering (OME) on this project has been completed and will Go Live OME at the end of March, 2020. The current stage is carried out Setting Material Management with scope of gathering material management and targeted to be completed in December, 2020.

Sulawesi EAM

The contract has been conducted on November, 2019, the current working position is conducting data gathering for OME. The working projection will be completed in December, 2020 with Go Live plan in the same month.



Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan Audit
Audited Financial Statements



Referensi Kriteria AR
AR Criteria Reference

Usaha Jasa Optimalisasi Aset Assets Optimization Service

Proyek Jasa Survey Data Induk Jaringan

Pekerjaan untuk tahun 2019 selesai dilaksanakan, jangka waktu pekerjaan selama 5 (lima) tahun mulai dari Januari 2019 hingga Januari 2024. Proyek Jasa Survey Data Induk Jaringan berlangsung dengan baik dan tidak terdapat kendala teknis dalam pelaksanaan pekerjaan.

Rehabilitasi PLTD Bawean

Telah dilakukan pekerjaan Relokasi PLTD Bawean Tahap 2, untuk mengantisipasi *Overhaul* yang dilakukan oleh UP Gresik untuk PLTMG pada bulan Desember. Pekerjaan ini melakukan relokasi 2 PLTD milik PLN dari pulau Gili Ketapang dan Pulau Sapudi. Pekerjaan telah selesai dilaksanakan secara keseluruhan di akhir tahun 2019.

Proyek Permanfaatan Laboratorium UPHB

UPHB telah membangun sebuah ide bisnis *non core* baru yaitu jasa kalibrasi yang telah memiliki sertifikasi KAN. Saat ini Laboratorium UPHB difokuskan untuk mendukung proses bisnis internal PJB. Rencana jangka panjang akan melakukan ekspansi ke pasar Eksternal seperti PLN, Indonesia Power maupun IPP.

Proyek Supervisi PLTU Pangkalan Susu

Kegiatan Supervisi telah selesai, dan seluruh pekerjaan termasuk *review* IK SOP telah selesai pada bulan Oktober 2019.

Kerjasama Pemanfaatan FABA

a. Pemanfaatan FABA Paiton

Sedang dilakukan peninjauan oleh tim PJB dan UID Jatim untuk melakukan pemanfaatan *Fly Ash dan Bottom Ash* (FABA) dalam bentuk paving blok untuk digunakan membangun gudang milik UID Jatim sebagai bentuk CSR dari PJB, FABA yang digunakan adalah milik UP Paiton dan UBJOM Paiton

b. Kajian SK 041

Terdapat penambahan lingkup SK yang sebelumnya hanya memanyungi FABA Unit Existing, dan saat ini ditambah menjadi pengelolaan FABA yang ada di Unit UBJOM.

Network Master Data Survey Services Project

Project for 2019 have been implemented, the time period of project is in 5 (five) years from January, 2019 to January, 2024. Network master survey services project data has been held properly and there are no technical challenges in the implementation.

Bawean DPP Rehabilitation

Relocation of Bawean DPP Phase 2 was conducted to anticipate Overhaul conducted by Gresik GU for GEPP in December. This project relocates 2 of PLN DPP from Gili Ketapang and Sapudi Island. The overall project have been conducted at the end of 2019.

MSUWA Laboratory Utilization Project

MSUWA has developed new idea of non-core business, namely KAN certified calibration services. Currently, MSUWA Laboratory is focused on supporting PJB internal business process. The long-term plan will conduct expansion to the External such as PLN, Indonesia Power or IPP.

Pangkalan Susu CFPP Supervision Project

Supervision has been completed and all projects including review of IK SOP has been completed in October, 2019.

FABA Utilization Collaboration

a. Paiton FABA Utilization

An exploratory between PJB and East Java UID team is implemented for Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) utilization in the form of paving block to be used in establishing warehouse owned by East Java UID as a form of PJB's CSR, FABA used is owned by Paiton GU and Paiton OMSBU.

b. Decree 401 Review

There is an addition in Decree scope which previously were only protect Existing FABA Unit and currently were added to FABA management within OMSBU Unit.

Usaha Jasa Penyedia Material Cadang Pembangkit (*Stockist*) Sparepart Procurement (*Stockist*) Service

Bidang usaha jasa *stockiest* saat ini dikelola langsung oleh Anak Perusahaan PJB yaitu PT PLN SC dimaksudkan untuk melayani pengadaan material cadang pembangkit di seluruh pembangkit di 23 (dua puluh tiga) lokasi dengan total kapasitas 10.077 MW.

Currently, the stockist services business segment is directly managed by a Subsidiary of PJB, namely PT PLN SC, appointed to provide the procurement of power plant spare parts in all power plant in 23 (twenty three) locations with 10,077 MW in total capacity.

PROFITABILITAS PER SEGMENT

SEGMENT PROFITABILITY

Setiap segmen usaha PJB memiliki kontribusi yang baik pada kinerja Perusahaan. Pada tahun 2019, kontribusi segmen usaha pada pendapatan usaha yang terbesar adalah Segmen Usaha Pembangkitan Listrik melalui penjualan tenaga listrik dengan kontribusi sebesar 84,72% dari jumlah pendapatan usaha.

All PJB business segments have optimally contributed to the Company's performance. In 2019, the business segment with the largest contribution to the revenue was the Electricity Business Segment through electricity sales that contributed 84.72% of the total revenue.

Komponen Pendapatan Usaha

Revenue Components

Komponen pendapatan PJB sesuai dengan segmen usaha PJB yaitu penjualan tenaga listrik, jasa operasi dan pemeliharaan, EPC atau konstruksi, dan pendapatan lainnya. Pada tahun 2019, pendapatan dikontribusi dari penjualan tenaga listrik sebesar 84,72%, jasa operasi dan pemeliharaan sebesar 11,12%, konstruksi sebesar 3,51%, dan pendapatan lainnya sebesar 0,65%.

Components of PJB revenue are in accordance with PJB's business segments: electricity sales, operation and maintenance services, EPC or construction, and other revenue. In 2019, revenue was contributed by electricity sales by 84.72%, operation and maintenance services by 11.12%, construction by 3.51%, and other revenues by 0.65%.

Tabel Komponen dan Komposisi Pendapatan Usaha (%)
Revenue Components and Composition (%)

Jenis Pendapatan Types of Revenue	2018		2019	
	Rp juta Rp million	%	Rp juta Rp million	%
Pendapatan Usaha Revenues				
Penjualan Tenaga Listrik Electricity Sales	34.757.316	85,15	33.681.317	84,72
Pendapatan Usaha Lainnya Other Revenues				
Jasa Operasi dan Pemeliharaan Operation and Maintenance Services	3.808.991	9,33	4.422.238	11,12
Konstruksi Construction	1.939.616	4,75	1.396.106	3,51
Lainnya Others	315.103	0,77	258.289	0,65
Jumlah Pendapatan Usaha Total Revenues	40.821.026	100,00	39.757.951	100,00

Pendapatan Usaha Per Segmen

Segment Revenue

Pendapatan usaha PJB tahun 2019 adalah sebesar Rp39.757.951 juta yaitu lebih rendah 2,60% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp40.821.026 juta. Hal tersebut terutama disebabkan oleh Penjualan Tenaga Listrik yang lebih rendah karena menurunnya produksi PJB, hal ini untuk mendukung optimasi di sistem Jawa Bali.

PJB's revenue in 2019 was Rp39,757,951 million, which was 2.60% lower than in 2018 amounting to Rp40,821,026 million. This was mainly due to lower Electricity Sales due to the decrease in PJB production; this was to support optimization in the Java-Bali system.

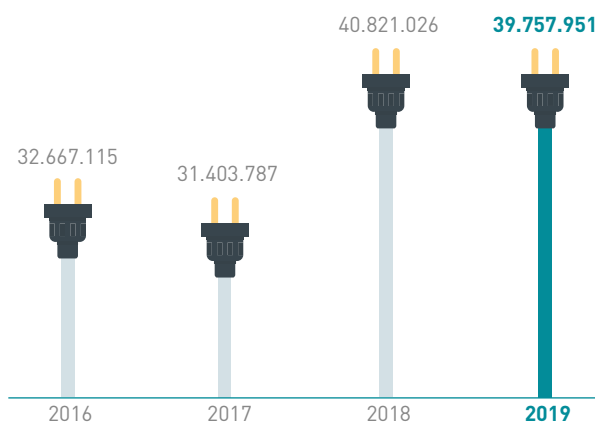
Tabel Pendapatan Usaha Per Segmen (Rp juta)

Table of Segment Revenue (Rp million)

Segmen Usaha Business Segments	2016	2017	2018	2019	Naik/(Turun) Increase/ (Decrease) [%]
Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik Power Plant Business	28.576.666	26.378.160	34.757.316	33.681.317	(3,10)
PLTGU CCPP	17.332.253	16.054.753	22.075.593	20.690.448	(6,27)
PLTU CFPP	8.597.284	8.149.944	9.884.783	9.815.582	(0,70)
PLTA HPP	2.570.722	2.154.339	2.775.006	3.120.684	12,46
PLTG GTPP	4.662.226	19.124	21.934	54.605	148,95
Usaha Jasa O&M dan EPC O&M and EPC Services Business	442.074	5.936.621	7.528.994	7.183.044	(4,59)
Usaha Jasa EAM,/IMAP, Stockiest EAM Service, IMAP, and Stockiest Business	442.074	535.197	490.934	681.695	38,86
Jumlah Pendapatan Usaha sebelum Eliminasi Total Revenues before Elimination	33.680.966	32.849.977	42.777.244	41.546.056	(2,88)
Eliminasi Elimination	(1.013.851)	(1.446.190)	(1.956.218)	(1.788.105)	(8,59)
Jumlah Pendapatan Usaha Total Revenue	32.667.115	31.403.787	40.821.026	39.757.951	(2,60)

Grafik Pendapatan Usaha (Rp juta)

Graph of Revenue (Rp million)



Laba Usaha Per Segmen Segment Operating Income

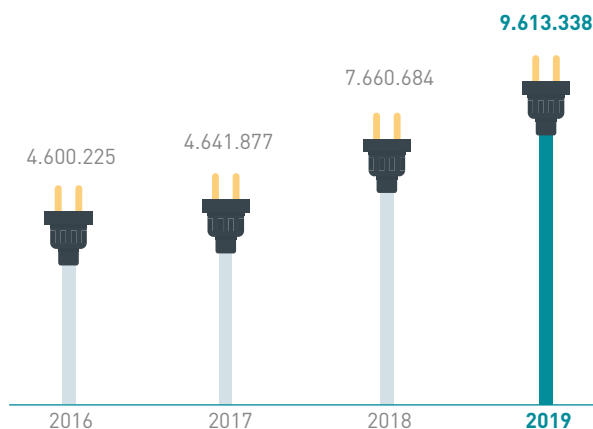
Laba usaha PJB tahun 2019 adalah sebesar Rp9.546.30 juta meningkat 25,49% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp7.660.684 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan penggunaan BBM sehingga Laba Penjualan Tenaga Listrik lebih baik dibandingkan Laba Usaha tahun 2018.

PJB's operating income in 2019 was Rp9,546.30 million, an increase of 25.49% compared to 2018 of Rp7,660,684 million. The increase was mainly due to the decrease in fuel usage so that the Profit of Electric Power Sales was higher than the Operating Income in 2018.

Tabel Pendapatan Usaha Per Segmen (Rp juta)
Table of Segment Operating Income (Rp million)

Segmen Usaha Business Segments	2016	2017	2018	2019	Naik/(Turun) Increase/ Decrease (%)
Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik Power Plant Business	4.211.451	3.298.636	6.241.594	8.227.961	31,82
PLTGU CCPP	2.145.996	2.055.476	3.471.348	4.685.041	34,96
PLTU CCPP	1.317.142	476.794	1.374.417	2.207.238	60,59
PLTA HPP	718.844	798.976	1.466.290	1.344.567	(8,30)
PLTG GTPP	29.469	(32.610)	(70.461)	(8.885)	(87,39)
Usaha Jasa O&M dan EPC O&M and EPC Services Business	531.362	1.784.381	82.594	425.040	414,61
Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik Power Plant Business	(1.082.291)	(1.324.776)	162.658	42.057	(74,14)
Jumlah Laba Usaha sebelum Eliminasi Total Operating Income before Elimination	3.660.521	3.758.241	6.486.846	8.695.058	34,04
Eliminasi Elimination	(200.653)	(301.294)	-	-	-
Hasil Segmen Segment Result	3.459.868	3.456.947	6.486.846	8.695.058	34,04
Penghasilan (Beban) Lain-lain Other Income (Expenses)	1.200.357	1.184.930	1.173.837	918.280	(21,77)
Jumlah Laba Usaha Total Operating Income	4.600.225	4.641.877	7.660.684	9.613.338	25,49

Grafik Laba Usaha (Rp juta)
Graph of Operating Income (Rp million)



Strategi dan Arah Pengembangan Segmen Usaha Strategy and Vision of Business Segment Development

Dalam rangka keberlanjutan usaha, strategi dan arah pengembangan disusun untuk setiap segmen usaha sehingga operasional dapat sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

To achieve business sustainability, the strategy and vision for development are arranged for each business segment so that operations can balance the targets.

Strategi dan Arah Pengembangan Segmen Usaha Penjualan Tenaga Listrik Strategy and Vision of the Electricity Segment Development

Penjualan Tenaga Listrik merupakan bisnis utama yang dimiliki oleh PJB dimana hampir 90% pendapatan berasal dari penjualan tenaga listrik pembangkit eksisting. PJB menekankan fokus penciptaan nilai bisnis pembangkit eksisting pada penjualan tenaga listrik yang lebih optimal dengan nilai EAF/EFOR yang mencapai *world class standard* dan mengusung prinsip *cost leadership* agar dapat mendukung kinerja usaha Pemegang Saham.

Electricity Sales is the main business owned by PJB where almost 90% of revenue is earned from sales of existing power plants. PJB emphasizes the focus of creating existing business power plant value on more optimal electricity sales with the value of EAF/EFOR reaching world-class standards and upholding the principle of cost leadership to support the business performance of Shareholders.

Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi yang dilakukan pada tahun 2019 adalah:

1. Meningkatkan kesiapan dan keandalan unit pembangkit,
2. Optimasi pola operasi untuk masing-masing unit pembangkit,
3. *Coal switching* PLTU Paiton 1-2 dari 5.000 kCal/kg menjadi 4.500 kCal/kg,
4. Melakukan kajian opsi *repowering*/relokasi untuk unit yang direncanakan RSH dalam jangka panjang (1000 MW).

To achieve these objectives, the strategies carried out in 2019 are:

1. Increase the readiness and reliability of generation units,
2. Optimization of operating patterns for each generation unit,
3. *Coal switching* for Paiton 1-2 CFPP from 5,000 kCal / kg to 4,500 kCal / kg,
4. Review of the repowering/relocation options for units planned by RSH in the long term (1000 MW).

Namun, Sistem Jawa Bali hanya tumbuh sebesar 3,2% lebih rendah dari target pertumbuhan sebesar 5,5% pada tahun 2019 sehingga berdampak pada penurunan kwh jual pembangkit PJB sebesar 9,5% meskipun posisi EAF PJB sebesar 95,6%.

However, the Java-Bali System only grew by 3.2%, lower than the 5.5% growth target in 2019, which resulted in a decrease in kWh of PJB generator sales by 9.5% despite the EAF PJB position of 95.6%.

Strategi dan Arah Pengembangan Segmen Usaha Jasa O&M Strategy and Vision of the O&M Services Segment Development

Penciptaan nilai bisnis jasa O&M melalui peningkatan proses operasi dan pemeliharaan pada pembangkit PJB maupun pembangkit milik pihak lain. Penerapan Manajemen aset pembangkitan akan menjadi kekuatan utama dalam pengelolaan aset yang berkinerja tinggi. Sinergi dengan *Asset Owner* dan *Asset Manager* akan terus ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas aset yang akan menghasilkan *output* yang tinggi dengan nilai biaya pokok produksi yang semakin baik secara berkesinambungan.

The establishment of O&M service business values is through improved operations and maintenance processes at PJB's power plant or other parties' plants. The implementation of power generation's asset management will be core support to manage high-performing assets. Synergy with Asset Owners and Asset Managers will continue to be improved to improve the quality of assets that will continuously produce high output with a better value of production costs.

Untuk pengembangan bisnis jasa O&M, strategi yang akan digunakan adalah pengembangan portfolio jasa O&M dengan melibatkan Anak Perusahaan PJB sebagai bagian dari segmentasi usaha jasa O&M dan meningkatkan *competitiveness* atas usaha jasa O&M.

For the development of the O&M service business, the strategy that will be used is the development of the O&M service portfolio by involving PJB Subsidiaries as part of O&M service business segmentation and increasing competitiveness of O&M service businesses.

Strategi dan Arah Pengembangan Segmen Usaha EPC

Strategy and Vision of EPC Segment Development

Strategi yang akan digunakan pada jasa EPC adalah mengembangkan jasa EPC untuk berbagai tipe dan ukuran pembangkit, terutama pembangkit yang memiliki ukuran diatas 100 MW. Fokus pengembangan bisnis EPC bertumpu pada pengembangan kapabilitas untuk memberikan jasa yang berkualitas dengan harga yang kompetitif agar dapat bersaing dalam *non-commercial* (penugasan PLN) dan *commercial market*. Untuk proses internal perusahaan, bisnis EPC akan mengembangkan *Integrated Management System* yang sesuai dengan *best practice*.

The strategy for EPC services is to develop EPC services into various types and sizes of power plants, especially power plants that have sizes above 100 MW. EPC's business development focus is on developing capabilities to provide quality services at competitive prices to compete in non-commercial (PLN's assignments) and commercial markets. For the company's internal processes, the EPC business will develop an Integrated Management System following best practices.

Strategi dan Arah Pengembangan Segmen Usaha Lainnya

Strategies and Vision of Other Segments Development

Usaha lainnya seperti *Business Solution* dan pelayanan penyediaan suku cadang. *Business Solution* yakni lini bisnis jasa berbasis teknologi informasi yang menyediakan jasa pendukung O&M pembangkit. Di antaranya adalah jasa implementasi manajemen aset pembangkitan, dimana PJB menawarkan implementasi manajemen aset pembangkit yang terintegrasi dengan *software* yang mendukung prosedur dan proses bisnis yang dikembangkan. Strategi untuk lini usaha ini adalah bisnis pelayanan penyediaan suku cadang untuk pembangkit akan dikelola oleh anak perusahaan PJB yang akan men-supply kebutuhan *spare part* untuk pembangkit FTP-1 baik yang dikelola PJB, IP dan beberapa unit PLN.

Other businesses include Business Solutions and spare parts supply services. Business Solution is a business line of information technology-based services that provide support for O&M power plants. One of them is the implementation of asset management services, where PJB offers the implementation of integrated asset management with software that supports developed business procedures and processes. The strategy for this business line is the service business of providing spare parts for the power plant to be managed by a PJB subsidiary that supplies spare parts for the FTP-1 power plant, both managed by PJB, IP, and several PLN units.

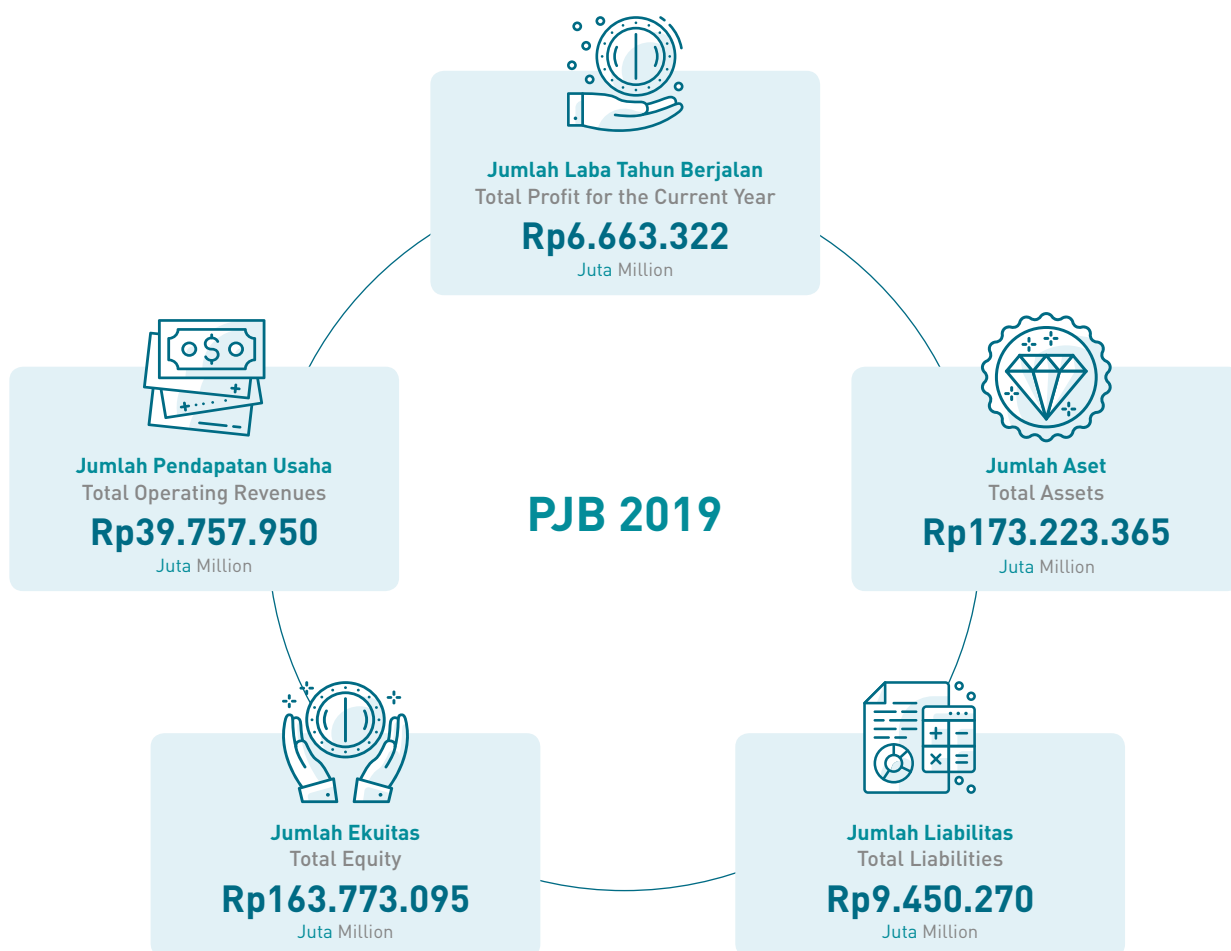


ANALISIS KINERJA KEUANGAN

FINANCIAL PERFORMANCE OVERVIEW

Pencapaian kinerja operasional di tahun 2019 menopang kinerja keuangan yang kuat memberikan keyakinan atas pengembangan usaha dan *business sustainability*.

The achievement of operational performance in 2019 also resulted in excellent financial performance ensuring business development and sustainability.



ANALISIS LABA RUGI KOMPREHENSIF

ANALYSIS OF COMPREHENSIVE PROFIT AND LOSS STATEMENT

Jumlah Laba Tahun Berjalan PJB tahun 2019 adalah sebesar Rp6.663.322 juta meningkat 12,60% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp5.917.432 juta. Sedangkan, jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan tahun 2019 adalah sebesar Rp6.172.475 juta meningkat 140,69% dibandingkan tahun 2018 sebesar (Rp15.170.790) juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan penggunaan BBM sehingga Laba Penjualan Tenaga Listrik lebih baik dibandingkan Laba tahun 2018.

In 2019, PJB's Profit for the Year was Rp6,663,322 million, 12.60% higher compared to 2018 of Rp5,917,432 million. However, PJB's Comprehensive Income for the Year was Rp6,172,475 million, 140.69% higher compared to 2018 (Rp15,170,790). The increase was mainly due to the decrease in fuel consumption so that the Profit of Electricity Sales is higher than the Profit in 2018.

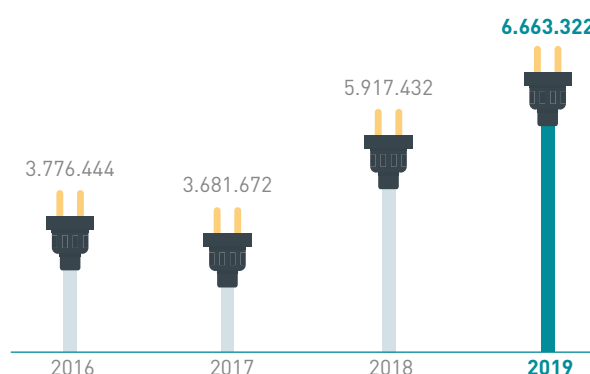
Tabel Laba Rugi Komprehensif (Rp juta)

Comprehensive Income Statement (Rp million)

Uraian Description	2016	2017	2018	2019	Naik/(Turun) Increase/ (decrease) [%]
Pendapatan Usaha Revenues	32.667.115	31.403.787	40.821.026	39.757.951	(2,60)
Beban Usaha Operating Expenses	29.207.248	27.946.839	34.334.181	31.062.893	(9,53)
Labanya Usaha Profit	3.459.867	3.456.948	6.486.845	8.695.058	34,04
Pos Keuangan dan Lain-lain Bersih Financial Items and Others (Net)	1.200.359	1.184.930	1.173.837	918.280	(21,77)
Labanya Sebelum Pajak Profit before tax	4.660.226	4.641.878	7.660.684	9.613.338	25,49
Beban Pajak Tax Expenses	(883.782)	(960.206)	(1.743.252)	(2.950.016)	69,22
Labanya Tahun Berjalan Profit for the Year	3.776.444	3.681.672	5.917.432	6.663.322	12,60
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain Tahun Berjalan setelah Pajak Other Comprehensive Income (Expenses) for the Year After Taxes	(1.381.518)	73.726	(21.088.224)	(490.848)	(97,67)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year	2.394.926	3.755.398	(15.170.792)	6.172.475	140,69
Labanya Tahun Berjalan Diatribusikan kepada: Profit for The Year Attributable To:					
- Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent Entity	3.759.932	3.668.635	5.904.512	6.645.392	12,55
- Kepentingan Non-Pengendali Non-controlling Interests	16.512	13.037	12.920	17.930	38,78
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan kepada: Total Comprehensive Income for The Year Attributable To:					
- Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent Entity	2.378.340	3.742.804	(15.190.703)	6.159.853	(140,55)
- Kepentingan Non-Pengendali Non-controlling Interests	16.586	12.594	19.911	12.621	(36,61)
Labanya Per Saham Dasar (Rupiah penuh) Basic Earnings Per Share (in Rupiah)	627	611	984	1.108	12,56

Grafik Jumlah Laba Tahun Berjalan (Rp juta)

Chart of Profit for the Year (Rp Million)



Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan Audit
Audited Financial Statements



Referensi Kriteria AR
AR Criteria Reference

Pendapatan Usaha Revenues

Pendapatan Usaha PJB terdiri atas Penjualan Listrik dan Pendapatan Usaha Lainnya. Penjualan listrik diperoleh dari penjualan tenaga listrik kepada PT PLN (Persero) dengan menggunakan formula tarif dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik. Sedangkan, Pendapatan Usaha Lainnya diperoleh dari jasa O&M, konstruksi, serta bisnis penunjang lain seperti jasa stockist, EAM/IMAP dan lainnya.

Pendapatan usaha PJB tahun 2019 adalah sebesar Rp39.757.951 juta lebih rendah 2,60% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp40.821.026 juta. Hal tersebut terutama disebabkan oleh Penjualan Tenaga Listrik yang lebih rendah karena menurunnya produksi PJB, hal ini untuk mendukung optimasi di Sistem Jawa Bali.

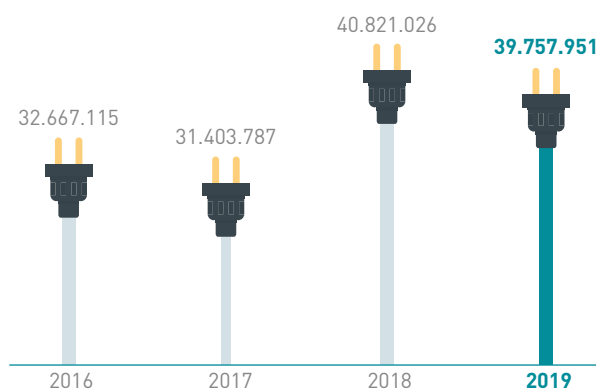
PJB's Revenues are from Electricity Sales and Other Operating Revenues. The sale of electricity is earned from the sale of electricity to PT PLN (Persero) using the tariff formula in the Power Purchase Agreement. Meanwhile, Other Operating Revenues are obtained from O&M services, construction, and other supporting businesses such as stockist services, EAM/IMAP, and others.

PJB's revenues in 2019 were Rp39,757,951 million, 2.60% lower than in 2018 amounting to Rp40,821,026 million. This was mainly due to lower Electricity Sales due to the decrease in PJB production, this was to support optimization in the Java Bali System.

Tabel Pendapatan Usaha (Rp juta)
Table of Revenues (Rp million)

Uraian Description	2016	2017	2018	2019	Naik/(Turun) Increase/ (Decrease) (%)
Penjualan Tenaga Listrik Electricity Sales	28.576.666	26.378.159	34.757.316	33.681.317	(3,10)
Pendapatan Usaha Lainnya Other Revenues	4.090.449	5.025.628	6.063.710	6.076.633	0,21
Jumlah Pendapatan Usaha Total Revenues	32.667.115	31.403.787	40.821.026	39.757.951	(2,60)

Grafik Pendapatan Usaha (Rp juta)
Chart of Revenues (Rp million)



Penjualan Tenaga Listrik Electricity Sales

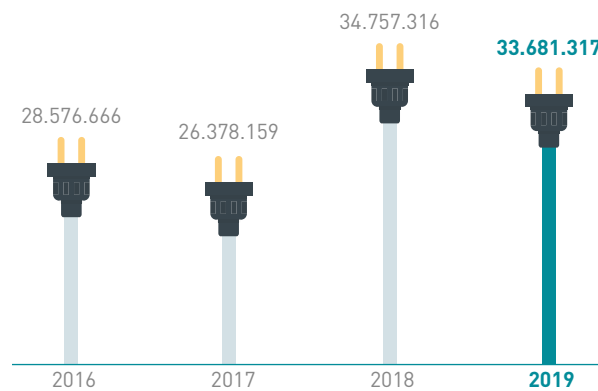
Formula tarif yang digunakan dalam penjualan tenaga listrik PJB mencakup perhitungan komponen harga kapasitas, harga tetap operasi dan pemeliharaan, harga bahan bakar, tingkat pasokan energi serta variabel lainnya.

Jumlah Penjualan Tenaga Listrik PJB tahun 2019 adalah sebesar Rp33.681.317 juta menurun 3,10% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp34.757.316 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh rendahnya realisasi produksi pada tahun 2019 untuk mendukung optimasi Sistem Jawa Bali.

The tariff formula used in PJB electricity sales includes the calculation of the capacity price component, the fixed operating and maintenance prices, fuel prices, the level of electricity supply, and other variables.

In 2019, Electricity Sales of PJB was Rp33,681,317 million, 3.10% lower compared to 2018 which was Rp34,757,316 million. The decline was mainly due to the low realization of production in 2019 to support the optimization of the Java-Bali System.

Grafik Penjualan Tenaga Listrik (Rp juta)
Chart of Electricity Sales (Rp million)



Pendapatan Usaha Lainnya Other Revenues

Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya PJB tahun 2019 adalah sebesar Rp6.076.633 juta meningkat 0,21% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp6.063.710 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan Jasa Operasi dan pemeliharaan tahun 2019 dibandingkan tahun 2018.

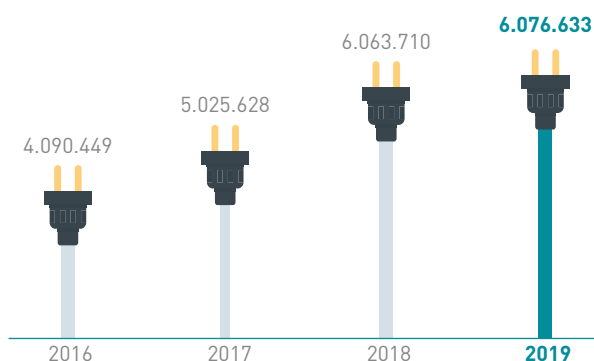
Total Other Business Income of PJB in 2019 was Rp6,076,633 million, 0.21% higher compared to 2018 of Rp6,063,710 million. The increase was mainly due to an increase in Operating and Maintenance Services revenue in 2019 compared to 2018.

Tabel Pendapatan Usaha Lainnya (Rp juta)
Table of Other Revenues (Rp million)

Uraian Description	2016	2017	2018	2019	Naik/(Turun) Increase/ (decrease) (%)
Jasa Operasi dan Pemeliharaan Operation and Maintenance Services	2.916.793	3.506.459	3.808.991	4.422.238	16,10
Konstruksi Construction	821.496	1.102.092	1.939.616	1.396.106	(28,02)
Lainnya Others	352.160	417.077	315.103	258.289	(18,03)
Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya Total Other Revenues	4.090.449	5.025.628	6.063.710	6.076.633	0,21



Grafik Pendapatan Usaha Lainnya (Rp juta)
Chart of Other Revenues (Rp million)



Beban Usaha Operating Expenses

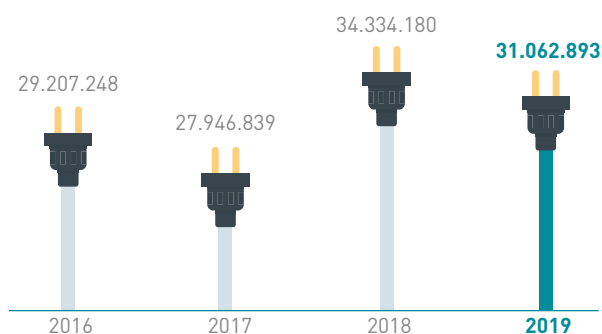
Jumlah Beban Usaha PJB tahun 2019 adalah sebesar Rp31.062.893 juta menurun 9,53% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp34.334.180 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan signifikan pada Beban Bahan Bakar akibat penurunan penggunaan BBM pada tahun 2019.

In 2019, Total Operating Expenses of PJB were Rp31,062,893 million, 9.53% lower compared to 2018 amounting to Rp34,334,180 million. The decrease was mainly due to a significant decrease in Fuel Expense due to the reduction in fuel use in 2019.

Tabel Beban Usaha (Rp juta)
Table of Operating Expense (Rp million)

Uraian Description	2016	2017	2018	2019	Naik/(Turun) Increase/ (Decrease) (%)
Pembelian Tenaga Listrik Electricity Purchases	-	-	-	332.016	-
Bahan Bakar dan Pelumas Fuel and Lubricants	18.691.824	16.696.543	22.323.942	18.830.297	(15,65)
Pemeliharaan Maintenance	3.717.001	4.352.735	4.761.927	4.798.897	0,78
Penyusutan Depreciation	4.136.323	3.898.063	3.938.110	3.699.338	(6,06)
Kepegawaian Employment	1.661.969	1.669.122	1.606.814	1.701.177	5,87
Lain-lain Others	1.000.131	1.330.376	1.703.388	1.701.167	(0,13)
Jumlah Beban Usaha Total Operating Expenses	29.207.248	27.946.839	34.334.180	31.062.893	(9,53)

Grafik Beban Usaha (Rp juta)
Chart of Operating Expenses (Rp million)



Beban Bahan Bakar dan Pelumas Fuel and Lubricant Expenses

Jumlah Beban Bahan Bakar dan Pelumas PJB tahun 2019 adalah sebesar Rp18.830.297 juta menurun 15,65% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp22.323.942 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan penggunaan Bahan Bakar Minyak dan karena menurunnya produksi penjualan tenaga listrik untuk mendukung optimasi di sistem oleh P2B.

In 2019, Total Fuel and Lubricants Expenses of PJB were Rp18,830,297 million, 15.65% lower compared to 2018 of Rp22,323,942 million. The decrease was mainly due to the decrease in the use of fuel oil and because of the decline in the production of electricity sales to support optimization in the system by P2B.

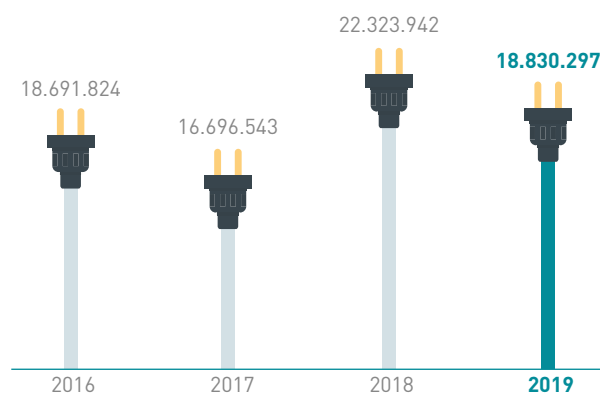
Tabel Beban Bahan Bakar dan Pelumas (Rp juta)

Table of Fuel and Lubricant Expenses (Rp million)

Uraian Description	2016	2017	2018	2019	Naik/(Turun) Increase/ (Decrease) [%]
Bahan Bakar Minyak Fuels	403.157	157.890	2.603.393	500.958	(80,76)
Solar (HSD) High-Speed Diesel	329.870	30.897	1.809.392	245.747	(86,42)
Residu (MFO) Marine Fuel Oil	73.287	126.993	794.001	255.211	(67,86)
Bahan Bakar Non Minyak Non-oil Fuels	18.267.642	16.515.775	19.683.504	18.287.210	(7,09)
Gas Alam Natural Gas	16.378.650	14.091.346	17.065.881	15.700.397	(8,00)
Batubara Coal	1.625.259	2.163.363	2.390.952	2.386.964	(0,17)
Air Water	216.333	221.820	178.927	141.803	(20,75)
Pajak Air Permukaan Surface Water Tax	24.387	22.267	18.364	16.882	(8,07)
Bahan Kimia dan Bahan Lainnya Chemical and Other Substances	23.013	16.979	29.380	41.164	1,301,08
Minyak Pelumas Lubricants	21.025	22.878	37.045	42.129	13,72
Jumlah Beban Bahan Bakar dan Pelumas Total Fuel and Lubricants Expenses	18.691.824	16.696.543	22.323.942	18.830.297	(15,65)

Grafik Beban Bahan Bakar dan Pelumas (Rp juta)

Chart of Fuel and Lubricants Expenses (Rp million)



Beban Pemeliharaan Maintenance Expenses

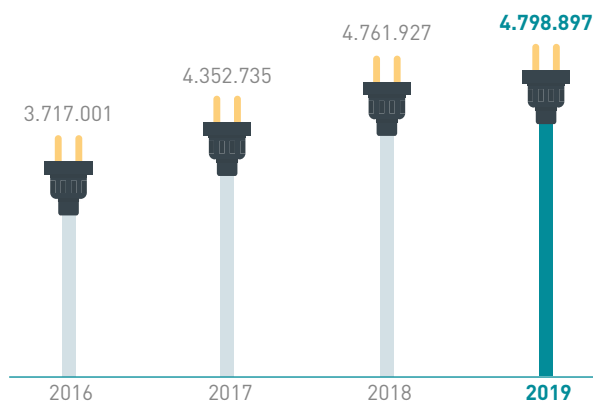
Jumlah Beban Pemeliharaan PJB tahun 2019 adalah sebesar Rp4.798.897 juta menurun 0,78% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp4.761.927 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh optimalisasi biaya pemeliharaan selama tahun 2019.

In 2019, Total Maintenance Expenses of PJB were Rp4,798,897 million, 0.78% lower compared to 2018 of Rp4,761,927 million. This decrease was mainly due to the optimization of maintenance costs during 2019.

Tabel Beban Pemeliharaan (Rp juta)
Table of Maintenance Expenses (Rp million)

Uraian Description	2016	2017	2018	2019	Naik/(Turun) Increase/ (decrease)(%)
Pemakaian Material Pemeliharaan Maintenance Materials	1.575.905	2.013.129	1.839.883	1.717.984	(6,63)
Jasa Borongan Contract Services					
Mesin Pembangkit dan Perlengkapan Power plant machineries and equipments	1.574.929	1.740.221	2.235.784	2.362.259	5,66
Perlengkapan Umum General Equipment	472.362	470.596	551.185	592.530	7,50
Kendaraan Bermotor, Alat-alat Mobil dan Lain-lain Vehicles, mobile equipments, and others	34.566	66.336	83.135	83.890	0,91
Tanah, Bangunan dan Infrastruktur Land, buildings, and infrastructure	59.239	62.453	51.940	42.235	713,15
Jumlah Beban Pemeliharaan Total Maintenance Expenses	3.717.001	4.352.735	4.761.927	4.798.897	0,78

Grafik Beban Pemeliharaan (Rp juta)
Chart of Maintenance Expenses (Rp million)



Beban Penyusutan Depreciation Expenses

Jumlah Beban Penyusutan PJB tahun 2019 adalah sebesar Rp3.699.338 juta menurun 6,06% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp40.047 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh revaluasi Aset Tetap tahun 2018.

In 2019, Depreciation Expense of PJB was Rp3,699,338 million, 6.06% lower compared to 2018 of Rp40,047 million. The decrease was mainly due to the revaluation of Fixed Assets in 2018.

Beban Kepegawaian Employment Expenses

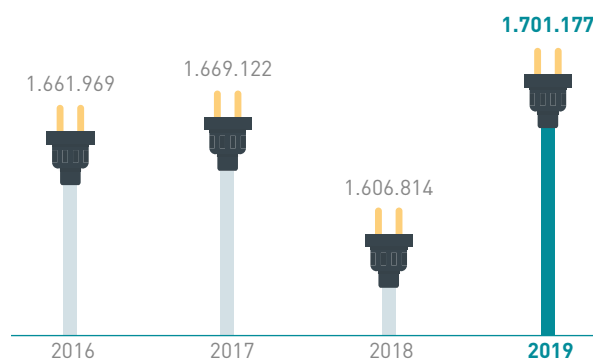
Jumlah Beban Kepegawaian PJB tahun 2019 adalah sebesar Rp1.701.177 juta meningkat 5,87% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp62.308 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh perhitungan beban imbalan kerja 2019 oleh aktuaris.

In 2019, Total Employment Expenses of PJB amounted to Rp1,701,177 million, 5.87% higher compared to 2018 of Rp62,308 million. The increase was mainly due to the calculation of the 2019 employee benefits expense by actuaries.

Tabel Beban Kepegawaian (Rp juta)
Table of Employment Expenses (Rp million)

Uraian Description	2016	2017	2018	2019	Naik/(Turun) Increase/ (decrease) [%]
Gaji dan Tunjangan Salaries and Allowances	643.224	715.166	728.339	753.049	3,39
Imbalan Kerja Employee Benefits	239.930	305.685	296.174	352.010	18,85
Bonus dan Insentif Karyawan Bonuses and Incentives	596.156	446.902	396.254	390.676	(1,41)
Pendidikan dan Pelatihan Education and Training	87.110	106.059	91.315	111.628	22,25
Tunjangan Kesehatan Health benefits	50.770	53.333	58.058	60.704	4,56
Lain-lain Others	44.779	41.977	36.674	33.110	(9,72)
Jumlah Beban Kepegawaian Total Employment Expenses	1.661.969	1.669.122	1.606.814	1.701.177	5,87

Grafik Beban Kepegawaian (Rp juta)
Chart of Employment Expenses (Rp million)



Beban Lain-lain

Other Expenses

Jumlah Beban Lain-Lain PJB tahun 2019 adalah sebesar Rp1.701.167 juta menurun 0,13% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp1.703.388 juta.

In 2019, Other Expenses of PJB reached Rp1,701,167 million, 0.13% lower compared to 2018 amounting to Rp1,703,388 million.

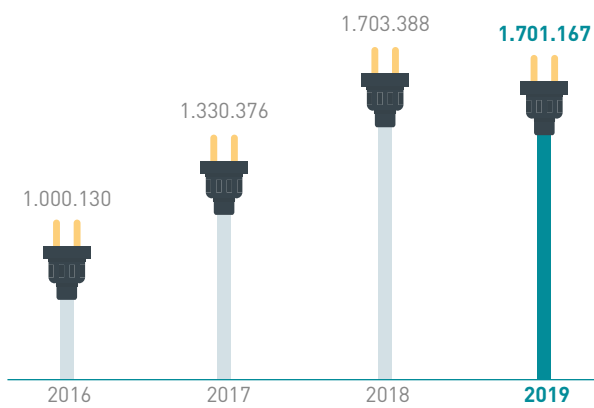
Tabel Beban Lain-lain (Rp juta)

Table of Other Expenses (Rp million)

Uraian Description	2016	2017	2018	2019	Naik/(Turun) Increase/ (decrease) [%]
Beban Kontrak Contract Expenses	670.928	997.777	1.291.076	1.213.598	(6,00)
Asuransi Insurance	102.750	69.906	70.633	88.878	25,83
Honorarium Honorarium	22.927	40.582	78.386	86.590	10,47
Perjalanan Dinas Business Trip	40.905	44.736	48.471	60.305	24,41
Konsumsi Business meals	17.659	19.131	23.966	24.109	0,60
Pos dan Telekomunikasi Mails and Telecommunications	7.741	16.323	11.853	15.774	33,08
Pajak dan Retribusi Lainnya Taxes and Other retributions	48.186	57.353	84.253	80.392	(4,58)
Lain-lain Others	89.034	62.589	73.105	131.523	38,81
Jumlah Beban Lain-lain Total Other Expenses	1.000.130	1.330.376	1.703.388	1.701.167	(0,13)

Grafik Beban Lain-lain (Rp juta)

Chart of Other Expenses (Rp million)



Labas Usaha

Operating Income

Jumlah Laba Usaha PJB tahun 2019 adalah sebesar Rp8.695.058 juta meningkat 34,04% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp6.486.845 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan laba atas penjualan tenaga listrik di 2019.

In 2019, Operating Income of PJB was Rp 8,695,058 million, 34.04% higher compared to 2018 which was Rp 6,486,845 million. The increase was mainly supported by an increase in profit on electricity sales in 2019.

Pos Keuangan dan Lain-lain Financial Items and Others

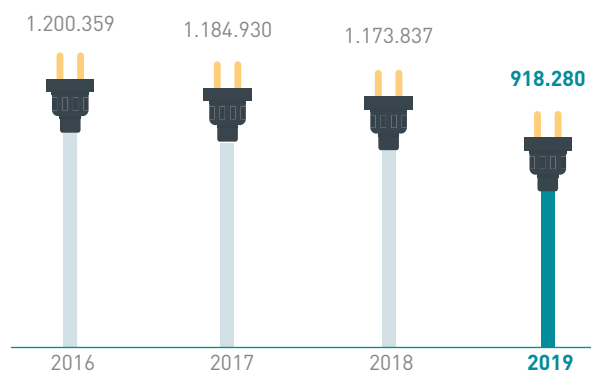
Jumlah Pos Keuangan dan Lain-lain Bersih PJB tahun 2019 adalah sebesar Rp 18.280 juta menurun 21,77% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp1.173.837 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pengakuan atas laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama.

In 2019, Financial items and Others-Net of PJB was Rp18,280 million, 21.77% lower compared to 2018 which was Rp1,173,837 million. This decrease was primarily due to a decrease in recognition of net income of associates and joint ventures.

Tabel Pos Keuangan dan Lain-lain Bersih (Rp juta)
Table of Total Financial Items and Others - Net (Rp million)

Uraian Description	2016	2017	2018	2019	Naik/(Turun) Increase/ (decrease) (%)
Penghasilan Keuangan Financial income	58.003	50.219	65.446	115.096	75,86
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing – bersih Profits (losses) on Foreign exchange – Net	(4.590)	7.597	65.446	(46.799)	(171,51)
Bagian laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama Share in net income of associates and joint ventures	451.942	739.782	1.064.508	891.393	(16,26)
Beban keuangan Financial Expenses	(175)	-	-	-	-
Lain-lain Bersih Others – Net	695.179	387.332	6.584	(41.410)	(728,95)
Jumlah Pos Keuangan dan Lain-lain Bersih Total Financial Items and Others - Net	1.200.359	1.184.930	1.173.837	918.280	(21,77)

Grafik Pos Keuangan dan Lain-lain Bersih (Rp juta)
Chart of Financial Items and Others -Net (Rp million)



Beban Pajak

Tax Expenses

Jumlah Beban Pajak PJB tahun 2019 adalah sebesar Rp2.950.016 juta meningkat 69,22% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp1.743.252 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan laba fiskal dan *impairment* atas rugi fiskal tahun 2016.

In 2019, tax expense of PJB was Rp2,950,016 million, 69.22% higher compared to 2018, which was Rp1,743,252 million. The increase was mainly due to an increase in fiscal profit and impairment of fiscal losses in 2016.

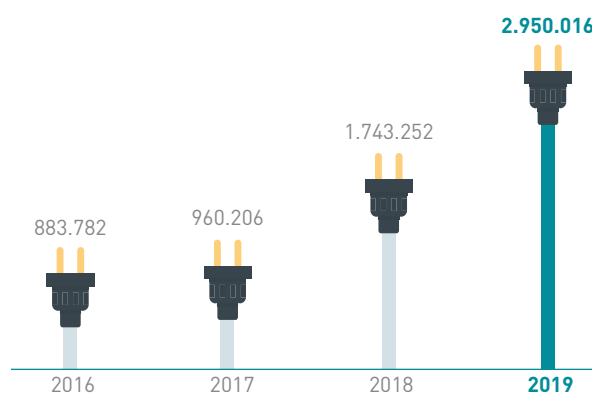
Tabel Beban Pajak (Rp juta)

Table of Tax Expense (Rp million)

Uraian Description	2016	2017	2018	2019	Naik/(Turun) Increase/ (decrease) (%)
Kini Current Tax	62.373	72.209	75.367	84.700	12,38
Tangguhan Deffered Tax	821.409	887.997	1.667.885	2.865.316	71,79
Jumlah Beban Pajak Total Tax Expenses	883.782	960.206	1.743.252	2.950.016	69,22

Grafik Beban Pajak (Rp juta)

Chart of Tax Expenses (Rp million)



Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain Tahun Berjalan

Other Comprehensive Income (Expenses) For The Year

Jumlah Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain Tahun Berjalan setelah Pajak tahun 2019 adalah sebesar Rp490.848 juta meningkat 97,67% dibandingkan tahun 2018 sebesar (Rp21.088.222) juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh tidak terdapatnya pengakuan surplus/defisit atas revaluasi aset tetap di tahun ini.

Other Comprehensive Income (Expenses) for the Year after Tax in 2019 was Rp490,848 million, 97.67% higher compared to 2018 (Rp21,088,222) million. The increase was mainly due to the absence of recognition of surplus/deficit for fixed asset revaluation in the year.

Tabel Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain Tahun Berjalan (Rp juta)
Table of Other Comprehensive Income (Expenses) for the Year (Rp million)

Uraian Description	2016	2017	2018	2019	Naik/(Turun) Naik/(Turun) (%)
Pos-pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi: Items that may be reclassified into profit or loss:					
Bagian Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain dari Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Other Comprehensive Income (Expenses) from Associates and Joint Ventures	(9.315)	440,430	247,000	(266.053)	(207,71)
Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba rugi: Items that will not be reclassified into profit or loss:					
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti Remeasurement on the Defined Benefit Plans	(220.824)	(260,992)	194,647	(208.812)	(207,28)
Surplus (Defisit) Revaluasi Aset Tetap Surplus (Deficit) in Revaluation of Fixed Assets	(1.206.586)	(170,653)	(29,212,914)	(74.511)	99,74
Manfaat Pajak Terkait Related income tax benefits	55.207	64,941	7,683,043	58.528	99,24
Jumlah Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain Tahun Berjalan Total Other Comprehensive Income (Expenses) for the Year	(1.372.203)	73,726	(21,088,224)	(490.848)	97,67

Laba Per Saham Dasar Basic Earnings per Share

Rata-rata tertimbang saham untuk tujuan perhitungan laba per saham dasar masing-masing sebanyak 6.000 juta saham. Perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi dilusi saham, sehingga laba per saham dasar sama dengan laba per saham dilusi.

Jumlah Laba Per Saham PJB tahun 2019 adalah sebesar Rp1.108 meningkat 12,56% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp984. Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan laba usaha yang didapatkan di tahun 2019.

The weighted-average shares to calculate basic earnings per share are 6,000 million shares. The company has no potential stock dilution effect; therefore, the basic earnings per share are equal to the diluted earnings per share.

Total Earnings Per Share of PJB in 2019 amounted to Rp1,108, 12.56% higher compared to 2018 of Rp984. This increase is in line with the increase in operating profit obtained in 2019.



ANALISIS POSISI KEUANGAN

FINANCIAL POSITION ANALYSIS

Jumlah Aset PJB pada tahun 2019 adalah sebesar Rp173.223.365 juta, Jumlah Liabilitas PJB pada tahun 2019 adalah sebesar Rp9.450.270 juta, dan Jumlah Ekuitas PJB pada tahun 2019 adalah sebesar Rp163.773.095 juta.

In 2019, Assets of PJB reached Rp173,223,365 million, Liabilities reached Rp9,450,270 million, and Equity reached Rp163,773,095 million.

Tabel Posisi Keuangan (Rp juta)
Table of Financial Position (Rp million)

Uraian Description	2016	2017	2018	2019	Naik/(Turun) Increase/ (Decrease) [%]
Aset Assets	191.738.394	193.321.110	174.390.907	173.223.365	(0,67)
Aset Lancar Current Assets	21.600.003	23.529.438	27.276.991	28.588.694	4,81
Aset Tidak Lancar Non-current Assets	170.138.391	193.321.110	147.113.916	144.634.671	(1,69)
Liabilitas Liabilities	5.956.099	7.471.128	7.382.220	9.450.270	28,01
Liabilitas Jangka Pendek Short-term Liabilities	3.772.224	4.033.059	4.862.490	5.056.333	3,99
Liabilitas Jangka Panjang Long-term Liabilities	2.183.875	3.438.069	2.519.730	4.393.937	74,38
Ekuitas Equity	185.782.295	185.849.982	167.008.687	163.773.095	(1,94)

Aset Assets

Komponen aset terbesar perusahaan masih didominasi dengan aset produktif seperti halnya:

1. Aset tetap pembangkit dan persediaan untuk menunjang operasional perusahaan.
2. Kas dan setara kas serta piutang usaha yang diantaranya dimanfaatkan sebagai sarana pembiayaan investasi dan operasional perusahaan.
3. Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama yang ke depan diharapkan menghasilkan *return* bagi perusahaan sekaligus upaya PJB dalam mengambil peran di dalam bisnis IPP untuk menjaga kedaulatan listrik nasional serta memperluas pangsa pasar di bisnis penunjang ketenagalistrikan lainnya.

The largest asset component of the company is still dominated by productive assets such as:

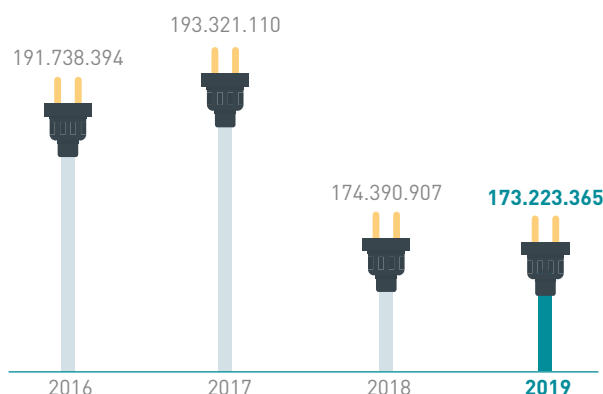
1. Fixed assets and inventory of power plants to support the company's operations.
2. Cash and cash equivalents and trade receivables which among others are used as a means of financing investment and company operations.
3. Future investments in associates and joint ventures are expected to generate returns for the company as well as the efforts of PJB in taking a role in the IPP business to maintain national electricity sovereignty and expand market share in other electricity supporting businesses.

Jumlah Aset PJB tahun 2019 adalah sebesar Rp173.223.365 juta menurun 0,67% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp174.390.907 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan wajar atas penyusutan aset tetap di tahun berjalan.

Total assets of PJB in 2019 amounted to Rp173,223,365 million, 0.67% lower compared to 2018 of Rp174,390,907 million. This decrease was mainly due to a reasonable decrease in fixed assets depreciation for the year.

Tabel Aset (Rp juta)
Table of Assets (Rp million)

Uraian Description	2016	2017	2018	2019	Naik/(Turun) Increase/ (Decrease) [%]
Aset Lancar Current Assets	21.600.003	23.529.438	27.276.991	28.588.694	4,81
Aset Tidak Lancar Non-current Assets	170.138.391	193.321.110	147.113.916	144.634.671	(1,69)
Jumlah Aset Total Assets	191.738.394	193.321.110	174.390.907	173.223.365	(0,67)

**Grafik Aset (Rp juta)**
Chart of Assets (Rp million)

Aset Lancar

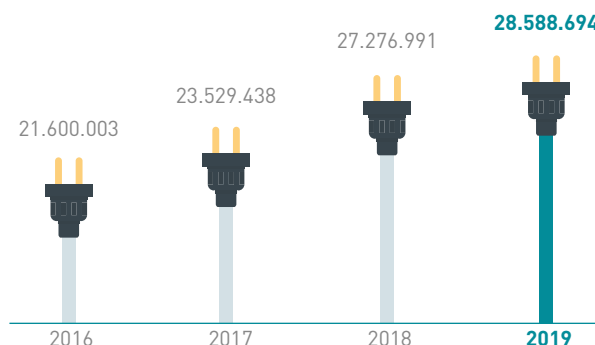
Current Assets

Jumlah Aset Lancar PJB tahun 2019 adalah sebesar Rp28.588.694 juta meningkat 4,81% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp27.276.991 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha atas pendapatan tenaga listrik yang masih outstanding pada tahun 2019.

In 2019, Current Assets of PJB was Rp28,588,694 million, 4.81% higher compared to 2018 which was Rp27,276,991 million. This increase was mainly due to an increase in trade receivables from electricity revenues which were still outstanding in 2019.

Tabel Aset Lancar (Rp juta)
Table of Current Assets (Rp million)

Uraian Description	2016	2017	2018	2019	Naik/(Turun) Increase/ (Decrease) (%)
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalent	2.135.475	2.879.830	1.688.004	1.838.858	8,94
Deposito Berjangka Time Deposits	367.297	280.000	1.204.511	326.901	(72,86)
Piutang Usaha Trade Receivables	16.365.506	16.968.816	20.146.456	22.140.678	9,90
Piutang Lain-lain Other Receivables	649.353	219.184	356.827	362.755	1,66
Persediaan Supplies	1.193.004	1.360.889	2.078.944	1.833.195	(11,82)
Pajak Dibayar Dimuka Prepaid Taxes	684.528	869.008	1.689.076	2.006.508	18,79
Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka Prepaid Expenses	204.840	951.711	113.173	79.799	(29,49)
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	21.600.003	23.529.438	27.276.991	28.588.694	4,81

Grafik Aset Lancar (Rp juta)
Chart of Current Assets (Rp million)

Kas dan Setara Kas

Jumlah Kas dan Setara Kas PJB tahun 2019 adalah sebesar Rp1.838.858 juta meningkat 8,94% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp1.688.004 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh menyiapkan dana untuk kebutuhan untuk Aset Add on Muara Tawar.

Perolehan kas dan setara kas perusahaan disamping diperoleh dari PT PLN (Persero) atas penjualan tenaga listrik dan pendapatan usaha lainnya yang selama ini mendominasi arus kas perusahaan, juga diperoleh melalui penerimaan deviden dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang nilainya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pembahasan mengenai kas dan setara kas akan dibahas lebih detail pada bagian Analisis Arus Kas.

Cash and Cash Equivalent

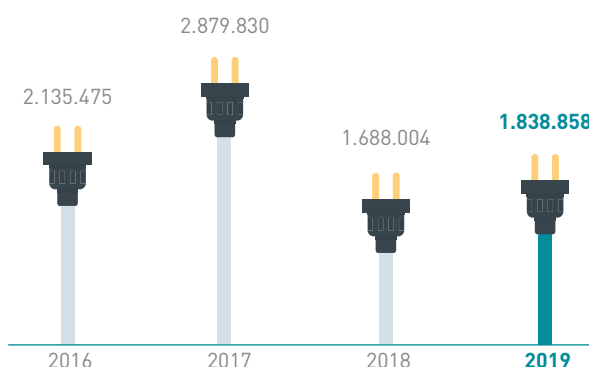
Cash and Cash Equivalents of PJB in 2019 amounted to Rp1,838,858 million, 8.94% higher compared to 2018 of Rp1,688,004 million. The increase was mainly due to preparing funds for the need for Muara Tawar Add on Assets.

The cash and cash equivalents, other than from PT PLN (Persero) for the sale of electricity and other business income that has been dominating the company's cash flow, are also obtained through dividends from associates and joint ventures whose value is increasing from year to year. The review of cash and cash equivalents will be discussed particularly in the Cash Flow Analysis section.

Tabel Kas dan Setara Kas (Rp juta)
Table of Cash and Cash Equivalent (Rp million)

Uraian Description	2016	2017	2018	2019	Naik/(Turun) Increase/ (Decrease) [%]
Kas Cash	13.217	4.322	3.006	2.676	(10,99)
Bank Bank	1.699.675	2.692.011	1.473.953	1.709.641	15,99
Pihak Berelasi Related Parties	1.275.657	2.431.689	1.361.900	1.507.878	10,72
Pihak Ketiga Third Parties	424.018	260.322	112.053	201.763	80,06
Setara Kas - Deposito Berjangka Cash Equivalent - Time Deposits	422.583	183.497	211.045	126.542	(40,04)
Pihak Berelasi Related Parties	412.471	173.385	200.933	116.430	(42,06)
Pihak Ketiga Third Parties	10.112	10.112	10.112	10.112	0,00
Jumlah Kas dan Setara Kas Total Cash and Cash Equivalent	2.135.475	2.879.830	1.688.004	1.838.858	8,94

Grafik Kas dan Setara Kas (Rp juta)
Chart of Cash and Cash Equivalent (Rp million)



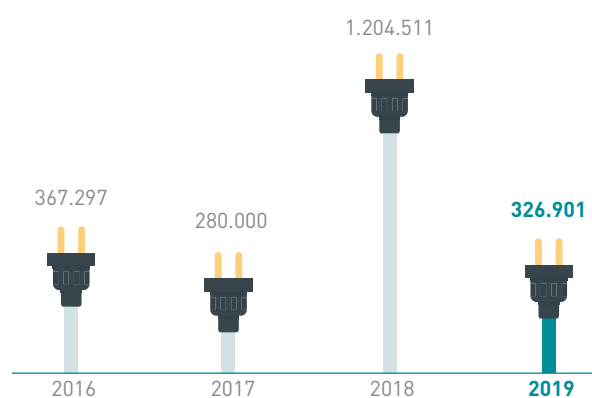
Deposito Berjangka

Jumlah Deposito Berjangka PJB pada tahun 2019 adalah sebesar Rp326.901 juta menurun 72,86% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp1.204.511 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh reklasifikasi atas deposito PJBI menjadi Deposito jangka panjang.

Time Deposits

In 2019, Time Deposits of PJB reached Rp326,901 million, 72.86% lower compared to 2018 which was Rp1,204,511 million. The decrease was mainly due to the reclassification of PJBI deposits into long-term deposits.

Grafik Deposito Berjangka (Rp juta)
Chart of Time Deposit (Rp million)



Piutang Usaha

Jumlah Piutang Usaha PJB tahun 2019 adalah sebesar Rp22.140.678 juta meningkat 9,90% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp20.146.456 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh piutang atas penjualan tenaga listrik yang masih *outstanding*.

Trade Receivables

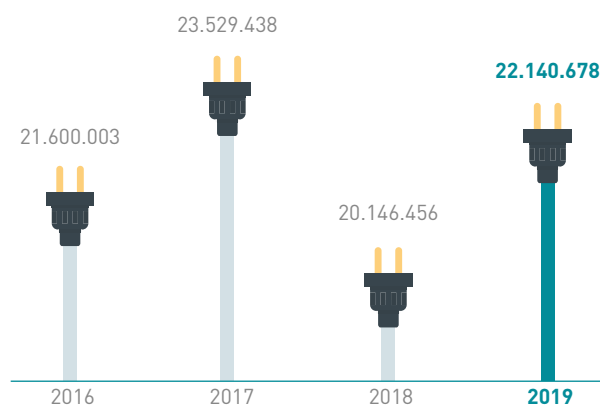
Total Trade Receivables of PJB in 2019 was Rp22,140,678 million, 9.90% higher compared to 2018 which was Rp20,146,456 million. This increase was mainly due to outstanding receivables from electricity sales.

Tabel Piutang Usaha (Rp juta)

Table of Trade Receivables (Rp million)

Uraian Description	2016	2017	2018	2019	Naik/(Turun) Increase/ (Decrease) (%)
Pihak Berelasi Related Parties	16.352.379	16.965.363	20.102.799	22.111.180	9,99
Pihak Ketiga Third Parties	13.127	3.453	43.657	29.498	(32,43)
Jumlah Piutang Usaha Total Trade Receivables	21.600.003	23.529.438	20.146.456	22.140.678	9,90

Grafik Piutang Usaha (Rp juta)
Chart of Trade Receivables (Rp million)



Piutang Lain-lain

Jumlah Piutang Lain-lain PJB pada tahun 2019 adalah sebesar Rp362.755 juta meningkat 1,66% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp356.827 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pengakuan atas bunga pinjaman untuk asosiasi.

Other Receivables

Total Other Receivables of PJB in 2019 were Rp362,755 million, 1.66% higher compared to 2018 amounting to Rp356,827 million. The increase was mainly due to increased recognition of loan interest for the associates.

Persediaan

Jumlah Persediaan PJB pada tahun 2019 adalah sebesar Rp1.833.195 juta menurun 11,81% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp2.078.944 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan saldo atas Bahan Bakar dan Pelumas pada tahun 2019.

Inventories

Total inventories of PJB in 2019 was Rp1,833,195 million, 11.81% lower compared to 2018 of Rp2,078,944 million. The decrease was mainly due to a decrease in the trade balance of Fuel and Lubricants in 2019.

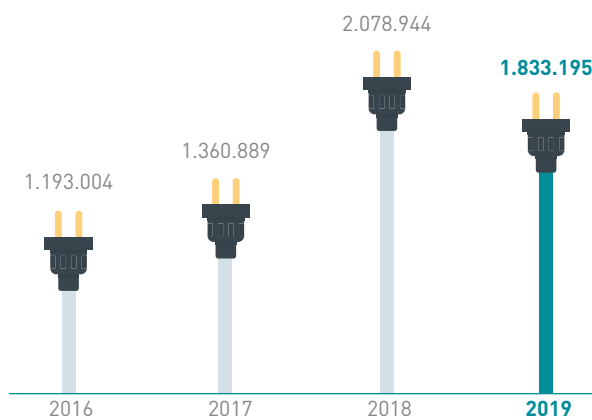
Tabel Persediaan (Rp juta)

Table of Inventories (Rp million)

Uraian Description	2016	2017	2018	2019	Naik/(Turun) Increase/ (Decrease) [%]
Bahan Bakar dan Pelumas Fuel and Lubricants	964.032	1.026.573	1.683.883	1.453.875	(13,66)
Material Pemeliharaan Maintenance materials	241.485	347.213	412.437	399.073	(3,24)
Sub Jumlah Sub-total	1.205.517	1.373.786	2.096.320	1.852.948	(11,61)
Penyisihan Penurunan Nilai Provision for impairment	(12.513)	(12.897)	(17.376)	(19.753)	13,68
Jumlah Persediaan Total Inventories	1.193.004	1.360.889	2.078.944	1.833.195	(11,82)



Grafik Persediaan (Rp juta)
Chart of Inventories (Rp million)



Pajak Dibayar Dimuka

Jumlah Pajak Dibayar Dimuka PJB tahun 2019 adalah sebesar Rp2.006.508 juta meningkat 18,79% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp1.689.076 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh masih terdapat saldo atas restitusi tahun 2017 PPN dan PPh.

Prepaid Taxes

Total prepaid tax of PJB in 2019 was Rp2,006,508 million, 18.79% higher compared to 2018 of Rp1,689,076 million. The increase was mainly due to the retained balance of VAT and Income Tax in 2017.

Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka

Jumlah Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka PJB tahun 2019 adalah sebesar Rp79.799 juta menurun 29,49% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp113.173 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan atas LC yang diakui dibandingkan tahun 2018.

Prepaid Expenses and Advances

Total Prepaid Expenses and Advances of PJB in 2019 amounted to Rp.79,799 million, 29.49% lower compared to 2018 of Rp113,173 million. The decrease was mainly due to the decrease in recognized LC compared to 2018.

Aset Tidak Lancar Non-Current Assets

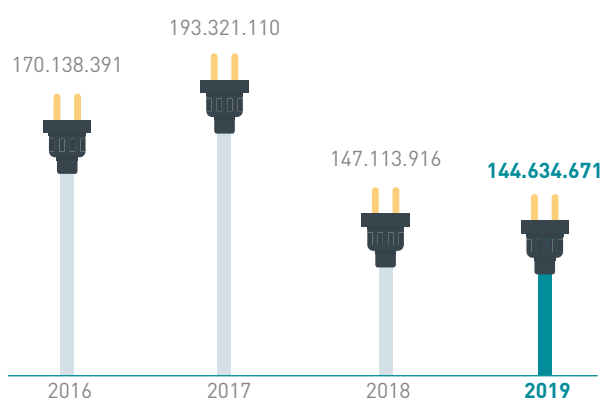
Jumlah Aset Tidak Lancar PJB tahun 2019 adalah sebesar Rp144.634.671 juta menurun 1,69% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp147.113.916 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan wajar atas penyusutan aset tetap dan menurunnya Aset Pajak Tangguhan tahun 2019.

Total Non-current Assets of PJB in 2019 amounted to Rp144,634,671 million, 1.69% lower compared to 2018 of Rp147,113,916 million. This decrease was primarily due to a reasonable decrease in fixed assets depreciation and a decrease in Deferred Tax Assets in 2019.

Tabel Aset Tidak Lancar (Rp juta)
Table of Non-current Assets (Rp million)

Uraian Description	2016	2017	2018	2019	Naik/(Turun) Increase/ (Decrease) (%)
Aset Tetap Fixed Assets	165.771.517	162.364.850	131.965.057	130.956.129	(0,76)
Properti Investasi Investment Properties	1.090.541	1.428.426	1.463.273	1.493.375	2,06
Investasi pada Entitas Asosiasi/Ventura Bersama Investment in Associates/Joint Ventures	3.130.778	5.801.036	7.445.759	7.880.576	5,84
Rekening Bank dan Deposito Berjangka Dibatasi Penggunaannya Restricted Bank Accounts and Time Deposits	-	28.029	68.297	94.223	37,96
Aset Pajak Tangguhan - Bersih Deferred Tax Assets -Net	29.852	41.429	5.019.595	2.212.070	(55,93)
Piutang kepada Ventura Bersama Receivables from Joint Ventures	-	11.165	827.957	785.639	(5,11)
Piutang Lain-lain Other Receivables	59.137	43.614	40.988	41.955	2,36
Aset Tidak Lancar Lainnya Other Non-Current Assets	56.566	73.123	282.990	1.170.704	313,69
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets	170.138.391	193.321.110	147.113.916	144.634.671	(1,69)

Grafik Aset Tidak Lancar (Rp juta)
Chart of Non-current Assets (Rp million)



Aset Tetap

Jumlah Aset Tetap PJB tahun 2019 adalah sebesar Rp130.956.129 juta menurun 0,76% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp131.965.057 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan wajar atas penyusutan aset tetap di tahun berjalan.

Fixed Assets

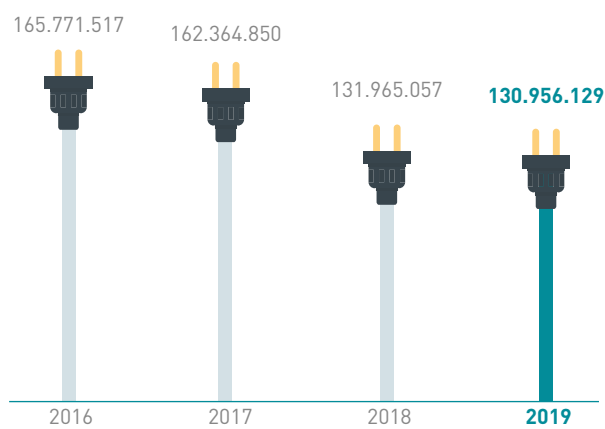
Total Fixed Assets of PJB in 2019 was Rp130,956,129 million, 0.76% lower compared to 2018 amounting to Rp131,965,057 million. This decrease was mainly due to a reasonable decrease in the depreciation of fixed assets in the current year.

Tabel Aset Tetap (Rp juta)

Table of Fixed Assets (Rp million)

Uraian Description	2016	2017	2018	2019	Naik/(Turun) Increase/ (Decrease) (%)
Tanah Land	15.709.993	15.562.440	17.303.524	17.301.257	(0,01)
Bangunan Umum, Waduk, dan Prasarana Public Buildings, Reservoirs, and Infrastructure	8.416.903	8.374.287	8.703.273	7.998.406	(8,10)
Instalasi dan Mesin Pembangkit Installation and Power Plant	135.753.262	132.051.017	97.195.925	95.227.922	(2,02)
Peralatan Transmisi dan Distribusi Transmission and Distribution Equipments	4.873.357	4.749.361	4.899.094	4.839.878	(1,21)
Perlengkapan Pengolahan Data dan Telekomunikasi Data Processing and Telecommunications Equipments	6.414	8.010	12.059	8.385	(30,47)
Peralatan Umum General Equipments	143.628	219.728	291.979	267.804	(8,28)
Kendaraan Bermotor Vehicles	32.832	55.404	51.211	50.583	(1,23)
Material Cadang Spare Parts	-	-	2.593	2.523	(2,70)
Pekerjaan dalam Pelaksanaan Work in Progress	123.752	101.417	2.233.388	4.067.978	82,14
Aset Tidak Digunakan dalam Operasi Non-operational Assets	711.376	1.243.186	1.277.320	1.196.702	(6,31)
Penyisihan Penurunan Nilai Allowance for Impairment Losses	-	-	(5.309)	(5.309)	-
Jumlah Aset Tetap Total Fixed Asset	165.771.517	162.364.850	131.965.057	130.956.129	(0,76)

Grafik Aset Tetap (Rp juta)
Chart of Fixed Assets (Rp million)



Properti Investasi

Properti investasi PJB merupakan tanah/bangunan milik perusahaan yang terletak di Paiton - Jawa Timur, Bekasi - Jawa Barat, Pluit - Jakarta Utara, Cipeundeuy - Bandung Barat dan Asahan - Sumatera Utara dengan hak legal berupa Hak Guna Bangunan (HGB) berjangka waktu dari 32 sampai 40 tahun, jatuh empo pada 2032 yang disewa kepada PT PLN (Persero), PT Paiton Energy, PT Jawa Power, PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero), PT Anugerah Mega Energi, PT Pertamina Hulu Energi ONWJ, PT Nusantara Regas, PT Cirata Karya Lestari dan PT Bajradaya Sentranusa. Penyewa tidak mempunyai hak opsi membeli properti pada saat akhir masa sewa.

Jumlah Properti Investasi PJB tahun 2019 adalah sebesar Rp1.493.375 juta meningkat 2,06% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp1.463.273 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penyesuaian atas nilai wajar atas properti investasi oleh KJPP atas tahun 2019.

Investasi pada Entitas Asosiasi/Ventura Bersama

Jumlah Investasi pada Entitas Asosiasi/Ventura Bersama PJB pada tahun 2019 adalah sebesar Rp7.880.576 juta meningkat 5,84% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp7.445.759 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pengakuan atas laba tahun berjalan.

Peningkatan jumlah investasi PJB pada entitas asosiasi dan ventura bersama menunjukkan keberhasilan bisnis portofolio Perusahaan dan sinyal perkembangan positif yang terjadi di entitas asosiasi dan ventura bersama. Di tahun 2019, PJB berhasil memperoleh dividen dari perusahaan asosiasi dan ventura bersama sebesar Rp216.813 juta

Rekening Bank dan Deposito Berjangka Dibatasi Penggunaannya

Jumlah Rekening Bank dan Deposito Berjangka Dibatasi Penggunaannya tahun 2019 adalah sebesar Rp94.223 juta meningkat 37,96% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp68.297 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan saldo atas jaminan proyek EPC PT Rekadaya ElektriKa.

Investment Property

PJB's investment property is a company-owned land/building located in Paiton - East Java, Bekasi - West Java, Pluit - North Jakarta, Cipeundeuy - West Bandung, and Asahan - North Sumatra with legal rights in the form of Building Rights (HGB) with a period of 32 to 40 years, due in 2032 that are leased to PT PLN (Persero), PT Paiton Energy, PT Jawa Power, PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero), PT Anugerah Mega Energi, PT Pertamina Hulu Energi ONWJ, PT Nusantara Regas, PT Cirata Karya Lestari, and PT Bajradaya Sentranusa. The tenants do not have the option to buy property at the end of the rental period.

Investment Properties of PJB in 2019 amounted to Rp1,493,375 million, 2.06% higher compared to 2018 of Rp1,463,273 million. This increase was mainly due to adjustments to the fair value of investment properties by KJPP for 2019.

Investment in Associates/Joint Ventures

Total investment in Associates/Joint Ventures of PJB in 2019 was Rp7,880,576 million, 5.84% higher compared to 2018 which was Rp7,445,759 million. This increase was mainly due to the recognition of the current year's profits.

The increase in PJB investment in associates and joint ventures shows the success of the Company's portfolio business and signals positive developments occurring in associates and joint ventures. In 2019, PJB successfully received dividends from associates and joint ventures of Rp216,813 million

Restricted Bank Accounts and Time Deposits

The Restricted Bank Accounts and Time Deposits in 2019 were Rp94,223 million, 37.96% higher compared to 2018 which was Rp68,297 million. The increase was mainly due to an increase in the balance of PT Rekadaya ElektriKa's EPC project collateral.

Aset Pajak Tangguhan – Bersih

Jumlah Aset Pajak Tangguhan – Bersih PJB tahun 2019 adalah sebesar Rp2.212.070 juta menurun 55,93% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp5.019.595 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pengakuan pajak tangguhan atas beda temporer dan penyisihan laba fiskal atas akumulasi rugi fiskal PT PJB.

Piutang kepada Ventura Bersama

Jumlah Piutang kepada Ventura Bersama PJB tahun 2019 adalah sebesar Rp785.639 juta menurun 5,11% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp827.957 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penyesuaian kurs atas piutang kepada ventura bersama tahun 2019.

Piutang Lain-lain

Jumlah Piutang Lain-lain PJB tahun 2019 adalah sebesar Rp41.955 juta meningkat 2,36% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp40.988 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan saldo piutang pada karyawan di tahun 2019.

Aset Tidak Lancar Lainnya

Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya PJB tahun 2019 adalah sebesar Rp1.170.704 juta meningkat 313,69% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp282.990 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh reklasifikasi atas Deposito berjangka menjadi Deposito Jangka Panjang PT PJB pada tahun 2019.

Deferred Tax Assets – Net

Total Deferred Tax Assets—Net of PJB in 2019 amounted to Rp2,212,070 million, 55.93% lower compared to 2018 of Rp5,019,595 million. The decrease was mainly due to the recognition of deferred taxes on temporary differences and allowance for fiscal profit on the accumulated fiscal loss of PT PJB.

Receivables from Joint Venture

The Receivables from Joint Ventures of PJB in 2019 were Rp785,639 million, 5.11% lower compared to 2018 amounting to Rp827,957 million. The decrease was mainly due to the adjustment of the exchange rate of receivables to joint ventures in 2019.

Other receivables

Total Other Receivables of PJB in 2019 was Rp41,955 million, 2.36% higher compared to 2018 of Rp40,988 million. This increase was mainly due to an increase in the balance of receivables from employees in 2019.

Other Non-current Assets

Total Other Non-current Assets of PJB in 2019 reached Rp1,170,704 million, 313.69% higher compared to 2018 of Rp282,990 million. The increase was mainly due to the reclassification of time deposits into PT PJB's Long-Term Deposits in 2019.



Liabilitas Liabilities

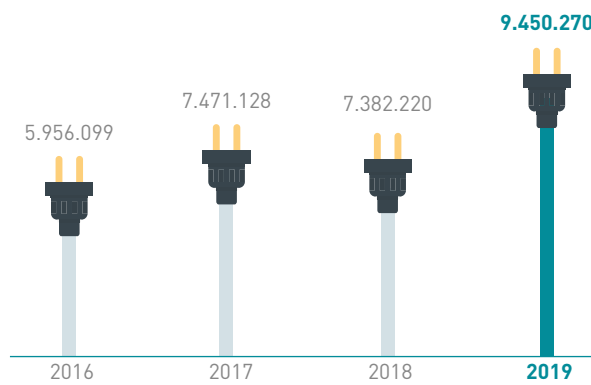
Jumlah Liabilitas PJB tahun 2019 adalah sebesar Rp9.450.270 juta meningkat 28,01% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp7.382.220 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan liabilitas kepada pemegang saham pada tahun 2019.

Total Liabilities of PJB in 2019 was Rp9,450,270 million, 28.01% higher compared to 2018 which was Rp7,382,220 million. The increase was mainly due to an increase in liabilities to shareholders in 2019.

Tabel Liabilitas (Rp juta)
Table of Liabilities (Rp million)

Uraian Description	2016	2017	2018	2019	Naik/(Turun) Increase/ (Decrease) [%]
Liabilitas Jangka Pendek Short-term liabilities	3.772.224	4.033.059	4.862.490	5.056.333	3,99
Liabilitas Jangka Panjang Long-term liabilities	2.183.875	3.438.069	2.519.730	4.393.937	74,38
Jumlah Liabilitas Total liabilities	5.956.099	7.471.128	7.382.220	9.450.270	28,01

Grafik Liabilitas (Rp juta)
Chart of Liabilities (Rp million)



Liabilitas Jangka Pendek Short-Term Liabilities

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek PJB tahun 2019 adalah sebesar Rp5.056.332 juta meningkat 3,99% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp4.862.490 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan hutang lain-lain atas hutang pembelian tenaga listrik.

Total Short-term Liabilities of PJB in 2019 was Rp5,056,332 million, 3.99% higher compared to 2018 amounting to Rp4,862,490 million. The increase was mainly due to an increase in other payables on electricity purchase debt.

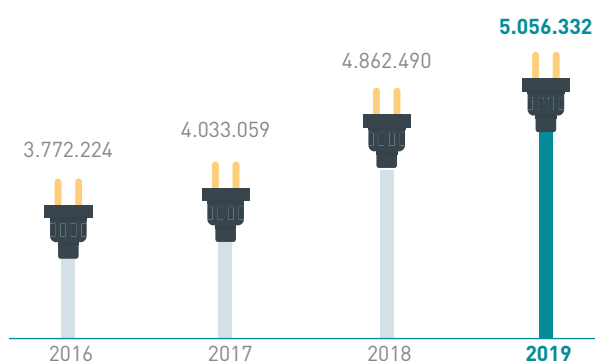
**Tabel Liabilitas Jangka Pendek (Rp juta)**

Table of Short-term Liabilities (Rp million)

Uraian Description	2016	2017	2018	2019	Naik/(Turun) Increase/ (Decrease) (%)
Utang Usaha Trade payables	2.308.906	2.737.497	3.494.980	3.431.194	(1,83)
Utang Lain-lain Other Payables	527.421	586.243	467.180	870.744	86,38
Utang Pajak Tax Payables	246.947	167.849	289.423	182.166	(37,06)
Biaya Masih Harus Dibayar Accrued Expenses	513.137	385.361	435.114	399.925	(8,09)
Liabilitas Imbalan Kerja yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun Current Maturities of Employee Benefit Liabilities	175.813	156.109	175.793	172.303	(1,99)
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Short-Term Liabilities	3.772.224	4.033.059	4.862.490	5.056.332	3,99

Grafik Liabilitas Jangka Pendek (Rp juta)

Chart of Short-term Liabilities (Rp million)

**Utang Usaha**

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek PJB tahun 2019 adalah sebesar Rp3.431.194 juta menurun 1,83% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp3.494.980 juta.

Trade Payables

Total Short-term Liabilities of PJB in 2019 was Rp3,431,194 million, 1.83% lower compared to 2018 of Rp3,494,980 million.

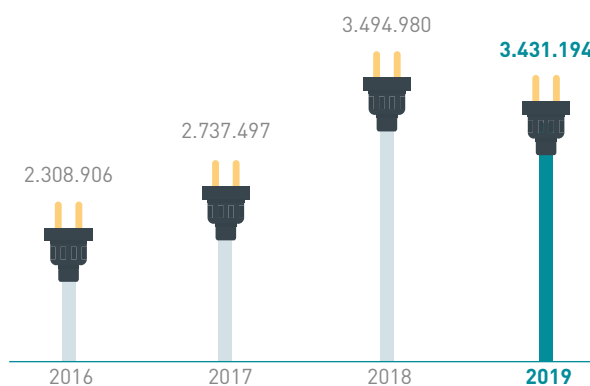
Tabel Utang Usaha (Rp juta)

Table of Trade Payables (Rp million)

Uraian Description	2016	2017	2018	2019	Naik/(Turun) Increase/ (Decrease) (%)
Pihak berelasi Related Parties	1.039.028	928.113	1.592.915	1.290.009	(19,02)
Pihak ketiga Third Parties	1.269.878	1.809.384	1.902.065	2.141.185	12,57
Jumlah Utang Usaha Total Trade Payables	2.308.906	2.737.497	3.494.980	3.431.194	(1,83)



Grafik Utang Usaha (Rp juta)
Chart of Trade Payables (Rp million)



Utang Lain-lain

Jumlah Utang Lain-lain PJB tahun 2019 adalah sebesar Rp870.744 juta meningkat 86,38% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp467.180 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pengakuan atas hutang pembelian tenaga listrik yang masih *outstanding*.

Other Payables

Total Other Payables of PJB in 2019 was Rp870,744 million, 86.38% higher compared to 2018 which was Rp467,180 million. The increase was mainly due to the recognition of outstanding debt for electricity purchases.

Utang Pajak

Jumlah Utang Pajak PJB tahun 2019 adalah sebesar Rp182.166 juta menurun 37,06% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp289.423 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh jumlah transaksi terhutang pajak yang lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tax Payables

Total Tax Payables of PJB in 2019 was Rp182,166 million, 37.06% lower compared to 2018 which was Rp289,423 million. The decrease was mainly due to lower tax payable transactions compared to the previous year.

Tabel Utang Pajak (Rp juta)
Table of Tax Payables (Rp million)

Uraian Description	2016	2017	2018	2019	Naik/(Turun) Increase/ (Decrease) [%]
Pajak Kini Current Tax	3.821	14.551	5.015	193	[96,15]
Pajak Penghasilan Income Tax	62.402	127.490	150.991	118.050	[21,82]
Pajak Pertambahan Nilai Value-added Tax	125.818	25.567	131.622	63.681	[51,62]
Lainnya Others	54.947	241	1.795	242	[86,52]
Jumlah Pajak Total Taxes	246.947	167.849	289.423	182.166	[37,06]

Biaya Masih Harus Dibayar

Jumlah Biaya Masih Harus Dibayar PJB tahun 2019 adalah sebesar Rp399.925 juta menurun 8,09% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp435.114 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pembebanan atas biaya yang masih dibayarkan tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2019.

Accrued Expenses

Total Accrued Expenses of PJB in 2019 were Rp399,925 million, 8.09% lower compared to 2018 which was Rp435,114 million. The decrease was mainly due to the previously accrued expenses made in 2019.

Liabilitas Imbalan Kerja yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun

Jumlah Liabilitas Imbalan Kerja yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun tahun 2019 adalah sebesar Rp172.303 juta menurun 1,99% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp175.793 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh perhitungan nilai jatuh tempo oleh aktuaris.

Current Maturities of Employee Benefit Liabilities

The amount of Employee Benefits Maturity in 2019 was Rp172,303 million, 1.99% lower compared to 2018 which was Rp175,793 million. The decrease was mainly due to the calculation of the maturity value by the actuary.

Liabilitas Jangka Panjang Long-term Liabilities

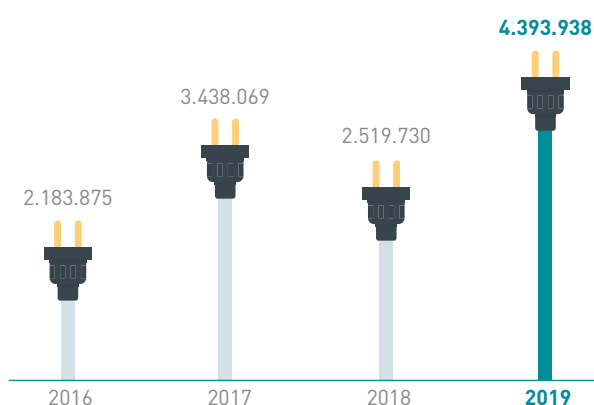
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang PJB tahun 2019 adalah sebesar Rp4.393.938 juta meningkat 74,38% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp2.519.730 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan atas Liabilitas kepada pemegang saham.

Total long-term Liabilities of PJB in 2019 amounted to Rp4,393,938 million, 74.38% higher compared to 2018 of Rp2,519,730 million. The increase was mainly due to the addition of liabilities to shareholders.

Tabel Liabilitas Jangka Panjang (Rp juta)
Table of Long-term Liabilities (Rp million)

Uraian Description	2016	2017	2018	2019	Naik/(Turun) Increase/ (Decrease) [%]
Liabilitas Pajak Tangguhan - Bersih Deferred Tax Liabilities-Net	247.788	1.082.267	45.275	44.538	[1,63]
Liabilitas kepada Pemegang Saham Liabilities to Shareholders	-	-	209.272	1.668.986	697,52
Liabilitas Imbalan Kerja - setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun Employee Benefits Liabilities (Net) of Current Maturities	1.936.087	2.355.802	2.265.183	2.680.414	18,33
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Long-term Liabilities	2.183.875	3.438.069	2.519.730	4.393.938	74,38

Grafik Liabilitas Jangka Panjang (Rp juta)
Chart of Long-term Liabilities (Rp million)



Liabilitas Pajak Tangguhan – Bersih

Jumlah Liabilitas Pajak Tangguhan – Bersih PJB tahun 2019 adalah sebesar Rp44.538 juta menurun 1,63% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp45.275 juta.

Liabilitas kepada Pemegang Saham

Jumlah Liabilitas kepada Pemegang Saham PJB tahun 2019 adalah sebesar Rp1.668.986 juta meningkat 697,52% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp209.272 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan pinjaman atas proyek Add on Muara Tawar sesuai dengan progress yang telah disepakati.

Liabilitas Imbalan Kerja - setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun

Jumlah Liabilitas Imbalan Kerja - setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun tahun 2019 adalah sebesar Rp 2.608.414 juta meningkat 18,33 % dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp2.265.183 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh perhitungan atas liabilitas Imbalan kerja sesuai perhitungan aktuaris.

Deferred Tax Liabilities—Net

Total Net Deferred Tax Liabilities of PJB in 2019 was Rp44,538 million, 1.63% lower compared to 2018 which was Rp45,275 million.

Liabilities to Shareholders

Total liabilities of PJB to shareholders in 2019 amounted to Rp1,688,986 million, 697.52% higher compared to 2018 of Rp209,272 million. The increase was mainly due to the addition of loans to Muara Tawar's Add-on project based on the agreed progress.

Employee Benefits Liabilities (Net) of Current Maturities

Employee Benefits Liabilities (Net) of Current Maturities in 2019 reached Rp2,608,414 million, 18.33% higher compared to 2018 in the amount of Rp2,265,183 million. The increase was mainly due to the calculation of the employee benefits liability following the actuary calculation.



Ekuitas Equity

Jumlah Ekuitas PJB 2019 adalah sebesar Rp163.773.095 juta menurun 1,94% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp167.008.687 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pembagian dividen atas saldo laba yang tidak ditentukan penggunaannya kepada pemegang saham pada tahun 2019.

Total Equity of PJB in 2019 amounted to Rp163,773,095 million, 1.94% lower compared to 2018 of Rp167,008,687 million. The decrease was mainly due to the distribution of dividends on the unspecified profit balance to shareholders in 2019.

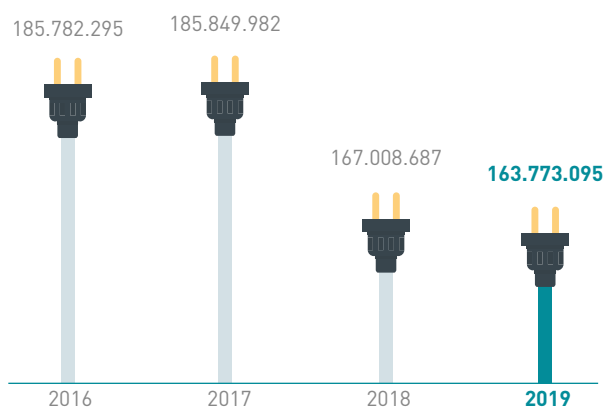
Tabel Ekuitas (Rp juta)

Table of Equity (Rp million)

Uraian Description	2016	2017	2018	2019	Naik/(Turun) Increase/ (Decrease) (%)
Modal Saham - Nilai Nominal Rp500 (Nilai Penuh) Per Saham Capital stock – par value of Rp500 (full amount) per share					
Modal Dasar - 24.000 juta Saham Authorized - 24,000 million shares					
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 6.000 juta Saham Issued and fully paid-up - 6,000 million shares	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-
Tambahan Modal Disetor Additional Paid-in Capital	2.915.205	2.915.205	2.915.205	2.915.205	-
Selisih Transaksi dengan Kepentingan Non-Pengendali Difference in Transaction with Non-Controlling Interest	(62.725)	(62.725)	(62.725)	(62.725)	-
Saldo Laba: Retained earnings					
Ditentukan Penggunaannya Appropriated	1.429.875	1.429.875	1.429.875	1.429.875	-
Tidak Ditentukan Penggunaannya Unappropriated	31.370.372	31.279.075	33.515.140	30.754.064	(8,24)
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income	147.069.280	147.143.449	126.046.528	125.560.989	(0,39)
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada: Equity Attributable To:					
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent Entity	185.722.007	185.704.877	166.844.023	163.597.408	(1,95)
Kepentingan Non-Pengendali Non-controlling Interests	60.288	145.103	164.664	175.687	6,69
Jumlah Ekuitas Total Equity	185.782.295	185.849.982	167.008.687	163.773.095	(1,94)

Grafik Ekuitas (Rp juta)

Chart of Equity (Rp million)



Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh merupakan saham biasa yang memberikan hak untuk membawa satu suara per saham dan berpartisipasi dalam dividen. Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh di tahun 2019 adalah sebesar Rp3.000.000 juta dan tidak terdapat perubahan dari tahun 2018.

Tambahan Modal Disetor

Tambahan Modal Disetor merupakan nilai pengalihan aset tetap, termasuk dana rehabilitasi PLTU Gresik Unit 1 dan 2 (berdasarkan Surat Direktur Utama PT PLN (Persero) Nomor 1311/533/DIRUT/2001 tanggal 19 Maret 2001) dan material pemeliharaan sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2000 yang diterima dari PT PLN (Persero) sebagai pemegang saham. Jumlah Tambahan Modal Disetor di tahun 2019 adalah sebesar 2.915.205 juta dan tidak terdapat perubahan dari tahun 2018.

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk

Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk PJB 2019 adalah sebesar Rp163.597.408 juta menurun 1,95% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp166.844.023 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pembagian dividen atas saldo laba yang tidak ditentukan penggunaannya pada tahun 2019.

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-Pengendali

Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-Pengendali PJB tahun 2019 adalah sebesar Rp175.687 juta meningkat 6,69% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp164.664 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan laba tahun berjalan tahun 2019.

Issued and Fully Paid-In Capital

Issued and Fully Paid-in Capital is a common stock that grants the authority of one vote per share and participates in dividends. The amount of Issued and Fully Paid-in Capital in 2019 was Rp3,000,000 million and there was no change from 2018.

Additional Paid-in Capital

Additional Paid-in Capital is the value of the transfer of fixed assets, including rehabilitation funds for Gresik CFPP Unit 1 and 2 (based on the Decree of PT PLN (Persero) President Director No. 1311/533/DIRUT/2001 on March 19, 2001) and material maintenance from 1996 to 2000 received from PT PLN (Persero) as a shareholder. Total Additional Paid-in Capital in 2019 was 2,915,205 million and there was no change from 2018.

Equity Attributable to Owners of the Parent Entity

Total Equity which is attributable to Owners of PJB's Parent Entity in 2019 is Rp163,597,408 million, 1.95% lower compared to 2018 which was Rp168,844,023 million. The decrease was mainly due to the distribution of dividends on unappropriated retained earnings in 2019.

Equity Attributable to Non-controlling Interests

Total Equity attributable to PJB's Non-Controlling Interest in 2019 was Rp175,687 million, 6.69% higher compared to 2018 of Rp164,664 million. This increase was mainly due to the addition of earnings for 2019.

ANALISIS ARUS KAS

CASH FLOWS ANALYSIS

Jumlah Kas dan Setara Kas PJB tahun 2019 adalah sebesar Rp1.838.858 juta meningkat 8,94% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp1.688.004 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan kas dari pendanaan untuk proyek Add On Muara Tawar.

Total PJB's Cash and Cash Equivalents in 2019 was Rp1,838,858 million or increased by 8.94% compared to 2018 which was Rp1,688,004 million. The increase was mainly due to an increase of cash from funding for the project of Add On Muara Tawar.

Tabel Arus Kas (Rp juta)

Table of Cash Flows (RP million)

Uraian Description	2016	2017	2018	2019	Naik/(Turun) Increased/ (Decreased) [%]
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi Net Cash provided by Operating Activities	1.988.180	2.774.372	2.748.822	1.195.765	(56,50)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi Net Cash Used in Investing Activities	(2.025.637)	(2.032.741)	(4.153.893)	(2.523.516)	(39,25)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan Net Cash provided by (Used in) Financing Activities	(702)	(1.279)	209.562	1.480.894	606,66
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase(Decrease) in Cash and Cash Equivalent	(38.159)	740.352	(1.195.509)	153.143	(112,81)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalent at the Beginning of The Year	2.177.209	2.135.475	2.879.830	1.688.004	(41,39)
Pengaruh Perubahan Kurs Mata Uang Asing Effect of changes in foreign currency	(3.575)	4.003	3.683	(2.289)	(162,15)
Jumlah Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalent at the End of The Year	2.135.475	2.879.830	1.688.004	1.838.858	8,94

Arus Kas Aktivitas Operasi

Cash Flows from Operating Activities

Jumlah Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi PJB tahun 2019 adalah sebesar Rp1.195.765 juta menurun 56,50% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp2.748.822 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pembayaran kepada pemasok atas hutang 2018 yang pelunasannya dilakukan di tahun 2019.

Total net Cash provided by PJB's Operating Activities in 2019 was Rp1,195,765 million or decreased by 56.50% compared to 2018 which was Rp2,748,822 million. The decrease was mainly due to payables paid to suppliers in 2018 which its maturity is in 2019.

Tabel Arus Kas Aktivitas Operasi (Rp juta)

Table of Cash Flows from Operating Activities (Rp million)

Uraian Description	2016	2017	2018	2019	Naik/(Turun) Increased/ (Decreased) [%]
Penerimaan Kas dari Pelanggan Cash Receipts from Customers	11.007.343	12.077.324	11.355.985	12.743.949	12,22
Pembayaran Kas kepada Pemasok, Karyawan, dan Lainnya Cash Paid to Suppliers, Employees, and Others	(8.701.187)	(9.109.490)	(8.222.738)	(11.430.192)	39,01
Kas Dihasilkan dari Operasi Cash Provided by Operations	2.306.156	2.967.834	3.133.247	1.313.757	(58,07)
Penerimaan Bunga Interest Received	58.003	50.219	-	115.096	75,86
Pembayaran Pengampunan Pajak Payment of Tax Amnesty	(884)	-	-	-	-
Pembayaran Pajak Penghasilan Income Tax Paid	(375.095)	(243.681)	(449.871)	(233.088)	(48,19)
Jumlah Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi Total Net Cash Provided by Operating Activities	1.988.180	2.774.372	2.748.822	1.195.765	(56,50)



Arus Kas Aktivitas Investasi Cash Flows for Investing Activities

Jumlah Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi PJB tahun 2019 adalah sebesar Rp2.523.516 juta menurun 39,25% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp4.153.893 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh nilai penempatan investasi dan penempatan deposito di tahun 2019 tidak setinggi di tahun 2018, namun hal ini sesuai dengan RKAP 2019.

Total Net Cash used for PJB's Investing Activities in 2019 was Rp2,523,516 million or decreased by 39.25% compared to 2018 which was Rp4,153,893 million. The decrease was mainly due to the value of investment placement and deposits placement in 2019 not higher than in 2018, however, this is in accordance with the 2019 ABOP.

Tabel Arus Kas Aktivitas Investasi (Rp juta)
Table of Cash Flows for Investing Activities (Rp million)

Uraian Description	2016	2017	2018	2019	Naik/(Turun) Increased/ (Decreased) [%]
Penerimaan Dividen dari Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Dividend Receipts from Associated Entities and Joint Ventures	204.144	236.892	195.998	216.678	10,55
Penempatan Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Investment Placements in Associated Entities and Joint Ventures	(325.965)	(1.726.938)	(541.141)	(26.291)	(95,14)
Penempatan Deposito Deposit Placement	(249.462)	(20.000)	(902.130)	(14.096)	(98,44)
Penempatan Pinjaman kepada Ventura Bersama Loan Placement to Joint Ventures	-	5.582	5.582	5.582	-
Penerimaan Kembali dari Pinjaman Ventura Bersama Receipt of Payments from Loan to Joint Ventures	-	-	(822.375)	-	(100,00)
Penarikan Deposito Berjangka Withdrawal of Time Deposits	-	107.297	(902.130)	203.390	-
Penempatan Rekening Bank dan Deposito Berjangka Dibatasi Penggunaannya Placement of Restricted Cash in Banks and Time Deposits	-	(28.029)	(40.268)	(25.926)	(35,62)
Penempatan Investasi oleh Kepentingan Non-pengendali Investment Placement by Non-Controlling Interest	-	73.500	-	-	-
Perolehan Aset Tetap Acquisition of Fixed Assets	-	(681.045)	(2.049.559)	(2.882.853)	40,66
Jumlah Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi Total Net Cash Used for Investing Activities	(2.025.637)	(2.032.741)	(4.153.893)	(2.523.516)	(39,25)

Arus Kas Aktivitas Pendanaan Cash Flows from Financing Activities

Jumlah Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan PJB tahun 2019 adalah sebesar Rp1.408.894 juta meningkat 606,66% dibandingkan tahun 2018 diperoleh dari kas sebesar Rp209.562 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penerimaan atas liabilitas kepada pemegang saham untuk pembiayaan proyek Add On Muara Tawar.

Total Net Cash obtained by (Used for) PJB's Financing Activities in 2019 was Rp1,408,894 million or increased by 606.66% compared to 2018 which was Rp209,562 million obtained by cash. The increase was mainly due to liabilities receipts to the shareholders for financing the project of Add On Muara Tawar.

Tabel Arus Kas Aktivitas Pendanaan (Rp juta)
Table of Cash Flows from Financing Activities (Rp million)

Uraian Description	2016	2017	2018	2019	Naik/(Turun) Increased/ (Decreased) [%]
Penerimaan pinjaman pemegang saham Proceed of Shareholder Loan	-	-	209.912	1.482.492	606,24
Pembayaran Dividen oleh Entitas Anak Kepada Kepentingan Non-Pengendali Payment of Dividend by Subsidiary to Non-Controlling Interest	(702)	(1.279)	(350)	(1.598)	356,57
Jumlah Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan Total Net Cash Obtained by (Used for) Financing Activities	(702)	(1.279)	209.562	1.480.894	606,66



ANALISIS KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG, TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG DAN RASIO KEUANGAN LAINNYA

ANALYSIS OF SOLVENCY, RECEIVABLES COLLECTIBILITY RATE AND OTHER FINANCIAL RATIOS

Kemampuan Membayar Utang Solvency

Tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya diukur menggunakan rasio solvabilitas dan rasio likuiditas. Berikut adalah rincian tanggal jatuh tempo kontraktual untuk liabilitas keuangan dengan pembayaran yang telah disepakati:

The ability of company rate to fulfill its obligations can be measured by using solvancy and liquidity ratio. The following is details of contractual maturity for financial liabilities with the agreed payment:

Tabel Rincian Jatuh Tempo Liabilitas (Rp juta)

Table of Liabilities Maturity Details (Rp million)

Uraian Description	Jatuh Tempo Maturity				
	Satu tahun One Year	Lebih dari 3 tahun namun kurang dari 3 tahun More than 3 years but less than 3 years	Lebih dari 3 tahun namun kurang dari 5 tahun More than 3 years but less than 5 years	Lebih dari 5 tahun More than 5 years	Jumlah Total
Liabilitas kepada Pemegang Saham Liability to Shareholder	-	1.668.986	-	-	1.668.986
Utang usaha Trade Payables	3.431.194	-	-	-	3.431.194
Utang Lain-lain Other Payables	870.744	-	-	-	870.744
Biaya yang Masih Harus Dibayar Accrued Expenses	399.925	-	-	-	399.925
Jumlah Total	4.701.863	1.668.986	-	-	6.370.849

Rasio Solvabilitas Solvency Ratios

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan membayar seluruh utangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio solvabilitas dapat dilihat melalui beberapa rasio keuangan diantaranya adalah *Debt to Assets Ratio* (DAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER).

Solvency ratio is a ratio that measure the ability of company to pay all the payables, both short and long term. Solvency ratio can be seen through several financial ratios like debt to assets ratio (DAR) and debt to equity ratio (DER).

Tabel Rasio Solvabilitas (%)

Table of Solvency ratios (%)

Uraian Description	2016	2017	2018	2019	Naik/(Turun) Increased/ (Decreased) [%]
DAR	3,11	3,86	4,23	5,46	1,23
DER	3,21	4,02	4,42	5,77	1,35

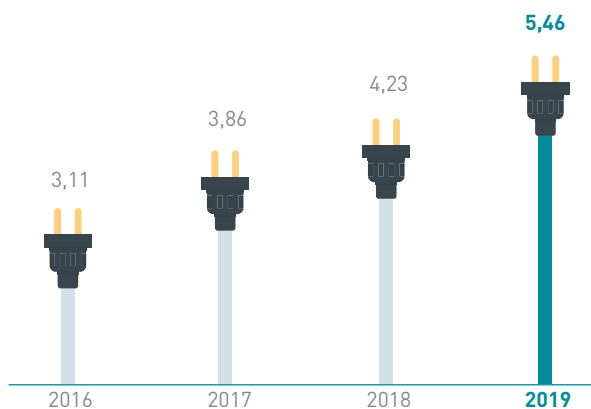
Debt to Assets Ratio (DAR)

Nilai DAR PJB tahun 2019 adalah 5,46% yaitu lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 yaitu 4,23%. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan nilai liabilitas kepada pemegang saham untuk pembiayaan proyek *Add On* muara Tawar.

Debt to Assets Ratio (DAR)

PJB's DAR value in 2019 was 5.46% or higher than in 2018 which was 4.23%. The increase was mainly caused by the increase of liabilities value to the shareholders for financing the project of *Add On* Muara Tawar.

Grafik DAR (%)
Chart of DAR (%)



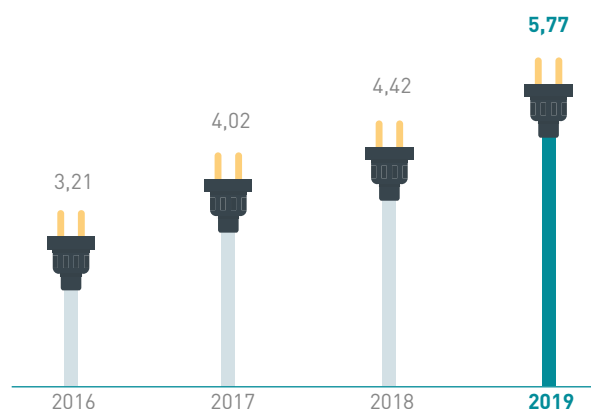
Debt to Equity Ratio (DER)

Nilai DER PJB tahun 2019 adalah 5,77% yaitu lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 yaitu 4,42%. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan nilai liabilitas kepada pemegang saham untuk pembiayaan proyek *Add On* muara Tawar juga terdapat penurunan ekuitas akibat pembagian dividen atas saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

Debt to Equity Ratio (DER)

PJB's DER value In 2019 was 5.77% or higher than in 2018 which was 4.42%. The increase was mainly caused by the increase of liabilities value to the shareholders for financing the project of *Add On* Muara Tawar, also there is the decrease of equity due to dividend distribution of earnings balance that has not been appropriated.

Grafik DER (%)
Chart of DER (%)



Rasio Likuiditas Liquidity Ratios

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang akan jatuh tempo. Rasio yang digunakan untuk menilai rasio likuiditas diantaranya adalah *cash ratio*, *quick ratio*, dan *current ratio*. Semakin tinggi nilai dari rasio-rasio tersebut, maka mengindikasikan bahwa PJB mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya yang akan jatuh tempo.

Liquidity ratio is used to measure the ability of the company in meeting all short-term liabilities approaching its maturity date. Ratios used to assess liquidity ratio are cash ratio, quick ratio, and current ratio. The higher the values of the ratios, the higher the chance of PJB to fulfill its obligations approaching the maturity date.

Tabel Rasio Likuiditas (%)

Table of Liquidity Ratios (%)

Uraian Description	2016	2017	2018	2019	Naik/(Turun) Increased/ (Decreased) [%]
Cash Ratio	56,61	71,41	34,71	36,37	1,66
Quick Ratio	540,98	549,67	518,21	529,15	10,94
Current Ratio	572,61	583,41	560,97	565,40	4,43

Cash Ratio

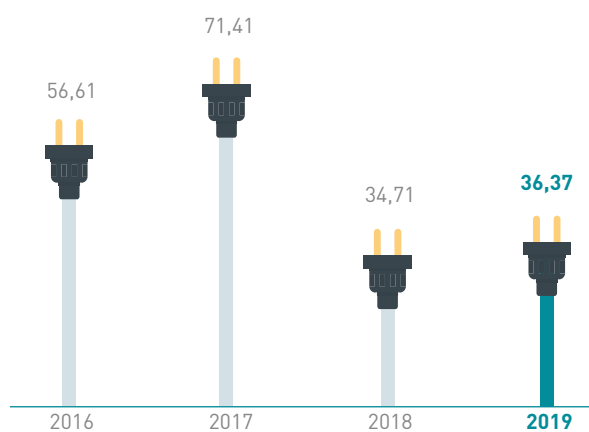
Cash Ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban yang harus segera dipenuhi dengan aset lancar. Nilai *Cash Ratio* PJB tahun 2019 adalah 36,37% yaitu lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 yaitu 34,71%. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan kas untuk pendanaan proyek *Add On* Muara Tawar dari Liabilitas kepada pemegang saham.

Cash Ratio

Cash ratio is used to measure the ability of company to pay the obligations must be fulfilled immediately with current assets. PJB's Cash Ratio value in 2019 was 36.37% or higher than in 2018 which was 34.71%. The increase was mainly caused by cash addition for funding the project of Add On Muara Tawar from Liabilities to the shareholders.

Grafik Cash Ratio (%)

Chart of Cash Ratio (%)



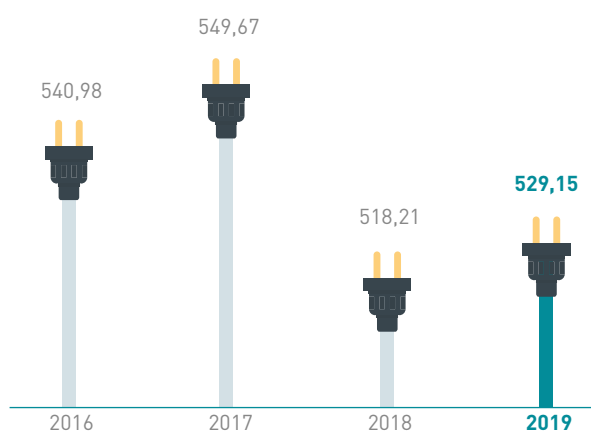
Quick Ratio

Quick Ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban yang harus segera dipenuhi dengan Aset Lancar di luar persediaan, karena persediaan dianggap tidak mudah digunakan untuk memenuhi kewajiban yang akan segera jatuh tempo. Nilai *Quick Ratio* PJB tahun 2019 adalah 529,15% yaitu lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 yaitu 518,21%. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh nilai piutang usaha *outstanding* yang lebih tinggi dibanding tahun 2018.

Quick Ratio

Quick ratio is used for measuring the ability of company in paying liabilities that should be immediately fulfilled with Current Assets outside inventories since the inventories are considered not easy to use to meet the liabilities approaching the maturity date. Quick Ratio of PJB value in 2019 was 529.15% or higher than in 2018 which was 518.21%. The increase was mainly caused by a higher outstanding receivables value than in 2018.

Grafik Quick Ratio (%)
Chart of Quick Ratio (%)



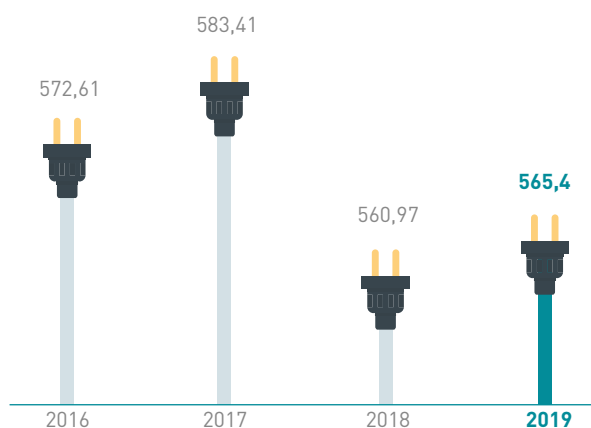
Current Ratio

Current Ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang akan segera jatuh tempo dengan Aset Lancar yang dimilikinya. Nilai *Current Ratio* PJB tahun 2019 adalah 565,40% yaitu lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 yaitu 560,97%. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh nilai piutang usaha *outstanding* yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2018.

Current Ratio

Current ratio is used for measuring the ability of company to meet obligations approaching its maturity date with its Current Assets. PJB's Current Ratio value in 2019 was 565.40% or higher than in 2018 which was 560.97%. The increase was mainly caused by a higher outstanding receivables value than in 2018.

Grafik Current Ratio (%)
Chart of Current Ratio (%)

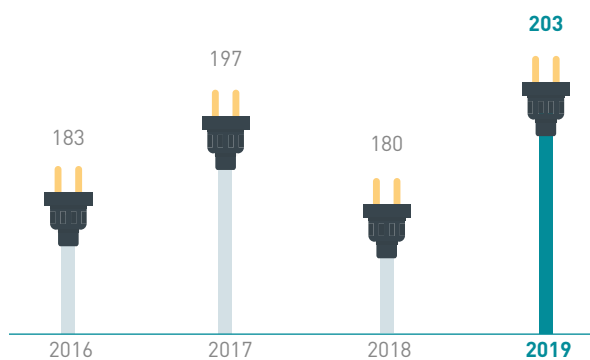


Tingkat Kolektibilitas Piutang Collectibility Rate Of Receivables

Kemampuan perusahaan dalam mengumpulkan piutang dapat diketahui dengan menghitung nilai *Collection Period*. Nilai *Collection Period* semakin kecil maka semakin baik, artinya kemampuan perusahaan dalam mengumpulkan piutang semakin cepat. Nilai *Collection Period* PJB tahun 2019 adalah 203.26 hari, yaitu lebih lambat (menurun 12,8%) dibandingkan tahun 2018 yaitu 180 hari. Hal tersebut terutama disebabkan oleh nilai *outstanding* atas piutang usaha lebih tinggi dibandingkan tahun 2018.

The ability of a company in collecting receivables can be identified by calculating the value of collection period. The smaller collection period value, the better it is, which means the company is able to collect the receivables faster. PJB's *Collection Period* value in 2019 was 203.26 days or slower (decreased by 12.8%) than in 2018 which was 180 days. It was mainly caused by the higher outstanding value of receivables compared to 2018.

Grafik *Collection Period* (hari)
Chart of *Collection Period* (in days)



Tabel Piutang Usaha Berdasarkan Umur (Rp juta)

Table of Receivables Turnover (Rp million)

Uraian Description	2016	2017	2018	2019	Naik/(Turun) Increased/ (Decreased) [%]
Belum jatuh tempo Not Yet Due	3.121.353	8.037.965	7.851.298	7.051.907	[10,18]
Sudah jatuh tempo Overdue					
1 s.d. 30 hari 1-30 days	3.067.496	3.942.349	1.807.587	5.667.717	213,55
31 s.d. 60 hari 31-60 days	2.751.276	3.092.825	1.736.589	5.884.898	238,88
Lebih dari 60 hari More than 60 days	7.425.381	1.895.677	8.750.982	3.536.156	[59,59]
Jumlah Piutang Usaha Total Receivables	16.365.506	16.968.816	20.146.456	22.140.678	9,90



Rasio Keuangan Lainnya Other Financial Ratios

Selain rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang serta tingkat kolektibilitas piutang, berikut diuraikan rasio penting lainnya yang relevan di PJB untuk mengukur kinerja keuangan.

In addition to ratio to determine the ability of the Company in meeting short-term and long-term liabilities as well as collectibility rate of receivables, the following are explanation of other important relevant ratios in PJB to measure the financial performance.

Rasio Profitabilitas Profitability Ratio

Rasio Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan laba. profitabilitas perusahaan dapat dilihat dari *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE).

Profitability ratio is a ratio used to measure the ability of company in generating profits. The Company's profitability can be identified from Return On Asset (ROA) and Return on Equity (ROE).

Tabel Rasio Profitabilitas (%)

Table of Profitability Ratio (%)

Uraian Description	2016	2017	2018	2019	Naik/(Turun) Increased/ (Decreased) (%)
ROA	1,97	1,90	3,39	3,84	0,45
ROE	2,03	1,98	3,54	4,06	0,52

Return on Asset (ROA)

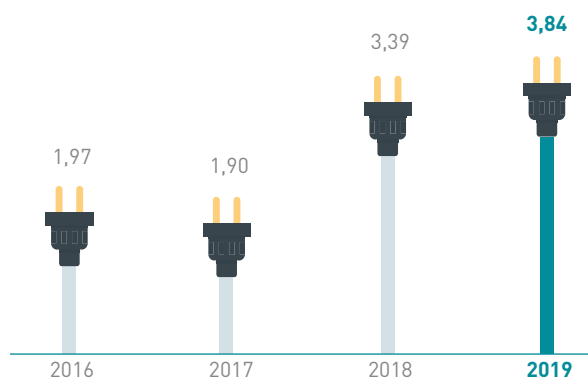
ROA digunakan untuk mengukur perolehan laba yang tersedia bagi pemilik perusahaan atas setiap nilai aset yang ada pada perusahaan. Nilai ROA PJB tahun 2019 adalah 3,84%, yaitu lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 yaitu 3,39%. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan laba bersih yang didapat pada tahun 2019.

Return on Asset (ROA)

ROA is used to measure the income available for the company owner over every value of the existing assets in the company. PJB's ROA value in 2019 was 3.84% or higher than in 2018 which was 3.39%. The increase was mainly caused by the increase of net income obtained in 2019.

Grafik ROA (%)

Chart of ROA (%)



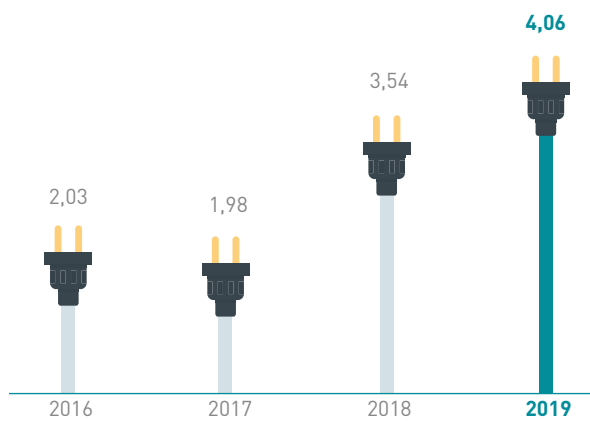
Return on Equity (ROE)

ROE digunakan untuk mengukur perolehan laba yang tersedia bagi pemilik perusahaan atas modal yang diinvestasikan di dalam perusahaan. Nilai ROE PJB tahun 2019 adalah 4,06%, yaitu lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 yaitu 3,54%. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan laba bersih yang didapat serta nilai ekuitas yang menurun pada tahun 2019 dibanding tahun 2018.

Return on Equity (ROE)

ROE is used to measure the income available for the company owner over the capital invested in the company. PJB's ROE value in 2019 was 4.06% or higher than in 2018 which was 3.54%. The increase was mainly caused by the increase of net income obtained as well as equity value decreased in 2019 compared to 2018.

Grafik ROE (%)
Chart of ROE (%)



Rasio Aktivitas

Activity Ratio

Rasio aktivitas digunakan untuk memberikan gambaran aktivitas operasional yang dilakukan Perusahaan baik yang berkaitan dengan kegiatan penjualan, pembelian, dan kegiatan lainnya. *Inventory Turn Over* (ITO) dan *Total Asset Turn Over* (TATO) merupakan bagian rasio aktivitas.

Activity ration is used to provide an overview of operational activities performed by the Company which are related to sales, purchases, and other activities. Inventory turn over (ITO) and total asset turn over (TATO) are part of the activity ratio.

Tabel Rasio Aktivitas (%)

Table of Activity Ratio (%)

Uraian Description	2016	2017	2018	2019	Naik/(Turun) Increased/ (Decreased) (%)
ITO (hari) (days)	24	21	20	17	(15,00)
TATO (kali) (times)	0,17	0,16	0,23	0,23	(0,21)

Inventory Turn Over (ITO)

ITO menunjukkan kemampuan dana yang tertanam dalam persediaan berputar dalam suatu periode tertentu, atau likuiditas dari persediaan dan tendensi untuk adanya *overstock*. Rasio perputaran persediaan mengukur efisiensi pengelolaan persediaan untuk menilai efisiensi operasional, yang memperlihatkan seberapa baiknya manajemen mengontrol modal yang ada pada persediaan.

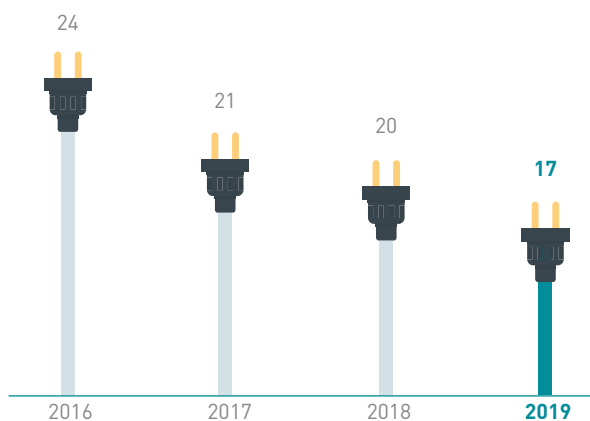
Nilai ITO PJB tahun 2019 adalah 17 hari, yaitu lebih cepat dibandingkan tahun 2018 yaitu 20 hari. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh efisiensi penggunaan persediaan di tahun 2019.

Inventory Turn Over (ITO)

ITO shows the ability of funds embedded in the inventory to turn over in a given period, or liquidity of the inventory and the tendency for an overstock. The inventory turnover measures the efficiency of inventory management to assess operational efficiency, which illustrates how well the management control the existing capital in the inventory.

PJB's ITO value in 2019 was 17 days or faster than in 2018 which was 20 days. The increase was mainly caused by the inventory usage efficiency in 2019.

Grafik ITO (hari)
Chart of ITO (in days)



Total Asset Turn Over (TATO)

TATO merupakan rasio yang menggambarkan perputaran aset diukur dari penjualan. Jadi semakin besar rasio ini semakin baik yang berarti bahwa aset dapat lebih cepat berputar dan meraih laba dan menunjukkan semakin efisien penggunaan keseluruhan aset dalam menghasilkan penjualan.

Nilai TATO PJB tahun 2019 adalah 0,23 kali, nilainya sama dengan tahun 2018 yaitu 0,23 kali.

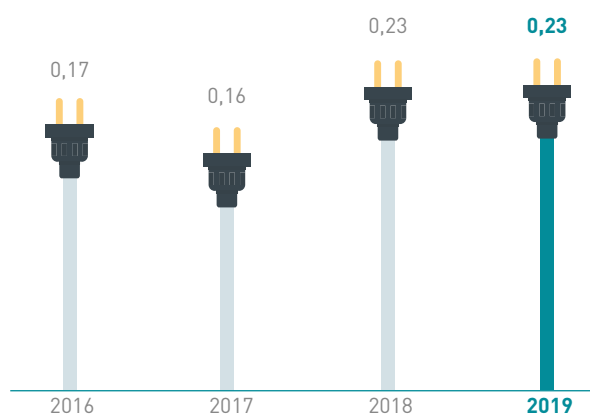
Total Asset Turn Over (TATO)

Total Assets Turn Over is a ratio that describes the asset turnover measured from the sales. Therefore, the greater the ratio the faster the asset turns over and make profits, also the more efficient the use of all assets in making sales.

PJB's TATO value in 2019 was 0.23 times or as same as in 2018.

Grafik TATO (kali)

Chart of TATO (times)



STRUKTUR MODAL

CAPITAL STRUCTURE

Struktur modal adalah perbandingan antara liabilitas dan ekuitas. Liabilitas terdiri dari jangka panjang dan jangka pendek, sedangkan ekuitas terdiri dari saham disetor dan laba ditahan. PJB senantiasa mengelola struktur modal untuk mendukung keberlanjutan bisnis dan memaksimalkan imbalan bagi Pemegang Saham.

Capital structure is a balance or comparison between liabilities and equity. Liabilities consist of long term and short term, while equity consists of paid-in shares and retained earnings. PJB consistently manages the capital structure to support business sustainability and optimize the returns for shareholders.

Struktur Modal tahun 2019 didominasi oleh Ekuitas yaitu sebesar Rp163.773.095 juta atau 94,54%, sedangkan Liabilitas sebesar Rp9.450.270 juta atau 5,46%.

The Capital Structure of 2019 is dominated by Equity in amounting to Rp163,773,095 million or 94.54%, while Liabilities amounting to Rp9,450,270 million or 5.46%.

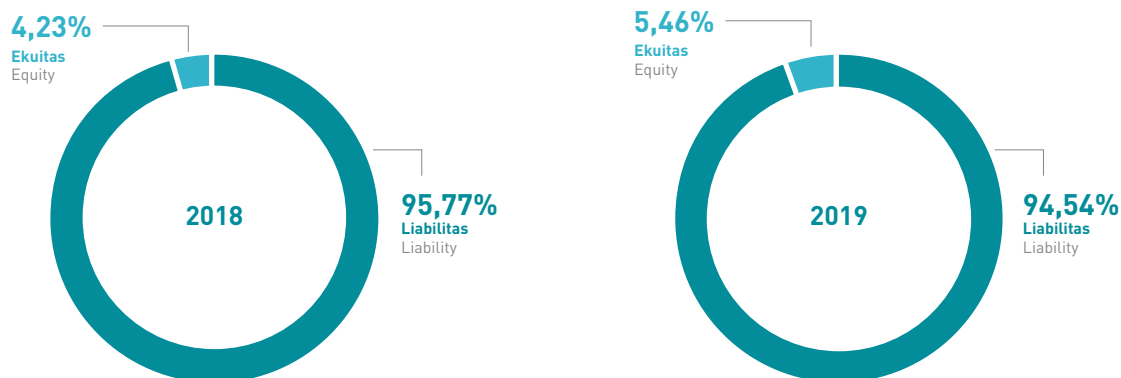
Tabel Struktur Modal (Rp juta)

Table of Capital Structure (in Rp million)

Uraian Description	2016		2017		2018		2019	
Liabilitas Liabilities	5.956.099	3,11	7.471.128	3,86	7.382.220	4,23	9.450.270	5,46
Ekuitas Equity	185.782.295	96,89	185.849.982	96,14	167.008.687	95,77	163.773.095	94,54
Aset Assets	193.321.110	100,00	191.738.394	100,00	174.390.907	100,00	173.223.365	100,00

Grafik Struktur Modal (%)

Chart of Capital Structure (%)



Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Management Policy on Capital Structure

Manajemen mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa perusahaan akan mampu untuk melanjutkan kelangsungan usaha dan untuk memastikan pemenuhan batas rasio kecukupan modal. Manajemen Perusahaan secara berkala melakukan tinjauan struktur permodalan. Perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya modal sehingga dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Oleh karena itu, kebijakan Perusahaan dalam mencari pendanaan akan selalu memperhitungkan risiko keuangan yang mungkin timbul di masa depan.

Management manages capital risk to ensure the company's capability of business continuity and compliance with the capital adequacy ratio. The management of Company periodically reviews the capital structure. The company strives to minimize capital costs in order to maximize the value of the company. Therefore, the Company's policy of seeking funding will always consider the further financial risks.



Dasar Pemilihan Kebijakan Struktur Modal Selection Basis of Capital Structure Policy

Perusahaan menetapkan kebijakan terkait struktur modal dengan mempertimbangkan:

1. Biaya permodalan dan risiko yang berhubungan;
2. Fleksibilitas keuangan dan tingkat risiko bisnis;
3. Posisi PJB sebagai *restricted subsidiary* (anak perusahaan PLN) mempunyai keterbatasan dalam penambahan utang pembiayaan baru sebagai konsekuensi *covenant* atas penerbitan surat utang internasional berupa *Global Bond* (sesuai dengan Indenture Majapahit Holding B.V. tertanggal 6 November 2009 dimana PT PLN (Persero) sebagai Penjamin, terdapat Pembatasan atas Indebtness Tambahan dari setiap *Restricted Subsidiary* baik secara langsung maupun tidak langsung);
4. Perbandingan ekuitas terhadap likuiditas ditetapkan melalui pelaksanaan analisis sensitivitas dengan berbagai variasi asumsi inti yang paling mungkin dihadapi PJB.

The company establishes policies related to the capital structure by considering the following:

1. Capital costs and related risks;
2. Financial flexibility and business risks level;
3. PJB's position as a restricted subsidiary (subsidiary of PT PLN) is limited in adding new financing debt as a consequence of the covenant on the issuance of international bonds in the form of Global Bonds (in accordance with the Indenture of Majapahit Holding B.V. on November 6, 2009, that PT PLN (Persero) as a guarantor is limited in expanding Indebtedness from each Restricted Subsidiary either directly or indirectly;
4. Comparison of equity to liquidities is determined through the sensitivity analysis implementation with various core assumptions the most likely experienced by PJB.



IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

MATERIAL COMMITMENTS FOR CAPITAL EXPENDITURE INVESTMENT

Perjanjian Pengadaan Bahan Bakar

Fuel Procurement Agreement

Nama Pihak dan Tujuan Pengadaan Bahan Bakar

Name of Parties and Purpose of Procurement

Pada tahun 2019, PJB memiliki ikatan material untuk pengadaan bahan bakar dengan beberapa pemasok. Perikatan ini bertujuan untuk mendapatkan bahan bakar yang ekonomis dan bermutu tinggi sehingga dapat menunjang dengan baik keandalan kegiatan pembangkitan tenaga listrik. Berikut adalah bentuk bentuk perikatan pengadaan bahan bakar tersebut:

In 2019, PJB established a material commitment for the fuel procurements with several suppliers. This commitment is aimed at obtaining economic and high-quality fuel that can support the reliability of power plant activities properly. The followings are types of the commitment of fuel procurements:

Perjanjian Pengadaan Batubara

Coal Procurement Agreement

Pemasok Suppliers	Nomor Kontrak Contract Number	Satuan Unit	Jumlah Total	Periode Period
PT PLN Batubara	007.Kjs/040/DIR/2010	Metrik ton Metric ton	2.800.000	Jan 2019 - Dec 2020
PT Oktasan Baruna Persada	089.PJ/061/2017	Metrik ton Metric ton	1.080.000	Dec 2017 - Nov 2020
PT Kaltim Prima Coal	070.PJ/061/2018	Metrik ton Metric ton	3.120.000	Jan 2019 - Dec 2020
PT Arutmin Indonesia	071.PJ/061/2018	Metrik ton Metric ton	2.400.000	Jan 2019 - Dec 2020
PT Adaro Indonesia (Spot)	059.PJ/061/2019	Metrik ton Metric ton	380.000	Nov 2019 - Apr 2020

Pada tanggal 9 Maret 2018, Kementerian ESDM menerbitkan surat keputusan Nomor 1395 K/30/MEM/2018 mengenai harga jual batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang berlaku surut sejak 1 Januari 2018. Sesuai surat keputusan tersebut, harga batubara ditetapkan sebesar US\$70/metrik ton dengan acuan pada kalori 6.322 kCal/kg. Surat keputusan tersebut juga mengatur formula untuk menghitung harga dengan spesifikasi yang berbeda seperti yang tercantum dalam keputusan tersebut. Melalui surat keputusan Nomor 1410 K/30/MEM/2018 tanggal 12 Maret 2018, masa berlaku surat keputusan Nomor 1395 K/30/MEM/2018 tersebut diubah menjadi berlaku sejak mulai tanggal 12 Maret 2018.

On March 9, 2018, the Ministry of Energy and Mineral Resources issued Decree No. 1395 K/30/MEM/2018 concerning the selling price of coal for public electricity supply which has been valid since January 1, 2018. According to the decree, the price of coal was set at USD 70/metric ton by referring to calories as 6,322 kcal/kg. The decree also stipulated a formula for price calculation with different specifications as stated in the decree. Through Decree No. 1410 K/30/MEM/2018 on March 12, 2018, the validity period of Decree No. The 1395 K/30/MEM/2018 was changed into March 12, 2018.

Harga dasar batubara di tempat penyerahan stockpile unit berkisar antara Rp600.417 sampai dengan Rp805.212 per ton, yang disesuaikan terhadap nilai kalori, kadar abu, sulfur, air, AFT dan HGI serta ukuran butiran.

The basic price of coal at the delivery point of the stockpile unit ranges from Rp600,417 to Rp805,212 per ton, which is adjusted to the value of calories, ash, sulfur, water, AFT, and HGI as well as grain size.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara, seluruh harga dasar kontrak diatas akan ditinjau secara periodik setiap 3 (tiga) bulanan untuk disesuaikan dengan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang US\$, dan harga dasar bahan bakar minyak HSD untuk industri.

According to the Regulation by the Ministry of Energy and Mineral Resources No. 07 of 2017 on the Procedure for Determining the Benchmark Sales of Metal and Coal Minerals, all the basic contract prices above will be reviewed periodically every 3 (three) months to adjust to the Rupiah exchange rate against currencies USD, and the base price of HSD industrial oil.

Sehubungan dengan perjanjian jual beli batubara, pemasok diwajibkan untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan.

In connection with the coal trading agreement, suppliers are required to assure guarantees.

Perjanjian Pengadaan Gas Alam

Natural Gas Procurement Agreement

Sektor Sector	Pemasok Suppliers	Nomor/Tanggal Kontrak Number/Date of Contract	Periode Period	Satuan Unit	Jumlah Total
Gresik	PT Pertamina Hulu Energi WMO	Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dan Kesepakatan Bersama (KB) Gas Sale & Purchase Agreement (PJBG) and Joint Agreement (KB)	1987 - 2020	TBTU	720
Gresik	PGN SAKA (SIPL)	Amandemen GSA 8 Nov 2011 GSA Amendment (Nov 8, 2011)	2011 - 2026	BSCF	330
Gresik	Kangean Energy Indonesia	462.PJ AMDII/041/DIR/2010 beserta Amandemen 462.PJ AMDII/041/DIR/2010 and Amendments	2012 - 2028	TBTU	369
Gresik	Inti Alasindo Energi (Interruptible IAE)	058.PJ/061/2017 beserta Amandemen/ Addendum 058.PJ/061/2017 and Amendments/ Addendums	2017 - 2020	BBTU	10.260
Gresik	Santos (Madura Offshore) Pty Ltd/Ophir	079.PJ/041/DIR/2013 beserta Amandemennya 079.JP/041/DIR/2013 and Amendments	2014 - 2019	TBTU	49,88
Gresik	PT Petrogas Jatim Utama	061.PJ/061/2013	2016 - 2020	MMSCF	41.475
Muara Karang	PT Pertamina Hulu Energi ONWJ	0198-2.PJ/EPI.03.02/DITDAN/2017	2017 - 2022	TBTU	185.872
Muara Karang	PT Perusahaan Gas Negara	0295-2.PJ/EPI.03.02/DIR/2018	2018 - 2019	BBTU	1.825
Muara Tawar	PT Perusahaan Gas Negara	0508-1.PJ/EPI.03.02/DIR/2018	2018 - 2019	BBTU	7.740
Muara Tawar	JOB PT JM (Swap)	Perubahan dan Pernyataan Kembali PJBG 28 Oktober 2011 Amendment and Restatement on October 28, 2011	2011 - 2019	BBTUD	15
Muara Tawar	PT Perusahaan Gas Negara (LNG)	0505-1.PJ/EPI.03.02/DIR/2018	2018 - 2019	LNG Terminal Use Agreement	
Muara Tawar	PT Pertamina EP	0103-2.PJ/EPI.01.02/DIR/2019	2018 - 2024	TBTU	29,24
Muara Karang & Muara Tawar	PT Nusantara Regas	PLN.273.PJ/041/DIR/2012	2012 - 2022	Kargo Cargo	191
Muara Karang & Muara Tawar	PT Tangguh PSC	0237.PJ/EPI.01.02/DIRUT/2016	2012 - 2034	Kargo Cargo	732
Muara Karang & Muara Tawar	PT Pertamina (Persero)	0592.PJ/EPI.01.02/DITDAN-2/2017	2017 - 2022	Kargo Cargo	5

Harga pembelian gas pipa pada titik penyerahan berkisar antara US\$2,39 sampai dengan US\$12,80 per *Million British Thermal Unit* (MMBTU).

The purchase price of piped gas at the delivery point ranges from USD 2.39 to USD 12.80 per Million British Thermal Unit (MMBTU).

Perjanjian Pengadaan Bahan Bakar Minyak

Perusahaan melalui PT PLN (Persero) (PLN) dan Pertamina mengadakan Perjanjian induk Jual Beli Bahan Bakar Minyak Nomor 071.PJ/060/DIR/2001 tanggal 8 Oktober 2001. Perjanjian ini telah diadendum tanggal 16 Mei 2007 dimana PLN dan Pertamina menyepakati antara lain:

1. Penggunaan harga bahan bakar bulanan yang ditetapkan oleh Pertamina untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 April 2007 dan harga bahan bakar 109,5% dari *Mid Oil Platts Singapore* (MOPS) ditambah Pajak Pertambahan Nilai untuk periode 1 Mei 2007 sampai dengan 31 Desember 2007;
2. Harga bahan bakar setelah tanggal 31 Desember 2007 akan ditetapkan oleh kedua belah pihak setiap tahun;
3. Jangka waktu pembayaran berikut pengenaan denda keterlambatan pembayaran sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia bulanan ditambah 1,3%;
4. Efektif mulai 1 Mei 2007, saldo utang yang belum dibayar atas pembelian bahan bakar sampai dengan 30 April 2007 dikenakan bunga sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia per tahun ditambah 1,3%, sampai diselesaikan dengan menerbitkan obligasi PLN selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2007;
5. Utang kepada Pertamina, termasuk obligasi yang akan diterbitkan maksimum sebesar Rp18 triliun;
6. Perjanjian ini berlaku untuk 5 tahun sejak 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2011;
7. PT Sucofindo (Persero) ditunjuk sebagai *surveyor* independen.

Berdasarkan Addendum III Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak tanggal 7 November 2011, Perusahaan melalui PLN dan Pertamina menyepakati dalam tahun 2011 sebagai berikut:

1. *High Speed Diesel* (HSD)
 - a. Harga pembelian HSD sampai dengan 2.537.161 kilo liter (kl) di 18 titik penyerahan Pertamina adalah 105% dari MOPS,
 - b. Harga pembelian HSD sampai dengan 480.487 kl di titik penyerahan Pertamina Terminal Transit Manggis adalah 108% dari MOPS,
 - c. Harga pembelian HSD sampai dengan 2.978.360 kl di titik penyerahan Instalasi Tanjung Priok dan Instalasi Surabaya Group adalah 108,5% dari MOPS,
 - d. Harga pembelian HSD diatas 5.996.008 kl atau yang diserahkan diluar 21 titik penyerahan yang ditetapkan Pertamina adalah 109,5% dari MOPS.
2. Harga pembelian *Industrial Diesel Oil* (IDO) sampai dengan 3.933 kl di titik penyerahan Kilang Plaju adalah 105% dari MOPS dan pembelian diatas 3.933 kl atau yang diserahkan diluar titik penyerahan Kilang Plaju adalah 109,5% dari MOPS.
3. Harga pembelian MFO sampai dengan 1.193.166 kl di titik penyerahan Kilang Cilacap adalah 105% dari MOPS dan pembelian diatas 1.193.166 kl atau yang diserahkan diluar titik penyerahan Kilang Cilacap adalah 109,5% dari MOPS.

Fuel Supply Agreement

The Company through PT PLN (Persero) and Pertamina made a Fuel Sell and Purchase Agreement No.071.PJ/060/DIR/2001 on October 8th, 2001. This agreement has been amended on May 16th, 2007 where PLN and Pertamina agreed the following:

1. The use of monthly fuel price determined by Pertamina for the period January 1 to April 30, 2007, and the fuel price of 109,5% from Mid Oil Platts Singapore (MOPS) are added by Value Added Tax for the period from May 1, 2007, to December 31, 2007;
2. The fuel price after December 31, 2007, will be determined by both parties every year;
3. The terms of payment and penalty charges on late payment with a rate of monthly Certificate of Bank Indonesia are added 1,3%;
4. Effective on May 1, 2007, the unpaid balance of payments for the fuel purchases until April 30, 2007, will bear interest with a rate per year of Certificate of Bank Indonesia and will be added 1,3 % until settled by issuing PLN obligation not later than August 31, 2007;
5. The maximum payable to Pertamina, including obligations that will be issued, amounting to Rp18 trillion (full amount);
6. This agreement is valid for 5 years from January 1, 2007, to December 31, 2011;
7. PT Sucofindo (Persero) is appointed as an independent surveyor

Based on Addendum III concerning Fuel Sale and Purchase Agreement on November 7, 2011, the Company through PLN and Pertamina agreed in 2011 as follows:

1. High-Speed Diesel (HSD)
 - a. The purchase price of HSD reached 2,537,161 kiloliters (kl) in 18 Pertamina delivery points is 105% of MOPS,
 - b. The purchase price of HSD up to 480,487 kl at the delivery point of Pertamina's Manggis Transit Terminal is 108% of MOPS,
 - c. The purchase price of HSD up to 2,978,360 kl at the delivery point of the Tanjung Priok Installation and Surabaya Group Installation is 108.5% of MOPS,
 - d. The purchase price of HSD above 5,996,008 kl or submitted beyond the 21 delivery points determined by Pertamina is 109.5% of the MOPS.
2. The purchase price of Industrial Diesel Oil (IDO) up to 3,933 kl at the delivery point of the Plaju Refinery is 105% of the MOPS and purchases above 3,933 kl or delivered outside the delivery point of the Plaju Refinery are 109.5% of the MOPS.
3. The purchase price of MFO up to 1,193,166 kl at the delivery point of the Cilacap Refinery is 105% of the MOPS and purchases above 1,193,166 kl or those delivered outside the delivery point of Cilacap Plant are 109.5% from MOPS.



Pada tahun 2013, PLN dan Pertamina sepakat untuk menggunakan harga tahun 2011, karena amandemen Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak belum diselesaikan.

Berdasarkan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-74/MK.02/2015 kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai rekomendasi penetapan harga jual beli HSD dan MFO antara PLN dan Pertamina tahun 2014 tanggal 30 Januari 2015 tersebut diatas, pokok-pokok kesepakatan antara Pertamina dan PLN antara lain:

1. Harga jual tahun 2014 menggunakan harga berdasarkan reviu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan sebesar HSD: MOPS + 9,19% dan MFO: MOPS + 11,94%;
2. Dalam rangka efisiensi biaya pembelian di tahun 2015, PLN dan anak perusahaan diperkenankan untuk mencari sumber BBM selain Pertamina, dengan tetap menjaga keamanan pasokan BBM.

Perusahaan telah mencatat pembelian HSD dan MFO tahun 2014 berdasarkan harga tersebut.

Dalam rangka penyelesaian harga jual BBM (HSD dan MFO) Pertamina kepada PLN, telah dilakukan pembahasan harga jual beli bahan bakar minyak (HSD dan MFO) antara Pertamina dan PLN tahun 2015 di Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), difasilitasi oleh Deputy Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN, untuk menentukan harga transaksi BBM di tahun 2015.

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Harga Jual Beli Bahan Bakar Minyak (HSD dan MFO) antara Pertamina dan PLN tanggal 9 Februari 2016 dengan hasil sebagai berikut:

1. Harga transaksi HSD tahun 2015:
 - Januari sampai dengan September 2015 adalah 107% dari MOPS
 - Oktober sampai dengan Desember 2015 adalah 105% dari MOPS
2. Harga transaksi MFO tahun 2015 adalah 109,5% dari MOPS.

Perusahaan telah mencatat pembelian HSD dan MFO tahun 2015 berdasarkan harga tersebut.

Pasokan Bahan Bakar Minyak ke unit pembangkit di lingkungan Perusahaan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak antara Pertamina dengan PLN No: 528/C0000/2007-SB dan 066-1.PJ/040/DIR/2007 tanggal 16 Mei 2007 beserta addendumnya, harga keekonomian BBM 2017 untuk pembangkit di lingkungan PLN/PJB adalah:

MFO = Rp4.760 – Rp5.751 per liter

HSD = Rp5.916 – Rp7.237 per liter

Berdasarkan Addendum IV Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak tanggal 16 Mei 2017, PLN dan Pertamina menyepakati perpanjangan jangka waktu pasokan hingga tahun 2020.

In 2013, PLN and Pertamina agreed to use the 2011 price because the amendment of the Fuel Sale and Purchase Agreement has not been finalized.

Based on the letter of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia No. S-74 / MK.02 / 2015 to the Ministry of Energy and Mineral Resources regarding the recommendations for determining the buying and selling prices of HSD and MFO between PLN and Pertamina in 2014 on January 30, 2015, the purposes of the agreement between Pertamina and PLN include:

1. The Sale price in 2014 uses the price based on the Review of the Board of Finance and Development Supervision of where HSD: MOPS + 9.19% and MFO: MOPS + 11.94%;
2. For the efficiency of the purchase cost in 2015, PLN and its subsidiaries can acquire fuel resources other than Pertamina, by constantly maintaining the security of fuel supply.

The Company has recorded the HSD and MFO purchases in 2014 based on those prices.

To settle the fuel sales price of Pertamina's fuel (HSD and MFO) to PLN, discussions on selling price of fuel (HSD and MFO) has been implemented between Pertamina and PLN in 2015 in the Ministry of State-Owned Enterprises ("SOE") office, facilitated by SOE's Deputy in Energy Business, Logistics, and Tourism, to determine the transaction price of fuel in 2015.

Based on the Memorandum of the Agreement on the Sale and Purchase for Fuel (HSD and MFO) between Pertamina and PLN on February 9, 2016, the results are stated as follows:

1. HSD transaction price in 2015:
 - January - September 2015 is 107% from MOPS
 - October - December 2015 is 105% from MOPS
2. Transaction MFO price in 2015 is 109,5% from MOPS

The Company has recorded purchases of HSD and MFO for 2015 based on those prices.

The supply of oil fuel to Power Plants in the Company's circumstances based on the Fuel Sales and Purchase Agreement between Pertamina and PLN No. 528/C0000/2007-SB and 066-1. PJ/040/DIR/2007 on May 16, 2007, along with its addendum, the 2017's oil fuel price for PLN/PJB power plants is:

MFO = Rp4,760 – Rp5,751 per liter

HSD = Rp5,916 – Rp7,237 per liter

Based on Addendum IV of the Fuel Sale and Purchase Agreement on May 16, 2017, PLN and Pertamina agreed to extend the period of supply to 2020.

Berdasarkan Addendum V, kesepakatan harga jual beli bahan bakar minyak (HSD dan MFO) antara Pertamina dan Perusahaan tanggal 17 Oktober 2017, adalah sebagai berikut:

1. Harga transaksi HSD tahun 2017:

- Januari sampai dengan Juni 2017 adalah 107% dari MOPS.
- Juli sampai dengan Desember 2017 adalah 104,58% dari MOPS

2. Harga transaksi MFO tahun 2017:

- Januari sampai dengan Juni 2017 adalah 109,5% dari MOPS.
- Juli sampai dengan Desember 2017 adalah 109,1% dari MOPS.

Berdasarkan Addendum VI, kesepakatan harga jual beli bahan bakar minyak (HSD dan MFO) tahun 2018 sampai dengan 2020 antara Pertamina dan PLN tanggal 20 Mei 2018, adalah sebagai berikut:

1. Harga rata-rata transaksi HSD semester I tahun 2018 adalah 104,77% dari MOPS
2. Harga rata-rata transaksi MFO semester I tahun 2018 adalah 106,34% dari MOPS

Perusahaan telah mencatat pembelian HSD dan MFO tahun 2018 berdasarkan harga tersebut.

Perusahaan telah mencatat pembelian HSD dan MFO tahun 2019 berdasarkan formulasi harga berikut melalui penetapan dari Divisi GBM PT PLN (Persero).

1. Harga minyak solar dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Alpha} \times \{100\% \times \text{MOPS Gasoil } \{0,25\%S\}\} \times \text{JISDOR}}{158,9}$$

Dengan formulasi Alpha sebagai berikut:

$$\text{Alpha} = 3,2099 \times \text{MOPS} - 1 + 0,0058908$$

2. Harga MFO 180 dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Alpha} \times \{100\% \times \text{MOPS HSF0 180 Cst}\} \times \text{JISDOR}}{1,009,015}$$

Dengan formulasi Alpha sebagai berikut:

$$\text{Alpha} = 22,109 \times \text{MOPS} - 1 + 0,0058908$$

Realisasi harga keekonomian BBM 2019 untuk pembangkit di lingkungan PLN/PJB adalah:

$$\text{MFO} = \text{Rp}4.347,2 - \text{Rp}7.058,7 \text{ per liter}$$

$$\text{HSD} = \text{Rp}7.153,3 - \text{Rp}8.493,1 \text{ per liter}$$

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, estimasi liabilitas atas utang pembelian bahan bakar kepada Pertamina masing-masing Rp479.320 dan Rp760.677 yang dicatat sebagai utang usaha.

Based on Addendum V, the sale and purchase price agreement for fuel (HSD and MFO) between Pertamina and the Company on October 17, 2017, are as follows:

1. HSD Transaction price in 2017:

- January to June 2017 is 107% from MOPS
- July to December 2017 is 104, 58% from MOPS

2. MFO Transaction price in 2017:

- January to June 2017 is 109,5% from MOPS
- July to December 2017 is 109,1 % from MOPS

Based on Addendum VI, the sale and purchase price agreement for fuel (HSD and MFO) from 2018 to 2020 between Pertamina and PLN on May 20, 2018, is as follow:

1. The average price of HSD transactions in the first semester of 2018 was 104.77% of the MOPS
2. The average price of MFO transactions in the first semester of 2018 was 106.34% of the MOPS

The company has recorded purchases of HSD and MFO in 2018 based on those prices.

The company has recorded the purchase of HSD and MFO in 2019 based on the following price formulation through the determination of the GBM Division of PT PLN (Persero).

1. The price of diesel oil is calculated using the following formula:

With Alpha formulation as follows:

$$\text{Alpha} = 3,2099 \times \text{MOPS} - 1 + 0,0058908$$

2. The price of MFO 180 is calculated using the following formula:

With Alpha formulation as follows:

$$\text{Alpha} = 22,109 \times \text{MOPS} - 1 + 0,0058908$$

The realization of the fuel price in 2019 for the internal power plants of PLN/PJB is:

$$\text{MFO} = \text{Rp}4,347.2 - \text{Rp}7,058.7 \text{ per liter}$$

$$\text{HSD} = \text{Rp}7,153.3 - \text{Rp}8,493.1 \text{ per liter}$$

As of December 31, 2019, and 2018, the estimated liabilities of the debt from fuel purchase to Pertamina amounted to Rp479,320 and Rp760,677 which are recorded as trade payables.



RKAP Biaya Bahan Bakar

ABOP on Fuel Costs

RKAP untuk biaya bahan bakar tahun 2019 sebesar Rp23.116.628 juta

ABOP on fuel costs in 2019 amounting to Rp23,116,628 million

Mata Uang yang Menjadi Denominasi Pengadaan Bahan Bakar

Fuel Procurement Denominated Currency

Sampai dengan 31 Desember 2019, perincian ikatan material untuk pengadaan bahan bakar berdasarkan mata uang adalah Rupiah (Rp).

As of December 31, 2019, the denomination of material commitments for procurement of fuel is Rupiah (Rp).

Langkah-Langkah Perlindungan Risiko Mata Uang atas Pengadaan Bahan Bakar

Risk Mitigation Plan on the Fuel Procurement Currency

Untuk menghindari risiko terkait beberapa perikatan pengadaan bahan bakar dengan para pemasok, PJB telah mengantisipasi risiko-risiko yang dapat terjadi. Dalam pengadaan batubara, harga dasar yang digunakan ditinjau secara periodik untuk disesuaikan dengan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat (US\$) dan harga dasar Bahan Bakar Minyak HSD untuk industri. Selain itu, setiap pemasok diwajibkan untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada PJB.

To prevent risks on several agreements of fuel procurement with suppliers, PJB has anticipated potential risks. In coal procurement, the base price used is periodically reviewed to adjust to the exchange rate of the Rupiah against the United States dollar (USD) and the base price of the HSD Fuel Oil for the industry. Also, each supplier is required to assure a guarantee to PJB.

Perjanjian Pengadaan dan Pemeliharaan

Procurement and Maintenance Agreement

Nama Pihak dan Tujuan Pengadaan dan Pemeliharaan

Name of Party and Purpose of Procurement and Maintenance

Pada tahun 2019, PJB memiliki ikatan material untuk pengadaan dan pemeliharaan dengan beberapa pihak-pihak. Perikatan ini bertujuan untuk menunjang pemeliharaan dan pengoperasian peralatan ketenagalistrikan demi kelancaran kegiatan pembangkitan tenaga listrik.

1. Sejalan dengan reorganisasi PLN yang membubarkan PLN Unit Pembangkitan Jawa-Bali (PLN UPJB), maka fungsi pengelolaan aset untuk pembangkit FTP 1 Jawa dilaksanakan oleh Perusahaan. Pada tanggal 7 Maret 2016 Perusahaan dan PLN menandatangani Perjanjian Induk Pengelolaan Aset Pembangkit PLTU dan PLTGU di Jawa. Perjanjian ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Pengelolaan Aset yang terdiri atas:

- Pengelolaan Aset PLTGU Blok II Muara Karang antara Perusahaan dan PLN Regional Jawa Bagian Barat pada tanggal 8 Maret 2016.
- Pengelolaan Aset PLTU Indramayu, PLTU Rembang dan PLTGU Blok V Muara Tawar antara Perusahaan dan PLN Regional Jawa Bagian Tengah pada tanggal 8 Maret 2016.

In 2019, PJB has material commitments for procurement and maintenance with several parties. This agreement aims to support the maintenance and operation of electrical equipment for the power plant operation.

1. Along with PLN's reorganization that dismissed PLN Unit Pembangkitan Jawa-Bali (PLN UPJB), the function of asset management for FTP 1 Java GU was performed by the Company. On March 7th, 2016, the Company and PLN have signed the Asset Management Service Head Agreement of CFPP and CCPP in Java. This agreement was followed by the Asset Management Agreement that consists of:

- Asset Management of Muara Karang CCPP Block II between the Company and PLN's West Java Region on March 8, 2016.
- Asset Management of Indramayu CFPP, Rembang CFPP, and Muara Tawar CCPP Block V between the Company and PLN's Central Java Region on March 8, 2016.

- Pengelolaan Aset PLTU Paiton 9, PLTU Pacitan dan PLTU Tanjung Awar-Awar antara Perusahaan dan PLN Regional Jawa Bagian Timur dan Bali pada tanggal 8 Maret 2016.
- Amandemen ke tiga Perjanjian Pengelolaan Aset PLTU Paiton 9, PLTU Pacitan, PLTU Tanjung Awar-Awar antara Perusahaan dan PLN Regional Jawa Bagian Timur dan Bali tanggal 15 Maret 2018.
- Amandemen ke tiga Perjanjian Pengelolaan Aset PLTGU Blok II Muara Karang antara Perusahaan dan PLN Regional Jawa Bagian Barat tanggal 26 Maret 2018.
- Amandemen ke tiga Perjanjian Pengelolaan Aset PLTU Indramayu, PLTU Rembang dan PLTGU Blok V Muara Tawar antara Perusahaan dan PLN Regional Jawa Bagian Tengah pada tanggal 26 Maret 2018.
- Amandemen keempat Perjanjian Pengelolaan Aset PLTGU Blok II Muara Karang antara Perusahaan dan PLN Regional Jawa Bagian Barat tanggal 22 Februari 2019.
- Amandemen keempat Perjanjian Pengelolaan Aset PLTU Indramayu, PLTU Rembang dan PLTGU Blok V Muara Tawar antara Perusahaan dan PLN Regional Jawa Bagian Tengah pada tanggal 22 Februari 2019.
- Amandemen keempat Perjanjian Pengelolaan Aset PLTU Paiton 9, PLTU Pacitan, PLTU Tanjung Awar-Awar antara Perusahaan dan PLN Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara tanggal 22 Februari 2019.

Sehubungan dengan adanya pengalihan Fungsi Aset *Manager* dan Aset Operator Pembangkit dari PLN Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Utara (PLN UIKSBU) dan PLN Unit Induk Wilayah Bangka Belitung (PLN UIW BABEL) kepada Perusahaan. Pada tanggal 26 Maret 2018 Perusahaan dan PLN menandatangani Perjanjian Induk Pengelolaan Aset Pembangkit di Sumatera. Perjanjian ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Pengelolaan Aset yang terdiri atas:

- Pengelolaan Aset PLTMG Arun antara Perusahaan dan PLN UIKSBU pada tanggal 11 April 2018.
- Amandemen Pengelolaan Aset PLTMG Arun antara Perusahaan dan PLN UIKSBU pada tanggal 3 Desember 2018.
- Amandemen Kedua Perjanjian Pengelolaan Aset PLTMG Arun antara Perusahaan dan PLN UIKSBU pada tanggal 28 Mei 2019.
- Pengelolaan Aset PLTU Air Anyir Bangka dan PLTU Suge Belitung antara Perusahaan dan PLN UIW BABEL pada tanggal 11 April 2018.
- Amandemen Perjanjian Pengelolaan Aset PLTU Air Anyir Bangka dan PLTU Suge Belitung antara Perusahaan dan PLN UIW BABEL pada tanggal 19 Agustus 2019.
- Pengelolaan Aset PLTU Tenayan antara Perusahaan dan PLN UIKSBU pada tanggal 3 Desember 2018.
- Amandemen Perjanjian Pengelolaan Aset PLTU Tenayan antara Perusahaan dan PLN UIKSBU pada tanggal 28 Mei 2019.

- Asset Management of Paiton 9 CFPP, Pacitan CFPP, and Tanjung Awar-Awar CFPP between the Company and PLN's East Java and Bali Region on March 8, 2015.
- The third amendment of the Asset Management Agreement for Paiton 9 CFPP, Pacitan CFPP, Tanjung Awar-Awar CFPP between the Company and PLN's East Java and Bali Region on March 15, 2018.
- The third amendment of the Asset Management Agreement for Muara Karang CCPP Block II between the Company and PLN's West Java Region on March 26, 2018.
- The third amendment of the Asset Management Agreement for Indramayu CFPP, Rembang CFPP, and Muara Tawar CCPP Block V between the Company and PLN's Central Java Region on March 26, 2018.
- The fourth amendment of the Asset Management Agreement for Muara Karang CCPP Block II between the Company and PLN's West Java Region on February 22, 2019.
- The fourth amendment of the Asset Management Agreement for Indramayu CFPP, Rembang CFPP, and Muara Tawar CCPP Block V between the Company and PLN's Central Java Region on February 22, 2019.
- The fourth amendment of the Asset Management Agreement for Paiton 9 CFPP, Pacitan CFPP, Tanjung Awar-Awar CFPP between the Company and PLN's East Java, Bali, and Nusa Tenggara Regions on February 22, 2019.

Related to the transfer of the Power Generation Function of Asset Manager and Asset Operator from PLN Northern Sumatra's Main Generation Unit (PLN UIKSBU) and PLN Bangka Belitung's Main Generation Unit (PLN UIW BABEL) to the Company. On March 26, 2018, the Company and PLN signed the Master Agreement on the Sumatra's Asset Management. This agreement is followed up with an Asset Management Agreement which consists of:

- Arun GEPP's Assets Management between the Company and PLN UIKSBU on April 11, 2018.
- Amendment to the Agreement on Arun GEPP's Asset Management between the Company and PLN UIKSBU on December 3, 2018.
- The Second Amendment to the Agreement on Arun GEPP's Asset Management between the Company and PLN UIKSBU on May 28, 2019.
- The management of Air Anyir Bangka CFPP and Suge Belitung CFPP's between the Company and PLN UIW BABEL on April 11, 2018.
- Amendment to the Agreement on Air Anyir Bangka CFPP and Suge Belitung CFPP's Asset Management between the Company and PLN UIW BABEL on August 19, 2019
- Tenayan CFPP's Asset Management between the Company and PLN UIKSBU on December 3, 2018.
- Amendment to the Agreement on Tenayan CFPP's Asset Management between the Company and PLN UIKSBU on May 28, 2019.





- Perjanjian Pengelolaan Aset PLTU Tembilahan antara Perusahaan dan PLN UIKSBU pada tanggal 18 Oktober 2018.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Perusahaan sebagai Aset *Manager* dan Aset Operator Pembangkit oleh PLN Regional Jawa Bagian Barat (JBB), Regional Jawa Bagian Tengah (JBT), dan Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara (JBNTN). Pada tanggal 29 November 2019 Perusahaan dan PLN menandatangani Perjanjian Induk Pengelolaan Aset Pembangkit. Perjanjian ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Pengelolaan Aset yang terdiri atas Perjanjian Pengelolaan Aset CNG *Plant* Gresik antara Perusahaan dan PLN Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara (JBNTN) pada tanggal 11 Desember 2019.

Untuk pengembangan bisnis di Luar Jawa, Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Jasa Operasi dan Pemeliharaan, diantaranya:

- Perjanjian induk PLTMG Arun (19x9,7 MW) pada tanggal 29 Juli 2015.
- PLTMG Arun tahap supporting (19x9,7 MW) pada tanggal 30 September 2016.
- Perjanjian jasa operasi dan pemeliharaan tahap *supporting* PLTU Tenayan (2x110 MW) tanggal 21 Desember 2015.
- Amandemen kesatu PLTU Tenayan Tahap *Supporting* pada tanggal 20 Juni 2016.
- Amandemen kedua PLTU Tenayan Tahap *Supporting* pada tanggal 12 Desember 2017.
- Amandemen ketiga PLTU Tenayan Tahap *Supporting* pada tanggal 19 November 2018.
- Adendum ketiga perjanjian PLTU 3 Babel Desa Air Anyir, Bangka tahap *supporting* pada tanggal 3 Oktober 2016.
- PLTU Belitung (2x16,5 MW) tahap *supporting* pada tanggal 1 Juni 2015.
- Amandemen Kesatu PLTU Belitung (2x16,5 MW) tahap *supporting* pada tanggal 29 Maret 2017.
- Amandemen Kedua PLTU Belitung (2x16,5 MW) tahap *supporting* pada tanggal 15 November 2017.
- Perjanjian PLTU Tembilahan Tahap *Supporting* pada tanggal 8 Maret 2018.
- Amandemen kesatu PLTU Tembilahan Tahap *Supporting* pada tanggal 3 Desember 2018.
- Amandemen ketiga PLTG Duri pada tanggal 27 Juni 2016.
- Amandemen keempat PLTG Duri pada tanggal 23 Maret 2017.
- Amandemen kelima PLTG Duri pada tanggal 28 Juni 2018.
- Amandemen keenam PLTG Duri pada tanggal 25 Januari 2019.
- Amandemen ketujuh PLTG Duri pada tanggal 8 Maret 2019.
- Perjanjian Induk PLTU Teluk Balikpapan (2 x 110 MW) pada tanggal 17 Juli 2014.
- Perjanjian PLTU Teluk Balikpapan (2x110 MW) tahap *supporting* (Pra COD) pada tanggal 5 Mei 2015.
- Tembilahan CFPP's Asset Management Agreement between the Company and PLN UIKSBU on October 18, 2018.

Related to the establishment of the Company as an Asset Manager and Asset Operator Operators by the West Java Regional PLN (JBB), the Central Java Regional (JBT), and the East Java Regional, Bali and Nusa Tenggara (JBNTN). On November 29, 2019, the Company and PLN signed the Plant Assets Management Asset Master Agreement. This agreement is followed up with the Asset Management Agreement which consists of the CNG Plant Gresik Asset Management Agreement between the Company and the Regional PLN of East Java, Bali, and Nusa Tenggara (JBNTN) on 11 December 2019.

For business development outside Java, the Company has signed an Operation and Maintenance Services Agreement, including:

- Arun GEPP's master agreement (19x9.7 MW) on 29 July 2015.
- Arun GEPP's supporting stage (19x9.7 MW) on 30 September 2016.
- Operation and maintenance service agreement for Tenayan CFPP of (2x110 MW) supporting phase on December 21, 2015.
- The first amendment of Tenayan CFPP's Supporting Phase on June 20, 2016.
- The second amendment of Tenayan CFPP's Supporting Phase on December 12, 2017.
- The third amendment of Tenayan CFPP's Supporting Phase on November 19, 2018.
- The third addendum of Babel 3 CFPP agreement in Air Anyir Village, Bangka supporting phase on October 3, 2016.
- Belitung CFPP of (2x16.5 MW) supporting phase on 1 June 2015.
- Amendment to Belitung CFPP of (2x16.5 MW) supporting phase on March 29, 2017.
- The Second Amendment to Belitung CFPP of (2x16.5 MW) supporting phase on November 15, 2017.
- The agreement of Tembilahan CFPP's Supporting Phase on March 8, 2018.
- The amendment of Tembilahan CFPP's Supporting Phase on December 3, 2018.
- The third amendment of Duri GTPP on June 27, 2016.
- The fourth amendment of Duri GTPP on March 23, 2017.
- The fifth amendment of Duri GTPP on June 28, 2018.
- The sixth amendment of Duri GTPP on January 25, 2019.
- The Seventh Amendment of Duri GTPP on March 8, 2019.
- Teluk Balikpapan CFPP's (2 x 110 MW) Master Agreement on July 17, 2014.
- Teluk Balikpapan CFPP's supporting phase Agreement (2x110 MW) (Pre COD) on 5 May 2015.

- Addendum perjanjian PLTU Teluk Balikpapan (2x10 MW) tahap *supporting* (Pre COD) pada tanggal 24 Juli 2015.
- PLTU Teluk Balikpapan (2x110 MW) periode setelah *Commercial Operation Date* (COD) sampai dengan *Final Acceptance Certificate* (FAC) tanggal 28 Juli 2017.
- Amandemen kesatu PLTU Teluk Balikpapan (2x110 MW) tahap *Supporting* (COD-FAC) pada tanggal 7 Maret 2018.
- Amandemen kedua PLTU Teluk Balikpapan (2x110 MW) tahap *Supporting* (COD-FAC) pada tanggal 4 September 2018.
- Amandemen ketiga PLTU Teluk Balikpapan (2x110 MW) tahap *Supporting* (COD-FAC) pada tanggal 27 Maret 2019.
- Perjanjian PLTU Pulang Pisau (2x60 MW) tahap *supporting* pada tanggal 30 Juni 2016.
- Amandemen PLTU Pusang Pisau (2x60 MW) tahap *supporting* pada tanggal 23 November 2016.
- Amandemen Kedua PLTU Pulang Pisau (2x60 MW) tahap *supporting* pada tanggal 28 April 2017.
- Addendum Ketiga PLTU Pulang Pisau (2x60 MW) tahap *supporting* pada tanggal 22 Juni 2017.
- Amandemen Keempat PLTU Pulang Pisau (2x60 MW) tahap *supporting* pada tanggal 28 Desember 2017.
- Amandemen Peralihan PLTU Pulang Pisau (2x60 MW) pada tanggal 29 Maret 2018.
- Amandemen Kelima PLTU Pulang Pisau (2x60 MW) tahap *supporting* pada tanggal 4 September 2018.
- Amandemen Keenam PLTU Pulang Pisau (2x60 MW) pada tanggal 13 Juni 2019.
- PLTU Ketapang (2x10 MW) tahap *supporting* pada tanggal 28 September 2016.
- Amandemen kesatu PLTU Ketapang pada tanggal 29 September 2017.
- Amandemen kedua PLTU Ketapang pada tanggal 28 Februari 2018.
- Amandemen ketiga PLTU Ketapang pada tanggal 26 April 2018.
- Amandemen keempat PLTU Ketapang (2x10 MW) tahap *supporting* pada tanggal 4 September 2018.
- Amandemen ketiga PLTU Amurang (2x25 MW) tahap *supporting* pada tanggal 30 Maret 2015.
- PLTU Amurang (2x25 MW) tahap *performance based* pada tanggal 30 April 2015.
- Addendum perjanjian PLTU Amurang (2x25 MW) tahap *performance based* pada tanggal 30 Desember 2015.
- Addendum kedua perjanjian PLTU Amurang (2x25 MW) tahap *performance based* pada tanggal 30 Juni 2016.
- PLTU Amurang (2x25 MW) tahap *performance based* kontrak 5 tahun pada tanggal 16 Januari 2017.
- Amandemen kesatu PLTU Amurang (2x25 MW) tahap *performance based* kontrak 5 tahun pada tanggal 10 Juli 2018.
- Perjanjian Induk PLTU Kendari (2x10 MW) tanggal 19 September 2013.

- Addendum to Teluk Balikpapan CFPP's supporting phase agreement (2x10 MW) (Pre COD) on July 24, 2015.
- Teluk Balikpapan CFPP (2x110 MW) period after the Commercial Operation Date (COD) until the Final Acceptance Certificate (FAC) on July 28, 2017.
- Amendment to Teluk Balikpapan CFPP of (2x110 MW) Supporting phase (COD-FAC) on March 7, 2018.
- The second amendment of Teluk Balikpapan CFPP of (2x110 MW) Supporting phase (COD-FAC) on September 4, 2018.
- The third amendment of Teluk Balikpapan CFPP of (2x110 MW) Supporting phase (COD-FAC) on March 27, 2019.
- Pulang Pisau CFPP's supporting phase agreement (2x60 MW) on June 30, 2016.
- An amendment of Pusang Pisau CFPP of (2x60 MW) supporting phase on November 23, 2016.
- The Second Amendment of Pulang Pisau CFPP (2x60 MW) supporting phase on 28 April 2017.
- Third Addendum of Pulang Pisau CFPP of (2x60 MW) supporting phase on June 22, 2017.
- The Fourth Amendment of Pulang Pisau CFPP of (2x60 MW) supporting phase on December 28, 2017.
- An amendment of Pulang Pisau CFPP (2x60 MW) on March 29, 2018.
- The Fifth Amendment of Pulang Pisau CFPP of (2x60 MW) supporting phase on September 4, 2018.
- The Sixth Amendment of Pulang Pisau CFPP (2x60 MW) on June 13, 2019.
- Ketapang CFPP of (2x10 MW) supporting phase on September 28, 2016.
- The first amendment to Ketapang CFPP on September 29, 2017.
- The second amendment to Ketapang CFPP on February 28, 2018.
- The third amendment to Ketapang CFPP on April 26, 2018.
- The fourth amendment of Ketapang CFPP of (2x10 MW) supporting phase on September 4, 2018.
- The Third Amendment to Amurang CFPP of (2x25 MW) supporting phase on 30 March 2015.
- Amurang CFPP of (2x25 MW) performance-based stage on April 30, 2015.
- An Addendum to Amurang CFPP of (2x25 MW) performance-based agreement on December 30, 2015.
- The Second Addendum to Amurang CFPP of (2x25 MW) performance-based phase agreement on June 30, 2016.
- Amurang CFPP (2x25 MW) performance-based stage 5-year contract on January 16, 2017.
- The First Amendment to Amurang CFPP of (2x25 MW) performance-based stage 5-year contract on July 10, 2018.
- Kendari CFPP's Master Agreement (2x10 MW) on September 19, 2013.





- PLTU Kendari (2x10 MW) tahap *supporting* tanggal 30 Desember 2013.
- Amandemen kesatu PLTU Kendari (2x10 MW) Tahap *Supporting* pada tanggal 29 Desember 2014.
- Adendum kedua perjanjian PLTU Nii Tanasa Kendari (2x10 MW) tahap *supporting* pada tanggal 29 Juni 2015.
- Adendum ketiga perjanjian PLTU Nii Tanasa Kendari (2x10 MW) tahap *supporting* pada tanggal 18 Desember 2015.
- Adendum keempat perjanjian PLTU Nii Tanasa Kendari (2x10 MW) tahap *supporting* pada tanggal 28 Juni 2016.
- Adendum kelima perjanjian PLTU Nii Tanasa Kendari (2x10 MW) tahap *supporting* pada tanggal 28 September 2016.
- Amandemen keenam perjanjian PLTU Nii Tanasa Kendari (2x10 MW) tahap *supporting* pada tanggal 27 Maret 2017.
- Amandemen ketujuh perjanjian PLTU Nii Tanasa Kendari (2x10 MW) tahap *supporting* pada tanggal 22 Juni 2017.
- Amandemen kedelapan perjanjian PLTU Nii Tanasa Kendari (2x10 MW) tahap *supporting* pada tanggal 26 Februari 2018.
- Amandemen kesembilan perjanjian PLTU Nii Tanasa Kendari (2x10 MW) tahap *supporting* pada tanggal 24 April 2018.
- Amandemen kesepuluh perjanjian PLTU Nii Tanasa Kendari (2x10 MW) tahap *supporting* pada tanggal 26 Desember 2018.
- Amandemen kesebelas perjanjian PLTU Nii Tanasa Kendari (2x10 MW) tahap *supporting* pada tanggal 31 Desember 2019.
- Perjanjian Induk PLTU Kendari Unit #3 (1x10 MW) tanggal 13 April 2015.
- Perjanjian PLTU Kendari unit #3 (1x10 MW) tahap *supporting* tanggal 23 November 2018.
- Amandemen kesatu PLTU Kendari unit #3 Tahap *Supporting* pada tanggal 24 April 2018.
- Perjanjian Induk PLTU Anggrek tanggal 12 September 2018.
- Perjanjian PLTU Anggrek tahap *supporting* (Pra COD) pada tanggal 1 April 2019.
- Adendum perjanjian PLTU Anggrek tahap *supporting* (Pre COD) pada tanggal 1 Juli 2019.
- PLTU Anggrek periode setelah *Commercial Operation Date* (COD) sampai dengan *Final Acceptance Certificate* (FAC) tanggal 30 September 2019.
- Perjanjian Induk PLTU Ampana tanggal 12 September 2018.
- Perjanjian PLTU Ampana tahap *supporting* (Pra COD) pada tanggal 17 Oktober 2019.
- PLTU Ampana periode setelah *Commercial Operation Date* (COD) sampai dengan *Final Acceptance Certificate* (FAC) tanggal 1 November 2019.
- Adendum perjanjian PLTU Bolok (2x16,5 MW) tahap *supporting* pada tanggal 17 Oktober 2016.
- Kendari CFPP of (2x10 MW) supporting phase on December 30, 2013.
- The First Amendment to Kendari CFPP of (2x10 MW) Supporting Phase on December 29, 2014.
- The Second Addendum to Nii Tanasa Kendari power plant agreements (2x10 MW) supporting phase on 29 June 2015.
- Addendum to the three Nii Tanasa Kendari CFPP's supporting phase agreement (2x10 MW) on December 18, 2015.
- The Fourth Addendum to Nii Tanasa Kendari CFPP's supporting phase agreements (2x10 MW) on June 28, 2016.
- The Fifth Addendum to Nii Tanasa Kendari CFPP's supporting phase agreements (2x10 MW) on September 28, 2016.
- The sixth amendment to Nii Tanasa Kendari CFPP's supporting phase agreement (2x10 MW) on March 27, 2017.
- The Seventh Amendment to Nii Tanasa Kendari CFPP's supporting phase agreement (2x10 MW) on June 22, 2017.
- The eighth amendment to Nii Tanasa Kendari CFPP's supporting phase agreement (2x10 MW) on February 26, 2018.
- The ninth amendment to Nii Tanasa Kendari CFPP's supporting phase agreement (2x10 MW) on April 24, 2018.
- The tenth amendment to Nii Tanasa Kendari CFPP's supporting phase agreement (2x10 MW) on December 26, 2018.
- The eleventh amendment to Nii Tanasa Kendari CFPP's supporting phase agreement (2x10 MW) on December 31, 2019.
- Kendari Unit#3 CFPP's (1x10 MW) Master Agreement on April 13, 2015.
- Kendari Unit#3 CFPP's supporting phase agreement (1x10 MW) on November 23, 2018.
- The First Amendment to Kendari unit#3 CFPP's Supporting Phase Agreement on April 24, 2018.
- Anggrek CFPP's Master Agreement on September 12, 2018.
- Anggrek CFPP's supporting phase agreement (Pre-COD) on April 1, 2019.
- An addendum to Anggrek CFPP's supporting phase agreement (Pre COD) on July 1, 2019.
- Aggrek CFPP's period after the Commercial Operation Date (COD) until the Final Acceptance Certificate (FAC) on 30 September 2019.
- Ampana CFPP's Master Agreement on September 12, 2018.
- Ampana CFPP's supporting phase agreement (Pre-COD) on October 17, 2019.
- Ampana CFPP's period after the Commercial Operation Date (COD) until the Final Acceptance Certificate (FAC) on November 1, 2019.
- Addendum to Bolok CFPP's supporting phase agreement (2x16.5 MW) on October 17, 2016.

- Amandemen kedua PLTU Bolok (2x16,5 MW) tahap *supporting* pada tanggal 31 Mei 2017.
- Amandemen ketiga PLTU Bolok (2x16,5 MW) tahap *supporting* pada tanggal 29 Desember 2017.
- Amandemen keempat PLTU Bolok (2x16,5 MW) tahap *supporting* pada tanggal 29 Desember 2017.
- Perjanjian PLTU Ropa tahap *supporting* tanggal 28 Oktober 2014.
- PLTU Tidore (2x7 MW) tahap *supporting* tanggal 12 Januari 2015.

Untuk pengembangan bisnis di Jawa, Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Jasa Operasi dan Pemeliharaan, diantaranya:

- Amandemen dan Pernyataan Kembali PLTA Wonorejo pada tanggal 30 Desember 2015.
- Amandemen keempat PLTA Wonorejo pada tanggal 17 Mei 2018.
- Amandemen kelima PLTA Wonorejo pada tanggal 23 Mei 2019.
- Amandemen dan Pernyataan kembali PLTA Ampel Gading pada tanggal 3 Juli 2017.

- The second amendment of Bolok CFPP of (2x16.5 MW) supporting phase on May 31, 2017.
- The third amendment of Bolok CFPP of (2x16.5 MW) supporting phase on December 29, 2017.
- The fourth amendment of Bolok CFPP of (2x16.5 MW) supporting phase on December 29, 2017.
- Ropa CFPP's supporting phase Agreement on October 28, 2014.
- Tidore CFPP of (2x7 MW) supporting phase on January 12, 2015.

For business development in Java, the Company has signed an Operation and Maintenance Services Agreement, including:

- Amendment and Restatement of Wonorejo HPP on December 30, 2015.
- The fourth amendment of Wonorejo HPP on May 17, 2018.
- The fifth amendment of Wonorejo HPP on May 23, 2019.
- Amendments and restatements of Ampel Gading HPP on July 3, 2017.

RKAP Pemeliharaan

ABOP on Maintenance

1. RKAP pemeliharaan eksisting tahun 2019 sebesar Rp1.263.921 juta.	1. ABOP on the existing maintenance in 2019 is Rp1,263,921 million.
2. RKAP pemeliharaan AMC tahun 2019 sebesar Rp999.308 juta.	2. ABOP on the AMC maintenance in 2019 is Rp999,308 million.
3. RKAP pemeliharaan Luar Jawa tahun 2019 sebesar Rp683.356 juta.	3. ABOP on the Outside-Java maintenance in 2019 is Rp683,356 million.

Mata Uang yang Menjadi Denominasi Pengadaan dan Pemeliharaan

Denominated Currency for the Procurement and Maintenance

Sampai dengan 31 Desember 2019, perincian ikatan material untuk pengadaan dan pemeliharaan berdasarkan mata uang adalah Rupiah (Rp).

As of December 31, 2019, the denomination of material commitments for procurement and maintenance is Rupiah (Rp).

Langkah-Langkah Perlindungan Risiko Mata Uang atas Pengadaan dan Pemeliharaan

Risk Mitigation Plan on the Procurement and Maintenance Currency

Dalam hal perikatan pengadaan dan pemeliharaan, PJB tidak menggunakan mata uang asing sehingga tidak dilakukan langkah perlindungan risiko dari posisi mata uang asing terkait.

In the procurement and maintenance agreements, PJB does not use foreign currencies; therefore, there is no risk mitigation taken from the position of the relevant foreign currencies.



Perjanjian Konsorsium Consortium Agreement

Nama Pihak dan Tujuan Konsorsium Name of Party and Purpose of the Consortium

Perjanjian konsorsium adalah pembiayaan bersama suatu proyek yang dilakukan oleh PJB dengan dua atau lebih Perusahaan lain. Perikatan ini bertujuan untuk membentuk suatu proyek baru atau mengembangkan proyek yang sudah ada melalui kerjasama dengan pihak lain.

A consortium agreement is joint financing for a project by PJB with two or more other companies. This agreement aims to form a new project or develop an existing project through collaboration with other parties.

Pada tanggal 12 Juli 2017 telah ditandatangani Perjanjian Konsorsium antara Perusahaan dengan PT Gama Energi Negeri. Perjanjian konsorsium tersebut mengenai kerjasama dalam pengembangan PLTU Sumut 2 2x300 MW di Medan, Sumatera Utara, dengan porsi penyertaan Perusahaan sebesar 51%. Sampai tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan belum melakukan *share subscription* di *Project Company*.

On July 12, 2017, a Consortium Agreement was signed between the Company and PT Gama Energi Negeri. The consortium agreement on the cooperation for the development of Sumut-2 CFPP (2x300 MW) in Medan, North Sumatra, with the Company's investment portion of 51%. As of the issuance date of the consolidated financial statements, the Company has not made any share subscription at the Project Company.

Pada tanggal 14 November 2019 telah ditandatangani Perjanjian Konsorsium antara Perusahaan (melalui PT PJB Investasi) dengan Abu Dhabi Future Energy Company PJSC - MASDAR. Perjanjian Konsorsium tersebut mengenai Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik Terapung 145 MWac Beserta Gardu Induk Evakuasi Daya di Cirata, dengan porsi penyertaan Perusahaan sebesar 51%. Sampai tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan belum melakukan *share subscription* di *Project Company*.

On November 14, 2019, the Consortium Agreement was signed between the Company (through PT PJB Investment) and Abu Dhabi Future Energy Company PJSC - MASDAR. The Consortium Agreement regarding the Development of 145 MWac Floating Photovoltaic Solar Power Plants and the Main Station for Power Evacuation in Cirata, with the Company's participation portion of 51%. As of the issuance date of the consolidated financial statements, the Company has not made any share subscription at the Project Company.

RKAP Konsorsium Sumut 2 dan PLTS Cirata ABOP on Sumut-2 Consortium and Cirata SPP

RKAP untuk konsorsium Sumut 2 dan PLTS Cirata tahun 2019 sebesar Rp186.285 juta.

The ABOP on Sumut-2 consortium and Cirata SPP in 2019 is Rp186,285 million.

Mata Uang yang Menjadi Denominasi Konsorsium Consortium Denominated Currency

Sampai dengan 31 Desember 2019, perincian ikatan material untuk konsorsium berdasarkan mata uang adalah Rupiah (Rp).

As of December 31, 2019, the denomination of material commitments for the consortium is Rupiah (Rp).

Langkah-Langkah Perlindungan Risiko Mata Uang atas Konsorsium Risk Mitigation Plan on Consortium

Dalam hal perikatan perjanjian konsorsium, PJB tidak menggunakan mata uang asing sehingga tidak dilakukan langkah perlindungan risiko dari posisi mata uang asing terkait.

In the consortium agreement, PJB does not use a foreign currency; therefore, there is no risk mitigation taken from the position of the relevant foreign currencies.

Perolehan Barang Modal Capital Expenditures

Pada tanggal 19 Desember 2017 telah ditandatangani perjanjian novasi antara PT PLN (Persero) dan PT Pembangkitan Jawa-Bali dan Konsorsium Doosan Heavy Industries and Construction Co. Ltd dan PT Utama Karya (Persero) sehubungan dengan Perjanjian Kontrak Nomor 0125.PJ/DAN.02.01/DIR/2017, tertanggal 29 Maret 2017 untuk proyek add on Pusat Listrik Tenaga Gas Uap Muara Tawar Blok 2,3 dan 4.

On December 19, 2017, a novation agreement was signed between PT PLN (Persero) and PT Pembangkitan Jawa-Bali and a consortium between Doosan Heavy Industries and Construction Co. Ltd and PT Utama Karya (Persero) relating to the Contract Agreement No. 0125.PJ/DAN.02.01/DIR/2017, on March 29, 2017, for the add-on project of Muara Tawar Combined-Cycle Power Plant's Block 2,3 and 4.

RKAP Barang Modal ABOP on Capital Expenditures

RKAP untuk *Add On* Muara Tawar Blok 2,3,4 tahun 2019 sebesar Rp1.887.664 juta.

The ABOP on the Add-On Project of Muara Tawar's Block 2,3,4 in 2019 is Rp1,887,664 million.

Mata Uang yang Menjadi barang modal Capital Expenditure Currency

Sampai dengan 31 Desember 2019, perincian ikatan material untuk barang berdasarkan mata uang adalah Rupiah (Rp).

As of December 31, 2019, the denomination of material commitments for capital expenditure is Rupiah (Rp).

Langkah-Langkah Perlindungan Risiko Mata Uang atas barang modal Risk Mitigation Plan on Capital Expenditure

Dalam hal perikatan perjanjian atas barang modal, PJB tidak menggunakan mata uang asing sehingga tidak dilakukan langkah perlindungan risiko dari posisi mata uang asing terkait.

In the material commitments on capital expenditure, PJB does not use foreign currencies; therefore, there is no risk mitigation taken from the position of the relevant foreign currencies.



REALISASI INVESTASI BARANG MODAL

REALIZATION OF CAPITAL GOODS INVESTMENT

PJB melakukan investasi barang modal dalam bentuk aset tetap berupa tanah, bangunan umum, waduk dan prasarana, instalasi dan mesin pembangkit, perlengkapan transmisi dan distribusi, perlengkapan umum dan kendaraan bermotor. Selain itu juga terdapat investasi pada pembangkitan, pengembangan usaha dan penugasan. Secara umum, tujuan investasi barang modal yang dilakukan Perusahaan adalah untuk mendukung kinerja operasional Perusahaan sehingga pembangkit semakin efisien dan andal serta memperlancar proses bisnis.

PJB invests the capital goods in form of fixed assets including land, buildings, reservoir, and infrastructure, installation and power plant, transmission and distribution equipment, general equipment, and motor vehicles. In addition, capital goods investment is performed by the Company to support operational performance of Company so the power plant gets more efficient and reliable as well as to make the business process smoother.

Investasi Barang Modal pada Aset Tetap

Capital Expenditure Investment in Fixed Assets

Investasi barang modal PJB pada aset tetap di tahun 2019 adalah sebesar Rp2.828.848 juta meningkat 1,09% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp2.798.368 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penguatan pembangkit serta *progress Add On* Muara Tawar.

PJB capital expenditure investment in fixed assets in 2019 amounted to Rp2,828,848 million, an increase of 1.09% compared to 2018 of Rp2,798,368 million. The increase was mainly due to the strengthening of the plant and the Add On Muara Tawar progress.

Tabel Jenis, Tujuan, dan Nilai Investasi Barang Modal Aset Tetap

Table of Type, Purpose and Investment Value of Capital Expenditure in Fixed Asset

Jenis Investasi Barang Modal Types of Capital Expenditure Investment	Tujuan Investasi Investment Objective	Realisasi Kegiatan Investasi (Rp juta) Realization of Investment Activities (Rp million)		Naik/(Turun) Increase/ (Decrease) %
		2018	2019	
Tanah Land	Pembangunan pembangkit baru Building new Generator	-	-	-
Bangunan Umum, Waduk dan Prasarana Public Buildings, Reservoirs, and Infrastructure	Operasional Perusahaan Company Operational	20.235	42.917	112,09
Instalasi dan Mesin Pembangkit Installation and Power Plant	Efisiensi dan keandalan pembangkit Generator efficiency and reliability	239.999	659.484	174,79
Peralatan Transmisi dan Distribusi Transmission and Distribution Equipment	Operasional Perusahaan Company Operational	161.474	69.289	(57,09)
Perlengkapan, Pengolahan Data, dan Telekomunikasi Data Processing Equipment and Telecommunication	Operasional Perusahaan Company Operational	3.955	571	(85,56)
Peralatan Umum General Equipment	Operasional Perusahaan Company Operational	160.008	77.694	(51,44)
Kendaraan Bermotor Motor vehicles	Operasional Perusahaan Company Operational		5.851	54,99
Pekerjaan dalam Pelaksanaan Company Operations Work in Implementation	Operasional Perusahaan Company Operational	-	1.973.042	(10,68)
Aset Tidak Digunakan dalam Operasi Asset Not Used in Operations	Operasional Perusahaan Company Operational	-	-	-
Jumlah Realisasi Kegiatan Investasi Total Realization of Investment Activities		2.798.368	2.828.848	1,09

Dengan terdapat penambahan investasi di tahun 2019, maka jumlah Aset Tetap tahun 2019 adalah sebesar Rp130.956.129 juta meningkat dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp131.965.057 juta.

With the addition of investment in 2019, the amount of Fixed Assets in 2019 reached Rp130,956,129 million, an increase compared to 2018 of Rp131,965,057 million.

Tabel Aset Tetap (Rp juta)
Table of Fixed Asset (Rp million)

Uraian Description	1 Januari 2019 January 1, 2019	Penambahan Additions	Pengurangan Deductions	Selisih Penilaian Kembali Difference Arising on Revaluation	Reklasifikasi Reclassification	31 Desember 2019 December 31, 2019
Biaya Perolehan Acquisition cost						
Tanah Land	17.303.524	-	-		(2.267)	17.301.257
Bangunan Umum, Waduk dan Prasarana Buildings, reservoir, and infrastructure	8.703.273	42.917	-		55.859	8.802.049
Instalasi dan Mesin Pembangkit Installation and Power Plant Machine	97.195.925	659.484	-		24.042	97.879.451
Peralatan Transmisi dan Distribusi Transmission and distribution equipment	4.899.094	69.289	-		4.432	4.972.815
Perlengkapan, Pengolahan Data, dan Telekomunikasi Equipment, Data Processing and Telecommunications	12.059	571	-		(2.892)	9.738
Peralatan Umum General equipment	947.236	77.694	-		(9.701)	1.015.229
Kendaraan Bermotor Motor Vehicles	133.799	5.851	-		(400)	139.250
Material Cadang Spare Parts	2.593	-	-		-	2.593
Sub Jumlah Sub Total	129.197.503	855.806	-		69.073	30.122.382
Pekerjaan dalam Pelaksanaan Work In Implementation	2.233.388	1.973.042	-		(138.452)	4.067.978
Aset Tidak Digunakan dalam Operasi Assets not used in operations	1.866.923	-	(11.820)		67.112	1.922.215
Total Biaya Perolehan Total Acquisition Cost	133.297.814	2.828.848	(11.820)		(2.267)	136.112.575
Akumulasi Penyusutan Accumulated Depreciation						
Bangunan Umum, Waduk dan Prasarana Buildings, reservoir, and infrastructure	-	803.546	-		97	803.643
Instalasi dan Mesin Pembangkit Installation and power plant	-	2.649.946	-		1.583	2.651.529
Peralatan Transmisi dan Distribusi Transmission and distribution equipment	-	133.039	-		(102)	132.937
Perlengkapan, Pengolahan Data, dan Telekomunikasi Equipment, Data Processing and Telecommunications	-	1.604	-		(251)	1.353
Peralatan Umum General Equipment	655.257	104.654	-		(12.486)	747.425
Kendaraan Bermotor Motor Vehicles	82.588	6.479	-		(400)	88.667
Material Cadang Spare Parts	-	70	-		-	70
Sub Jumlah Sub Total	737.845	3.699.338	-		(11.559)	4.425.624
Aset Tidak Digunakan dalam Operasi Aset Tidak Asset not used in operations	589.603	63.650	(11.820)		84.080	725.513
Jumlah Akumulasi Penyusutan Total Accumulated depreciation	1.327.448	3.762.988	(11.820)		72.521	5.151.137
Penyisihan Penurunan Nilai Allowance for impairment losses	(5.309)	-	-		-	(5.309)
Nilai Buku Booked Value	131.965.057	3.762.988	(11.820)		72.521	130.956.129

Investasi Barang Modal pada Pembangkitan, Pengembangan Usaha dan Penugasan Investment of Capital Expenditure in Power Plant, Business Development, and Assignment

Selain investasi pada barang modal di aset tetap, PJB juga melakukan investasi barang modal dalam rangka penguatan pembangkitan, pengembangan usaha dan penugasan. Investasi tersebut pada tahun 2019 adalah sebesar Rp2.889.490 juta menurun 7,26% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp3.115.679 juta. Tidak tercapainya program investasi pengembangan usaha disebabkan karena masih menunggu keputusan dari Kementerian dan PLN atas beberapa tahapan proyek dan bergesernya RUPTL beberapa program investasi.

In addition to investing in capital expenditure in fixed assets, PJB also invests in capital expenditure in the context of strengthening power plant, business development and assignment. The investment in 2019 amounted to Rp2,889,490 million, decreased 7.26% compared to 2018 of Rp3,115,679 million. The achievement of the business development investment program was not achieved because it was still waiting for a decision from the Ministry and PLN over several stages of the project and the shift in the Electricity Supply Business Plan of several investment programs.

Tabel Investasi Barang Modal pada Pembangkitan, Pengembangan Usaha dan Penugasan
Table of Capital Expenditure Investment in Power Plant, Business Development, and Assignment

Jenis dan Tujuan Investasi Types and Objectives of Investment	2018	2019
Penguatan Pembangkitan Power Plant Strengthening		
Kapitalisasi Capitalization	143.036	490.832
Penguatan Pembangkit Power Plant Strengthening	210.930	316.397
Penggantian Peralatan Utama Pembangkit Main Power Plant Equipment Replacement	235.559	130.090
Sistem dan Saran Informatika Information Systems and Facilities	38.322	90.843
Jumlah Penguatan Pembangkitan Total Power Plant Strengthening	627.847	1.028.162
Pengembangan & Penugasan Development & Assignment		
Pengembangan Usaha Business Development	2.487.832	1.861.328
Jumlah Pengembangan & Penugasan Total Development & Assignment	2.487.832	1.861.328
Jumlah Investasi Barang Modal pada Pembangkitan, Pengembangan Usaha dan Penugasan Total Capital Expenditure Investment in Power Plant, Business Development, and Assignment	3.115.679	2.889.490

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA PERUSAHAAN TAHUN 2019 DAN PROYEKSI TAHUN 2020

COMPARISON BETWEEN COMPANY'S PERFORMANCE TARGET AND REALIZATION IN 2019 AND PROJECTION FOR 2020

Target, Realisasi dan Proyeksi Kinerja Keuangan Targets, Realization, and Projection of Financial Performance

Kinerja keuangan diuraikan dalam pencapaian PJB pada target pendapatan dan laba Perusahaan sebagaimana pada Laporan Laba Rugi Komprehensif sebagai berikut:

The financial performance is described in achievement of PJB in the revenue and profit targets as stated in the Comprehensive Income Statement as follows:

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Pendapatan dan Laba Tahun 2019 serta Proyeksi Tahun 2020 (Rp juta)
Table of Comparison between Targets and Realization of Revenue and Profit in 2019 and Projections for 2020 (Rp million)

Uraian Description	Target RKAP 2019 ABOP Target in 2019	Realisasi 2019 Realization in 2019	Pencapaian Achievement (%)	Proyeksi 2020 Projection for 2020
Pendapatan Usaha Revenue	44.454.030	39.757.950	89,44	39.319.979
- Penjualan Tenaga Listrik Electricity Sales	37.137.208	33.681.317	90,69	31.260.867
- Jasa O&M O&M Services	5.067.098	4.422.238	87,27	5.771.579
- Jasa EPC EPC services	1.839.200	1.396.106	75,91	2.067.207
- Jasa Usaha Lainnya Other services	410.524	258.289	62,92	220.327
Beban Usaha Operating expenses	36.967.137	31.062.893	84,03	31.775.063
Laba Usaha Operating Income	7.486.893	8.695.058	116,14	7.554.916
Pos Keuangan dan Lain-lain Bersih Financial Items and Others-Net	615.217	918.280	149,26	991.316
Laba Sebelum Pajak Profit before Tax	8.102.109	9.613.338	118,65	8.536.232
(Beban) Manfaat Pajak Tax (Expenses) Benefits	(1.888.674)	(2.950.016)	156,20	(1.898.024)
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	6.213.435	6.663.322	107,24	6.638.208
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Income for the Year	6.213.435	6.172.475	99,34	6.638.208

Target, Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Targets, Realization, and Projection of Revenue

Pendapatan usaha yang dimaksud adalah hasil dari penjualan energi listrik, Jasa O&M, Jasa EPC, Jasa Stockiest dan Lainnya.

The operating income is the result of electricity sales, O&M Services, EPC Services, Stockiest Services, and Others.

Penjualan Tenaga Listrik

Realisasi pendapatan dari penjualan tenaga listrik tahun 2019 sebesar Rp33.681.317 juta dengan pencapaian 90,69% dari target RKAP 2019. Pencapaian ini dipengaruhi oleh realisasi produksi dibawah RKAP untuk mendukung optimasi di sistem oleh P2B. Selanjutnya, di tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp31.260.867 juta berdasarkan asumsi pertumbuhan tenaga listrik tahun 2020.

Electricity Sales

The realization of revenue from electricity sales in 2019 amounted to Rp33,681,317 million with the achievement of 90.69% of the 2019 ABOP target. This achievement was affected by the realization of production under the ABOP to support optimization in the system by P2B. Furthermore, in 2020, it is projected to reach Rp31,260,867 million in accordance with the assumed growth of electricity in 2020.

Jasa O&M

Realisasi pendapatan dari jasa O&M tahun 2019 sebesar Rp4.422.238 juta dengan pencapaian 87,27% dari target RKAP 2019. Pencapaian ini dipengaruhi oleh BAST atas pekerjaan AI PLN untuk AMC Sumatera tahun 2019 terbit di tahun 2020 (pengakuan pendapatan 2020). Selanjutnya, di tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp5.771.529 juta berdasarkan asumsi kontrak Jasa O&M tahun 2020.

Jasa EPC

Realisasi pendapatan dari jasa EPC tahun 2019 sebesar Rp1.396.106 juta dengan pencapaian 75,91% dari target RKAP 2019. Pencapaian ini dipengaruhi oleh rendahnya perolehan kontrak baru dan mundurnya progress konstruksi transmisi distribusi ke PLN dengan kendala pembebasan lahan. Selanjutnya, di tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp2.067.207 juta berdasarkan asumsi perolehan kontrak yang didapatkan RE pada tahun 2020.

Jasa Stockiest dan Lainnya

Realisasi pendapatan dari jasa Stockiest dan Lainnya tahun 2019 sebesar Rp258.289 juta dengan pencapaian 62,92% dari target RKAP 2019. Pencapaian ini dipengaruhi oleh mundurnya jadwal pemasangan barang dan OH unit. Selanjutnya, di tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp220.327 juta berdasarkan asumsi jumlah proyeksi pekerjaan dan kontrak yang akan didapat dari PLNSC atau usaha lainnya.

Target, Realisasi dan Proyeksi Laba Target, Realization, and Projection of Profit

Realisasi Laba Tahun Berjalan tahun 2019 sebesar Rp6.663.322 juta dengan pencapaian 107,24% dari target RKAP 2019. Pencapaian ini dipengaruhi oleh optimalisasi biaya usaha sehingga laba melebihi RKAP. Selanjutnya, di tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp6.638.208 juta berdasarkan asumsi dari laba masing-masing segmen usaha yaitu Penjualan Tenaga Listrik, Jasa O&M, EPC, Usaha lainnya, ataupun laba investasi di Perusahaan Asosiasi.

O&M Services

The realization of revenue from O&M services in 2019 amounted to Rp4,422,238 million with the achievement of 87.27% of the 2019 ABOP target. This achievement was affected by BAST for the work of AI PLN for the 2019 AMC Sumatra to be published in 2020 (recognition of 2020 income). Furthermore, in 2020, it is projected to reach Rp5,771,529 million in accordance with the assumed O&M Services contract in 2020.

EPC services

The realization of revenue from EPC services in 2019 amounted to Rp1,396,106 million with the achievement of 75.91% of the 2019 ABOP target. This achievement was affected by the low acquisition of new contracts and the delay in the construction progress of the distribution transmission to PLN with land acquisition issues. Furthermore, in 2020, it is projected to reach Rp2,067,207 million in accordance with the assumption of obtaining a contract obtained by RE in 2020.

Stockiest and Other Services

The realization of revenue from Stockiest and Other services in 2019 amounted to Rp258,289 million with the achievement of 62.92% of the 2019 ABOP target. This achievement was affected by the delay in the installation schedule of goods and OH units. Furthermore, in 2020, it is projected to reach Rp220,327 million in accordance with the assumption of the number of projected works and contracts from PLNSC or other businesses.

The realization of Profit for the Year in 2019 amounted to Rp6,663,322 million with the achievement of 107.24% of the 2019 ABOP target. This achievement was affected by the optimization of business costs so that profits exceeded the ABOP. Furthermore, in 2020, it is projected to reach Rp6,638,208 million in accordance with the assumptions of the profits of each business segment, namely Electricity Sales, O&M Services, EPC, Other Businesses, or investment profits in Associates.



Target, Realisasi dan Proyeksi Posisi Keuangan

Target, Realization, and Projection of Financial Position

Kinerja posisi keuangan ditunjukkan pada pencapaian pada target jumlah aset, liabilitas dan ekuitas sebagaimana pada Laporan Posisi Keuangan.

The financial position performance is shown in the achievement of the target number of assets, liabilities, and equity as in the Financial Position Report.

Target, Realisasi dan Proyeksi Aset

Target, Realization, and Projection of Assets

Realisasi Jumlah Aset tahun 2019 sebesar Rp173.223.365 juta dengan pencapaian 87,12% dari target RKAP 2019. Pencapaian ini dipengaruhi oleh belum mengakomodir revaluasi Aset tahun 2018 yang mengalami penurunan. Selanjutnya, di tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp173.315.971 juta berdasarkan asumsi penambahan beberapa investasi baik di Investasi Pembangkit atau di Investasi yang terkait Pengembangan Usaha serta pembayaran dividen ke PLN.

The realization of 2019 Assets amounted to Rp173,223,365 million with the achievement of 87.12% of the 2019 ABOP target. This achievement was influenced by not accommodating the revaluation of decreased assets in 2018. Furthermore, in 2020, it is projected to amount to Rp173,315,971 million in accordance with the assumption of adding some investments both in Power Plant Investments or Investments in Business Development and dividend payments to PLN.

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Jumlah Aset Tahun 2019 serta Proyeksi Tahun 2020 (Rp juta)
Table of Comparison between Targets and Realization of Assets in 2019 and Projections for 2020 (Rp million)

Uraian Description	Target RKAP 2019 The 2019 ABOP Target	Realisasi 2019 Realization in 2019	Pencapaian Achievement (%)	Proyeksi 2020 Projection for 2020
Aset Lancar Current Assets	30.242.523	28.588.694	94,53	28.472.535
Aset Tidak Lancar Non-current Assets	168.579.369	144.634.671	85,80	144.843.437
Jumlah Aset Total Assets	198.821.892	173.223.365	87,12	173.315.971

Aset Lancar

Realisasi Jumlah Aset Lancar tahun 2019 sebesar Rp28.588.694 juta dengan pencapaian 94,53% dari target RKAP 2019. Pencapaian ini dipengaruhi oleh adanya offset dividen atas Piutang sebesar Rp3,5 triliun sesuai dengan Sirkuler Pemegang Saham tanggal 30 Oktober 2019, dan Dividen atas laba 2018 sebesar Rp5,9 triliun. Selanjutnya, di tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp28.472.535 juta berdasarkan asumsi oleh adanya offset dividen atas Dividen atas laba tahun buku 2019 sebesar Rp6,6 triliun.

Current Assets

The realization of 2019 Current Assets was Rp28,588,694 million with the achievement of 94.53% of the 2019 ABOP target. This achievement was influenced by an offsetting dividend on Receivables reaching Rp3.5 trillion following Shareholders Circular on October 30, 2019, and Dividends on earnings 2018 reaching Rp5.9 trillion. Furthermore, in 2020, it is projected to reach Rp28,472,535 million in accordance with the assumption that there is an offsetting dividend on the dividend from the profit for the fiscal year 2019 of Rp6.6 trillion.

Aset Tidak Lancar

Realisasi Jumlah Aset Tidak Lancar tahun 2019 sebesar Rp144.634.671 juta dengan pencapaian 85,80% dari target RKAP 2019. Pencapaian ini dipengaruhi oleh RKAP 2019 belum mengakomodir revaluasi Aset tahun 2018 yang mengalami penurunan. Selanjutnya, di tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp144.834.437 juta berdasarkan asumsi Penambahan di Investasi Pembangkit maupun di Investasi Pengembangan Usaha.

Non-current Assets

The realization of 2019 Non-Current Assets was Rp144,634,671 million with the achievement of 85.80% of the 2019 ABOP target. This achievement was due to the 2019 ABOP which did not accommodate the decreased asset revaluation in 2018. Furthermore, in 2020, it is projected to reach Rp144,834,437 million in accordance with the assumptions of Additions to Power Plant Investment and Business Development Investment.



Target, Realisasi dan Proyeksi Liabilitas Target, Realization, and Projection of Liabilities

Realisasi Jumlah Liabilitas tahun 2019 sebesar Rp9.450.270 juta dengan pencapaian 78,93% dari target RKAP 2019. Pencapaian ini dipengaruhi oleh RKAP 2019 belum mengakomodir revaluasi Aset tahun 2018 yang mempengaruhi posisi Pajak Tangguhan yang di tahun 2019 berada di posisi Aset. Selanjutnya, di tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp9.462.741 juta berdasarkan asumsi Penambahan Utang kepada Pemegang Saham atas proyek add on Muara Tawar.

The realization of Total Liabilities in 2019 was Rp9,450,270 million with the achievement of 78.93% of the 2019 ABOP target. This achievement was influenced by the 2019 ABOP which did not accommodate the 2018 Asset revaluation that affected the Deferred Tax position which in 2019 was in Assets. Furthermore, in 2020, it is projected to reach Rp 9,462,741 million in accordance with the assumption of the Addition of Debt to Shareholders for the Muara Tawar's Add-on project.

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Jumlah Liabilitas Tahun 2019 serta Proyeksi Tahun 2020 (Rp juta)
Table of Comparison between Targets and Realization of Liabilities in 2019 and the 2020 Projection (Rp million)

Uraian Description	Target RKAP 2019 The 2019 ABOP Target	Realisasi 2019 Realization in 2019	Pencapaian Achievement [%]	Proyeksi 2020 Projection for 2020
Liabilitas Jangka Pendek Short-term Liabilities	3.894.151	5.056.333	129,84	3.597.544
Liabilitas Jangka Panjang Long-term Liabilities	8.079.484	4.393.937	54,38	5.865.196
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	11.973.635	9.450.270	78,93	9.462.741

Liabilitas Jangka Pendek

Realisasi Jumlah Liabilitas Jangka Pendek tahun 2019 sebesar Rp5.056.333 juta dengan pencapaian 129,84% dari target RKAP 2019. Pencapaian ini dipengaruhi oleh utang material seiring penambahan material untuk cadangan pemeliharaan awal tahun 2020. Selanjutnya, di tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp3.597.544 juta berdasarkan asumsi utang bahan bakar yang menjadi tanggung jawab PJB hanya sekitar 1 bulan dan tidak ada penambahan utang material.

Short-term Liabilities

The realization of 2019 Total Short-term Liabilities was Rp5,056,333 million with 129.84% of the 2019 ABOP target. This achievement was affected by material debt as additional material was added to the initial maintenance reserve in 2020. Furthermore, in 2020, it is projected to reach Rp3,597,544 million in accordance with the fuel debt assumption that the PJB is responsible for about 1 month without any additional material debt.

Liabilitas Jangka Panjang

Realisasi Jumlah Liabilitas Jangka Panjang tahun 2019 sebesar Rp4.393.937 juta dengan pencapaian 54,38% dari target RKAP 2019. Pencapaian ini dipengaruhi oleh RKAP 2019 yang belum mengakomodir revaluasi Aset tahun 2018 dan mempengaruhi posisi Pajak Tangguhan pada tahun 2019 berada di posisi Aset. Selanjutnya, di tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp5.865.196 juta berdasarkan asumsi bertambahnya nilai utang atas Pemegang saham (SHL) ECA atas proyek add on Muara Tawar.

Long-term liabilities

The realization of 2019 Long Term Liabilities was Rp4,393,937 million with 54.38% achievement of the 2019 ABOP target. This achievement was influenced by the 2019 ABOP that did not accommodate the 2018 Asset revaluation and affected the Deferred Tax position in 2019 in Assets position. Furthermore, in 2020, it is projected to reach Rp5,865,196 million in accordance with the assumption of increasing the value of debt to the ECA shareholders (SHL) for Muara Tawar's Add-on project.

Target, Realisasi dan Proyeksi Ekuitas Target, Realization, and Projection of Equity

Realisasi Jumlah Ekuitas tahun 2019 sebesar Rp163.773.095 juta dengan pencapaian 87,65% dari target RKAP 2019. Pencapaian ini dipengaruhi oleh RKAP 2019 belum mengakomodir revaluasi Aset tahun 2018 yang mengurangi Penghasilan Komprehensif Lain atas Surplus (defisit) akibat revaluasi. Selanjutnya, di tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp163.853.231 juta berdasarkan asumsi pembayaran dividen atas perolehan laba tahun 2019 sebesar Rp6,6 triliun.

The realization of Total Equity in 2019 was Rp163,773,095 million with the achievement of 87.65% of the 2019 ABOP target. This achievement was influenced by the 2019 ABOP that did not accommodate the revaluation of Assets in 2018 which reduced Other Comprehensive Income over Surplus (deficit) due to revaluation. Furthermore, in 2020, it is projected to amount to Rp163,853,231 million in accordance with the assumption of dividend payments on profits in 2019 of Rp6.6 trillion.

Target, Realisasi dan Proyeksi Struktur Modal Target, Realization, and Projection of Capital Structure

Realisasi Struktur Modal tahun 2019 terdiri atas Liabilitas sebesar Rp9.450.270 juta dan Ekuitas sebesar Rp173.223.365 juta. Selanjutnya, di tahun 2020 diproyeksikan Liabilitas sebesar Rp9.462.741 juta dan Ekuitas sebesar Rp163.853.231 juta berdasarkan asumsi pembayaran dividen ke PLN atas Laba tahun buku 2019 dan penambahan nilai utang kepada Pemegang Saham atas proyek *add on* Muara Tawar.

The realization of the Capital Structure in 2019 consisted of liabilities of Rp9,450,270 million and Equity of Rp173,223,365 million. Furthermore, in 2020, the Liability is projected to reach Rp9,462,741 million and Equity of Rp163,853,231 million in accordance with the assumption of dividend payments to PLN for Profit for the fiscal year 2019 and additional debt value to Shareholders for Muara Tawar's Add-on project.

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Struktur Modal Tahun 2019 serta Proyeksi Tahun 2020 (Rp juta)
Table of Comparison between Targets and Realization of Capital Structure in 2019 and Projections for 2020 (Rp million)

Uraian Description	Target RKAP 2019 The 2019 ABOP Target		Realisasi 2019 Realization in 2019		Pencapaian Achievement (%)	Proyeksi 2020 Projection for 2020	
	Nominal Nominal	Komposisi Composition (%)	Nominal Nominal	Komposisi Composition (%)		Nominal Nominal	Komposisi Composition (%)
Liabilitas Liabilities	11.973.635	6,02	9.450.270	4,75	78,93	9.462.741	5,46
Ekuitas Equity	186.848.258	93,98	163.773.095	82,37	87,65	163.853.231	94,54
Aset Assets	198.821.892	100,00	173.223.365	87,12	87,12	173.315.971	100,00

Target, Realisasi dan Proyeksi Aspek Pemasaran Target, Realization, and Projection of Marketing Aspects

Terkait aspek pemasaran dapat dilihat dari pencapaian atas target penjualan tenaga listrik dan cakupan pangsa pasar.

The marketing aspects can be seen from the achievement of the electricity sales target and market share coverage.

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Aspek Pemasaran Tahun 2019 serta Proyeksi Tahun 2020
Table of Comparison between Target and Realization of Marketing Aspects in 2019 and Projections for 2020

Uraian Description	Target RKAP 2019 The 2019 ABOP Target	Realisasi 2019 Realization in 2019	Pencapaian Achievement (%)	Proyeksi 2020 Projection for 2020
Penjualan Tenaga Listrik (GWh) Electricity Sales (GWh)	24.968,11	22.404,11	89,73	21.986,21
Pangsa Pasar (%) Market Share (%)	11,04	11,48	104,00	10,90

Penjualan Tenaga Listrik

Realisasi Penjualan Tenaga Listrik tahun 2019 sebesar Rp33.681.317,25 juta dengan pencapaian 90,69% dari target RKAP 2019. Pencapaian ini dipengaruhi oleh rendahnya realisasi produksi pada tahun 2019 untuk mendukung optimasi Sistem Jawa Bali. Selanjutnya, di tahun 2020 diproyeksikan sebesar 21.986 GWh (Rp32.594.915,26 juta) berdasarkan asumsi pertumbuhan kebutuhan energi listrik di Sistem Jawa Bali.

Pangsa Pasar

Realisasi Pangsa Pasar tahun 2019 sebesar 11,48% dengan pencapaian 104,00% dari target RKAP 2019. Pencapaian ini dipengaruhi oleh masuknya pembangkit baru yang lebih efisien serta adanya IBT (*Interbus Transformer*) yang dapat mengambil pangsa pasar kebutuhan listrik 150KV di daerah-daerah yang selama ini disuplai listrik oleh PJB. Selanjutnya, di tahun 2020 diproyeksikan sebesar 10,90% berdasarkan asumsi adanya penambahan pembangkit baru pada Sistem Jawa Bali yang direncanakan COD pada tahun 2020.

Electricity Sales

The realization of Electricity Sales in 2019 was Rp33,681,317.25 million with the achievement of 90.69% of the 2019 ABOP target. This achievement was influenced by the low realization of production in 2019 to support the optimization of the Java-Bali System. Furthermore, in 2020, it is projected to reach 21,986 GWh (Rp32,594,915.26 million) in accordance with the assumption of growing demand of electricity in the Java-Bali System.

Market share

The realization of Market Share in 2019 was 11.48% with the achievement of 104.00% of the 2019 ABOP target. This achievement is due to new, more efficient power plants as well as the IBT (*Interbus Transformer*) that can take market share of 150KV electricity demand in PJB's operational areas. Furthermore, in 2020, it is projected to reach 10.90% in accordance with the assumption of the addition of new plants to the Java-Bali System planned by COD in 2020.

Target, Realisasi dan Proyeksi Aspek Operasional Targets, Realization, and Projection of Operational Aspects

Aspek operasional mencakup pada pencapaian faktor kinerja pembangkit eksisting, produksi tenaga listrik dan pemakaian listrik.

Operational aspects cover the achievement of the performance factors of existing plants, electricity production, and electricity consumption.

Target, Realisasi dan Proyeksi Faktor Kinerja Pembangkit Target, Realization, and Projection of Power Plant Performance Factors

Indikator kinerja pembangkit mencakup faktor ketersediaan, faktor gangguan dan efisiensi pembangkit.

Power Plant performance indicators include the factors of availability, disruption, and plant efficiency.

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Pembangkit Tahun 2019 serta Proyeksi Tahun 2020 (Rp juta)
Table of Comparison of Targets with 2019 Plant Performance Realization and Projections for 2020 (Rp million)

Uraian Description	Target RKAP 2019 The 2019 ABOP Target	Realisasi 2019 Realization in 2019	Pencapaian Achievement (%)	Proyeksi 2020 Projection for 2020
EAF Pembangkit Eksisting (%) EAF of Existing Power Plants (%)	93,35	95,06	101,83	94,43
EAF PLTU FTP-1 (%) EAF of FTP-1 CFPP (%)	84,93	90,71	106,81	89,11
EFOR Pembangkit Eksisting (%) EFOR of Existing Power Plants (%)	1,81	0,80	155,91	0,99
EFOR PLTU FTP-1 (%) EAF of FTP-1 CFPP (%)	3,59	2,31	135,64	3,08
Tara Kalor Neto Pembangkit Eksisting (kCal/kWh) Net Plant Heat Rate of Existing Power Plants (kCal/kWh)	2.416	2.491	96,92	2.490
Tara Kalor Neto PLTU FTP-1 (kCal/kWh) Net Plant Heat Rate of FTP-1 CFPP (kCal/kWh)	2.656	2.664	99,68	2.746

Equivalent Availability Factor (EAF)

Realisasi EAF Pembangkit Eksisting tahun 2019 sebesar 95,06% dengan pencapaian 101,83% dari target RKAP 2019. Pencapaian ini dipengaruhi oleh jumlah *J* yang jatuh tempo di tahun 2019 lebih sedikit daripada tahun 2018. Selain itu, pelaksanaan pekerjaan dengan status *Maintenance Outage* juga lebih sedikit dibandingkan tahun 2018 karena optimasi dari *Predictive* dan *Preventive Maintenance* sehingga tidak membutuhkan unit untuk *shutdown*. Selanjutnya, di tahun 2020 diproyeksikan sebesar 94,43% berdasarkan asumsi pemeliharaan yang dilakukan di tahun 2020 adalah sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan.

Realisasi EAF PLTU FTP-1 tahun 2019 sebesar 90,71% dengan pencapaian 106,81% dari target RKAP 2019. Pencapaian ini dipengaruhi oleh optimalisasi OH dengan membuat *Work Breakdown Structure* (WBS) berbasis Jam, memperpendek gangguan dengan cara *strategy spare part* dan *joint inventory* dan peningkatan keandalan peralatan (*upgrading & uprating essential equipment*). Selanjutnya, di tahun 2020 diproyeksikan sebesar 89,11% berdasarkan asumsi OH yang dilaksanakan di tahun 2020 lebih banyak dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Equivalent Forced Outage Rate (EFOR)

Realisasi EFOR Pembangkit Eksisting tahun 2019 sebesar 0,80% dengan pencapaian 155,91% dari target RKAP 2019. Pencapaian ini dipengaruhi oleh pelaksanaan *overhaul*, *predictive* dan *preventive maintenance* yang efektif sehingga dapat meminimalisir terjadinya *breakdown* atau gangguan selama interval *overhaul*. Selanjutnya, di tahun 2020 diproyeksikan sebesar 0,99% berdasarkan asumsi bahwa di tahun 2020 terjadi pandemi covid-19 yang menyebabkan beberapa pembangkit PJB *reserved shutdown* sehingga mengurangi jam *service* dan berdampak pada EFOR (faktor formulasi).

Realisasi EFOR PLTU FTP-1 tahun 2019 sebesar 2,31% dengan pencapaian 135,64% dari target RKAP 2019. Pencapaian ini dipengaruhi oleh pelaksanaan *overhaul*, *predictive* dan *preventive maintenance* yang efektif sehingga dapat meminimalisir terjadinya *breakdown* atau gangguan selama interval *overhaul*. Selanjutnya, di tahun 2020 diproyeksikan sebesar 3,08% berdasarkan asumsi bahwa di tahun 2020 terjadi pandemi covid-19 yang menyebabkan beberapa pembangkit PJB *reserved shutdown* sehingga mengurangi jam *service*, menambah jam FO (*Start Fault*) pasca *Reserve Shutdown Hours* (RSH) sehingga berdampak pada EFOR (faktor formulasi).

Equivalent Availability Factor (EAF)

The realization of the Existing Power Plant's EAF in 2019 was 95.06% with 101.83% of the 2019 ABOP target. This achievement was influenced by the number of overhauls that were due in 2019 less than in 2018. Also, the implementation of work with Maintenance Outage status was less than in 2018 due to the optimization of Predictive and Preventive Maintenance so that it did not require the unit to shut down. Furthermore, in 2020, it is projected to reach 94.43% in accordance with the assumption that maintenance carried out in 2020 is in accordance with the predetermined plan.

The realization of FTP-1 CFPP's EAF in 2019 was 90.71% with the achievement of 106.81% of the 2019 ABOP target. This achievement was influenced by OH optimization by creating a Time-based Work Breakdown Structure (WBS), shortening disruption using the spare part and joint strategy inventory, and increase equipment reliability (upgrading & uprating essential equipment). Furthermore, in 2020, it is projected to reach 89.11% in accordance with the OH assumptions implemented in 2020 more and following the schedule.

Equivalent Forced Outage Rate (EFOR)

The realization of the Existing Power Plant's EFOR in 2019 was 0.80% with 155.91% of the 2019 ABOP target. This achievement was influenced by effective overhaul, predictive, and preventive maintenance implementation to minimize breakdowns or disturbances during the overhaul interval. Furthermore, in 2020, it is projected to reach 0.99% in accordance with the assumption that in 2020 there was a COVID-19 pandemic that caused several reserved PJB power plants to shut down thereby reducing service hours and impacting on EFOR (formulation factor).

The realization of FTP-1 CFPP's EFOR in 2019 was 2.31% with the achievement of 135.64% of the 2019 ABOP target. This achievement was influenced by effective overhaul, predictive, and preventive maintenance implementation to minimize the occurrence of breakdowns or disturbances during the overhaul interval. Furthermore, in 2020 it is projected to reach 3.08% in accordance with the assumption that in 2020 there was a COVID-19 pandemic which caused some PJB's reserved power plants to shut down thereby reducing service hours, increasing FO (Start Fault) hours after Reserve Shutdown Hours (RSH) so that it had an impact on EFOR (formulation factor).



Tara Kalor Neto

Realisasi Tara Kalor Neto (*Net Plant Heat Rate/NPHR*) Pembangkit Eksisting tahun 2019 sebesar 2.491 kCal/kWh dengan pencapaian 96,92% dari target RKAP 2019. Pencapaian ini dipengaruhi oleh kebutuhan sistem dimana pembangkit PLTU gas beroperasi lebih tinggi dari yang direncanakan, sehingga NPHR korporat menjadi lebih tinggi. Selanjutnya, di tahun 2020 diproyeksikan sebesar 2.490 kCal/kWh berdasarkan asumsi proyeksi pertumbuhan penjualan dan pemakaian bahan bakar sesuai dengan proyeksi beban Sistem Jawa Bali.

Realisasi Tara Kalor Neto PLTU FTP-1 tahun 2019 sebesar 2.664 kCal/kWh dengan pencapaian 99,68% dari target RKAP 2019. Pencapaian ini dipengaruhi oleh seringnya unit mengalami gangguan *Force Outage* atau *Force Derating* sehingga pembebanan tidak bisa optimal hal ini berpengaruh terhadap kurang efisiensi mesin tersebut. Selanjutnya, di tahun 2020 diproyeksikan sebesar 2746 kCal/kWh berdasarkan asumsi adanya pandemi covid-19 mengakibatkan pertumbuhan penjualan listrik turun drastis mengakibatkan banyak unit yang di RSH dan pembebanan yang minim sekali sehingga NPHR akan naik (kinerja kurang baik).

Net Plant Heat Rate

Realization of the Net Plant Heat Rate (NPHR) of the Existing Power Plant in 2019 amounted to 2,491 kCal/kWh with the achievement of 96.92% of the 2019 ABOP target. This achievement is influenced by the system requirements where the gas power plant operates higher than planned which leads to higher Corporate NPHR. Furthermore, in 2020, it is projected to reach 2,490 kCal / kWh in accordance with the assumption of projected sales growth and fuel consumption following the projected load of the Java-Bali System.

The realization of the Net Plant Heat Rate for FTP-1 CFPP in 2019 was 2,664 kCal/kWh with the achievement of 99.68% of the 2019 ABOP target. This achievement is influenced by more frequent Force Outage or Force Derating that led to non-optimal loading; this affects the equipment to be less efficient. Furthermore, in 2020, it is projected to reach 2746 kCal/kWh in accordance with the assumption that the Covid-19 pandemic will result in a drastic decrease in electricity sales resulting in many units in the RSH and very minimal loading; therefore, the NPHR will rise (non-optimal performance).

Target, Realisasi dan Proyeksi Produksi Tenaga Listrik Target, Realization, and Projection of Electricity Production

Realisasi Produksi Tenaga Listrik tahun 2019 sebesar 23.312,99 GWh dengan pencapaian 89,23% dari target RKAP 2019. Pencapaian ini dipengaruhi oleh pola musim kering pada pembangkit hydro, dan kebutuhan sistem (*dispatch*) atas pembangkit berbahan bakar gas. Selanjutnya, di tahun 2020 diproyeksikan sebesar 20.936,05 GWh berdasarkan asumsi pertumbuhan kebutuhan energi listrik sesuai dengan yang telah diproyeksikan oleh Sistem Jawa Bali.

The realization of Electricity Production in 2019 was 23,312.99 GWh with the achievement of 89.23% of the ABOP target. This achievement was influenced by the dry season's pattern on hydropower plants, and the system requirements (*dispatch*) of Gas-fired Power Plants. Furthermore, in 2020, it is projected to reach 20,936.05 GWh in accordance with the assumption of growth in electrical energy needs following those projected by the Java-Bali System.

Target, Realisasi dan Proyeksi Pemakaian Sendiri Target, Realization, and Projection of Self-Consumption

Realisasi Pemakaian Sendiri tahun 2019 sebesar 908,88 GWh dengan pencapaian 112,09% dari target RKAP 2019. Pencapaian ini dipengaruhi oleh pola operasi dari pembangkit PJB, dimana UP Paiton beroperasi dengan *capacity factor* yang lebih tinggi dari rencana, sehingga pemakaian sendiri korporat menjadi lebih tinggi. Selanjutnya, di tahun 2020 diproyeksikan sebesar 858,38 GWh berdasarkan asumsi yang sama dengan asumsi produksi diatas.

The realization of the self-consumption in 2019 was 908.88 GWh with the achievement of 112.09% of the 2019 ABOP target. This achievement was influenced by the operating patterns of PJB's power plants, where Paiton GU operates with a higher capacity factor than planned; therefore, corporate internal use becomes higher. Furthermore, in 2020, it is projected to reach 858.38 GWh in accordance with the same assumptions as to the production assumptions above.

Target, Realisasi dan Proyeksi Pengembangan SDM Targets, Realization, and Projection of HC Development

Terkait dengan pengembangan SDM, terdapat beberapa indikator yaitu HCR, OCR dan biaya pelatihan.

There are several indicators for HC development which are HCR, OCR, and training budget.

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Pengembangan SDM Tahun 2019 serta Proyeksi Tahun 2020

Table of Comparison between Targets and Realization of HC Development in 2019 and Projections for 2020

Uraian Description	Target RKAP 2019 The 2019 ABOP Target	Realisasi 2019 Realization in 2019	Pencapaian Achievement (%)	Proyeksi 2020 Projection for 2020
HCR HCR	4,45	4,45	100,00	4,51
OCR OCR	4,45	4,45	100,00	4,51
Biaya Pelatihan (Rp) Training Budget (Rp)	90.362.238.666	97.666.199.150	108,08	97.706.870.000

Human Capital Readiness (HCR)

Realisasi HCR tahun 2019 sebesar 4,45 dengan pencapaian 100,00% dari target RKAP 2019. Pencapaian ini dipengaruhi oleh tercapainya program pengembangan kompetensi yang telah direncanakan berdasarkan hasil assessment kompetensi dari atasan langsung kepada karyawan. Selain itu, karena konsistensi, perhatian, dan keterlibatan dari Manajemen khususnya Senior Leader dalam mendukung pencapaian kontrak kinerja HCR yaitu tercapainya kinerja proses melalui pencapaian *Maturity Level Index* sesuai target dan tercapainya kinerja hasil atau KPI sesuai target dari PLN. Selanjutnya, di tahun 2020 diproyeksikan sebesar 4,51 berdasarkan asumsi seluruh target MLI, RMI, dan KPI tercapai.

Human Capital Readiness (HCR)

The realization of HCR in 2019 was 4.45 with the achievement of 100.00% of the 2019 ABOP target. This achievement was influenced by the achievement of the planned competency development program in accordance with the results of the competency assessment from direct supervisors to employees. Also, due to the consistency, attention, and involvement of Management, especially Senior Leaders in supporting the achievement of HCR performance contracts, namely the achievement of process performance through the achievement of *Maturity Level Index* according to the target and achievement of performance results or KPI in accordance with PLN's targets. Furthermore, in 2020, it is projected to reach 4.51 in accordance with the assumptions of all MLI, RMI, and KPI targets achieved.

Organizational Capital Readiness (OCR)

Realisasi OCR tahun 2019 sebesar 4,45 dengan pencapaian 100,00% dari target RKAP 2019. Pencapaian ini dipengaruhi oleh peningkatan pembinaan yang dilakukan melalui PGD, Vicon, WAG, dan *Site Visit*. Selain itu, Pemantauan implementasi OCR yang dilakukan melalui *Site Visit*, *Callback*, dan *Assessment*. Selanjutnya, di tahun 2020 diproyeksikan sebesar 4,51 berdasarkan asumsi bahwa fungsi pembinaan, monitoring, dan evaluasi lebih ditingkatkan sehingga seluruh KPI dan MLI dapat tercapai.

Organizational Capital Readiness (OCR)

The realization of OCR in 2019 was 4.45 with the achievement of 100.00% of the 2019 ABOP target. This achievement was influenced by increased coaching conducted through PGD, Vicon, WAG, and *Site Visit*. Also, OCR monitoring is conducted through *Site Visit*, *Callback*, and *Assessment*. Furthermore, in 2020 it is projected to reach 4.51 in accordance with the assumption that the fostering, monitoring, and evaluation functions will be further improved to achieve the KPI and MLI.

Biaya Pelatihan

Realisasi Biaya Pelatihan tahun 2019 sebesar Rp97,66 juta dengan pencapaian 108,08% dari target RKAP 2019. Pencapaian ini salah satunya dipengaruhi oleh kenaikan nilai SPPD berdasarkan SK Nomor 039.P/019/DIR/2019 tentang Perjalanan Dinas Karyawan. Selanjutnya, Biaya Pelatihan pada tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp97,706,870,000 berdasarkan asumsi pemotongan 10% untuk efisiensi penurunan RKAP berdasarkan arahan RUPS 2020.

Training Budget

Realization of Training Budget in 2019 was Rp97.66 million with the achievement of 108.08% of the 2019 ABOP target. One of these achievements was influenced by the increase in SPPD values in accordance with Decree No. 039.P/019/DIR/2019 concerning Employee Business Trips. Furthermore, the Training Budget in 2020 is projected to reach Rp97,706,870,000 in accordance with the assumption of a 10% deduction due to the lower efficiency of the ABOP in accordance with the 2020 GMS Resolution.

KEBIJAKAN DIVIDEN

DIVIDEND POLICY

Kebijakan Pembagian Dividen

Dividend Distribution Policy

Kebijakan Dividen PJB diatur berdasarkan Anggaran Dasar PT Pembangkitan Jawa-Bali Pasal 26 tentang Penggunaan Laba yaitu sebagai berikut:

1. Pembagian dividen diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham,
2. Dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif,
3. Dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu,
4. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan dengan syarat pengambilannya tidak secara sekaligus dan dengan membayar biaya administrasi yang ditetapkan Direksi,
5. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan,
6. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir apabila diminta oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan,
7. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris,
8. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan,
9. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim.

Dividend policy of PJB is regulated in Article 26 of the Articles of Association of PT Pembangkitan Jawa-Bali on the Use of Profit as follows:

1. Distribution of dividends is decided at the General Meeting of Shareholders,
2. Dividends may only be distributed if the Company has positive earning balance,
3. Dividends which are not claimed within 5 (five) years after being declared available for distribution, will be deposited in special reserve funds,
4. Dividends in the special reserved funds can be claimed by Shareholders holding legal proof of their entitlement to the Company's Board of Directors and paying administrative fees on condition that the dividends are not collected all at once,
5. Dividends in special reserved funds which are not claimed within 10 (ten) years will be the rights of the Company,
6. The Company may distribute interim dividends before the Company's fiscal year ends if requested by shareholders representing at least 1/10 (one-tenth) of issued shares after taking into account the projection of profit and the financial capabilities of company,
7. The distribution of interim dividends is established by the Board of Directors decision after obtaining approval from the Board of Commissioners,
8. In the condition that the Company suffers losses at the end of fiscal year, the distributed interim dividends shall be returned by shareholders to the Company,
9. The Board of Directors and Board of Commissioners are jointly and severally responsible for the company's losses in the event that Shareholders fail to return the interim dividends.

Pembagian Dividen

Dividend Distribution

Pembagian Dividen tahun Buku 2018

Dividend Distribution for the 2018 Fiscal Year

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 14 Juni 2019, Pemegang Saham memberi kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan saldo laba, cadangan umum dan tujuan serta dividen atas laba Perusahaan tahun 2018. Berdasarkan surat PT PLN (Persero) Nomor 0899/MNJ.00.01/DIRUT/2019-R tanggal 1 Juli 2019, pembagian dividen untuk tahun buku 2018 ditetapkan sebesar Rp5.904.512 juta atau Rp984 (nilai penuh) per lembar saham.

In accordance with the General Meeting of Shareholders on June 14, 2019, the Shareholders authorized the majority Shareholders to determine the retained earnings, general reserves and goals as well as dividends on the profit of Company in 2018. In accordance with letter of PT PLN (Persero) No. 0899/MNJ.00.01/DIRUT/2019-R dated July 1, 2019, the distribution of dividends for the fiscal year 2018 is set at Rp5,904,512 million or Rp984 (full amount) per share.

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler tanggal 30 Oktober 2019, Pemegang Saham menyetujui pembagian dividen tunai dari saldo laba Perseroan sampai dengan tahun buku 2017 yang tidak ditentukan penggunaannya kepada PLN selaku Pemegang Saham Mayoritas sebesar Rp3.501.956 juta melalui mekanisme *set off* terhadap piutang komponen A Perseroan kepada PT PLN (Persero) yang senilai atau setara dengan 25,8% dari saldo piutang komponen A per 31 Desember 2018.

In accordance with the Resolution of the Circular General Meeting of Shareholders on October 30, 2019, the Shareholders approved the distribution of cash dividends from the retained earnings of Company up to the 2017 financial year which were not determined for used by PLN as the Majority Shareholder of Rp3,501,956 million through the set off mechanism for component A accounts receivable The Company to PT PLN (Persero) which is equal to or equal to 25.8% of the balance of receivables component A as of December 31, 2018.

Pembagian Dividen tahun Buku 2017

Dividend Distribution for the 2017 Fiscal Year

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 15 Agustus 2018, Pemegang Saham memberi kuasa kepada pemegang saham mayoritas untuk menetapkan penggunaan laba bersih Perusahaan tahun 2018. Berdasarkan surat PT PLN (Persero) Nomor 1131/MNJ.00.01/DIRUT/2018-R tanggal 15 Agustus 2018, menetapkan dividen untuk tahun buku 2018 sebesar 100% dari laba bersih Perusahaan atau sebesar Rp3.668.635 juta atau Rp611 per saham dan telah dibayarkan melalui nota piutang tanggal 28 September 2018.

In accordance with the General Meeting of Shareholders on 15 August 2018, the Shareholders authorized the majority shareholders to determine the use of the Company's net income in 2018. Based on the letter of PT PLN (Persero) No. 1131/MNJ.00.01/DIRUT/2018-R dated August 15, 2018, set dividends for the fiscal year 2018 of 100% of the Company's net income or amounting to Rp3,668,635 million or Rp611 per share and have been paid through the receivable memorandum on September 28, 2018.

Tabel Pembagian Dividen

Table of Dividend Distribution

Uraian Description	Tahun Buku 2015 Fiscal Year 2015	Tahun Buku 2016 Fiscal Year 2016	Tahun Buku 2017 Fiscal Year 2017	Tahun Buku 2018 Fiscal Year 2018	
Laba Bersih Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk (Rp juta) Net Income attributable to owner of parent entity (in IDR million)	3.219.630	3.769.300	3.668.635	5.904.512	-
Persentase Dividen (%) Dividend Percentage (%)	90	100	100	100	-
Dividen yang Dibagikan (Rp juta) Distributed Dividend (in IDR million)	2.897.667	3.759.932	3.668.635	5.904.512	3.501.956
Dividen per Lembar (Rp juta) Dividend per share (in IDR million)	483	627	611	984	584
<i>Dividend Pay Out Ratio</i>	90	100	100	100	100
Tanggal Pengumuman Dividen Date of Dividend Announcement	1 Desember 2016 December 1, 2016	13 Juli 2017 July 13, 2017	1 Oktober 2018 October 1, 2018	1 Juli 2019 July 1, 2019	30 Oktober 2019 October 30, 2019
Tanggal Pembayaran Dividen Dividend Payment Date	7 Desember 2016 December 7, 2016	7 Agustus 2017 August 7, 2017	28 September 2018 September 28, 2018	29 November 2019 November 29, 2019	5 Desember 2019 December 5, 2019

KONTRIBUSI KEPADA NEGARA

CONTRIBUTION TO THE STATE

Bentuk komitmen PJB kepada Negara diwujudkan dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan sebagai Wajib Pajak melalui pembayaran PPh Badan dan PPN. Jumlah setoran PPh Badan dan PPN tahun 2019 sebesar Rp1.054.104,57 juta meningkat 24,29% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp848.118,55 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah pembelian material dan penggunaan jasa dari pihak ketiga.

Selain itu, sebagai Pemotong Pajak, Perusahaan secara aktif berperan serta dalam melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan atas pajak-pajak seperti PPh Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi dan sewa bangunan; PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi; dan PPh Pasal 23 atas penghasilan yang diterima wajib pajak badan.

The manifestation of PJB commitment to the State is represented in the Company's obligations fulfillment as Taxpayers through the payment of Income Tax (IT) and Value-added Tax (VAT). Total corporate income tax and VAT in 2019 deposits were Rp1,054,104.57 million increased by 24.29% compared to 2018 that reached Rp848,118.55 million. The increase was mainly due to an increase in the number of material purchases and use of services from third parties.

In addition, as a Tax Withholder, the Company actively participates in deducting, depositing, and reporting on taxes such as Income Tax Article 4 paragraph 2 concerning services on construction and lease of buildings; Income Tax Article 21 concerning income received by individual taxpayers; and Income Tax Article 23 on income received by corporate taxpayers.

Tabel Setoran Pajak (Rp juta)

Table of Tax Payment (in Rp million)

Uraian Description	2017	2018	2019	Naik (Turun) Increase (Decrease) %
PPh Pasal 21 Income Tax Article 21	143.738,95	159.889,95	197.904,86	23,78
PPh Pasal 23 Income Tax Article 23	53.236,93	58.997,98	71.469,31	21,14
PPh Pasal 4 ayat 2 Income Tax Article 4 (2)	6.395,95	22.974,80	60.960,03	165,33
PPh Pasal 15 Income Tax Article 15	57,09	459,06	501,89	9,33
PPh Pasal 22 Income Tax Article 22	43.006,60	66.814,34	85.175,60	27,48
PPh Pasal 25 Income Tax Article 25	-	-	-	-
PPh Pasal 26 Income Tax Article 26	624,61	1.607,81	2.560,08	59,23
PPh Badan Corporate Income Tax	-	-	-	-
PBB Land and Building Tax	2.291,72	8.720	9.970,63	14,34
PPN Masukan Input VAT	433.280,44	528.654,59	625.562,17	18,33
Jumlah Setoran Pajak Total Tax Payment	682.632,29	848.118,55	1.054.104,57	24,29

Pajak yang dipungut oleh pihak lain sampai dengan akhir tahun 2019 sebesar Rp250.179,07 juta meningkat 0,21% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp249.661,68 juta yang terdiri dari:

Taxes deducted by other parties until the end of 2019 reached Rp250,179.07 million, an increase of 0.21% compared to 2018 which reached Rp249,661.68 million consisting of the following:

Tabel Setoran Pajak (Rp juta)

Revenues Deducted by Other Parties (in Rp Million)

Uraian Description	2017	2018	2019	Naik (Turun) Increase (Decrease) %
PPh Pasal 22 Income Tax Article 22	48.029,72	236.358,42	207.768,45	(12,10)
PPh Pasal 23 Income Tax Article 23	15.537,40	13.303,26	42.410,62	218,80
Jumlah Pungutan Pajak Total Tax Deducted	63.567,11	249.661,68	250.179,07	0,21

Bentuk kontribusi lain PJB kepada Negara secara tidak langsung yaitu pada tahun 2019 telah menyumbang dividen kepada PT PLN (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pembahasan mengenai pembagian dividen telah dijelaskan di sub-bab sebelumnya yaitu bagian Kebijakan Dividen.

Another manifestation of indirect contributions of PJB to the State in 2019 was the contribution in dividends to PT PLN (Persero) as a State-Owned Enterprise (BUMN). The discussion on dividend distribution has explained in the previous sub-section, which is Dividend Policy sub-section.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN MANAJEMEN EMPLOYEE AND MANAGEMENT STOCK OPTION PROGRAM

Sampai dengan 31 Desember 2019, PJB tidak memiliki program kepemilikan saham oleh karyawan atau *Employee Stock Option Program* (ESOP) dan kepemilikan saham oleh manajemen atau *Management Stock Option Program* (MSOP). Sehingga tidak ada informasi terkait jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya, jangka waktu, persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak serta harga *exercise*.

As of December 31, 2019, PJB did not have Employee Stock Option Program (ESOP) and Management Stock Option Program (MSOP). Therefore, there is no information regarding the number of ESOP/MSOP shares and their realization, the period of time, the requirements of eligible employees and/or management and exercise prices.

REALISASI DANA PENAWARAN UMUM REALIZATION OF PUBLIC OFFERING PROCEEDS

Sampai dengan 31 Desember 2019, PJB bukan merupakan perusahaan *go-public* (perusahaan terbuka) dan belum melakukan penawaran umum, sehingga tidak ada informasi mengenai total perolehan dana, rencana penggunaan dana, rincian penggunaan dana, saldo dana, maupun tanggal persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana.

As of December 31, 2019, PJB is a non-listed company and has not conducted any public offering; therefore, there is no information regarding the total funds received, realization plan, details of fund usage, fund balance, and the date of the GMS approval concerning changes in the proceeds realization.



INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI/BERELASI

INFORMATION OF MATERIAL TRANSACTIONS RELATED TO CONFLICT OF INTEREST OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATED/RELATED PARTIES

Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan Material Transactions Containing Conflict of Interest

Sampai dengan 31 Desember 2019, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

As of December 31, 2019, there were no transactions containing conflicts of interest.

Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Berelasi Transactions with Affiliated/Related Parties

Pihak-Pihak Berelasi Related Parties

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan dan entitas anak (entitas pelapor):

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor,
 - ii. Memiliki pengaruh signifikan atas pelapor atau entitas pelapor, atau
 - iii. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain),
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura Bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya),
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama,
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga,
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor,

Related party is a person or an entity related to the Company and subsidiaries (reporting entity):

- a. A person or family member is affiliated with the reporting entity if the person:
 - i. Having any control or joint control over the reporting entity;
 - ii. Having a significant influence over reporting entity; or
 - iii. A personnel of key management in the reporting entity or its parent company
- b. An entity is affiliated with reporting entity if fulfilling following conditions:
 - i. The entity and reporting entity are members of an identical business group (including parent entity, subsidiary, and sub-subsidiary entity affiliated with other entities),
 - ii. One entity is an associated entity or joint venture for other entities (or associated entity or joint venture as member of a business entity where the other entities are the members),
 - iii. Both entities are joint ventures under the same third parties,
 - iv. One entity is a joint venture of third entity while another entity is associated entity of the third entity,
 - v. The entity is a post-employment benefit program of a reporting entity or related entity with the reporting entity. If the reporting entity is the entity holds the program, the sponsoring entity is also related to the reporting entity,

- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a),
- vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas),
- viii. Entitas atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

- vi. An entity that is controlled or jointly controlled with a person identified in point (a),
- vii. The person identified in point (a) (i), has a significant impact on entity or member of key management of the entity (or parent company of the entity),
- viii. An entity or member of a group where the entity is a part of the group, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent company of the reporting entity.

Sifat Hubungan Pihak Berelasi

Nature of Related Party Relationship

Dalam kegiatan usahanya, PJB melakukan transaksi tertentu dengan pihak hubungan berelasi. Berikut adalah penjelasan mengenai sifat hubungan berelasi yang dimiliki oleh PJB:

- a. Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang saham PT PLN (Persero) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- b. PT PLN (Persero) dan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) merupakan pemegang saham Perusahaan;
- c. PT Sumber Segara Primadaya (S2P), PT Bajradaya Sentranusa (BDSN), PT Bukit Pembangkit Innovative (BPI), PT Komipo Pembangkitan Jawa-Bali (KPJB), PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa-Bali (SGPJB) dan PT Guohua Taidian Pembangkitan Jawa-Bali (GTPJB) merupakan entitas asosiasi dan ventura bersama;
- d. PT Indonesia Power, PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PLN Batam), PT Pengembang Listrik Nasional Geothermal (PLN Geothermal), PT PLN Batubara, PT Indonesia Comnets Plus dan PT Haleyora Power merupakan perusahaan yang pemegang sahamnya sama dengan pemegang saham utama Perusahaan dan atau sebagian pengurusnya sama dengan Perusahaan;
- e. Dewan Komisaris dan Direksi merupakan personil manajemen kunci Perusahaan dan entitas anak.

In the business activity, PJB performs particular transaction with related parties. Explanation on the nature of PJB's related parties is as follows:

- a. Government of the Republic of Indonesia is the Shareholder of PT PLN (Persero) and State-Owned Enterprises (SOE).
- b. PT PLN (Persero) and Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) are the Shareholders of the Company.
- c. PT Sumber Segara Primadaya, PT Bajradaya Sentranusa, PT Bukit Pembangkit Innovative, PT Komipo Pembangkitan JawaBali, PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa-Bali, and PT Guohua Taidian Pembangkitan Jawa-Bali are the Company's associate and joint ventures.
- d. PT Indonesia Power, PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PLN Batam), PT Pengembang Listrik Nasional Geothermal (PLN Geothermal), PT PLN Batubara, PT Indonesia Comnets Plus, and PT Haleyora Power are companies whose Shareholders are the same as the Company's Major Shareholders and or the management is partly the same as the Company;
- e. Board of Commissioners and Board of Directors are the key management personnel of the Company and its subsidiaries.

Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Perusahaan:

The following is a list of related parties that have transactions with the Company:

No.	Pihak Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Sifat Transaksi Nature of Transaction
1	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Pemegang saham Perusahaan The Company's Shareholder	Transaksi pembelian tenaga listrik Electricity purchase transaction
2	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan A State-Owned Enterprise owned by the Ministry of Finance	Penempatan rekening bank dan deposito berjangka Bank account placements and time deposits
3	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan A State-Owned Enterprise owned by the Ministry of Finance	Penempatan rekening bank dan deposito berjangka Bank account placements and time deposits
4	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan A State-Owned Enterprise owned by the Ministry of Finance	Penempatan rekening bank dan deposito berjangka Bank account placements and time deposits

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Berelasi

Information of Material Transactions Related to Conflict of Interest or Transactions with Affiliated/Related Parties

No.	Pihak Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Sifat Transaksi Nature of Transaction
5	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan A State-Owned Enterprise owned by the Ministry of Finance	Penempatan rekening bank Bank account placement
6	PT Pertamina (Persero)	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan A State-Owned Enterprise owned by the Ministry of Finance	Transaksi pembelian bahan bakar dan minyak Transactions of fuel and oil purchase
7	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan A State-Owned Enterprise owned by the Ministry of Finance	Transaksi pembelian bahan bakar dan minyak Transactions of fuel and oil purchase
8	PT Nusantara Regas	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan A State-Owned Enterprise owned by the Ministry of Finance	Transaksi pembelian gas untuk IP dan PJB Transactions of gas purchase for IP and PJB
9	PT Asuransi Jasa Indonesia	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan A State-Owned Enterprise owned by the Ministry of Finance	Asuransi bangunan, instalasi dan mesin pembangkit dan peralatan transmisi milik Perusahaan Insurance for buildings, installations, power plant machineries, and transmission equipment owned by the Company
10	Perum Jasa Tirta	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan A State-Owned Enterprise owned by the Ministry of Finance	Transaksi pengelolaan sumber daya air Transaction of Water Management

Kewajaran Transaksi Transaction Fairness

Seluruh transaksi dengan pihak berelasi telah sesuai dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati kedua belah pihak, sehingga Perseroan menganggap bahwa semua transaksi masih dalam batas wajar sesuai dengan PSAK No.7 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. Hal ini mengindikasikan bahwa Perusahaan telah melakukan transaksi dengan pihak yang berelasi secara wajar.

All of the related party transactions already in accordance with the policies and requirements agreed by both parties; therefore, the Company considers that all transactions are within fair limit according to SFAS No. 7 on Related Parties Disclosure. It indicates that the Company has fairly performed transaction with related parties.

Alasan Dilakukannya Transaksi Transaction Purposes

Transaksi afiliasi dilakukan berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan profesional yang menguntungkan kedua belah pihak.

Affiliated transactions are implemented in accordance with the principle of mutual need or reciprocal business and professionalism beneficial both parties.

Nilai Transaksi dengan Pihak Berelasi Transactions with Related Parties

Berikut adalah saldo dan transaksi dengan pihak berelasi tahun 2018 dan 2019 (persentase yang diuraikan di tabel berikut merupakan persentase terhadap jumlah aset/ liabilitas/ pendapatan/beban yang bersangkutan):

The following are the balances and transactions with related parties in 2018 and 2019 (the percentage described in the following table represents the percentage of the total assets/ liabilities/revenues/expenses):



Tabel Nilai Transaksi dengan Pihak Berelasi (Rp juta)

Table of Related Parties Transactions (in Rp million)

Jenis Transaksi Type of Transaction	Pihak Yang Bertransaksi Related Parties	2018		2019	
		Rp juta Rp million	%*	Rp juta Rp million	%*
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalent	BNi	419.255	0,24	568.195	0,33
	Bank Mandiri	843.254	0,48	528.794	0,31
	BRI	300.324	0,17	527.319	0,30
	BTN	-	-	-	-
	Sub Jumlah Subtotal	1.562.833	0,89	1.624.308	0,61
Deposito jangka panjang Time Deposit	Bank Rakyat Indonesia	-	-	655.271	0,38
Deposito Berjangka Time Deposit	BRI	1.184.511	0,68	293.000	0,17
	Dibatasi penggunaannya	-	-		
	Bank Mandiri	20.000	0,01	20.000	0,01
	BNi	-	-	13.901	0,01
	Sub Jumlah Subtotal	1.204.511	0,69	326.901	0,19
Piutang Usaha Trade Receivables	PLN	20.065.224	11,51	22.073.022	12,74
	IP	37.575	0,02	38.158	0,02
	Sub Jumlah Subtotal	20.102.799	11,53	22.111.180	12,76
Utang Lain-lain Tidak Lancar Other Receivable Non-Current	PT Komipo Pembangkit Jawa Bali	5.582	0,00	-	-
	PT Shenhua Guohua PJB	822.375	0,47	785.639	0,45
	Sub Jumlah Subtotal	827.957	0,47	785.639	0,45
Utang Usaha Other Payables	PT Nusantara Regas	463.175	6,27	423.998	5,07
	PT Pertamina (Persero)	760.677	10,30	479.320	4,49
	PGN	219.300	2,97	289.166	3,06
	Perum Jasa Tirta	71.533	0,97	56.379	0,60
	PLN	25.812	0,35	41.146	0,44
	Sub Jumlah Subtotal	1.592.915	21,57	1.290.009	13,64
Utang Lain-lain Other Payables	PLN	17.751	0,24	9.887	0,10
	PT Indonesia Comnet Plus	8.094	0,11	6.868	0,07
	PT Haleyora Power			4.647	0,05
	PT Indonesia Power	682	0,01	3.835	0,04
	Sub Jumlah Subtotal	26.527	0,36	25.237	0,27
Penjualan Tenaga Listrik Electricity Sales	PLN	34.757.316	85,15	33.681.317	84,72
	Sub Jumlah Subtotal	34.757.316	85,15	33.681.317	84,72

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Berelasi

Information of Material Transactions Related to Conflict of Interest or Transactions with Affiliated/Related Parties

Jenis Transaksi Type of Transaction	Pihak Yang Bertransaksi Related Parties	2018		2019	
		Rp juta Rp million	%*	Rp juta Rp million	%*
Pendapatan Usaha Lainnya Other Operating Revenues	PLN	5.701.540	13,97	5.678.466	14,28
	PT Indonesia Power	165.925	0,41	261.156	0,66
	PT Bukit Pembangkit Innovative	-	-	-	-
	PT Bajradaya Sentranusa	-	-	-	-
	PT Sumber Segara Primadaya	-	-	-	-
	Sub Jumlah Subtotal	5.867.465	14,38	5.939.622	14,94
Pembelian Bahan Bakar dan Pelumas Fuel and Lubricants Purchasing	PT Pertamina (Persero)	5.734.568	16,70	5.697.142	18,34
	PT Perusahaan Gas Negara (Persero)	2.331.901	6,79	4.154.323	13,37
	PT Nusantara Regas	4.437.172	12,92	1.845.031	5,94
	Perum Jasa Tirta	178.927	0,52	141.803	0,46
	PT PLN Batubara	611.125	1,78	711.240	2,29
	Sub Jumlah Subtotal	13,293,693	38,71	12.549.539	40,39
Beban Usaha Operating Expenses	PT Haleyora Power	17.663	0,05	18.704	0,06
	PT Indonesia Comnet Plus	10.609	0,03	11.057	0,04
	PT PLN Enjiniring			2.167	0,01
	PT PLN Tarakan			480	0,00
	Sub Jumlah Subtotal	28.272	0,08	32.408	0,11
Beban Usaha Lain-lain Other Operating Expenses	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	70.633	0,21	88.878	0,29
	Sub Jumlah Subtotal	70.633	0,21	88.878	0,29

* persentase terhadap jumlah aset/liabilitas/pendapatan/beban yang bersangkutan
percentage of the total assets/liabilities/revenues/expenses

Jumlah kompensasi Dewan Komisaris Perusahaan tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebesar Rp12.744 juta dan Rp9.648 juta. Sedangkan kompensasi Direksi Perusahaan tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebesar Rp20.607 juta dan Rp18.810 juta. Seluruh kompensasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan merupakan imbalan kerja jangka pendek.

Total compensation of the Company's Board of Commissioners in 2018 and 2019 amounted to Rp12,744 million and Rp9,648 million, respectively. While compensation for the Company's Directors in 2018 and 2019 amounted to Rp20,607 million and Rp18,810 million, respectively. All compensation to the Company's Board of Commissioners and Directors is a short-term employee benefit.

Kebijakan Perusahaan terkait dengan tentang Mekanisme Review atas Transaksi Policies Related to Review Mechanism of Transactions

Mekanisme *review* atas transaksi dengan pihak berelasi melalui proses audit baik yang dilakukan oleh auditor internal maupun auditor eksternal. Sebagai upaya untuk memastikan tingkat kewajaran transaksi dan kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, laporan transaksi afiliasi di atas telah diaudit oleh Auditor.

Review of transaction mechanism with related parties is conducted through an audit process both by internal auditor and external auditor. As an effort to ensure the level of transaction fairness and conformity with accounting standard that is generally applied in Indonesia, the report of affiliated transactions presented above has been audited by the Auditor.

INFORMASI MATERIAL INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, AKUISISI, DAN RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

MATERIAL INFORMATION ON INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, ACQUISITION, AND DEBT/CAPITAL RESTRUCTURING

Investasi Investment

Pada tahun 2019, PJB melakukan tiga bentuk investasi yaitu investasi pada kinerja unit dan pengembangan usaha, investasi pada entitas asosiasi/ventura bersama, dan investasi penyertaan saham pada entitas anak. Jenis mata uang yang digunakan adalah dalam mata uang Rupiah. Sumber dana investasi merupakan alokasi dana internal perusahaan/Anggaran RKAP tahun 2019.

In 2019, PJB performed three types of investments, including investment with unit performance and business development, and investment with subsidiaries/joint ventures. The type of currency used is in Rupiah. The source of investment funds is the company's internal fund allocation/ABOP in 2019.

Investasi pada Penguatan Pembangkit dan Pengembangan Usaha Investment on Power Plant Enhancement and Business Development

Investasi penguatan pembangkit pada tahun 2019 adalah sebesar Rp1.028.162,48 juta atau 163,87% bila dibandingkan realisasi tahun 2018 sebesar Rp627.847,05 juta. Bila dibandingkan dengan RKAP 2019, pencapaiannya sebesar 91,29%. Hal ini disebabkan adanya efisiensi pembayaran atas program LTPSA HGPP PLTGU Blok 3 & 4 UP Muara Tawar, serta LTPSA HGPP PLTGU Blok 1-3 UP Gresik.

Investment to strengthen the power plant in 2019 is Rp1,028,162.48 million or 163.87% compared to the realization in 2018 of Rp627,847.05 million. When compared with the 2019 ABOP, the achievement was 91.29%. This is due to the payment efficiency of the CCPP LTPSA HGPP of Block 3 & 4 program, and CCPP LTPSA HGPP of Block 1-3 Gresik GU.

Investasi untuk program pengembangan usaha pada tahun 2019 adalah sebesar Rp1.861.327,77 juta atau 74,82% bila dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp2.487.832,97 juta. Bila dibandingkan dengan RKAP 2019, pencapaiannya sebesar 90,68%. Hal ini disebabkan oleh target anggaran kas investasi (AKI) Add On Muara Tawar terbayar Rp1,7 triliun dari target Rp1,8 triliun dan Target AKI PLTU Sumbagsel terbayar Rp26,4 miliar dari target Rp67,5 miliar.

Investment in the business development program in 2019 amounted to Rp1,861,327.77 million or 74.82% compared to 2018 amounting to Rp2,487,832.97 million. When compared with the 2019 ABOP, the achievement was 90.68%. This was due to the Add On Muara Tawar investment cash (AKI) budget target paid of Rp1.7 trillion from the Rp1.8 trillion target and the Southern Sumatera CFPP AKI Target paid Rp26.4 billion from the target of Rp67.5 billion.



Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan Audit
Audited Financial Statements



Referensi Kriteria AR
ARA Criteria Reference

Investasi pada Entitas Asosiasi/Ventura Bersama

Investment in Associated Entities/Joint Ventures

PJB melakukan investasi pada enam perusahaan ventura bersama dan satu entitas asosiasi:

PJB invests in 6 joint ventures and 1 associated entities as follows:

Tabel Investasi pada Entitas Asosiasi/Ventura Bersama

Table of Investment in Associated Entities/Joint Ventures

Perusahaan Company	Domisili Domicile	Jenis Usaha Business Line	Tahun Operasi Year	% Penyertaan % of Ownership	
				2018	2019
Entitas Asosiasi Associated Entities					
PT Sumber Segara Primadaya (SSP)	Cilacap	Pembangkit Listrik Power Plant	2006	49,00	49,00
Ventura Bersama Joint Ventures					
PT Bajradaya Sentranusa (BDSN)	Asahan	Pembangkit Listrik Power Plant	2011	36,61	36,61
PT Bukit Pembangkit Innovative (BPI)	Palembang	Pembangkit Listrik Power Plant	2015	37,25	29,15
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali (KPJB)	Jepara	Operasi dan Pemeliharaan Operation and Maintenance	2010	49,00	49,00
PT Rekindaya Mamuju (RDM)	Jakarta	Pembangkit Listrik Power Plant	2018	10,00	10,00
PT Shenhua Gouhua Pembangkitan Jawa-Bali	Jakarta	Pembangkit Listrik Power Plant	*)	30,00	30,00
PT Guohua Taidian Pembangkitan Jawa-Bali	Jakarta	Operasi dan Pemeliharaan Operation and Maintenance	*)	30,00	30,00
PT North Sumatera Hydro Energy	Jakarta	Pembangkit Listrik Power Plant	*)	25,00	25,00
PT Sumbagselenergi Sakti Pewali	Jakarta	Pembangkit Listrik Power Plant	*)	10,00	10,00

*) dalam tahap pengembangan
in development stage

Investasi Penyertaan Saham pada Entitas Anak

Share Investment in Subsidiaries

Perusahaan memiliki saham entitas anak baik langsung maupun tidak langsung sebagai berikut:

The Company owns shares of the subsidiaries both directly and indirectly, as follows:

Tabel Investasi Penyertaan Saham pada Entitas Anak

Table of Share Investment in Subsidiaries:

Perusahaan Company	Domisili Domicile	Jenis Usaha Business Line	% Penyertaan % of Ownership	
			2018	2019
PT Pembangkitan Jawa-Bali Services (PJBS)	Surabaya	Jasa Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik dan Pembangunan (Pemasangan) Peralatan Ketenagalistrikan Operations & Maintenance Service of Power Plant and Construction (Installation) of Electrical Equipment	98,00	98,00
PT Mitra Karya Prima (MKP)*	Surabaya	Penyediaan SDM untuk O&M HC Provision for O&M	92,00	92,00
PT Sertifikasi Kompetensi Pembangkit Tenaga Listrik (SKP)*	Jakarta	Sertifikasi kompetensi SDM bidang ketenagalistrikan HR competency certification in the electricity sector	95,00	95,00

Perusahaan Company	Domisili Domicile	Jenis Usaha Business Line	% Penyertaan % of Ownership	
			2018	2019
PT Rekadaya ElektriKA (RE) dan entitas anak	Jakarta	Enjinering, Pengadaan dan Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan Sektor Ketenagalistrikan Engineering, Procurement, and Construction, as well as Operations and Maintenance in Electricity Sector	92,00	98,91
PT Rekadaya ElektriKA Consult (REC) *	Jakarta	Jasa konsultansi bidang teknik, disain, manajemen SDM, studi perencanaan dan konstruksi Consultancy services in engineering, design, HC management, planning and construction studies	99,80	99,80
PT Navigat Innovative Indonesia (NII)	Palembang	Investasi pada pembangkit <i>Independent Power</i> Investment in Independent Power plants	72,97	72,98
PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJB Investasi)	Jakarta	Investasi Ketenagalistrikan Electricity Investment	100,00	99,99
PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang (PLNSC)	Jakarta	Penyediaan suku cadang pembangkit Provision of generator spare parts	51,00	51,00

* kepemilikan saham tidak langsung
Indirect shares ownership

Ekspansi Expansion

Pada tahun 2019, PJB tidak melakukan aktivitas ekspansi, sehingga tidak terdapat informasi terkait tujuan dan nilai transaksi.

PJB did not undertake any expansion activity in 2019, so that there is no information regarding its purpose and value of the transactions.

Divestasi Divestment

Pada tahun 2019, PJB tidak melakukan aktivitas divestasi, sehingga tidak terdapat informasi terkait tujuan dan nilai transaksi.

PJB did not undertake any divestment activity in 2019, so that there is no information regarding the purpose and value of the transaction.

Akuisisi Acquisition

Pada tahun 2019, PJB tidak melakukan aktivitas akuisisi perusahaan, sehingga tidak terdapat informasi terkait tujuan dan nilai transaksi.

PJB did not undertake any acquisition activity in 2019, so that there is no information regarding its purpose and value of the transactions.

Restrukturisasi Utang/Modal Debt/Capital Restructuring

Pada tahun 2019, PJB tidak melakukan restrukturisasi baik utang maupun modal. sehingga tidak terdapat informasi terkait hal tersebut.

PJB did not undertake any debt/capital restructuring activity in 2019, so that there is no information regarding its purpose and value of the transactions.



Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan Audit
Audited Financial Statements



Referensi Kriteria ARA
ARA Criteria Reference

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

CHANGES IN ACCOUNTING POLICY

Alasan Perubahan Kebijakan Akuntansi

Reason of Changes in Accounting Policy

Kebijakan akuntansi perusahaan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Perusahaan melakukan *review* berkelanjutan kebijakan akuntansi terhadap perkembangan revisi Standar Akuntansi Keuangan yang relevan dengan perusahaan. Berikut adalah penerapan standar akuntansi keuangan baru dan revisi (PSAK) dan interpretasi standar akuntansi keuangan (ISAK) yang berlaku efektif tahun 2019, dan standar yang telah diterbitkan tetapi belum diterapkan.

Accounting policy of Company is arranged in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia. The Company continuously reviews accounting policy towards the development of revisions of FAS that are relevant to the Company. The followings are the implementation of the new financial accounting standards and its revision as well as the interpretation of FAS (ISFAS) that is effectively applied in 2019, and standards that have been issued, but not yet implemented.

Uraian Perubahan Kebijakan Akuntansi

Description of Changes in Accounting Policy

Standar Akuntansi Berlaku Efektif Tahun 2019

Accounting Standards Effective in 2019

Dalam tahun berjalan, Perusahaan dan entitas anak telah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baru dan revisi serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019.

In the current year, the Company and its Subsidiaries implemented the new and the revision of Statements of Financial Accounting Standard (SFAS), as well as the Statements Interpretation of Financial Accounting Standard (ISFAS) issued by the Financial Accounting Standard of Board of the Indonesian Institute of Accounting ("DSAK-IAI"), relevant to its operations and effective for the accounting period started on January 1st, 2019.

Penerapan dari standar akuntansi berikut oleh Perusahaan, yang berlaku efektif 1 Januari 2019, menyebabkan perubahan signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Perusahaan:

- PSAK 22 (Penyesuaian 2018): Kombinasi Bisnis;
- PSAK 24 (Amandemen 2018): Imbalan Kerja tentang Amandemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program;
- PSAK 26 (Penyesuaian 2018): Biaya Pinjaman;
- PSAK 46 (Penyesuaian 2018): Pajak Penghasilan;
- PSAK 66 (Penyesuaian 2018): Pengaturan Bersama;
- ISAK 33: Transaksi Valuta Asing dan Imbalan Dimuka;
- ISAK 34: Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan.

The implementation of the following accounting standards by the Company, effective from January 1st, 2019, resulting significant changes in the consolidated financial statements of Company:

- SFAS 22 (Improvement 2018): Business Combination;
- SFAS 24 (Amandemen 2018): Employee Benefits regarding Plan Amendment, Curtailment or Settlement;
- SFAS 26 (Improvement 2018): Borrowing Cost;
- SFAS 46 (Improvement 2018): Income Tax;
- SFAS 66 (Improvement 2018): Joint Arrangement;
- ISFAS 33: Foreign Currency Transactions and Advance Consideration;
- ISFAS 34: Uncertainty Over Income Tax Treatments

Dampak atas Penerapan Standar Akuntansi Berlaku Efektif Tahun 2019

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak memiliki dampak kuantitatif yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

Impact on the Accounting Standards Implementation Effective in 2019

The implementation of the above standards had no significant effect on the amounts reported for the current period or prior financial year.



Standar dan Interpretasi telah Diterbitkan tetapi Belum Diterapkan Issued Standards and Interpretations But Not Yet Effective

Sejumlah amandemen terhadap standar dan interpretasi akan efektif untuk periode tahunan yang dimulai pada 1 Januari 2020 dan belum diaplikasikan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini.

Pada saat penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan dan entitas anak masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan konsolidasian Perusahaan.

- PSAK 15 (Amandemen 2017): Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama;
- PSAK 62 (Amandemen 2017): Kontrak Asuransi - Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi;
- PSAK 71: Instrumen Keuangan;
- PSAK 71 (Amandemen 2018): Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif;
- PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan;
- PSAK 73: Sewa;
- PSAK 1 (Amendemen 2019): Penyajian Laporan Keuangan tentang Judul Laporan Keuangan;
- PSAK 1 (Penyesuaian Tahunan 2019): Penyajian Laporan Keuangan;

Standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 112: Akuntansi Wakaf

Potensi Dampak atas Standar dan Interpretasi yang telah Diterbitkan tetapi Belum Diterapkan

Pada saat penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan dan entitas anak masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amandemen standar, dan interpretasi atas standar serta pengaruhnya pada laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak.

A number of amendments to the standards and interpretations will be effective for the annual period started on January 1st, 2020 and has not been applied yet in the arrangement of this consolidated financial statement.

In the issuance of consolidated financial statements, the Company and its Subsidiaries are still evaluating the potential impacts from the implementation of new standards and the revisions, as well as its impacts on the Company's consolidated financial statements.

- SFAS 15 (Amandemen 2017): Investments in Associates and Joint Ventures: Long-term Interest in Associate and Joint Ventures;
- SFAS 62 (Amandemen 2017): Insurance Contract - Applying SFAS 71: Financial Instruments with SFAS 62: Insurance Contracts;
- SFAS 71: Financial Instruments;
- SFAS 71 (Amandemen 2018): Financial Instruments: Prepayment Features with Negative Compensation;
- SFAS 72: Revenue from Contracts with Customers;
- SFAS 73: Leases;
- SFAS 1 (Amendemen 2019): Presentation of Financial Statements regarding Title of Financial Statements;
- SFAS 1 (Annual Improvement 2019): Presentation of Financial Statements;

The following standard effective for periods beginning on or after January 1, 2021, with early application is permitted are:

- SFAS 112: Wakaf Accounting

Potential Impacts on Standards and Interpretations Published but Not Yet Implemented

At the consolidated financial statements issuance, the Company and subsidiaries are still evaluating the impacts that may arise from the standards implementation, amendments to standards, and interpretations of the standards and their impacts on the consolidated financial statements of the Company and subsidiaries.

PERUBAHAN PERATURAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUSAHAAN

CHANGES IN THE REGULATIONS AND THE IMPACTS ON THE COMPANY

Berikut beberapa perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku efektif pada tahun 2019 dan dampaknya terhadap kinerja PJB:

Following are some changes to the laws and regulations effective in 2019 and the impacts on the performance of PJB:

Tabel Perubahan Peraturan Perundang-undangan dan Dampaknya terhadap Perusahaan
Table of Changes in Regulations and Impacts on the Company

No.	Peraturan Regulations	Keterangan Perubahan Changes Description	Dampaknya Terhadap PJB secara Kualitatif dan/atau Kuantitatif Impacts on PJB Qualitatively and / or Quantitatively
1.	Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal Minister of Environment and Forestry Regulation (Permen) No. 15 Year 2019 concerning Emission Quality Standards for Thermal Power Plants	Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Termal dengan bahan bakar batubara wajib : 1. Memasang CEMS dan memenuhi ketentuan Baku Mutu Emisi untuk parameter Merkuri (Hg) dan Karbondioksida (CO ₂), paling lambat 3 tahun sejak Permen ini berlaku. 2. Mengintegrasikan hasil pemantauan secara elektronik melalui daring system pelaporan emisi secara terus menerus paling lambat 2 tahun sejak Permen ini berlaku. The parties responsible for a business and / or activity operated a Thermal Power Plant with coal fuel obliged to: 1. Installing CEMS and meeting Emission Quality Standards for Mercury (Hg) and Carbon Dioxide (CO ₂) parameters, no later than 3 years from this Ministerial Regulation applies. 2. Integrating the electronic monitoring results through an online emissions reporting system continuously no later than 2 years from this Ministerial Regulation applies.	PJB selaku Perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang Pembangkit Listrik Tenaga Termal wajib melakukan pemantauan emisi dan membuat laporan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. PJB as a company running Thermal Power Plants activities is required to monitor emissions and make reports according to the provisions in the Regulation of the Minister of Environment and Forestry.
2.	Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan	Membahas mengenai ketentuan dalam industri KBL berbasis Baterai dan/atau perusahaan industri komponen KBL Berbasis Baterai. 1. Perpres ini mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh industri KBL Berbasis Baterai dan/atau perusahaan industri komponen KBL Berbasis Baterai dalam melakukan kegiatan industri KBL Berbasis Baterai dan/atau industri komponen KBL antara lain: a. perusahaan didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan memiliki izin usaha industri untuk merakit atau memproduksi KBL Berbasis Baterai. b. Wajib membangun fasilitas manufaktur KBL Berbasis Baterai di dalam negeri. c. Wajib mendukung dan melakukan kerja sama dengan industri KBL Berbasis Baterai dalam negeri. d. Wajib mengutamakan penggunaan TKDN dengan tingkat penggunaan TKDN sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Perpres ini. 2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan insentif berupa fiskal dan insentif nonfiskal untuk mempercepat program KBL Berbasis Baterai untuk transportasi jalan. 3. Untuk pertama kali penyediaan insfrastruktur pengisian listrik untuk KBL Berbasis Baterai dilaksanakan melalui penugasan kepada PT PLN (Persero). 4. Tarif Tenaga listrik yang diberlakukan pada pengisian listrik untuk KBL Berbasis Baterai ditetapkan oleh Menteri ESDM	1. Terdapat peluang bisnis bagi PJB untuk mengikuti percepatan program KBL berbasis Baterai baik dalam industri KBL Berbasis Baterai maupun industri komponen KBL Berbasis Baterai mengingat peluang bisnis tersebut terbuka untuk BUMN dan/atau Badan usaha lainnya; 2. PJB juga berpeluang mendukung PLN dalam melaksanakan penugasan penyedia infrastruktur pengisian listrik untuk KBL Berbasis Baterai; 3. Dalam hal PJB akan membangun infrastruktur pengisian listrik (instalasi listrik privat dan/atau SPKLU maka PJB wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Peraturan Regulations	Keterangan Perubahan Changes Description	Dampaknya Terhadap PJB secara Kualitatif dan/atau Kuantitatif Impacts on PJB Qualitatively and / or Quantitatively
	Presidential Regulation (Perpres) No. 55 of 2019 concerning the Acceleration of the Battery-Based Electric Motor Vehicle Program for Road Transportation	Discussing the provisions in the Battery-Based KBL industry and / or Battery-Based KBL component industry companies. 1. This Presidential Regulation regulates the provisions that must be met by the Battery-Based KBL industry and / or Battery Based KBL component industry companies in performing Battery-Based KBL industry activities and / or KBL component industries including: a. the company established under Indonesian law and has an industrial business license to assemble or produce Battery Based KBL. b. Obligated to build a battery-based KBL manufacturing facility in the country. c. Obligated to support and collaborate with the domestic Battery-Based KBL industry. d. Obligated to prioritize the Domestic Component Level usage with the Domestic Component Level usage level as regulated in Article 8 of this Presidential Regulation. 2. Central Government and Regional Government provide fiscal and non-fiscal incentives to accelerate the Battery-Based KBL program for road transport. 3. For the first time the provision of electricity charging infrastructure for the Battery-Based KBL was implemented through an assignment to PT PLN (Persero). 4. Electricity tariffs applied on charging electricity for KBL Battery-based set by the Minister of Energy and Mineral Resources.	1. There is a business opportunity for PJB to follow the acceleration of the Battery-Based KBL program both in the Battery-Based industry and Battery-Based KBL component industry considering that the business opportunity is open to SOEs and / or other business entities; 2. PJB also has the opportunity to support PLN in performing the assignment of electricity charging infrastructure providers for Battery-Based KBL; 3. In the event that the PJB will build electricity charging infrastructure (private electricity installations and / or Public Electric Vehicle Charging Station), then PJB must meet the electricity safety provisions in accordance with the regulations provisions.
3.	Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat KPPU Regulation No. 1 of 2019 concerning Procedures for Handling Cases of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition	Membahas mengenai tata cara penanganan perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 1. KPPU telah memperbaharui regulasi mengenai tata cara penanganan perkara guna meningkatkan transparansi, keadilan dan kepastian hukum dalam proses penanganan perkara sesuai dengan prinsip-prinsip hukum secara yang baik sesuai perundang-undangan 2. Peraturan ini mengatur mengenai Sumber Perkara Penyelidikan, Sidang Majelis Komisi, Alat Bukti, Putusan Komisi dan Upaya Hukum dalam perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 3. Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan KKPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Discussing the procedures for handling cases of monopolistic practices and unfair business competition. 1. KPPU has updated regulations regarding the procedure for handling cases in order to increase transparency, justice and legal certainty in the handling cases process in accordance with legal principles in accordance with the laws and regulations. 2. This regulation regulates the Sources of Investigation Cases, Commission Council Sessions, Evidence, Commission Decisions and Penalty Efforts in monopolistic practices and unfair business competition cases. 3. With this Regulation applies, so that KKPU Regulation No. 1 of 2010 concerning Procedures for Case Management is revoked and declared invalid.	Dalam hal PT PJB melakukan kegiatan usahanya, terdapat kemungkinan adanya laporan pelanggaran terkait praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat baik oleh PT PJB maupun pihak lain. Dalam hal ini, PT PJB dapat menjadi pihak Terlapor maupun Pelapor: 1. Dalam hal menjadi Terlapor: maka PT PJB agar secara kooperatif mengikuti proses pemeriksaan untuk membuktikan benar atau tidaknya telah melakukan pelanggaran, serta mengajukan upaya hukum sebelum melaksanakan putusan. 2. Dalam hal menjadi Pelapor: maka PT PJB harus membuat laporan secara tertulis berisi identitas PT PJB dan terlapor, uraian dugaan pelanggaran dan disertai dengan alat buktinya. In the case of PT PJB performing its business activities, there is a possibility of violations reports related to monopolistic practices and unfair business competition both by PT PJB and other parties. In this case, PT PJB can become the Reported Party or the Reporting Party. 1. In the case of becoming a Reported Party: PT PJB should cooperatively follow the investigation process to prove whether or not a violation has been conducted, as well as submit legal efforts before taking the decision. 2. In the case of becoming a Reporting Entity: PT PJB is obliged to make a written report containing the identity of PT PJB and the reported, a description of the alleged violation along with the evidences.



Perubahan Peraturan dan Dampaknya terhadap Perusahaan

Changes in The Regulations and The Impacts on The Company

No.	Peraturan Regulations	Keterangan Perubahan Changes Description	Dampaknya Terhadap PJB secara Kualitatif dan/atau Kuantitatif Impacts on PJB Qualitatively and / or Quantitatively
4.	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenaker) tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain Minister of Manpower and Transmigration Regulation (Permenaker) of 2019 concerning the Second Amendment to Minister of Manpower and Transmigration Regulation No. 19 of 2012 concerning Conditions of Partial Work Implementation Submission to Other Companies	Perubahan terkait Perusahaan penyedia tenaga kerja/ buruh yang antara lain: 1. Proses perizinan perusahaan penyedia tenaga kerja/ buruh berdasarkan Permenaker 11/2-19 dilakukan secara elektronik atau via OSS sehingga menjadi lebih cepat dan transparan, 2. Terdapat perubahan ketentuan mengenai sanksi bagi perusahaan penyedia tenaga kerja/buruh yang melanggar aturan, semula berupa sanksi pencabutan izin operasional menjadi sanksi administratif. sanksi administratif berupa teguran tertulis dan pembekuan kegiatan usaha, 3. Proses penerbitan bukti pendaftaran Perjanjian Penyedia Jasa Pekerja/Buruh menjadi lebih cepat, yang semula selama 7 hari kerja menjadi paling lambat 3 hari kerja, 4. Berdasarkan Pasal 19 huruf d Permenaker 11/2019 yang berbunyi "Kewajiban memenuhi hak Pekerja/ Buruh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", klausul ini mengikat perusahaan pemberi kerja dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dalam memenuhi hak pekerja/buruh. Changes related to companies providing manpower/worker, including: 1. The licensing process of manpower/labor provider companies in accordance with Permenaker 11 / 2-19 is implemented electronically or via OSS so that it becomes faster and more transparent. 2. There is a provisions change regarding sanctions for companies that provide manpower/worker that violate the rules, originally in the form of sanctions of operational licenses revoking into administrative sanctions. Administrative sanctions in the form of written warning and business activities discharging. 3. The process of proof of registration issuance of the Employee Service Provider Agreement becomes faster, which was originally for 7 working days, currently for latest 3 working days only. 4. In Accordance with Article 19 letter d of the Minister of Manpower Regulation 11/2019 which reads "Obligation to fulfill the rights of manpower/worker in accordance with statutory provisions", this clause binds employer companies and service providers of manpower/worker in fulfilling rights of manpower/worker.	PT PJB selaku perusahaan pemberi kerja harus memastikan bahwa perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang bekerjasama dengan PT PJB harus sudah memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam Permenaker 11/2019. PT PJB as an employer company has to ensure that the company providing manpower/worker services in collaboration with PT PJB must meet all the provisions stipulated in Permenaker 11/2019.

No.	Peraturan Regulations	Keterangan Perubahan Changes Description	Dampaknya Terhadap PJB secara Kualitatif dan/atau Kuantitatif Impacts on PJB Qualitatively and / or Quantitatively
5.	Undang-undang (UU) Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) Law No. 17 of 2019 concerning Water Resources (UU SDA)	UU baru tentang Sumber Daya Air yang terbit sejak dicabutnya UU Nomor 7/2004 tentang Sumber Daya Air The new law on water resources which was published since the revocation of law No. 7/2004 on water resources	1. Berdasarkan pasal 58 UUSDA maka PJB berpotensi dikenakan BJPSDA, 2. Berdasarkan ketentuan pasal 49 kegiatan penggunaan SDA untuk kebutuhan pembangkit listrik merupakan penggunaan SDA untuk kebutuhan usaha sehingga PJB wajib melakukan pengurusan izin SIPPA, 3. Berdasarkan pasal 73 diatur ketentuan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp300.000.000 dan paling banyak Rp1000.000.000 terhadap setiap orang yang karena kelalaiannya menggunakan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha tanpa izin.
6.	Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-315/MBU/12/2019 tentang Penataan Anak Perusahaan atau Perusahaan Patungan di Lingkungan BUMN Minister of SOE Decree No. SK-315/MBU/12/2019 concerning the Arrangement of Subsidiaries or Joint Ventures in the SOE Environment	1. Penghentian sementara (moratorium) pendirian Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan. 2. Pemerintah melalui Kementerian BUMN melakukan penataan Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan di lingkungan BUMN dengan cara menghentikan sementara waktu (moratorium) pendirian Anak Perusahaan dan melakukan <i>going concern</i> terhadap anak perusahaan/perusahaan patungan yang kinerjanya tidak baik 3. Moratorium berlaku terhadap BUMN dan Perusahaan afiliasi yang terkonsolidasi ke BUMN termasuk cucu perusahaan dan turunannya. Moratorium dikecualikan untuk pendirian Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan dalam rangka mengikuti <i>tender</i> dan/atau untuk melaksanakan proyek-proyek bagi BUMN yang mempunyai bidang usaha jasa konstruksi dan/atau pengusahaan jalan tol dan dalam rangka melaksanakan kebijakan atau program pemerintah.	1. Ketentuan Moratorium pendirian Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan di Lingkungan BUMN yang diatur dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-315/MBU/12/2019 berlaku juga bagi PT PJB apabila PT PJB mendirikan anak perusahaan/perusahaan patungan untuk menjalankan kegiatan yang tidak dikecualikan dalam keputusan menteri BUMN tersebut. 2. Ketentuan Moratorium tersebut tidak berlaku bagi PT PJB apabila PT PJB mendirikan anak perusahaan/Perusahaan Patungan dalam rangka melaksanakan kebijakan atau program pemerintah.
		1. Temporary suspension (moratorium) on the Subsidiaries/Joint Ventures establishment 2. The Government through the Ministry of SOEs organizes Subsidiaries and Joint Ventures within the SOE environment by temporarily suspension (moratorium) the Subsidiaries establishment and going concern to subsidiaries/joint ventures which performance is not good 3. The moratorium applies to SOEs and affiliated companies consolidated into SOEs including Second-Tier Subsidiaries and the Subsidiaries. The moratorium is excluded for Subsidiaries/Joint Ventures establishment in order to participate in tenders and/ or to carry out projects for SOEs that have construction service business and/or toll road concessions and in order to carry out government policies or programs	1. Moratorium Provision on the Subsidiaries/ Joint Ventures establishment in the SOE Environment as stipulated in SOE Ministerial Decree No. SK-315/MBU/12/2019 also applies to PT PJB if PT PJB establishes a subsidiary/ joint venture to carry out activities which are not excluded in the decision of SOE minister. 2. The Moratorium Provisions do not apply to PT PJB if PT PJB establishes a subsidiary / Joint Venture Company in the context of implementing government policies or programs.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

INFORMATION AND MATERIAL FACTS AFTER ACCOUNTANT REPORTING DATE

Setelah tanggal laporan akuntan untuk tahun buku 2019, terdapat kejadian/peristiwa material yaitu:

- Pada awal tahun 2020 Pemerintah mengumumkan "status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona".
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (Peraturan) telah diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2020.

Dampak terhadap Perusahaan atas peristiwa tersebut adalah:

- Hal tersebut berdampak pada penurunan ekonomi dalam negeri, yaitu melemahnya nilai tukar rupiah dan penurunan harga sekuritas di pasar modal. Manajemen telah menilai dampak peristiwa tersebut terhadap operasi Perusahaan dan percaya bahwa tidak ada dampak negatif yang signifikan dalam jangka pendek meskipun dampak jangka panjang sulit diprediksi pada saat ini. Manajemen akan terus memantau ini dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko dan ketidakpastian pada masa yang akan datang.
- Peraturan tersebut tidak berdampak kepada pengukuran aset dan kewajiban pajak kini maupun tangguhan, termasuk beban terkait, yang dilaporkan pada laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2019 dan baru berdampak pada pelaporan keuangan setelah tahun 2019. Jika Perusahaan dan entitas anak menggunakan tarif pajak 22% untuk tahun 2019, aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan yang dilaporkan oleh Perusahaan dan entitas anak pada tanggal 31 Desember 2019 akan turun sebesar Rp66.362 juta dan Rp1.336 juta.

After the report date of accountant for fiscal year 2019, there are material cases/events, namely:

- In early 2020 the Government announced "the status of a specific state of emergency from the corona virus".
- Government Regulation in Lieu of Law No.1 Year 2020 ("the Regulation") has been issued on March 31, 2020.

The impact on the Company for the case is as follows::

- It has an impact on the decline in the domestic economy, which is the weakening of the Rupiah and the decline in prices of securities on the capital market. Management has assessed the impact of these events on the Company's operations and believes that there are no significant negative impacts in the short term even though long-term impacts are difficult to predict at this time. Management will continue to monitor this and take action as needed to overcome risks and uncertainties in the future.
- The Regulation does not affect the measurement of the current and deferred tax assets and liabilities, including its related expenses, which were reported in the consolidated financial statements of December 31, 2019 and would just impact the financial reporting after 2019. If the Company and its subsidiaries used the 22% tax rate in 2019, the deferred tax assets and liabilities reported by the Company and its subsidiaries as of December 31, 2019 would have decreased by Rp66,362 million and Rp1,336 million, respectively.

INFORMASI KEUANGAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI

FINANCIAL INFORMATION RELATED TO EXTRAORDINARY AND RARE EVENTS

Berdasarkan Setelah Laporan Keuangan Konsolidasian tahun 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, tidak terdapat informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan jarang terjadi.

In accordance with the audited Consolidated Financial Statements 2019 by Public Accountant Firm, there was no financial information reported that relates to extraordinary and rare events.

KEY PERFORMANCE INDICATOR DAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

KEY PERFORMANCE INDICATOR SOUNDNESS LEVEL OF COMPANY

Key Performance Indicator (KPI)

Pengelolaan KPI yang meliputi penyusunan standar, indikator, target kinerja Perusahaan dan penjabarannya sampai dengan satuan unit kerja terkecil di lingkungan Perusahaan serta seluruh pegawai dilakukan oleh Satuan Manajemen Mutu & Kinerja yang berada dibawah Satuan Manajemen Risiko dan Kinerja.

KPI Perusahaan tahun 2019 disetujui oleh Pemegang Saham pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 9 Januari 2019 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2019, Pemegang Saham Perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan menyepakati Kontrak Manajemen/Key Performance Indicators (KPI) tahun 2019. Realisasi KPI Kontrak Manajemen antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Perusahaan tahun 2019 adalah sebesar 93,17 sebagaimana pada tabel berikut:

KPI management covers the preparation of standards, indicators, the Company's performance targets, and the elaboration even to the smallest work unit within the Company and all employees, performed by the Quality and Performance Management Unit under the Risk and Performance Management Unit.

KPI of Company in 2019 was approved by the Shareholders during the General Meeting of Shareholders (GMS) on January 9, 2019 concerning Ratification of 2019 ABOP, the Company's Shareholders, the Board of Commissioners and Directors of the Company agreed on the Management Contract/Key Performance Indicators (KPI) in 2019. The realization of the Management Contract KPI between the Directors and the Board of Commissioners with the Company's Shareholders in 2019 is 93.17 as in the following table:

No.	Perspektif Perspective	Satuan Unit	Bobot Weight	Target	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement *	Nilai Value
1. Fokus Pelanggan Customer Focus							
1.1. Equivalent Forced Outage Rate (EFOR)							
a.	EFOR Pembangkit PLTU Batubara Eksisting EFOR of Existing CFPP	%	3	1,46	1,76	79,45%	2,38
b.	EFOR Pembangkit PLTU Batubara AMC Jawa Bali EFOR of Java Bali AMC CFPP	%	6	3,70	2,31	100,00%	6,00
c.	EFOR Pembangkit Non PLTU Batubara EFOR of Non CFPP	%	3	1,71	0,61	100,00%	3,00
2. Efektifitas Produk dan Proses Product and Process Effectiveness							
2.1. Equivalent Availability Factor (EAF) Pembangkit Equivalent Availability Factor (EAF) Pembangkit							
a.	EAF Pembangkit PLTU Batubara Eksisting EAF of Existing CFPP	%	8	89,00	90,28	100,00%	8,00
b.	EAF Pembangkit PLTU Batubara AMC Jawa Bali EAF of Java Bali AMC CFPP	%	14	83,23	90,71	100,00%	14,00
c.	EAF Pembangkit Non PLTU Batubara EAF of Non CFPP	%	6	93,48	95,38	100,00%	6,00
2.2. Tara Kalor Neto Eksisting dan AMC Jawa Bali Net Plant Heat of Existing and Java Bali AMC							
a.	Tara Kalor Neto Pembangkit PLTU Batubara Eksisting Net Plant Heat Rate of Existing CFPP	Kcal/kWh	5	2.626,00	2.742,66	95,55%	4,77
b.	Tara Kalor Neto Pembangkit PLTU Batubara AMC Jawa Bali Net Plant Heat Rate of Java Bali AMC CFPP	Kcal/kWh	5	2.681,00	2.664,41	100,00%	5,00
c.	Tara Kalor Neto Pembangkit Non PLTU Batubara Net Plant Heat Rate of Non CFPP	Kcal/kWh	2	2.269,00	2.195,78	100,00%	2,00
2.3. Umur Persediaan Supply Maturity							
		hari	3	15-22	19,81	100,00%	3,00
3. Fokus Tenaga Kerja Workforce Focus							
3.1. Human Capital Readiness (HCR)							
		level	3	4,45	4,45	100,00%	3,00
3.2. Organizational Capital Readiness (OCR)							
		level	3	4,45	4,45	100,00%	3,00
4. Keuangan dan Pasar Financial and Market							
4.1. Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Pembangkit Cost of Electricity Supply (CES)							
a.	BPP Pembangkit Eksisting CES of Existing CFPP	Rp/kWh	7	1.208,00	1.136,10	100,00%	7,00
b.	BPP Pembangkit AMC Jawa Bali CES of Java Bali AMC CFPP	Rp/kWh	6	788,00	717,56	100,00%	6,00
4.2. Efisiensi Biaya Pemeliharaan Maintenance Cost Effectiveness							
		%	3	0,75	0,68	100,00%	3,00

Key Performance Indicator dan Tingkat Kesehatan Perusahaan

Key Performance Indicator Soundness Level of Company

No.	Perspektif Perspective	Satuan Unit	Bobot Weight	Target	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement *	Nilai Value
4.3. Investasi Investment							
a.	Pengembangan Usaha Non NCB Non NCB Business Development	%	6	100,00	63,69	63,69%	3,82
b.	National Capacity Building (NCB)	%	4	100,00	55,04	55,04%	2,20
4.4. Sinergi dengan Anak Perusahaan Lain dan Pushartlis Synergy with Other Subsidiaries and Pushartlis							
a.	Sinergi dengan Anak Perusahaan Lain Synergy with Other Subsidiaries	Rp miliar Rp billion	3	876,27	1.005,07	100,00%	3,00
b.	Sinergi dengan Pushartlis Synergy with Pushartlis		3	25,00	55,62	100,00%	3,00
5. Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Jawab Leadership, Governance, and Community Responsibility							
5.1.	Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) GCG Implementation	Skor Score	2	93,20	94,45	100,00%	2,00
5.2.	Tingkat Proper Unit (Hijau/ Emas) Proper Unit Level (Green/Gold)	Unit	2	2 Proper Emas	94,45	100,00%	2,00
5.3.	Penyelesaian Temuan Auditor Auditor Findings Settlement	%	3	100,00	100,00	100,00%	3,00
5.4.	Kepatuhan pada Kesehatan, Keselamatan Kerja & Lingkungan Hidup (K3LH) OSHE Compliance		Max -10				
TOTAL			100				93,17

* untuk pencapaian > 100%, ditulis 100%
for achievement > 100%, written 100%

Tingkat Kesehatan Perusahaan Soundness Level of Company

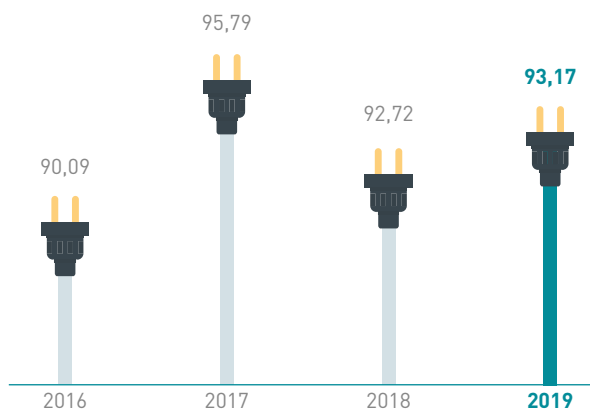
Hasil pencapaian selama tahun berjalan dinilai berdasarkan Surat Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0001.E/DIR/2019 tanggal 26 Mei 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi Direktorat, Unit dan Anak Perusahaan dengan penggolongan penilaian tingkat kesehatan sesuai dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara.

Penilaian tingkat kesehatan PJB berada pada tingkat "AA" kategori "SEHAT" dengan nilai **93,17**.

Achievement results for the current year are assessed according to PT PLN (Persero) Directors Circular Number 0001.E/DIR/2019 dated May 26, 2019 concerning Implementation Guidelines for Calculating Organizational Performance Value of the Directorate, Units and Subsidiaries by classification of soundness rating according to the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number KEP-100/MBU/2002 dated 4 June 2002 concerning Rating of Soundness of State-Owned Enterprises.

PJB soundness level assessment is at the level of "AA" category "HEALTHY" with a value of **93,17**.

Grafik Tingkat Kesehatan Perusahaan (nilai)
Chart of Company Soundness Level (score)



Hal-hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha

Issues with Potential that Significantly Influence Business Continuity

Pada tahun 2019 tidak terdapat hal yang menyebabkan kelangsungan usaha Perusahaan terhenti, namun ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dan mitigasi risiko. Beberapa hal tersebut berasal dari faktor eksternal dan internal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha PJB.

Di sisi eksternal, terdapat tiga tren global yang secara khusus mempengaruhi sistem ketenagalistrikan yang dikenal dengan 3D (dekarbonisasi, digitalisasi, desentralisasi). Dekarbonisasi mendorong penggunaan sumber energi bersih untuk mengantisipasi laju penurunan cadangan sumber energi fosil (non-terbarukan) seperti minyak dan gas bumi yang semakin menipis. Digitalisasi mendorong penggunaan sistem teknologi digital untuk mengefisienkan dan mengoptimalkan proses bisnis, sedangkan desentralisasi mendorong pembangunan pembangkit tersebar dan mandiri untuk meningkatkan elektrifikasi di daerah terpencil. Akselerasi implementasi energi bersih dituangkan pemerintah dalam target bauran energi baru terbarukan sebesar 23% di tahun 2025 dan kebijakan-kebijakan baru antara lain Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2019 yang mengatur mengenai Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Untuk Transportasi Jalan serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 tahun 2019 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap Oleh Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Selain itu, penjualan listrik PJB sebagian besar dihasilkan oleh pembangkit *Peaker*. Berdasarkan estimasi kapasitas terpasang di Jawa Bali, dengan adanya perkembangan eksternal seperti penyelesaian program 35 GW akan meningkatkan kapasitas terpasang di kesisteman Jawa-Bali sehingga berpotensi menurunkan *merit order* pembangkit *peaker* PJB setelah rasio elektrifikasi berada diatas 97%. Pada Agustus 2019, terjadi gangguan yang meluas (*blackout*) di sistem kelistrikan Jawa-Bali, yang menyebabkan kebutuhan *fast response* di sisi unit pembangkit untuk pemulihannya. Pembangkit-pembangkit yang dikelola PJB khususnya di UP Muara Karang, UP Muara Tawar dan UP Cirata mampu mendukung kesiapan pasokan listrik didalam sistem kelistrikan Jawa Bali yang terus ditingkatkan melalui upaya simulasi *blackstart* dengan hasil yang memuaskan. Pembangkit juga memiliki kemampuan *hostload* yang memadai.

In 2019, there were no issues resulting the business continuity of Company to stop, but there are some things need attention and risk mitigation. Some of these things come from external and internal factors that have the potential to significantly influence the business continuity of PJB.

Externally, there are three global trends that specifically affect the electricity system known as 3D (decarbonization, digitalization, decentralization). Decarbonization drives clean energy sources usage to anticipate the rate of decrease in reserves of fossil (non-renewable) energy sources such as oil and natural gas which is getting low. Digitalization drives the digital technology systems use to make efficient and optimize business processes, while decentralization drives the development of spread and independent power plants to increase electrification in remote areas. The acceleration of clean energy implementation is included by the government in the renewable energy mix target of 23% in 2025 and new policies include Presidential Regulation No. 55 of 2019 which regulates the Acceleration of Battery-Based Electric Vehicles for Road Transportation and Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 16 of 2019 concerning Use of Roof SPP Systems by Consumers of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). In addition, PJB electricity sales are mostly generated by the *Peaker* power plants. In accordance with the estimated installed capacity in Java-Bali, external developments such as the 35 GW program completion will increase installed capacity in the Java-Bali system so that it has the potential to reduce the merit order of the PJB *peaker* power plants after the electrification ratio is above 97%. In August 2019, there was a widespread blackout in the Java-Bali electricity system, which caused the fast response needs on the power plant side for the recovery. The power plants managed by the PJB, especially at Muara Karang GU, Muara Tawar GU and Cirata GU are able to support the readiness of electricity supply in the Java-Bali electricity system which continues to be improved through blackstart simulation efforts with satisfying results. The power plants also have adequate *hostload* capabilities.



Dari sisi internal, adanya kebijakan Revaluasi Aset yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) pada tahun sebelumnya memiliki dampak yang signifikan bagi PJB. Usia pembangkit PJB yang sudah mendekati dan/atau melampaui *expected lifetime* memberikan tantangan untuk bersaing dengan pembangkit-pembangkit baru. Selain itu, pertumbuhan jumlah SDM untuk pengembangan bisnis sesuai yang dicanangkan dalam RJPP 2017-2021 berpotensi memunculkan risiko penurunan produktivitas dan menambah beban usaha, bilamana terjadi ketidaksesuaian proyeksi pertumbuhan bisnis PJB.

Internally, the Asset Revaluation policy implemented by PT PLN (Persero) in the previous year had a significant impact on PJB. PJB power plants lifetime approaching and/or exceeding the expected lifetime presents challenges to compete with new power plants. In addition, the growth in the human resources number for business development as stated in the 2017-2021 CLP has the potential to bring up risks of decreasing productivity and increasing business expenses, in the event of a mismatch in the projected PJB business growth.

Potensi Dampak pada Perusahaan Potential Impact on the Company

Faktor eksternal dan internal diatas memiliki dampak terhadap Perusahaan diantaranya adalah:

1. Perkembangan teknologi EBT yang semakin murah akan menggeser peran pembangkit berbahan bakar fosil (BBM, BBG dan batubara).
2. Penyelesaian program 35 GW akan menyebabkan penurunan *merit order* pembangkit *peaker* PJB.
3. Kebutuhan infrastruktur *Emergency Diesel Generator* (EDG) di ketiga pembangkit untuk meningkatkan kemampuan unit pembangkit dalam mendukung keamanan sistem kelistrikan Jawa-Bali.
4. Kebijakan revaluasi aset meningkatkan beban depresiasi yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Selain itu, nilai perolehan yang besar berdampak pada pengambilan keputusan terhadap pembangkit dengan CF mendekati 0 (nol).

The external and internal factors above have impacts on the Company, including:

1. The development of Renewable Energy technology which becomes cheaper will replace the role of fossil-fueled plants (Fuel, Gas, and coal).
2. Completion of the 35 GW program will cause a decrease in the merit order of PJB's Peaker power plants.
3. Emergency Diesel Generator (EDG) infrastructure needs in all three power plants to increase the generating units ability to support the security of the Java-Bali electricity system.
4. The asset revaluation policy increases the depreciation expense which affects the company's financial performance. In addition, the large acquisition value affects the decision making of the power plant with CF approaching 0 (zero).

Assessment Manajemen untuk Mengelola Potensi yang Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Management Assessment Potentials that Significantly Influence Business Continuity

Berdasarkan potensi pengaruh dari internal dan eksternal diatas, dilakukan redefinisi atas strategi yang telah ditetapkan sebelumnya perlu dilakukan dalam sebuah kegiatan mitigasi dan dituangkan dalam program-program tahunan pada Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) yang diselaraskan dengan arah pengembangan pada Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Tujuannya untuk menjaga *agility* dan semangat adaptasi yang berkesinambungan dengan mengoptimalkan *core competency* dan inovasi yang menjunjung tinggi prinsip tata kelola dan pengelolaan risiko yang baik. Selain itu, manajemen juga melakukan berbagai penilaian dan evaluasi untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai keberlangsungan usaha Perusahaan.

In accordance with the potential internal and external influences above, a redefinition of the pre-determined strategy needs to be carried out in a mitigation activity and included in annual programs in the ABOP which is aligned with the direction of development in the CLP. The purposes are to maintain agility and sustainable spirit adaptation by optimizing core competency and innovation that upholds the principles of good governance and risk management. In addition, management also implements various assessments and evaluations to provide adequate confidence regarding the sustainability of the Company's business.

Dalam penilaian posisi Perusahaan relatif kepada kesempatan dan tantangan, PJB berada pada kuadran *growth & investment* yang menunjukkan bahwa PJB memiliki potensi untuk bertumbuh pesat, sehingga perlu dipastikan PJB memiliki sumber daya yang cukup untuk menopang pertumbuhan tersebut, baik dari internal, maupun eksternal. Investasi dapat dilakukan untuk menopang pertumbuhan organik di lini bisnis eksisting dan lini bisnis baru. Pertumbuhan organik diwujudkan dengan memperkuat dan menambah kapasitas lini bisnis utama yaitu pembangkit tenaga listrik, melakukan penetrasi *market* baru untuk lini bisnis jasa EPC dan jasa O&M serta investasi dalam proyek IPP.

Dalam hal tata kelola perusahaan, telah dilakukan asesmen Baldrige Excellence Framework dan meraih skor sebesar 700, yang sekaligus mempertahankan PJB pada posisi band **"Industry Leader"**. Selain itu, di tahun 2019 ini PJB juga berhasil meraih **Juara 1 Annual Report Award 2018** kategori Perusahaan *Private Non-keuangan Non-Listed*, yang membuktikan integritas PJB dalam mengelola perusahaan berdasarkan prinsip GCG serta menganut pola keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingan. Pengelolaan perusahaan yang baik ini, setiap tahunnya diases oleh asesor independen (BPKP) maupun dilakukan secara mandiri. Pada asesmen GCG yang diselenggarakan pada tahun 2019, skor yang dicapai sebesar **94,45 dari 100** dengan kategori **"Sangat Baik"**.

In assessing the position relative of Company to opportunities and challenges, PJB is in the growth & investment quadrant which shows that PJB has the potential to grow rapidly, so it needs to be ensured that PJB has sufficient resources to support such growth, both internal and external. Investment can be implemented to sustain organic growth in existing business lines and new business lines. Organic growth is realized by strengthening and increasing the capacity of key business lines, which are power plants, penetrating new markets for the EPC service business line and O&M services and investing in IPP projects.

In terms of corporate governance, the Baldrige Excellence Framework assessment has been carried out and achieved a score of 700, which also maintains PJB in the position of the band **"Industry Leader"**. In addition, in 2019, PJB also won **1st Place in the 2018 Annual Report Award** in the category of Non-Listed Private Non-financial Companies, which proves integrity of PJB in managing companies in accordance with GCG principles and adheres to patterns of information disclosure to stakeholders. Good management of the company is assessed annually by independent assessors (BPKP) or independently. In the GCG assessment held in 2019, the score achieved was **94.45 out of 100** in the **"Very Good"** category.

Asumsi yang Digunakan dalam Melakukan Assessment Applied Assumptions for the Assessment

Berdasarkan kondisi tersebut, strategi pengembangan PJB yang tertuang pada Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) periode 2017-2021 akan disesuaikan untuk menjawab tantangan-tantangan dan tetap memberikan nilai tambah kepada pemegang saham dan sektor ketenagalistrikan Indonesia melalui masing-masing lini bisnis yang dioperasikan baik oleh PJB sendiri, Anak Perusahaan serta Perusahaan Afiliasi.

Dalam hal penilaian dan evaluasi risiko kelangsungan usaha melalui analisis kekuatan berkompetisi dan kesempatan eksternal atau industri, analisis SWOT per lini bisnis, realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, data pembandingan industri sejenis, kondisi pasar dan perekonomian terkini, RUPTL, RJPP, Pedoman Manajemen Risiko dan Tata Kelola Perusahaan. Asumsi tersebut diproyeksi dan dievaluasi secara periodik. Untuk asumsi makro ekonomi (kurs, suku bunga, tarif, dan lain-lain) dan tingkat harga internasional tahunan dievaluasi melalui RKAP Perusahaan yang telah disetujui oleh Pemegang Saham.

Referring to those conditions, development strategy of PJB as disclosed in Long-term Corporate Plan of 2017-2021 period will be adjusted to answer the challenges and keep providing added value to the shareholders and Indonesian electricity sector through every business line that is operated either by PJB, Subsidiary or Affiliated Companies.

Related to business continuity risk assessment and evaluation, the assumptions applied by the Company refer to SWOT analysis for each business line, the realization of previous years' performance, similar industry comparison data, current condition of market and economy, Electricity Supply Business Plan, CLP, Risk Management Guidelines, and Corporate Governance. These assumptions are periodically projected and evaluated. For macro-economic assumptions (exchange rates, interest rates, tariffs, etc.) and the annual international price level, they are evaluated through the Company's Annual Budget and Operational Plan that has been approved by the Shareholders.



Arahan atau Keputusan Manajemen atas hasil *Assessment* Direction or Decision of Management on the Assessment Result

Hasil analisis SWOT memberikan gambaran posisi PJB saat ini. Dari hasil tersebut terdapat beberapa arahan dari Manajemen dalam hal ini Direksi sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya saing usaha dan pangsa pasar, baik dengan mengoptimalkan aset yang ada, membuat rencana pengembangan pembangkit eksisting maupun dengan mengejar pasar yang baru.
2. Berperan aktif pada bisnis EBT dan penunjangnya yang proven secara operasional dan komersial.
3. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM di bidang bisnis, penguatan kompetensi O&M dan mengembangkan *expertise*, serta membangun *mindset digital worker* untuk menghadapi era disruptif teknologi.

The results of the SWOT analysis provide an overview of the current PJB position. From these results there are several directions from Management, in this case the Board of Directors, as follows:

1. Increasing business competitiveness and market share, both by optimizing existing assets, making plans to develop existing power plants and by pursuing new markets.
2. Performing active role in the renewable energy business and its supports which have proven operationally and commercially.
3. Increasing the capacity and capability of HR in the business field, strengthening O&M competencies and developing expertise, as well as establishing a digital worker mindset to face the disruptive technology era.

Penyesuaian yang Dilakukan Adjustments

Untuk memitigasi dampak dari faktor internal dan eksternal, PJB telah berupaya melakukan beberapa strategi sebagai berikut:

1. Memilih dan bekerja sama dengan *partner* strategis untuk membangun pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan energi yang berkelanjutan.
2. Dalam menjaga aset unit Pembangkitan yang dimiliki PJB, dilakukan kegiatan *risk survey* sesuai standar global (NFPA dan *Factory Mutual Standards/FM*) oleh pihak independen untuk memitigasi risiko.
3. Integrasi resources dalam PJB *Group* sehingga seluruh kompetensi dan sumber daya yang dimiliki oleh Anak Perusahaan/Perusahaan Afiliasi dapat disinergikan untuk dapat menghasilkan pembangkit listrik yang andal, efisien dan kompetitif.
4. Penguatan fungsi dan struktur organisasi sebagai bentuk peningkatan kesiapan dan efektifitas organisasi untuk mendukung penugasan PLN dan pengembangan bisnis.
5. Meningkatkan kemampuan unit pembangkit dalam mendukung keamanan sistem kelistrikan Jawa-Bali.

To mitigate internal and external factors impacts, PJB has tried to carry out several strategies as follows:

1. Choosing and co-operating with strategic partners to build power plants that utilize sustainable energy.
2. In maintaining the assets of the Power Plant unit owned by PJB, risk survey activities are conducted by an independent party to mitigate the risk in accordance with global standard (NFPA and Factory Mutual Standards/FM)
3. Integration of resources in PJB Group, so that all competencies and resources owned by Subsidiaries/ Affiliated Companies are able to be synergized for reliable, efficient and, competitive production of power plants.
4. Strengthening the functions and structure of the organization as a manifestation of increasing the the organization readiness and effectiveness to support PLN assignments and business development.
5. Increasing the ability of generating units in supporting the security of the Java-Bali electricity system.

DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENDAPATAN DAN LABA PERUSAHAAN

IMPACTS OF PRICE CHANGES ON COMPANY REVENUES AND PROFITS

Dampak Perubahan Biaya Pokok Penyediaan (BPP)

Impact of Changes to Cost of Electricity Supply (CES)

Biaya pokok penyediaan tenaga listrik merupakan biaya yang disediakan PJB dalam hal ini adalah dari sisi pembangkit yaitu dari pembelian energi primer sampai tenaga listrik dijual kepada PLN.

Dampak perubahan BPP terhadap pendapatan operasi yaitu setiap perubahan Rp1 biaya pokok penyediaan tenaga listrik mengakibatkan pendapatan operasi di tahun 2019 berubah sekitar Rp29.646 juta dan Rp29.997 juta di tahun 2018.

Dampak perubahan BPP terhadap laba operasi perusahaan yaitu setiap perubahan Rp1 biaya pokok penyediaan tenaga listrik mengakibatkan laba operasi di tahun 2019 berubah sekitar Rp7.534 juta dan Rp5.215 juta di tahun 2018.

The Cost of Electricity Supply (CES) is the cost provided by the PJB, in this case, from the power plants side, which is from the purchase of primary energy to electricity sold to PLN.

The impact of CES changes on operating income is that every change of Rp1 in the cost of electricity supply will cause operating income to change by approximately Rp29,646 million in 2019 and Rp29,997 million in 2018.

The impact of CES changes on the operating profit of company is that every change of Rp1 in the cost of electricity supply will result in operating profit to change approximately Rp7,534 million in 2019 and Rp5,215 million in 2018.

Dampak Perubahan Harga Jual Tenaga Listrik

Impacts of Changes in Sales of Electricity Price

Dampak perubahan harga jual tenaga listrik terhadap pendapatan operasi yaitu setiap perubahan Rp1 harga jual listrik mengakibatkan pendapatan operasi di tahun 2019 berubah senilai Rp22.404 juta dan Rp24.751 juta untuk tahun 2018.

Dampak perubahan harga jual tenaga listrik terhadap laba operasi yaitu setiap perubahan Rp1 harga jual listrik mengakibatkan laba operasi di tahun 2019 berubah senilai Rp5.694 juta dan Rp4.308 juta untuk tahun 2018.

The impact of changes in electricity selling prices on operating income is that each change of Rp1 in the selling price of electricity will result operating income to change by Rp22,404 million in 2019 and Rp24,751 million for 2018.

The impact of changes in electricity sales prices on operating income is that every change of Rp1 in the selling price of electricity will result operating profit to change by Rp5,694 million in 2019 and Rp4,308 million for 2018.



Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan Audit
Audited Financial Statements



Referensi Kriteria ARA
ARA Criteria Reference

ASPEK PEMASARAN DAN PANGSA PASAR

MARKETING ASPECTS AND MARKET SHARE

Pelanggan dan Target Pasar

Customers and Target Market

Pelanggan PJB dalam segmen usaha penyediaan listrik adalah PT PLN (Persero) UIP2B (Unit Induk Penyaluran dan Pengaturan Beban), sedangkan segmen bisnis penyedia jasa O&M dan jasa lainnya adalah PT PLN (Persero) Regional maupun Independent Power Producer (IPP). Salah satu upaya yang dilakukan PJB untuk terus meningkatkan pangsa pasarnya serta menjaga kepercayaan pelanggannya adalah menyusun *customer relation management*.

Pengelolaan kegiatan pemasaran PJB dilakukan di seluruh elemen di dalam Perusahaan baik dalam aspek pemasaran jasa pembangkitan tenaga listrik, jasa O&M maupun jasa usaha lainnya. Pengelola pemasaran PJB dikelola oleh Direktorat Operasi melalui Divisi Operasi dan Sistem Pengendalian Kontrak.

Proses pemasaran penyediaan listrik PJB baik unit eksisting berikut jasa O&M dibagi menjadi 4 (empat) pelanggan yaitu:

1. PT PLN Unit Penyaluran dan Pengatur Beban Wilayah Jakarta dan Banten,
2. PT PLN Unit Penyaluran dan Pengatur Beban Wilayah Jawa Barat,
3. PT PLN Unit Penyaluran dan Pengatur Beban Wilayah Jawa Tengah,
4. PT PLN Unit Penyaluran dan Pengatur Beban Wilayah Jawa Timur.

PJB customer in the electricity supply business segment are PT PLN (Persero) UIP2B (Main Unit of Load Distribution and Management), while the O&M service business provider segments and other services are PT PLN (Persero) Regional and Independent Power Producer (IPP). One of the efforts taken by PJB to continuously increase the market share and maintain the customers trust is to arrange customer relations management.

The management of PJB marketing activities is performed by all elements of the Company both in the aspects of marketing power plant services, O&M services, and other PJB services. PJB's marketing management is maintained by the Directorate of Operations through the Contract Control Operations and Systems Division.

PJB's marketing process in the existing unit with the O&M services is divided into 4 customers, namely:

1. PT PLN Distribution and Load Management Unit for Jakarta and Banten Areas
2. PT PLN Distribution and Load Management Unit for West Java Areas
3. PT PLN Distribution and Load Management Unit for Central Java Areas
4. PT PLN Distribution and Load Management Unit for East Java Areas

Analisis Segmen Pasar dan Kondisi Persaingan

Analysis of Market Segment and Competition

Efisiensi produksi energi listrik diukur dari tingkat biaya yang digunakan untuk membangkitkan energi listrik. Dalam pembangkitan terdapat sebuah sistem yang disebut merit order, yaitu suatu metode dimana pembangkit dengan biaya yang paling murah akan diprioritaskan untuk beroperasi dibandingkan dengan yang lebih mahal, sampai beban energi listrik tercukupi.

Untuk segmen beban dasar (*base load*) biasanya didominasi oleh PLTU dengan bahan bakar batubara yang memiliki *merit order* bagus sedangkan pembangkit milik PJB sebagian besar adalah PLTGU berbahan bakar gas sehingga *merit order*-nya bagus di segmen beban menengah (*medium load*).

The efficiency of electricity-power production is measured by the level of costs used to generate electricity. In the power plant, there is a system called Merit Order which is a method where the lowest cost power plant will be prioritized to operate compared to the more expensive ones, until the load of electricity power is fulfilled.

For the Base Load segment, it is normally dominated by CFPP fueled by coal which has good merit orders while the plants of PJB are mostly CCPP so that the merit order is considered as good for the medium load segment.

Posisi Produk di Pasar Market Position of The Company's Products

Pasar utama Perusahaan terkait penjualan energi listrik masih berfokus di Sistem Jawa-Bali. Terlihat dari realisasi penjualan tenaga listrik PJB mencapai 26,17% dari total penjualan energi listrik Sistem Jawa-Bali dengan detail penjualan unit eksisting PJB mencapai 11,48% dan melalui pembangkit Unit Bisnis Jasa O&M yang dikelola oleh PJB mencapai 14,69%.

Peran pembangkit dalam operasi sistem biasanya diklasifikasikan menjadi pembangkit pemikul beban dasar (*base load*), beban menengah (*medium load/load follower*) dan pembangkit pemikul beban puncak (*peaker*). Pembangkit milik PJB sebagian besar didominasi oleh PLTGU atau pembangkit berbahan bakar gas, sehingga menempatkan PJB sebagai pembangkit *medium load* dan *peakers*.

Sehingga sebagian besar pangsa pasar penjualan energi listrik di Sistem Jawa-Bali pada segmen *medium load* dan *peakers* masih didominasi oleh PJB, sedangkan kategori *base load* ditempati oleh PLN (sebagian pengelolaannya oleh PJB), Indonesia Power dan IPP (*Independent Power Producer*).

The main market of Company related to the sale of electricity power is still focused on the Java-Bali System. It can be seen from the realization of PJB's electricity sales reaching 26.17% of the total electricity sales of the Java-Bali System with the detailed sales of the existing units reaching 11.48% PJB and PJB Operation & Maintenance Services Business Unit reaching 14.69%.

The role of power plant in system operations is usually classified into base load, medium load/load follower and peaker. The power plants of PJB are mostly dominated by CCPP or Combined Cycle Power Plants, so placed PJB's position at a medium load and peakers.

Therefore, the majority of the market share of electricity power sales in the Java-Bali system for medium and peaker segments is still dominated by PJB, while the base load category is occupied by PLN (partly managed by PJB), Indonesia Power, and IPP (Independent Power Producer).

Strategi dan Target Pencapaian Strategi Pasar Strategy and Target Achievement of Market Plan

Seiring dengan pengembangan usaha PJB yang merambah pada value chain ketenagalistrikan selain pembangkitan, maka diperlukan perencanaan yang strategis terkait pemasaran. Adapun strategi yang ditetapkan perusahaan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi serta RJPP yang telah ditetapkan. Beberapa strategi utama yang direalisasikan antara lain:

1. Kunjungan kerja ke tiap UP2B (Unit Penyaluran dan Pengaturan Beban) dan UIP2B (Unit Induk Pusat Pengaturan Beban) untuk mengetahui kondisi pasar ter-*update* dan rencana-rencana terkait sistem kelistrikan,
2. Diskusi operasi bersama pelanggan sesuai dengan area pelanggan,
3. Melakukan *gathering* dengan seluruh pelanggan yang dibagi sesuai dengan area pelanggan.
4. Mengamankan jaminan pasokan bahan baku & *spare part*,
5. Melakukan *Cost Leadership: Coal Switching, Joint Inventory, Optimize & Improve* proses bisnis
6. Menerapkan program implementasi *engineering center* dan *Enterprise Asset Management*,
7. Meningkatkan kompetensi SDM.

Along with the development of the PJB business that has penetrated the electricity value chain in addition to power plants, strategic planning related to marketing is needed. The strategy set by the company is the elaboration of the Vision and Mission as well as the established CLP. Some of the main strategies realized is as follows:

1. Work visits to each LDU (Load and Distribution Unit) and LMU (Load Management Unit) to find out current market conditions and plans related to electricity systems
2. Discussion concerning Operations with customers based on the customers' area,
3. Gathering with all customers in accordance with customers' area.
4. Securing guaranteed supply of raw materials & spare parts
5. Cost Leadership: Coal Switching, Joint Inventory, Optimize & Improve of Business Process
6. Implementing engineering center and Enterprise Asset Management,
7. Improving HR competencies.



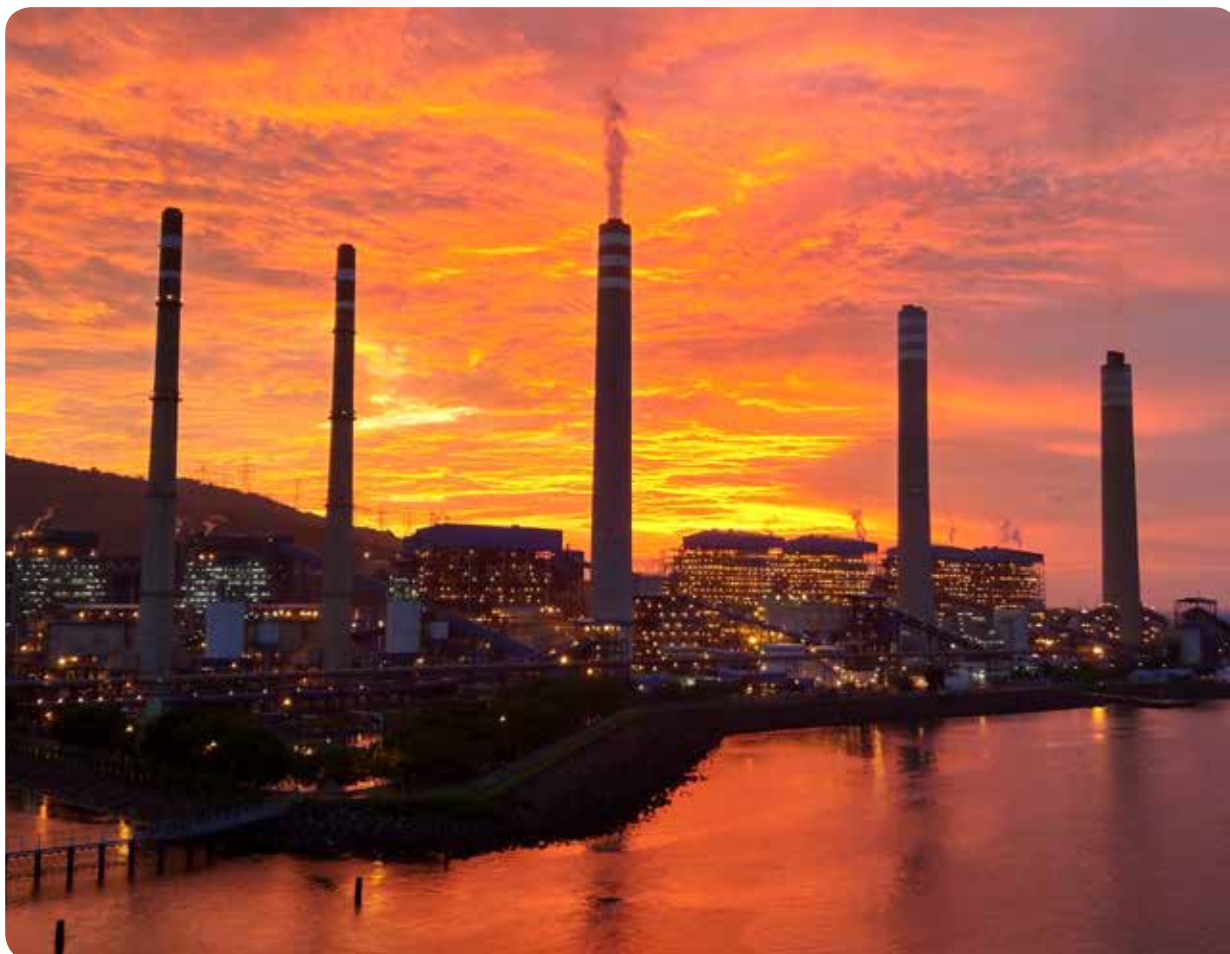
Pangsa Pasar Market Share

Kegiatan pemasokan listrik di sistem Jawa Bali dipasok oleh PJB (Eksisting dan UBJOM), Indonesia Power (Eksisting dan UJP), PLN dan IPP. Berikut adalah gambar diagram pangsa pasar industri kelistrikan sistem Jawa Bali:

The electricity distribution activities in the Java-Bali system are distributed by PJB (Existing and O&M Services Business), Indonesia Power (Existing and UJP), PLN and IPP. The following is market share table of the Java-Bali electricity system:

Tabel Pangsa Pasar Kelistrikan Sistem Jawa Bali
Table of Java-Bali Market Share

Produsen Producer	2018		2019	
	GWh	%	GWh	%
PJB Eksisting PJB Eksisting	24.825	13,23	22.338	11,48
UBJOM O&M Services Business Unit	25.932	13,82	28.574	14,69
Indonesia Power Eksisting Indonesia Power Existing	40.519	21,60	38.749	19,92
UJP UJP	28.477	15,18	32.906	16,91
PLN	19.529	10,41	20.419	10,50
IPP (Listrik Swasta) Independent Power Producer	48.322	25,76	51.553	26,50
Jumlah Sistem Jawa Bali Total Java-Bali System	187.605	100,00	194.539	100,00



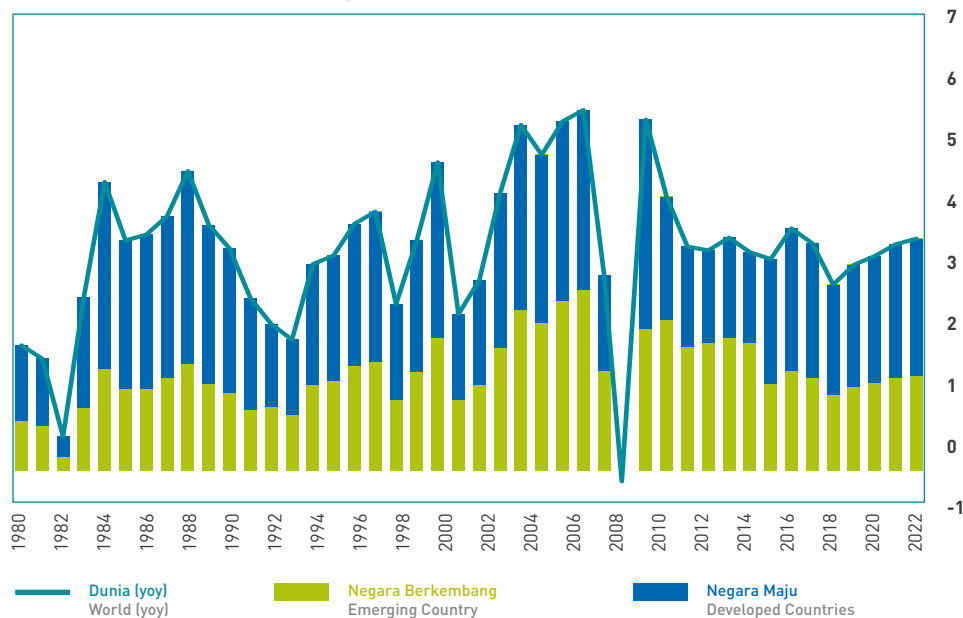
PROSPEK USAHA BUSINESS PROSPECTS

Prospek Perekonomian Dunia Prospects of The World Economy

Proses pemulihan ekonomi dunia tertahan setelah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) merebak diakhir Januari 2020. COVID-19 diperkirakan akan menekan perekonomian Tiongkok dan menghambat keberlanjutan pemulihan ekonomi dunia pada tahun 2020. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia 2020 sebesar 3,0%, namun akan meningkat pada tahun 2021. Risiko pasar keuangan dunia meningkat sehingga mendorong penyesuaian aliran dana negara berkembang pada aset keuangan dan komoditas yang dianggap aman. Selain itu, pandemi ini memberikan tekanan pada mata uang negara berkembang.

The recovery of the world economy was halted after *Corona-Virus Disease 2019* (COVID-19) at the end of January 2020. COVID-19 is expected to put pressure on China's economy and hamper the sustainability of world economic recovery in 2020. Bank Indonesia estimates that world economic growth in 2020 will be 3.0%; however, it will increase in 2021. Risks in world financial markets have risen to encourage adjustment of developing country funds on financial assets and commodities deemed safe. Also, this pandemic puts pressure on developing country currencies.

Grafik Pertumbuhan Ekonomi Dunia
Graph of World Economic Growth



Sumber: Bank Indonesia, Laporan Kebijakan Moneter (Ekonomi, Moneter dan Keuangan) Triwulan IV Tahun 2019
Source: Bank Indonesia, Monetary Policy Report (Economy, Monetary and Finance) Quarter IV of 2019



Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan Audit
Audited Financial Statements



Referensi Kriteria ARK
ARK Criteria Reference

Prospek Perekonomian Indonesia Economy Prospect of Indonesia

Prospek Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Economic Growth Prospect of Indonesia

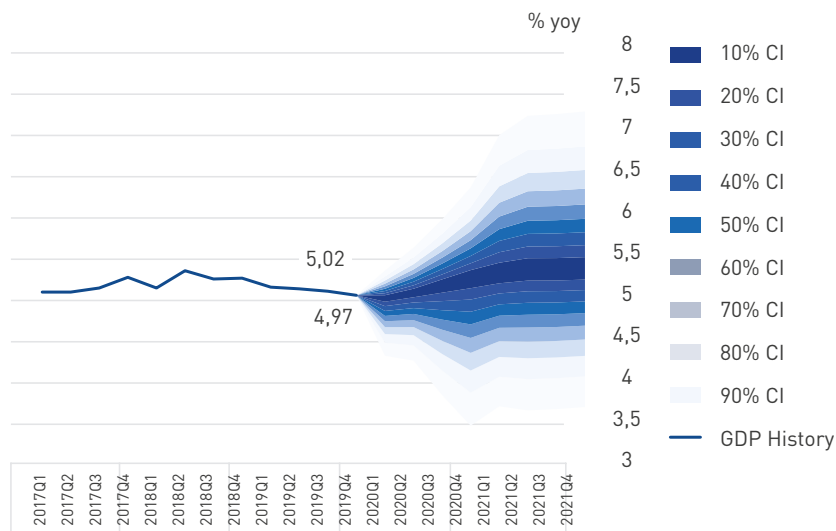
Optimisme terhadap penguatan momentum pertumbuhan ekonomi 2018 tertahan saat COVID-19 mulai menyebar pada akhir Januari 2020. Kondisi ini tidak terlepas dari peran besar ekonomi Tiongkok dalam perekonomian Indonesia, khususnya melalui jalur pariwisata, jalur ekspor dan jalur investasi. Data tahun 2019 menunjukkan pangsa kunjungan wisatawan Tiongkok mencapai hampir 13% dari total wisatawan mancanegara ke Indonesia dengan nilai devisa sekitar 14% dari total yang diperoleh. Ekspor Indonesia ke Tiongkok dan juga *Foreign Direct Investment* (FDI) dari Tiongkok juga tidak kecil masing-masing mencapai 17% dari total ekspor Indonesia dan 16,8% dari total FDI.

Bank Indonesia memperkirakan prospek pemulihan ekonomi dunia yang tertahan secara jangka pendek pasca meluasnya COVID-19 akan mempengaruhi perekonomian Indonesia. Pengaruh tidak hanya bersumber dari pengaruh langsung akibat peran Tiongkok ke Indonesia melalui jalur pariwisata, perdagangan dan investasi. Pengaruh juga berasal dari pengaruh tidak langsung melalui jalur rambatan (*spill over*) ke negara lain dan perekonomian dunia yang secara keseluruhan juga akan melambat. Kondisi ini pada gilirannya akan mengurangi permintaan terhadap produk ekspor Indonesia. Dengan pertimbangan ini Bank Indonesia merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi 2020 menjadi lebih rendah yaitu menjadi 5,0-5,4% dari perkiraan semula 5,1-5,5% dan kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 5,2-5,6%

The optimism on good momentum of economic growth in 2018 was held back when COVID-19 began to spread at the end of January 2020. This condition is inseparable from the large role of the Chinese economy in the Indonesian economy which is not small, especially through tourism, export, and investment channels. Data of 2019 show that the share of Chinese tourist arrivals reaches almost 13% of the total foreign tourists to Indonesia with a foreign exchange value of around 14% of the total obtained. Indonesia's exports to China and Foreign Direct Investment (FDI) from China are also not small, each reaching 17% of Indonesia's total exports and 16.8% of total FDI.

Bank Indonesia predicts the prospect of a short-term global economic recovery post the expansion of COVID-19 will affect Indonesia's economy. The influence does not only come from the direct influence of the role of China in Indonesia through tourism, trade, and investment. Influence also comes from indirect effects through spill over to other countries and the world economy will also slow down. This condition in turn will reduce the demand for Indonesia's export products. Therefore, Bank Indonesia revised down its economic growth forecast for 2020 to 5.0-5.4% from the original estimate of 5.1-5.5% and then increased in 2021 to 5.2-5.6%

Grafik Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Chart of Indonesia's Economic Growth Projection



Sumber: Bank Indonesia, Laporan Kebijakan Moneter (Ekonomi, Moneter dan Keuangan) Triwulan IV Tahun 2019
Source: Bank Indonesia, Monetary Policy Report (Economy, Monetary and Finance) Quarter IV of 2019

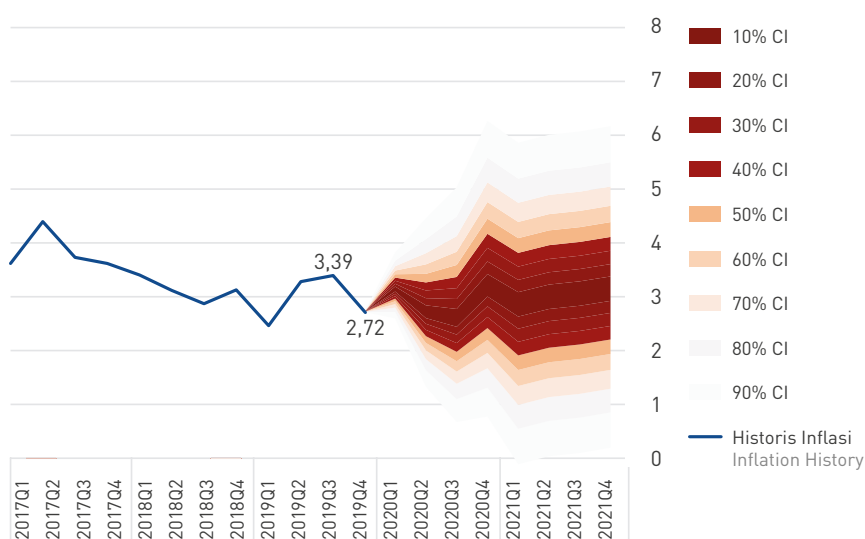
Prospek Inflasi Indonesia

Inflasi IHK 2020 diperkirakan tetap rendah dan stabil dalam kisaran sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Terjaganya inflasi bersumber dari tekanan inflasi dari kelompok inti dan *volatile food* yang menurun. Inflasi inti diperkirakan lebih rendah sejalan dengan ekspektasi inflasi yang terkendali permintaan domestik yang terkelola dengan baik serta pergerakan nilai tukar yang stabil sesuai fundamental. Walaupun demikian, beberapa risiko perlu dicermati karena dapat mempengaruhi imbalan terhadap prospek inflasi. Risiko tersebut diantaranya adalah harga komoditas global terutama harga minyak, emas, dan komoditi pangan lainnya. Selain itu, perkembangan COVID-19 juga menjadi perhatian karena dapat mengganggu distribusi komoditas impor. Bank Indonesia tetap konsisten menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mengendalikan inflasi tetap rendah dan stabil dalam sasaraannya adalah $3,0\% \pm 1\%$ pada tahun 2020 dan 2021.

Inflation Prospects of Indonesia

2020 CPI inflation is expected to be at a lower level and stable within a predetermined target range. The subdued inflation is due to inflationary pressure from the core group and declining volatile food. Core inflation is expected to be lower in line with expectations of inflation being controlled by well-managed domestic demand and stable exchange rate movements following the fundamentals. Nevertheless, several risks are required to consider since they can influence the balance of the inflation outlook. These risks include global commodity prices, especially oil, gold, and other food commodity prices. Also, the development of COVID-19 is a concern as it can disrupt the distribution of imported commodities. Bank Indonesia attempts to keep maintaining price stability and strengthening policy coordination with the government both at the central and regional levels to control and stabilize inflation at the low level with the target of $3.0\% \pm 1\%$ in 2020 and 2021.

Grafik Proyeksi Inflasi Indonesia
Chart of Indonesia's Inflation Projection



Sumber: Bank Indonesia, Laporan Kebijakan Moneter (Ekonomi, Moneter dan Keuangan) Triwulan IV Tahun 2019
Source: Bank Indonesia, Monetary Policy Report (Economy, Monetary and Finance) Quarter IV of 2019



Prospek Industri Kelistrikan Nasional Prospects of National Electricity Industry

- Proyeksi Kondisi Pembangkit Listrik 2020

Prospek industri kelistrikan diproyeksikan mengalami peningkatan baik dari sisi operasional produksi maupun penjualan listrik. Dengan menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi sepuluh tahun mendatang rata-rata 6,4% per tahun dan bergerak dari realisasi kebutuhan tenaga listrik tahun 2017 dan 2018, proyeksi penjualan tenaga listrik pada tahun 2028 diperkirakan akan mencapai 433 TWh, atau mengalami pertumbuhan rata-rata 6,42% selama 10 tahun mendatang. Beban puncak pada tahun 2028 diproyeksikan akan mencapai 67 ribu. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik tersebut diprogramkan pembangunan pembangkit listrik baru untuk periode 2019 – 2028 sebesar 56 GW.

- Pengembangan Pembangkit di 2020

Rencana penambahan kapasitas pembangkit selama 10 tahun mendatang (2019 – 2028) untuk seluruh Indonesia adalah 56,4 GW atau pertambahan kapasitas rata-rata mencapai 5,6 GW per tahun. PLTU batubara akan mendominasi jenis pembangkit yang akan dibangun, yaitu mencapai 27,1 GW atau 48%, sementara PLTGU dengan kapasitas 9,1 GW atau 16,2% dan PLTG/MW sebesar 3,3 GW atau 5,8%. Untuk energi baru terbarukan (EBT), yang terbesar adalah PLTA/PLTM sebesar 9,7 GW atau 17,2% dari kapasitas total, disusul oleh PLTP sebesar 4,6 GW atau 8,2%. Sedangkan EBT lainnya sebesar 2,6 GW atau 4,5% berupa PLTS, PLTB, PLTSa, PLTBg, PLTBm dan PLTAL.

- Proyeksi Penjualan Listrik

Dengan menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi sepuluh tahun mendatang rata-rata 6,4% per tahun dan bergerak dari realisasi kebutuhan tenaga listrik tahun 2017 dan 2018, proyeksi penjualan tenaga listrik pada tahun 2028 diperkirakan akan mencapai 433 TWh, atau mengalami pertumbuhan rata-rata 6,42% selama 10 tahun mendatang.

- Projection of Power Plant Conditions in 2020

The prospect of the electricity industry is projected to increase both in terms of operational production and electricity sales. By the assumption of economic growth in the next ten years around 6.4% per year and moving from the realization of electricity demand in 2017 and 2018, the projected sales of electricity in 2028 is expected to reach 433 TWh or growing 6,42% over the next 10 years. The peak load in 2028 is projected to reach 67 thousand. To meet the electricity needs, the construction of new power plants from 2019 to 2028 of 56 GW is established.

- Development of Power Plants in 2020

The planned increase in power plant capacity for the next 10 years (2019 - 2028) all over Indonesia is 56.4 GW or an average capacity increase of 5.6 GW per year. Coal CFPP will dominate all power plant types that will be built, reaching 27.1 GW or 48%, while CCPP of 9.1 GW or 16.2% and GTPP/GEPP of 3.3 GW or 5.8%. For renewable energy the largest is HPP/MHPP of 9.7 GW or 17.2% of total capacity, followed by GPP of 4.6 GW or 8.2%. While the other Renewable Energy of 2.6 GW or 4.5% is by Solar Power Plant, Wind Power Plant, Waste-to-energy Power Plant, Biogas Power Plant, Biomass Power Plant, and Seawater Power Plant.

- Electricity Sales Projection

By the assumption of economic growth in the next ten years around 6.4% per year and moving from the realization of electricity demand in 2017 and 2018, the projected electricity sales in 2028 are expected to reach 433 TWh or growing 6,42% over the next 10 years.

Tabel Proyeksi Penjualan Tenaga Listrik Indonesia Berdasarkan Sektor (GWh)

Table of Electricity Sale Projection in Indonesia Based on Sector (GWh)

Komponen Description	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Rumah Tangga Household	101.307	105.794	110.909	116.363	122.144	128.251	134.627	141.642	149.035	156.802
Bisnis Business	46.332	49.716	53.585	57.599	61.753	66.215	70.869	75.814	81.326	87.048
Publik Public	16.749	17.871	19.122	20.423	21.831	23.267	24.788	26.553	28.436	30.448
Industri Industry	80.991	88.069	95.736	105.094	114.276	122.190	130.655	139.300	148.442	158.415
Jumlah Total	245.379	261.450	279.353	299.510	320.004	339.923	360.939	383.310	407.239	432.713

Sumber: RUPTL 2019 - 2028

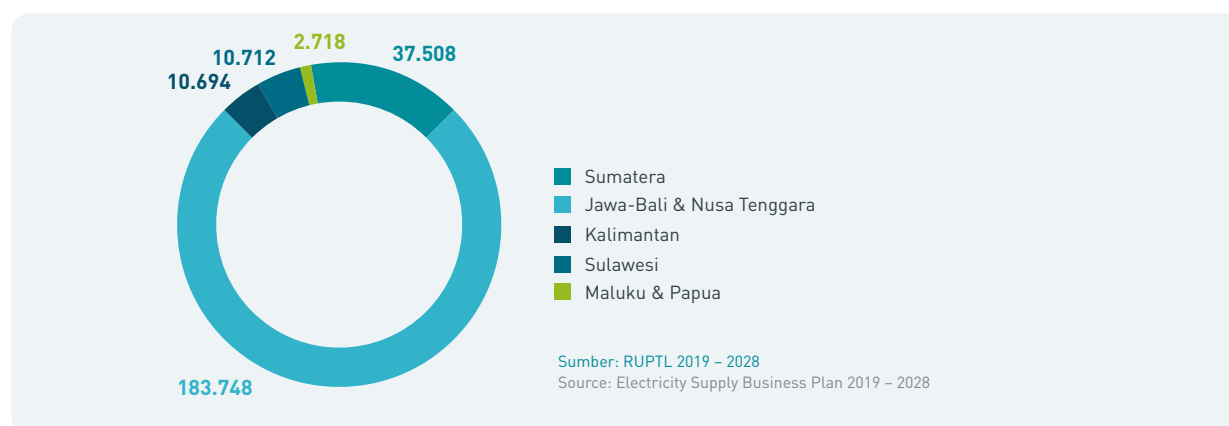
Source: Electricity Supply Business Plan 2019 - 2028

Jika proyeksi penjualan listrik terbagi pada wilayah penjualan, Wilayah Jawa-Bali memiliki kontribusi penjualan listrik terbesar di Indonesia. Hal ini menjadi peluang bagi PJB untuk memaksimalkan operasional produksi dan pasokan listrik.

If the electricity sales projection is divided into sales areas, the Java-Bali Area has the largest electricity sales contribution in Indonesia. This is an opportunity for PJB to optimize its operational production and electricity supply.

Grafik Proyeksi Penjualan Tenaga Listrik Indonesia Berdasarkan Wilayah Tahun 2019 (GWh)

Chart of Electricity Sales Projection in Indonesia Based on Area in 2019 (GWh)



- Pengembangan Pembangkit EBT

Melalui RUPTL PT PLN (Persero) 2019-2028, Kementerian ESDM mengintrusikan PLN agar terus mendorong pengembangan EBT, di mana target penambahan pembangkit listrik dari EBT hingga tahun 2028 sebesar 16.714 MW.

- Development of Renewable Energy Power Plant

Through the Electricity Supply Business Plan 2019-2028 of PT PLN (Persero), the Ministry of Energy and Mineral Resources has requested PLN to maintain the development of Renewable Energy, where the target of additional Renewable Energy-based power plants until 2028 is 16,714 MW.

Tabel Roadmap Pengembangan EBT (MW)

Table of Renewable Energy Development Roadmap (MW)

Pembangkit-EBT Power Plant - Renewable Energy	Kapasitas Capacity	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Jumlah Total
PLTP GPP	MW	190	151	147	455	245	415	2.759	45	145	55	4.607
PLTA HPP	MW	154	326	755	-	182	1.484	3.047	129	466	1.467	8.009
PLTM MHPP	MW	140	238	479	200	168	232	27	20	20	10	1.534
PLT Surya SPP	MWp	63	78	219	129	160	4	250	-	2	2	908
PLT Bayu WPP	MW	-	-	30	360	260	50	150	-	-	5	855
PLT Biomass/Sampah Waste-to-Energy Power Plant	MW	12	139	60	357	50	103	19	5	15	35	794
PLT Kelautan Marine Power Plant	MW	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	7
PLT Bio-Fuel Bio-Fuel Power Plant	Ribu Kilo Meter thousand kilometers	520	487	291	167	151	146	154	159	166	175	2.415
Jumlah Total	MW	560	933	1.697	1.501	1.065	2.287	6.251	199	648	1.574	16.714

Sumber: RUPTL 2019 - 2028

Source: Electricity Supply Business Plan 2019 - 2028

Prospek Usaha PJB PJB Business Prospects

PJB dalam memastikan kedaulatan listrik nasional ikut berpartisipasi aktif dalam program 35 GW dengan pengembangan pembangkit tenaga listrik 35 GW porsi PLN (12 proyek), pengembangan pembangkit 35 GW porsi IPP (17 proyek serta kajian *feasibility study*), dan pengembangan pembangkit energi baru terbarukan.

Pada tahun 2020, PJB memiliki sasaran program portofolio usaha sebesar 11.093,5 MW dengan rincian proyek yang telah beroperasi sebesar 2.000 MW, *progress* COD tahun 2020 sebesar 1.650 MW, *progress* konstruksi sebesar 510 MW, *progress* penyelesaian PPA sebesar 2.175 MW, *progress Feasibility Study* sebesar 2.758,5 MW.

To ensure national electricity business continuity, PJB actively participates in the 35 GW program by developing a 35 GW power plant portion of PLN (12 projects), developing a 35 GW portion of the IPP portion (17 projects and feasibility study studies), and the development of new renewable energy plants.

In 2020, PJB has a business portfolio program target of 11,093.5 MW with details of operating projects at 2,000 MW, COD progress in 2020 at 1,650 MW, construction progress at 510 MW, PPA completion progress at 2,175 MW, Feasibility Study progress at 2,758.5 MW.

Tabel Rencana COD Pembangkitan 2020-2021

Table of COD Plan for Power Plant of 2020-2021

Proyek Projects	Tahun COD COD Year	Kapasitas Capacity	Progress
PLTU Jawa 7 Unit 1 Java-7 CFPP Unit-1	2020	1000	Operasi Operation
PLTU Cilacap Ekspansi 2 Cilacap CFPP Expansion-2	2020	1000	Operasi Operation
Muara Tawar Blok 2,3,4 Muara Tawar Block 2,3,4	2020	650	Konstruksi Construction
PLTU Jawa 7 Unit 2 Java-7 CFPP Unit-2	2020	1000	Konstruksi Construction

Dalam pengembangan di bisnis IPP, PJB akan menggunakan *vehicle company* (anak perusahaan) yaitu PJB Investasi (PJBI) yang akan mengelola investasi atas penugasan pengembangan IPP. PJBI merupakan Anak Perusahaan yang bersifat *unrestricted* (lepas dari induknya). Karena bersifat *unrestricted*, PJBI dapat bergerak lebih leluasa mencari investasi untuk proyek yang produktif dalam rangka menjawab tantangan program pembangunan pembangkit baru dengan total kapasitas 35 GW.

In the development of the IPP business, PJB will use a vehicle company (a subsidiary), PJB Investasi (PJBI), which will manage investment assigned based on IPP's development. PJBI is an unrestricted subsidiary (separated from its parent company). Because it is unrestricted, PJBI can move more freely to find investments for productive projects to answer the challenges of the new power plant development program with a total capacity of 35 GW.

Sejalan dengan RUPTL PT PLN (Persero) 2020-2029 dimana PLN diminta untuk terus mendorong pengembangan EBT, dapat menjadi peuang bagi PJB untuk masuk pada bisnis EBT dan penunjang yang proven secara operasional dan komersial. PJB berencana untuk mengembangkan pembangkit PLTS Apung Cirata dan PLTB Tanah Laut, PLTBm Cofiring, serta melakukan pengembangan bisnis penunjang EBT, serta melakukan *feasibility study* atas potensi pengembangan di bisnis EBT.

In line with PT PLN (Persero) Electricity Supply Business Plan 2020-2029 where PLN is required to continue to encourage the development of Renewable Energy, it can become an opportunity for PJB to enter the Renewable Energy business and allowances which are operationally and commercially proven. PJB plans to develop Cirata Floating SPP and Tanah Laut WPP, Cofiring Biomass Power Plant, and Renewable Energy business support development, as well as feasibility studies on potential development in the Renewable Energy business.

Strategi Perusahaan Kedepan Future Business Strategy

Dalam mencapai sasaran strategis 5 (lima) tahun ke depan, PJB menggunakan Strategy Map PJB yang memiliki 5 (lima) tema yang menjadi panduan perusahaan dalam menyusun Strategic Objective yaitu:

1. **Maximizing shareholders value** yang ditujukan untuk memberikan nilai tambah bagi PLN sebagai pemegang saham.
2. **Growth and sustainability** yang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan Perusahaan.
3. **Synergy PJB Group** yang ditujukan untuk meningkatkan sinergi antar PJB Group.
4. **Operational Excellence** yang ditujukan untuk tetap menjaga fokus dan meningkatkan performa operasi, baik sebagai aset owner, operator dan dibidang operasional lainnya.
5. **Productivity Optimization** menggambarkan pengembangan kapasitas dan kapabilitas SDM PJB untuk menopang pertumbuhan Perusahaan.

In achieving the strategic goals for the next 5 (five) years, PJB applies PJB's Strategy Map with 5 (five) themes that encompass the company in preparing the Strategic Objectives which are as follows:

1. **Maximizing shareholder value** that aims to provide added value to PLN as a shareholder.
2. **Growth and sustainability** that aims to support company growth.
3. **PJB Group Synergy** that aims to increase synergy between PJB Group.
4. **Operational Excellence** that aims to stay focused and improve operational performance, both as an asset owner, operator and in other operational fields.
5. **Productivity Optimization** that illustrates the development of PJB's Human Capital capacity and capability to support company growth.





TATA KELOLA PERUSAHAAN

GOOD CORPORATE GOVERNANCE



Pendahuluan
Introduction



Laporan Manajemen
Management Report



Profil Perusahaan
Company Profile



Tinjauan Pendukung Bisnis
Business Support Review



Analisis dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis



Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan Audit
Audited Financial Statements



Referensi Kriteria AR
AR Criteria Reference

KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA SECARA BERKELANJUTAN

COMMITMENT TO IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan aspek penting bagi PJB dalam mengintegrasikan setiap sumber daya yang dimiliki sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan serta membangun bisnis yang berkelanjutan.

Good corporate governance (GCG) is an important aspect for PJB in integrating every resource to provide added value to stakeholders and build a sustainable business.

Industri ketenagalistrikan merupakan salah satu cabang produksi strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, peran strategis industri ketenagalistrikan dalam menopang setiap aspek kehidupan masyarakat harus dikelola dengan baik. PJB sebagai salah satu entitas bisnis di industri ketenagalistrikan secara konsisten berkomitmen mendukung upaya Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan ketersediaan tenaga listrik.

Sejalan dengan upaya tersebut, PJB terus meningkatkan kualitas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) untuk mengoptimalkan peran dan nilai perusahaan dengan mendorong pengelolaan PJB yang profesional, transparan, dan efisien. Selain itu, penerapan prinsip GCG merupakan wujud pemenuhan bertanggung jawab kepada Pemegang Saham, Mitra Bisnis, dan Masyarakat serta *Stakeholder* lainnya. Melalui penerapan prinsip-prinsip GCG diharapkan mampu memaksimalkan nilai PJB bagi para *Stakeholders* dalam bentuk peningkatan kinerja, kerja sama bisnis yang saling menguntungkan dan peran serta dalam pengembangan masyarakat serta bisnis yang berkelanjutan.

Sebagai sebuah sistem, penerapan GCG merupakan upaya dalam memberi keyakinan bahwa PJB dikelola untuk melindungi kepentingan *Stakeholders* sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip GCG yaitu antara lain:

1. Transparansi

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi material yang relevan bagi Perusahaan. Transparansi diupayakan dan diwujudkan dengan selalu berusaha untuk mempelopori pengungkapan informasi keuangan dan non-keuangan kepada *Stakeholder* serta dalam pengungkapannya tidak terbatas pada informasi yang bersifat wajib dengan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan praktik terbaik GCG.

The electricity industry is one of the branches of strategic production that concerns the lives of many people. Therefore, the strategic role of the electricity industry in supporting every aspect of community life must be managed properly. PJB as one of the business entities in the electricity industry is consistently committed to supporting the Government's efforts in meeting the community's need for electricity availability.

In line with these efforts, PJB continues to improve the quality of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) to optimize the role and value of the company by encouraging professional, transparent, and efficient PJB management. Also, the application of GCG principles is a form of fulfilling the responsibility to Shareholders, Business Partners, and the Community and other Stakeholders. Through the application of GCG principles, it is expected to be able to maximize the value of PJB for stakeholders in the form of performance improvement, mutually beneficial business cooperation, and participation in community development and sustainable business.

As a system, the application of GCG is an effort to assure that PJB is managed to protect the interests of Stakeholders in line with the laws and regulations and the principles of GCG, which include:

1. Transparency

Transparency is openness in conducting the decision making process and presenting material information relevant to the Company. Transparency is pursued and realized through the disclosure of financial and non-financial information to stakeholders, and the disclosure which is not limited to compulsory information by not invalidating the applicable laws and GCG best practices.

2. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ Perusahaan sehingga pengelolaan Perusahaan dilaksanakan secara efektif. Penerapan akuntabilitas mendorong seluruh individu dan/atau Organ Perusahaan agar menyadari hak dan kewajiban, tugas serta kewenangannya.

3. Pertanggungjawaban

Prinsip pertanggungjawaban merupakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dan etika bisnis yang sehat dalam pengelolaan Perusahaan. Pertanggungjawaban diwujudkan oleh Perusahaan dengan selalu berusaha menjadi warga Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

4. Kemandirian

Prinsip kemandirian merupakan pengelolaan Perusahaan secara mandiri tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat termasuk tidak adanya kepentingan politik dan kepentingan pribadi dalam pengelolaan Perusahaan. Kemandirian merupakan suatu keharusan agar Organ Perusahaan dapat bertugas dengan baik serta mampu membuat keputusan yang terbaik bagi Perusahaan dan dilaksanakan dengan selalu menghormati hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta kewenangan masing-masing Organ Perusahaan.

5. Kewajaran

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *Stakeholder* sesuai perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan menjamin bahwa setiap Pemegang Saham dan *Stakeholder* mendapatkan perlakuan yang wajar, dan dapat menggunakan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Accountability

The accountability principle refers to the clarity of functions, implementation, and responsibility of the Company's Organs so that the Company governance can be managed effectively. The implementation of accountability encourages all Company's individuals and/or organs to be aware of their rights and obligations, tasks, and authorities.

3. Responsibility

The responsibility principle is compliance with applicable laws, regulations, and the principle of Good Corporate Governance, and Business Ethics within the Company governance. Responsibility can be realized by the Company through the implementation of Good Corporate Governance.

4. Independence

The independence principle is a form of the Company independent governance without conflict of interest and the influence/pressure of any party opposing the applicable laws, regulations, and the principles of Good Corporate Governance include the absence of political and personal interests within the Company management. Independence is a necessity to allow the Company's Organs to run appropriately, to make the best decisions for the Company, and to consider the rights and obligations, tasks, responsibilities, and the authority of every Organ.

5. Fairness

Fairness and equality towards Stakeholder rights are following the agreement and applicable laws and regulations. The Company guarantees that every shareholder and stakeholder are granted fair treatment and allowed to use their rights regarding the applicable laws and regulations.

Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik The basis for Implementing Good Corporate Governance

Perusahaan berupaya mematuhi setiap peraturan yang merupakan landasan hukum terkait implementasi GCG dan menjadi acuan PJB yang meliputi:

1. Undang-Undang RI No.19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-Undang RI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Menteri Negara BUMN nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara, serta perubahannya melalui Peraturan Menteri Negara BUMN No. 09/MBU/2012 tanggal 06 Juli 2012;

The company strives to comply with every regulation that is the legal basis related to GCG implementation and becomes a reference for PJB which includes:

1. Republic of Indonesia Law No.19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises;
2. Republic of Indonesia Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
3. State-Owned Enterprises Ministry Regulation PER-01/MBU/2011 on August 1, 2011, concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, and the amendment through the Regulation of SOE Ministry No. 09/MBU/2012 on July 6, 2012;



4. Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara.

Selain itu, PJB juga memperhatikan perkembangan terkini best practice yang berlaku terkait implementasi GCG seperti :

1. *Principles of Corporate Governance* oleh *Organization for Economic Co-Operation and Development* (OECD) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Pedoman Umum GCG Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).
3. *ASEAN Corporate Governance Scorecard*.
4. Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

4. Decree of the Secretary of State-Owned Enterprises Ministry No. SK-16/S.MBU/2012 on June 6, 2012, concerning Indicators/ Parameters for Assessing and Evaluating the Implementation of Good Corporate Governance within State-Owned Enterprises.

Additionally, PJB also pays attention to the latest developments in applying best practices related to GCG implementation such as:

1. Principles of Corporate Governance by the Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) and the Financial Services Authority (OJK).
2. Indonesia GCG Manual by National Committee of Governance Policy (KNKG).
3. ASEAN Corporate Governance Scorecard.
4. Corporate Governance Manual for Listed Company by Financial Services Authority Regulation (POJK).

Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik The Purpose of Good Corporate Governance Implementation

Perusahaan mendefinisikan GCG sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis beserta urusan-urusan Perusahaan dalam rangka memastikan keberhasilan bisnis dan akuntabilitas guna meningkatkan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *Stakeholder*. PJB berupaya untuk terus melakukan setiap kegiatan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai perwujudan loyalitas PJB terhadap kepentingan pemegang saham dan *Stakeholder* dengan aktivitas Perusahaan. serta mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku, praktik dan panduan yang telah menjadi standar bisnis. Oleh karena itu, tujuan penerapan GCG di Perusahaan secara spesifik adalah untuk:

1. Mencapai pertumbuhan dan timbal hasil yang maksimal sehingga meningkatkan kemakmuran Perusahaan, serta mewujudkan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang tanpa mengabaikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya.
2. Mengendalikan dan mengarahkan hubungan yang baik antara Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh pemangku kepentingan Perusahaan.
3. Mendukung aktivitas pengendalian internal dan pengembangan Perusahaan.
4. Mengelola sumber daya secara lebih amanah.
5. Meningkatkan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
6. Memperbaiki budaya kerja Perusahaan.
7. Menjadikan Perusahaan bernilai tambah yaitu meningkatkan kesejahteraan seluruh insan Perusahaan berikut peningkatan kemanfaatan bagi pemangku kepentingan Perusahaan.

The Company defines GCG as a process and structure used to direct and manage the business along with the Company's affairs to ensure business success and accountability to increase Shareholder value in the long term, while still taking into account the interests of the Stakeholders. PJB strives to carry out every activity in a way that can be accounted for as a manifestation of PJB's loyalty to the interests of shareholders and stakeholders with the Company's activities. and comply with applicable laws and regulations, practices, and guidelines that have become business standards. Therefore, the specific objectives of implementing GCG in the Company are to:

1. Achieving optimal growth and return to increase the profitability of the Company, and realizing the long-term Shareholder's value along with the interests of other Stakeholders.
2. Controlling and directing good relations between shareholders, Board of Directors, Board of Commissioners, and all stakeholders of the Company.
3. Supporting the Company's activities of internal control and development.
4. Managing resources reliably.
5. Improving accountability to stakeholders.
6. Improving the Company's work culture.
7. Making the Company value-added by increasing the welfare of all the Company's personnel and increasing the benefits for the Company's stakeholders.

Proses Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Process

Perusahaan senantiasa memastikan penerapan setiap proses bisnis selalu sejalan dengan prinsip-prinsip GCG. Proses-proses tata kelola perusahaan di PJB dijelaskan sebagai berikut:

A. Develop GCG

Proses ini berupa mengembangkan struktur dalam penerapan GCG, yang berupa panduan organisasi, pedoman kebijakan dan panduan perilaku. Hasil *output* proses ini adalah *CG Code* dan *Roadmap* GCG sebagai pedoman implementasi GCG di PJB. Kedua output ini akan menjadi referensi dalam penyusunan pedoman kebijakan lainnya atau *soft structure* GCG. Pedoman tersebut dievaluasi secara berkala disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan Perusahaan.

B. Cascade to all Parties

Proses ini berupa mengkomunikasikan dan mensosialisasikan *soft structure* yang telah ditetapkan kepada seluruh Insan Perusahaan. Hasil dari proses ini adalah ditetapkannya *Board Manual* (Tatalaksana Hubungan Direksi dan Dewan Komisaris), PKB hasil kesepakatan Manajemen dengan Serikat Pekerja, dan *Code of Conduct* sebagai pedoman perilaku seluruh Insan Perusahaan. Pedoman tersebut dievaluasi secara berkala disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan Perusahaan. Seluruh karyawan menandatangani komitmen atas kepatuhan terhadap pedoman perilaku setiap tahunnya.

C. Plan the Implementation

Proses ini berupa mengkoordinasikan sumber daya untuk mencapai tujuan. Hasil dari proses ini adalah ditetapkannya Charter (Komite Audit Charter & Internal Audit Charter), Pedoman Pelaksanaan Audit, Surat Keputusan Direksi, dan penandatanganan Pakta Integritas oleh Direksi.

D. Execution

Proses ini berupa kegiatan proses bisnis yang dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip GCG.

E. Monitor & Learn

Proses ini berupa pengukuran pelaksanaan GCG dan tata nilai Perusahaan. Hasil dari proses ini adalah hasil *assessment* GCG, baik yang dilakukan oleh badan independen (pada tahun genap), atau secara *self assessment* (pada tahun ganjil), dan PJB Way dan *Workforce Engagement Survey*.

F. Test & Adapt

Proses ini berupa pengembangan berkelanjutan atas hasil *assessment* GCG. Perlu dilakukan *continuous improvement* dari penerapan GCG yang telah dilakukan dengan memperbaiki *Area of Improvement* yang ditemukan saat pelaksanaan *assessment*.

The company always ensures that the implementation of each business process is always in line with the principles of GCG. The corporate governance processes at PJB are explained as follows:

A. Develop GCG

This process involves structure development in GCG implementation, in the form of organizational Guidance, Policy Manual, and Code of Conduct. The output of this process is the GCG Code and GCG Roadmap as GCG implementation guidelines at PJB. Both outputs (GCG Code and GCG Roadmap) will become references in the preparation of other policy guidelines or GCG soft structure. The guidelines are regularly revised based on the Company's development.

B. Cascade to all Parties

This process is represented in communicating and socializing the soft structure established for all Company personnel. The process results are the establishment of a Board Manual (Board of Directors and Board of Commissioners Manual), Collective Worker Agreement (PKB) as a result of the agreement between Management and Worker Union, and the Code of Conduct as guidelines to behave for all company employees. The guidelines are regularly evaluated based on the Company's development. All employees annually sign a commitment to compliance with the Code of Conduct.

C. Plan the Implementation

This process is represented in coordinating resources to achieve targets. The process results are the stipulation of Audit Committee Charter, Internal Audit Charter, Guidelines for auditing, Board of Directors Decree, and the signing of the Integrity Pact by the Board of Directors.

D. Execution

This process is represented in business process activities established by concerning the principles of GCG.

E. Monitor & Learn

This process is represented in measuring the implementation of GCG and Corporate Culture. The results of this process are GCG assessment results, whether conducted by an independent agency (in even years), or by self-assessment (in odd years), and the PJB Way and Workforce Engagement Survey.

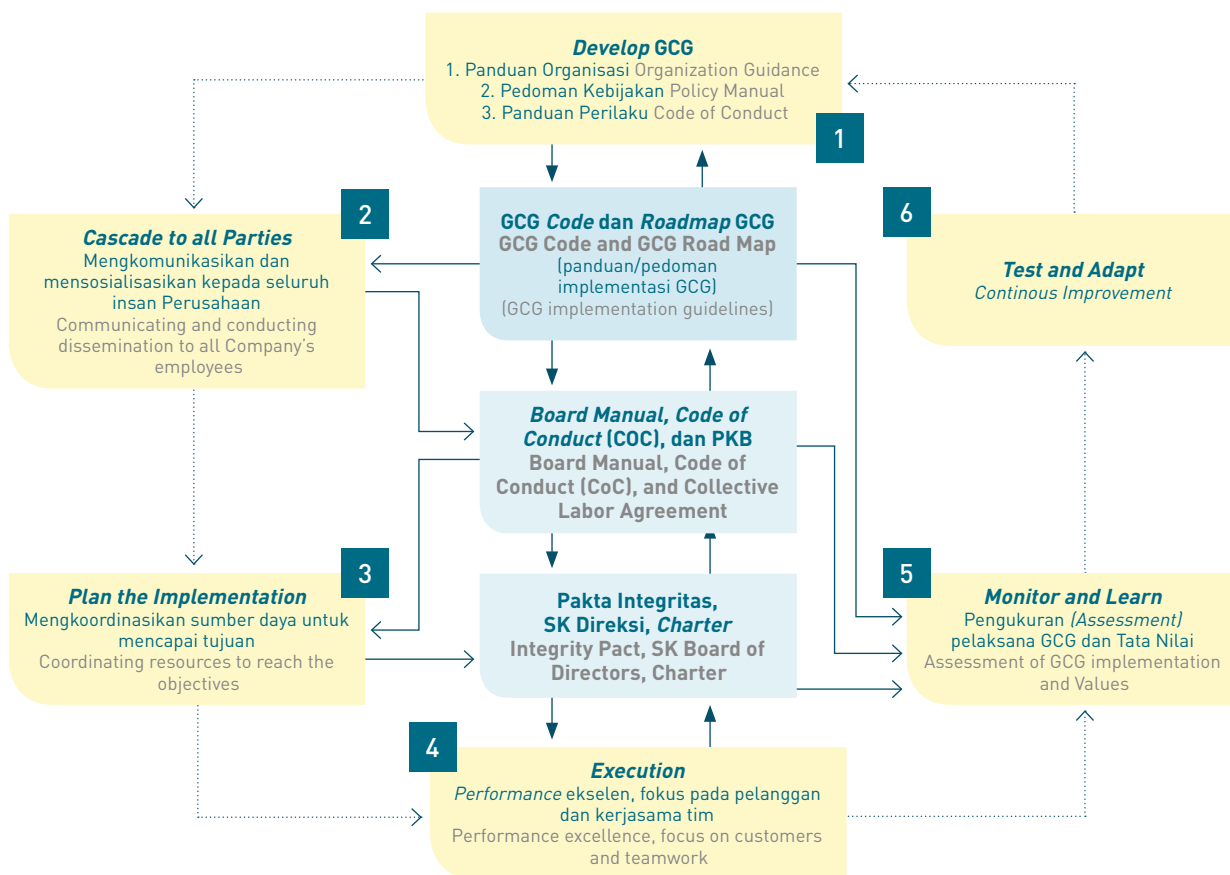
F. Test & Adapt

This process is represented in the continuous development of GCG assessment results. Continuous improvement from the implementation of GCG is considered significant which has been implemented by improving the Area of Improvement during the assessment.



Proses Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Process



Roadmap Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Good Corporate Governance Roadmap

Perusahaan secara bertahap terus melakukan pengembangan implementasi GCG mengacu pada *Roadmap* GCG PJB 2016–2021 yang merupakan *grand strategy* dan *milestone* implementasi GCG sampai tahun 2021 menuju tata kelola perusahaan berkelanjutan dengan menerapkan konsep *Enterprise Governance* sebagai dasar dalam membangun organisasi yang berkelanjutan, yang mencakup proses *Corporate Governance* dan proses *Business Governance*.

The company gradually continues to develop the implementation of GCG referring to the 2016–2021 PJB GCG Roadmap which is the grand strategy and milestone of GCG implementation until 2021 towards sustainable corporate governance by applying the concept of Enterprise Governance as the basis for building a sustainable organization, which includes the Corporate Governance process and the Business Governance process.

**Roadmap Pengembangan dan Implementasi GCG PJB Tahun 2016–2021**

Roadmap for Development and Implementation of PJB GCG in 2016–2021

2016 - 2017	2018 - 2019	2020 - 2021
VISI VISION		
<i>Good Corporate Governance</i>	<i>Good Corporate Company</i>	<i>Good Corporate Citizen</i>
IMPLEMENTASI IMPLEMENTATION		
1. Pemuktahiran Infrastruktur GCG 2. <i>Assessment</i> GCG unit dan Anak Perusahaan 1. GCG infrastructure update 2. GCG Unit and Subsidiaries Assesment	Penerapan Standar Tata Kelola Perusahaan setara dengan Perusahaan Terbuka Standard CG Implementation equivalent to public company	Analisa Penerapan GCG sesuai standar ASEAN CG <i>Scorecard</i> Analysis of GCG implementation based on Asean CG Scorecard standard
SASARAN INDIKATOR INDICATOR TARGET		
1. Pemenuhan ketentuan dan peraturan dalam Tata Kelola Perusahaan 2. Terbentuknya mekanisme Pengendalian Internal 1. Fulfillment of provisions and regulations in GC 2. Internal Controlling Mechanism establishment	Dapat mengendalikan operasi bisnis, khususnya aspek risiko usaha secara efektif Being able to control business operations, especially selectively business risk aspects	Dikenal sebagai perusahaan yang beretika dan bertanggung jawab Known as a Company that have ethics and responsible

Untuk mendorong terciptanya pencapaian misi dan sasaran strategis Perusahaan serta peningkatan kinerja yang berkelanjutan, PJB melaksanakan inisiatif sebagai berikut:

1. Penilaian mandiri atas penerapan GCG tahun 2019 melalui Parameter Kementerian BUMN (SK Sekretaris Menteri BUMN No. SK-16/S. MBU/2012).
2. Penilaian GCG berdasarkan ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) dibantu oleh IICD
3. Penilaian Implementasi Kinerja Ekselen berdasarkan *Baldrige Excellence Framework* tahun 2019.
4. Peninjauan *soft structure* GCG.
5. Monitoring Program RJPP dan RKAP melalui *Corporate Strategic Review Meeting* (CSR) dan *Strategic Review Meeting* (SRM) Bisnis.

To support the achievement of the Company's strategic mission and objectives and sustainable performance improvement, PJB implements the following initiatives:

1. 2018 GCG Assessment tWorker Unionsough the parameters of the Ministry of BUMN (Decree of the Secretary of the BUMN Minister No. SK-16/S. MBU/2012).
2. GCG Assessment based on ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) by IICD.
3. Assessment for the Performance Excellence based on the Baldrige Excellence Framework in 2019.
4. GCG Soft Structure review.
5. RJPP and RKAP Programs Monitoring through the Corporate Strategic Review Meeting (CSR) and Business Strategic Review Meeting (SRM).

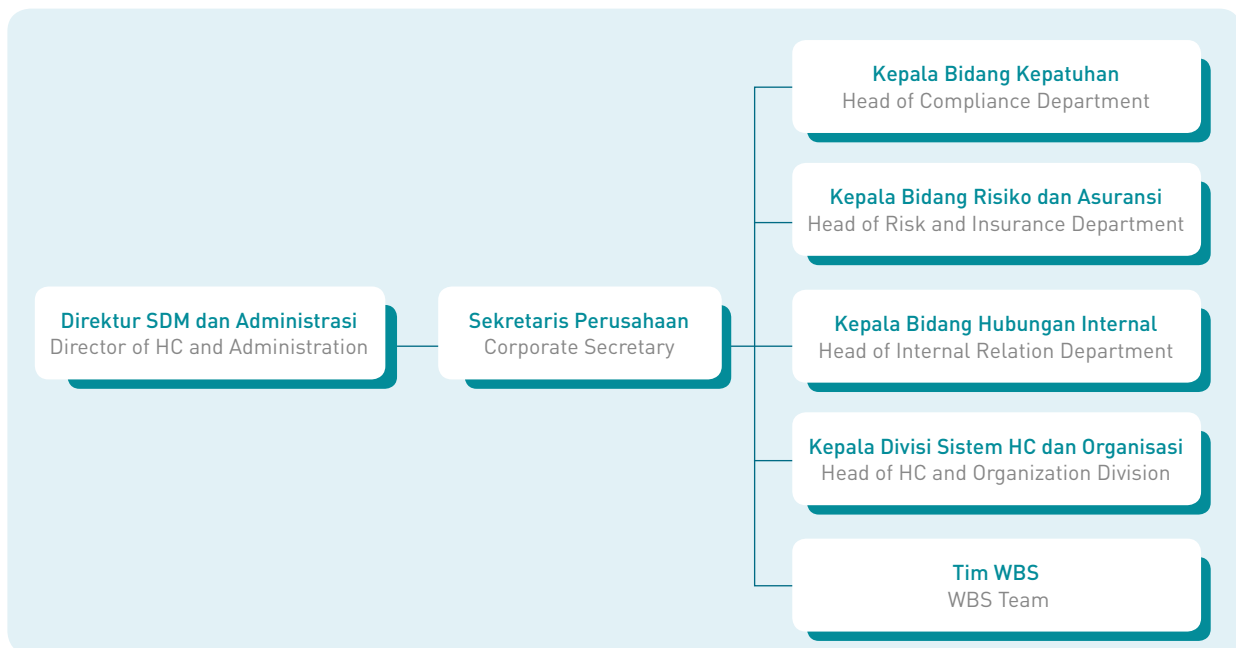
Tanggung Jawab Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Responsibility on GCG Implementation

Perusahaan telah menetapkan Direktur SDM dan Administrasi sebagai penanggung jawab atas penerapan dan pemantauan GCG, sesuai dengan Keputusan Direksi di Luar Rapat tentang Penunjukkan Penanggung Jawab dalam Penerapan dan Pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) tertanggal 2 Juli 2013. Adapun teknis operasional penerapan dan pemantauan GCG, Direktur SDM dan Administrasi dibantu oleh Sekretaris Perusahaan sesuai dengan Peraturan Direksi No. 010.P/019/DIR/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja PJB.

The company has designated the Director of Human Resources and Administration as the person responsible for GCG implementation and monitoring, following the Decree of the Directors Outside the Meeting on Appointing Responsibilities in the Implementation and Monitoring of Good Corporate Governance dated July 2, 2013. The technical operational implementation and GCG monitoring, HC Director and Administration assisted by the Corporate Secretary following Directors' Regulation No. 010.P / 019 / DIR / 2019 concerning Organization and Working Procedures of PJB.

Struktur Pengelola Penerapan GCG

Management Structure of GCG Implementation



Tanggung jawab Direktur SDM dan Administrasi terkait penerapan dan pemantauan GCG antara lain:

1. Menyusun rencana kerja yang diperlukan untuk memastikan perusahaan memenuhi Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) di PJB dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
3. Memantau dan menjaga kepatuhan Perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perusahaan dengan pihak ketiga.
4. Melaporkan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang disampaikan kepada RUPS dan Dewan Komisaris minimal sekali dalam setahun.

Laporan pelaksanaan GCG disusun oleh Sekretaris Perusahaan untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Komisaris dan RUPS melalui Laporan Hasil *Assessment* GCG, Laporan Manajemen dan Laporan Tahunan Perusahaan.

The responsibilities of GCG implementation and monitoring by the Director of HC and Administration include:

1. Preparing a work plan to ensure company compliance with the Good Corporate Governance Code in PJB and other regulations to implement the principles of Good Corporate Governance.
2. Monitoring and maintaining the Company's activities to comply with the applicable provisions.
3. Monitoring and maintaining the Company's compliance with all agreements and commitments by the Company with third parties.
4. Reporting the implementation of Good Corporate Governance to the GMS and the Board of Commissioners at least once a year.

The GCG implementation report is prepared by the Corporate Secretary and subsequently submitted to the Board of Commissioners and the GMS through the GCG Assessment Report, Management Report, and Annual Report.

Penilaian Implementasi GCG Tahun 2019 Assessment of GCG Implementation in 2019

Penilaian pengukuran penerapan GCG tahun 2019 dilakukan secara mandiri (*self assessment*) yang berita acaranya telah ditandatangani pada tanggal 19 Desember 2019, setelah sebelumnya pada tahun 2018 dilakukan oleh pihak independen yaitu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berdasarkan No. LGCG-199/PW13/4/2019 tanggal 2 April 2019.

Parameter yang digunakan dalam *assesment* tersebut berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor 16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*). Parameter tersebut mencakup 6 (enam) aspek *governance* yaitu Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan, Pemegang Saham dan RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, Pengungkapan Informasi dan Transparansi, dan Aspek Lainnya.

Proses penilaian penerapan GCG tahun 2019 mencakup evaluasi atas penerapan GCG yang telah dilakukan selama 2019 berdasarkan *Area of Improvement* (Aoi) atas hasil *assessment* GCG di tahun sebelumnya. Hasil penilaian GCG tahun 2019 mencapai skor 94,45 atau meningkat dari skor penilaian di tahun 2018 yang sebesar 94,17. Skor penilaian di tahun 2019 tersebut sekaligus berhasil memenuhi 101,12 % atas target yang telah ditetapkan dalam Kontrak Manajemen 2019 yang sebesar 93,40. Pencapaian per aspek *governance* tahun 2019 adalah sebagai berikut:

The assessment of the implementation of GCG in 2019 was measured independently (*self-assessment*) and the official report was signed on December 19, 2019, which previously in 2018 was carried out by an independent party, the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) based on No. LGCG-199 / PW13 / 4/2019 dated April 2, 2019.

The parameters used in the assessment are based on the Decree of the Secretary of the SOE Ministry No. 16/S. MBU/2012 concerning Indicators/Parameters for Evaluation and Assessment of the Implementation of Good Corporate Governance. These parameters include 6 (six) aspects of governance: Commitment to the Implementation of Good Corporate Governance Continuously, Shareholders and GMS, Board of Commissioners, Directors, Information Disclosure and Transparency, and Other Aspects.

The process of evaluating the implementation of GCG in 2019 includes an evaluation of the application of GCG that has been carried out during 2019 based on the Area of Improvement (Aoi) of the results of the GCG assessment in the previous year. The results of the GCG assessment in 2019 reached a score of 94.45 or increased from the assessment score in 2018 which amounted to 94.17. The assessment score in 2019 also managed to meet 101.12% of the target set in the 2019 Management Contract of 93.40. The achievements of each aspect of corporate governance in 2019 are as follows:

No	Nama Kriteria Criteria	Bobot Value	Capaian Tahun 2019 Achievements in 2019		Keterangan Description
			Skor Score	% Capaian Achievements %	
1	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment to Implementation of Sustainable Good Corporate Governance	7	7,000	100	Sangat Baik Excellent
2	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal Shareholders and GMS/Capital owners	9	7,229	80,32	Sangat Baik Excellent
3	Dewan Komisaris Board of Commissioners	35	33,077	94,51	Sangat Baik Excellent
4	Direksi Board of Directors	35	33,147	94,71	Sangat Baik Excellent
5	Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Traparency	9	9,000	100	Sangat Baik Excellent
6	Aspek Lainnya Other aspects	5	5,000	100	Sangat Baik Excellent
Skor Keseluruhan Total Score		100	94,45		
Kualifikasi Kualitas Penerapan GCG Category of GCG Quality			Sangat Baik Excellent		



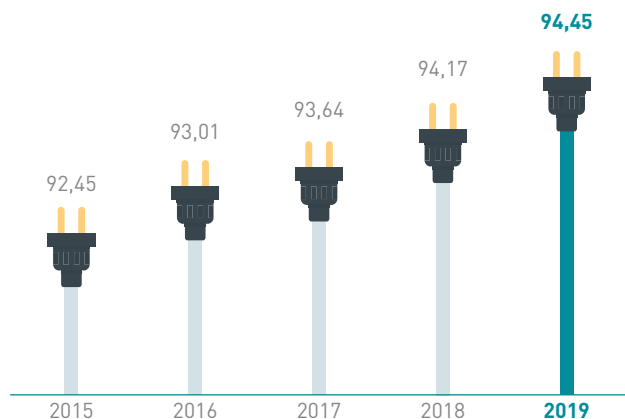
Komitmen Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan

Commitment To Implementation of Sustainable Good Corporate Governance

Perusahaan secara konsisten melakukan penilaian penerapan GCG sejak tahun 2009. Nilai *assessment* GCG yang dicapai PJB terus meningkat dalam 5 (lima) tahun terakhir, sebagaimana ditunjukkan dalam grafik dibawah ini:

The company has consistently assessed the implementation of GCG since 2009. The value of GCG assessments achieved by PJB has increased for the last 5 (five) years, as shown in the graph below:

Skor Penilaian GCG Tahun 2015 - 2019
GCG Assessment Score for 2015 - 2019



Penilaian penerapan GCG tahun 2019 menghasilkan beberapa rekomendasi sebagai *Area of Improvement* (AoI) yang perlu ditindaklanjuti sebagai upaya peningkatan kualitas penerapan GCG di tahun selanjutnya. Rekomendasi penilaian penerapan GCG tahun 2019 adalah sebagai berikut:

The assessment of the GCG implementation in 2019 resulted in several recommendations as an Area of Improvement (AoI) required to be followed up to improve the quality of GCG implementation in the following year. Recommendations for evaluating the application of GCG in 2019 are as follows:

Aspek Aspect	Rekomendasi Recommendations	
Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance	-	-
Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal Shareholders and GMS/ Capital owners	1. Tidak dicantumkan alasan pemberhentian Direksi. 2. Penunjukan pejabat (Direksi dan Komisaris) definitif melebihi 30 hari. 3. Tidak ada penunjukan Komisaris Independen. 4. Tidak ada pedoman penetapan jumlah maksimal jabatan komisaris yang dapat dirangkap oleh Dewan Komisaris. 5. Keterlambatan pengesahan RJPP dan RKAP. 6. Persetujuan aksi korporasi melebihi 30 hari. 7. Perlu pembaharuan <i>subsidiary governance</i> perusahaan induk (penilaian Direksi dan Komisaris, pedoman penentuan honor, penentuan KAP, penentuan dividen, dll).	1. There is no justification stated for the dismissal of Directors. 2. The appointment process of definitive officials (Directors and Commissioners) is more than 30 days. 3. No appointment of an Independent Commissioner. 4. There is no guideline for determining the maximum number of commissioners positions that can be concluded by the Board of Commissioners. 5. Delayed approval of the Company's Long-term Plan and Annual Budget and Operational Plan (ABOP). 6. The approval of corporate actions is more than 30 days. 7. The renewal of subsidiaries' corporate governance of the holding company (assessment of Directors and Commissioners, guidelines for determining honorarium, determining KAP, determining dividends, etc.) is required.



Aspek Aspect	Rekomendasi Recommendations	
Dewan Komisaris Board of Commissioners	1. Perlu penyempurnaan BOC Manual (kebijakan penyampaian informasi yang bersifat insidentil dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris terhadap perjanjian pihak ketiga. 2. Belum memiliki kebijakan dan melakukan pengukuran/penilaian kinerja Dewan Komisaris. 3. Belum melakukan penilaian kinerja Direksi secara individual.	1. BOC Manual Improvement (the policy to convey incidental information and the supervisory function of the Board of Commissioners for third party agreements) is required. 2. Any policy and the performance/assessment indicators for the Board of Commissioners have not already established. 3. The individual performance assessment of the Board of Directors has not already conducted.
Direksi Board of Directors	1. Kenaikan <i>net worth</i>, dividen dan <i>earning per share</i> dalam 3 tahun terakhir masih tidak konsisten. 2. Pengajuan usulan RJPP melebihi batas waktu yang telah ditentukan (maks. 60 hari sebelum periode RJPP).	1. The increase in net worth, dividends, and earnings per share in the last 3 years is still unstable. 2. The submission of Company Long-term Plan proposals exceeds the specified deadline (max. 60 days before the Long-term Plan period).
Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	-	-
Aspek Lainnya Other aspects	-	-

Tidak Lanjut Rekomendasi GCG

GCG Recommendations Follow-up

Perusahaan terus berupaya memenuhi *Area of Improvement* (AoI) telah melakukan *monitoring* atas tindak lanjut rekomendasi hasil penilaian sebelumnya tahun 2018 sebagai berikut:

The company continues to fulfill the Area of Improvement (AoI) and has monitored the follow-up recommendations of the previous assessment results in 2018 as follows:

Rekomendasi Recommendations		Tindak Lanjut Follow-up
Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance		
Tidak ada rekomendasi No recommendations		
Pemegang Saham dan RUPS Shareholders and GMS		
1. Mencantumkan alasan pemberhentian dalam surat pemberitahuan.	1. Stating the reason for the dismissal through Minutes of Dismissal.	Proses tindak lanjut atas hal ini sedang dalam tahap pembahasan di Pemegang Saham. In the process of the Shareholders discussion.
2. Menindaklanjuti seluruh rencana tindak lanjut atas <i>Area of Improvement</i> yang dihasilkan dari <i>assessment</i> GCG tahun 2016.	2. Following up all follow-up plans for the Area of Improvement from the 2016 GCG assessment.	Proses tindak lanjut atas hal ini sedang dalam tahap pembahasan di Pemegang Saham. In the process of the Shareholders discussion.
3. Meminta masukan secara formal dari kementerian teknis maupun BUMN mengenai usulan calon anggota Dewan Komisaris dan melakukan penilaian terhadap bakal calon anggota Dewan Komisaris yang tercantum dalam daftar usulan calon anggota Dewan Komisaris.	3. Requesting formal/official recommendation from the technical ministry and SOE Ministry regarding the proposed candidates for the Board of Commissioners and conduct an assessment of prospective members of the Board of Commissioners listed in the list of proposed candidates for the Board of Commissioners.	Proses tindak lanjut atas hal ini sedang dalam tahap pembahasan di Pemegang Saham. In the process of the Shareholders discussion.

Rekomendasi Recommendations		Tindak Lanjut Follow-up
4. Mengisi kekosongan jabatan Dewan Komisaris tepat waktu dan menyatakan komisaris independen secara eksplisit dalam keputusan pengangkatan Dewan Komisaris minimal 20% sebagai Komisaris Independen serta didukung dengan Berita Acara Pengangkatan/Pelantikan Dewan Komisaris.	4. Occupying the vacant position in the Board of Commissioners on time and declaring independent commissioners explicitly in the decision to appoint a minimum of 20% as an Independent Commissioner supported by Minutes of Appointment/Inauguration of the Board of Commissioners.	Proses tindak lanjut atas hal ini sedang dalam tahap pembahasan di Pemegang Saham. In the process of the Shareholders discussion.
5. Menetapkan aturan yang secara eksplisit menetapkan jumlah maksimal jabatan sebagai komisaris yang dapat dipegang oleh seorang anggota Komisaris.	5. Establishing rules that explicitly specify the maximum number of commissioner positions that can be occupied by a member of the Board of Commissioners.	Proses tindak lanjut atas hal ini sedang dalam tahap pembahasan di Pemegang Saham. In the process of the Shareholders discussion.
6. Mengesahkan usulan RJPP PT PJB tepat waktu.	6. Ratifying PT PJB's Long-term Plan proposal on time.	Proses tindak lanjut atas hal ini sedang dalam tahap pembahasan di Pemegang Saham. In the process of the Shareholders discussion.
7. Mengesahkan RKAP tepat waktu.	7. Ratifying PT PJB's Annual Budget and Operational Plan on time.	RKAP 2020 telah disahkan tepat waktu. The ABOP 2020 has been ratified timely
8. Memberikan persetujuan atas setiap usulan aksi korporasi Direksi tepat waktu (tidak melebihi 30 hari).	8. Approving each proposed corporate action by the Board of Directors on time (not longer than 30 days).	Proses tindak lanjut atas hal ini sedang dalam tahap pembahasan di Pemegang Saham. In the process of the Shareholders discussion.
9. Membuat pedoman penilaian kinerja Direksi individual yang mencakup indikator kinerja utama beserta kriteria keberhasilannya.	9. Developing guidelines for the individual performance-assessment of the Board of Directors that includes key performance indicators and target criteria.	Proses tindak lanjut atas hal ini sedang dalam tahap pembahasan di Pemegang Saham. In the process of the Shareholders discussion
10. Membuat pedoman/sistem penilaian kinerja Dewan Komisaris individual dan kolegal yang memuat sekurang-kurangnya indikator kinerja utama dan kriteria keberhasilan.	10. Developing guidelines and systems for evaluating the individual and collegial performance of the Board of Commissioners that contain at least key performance indicators and success criteria.	Proses tindak lanjut atas hal ini sedang dalam tahap pembahasan di Pemegang Saham. In the process of the Shareholders discussion.
11. Membuat dan mengesahkan kontrak kinerja Komisaris secara kolegal.	11. Establishing and ratifying the Board of Commissioners' performance contracts collectively.	Proses tindak lanjut atas hal ini sedang dalam tahap pembahasan di Pemegang Saham. In the process of the Shareholders discussion.
12. Melakukan penilaian atas capaian kinerja kolegal Dewan Komisaris dan mencantumkannya dalam Risalah RUPS.	12. Assessing the performance achievements of the Board of Commissioners to be submitted in the GMS Minutes.	Proses tindak lanjut atas hal ini sedang dalam tahap pembahasan di Pemegang Saham. In the process of the Shareholders discussion.
13. Menyusun pedoman penetapan gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas serta tantiem/insentif kinerja dengan menggunakan formula yang memperhitungkan tingkat pendapatan, tingkat inflasi, besaran aktiva dan variable lainnya.	13. Developing guidelines for determining salary/honorarium, benefits, and facilities as well as bonuses/performance incentives by a formula based on the level of income, the level of inflation, the number of assets, and other variables.	Proses tindak lanjut atas hal ini sedang dalam tahap pembahasan di Pemegang Saham. In the process of the Shareholders discussion.
14. Menyusun pedoman penunjukan auditor eksternal.	14. Developing guidelines for appointing external auditors.	Proses tindak lanjut atas hal ini sedang dalam tahap pembahasan di Pemegang Saham. In the process of the Shareholders discussion.
15. Melakukan pembahasan mengenai usulan penetapan KAP, alasan-alasan penunjukan dan besaran honoronya.	15. Discussing the proposed establishment of the Public Accounting Firm (KAP), the reasons for the appointment, and the amount of fee.	Proses tindak lanjut atas hal ini sedang dalam tahap pembahasan di Pemegang Saham. In the process of the Shareholders discussion.

Rekomendasi Recommendations		Tindak Lanjut Follow-up
16. Membuat dan mengesahkan pedoman penyusunan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.	16. Preparing and ratifying guidelines for the Annual Report and the Supervisory Report of the Board of Commissioners.	Proses tindak lanjut atas hal ini sedang dalam tahap pembahasan di Pemegang Saham. In the process of the Shareholders discussion.
17. Melakukan telaahan terhadap Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.	17. Reviewing the Annual Report and the Supervisory Report of the Board of Commissioners.	Proses tindak lanjut atas hal ini sedang dalam tahap pembahasan di Pemegang Saham. In the process of the Shareholders discussion.
18. Menetapkan pedoman/kebijakan dividen.	18. Establishing dividend guidelines/policies.	Proses tindak lanjut atas hal ini sedang dalam tahap pembahasan di Pemegang Saham. In the process of the Shareholders discussion.
Dewan Komisaris Board of Commissioners		
1. Melengkapi <i>Board Manual</i> Dewan Komisaris dengan muatan berisi tentang kebijakan terkait penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris yang bersifat insidental dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris terhadap perjanjian dengan pihak ketiga.	1. Completing the Board of Commissioners' Manual with policies related to the information submitted to the Board of Commissioners that is incidental and the supervisory function of the Board of Commissioners on agreements with third parties.	Proses tindak lanjut atas hal ini sedang dalam tahap proses pembahasan di Dewan Komisaris. In the process of the Board of the Commissioners discussion.
2. Mencantumkan dalam surat usulan kepada Pemegang Saham dan Rencana Kerja Anggaran Dewan Komisaris nama calon auditor eksternal beserta besaran imbal jasa yang akan diberikan.	2. Stating in the proposal letter to the Shareholders and the Budget and Work Plan of the Board of Commissioners as well as the institution name of the prospective external auditor and the amount of fee.	Proses tindak lanjut atas hal ini sedang dalam tahap proses pembahasan di Dewan Komisaris. In the process of the Board of the Commissioners discussion.
3. Menuntaskan <i>Area of Improvement</i> aspek Dewan Komisaris pada periode assessment sebelumnya.	3. Completing the Area of Improvement aspects of the Board of Commissioners in the previous assessment period.	Proses tindak lanjut atas hal ini sedang dalam tahap proses pembahasan di Dewan Komisaris. In the process of the Board of the Commissioners discussion.
4. Membuat kebijakan pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris.	4. Developing measurement and assessment policies on the performance of the Board of Commissioners.	Proses tindak lanjut atas hal ini sedang dalam tahap proses pembahasan di Dewan Komisaris. In the process of the Shareholders discussion.
5. Menilai kinerja Direksi secara individu.	5. Assessing the individual performance of the Board of Directors.	Proses tindak lanjut atas hal ini sedang dalam tahap proses pembahasan di Dewan Komisaris. In the process of the Board of the Commissioners discussion.
6. Melengkapi tata tertib rapat dengan poin pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya dan telaah Dewan Komisaris serta Keputusan RUPS atas usulan dari Direksi.	6. Completing the rules of the meeting with the evaluation of the follow-up to the meeting results and the review of the Board of Commissioners and the GMS Resolution on the Board of Directors' proposal.	Proses tindak lanjut atas hal ini sedang dalam tahap proses pembahasan di Dewan Komisaris. In the process of the Board of the Commissioners discussion.
7. Memerintahkan kepada Sekretaris Dewan Komisaris agar menuangkan hasil keputusan yang diambil ke dalam Risalah Rapat.	7. Requesting the Secretary of the Board of Commissioners to publish the Resolution in the Meeting Minutes.	Proses tindak lanjut atas hal ini sedang dalam tahap proses pembahasan di Dewan Komisaris. In the process of the Board of the Commissioners discussion.
8. Menandatangani Piagam Komite Audit, Piagam Komite Sumber Daya Manusia dan Organisasi, dan Piagam Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan.	8. Signing the Audit Committee Charter, the Human Resources and Organization Committee Charter, and the Risk Management and Compliance Committee Charter.	Piagam Komite telah ditandatangani oleh Komisaris Utama. Audit Committee Charter has been signed by the President Commissioner.

Rekomendasi Recommendations		Tindak Lanjut Follow-up
Direksi Board of Directors		
1. Mengambil langkah strategis guna meningkatkan <i>Net Worth</i> , Dividen, dan <i>Earning Per Share</i> secara konsisten setiap tahunnya.	1. Taking strategic steps to increase Net Worth, Dividends, and Earning Per Share consistently every year.	Penyusunan program penguatan kinerja keuangan dalam RKAP 2019: 1. Efisiensi OPEX dalam RKAP. 2. Pengendalian biaya. 3. <i>Cash Management</i> untuk mendukung penyelesaian proyek pengembangan usaha. 4. Peningkatan kinerja keuangan APPA. 5. Peningkatan peran dan kontrol PJB di PA melalui penerapan KPI Individu untuk wakil PJB di PA. 6. <i>Review</i> transaksi terpusat PJB dan PLN dan dampak perpajakannya. 7. Penguatan struktur modal: kajian optimasi pemanfaatan laba ditahan untuk meningkatkan struktur modal. To formulate a program to support financial performance in the 2019 ABOP: 1. OPEX Efficiency in ABOP. 2. Cost control. 3. Cash Management to support business development projects. 4. Improvement of APPA's financial performance. 5. Enhancing the role and control of PJB in PA through the application of Individual KPIs for PJB representatives. 6. Review of PJB and PLN's centralized transactions and the impact of taxation. 7. Improving capital structure: the study of optimizing the use of retained earnings to improve the capital structure.
2. Memperbaiki struktur organisasi, yaitu Sekretaris Perusahaan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama.	2. Improving the organizational structure in which the Corporate Secretary is responsible directly to the President Director.	Telah dilakukan penyesuaian struktur organisasi dengan menempatkan Sekretaris Perusahaan dibawah Direktur Utama. The organizational structure has been adjusted by placing the Corporate Secretary under the President Director.
3. Menginstruksikan Sekretaris Perusahaan agar dalam Bab Laporan Direksi dalam Laporan Tahunan mengungkapkan perbandingan antara hasil dengan target dan kendala-kendala yang dihadapi.	3. Instructing the Corporate Secretary to ensure that the Board of Directors' Report Chapter in the Annual Report informs the comparison between results and targets as well as the challenges faced.	Laporan Tahunan 2018 telah memuat bahasan mengenai perbandingan antara hasil dengan target dan kendala-kendala yang dihadapi. The 2018 Annual Report has included a comparison between results and targets and the challenges faced.
4. Menginstruksikan Sekretaris Perusahaan agar Bab Analisa dan Pembahasan Manajemen dalam Laporan Tahunan memuat dampak perubahan harga terhadap pendapatan perusahaan dan laba bersih atau laba usaha.	4. Instructing the Corporate Secretary to ensure that the Management Discussion and Analysis Chapter in the Annual Report contains the effect of price changes on company revenue and net income or operating profit.	Laporan Tahunan 2018 telah memuat bahasan mengenai dampak perubahan harga terhadap pendapatan perusahaan dan laba bersih atau laba usaha. The 2018 Annual Report has included a discussion of the effect of price changes on company revenue and net income or operating profit.
Pengungkapan Informasi Dan Transparansi Information Disclosure and Transparency		
Tidak ada rekomendasi No recommendations		
Aspek Lainnya Other Aspects		
Tidak ada rekomendasi No recommendations		



Penilaian GCG Berdasarkan ASEAN *Corporate Governance Scorecard* GCG Assessment Based On ASEAN Corporate Governance Scorecard

Sebagai wujud komitmen untuk senantiasa meningkatkan standar implementasi tata kelola korporasi perusahaan, PJB juga melakukan penilaian atas praktek *Corporate Governance* berdasarkan ASEAN CG Scorecard (ACGS).

Komponen penilaian ASEAN CG Scorecard dikelompokkan ke dalam 2 (dua) tingkat sebagai berikut:

- Tingkat 1
Terdiri dari 5 (lima) prinsip yaitu Hak-Hak Pemegang Saham, Perlakuan Setara terhadap Pemegang Saham, Peran Pemangku Kepentingan, Pengungkapan dan Transparansi, serta Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris.
- Tingkat 2
Terdiri dari bonus dan penalti.

Hasil penilaian GCG PJB berdasarkan prinsip dalam ASEAN *Corporate Governance Scorecard* mencapai skor sebesar 80,74. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tingkat kepatuhan PJB termasuk dalam predikat “Good” atau Level 3 (80-89.99), yakni praktek GCG yang dilakukan perusahaan hanya mengadopsi sebagian standar internasional. Berikut adalah rincian skor dari masing-masing komponen *scorecard*:

As a commitment to continuous improvement for the standard of corporate governance, PJB also assesses the practice of Corporate Governance based on the ASEAN CG Scorecard (ACGS).

The components of the ASEAN CG Scorecard assessment are categorized into 2 (two) levels as follows:

- Level 1
Consists of 5 (five) principles: Rights of Shareholders, Equitable Treatment of Shareholders, Role of Stakeholders, Disclosure and Transparency, and Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners.
- Level 2
Consists of bonuses and penalties.

The results of PJB’s GCG assessment based on the ASEAN Corporate Governance Scorecard reached a score of 80.74. This shows that PJB’s compliance level is classified in “Good” predicate or at the Level 3 (80-89.99) in which GCG practices by the Company only adopts several international standards. The following is a score breakdown of each scorecard component:

Total Nilai untuk Praktek GCG PT Pembangkitan Jawa-Bali Total Score for GCG Practices of PT Pembangkitan Jawa-Bali				
	Komponen Penilaian Assessment Components	Bobot Value	Skor Score	% Capaian % Achievement
Level 1				
A	Rights of Shareholders	10,00	10,00	100,00%
B	Equitable Treatment of Shareholders	10,00	6,67	66,67%
C	Role of Stakeholders	15,00	13,85	92,31%
D	Disclosure and Transparency	25,00	20,16	80,65%
E	Responsibilities of The Board	40,00	28,07	70,18%
	Level 1 Score	100,00	78,74	78,74%
Level 2				
	Bonus	30,00	4,00	
	Penalty	(58,00)	(2,00)	
	Level 2 Score	30,00	2,00	
	Skor Keseluruhan Total Score	130,00	80,74	
	Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG Quality Classification for the GCG Implementation			BAIK GOOD



Penilaian Implementasi Kinerja Ekselen Assessment of Performance Excellence

Penilaian kinerja ekselen mengacu pada standar *Baldrige Excellence Framework*. Standar tersebut menjadi benchmark karena telah digunakan secara luas oleh perusahaan di berbagai negara untuk menilai kinerja ekselen perusahaan. Indikator yang dinilai dalam *Baldrige Excellence Framework* mencakup aspek kepemimpinan, Perencanaan Strategis, Fokus Pelanggan, Pengukuran, Analisis, dan Manajemen Pengetahuan, Fokus Tenaga Kerja dan Fokus Operasi.

Pengukuran skor *Baldrige Excellence Framework* dilakukan dengan menggunakan penilaian asesor independen, berdasarkan Indonesia *Quality Award Foundation* (IQAF) yang dilakukan pada tanggal 25 – 29 November 2019.

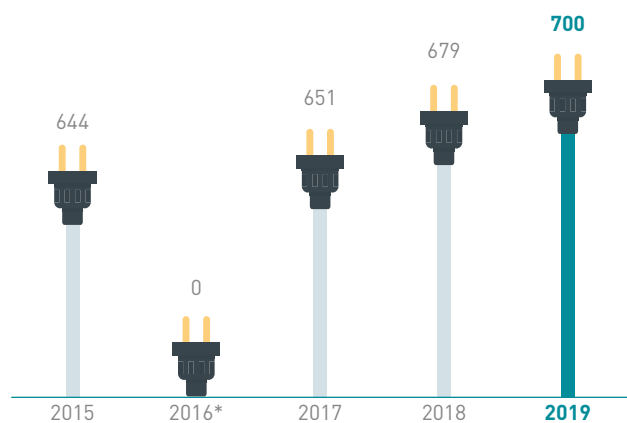
Capaian skor *Malcolm Baldrige* tahun 2019 sebesar 700. Skor meningkat dari tahun 2018 yaitu 679 dan menempatkan PJB pada *band Industry Leader*.

Performance Excellence Assessment refers to the *Baldrige Excellence Framework* standard. The standard is a benchmark since it has been widely used by companies in various countries to assess the performance of the company's excellence. The indicators assessed in the *Baldrige Excellence Framework* cover aspects of leadership, strategic planning, customer focus, measurement, analysis and knowledge management, workforce focus, and operations focus.

The *Baldrige Excellence Framework* score measurement is carried out using an independent assessor assessment, based on the Indonesia *Quality Award Foundation* (IQAF) conducted on November 25-29, 2019.

The achievement of *Malcolm Baldrige*'s score in 2019 was 700. The score increased from 2018 which was 679 and led PJB as the *Industry Leader* band.

Penilaian Implementasi Kinerja Ekselen Tahun 2015 - 2019 Excellence Performance Assessment for 2015 - 2019



* Tahun 2016 tidak melakukan asesmen
In 2016 there was no assessment

Capaian PJB Terkait Penerapan GCG Tahun 2019 PJB Achievements on 2019 GCG Implementation

Komitmen PJB dalam mengaktualisasi prinsip-prinsip GCG di lingkungan Perusahaan tahun 2019 telah menghasilkan beberapa capaian diantaranya tercermin melalui hal-hal sebagai berikut:

1. HR Excellence Awards tahun 2019

PJB menerima 3 (tiga) penghargaan dengan rating AA dalam kategori: *Learning & Development Strategy*, *HR Transformation Strategy*, dan *HR Technology Strategy*. Penghargaan ini diterima pada 10 April 2019.

PJB's commitment to actualizing GCG principles in the Company's environment in 2019 has resulted in several achievements presented as follows:

1. HR Excellence Awards in 2019

PJB received 3 (three) awards with an AA rating in the categories: *Learning & Development Strategy*, *HR Transformation Strategy*, and *HR Technology Strategy*. This award was received on April 10, 2019.

2. Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2019

PJB UP Gresik menjadi juara untuk kategori *Social Empowerment* selama 3 tahun berturut-turut. AREA sekaligus menjadi wadah bagi perusahaan-perusahaan di Asia untuk mengetahui isu global maupun perkembangan SDG's di dunia. Penghargaan diterima pada 24 Mei 2019.

3. CSR Indonesia Award 2019

PJB BPWC meraih penghargaan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada kategori Didaktika Pratama Unggul. Apresiasi diberikan atas partisipasi perusahaan dalam membantu masyarakat di bidang edukasi, melalui TK ElektriKA binaannya. Penghargaan diterima pada 30 – 31 Juli 2019.

4. Indonesia Sustainable Development Goals Awards (ISDA) 2019

PJB menerima 11 penghargaan pada Indonesia *Sustainable Development Goals Awards* (ISDA) 2019 berupa 2 (dua) buah *Platinum Award*, 5 (lima) *Gold Award*, 3 (tiga) *Silver Award*, dan 1 (satu) gelar terbaik kategori Perorangan tingkat lapangan. Penghargaan diterima pada 6 September 2019.

5. Subroto Award Tahun 2019

PJB meraih 3 (tiga) penghargaan Bidang Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) pada Kategori PLTU/GU dan satu penghargaan Bidang Efisiensi Energi. PLTU Paiton 1 & 2, PLTGU Muara Tawar, PLTU Ropa memperoleh penghargaan bidang K2 atas pemenuhan standarisasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik, pengamanan instalasi tenaga listrik, serta pengamanan pemanfaatan tenaga listrik. Sementara UP Brantas meraih juara untuk Manajemen Energi sub kategori Inovasi Khusus pada Industri dan Bangunan Gedung. Penghargaan diterima pada 27 September 2019.

6. Annual Report Award Tahun 2018

PJB berhasil meraih predikat juara 1 (satu) *Annual Report Award* 2018 pada kategori 'Private Non Keuangan Non Listed'. *Annual Report* PJB tahun 2018 mengangkat tema 'Menghadirkan Nilai Tambah dan Harapan Baru Bagi Pemangku Kepentingan Melalui Perkembangan Berkelanjutan'. Melalui tema ini PJB menunjukkan eksistensinya sebagai Perusahaan yang mampu menghadirkan laporan berkualitas serta relevan dengan perkembangan ekonomi dan industri kelistrikan saat ini. Penghargaan diterima pada 14 November 2019.

7. PROPER Emas Tahun 2019

PJB UP Paiton dan UP Gresik meraih peringkat emas dalam PROPER 2019 yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tahun 2019 merupakan kali ketiga UP Paiton mempertahankan PROPER Emas dan menjadi tahun perdana UP Gresik mendapatkan PROPER Emas. Dengan bertambahnya 2 PROPER Emas ini maka PJB telah memiliki 4 PROPER Emas di tiga tahun terakhir dan berhasil menjadi pemilik PROPER Emas terbanyak di PLN Grup.

2. Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2019

PJB Gresik Generation Unit won the Social Empowerment category for 3 years in a row. AREA is also a place for companies in Asia to find out global issues and the development of SDG's in the world. The award was received on May 24, 2019.

3. CSR Indonesia Award 2019

PJB CRMU won the Corporate Social Responsibility (CSR) award in the Superior Primary Didactic category. Appreciation is given for the company's participation in assisting the community in the field of education, through its assisted ElektriKA Kindergarten. The award was received on 30 - 31 July 2019.

4. Indonesia Sustainable Development Goals Awards (ISDA) 2019

PJB received 11 awards at the 2019 Indonesia Sustainable Development Goals Awards (ISDA) in the form of 2 (two) Platinum Awards, 5 (five) Gold Awards, 3 (three) Silver Awards, and 1 (one) best degree in the Individual category at the field level. The award was received on 6 September 2019.

5. Subroto Award 2019

PJB won 3 (three) Electricity Safety (K2) awards in the CFPP / GU category and one Energy Efficiency award. Paiton 1 & 2 CFPP, Muara Tawar GTPP, Ropa CFPP received the K2 field award for fulfilling the standardization of equipment and electric power utilization, securing electricity installations, and securing electric power utilization. While UP Brantas won the Energy Management sub-category for Special Innovation in Industry and Building. The award was received on September 27, 2019.

6. Annual Report Award 2018

PJB won the 1st (First Winner) 2018 Annual Report Award in the 'Private Non-Financial Non-Listed' category. The 2018 PJB Annual Report brought the theme 'Bringing New Added Value and Hope to Stakeholders through Sustainable Development'. Through this theme, PJB shows its existence as a company that can present quality reports that are relevant to current economic and electricity industry developments. The award was received on November 14, 2019.

7. PROPER Gold in 2019

PJB Paiton and Gresik Generation Units won Gold PROPER in the 2019 PROPER organized by the Ministry of Environment and Forestry. 2019 is the third time that UP Paiton retained the Gold PROPER and became the first year that UP Gresik received a Gold PROPER. With the addition of these 2 Gold PROPERs, PJB has had 4 Gold PROPERs in the last three years and managed to become the largest Gold PROPER owner in the PLN Group.



Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan Audit
Audited Financial Statements



Referensi Kriteria AR
ARA Criteria Reference

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE

Struktur tata kelola Perusahaan baik dari segi organ maupun kebijakan dirancang agar dapat menunjang implementasi tata kelola Perusahaan yang baik di lingkungan PJB yang sejalan dengan nilai-nilai Perusahaan. Perusahaan secara berkala mengkaji dan mengembangkan organ serta kebijakan perusahaan agar senantiasa sesuai dengan skala organisasi dan dinamika bisnis yang dijalankan PJB. PJB mendorong *awareness* terhadap peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, maupun karyawan guna terciptanya Tata Kelola Perusahaan yang berkelanjutan.

The corporate governance structure both in terms of organs and policies are designed to be able to support the implementation of good corporate governance in the PJB environment that is in line with Company values. The company periodically reviews and develops organizations and company policies to always follow the scale of the organization and business dynamics run by PJB. PJB encourages awareness of the roles and responsibilities of the Board of Commissioners, Directors, and employees to create sustainable corporate governance.

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan

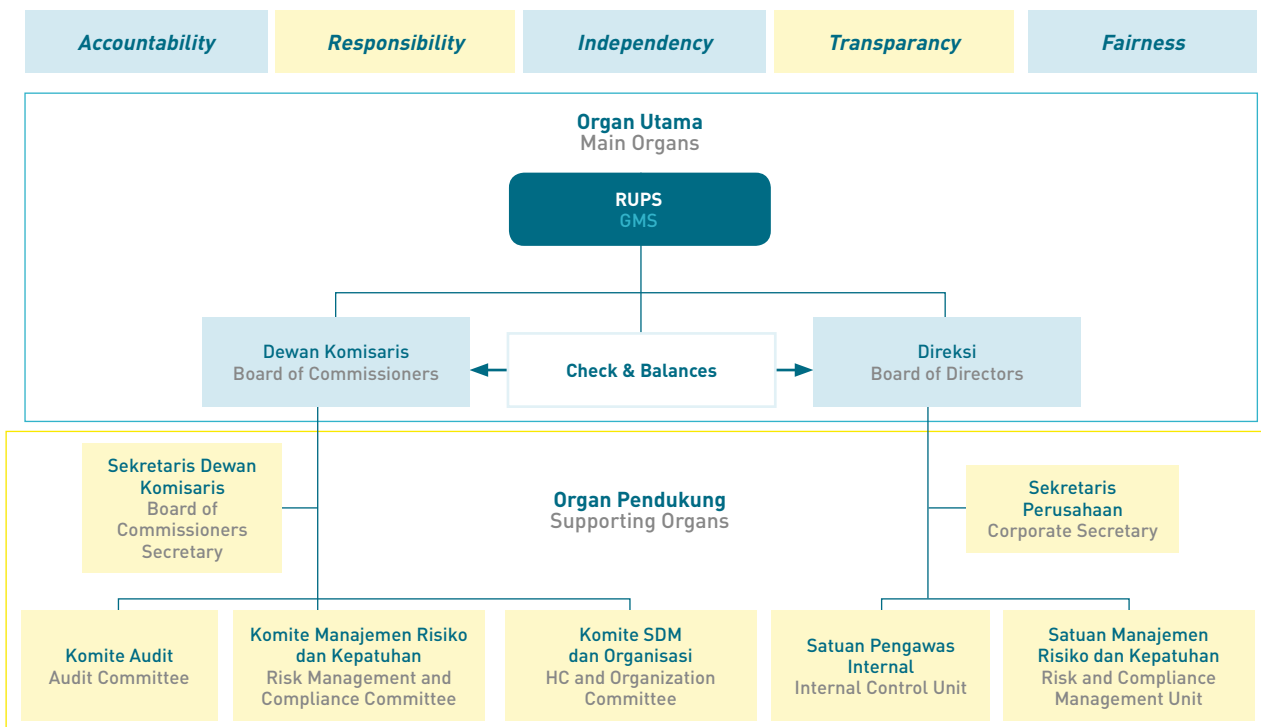
Corporate Governance Organizational Structure

Struktur organ tata kelola PJB terdiri dari Organ Utama dan Organ Pendukung Perusahaan. Organ Utama Perusahaan meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Sedangkan organ pendukung terdiri dari Sekretaris Perusahaan, Satuan Pengawasan Internal, Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan, Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan, Komite SDM dan Organisasi.

Organ Structure of PJB Corporate Governance consists of Main Organ and Supporting Organ. The Company's Main Organs include the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors. While the supporting organs consist of the Corporate Secretary, Internal Supervision Unit, Risk and Compliance Management Unit, Secretary of the Board of Commissioners, Audit Committee, Risk and Compliance Management Committee, HC and Organization Committee.

Struktur Organ Tata Kelola PJB

PJB Corporate Governance Structure



Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Policies

Perusahaan menyadari bahwa kebijakan (*Softstructure*) menjadi bagian penting dalam implementasi GCG sebagai perangkat aturan yang menjadi pedoman bagi organ tata kelola Perusahaan untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, *best practice* serta sejalan dengan nilai-nilai budaya PJB. Kebijakan tata kelola Perusahaan PJB antara lain:

1. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*CG Code*);
2. Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*);
3. Pedoman Tatalaksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*);
4. Pedoman Tatalaksana Kerja Dewan Komisaris (*Board of Commissioner Manual*);
5. Pedoman Tatalaksana Kerja Direksi (*Board of Director Manual*);
6. Pedoman *Subsidiary Governance* (Tata Kelola Komunikasi APPA);
7. Kebijakan Pengungkapan Informasi (*Disclosure Information*);
8. *Audit Internal Charter*;
9. *Charter* Komite;
10. Pedoman Kebijakan Perusahaan;
11. Pedoman terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN);
12. Pedoman terkait benturan kepentingan;
13. Program Pengendalian Gratifikasi;
14. Pedoman penegakan disiplin dan penanganan pelanggaran (*Whistleblowing System/WBS*);
15. Program PJB Bersih;
16. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Pelestarian Lingkungan (K3L);
17. Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
18. Berbagai kebijakan dan prosedur Perusahaan yang senantiasa dilengkapi dan disempurnakan secara terus-menerus serta disesuaikan dengan peraturan/ perundang-undangan yang berlaku dan terbaru.

Perusahaan melakukan peninjauan ulang dan apabila diperlukan, dilakukan pemutakhiran secara berkala atas kebijakan yang telah dimiliki PJB untuk mengakomodir kebutuhan dan perkembangan Perusahaan, peraturan perundang-undangan serta *best practices* penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

The Company realizes that Policies or Soft structure are the significant part of GCG implementation as an applicable rules that direct the Company's governance organs to apply the corporate governance principles in accordance with the laws and regulations, best practices and aligned with the cultural values of PJB. Corporate governance policies of PJB include:

1. Corporate Governance Code;
2. Code of Conduct;
3. Board Manual;
4. Board of Commissioner Manual;
5. Board of Directors Manual;
6. Subsidiary Governance Code (APPA Communication Governance);
7. Disclosure Information Policy;
8. Internal Audit Charter;
9. Committee Charter;
10. Company Policy Guidelines;
11. Guidelines on the Report of State Officials Asset (LKHPN);
12. Guidelines on conflicts of interest;
13. Gratification Control Program;
14. Guidelines on Whistleblowing System/ WBS;
15. PJB Bersih Program;
16. Occupational Health and Safety Policy and Environmental Conservation (K3L);
17. Goods and Services Procurement Policy; and
18. Various company policies and procedures are continually updated and refined continuously following the applicable laws and regulations.

The Company reviews and periodically updates the policies proposed by PJB to accommodate the needs and developments of the Company, regulation, and best practices for implementing Good Corporate Governance.

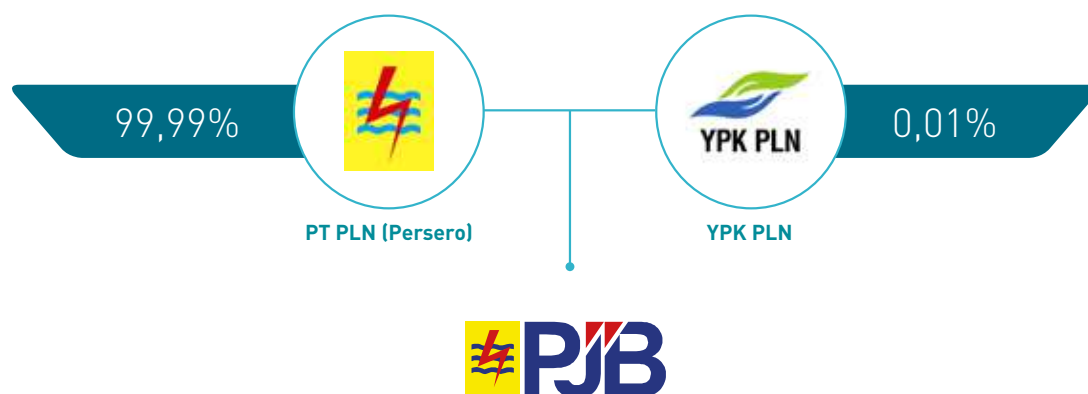


INFORMASI MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI

INFORMATION ON MAJORITY AND CONTROLLING SHAREHOLDERS

Kepemilikan saham atas PJB sebesar 99,99 % dari total saham Perusahaan dipegang oleh PT PLN (Persero) yang sekaligus menjadikannya sebagai Pemegang Saham utama dan pengendali di PJB. Sedangkan kepemilikan saham PJB sebesar 0,01% dimiliki oleh Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero). Direktur Utama PT PLN (Persero) merupakan representasi pemegang saham utama dan pengendali. Secara teknis hubungan dengan anak perusahaan berada di bawah Direktur Keuangan PT PLN (Persero) melalui Divisi Portofolio Management. Informasi lebih detail terkait kepemilikan saham dapat dilihat pada bagian Profil Perusahaan terkait struktur dan komposisi pemegang saham. Adapun skema pemegang saham utama dan pengendali PJB adalah sebagai berikut:

The share ownership in PJB of 99.99% of the total shares of the Company is held by PT PLN (Persero) which also makes it the main and controlling shareholder in PJB. While the PJB share ownership of 0.01% is owned by the Education and Welfare Foundation of PT PLN (Persero). The President Director of PT PLN (Persero) is a representation of the majority and controlling shareholder. Structurally, the relationship with the subsidiary is under the Finance Director of PT PLN (Persero) through the Portfolio Management Division. More detailed information regarding share ownership can be seen in the Company Profile section concerning the shareholder's structure and composition. The schemes of PJB's majority and controlling shareholders are as follows:



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Tata kelola perusahaan menempatkan Pemegang Saham pada wewenang tertinggi dalam pengambilan keputusan strategis dalam menentukan arah pengembangan dan keberlanjutan Perusahaan. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menjadi sarana bagi para Pemegang Saham PJB untuk mempergunakan wewenang dan memperoleh hak-haknya dalam pengambilan keputusan strategis dan menentukan arah Perusahaan serta hal-hal lain yang tidak diserahkan kepada Dewan Komisaris atau Direksi untuk meningkatkan nilai tambah bagi Pemegang Saham. RUPS memiliki kewenangan diantaranya menyetujui atau menolak rencana kerja Perusahaan, menetapkan perhitungan alokasi laba perusahaan, mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris, mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, mengesahkan perubahan Anggaran Dasar, memberikan persetujuan atas laporan tahunan, dan menunjuk akuntan publik, serta menetapkan jumlah dan jenis kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi.

Keputusan yang diambil oleh Pemegang Saham sepenuhnya didasarkan pada kepentingan Perusahaan dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan, bertanggung jawab, adil dan transparan. Berdasarkan hal tersebut, Pemegang Saham memiliki tanggung jawab sebagai berikut :

1. Pemegang Saham harus:
 - a. Memperhatikan kepentingan Pemegang Saham Minoritas dan *stakeholders* sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. Mengungkapkan kepada instansi penegak hukum tentang Pemegang Saham Pengendali yang sebenarnya (*Ultimate Shareholders*) dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau dalam hal diminta oleh otoritas terkait.
2. Pemegang Saham yang merupakan Pemegang Saham Pengendali pada beberapa perusahaan, perlu diupayakan agar akuntabilitas dan hubungan antar perusahaan dapat dilakukan secara transparan;
3. Pemegang Saham Minoritas bertanggung jawab untuk menggunakan haknya dengan baik sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan;
4. Pemegang Saham harus dapat:
 - a. Memisahkan kepemilikan harta Perusahaan dengan kepemilikan harta pribadi;
 - b. Memisahkan fungsinya sebagai Pemegang Saham dan sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi dalam hal Pemegang Saham menjabat pada salah satu dari kedua organ tersebut.

Corporate governance grants the Shareholders with the highest authority to make strategic decisions for the Company's development and sustainability. The General Meeting of Shareholders (GMS) accommodates PJB's Shareholders to exercise their authority as well as to obtain their rights in making strategic decisions and determining the Company's direction and other matters that are not granted to the Board of Commissioners or the Board of Directors intended to increase added value for Shareholders. The GMS has the authority to approve or reject the Company's work plan, determine the calculation of the company's profit allocation, appoint and dismiss the members of the Board of Directors and Board of Commissioners, evaluate the performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors, approve changes to the Articles of Association, approve annual reports, and appoint a public accountant, and determine the amount and type of compensation of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Shareholders' decision is entirely based on the Company's interests by considering aspects of sustainability, responsibility, fairness, and transparency. Therefore, the Shareholders have the following responsibilities:

1. Shareholders must:
 - a. Consider the interests of Minority Shareholders and stakeholders following statutory regulations;
 - b. Disclose to legal bodies about the Ultimate Shareholders if there is an alleged legal violation or if requested by the relevant authority.
2. Controlling Shareholders in several companies are required to be transparent in terms of accountability and affiliation;
3. Minority Shareholders are responsible for exercising their rights properly following the Company's Articles of Association and laws and regulations;
4. Shareholders must be able to:
 - a. Differ the ownership of company assets from personal assets;
 - b. Differ its function as a Shareholder and as a member of the Board of Commissioners or Directors if the Shareholder holds office in one of the two organs.



Ketentuan Penyelenggaraan RUPS Provisions for the GMS

RUPS Perusahaan merupakan representasi manajerial Grup PLN dalam mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan fungsi pengelolaan dan fungsi pengawasan. Sebagaimana dijelaskan dalam Anggaran Dasar Perusahaan, RUPS PJB terdiri dari:

1. RUPS Tahunan tentang persetujuan Laporan Tahunan
2. RUPS Tahunan tentang persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
3. RUPS Luar Biasa (RUPSLB) adalah RUPS yang diselenggarakan di luar jadwal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan.

Pemanggilan rapat dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sebelum RUPS. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dengan mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan tata cara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perusahaan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.

RUPSLB diadakan setiap saat jika dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham. Direksi wajib menyelenggarakan RUPSLB sesuai permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permintaan RUPS diterima. Dalam hal Direksi tidak menyelenggarakan RUPSLB maka Dewan Komisaris/ Pemegang Saham yang menandatangani surat permintaan, berhak untuk memanggil sendiri RUPS atas biaya Perusahaan, setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perusahaan.

The Company's General Meeting of Shareholders is the managerial representation of PLN Group's responsibility towards the entire implementation of the management and supervisory functions. As explained in the Company's Articles of Association, PJB's GMS consists of:

1. Annual GMS regarding approval of the Annual Report
2. Annual GMS regarding approval of the Annual Budget and Operational Plan
3. Extraordinary GMS (EGMS) is a GMS held outside the schedule outlined in the Articles of Association, which can be held at any time based on the need for the interests of the Company.

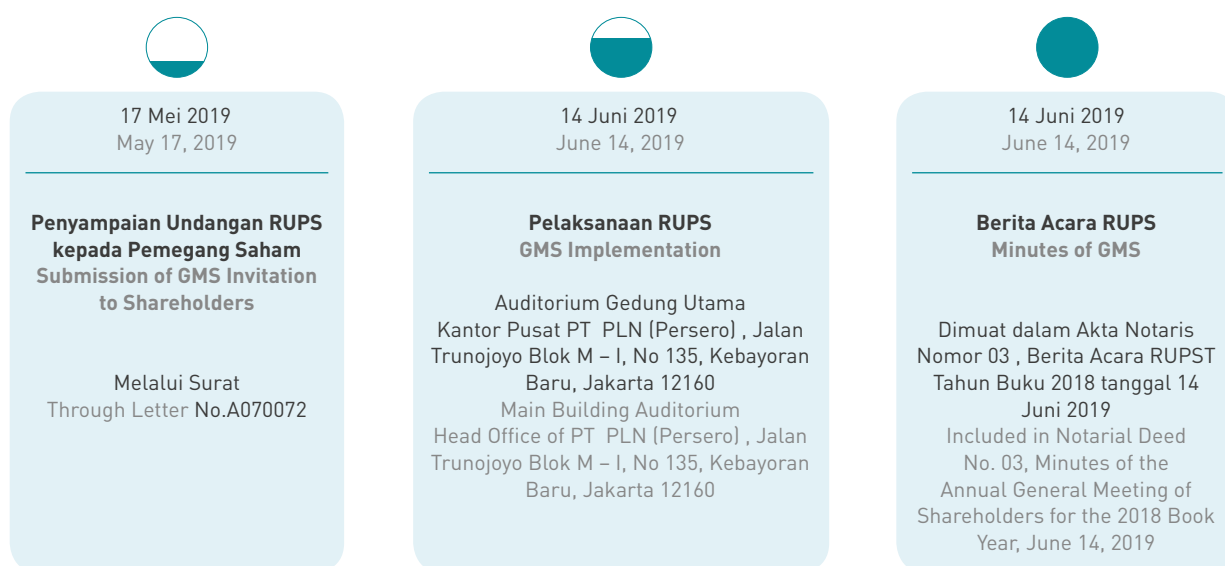
The meeting invitation shall be made not later than 14 days before the GMS. The invitation is made by including the date, time, place, and procedure for the meeting accompanied by a notification that the material to be discussed at the GMS is available at the Company's office from the date of the GMS invitation until the GMS date.

The EGMS is held at any time if deemed necessary by the Board of Directors and/or the Board of Commissioners and/or Shareholders. The Board of Directors is required to hold an EGMS based on a written request from the Board of Commissioners or Shareholders not later than 30 (thirty) days from the date the GMS request is received. If the Board of Directors does not hold an EGMS, the Board of Commissioners/ Shareholders who sign the request letter, are entitled to invite the GMS themselves at the Company's expense, after approved by the Chair of the District Court whose jurisdiction covers the Company's domicile.

Penyelenggaraan RUPS Tahun 2019 The Holding of GMS 2019

Perusahaan telah melaksanakan RUPS sebanyak dua kali sepanjang tahun 2019, yaitu RUPS Tahunan tentang Persetujuan RKAP tanggal 29 Januari 2019 dan RUPS Tahunan tentang Persetujuan Laporan Tahunan tanggal 14 Juni 2019 dengan dihadiri oleh seluruh pemegang saham dan/atau kuasa/wakil pemegang saham, bertempat di PT PLN (Persero). Tahapan pelaksanaan dan hasil RUPS Tahunan tentang Persetujuan Laporan Tahunan 2018 adalah sebagai berikut :

The Company has held GMS twice during 2019, namely the Annual GMS on the Approval of the Annual Budget and Operational Plan on January 29, 2019, and the Annual GMS on the Approval of the Annual Report on June 14, 2019, attended by all shareholders and/or the attorney/representative of shareholders, located at PT PLN (Persero). The stages and the results of the Annual GMS concerning the 2018 Annual Report Approval are as follows:



Hasil Penyelenggaraan RUPS Tahunan tahun 2019

Results of the 2019 Annual GMS

Pemanggilan Invitation	
Surat No. A070072 tanggal 17 Mei 2019 Letter No. A070072 on May 17, 2019	
Berita Acara Minutes of Meeting	
Akta Notaris Nomor 03 Berita Acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2018, tanggal 14 Juni 2019 Notarial Deed No. 03 Minutes of Annual General Meeting of Shareholders of 2018 on June 14, 2019	
Agenda Rapat 1: Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2018 serta Pemberian Pembebasan Tanggungjawab Sepenuhnya (<i>Volledig Acquit et de Charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas Pengelolaan dan Pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018.	Meeting Agenda 1: Approval and Ratification of the Company's Annual Report for Fiscal Year 2018, including the Report on the Implementation of the Supervision of the Board of Commissioners of 2018 and granting release and discharge (<i>Volledig Acquit et de Charge</i>) to the Board of Directors and Board of Commissioners for Management and Supervision that have been carried out during the Fiscal Year 2018.
Keputusan: 1. RUPS menyetujui dan menerima Laporan Tahunan mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2018 yang terdiri atas : Laporan Keuangan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan. 2. RUPS menyetujui dan menerima Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2018. 3. RUPS mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 yang memuat Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian, Laporan Arus Kas Konsolidasian dan Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan pendapat "Wajar tanpa Pengecualian" sebagaimana dimaksud dalam laporannya Nomor 00484/2.1030/AU.1/02/0499-3/1/IV/2019, Tanggal 1 April 2019.	Decision : 1. The GMS approved and received the Annual Report on the Circumstances and the Way of the Company during Fiscal Year 2018 which consisted of Financial Statements, Performance Evaluation Reports, and Compliance Reports. 2. The GMS approved and received the Board of Commissioners' Supervisory Implementation Implementation Report during Fiscal Year 2018. 3. The GMS endorsed the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2018 which contained the Consolidated Financial Position Report, the Consolidated Statements of Profit and Loss and Other Comprehensive Income, the Consolidated Cash Flow Statement and the Consolidated Changes in the Equity Changes and their explanations audited by Amir Abadi Jusuf's Public Accounting Firm, Aryanto, Mawar & Rekan with the opinion "Unqualified" as referred to in the report No: 00484/2.1030/AU.1/02/0499-3/1/IV/2019 on April 1, 2019.

4. RUPS memberikan pembebasan sepenuhnya (<i>Volledig Acquit et de Charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan sesuai dengan tanggung jawab dan tindakan dalam bidang masing-masing yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta termuat dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan. Pengesahan dan Pembebasan tanggung jawab tersebut tidak melepaskan tanggung jawab hukum terhadap Direksi dan/atau Dewan Komisaris apabila Laporan yang diungkapkan tersebut terbukti melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan/atau ternyata dikemudian hari terbukti adanya tindakan yang menyimpang dan/atau merugikan Perseroan.	4. The GMS grants release and discharge (<i>Volledig Acquit et de Charge</i>) to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervision based on their responsibilities and actions in their respective fields that have been carried out during Fiscal Year 2018, as long as these actions do not conflict with applicable laws and regulations as well as contained in the Financial Statements that have been audited by Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan's Public Accountants. The ratification and the release and discharge do not relinquish legal responsibility towards the Board of Directors and/or the Board of Commissioners if the disclosed Report is proven to violate the applicable legal provisions and procedures and/or in the future there is evidence of deviant actions and/or harm to the Company.
Tindak Lanjut: Sudah dilaksanakan	Follow-up : Done
Agenda Rapat 2: Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2018.	Meeting Agenda 2 : Determination of the Net Profit Appropriation for the Fiscal Year 2018.
Keputusan: RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2018.	Decision: The GMS authorizes the majority shareholders to determine the net profit appropriation for the fiscal year 2018.
Tindak Lanjut: Sudah dilaksanakan	Follow-up: Done
Agenda Rapat 3: Penetapan Tantiem Tahun Buku 2018 dan Remunerasi Tahun Buku 2019 bagi Direksi dan Komisaris, serta Bonus bagi Karyawan Tahun Buku 2018.	Meeting Agenda 3 : Determination of Facilities for the fiscal year 2018 and remuneration for the fiscal year 2019 for directors and commissioners, as well as bonuses for employees for the fiscal year 2018.
Keputusan: RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Tantiem Tahun Buku 2018 dan Remunerasi Tahun Buku 2019 bagi Direksi dan Dewan Komisaris serta Bonus bagi Karyawan untuk Tahun Buku 2018.	Decision : The GMS authorizes the majority shareholders to determine the Fiscal Year 2018's Tantiem and Fiscal Year 2019's Remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners and the Employee's bonuses for the Fiscal Year 2018.
Tindak Lanjut: Sudah dilaksanakan	Follow-up: Done
Agenda Rapat 4: Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Perseroan Tahun Buku 2019.	Meeting Agenda 4: The appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's 2019 Financial Statements.
Keputusan: RUPS memberi kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan untuk Tahun Buku 2019.	Decision : The GMS authorizes the majority Shareholders to determine the Appointment of a Public Accounting Firm as an auditor who will audit the Company's Financial Statements, Performance Evaluation Reports and Compliance Reports for Fiscal Year 2019.
Tindak Lanjut: Sudah dilaksanakan	Follow-up : Done

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi turut hadir dalam RUPS Tahunan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya baik secara kolegal maupun individu. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam RUPS Tahunan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

All members of the Board of Commissioners and Directors are present at the Annual GMS to take responsibility for the implementation of their duties both collectively and individually. Members of the Board of Commissioners and Directors present at the 2019 Annual General Meeting are as follows:

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
Sriyono Dwidjo Siswoyo	Iwan Agung Firstantara
Defy Indiyanto Budiarto	Sugiyanto
Sunarsip	Miftahul Jannah
Benny M.M. Marbun	Henky Heru Basudewo
Hendra Iswahyudi	Tjutju Kurnia Sutjiningsih
Jisman P.Hutajulu	Suharto

Pemegang Saham PJB juga menerbitkan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler di tahun 2019 sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, meliputi:

PJB's Shareholders also issued Shareholder's Circular Decrees in 2019 as stipulated in the Articles of Association, including:

Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler Tahun 2019

Shareholder's Circular Decree in 2019

No.	Tanggal Tanggal	Perihal	Subjects
1	31 Juli 2019 July 31, 2019	Keputusan RUPS Sirkuler Persetujuan atas Tambahan Modal Disetor dari PT PJB kepada PT PJB Investasi untuk Proyek PLTU MT Sumbagsel 1 (2x150 MW)	Circular GMS Decree on the Approval of Additional Paid-in Capital from PT PJB to PT PJB Investasi for MT Southern Sumatera 1 CFPP Project (2x150 MW)
2	11 September 2019 September 11, 2019	Keputusan RUPS Sirkuler Persetujuan Penetapan Partner Strategis Terpilih PT PJB dalam Pengembangan PLTS Terapung Cirata 145 MW berserta Gardu Induk Evakuasi Daya	Circular GMS Decree on the Approval of the Establishment of PT PJB's Selected Strategic Partners in the Development of Cirata 145 MW Floating SPP along with the Main Station for Power Evacuation
3	26 September 2019 September 26, 2019	Keputusan RUPS Sirkuler mengenai Penetapan NKO Perseroan pada Semester I Tahun 2019	Circular GMS Decree on the Appointment of the Company NKO in Semester I of 2019
4	15 Oktober 2019 October 15, 2019	Keputusan RUPS Sirkuler Persetujuan atas Tambahan Modal Disetor dari PT PJB kepada PT PJB Investasi	Circular GMS Decree on the Approval of Additional Paid-in Capital from PT PJB to PT PJB Investasi
5	30 Oktober 2019 October 30, 2019	Keputusan RUPS Sirkuler Persetujuan Konversi Dividen Tunai Perseroan kepada PT PLN (Persero) menjadi Penambahan Penyertaan Modal PT PLN (Persero) ke dalam Modal Saham PT PJB dan Set-Off Piutang Komponen A	Circular GMS Decree on the Approval of the Conversion of the Company's Cash Dividend to PT PLN (Persero) to Increase PT PLN (Persero) Equity Participation into PT PJB's Share Capital and Set-Off Component-A Receivables
6	8 November 2019 November 8, 2019	Keputusan RUPS Sirkuler Persetujuan Revisi Disburse Investasi dalam RKAP Perseroan Tahun 2019	Circular GMS Decree on the Approval of Revised Investment Disburse in the Company's ABOP 2019
7	22 November 2019 November 22, 2019	Keputusan RUPS Sirkuler Persetujuan atas Peningkatan Porsi Saham Perseroan pada Penugasan PLTU Riau 2 (250 MW)	Circular GMS Decree on the Approval of Increasing the Share of the Company in Assignment of Riau-2 CFPP (250 MW)
8	27 November 2019 November 27, 2019	Keputusan RUPS Sirkuler Penyesuaian Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2017	Circular GMS Decree on the Adjustment of Purpose, Objectives, and Business Activities Based on the 2017 Standard Classification on Indonesian Business Field



Tindak Lanjut Arahan Pemegang Saham Follow-up on Shareholders' Instruction

Para pemegang saham baik melalui RUPS maupun secara sirkuler di tahun 2019 menghasilkan beberapa arahan terkait pengelolaan dan rencana pengembangan Perusahaan dan telah direalisasikan dengan status realisasi sebagai berikut :

The shareholders, during GMS and circular GMS in 2019, decided several instructions related to the management and development plan of the Company and have been realized with the realization status as follows:

No.	Arahan Instruction	Tindak Lanjut Follow-up		Status Status
Arahan RUPS LPT 2018, tanggal 14 Juni 2019				
GMS Instruction on the 2018 LPT on June 14, 2019				
1	Direksi dan Dewan Komisaris diminta untuk mengimplementasikan misi <i>portofolio</i> SOLID dalam pengelolaan bisnis Perusahaan dan semua entitas yang berada dibawahnya dengan <i>ultimate goal</i> untuk meningkatkan efektifitas dan manfaat bagi PT PLN (Persero) secara konsolidasi. The Board of Directors and Board of Commissioners are requested to implement the SOLID portfolio mission in managing the business of the Company and all entities under it with the ultimate goal to increase the effectiveness and benefits of PT PLN (Persero) on a consolidated basis.	Berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 051/DIR/2018 tentang Persetujuan Implementasi Hasil Kajian Arah dan Strategi Pengembangan Portofolio Bisnis PT PLN (Persero), PJB telah mendapatkan porsi. Peran PJB dalam mendukung Program SOLID: 1. <i>Securing Business Sustainability</i> (S): menjaga sekuritas sistem, menjaga stabilitas tegangan Sistem Jawa Bali. 2. <i>Optimizing Cost Efficiency</i> (O): <i>coal switching, coal transport</i>, peningkatan CF PLTU FTP-1. 3. <i>Leading Industries Capabilities</i> (L): <i>Malcolm baldridge</i>. 4. <i>Increasing Profit / Margin Contribution</i> (I) : COD Jawa 7, Jawa 8 dan MTW Add On Blok 2. 5. <i>Developing New Edge</i> (D): Pengembangan EBT.	Based on the Decree of the Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 051/DIR/2018 concerning Approval of Implementation of Results of Study on Direction and Strategy for PT PLN (Persero) Business Portfolio Development, PJB has received a portion. The role of PJB in supporting the SOLID Program: 1. Securing Business Sustainability (S): maintain system security, maintain voltage stability in the Java-Bali System. 2. Optimizing Cost Efficiency (O): coal switching, coal transport, increasing CF of FTP-1 CFPP. 3. Leading Industries Capabilities (M): Malcolm Baldridge. 4. Increasing Profit / Margin Contribution (I): COD Java 7, Java 8, and MTW Add On Block 2. 5. Developing New Edge (D): Development of Renewable Energy.	Selesai Done
2	Setiap pembentukan subsidiaries (anak perusahaan, afiliasi dan entitas lainnya), penyertaan modal dan/atau pelaksanaan kerjasama jangka panjang harus dikonsultasikan dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham, selain melaksanakan ketentuan-ketentuan lain daam Anggaran Dasar Perusahaan, In every subsidiaries (affiliates and other entities) establishment, capital participation and/or the implementation of long-term cooperation must be consulted and reported to the Board of Commissioners and Shareholders, in addition to implementing other provisions in the Company's Articles of Association,	1. Hingga saat ini belum ada rencana pembentukan JVC. 2. Rencana Tambahan Modal Disetor (TMD) untuk PT Sumbagselenergi Sakti Pewali (SS Pewali). 3. Rencana Modal Kerja untuk PJB.	1. Currently, there are no plans to establish a JVC. 2. Additional Paid-in Capital (TMD) Plan for PT Sumbagselenergi Sakti Pewali (SS Pewali). 3. Working Capital Plan for PJB.	Selesai Done

No.	Arahan Instruction	Tindak Lanjut Follow-up	Status Status
3	Perusahaan diminta untuk mempercepat penyelesaian Pekerjaan Dalam Pelaksanaan agar aset tersebut dapat segera menghasilkan <i>revenue</i>. The company is tasked to accelerate the completion of Work in Implementation so that these assets can immediately generate revenue.	1. Proyeksi Pekerjaan Dalam Pelaksanaan dalam RKAP 2019 yaitu Rp3.428.056.230,-. 2. Realisasi PDP Per 31 Oktober 2019 yaitu Rp4.303.047.541.655,-, berkurang dari bulan sebelumnya disebabkan UP Muara Karang "Sistem Pengendali Banjir" dan PT RE. 3. "Peralatan Kerja" telah mendaftarkan PDP ke Aset Tetap. 4. Progres Proyek per Laporan Pengembangan Usaha bulan Oktober 2019: - IPP PLTU Jawa 7 : 90,14% dari bulan sebelumnya 89,59% (rencana 93,02%). - IPP PLTA Batang Toru : 10,99% dari bulan sebelumnya 10,99% (rencana 35,40%). - Add On Muara Tawar : 83,78% dari bulan sebelumnya 82,93% (rencana 99,35%). - IPP PLTU Jawa 8 : 94,99% dari bulan sebelumnya 92,55% (rencana 89,67%). - Cirata Floating PV: RUPS Persetujuan Penetapan <i>Partner</i>, MoU antara PLN dengan <i>Partner</i> (Masdar), HoA antara PJB dengan <i>Partner</i> (Masdar).	Selesai Done Selesai Done
4	Perusahaan diminta untuk lebih peka dari sisi orientasi bisnis Perusahaan dengan melakukan optimasi EAF dan CF khususnya PLTU berkoordinasi antara lain dengan Unit Pengatur Beban untuk mengefisienkan biaya pemeliharaan dan meningkatkan pendapatan Perusahaan. The Company is asked to be more sensitive in terms of the Company's business orientation by optimizing EAF and CF especially CFPP in coordination with the Load Management Unit to streamline maintenance costs and increase the Company's revenue.	1. Berdasarkan hasil Rapat ROTS, CF UP Paiton Tahun 2019 turun dari 83,0% menjadi 82,1%, namun pencapaian sampai dengan Juli 87,4%, dengan perkiraan pencapaian akhir tahun 88,94%. 2. Perencanaan dan pengendalian stok harian batubara UP Paiton 2019 termasuk rencana dan realisasi vessel 2019. 3. Telah dilakukan pengujian dan perhitungan <i>Gross Plant Heat Rate</i> dan <i>Net Plant Heat Rate</i> pada PLTU Paiton Unit 1 menggunakan metode <i>energy input -energy output</i> dan metode <i>energy balance (heat loss)</i> ada dua basis yaitu basis <i>Higher Heating Value</i> (HHV) dan <i>Lower Heating Value</i> (LHV). Uji ini dilakukan untuk memperoleh harga batubara per nilai kalori setelah dilakukannya proses <i>coal switching</i>.	Selesai Done



No.	Arahan Instruction	Tindak Lanjut Follow-up	Status Status	
5	Perusahaan diminta untuk memastikan kesiapan pembangkit dalam rangka pemeliharaan pembangkit sistem Jawa-Bali yang akan dilakukan pada Semester 2 Tahun 2019. The company is tasked to ensure the readiness of the power plant in the context of maintaining the Java-Bali system power plant which will be conducted in Semester 2 of 2019.	1. <i>Alignment resource</i> OH dan memastikan kesiapan material OH. Telah disusun kebijakan untuk pelaksanaan Integrasi <i>Resource Overhaul</i> antara UP-UPHAR untuk menunjang pelaksanaan OH. a. Integrasi <i>Resource</i> OH (UP - UPHAR) b. <i>Framework Outage Management</i> c. Jadwal pelaksanaan OH d. Adanya kebijakan dan skema intergrasi <i>resource</i> OH e. Adanya rencana dan realisasi OH unit PJB. 2. <i>Corrective Hero to Preventive Hero</i> a. Realisasi pelaksanaan eksekusi preventive maintenance lebih besar dibandingkan dengan eksekusi program <i>corrective</i>. Dan presentase eksekusi <i>corrective</i> dari tahun ke tahun semakin turun. b. <i>Improve Job Task</i> PM (<i>smart</i> PM Rembang) c. <i>Improve Tools</i> (PM 4.0 Indramayu) d. Rutin Pelaksanaan Gemba dan Role Model pada Unit-Unit FTP-1 3. Data <i>Failsafe</i> peralatan kesesuaian kaidah <i>failsafe boiler</i>/turbin untuk unit FTP-1.	1. Alignment of OH resources and ensure OH material readiness. A policy has been prepared for the implementation of the Resource Overhaul Integration between Maintenance Units to support the implementation of OH. a. OH Resource Integration (Generation Unit – Maintenance Unit) b. Framework Outage Management c. OH implementation schedule d. The existence of OH resource integration policies and schemes e. Plans and realization of OH PJB units. 2. Corrective Hero to Preventive Hero a. The realization of the implementation of preventive maintenance is greater than the execution of the corrective program. And the percentage of corrective executions has declined over the years. b. Improve PM Job Task (smart PM Rembang) c. Improve Tools (PM 4.0 Indramayu) d. Routine Implementation of Shepherd and Role Model in FTP-1 Units 3. Data Failsafe, failsafe equipment of boiler/turbine compliance for FTP-1 units.	Selesai Done
6	Perusahaan diminta melakukan <i>benchmarking</i> Top 5 pembangkit dunia produk pembangkit <i>similar</i> FTP-1 untuk meningkatkan kinerja pembangkit FTP-1 Perusahaan. The company is asked to benchmark the world's Top 5 similar FTP-1 power generation products to improve the performance of the Company's FTP-1 power plant.	Akan dilaksanakan pada Februari 2020	Will be conducted in February 2020	Proses Tindak Lanjut Follow-up Process

No.	Arahan Instruction	Tindak Lanjut Follow-up	Status Status	
7	Perusahaan diminta menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menurunkan <i>Opportunity Profit Forgone</i> Perseroan, antara lain dengan meningkatkan CF dan menurunkan gangguan pembangkit. The company was asked to prepare strategic steps to reduce the Company's Opportunity Profit Forgone, among others by increasing CF and reducing power disruptions.	- Telah dilakukan program migrasi <i>outgoing</i> trafo gresik dari 500 kV ke 150 kV - Telah dilakukan pengoperasian CNG <i>Plant</i> Gresik & MTW untuk mensupport operasional pembangkit - Telah dilakukan <i>alignment</i> dan optimasi <i>schedule</i> OH menyesuaikan permintaan P2B dan <i>resource</i> OH - Skema OH FTP-1 - Kajian Pemunduran OH - Notulen RAE <i>Alignment</i> Optimasi <i>Schedule</i> OH 2019	- Gresik's transformer outgoing migration program has been carried out from 500 kV to 150 kV - The operation of Gresik's CNG Plant & MTW has been carried out to support plant operations - Alignment and optimization of OH schedule have been adjusted to P2B requests and OH resources - OH FTP-1 Schema - OH Withdrawal Study - RAE minutes - Alignment Optimization Schedule OH 2019	Selesai Done
8	Perusahaan diminta untuk mempersiapkan kecukupan persediaan batubara sehubungan dengan rencana COD dan evakuasi daya dari pembangkit-pembangkit berkapasitas besar pada sistem Jawa-Bali. The company was asked to prepare a sufficient supply of coal in connection with the COD plan and the evacuation of power from large capacity plants in the Java-Bali system.	- Telah dilakukan pengiriman pasokan batubara pertama sebanyak 3 tongkang oleh Anak Perusahaan PLN BB yaitu PT Banyan Koalindo Lestari (BKL). - Akan dilakukan pengiriman kembali sebanyak 7 tongkang (Akhir Agustus -September). - Kondisi saat ini yang tersedia yaitu 21.500 MT, sedangkan untuk dilakukan <i>first synchron</i> dibutuhkan 69.500 MT (pengiriman BB kedua). - Telah dilakukan pembahasan antara PLN BB dan SGPJB bahwa hingga akhir tahun dibutuhkan s.d. 2.000.000 MT. - CSA antara SGPJB dengan BKL telah disepakati.	- The shipment of the first 3 barges of coal was delivered by a PLN BB's subsidiary, PT Banyan Koalindo Lestari (BKL). 7 barges will be sent again (at the End of August - September). - The currently available condition is 21,500 MT, while for the first synchronization takes 69,500 MT (second BB shipment). - There has been a discussion between PLN BB and SGPJB that until the end of the year, it requires 2,000,000 MT. - CSA between SGPJB and BKL has been signed.	Selesai Done
9	Perusahaan diminta untuk melakukan evaluasi terhadap kejadian-kejadian K3L di tahun 2018 guna mencapai <i>Zero Accident</i> dan kepatuhan terhadap lingkungan di tahun 2019. The company is asked to evaluate K3L events in 2018 to achieve Zero Accident and environmental compliance in 2019.	Pengendalian Pekerjaan mitra kerja atau kontraktor di PJB akan menggunakan CSMS (<i>Contractor Safety Manajemen System</i>) progres terakhir Rapat koordinasi inisiasi pembuatan aplikasi CSMS bersama LK3-1, LK3-2, BTIF.	Work Control of work partners or contractors in PJB will use CSMS (Contractor Safety Management System), final progress Coordination meeting for the initiation of CSMS application development with HSE-1, HSE-2, IT Department.	Selesai Done
10	Semua temuan, catatan dan saran Dewan Komisaris, Auditor Internal maupun Auditor Eksternal atas Laporan Keuangan tahun 2018 agar ditindaklanjuti secara tuntas oleh Direksi dalam tahun 2019. Direksi agar mengupayakan temuan yang sama dalam bidang yang sama tidak boleh terjadi lagi pada masa yang akan datang. Hasil tindak lanjut agar dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.	<i>Evidence</i> Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Audit SPI PLN, Laporan Manajemen serta FGD Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan yang dilakukan dan sudah dikonfirmasi dengan Audit yang dilakukan oleh KAP RSM yang menyatakan tidak ada masalah berkaitan dengan pengendalian internal dan operasi yang tertera di Laporan Kepatuhan KAP RSM.	<i>Evidence</i> of Completion of Follow-Up to the PLN IAU's Audit Report, Management Report and FGD for Improving the Quality of Financial Statements conducted and confirmed by an Audit conducted by RSM Accounting Firm which stated there were no problems related to internal control and operations contained in the RSM Accounting Firm Compliance Report.	Selesai Done



No.	Arahan Instruction	Tindak Lanjut Follow-up	Status Status
	All findings, notes, and suggestions from the Board of Commissioners, Internal Auditors, and External Auditors of the 2018 Financial Statements must be followed up thoroughly by the Board of Directors in 2019. The Board of Directors should be able to prevent the same findings in the same field to occur in the future. Follow-up results should be reported to the Board of Commissioners and Shareholders.		
Arahan RUPS RKAP 2019, tanggal 9 Januari 2019 GMS Instruction on ABOP 2019 on January 9, 2019			
1	Perusahaan diminta untuk fokus dalam menyelesaikan <i>project-project</i> penugasan (termasuk Proyek <i>Mobile Power Plant</i>). The company is tasked to focus on completing assignment projects (including the Mobile Power Plant Project).	1. Telah disusun Tata Kelola Pengembangan Bisnis Pembangkit Listrik yang ditetapkan melalui Peraturan Direksi No.002.P/019/DIR/2008 sebagai pedoman implementasi dan koordinasi bagi PT PJB dalam pengelolaan pengembangan bisnis pembangkit listrik. 2. Enam belas Proyek telah disusun kajian kelayakan, risiko dan komersial. 3. Telah disusun target penyelesaian setiap tahap dalam sebuah proyek mulai dari tahap inisiasi hingga penyelesaian. 4. Aplikasi PRIME telah dapat dijalankan serta pada rapat pemantauan progres proyek tanggal 21 Agustus 2019, secara informal telah disepakati untuk dilakukan proses pengisian data progres proyek sebagai monitoring dan evaluasi progres proyek, serta proses tindak lanjut penanganan isu-isu minor dalam pengembangan aplikasi (laporan evaluasi pasca pengembangan). 5. HOA antara PT PJB dengan Konsorsium PT Barata Indonesia, PT PAL Indonesia, PT Pindad (Persero). 6. Berdasarkan Rapat Diskusi Lanjutan MPP PJB, BUMNIS dan PT PLN (Persero) di Kemenko Maritim pada tanggal 2019, bahwa hingga saat ini BUMNIS belum menyampaikan <i>update</i> proposal penawaran MPP Banda Aceh 1, sehingga PJB belum dapat melakukan verifikasi dan klarifikasi, BUMNIS telah mengirimkan surat untuk meminta perpanjangan waktu dalam menyampaikan total harga EPC. 7. Disimpulkan bahwa, baik secara teknis, komersial dan pemenuhan NCB, BUMNIS tidak mampu memenuhi ketentuan sesuai PJBL (Perjanjian Jual Beli Listrik).	Selesai Done
		1. Power Plant Business Development Management has been established through the Board of Directors Decree No.002.P/019/DIR/2008 as a guideline for implementation and coordination for PT PJB in managing the power plant business development. 2. Sixteen projects have been prepared for feasibility, risk, and commercial studies. 3. The project completion target for each stage has been designed from the initiation to completion. 4. The PRIME application has been able to run and at the project progress monitoring meeting on August 21, 2019, it was informally agreed that the process of filling the project progress data as a monitoring and evaluation of project progress, as well as the follow-up process of handling minor issues in application development (report post-development evaluation). 5. HOA between PT PJB and the Consortium of PT Barata Indonesia, PT PAL Indonesia, PT Pindad (Persero). 6. Based on the Continuing MPP PJB Discussion Meeting, BUMNIS and PT PLN (Persero) at the Maritime Coordinating Ministry on 2019 that currently, BUMNIS has not submitted an updated proposal for Banda Aceh MPP-1's offering; therefore, PJB still cannot verify and clarify, BUMNIS has sent a letter requesting an extension of time in submitting the total EPC price. 7. It was concluded both technically, commercially and in compliance with NCB, BUMNIS was unable to fulfill the provisions following the PPA (Power Purchase Agreement).	

No.	Arahan Instruction	Tindak Lanjut Follow-up	Status Status	
2	Perusahaan diminta untuk melaporkan evaluasi efektifitas kerja sama kontrol <i>supply</i> batubara baik dari segi kuantitas maupun kualitas batubara dan melakukan peninjauan terhadap sumber lokasi tambang batubara serta transportasi yang digunakan untuk melihat zonasi dan dilaporkan secara bulanan kepada Pemegang Saham. Guna memastikan tujuan tersebut, perlu dilakukan penambahan pegawai dan kelengkapan peralatan pengujian. The Company is tasked to report the evaluation of the effectiveness of coal supply control cooperation in terms of both quantity and quality of coal and conduct a review of the source of the coal mine location and transportation used to see zoning and reported monthly to the Shareholders. To ensure this goal, it is necessary to add employees and complete test equipment.	1. Pedoman Manajemen Batubara. 2. Kesiapan <i>Coal Handling Facility</i>. 3. Kesiapan SOP dan IK proses penerimaan dan pengujian kualitas dan kuantitas batubara. 4. Organisasi SPI telah memperkuat fungsi audit berbasis regional dan menambahkan fungsi konsultasi. 5. Penguatan formasi pada fungsi Batubara di DIVEPI-1 dan DIVEPI-2. 6. Telah dilakukan beberapa pelatihan bagi personil dalam melakukan pengendalian mutu pasokan batubara, serta sertifikasi untuk pengelolaan laboratorium. 7. Telah dilakukan identifikasi kesiapan laboratorium pengujian batubara pada masing-masing unit. 8. Melakukan mapping pengendalian batubara pada PLTU Tenayan, Bangka, Belitung, Kaltim Teluk dan Pulau Pisau. 9. Telah disusun rekomendasi atas pengendalian batubara pada kelima PLTU tersebut di atas.	1. Coal Management Guidelines. 2. Coal Handling Facility Readiness. 3. SOP and IK readiness of the process of receiving and testing the quality and quantity of coal. 4. The IAU organization has strengthened the regional-based audit function and added a consultation function. 5. Strengthening the formation of coal functions in DIVEPI-1 and DIVEPI-2. 6. Various training for personnel in conducting quality control of coal supply, as well as certification for laboratory management. 7. The identification of coal testing laboratory readiness has been carried out in each unit. 8. Mapping coal control at Tenayan, Bangka, Belitung, East Kalimantan, and Pulau Pisau CFPP. 9. Recommendations have been made for coal control in the five Coal-fired Power Plants (CFPP) aforementioned.	Selesai Done
3	Perusahaan diminta untuk melaporkan inisiatif dan rencana strategis untuk menjaga kehandalan dan memperbaiki nilai <i>Equivalent Forced Outage Rate</i> (EFOR) setiap triwulanan. The Compan is tasked to report initiatives and strategic plans to maintain reliability and improve the value of the Equivalent Forced Outage Rate (EFOR) quarterly.	1. Telah dilakukan pelaksanaan program-program strategis untuk menunjang kehandalan pembangkit, salah satunya Penggantian Modul Preheater HRSG Gresik bersamaan pelaksanaan OH. 2. Telah dibuat buku <i>strategic action</i> sebagai pedoman pengelolaan FTP-1 dan pedoman <i>monitoring</i> peningkatan <i>performance</i> PLTU FTP-1 Jawa. 3. Telah dianggarkan dalam RKAP 2019 untuk pengadaan <i>strategic spare part</i> dan sudah terkontrak, salah satunya <i>Rotor Generator</i> UP MTW (Levering). 4. List Pengadaan <i>Strategic Spare Part</i> untuk FTP-1 Jawa. 5. Realisasi pelaksanaan eksekusi <i>preventive maintenance</i> lebih besar dibandingkan dengan eksekusi program <i>corrective</i>. 6. Smart PM Rembang. 7. PM 4.0 Indramayu.	1. Strategic programs have been carried out to support the reliability of the plant, one of which is the Replacement of the Gresik HRSG Preheater Module along with OH implementation. 2. A strategic action book has been made as a guideline for managing FTP-1 and monitoring guidelines for increasing the performance of the Java FTP-1 CFPP. 3. Has been budgeted in the 2019 RKAP for the procurement of strategic spare parts and has been contracted, one of them is the Rotor Generator MTW GU (Levering). 4. List of Strategic Spare Part Procurement for FTP-1 Java. 5. The realization of the implementation of preventive maintenance is greater than the execution of the corrective program. 6. Smart PM Rembang. 7. PM 4.0 Indramayu.	Selesai Done

No.	Arahan Instruction	Tindak Lanjut Follow-up	Status Status	
4	Perusahaan diminta untuk mengkaji dan menyiapkan langkah strategis terkait dampak optimasi <i>Equivalent Availability Factor</i> (EAF) dan <i>Capacity Factor</i> (CF) untuk menciptakan biaya operasional yang lebih efektif. The Company is tasked to review and prepare strategic steps related to the impact of optimization of the Equivalent Availability Factor (EAF) and Capacity Factor (CF) to create more effective operational costs.	1. Telah dilaksanakan kontrak payung untuk <i>equipment</i> pembangkit. 2. Telah dilakukan program migrasi <i>outgoing trafo</i> gresik dari 500 kV ke 150 kV.	1. A Framework Contract has been carried out for generating equipment. 2. Gresik's transformer outgoing migration program has been carried out from 500 kV to 150 kV.	Selesai Done
5	Perusahaan diminta untuk melakukan kajian dan lebih proaktif dalam inisiasi bisnis <i>renewable energy</i> , terutama potensi <i>home charging</i> pada bisnis <i>Electrical Vehicle</i> (EV). The Company is tasked to conduct studies and be more proactive in initiating the renewable energy business, especially the potential of home charging in the Electrical Vehicle (EV) business.	Kajian dalam skala strategis (<i>high level</i>) telah selesai dibuat. Disusun dalam bentuk Strategi Pengembangan Bisnis dalam jangka waktu 2020 - 2030. Adapun Lini bisnis yang berpotensi untuk dijabaki antara lain adalah bisnis penyedia energi untuk EV (<i>Charging Infrastructure</i>), Bisnis penyedia Teknologi dan peralatan untuk EV, Bisnis Penyedia jasa layanan transportasi listrik terintegrasi, dan yang berkaitan. PJB (melalui STEK) mengeluarkan <i>prototype</i> EV roda 2 (sepeda listrik) dan roda 4 (<i>shuttle car</i>) dengan bekerjasama dengan salah satu pionir EV indonesia (Ricky Elson) dan telah dipamerkan pada acara PJB <i>Connect</i> 2019.	High-level strategic studies have been completed. Compiled in the form of a Business Development Strategy in the period 2020-2030. The potential business lines include the energy supply business for EV (Charging Infrastructure), Technology and equipment provider business for EV, Business Providers of integrated electricity transportation services, and other related business. PJB (through STEK) issued a prototype EV 2 wheel (electric bicycle) and 4 wheels (shuttle car) in collaboration with one of the Indonesian EV pioneers (Ricky Elson) and has been exhibited during PJB Connect 2019.	Selesai Done
6	Direksi Perusahaan diminta secara bersama-sama lebih proaktif dan teliti dalam pengambilan keputusan pada program investasi. The Company's Board of Directors is tasked to be more proactive and conscientious in making decisions on the investment program.	PJB dalam mengambil keputusan telah melalui mekanisme pengambilan keputusan: 1. Adanya Mekanisme Pembagian dan Pelimpahan Wewenang melalui Peraturan Direksi PT PJB No 004.P/019/DIR/2019 tentang Batasan Kewenangan Pengambilan Keputusan. 2. Saat ini dalam proses penyusunan draft SK Kebijakan Investasi dan Pedoman. 3. Terdapat SOP yang mengatur mengenai proses pengambilan keputusan (dalam Rapat Direksi). 4. Terdapat SOP dalam penyusunan kajian Dokumen Manajemen Risiko (DMR), yang terdiri dari Kajian Kelayakan Operasional (KKO), Kajian Kelayakan Finansial (KKF), Kajian Kepatuhan dan Hukum, Kajian Risiko.	The decision-making process by PJB has gone through the following mechanism: 1. Through a mechanism for the distribution and delegation of authority through PT PJB's Board of Directors Regulation No. 004.P / 019 / DIR / 2019 concerning Limitation of Decision-Making Authority. 2. Currently in the process of drafting the Investment Policy Decree and Guidelines. 3. Applicable SOP governing the decision-making process (at the Directors' Meeting). 4. Applicable SOP in the preparation of a Risk Management Document (DMR) study, which consists of an Operational Feasibility Study (KKO), a Financial Feasibility Study (KKF), Compliance, and Legal Studies, Risk Assessment.	Selesai Done

No.	Arahan Instruction	Tindak Lanjut Follow-up		Status Status
7	Perusahaan diminta mengkaji inisiatif strategis dalam pelaksanaan jasa O&M dengan memaksimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi, Model <i>Business Sharing</i> , dan mengurangi pemanfaatan tenaga kerja langsung. The Company is tasked to review strategic initiatives in the implementation of O&M services by maximizing the use of Information Technology, Business Sharing Models, and reducing the use of direct labor.	Pada tahun 2017-2018, terdapat gangguan pada unit-unit FTP-1, khususnya UBJOM Pacitan terdapat 2 gangguan yang berdampak cukup signifikan, gangguan ini menyebabkan pekerjaan <i>overhaul</i> yang cukup lama. Akibat gangguan di unit-unit FTP-1 maka disusun Buku pedoman pengelolaan PLTU FTP-1, <i>strategic action</i> program. Buku ini disusun sebagai pedoman identifikasi & mencegah kerusakan dini equipment, budget O&M <i>best practice</i> dan produksi least cost dengan program strategis K3L, keadilan, efisiensi dan BPP.	In 2017-2018, there were disturbances in FTP-1 units, especially in Pacitan OMSBU, there were 2 disruptions which had a significant impact, this disruption caused a long overhaul of work. As a result of disturbances in FTP-1 units, a manual for managing the FTP-1 CFPP, a strategic action program, was prepared. This book has been prepared as a guideline for identifying & preventing early damage to equipment, best practice O&M budget, and least-cost production with HSE strategic programs, fairness, efficiency, and CES.	Selesai Done
8	Perusahaan diminta untuk meningkatkan efisiensi biaya dan memperhatikan bahwa total biaya dalam RKAP 2019 merupakan pagu maksimal dan target <i>revenue</i> merupakan batas minimal yang harus dicapai. The Company is tasked to improve cost efficiency and to pay attention that the total cost in ABOP 2019 is the maximum standard and the revenue target is the minimum achievement standard.	1. Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi secara korporat dilaksanakan secara rutin bulanan melalui VICON ALCO PJB disertai dengan komitmen <i>disburse</i> AKI Unit. 2. Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi secara korporat dilaksanakan secara rutin bulanan melalui VICON ALCO PJB disertai dengan komitmen <i>disburse</i> AKI Unit.	1. Corporate monitoring and evaluation are carried out routinely every month through VICON ALCO PJB accompanied by a commitment to disburse the AKI Unit. 2. Corporate monitoring and evaluation are carried out routinely every month through VICON ALCO PJB accompanied by a commitment to disburse the AKI Unit.	Selesai Done
9	Perusahaan diminta agar dalam pelaksanaan program kegiatan operasi dan investasi, memprioritaskan optimalisasi sinergi antar Anak perusahaan PT PLN (Persero) dan sinergi dengan unit-unit PT PLN (Persero). The Company is tasked that in the implementation of its operations and investment programs, prioritizing the optimization of synergies between the subsidiaries of PT PLN (Persero) and the synergies with the units of PT PLN (Persero).	Realisasi Nilai Indikator Sinergi dengan Anak Perusahaan Lain hingga November 2019 telah mencapai Rp 846,30 Milyar dari KPI Rp 876,27 Milyar (111,14%). Realisasi Nilai Indikator Sinergi dengan Pusharlis hingga November 2019 telah mencapai Rp 32,14 Milyar dari KPI Rp 25 Milyar (148,34%). 1. PT Adhiguna Putera : Proses <i>review</i> kontrak pada 12 Juni 2019 untuk pengadaan Jasa pembongkaran dan pembersihan batu bara serta <i>management jetty</i> untuk PT PJB UJIN, UJRB, UJTA, UJPC, dan UJPT senilai Rp. 69.706.177.069,10.	Realization of Indicator Value of Synergy with Other Subsidiaries as of November 2019 has reached Rp 846.30 Billion from KPI Rp 876.27 Billion (111.14%). Realization of Indicator Value of Synergy with Pusharlis until November 2019 has reached Rp 32.14 Billion from KPI Rp 25 Billion (148.34%). 1. PT Adhiguna Putera: The contract review process on June 12, 2019, for the procurement of coal demolition and cleaning services and management jetty for PT PJB UJIN, UJRB, UJTA, UJPC, and UJPT worth Rp. 69,706,177,069.10.	



No.	Arahan Instruction	Tindak Lanjut Follow-up	Status Status
	2. PT PLN Pusertif : Proses <i>review</i> kontrak tanggal 21 Mei 2019 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Inspeksi, Pengujian, Kalibrasi, <i>Assesment</i> dan Sistem Manajemen Mutu, SMK3, SML Pada Lingkup Unit Pembangkit Tenaga Listrik PT PJB senilai Rp. 19.158.405.200,- 3. PT Indonesia Comnets - Kontrak jangka panjang Pengadaan Pelayanan Video <i>Conference</i> tahun 2017-2021 senilai Rp 5.640.053.760. - Kontrak jangka panjang Pengadaan Layanan Komunikasi Data UBJ O&M untuk PT PJB Bidang Teknologi Informasi (2018-2021) senilai Rp8.092.458.000. 4. PT Haleyora : Proses <i>Levering</i> Pengadaan pendampingan jasa survey batu bara senilai Rp3.928.823.738. 5. PT PLN BB - Pengadaan batu bara untuk Unit <i>Existing</i> yang telah terkontrak sampai dengan bulan November 2019 senilai Rp634,37 Milyar 6. PT Cogindo Daya Bersama - Proses <i>review</i> kontrak tanggal 29 November 2019 untuk pengadaan material <i>strategic sparepart batch</i> 4-2 untuk PT PJB UBJOM Arun senilai Rp2.819.696.000,- sudah termasuk PPN 10%. Nomor surat penunjukan Z6124710R. - Proses <i>review</i> kontrak tanggal 29 November 2019 untuk pengadaan material <i>strategic sparepart batch</i> 4-1 untuk PT PJB UBJOM Arun senilai Rp3.981.505.000,- sudah termasuk PPN 10%. Nomor surat penunjukan Z6124706R. - Kontrak nomor 061.PJ/061/2019 untuk pengadaan Material TBM 24.000 Jam <i>Batch</i> 1 PT PJB UBJOM Arun senilai Rp. 6.569.039.631,- . - Kontrak nomor 063.PJ/061/2019 untuk pengadaan Material TBM 24.000 Jam <i>Batch</i> 2 PT PJB UBJOM Arun senilai Rp. 3.244.206.108,-	2. PT PLN Pusertif: The contract review process dated May 21, 2019, for the Procurement of Inspection, Testing, Calibration, Assessment, and Quality Management System Work Services, OHS Management System, Environmental Management System in the scope of the PT PJB Power Plant Unit of Rp. 19,158,405,200. 3. PT Indonesia Comnets - Long-term contract for the Procurement of Video Conference Services for 2017-2021 worth Rp 5,640,053,760. - Long-term contract Procurement of UBJ O&M Data Communication Services for PT PJB in Information Technology (2018-2021) worth Rp. 8092,458,000. 4. PT Haleyora: Levering Process Procurement of coal survey service assistance worth Rp 3,928,823,738. 5. PT PLN BB - Procurement of coal for Existing Units that have been contracted until November 2019 worth 634.37 billion 6. PT Cogindo Daya Bersama - The contract review process dated November 29, 2019, for the procurement of strategic material spare parts batch 4-2 for PT PJB's Arun OMSBU of Rp. 2,819,696,000, - including 10% VAT. Appointment Letter No: Z6124710R. - Contract review process dated November 29, 2019, for the procurement of strategic material spare parts batch 4-1 for PT PJB's Arun OMSBU of Rp. 3,981,50,000, - including 10% VAT. Letter number for appointment Z6124706R. - Contract number 061.PJ / 061/2019 for the procurement of 24,000 TBM Material Batch 1 PT PJB's Arun OMSBU of Rp. 6,569,039,631. - Contract number 063.PJ / 061/2019 for the procurement of 24,000 TBM Material Batch 2 PT PJB's Arun OMSBU of Rp. 3,244,206,108 -	Selesai Done

No.	Arahan Instruction	Tindak Lanjut Follow-up	Status Status
10	Perusahaan diminta untuk mengimplementasikan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU)/ <i>Malcolm Baldrige</i> , dengan target pencapaian lebih baik dari nilai tahun sebelumnya. The Company is tasked to implement the Superior Performance Assessment Criteria (KPKU) / <i>Malcolm Baldrige</i> , with the target of achieving better than the previous year's value.	1. Telah dilakukan <i>Training</i> Pendalaman Kriteria <i>Baldrige</i> 2019-2020 pada tanggal 1-3 Juli 2019. 2. Kerangka Kinerja <i>Excellence Baldrige</i>. 3. Proses Penyusunan Dokumen Aplikasi oleh masing-masing kategori. 4. <i>Workshop</i> penyusunan dokumen aplikasi. 5. Telah dilaksanakan <i>assessment Malcom Baldrige</i> pada tgl 25-29 November 2019, dan PJB berhasil mendapatkan skor 700 berada di <i>band Industry Leader</i>.	Selesai Done
11	Perusahaan diminta mengimplementasikan ERM (<i>Enterprise Risk Management</i>) dalam pengelolaan risiko Perusahaan dengan menerapkan RKAP berbasis risiko dan target hasil <i>assessment</i> tingkat kematangan risiko lebih baik dari tahun lalu. The Company is tasked to implement ERM (<i>Enterprise Risk Management</i>) in the management of Company risk by implementing risk-based RKAP and the target of the assessment of risk maturity level is better than last year.	1. Telah dilakukan <i>self-assessment Risk Management Maturity</i> 2018 pada 17 Mei 2019, dengan hasil maturitas pada level 2.41. 2. Saat ini sedang dilakukan <i>assessment</i> oleh pihak eksternal. 3. Penyusunan RKAP 2019 telah berbasis risiko (aplikasi iplan) 4. Update Revisi Pedoman Manajemen Risiko masih berupa draft yang belum disahkan, target : November akhir. 5. Pengembangan Aplikasi ERM: sudah bisa digunakan, saat ini diusulkan menambahkan fungsi tren peta risiko triwulanan dan insiden manajemen, REaP (<i>Risk Evaluation and Prioritization</i>), fitur pencarian risiko. 6. Profil Risiko 2020 akan di-<i>endorse</i> ke masing-masing Direksi. 7. <i>Risk Appetite Framework</i> PT PJB sedang dalam proses pengesahan Direksi, target Desember 2019. 8. Penyusunan Program RKAP telah disesuaikan dengan risk profile unit (kode risiko) pada aplikasi IPLAN. 9. Terdapat pelatihan manajemen risiko untuk senior <i>leader</i>. 10. Sertifikasi manajemen risiko. 11. ISO 31000 (QRGP) untuk Direksi dan Dewan Komisaris. 12. Sosialisasi DMR.	Selesai Done



No.	Arahan Instruction	Tindak Lanjut Follow-up	Status Status	
12	Perusahaan harus mengoptimalkan fungsi Satuan Kerja Audit dalam semua aspek. The Company must optimize the function of the Audit Work Unit in all aspects.	1. Program Kerja Audit Tahunan, Laporan Hasil Audit sudah berbasis <i>Risk Based Audit</i> dan sudah dilakukan <i>benchmarking</i> ke PT PLN (Persero) untuk penguatan audit SPI. 2. Terdapat surat dari direktur <i>Human Capital Management</i> PT PLN (Persero) No 1812/SDM.01.01/010400/2019-R tanggal 09 Juli 2019, perihal Rekomendasi Persetujuan Atas Usulan Perubahan Organisasi PT PJB dimana salah satu pointnya adalah penambahan 1 Kepala Bidang pada satuan audit internal, yaitu Kepala Bidang Konsultasi Pengembangan Metodologi, <i>Quality Assurance</i>, dan pelaporan. 3. <i>Learning Focus</i> dan <i>Learning Theme Business Excellence</i>.	1. Annual Audit Work Program, the Audit Report has been based on Risk-Based Audit; Benchmarking has also been carried out in PT PLN (Persero) to strengthen the audit by IAU. 2. There is a letter from the director of Human Capital Management of PT PLN (Persero) No 1812 / SDM.01.01 / 010400/2019-R dated July 9, 2019, regarding Recommendations for Approval on the Proposed Change in Organizations of PT PJB where one point is the addition of 1 Head of Division to internal audit unit, namely the Head of Consultation for Methodology Development, Quality Assurance, and reporting. 3. Learning Focus and Learning Theme Business Excellence.	Selesai Done
13	Dalam rangka program penurunan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Perusahaan agar melakukan inovasi-inovasi dan investasi yang dapat meningkatkan efisiensi Perusahaan dan Keandalan Operasi. In the framework of the program to reduce the Company's Cost of Electricity Supply (CES) to make innovations and investments that can improve the Company's efficiency and reliability of operations.	1. Telah dilakukan pengoptimalan biaya bahan bakar dan transportasi Batubara. 2. Swakelola Jasa OH merupakan program untuk melakukan pemeliharaan OH sendiri tanpa menggunakan pihak ketiga, Telah dilakukan pembahasan optimalisasi jasa <i>expert external</i> untuk OH, salah satunya pada Pembangkit Eksisting yaitu OH <i>Major</i> GT 41 & 42 MTW merupakan PH <i>Major</i> pertama setelah serah terima aset sehingga membutuhkan jasa <i>expert OEM</i> untuk pelaksanaan OH, namun dioptimasi <i>scope</i> jasa <i>expert OH</i> seminimal mungkin dan di tahun tahun berikutnya tidak lagi menggunakan jasa <i>expert OEM</i> (swakelola jasa OH dapat dilakukan sendiri). 3. Pekerjaan straightening dan balancing HIP Rotor Turbin Pacitan, yang dikerjakan secara swakelola, terdapat saving sebesar Rp 1,8 M.	1. Optimization of coal fuel and transportation costs has been carried out. 2. OH Service Management is a program to conduct OH maintenance on its own without using a third party. Discussions have been carried out on optimization of expert external services for OH, one of which is the Existing Plant namely OH Major GT 41 & 42 MTW is the first PH Major after the handover of assets that requires OEM expert services for OH implementation, but the optimal scope of OH expert services is optimized and in the following years no longer use expert OEM services (self-management of OH services can be done alone). 3. Pacitan Turbine's HIP straightening and balancing projects, which are self-managed, saved Rp 1.8 billion.	Selesai Done
14	Perusahaan diminta mencari data <i>benchmarking</i> terkait indikator operasional dan indikator keuangan dari perusahaan yang menjadi <i>market leader</i> di lingkup bisnis yang sejenis untuk membandingkan <i>performance</i> Perusahaan dengan <i>market leader</i> . The Company is tasked to find benchmarking data related to operational indicators and financial indicators of companies that are market leaders in similar business scopes to compare the Company's performance with market leaders.	Melakukan komparasi yang menunjukkan OM <i>Cost</i> PJB lebih murah dibanding IPP dan referensi internasional: 1. Perbaikan Data NERC sedang dilakukan (Indikator Operasional). 2. Telah didapat referensi Internasional dari NREI, CSEC, <i>Power Mag</i> (Indikator Keuangan).	A comparison showing PJB's OM Cost is lower than IPP and international references: 1. Improvements to the NERC Data are underway (Operational Indicators). 2. International references have been obtained from NREI, CSEC, Power Mag (Financial Indicators).	Selesai Done

No.	Arahan Instruction	Tindak Lanjut Follow-up		Status Status
15	Perusahaan berkewajiban memenuhi <i>covenant</i> sebagaimana dimaksud dalam <i>Indenture of Guaranteed Note</i> yang diterbitkan oleh Majapahit Holding B.V atas jaminan PT PLN (Persero), dan <i>covenant</i> obligasi sebagaimana dimaksud dalam <i>Indenture Progam Global Medium Term Note</i> (GMTN) PT PLN (Persero) Tahun 2011, 2017 dan 2018, dalam setiap aksi korporasi yang akan diambil oleh Perusahaan antara lain tetapi tidak terbatas pada transaksi <i>additional indebtedness, layering of indebtedness, liens, asset sales and leaseback, issuance or sales of equity interest, issuance of guarantees, merger and acquisition, serta event of default</i>. The Company is tasked to fulfill the covenant as referred to in the Indenture of Guaranteed Note issued by Majapahit Holding BV for the guarantee of PT PLN (Persero), and covenant bonds as referred to in the Global Medium Term Note (GMTN) PT PLN (Persero) Year 2011, 2017 and 2018, in every corporate action to be taken by the Company, among others, but not limited to additional indebtedness transactions, layering of indebtedness, liens, asset sales and leaseback, issuance or sales of equity interests, issuance of guarantees, mergers and acquisitions, and events of default.	Telah dilakukan penandatanganan atas Laporan Rekapitulasi Tindakan Aksi Korporasi PT PJB dan telah memenuhi ketentuan <i>covenant</i> dalam Indenture, Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Pinjaman lainnya.	The signing of the PT PJB Corporate Action of the Recapitulation Report has been signed and has fulfilled the covenant provisions in the Indenture, Trustee Agreement, and other Loan Agreements.	Selesai Done

Arahan RUPS tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 telah direalisasikan seluruhnya pada tahun buku tersebut.

The instruction of the previous GMS in 2018 was fully realized during the fiscal year.



Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan Audit
Audited Financial Statements



Referensi Kriteria ARA
ARA Criteria Reference

DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS

Dewan Komisaris sebagai wakil Pemegang Saham memiliki tugas pokok melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi atas kebijakan Direksi dan jalannya kegiatan perusahaan pada umumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pengawasan dan penasihat dilakukan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan Visi serta Anggaran Dasar PJB. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara.

The Board of Commissioners as the representative of Shareholders has the main task of supervising and advising the Board of Directors on the Board of Directors' policies and the general management of the Company based on Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The monitoring and supervisory are carried out for the benefit of the Company and following PJB's Vision and Articles of Association. The position of each member of the Board of Commissioners including the President Commissioner is equal.

Komposisi Dewan Komisaris Board of Commissioners Composition

Dewan Komisaris PJB telah melalui dan dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh PT PLN (Persero) selaku Pemegang Saham guna menjamin calon Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi, reputasi, bebas dari afiliasi maupun benturan kepentingan lainnya dan pengalaman serta keahlian yang dibutuhkan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing. Dewan Komisaris PJB periode Januari sampai dengan 31 Desember 2019 berjumlah 6 (enam) orang yang terdiri dari 2 orang Komisaris Independen dan 4 orang Komisaris mewakili Pemegang Saham. Komposisi dan susunan Dewan Komisaris PJB adalah sebagai berikut:

PJB's Board of Commissioners has passed and was declared to have passed the fit and proper test by PT PLN (Persero) as the Shareholder to ensure the candidates for the Board of Commissioners have integrity, competence, reputation, non-affiliation or other conflicts of interest and experience and expertise required for their respective functions and duties. The Board of Commissioners for the period of January to December 31, 2019, is 6 (six) persons consisting of 2 Independent Commissioners and 4 Commissioners representing the Shareholders. The composition and formation of PJB's Board of Commissioners are as follows:

Komposisi Dewan Komisaris Tahun 2019

Board of Commissioners Composition in 2019

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Decree of Appointment
Sriyono Dwidjo Siswoyo	Komisaris Utama President Commissioner	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris PT PJB Tanggal 18 September 2017, juncto Keputusan RUPS tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) Dewan Komisaris Perseroan Tanggal 2 Desember 2016) Circular GMS Decree on the Dismissal and Appointment of Commissioner of PT PJB on September 18, 2017, in conjunction with the Resolution of the General Meeting of Shareholders on the Dismissal and Appointment of the Board of Commissioners of the Company on 2 December 2016)
Defy Indiyanto Budiarto	Komisaris (Independen) Commissioner (Independent)	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris PT PJB Tanggal 18 September 2017 Circular GMS Resolution on the Dismissal and Appointment of Commissioners of PT PJB on September 18, 2017
Sunarsip	Komisaris (Independen) Commissioner (Independent)	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris PT PJB Tanggal 18 September 2017 Circular GMS Resolution on the Dismissal and Appointment of Commissioners of PT PJB on September 18, 2017
Alihuddin Sitompul ¹	Komisaris Commissioner	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris PT PJB Tanggal 18 September 2017 Circular GMS Resolution on the Dismissal and Appointment of Commissioners of PT PJB on September 18, 2017
Benny M.M. Marbun	Plt. Komisaris Act. Commissioner	Keputusan RUPS tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) Dewan Komisaris Perseroan Tanggal 2 Desember 2016) Resolution of the General Meeting of Shareholders on the Dismissal and Appointment of Act. Board of Commissioners of the Company on 2 December 2016)
Hendra Iswahyudi	Plt. Komisaris Act. Commissioner	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pengangkatan Komisaris PT PJB Tanggal 19 Desember 2017 Circular GMS Resolution on Appointment of PT PJB Commissioners on December 19, 2017



Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Decree of Appointment
Jisman P. Hutajulu ²	Plt. Komisaris Act. Commissioner	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Pergantian Dewan Komisaris Perseroan tanggal 11 Maret 2019 Circular GMS Resolution on the Dismissal, Appointment and Substitution of the Company's Board of Commissioners dated March 11, 2019

Keterangan Keterangan:

1. Menjabat sebagai Komisaris Perusahaan sampai dengan bulan Maret 2019
Served as a Commissioner of the Company until March 2019
2. Menjabat sebagai Komisaris Perusahaan mulai bulan Maret 2019
Served as a Commissioner of the Company from March 2019

Kriteria Penentuan Komisaris Independen Independent Commissioner Criteria

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan Perusahaan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 Tanggal 1 Agustus 2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 Tanggal 6 Juli 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN. Independensi Dewan Komisaris memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BUMN yang bersangkutan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
2. Tidak menjabat sebagai Direksi di perusahaan yang terafiliasi dengan Perusahaan.
3. Tidak bekerja pada pemerintah termasuk departemen, lembaga dan kemiliteran dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.
4. Tidak bekerja di Perusahaan atau afiliasinya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.
5. Tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung, dengan Perusahaan atau perusahaan yang menyediakan jasa dan produk kepada Perusahaan dan afiliasinya.
6. Bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Dewan Komisaris untuk bertindak atau berpikir secara bebas di lingkup Perusahaan.

Independent Commissioners are members of the Board of Commissioners who are not affiliated with the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners and controlling shareholders, and are free from business relationships or other relationships that can affect their ability to act independently or act solely in the interests of the Company as described in the Act Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and SOE Ministry's Regulation Number: PER-01 / MBU / 2011 August 1, 2011, Regarding the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs as amended lastly through SOE Ministry's Regulation Number: PER- 09 / MBU/2012 on July 6, 2012, Regarding Amendments to SOE Ministry's Regulation Number: PER-01 / MBU / 2011 Regarding the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs. The independence of the Board of Commissioners meets the following criteria:

1. Not financially affiliated, management, share ownership, and/or family relations with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and/or Controlling Shareholders or relationships with the BUMN concerned, which can affect its ability to act independently.
2. Not serving as a Director in a company affiliated with the Company.
3. Not working for the government including departments, institutions, and military in the last 3 (three) years.
4. Not working for the Company or its affiliates within the last 3 (three) years.
5. Not financially affiliated, either directly or indirectly, with the Company or companies that provide services and products to the Company and its affiliates.
6. Free from conflict of interests or activities or other relationships that can hinder or interfere with the Board of Commissioners' independence within the scope of the Company.

Selain itu, Tata Laksana Kerja Direksi-Dewan Komisaris (*Board Manual*) PJB menjelaskan bahwa Komisaris Independen Perusahaan memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Berasal dari luar Perusahaan.
2. Tidak memiliki saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan.
3. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan, Komisaris, Direktur atau Pemegang Saham Utama Perusahaan.
4. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

Additionally, PJB's Board Manual explains that the Company's Independent Commissioners have the following criteria:

1. Appointed from outside the Company.
2. Not having direct or indirect shares in the Company.
3. Not having any affiliation with the Company, Commissioners, Directors, or Major Shareholders of the Company.
4. Not in a business relationship, directly or indirectly, related to the Company's business activities.

Komisaris Independen PJB PJB Independent Commissioner

Dewan Komisaris PJB saat ini terdiri dari 6 (enam) orang anggota, dan 2 (dua) orang komisaris atau 30% diantaranya merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham, meskipun tidak dinyatakan sebagai Komisaris Independen yaitu Sdr. Defy Indiyanto Budiarto dan Sdr. Sunarsip.

PJB's Board of Commissioners currently consists of 6 (six) members, and 2 (two) commissioners or 30% of whom are members of the Board of Commissioners who are not affiliated with shareholders, even though they are not declared as Independent Commissioners, namely Mr. Defy Indiyanto Budiarto and Mr. Sunarsip.

Pernyataan Independensi dan Potensi Benturan Kepentingan Statement of Independence and Potential Conflict of Interest

Anggota Dewan Komisaris PJB disyaratkan untuk membuat pernyataan independensi dan bebas benturan kepentingan setiap tahun dengan menyebutkan bahwa:

1. Tidak memiliki benturan kepentingan dan/atau terlibat dalam transaksi yang memiliki benturan kepentingan dengan PT Pembangkitan Jawa Bali dan/atau anak perusahaannya yang terkonsolidasi dan terafiliasi.
2. Tidak memegang jabatan rangkap dalam jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang merugikan perusahaan dan dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PJB.
3. Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda dengan anggota Direksi lainnya maupun dengan anggota Dewan Komisaris PJB.

Pada tahun 2019, seluruh anggota Dewan Komisaris Perusahaan telah menandatangani pernyataan untuk bersikap independen dan bebas benturan kepentingan melalui Pakta Integritas dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

PJB's Board of Commissioners members are required to make a statement of independence and are free of conflicts of interest annually by stating that:

1. Not having a conflict of interest and / or is involved in a transaction that has a conflict of interest with PT Pembangkitan Jawa Bali and/or its affiliated and affiliated subsidiaries.
2. Not in concurrent positions in other positions that can lead to a conflict of interest that harms the company and is prohibited in the laws and regulations that apply to PJB.
3. Not family affiliated to the second degree, either in a straight line or laterally or in a relationship with other members of the Board of Directors or with members of the PJB Board of Commissioners.

In 2019, all members of the Company's Board of Commissioners have signed a statement to be independent and free from conflicts of interest through the Integrity Pact in carrying out its functions and duties.



Nama Name	Pakta Integritas Integrity Pact
Sriyono Dwidjo Siswoyo	Pakta Integritas (Pernyataan telah ditandatangani pada bulan Januari 2019) Integrity Pact (Statement signed in January 2019)
Defy Indiyanto Budiarto	Pakta Integritas (Pernyataan telah ditandatangani pada bulan Januari 2019) Integrity Pact (Statement signed in January 2019)
Sunarsip	Pakta Integritas (Pernyataan telah ditandatangani pada bulan Januari 2019) Integrity Pact (Statement signed in January 2019)
Alihuddin Sitompul ¹	Pakta Integritas (Pernyataan telah ditandatangani pada bulan Januari 2019) Integrity Pact (Statement signed in January 2019)
Benny M.M. Marbun	Pakta Integritas (Pernyataan telah ditandatangani pada bulan Januari 2019) Integrity Pact (Statement signed in January 2019)
Hendra Iswahyudi	Pakta Integritas (Pernyataan telah ditandatangani pada bulan Januari 2019) Integrity Pact (Statement signed in January 2019)
Jisman P. Hutajulu ²	Pakta Integritas (Pernyataan telah ditandatangani pada bulan April 2019) Integrity Pact (Statement signed in January 2019)

Keterangan Information:

1. Menjabat sebagai Komisaris Perusahaan sampai dengan bulan Maret 2019
Served as Commissioner of the Company until March 2019
2. Menjabat sebagai Komisaris Perusahaan mulai bulan Maret 2019
Served as Commissioner of the Company from March 2019

Program Pengenalan Bagi Dewan Komisaris Baru Induction Program for New Members of the Board of Commissioners

Program pengenalan (Program Induksi) kepada Anggota Dewan Komisaris baru sebagaimana yang diamanatkan dalam Pedoman Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris (*Board of Comisioner Manual*) dan *Board Manual* PJB, bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai PJB. Sekretaris Perusahaan sebagai pelaksana program pengenalan berkoordinasi dengan Sekretaris Dewan Komisaris mempersiapkan materi program pengenalan yang meliputi:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh PJB.
2. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan berbagai masalah strategis lainnya sesuai dengan RJPP Perusahaan.
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan audit eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit.
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris.

Program pengenalan PJB dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perusahaan/Anak Perusahaan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan PJB dimana program tersebut dilaksanakan. Pada tahun 2019, terdapat pergantian anggota Dewan Komisaris dengan diangkatnya Sdr. Jisman Hutajulu sehingga dilaksanakan program pengenalan bagi Komisaris baru sebagai berikut :

The Induction Program for new Members of the Board of Commissioners as mandated in the Board of Commissioners Manual and Board of Directors Manual aims to provide knowledge about PJB. The Corporate Secretary as the organizer of the program coordinates with the Secretary of the Board of Commissioners to prepare material for the introduction program which includes:

1. Implementation of GCG principles by PJB.
2. Description of the Company relating to the objectives, nature and scope of activities, financial and operating performance, strategies, short-term and long-term business plans, competitive positions, risks, and various other strategic issues by the Company's CLP.
3. Information relating to delegated authority, internal audit and external audit, internal control systems, and policies, including the Audit Committee.
4. Information regarding the duties and responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners.

PJB's Induction Program can be in the form of presentations, meetings, visits to the Company / Subsidiaries, and reviewing documents or other programs deemed appropriate to the PJB where the program is implemented. In 2019, there was a change of members of the Board of Commissioners with the appointment of Mr. Jisman Hutajulu; therefore, the induction program for the new Commissioner is carried out as follows:

Tanggal Date	Agenda Agenda	Dewan Komisaris Board of Commissioners
5 April 2019 April 5, 2019	1. <i>Corporate Exposure</i> & Implementasi GCG 2. Transformasi Korporat dan RJPP PT PJB 2017 – 2021 3. RKAP Tahun 2019 1. Corporate Exposure & GCG Implementation 2. Corporate Transformation and PT PJB's Corporate Long-term Plan 2017 – 2021 3. ABOP 2019	Jisman P. Hutajulu

Pedoman Kerja Dewan Komisaris Board of Commissioners Manual

Dewan Komisaris menyusun pedoman kerja internal dalam bentuk Piagam Kerja Dewan Komisaris dan ditetapkan oleh Komisaris Utama pada tanggal 12 Desember 2011. Piagam Kerja Dewan Komisaris telah dimutakhirkan menjadi pedoman kerja yang saat ini dikenal dengan Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris atau *Board of Commissioner Manual* (BoC *Manual*) dan disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 011.K/DK/PJB/2014 tanggal 22 Desember 2014. Tata laksana Kerja Dewan Komisaris atau *Board of Commissioner Manual* (BoC *Manual*) merupakan bagian tidak terpisahkan dari *Board Manual*.

Keberadaan BoC *Manual* merupakan wujud komitmen Dewan Komisaris untuk bertindak dan bersikap berdasarkan prinsip GCG, yaitu transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen dan adil, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar, serta sesuai dengan standar etika yang berlaku di Perusahaan. Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris ditinjau ulang secara berkala dan jika diperlukan dilakukan pemutakhiran sesuai kebutuhan Dewan Komisaris dan perkembangan Perusahaan.

BoC *Manual* mencakup hal-hal yang belum cukup diatur dalam *Board Manual* dan/atau memerlukan penjabaran lebih lanjut yang bersifat teknis pelaksanaan di lingkungan internal Dewan Komisaris. BoC *Manual* mengatur pelaksanaan tugas dan fungsi internal Dewan Komisaris. Isi dari BoC *Manual* adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum Dewan Komisaris.
2. Tugas Dan Wewenang Dewan Komisaris.
3. Hak Dan Kewajiban Dewan Komisaris.
4. Prosedur Pengawasan Terhadap Kegiatan Operasional Perusahaan.
5. Rapat Dewan Komisaris.
6. Rencana Kerja Tahunan Dewan Komisaris.
7. Kunjungan Kerja Dewan Komisaris.
8. Administrasi Surat Menyurat Dewan Komisaris.
9. Komite - Komite Dewan Komisaris.
10. Sekretariat Dewan Komisaris.

The Board of Commissioners compiles internal work guidelines in the form of a Board of Commissioners Charter and was established by the President Commissioner on December 12, 2011. The Board of Commissioners' Charter has been updated to the work guideline which is currently known as the Board of Commissioners Manual (BoC Manual) and was approved by Decree of the Board of Commissioners Number 011.K/DK/PJB/2014 on December 22, 2014. The Board of Commissioner Manual (BoC Manual) is an integral part of the Board Manual.

The existence of the BoC Manual is a form of the Board of Commissioners' commitment to act and behave based on GCG principles, namely transparent, accountable, responsible, independent and fair, compliance with laws and regulations and the Articles of Association, as well as following the ethical standards that apply in the Company. The Board of Commissioners' Manual is reviewed periodically and updated based on the needs of the Board of Commissioners and the Company's development.

The BoC Manual covers matters that have not been adequately regulated in the Board Manual and/or requires further technical elaboration in the scope of the Board of Commissioners. The BoC Manual regulates the implementation of the internal duties and functions of the Board of Commissioners. The contents of the Board of Commissioner's Manual are as follows:

1. General Provisions of the Board of Commissioners.
2. Duties and Authorities of the Board of Commissioners.
3. Rights and Responsibilities of the Board of Commissioners.
4. Supervisory Procedures for Company Operational Activities.
5. Board of Commissioners Meeting.
6. Annual Work Plan of the Board of Commissioners.
7. Official Visit to the Board of Commissioners.
8. Administration of the Board of Commissioners Correspondence.
9. Committees of the Board of Commissioners.
10. Secretariat of the Board of Commissioners.

Aspek Dewan Komisaris yang diatur dalam *Board Manual* dan dijabarkan lebih jelas dalam *BoC Manual* PJB, antara lain:

1. Pengertian, persyaratan dan komposisi Dewan Komisaris.
2. Prinsip-Prinsip Pengambilan Keputusan Dewan Komisaris.
3. Pengaturan rangkap jabatan.
4. Program pengenalan dan pelatihan.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris serta *Key Performance Indicator* Dewan Komisaris.
6. Tugas dan wewenang Dewan Komisaris, termasuk terkait persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP, tugas arahan dan pengawasan Dewan Komisaris dan Praktik GCG.
7. Hak dan Kewajiban Dewan Komisaris.
8. Tata Tertib Rapat.
9. Pelaporan dan Pertanggungjawaban.
10. Organ Pendukung Dewan Komisaris.

The aspects of the Board of Commissioners that are regulated in the *Board Manual* and spelled out more clearly in the *PJB BoC Manual*, include:

1. Definition, requirements, and composition of the Board of Commissioners.
2. Principles for Decision Making of the Board of Commissioners.
3. Concurrent position policy.
4. An introduction and training program.
5. The Work Plan and Budget of the Board of Commissioners and the Key Performance Indicator of the Board of Commissioners.
6. The duties and authorities of the Board of Commissioners, including those related to the approval of the draft Corporate Long-term Plan and ABOP, the duties and supervisory of the Board of Commissioners and GCG Practices.
7. Rights and Obligations of the Board of Commissioners.
8. Meeting Codes.
9. Reporting and Accountability.
10. Supporting Organs of the Board of Commissioners.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Tasks and Responsibilities of the Board of Commissioners

Sebagaimana telah diatur dalam *Board Manual* dan *BoC Manual*, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris secara umum adalah terkait pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat atas pengelolaan Perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip CGC. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan operasional kecuali hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengambilan keputusan Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris, sehingga tidak meniadakan wewenang dan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan. Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Komisaris PJB meliputi:

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan.
2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.
3. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJPP dan RKAP.
4. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan.
5. Melaporkan dengan segera kepada Rapat Umum Pemegang Saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan.

As regulated in the *Board Manual* and *BoC Manual*, the tasks and responsibilities of the Board of Commissioners, in general, are related to the implementation of the supervisory function and providing advice on the management of the Company based on the CGC principles. The Board of Commissioners is not involved in making decisions related to operational activities except other things stipulated in the Articles of Association and applicable laws and regulations. Decision making of the Board of Commissioners is part of the supervisory duties of the Board of Commissioners, so it does not negate the authority and responsibility of the Board of Directors for the implementation of management. The main duties and responsibilities of PJB's Board of Commissioners include:

1. Recommending the Board of Directors on the implementation of company management.
2. Researching and analyzing and signing the Company's Long Term Plan and Work Plan and Corporate Budget prepared by the Directors, following the provisions of this Articles of Association.
3. Providing opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding the Company's Long Term Plan and Work Plan and Corporate Budget regarding the reasons for the Board of Commissioners to sign the RJPP and RKAP.
4. Following the development of the Company's activities, providing opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding any issues deemed important to the management of the Company.
5. Reporting immediately to the General Meeting of Shareholders if there are symptoms of a decline in the Company's performance.

- Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.
- Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan apabila diminta.
- Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
- Melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan tersebut dan Perusahaan lain.
- Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang barulampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
- Researching and analyzing periodic and annual reports prepared by the Directors and signing annual reports.
- Provide explanations, opinions, and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding the Annual Report when requested.
- Compiling minutes of the Board of Commissioners' meeting and keep a copy.
- Reporting to the Company regarding ownership of its shares and / or their families in the Company and other companies.
- Reporting the supervisory tasks that have been carried out during the past fiscal year to the General Meeting of Shareholders.
- Performing other obligations in the context of supervisory duties and providing advice, as long as it does not conflict with statutory regulations, articles of association, and / or decisions of the General Meeting of Shareholders.

Pembagian Tugas Anggota Dewan Komisaris

Tasks Division of Members of the Board of Commissioners

Anggota Dewan Komisaris bertugas secara Individu dan kolegal sebagaimana diatur dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris. Masing-masing Dewan komisaris ditunjuk untuk melakukan pengawasan secara individu pada bidang-bidang yang berbeda sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditetapkan. Pembagian tugas diantara para Komisaris adalah sebagai berikut:

Members of the Board of Commissioners are tasked individually and collegially as stipulated in the Board of Commissioners Manual. Every member of the Board of Commissioners is appointed to supervise individually in different fields following the assigned division of tasks. The division of duties among the Commissioners is as follows:

Nama Name	Tugas Pengawasan	Supervisory Task
Sriyono Dwidjo Siswoyo	• Selaku koordinator atas semua tugas dan kewajiban Dewan Komisaris	• As coordinator of all duties and obligations of the Board of Commissioners
Defy Indiyanto Budiarto	• Pengawasan dalam bidang Audit • Pengawasan dalam bidang SDM dan Organisasi • Pengawasan dalam kinerja dan K3L	• Monitoring in the field of Audit • Monitoring in the field of HC and Organizations • Monitoring the performance and HSE
Sunarsip	• Pengawasan dalam bidang Audit • Pengawasan dalam bidang Manajemen Risiko dan Kepatuhan • Pengawasan bidang keuangan • Pengawasan bidang investasi dan pengembangan usaha	• Monitoring in the field of Audit • Monitoring in the field of Risk Management and Compliance • Monitoring the financial sector • Monitoring investment and business development
Alihuddin Sitompul ¹	• Pengawasan dalam bidang SDM dan Organisasi • Pengawasan dalam kinerja dan K3L	• Monitoring in the field of HC and Organizations • Monitoring the performance and HSE
Benny M.M. Marbun	• Pengawasan dalam bidang Manajemen Risiko dan Kepatuhan • Pengawasan bidang investasi dan pengembangan usaha	• Monitoring in the field of Risk Management and Compliance • Monitoring investment and business development
Hendra Iswahyudi	• Pengawasan dalam bidang Manajemen Risiko dan Kepatuhan • Pengawasan dalam bidang operasional pembangkitan	• Monitoring in the field of Risk Management and Compliance • Monitoring in the field of generation operations
Jisman P. Hutajulu ²	• Pengawasan dalam bidang SDM dan Organisasi • Pengawasan dalam kinerja dan K3L	• Monitoring in the field of HC and Organizations • Monitoring the performance and HSE

Dewan Komisaris membentuk komite-komite yang di dalamnya, setiap anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi ketua dan wakil ketua pada Komite yang telah dibentuk. Pendelegasian anggota Dewan Komisaris kedalam sejumlah Komite mempertimbangkan kompetensi dan dianggap mampu melaksanakan tugas pada masing-masing Komite tersebut yaitu:

Komite Committee	Ketua Chairman	Wakil Ketua Vice-Chairman
Komite Audit Audit Committee	Sunarsip	Defy Indiyanto Budiarto
Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan Risk and Compliance Management Committee	Benny MM Marbun	Hendra Iswahyudi
Komite SDM dan Organisasi HC and Organization Committee	Alihuddin Sitompul ¹ Defy Indiyanto Budiarto	Defy Indiyanto Budiarto Jisman P. Hutajulu ²

Keterangan Keterangan:

- Menjabat sebagai Komisaris Perusahaan sampai dengan bulan Maret 2019
Served as Chairperson and Vice Chairperson Chairperson of the HC Committee and Corporate Organization until March 2019
- Menjabat sebagai Komisaris Perusahaan mulai bulan Maret 2019
Served as Chairperson and Vice Chairperson Chairperson of the HC Committee and Corporate Organization from March 13, 2019

The Board of Commissioners forms committees in which each member of the Board of Commissioners is appointed as chairman and Vice Chairperson chairman of the Committee that has been formed. The delegation of members of the Board of Commissioners into several Committees considers competence and is considered capable of carrying out the duties of each Committee, namely:

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dan Penasehatan Implementation of Supervisory and Advisory Functions

Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi terkait pengelolaan Perusahaan dalam beberapa aspek yang secara garis besar meliputi:

- Aspek Korporat.
 - Berperan sesuai fungsinya dalam persiapan dan penyelenggaraan RUPS tahunan yakni RUPS Persetujuan RKAP dan RUPS Pertanggungjawaban (LPT).
 - Arahan dalam penyusunan RJPP dan RKAP 2020.
 - Monitoring pelaksanaan RJPP dan RKAP serta kebutuhan revisinya.
 - Penasehatan dalam penyusunan Tata kelola Niaga, Risiko Korporat, Risiko Bisnis, Kepatuhan, Agenda Korporat dan lain-lain.
- Niaga dan Operasi - Pemeliharaan.
 - Produksi/penjualan kWh dan pengendalian Biaya Pokok Produksi.
 - Strategi peningkatan kinerja pembangkit batubara eksisting.
 - Energy mix dan security of supply energi primer.
 - Program dan realisasi pemeliharaan unit pembangkit.
 - Bisnis O&M baik yang dilaksanakan oleh PJB maupun Anak Perusahaan.
 - Kepatuhan pada K3LH (Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan Hidup).
- Pengembangan Usaha dan Pembinaan Anak Perusahaan.
 - Arahan dalam menindaklanjuti Penugasan yang diterima dari Pemegang Saham, termasuk dalam penyiapan SDM dan sumber daya lainnya.
 - Evaluasi dan Rekomendasi atas pelaksanaan Program Kemitraan IPP termasuk pemilihan partner mitra bisnis.

The Board of Commissioners has carried out its supervisory function and provided advice to the Directors regarding the management of the Company in several aspects which broadly include:

- Corporate Aspects.
 - Acting according to its function in the preparation and implementation of the annual GMS namely the GMS on ABOP Approval and the GMS on Liability (LPT).
 - The direction in the preparation of CLP and ABOP 2020.
 - Monitoring the implementation of CLP and ABOP and their revision needs.
 - Counseling in the preparation of Commercial Governance, Corporate Risk, Business Risk, Compliance, Corporate Agenda, and others.
- Commerce and Operations - Maintenance.
 - Production/sale of kWh and production cost control.
 - Strategy to improve the performance of existing coal plants.
 - Energy mix and security of primary energy supply.
 - Program and realization of maintenance of generating units.
 - O&M business, both conducted by PJB and its Subsidiaries.
 - Compliance with HSE (Health, Safety, and Environment).
- Business Development and Guidance of Subsidiaries.
 - Directives in following up on Assignments received from Shareholders, including in the preparation of HC and other resources.
 - Evaluation and Recommendations for the implementation of the IPP Partnership Program including the selection of business partner partners.

- c. Evaluasi atas pembentukan anak perusahaan/perusahaan afiliasi dan setoran sahamnya.
- d. Pengawasan dan penasehatan atas progres seluruh proyek Penugasan.
- 4. SDM & Organisasi
 - a. Pemilihan Direksi & Komisaris pada Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi.
 - b. Penyusunan organisasi dan pembagian tugas.
 - c. Evaluasi dan analisa atas Efektifitas Organisasi.
 - d. Review atas *Job Competency Readiness*, Program pengembangan SDM termasuk arahan dalam program "*Built, Borrow & Buy*" dalam penyiapan kader-kader perusahaan.
 - e. Review atas proses bisnis seluruh fungsi dengan mengacu pada standard APQC (*American Productivity Quality Center*) dan keselarasannya dengan Teknologi Informasi melalui penyusunan *Enterprise Architecture*.
 - f. Review atas kebijakan aspek K3L (Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Lingkungan).
- 5. Audit SPI
 - a. Review Rencana Kerja SPI serta pelaksanaannya, termasuk evaluasi temuan-temuan penting.
 - b. Memantau pelaksanaan *Risk Based Audit* dan memberikan Arahan dalam pelaksanaan *Three Lines of Defense*.
 - c. Evaluasi hasil Audit Eksternal (KAP dan Auditor Eksternal lainnya).
 - d. Monitoring Tindak lanjut Keputusan dan Arahan RUPS.
 - e. Rekomendasi penghapusbukuan ATTB.
 - f. Monitoring pelaksanaan *Whistle Blowing System* (WBS) serta revisi terhadap Pedomannya.

- c. Evaluation of the establishment of a subsidiary / affiliated company and the deposit of shares.
- d. Supervisory and advice on the progress of all Assignment projects.
- 4. HC & Organization
 - a. Election of Directors and Commissioners of Subsidiaries and Affiliated Companies.
 - b. Organizational preparation and division of tasks.
 - c. Evaluation and analysis of Organizational Effectiveness.
 - d. Review of Job Competency Readiness, HC development program including the direction in the "Built, Borrow & Buy" program in preparing company cadres.
 - e. Reviewing all business functions of the process by referring to the APQC (American Productivity Quality Center) standard and its alignment with Information Technology through the preparation of Enterprise Architecture.
 - f. Review of HSE (Occupational Health and Safety and Environment) policies.
- 5. IAU Audit
 - a. Review IAU's Work Plan and its implementation, including the evaluation of important findings.
 - b. Monitor the implementation of Risk-Based Audit and provide direction in the implementation of the Three Line of Defenses.
 - c. Evaluate the results of the External Audit (Accounting Firm and other External Auditors).
 - d. Monitoring the Follow-up to the Resolution and Direction of the GMS.
 - e. Bookkeeping recommendation for NOFA.
 - f. Monitoring the implementation of the Whistle Blowing System (WBS) as well as revisions to the Guidelines.

Kunjungan Kerja Dewan Komisaris Board of Commissioners Official Visit

Kunjungan ke Unit Pembangkit maupun Anak Perusahaan dilakukan guna mendapat informasi lebih jelas secara langsung mengenai jalannya Unit/Anak Perusahaan tersebut, Kunjungan Dewan Komisaris yang terlaksana tahun 2019 adalah :

A visit to the Generation Unit and a Subsidiary is carried out to receive more accountable information directly about the running of the Unit/Subsidiary. The Board of Commissioners' visit that took place in 2019 is as follows.

No.	Lokasi Location	Waktu Date
1	PLTU Bangka, PLTU Belitung dan PLTU Bolok - Kupang Bangka CFPP, Belitung CFPP and Bolok-Kupang CFPP	24-25 Januari 2019 January 24-25, 2019
2	Proyek PLTU Jawa 7 – Cilegon, Banten Java 7 CFPP Project – Cilegon, Banten	7 Februari 2019 February 7, 2019
3	Proyek PLTU Anggrek Gorontalo – Gorontalo Anggrek Gorontalo CFPP Project – Gorontalo	20 Februari 2019 February 20, 2019
4	PLTU Amurang – Amurang, Sulawesi Utara Amurang CFPP – Amurang, North Sulawesi	21 Februari 2019 February 21, 2019
5	PLTU Pacitan – Pacitan, Jawa Timur Pacitan CFPP – Pacitan, East Java	22 Februari 2019 February 22, 2019
6	Proyek PLTA Batang Toru – Sibolga, Sumatera Utara Batang Toru HPP Project – Sibolga, North Sumatera	14 - 16 Maret 2019 March 14-16, 2019



No.	Lokasi Location	Waktu Date
7	PLTU Tanjung Awar-Awar, Tuban Jawa Timur Tanjung Awar-Awar CFPP, Tuban, East Java	11 -12 April 2019 April 11-12, 2019
8	PLTD SUPPA (6 x 10,4 MW) di Pinrang, Sulawesi Selatan SUPPA DEPP (6 x 10,4 MW) in Pinrang, South Sulawesi	3 Mei 2019 May 3, 2019
9	TOSS (Tempat Olah Sampah Setempat) Klungkung Bali TOSS (Local Waste Management Sites) Klungkung Bali	20 Juni 2019 June 20, 2019
10	PLTU Tenayan – Pekan Baru, Riau Tenayan CFPP – Pekan Baru, Riau	4-5 Juli 2019 July 4-5, 2019
11	PLTMG Bawean 3 x 1 MW dan Ekowisata Hijau Daun Binaan UP Gresik, di pulau Bawean Bawean GEPP of 3 x 1 MW and Hijau Daun Ecotourism fostered by Gresik GU, Bawean Island	11-12 Juli 2019 July 11-12, 2019
12	Proyek Add-on Muara Tawar, di UP PLTGU Muara Tawar Muara Tawar Add-on GU, in Muara Tawar GTPP GU	25 Juli 2019 July 25, 2019
13	PLTA Brantas dan PLTA Tulung Agung, di Jawa Timur Brantas HPP and Tulung Agung HPP, East Java	1-2 Agustus 2019 August 1-2, 2019
14	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris ke PLTU Paiton, di Unit Pembangkit Paiton, Jawa Timur Working Visit of the Board of Commissioners to the Paiton CFPP, in the Paiton GU, East Java	24 September 2019 September 24, 2019
15	PLTU Jawa 7, Cilegon Jawa Barat Java 7 CFPP, Cilegon, West Java	27 September 2019 September 27, 2019
16	Unit Pembangkitan Gresik, Gresik Jawa Timur Gresik GU, Gresik, East Java	3 Oktober 2019 October 3, 2019
17	UBJOM PLTU Indramayu, Indramayu Jawa Barat Indramayu CFPP OMSBU, Indramayu, West Java	14 Oktober 2019 October 14, 2019
18	PLTU Tidore, Tidore Maluku Utara Tidore CFPP, Tidore, North Maluku	11-12 November 2019 November 11-12, 2019

Persetujuan dan Rekomendasi Dewan Komisaris Board of Commissioners' Approval and Recommendation

Dewan Komisaris telah memberikan beberapa persetujuan dan rekomendasi kepada Direksi baik melalui keputusan hasil rapat maupun dengan surat keputusan. Seluruh keputusan Dewan Komisaris baik melalui surat maupun hasil Rapat Dewan Komisaris dan Direksi yang tertuang dalam Notulen Rapat senantiasa dimonitor tindak lanjut penyelesaiannya pada setiap rapat. Persetujuan dan rekomendasi yang diberikan Dewan Komisaris mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Rekomendasi Dewan Komisaris atas Rencana Pemberian Tambahan Modal Disetor bagi PJB Investasi untuk Proyek PLTU MT Sumbagsel 1 Kapasitas 2x150 MW.
2. Persetujuan Penggunaan Saldo Laba PT Pembangkitan Jawa Bali.
3. Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris dalam RUPS LPT Tahun Buku 2018.
4. Rekomendasi Dewan Komisaris atas Tambahan Modal Disetor kepada PT PJB Investasi Tahun 2019.
5. Rekomendasi Perubahan Skema Penugasan PT PJB dalam Proyek IPP PLGTU Riau-2 dari yang sebelumnya Penugasan sebagai *mandatory Partner* dengan kepemilikan saham sebesar 30% menjadi penugasan dengan kepemilikan saham sebesar 51%.
6. Tanggapan Tertulis Perubahan Anggaran Dasar.

The Board of Commissioners has provided several approvals and recommendations to the Board of Directors both through the decision of the meeting results and by decree. All decisions of the Board of Commissioners, both through letters and the results of the Board of Commissioners and Board of Directors Meeting contained in the Minutes of the Meeting, are always monitored by the follow-up to the resolution at each meeting. Approval and recommendations given by the Board of Commissioners include the following:

1. Board of Commissioners' Recommendations on the Provision of Additional Paid-in Capital of PJB Investasi for Sumbagsel 1 MT CFPP Project with a capacity of 2x150 MW.
2. Approval for the Use of PT Pembangkitan Jawa Bali's Profit Balance.
3. Written Response of the Board of Commissioners at the LPT AGM for Fiscal Year 2018.
4. Recommendations from the Board of Commissioners of Additional Paid in Capital to PT PJB Investasi in 2019.
5. Recommendations for Changing the PT PJB Assignment Scheme in the IPP PLGTU Riau-2 Project from the previous assignment as a mandatory Partner with 30% share ownership to an assignment with 51% share ownership.
6. Written Response to Amendments to the Articles of Association.

7. Persetujuan Penetapan Kandidat *Partner* Proyek Penugasan PLTS Terapung Cirata 145 MWac beserta Gardu Induk Evakuasi Daya.
8. Rekomendasi Dan Persetujuan Terkait Usulan RKAP Revisi Tahun 2019.
9. Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris atas Surat Direksi mengenai Usulan RKAP 2020.

7. Approval for the Appointment of Cirata 145 MWac Floating SPP Assignment Project Partner along with the Main Station for Power Evacuation.
8. Recommendations and Approvals Regarding the Proposed Revised ABOP 2019.
9. Written Response of the Board of Commissioners to the Directors' Letter regarding the ABOP 2020.

Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meeting

Rapat Dewan Komisaris diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan sebagaimana diatur dalam *Board Manual* PJB. Rapat Dewan Komisaris terdiri dari Rapat Internal Dewan Komisaris dan Rapat Pengawasan Dewan Komisaris yang dihadiri oleh Direksi. Selain itu, terdapat pula Rapat Konsultasi untuk membahas berbagai aspek operasional dan pengelolaan finansial PJB, yang merupakan Rapat Direksi yang dihadiri oleh Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris menyusun rencana rapat sebelum tahun berjalan baik rapat internal Dewan Komisaris maupun Rapat Pengawasan dan Konsultasi yang dihadiri oleh Direksi masing-masing minimal 1 kali setiap bulan. Agenda rapat internal Dewan Komisaris secara umum meliputi tindak lanjut tugas Dewan Komisaris, Laporan Manajemen dan Kinerja, dan progres proyek dan penugasan. Sementara agenda rapat pengawasan/konsultasi secara umum meliputi Laporan Manajemen dan Kinerja, dan Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya.

Materi yang akan dibahas dan agenda rapat terlebih dahulu dikaji dalam Rapat Intern Dewan Komisaris (RID) maupun Rapat Komite berdasarkan laporan-laporan yang dibuat oleh Manajemen. Selama tahun 2019, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat internal sebanyak 12 kali dengan agenda dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Meetings of the Board of Commissioners are held at least once a month as stipulated in PJB's Board Manual. The Board of Commissioners' Meeting consists of the Board of Commissioners' Internal Meeting and the Board of Commissioners' Supervisory Meeting which is attended by the Directors. Also, there is a Consultation Meeting to discuss various aspects of PJB's operational and financial management, which is a Board of Directors' Meeting attended by the Board of Commissioners.

The Board of Commissioners prepares plans for the meeting before the current year, both the Board of Commissioners' internal meetings and the Supervisory and Consultation Meeting attended by the Directors at least once every month. The general agenda of the Board of Commissioners' internal meetings include follow-up to the duties of the Board of Commissioners, Management and Performance Reports, and project progress and assignments. While the general supervisory/consultation meeting agenda includes Management and Performance Reports, and Follow-Up to Previous Meetings.

The material to be discussed and the agenda of the meeting were first reviewed in the Internal Meeting of the Board of Commissioners (RID) and Committee Meetings based on reports made by Management. During 2019, the Board of Commissioners held 12 internal meetings with the agenda and the attendance of the Board of Commissioners is as follows:

Agenda Rapat Internal Dewan Komisaris

The Board of Commissioners' Internal Meeting Agenda

No.	Tanggal Date	Agenda	Agenda	Peserta Participant
1.	28 Januari 2019 January 28, 2019	1. Arahan Dewan Komisaris 2. Progres Tindak Lanjut Rapat yang Lalu 3. Laporan Kegiatan Komite Audit 4. Laporan Kegiatan Komite Manajemen Risiko & Kepatuhan 5. Laporan Kegiatan Komite SDM & Organisasi 6. Hasil Kajian Proper	1. Direction of the Board of Commissioners 2. Follow-Up Progress of the Previous Meeting 3. Audit Committee Activity Report 4. Risk Management & Compliance Committee Activity Report 5. HC & Organization Committee Activity Report 6. Proper Study Results	Sriyono Dwidjo Siswoyo, Defy Indiyanto Budiarto, Sunarsip, Alihuddin Sitompul Benny M.M Marbun, Hendra Iswahyudi

No.	Tanggal Date	Agenda	Agenda	Peserta Participant
2.	27 Februari 2019 February 27, 2019	1. Arahan Dewan Komisaris 2. Progres Tindak Lanjut Rapat yang Lalu 3. Laporan Kinerja PT PJB Bulan Januari 4. Laporan Kegiatan Komite Audit 5. Laporan Kegiatan Komite Manajemen Risiko & Kepatuhan 6. Laporan Kegiatan Komite SDM & Organisasi 7. Progres Arahan RUPS RKAP	1. Direction of the Board of Commissioners 2. Follow-Up Progress of the Past Meeting 3. PT PJB Performance Report in January 4. Audit Committee Activity Report 5. Risk Management & Compliance Committee Activity Report 6. HC & Organization Committee Activity Report 7. Progress of GMS on ABOP Direction	Sriyono Dwidjo Siswoyo, Defy Indiyanto Budiarto, Sunarsip, Alihuddin Sitompul Benny M.M Marbun, Hendra Iswahyudi
3.	28 Maret 2019 March 28, 2019	1. Arahan Dewan Komisaris 2. Progres Tindak Lanjut Rapat yang Lalu 3. Laporan Kinerja PT PJB Bulan Februari 4. Laporan Kegiatan Komite Audit 5. Laporan Kegiatan Komite Manajemen Risiko & Kepatuhan 6. Laporan Kegiatan Komite SDM & Organisasi	1. Direction of the Board of Commissioners 2. Follow-Up Progress of the Past Meeting 3. February PT PJB Performance Report 4. Audit Committee Activity Report 5. Risk Management & Compliance Committee Activity Report 6. HC & Organization Committee Activity Report	Sriyono Dwidjo Siswoyo, Defy Indiyanto Budiarto, Sunarsip, Alihuddin Sitompul Benny M.M Marbun, Jisman P. Hutajulu
4.	25 April 2019 April 25, 2019	1. Arahan Dewan Komisaris 2. Laporan Kegiatan Dewan Komisaris oleh Sekretaris Dewan Komisaris 3. Laporan Manajemen PT PJB Triwulan I 2019 4. Laporan Kegiatan Komite Audit 5. Laporan Kegiatan Komite Manajemen Risiko & Kepatuhan 6. Laporan Kegiatan Komite SDM & Organisasi	1. Direction of the Board of Commissioners 2. Board of Commissioners Activity Report by the Board of Commissioners' Secretary 3. Management Report of PT PJB Quarter I 2019 4. Audit Committee Activity Report 5. Risk Management & Compliance Committee Activity Report 6. HC & Organization Committee Activity Report	Sriyono Dwidjo Siswoyo, Defy Indiyanto Budiarto, Sunarsip, Alihuddin Sitompul Benny M.M Marbun, Jisman P. Hutajulu
5.	23 Mei 2019 May 23, 2019	1. Arahan Dewan Komisaris 2. Progres Tindak Lanjut Tugas Dewan Komisaris yang Lalu 3. Laporan Kinerja PT PJB Bulan April 2019 4. Laporan Kegiatan Komite Audit 5. Laporan Kegiatan Komite Manajemen Risiko & Kepatuhan 6. Laporan Kegiatan Komite SDM & Organisasi	1. Direction of the Board of Commissioners 2. Follow-Up Progress on the Board of Commissioners' Past Tasks 3. Performance Report of PT PJB in April 2019 4. Audit Committee Activity Report 5. Risk Management & Compliance Committee Activity Report 6. HC & Organization Committee Activity Report	Sriyono Dwidjo Siswoyo, Defy Indiyanto Budiarto, Sunarsip, Alihuddin Sitompul Benny M.M Marbun, Hendra Iswahyudi, Jisman P. Hutajulu
6.	27 Juni 2019 June 27, 2019	1. Arahan Dewan Komisaris 2. Tindak Lanjut Tugas Dewan Komisaris yang Lalu oleh Sekretaris Dekom 3. Laporan Kinerja PT PJB Bulan Mei 2019 4. Laporan Kegiatan Komite Audit 5. Laporan Kegiatan Komite Manajemen Risiko & Kepatuhan 6. Laporan Kegiatan Komite SDM & Organisasi	1. Direction of the Board of Commissioners 2. Follow up on the Board of Commissioners' Past Tasks by the Secretary of the Board of Commissioners 3. PT PJB Performance Report in May 2019 4. Audit Committee Activity Report 5. Risk Management & Compliance Committee Activity Report 6. HC & Organization Committee Activity Report	Sriyono Dwidjo Siswoyo, Defy Indiyanto Budiarto, Sunarsip, Alihuddin Sitompul Benny M.M Marbun, Hendra Iswahyudi, Jisman P. Hutajulu



No.	Tanggal Date	Agenda	Agenda	Peserta Participant
7.	31 Juli 2019 July 31, 2019	1. Arahan Dewan Komisaris 2. Tindak Lanjut Tugas Dewan Komisaris yang Lalu oleh Sekretaris Dekom 3. Laporan Manajemen PT PJB Triwulan II 2019 4. Laporan Kegiatan Komite Audit 5. Laporan Kegiatan Komite Manajemen Risiko & Kepatuhan 6. Laporan Kegiatan Komite SDM & Organisasi 7. Pembahasan Revisi RKAP 2019	1. Direction of the Board of Commissioners 2. Follow up on the Board of Commissioners' Past Tasks by the Secretary of the Board of Commissioners 3. Management Report of PT PJB Quarter II 2019 4. Audit Committee Activity Report 5. Risk Management & Compliance Committee Activity Report 6. HC & Organization Committee Activity Report 7. Discussion on 2019 ABOP Revision	Sriyono Dwidjo Siswoyo, Defy Indiyanto Budiarto, Sunarsip, Alihuddin Sitompul Benny M.M Marbun, Hendra Iswahyudi, Jisman P. Hutajulu
8.	27 Agustus 2019 August 27, 2019	1. Arahan Dewan Komisaris 2. Progres Tindak Lanjut Tugas Dekom 3. Laporan Kinerja PT PJB Bulan Juli 2019 4. Laporan Kegiatan Komite Audit 5. Laporan Kegiatan Komite Manajemen Risiko & Kepatuhan 6. Laporan Kegiatan Komite SDM & Organisasi	1. Direction of the Board of Commissioners 2. Follow-Up Progress of the Dekom Task Force 3. PT PJB Performance Report in July 2019 4. Audit Committee Activity Report 5. Risk Management & Compliance Committee Activity Report 6. HC & Organization Committee Activity Report	Sriyono Dwidjo Siswoyo, Defy Indiyanto Budiarto, Sunarsip, Alihuddin Sitompul Benny M.M Marbun, Hendra Iswahyudi, Jisman P. Hutajulu
9.	25 September 2019 September 25, 2019	1. Arahan Dewan Komisaris 2. Laporan Kinerja PT PJB Bulan Agustus 2019 3. Laporan Kegiatan Komite Audit 4. Laporan Kegiatan Komite Manajemen Risiko & Kepatuhan 5. Laporan Kegiatan Komite SDM & Organisasi	1. Direction of the Board of Commissioners 2. PT PJB Performance Report in August 2019 3. Audit Committee Activity Report 4. Risk Management & Compliance Committee Activity Report 5. HC & Organization Committee Activity Report	Sriyono Dwidjo Siswoyo, Defy Indiyanto Budiarto, Sunarsip, Alihuddin Sitompul Benny M.M Marbun, Hendra Iswahyudi,
10.	24 Oktober 2019 October 24, 2019	1. Arahan Dewan Komisaris 2. Laporan Manajemen PT PJB Triwulan III 2019 3. Laporan Kegiatan Komite Audit 4. Laporan Kegiatan Komite Manajemen Risiko & Kepatuhan 5. Laporan Kegiatan Komite SDM & Organisasi	1. Direction of the Board of Commissioners 2. Management Report of PT PJB Quarter III 2019 3. Audit Committee Activity Report 4. Risk Management & Compliance Committee Activity Report 5. HC & Organization Committee Activity Report	Sriyono Dwidjo Siswoyo, Defy Indiyanto Budiarto, Sunarsip, Alihuddin Sitompul Benny M.M Marbun, Hendra Iswahyudi, Jisman P. Hutajulu
11.	21 November 2019 November 21, 2019	1. Arahan Dewan Komisaris 2. Laporan Kinerja PT PJB Bulan Oktober 2019 3. Laporan Kegiatan Komite Audit 4. Laporan Kegiatan Komite Manajemen Risiko & Kepatuhan 5. Laporan Kegiatan Komite SDM & Organisasi	1. Direction of the Board of Commissioners 2. PT PJB Performance Report in October 2019 3. Audit Committee Activity Report 4. Risk Management & Compliance Committee Activity Report 5. HC & Organization Committee Activity Report	Sriyono Dwidjo Siswoyo, Defy Indiyanto Budiarto, Sunarsip, Alihuddin Sitompul Benny M.M Marbun, Hendra Iswahyudi, Jisman P. Hutajulu
12.	19 Desember 2019 December 19, 2019	1. Arahan Dewan Komisaris 2. Progres Tindak Lanjut Tugas Dewan Komisaris yang Lalu 3. Laporan Kinerja PT PJB Bulan November 2019 4. Laporan Kegiatan Komite Audit 5. Laporan Kegiatan Komite Manajemen Risiko & Kepatuhan 6. Laporan Kegiatan Komite SDM & Organisasi 7. Evaluasi komite pada Dewan Komisaris PT PJB	1. Direction of the Board of Commissioners 2. Follow-Up Progress on the Board of Commissioners' Past Tasks 3. PT PJB Performance Report for November 2019 4. Audit Committee Activity Report 5. Risk Management & Compliance Committee Activity Report 6. HC & Organization Committee Activity Report 7. Evaluation of the committee on the Board of Commissioners of PT PJB	Sriyono Dwidjo Siswoyo, Defy Indiyanto Budiarto, Sunarsip, Alihuddin Sitompul Benny M.M Marbun, Hendra Iswahyudi, Jisman P. Hutajulu

Selain itu, Dewan Komisaris melaksanakan rapat bersama Direksi dalam Rapat Pengawasan. Selama tahun 2019, telah dilaksanakan Rapat Pengawasan sebanyak 12 kali dengan agenda dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris sebagai berikut:

Also, the Board of Commissioners conducts joint meetings with the Directors in Supervisory Meetings. During 2019, 12 Supervisory Meetings were held with the agenda and attendance of the Board of Commissioners as follows:

Agenda Rapat Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi

Agenda for the Supervisory Meeting of the Board of Commissioners and Directors

No.	Tanggal Date	Agenda		Peserta Participant
1	29 Januari 2019 January 29, 2019	1. Laporan Kinerja PT PJB Bulan Desember 2018 2. Pembahasan Hasil RUPS 2019 3. Hasil Kunjungan Kerja ke Unit terkait Kualitas Batubara di PLTU Bangka, Belitung dan Bolok	1. PT PJB Performance Report for December 2018 2. Discussion of the Results of the 2019 GMS 3. Results of Official Visits to Units related to Coal Quality in Bangka, Belitung and Bolok CFPPs	Sriyono Dwidjo Siswoyo, Defy Indiyanto Budiarto, Alihuddin Sitompul, Benny M.M. Marbun, Hendra Iswahyudi, Iwan Agung Firstantara, Henky Heru Basudewo, Tjutju Kurnia S, Suharto
2.	28 Februari 2019 February 28, 2019	1. Pengantar Dewan Komisaris 2. Laporan Kinerja PT PJB Bulan Januari 2019 3. Progres Proyek Pengembangan Usaha 4. Laporan Progres Tindak Lanjut Arahan RUPS	1. Introduction to the Board of Commissioners 2. PT PJB Performance Report for January 2019 3. Progress of Business Development Projects 4. Follow-Up Progress Report of GMS Direction	Sriyono Dwidjo Siswoyo, Defy Indiyanto Budiarto, Sunarsip, Alihuddin Sitompul, Benny M.M. Marbun, Hendra Iswahyudi, Iwan Agung Firstantara, Sugiyanto, Henky Heru Basudewo, Tjutju Kurnia S, Suharto
3.	28 Maret 2019 March 28, 2019	1. Pengantar Dewan Komisaris 2. Laporan Kinerja PT PJB Bulan Februari 2019 3. Progres Proyek Pengembangan Usaha 4. Persiapan RUPS LPT 2018	1. Introduction to the Board of Commissioners 2. PT PJB Performance Report in February 2019 3. Progress of Business Development Projects 4. Preparation for the 2018 LPT GMS	Sriyono Dwidjo Siswoyo, Defy Indiyanto Budiarto, Sunarsip, Benny M.M. Marbun, Hendra Iswahyudi, Jisman P. Hutajulu, Iwan Agung Firstantara, Sugiyanto, Miftahul Jannah, Henky Heru Basudewo, Tjutju Kurnia S, Suharto
4.	26 April 2019 April 26, 2019	1. Pengantar Dewan Komisaris 2. Laporan Manajemen PT PJB Triwulan I 2019 3. Progres Proyek Pengembangan Usaha 4. Laporan Progres Tindak Lanjut Arahan RUPS	1. Introduction to the Board of Commissioners 2. Management Report of PT PJB Quarter I 2019 3. Progress of Business Development Projects 4. Follow-Up Progress Report of GMS Direction	Sriyono Dwidjo Siswoyo, Defy Indiyanto Budiarto, Sunarsip, Benny M.M. Marbun, Hendra Iswahyudi, Jisman P. Hutajulu, Iwan Agung Firstantara, Miftahul Jannah, Tjutju Kurnia S, Suharto
5.	24 Mei 2019 May 24, 2019	1. Pengantar Dewan Komisaris 2. Laporan Kinerja PT PJB Bulan April 2019	1. Introduction to the Board of Commissioners 2. PT PJB Performance Report in April 2019	Sriyono Dwidjo Siswoyo, Defy Indiyanto Budiarto, Sunarsip, Benny M.M. Marbun, Hendra Iswahyudi, Jisman P. Hutajulu, Iwan Agung Firstantara, Sugiyanto, Miftahul Jannah, Henky Heru Basudewo, Tjutju Kurnia S, Suharto



Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan Audit
Audited Financial Statements



Referensi Kriteria AR
AR Criteria Reference

No.	Tanggal Date	Agenda		Peserta Participant
6.	28 Juni 2019 June 28, 2019	1. Pengantar Dewan Komisaris 2. Laporan Kinerja PT PJB Bulan Mei 2019 3. Progres Proyek Pengembangan Usaha 4. Laporan Progres Tindak Lanjut Arahan RUPS 5. Insight RKAP 2020	1. Introduction to the Board of Commissioners 2. PT PJB Performance Report in May 2019 3. Progress of Business Development Projects 4. Follow-Up Progress Report of GMS Direction 5. ABOP 2020 Insight	Sriyono Dwidjo Siswoyo, Defy Indiyanto Budiarto, Sunarsip, Benny M.M. Marbun, Hendra Iswahyudi, Jisman P. Hutajulu, Iwan Agung Firstantara, Sugiyanto, Miftahul Jannah, Henky Heru Basudewo, Tjutju Kurnia S, Suharto
7.	31 Juli 2019 July 31, 2019	1. Pengantar Dewan Komisaris 2. Laporan Manajemen PT PJB Triwulan II 2019 3. Progres Proyek Pengembangan Usaha 4. Pembahasan Annual Report Tahun 2018	1. Introduction to the Board of Commissioners 2. Management Report of PT PJB Quarter II 2019 3. Progress of Business Development Projects 4. Discussion on Annual Report 2018	Sriyono Dwidjo Siswoyo, Defy Indiyanto Budiarto, Sunarsip, Benny M.M. Marbun, Hendra Iswahyudi, Jisman P. Hutajulu, Iwan Agung Firstantara, Sugiyanto, Suharto
8.	27 Agustus 2019 August 27, 2019	1. Pengantar Dewan Komisaris 2. Laporan Kinerja PT PJB Bulan Juli 2019 3. Progres Proyek Pengembangan Usaha	1. Introduction to the Board of Commissioners 2. PT PJB Performance Report in July 2019 3. Progress of Business Development Projects	Sriyono Dwidjo Siswoyo, Defy Indiyanto Budiarto, Sunarsip, Benny M.M. Marbun, Hendra Iswahyudi, Jisman P. Hutajulu, Iwan Agung Firstantara, Sugiyanto, Henky Heru Basudewo, Tjutju Kurnia S, Suharto
9.	26 September 2019 September 26, 2019	1. Pengantar Dewan Komisaris 2. Laporan Kinerja PT PJB Bulan Agustus 2019 3. Progres Proyek Pengembangan Usaha	1. Introduction to the Board of Commissioners 2. PT PJB Performance Report in August 2019 3. Progress of Business Development Projects	Sriyono Dwidjo Siswoyo, Defy Indiyanto Budiarto, Sunarsip, Benny M.M. Marbun, Hendra Iswahyudi, Jisman P. Hutajulu, Iwan Agung Firstantara, Sugiyanto, Miftahul Jannah, Henky Heru Basudewo, Tjutju Kurnia S, Suharto
10.	24 Oktober 2019 October 24, 2019	1. Pengantar Dewan Komisaris 2. Laporan Manajemen PT PJB Triwulan III 2019 3. Progres Proyek Pengembangan Usaha	1. Introduction to the Board of Commissioners 2. Management Report of PT PJB Quarter III 2019 3. Progress of Business Development Projects	Sriyono Dwidjo Siswoyo, Defy Indiyanto Budiarto, Sunarsip, Benny M.M. Marbun, Hendra Iswahyudi, Jisman P. Hutajulu, Iwan Agung Firstantara, Sugiyanto, Miftahul Jannah, Tjutju Kurnia S
11.	21 November 2019 November 21, 2019	1. Pengantar Dewan Komisaris 2. Laporan Kinerja PT PJB Bulan Oktober 2019 3. Progres Proyek Pengembangan Usaha	1. Introduction to the Board of Commissioners 2. PT PJB Performance Report in October 2019 3. Progress of Business Development Projects	Sriyono Dwidjo Siswoyo, Defy Indiyanto Budiarto, Sunarsip, Benny M.M. Marbun, Hendra Iswahyudi, Jisman P. Hutajulu, Iwan Agung Firstantara, Sugiyanto, Miftahul Jannah, Tjutju Kurnia S, Suharto
12.	19 Desember 2019 December 19, 2019	1. Pengantar Dewan Komisaris 2. Laporan Hasil Self Assessment GCG 2019 3. Laporan Kinerja PT PJB Bulan November 2019 4. Progres Proyek Pengembangan Usaha 5. Persiapan RUPS RKAP 2020	1. Introduction to the Board of Commissioners 2. 2019 GCG Self Assessment Results Report 3. PT PJB Performance Report for November 2019 4. Progress of Business Development Projects 5. Preparation for the GMS on ABOP 2020	Sriyono Dwidjo Siswoyo, Defy Indiyanto Budiarto, Sunarsip, Benny M.M. Marbun, Hendra Iswahyudi, Jisman P. Hutajulu Iwan Agung Firstantara, Sugiyanto, Miftahul Jannah, Henky Heru Basudewo, Tjutju Kurnia S



Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Internal dan Pengawasan

Frequency and level of attendance of the Board of Commissioners in Internal Meetings and Supervisory

Nama Name	Rapat Internal Internal Meeting			Rapat Pengawasan Supervisory Meeting		
	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance rate	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance rate
Sriyono Dwidjo Siswoyo	12	12	100%	12	12	100.0%
Defy Indiyanto Budiarto	12	12	100%	12	12	100%
Sunarsip	12	12	100%	12	12	100%
Alihuddin Sitompul ¹	2	2	100%	2	2	100%
Benny M.M. Marbun	12	12	100%	12	12	100%
Hendra Iswahyudi	12	10	83%	12	12	100%
Jisman P. Hutajulu ²	10	9	90%	10	10	100%

Keterangan Information:

1. Menjabat sebagai Komisaris Perusahaan sampai dengan bulan Maret 2019
Served as Commissioner of the Company until March 2019
2. Menjabat sebagai Komisaris Perusahaan mulai bulan Maret 2019
Served as Commissioner of the Company from March 2019

Jalannya rapat dan keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris PJB telah dicatat dan didokumentasikan dalam risalah rapat Dewan Komisaris. Risalah rapat ditandatangani oleh ketua rapat dan didistribusikan kepada semua anggota Dewan Komisaris yang menghadiri rapat maupun tidak. Perbedaan pendapat (*disenting opinion*) yang terjadi dalam rapat telah dicatat dalam risalah rapat disertai alasan mengenai perbedaan pendapat.

The proceedings and decisions taken at the PJB Board of Commissioners meeting have been recorded and documented in the minutes of the Board of Commissioners' meeting. Minutes of meetings are signed by the chair of the meeting and distributed to all members of the Board of Commissioners who attended the meeting or not. Dissenting opinions that occur in a meeting have been recorded in the minutes of the meeting accompanied by reasons for dissent.

Program Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris Board of Commissioners Competency Development Program

Perusahaan menyediakan program bagi Dewan Komisaris untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi yang relevan dengan bisnis Perusahaan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris. Selama tahun 2019, anggota Dewan Komisaris telah mengikuti kegiatan program pengembangan kompetensi sebagaimana telah dijelaskan pada uraian terkait Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Kepala SPI.

The Company provides programs for the Board of Commissioners to increase knowledge and competencies relevant to the Company's business to support the implementation of the Board of Commissioners' supervisory duties. During 2019, members of the Board of Commissioners participated in the competency development program activities as explained in the description related to the Education and Training of the Board of Commissioners, Directors, Committees, Corporate Secretary, and Head of SPI.

Penilaian Kinerja Komite-Komite Di Bawah Dewan Komisaris Performance Assessment of Committees Under the Board of Commissioners

Dewan Komisaris mengevaluasi kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris berdasarkan kriteria berupa pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan Komite. Uraian lebih lanjut mengenai penilaian kinerja komite di bawah Dewan Komisaris dapat dilihat pada bagian Komite Audit, Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan, serta Komite SDM dan Organisasi.

The Board of Commissioners evaluates the performance of the Committee under the Board of Commissioners based on criteria in the form of achieving targets set in the Annual Work Plan of the Committee. Further details regarding the performance evaluation of the committee under the Board of Commissioners can be seen in the Audit Committee, the Risk Management and Compliance Committee, and the HC and Organization Committee.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Performance Assessment of the Board of Commissioners

Kinerja Dewan Komisaris secara rutin dinilai sebagai bentuk evaluasi atas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Penilaian kinerja Dewan Komisaris tahun 2019 telah dilaksanakan baik secara *self-assessment* maupun oleh RUPS berdasarkan Laporan Tugas Pengawasan, realisasi *Key Performance Indicators* (KPI) dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik aspek Dewan Komisaris. Pengukuran keberhasilan kinerja Dewan Komisaris merupakan hasil kerja kolegal dari seluruh Dewan Komisaris. Pencapaian Kinerja Dewan Komisaris tahun 2019 adalah sebagai berikut:

The performance of the Board of Commissioners is routinely assessed as a form of evaluation of the performance of the Board of Commissioners' duties. The performance evaluation of the Board of Commissioners in 2019 has been carried out both by self-assessment and by the GMS based on the Supervisory Report, the realization of Key Performance Indicators (KPI), and the implementation of good corporate governance aspects of the Board of Commissioners. The measurement of the success of the performance of the Board of Commissioners is the collegial work of the entire Board of Commissioners. The Board of Commissioners' Performance in 2019 is as follows:

No.	Key Performance Indicator	Formula	Polaritas Polarity	Satuan Unit	Bobot Weight	Target 2019 2019 Target	Nilai Perolehan Achievement Score	Metode Pengukuran Measurement Method	Nilai Perolehan Achievement Score	Skor Score
Dewan Komisaris dengan Direksi Board of Commissioners with Board of Directors					45		41			
1	Review dan Tanggapan atas rencana Perusahaan Review and Opinion on Corporate Plan.	Pembahasan, saran atas RKAP 2018, KPI 2018 dan RJPP (<i>Review</i>) serta Revisi RKAP 2018 (apabila ada) Discussion, advise on 2018, KPI 2018 and Long-term Strategic Plan (<i>Review</i>) and 2018 Revision (if any).	+	Kali Times	5	2	- 1 kali - 2 kali atau lebih - 1 time - 2 times or more	Jumlah Surat Dewan Komisaris kepada Direksi tentang RKAP 2019, KPI 2019 dan RJPP serta revisi RKAP 2019 (bila ada) Total letters from the Board of Commissioners to the Board of Directors regarding 2019 ABOP, 2019 KPI, and CLP, as well as the revised ABOP (if any)	2	5
		Ukuran waktu Tanggapan/ <i>review</i> terhadap Rencana Perusahaan sesuai dengan Board Manual PJB Submission period of Opinion/ <i>Review</i> on Corporate Plan based on PJB Board Manual	-	Hari Days	3	30	- Diatas 45 hari - 31 s/d 45 hari - 30 hari atau kurang - Above 45 days - 31 to 45 days - 30 days or less	Rata-rata Surat Tanggapan Komisaris Utama atas RKAP / RJPP diproses sejak Surat dari Direksi diterima The average day of the President Commissioner's Response Letter to ABOP / CLP is processed since the Directors' Letter is received	7	3
2	Review dan Tanggapan atas Kinerja Perusahaan Review and Opinion on Company's Performance	Pembahasan dan Tanggapan atas : - LM dan KPI Triwulanan 2019 - LM dan KPI Tahun 2018 Discussion and Opinion on: - Quarter LM and KPI in 2019, - LM and KPI for 2018	+	Kali Times	10	5	- kurang dari 5 kali - 5 kali atau lebih - less than 5 times - 5 times or more	Jumlah Surat Tanggapan dan Risalah Rapat atas LM Triwulan dan Tahunan. Surat Tanggapan berupa Surat dari sekretaris Dewan Komisaris kepada Sekretaris Perusahaan Total Response Letters and Minutes of Meetings for the Quarterly and Annual LM. Response Letter in the form of a Letter from the Secretary of the Board of Commissioners to the Corporate Secretary	4	8
3	Review tindak lanjut hasil/temuan audit internal/eksternal Review on internal/external audit follow-up/finding.	Pembahasan dan tanggapan/saran atas Laporan Pemeriksaan internal dan monitoring Tindak Lanjut Temuan auditor eksternal Discussion and Opinion/Recommendation on Internal Audit Report and monitoring external audit Finding Follow-Up	+	Kali Times	7	4	- kurang dari 4 kali - 4 kali atau lebih - less than 4 times - 4 times or more	Jumlah Surat tanggapan dan risalah rapat dari ketua Komite Audit kepada Kepala SPI. Jumlah Pembahasan dan/atau Tanggapan atas Laporan Pemeriksaan. Bentuk pembahasan berupa Risalah Rapat antara Komite Audit dengan KSPI dan/atau Surat Tanggapan Ketua Komite Audit kepada KSPI Total response letters and minutes of meetings from the Head of Audit Committee to the Head of SPI. Number of Discussions and/or Responses to Audit Reports. Discussion is in the form of Minutes of Meetings between the Audit Committee and KSPI and/or the Head of Audit Committee's Response Letter to KSPI	2	5

No.	Key Performance Indicator	Formula	Polaritas Polarity	Satuan Unit	Bobot Weight	Target 2019 Target	Nilai Perolehan Achievement Score	Metode Pengukuran Measurement Method	Nilai Perolehan Achievement Score	Skor Score
4	Memberi Tanggapan tertulis/ Persetujuan/ nasehat/saran terkait rencana strategis Perusahaan yang memerlukan Persetujuan Dekom/RUPS Providing written Opinion/Approval/ Advise/Recommendation related to Corporate Strategic Plan requiring approval from Board of Commissioners/ GMS	Pembahasan dan Pemberian Tanggapan tertulis/ persetujuan atas permintaan Direksi (setelah data lengkap) Discussion and provision of written Opinion/Approval on Board of Directors proposal (after the date completed)	-	Hari Days	20	14	- Diatas 30 hari - 15 s/d 30 hari - 14 hari atau kurang - above 30 days - 15 to 30 days - 14 days or less	Rata-rata hari Surat Tanggapan Dewan Komisaris atas usulan Direksi diproses sejak Surat dari Direksi diterima The average day of the Board of Commissioners' Response Letter to the Board of Directors proposal is processed since the Letter from the Board of Directors received	12,5	20
Dewan Komisaris dengan RUPS Board of Commissioners with GMS 20										
5	Menyampaikan program kerja dan KPI Dewan Komisaris Tahunan Submission of Board of Commissioners Annual Working Program and KPI	Rencana Kerja dan KPI Dewan Komisaris Tahun 2018 Board of Commissioners Working Program and KPI for 2018	+	Dok Document	4	1	1 Dokumen 1 Document	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan KPI Dewan Komisaris Total KPI Board of Commissioners' Work Plan Documents	1	4
		Ketepatan waktu penyampaian On time submission	+	Hari Days	2	15	- 1 s/d 14 hari sebelum RUPS RKAP - 15 hari atau lebih sebelum RUPS RKAP - to 14 days before the GMS of ABOP - 15 days or more before the GMS of ABOP	Lama hari Program Kerja Dewan Komisaris dikirim sebelum RUPS RKAP The days length the Board of Commissioners' Work Program is sent before the ABOP GMS	15	2
6	Menyampaikan Pendapat/usul Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham/RUPS Submission of Board of Commissioners Recommendation/ Opinion to the Shareholders/GMS	Pendapat atas : - RJP/Review RJP jika ada (setelah TW1) - RKAP Tahun Buku 2020 (sebelum RUPS RKAP) - LM & KPI 2018 (sebelum RUPS LPT) Menyampaikan : - Usulan Remunerasi tahun Buku 2018 (sebelum RUPS LPT) Opinion on : - LTP/LTP Review, if any (after 1st Quarter) - Fiscal Year 2020, (before GMS of ABOP) - LM & KPI 2018. (before GMS of RUPS LPT) Submission of : - Remuneration proposal for fiscal year 2018 (before GMS of LPT)	+	Kali Times	3	3	- kurang dari 3 pendapat/usul - 3 pendapat/usul atau lebih - less than 3 opinions/ suggestions - 3 opinions/ suggestions or more	Jumlah Surat Dewan Komisaris kepada RUPS tentang RJP, RKAP dan LM Total Board of Commissioners' Letters to GMS regarding CLP, ABOP, and LM	2	2
		Ketepatan waktu penyampaian On time submission	+	Hari Days	2	15	- 1 s/d 14 hari sebelum RUPS RKAP - 15 hari atau lebih sebelum RUPS RKAP - to 14 days before the GMS of ABOP - 15 days or more before the GMS of ABOP	Lama hari penyampaian pendapat Dewan Komisaris dikirim sebelum RUPS RKAP The days length of the Board of Commissioners' submission is sent before the ABOP GMS	14	1

No.	Key Performance Indicator	Formula	Polaritas Polarity	Satuan Unit	Bobot Weight	Target 2019 2019 Target	Nilai Perolehan Achievement Score	Metode Pengukuran Measurement Method	Nilai Perolehan Achievement Score	Skor Score
7	Menyampaikan Laporan tentang tugas Pengawasan Dewan Komisaris Submission of Board of Commissioners Supervisory Duty Report	Laporan terdiri atas : 1. Laporan Pengawasan Tahun 2018 2. Laporan Pengawasan Semester 1 Tahun 2019 3. Laporan Pengawasan Semester 2 Tahun 2019 The reports consist of: 1. Supervisory Report as of 2018 2. Supervisory Report as of 1st Semester of 2019 3. Supervisory Report as 2nd Semester of 2019	+	Laporan Reports	4	2	- 1 laporan - 2 laporan - 1 report - 2 reports	2 4 Jumlah Surat Dewan Komisaris kepada RUPS tentang Laporan Pengawasan Total Board of Commissioners' Letters to GMS regarding Supervisory Reports	2	4
		Ketepatan waktu penyampaian : - Laporan Pengawasan Tahun 2018 On time submission: - Supervisory Report as of 2018	+	Hari Days	3	15	- 1 s/d 14 hari sebelum RUPS RKAP - 15 hari atau lebih sebelum RUPS RKAP - 1 to 14 days before the GMS of ABOP - 15 days or more before the GMS of ABOP	2 3 Berapa lama (hari) Laporan Pengawasan Tahun 2016 Dewan Komisaris dikirim sebelum RUPS RKAP How long (days) 2016 Supervisory Report of the Board of Commissioners is sent before ABOP GMS	15	3
		- Laporan Pengawasan Semester 1 - 2019 - Supervisory Report as of 1st Semester - 2019		Hari Days	2	30	- Lebih dari 30 hari sejak akhir periode - 30 hari sejak akhir periode atau kurang - More than 30 days from the end of the period - 30 days from the end of the period or less	1 2 Berapa lama (hari) Laporan Pengawasan Semester I 2017 Dewan Komisaris dikirim sebelum akhir periode How long (days) of the Semester I/2017 Supervision Report of the Board of Commissioners is sent before the end of the period	20	2
Internal Dewan Komisaris Internal Board of Commissioners					35				40	
8	Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meeting	Rapat Dewan Komisaris terdiri dari : Rapat Internal (RID) dan Rapat Pengawasan dengan Direksi (RDD) Board of Commissioners Meeting consists of: Internal Meeting (RID) and Monitoring Meeting with Board of Directors (RDD).	+	Kali Times	20	24	- kurang 15 kali - 15-23 kali - 24 kali/lebih - less than 15 times - 15-23 times - 24 times/more	15 20 25 Jumlah RID dan RDD selama 1 tahun Total RID and RDD for 1 year		25
9	Kajian Komite Committee Review	Kajian / Usulan solusi Permasalahan yang dihadapi di PJB atau Unit Kerja Review/Proposed solutions Problems faced in PJB or work units	+	Kali Times	5	4		15 20 25 Jumlah Kajian 4 buah per Komite Total Review 4 per Committee		5
10	Pengenalan/ Induksi/ peningkatan kompetensi Orientation/ Induction/ Competency Development	- Mengikuti seminar/ workshop - Induksi jika ada Komisaris baru - Participation in domestic and international seminar/ workshop - Induction for New Commissioner	+	Kali Times	5	3	- kurang dari 3 kali - 3 kali atau lebih - less than 3 times - 3 times or more	3 5 Jumlah Seminar / Workshop yang diikuti Komisaris Total Seminars/Workshops participated by Commissioners		5
11	Pengelolaan GCG GCG Assessment.	Pencapaian skor assessmen GCG Aspek Dewan Komisaris Th 2019 Achievement of GCG Assessment Score for Board of Commissioners Aspect in 2017.	+	Skor Score	5	>85	- Di bawah 85 - 85 atau lebih - below 85 - 85 or more	3 5 Skor assessmen GCG aspek Dewan Komisaris GCG assessment score aspects of the Board of Commissioners		5
TOTAL					100				99	

Selain itu, Dewan Komisaris juga dinilai melalui *assessment* GCG atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan GCG, termasuk organ pendukung Dewan Komisaris. *Assessment* penerapan GCG untuk Dewan Komisaris dilaksanakan sesuai kerangka acuan pelaksanaan *Assessment* GCG berdasarkan parameter yang diatur dalam SK Sekretaris Menteri BUMN No.16/S.MBU/2012. Capaian masing-masing indikator dari Aspek Dewan Komisaris tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Capaian Penilaian GCG Indikator Aspek Dewan Komisaris

GCG Assessment Achievement Indicator Board of Commissioners' Aspects

No.	Indikator Indicator	Capaian (%) Achievements (%)
1	Dewan komisaris melaksanakan program pelatihan/ pembelajaran secara berkelanjutan.	100
2	Dewan komisaris melakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara jelas serta menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dewan komisaris.	96.91
3	Dewan komisaris memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh direksi.	100
4	Dewan komisaris memberikan arahan terhadap direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.	99.43
5	Dewan komisaris melaksanakan pengawasan terhadap direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.	90.17
6	Dewan komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan.	91.81
7	Dewan komisaris berperan dalam pencalonan anggota direksi, menilai kinerja direksi (individu dan kolegal) dan mengusulkan tantiem/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja direksi.	80.14
8	Dewan komisaris melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya.	100
9	Dewan komisaris memantau dan memastikan bahwa praktik tata kelola perusahaan yang baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.	86.13
10	Dewan komisaris menyelenggarakan rapat dewan komisaris yang efektif dan menghadiri Rapat dewan komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	96.96
11	Dewan komisaris memiliki sekretaris dewan komisaris untuk mendukung tugas kesekretariatan dewan komisaris.	90.54
12	Dewan komisaris memiliki komite dewan komisaris yang efektif	98.30

Hasil *self-assessment* GCG pada aspek pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris pada tahun 2019 mencapai skor 33,077 dari skor maksimal 35 atau setara dengan 94,51% dengan kategori Sangat Baik.

Additionally, the Board of Commissioners is also assessed through a GCG assessment of the implementation of its duties and responsibilities in implementing GCG, including organs supporting the Board of Commissioners. The GCG implementation assessment for the Board of Commissioners is carried out based on the terms of reference for implementing the GCG Assessment based on the parameters stipulated in the Decree of SOE Ministry No.16 / S.MBU/2012. The achievements of each indicator from the Board of Commissioners' Aspects in 2019 are as follows:

The results of GCG self-assessment on aspects of carrying out the duties and responsibilities of the Board of Commissioners in 2019 reached a score of 33,077 from a maximum score of 35 or equivalent to 94.51% in 'Excellent' category.

DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS

Direksi sebagai salah satu organ utama tata kelola perusahaan menjalankan fungsi pengelolaan Perusahaan dan bertanggung jawab secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya dalam mencapai maksud dan tujuan Perusahaan. Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan ketentuan Anggaran Dasar. Setiap anggota Direksi wajib menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab demi kepentingan Perusahaan serta memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Board of Directors as one of the main organs of corporate governance carries out the Company's management functions and is collectively responsible for carrying out its duties in achieving the aims and objectives of the Company. The Board of Directors is responsible for carrying out its duties to the GMS as a form of accountability for the management of the Company following the principles of GCG and the provisions of the Articles of Association. Each member of the Board of Directors must carry out their duties in good faith and full responsibility for the interests of the Company and pay attention to the applicable laws and regulations.

Komposisi Direksi

Board of Directors Composition

Direksi PJB telah melalui dan dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh PT PLN (Persero) selaku Pemegang Saham guna menjamin calon anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi, reputasi, bebas dari afiliasi maupun benturan kepentingan lainnya dan pengalaman serta keahlian yang dibutuhkan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing. Direksi PJB periode Januari sampai dengan 31 Desember 2019 berjumlah 6 (enam) orang dan tidak terdapat penggantian anggota Direksi. Komposisi dan susunan Direksi PJB adalah sebagai berikut:

PJB's Board of Directors has passed the fit and proper test by PT PLN (Persero) as a Shareholder to ensure prospective members of the Board of Directors have integrity, competence, reputation, free from affiliation or other conflicts of interest and experience and expertise needed in carrying out their respective functions and duties. The Directors of PJB for the period of January to December 31, 2019, totaled 6 (six) people and there were no replacement members of the Directors. The composition and composition of PJB's Board of Directors are as follows:

Komposisi Direksi Tahun 2019

Board of Directors Composition in 2019

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Decree of Appointment
Iwan Agung Firstantara	Direktur Utama President Director	Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat tanggal 21 Maret 2016 Shareholders' Decision Outside the Meeting on March 21, 2016
Sugiyanto	Plt. Direktur Operasi - 1 Act. Director of Operations - 1	Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat tanggal 10 Agustus 2017 Shareholders' Decision Outside the Meeting on August 10, 2017
Miftahul Jannah	Direktur Operasi - 2 Director of Operations - 2	Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat tanggal 21 Maret 2016 Shareholders' Decision Outside the Meeting on March 21, 2016
Henky Heru Basudewo	Direktur Pengembangan dan Niaga Director of Development and Commerce	Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat tanggal 21 Maret 2016 Shareholders' Decision Outside the Meeting on March 21, 2016
Tjutju Kurnia S.	Direktur Keuangan Director of Finance	Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat tanggal 21 Maret 2016 Shareholders' Decision Outside the Meeting on March 21, 2016
Suharto	Direktur SDM dan Administrasi HC and Administration Director	Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat tanggal 21 Maret 2016 Shareholders' Decision Outside the Meeting on March 21, 2016



Pernyataan Independensi dan Potensi Benturan Kepentingan Statement of Independence and Potential Conflict of Interest

Anggota Direksi PJB disyaratkan untuk membuat pernyataan independensi dan bebas benturan kepentingan setiap tahun melalui Pakta Integritas dengan menyebutkan bahwa:

1. Akan melaksanakan tugas dan wewenang maupun pengembangan karir serta mengambil keputusan dalam keadaan mandiri, tidak berada di bawah tekanan dan/atau bebas dari pengaruh maupun intervensi dari pihak manapun termasuk tidak terbatas pada intervensi dari partai politik, kelompok maupun golongan tertentu (*independency*).
2. Akan melaksanakan tugas dan wewenang serta mengambil keputusan dengan mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan lainnya oleh karenanya tidak akan menyalahgunakan kewenangan jabatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk kepentingan pihak manapun termasuk namun tidak terbatas pada kepentingan pribadi, partai politik, kelompok maupun golongan tertentu (*duty care and loyalty*).
3. Akan melaksanakan tugas dan wewenang serta mengambil keputusan, tanpa ada kepentingan pribadi atau tujuan untuk melakukan sesuatu untuk manfaat diri sendiri, maupun menguntungkan pihak-pihak yang terkait, atau pihak yang terafiliasi, partai politik, kelompok maupun golongan tertentu (*conflict of interest*).
4. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta dalam mengambil keputusan, tidak akan meminta, tidak akan menawarkan/tidak menjanjikan untuk memberi/menerima hadiah, upeti, suap, sogok, gratifikasi apapun dan/atau bentuk imbalan lainnya yang bukan menjadi hak secara sah dan secara hukum dari pihak manapun.
5. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta dalam mengambil keputusan, tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) baik yang secara langsung maupun tidak langsung.
6. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta dalam mengambil keputusan, tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan terjadinya ketidakwajaran dalam penetapan harga pembelian, pemborosan dan kebocoran keuangan perusahaan.
7. Akan melaksanakan tugas dan wewenang serta mengambil keputusan dengan pemahaman/penugasan yang cukup tentang berbagai ketentuan dan peraturan yang terkait (*prudent person role*), dan mematuhi serta melaksanakan seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*duty abiding the laws*).

Pada tahun 2019, seluruh Anggota Direksi PJB telah menandatangani pernyataan untuk bersikap independen dan bebas benturan kepentingan melalui Pakta Integritas dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

PJB's Board of Directors are required to declare a statement of independence and are free of conflicts of interest annually through the Integrity Pact stating that:

1. The Board of Directors must carry out the duties and authority as well as career development and make decisions in an independent state, not under pressure and/or free from influence or intervention from any party, including not limited to intervention from political parties, groups or certain groups (*independency*).
2. The Board of Directors must carry out the duties and authorities and make decisions by prioritizing the interests of the Company above other interests; therefore, will not abuse the authority of the position, either directly or indirectly, for the benefit of any party including but not limited to personal interests, political parties, groups and certain groups (*duty care and loyalty*).
3. The Board of Directors must carry out the duties and authority and make decisions, without any personal interest or purpose to do something for the benefit of themselves, or benefit related parties, or affiliated parties, political parties, groups, or certain groups (*conflict of interest*).
4. In carrying out the duties and authority as well as in making decisions, The Board of Directors must not ask, offer/ promise to give/receive gifts, tribute, bribes, bribes, any gratuities, and/or other forms of compensation that are illegal from any party.
5. In carrying out the duties and authority and in making decisions, The Board of Directors must not involve in corruption, collusion, and nepotism (KKN) practices, either directly or indirectly.
6. In carrying out the duties and authority as well as in making decisions, The Board of Directors must not take actions that result in irregularities in determining the purchase price, waste, and leakage of the company's finances.
7. The Board of Directors must carry out the duties and authorities and make decisions with sufficient understanding/assignment of various relevant provisions and regulations (*prudent person role*), and comply with and carry out all the provisions and regulations in force (*duty abiding the laws*).

In 2019, all PJB Directors in performing its functions and duties have signed the statement of independence and free from conflict of interest through the Integrity Pact.

Nama Name	Pakta Integritas integrity pact
Iwan Agung Firstantara	Pakta Integritas (Pernyataan telah ditandatangani pada bulan Januari 2019) Integrity Pact (Statement signed in January 2019)
Sugiyanto	
Miftahul Jannah	
Henky Heru Basudewo	
Tjutju Kurnia S.	
Suharto	

Program Pengenalan Direksi Induction Program for the Board of Directors

Program Pengenalan (Program Induksi) kepada Direktur baru sebagaimana yang diamanatkan dalam Pedoman Tata Laksana Keja Direksi (*Board of Directors Manual*) dan *Board Manual* PJB, bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai PJB agar dapat memahami tugas dan tanggung jawab sebagai Direktur, proses bisnis Perusahaan, serta dapat bekerja selaras dengan Organ Perusahaan lainnya. Sekretaris Perusahaan sebagai pelaksana Program Pengenalan bagi Direktur yang baru diangkat, mempersiapkan materi program pengenalan yang meliputi:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh PJB.
2. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan berbagai masalah strategis lainnya.
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan audit eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit.
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris.

Program Pengenalan Perusahaan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perusahaan/ Anak Perusahaan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan PJB dimana program tersebut dilaksanakan. Pada tahun 2019, tidak terdapat pergantian Anggota Direksi, maka tidak terdapat pelaksanaan program pengenalan bagi Direktur baru.

The Induction Program to the new Directors as mandated in the Board of Directors Manual and the Board of Directors Manual aims to provide insight about PJB to understand the duties and responsibilities as a Director, the Company's business processes, and can work in harmony with other Company Organs. The Corporate Secretary as the executor of the Introductory Recognition Program for newly appointed Directors prepares material for the introductory program which includes:

1. Implementation of GCG principles by PJB.
2. Description of the Company relating to the objectives, nature and scope of activities, financial and operating performance, strategies, short-term and long-term business plans, competitive positions, risks, and various other strategic issues.
3. Information relating to delegated authority, internal audit and external audit, internal control systems, and policies, including the Audit Committee.
4. Information regarding the duties and responsibilities of the Directors and Board of Commissioners.

The Company Introduction Program can take the form of presentations, meetings, visits to the Company / Subsidiaries, and review of documents or other programs deemed appropriate to the PJB where the program is implemented. In 2019, there was no change in members of the Board of Directors, so there was no introduction of an introduction program for new Directors.

Pedoman Kerja Direksi Board of Directors Manual

Direksi telah menyusun pedoman kerja internal yang dikenal dengan Tata Laksana Kerja Direksi atau *Board of Directors Manual* (BoD Manual) yang dimulai pada tahun 2013. Pada tahun 2014, Tata Laksana Kerja Direksi atau *Board of Directors Manual* (BoD Manual) PJB ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor: 030.K/020/DIR/2014 tanggal 30 Desember 2014. Tata Laksana Kerja Direksi (*Board of Director Manual*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *Board Manual*.

The Board of Directors has compiled internal work guidelines known as the Board of Directors Manual (BoD Manual) which began in 2013. In 2014, the Board of Directors Manual (BoD Manual) was determined through a Decree Board of Directors Number: 030.K / 020 / DIR / 2014 dated 30 December 2014. The Board of Director's Manual is an inseparable part of the Board Manual.

Keberadaan BoD Manual merupakan bagian dari *Soft Structure* GCG sebagai wujud komitmen Direksi untuk bertindak dan bersikap berdasarkan prinsip-prinsip GCG, yaitu transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen dan adil, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar, serta sesuai dengan standar etika yang berlaku di Perusahaan. Tata Laksana Kerja Direksi ditinjau ulang secara berkala dan jika diperlukan dilakukan pemutakhiran sesuai kebutuhan Direksi dan perkembangan Perusahaan.

BoD *Manual* mencakup hal-hal yang belum cukup diatur dalam *Board Manual* dan/atau memerlukan penjabaran lebih lanjut yang bersifat teknis pelaksanaan di lingkungan internal Direksi. BoD *Manual* mengatur pelaksanaan tugas dan fungsi internal Direksi. Isi dari BoD *Manual* adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum Direktur
2. Tugas Dan Wewenang Direksi
3. Hak Dan Kewajiban Direksi
4. Rapat Direksi
5. Sekretaris Perusahaan
6. Satuan Pengawasan Intern
7. Hubungan Dengan Anak Perusahaan & Perusahaan Afiliasi

Aspek Direksi yang diatur dalam *Board manual* dan dijabarkan lebih jelas dalam BoD Manual PJB, antara lain:

1. Tata Laksana Kerja terkait Jabatan
2. Tata Laksana Kerja terkait Batas Kewenangan
3. Tata Laksana Kerja terkait Pelaksanaan Operasional Perusahaan
4. Alur Kerja Kewenangan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris dan Kewenangan Direksi yang Memerlukan Persetujuan RUPS setelah Mendapatkan Tanggapan Tertulis dari Dewan Komisaris

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Taks and Responsibilities of the Board of Directors

Sebagaimana telah diatur dalam *Board Manual* dan BoD Manual, tugas dan tanggung jawab Direksi secara umum adalah mengelola dan memastikan terselenggaranya kegiatan operasional dan pelaksanaan GCG sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketetapan dalam Anggaran Dasar. Tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain:

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
2. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS.

The existence of the BoD Manual is part of the GCG Soft Structure as a manifestation of the Board of Directors' commitment to act and behave based on GCG principles, namely transparent, accountable, responsible, independent and fair, compliance with laws and statutes, and following ethical standards applicable in the Company. The Board of Directors' Work Procedures are reviewed periodically and if necessary, updates are made according to the needs of the Directors and the development of the Company.

The BoD Manual covers matters that have not been adequately regulated in the Board Manual and/or requires further elaboration of the technical nature of implementation within the Board of Directors' internal environment. The BoD Manual regulates the implementation of the internal duties and functions of the Directors. The contents of the BoD Manual are as follows:

1. General Provisions of the Director
2. Duties and Authorities of the Directors
3. Rights and Obligations of Directors
4. Directors' Meeting
5. Corporate Secretary
6. Internal Audit Unit
7. Relationships with Subsidiaries & Affiliated Companies

The aspects of the Board of Directors which are regulated in the Board manual and outlined more clearly in the PJB BoD Manual include:

1. Work Procedures related to Position
2. Work Procedures related to Authority Limits
3. Work Procedures related to the Implementation of Company Operations
4. Work Flow Authority of Directors requiring Board of Commissioners Approval and Board of Directors Authority Requiring GMS Approval after Obtaining Written Response from the Board of Commissioners

As stipulated in the Board Manual and BoD Manual, the duties and responsibilities of the Board of Directors, in general, are to manage and ensure the implementation of operational activities and GCG implementation following applicable laws and regulations and the provisions in the Articles of Association. The duties and responsibilities of the Board of Directors include:

1. Undertaking and guaranteeing the implementation of the Company's business and activities following the aims and objectives and business activities.
2. Preparing the Company's Long-Term Plan, Annual Budget and Operational Plan, and its amendments timely and then submitting to the Board of Commissioners and Shareholders to be ratified at the GMS.



3. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
4. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi.
5. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perusahaan, serta dokumen keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan.
6. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.
7. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan.
8. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan.
9. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan, dan dokumen keuangan Perusahaan, dan dokumen Perusahaan lainnya.
11. Menyimpan di tempat kedudukan Perusahaan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris, dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perusahaan serta dokumen Perusahaan lainnya.
12. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan.
13. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham.
14. Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian dan tugasnya.
15. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta Anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham.
16. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Providing an explanation to the GMS regarding the Company's Long-Term Plan and Annual Budget and Operational Plan.
4. Preparing a Register of Shareholders, Special Register, Minutes of GMS, and Minutes of Board of Directors' Meetings.
5. Preparing an Annual Report as a form of accountability for the management of the Company, as well as the Company's financial documents as referred to in the Law on Company Documents.
6. Prepare Financial Statements based on Financial Accounting Standards and submit to the Public Accountant to be audited.
7. Submitting Annual Reports including Financial Statements to the GMS for approval and approval.
8. Providing an explanation for the GMS regarding the Annual Report.
9. Submitting Balance Sheet and Income Statement which has been ratified by the GMS to the Minister in charge of Law and Human Rights following statutory provisions.
10. Maintaining the Register of Shareholders, Special Register, Minutes of GMS, Minutes of Board of Commissioners 'Meetings and Minutes of Board of Directors' Meetings, Annual Reports, Company financial documents, and other Company documents.
11. Keeping in the Company's office: Register of Shareholders, Special Register, Minutes of GMS Meeting, Minutes of Meeting of the Board of Commissioners, and Minutes of Directors' Meeting, Annual Report, and the Company's financial documents and other Company documents.
12. Developing an accounting system following Financial Accounting Standards and based on the principles of internal control, especially the functions of management, recording, storage, and supervision.
13. Providing periodic reports based on applicable regulations, as well as other reports whenever requested by the Board of Commissioners and/or Shareholders.
14. Preparing the organizational structure of the Company complete with details and tasks.
15. Explaining matters asked or requested by Members of the Board of Commissioners and Shareholders.
16. Performing other responsibilities based on the provisions stipulated in the Articles of Association and those determined by the GMS based on statutory regulations.



Pembagian Tugas Anggota Direksi

Task Division of the Board of Directors

Anggota Direksi menjalankan kegiatan operasional Perusahaan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing sebagaimana telah diatur dalam BoD *Manual* PJB dan diperkuat dengan Keputusan Direksi Nomor: 010.P/019/DIR/2019 tanggal 16 Juli 2019, tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi ditetapkan sebagai berikut:

Members of the Board of Directors carry out operational activities of the Company following their respective fields of work as stipulated in the PJB BoD Manual and are strengthened by Directors' Decree Number: 010.P / 019 / DIR / 2019 dated July 16, 2019, the duties and responsibilities of each member of the Board of Directors defined as follows:

Pembagian Tugas Anggota Direksi

Task Division of the Board of Directors

Jabatan Position	Tugas Pengawasan	Tasks and responsibilities
Direktur Utama President Director	Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan/perundang undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.	Performing all actions related to the management of the Company for the interests of the Company following the aims and objectives of the Company, as well as representing the Company both inside and outside the court of all matters and all incidents with restrictions as regulated in laws/regulations, the Articles of Association, and/or the decision of the General Meeting of Shareholders.
Direktur Operasi- 1 Director of Operations- 1	- Memastikan pengelolaan Unit Pembangkit untuk memastikan <i>sustainability maturity</i> pengelolaan dan kinerja Unit Pembangkitan dan Unit Bisnis Jasa O&M dibawah koordinasi Direktorat Operasi-1. - Memastikan bahwa Unit Pembangkit mampu mencapai sasaran kinerja operasional yang ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang maupun RKAP dan menjaga kesehatan Unit Pembangkitan dan Unit Bisnis Jasa O&M dibawah koordinasi Direktorat Operasi-1 guna menjamin <i>sustainability</i> dan mendukung pertumbuhan Perusahaan. - Memastikan pengendalian portofolio kinerja Unit Pembangkitan dan Unit Bisnis Jasa O&M dibawah koordinasi Direktorat Operasi-1 (termasuk kinerja kontrak PPA). - Memastikan perencanaan dan pengendalian operasi dan pemeliharaan Unit Pembangkitan dan Unit Bisnis Jasa O&M dibawah koordinasi Direktorat Operasi-1 agar tingkat kesiapan unit, efisiensi, mutu dan keandalan setara kelas dunia dengan tetap memperhatikan aspek komersial untuk memperoleh harga jual yang kompetitif. - Memastikan pengelolaan operasi dan pemeliharaan Unit Pembangkitan dan Unit Bisnis Jasa O&M dibawah koordinasi Direktorat Operasi-1 mengacu pada kaidah best practices untuk memastikan peningkatan performance pembangkit secara berkelanjutan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.	- Ensuring the management of the Generation Unit to ensure the sustainability of management maturity and the performance of the Generation Unit and O&M Services Business Unit under the coordination of the Directorate of Operations-1. - Ensuring that the Generation Unit can achieve the operational performance targets set in the Long-Term Plan and ABOP and maintaining the condition of the Generation Unit and O&M Services Business Unit under the coordination of the Directorate of Operations-1 to ensure sustainability and support the Company's growth. - Ensure portfolio performance control of the Generation Unit and O&M Services Business Unit under the coordination of the Directorate of Operations-1 (including the performance of PPA contracts). - Ensure the planning and control of the operation and maintenance of the Generation Unit and the O&M Services Business Unit under the coordination of the Directorate of Operations-1 so that the level of unit readiness, efficiency, quality, and reliability is equivalent to world-class while still taking into account commercial aspects to obtain competitive selling prices. - Ensuring the operation and maintenance management of Generation Units and O&M Services Business Unit under the coordination of the Directorate of Operations-1 refers to the rules of best practices to ensure continuous improvement in plant performance following established performance targets.

Jabatan Position	Tugas Pengawasan	Tasks and responsibilities
Direktur Operasi - 2 Director of Operations - 2	6. Memastikan perencanaan dan pengendalian energi primer pada Unit Pembangkitan dan Unit Bisnis Jasa O&M dibawah koordinasi Direktorat Operasi-1 baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan memperhatikan kondisi internal dan kebutuhan/peluang pasar, sekaligus untuk menjamin kelancaran operasi Unit Pembangkitan. 7. Memastikan pengelolaan Lingkungan dan K3 pada seluruh Unit Pembangkitan dan Unit Bisnis Jasa O&M dibawah koordinasi Direktorat Operasi-1 agar memenuhi kaidah/standar pengelolaan yang baik sesuai dengan pengelolaan standar kelas dunia. 8. Memastikan perencanaan, analisa dan evaluasi penyusunan jadwal pemeliharaan Unit Pembangkitan dan Unit Bisnis Jasa O&M dibawah koordinasi Direktorat Operasi-1 dengan menerapkan sistem "outage management" secara optimal. 9. Memastikan pengendalian sistem operasi dan perniagaan ketenagalistrikan, serta pengendalian anggaran dan kontrak jasa O&M dan AMC Pembangkit Jasa O&M dibawah koordinasi Direktorat Operasi-1.	6. Ensure planning and control of primary energy in the Generation Unit and O&M Services Business Unit under the coordination of the Directorate of Operations-1, both short-term and long-term by taking into account internal conditions and market needs/opportunities, as well as to ensure the smooth operation of the Generation Unit. 7. Ensuring Environmental and OHS management in all Generation Units and O&M Services Business Units under the coordination of the Directorate of Operations-1 to meet good management rules/standards under world-class management standards. 8. Ensuring the planning, analysis, and evaluation of the preparation of maintenance schedules for the Generation Unit and O&M Services Business Unit under the coordination of the Directorate of Operations-1 by optimally implementing the "outage management" system. 9. Ensuring control of the operating system and electricity trade, as well as O&M service and budget control contracts and AMC O&M Service Power Plant under the coordination of the Director of Operations-1.
	1. Memastikan pengelolaan Unit Pembangkit untuk memastikan <i>sustainability maturity</i> pengelolaan dan kinerja Unit Bisnis Jasa O&M dibawah koordinasi Direktorat Operasi-2. 2. Memastikan pengendalian portofolio kinerja Unit Bisnis Jasa O&M dibawah koordinasi Direktorat Operasi-2. 3. Memastikan bahwa Unit Pembangkitan mampu mencapai sasaran kinerja operasional yang ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang maupun RKAP dan menjaga kesehatan Unit Bisnis Jasa O&M dibawah koordinasi Direktorat Operasi-2 guna menjamin <i>sustainability</i> dan mendukung pertumbuhan Perusahaan. 4. Memastikan perencanaan dan pengendalian operasi & pemeliharaan kesehatan Unit Bisnis Jasa O&M dibawah koordinasi Direktorat Operasi-2 agar tingkat kesiapan unit, efisiensi, mutu dan keandalan setara kelas dunia dengan tetap memperhatikan aspek komersial untuk memperoleh harga jual yang kompetitif. 5. Memastikan pengelolaan operasi dan pemeliharaan kesehatan Unit Bisnis Jasa O&M dibawah koordinasi Direktorat Operasi-2 mengacu pada kaidah <i>best practices</i> untuk memastikan peningkatan performance pembangkit secara berkelanjutan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.	1. Ensuring the management of the Generation Unit to ensure the sustainability of the management maturity and performance of the O&M Business Unit under the coordination of the Directorate of Operations-2. 2. Ensuring portfolio performance control of the O&M Services Business Unit under the coordination of the Directorate of Operations-2. 3. Ensuring that the Generation Unit can achieve the operational performance targets set in the Long Term Plan and the ABOP and maintaining the health of the O&M Business Unit under the coordination of the Directorate of Operations-2 to ensure sustainability and support the Company's growth. 4. Ensure the planning and control of operations & health maintenance of the O&M Services Business Unit under the coordination of the Directorate of Operations-2 so that the level of unit readiness, efficiency, quality, and reliability is equivalent to world-class while still taking into account commercial aspects to obtain competitive selling prices. 5. Ensuring the management of operations and maintenance of the O&M Business Unit under the coordination of the Directorate of Operations-2 refers to the rules of best practices to ensure continuous improvement in plant performance following predetermined performance targets.

Jabatan Position	Tugas Pengawasan	Tasks and responsibilities
Direktur Pengembangan dan Niaga Director of Development and Commerce	- Memastikan perencanaan dan pengendalian energi <i>primer</i> pada kesehatan Unit Bisnis Jasa O&M dibawah koordinasi Direktorat Operasi-2 baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan memperhatikan kondisi internal dan kebutuhan/peluang pasar. - Memastikan pengelolaan Lingkungan dan K3 pada seluruh kesehatan Unit Bisnis Jasa O&M dibawah koordinasi Direktorat Operasi-2 agar memenuhi kaidah/standar pengelolaan yang baik sesuai dengan pengelolaan standar kelas dunia. - Memastikan perencanaan, analisa dan evaluasi penyiapan jadwal pemeliharaan kesehatan Unit Bisnis Jasa O&M dibawah koordinasi Direktorat Operasi-2 dengan menerapkan sistem "<i>outage management</i>" secara optimal. - Memastikan pengendalian sistem operasi dan perniagaan ketenagalistrikan, serta pengendalian anggaran dan kontrak pengelolaan Jasa O&M dibawah koordinasi Direktorat Operasi-2.	- Ensuring the planning and control of primary energy in the health of the O&M Business Unit under the coordination of the Operations Directorate, both short-term and long-term, with due regard to internal conditions and market needs/opportunities. - Ensuring Environmental and OHS management in all health of the O&M Business Unit under the coordination of the Directorate of Operations-2 to meet the rules/standards of good management under the management of world-class standards. - Ensuring the planning, analysis, and evaluation of the preparation of the O&M Services Business Unit health care schedule under the coordination of the Directorate of Operations-2 by implementing an "outage management" system optimally. - Ensuring control of the operating system and electricity commerce, as well as budget and contract management of O&M services under the coordination of the Directorate of Operations-2.
	- Memastikan pengelolaan dan pengembangan Strategi Bisnis dan Pemasaran untuk mendukung pengembangan bisnis perusahaan. - Memastikan bahwa bisnis yang dijalankan dan akan dikembangkan mampu mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang maupun RKAP serta mendukung <i>sustainability</i> dan menjamin pertumbuhan Perusahaan. - Memastikan pengelolaan kegiatan pengembangan bisnis (baik pengembangan aset, pengembangan usaha, pengelolaan IPP) dengan proses kajian rencana dan rancangan pengembangan secara profesional, dalam rangka mendukung <i>sustainability</i> pertumbuhan Perusahaan. - Memastikan pelaksanaan penyusunan kontrak-kontrak bisnis dapat memenuhi syarat baik secara teknis, komersial dan hukum serta memenuhi kinerja keuangan Perusahaan. - Memastikan pengelolaan dan pengendalian proses kegiatan <i>supply chain</i> dan <i>purchasing management</i>, agar dapat mendukung kelancaran proses bisnis perusahaan. - Mengelola bisnis Penunjang Jasa O&M dan Pemanfaatan Aset agar memberikan kontribusi yang optimal bagi pengembangan bisnis Perusahaan. - Memastikan pengelolaan kegiatan proyek konstruksi pembangkitan agar dapat berjalan sesuai dengan rencanaannya.	- Ensuring the management and development of Business and Marketing Strategies to support the company's business development. - Ensuring that the business that is run and will be developed can achieve the targets set in the Long-Term Plan and ABOP as well as supporting sustainability and ensuring the growth of the Company. - Ensuring the management of business development activities (both asset development, business development, IPP management) through the process of reviewing plans and professional development plans, to support the sustainability of the Company's growth. - Ensuring that the implementation of business contracts can meet technical, commercial, and legal requirements as well as meeting the Company's financial performance. - Ensuring the management and control of supply chain and purchasing management activities, to support the smooth running of the company's business processes. - Managing the business of Supporting O&M Services and Utilizing Assets to provide an optimal contribution to the development of the Company's business. - Ensuring the management of the construction project activities so that it can run according to plan.



Jabatan Position	Tugas Pengawasan	Tasks and responsibilities
Direktur Keuangan Director of Finance	- Memastikan tersusunnya pengelolaan anggaran perusahaan dilakukan secara optimal sesuai strategi dan program perusahaan, yang ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan maupun RKAP. - Mengelola perencanaan strategis pendanaan jangka panjang korporat. - Memastikan pengelolaan keuangan perusahaan secara optimal guna menjamin likuiditas dalam mendukung kegiatan perusahaan. - Memastikan pengelolaan kegiatan akuntansi perusahaan sesuai kaidah akuntansi yang berlaku. - Melakukan <i>monitoring</i> terhadap pengelolaan keuangan Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi, untuk memastikan integrasi dengan kebijakan pengelolaan keuangan PJB secara korporasi. - Memastikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan dan strategi dalam pengelolaan perolehan sumber pendanaan termasuk identifikasi penyedia dan ketersediaan sumber pinjaman lokal dan global.	- Ensuring that the management of the company's budget is carried out optimally following the company's strategies and programs, which are set out in the Company's Long-Term Plan and ABOP. - Manage corporate long-term funding strategic planning. - Ensuring optimal company financial management to guarantee liquidity in supporting company activities. - Ensuring the management of the company's accounting activities following applicable accounting rules. - Monitoring the financial management of Subsidiaries and Affiliated Companies, to ensure integration with the PJB's financial management policies in a corporate manner. - Ensure the planning, implementation, and evaluation of policies and strategies in managing the acquisition of funding sources including the identification of providers and the availability of local and global loan sources.
Direktur SDM dan Administrasi HC and Administration Director	- Memastikan pengelolaan <i>human capital</i> dan organisasi dilakukan secara optimal dan mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang maupun RKAP serta mendukung <i>sustainability</i> dan pertumbuhan Perusahaan. - Memastikan pengelolaan <i>human capital</i> dan pengembangan organisasi untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas. - Memastikan pengelolaan administrasi karyawan dan pengelolaan fasilitas kesejahteraan karyawan secara tertib. - Memastikan pengelolaan dan kesiapan <i>human capital</i> di internal Perusahaan, Anak Perusahaan dan keberadaan di Perusahaan Afiliasi, untuk mendukung perkembangan bisnis Perusahaan. - Memastikan pengelolaan pengembangan talenta untuk menjamin ketersediaan dan kesiapan <i>human capital</i> selaras dengan kebutuhan perusahaan. - Memastikan pengelolaan manajemen perubahan dan budaya perusahaan secara efektif untuk menciptakan lingkungan organisasi yang dinamis dan mampu menjawab tantangan persaingan. - Memastikan pengelolaan sistem otomatisasi <i>Human Capital</i> untuk mendukung kedinamisan dan keakuratan <i>database</i> Sistem Informasi <i>Human Capital</i>. - Memastikan penyusunan, pengkoordinasian dan evaluasi anggaran biaya fasilitas dan administrasi.	- Ensuring the management of human capital and the organization is carried out optimally and achieving the targets set in the Long-Term Plan and ABOP as well as supporting the Company's sustainability and growth. - Ensuring the management of human capital and organizational development to increase motivation and productivity. - Ensuring the management of employee administration and the management of employee welfare facilities in an orderly manner. - Ensuring the management and readiness of human capital within the Company, Subsidiaries, and the application in Affiliated Companies, to support the development of the Company's business. - Ensuring the management of talent development to ensure the availability and readiness of human capital in line with company needs. - Ensuring effective change management and corporate culture to create a dynamic organizational environment and be able to answer the challenges of competition. - Ensuring the management of the Human Capital automation system to support the dynamics and accuracy of the Human Capital Information System database. - Ensuring the preparation, coordination, and evaluation of facilities and administrative costs.



Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tasks and Responsibilities Implementation of the Board of Directors

Direksi telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta *Key Performance Indicators* (KPI) tahun 2019. RKAP dan KPI telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Pemegang Saham dalam RUPS tanggal 9 Januari 2019. Direksi telah melakukan beberapa kegiatan sebagai upaya mengimplementasikan dan mencapai target-target RKAP dan KPI di tahun 2019 sebagai berikut :

The Board of Directors has prepared the Annual Budget and Operational Plan (ABOP) and Key Performance Indicators (KPI) in 2019. The ABOP and KPI have been approved by the Board of Commissioners and Shareholders during GMS on January 9, 2019. The Board of Directors has carried out several activities in an effort to implement and achieve targets for ABOP and KPI in 2019 as follows:

Aspek Aspects	Program kerja Work program	
Fokus Pelanggan Customer Focus	- Upaya menjaga angka <i>Equivalent Forced Outage Rate</i> (EFOR)	- Efforts to maintain Equivalent Forced Outage Rate (EFOR)
Efektifitas Produk dan Proses Effectiveness of Products and Processes	- Upaya menjaga angka <i>Equivalent Availability Factor</i> (EAF) Pembangkit - Upaya menjaga Tara Kalor <i>Netto</i> - Menjaga ketersediaan pasokan batu bara.	- Efforts to maintain the number of Equivalent Availability Factor (EAF) for Generators - Efforts to maintain the Net Plant Heat Rate - Maintaining the availability of coal supply.
Fokus Tenaga Kerja Workforce Focus	- Pengukuran <i>Human Capital Readiness</i> (HCR) - Pengukuran <i>Organization Capital Readiness</i> (OCR)	- Measurement of Human Capital Readiness (HCR) - Measurement of Organization Capital Readiness (OCR)
Keuangan dan Pasar Finance and Markets	- Efisiensi Biaya Pokok Pembangkit (BPP). - Efektivitas biaya pemeliharaan - Nilai penyerapan investasi - Sinergi dengan Anak Perusahaan lain dan <i>Pusharlis</i> .	- Efficiency in Cost of Electricity Supply (CES) - Effectiveness of maintenance costs - Value of investment absorption - Synergy with other subsidiaries and <i>Pusharlis</i> .
Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan Leadership, Governance and Community Responsibility	- Pelaksanaan Penerapan GCG - Pencapaian PROPER Unit - Penyelesaian temuan auditor - Tingkat Kepatuhan pada K3LH (Kesehatan, Keselamatan Kerja & Lingkungan Hidup)	- Implementation of GCG Implementation - Achievement of PROPER Unit - Completion of auditor findings - Compliance Level in HSE (Health, Safety & Environment)

Selain itu, Direksi juga telah mengeluarkan keputusan sepanjang tahun 2019 yang berkaitan dengan aspek dan program kerja Direksi sebanyak 12 keputusan.

Additionally, the Board of Directors also issued decisions throughout 2019 relating to aspects and work programs of the Board of Directors of 12 decisions.

Rapat Direksi

Board of Directors Meeting

Rapat Direksi diadakan setiap kali dianggap perlu, namun sekurang-kurangnya sekali dalam 1 bulan sebagaimana diatur dalam *Board Manual* PJB. Direksi mengupayakan agar Rapat diselenggarakan minimal satu kali dalam satu minggu (setiap hari Kamis). Rapat Direksi dapat diadakan di luar jadwal rutin, jika dianggap perlu dan bersifat segera dan strategis, dengan agenda hal-hal yang memerlukan pengambilan keputusan.

Board of Directors meetings is held as required, at least once a month as stipulated in PJB's Board Manual. The Board of Directors strives to have the Meeting held at least once a week (every Thursday). The Board of Directors' meetings can be held outside the regular schedule, if deemed necessary, immediate and strategic, with an agenda that requires decision making.

Direksi menyusun rencana rapat sebelum tahun berjalan. Rapat Direksi membahas agenda rutin dan agenda non rutin (lain-lain). Agenda rutin terdiri dari Laporan Kondisi Pasar dan Posisi PJB dan Laporan Manajemen. Agenda non rutin (lain-lain) adalah hal-hal diluar agenda rutin yang perlu dibahas sebagai laporan kepada Direksi maupun memerlukan persetujuan Direksi atau pembahasan atas arahan/keputusan Dewan Komisaris dan/atau RUPS. Selama tahun 2019, telah dilaksanakan 34 kali Rapat Internal Direksi dengan agenda dan tingkat kehadiran Direksi adalah sebagai berikut:

The Board of Directors prepares a meeting plan before the current year. The Board of Directors' Meeting discusses routine and non-routine agendas. The routine agenda consists of the Market Condition Report and PJB Position and Management Report. Non-routine agenda (other) are things outside the routine agenda that need to be discussed as a report to the Board of Directors and require the approval of the Board of Directors or discussion of directions of the Board of Commissioners and/or GMS. During 2019, Board of Directors' Internal Meetings were held 34 times with the agenda and attendance of the Directors as follows:

No.	Tanggal Date	Agenda		Peserta Participant
1	4 Januari 2019 January 4, 2019	1. Persiapan RUPS RKAP 2019 2. KPI Korporat 2019	1. Preparation for the GMS on ABOP 2019 2. Corporate KPI 2019	Sugiyanto, Miftahul Jannah, Tjutju Kurnia S
2	10 Januari 2019 January 10, 2019	1. Kondisi Pasar dan Posisi PJB 2. Persiapan RUPS RKAP Anak Perusahaan Tahun 2019	1. Market Conditions and PJB Position 2. Preparation of GMS on Subsidiary's ABOP for 2019	Iwan Agung Firstantara, Sugiyanto, Miftahul Jannah, Henky Heru Basudewo, Tjutju Kurnia S, Suharto
3	25 Januari 2019 January 25, 2019	1. Progres Penyelesaian Tanah Cirata dan Tanah Reklamasi Gresik 2. Program Penurunan BPP 2019 3. Laporan Kinerja Bulan Desember 2018 & KPI Tahun 2019 4. Proses Penghapusbukuan ATTB	1. Progress in Settling Cirata Land and Gresik Reclamation Land 2. Cost of Electricity Supply Reduction Program 2019 3. December 2018 Performance Report & 2019 KPI 4. Non Operating Fixed Asset Book-Out Process	Iwan Agung Firstantara, Sugiyanto, Tjutju Kurnia S, Suharto
4	31 Januari 2019 January 31, 2019	1. Persiapan Pra Forum Bisnis 2019 2. Persetujuan Konsultansi Bisnis OM PJB Group	1. Preparation for the 2019 Business Forum 2. Approval of PJB Group's OM Business Consultancy	Iwan Agung Firstantara, Sugiyanto, Henky Heru Basudewo, Suharto
5	26 Februari 2019 February 26, 2019	1. Laporan Tindak Lanjut Arahan RUPS dan Rekomendasi Dekom 2019 2. Laporan Progres Penugasan 3. Laporan Kinerja PT PJB Bulan Januari 2019	1. Follow-up Report on GMS Directive and 2019 Recommendations from the Board of Commissioners 2. Assignment Progress Report 3. PT PJB Performance Report for January 2019	Iwan Agung Firstantara, Sugiyanto, Miftahul Jannah, Henky Heru Basudewo, Tjutju Kurnia S, Suharto
6	6 Maret 2019 March 6, 2019	1. Laporan Rencana Revisi SK Pedoman Pendayagunaan <i>Idle Asset</i> dan <i>Side Product</i> di lingkungan PJB 2. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat Direksi 3. Laporan Proposal AMC PLTU Labuhan Angin	1. SK Revision Plan Report Guideline for Utilizing Idle Asset and Side Product in PJB 2. Decision-making Mechanism in the Board of Directors' Meeting 3. AMC Proposal Report on Labuhan Angin CFPP	Iwan Agung Firstantara, Henky Heru Basudewo, Tjutju Kurnia S, Suharto
7	12 Maret 2019 March 12, 2019	1. Kondisi Pasar dan Posisi PJB 2. Konversi Saldo Laba sebagai Penambahan Setoran Modal PJB	1. Market Conditions and PJB Position 2. Conversion of Retained Earnings as Addition to PJB Capital Deposit	Iwan Agung Firstantara, Sugiyanto, Miftahul Jannah, Henky Heru Basudewo, Tjutju Kurnia S, Suharto
8	27 Maret 2019 March 27, 2019	1. Laporan Progres Penugasan 2. Laporan Kinerja PT PJB Bulan Februari 2019 3. Persiapan RUPS LPT 2018	1. Assignment Progress Report 2. PT PJB Performance Report in February 2019 3. Preparation for the 2018 LPT GMS	Sugiyanto, Miftahul Jannah, Tjutju Kurnia S
9	9 April 2019 April 9, 2019	1. Laporan SK Kebijakan Investasi Korporat 2. Progres Persiapan <i>Workshop</i> Lini Bisnis Jasa OM	1. SK Investment Corporate Policy Report 2. Preparation Progress of Workshop on OM Services' Lines of Business	Iwan Agung Firstantara, Sugiyanto, Miftahul Jannah, Henky Heru Basudewo, Tjutju Kurnia S, Suharto
10	16 April 2019 April 16, 2019	1. Perubahan Anggaran Dasar PT PJB 2. Progres Penugasan per 31 Desember 2018 dan April 2019 3. Laporan Perkembangan Akuisisi PT RE 4. Review RJPP PT PJB 5. Penyampaian RJPP PT PJBS	1. Amendment to the Articles of Association of PT PJB 2. Assignment Progress per December 31, 2018, and April 2019 3. Acquisition Progress Report PT RE 4. Review of PT PJB's CLP 5. Submission of PT PJBS' CLP	Iwan Agung Firstantara, Sugiyanto, Miftahul Jannah, Henky Heru Basudewo, Tjutju Kurnia S, Suharto



No.	Tanggal Date	Agenda		Peserta Participant
11	25 April 2019 April 25, 2019	1. Laporan Progres Penugasan 2. Laporan Manajemen Triwulan I 2019 3. Komitmen Direksi atas ICOFR 4. Finalisasi Risk Appetite PT PJB 5. Progres Perkembangan Akuisisi PT RE	1. Assignment Progress Report 2. Quarterly Management Report 2019 3. The Board of Directors' commitment to ICOFR 4. Finalization of PT PJB Risk Appetite 5. Progress Development of PT RE Acquisition	Iwan Agung Firstantara, Sugiyanto, Miftahul Jannah, Henky Heru Basudewo, Tjutju Kurnia S, Suharto
12	2 Mei 2019 May 2, 2019	1. Perbaikan dan O&M PLTBm Gorontalo 2. Relokasi PLTD Suppa	1. Repairs and O&M of Gorontalo Biomass Power Plant (BMPP) 2. Relocation of Suppa DEPP	Iwan Agung Firstantara, Sugiyanto, Miftahul Jannah, Henky Heru Basudewo, Tjutju Kurnia S, Suharto
13	10 Mei 2019 May 10, 2019	1. Laporan Program Sistering UP Gresik dan UP Muara Karang	1. Report on UP Gresik and UP Muara Karang	Iwan Agung Firstantara, Sugiyanto, Miftahul Jannah, Henky Heru Basudewo, Tjutju Kurnia S, Suharto
14	14 Mei 2019 May 14, 2019	1. Kondisi Pasar dan Posisi PJB 2. Laporan Manajemen Risiko dan Evaluasi Kepatuhan PJB TW I Tahun 2019 3. Paparan Profesi Insinyur 4. Presentasi Tim <i>Benchmark</i> Jepang 5. <i>Refinancing</i> BDSN	1. Market Conditions and PJB Position 2. Risk Management Report and PJB TW I Compliance Evaluation in 2019 3. Engineer Professional Exposure 4. Presentation of the Japanese Benchmark Team 5. BDSN Refinancing	Iwan Agung Firstantara, Sugiyanto, Miftahul Jannah, Tjutju Kurnia S, Suharto
15	22 Mei 2019 May 22, 2019	1. Persiapan RUPS LPT Anak Perusahaan 2018 2. Laporan Kinerja Bulan April 2019 3. Likuiditas terkait AMC Jawa dan Luar Jawa	1. Preparation of the 2018 subsidiary LPT GMS 2. April 2019 Performance Report 3. Liquidity related to Java and Outside Java AMC	Iwan Agung Firstantara, Sugiyanto, Tjutju Kurnia S, Suharto
16	20 Juni 2019 June 20, 2019	1. Persiapan RUPS LPT Anak Perusahaan 2018 2. <i>Review</i> Penetapan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) unit dan BPWC Semester 2 Tahun 2018 3. Mitigasi risiko dalam proyek pengembangan usaha	1. Preparation of the 2018 subsidiary LPT GMS 2. Review the Determination of Organizational Performance Value (NKO) units and CRMU Semester 2 of 2018 3. Risk mitigation in business development projects	Iwan Agung Firstantara, Sugiyanto, Tjutju Kurnia S, Suharto
17	28 Juni 2019 June 28, 2019	1. Laporan Kinerja Bulan Mei 2019 2. Progres Pengembangan Usaha 3. Pembahasan RKAP 2020	1. Performance Report for May 2019 2. Progress of Business Development 3. Discussion on ABOP 2020	Iwan Agung Firstantara, Sugiyanto, Miftahul Jannah, Henky Heru Basudewo, Tjutju Kurnia S, Suharto
18	4 Juli 2019 July 4, 2019	1. Kondisi Pasar dan Posisi PJB 2. Arahan RUPS LPT 2018	1. Market Conditions and PJB Position 2. Direction of the 2018 LPT GMS	Sugiyanto, Miftahul Jannah, Henky Heru Basudewo, Tjutju Kurnia S, Suharto
19	29 Juli 2019 July 29, 2019	1. Pengadaan Batubara <i>Low Sulfur</i> 2. Strategi Korporat 6 Bulan kedepan 3. Perubahan Skema Penugasan IPP PLTGU Riau-2 4. Pembahasan <i>Annual Report</i> 2018 5. Laporan Manajemen PT PJB Triwulan II 2019 6. Progres Proyek Pengembangan Usaha	1. Low Sulfur Coal Procurement 2. Corporate Strategy for the Next 6 Months 3. Changes in Riau-2 IPP CCPP Assignment Scheme 4. Discussion of the 2018 Annual Report 5. PT PJB's Management Report of Quarter II 2019 6. Progress of Business Development Projects	Iwan Agung Firstantara, Sugiyanto, Henky Heru Basudewo, Tjutju Kurnia S, Suharto

No.	Tanggal Date	Agenda		Peserta Participant
20	9 Agustus 2019 August 9, 2019	1. Persiapan PJB Connect 2. Laporan Mapping Rumah Sakit dengan Fasilitas Unit Luka Bakar 3. Progres Perkembangan Akuisisi PT RE 4. Laporan Pekerjaan RE di PT PJB 5. Induksi Annual Report Award 2018 6. Persiapan RUPS PT S2P	1. Preparation of PJB Connect 2. Hospital Mapping Report with Burn Treatment Unit Facilities 3. The Progress of Acquisition Development of PT RE 4. RE Employment Report at PT PJB 5. Induction of the 2018 Annual Report Award 6. Preparation for the GMS of PT S2P	Iwan Agung Firstantara, Henky Heru Basudewo, Tjutju Kurnia S, Suharto
21	21 Agustus 2019 August 21, 2019	1. Laporan Kinerja Bulan Agustus 2019 2. Laporan Progres Pengembangan Usaha 3. Persiapan COD PLTU Cilacap dan Jawa 7 4. Induksi <i>Annual Report Award</i> 2018 5. Perumusan KPI SOLID dalam Kontrak Manajemen PJB	1. August 2019 Performance Report 2. Business Development Progress Report 3. Preparation for Cilacap and Java COD CFPP 7 4. 2018 Annual Report Award Induction 5. Formulation of the SOLID KPI in the PJB Management Contract	Iwan Agung Firstantara, Sugiyanto, Miftahul Jannah, Henky Heru Basudewo, Tjutju Kurnia S, Suharto
22	4 September 2019 September 4, 2019	1. <i>Cyber Security</i> 2. <i>Review RJPP</i> 3. <i>Review KPI Anak Perusahaan</i>	1. Cyber Security 2. Review of CLP 3. Review of Subsidiaries' KPI	Iwan Agung Firstantara, Miftahul Jannah, Tjutju Kurnia S, Suharto
23	12 September 2019 September 12, 2019	1. Laporan Kronologi Bonus PT KPJB 2. Kondisi Pasar dan Posisi PJB	1. PT KPJB Bonus Chronology Report 2. Market Conditions and PJB Position	Iwan Agung Firstantara, Sugiyanto, Miftahul Jannah, Henky Heru Basudewo, Tjutju Kurnia S, Suharto
24	24 September 2019 October 24, 2019	1. Progres Proyek Pengembangan Usaha 2. Laporan Kinerja Bulan Agustus 2019 3. Pengembangan Wisata di Waduk Cirata untuk Pemberdayaan Masyarakat	1. Progress of Business Development Projects 2. August 2019 Performance Report 3. Tourism Development in Cirata Reservoir for Community Empowerment	Iwan Agung Firstantara, Sugiyanto, Miftahul Jannah, Henky Heru Basudewo, Tjutju Kurnia S
25	15 Oktober 2019 October 15, 2019	1. Hasil <i>Binding Opinion</i> (BO) Bani atas Permasalahan Tanah Reklamasi PLTU Gresik dan Tindak Lanjutnya	1. Binding Opinion (BO) Results of Gresik Power Plant Land Reclamation Problems and Follow Up	Iwan Agung Firstantara, Sugiyanto, Miftahul Jannah, Tjutju Kurnia S, Suharto
26	23 Oktober 2019 October 23, 2019	1. Kondisi Pasar dan Posisi PJB 2. Laporan Manajemen PT PJB Triwulan III 2019 3. Progres Proyek Pengembangan Usaha	1. Market Conditions and PJB Position 2. Management Report of PT PJB Quarter III 2019 3. Progress of Business Development Projects	Iwan Agung Firstantara, Sugiyanto, Tjutju Kurnia S, Suharto
27	1 November 2019 November 1, 2019	1. Laporan Pengelolaan Kontrol <i>Supply</i> Batubara di Unit PJB 2. Rencana Pemanfaatan <i>Idle Asset</i> sebagai Lokasi Wisata di Area PLTA Tulungagung 3. Laporan Progres PLTS Cirata 4. Laporan Progres PV di Pembangkit 5. <i>Co-Firing</i> Paiton dan PLTU lainnya 6. Pemanfaatan Waduk sebagai PLTMH	1. Management Report of Coal Supply Control in the PJB Unit 2. Planned Utilization of the Idle Asset as a Tourist Location in the Tulungagung Hydroelectric Power Plant 3. Report on Cirata SPP Progress 4. PV Progress Report on the Plant 5. Co-Firing Paiton and other CFPP 6. Utilization of reservoirs as MHPP	Iwan Agung Firstantara, Sugiyanto, Miftahul Jannah, Henky Heru Basudewo, Suharto



No.	Tanggal Date	Agenda		Peserta Participant
28	7 November 2019 November 7, 2019	1. Laporan Progres REMDO 2. Laporan Progres <i>Parenting</i> dan Sistering 3. Laporan Pengelolaan Kontrol <i>Supply</i> Batubara di PJB 4. Penggunaan Waduk sebagai PLTMH 5. Laporan Progres PLTS Cirata 6. Laporan Progres PV di Pembangkit	1. REMDO Progress Report 2. Parenting and Sistering Progress Report 3. Management Report on Coal Supply Control at the PJB 4. Use of reservoirs as MHPP 5. Report on Cirata SPP Progress 6. PV Progress Report on the Plant	Iwan Agung Firstantara, Sugiyanto, Miftahul Jannah, Henky Heru Basudewo
29	21 November 2019 November 21, 2019	1. Laporan Manajemen PT PJB Triwulan III 2019 2. Progres Proyek Pengembangan Usaha 3. Penggunaan Waduk sebagai PLTMH 4. Laporan Progres PLTS Cirata 5. Laporan Progres PV di Pembangkit	1. Management Report of PT PJB Quarter III 2019 2. Progress of Business Development Projects 3. Use of reservoirs as MHPP 4. Report on Cirata SPP Progress 5. PV Progress Report on the Plant	Iwan Agung Firstantara, Sugiyanto, Miftahul Jannah, Henky Heru Basudewo, Tjutju Kurnia S, Suharto
30	28 November 2019 November 28, 2019	1. Penyampaian RJPP PJB 2019 – 2023 2. Pemanfaatan <i>Idle Asset</i> sebagai Lokasi Wisata di PLTA Tulungagung	1. Submission of RJPP PJB 2019 – 2023 2. Utilization of Idle Asset as a Tourist Location in the Tulungagung Hydroelectric Power Plant	Iwan Agung Firstantara, Sugiyanto, Miftahul Jannah, Tjutju Kurnia S, Suharto
31	5 Desember 2019 December 5, 2019	1. Laporan Pengelolaan Kontrol <i>Supply</i> Batubara di Unit PJB 2. Laporan <i>Progres</i> PLTS Cirata, PV di Pembangkitan, Penggunaan Waduk untuk PLTMH dan <i>Co- Firing</i> Paiton	1. Management Report of Coal Supply Control in the PJB Unit 2. Report on Cirata SPP Progress, PV in Power Plant, Use of Reservoirs for MHPP and Paiton Co-Firing	Iwan Agung Firstantara, Miftahul Jannah, Tjutju Kurnia S, Suharto
32	12 Desember 2019 December 12, 2019	1. Penyampaian Kajian Pengembangan PLTU Muara Karang 4 & 5 2. Laporan Pengelolaan Kontrol <i>Supply</i> Batubara di Unit PJB 3. Kondisi Pasar dan Posisi PJB	1. Submission of Muara Karang 4 & 5 CFPP Development Study 2. Management Report of Coal Supply Control in the PJB Unit 3. Market Conditions and PJB Position	Iwan Agung Firstantara, Sugiyanto, Miftahul Jannah, Henky Heru Basudewo, Tjutju Kurnia S, Suharto
33	18 Desember 2019 December 18, 2019	1. Pemanfaatan Fasilitas <i>Non Cash Loan</i> untuk PT RE 2. Potensi Pengembangan PLTM 3. Paparan Kajian Alih Aset FTP-1 4. Persiapan RUPS RKAP 2020 5. Laporan Kinerja Bulan November 2019 6. Laporan Hasil <i>Self Assessment</i> GCG 2019 7. Progres Proyek Pengembangan Usaha	1. Utilization of Non-Cash Loan Facilities for PT RE 2. Potential MHPP Development 3. Expose the FTP-1 Asset Transfer Study 4. Preparation for the GMS on ABOP 2020 5. November 2019 Performance Report 6. 2019 GCG Self-Assessment Results Report 7. Progress of Business Development Projects	Iwan Agung Firstantara, Sugiyanto, Henky Heru Basudewo, Tjutju Kurnia S
34	26 Desember 2019 December 26, 2019	1. Laporan Pengelolaan Kontrol <i>Supply</i> Batubara di UBJOM Tenayan 2. Laporan Progres PLTS Cirata, PV Pembangkitan dan <i>Co-Firing</i>	1. Report on Management of Coal Supply Control in UBJOM Tenayan 2. Report on Cirata SPP Progress, PV Generation and Co-Firing	Iwan Agung Firstantara, Miftahul Jannah, Henky Heru Basudewo, Tjutju Kurnia S, Suharto

Tingkat Kehadiran Direksi dalam Rapat Internal dan Pengawasan

Level of Directors' Attendance in Internal and Supervisory Meetings

Nama Name	Rapat Internal Internal Meeting			Rapat Pengawasan Supervisory Meeting		
	Frekuensi Rapat Total Meeting	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance ratio	Frekuensi Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Total of Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Ratio
Iwan Agung Firstantara,	34	31	91 %	12	12	100%
Sugiyanto	34	29	85%	12	10	83%
Miftahul Jannah	34	25	74%	12	8	67%
Henky Heru Basudewo	34	23	68%	12	9	75%
Tjutju Kurnia Sutjningsih	34	31	91%	12	11	92%
Suharto	34	29	85%	12	10	83%

Jalannya rapat dan keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi telah dicatat dan didokumentasikan dalam Risalah Rapat Direksi. Risalah Rapat ditandatangani oleh seluruh Direktur yang hadir pada saat Rapat Direksi dilaksanakan. Setiap Direktur berhak mendapatkan salinan Risalah Rapat, baik Direktur yang bersangkutan hadir ataupun tidak dalam Rapat Direksi tersebut. Dalam Risalah Rapat Direksi menjelaskan mengenai jalannya rapat, yang meliputi waktu dan tempat pelaksanaan rapat, daftar hadir, materi dan pembahasan, pendapat yang terdapat dalam rapat, proses pengambilan keputusan, dan keputusan yang ditetapkan, serta jika ada perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat disertai alasan mengenai perbedaan pendapat tersebut. Tindak lanjut keputusan Rapat Direksi selalu dimonitor dan dilaporkan dalam setiap rapat selanjutnya.

The proceedings and decisions taken at the Board of Directors 'Meeting have been recorded and documented in the Minutes of the Directors' Meeting. Minutes of meetings are signed by all Directors present at the meeting. Every Director is entitled to receive a copy of the Minutes of Meeting, whether the Director concerned is present or not at the meeting. In the Minutes of Meeting, the Board of Directors explains the proceedings of the meeting, which includes the time and place of the meeting, the attendance list, the material and discussion, the opinions contained in the meeting, the decision making process, and the decisions made, and if there are dissenting opinions that occur the meeting was accompanied by reasons for the difference of opinion. Follow-up decisions on the Board of Directors' meetings are always monitored and reported at each subsequent meeting.

Program Pengembangan Kompetensi Direksi

Board of Directors Competency Development Program

Perusahaan menyediakan program bagi Direksi untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi yang relevan dengan bisnis Perusahaan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pengelolaan Perusahaan. Selama tahun 2019, anggota Direksi telah mengikuti kegiatan program pengembangan kompetensi sebagaimana telah dijelaskan pada uraian terkait Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Kepala SPI.

The Company provides programs for Directors to improve knowledge and competencies relevant to the Company's business to support the implementation of the Company's management tasks. During 2019, members of the Board of Directors have participated in competency development program activities as explained in the description related to the Education and Training of the Board of Commissioners, Directors, Committees, Corporate Secretary, and Head of SPI.

Penilaian Kinerja Komite-Komite Di Bawah Direksi

Performance Assessment of Committees Under the Board of Directors

Sampai dengan akhir tahun 2019, PJB belum membentuk Komite di bawah Direksi. Sehingga, tidak terdapat penilaian kinerja komite dibawah Direksi.

As of the end of 2019, PJB has not formed any Committee under the Board of Directors. Therefore, there is no performance assessment of committees under the Board of Directors.

Berdasarkan struktur organ tata kelola perusahaan PJB, Direksi memiliki organ pendukung yaitu Satuan Pengawasan Internal

Based on the organizational structure of PJB's corporate governance, the Board of Directors has supporting organs:

dan Satuan Manajemen Risiko & Kepatuhan. Pelaksanaan tugas organ pendukung tersebut dituangkan ke dalam *key performance indicator* yang disepakati sebagai acuan dan ukuran pencapaian target pelaksanaan tugas.

Penilaian kinerja Satuan Pengawasan Internal dan Satuan Manajemen Risiko & Kepatuhan dilakukan oleh Direktur Utama dengan berdasarkan parameter kriteria Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas. Penilaian dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun.

Capaian tugas Satuan Pengawasan Internal Perusahaan tahun 2019 telah mencapai target Perusahaan sebesar 104% dari rencana kerja yang disusun. Sedangkan capaian tugas Satuan Manajemen Risiko & Kepatuhan tahun 2019 juga telah mencapai target Perusahaan sebesar 115% dari rencana kerja yang disusun.

Internal Audit Unit and the Risk Management & Compliance Unit. The implementation of the supporting organ's tasks is included in an applicable key performance indicator as a reference and measure of the achievement of the task implementation target.

The performance assessment of the Internal Audit Unit and the Risk Management & Compliance Unit are carried out by the President Director based on the indicators of the Completeness and Tasks Performance. Assessment is conducted 2 (two) times a year.

The Company's Internal Audit Unit's achievements in 2019 have achieved the Company's target of 104% of the work plans prepared. While the achievement of the duties of the Risk Management & Compliance Unit in 2019 has also reached the Company's target of 115% of the work plans prepared.

Penilaian Kinerja Direksi Performance Assessment of the Board of Directors

Kinerja Direksi secara rutin dinilai sebagai bentuk evaluasi atas pelaksanaan tugas Direksi. Penilaian kinerja Direksi tahun 2019 telah dilaksanakan baik secara self-assessment maupun oleh Dewan Komisaris dan RUPS berdasarkan Laporan Keuangan, Laporan realisasi RKAP (Manajemen), dan Laporan Tahunan serta Realisasi *Key Performance Indicators* (KPI) dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik aspek Direksi. Pengukuran keberhasilan kinerja Direksi merupakan hasil kerja kolektif dari seluruh Direksi. Pencapaian Kinerja Direksi tahun 2019 adalah sebagai berikut :

The performance of the Board of Directors is routinely assessed as a form of evaluation of the implementation of the Board of Directors' tasks. The performance assessment of the Board of Directors in 2019 has been carried out both by self-assessment as well as by the Board of Commissioners and the GMS based on Financial Statements, ABOP (Management) Reports, and Annual Reports and Realization of Key Performance Indicators (KPI) and the implementation of good corporate governance aspects of the Directors. Measuring the success of the Directors' performance is the collective result of all Directors. The Board of Directors' Performance Achievements in 2019 are as follows:

Realisasi *Key Performance Indicators* Direksi Realization of Directors' Key Performance Indicators

No.	Perspektif Perspective	Satuan Unit	Target	Bobot Weight	2019					
					Target	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement	Nilai Value	Keterangan Remarks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I	Fokus Pelanggan Customer Focus			12				11.38		
1.1	Equivalent Forced Outage Rate (EFOR)									
	a. EFOR Pembangkit PLTU Batubara Eksisting a. EFOR of Existing CFPP	↓ %	1.46	3	1.46	1.78	79.45%	2.38	🟡	Masalah Problem
	b. EFOR Pembangkit PLTU Batubara AMC Jawa Bali b. EFOR of Java Bali AMC CFPP	↓ %	3.70	6	3.70	2.31	100.00%	6.00	🟢	Baik Good
	c. EFOR Pembangkit Non PLTU Batubara c. EFOR of Non CFPP	↓ %	1.71	3	1.71	0.61	100.00%	3.00	🟢	Baik Good
II	Efektifitas Produk dan Proses Product and Process Effectiveness			43				42.77		
2.1	Equivalent Availability Factor (EAF) Pembangkit Equivalent Availability Factor (EAF) Power Plant									
	a. EAF Pembangkit PLTU Batubara Eksisting a. EAF of Existing CFPP	↑ %	89.00	8	89.00	90.28	100.00%	8.00	🟢	Baik Good
	b. EAF Pembangkit PLTU Batubara AMC Jawa Bali b. EAF of Java Bali AMC CFPP	↑ %	83.23	14	83.23	90.71	100.00%	14.00	🟢	Baik Good

No.	Perspektif Perspective	Satuan Unit	Target	Bobot Weight	2019					Keterangan Remarks
					Target	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement	Nilai Value		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	c. EAF Pembangkit Non PLTU Batubara c. EAF of Non CFPP	↑ %	93.48	6	93.48	95.38	100.00%	6.00	Baik Good	
2.2	Tara Kalor Netto Eksisting dan AMC Jawa Bali Net Plant Heat of Existing and Java Bali AMC									
	a. Tara Kalor Netto Pembangkit PLTU Batubara Eksisting a. Net Plant Heat of Existing CFPP	↓ kcal/ kWh	2,626	5	2,626	2,743	95.55%	4.77	Hati-Hati Caution	
	b. Tara Kalor Netto Pembangkit PLTU Batubara AMC Jawa Bali b. Net Plant Heat of Java Bali AMC CFPP	↓ kcal/ kWh	2,681	5	2,681	2,664	100.00%	5.00	Baik Good	
	c. Tara Kalor Netto Pembangkit Non PLTU Batubara c. Net Plant Heat of Non CFPP	↓ kcal/ kWh	2,269	2	2,269	2,196	100.00%	2.00	Baik Good	
2.3	Umur Persediaan Batubara Eksisting dan AMC Jawa Bali Coal Supply Maturity of Existing Coal and Java-Bali AMC	↓ Hari Day	15-22	3	15-22	19.81	100.00%	3.00	Baik Good	
III	Fokus Tenaga Kerja Workforce Focus			6				6.00		
3.1	Human Capital Readiness (HCR)	↑ Level	4.45	3	4.45	4.45	100.00%	3.00	Baik Good	
3.2	Organizational Capital Readiness (OCR)	↑ Level	4.45	3	4.45	4.45	100.00%	3.00	Baik Good	
IV	Keuangan dan Pasar Financial and Market		4.45	32				20.02		
4.1	Biaya Pokok Penyediaan Pembangkit Power Plant Cost of Supply									
	a. BPP Pembangkit Eksisting a. CES of Existing CFPP	↓ Rp/ kWh	1,208	7	1,208.01	1,136.10	100.00%	7.00	Baik Good	
	b. BPP Pembangkit AMC Jawa Bali b. CES of Java Bali AMC CFPP	↓ Rp/ kWh	788	6	787.61	717.56	100.00%	6.00	Baik Good	
4.2	Efektifitas Biaya Pemeliharaan Maintenance Cost Effectiveness	↓ %	0.75	3	0.75	0.68	100.00%	3.00	Baik Good	
4.3	Investasi Investment									
	a. Pengembangan Usaha Non NCB a. Non NCB Business Development	↑ %	100	6	100.00	63.69	63.69%	3.82	Masalah Problem	
	b. National Capacity Building	↑ %	100	4	100.00	55.04	55.04%	2.20	Masalah Problem	
4.4	Sinergi dengan Anak Perusahaan Lain dan Pushartlis Synergy with Other Subsidiaries and Pushartlis									
	a. Sinergi dengan Anak Perusahaan Lain a. Synergy with Other Subsidiaries	↑ Rp Milyar Rp Billion	876.27	3	876.27	1,005.07	100.00%	3.00	Baik Good	
	b. Sinergi dengan Pushartlis b. Synergy with Pushartlis	↑ Rp Milyar Rp Billion	25	3	25.00	55.62	100.00%	3.00	Baik Good	
V	Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan Leadership, Governance, and Community Responsibility			7				5.00		
5.1	Penerapan GCG GCG Implementation	↑ Skor Skor	93.40	2	93.40	94.45	100.00%	2.00	Baik Good	
5.2	Tingkat Proper Unit Proper Unit Level	↑ Jml Unit Total Unit	2 proper emas, 4 proper hijau 2 gold proppers, 4 green proppers	2	2 proper emas, 4 proper hijau 2 gold proppers, 4 green proppers	2 proper emas, 4 proper hijau 2 gold proppers, 4 green proppers	100.00%	2.00	Baik Good	
5.3	Penyelesaian temuan auditor Auditor Findings Settlement	↑ %	100	3	100	100.00	100.00%	2.00	Baik Good	
5.4	Kepatuhan pada K3LH (Kesehatan, Keselamatan Kerja & Lingkungan Hidup) OSHE Compliance	↓		Max -10				-2.0		
TOTAL			100					93,17		

Selain itu, Direksi juga dinilai melalui assessment GCG atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan GCG, termasuk organ dan fungsi pendukung Direksi. *Assessment* implementasi GCG untuk Direksi dilaksanakan sesuai pedoman dalam pelaksanaan penilaian dan evaluasi atas penerapan GCG berdasarkan indikator/paramater yang diatur dalam SK Sekretaris Kementerian BUMN No.16/S.MBU/2012. Capaian masing-masing indikator dari Aspek Direksi tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Additionally, the Board of Directors is also assessed through a GCG assessment of the implementation of their tasks and responsibilities concerning the GCG implementation, including the organs and supporting functions of the Board of Directors. GCG assessment for the Board of Directors is conducted following the guidelines in the assessment and evaluation of GCG implementation based on indicators/parameters outlined in the Decree of the Secretary of the SOE Ministry No.16 / S.MBU / 2012. The achievements of each indicator from the Directors Aspect in 2019 are as follows:

Capaian Penilaian GCG Indikator Aspek Direksi

Achievement Indicators for GCG Assessment of the Board of Directors

No.	Indikator Indicator	Capaian (%) Achievements [%]
1	Direksi memiliki pengenalan dan pelatihan/ pembelajaran serta melaksanakan program tersebut secara berkelanjutan.	100
2	Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas.	97.72
3	Direksi menyusun perencanaan perusahaan.	92.76
4	Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja perusahaan.	93.99
5	Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.	100
6	Direksi melaksanakan pengurusan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar.	100
7	Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi perusahaan dan stakeholders.	94.19
8	Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota direksi dan manajemen di bawah direksi.	96.43
9	Direksi memastikan perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada dewan komisaris dan Pemegang Saham tepat waktu.	88.93
10	Direksi menyelenggarakan rapat direksi dan menghadiri rapat dewan komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	97.50
11	Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif.	94.62
12	Direksi menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan yang berkualitas dan efektif.	95.12
13	Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.	86.54

Hasil *self-assessment* GCG pada aspek pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi pada tahun 2019 mencapai skor 33,147 dari skor maksimal 35 atau setara dengan 94,71% dengan kategori Sangat Baik.

The results of GCG self-assessment on aspects of tasks and responsibilities implementation by the Board of Directors in 2019 achieved a score of 33,147 from a maximum score of 35 or equivalent to 94.71% in 'Excellent' category.

HUBUNGAN AFILIASI DAN HUBUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI

AFFILIATION AND WORK RELATIONSHIP BETWEEN THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Organ Utama Perusahaan secara independen menjalankan pengelolaan Perusahaan sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Masing-masing organ utama berupaya menghindari segala bentuk potensi terjadinya konflik kepentingan. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris bertindak independen dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya baik secara individual maupun kolegal semata-mata demi kepentingan Perusahaan. Hubungan antara Dewan Komisaris dan Direksi sebagai organ utama tata kelola Perusahaan adalah hubungan kerja sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan dan fungsi pengelolaan Perusahaan.

The Company's Main Organs independently perform the company management following the principles of Good Corporate Governance. Every main organ always prevents all forms of potential conflicts of interest. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners act independently in performing their functions and duties both individually and collectively for the benefit of the Company. The relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors as the main organ of corporate governance is the work relationship implemented in the supervisory function and the management function of the Company.

Hubungan Afiliasi Antara Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali

Affiliation Between the Members of The Board of Directors, The Board of Commissioners, and The Majority and/or Controlling Shareholders

Sebagai upaya dalam menjaga independensi dan potensi benturan kepentingan anggota Dewan Komisaris, PJB memastikan hubungan afiliasi setiap anggota Dewan Komisaris diantaranya melalui hubungan keluarga dan keuangan antara anggota Dewan Komisaris dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi serta Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali PJB sepanjang tahun 2019. Hubungan afiliasi anggota Dewan Komisaris tercermin pada tabel sebagai berikut:

As an effort to maintain the independence and the prevention of conflict of interests among members of the Board of Commissioners, PJB ensures the affiliation of each member of the Board of Commissioners including family and financial affiliations between members of the Board of Commissioners with fellow members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors and the Majority and/or Controlling Shareholders throughout 2019. The affiliation of the members of the Board of Commissioners is presented in the following table:

Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris

Affiliations of Members of the Board of Commissioners

Nama Name	Hubungan Keluarga Dengan Family Affiliation with			Hubungan Keuangan Dengan Financial Affiliation with		
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Shareholders	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Shareholders
Sriyono Dwidjo Siswoyo	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None
Defy Indiyanto Budiarto	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None
Sunarsip	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None
Benny M.M. Marbun	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None
Hendra Iswahyudi	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None
Jisman P. Hutajulu	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None

Selain itu, seluruh anggota Dewan Komisaris PJB tidak memiliki hubungan afiliasi di perusahaan lain baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi serta Pemegang Saham yang dilarang sesuai dengan ketentuan internal Perusahaan.

Additionally, all members of PJB's Board of Commissioners are not affiliated in other companies either as members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and shareholders prohibited based on the Company's internal regulations.

Sama halnya dengan Dewan Komisaris, dalam memastikan hubungan afiliasi setiap anggota Direksi diantaranya melalui hubungan keluarga dan keuangan antara anggota Direksi dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris serta Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali PJB sepanjang tahun 2019. Hubungan afiliasi anggota Direksi tercermin pada tabel sebagai berikut:

Hubungan Afiliasi Anggota Direksi

Affiliations of the Members of the Board of Directors

Nama Name	Hubungan Keluarga Dengan Family Affiliation with			Hubungan Keuangan Dengan Financial Affiliation with		
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Shareholders	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Shareholders
Iwan Agung Firstantara	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None
Sugiyanto	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None
Miftahul Jannah	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None
Henky Heru Basudewo	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None
Tjutju Kurnia Sutjiningsih	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None
Suharto	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None

Selain itu, seluruh anggota Direksi PJB tidak memiliki hubungan afiliasi di perusahaan lain baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi serta Pemegang Saham yang dilarang sesuai dengan ketentuan internal Perusahaan.

Similar to the Board of Commissioners, in ensuring the affiliation of each member of the Board of Directors including family and financial affiliations between members of the Board of Directors with fellow members of the Board of Directors and / or members of the Board of Commissioners as well as the Majority and/or Controlling Shareholders throughout 2019. The affiliation of members of the Board of Directors is presented in the following table:

Additionally, all members of PJB's Board of Directors are not affiliated in other companies either as members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and Shareholders prohibited based on the Company's internal regulations.

Hubungan Kerja Dewan Komisaris Dengan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors Work Relationships

Prinsip Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi PJB adalah mitra yang saling menunjang dan bersinergi demi kemajuan bisnis Perusahaan. Direksi telah mempertimbangkan saran, nasihat dan rekomendasi dari Dewan Komisaris dalam setiap keputusan strategis yang akan diambil. Prinsip-prinsip Hubungan Kerja Direksi dengan Dewan Komisaris PJB adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris menghormati tugas dan wewenang Direksi dalam mengelola Perusahaan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan.
2. Direksi menghormati tugas dan wewenang Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap kebijakan pengelolaan Perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Setiap hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris merupakan hubungan yang bersifat formal kelembagaan, dalam arti senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme baku atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.

The definition of Work Relationship of PJB's Board of Commissioners and Board of Directors is as partners that support and synergize for the progress of the Company's business. The Board of Directors has considered the direction, advice and recommendations of the Board of Commissioners in every strategic decision that will be taken. The principles of the Work Relationship of PJB's Board of Directors with the Board of Commissioners are as follows:

1. The Board of Commissioners takes into account the tasks and authority of the Board of Directors in managing the Company as stipulated in the regulations and the Articles of Association of the Company.
2. The Board of Directors takes into account the tasks and authority of the Board of Commissioners to supervise and recommend the Company's management policies regarding the provisions of the Articles of Association.
3. The work relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners is a formal-institutional relationship in which it is based on standard mechanism or accountable correspondence.

4. Sarana korespondensi baku yang digunakan dalam hubungan kerja Direksi Dewan Komisaris selain menggunakan surat menyurat secara hardcopy juga menggunakan Tata Laksana Surat dan Kearsipan berdasarkan *Office Automation* yang berlaku di Perusahaan dan atau menggunakan *email*.
5. Setiap hubungan kerja yang bersifat informal dapat dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, namun tidak dapat digunakan sebagai kebijakan formal sebelum melalui mekanisme atau korespondensi yang dapat di pertanggungjawabkan.
6. Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi Perusahaan secara tepat waktu, lengkap, terukur dan akurat.
7. Direksi bertanggungjawab atas penyampaian informasi Perusahaan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu, lengkap, terukur dan akurat.

Dewan Komisaris dan Direksi PJB dalam menjalankan hubungan kerja dilakukan baik secara formal maupun informal. Hubungan kerja formal merupakan hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris yang dapat dilakukan melalui sarana/mekanisme korespondensi baku maupun Rapat Pengawasan dan Rapat Konsultasi. Rapat Pengawasan merupakan rapat Dewan Komisaris yang dihadiri oleh Direksi, sedangkan Rapat Konsultasi adalah rapat Direksi yang dihadiri oleh Dewan Komisaris. Sedangkan mekanisme Hubungan Kerja Informal antara Dewan Komisaris dengan Pejabat PJB diatur sebagai berikut:

1. Pejabat PJB dapat melakukan pertemuan dengan Organ pendukung Dewan Komisaris yang bersifat Hubungan Kerja Informal terkait hal-hal yang memerlukan koordinasi dengan pihak Dewan Komisaris
2. Permintaan kehadiran Pejabat PJB dilakukan secara tertulis oleh Dewan Komisaris/Komisaris (selaku Ketua/Wakil Ketua Komite) yang ditujukan kepada Direksi untuk meminta Pejabat PJB yang bersangkutan hadir dengan tujuan berkoordinasi dan/atau mendapatkan informasi untuk melengkapi informasi yang diperlukan Dewan Komisaris.

Selain itu, Organ pendukung Dewan Komisaris dapat pula melakukan pertemuan/mengajukan permintaan informasi kepada Pejabat PJB yang bersifat hubungan kerja informal sebagai berikut:

1. Klarifikasi informasi dan dokumen sehubungan permintaan Direksi yang memerlukan persetujuan atau tanggapan tertulis Dewan Komisaris
2. Klarifikasi informasi dan dokumen sehubungan hal-hal operasional PJB yang menjadi perhatian Dewan Komisaris

Sebagai upaya dalam memastikan terlaksananya koordinasi yang baik dan jelas antara Dewan komunikasi dengan Direksi, maka diperlukan pedoman baku yang mengatur hubungan kerja kedua organ tersebut. Oleh karena itu, Dewan Komisaris

4. Besides using correspondence in the form of hardcopy, the standard correspondence facilities used in the work relationship of the Board of Commissioners also consist of Letters and Filing Procedures based on the Office Automation applicable at the Company and/or on e-mail.
5. Every informal work relationship can be performed by each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors; however, it cannot be used as a formal policy before passing an accountable mechanism or correspondence.
6. The Board of Commissioners has the right to receive Company information timely, completely, measurably, and accurately.
7. The Board of Directors is responsible for delivering Company information to the Board of Commissioners timely, completely, measurably, and accurately.

The work relationships by PJB's Board of Commissioners and Board of Directors are established both formally and informally. Formal working relationship is a working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners which can be carried out through means / standard correspondence mechanisms as well as Oversight Meetings and Consultation Meetings. The Oversight Meeting is a Board of Commissioners meeting attended by the Directors, while a Consultation Meeting is a Board of Directors meeting which is attended by the Board of Commissioners. While the mechanism of Informal Work Relations between the Board of Commissioners and PJB Officials is regulated as follows:

1. PJB officials are allowed to conduct a meeting with the supporting organs of the Board of Commissioners which are Informal Work Relationship related to cases need coordination with the Board of Commissioners.
2. The meeting invitation as a request by PJB Officials is written by the Board of Commissioners or a Commissioner (as Head/ Vice Chairperson Head of the Committee) addressed to the Board of Directors to request the relevant PJB Officials to coordinate and/or receive information to complete the information required by the Board of Commissioners.

On the other hand, the supporting organs of the Board of Commissioners may also conduct meetings/submit information requests to PJB Officials as an informal working relation which is as follows:

1. Clarification of information and documents regarding the request of the Board of Directors that requires the Board of Commissioners' written approval or response.
2. Clarification of information and documents regarding PJB operation concerned by the Board of Commissioners

To ensure the implementation of good and accountable coordination between the Board and the Board of Directors, standard guidelines that govern the working relations of the two organs are required. Therefore, the Board of Commissioners

bersama Direksi menetapkan pedoman kerja yang disebut Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*). Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) menjadi pedoman bagi kedua organ tersebut yang menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami, dan dapat dijalankan dengan konsisten. Pedoman tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan fungsi, tugas serta tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam rangka mencapai Visi dan Misi Perusahaan.

Board Manual mengatur hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi, dimana komunikasi langsung antara Dewan Komisaris dengan Direksi terselenggara dalam Rapat Pengawasan yang berlangsung secara berkala sekurang-kurangnya satu bulan sekali, dan dapat ditambah sewaktu-waktu untuk keperluan khusus/penting. Direksi dapat menyelenggarakan Rapat dengan mengundang Dewan Komisaris yang disebut Rapat Konsultasi, untuk hal-hal yang Direksi anggap penting untuk dikonsultasikan dengan Dewan Komisaris. *Board Manual* juga memuat tata tertib rapat Dewan komisaris dan Direksi. *Board Manual* mencakup aspek diantaranya :

1. Tata Laksana Kerja Terkait Jabatan.
2. Tata Laksana Kerja Terkait Batas Kewenangan.
3. Tatalaksana Kerja Terkait Pelaksanaan dan Pengawasan Operasional Perusahaan.
4. Alur Kerja Kewenangan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris dan Kewenangan Direksi yang Memerlukan Persetujuan RUPS Setelah Mendapatkan Tanggapan Tertulis Dari Dewan Komisaris.
5. Tata Tertib Rapat Direksi dan Dewan Komisaris (Rapat Pengawasan dan Rapat Konsultasi).

Pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris dan Direksi bersifat dinamis dan selalu berkembang, sehingga *Board Manual* perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan relevansinya sesuai kebutuhan Direksi dan Dewan Komisaris serta perkembangan Perusahaan. PJB melakukan penyempurnaan Tata Laksana Kerja bagi Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) setelah dilakukan revisi terakhir dan telah ditetapkan pada tanggal 25 November 2014. Beberapa hal yang mendasari penyesuaian *Board Manual* PJB adalah adanya perubahan peraturan yang menjadi landasan *Board Manual*, penyesuaian ketentuan terkait komunikasi antar organ untuk tetap menjamin efektivitas dan efisiensi pengambilan keputusan tetapi masih dalam koridor *business judgement process*. Penyesuaian yang lain adalah dengan mengeluarkan seluruh hal yang tidak memerlukan lintas persetujuan organ, sehingga diharapkan *Board Manual* ini lebih ringkas dan lebih efektif dalam implementasinya.

together with the Board of Directors set work guidelines known as the Board Manual. The Board Manual serves as guidelines for the two organs that explain the stages of activities in a structured, systematic, easy to understand, and consistent manner. The guideline is expected to support the implementation of the functions, duties and responsibilities of the Directors and Board of Commissioners in order to achieve the Company's Vision and Mission.

The Board Manual also regulates work relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors, where direct communication between the Board of Commissioners and the Board of Directors is performed at the Supervision Meeting held at least once a month and can be repeatedly held due to important needs. The Board of Directors can hold meetings by inviting the Board of Commissioners, namely the Consultation Meeting, in the condition that the Board of Directors considers necessary to consult with the Board of Commissioners. The Board Manual is also attached to the Board of Commissioners and Directors meetings. The Manual Board includes aspects including:

1. The Board Manual related to position.
2. The Board Manual related to Authority.
3. The Board Manual related to Implementation and Operational Supervision.
4. The workflow of Board of Directors Authority that requires Board of Commissioners' Approval and the Board of Directors Authority that Requires GMS Approval after the Written Responses from the Board of Commissioners.
5. Board of Directors and Board of Commissioners Meeting Regulations (Supervisory Meetings and Consultation Meetings).

The implementation of the functions of the Board of Commissioners and Board of Directors is dynamic and developing; therefore, the Board Manual is required to be regularly evaluated to ensure its relevance based on the needs of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as the Company's development. PJB improved the Board Manual after the last revision and was established on November 25, 2014. Some matters that underlie PJB Board Manual adjustments are changes in regulations that become the Board Manual's basis, adjustments related to communication between organs to ensure the effectiveness and efficiency of decision making but are still in the corridor of the business judgment process. Another adjustment is to issue all matters that do not require cross-organ approval, so that this Board Manual is expected to be more concise and more effective in its implementation



KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

POLICY ON COMPOSITION DIVERSITY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Bisnis yang dijalankan PJB cukup kompleks dan menyangkut kebutuhan masyarakat secara luas, sehingga diperlukan alternatif pemecahan masalah komprehensif dan efisien. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan dari berbagai bidang keilmuan dan kompetensi yang menyangkut bisnis PJB. Keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi diharapkan dapat menghasilkan paradigma dalam pengambilan keputusan menjadi lebih luas untuk memastikan efektifitas penerapannya dalam pencapaian tujuan Perusahaan.

PJB business is quite complex that involves large-scale social needs so that alternative solutions to comprehensive and efficient solutions are required. Therefore, approaches are required from various scientific fields and competencies concerning PJB business. The diversity of the composition of the members of the Board of Commissioners and Directors is expected to produce a broader paradigm in decision making to ensure the effectiveness of its implementation in achieving the Company's goals.

Kebijakan keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi PJB secara tertulis mengacu pada Anggaran Dasar, ketentuan Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan unsur keberagaman dari sisi pendidikan, keahlian, pengalaman kerja, jenis kelamin dan usia. Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi PJB Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

The policy on the composition diversity of PJB's Board of Commissioners and Board of Directors refers to the Articles of Association, Shareholder provisions, and applicable laws and regulations by considering the diversity of elements in terms of education, expertise, work experience, gender, and age. The diversity in the composition of PJB's Board of Commissioners and Board of Directors in 2019 are as follows:

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Composition Diversity of the Board of Commissioners

Nama Name	Jenis Kelamin Gender	Usia Age	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience
Sriyono Dwidjo Siswoyo	Laki-laki Male	60 tahun 60 years old	• S1 Teknik Sipil • <i>Master of Project Management</i> • Bachelor of Civil Engineering • Master of Project Management	• Kepala Divisi Pengembangan Organisasi PT PLN (Persero) • Direktur Utama PT PLN Batam • Direktur SDM PT PLN Batam • Manajer Senior Pengembangan Unit PLN • Head of Development Division of PT PLN (Persero) • President Director of PT PLN Batam • HC Director of PT PLN Batam • Senior Manager of PLN Development Unit
Defy Indiyanto Budiarto	Laki-laki Male	38 tahun 38 years old	• S1 Hubungan Internasional • S2 Ilmu Politik • Bachelor of International Relations • Master of Politics	• Komisaris Utama PT Rediss Papua • Direktur PT Definisi Bumi Resources • Komisaris Utama PT Wireless One Nusantara • General Manager PT Rediss Papua • Direktur PT Bara Inti Surya • Marketing Manager PT Rediss Papua • President Commissioner of PT Rediss Papua • Director of PT Definisi Bumi Resources • President Commissioner of PT Wireless One Nusantara • General Manager of PT Rediss Papua • Director of PT Bara Inti Surya • Marketing Manager PT Rediss Papua
Sunarsip	Laki-laki Male	47 tahun 47 years old	• S1/D4 Akuntansi (STAN) • S2 Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik	• <i>Strategic Advisor</i> • <i>Chief Economist</i> • Tenaga Ahli Dewan Komisaris • Komite Pemantau Manajemen Risiko • Tenaga Ahli Kementerian BUMN, Bidang Riset & Kebijakan

Nama Name	Jenis Kelamin Gender	Usia Age	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience
			• Bachelor of Accounting (STAN) • Master Program in Planning and Public Policy	• Kepala Bidang Data Kementerian BUMN • Staf Khusus Kepala Bidang Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan • Analisis Makro dan Fiskal Bidang Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan • Peneliti di Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akutansi Pemerintah, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan • Kepala Divisi Riset, Pusat Pengembangan Akutansi dan Keuangan, STAN • Auditor BAPEKSTA, Kementerian Keuangan • Strategic Advisor • Chief Economist • Expert Board of Commissioners • Risk Management Monitoring Committee • Ministry of SOE Expert, Research and Tech. & Policy Field • Head of Data Ministry of SOE • Special Staff of the Ministry of Finance's Head of Fiscal Policy Division • Macro and Financial Analyst of the Ministry of Finance's Fiscal Policy • Researcher at the Institute for Public Finance Review and Government Accounting, Financial Education and Training Agency • Head of Research Division, Accounting and Financial Development Center, STAN • BAPEKSTA Auditor, Ministry of Finance
Jisman P. Hutajulu	Laki-laki Male	53 tahun 53 years old	• S1 Elektro – Arus Kuat • S2 Manajemen • Bachelor of Electrical Engineering – integrated circuit • Master of Management	• Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan • Kepala Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Ketenagalistrikan • Kasubdit Harga Tenaga Listrik • Kasubdit Harga dan Subsidi Listrik • Kasubdit Standardisasi Ketenagalistrikan • Kasie Penyiapan Aturan Usaha Tenaga Listrik • Kasie Harga Jual Tenaga Listrik • Director of Electricity Program Development • Chief of Civil Servant Investigator (PPNS) in the Electricity Field • Head of Sub-Directorate of Electric Power Prices • Head of Sub-Directorate of Electricity Prices and Subsidies • Head of Sub-Directorate of Electricity Standardization • Head of Division for Preparation of Electricity Business Rules • Head of Division for Electricity Sales Price
Benny M.M. Marbun	Laki-laki Male	60 tahun 60 years old	• S1 Teknik Elektro • <i>Master of Engineering Science</i> • Bachelor of Electrical Engineering • Master of Engineering Science	• Kepala Divisi Niaga PT PLN (Persero) • General Manager PLN Wilayah Papua • Ahli Layanan Pelanggan • Spesialis Layanan Pelanggan • Manager PLN Cabang • Kepala Bagian Distribusi • Head of Commerce Division PT PLN (Persero) • General Manager of the Papua Regional PLN • Customer Service Expert • Customer Service Specialist • Branch Manager PLN • Head of Distribution Division



Nama Name	Jenis Kelamin Gender	Usia Age	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience
Hendra Iswahyudi	Laki-laki Male	51 tahun 51 years old	• S1 Teknik Fisika • S2 Perencanaan dan Kebijakan Publik • S3 Ekonomi • Bachelor of Engineering Physics • Master of Planning and Public Policy • Doctor of Economics	• Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan • Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi • Kepala Bagian Rencana dan Laporan • Staf - Dit Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan • Kasi Perhitungan Harga Tenaga Listrik - Dit Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan • Kepala Seksi Penyiapan Usaha - Ditjen LPE • Kasi Evaluasi Pemanfaatan Energi - Ditjen LPE • Pj. Kasi Evaluasi Konservasi Energi - Ditjen LPE • Director of Electricity Business Development • Director of Planning, Development of New, Renewable, and Energy Conservation Infrastructure • Head of Plan and Report Section • Staff - Directorate of Electricity Business Development • Head of Division for Calculation of Electricity Prices - Directorate of Electricity Business Development Guidance • Head of Business Planning Division - Directorate General of LPE • Head of Evaluation of Energy Utilization - Directorate General of LPE • PIC of Evaluation of Energy Conservation Head - Directorate General of LPE

Keberagaman Komposisi Direksi

Composition Diversity of the Board of Directors

Nama Name	Jenis Kelamin Gender	Usia Age	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience
Iwan Agung Firstantara	Laki-laki Male	50 tahun 50 years old	• S1 Teknik Mesin • S2 Bidang Manajemen • Bachelor of Mechanical Engineering • Master of Management	• Kepala Divisi Operasi Regional Sumatera • <i>General Manager</i> PLN Unit Pembangkitan Jawa-Bali • Head of Regional Operations Division of Sumatera • General Manager of PLN Jawa-Bali Power Generation Unit
Sugiyanto	Laki-laki Male	52 tahun 52 years old	• S1 Teknik Nuklir • S2 Teknik Mesin • Bachelor of Nuclear Engineering • Master of Mechanical	• <i>General Manager</i> PLN Unit Pembangkitan Sumatera Bagian Utara • General Manager of PLN Power Generation Unit in North Sumatera
Miftahul Jannah	Laki-laki Male	54 tahun 54 years old	• S1 Fisika • S2 Bidang Manajemen • Bachelor of Physics • Master of Management	• <i>General Manager</i> Unit Pembangkitan Muara Karang • <i>General Manager</i> PLN Jasa Sertifikasi • General Manager of Muara Karang Power generation Unit • General Manager of PLN Certification Services
Henky Heru Basudewo	Laki-laki Male	63 tahun 63 years old	• S1 Teknik Sipil • S2 Geo-Technical • Bachelor of Civil Engineering • Master of Geo-Technical Engineering	• Kepala Divisi Konstruksi dan IPP Jawa-bali • Direktur Utama PT RE • Head of Construction and IPP Jawa-Bali Division • President Director of PT RE
Tjutju Kurnia Sutjiningsih	Perempuan Female	60 tahun 60 years old	• S1 Ekonomi Perusahaan • Bachelor of Corporate Economics	• Kepala Divisi Perbendaharaan • Head of Treasury Division
Suharto	Laki-laki Male	58 tahun 58 years old	• S1 Teknik Listrik • S2 Bidang Kelistrikan • Bachelor of Electrical Engineering • Master of Electricity	• Kepala Kantor Induk Pusat Pendidikan dan Pelatihan • Kepala Divisi Pengembangan SDM & Talenta • Head of Education and Training Center at the Head Office • Head of HC & Talent Development Division

KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

REMUNERATION POLICY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Perusahaan memberikan apresiasi dan kompensasi atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang besar kepada Dewan Komisaris dan Direksi berupa remunerasi yang dapat diusulkan secara berkala setiap tahun dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan dengan pertimbangan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan, serta faktor lain (penghasilan Direksi & Dewan Komisaris di industri sejenis).

Kebijakan remunerasi dan pemberian fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/06/2016, Nomor PER-01/MBU/06/2017 dan NOMOR PER-06/MBU/06/2018 dan Nomor PER-01/MBU/05/2019.

The Company provides appreciation and compensation for the implementation of the large duties and responsibilities to the Board of Commissioners and Directors in the form of remuneration that can be proposed periodically every year in the General Meeting of Shareholders to obtain approval by considering business scale factors, business complexity factors, inflation rates, financial condition and capability of the company, and other factors (remunerations of Directors & Commissioners in similar industries).

Remuneration policy and other facilities for the Board of Commissioners and Directors refer to SOE Minister Regulation Number PER-04/MBU/2014 which has been amended several times by SOE Minister Regulation Number PER-02/MBU/06/2016, Number PER-01/MBU/06/2017 and NUMBER PER-06/MBU/06/2018 and Number PER-01/MBU/05/2019.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Board of Commissioners and Directors Remuneration Structure

Struktur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi PJB mengacu pada :

1. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/06/2016, Nomor PER-01/MBU/06/2017, Nomor PER-06/MBU/06/2018 dan Nomor PER-01/MBU/05/2019;
2. Keputusan Bersama antara Direktur PT Pembangkitan Jawa Bali dan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali Nomor 004.K/021/DIR/2017 dan 012.K/DK-PJB/2017 Tentang Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT PJB;
3. Keputusan Pemegang Saham melalui Surat Pemegang Saham Mayoritas Nomor 0899/MNJ.00.01/DIRUT/2019-R tanggal 01 Juli 2019 Perihal Penentuan Tantiem Tahun 2018 dan Remunerasi Tahun 2019 Direksi dan Dekom serta Dividen Tahun 2018 Anak Perusahaan PT PLN (Persero).

Berikut adalah struktur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi PJB:

PJB's Board of Commissioners and Directors Remuneration Structure refers to:

1. SOE Minister Regulation Number PER-04/MBU/2014 which has been amended several times by SOE Ministerial Regulation Number PER-02/MBU/06/2016, Number PER-01/MBU/06/2017, Number PER-06/MBU/06/2018 and Number PER-01/MBU/05/2019;
2. Joint Decree between the Director of PT Pembangkit Jawa Bali and Commissioner of PT Pembangkit Jawa Bali Number 004.K/021/DIR/2017 and 012.K/DK-PJB/2017 Regarding the Determination of the Remuneration of the Directors and Board of Commissioners of PT PJB;
3. Shareholder Decree through Majority Shareholders Letter Number 0899/MNJ.00.01/DIRUT/2019-R dated July 1, 2019 Regarding Determination of 2018 Tantiem and 2019 Remuneration for Directors and Board of Commissioners and 2018 Dividend for Subsidiaries of PT PLN (Persero).

The following is PJB's Board of Commissioners and Directors Remuneration Structure:



Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan Audit
Audited Financial Statements



Referensi Kriteria AR
ARA Criteria Reference

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remuneration Policy of the Board of Commissioners and the Board of Director

Komponen Remunerasi Remuneration Component	Dewan Komisaris Board of the Commissioners	Direksi Board of Directors
Gaji/Honorarium Salary/Honorarium	- Honorarium Komisaris Utama ditetapkan sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari Gaji Direktur Utama. - Honorarium Komisaris ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Honorarium Komisaris Utama. - The President Commissioner's salary is set at 45% (forty- five percent) of the President Director's Salary - The Commissioners' salary is set at 90% (ninety percent) of the President Commissioner's salary	- Gaji Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Pemegang Saham. - Gaji Direktur yang membidangi Sumber Daya Manusia ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Gaji Direktur Utama. - Gaji Direktur yang lain ditetapkan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari Gaji Direktur Utama. - The President Director's salary is set by using internal guidelines determined by the Shareholders - The salary of Director in charge of Human Capital is set at 90% (ninety percent) of the President Director's salary. - The salary of other Directors is set at 85% (eighty five percent) of the President Director's salary.
Tunjangan Cuti Tahunan dan Cuti Besar Annual Leave and Collective Leave Benefits	Tidak diberikan Not granted	Tidak diberikan Not granted
Fasilitas /Tunjangan Perumahan Facility/Housing Benefit	-	1 (satu) Rumah Jabatan beserta perlengkapan pemeliharaan, utilitas, dan pengamanannya ditanggung sepenuhnya oleh Perusahaan 1 (one) Housing facility and its appliances maintenance, utilities, and security equipment are granted entirely by the Company
Tunjangan Transportasi Transportation Benefits	Tunjangan transportasi diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Honorarium masing-masing anggota Dewan Komisaris. Transportation allowance is provided at 20% (twenty percent) of the Salary of each member of the Board of Commissioners.	-
Asuransi Purna Jabatan Retirement Insurance	Ketentuan mengenai asuransi purna jabatan anggota Direksi mutatis mutandis berlaku bagi penetapan asuransi purna jabatan anggota Dewan Komisaris. The provisions regarding retirement insurance for members of the Board of Directors apply, mutatis mutandis, to the determination of retirement insurance for the members of the Board of Commissioners.	Asuransi purna jabatan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Direksi yang statusnya definitif. 2. Tidak diberikan untuk anggota Direksi yang berstatus pegawai PT PLN (Persero) atau pegawai Anak Perusahaan PT PLN (Persero). 3. Premi yang ditanggung oleh perusahaan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari Gaji dalam satu tahun. 4. Pemberian premi, iuran atau istilah lain yang relevan untuk asuransi purna jabatan, sudah termasuk di dalamnya premi untuk asuransi kecelakaan dan kematian . Retirement insurance is provided with the following conditions: 1. Definitive directors. 2. Not granted to members of the Board of Directors with PT PLN (Persero) or PT PLN (Persero) Subsidiaries employee status. 3. The premium granted by the company is at most 25% (twenty five percent) of the salary in one year. 4. Premiums, contributions or other terms relevant to retirement insurance include the premiums for life insurance.

Komponen Remunerasi Remuneration Component	Dewan Komisaris Board of the Commissioners	Direksi Board of Directors
Fasilitas Kendaraan Vehicle Facility	-	Anggota Direksi hanya berhak atas 1 (satu) Fasilitas kendaraan dari perusahaan. Fasilitas kendaraan termasuk di dalamnya biaya pemeliharaan dan operasional diberikan dengan memperhatikan kondisi keuangan perusahaan. Members of the Board of Directors are only provided 1 (one) vehicle facility from the company. Vehicle facility including maintenance and operational costs are granted by considering the financial condition of company.
Fasilitas Kesehatan Healthcare Allowances	Ketentuan mengenai Fasilitas kesehatan anggota Direksi, mutatis mutandis berlaku bagi Fasilitas kesehatan anggota Dewan Komisaris. Provisions regarding health facilities for the Board of Directors members, mutatis mutandis apply to health facilities for the Board of Commissioners members.	Fasilitas kesehatan diberikan berupa : a) Rawat jalan dan obat; b) rawat inap dan obat; dan c) <i>medical check up</i> . Healthcare allowances are provided as follows: a) Outpatient care and medication; b) Hospitalization and medication; and c) Medical check-up
Fasilitas Bantuan Hukum Legal Service Facilities	Ketentuan mengenai Fasilitas bantuan hukum anggota Direksi dan mantan anggota Direksi, mutatis mutandis berlaku bagi Fasilitas bantuan hukum bagi anggota Dewan Komisaris serta mantan anggota Dewan Komisaris. Provisions regarding legal service facilities for members and the former members of the Board of Directors, mutatis mutandis, apply to legal service facilities for members and former members of the Board of Commissioners.	Fasilitas bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembiayaan jasa kantor pengacara/konsultan hukum yang meliputi proses pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa di lembaga peradilan. Legal service facilities are granted in the form of financing the services of a lawyer's firm/legal consultant which covers the investigation process as witnesses, suspects, and defendants at the judicial institution.
Tantiem/Insentif Kinerja Tantiem/Performance Incentive	Tantiem ditetapkan oleh Pemegang Saham dengan komposisi besaran Komisaris Utama 45% dari Direktur Utama; dan Anggota Komisaris sebesar 90% dari Komisaris Utama. Tantiem is determined by the Shareholders with a composition of president Commissioner is granted 45% of the President Director; and the members of the Board of Commissioners are granted 90% of the President Commissioner	Tantiem ditetapkan oleh Pemegang Saham dengan komposisi besaran Direktur yang membidangi Sumber Daya Manusia 90% dari Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya 85% dari Direktur Utama. Tantiem is determined by the Shareholders with a composition of The members of the Board of Directors in charge of Human Capital are granted 90% from the President Director and other Directors are granted 85% from the President Director

Prosedur Usulan Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Proposal Procedure for Determining The Remuneration for The Board of Commissioners and The Board of Directors

Kebijakan remunerasi diimplementasikan dengan prinsip kehati-hatian, wajar dan transparan. Remunerasi diusulkan dan dikaji melalui beberapa tahap khususnya di level fungsi pengawasan sebagai perwakilan pemegang saham sampai kemudian ditetapkan dalam RUPS. Mekanisme pemberian remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Remuneration policy is implemented with the principle of prudence, fairness and transparency. Remuneration is proposed and reviewed through several stages, especially at the level of the supervisory function as a shareholder representative until later stipulated in the GMS. The mechanism of providing remuneration for the Board of Commissioners and Directors is as follows:



Keterangan:

1. Direksi mengajukan usulan remunerasi kepada Dewan Komisaris melalui Komite SDM dan Organisasi.
2. Komite SDM dan Organisasi melakukan penelaahan atas kompensasi yang diberikan di pasar untuk pekerjaan yang bersangkutan pada perusahaan lainnya dengan bidang usaha dan status yang sama. Dengan memperhitungkan kinerja usaha perusahaan dan kontribusi masing-masing individu, kemudian dilakukan pembahasan oleh Komite SDM & Organisasi untuk menyiapkan rekomendasi.
3. Dewan Komisaris melakukan pembahasan lanjutan dan persetujuan atas usulan remunerasi yang diajukan.
4. Usulan remunerasi disampaikan kepada pemegang saham untuk mendapat persetujuan dan penetapan.
5. Pemegang Saham memberikan persetujuan dan menetapkan remunerasi melalui RUPS.

Description:

1. The Board of Directors submits the remuneration proposal to the Board of Commissioners through the HC and Organization Committee.
2. The HC and Organization Committee reviews the compensation provided in the market for the work concerned in other companies with the same business field and status. By considering the company's business performance and the contribution of each individual, a discussion is then conducted by the HC & Organization Committee to prepare a recommendation.
3. The Board of Commissioners conducts a further discussion for the approval of the proposed remuneration.
4. The remuneration proposal is then delivered to shareholders for approval and determination.
5. Shareholders approve and determine remuneration through the GMS.

Indikator Usulan Penetapan Remunerasi Bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Proposal Indicator for Determining The Remuneration for The Board of Commissioners and The Board of Directors

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi PJB memperhatikan indikator yang dalam menjadi dasar perumusan usulan remunerasi mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 tentang pedoman penetapan penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagai berikut:

1. Faktor skala usaha.
2. Faktor kompleksitas usaha.
3. Tingkat inflasi.
4. Kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan.
5. Faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Penetapan Penghasilan berupa gaji/honorarium dan tantiem akan dilakukan oleh Pemegang Saham dan disampaikan melalui surat penetapan. Sedangkan untuk tunjangan dan fasilitas diberikan berdasarkan Keputusan Bersama Direksi Dewan Komisaris dengan mengacu kepada Permen BUMN No PER-01/MBU/06/2017 tentang Perubahan Kedua Permen BUMN No PER-04/MBU/2014 juncto Permen BUMN No PER-02/MBU/2016 tentang Perubahan Atas Permen BUMN No PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Remuneration of PJB's Board of Commissioners and Board of Directors refers to the State-Owned Enterprises Ministry Regulation No: PER-04/MBU/2014 on guidelines for determining the remuneration for Board of Directors, Board of Commissioners, and State-Owned Enterprises Supervisory Board as follows:

1. Business scale.
2. Business complexity.
3. Inflation rate
4. Financial conditions and capabilities of Company.
5. Other relevant factors that do not conflict with the laws and regulations.

Furthermore, The Determination of Remuneration in the form of salary/honorarium and tantiem will be conducted by the Shareholders and submitted through a decree. While the benefits and facilities are provided by the Joint Decree of the Board of Directors with The Board of Commissioners, with reference to State-Owned Enterprise (SOE) Ministry Regulation No. PER-01/MBU/06/2017 regarding the Second Amendment of State-Owned Enterprises Ministry Regulation No. PER-04/MBU/2014 juncto State-Owned Enterprises Ministry Regulation No. PER-02/MBU/2016 concerning Amendments to State-Owned Enterprises Regulation No. PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining Remuneration for Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of State-Owned Enterprises.



Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Total Remuneration for The Board of Commissioners and The Board of Directors

Pemegang saham menetapkan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi PJB tahun 2019 melalui Surat Keputusan Pemegang Saham Mayoritas PJB No. 0899/MNJ.00.01/DIRUT/2019-R tanggal 01 Juli 2019. Rincian remunerasi untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi adalah sebagai berikut :

Shareholders determine total remuneration for the Board of Commissioners and Directors of PJB in 2019 through the PJB Majority Shareholder Decree No. 0899/MNJ.00.01/DIRUT/2019-R dated July 1, 2019. The remuneration details for each member of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors are as follows:

Remunerasi Dewan Komisaris

Remuneration for The Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Remunerasi Bulanan Monthly Remuneration			Tunjangan Tahunan Annual Allowances	Honorarium dan Tunjangan 2019 (Rp) Salary and Allowances 2019 (Rp)	Tantiem (Rp) (Pembayaran Bulan Juli 2019) Tantiem (Rp) (Per July 2019)
		Honor Per Bulan (Rp) Salary per Month (Rp)	Tunjangan Transport Per Bulan (Rp) Transportation Allowance Per Month (Rp)	Total (Rp) Total (Rp)	THR (Rp) Annual Religious Holiday Allowance (Rp)		
Sriyono Dwidjo Siswoyo	Komisaris Utama President Commissioner	60.750.000	12.150.000	72.900.000	60.750.000	133.650.000	669.375.000
Defy Indiyanto Budiarto	Komisaris Commissioner	54.675.000	10.935.000	65.610.000	54.675.000	120.285.000	595.000.000
Sunarsip	Komisaris Commissioner	54.675.000	10.935.000	65.610.000	54.675.000	120.285.000	595.000.000
Alihuddin Sitompul ¹	Komisaris Commissioner	54.675.000	10.935.000	65.610.000	-	65.610.000	595.000.000
Jisman P. Hutajulu ²	Plt. Komisaris Acting Commissioner	54.675.000	10.935.000	65.610.000	54.675.000	120.285.000	-
Benny M.M. Marbun	Plt. Komisaris Acting Commissioner	54.675.000	10.935.000	65.610.000	54.675.000	120.285.000	595.000.000
Hendra Iswahyudi	Plt. Komisaris Acting Commissioner	54.675.000	10.935.000	65.610.000	54.675.000	120.285.000	595.000.000

Keterangan:

- Menjabat sebagai Komisaris Perusahaan sampai dengan bulan Maret 2019, sehingga tidak dibayar THR
- Menjabat sebagai Komisaris Perusahaan mulai bulan Maret 2019, sehingga tidak mendapat tantiem

Remarks:

- Served as Company Board of Commissioner until March 2019, so as the Religious Holiday Allowance did not paid
- Served as Company Board of Commissioner until March 2019, so as the tantiem did not provided

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remuneration Policy of the Board of Commissioners and the Board of Director

Remunerasi Direksi

Remuneration for The Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Remunerasi Bulanan Monthly Remuneration			Tunjangan Tahunan Annual Allowances		Gaji dan Tunjangan 2019 (Rp) Salary and Allowances 2019 (Rp)	Tantiem (Rp) (Pembayaran Bulan Juli 2019) Tantiem (Rp) (Per July 2019)
		Gaji Perbulan (Rp) Salary per Month (Rp)	Tunjangan Transport Per Bulan (Rp) Transportation Allowance Per Month (Rp)	Total (Rp) Total (Rp)	THR (Rp) Annual Religious Holiday Allowance (Rp)	Tunjangan Cuti Tahunan (Rp) Tuition Cuti Tahunan (Rp)		
Iwan Agung Firstantara	Direktur Utama President Director	135.000.000	-	135.000.000	135.000.000	-	270.000.000	1.487.500.000
Sugiyanto	Plt. Direktur Operasi- 1 Act. Director of Operations - 1	114.750.000	-	114.750.000	114.750.000	-	229.500.000	1.285.200.000
Miftahul Jannah	Direktur Operasi - 2 Director of Operations-2	114.750.000	-	114.750.000	114.750.000	-	229.500.000	1.285.200.000
Henky Heru Basudewo	Direktur Pengembangan dan Niaga Director of Business Development & Commerce	114.750.000	-	114.750.000	114.750.000	-	229.500.000	1.285.200.000
Tjutju Kurnia Sutjiningsih	Direktur Keuangan Director of Finance	114.750.000	-	114.750.000	114.750.000	-	229.500.000	1.285.200.000
Suharto	Direktur SDM dan Administrasi Director of Human Capital and Administration	121.500.000	-	121.500.000	114.750.000	-	236.250.000	1.285.200.000

Bonus Non Kinerja dan Opsi Saham Dewan Komisaris dan Direksi Non-Performance Bonuses and Stock Options of The Board of Commissioners and The Board of Directors

Sampai dengan akhir tahun 2019, tidak terdapat bonus non kinerja dan opsi saham yang diberikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Until the end of 2019, there are no non-performance bonuses and stock options provided to the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

KOMITE AUDIT

AUDIT COMMITTEE

Dewan Komisaris membentuk Komite Audit dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, khususnya terkait *oversight* (pengawasan) atas kualitas dan integritas pelaporan keuangan Perseroan serta efektifitas sistem pengendalian internal. Tugas utama Komite Audit adalah memantau dan memastikan berjalannya fungsi-fungsi yang berhubungan dengan audit dan pengendalian internal Perusahaan secara profesional, independen. Komite Audit diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

The Board of Commissioners established an Audit Committee to assist the implementation of its duties and responsibilities, specifically related to the quality and integrity oversight of the Company's financial reporting and the effectiveness of the internal control system. The main task of the Audit Committee is to monitor and ensure the audit and internal control functions of the Company professionally and independently. The Audit Committee is appointed and dismissed and responsible directly to the Board of Commissioners.

Dasar Pembentukan Komite Audit

Establishment Basis of the Audit Committee

Komite Audit dibentuk dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012. Komite Audit PJB terakhir kali ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 001.K/DK/PJB/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pembentukan Komite Audit pada Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali sebagai pemutakhiran dari Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 005.K/DK/PJB/2018 tanggal 20 Agustus 2018 tentang Perpanjangan Masa Tugas Komite (Komite Audit, Komite Manajemen Risiko & Kepatuhan dan Komite SDM & Organisasi) Pada Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali.

The Audit Committee was formed by referring to Law Number 19 of 2003; Law Number 40 of 2007 and SOE Ministry Regulation Number: PER-12 / MBU / 2012 on August 24, 2012. PJB's Audit Committee was last determined based on the Decree of the Board of Commissioners Number: 001.K / DK / PJB / 2019 on January 2, 2019, concerning the Establishment of the Audit Committee on the Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa Bali to revise the Decree of the Board of Commissioners Number: 005.K / DK / PJB / 2018 on August 20, 2018, concerning Extension of the Term of Office of the Committees (Audit Committee, Risk & Compliance Management Committee, and HC and Organization Committee) on the Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa Bali.

Susunan Komite Audit

Audit Committee Composition

Komite Audit PJB dipimpin oleh seorang Ketua yang merupakan anggota Dewan Komisaris Independen dan dibantu oleh Wakil Ketua, Sekretaris merangkap anggota serta setidaknya 2 (dua) orang anggota. Susunan Komite Audit Perusahaan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

PJB's Audit Committee is led by a Chairperson who is a member of the Independent Board of Commissioners and is assisted by a Vice-Chairperson, Secretary concurrently as a member, and at least 2 (two) members. The composition of the Company's Audit Committee in 2019 is as follows:

Susunan Komite Audit
Audit Committee Composition

Nama Name	Jabatan Position	Keahlian Expertise	Periode Jabatan Term of Office
Sunarsip	Ketua Chairperson (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Akuntansi, Keuangan dan Audit Accounting, Finance and Audit	Januari - Desember 2019 January - December 2019
Defy Indiyanto Budiarto	Wakil Ketua Vice Chairperson (Komisaris) (Commissioner)	Komunikasi Korporat, Strategi Korporasi Corporate Communication, Corporate Strategy	Januari - Desember 2019 January - December 2019
Sigit Djalul Purwoko	Sekretaris Secretary (Pihak Independen) (Independent Party)	Manajemen <i>Strategic</i> , <i>Internal Auditing</i> , dan Eksaminasi <i>Fraud</i> . Strategic Management, Internal Auditing, and Fraud Examination.	Januari - Desember 2019 January - December 2019
Andar Sudiar Sukma	Anggota Member (Pihak Independen) (Independent Party)	Hukum/Kepatuhan, <i>Internal Auditing</i> , dan Eksaminasi <i>Fraud</i> . Law / Compliance, Internal Auditing, and Fraud Examination.	Januari - Desember 2019 January - December 2019



Profil Anggota Komite Audit Profile of Member of Audit Committees



Sunarsip

Ketua Komite Audit
Chairperson of Audit Committee

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
The profile can be seen in the Board of Commissioners Profile section.



Defy Indiyanto Budiarto

Wakil Ketua Komite Audit
Vice Chairperson of Audit Committee

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
The profile can be seen in the Board of Commissioners Profile section.



Sigit Djal Purwoko

Sekretaris Komite Audit
Secretary of Audit Committee

Warga Negara Indonesia, 60 tahun, berdomisili di Jakarta.

Dasar Pengangkatan

Diangkat berdasarkan SK Dewan Komisaris Nomor: 005.K/DK/PJB/2018 tanggal 20 Agustus 2018 diperpanjang dengan SK Dewan Komisaris Nomor: 001.K/DK/PJB/2019 tanggal 2 Januari 2019.

Pendidikan

Menyelesaikan pendidikan S1 Elektroteknik dari Institut Teknologi Bandung tahun 1984; S2 Bidang Manajemen Pemasaran dari STIE IPWI Jakarta tahun 2001 dan S3 Bidang Ekonomi Bisnis dari Universitas Padjajaran tahun 2014. Selain itu, pendidikan non-formal yang pernah diikuti untuk mendapatkan sertifikasi diantaranya Sertifikasi *Advance to Integration/Requirements For Certification As Established In The CRMP Body Of Knowledge For Professional* (2012-2014), *Qualified Internal Auditor (QIA)* (2004), *Certified Fraud Examiner (CFE)* (2006), *Certified Risk Management Professional (CRMP)* (2010) dan *Certified Forensic Auditor (CFrA)* (2014).

Riwayat Pekerjaan

Mulai berkarir sebagai Pegawai PLN sejak tahun 1984, Kepala Bagian Teknik di PLN (1987-1992), Kepala Cabang PLN (1992-2001), Manager Area PLN (2001), Manajer Distribusi dan Pemasaran (2001-2003), *Advance Audit Khusus SPI PLN Kantor Pusat* (2003-2008), *Manager Senior Kinerja Distribusi Jawa Bali* (2008-2009), Kepala Audit Internal (KAI) PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten (2009-2010), Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan SPI PLN Kantor Pusat (2010-2012), *Expert Audit III* (2012-2015) dan Pelaksana Tugas Kepala Satuan Pengawasan Intern PLN Kantor Pusat (2015). Setelah pensiun pada 1 Mei 2015, diminta oleh Direksi PT PLN (Persero) sebagai *Expert Audit I, II, dan III* untuk pembinaan dan pengembangan SPI PT PLN (Persero) dari 196 Auditor menjadi 1000 Auditor *fresh graduate* pada 31 Desember 2017. Pada masa itu juga menjabat sebagai Inspektur Satuan Pengawasan Intern PT PLN (Persero) Regional Kantor Pusat (2016-2017).

Indonesian Citizen, 60 years old, based in Jakarta.

Decree of Appointment

Appointed based on the Board of Commissioners' Decree Number: 005.K / DK / PJB / 2018 on August 20, 2018, extended by the Board of Commissioners' Decree Number: 001.K / DK / PJB / 2019 on January 2, 2019.

Education

Graduated with a Bachelor's degree in Electrical Engineering from the Bandung Institute of Technology in 1984; S2 in Marketing Management from STIE IPWI Jakarta in 2001 and S3 in Business Economics from Padjadjaran University in 2014. Also, non-formal education to obtain certification includes *Advance to Integration/Requirements for Certification as Established in the CRMP Body Of Knowledge For Professional* (2012-2014), *Qualified Internal Auditor (QIA)* (2004) Certification, *Certified Fraud Examiner (CFE)* (2006), *Certified Risk Management Professional (CRMP)* (2010) and *Certified Forensic Auditor (CFrA)* (2014).

Work Experiences

Started career as a PLN employee since 1984, Head of Engineer at PLN (1987-1992), Head of PLN Branch (1992-2001), PLN Area Manager (2001), Manager of Distribution and Marketing (2001-2003), *Advance Special Audit* at IAU PLN Head Office (2003-2008), Senior Manager of Java-Bali Distribution Performance (2008-2009), Head of Internal Audit in West Java and Banten PLN Distribution (2009-2010), Head of Development at IAU PLN Head Office (2010-2012), *Audit Expert III* (2012-2015) and Interim Officer of Head of Internal Control Unit at PLN Head Office (2015). After retired on May 1, 2015, he was asked by the Board of Directors of PT PLN (Persero) to be an Audit Expert I, II, and III to develop IAU PT PLN (Persero) from 196 auditors to 1000 fresh graduate auditor on December 31, 2017. He was also appointed as Internal Audit Unit Inspectorate at PT PLN (Persero) Head Office Region (2016-2017).



Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan Audit
Audited Financial Statements



Referensi Kriteria AR
ARA Criteria Reference



Andar Sudiar Sukma

Anggota Komite Audit
Member of Audit Committee

Warga Negara Indonesia, 39 tahun, berdomisili di Jakarta.

Dasar Pengangkatan

Diangkat berdasarkan SK Dewan Komisaris Nomor: 005.K/DK/PJB/2018 tanggal 20 Agustus 2018 diperpanjang dengan SK Dewan Komisaris Nomor: 001.K/DK/PJB/2019 tanggal 2 Januari 2019.

Pendidikan

Menyelesaikan pendidikan S1 Hukum dari Universitas Indonesia tahun 2004. Selain itu, pendidikan non-formal yang pernah diikuti untuk mendapatkan sertifikasi diantaranya *Certified Fraud Examiner* (CFE) (2012), kandidat *Certified Risk Management Professional* (CRMP) (2016), *Certified Governance Profesional* (CGP) (2019), dan *Certified on Committee Audit Practice* (CACP) (2019) serta telah memiliki lisensi untuk menjalankan Profesi Advokat (2018).

Riwayat Pekerjaan

Pernah berkarir sebagai *Good Corporate Governance* (GCG) *Associate Consultant* Sofyan Djalil & Partner (2004-2005), *Executive Compliance* PT Prudential Life Assurance (Life Insurance) (2005-2006), *Resident Auditor* dan Auditor Internal untuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2006-2014), Manajer Hukum Perikatan Bisnis PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2014-2015), *Legal Head/GM Legal* untuk PT Transjakarta (2015-2016), *Associate Director* PT Sinergi Daya Prima (SDP Consulting) (2016-2018) dan Komite Manajemen Risiko & Kepatuhan PT Pembangkitan Jawa-Bali (2016 -2017).

Indonesian Citizen, 39 years old, based in Jakarta.

Decree of Appointment

Appointed based on the Board of Commissioners' Decree Number: 005.K / DK / PJB / 2018 on August 20, 2018 extended by the Board of Commissioners' Decree Number: 001.K / DK / PJB / 2019 on January 2, 2019.

Education

He earned a Bachelor of Law from the University of Indonesia in 2004. Also, non-formal education to obtain certification includes Certified Fraud Examiner (CFE) (2012), candidates for Certified Risk Management Professional (CRMP) (2016), Certified Governance Professional (CGP) (2019), and Certified on Committee Audit Practice (CACP) (2019) and already has a license to carry out the Advocate Profession (2018).

Work Experiences

Had Career As Good Corporate Governance (GCG) Associate Consultant (2004-2005), Executive Compliance At PT Prudential Life Assurance (Life Insurance) (2005-2006), Resident Auditor And Internal Auditor at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2006-2014), Manager of Business Engagement Legal at PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2014-2015), Legal Head at PT Transjakarta (2015-2016), Associate Director at PT Sinergi Daya Prima (SDP Consulting) (2016-present) and Risk Management & Compliance Committee at PT Pembangkitan Jawa-Bali (2016 -2017).



Masa Jabatan Komite Audit

Term of Office of Audit Committee

Masa jabatan Komite Audit ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris yaitu 1 (satu) tahun. Masa jabatan Komite Audit dapat diperpanjang mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris. Sedangkan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris menjabat paling lama 2 (dua) tahun diangkat untuk 1 (satu) periode masa jabatan, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali pada masa jabatan berikutnya.

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PJB dan dilaporkan kepada RUPS. Pemberhentian anggota Komite Audit dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatannya dan dapat pula diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris apabila tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya.

The term of office of the Audit Committee is determined based on a Decree of the Board of Commissioners of 1 (one) year. The term of office of the Audit Committee can be extended following the term of office of the Board of Commissioners. While members of the Audit Committee who are not members of the Board of Commissioners have a maximum term of 2 (two) years for 1 (one) term of office and can be reappointed for 1 (one) more period in the next term.

The appointment and dismissal of members of the Audit Committee are based on the PJB Board of Commissioners' Decree and reported to the GMS. Dismissal of members of the Audit Committee can be carried out if the person concerned ends his term of office and can also be dismissed based on the decision of the Board of Commissioners if it does not meet the established performance and/or is not competent in carrying out his duties.

Independensi Komite Audit

Independence of the Audit Committee

Komite Audit harus memenuhi kriteria independensi serta mampu melaksanakan tugasnya secara independen, semata-mata untuk kepentingan Perseroan, terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan Perusahaan.

The Audit Committee must meet the independence criteria and perform its duties independently for the benefit of the Company, regardless of the influence of various parties with a conflict of interests against the Company.

Kriteria Independensi	Independence Criteria	Sunarsip	Defy Indiyanto Budiarto	Sigit Djalur Purwoko	Andar Sudiar Sukma
Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit dan non-audit atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.	Not a person in a public accounting firm, legal consulting institution, or other parties providing audit and non-audit services or other consulting services to the Company within the past 6 (six) months.	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung di Perusahaan.	Not having any share either directly or indirectly in the Company.	✓	✓	✓	✓
Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan/atau mengendalikan Perusahaan dalam waktu enam bulan terakhir.	Not a person who has the authority and responsibility to plan, lead, and/or control the Company within the past six months.	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun ke samping atau hubungan semenda.	Not family-affiliated with any member of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners up to the second degree, either in a straight line or sideways or in a relationship.	✓	✓	✓	✓

Kriteria Independensi	Independence Criteria	Sunarsip	Defy Indiyanto Budiarto	Sigit Djalur Purwoko	Andar Sudiar Sukma
Tidak mempunyai hubungan usaha langsung dan tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan; dan	Not having direct and indirect business relationships related to the Company's business activities; and	✓	✓	✓	✓
Tidak sedang berada dalam institusi yang kegiatan usahanya memberikan jasa kepada Perusahaan.	Not serving in an institution whose business activities provide services to the Company.	✓	✓	✓	✓
Komite Audit telah memenuhi kriteria independen dan mampu melaksanakan tugas secara independen, semata-mata untuk kepentingan Perseroan, terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan Perusahaan. The Audit Committee has fulfilled the independent criteria to perform its duties independently for the benefit of the Company, regardless of the influence of various parties with a conflict of interests against the Company.					

Pedoman Kerja Komite Audit Audit Committee Charter

Dewan Komisaris telah menetapkan pedoman kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas Komite Audit yang disebut Piagam Komite Audit pada tanggal 31 Desember 2018. Piagam Komite Audit memuat ketentuan antara lain: Maksud dan Tujuan, Fungsi dan Tugas Pokok dan Tanggung Jawab, Wewenang, Organisasi dan Keanggotaan, Penilaian Kinerja Anggota Komite, Pertemuan/rapat dan Kode Etik.

Piagam Komite Audit dikaji ulang secara berkala guna memastikan bahwa cakupan pedoman tersebut senantiasa sejalan dengan kebutuhan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *best practices*.

The Board of Commissioners has established work guidelines to support the implementation of the Audit Committee's tasks or the Audit Committee Charter on December 31, 2018. The Audit Committee Charter covers the provisions including Purpose and Objectives, Main Functions and Duties and Responsibilities, Authority, Organization and Membership, Assessment Committee Members' Performance, Meetings, and the Code of Conduct.

The Audit Committee Charter is regularly reviewed to ensure that the scope of the guidelines is always in line with needs, applicable laws and regulations, and best practices.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit Tasks and Responsibilities of the Audit Committee

Komite Audit PJB secara umum bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Pelaksanaan tugas Komite Audit mengacu pada Piagam Komite Audit sebagai pedoman kerjanya. Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Audit terdiri dari:

1. Membuat program/rencana kerja tahunan yang berisi rencana kegiatan, jadwal dan penggunaan sumber daya.
2. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Dewan Komisaris mengenai kegiatan Komite Audit.
3. Menyampaikan dengan segera temuan hasil pemeriksaan Auditor Eksternal maupun Internal yang potensial dan signifikan.

PJB's Audit Committee has generally the task of assisting the Board of Commissioners in monitoring and evaluating audit planning and implementation as well as monitoring the follow-up of audit results to assess the adequacy of internal control including adequacy of the financial reporting process. The implementation of the duties of the Audit Committee refers to the Audit Committee Charter as a working guideline. The tasks and responsibilities of the Audit Committee consist of:

1. Preparing a program / annual work plan that contains a plan of activities, schedule, and use of resources.
2. Submitting regular reports to the Board of Commissioners regarding the activities of the Audit Committee.
3. Immediately submit potential and significant findings of the examination of External and Internal Auditors.

4. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai tindak lanjut hasil pemeriksaan Auditor, terutama temuan potensial dan signifikan yang belum ditindaklanjuti secara tuntas.
5. Menelaah Laporan Keuangan Perusahaan dan Informasi Keuangan lainnya yang akan disampaikan kepada pemegang saham.
6. Memberikan saran dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang terkait dengan tugas Dewan Komisaris antara lain melakukan *review/evaluasi* internal audit *charter*, kinerja dan efektivitas kegiatan SPI, kecukupan SDM SPI serta struktur organisasi SPI.
7. Mengusulkan kepada Dewan Komisaris agar Direksi menugaskan kepada SPI untuk melaksanakan pemeriksaan tertentu/pemeriksaan khusus.
8. Menyampaikan usulan dalam proses penetapan Auditor Eksternal (Kantor Akuntan Publik) yang akan melakukan audit.
9. Menyampaikan usulan kepada Dewan Komisaris untuk memasukkan hal-hal strategis dalam ruang lingkup pemeriksaan, dalam penyusunan PKAT SPI PJB.

4. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the follow-up of the Auditor's examination results, especially potential and significant findings that have not been followed up completely.
5. Reviewing the Company's Financial Statements and other Financial Information that will be submitted to shareholders.
6. Advising and recommending to the Board of Commissioners concerning the tasks of the Board of Commissioners which are reviewing/evaluating the internal audit charter, performance, and effectiveness of IAU activities, sufficiency in IAU Human Capital, and its organizational structure.
7. Proposing to the Board of Commissioners so that the Board of Directors assigned IAU to conduct certain audits/special audit.
8. Presenting proposal in the appointment process of the External Auditor (Public Accounting Firm) that will conduct the audit
9. Presenting the proposal to the Board of Commissioners to add strategic matters within inspection scope in conducting Audit Committee Working Program of PJB IAU

Rencana Program Kerja Komite Audit Audit Committee Work Plan

Komite Audit telah menyusun rencana program kerja Komite Audit tahun 2019 dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugasnya, sebagai berikut :

1. Kegiatan rutin yang terdiri dari :
 - a. Kegiatan internal Komite Audit yang mencakup :
 - 1) Evaluasi Laporan Manajemen dan Kinerja Korporat.
 - 2) Penyiapan surat Dewan Komisaris sesuai bidang tugas Komite Audit.
 - 3) Melakukan *monitoring* KPI Dewan Komisaris dan *monitoring* arahan Dewan Komisaris serta Pemegang Saham sesuai RUPS.
 - 4) Penyiapan dan penyampaian Laporan Kinerja Komite Audit.
 - b. Kegiatan Koordinasi Komite Audit Dengan Satuan Pengawasan Intern (SPI), mencakup :
 - 1) Review dan Evaluasi Program Kerja Audit Tahunan (PKAT).
 - 2) Pembahasan berkala mengenai Hasil Audit SPI dan Hasil Audit Eksternal.
 - 3) Supervisi terhadap pelaksanaan *Risk Based Audit* (RBA), evaluasi pengendalian internal korporat, implementasi *Quality Assurance Review*, dan Fungsi SPI diluar Audit.
 - 4) Kordinasi dengan Kantor Akuntan Publik (KAP), SPI PT PLN (Persero) dan auditor eksternal lainnya.
2. Kegiatan Khusus/Non Rutin yang terdiri dari :
 - a. *Review* dan pengkinian atas dokumen Piagam Komite Audit.

The Audit Committee has prepared a plan for the Audit Committee's work program in 2019 to support the effectiveness of carrying out its duties, as follows:

- 1) Routine activities consisting of:
 - a) Internal Audit Committee activities that include:
 - i) Evaluate Management and Corporate Performance Reports.
 - ii) Preparation of the Board of Commissioners' letter following the duties of the Audit Committee.
 - iii) Monitoring the Board of Commissioners KPI and monitoring the direction of the Board of Commissioners and Shareholders following the GMS.
 - iv) Preparing and submitting the Audit Committee Performance Report.
 - b) The activity of Audit Committee Coordination with Internal Audit Unit, include:
 - i) Review and Evaluation of the Annual Audit Work Program (PKAT).
 - ii) Periodic discussion on IAU's Audit Results and External Audit Results.
 - iii) Supervision of the implementation of Risk-Based Audit (RBA), evaluation of corporate internal control, implementation of Quality Assurance Review, and SPI functions outside of Audit.
 - iv) Coordination with the Public Accounting Firm (PAF), PT PLN (Persero) IAU, and other external auditors.
- 2) Special/Non-Routine Activities consist of:
 - a) Review and update the Audit Committee Charter documents.

- b. Review dan Evaluasi atas program korporat tahun 2019 dibidang Akuntansi dan keuangan.
 - c. Review dan Evaluasi atas isu/program operasional korporat tahun 2019 dibidang *Equivalent Availability Factor* (EAF) Pembangkit Eksisting, serta dampak penerapan coal switching pada pembangkit eksisting.
 - d. Review dan Evaluasi mengenai penerapan *Three Line of Defence* di Perseroan
 - e. Evaluasi atas rencana korporat untuk melaksanakan *Internal Control for Financial Reporting* (ICoFR)
 - f. Kunjungan lapangan ke pembangkit-pembangkit milik dan yang dikelola oleh Perseroan
 - g. Koordinasi dengan Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris lainnya.
3. Program Pengembangan Kompetensi Komite Audit.

- b) Review and evaluation of the 2019 corporate program in accounting and finance.
 - c) Review and evaluation of corporate operational programs in 2019 in the field of Equivalent Equity Factor (EAF) of Existing Generators, as well as the impact of applying coal switching in existing plants.
 - d) Review and Evaluation regarding the implementation of the Three Line of Defense in the Company
 - e) Evaluation of corporate plans to implement Internal Control for Financial Reporting (ICoFR)
 - f) Field visits to power plants owned and managed by the Company
 - g) Coordination with the Board of Commissioners' Secretary and other Board of Commissioners Committees.
- 3) Audit Committee's Competency Development Program.

Pelaksanaan Tugas Komite Audit Audit Committee Tasks Implementation

Komite Audit telah melaksanakan rencana program kerja Komite Audit tahun 2019 dalam mendukung tugas Dewan Komisaris sesuai dengan Piagam Komite Audit dengan melakukan telaah, memberikan masukan atau rekomendasi, menghadiri rapat-rapat dengan Dewan Komisaris, Direksi, SPI dan pertemuan lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas Komite Audit serta melakukan kunjungan kerja bersama Dewan Komisaris. Realisasi program kerja dilaporkan secara triwulanan kepada Dewan Komisaris dengan kegiatan sebagai berikut.

Pada periode bulan Januari - Maret 2019 (Triwulan I - 2019), Komite Audit PJB telah melaksanakan program kerja dan kegiatan, antara lain:

1. Pembahasan EA dan perkembangan IT bersama Komite lain.
2. Mendampingi Dewan Komisaris mengunjungi PLTU Bolok, PLTU Belitung dan PLTU Bangka.
3. Pembahasan mengenai Laporan Hasil Audit (LHA) TW IV dengan SPI dan Strategi Pencapaian Kinerja bersama SPI.
4. Pembahasan bersama Manajemen mengenai rencana Tambahan Modal Disetor (TMD) untuk PJB dalam rangka proyek Sumbagsel 1.
5. Pembahasan mengenai PPA dan AMC PT PJB.
6. Pembahasan Progres Tindak Lanjut Arahan RUPS RKAP 2019.
7. Mendampingi Dewan Komisaris mengunjungi PLTU Pacitan Sudimoro.
8. Pembahasan Hasil Revaluasi Aset Tahun 2018.

Pada periode bulan April-Juni 2019 (Triwulan II - 2019), Komite Audit PJB telah melaksanakan program kerja dan kegiatan, antara lain:

1. *Exit Meeting* audit eksternal oleh RSM.
2. Tindak Lanjut Arahan RUPS dan Rekomendasi Dewan Komisaris 2019.
3. Diskusi pencapaian KPI Korporat TW I tahun 2019

The Audit Committee has implemented the Audit Committee work plan in 2019 in supporting the tasks of the Board of Commissioners following the Audit Committee Charter by reviewing, providing input or recommendations, attending meetings with the Board of Commissioners, Directors, IAU and other meetings related to the implementation of the Committee's duties Audit and conduct work visits with the Board of Commissioners. The realization of the work program is reported quarterly to the Board of Commissioners with the following activities.

From January to March 2019 (Quarter I - 2019), PJB's Audit Committee has implemented work programs and activities, including:

1. Discussion on EA and IT development with other Committees.
2. Accompanying the Board of Commissioners in the visit to Bolok CFPP, Belitung CFPP, and Bangka CFPP.
3. Discussion on the QIV Audit Report (LHA) with IAU and the Performance Achievement Strategy with SPI.
4. Discussion with Management regarding the plan for Additional Paid-in Capital (TMD) for PJB in the context of the Sumbagsel 1 project.
5. Discussion on PPA and AMC PT PJB.
6. Discussion on the Progress of the Follow-up Direction of the 2019 RUU ABOP.
7. Assisting the Board of Commissioners to visit Pacitan Sudimoro CFPP.
8. Discussion on 2018 Asset Revaluation Results.

From April to June 2019 (Quarter II - 2019), PJB's Audit Committee has carried out work programs and activities, including:

1. Exit Meeting external audit by RSM.
2. Follow-up on GMS Direction and Board of Commissioners 2019 Recommendations.
3. Discussion on QI Corporate KPI achievements in 2019

4. Pembahasan Laporan SPI TW I Tahun 2019 (LKSPI/LHA TW I/2019)
5. *Progress* hasil pemeriksaan BPK mengenai subsidi.
6. Kunjungan ke PLTD Suppa.
7. *Progress* peningkatan implementasi *Internal Control over Financial Report* (ICoFR) di PJB.
8. Pembahasan Risiko Proyek bersama Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan.
9. Kunjungan Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS) ke Bali.

Pada periode bulan Juli - September 2019 (Triwulan III - 2019), Komite Audit PJB telah melaksanakan program kerja dan kegiatan, antara lain:

1. Kunjungan PLTU Tenayan 2 x 100 MW Riau pada tanggal 4 dan 5 Juli 2019.
2. Kunjungan ke Bawean pada tanggal 17 Juli 2019.
3. Kunjungan PLTU Pulang Pisau, 2 x 60 MW, pada tanggal 18 Juli 2019.
4. Kunjungan PLTGU Muara Tawar, pada tanggal 25 Juli 2019.
5. Pembahasan LKSPI TW II 2019 pada tanggal 30 Juli 2019.
6. Pembahasan Proses Bisnis WBS untuk persiapan *review* Peraturan Direksi tentang WBS.
7. Pembahasan Progres Tindak Lanjut Arahan RUPS.
8. Peninjauan Lokasi Pohon Penyebab *Blackout* Jawa Bagian Barat.
9. Diskusi revisi RKAP 2019 pada tanggal 6 September 2019.
10. *Review* Surat Keputusan Bersama untuk perubahan WBS pada tanggal 17 September 2019.
11. Pembahasan Progres Tindak Lanjut Arahan RUPS dan Rekomendasi Dewan Komisaris pada tanggal 6 September 2019.
12. Pembahasan Laporan Akhir ICoFR RSM pada tanggal 17 September 2019.

Pada periode bulan Oktober - Desember 2019 (Triwulan IV - 2019), Komite Audit PJB telah melaksanakan program kerja dan kegiatan, antara lain:

1. Kunjungan ke UP Gresik pada tanggal 3 Oktober 2019.
2. Induksi Dewan Komisaris Mengenai PSAK 71,72, dan 73 pada tanggal 4 Oktober 2019.
3. Pembahasan *Board Manual* dan *Area of Improvement* GCG pada tanggal 10-11 Oktober 2019.
4. Risk Map UBJOM Indramayu pada tanggal 14 Oktober 2019.
5. *Supplier Gathering* Pulang Pisau pada tanggal 19 Oktober 2019.
6. Pembahasan Tindak Lanjut Arahan RUPS dan Dewan Komisaris pada tanggal 8 November 2019.
7. Pembahasan *Cascading* KPI Korporat 8 November 2019.
8. Kunjungan ke PLTU Tanjung Awar Awar.
9. Kunjungan ke PLTU Tidore.
10. Pembahasan LKSPI TW III tahun 2019.
11. Pembahasan *Self Assessment* GCG pada tanggal 10 Desember 2019.
12. Pembahasan PKAT 2020 dengan SPI PJB pada tanggal 11 Desember 2019.
13. *Kick off Meeting* KAP tahun buku 2019.

4. Discussion on QI 2019 IAU Report (LKSPI / LHA TW I / 2019)
5. Progress of BPK's audit results regarding subsidies.
6. Visit to Suppa DPP.
7. Progress in improving the implementation of Internal Control over Financial Report (ICoFR) in PJB.
8. Discussion on Project Risks with the Risk Management and Compliance Committee.
9. Visit to Local Waste Management Sites (TOSS) to Bali.

From July to September 2019 (Quarter III - 2019), the PJB Audit Committee has carried out work programs and activities, including:

1. Visit to Tenayan CFPP, 2 x 100 MW Riau on 4 and 5 July 2019.
2. Visit to Bawean on July 17, 2019.
3. Visit to Pulang Pisau CFPP, 2 x 60 MW, on 18 July 2019.
4. Visit to Muara Tawar CFPP, on July 25, 2019.
5. Discussion on LKSPI Q II 2019 on 30 July 2019.
6. Discussion on WBS Business Process in preparation for reviewing the Directors' Regulations on WBS.
7. Discussion on the Follow-Up Progress of GMS Direction.
8. Location Review of the Cause of Blackout in West Java.
9. Discussion on the revised ABOP 2019 on September 6, 2019.
10. Review of Joint Decree for changes to WBS on September 17, 2019.
11. Discussion on the Follow-Up Progress of GMS Direction and Board of Commissioners Recommendations on September 6, 2019.
12. Discussion on RSM ICoFR Final Report on September 17, 2019.

From October to December 2019 (Quarter IV - 2019), PJB's Audit Committee has implemented work programs and activities, including:

1. Visit to Gresik GU on October 3, 2019.
2. Induction of the Board of Commissioners Regarding PSAK 71.72, and 73 on 4 October 2019.
3. Discussion on GCG Board Manual and Area of Improvement on 10-11 October 2019.
4. Risk Map of Indramayu OMSBU on October 14, 2019.
5. Supplier of Pulang Pisau Gathering on October 19, 2019.
6. Discussion on Follow-Up Directions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Commissioners on November 8, 2019.
7. Discussion on Corporate KPI Cascading on November 8, 2019.
8. Visit to Tanjung Awar Awar CFPP.
9. Visit to Tidore CFPP.
10. Discussion on LKSPI Q III in 2019.
11. Discussion on GCG Self-Assessment on December 10, 2019.
12. Discussion on PKAT 2020 with PJB's IAU on December 11, 2019.
13. Kick-off Meeting with PAF for the fiscal year 2019.



Rapat Komite Audit Audit Committee Meeting

Komite Audit wajib melakukan pertemuan rutin dengan Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan serta melakukan pertemuan dengan fungsi terkait terutama fungsi keuangan dan Internal Audit dalam rangka membahas perkembangan dan aktivitas Perusahaan baik secara berkala maupun sesuai kondisi yang diperlukan sebagaimana diuraikan dalam BoC *Manual* PJB. Hal tersebut sejalan dengan Piagam Komite Audit bahwa Komite Audit mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan untuk menyelesaikan Program Kerja Komite Audit. Komite Audit telah melaksanakan rapat internal sepanjang tahun 2019 sebanyak 21 kali.

The Audit Committee is required to hold regular meetings with the Board of Commissioners at least 1 (once) a month and conduct meetings with related functions, especially the financial and Internal Audit functions, to discuss the Company's developments and activities both periodically and according to the necessary conditions as described in the PJB's Board of Commissioners Manual. This is in line with the Audit Committee Charter that the Audit Committee meets regularly at least 1 (one) time in a month to complete the Audit Committee Work Program. The Audit Committee held 21 internal meetings in 2019.

Agenda Rapat Komite Audit Audit Committee Meeting Agenda

No.	Tanggal Tanggal	Agenda	Agenda
1	6 Feb 2019 February 6, 2019	Laporan Hasil Audit (LHA) TW IV 2018	Audit Report (LHA) Q IV 2018
2	13 Feb 2019 February 13, 2019	PPA dan <i>Asset Management Contract</i> PT PJB	PPA and Asset Management Contract PT PJB
3	19 Feb 2019 February 19, 2019	Tindak lanjut dari Arahan RUPS dan Dewan Komisaris RKAP 2019	Follow up on the GMS and Board of Commissioners 2019 Directions
4	19 Mar 2019 March 19, 2019	Rapat Hasil Revaluasi Aset 2019	2019 Asset Revaluation Results Meeting
5	6 Mar 2019 March 6, 2019	<i>Exit Meeting</i> Audit Laporan Keuangan PJB tahun audit 2018	Audit Exit-Meeting of PJB Financial Statements of 2018
6	22 Apr 2019 April 22, 2019	Tindak Lanjut Arahan RUPS dan Rekomendasi Dekom 2019	Follow-up Direction to the General Meeting of Shareholders and Recommendations of the 2019 Board of Commissioners
7	23 Apr 2019 April 23, 2019	pencapaian KPI Korporat TW I tahun 2019	achievement of the Q1 Corporate KPI 2019
8	10 Mei 2019 May 10, 2019	- Laporan SPI TW I Tahun 2019 (LKSPI/LHA TW I/2019) - <i>Progress</i> hasil pemeriksaan BPK mengenai subsidi	- IAU QI Report 2019 (LKSPI / LHA Q I / 2019) - Progress of BPK's audit results regarding subsidies
9	17 Mei 2019 May 17, 2019	<i>Progress</i> Peningkatan Implmentasi ICoFR di PT PJB	Progress of Improvement of ICoFR Implementation at PT PJB
10	21 Juni 2019 June 21, 2019	Risiko Proyek bersama KMRK	Project Risks with KMRK
11	30 Juli 2019 July 30, 2019	- Pembahasan Laporan Kinerja SPI TW II 2019 - Proses Bisnis WBS untuk persiapan <i>review</i> Peraturan Direksi tentang WBS	- Discussion on IAU's Performance Report for the Q2 of 2019 - WBS Business Process for the review of the Board of Directors' Decree on WBS
12	30 Juli 2019 July 30, 2019	Tindak Lanjut Arahan RUPS dan Rekomendasi Dekom 2019 (lanjutan)	Follow Up on GMS Direction and Recommendation of the 2019 Board of Commissioners (continued)
13	6 Sep 2019 September 6, 2019	Diskusi revisi RKAP 2019	Discussion on the revised 2019 ABOP
14	6 Sep 2019 September 6, 2019	Pembahasan Tindak Lanjut Arahan RUPS dan Dewan Komisaris 2019 (lanjutan)	Discussion on Follow-Up Directions for the GMS and Board of Commissioners 2019 (continued)
15	17 Sep 2019 September 17, 2019	Pembahasan Laporan Akhir ICoFR bersama konsultan RSM Indonesia	ICoFR Final Report Discussion with Indonesian RSM consultant
16	10-11 Okt 2019 October 10-11, 2019	Pembahasan <i>Board Manual</i> dan Aol GCG	Discussion on the Board Manual and Aol GCG
17	8 Nov 2019 November 8, 2019	Pembahasan Tindak Lanjut Arahan RUPS dan Dekom	Discussion on Follow-Up Directions of the General Meeting of Shareholders and Board of Commissioners



No.	Tanggal Tanggal	Agenda	Agenda
18	8 Nov 2019 November 8, 2019	Pembahasan <i>Cascading</i> KPI Korporat	Discussion on Corporate KPIs Cascading
19	19 Nov 2019 November 19, 2019	Pembahasan LKSPI TW III tahun 2019	Discussion on LKSPI Q3 of 2019
20	11 Des 2019 December 11, 2019	Pembahasan PKAT 2020 dengan SPI PJB	Discussion on PKAT 2020 with PJB IAU
21	17 Des 2019 December 17, 2019	<i>Kick off Meeting</i> KAP RSM Indonesia untuk audit laporan keuangan tahun buku 2019	Kick-Off Meeting with the PAF, RSM Indonesia, for auditing financial statements for the fiscal year 2019

Frekuensi Rapat Internal dan Tingkat Kehadiran Anggota Komite Audit

Frequency of Internal Meetings and Attendance of Member of Audit Committees

Nama Name	Frekuensi Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendances	Tingkat Kehadiran Attendance ratio
Sunarsip	21	20	95%
Defy Indiyanto Budiarto	21	13	63%
Sigit Djalur Purwoko	21	21	100%
Andar Sudiar Sukma	21	20	95%

Program Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Audit Committee Competency Development Program

Anggota Komite Audit ikut serta dalam kegiatan pengembangan kompetensi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Komite Audit. Program pengembangan kompetensi Anggota Komite Audit PJB sepanjang tahun 2019 dapat dilihat pada uraian terkait Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Kepala SPI.

Member of Audit Committees have participated in competency development activities to support the implementation of the Audit Committee's functions. The competency development program for PJB's Member of Audit Committees in 2019 can be seen in the description related to the Education and Training of the Board of Commissioners, the Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Head of IAU.

Evaluasi Kinerja Komite Audit

Audit Committee Performance Assessment

Komite Audit secara berkala dievaluasi dalam rangka memastikan dan mendorong efektivitas pelaksanaan tugas Komite Audit. Evaluasi kinerja Komite Audit serta kinerja masing-masing Anggota Komite Audit dilakukan melalui penilaian berdasarkan kriteria berupa pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan Komite Audit yang meliputi:

1. Kontribusi terhadap pencapaian target Tim.
2. Jumlah Kajian, Analisis, Rekomendasi.
3. Tingkat keaktifan dalam kegiatan Tim.
4. Kerjasama dalam Tim.
5. Mutu dan Kualitas Konsep.

Dewan Komisaris menilai kinerja Komite dan kinerja masing-masing Anggota Komite Audit yang bukan anggota Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. Hasil Evaluasi tersebut selanjutnya digunakan untuk menyusun langkah-langkah perbaikan, pengembangan dan penyempurnaan yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Berikut adalah hasil evaluasi kinerja Anggota Komite Audit pada tahun 2019:

The Audit Committee is regularly assessed to ensure and support the effectiveness of the Audit Committee's duties. An evaluation of the performance of the Audit Committee and the performance of each Member of Audit Committee is carried out through an evaluation based on criteria in the form of achieving targets set in the Audit Committee's Annual Work Plan which includes:

1. Contribution to Team target achievement.
2. The number of studies, analysis, recommendations.
3. Level of activity in Team activities.
4. Teamwork.
5. Concept Quality.

The Board of Commissioners assesses the performance of the Committee and the performance of each Member of Audit Committee who is not a member of the Commissioners at least once a year. The evaluation results are then used to develop the steps for improvement, development, and improvement needed to support the implementation of the duties of the Board of Commissioners. The following are the results of the performance assessment of Member of Audit Committees in 2019:

Tabel Evaluasi Kinerja Anggota Komite Audit

Table of the Performance Assessment for Member of Audit Committees

No.	Parameter Penilaian Indicators	Sigit Jalu Purwoko	Andar Sudiar Sukma
1	Kontribusi terhadap Pencapaian Target Tim Contribution to Team Target Achievement	4	3
2	Jumlah Kajian, Analisis, Rekomendasi Number of Studies, Analysis, Recommendations	4	4
3	Tingkat Keaktifan dalam Kegiatan Tim Level of Activity in Team Activities	4	4
4	Kerjasama dalam Tim Teamwork	4	4
5	Mutu dan Kualitas Konsep Concept Quality	4	4
Rata-Rata Skor Average Score		4	3,8

Keterangan Skor Score Description:

- 1 Tidak Sesuai Harapan Not as Expected
- 2 Kurang Sesuai Harapan Lower than Expected
- 3 Sesuai Harapan As Expected
- 4 Melampaui Harapan Excellent



PLTU Amurang
Amurang CFPP

KOMITE MANAJEMEN RISIKO DAN KEPATUHAN

RISK MANAGEMENT AND COMPLIANCE COMMITTEE

Dewan Komisaris membentuk Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, khususnya terkait kebijakan dan strategi Perusahaan dari sisi risiko maupun kepatuhan. Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas penilaian terhadap hasil kajian risiko dan kepatuhan pada kegiatan perencanaan, operasional dan investasi Perusahaan serta kegiatan evaluasi atas penerapan *Enterprise Risk Management* di Perusahaan dan tingkat kepatuhan Perusahaan dalam menyampaikan laporan berkala kepada Dewan Komisaris. Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

The Board of Commissioners established a Risk Management and Compliance Committee to assist the implementation of its duties and responsibilities, specifically related to the Company's policies and strategies in terms of risk and compliance. The Risk Management and Compliance Committee provides input to the Board of Commissioners on the assessment of the results of risk and compliance studies on the Company's planning, operational and investment activities as well as evaluating the implementation of Enterprise Risk Management in the Company and the Company's compliance level in submitting periodic reports to the Board of Commissioners. The Risk Management and Compliance Committee is appointed and terminated and reports directly to the Board of Commissioners.

Dasar Pembentukan Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Establishment Basis of the Risk Management and Compliance Committee

Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan dibentuk dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012. Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan PJB terakhir kali ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 002.K/DK/PJB/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang pembentukan Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan pada Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali, sebagai pemutakhiran dari Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 005.K/DK/PJB/2018 tanggal 20 Agustus 2018 tentang Perpanjangan Masa Tugas Komite (Komite Audit, Komite Manajemen Risiko & Kepatuhan dan Komite SDM & Organisasi) Pada Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali.

The Risk Management and Compliance Committee was formed by referring to Law Number 19 of 2003; Law Number 40 of 2007 and SOE Ministry Regulation Number: PER-12 /MBU/2012 on August 24, 2012. PJB's Risk Management and Compliance Committee was last determined based on the Decree of the Board of Commissioners Number: 002.K / DK / PJB / 2019 on January 2, 2019, concerning the establishment of a Risk Management and Compliance Committee on the Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa Bali, as an update of the Decree of the Board of Commissioners Number: 005.K / DK / PJB / 2018 on August 20, 2018, regarding Extension of the Term of Office of the Committee (Audit Committee, Risk & Compliance Management Committee, and HC and Organization Committee) in the Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa Bali.

Susunan Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Composition of the Risk Management and Compliance Committee

Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan PJB dipimpin oleh seorang Ketua yang merupakan anggota Dewan Komisaris dan dibantu oleh Wakil Ketua, Sekretaris merangkap anggota serta setidaknya 2 (dua) orang anggota. Susunan Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan Perusahaan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

PJB's Risk Management and Compliance Committee is led by a Chairperson who is a member of the Board of Commissioners and is assisted by a Vice-Chairperson, Secretary concurrently as a member, and at least 2 (two) members. The composition of the Company's Risk Management and Compliance Committee in 2019 is as follows:

Susunan Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Composition of the Risk Management and Compliance Committee

Nama Name	Jabatan Position	Keahlian Expertise	Periode Jabatan Term of Office
Benny MM Marbun	Ketua Chairperson (Komisaris) (Commissioner)	Manajemen Bisnis Business management	Januari - Desember 2019 January - December 2019
Hendra Iswahyudi	Wakil Ketua Vice Chairperson (Komisaris) (Commissioner)	Teknik Fisika, Perencanaan dan Kebijakan Publik, Ekonomi Physical Engineering, Planning and Public Policy, Economy	Januari - Desember 2019 January - December 2019
Sunarsip	Anggota Member (Komisaris) (Commissioner)	Akuntansi, Keuangan dan Audit Accounting, Finance and Audit	Januari - Desember 2019 January - December 2019



Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Risk Management and Compliance Committee

Nama Name	Jabatan Position	Keahlian Expertise	Periode Jabatan Term of Office
Bambang Istianto	Sekretaris Secretary (Pihak Independen) (Independent Party)	<i>General Accounting and Cost Accounting, Capital Budgeting, Corporate Finance, Organization Management, Process Facilitation dan Risk Management</i> General Accounting and Cost Accounting, Capital Budgeting, Corporate Finance, Organization Management, Process Facilitation, and Risk Management	Januari - Desember 2019 January - December 2019
Eko Prijatno Kestijanto B	Anggota Member (Pihak Independen) (Independent Party)	Manajemen Bisnis, Tata Kelola dan <i>Operation & Maintenance</i> Pembangkitan Business Management, Governance and Operation & Maintenance of Power Plant	Januari - Desember 2019 January - December 2019

Profil Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan Profile of Members of the Risk Management and Compliance Committee



Benny MM Marbun

Ketua Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan
Chairperson of the Risk Management and Compliance Committee

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
The profile can be seen in the Board of Commissioners Profile section.



Hendra Iswahyudi

Wakil Ketua Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan
Vice Chairperson of the Risk Management and Compliance Committee

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
The profile can be seen in the Board of Commissioners Profile section.



Sunarsip

Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan
Member of the Risk Management and Compliance Committee

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
The profile can be seen in the Board of Commissioners Profile section.



Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan Audit
Audited Financial Statements



Referensi Kriteria AR
ARA Criteria Reference



Bambang Istianto

Sekretaris Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan
Secretary of the Risk Management and Compliance Committee

Warga Negara Indonesia, 44 tahun, berdomisili di Jakarta.

Dasar Pengangkatan

Diangkat berdasarkan SK Dewan Komisaris Nomor: 005.K/DK/PJB/2018 tanggal 20 Agustus 2018 diperpanjang dengan SK Dewan Komisaris Nomor: 002.K/DK/PJB/2019 tanggal 2 Januari 2019.

Pendidikan

Menyelesaikan pendidikan Ahli Madya Manajemen Keuangan dan Perbankan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPKP Bandung tahun 1998 dan S1 Ekonomi dari Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2009.

Selain itu, pendidikan non-formal yang pernah diikuti untuk mendapatkan sertifikasi diantaranya Sertifikasi *Certified Risk Management Professional* (CRMP) (2016), Pelatihan *Governance Risk & Compliance* (GRC) (2018) dan Pelatihan Meningkatkan Kinerja Program melalui *Monitoring & Evaluation* (2019)

Riwayat Pekerjaan

Mulai berkarir sebagai staff keuangan dan administrasi PT Studio Cilaki 45 sebuah perusahaan konsultan manajemen dan teknik (1997), Manajer Administrasi, Keuangan dan Akuntansi PT ISI Indraco (2008), Manajer Keuangan PT Ganesha Petro (2009), Manajer Keuangan di PT Meisa Dwi Kencana (2010) Tenaga Ahli pada PT Netritva Pradhana (2012 – sekarang) dan Anggota Komite Manajemen Risiko & Kepatuhan Dewan Komisaris pada PT Pembangkitan Jawa Bali, (2014- sekarang).

Indonesia Citizen, 44 years old, based in Jakarta.

Decree of Appointment

Appointed based on the Board of Commissioners' Decree Number: 005.K / DK / PJB / 2018 dated August 20, 2018 extended by the Board of Commissioners' Decree Number: 002.K / DK / PJB / 2019 dated January 2, 2019.

Education

Earned an Associate Degree in Financial Management and Banking from YPKP Bandung School of Economics in 1998 and a Bachelor of Economics from Padjadjaran University Bandung in 2009.

Also, non-formal education to obtain certification includes Certified Risk Management Professional (CRMP) Certification (2016), Governance Risk & Compliance (GRC) Training (2018) and Training to Improve Program Performance through Monitoring & Evaluation (2019)

Work Experiences

Started his career as a financial and administrative staff of PT Studio Cilaki 45, a management and engineering consulting firm (1997), Administrative, Finance and Accounting Manager of PT ISI Indraco (2008), Finance Manager of PT Ganesha Petro (2009), Expert Finance Manager of PT Meisa Dwi Kencana (2010) of PT Netritva Pradhana (2012 - present) and Members of the Board of Commissioners' Risk Management & Compliance Committee of PT Pembangkitan Jawa Bali, (2014-present).



Eko Prijatno Kestianto B

Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan
Member of the Risk Management and Compliance Committee

Warga Negara Indonesia, 60 tahun, berdomisili di Surabaya.

Dasar Pengangkatan

Diangkat berdasarkan SK Dewan Komisaris Nomor: 005.K/DK/PJB/2018 tanggal 20 Agustus 2018 diperpanjang dengan SK Dewan Komisaris Nomor: 002.K/DK/PJB/2019 tanggal 2 Januari 2019

Pendidikan

Menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Elektro dari Universitas Gadjah Mada (1987) dan Magister Bisnis Administrasi dan Teknologi (MBAT) dari Institut Teknologi Bandung (2003).

Selain itu, pendidikan non-formal yang pernah diikuti untuk mendapatkan sertifikasi diantaranya ISO 9000 : 2000 *Awareness Training* (2001) dan OHSAS 18001 *Awareness* (2005). Pelatihan *Governance Risk & Compliance* (GRC) tahun 2018.

Riwayat Pekerjaan

Pernah berkarir sebagai Enjinir Produksi C PLTGU Gresik PT PLN (1992–1998), Kepala Unit PLTGU Muara Tawar PT PLN PJB II UP Muara Karang (1998), *Vice Chairperson Manager* SDM dan Organisasi PT PLN PJB II UP Muara Karang (1998–2000), *Vice Chairperson Manager Maintenance Control* PT PLN PJB II UP Muara Karang (2000–2002), Asmen Pemantauan & Evaluasi Pembangkitan & Jaringan PT PJB (2002–2004), Manajer Lingkungan & K3 PT PJB (2004–2006), Manajer Pemasaran dan Pembinaan Unit Usaha PT PJB (2006–2009), Senior Manajer Humas & CSR PJB (2009–2011), Senior Manajer Niaga PT PJB sejak tahun (2011–2013), dan Sekretaris Perusahaan PT PJB (2013–2015).

Indonesian citizen, 60 years old, residing in Surabaya.

Decree of Appointment

Appointed based on the Board of Commissioners 'Decree Number: 005.K / DK / PJB / 2018 on August 20, 2018, extended by the Board of Commissioners' Decree Number: 002.K / DK / PJB / 2019 on January 2, 2019

Education

He earned his Bachelor of Electrical Engineering from Gadjah Mada University (1987) and Masters in Business Administration and Technology (MBAT) from the Bandung Institute of Technology (2003).

Also, non-formal education to obtain certification includes ISO 9000: 2000 *Awareness Training* (2001) and OHSAS 18001 *Awareness* (2005). *Governance Risk & Compliance* (GRC) training in 2018.

Work Experiences

He once served as a Production Engineer C of PT PLN s Gresik GTPP (1992–1998), Head of Muara Tawar GTPP Unit of PT PLN, PJB II Muara Karang GU (1998), Vice Manager of HC and Organization of PT PLN PJB II UP Muara Karang (1998–2000), Vice Chairperson Manager of Maintenance Control of PT PLN PJB II UP Muara Karang (2000–2002), Assets Monitoring & Evaluation of PT PJB Generation & Network Generations (2002–2004), HSE Manager of PT PJB (2004–2006), Marketing Manager and Business Unit Development PT PJB (2006–2009), Senior Manager of Public Relations & CSR of PJB (2009–2011), Senior Commerce Manager of PT PJB (2011–2013), and Corporate Secretary of PT PJB (2013–2015).



Tata Kelola Perusahaan
 Good Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
 Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan Audit
 Audited Financial Statements



Referensi Kriteria AR
 ARA Criteria Reference

Masa Jabatan Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan Term of Office of the Risk Management and Compliance Committee

Masa jabatan Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris yaitu 1 (satu) tahun. Masa jabatan Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan dapat diperpanjang mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris, sedangkan anggota Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris menjabat paling lama 2 (dua) tahun diangkat untuk 1 (satu) periode masa jabatan, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali pada masa jabatan berikutnya.

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PJB dan dilaporkan kepada RUPS. Pemberhentian anggota Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatannya dan dapat pula diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris apabila tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya.

The term of office of the Risk Management and Compliance Committee is determined based on a Decree of the Board of Commissioners which is 1 (one) year. The term of office of the Risk Management and Compliance Committee can be extended following the term of office of the Board of Commissioners, while members of the Risk Management and Compliance Committee who are not members of the Board of Commissioners have a maximum term of 2 (two) years appointed for 1 (one) term of office, and can be reappointed for 1 (one) time in the next term.

The appointment and dismissal of members of the Risk Management and Compliance Committee is based on the PJB Board of Commissioners' Decree and reported to the GMS. Dismissal of members of the Risk Management and Compliance Committee can be carried out if the concerned term ends his term and can also be dismissed based on the decision of the Board of Commissioners if it does not meet the established performance and/or is incompetent in task performance.

Independensi Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan Independence of the Risk Management and Compliance Committee

Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan harus memenuhi kriteria independensi serta mampu melaksanakan tugasnya secara independen, semata-mata untuk kepentingan Perusahaan, terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan Perusahaan.

The Risk Management and Compliance Committee must meet the independence criteria and be able to carry out its duties independently, solely for the benefit of the Company, regardless of the influence of various parties with a conflict of interests against the Company.

Kriteria Independensi	Independence Criteria	Benny MM Marbun	Hendra Iswahyudi	Sunarsip	Bambang Istianto	Eko Prijatno B
Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit dan non-audit atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.	Not a person in a public accounting firm, legal consulting office, or other party providing audit and non-audit services or other consulting services to the Company within the past 6 (six) months.	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung di Perusahaan.	Not having any share either directly or indirectly in the Company.	✓	✓	✓	✓	✓
Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan/atau mengendalikan Perusahaan dalam waktu enam bulan terakhir.	Not a person who has the authority and responsibility to plan, lead, and/or control the Company within the past six months.	✓	✓	✓	✓	✓



Kriteria Independensi	Independence Criteria	Benny MM Marbun	Hendra Iswahyudi	Sunarsip	Bambang Istianto	Eko Prijatno B
Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun ke samping atau hubungan semenda.	Not family-affiliated with members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners up to the second degree, either in a straight line or sideways or in a relationship.	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan usaha langsung dan tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan; dan	Not having direct and indirect business relationships related to the Company's business activities; and	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak sedang berada dalam institusi yang kegiatan usahanya memberikan jasa kepada Perusahaan.	Not serving in an institution whose business activities provide services to the Company.	✓	✓	✓	✓	✓
Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan telah memenuhi kriteria independen dan mampu melaksanakan tugas secara independen, semata-mata untuk kepentingan Perusahaan, terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan Perusahaan. The Risk Management and Compliance Committee has fulfilled the independent criteria to perform its tasks independently for the interest of the Company, regardless of the influence of various parties with a conflict of interests against the Company.						

Pedoman Kerja Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan Risk Management and Compliance Committee Charter

Dewan Komisaris telah menetapkan pedoman kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang disebut Piagam Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan pada tahun 2018. Piagam Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan mengatur beberapa hal terkait antara lain: Maksud dan Tujuan, Fungsi dan Tugas Pokok, Tanggung Jawab dan Wewenang, Organisasi dan Keanggotaan, *Key Performance Indicator* dan Penilaian kinerja Komite, Mekanisme Kerja dan Kode Etik.

Piagam Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan dikaji ulang secara berkala guna memastikan bahwa cakupan pedoman tersebut senantiasa sejalan dengan kebutuhan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *best practices*.

The Board of Commissioners has established work guidelines to support the implementation of the duties of the Risk and Compliance Management Committee called the Risk and Compliance Committee Charter in 2018. The Charter of the Risk and Compliance Management Committee regulates several related matters including Purpose and Objectives, Main Functions and Tasks, Responsibilities and Authority, Organization and Membership, Key Performance Indicator and Performance Assessment, Work Mechanism, and Code of Conduct.

The Charter of the Risk Management and Compliance Committee is periodically reviewed to ensure that the scope of the guidelines is always in line with the needs, applicable laws and regulations, and best practices.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan Tasks and Responsibilities of the Risk Management and Compliance Committee

Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan berhubungan dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan tugasnya yang masing-masing memiliki tanggung jawab yang jelas pada semua kegiatan yaitu Direksi, termasuk seluruh jajaran manajemen, terutama yang menangani manajemen risiko serta Dewan Komisaris termasuk jajarannya. Tugas pokok Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan adalah sebagai berikut:

The Risk Management and Compliance Committee deals with related parties in carrying out their duties, each of which has clear responsibilities in all activities, namely the Board of Directors, including all levels of management, especially those who handle risk management and the Board of Commissioners including its staff. The main tasks of the Risk Management and Compliance Committee are as follows:

1. Menilai dan memberi masukan terhadap kebijakan dan strategi Perusahaan kepada Dewan Komisaris, baik dari sisi risiko maupun kepatuhan.
2. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas penilaian terhadap hasil kajian analisa risiko dan kepatuhan pada:
 - a. Kegiatan Perencanaan Perusahaan.
 - b. Kegiatan Operasional Perusahaan.
 - c. Kegiatan Investasi Perusahaan.
 - d. Kegiatan Evaluasi atas penerapan Enterprise Risk Management di Perusahaan.
 - e. Tingkat Kepatuhan Perusahaan.
3. Menyampaikan laporan berkala kepada Dewan Komisaris mengenai kegiatan Komite.
4. Memantau dan menilai bahwa semua kegiatan Perusahaan yang ada di dalam RJPP dan RKAP telah mengandung pendekatan Enterprise Risk Management terhadap berbagai risiko Perusahaan;
5. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan saran kepada Direksi mengenai berbagai hal yang dapat meningkatkan kelancaran dan efektivitas proses manajemen risiko;
6. Melakukan penilaian terhadap penerapan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris; dan
7. Bertindak sebagai *early warning system* dengan memberikan kajian berupa saran dan rekomendasi terkait penerapan manajemen risiko dan kepatuhan kepada Dewan Komisaris.

1. Assess and provide input on the Company's policies and strategies to the Board of Commissioners, both in terms of risk and compliance.
2. Provide input to the Board of Commissioners on the assessment of the results of the risk analysis and compliance review on:
 - a. Corporate Planning Activities.
 - b. Company Operational Activities.
 - c. Corporate Investment Activities.
 - d. Evaluation activities on the implementation of Enterprise Risk Management in the Company.
 - e. Company Compliance Level.
3. Submit periodic reports to the Board of Commissioners regarding the Committee's activities.
4. Monitor and assess that all Company activities in the CLP and ABOP already contain an Enterprise Risk Management approach to various Company risks;
5. Assist the Board of Commissioners in providing advice to the Directors on various matters that can improve the smoothness and effectiveness of the risk management process;
6. Assess the application of risk management and compliance functions and report them to the Board of Commissioners; and
7. Act as an early warning system by providing studies in the form of suggestions and recommendations related to the application of risk management and compliance with the Board of Commissioners.

Rencana Program Kerja Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan Risk Management and Compliance Committee Work Plan

Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan telah menyusun rencana program kerja Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan tahun 2019 dalam mendukung efektifitas pelaksanaan tugasnya, sebagai berikut :

1. Kegiatan rutin yang terdiri dari :
 - a. Kegiatan koordinasi Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan dengan manajemen yang mencakup :
 - 1) *Monitoring* dan Evaluasi Rencana Kerja Perusahaan.
 - 2) Koordinasi berkala dengan manajemen.
 - 3) Evaluasi potensi/mitigasi risiko di Korporat.
 - 4) Koordinasi dengan Sekretaris Dewan Komisaris.
 - b. *Monitoring* dan Evaluasi Laporan Manajemen berkala.
2. Kegiatan Khusus/Non Rutin yang terdiri dari :
 - a. *Monitoring* dan *review* RJPP 2017-2022.
 - b. *Monitoring* dan *review* pelaksanaan Corporate Agenda tahun 2019.
 - c. Review kebijakan, strategi dan implementasi Penugasan PT PLN.
 - d. Review strategi portofolio terkait *Unrestricted*

The Risk and Compliance Management Committee has compiled a work plan for 2019 to support the effectiveness of tasks implementation, as follows:

1. Routine activities consisting of:
 - a. The coordination activities of the Risk Management and Compliance Committee with management include:
 - 1) Monitoring and Evaluating the Company's Work Plan.
 - 2) Periodic coordination with management.
 - 3) Evaluation of potential risks/ risk mitigation in the Company.
 - 4) Coordination with the Secretary of the Board of Commissioners.
 - b. Periodic Monitoring and Evaluation of Management Reports.
2. Special / Non-Routine Activities consisting of:
 - a. CLP 2017-2022 monitoring and review.
 - b. Monitoring and review of the implementation of the Corporate Agenda in 2019.
 - c. Review of policies, strategies, and implementation of PT PLN's Assignments.
 - d. Review of portfolio strategies related to Unrestricted

Subsidiaries, RJPP dan Corporate Charter.

- e. *Monitoring dan Review Implementasi Three Lines of Defense.*
 - f. *Monitoring dan Review Kebijakan Strategi Security of Supply.*
 - g. *Review business process PJB berdasarkan metode APQC.*
 - h. *Monitoring dan Review pengendalian internal (COSO, ERM, ICOFR, APQC).*
 - i. *Evaluasi dan monitor rencana pengembangan bisnis energi baru terbarukan (EBT) di korporat.*
3. Program Pengembangan Kompetensi Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan.

Subsidiaries, CLP, and Corporate Charter.

- e. *Monitoring and Review of Implementation of Three Lines of Defense.*
 - f. *Monitoring and Reviewing the Security of Supply Strategy Policy.*
 - g. *Review the PJB business process based on the APQC method.*
 - h. *Monitoring and Review of internal controls (COSO, ERM, ICOFR, APQC).*
 - i. *Evaluate and monitor the development plan of the new renewable energy business (EBT) at the corporation.*
3. Competency Development Program of the Risk Management and Compliance Committee.

Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan Risk Management and Compliance Committee Task Implementation

Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan melaksanakan tugasnya sebagai organ pendukung Dewan Komisaris sepanjang tahun 2019 yang dilaporkan secara triwulanan kepada Dewan Komisaris. Kegiatan Komite dilakukan melalui rapat-rapat bersama dengan Direktur dan Manajemen terkait topik-topik tertentu maupun kunjungan ke unit-unit pembangkit yang dikelola oleh Perusahaan. Secara umum, Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan telah melakukan pengawasan dan pendampingan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Evaluasi pelaksanaan RKAP 2019.
2. Proses penyusunan draft RKAP 2020.
3. Pelaksanaan *enterprise risk management* di level korporat.
4. Pengawasan kebijakan pengelolaan Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi.
5. Pengawasan pelaksanaan pengendalian internal dengan menggunakan pendekatan *Three line of Defences*.
6. Permintaan rekomendasi dan persetujuan tertulis Dewan Komisaris atas tindakan korporasi yang dilakukan oleh Direksi.
7. Pembaharuan informasi mengenai pengelolaan UBJOM dan Unit Pembangkit.
8. Proses investasi dan/atau pengembangan usaha korporat.
9. Proses bisnis internal diantaranya tapi tidak terbatas kepada bidang pengembangan usaha, pengadaan, UBJOM dan lain-lain.

The Risk Management and Compliance Committee implements its duties as a supporting organ of the Board of Commissioners in 2019 which is reported quarterly to the Board of Commissioners. The Committee's activities are carried out through joint meetings with Directors and Management related to certain topics as well as visits to generating units managed by the Company. In general, the Risk Management and Compliance Committee has conducted supervision and assistance for the following matters:

1. Evaluate the implementation of the 2019 ABOP.
2. The process of drafting the 2020 ABOP.
3. Implementation of enterprise risk management at the corporate level.
4. Oversight of management policies for Subsidiaries and Affiliated Companies.
5. Oversight of the implementation of internal control using the Three line of Defense approach.
6. Request for recommendation and written approval from the Board of Commissioners for corporate actions taken by the Board of Directors.
7. Updated information about the management of OMSBU and Generation Units.
8. Investment process and/or corporate business development.
9. Internal business processes including but not limited to the areas of business development, procurement, OMSBU, and others.

Rapat Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan Risk Management and Compliance Committee Meeting

Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan melakukan pertemuan rutin dengan Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan serta melakukan pertemuan dengan fungsi terkait pelaksanaan manajemen risiko dan kepatuhan di Perusahaan sebagaimana diuraikan dalam BoC Manual PJB. Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan telah melaksanakan rapat internal sebanyak 36 kali sepanjang tahun 2019.

The Risk Management and Compliance Committee conducts regular meetings with the Board of Commissioners at least 1 (one) time a month and holds meetings with functions related to the implementation of risk management and compliance in the Company as outlined in the PJB's Board of Commissioners Manual. The Risk Management and Compliance Committee has conducted 41 internal meetings throughout 2019.

Agenda Rapat Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Risk Management and Compliance Committee Meeting Agenda

No.	Tanggal Date	Agenda	Agenda
1	3 Januari 2019 January 3, 2019	- Pembahasan Progres Report PJB IMS 2.0 - Pembahasan Progres Implementasi IT dan ISO 27001 PJB	- Discussion on PJB IMS 2.0 PJB Progress Report - Discussion on the Progress of IT Implementation and ISO 27001 PJB
2	4 Januari 2019 January 4, 2019	Pembahasan Tindak Lanjut Arahan RUPS dan Rekomendasi Dewan Komisaris	Discussion on Follow-up on GMS Direction and Board of Commissioners Recommendations
3	5 Januari 2019 January 5, 2019	Persiapan <i>Final Assessment</i> GCG tahun 2018	Preparation for the Final GCG Assessment in 2018
4	7 Januari 2019 January 7, 2019	Simulasi Pelaksanaan RUPS RKAP PJB Tahun 2019	Simulation of GMS PJB RKAP 2019
5	16 Januari 2019 January 16, 2019	- Rapat Internal Dekom dan Komite Dewan Komisaris - Membahas KPI Perseroan tahun 2019 - Membahas Arahan RUPS	- Internal Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Commissioners - Discussion on the Company's KPI in 2019 - Discussion on the GMS Direction
6	23 Januari 2019 January 23, 2019	- Rapat dengan Manajemen (RKM) membahas Tambahan Modal Disetor (TMD) untuk PLTU Sumbagsel 1 - Rapat dengan Manajemen (RKM) membahas Kebijakan Investasi	- Meeting with Management (RKM) discusses Additional Paid-in Capital (TMD) for the Southern Sumatera 1 CFPP - Meeting with Management (RKM) discusses Investment Policy
7	31 Januari 2019 January 31, 2019	Pembahasan Finalisasi Pembuatan Aplikasi ERM (Pengganti Q-Radar)	Discussion on Finalization of Making ERM Application (Substitute for Q-Radar)
8	12 Februari 2019 February 12, 2019	Pembahasan Tambahan Modal Disetor (TMD) PT PJB ke PLTU Sumbagsel 1	Discussion on PT PJB's Paid-in Capital (TMD) to the Southern Sumatera 1 CFPP
9	13 Februari 2019 February 13, 2019	- Pembahasan PPA (PJBTL) Unit <i>Existing</i> dan IPP - Pembahasan Kontrak AMC antara PLN dengan PJB	- Discussion on Existing Unit and IPP PPA (PJBTL) - Discussion on AMC Contracts between PLN and PJB
10	4 Maret 2019 March 4, 2019	Rapat / Wawancara dengan BPKP dalam rangka <i>assessment</i> GCG tahun 2018	Meeting / Interview with BPKP in the framework of GCG assessment in 2018
11	12 Maret 2019 March 12, 2019	Rapat membahas Evaluasi ERM	The meeting discussed the ERM Evaluation
12	19 Maret 2019 March 19, 2019	- Rapat dengan Div. Akuntansi membahas <i>progress</i> Revaluasi <i>Asset</i> PJB 2018. - Rapat dengan Div. EP1 & EP2, membahas pengelolaan Batubara	- Meeting with Accounting Div. discussion on the progress of the 2018 PJB Asset Revaluation. - Meeting with EP1 & EP2 Div., discussion on Coal management
13	4 April 2019 April 4, 2019	Pembahasan Pemilihan Mitra sesuai Peraturan Direksi PLN No. 0061 Tahun 2019	Discussion on Partner Selection following PLN Board of Directors Decree No. 0061 2019
14	9 April 2019 April 9, 2019	Pembahasan <i>Enterprise Performance Management</i> (EPM)	Discussion on Enterprise Performance Management (EPM)
15	15 April 2019 April 15, 2019	Program Kerja Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan Tahun 2019	Work Program for Risk Management and Compliance Unit in 2019
16	9 Mei 2019 May 9, 2019	- Implementasi ISO 27001 PJB - Pembahasan Laporan Hasil Audit (LHA) TW I 2019	- Implementation of ISO 27001 PJB - Discussion on Audit Report (LHA) Q I 2019
17	17 Mei 2019 May 17, 2019	Progres Implementasi ICOFR di PJB, RSM sebagai Konsultan	ICOFR Implementation Progress in PJB, RSM as Consultant
18	23 Mei 2019 May 23, 2019	- Pembahasan Kesiapan Menghadapi Penilaian PROPER 2019 dari Aspek CSR / <i>Community Development</i> - Rapat dengan Manajemen (RKM) membahas Progres Tindak Lanjut Keputusan RUPS dan Arahan Dewan Komisaris (PILAR)	- Discussion on Readiness to Face 2019 PROPER Assessment from CSR / Community Development Aspects - Meeting with Management (RKM) to discuss the Progress of Follow-Up to GMS Decrees and Board of Commissioners Directives (PILAR)
19	21 Juni 2019 June 21, 2019	Pembahasan Identifikasi Risiko Project oleh DIVKON PT PJB	Discussion on Project Risk Identification by PT PJB DIVKON
20	19 Juli 2019 July 19, 2019	Rapat Pembahasan Pengembangan Usaha dan <i>Disburse</i> Anggaran Investasi 2019	Meeting on Business Development Discussion and Investment Budget Disburse 2019

No.	Tanggal Date	Agenda	Agenda
21	30 Juli 2019 July 30, 2019	- Rapat Komite dengan Manajemen (RKM) Membahas Laporan Hasil Audit (LHA) TW II 2019 - Rapat Komite Dewan Komisaris dengan Manajemen (RKM) membahas Progres Tindaklanjuti Keputusan RUPS dan Arahan Dewan Komisaris (PILAR)	- Committee Meeting with Management (RKM) to Discuss the Audit Report (LHA) Q II 2019 - The Board of Commissioners' Committee Meeting with Management (RKM) to discuss the Progress of the Follow-up Resolutions of the GMS and the Board of Commissioners' Direction (PILAR)
22	9 Agustus 2019 August 9, 2019	- Review RJPP 2018 – 2022 - Pembahasan Kebijakan Investasi	- Corporate Long-term Plan Review 2018 - 2022 - Discussion on Investment Policies
23	14 Agustus 2019 August 14, 2019	Rapat Komite Dewan Komisaris dengan Manajemen (RKM) Pembahasan Pemilihan Mitra	Board of Commissioners' Committee Meeting with Management (RKM) to Discuss on Partner Selection
24	3 September 2019 September 3, 2019	Rapat Komite Dewan Komisaris dengan Manajemen (RKM) Pembahasan Pemilihan Mitra untuk <i>Floating PV Cirata 145 MW peak</i>	Board of Commissioners' Committee Meeting with Management (RKM) to Discuss Partner Selection for Cirata Floating PV of 145 MW peak
25	6 September 2019 September 6, 2019	- Rapat Komite Dewan Komisaris dengan Manajemen (RKM) Pembahasan Usulan Revisi RKAP PJB 2019 - Rapat Komite Dewan Komisaris dengan Manajemen (RKM) Pembahasan Progres Arahan RUPS dan Rekomendasi Dewan Komisaris (PILAR)	- Board of Commissioners' Committee Meeting with Management (RKM) Discussion on the Proposed Revision of the 2019 PJB RKAP - Board of Commissioners' Committee Meeting with Management (RKM) Discussion on the Progress of GMS Direction and Board of Commissioners' Recommendations (PILAR)
26	17 September 2019 September 17, 2019	- Rapat Komite Dewan Komisaris dengan Manajemen (RKM) Pembahasan Progres Implementasi ICOFR di PJB - Rapat Komite Dewan Komisaris dengan Manajemen (RKM) Pembahasan Progres Program Kerja Div. BSS	- Board of Commissioners' Committee Meeting with Management (RKM) Discussion on ICOFR Implementation Progress in PJB - Board of Commissioners' Committee Meeting with Management (RKM) Discussion on Work Program Progress of BSS Div.
27	24 September 2019 September 24, 2019	Rapat Komite Dewan Komisaris dengan Manajemen (RKM) Pembahasan Kajian <i>Coal Switching</i> di UP Paiton	Board of Commissioners' Committee Meeting with Management (RKM) Discussion on Coal Switching Study at Paiton GU
28	10-11 Oktober 2019 October 10-11, 2019	- Finalisasi BOC Manual dan <i>Board Manual</i> 2018 - Pembahasan AOI GCG 2018	- Finalization of the 2018 BOC Manual and Board Manual - Discussion on AOI GCG 2018
29	23 Oktober 2019 October 23, 2019	- FGD Manajemen Risiko - Forum ERM PJB	- Risk Management FGD - PJB ERM Forum
30	6 November 2019 November 6, 2019	Pembahasan Komponen biaya <i>Floating PV Cirata</i> dengan UBANG	Discussion on Cirata PV Floating Cost Components with UBANG
31	8 November 2019 November 8, 2019	Pembahasan Progress Tindak Lanjut Arahan RUPS dan Rekomendasi Dewan Komisaris (PILAR)	Discussion on Progress of Follow-up Direction of GMS and Board of Commissioners Recommendations (PILAR)
32	19 November 2019 November 19, 2019	Pembahasan BOD dan BOC <i>Manual</i> (BOM)	Discussion on BOD and BOC Manual (BOM)
33	3 Desember 2019 December 3, 2019	Pembahasan <i>Profile</i> Risiko Korporat tahun 2020	Discussion on Corporate Risk Profile 2020
34	12 Desember 2019 December 12, 2019	Pembahasan Tindak Lanjut Arahan RUPS dan Rekomendasi Dewan Komisaris (PILAR) final	Final Discussion on the Direction of General Meeting of Shareholders and the Recommendations of the Board of Commissioners (PILAR)
35	13 Desember 2019 December 13, 2019	Pembahasan RKAP PJB tahun 2020	Discussion on PJB's 2020 ABOP
36	17 Desember 2019 December 17, 2019	Pembahasan hasil <i>assessment</i> GCG 2019 dan <i>Opportunity For Improvement</i> (OFI) nya	Discussion on the results of the 2019 GCG assessment and its Opportunity For Improvement (OFI)



Frekuensi Internal Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Frequency of Internal Meetings and Attendance Ratio of Members of the Risk Management and Compliance Committee

Nama Name	Frekuensi Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendances	Tingkat Kehadiran Attendance Ratio
Benny MM Marbun	36	33	92%
Hendra Iswahyudi	36	5	14%
Sunarsip	36	33	92%
Bambang Istianto	36	36	100%
Eko Prijatno Kestianto B	36	36	100%

Program Pengembangan Kompetensi Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan Risk Management and Compliance Committee Competency Development Program

Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan ikut serta dalam kegiatan pengembangan kompetensi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan. Program pengembangan kompetensi Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan PJB sepanjang tahun 2019 dapat dilihat pada uraian terkait Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Kepala SPI.

Members of the Risk Management and Compliance Committee participate in competency development activities to support the implementation of the duties of the Members of the Risk Management and Compliance Committee. The competency development program of PJB Risk Management and Compliance Committee Members throughout 2019 can be seen in the description related to the Education and Training of the Board of Commissioners, Directors, Committees, Corporate Secretary, and Head of IAU.

Evaluasi Kinerja Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan Performance Assessment of the Risk Management and Compliance Committee

Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan secara berkala dievaluasi dalam rangka memastikan dan mendorong efektifitas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan. Evaluasi kinerja Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan serta kinerja masing - masing Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan dilakukan melalui penilaian berdasarkan kriteria berupa pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang meliputi:

1. Kontribusi terhadap pencapaian target Tim.
2. Jumlah Kajian, Analisis, Rekomendasi.
3. Tingkat keaktifan dalam kegiatan Tim.
4. Kerjasama dalam Tim.
5. Mutu dan Kualitas Konsep.

Dewan Komisaris menilai kinerja Komite dan kinerja masing-masing Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang bukan anggota Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. Hasil Evaluasi tersebut selanjutnya digunakan untuk menyusun langkah-langkah perbaikan, pengembangan dan penyempurnaan yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Berikut adalah hasil evaluasi kinerja Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan pada tahun 2019:

The Risk Management and Compliance Committee is regularly evaluated to ensure and encourage the effectiveness of the implementation of the Risk Management and Compliance Committee's tasks. The performance assessment of the Risk Management and Compliance Committee and the performance of each Member of the Risk Management and Compliance Committee is carried out through an assessment based on criteria in the form of achieving targets set in the Annual Work Plan of the Risk Management and Compliance Committee which includes:

1. Contribution to Team target achievement.
2. The number of studies, analysis, recommendations.
3. Level of activity in Team activities.
4. Teamwork.
5. Concept Quality.

The Board of Commissioners assesses the performance of the Committee and the performance of each Member of the Risk Management and Compliance Committee who is not a member of the Commissioner at least once a year. The evaluation results are then used to develop the steps for improvement, development, and improvement needed to support the implementation of the duties of the Board of Commissioners. The following are the results of the performance evaluation of Members of the Risk Management and Compliance Committee in 2019:



Tabel Evaluasi Kinerja Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Table of Performance Assessment for Risk Management and Compliance Committee Members

No.	Parameter Penilaian Rating Parameters	Bambang Istianto	Eko Prijatno KB
1	Kontribusi terhadap Pencapaian Target Tim Parameter of Contribution to Team Target Achievement	4	3
2	Jumlah Kajian, Analisis, Rekomendasi Number of Studies, Analysis, Recommendations	4	4
3	Tingkat Keaktifan dalam Kegiatan Tim Level of Activity in Team Activities	4	4
4	Kerjasama dalam Tim Teamwork	4	4
5	Mutu dan Kualitas Konsep Concept Quality	4	4
Rata-Rata Skor Average Score		4	3,8

Keterangan Skor : Score Description:

1 : Tidak Sesuai Harapan Not as Expected

2 : Kurang Sesuai Harapan Lower than Expected

3 : Sesuai Harapan As Expected

4 : Melampaui Harapan Excellent



KOMITE SDM DAN ORGANISASI

HC AND ORGANIZATION COMMITTEE

Dewan Komisaris membentuk Komite SDM dan Organisasi dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, khususnya terkait kebijakan dan strategi Perusahaan dari sisi SDM maupun Organisasi. Komite SDM dan Organisasi secara khusus mengevaluasi dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas Program Pengembangan SDM dan Organisasi yang mendukung *Human Capital Readiness* (HCR) dan *Organizational Capital Readiness* (OCR), nominasi pejabat satu tingkat di bawah Direksi serta remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi.

The Board of Commissioners established the HC and Organization Committee to assist the implementation of its duties and responsibilities, specifically related to Company policies and strategies from the Human Capital aspect as well as the Organizational aspect. The HC and Organization Committee specifically evaluates and provides input to the Board of Commissioners on the Human Capital and Organizational Development Program that supports Human Capital Readiness (HCR) and Organizational Capital Readiness (OCR), nomination of officials one level below the Board of Directors and remuneration for the Board of Commissioners and Directors.

Dasar Pembentukan Komite SDM dan Organisasi

Establishment Basis for HC and Organization Committee

Komite SDM dan Organisasi dibentuk dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012. Komite SDM dan Organisasi PJB terakhir kali ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 006.K/DK/PJB/2019 tanggal 13 Maret 2019, tentang Penggantian Susunan Anggota Komite SDM dan Organisasi pada Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali dan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 003.K/DK/PJB/2019 tanggal 2 Januari 2019, tentang Pembentukan Komite SDM dan Organisasi pada Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali, sebagai pemutakhiran dari Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 005.K/DK/PJB/2018 tanggal 20 Agustus 2018 tentang Perpanjangan Masa Tugas Komite (Komite Audit, Komite Manajemen Risiko & Kepatuhan dan Komite SDM & Organisasi) Pada Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali.

HC and Organization Committee was established by referring to Law Number 19 of 2003; Law Number 40 of 2007 and SOE Ministry Regulation Number: PER-12/MBU/2012 on August 24, 2012. PJB's HC and Organization Committee's establishment was last determined in accordance with the Decree of the Board of Commissioners Number: 006.K/DK/PJB/2019 on March 13, 2019, concerning the Structure Reformation of HC and Organizations Committee in the Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa Bali and the Decree of the Board of Commissioners Number: 003.K / DK / PJB / 2019 on January 2, 2019, concerning the Establishment of the HC and Organization Committee at the Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa Bali, as an update of the Decree of the Board of Commissioners Number: 005.K/DK/PJB/2018 on August 20, 2018 concerning Extension of the Term of Office of the Committee (Audit Committee, Risk & Compliance Management Committee and HC and Organization Committee) in the Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa Bali.

Susunan Komite SDM dan Organisasi

HC and Organization Committee Composition

Komite SDM dan Organisasi PJB dipimpin oleh seorang Ketua yang merupakan anggota Dewan Komisaris dan dibantu oleh Wakil Ketua, Sekretaris merangkap anggota dan setidaknya 2 (dua) orang Anggota. Susunan Komite SDM dan Organisasi Perusahaan sampai dengan bulan maret tahun 2019 adalah sebagai berikut:

PJB's HC and Organization Committee is led by a Chairperson who is a member of the Board of Commissioners and is assisted by a Vice Chairperson Chairperson, Secretary and concurrent members and at least 2 (two) Members. The composition of the HC and Organization Committee as of March 2019 is as follows:

Susunan Komite SDM dan Organisasi

HC and Organization Committee Composition

Nama Name	Jabatan Position	Keahlian Expertise	Periode Jabatan Term of Office
Alihuddin Sitompul	Ketua Chairperson (Komisaris) (Commissioner)	Manajemen Bisnis Business management	Januari - Maret 2019 January - March 2019
Defy Indiyanto Budiarto	Wakil Ketua Vice Chairperson (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Komunikasi Korporat, Strategi Korporasi Corporate Communication, Corporate Strategy	Januari - Maret 2019 January - March 2019
Chaerudin Darsa	Sekretaris Secretary (Pihak Independen) (Independent Party)	Human Capital, Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, <i>Corporate Culture</i> Human Capital, Occupational Safety and Health Management, Corporate Culture	Januari - Maret 2019 January - March 2019
Rahardjo Setyo Budi	Anggota Member (Pihak Independen) (Independent Party)	Human Capital dan Manajemen Bisnis Human Capital and Business Management	Januari - Maret 2019 January - March 2019

Pada tahun 2019, terdapat pergantian anggota Komite SDM dan Organisasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 006.K/DK/PJB/2019 tanggal 13 Maret 2019, tentang Penggantian Susunan Anggota Komite SDM dan Organisasi pada Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali. Susunan Komite SDM dan Organisasi Perusahaan sampai dengan bulan Desember tahun 2019 adalah sebagai berikut:

In 2019, there was a change in the composition of HC and Organization Committee in accordance with the Decree of the Board of Commissioners No. 006.K/DK/PJB/2019 on March 13, 2019, concerning the Member Reformation of the HC and Organization Committee in the Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa Bali. The composition of the HC and Organization Committee as of December 2019 is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Keahlian Expertise	Periode Jabatan Term of Office
Defy Indiyanto Budiarto	Ketua Chairperson (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Komunikasi Korporat, Strategi Korporasi Corporate Communication, Corporate Strategy	Maret - Desember 2019 March- December 2019
Jisman P. Hutajulu	Wakil Ketua Vice Chairperson (Komisaris) (Commissioner)	Keselamatan, Standardisasi Ketenagalistrikan dan <i>Inspector, Auditor</i> Safety, Electricity Standardization and Inspector, Auditor	Maret - Desember 2019 March- December 2019
Chaerudin Darsa	Sekretaris Secretary (Pihak Independen) (Independent Party)	<i>Human Capital</i> , Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, <i>Corporate Culture</i> Human Capital, Occupational Safety and Health Management, Corporate Culture	Maret - Desember 2019 March- December 2019
Rahardjo Setyo Budi	Anggota Member (Pihak Independen) (Independent Party)	<i>Human Capital</i> dan Manajemen Bisnis Human Capital and Business Management	Maret - Desember 2019 March- December 2019



Profil Anggota Komite SDM dan Organisasi Profile of HC and Organization Committee



Defy Indiyanto Budiarto

Ketua Komite SDM dan Organisasi
Chairperson of the HC and
Organization Committee

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
The profile can be seen in the Board of
Commissioners Profile section.



Jisman P. Hutajulu

**Wakil Ketua Komite SDM dan
Organisasi**
Vice Chairperson of the HC and
Organization Committee

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
The profile can be seen in the Board of
Commissioners Profile section.



Chaerudin Darsa

Sekretaris Komite SDM dan Organisasi
Secretary of the HC and Organization Committee

Warga Negara Indonesia, 60 tahun, berdomisili di Depok.

Dasar Pengangkatan

Diangkat berdasarkan SK Dewan Komisaris Nomor: 005.K/DK/PJB/2018 tanggal 20 Agustus 2018 diperpanjang dengan SK Dewan Komisaris Nomor: 006.K/DK/PJB/2019 tanggal 13 Maret 2019.

Pendidikan

Menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (ITB) tahun 1984 dan S2 Manajemen Keuangan dari UPN Veteran tahun 2005. Selain itu, pendidikan non-formal yang pernah diikuti untuk mendapatkan sertifikasi diantaranya Sertifikasi *Quality Management Systems Assessment* (1997), *Malcolm Baldrige Criteria* (2013) dan *Sosialization of ISO/IEC 17021-1 : 2015 ; ISO/IEC 17021-3 : 2015; ISO 9001:2015* (2015).

Riwayat Pekerjaan

Pernah berkarir sebagai Asisten ahli survei hidrologi dan Kasie Pemetaan (1984-1996), Asisten Manajer Sertifikasi Sistem Mutu (1996-2007), Manajer Bidang Pengembangan Usaha PT PLN (2007-2010), Manajer Senior Budaya Perusahaan dan Manajemen Perubahan pada Direktorat SDM PT PLN (2010-2015), Selain itu juga menjadi Auditor ISO 9001 & 14001 LMK QSC (1996-2010), Dosen Tetap STT PLN (2008-2011), Instruktur PLN Pusdiklat (2008-Sekarang), *Auditor SNI Award* (2010-Sekarang), *Auditor KAN SNI 17021* (2012-Sekarang), Anggota *Governing Board LSP PLN Pusdiklat* (2014-2015), *Auditor Malcolm Baldrige/KPKU* (2015-Sekarang) dan Konsultan ISO 9001 (2015-Sekarang), Ketua Komite Pengaman Ketidakberpihakan Lembaga Sertifikasi Produk LMK *Cerification PT PLN* (Persero) Pusat Sertifikasi (2019 – sekarang)

Indonesian citizen, 60 years old, domiciled in Depok.

Decree of Appointment

Appointed in accordance with the Board of Commissioners' Decree Number: 005.K/DK/PJB/2018 on August 20, 2018, extended by the Board of Commissioners' Decree Number: 006.K/DK/PJB/2019 on March 13, 2019.

Education

He earned his Bachelor of Civil Engineering from the Bandung Institute of Technology (ITB) in 1984 and a Master of Financial Management from UPN Veteran in 2005.

Also, non-formal education to obtain certification includes Quality Management Systems Assessment Certification (1997), Malcolm Baldrige Criteria (2013) and Sosialization of ISO / IEC 17021-1: 2015; ISO / IEC 17021-3: 2015; ISO 9001: 2015 (2015).

Work Experiences

Started career as Hydrology Survey Expert Assistant and Head of Mapping Section (1984-1996), Quality System Certification Manager Assistant (1996-2007), Business Development Manager at PT PLN (2007-2010), Corporate Culture and Change Management Senior Manager at PT PLN HC Directorate (2010-2015), in addition, ISO 9001 & 14001 LMK QSC Auditor (1996-2010), Non-Permanent Lecturer at STT PLN (2008-2011), Instructor at PLN Education and Learning Center (2008-present), SNI Award Auditor (2010-present), KAN SNI 17021 Auditor (2012-present), Governing Board LSP Member at PLN Education and Learning Center (2014-2015), Malcolm Baldrige/KPKU Auditor (2015-present) and ISO 9001 Consultant (2015-present). Chairperson of LMK Certification Independence Committee of PT PLN (Persero) Certification Center (2019 - present)



Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan Audit
Audited Financial Statements



Referensi Kriteria ARS
ARS Criteria Reference



Rahardjo Setyo Budi

Anggota Komite SDM dan Organisasi
Member of the HC and Organization Committee

Warga Negara Indonesia, 61 tahun, berdomisili di Tangerang Selatan.

Dasar Pengangkatan

Diangkat berdasarkan SK Dewan Komisaris Nomor: 005.K/DK/PJB/2018 tanggal 20 Agustus 2018 diperpanjang dengan SK Dewan Komisaris Nomor: 006.K/DK/PJB/2019 tanggal 13 Maret 2019.

Pendidikan

Menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Mesin dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) (1985).
Selain itu, pendidikan non-formal yang pernah diikuti diantaranya Pelatihan Pemetaan Proses Bisnis dan Penyusunan Uraian Jabatan (2003), Seminar *Strategic Outsourcing* (2004), CIAC *Certification Course for Call Center "Operations Management"* (2008), Pelatihan Manajemen Risiko Menengah untuk Manajer (2011) dan Project Management Training (2014).

Riwayat Pekerjaan

Pernah berkarir sebagai *Vice Chairperson Manager* Administrasi Niaga PT PLN (2008), Manajer *Monitoring Anggaran* Direktorat Konstruksi Strategis PT PLN (2008-2010), Manager Senior Konstruksi Pembangkit Direktorat Operasi Jawa Bali, PT PLN (2010-2012), Manager Senior Konstruksi Pembangkit Direktorat Konstruksi PT PLN (2012-2014).

Indonesian citizen, 61 years old, based in South Tangerang.

Decree of Appointment

Appointed in accordance with the Board of Commissioners' Decree Number: 005.K/DK/PJB/2018 on August 20, 2018, extended by the Board of Commissioners' Decree Number: 006.K/DK/PJB/2019 on March 13, 2019.

Education

He earned a Bachelor of Mechanical Engineering from Sepuluh Nopember Institute of Technology Surabaya (ITS) (1985).
Also, non-formal education programs include Training on Mapping Business Processes and Positioning Descriptions (2003), Strategic Outsourcing Seminar (2004), CIAC Certification Course for Call Centers "Operations Management" (2008), Intermediate Risk Management Training for Managers (2011) and Project Management Training (2014).

Work Experiences

He once served as Vice Manager of PT PLN Commercial Administration (2008), Manager of Budget Monitoring for the Strategic Construction Directorate of PT PLN (2008-2010), Senior Manager of Power Plant Construction Directorate for Java and Bali Operations, PT PLN (2010-2012), Senior Manager of PT PLN Power Plant Construction Directorate (2012-2014).



Masa Jabatan Komite SDM dan Organisasi

Term of Office of HC and Organization Committee

Masa jabatan Komite SDM dan Organisasi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris yaitu 1 (satu) tahun. Masa jabatan Komite SDM dan Organisasi dapat diperpanjang mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris, sedangkan anggota Komite SDM dan Organisasi yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris menjabat paling lama 2 (dua) tahun diangkat untuk 1 (satu) periode masa jabatan, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali pada masa jabatan berikutnya.

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite SDM dan Organisasi dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PJB dan dilaporkan kepada RUPS. Pemberhentian anggota Komite SDM dan Organisasi dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatannya dan dapat pula diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris apabila tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya.

The term of office of the HC and Organization Committee is determined in accordance with Decree of the Board of Commissioners which is 1 (one) year. The term of office of the HC and Organization Committee can be extended following the term of office of the Board of Commissioners, while members of the Committee who are not members of the Board of Commissioners have a maximum of 2 (two) years of appointment for 1 (one) term of office, and can be reappointed for 1 (one) time in the next period.

The appointment and dismissal of HC and Organization Committee is in accordance with PJB's Board of Commissioners' Decree and reported to the GMS. Dismissal of members of HC and Organization Committee can be done if the term ends and can also be dismissed in accordance with the decree of the Board of Commissioners if the performance is not competent.

Independensi Komite SDM dan Organisasi

Independence of the HC and Organization Committee

Komite SDM dan Organisasi harus memenuhi kriteria independensi serta mampu melaksanakan tugasnya secara independen, semata-mata untuk kepentingan Perusahaan, terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan Perusahaan.

The HC and Organization Committee must meet the independence criteria to perform their tasks independently for the benefit of the Company, regardless of the influence of various parties with a conflict of interests against the Company.

Kriteria Independensi	Independence Criteria	Defy Indiyanto Budiarto	Jisman P. Hutajulu	Chaerudin Darsa	Rahardjo Setyo Budi
Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit dan non-audit atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.	Not a person in a public accounting firm, legal consulting office, or other party providing audit and non-audit services or other consulting services to the Company within the past 6 (six) months.	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung di Perusahaan.	Not having any share either directly or indirectly in the Company.	✓	✓	✓	✓
Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan/atau mengendalikan Perusahaan dalam waktu enam bulan terakhir.	Not a person who has the authority and responsibility to plan, lead and / or control the Company within the past six months.	✓	✓	✓	✓

Kriteria Independensi	Independence Criteria	Defy Indiyanto Budiarto	Jisman P. Hutajulu	Chaerudin Darsa	Rahardjo Setyo Budi
Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun ke samping atau hubungan semenda.	Not family-affiliated with members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners up to the second degree, either in a straight line or sideways or in a relationship.	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan usaha langsung dan tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan; dan	Not having direct and indirect business relationships related to the Company's business activities; and	✓	✓	✓	✓
Tidak sedang berada dalam institusi yang kegiatan usahanya memberikan jasa kepada Perusahaan.	Not serving in an institution whose business activities provide services to the Company.	✓	✓	✓	✓
Komite SDM dan Organisasi telah memenuhi kriteria independen dan mampu melaksanakan tugas secara independen, semata-mata untuk kepentingan Perusahaan, terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan Perusahaan. The HC and Organization Committee has fulfilled the independent criteria to perform its duties independently for the benefit of the Company, regardless of the influence of various parties with a conflict of interests against the Company.					

Pedoman Kerja Komite SDM dan Organisasi HC and Organization Committee Charter

Dewan Komisaris telah menetapkan pedoman kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas Komite SDM dan Organisasi yang disebut Piagam Komite SDM dan Organisasi pada tahun 2018. Piagam Komite SDM dan Organisasi mengatur beberapa hal terkait antara lain: Maksud dan Tujuan, Fungsi dan Tugas Pokok, Tanggung Jawab dan Wewenang, Organisasi dan Keanggotaan, *Key Performance Indicator* dan Penilaian kinerja Komite, Mekanisme Kerja dan Kode Etik.

Piagam Komite SDM dan Organisasi dikaji ulang secara berkala guna memastikan bahwa cakupan pedoman tersebut senantiasa sejalan dengan kebutuhan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *best practices*.

The Board of Commissioners has set work guidelines to support the implementation of the HC and Organization Committee tasks or HC and Organization Committee Charter of 2018. The HC and Organization Committee Charter regulates several matters including: Purpose and Objectives, Main Functions and Duties, Responsibilities and Authority, Organization and Membership, Key Performance Indicator and Performance Assessment, Work Mechanism and Code of Conduct.

The HC and Organization Committee Charter is reviewed regularly to ensure the compliance with the needs, applicable laws and regulations and best practices.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite SDM dan Organisasi Tasks and Responsibilities of HC and Organization Committee

Komite SDM dan Organisasi secara umum bertugas dan bertanggung jawab membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terkait pengelolaan SDM dan Organisasi. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite SDM dan Organisasi mengacu pada Piagam dan surat penetapan Komite SDM dan Organisasi. Adapun tugas dan tanggung jawab Komite SDM dan Organisasi terdiri dari:

1. Melakukan analisa, memberi masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan, pedoman strategi dan sistem SDM dan Organisasi perusahaan.

The HC and Organization Committee generally has the task and responsibility to assist the Board of Commissioners in conducting oversight related to HC and Organization management. The implementation of the tasks and responsibilities of the HC and Organization Committee refers to the Charter and letter of determination. The tasks and responsibilities of the HC and Organization Committee consist of:

1. Analyzing and providing input and recommendations to the Board of Commissioners on policies, strategy guidelines and HC and organizations systems.

2. Melakukan analisa, memberi masukan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan SDM dan Organisasi yang dilakukan oleh Perusahaan.
3. Bersama komite lainnya menilai dan memberi masukan sesuai dengan bidang komite kepada Dewan Komisaris atas :
 - a. Pelaksanaan Anggaran Dasar dan Board Manual Perusahaan;
 - b. Rencana Kerja Jangka Panjang (RJPP);
 - c. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP); Laporan Tahunan, Triwulanan dan Laporan Kinerja bulanan;
 - d. *Good Corporate Governance* (GCG);
 - e. *Key Performance Indicator* (KPI) Perusahaan;
 - f. KPI Dewan Komisaris.
4. Melakukan analisa, memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris khususnya atas kebijakan dan pelaksanaan kegiatan :
 - a. Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) dan *Malcolm Baldrige*;
 - b. Pengembangan Teknologi Informasi.
5. Mempelajari, mengevaluasi dan memberikan masukan terhadap Laporan Manajemen, Kinerja SDM dan Organisasi dan Laporan K3L yang disusun oleh Direksi.
6. Melakukan analisa, memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas usulan-usulan Direksi dalam hal:
 - a. Program Pengembangan SDM dan Organisasi yang mendukung *Human Capital Readiness* (HCR) dan *Organizational Capital Readiness* (OCR);
 - b. Nominasi pejabat satu tingkat di bawah Direksi;
 - c. Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
7. Melakukan analisa, memberi masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan, strategi dan pelaksanaan pengelolaan LK3 (Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja) Perusahaan.
8. Melakukan analisa, memberi masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan, strategi dan pelaksanaan pengelolaan Sistem Informasi Perusahaan serta Integrasi pengelolaannya.
9. Melakukan analisa, memberi masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan, strategi dan pelaksanaan pengelolaan Budaya Perusahaan, Hubungan Industrial serta pelaksanaan *reward and punishment* pegawai.
10. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Komite SDM dan Organisasi, melaksanakan rapat-rapat komite, membuat risalah rapat, dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas-tugas komite secara berkala kepada Dewan Komisaris.
11. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian, memastikan selesainya dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sesuai lingkup tugas dan kewajiban Komite Dewan Komisaris.
12. Menjaga kerahasiaan data serta informasi perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Dewan Komisaris.

2. Analyzing and providing input to the Board of Commissioners on the implementation of HC and Organizational management activities carried out by the Company.
3. Together with other committees assess and provide input in accordance with the area of the committee to the Board of Commissioners for:
 - a. Implementation of the Company's Articles of Association and Board Manual;
 - b. Long-term Work Plan (CLP);
 - c. Company Work Plan and Budget (ABOP); Annual Report, Quarterly and Monthly Performance Report;
 - d. *Good Corporate Governance* (GCG);
 - e. Company's *Key Performance Indicator* (KPI);
 - f. KPI Board of Commissioners.
4. Conduct analysis, provide input and recommendations to the Board of Commissioners specifically on policies and implementation of activities:
 - a. Superior Performance Assessment Criteria (KPKU) and *Malcolm Baldrige*;
 - b. Information Technology Development.
5. Study, evaluate and provide input on Management Reports, HC and Organization Performance and HSE Report prepared by the Directors.
6. Conduct analysis, provide input and recommendations to the Board of Commissioners on Directors' proposals in terms of:
 - a. Human Capital and Organizational Development Programs that support *Human Capital Readiness* (HCR) and *Organizational Capital Readiness* (OCR);
 - b. Nomination of officials one level below the Board of Directors;
 - c. Remuneration for the Board of Commissioners and Directors.
7. Analyze, provide input and recommendations to the Board of Commissioners on the policies, strategies and implementation of the Company's EHS (Environment, Health and Safety) management.
8. Analyze, provide input and recommendations to the Board of Commissioners on the policies, strategies and implementation of the management of the Company's Information System and the integration of its management.
9. Conduct analysis, provide input and recommendations to the Board of Commissioners on policies, strategies and implementation of the management of Corporate Culture, Industrial Relations and the implementation of employee reward and punishment.
10. Arranging activity plans and budgets of the HC and Organization Committee, carrying out committee meetings, making minutes of meetings, and submitting reports on the implementation of committee duties periodically to the Board of Commissioners.
11. Identifying matters that require attention, ensuring completion and carrying out other tasks assigned by the Board of Commissioners in accordance with the scope of duties and obligations of the Board of Commissioners Committee.
12. Maintaining the confidentiality of company data and information in accordance with the provisions in force in the Board of Commissioners.



Rencana Program Komite SDM dan Organisasi HC and Organization Committee Program Plans

Komite SDM dan Organisasi telah menyusun rencana program kerja Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan tahun 2019 dalam mendukung efektifitas pelaksanaan tugasnya, sebagai berikut:

1. Kegiatan Internal Komite SDM dan Organisasi.
 - a. Evaluasi Laporan Manajemen Triwulanan dan Laporan Kinerja setiap bulan.
 - b. Evaluasi pencapaian target Program Bidang SDM dan Organisasi.
 - c. Evaluasi pencapaian Program LK3.
 - d. Evaluasi pencapaian target OCR dan HCR.
 - e. Mengevaluasi dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terhadap usulan Direksi dalam hal pengembangan Organisasi, Nominasi dan Remunerasi Perusahaan.
 - f. Menyiapkan Laporan Kegiatan Komite SDM dan Organisasi.
 - g. Menyiapkan dan memantau Program Kerja Komite SDM dan Organisasi.
 - h. Berpartisipasi aktif dalam Rapat Internal Dewan Komisaris (RID), untuk membahas bahan rapat pengawasan dengan Direksi.
 - i. Memberikan masukan (apabila diminta) kepada Dewan Komisaris dalam rapat pengawasan dengan Direksi.
2. Kegiatan bersama Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan.
 - a. Melakukan rapat mingguan antar Komite dan Sekretaris Dewan Komisaris.
 - b. Melakukan evaluasi Laporan Kinerja dan Laporan Manajemen.
 - c. Evaluasi atas usulan RKAP 2020 dan usulan revisi RKAP 2019.
 - d. Evaluasi atas Kinerja Anak Perusahaan/Perusahaan Afiliasi, Evaluasi atas IT *Governance*, dan Evaluasi TLD (*Three Lines of Defense*).

The HC and Organization Committee have drawn up a work plan for the Risk Management and Compliance Committee in 2019 to support the effectiveness of carrying out their duties, as follows:

1. Internal Activities of the HC and Organization Committee.
 - a. Evaluation of the Quarterly Management Report and the Monthly Performance Report.
 - b. Evaluate the achievement of targets in the Field of HC and Organizational Programs.
 - c. Evaluation of HSE Program achievements.
 - d. Evaluate the achievement of OCR and HCR targets.
 - e. Evaluate and provide input to the Board of Commissioners on the Board of Directors' proposals in terms of developing the Company's Organization, Nomination and Remuneration.
 - f. Prepare a Report on the Activities of the HC and Organization Committee.
 - g. Prepare and monitor the Work Program of the HC and Organization Committee.
 - h. Actively participating in the Board of Commissioners' Internal Meeting (RID), to discuss the material of the supervisory meeting with the Directors.
 - i. Provide input (if requested) to the Board of Commissioners in a supervisory meeting with the Board of Directors.
2. Joint activities with the Board of Commissioners' Secretary, Audit Committee and Risk and Compliance Committee.
 - a. Conduct weekly meetings between the Committee and the Secretary of the Board of Commissioners.
 - b. Evaluate Performance Reports and Management Reports.
 - c. Evaluate the 2020 RKAP proposal and the proposed 2019 RKAP revision.
 - d. Evaluation of the Performance of Subsidiaries / Affiliated Companies, Evaluation of IT Governance, and Evaluation of TLD (Three Lines of Defense).



Pelaksanaan Tugas Komite SDM dan Organisasi

Task Implementation of HC and Organization Committee

Komite SDM dan Organisasi telah melaksanakan rencana program kerja Komite Audit tahun 2019 dalam mendukung tugas Dewan Komisaris sesuai dengan Piagam Komite SDM dan Organisasi dengan melakukan telaah, memberikan masukan atau rekomendasi, menghadiri rapat-rapat dengan Dewan Komisaris, Direksi dan pertemuan lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas Komite SDM dan Organisasi serta melakukan kunjungan kerja bersama Dewan Komisaris. Secara umum, Komite SDM dan Organisasi telah melakukan pengawasan dan pendampingan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Mengevaluasi Laporan Kinerja setiap bulan dan Laporan Manajemen Triwulanan tahun 2019.
2. Mengevaluasi pencapaian target Program Bidang SDM dan Organisasi.
3. Mengevaluasi pencapaian target *Zero Accident* terkait Implementasi K3L dan Reposisi Fungsi K3L dan Persiapan Proper.
4. Mengevaluasi pencapaian target OCR dan HCR.
5. *Monitoring* dan Evaluasi Tata Kelola IT terkait IT *Master Plan*, *Enterprise Architecture* (EA) PJB, IMS - 2.0 dan Pengembangan Teknologi Informasi.
6. Menyampaikan Laporan Kegiatan Komite SDM dan Organisasi secara Triwulanan sepanjang tahun 2019.
7. Menyiapkan Program Kerja Komite SDM dan Organisasi tahun 2020.
8. Berpartisipasi Aktif dalam Rapat Internal Dewan Komisaris (RID) sebanyak 12 kali.
9. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dalam rapat pengawasan dengan Direksi sebanyak 12 kali.
10. Mengikuti rapat Komite Audit; Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan; Sekretaris Dewan Komisaris dengan manajemen sebanyak 28 kali.
11. Mengikuti rapat antar Komite dan Sekretaris Dewan Komisaris sebanyak 41 kali.
12. Mengikuti Dewan Komisaris ke Unit sebanyak 18 kali.

The HC and Organization Committee have implemented the Audit Committee work plan in 2019 to support the duties of the Board of Commissioners in accordance with the Charter of the HC and Organization Committee by reviewing, providing input or recommendations, attending meetings with the Board of Commissioners, Directors and other meetings related to implementation the tasks of the HC and Organization Committee and conducting work visits with the Board of Commissioners. In general, the HC and Organization Committee has conducted supervision and assistance for the following matters:

1. Evaluate the monthly Performance Report and the 2019 Quarterly Management Report.
2. Evaluate the achievement of targets in the aspects of Human Capital and Organizational Programs.
3. Evaluate the achievement of the Zero Accident target related to HSE Implementation and Repositioning of HSE Functions and Proper Preparation.
4. Evaluate the achievement of OCR and HCR targets.
5. Monitor and Evaluate IT Governance related to IT Master Plan, PJB Enterprise Architecture (EA), IMS - 2.0 and Information Technology Development.
6. Submit Quarterly the HC and Organization Committee Activity Reports throughout 2019.
7. Prepare the HC and Organization Committee Work Program in 2020.
8. Active Participation in the Internal Meeting of the Board of Commissioners (RID) 12 times.
9. Provide input to the Board of Commissioners in 12 supervisory meetings with the Directors.
10. Follow the Audit Committee meeting; Risk and Compliance Management Committee; Secretary of the Board of Commissioners with management 28 times.
11. Participate in meetings between the Committees and the Board of Commissioners' Secretary 41 times.
12. Follow the Board of Commissioners to the Unit 18 times.

Rapat Komite SDM dan Organisasi

HC and Organization Committee Meeting

Komite SDM dan Organisasi melakukan pertemuan rutin dengan Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan serta melakukan pertemuan dengan fungsi terkait pelaksanaan pengelolaan SDM dan organisasi di Perusahaan sebagaimana diuraikan dalam BoC *Manual* PJB. Komite SDM dan Organisasi telah melaksanakan rapat internal sebanyak 15 kali sepanjang tahun 2019.

The HC and Organization Committee conducts regular meetings with the Board of Commissioners at least 1 (once) a month and holds meetings with functions related to the implementation of Human Capital management and organization in the Company as outlined in PJB's BoC Manual. The HC and Organization Committee has held 15 internal meetings throughout 2019.

Agenda Rapat Komite SDM dan Organisasi

HC and Organization Committee Meeting Agenda

No.	Tanggal Tanggal	Agenda	Agenda
1	3 Januari 2019 January 3, 2019	Progress Enterprise Architecture (EA).	Progress Enterprise Architecture (EA).
2	3 Januari 2019 January 3, 2019	Pengembangan IT dan Pemenuhan ISO 27001.	IT Development and ISO 27001 Compliance.
3	23 Februari 2019 February 23, 2019	Pembahasan LK3 di Unit-Unit Pembangkit PJB.	Discussion on HSE in PJB Generation Units.
4	20 Maret 2019 March 20, 2019	Pembahasan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PJB.	Discussion on PJB Collective Labor Agreement (PKB).
5	9 April 2019 April 9, 2019	Pembahasan Progress Pengembangan PJB IMS 2.0 Enterprise Architecture (EA).	Discussion on the Development Progress of PJB IMS 2.0 Enterprise Architecture (EA).
6	23 April 2019 April 23, 2019	Pembahasan Pencapaian Kinerja Korporat PJB.	Discussion on PJB Corporate Performance Achievement.
7	9 Mei 2019 May 9, 2019	Pembahasan Manajemen Keamanan Informasi PJB ISO 27001.	Discussion on Information Security Management PJB ISO 27001.
8	23 Mei 2019 May 23, 2019	Pembahasan Persiapan Proper dan K3L di PJB.	Discussion on Proper and HSE Preparation at PJB.
9	10 Juli 2019 July 10, 2019	Pembahasan Rencana Penggabungan Unit-Unit di PJB dalam rangka mendukung Kontrol Direksi.	Discussion on Plans for Merging Units in PJB in order to support the Directors' Control.
10	24 Juli 2019 July 24, 2019	Evaluasi K3L dan Persiapan Proper 2019.	HSE Evaluation and Proper Preparation 2019.
11	14 Agustus 2019 August 14, 2019	Pembahasan K3L, HIRAC, IK dan JSA.	Discussion of K3L, HIRAC, IK and JSA.
12	15 Agustus 2019 August 15, 2019	Pembahasan HCR, OCR dan HRIS PJB.	Discussion of HCR, OCR and HRIS PJB.
13	16 September 2019 September 16, 2019	Pembahasan Aplikasi Izat dan <i>Permit to Works</i> (PTW).	Discussion of 'Izat' and Permit to Works (PTW) Applications.
14	6 November 2019 November 6, 2019	Pembahasan Rencana Re-Organisasi PJB.	Discussion on the PJB Reorganization Plan.
15	7 November 2019 November 7, 2019	Pembahasan Pengelolaan (SHM) <i>Stakeholder</i> Manajemen PJB.	Management Discussion (SHM) on PJB Stakeholders Management.

Frekuensi Rapat Internal dan Tingkat Kehadiran Anggota Komite SDM dan Organisasi

Internal Meetings Frequency and Attendance Ratio of HC and Organization Committee Members

Nama Name	Frekuensi Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendances	Tingkat Kehadiran Attendance Ratio
Alihuddin Sitompul ¹	3	3	100%
Defy Indiyanto Budiarto	15	15	100 %
Jisman P. Hutajulu ²	12	3	25 %
Chaerudin Darsa	15	13	87%
Rahardjo Setyo Budi	15	13	87%

Keterangan Information :

- Menjabat sebagai Komisaris Perusahaan sampai dengan bulan Maret 2019
Chairperson of the HC and Organization Committee to March 2019
- Menjabat sebagai Komisaris Perusahaan mulai bulan Maret 2019
Vice Chairperson of the HC and Organization Committee from March 2019



Program Pengembangan Kompetensi Komite SDM dan Organisasi HC and Organization Committee Competency Development Program

Anggota Komite SDM dan Organisasi ikut serta dalam kegiatan pengembangan kompetensi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Komite SDM dan Organisasi. Program pengembangan kompetensi Anggota Komite SDM dan Organisasi PJB sepanjang tahun 2019 dapat dilihat pada uraian terkait Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Kepala SPI.

Members of the HC and Organization Committee participate in competency development activities to support the implementation of the Committee's tasks. The competency development program for PJB's HC and Organization Committee in 2019 can be seen in the description related to the Education and Training of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Head of IAU.

Evaluasi Kinerja Komite SDM dan Organisasi Performance Assessment of HC and Organization Committee

Komite SDM dan Organisasi secara berkala dievaluasi dalam rangka memastikan dan mendorong efektifitas pelaksanaan tugas Komite SDM dan Organisasi. Evaluasi kinerja Komite SDM dan Organisasi serta kinerja masing - masing Anggota Komite SDM dan Organisasi dilakukan melalui penilaian berdasarkan kriteria berupa pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan Komite SDM dan Organisasi yang meliputi:

1. Kontribusi terhadap pencapaian target Tim.
2. Jumlah Kajian, Analisis, Rekomendasi.
3. Tingkat keaktifan dalam kegiatan Tim.
4. Kerjasama dalam Tim.
5. Mutu dan Kualitas Konsep.

The HC and Organization Committee is regularly assessed to ensure and support the effective implementation of the HC and Organization Committee's tasks. The performance assessment of the HC and Organization Committee and its members is in accordance with criteria in the form of achieving targets set in the Annual Work Plan of the HC and Organization Committee which includes:

1. Contribution to Team target achievement.
2. The number of studies, analysis, recommendations.
3. Level of activity in Team activities.
4. Teamwork.
5. Concept Quality.

Dewan Komisaris menilai kinerja Komite dan kinerja masing-masing Anggota Komite SDM dan Organisasi yang bukan anggota Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. Hasil Evaluasi tersebut selanjutnya digunakan untuk menyusun langkah-langkah perbaikan, pengembangan dan penyempurnaan yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Berikut adalah hasil evaluasi kinerja Anggota Komite SDM dan Organisasi pada tahun 2019:

The Board of Commissioners assesses the performance of the Committee and its non-Commissioner members at least once a year. The assessment results are then used to develop the steps for improvement, development and improvement needed to support the implementation of the tasks of the Board of Commissioners. The following are the results of the performance assessment of HC and Organization Committee Members in 2019:

Tabel Evaluasi Kinerja Anggota Komite SDM dan Organisasi

Table of the Performance Assessment for HC and Organization Committee Members

No.	Parameter Penilaian Indicators	Chaerudin Darsa	Rahardjo Setyo Budi
1	Kontribusi terhadap Pencapaian Target Tim Contribution to Team Target Achievement	4	3
2	Jumlah Kajian, Analisis, Rekomendasi Number of Studies, Analysis, Recommendations	3	3
3	Tingkat Keaktifan dalam Kegiatan Tim Level of Activity in Team Activities	4	4
4	Kerjasama dalam Tim Teamwork	4	4
5	Mutu dan Kualitas Konsep Concept Quality	4	4
Rata-Rata Skor Average Score		3,8	3,6

Keterangan Skor : Score Description :

- 1 : Tidak Sesuai Harapan Not as Expected
- 2 : Kurang Sesuai Harapan Lower than Expected
- 3 : Sesuai Harapan As Expected
- 4 : Melampaui Harapan Excellent

PELAKSANA FUNGSI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE FUNCTIONS IMPLEMENTER

Pelaksanaan Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi melekat pada tugas dan tanggung jawab Komite SDM dan Organisasi. Sehingga uraian mengenai nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite nominasi dan/atau remunerasi; independensi komite nominasi dan/atau remunerasi; uraian tugas dan tanggung jawab; uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan/atau remunerasi pada tahun buku; frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite nominasi dan/atau remunerasi; dan pernyataan adanya pedoman komite nominasi dan/atau remunerasi dapat dilihat pada uraian terkait Komite SDM dan Organisasi Pada Bab Tata Kelola Perusahaan.

Functions implementation of the Nomination and Remuneration Committee is inherent in the duties and responsibilities of the HC and Organization Committee. So that the description of the name, position, and brief curriculum vitae of the members of the nomination and/or remuneration committee; independency of the nomination and/or remuneration committee; a description of the duties and responsibilities; a description of the implementation of the nomination and/or remuneration committee activities in the financial year; frequency of meetings and attendance of the nomination and/or remuneration committee; and a statement on the existence of guidelines on nomination and/or remuneration committees can be seen in the description related to the HC and Organization Committee in the Corporate Governance Chapter.

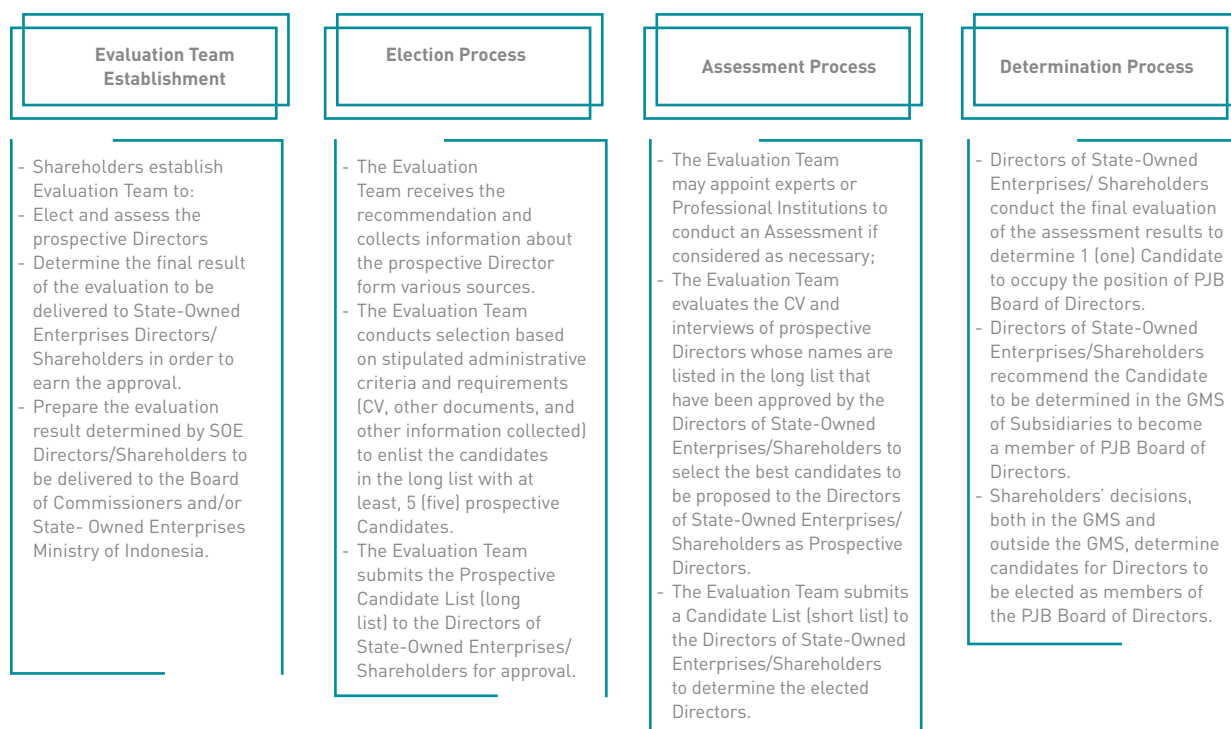
Kebijakan Mengenai Suksesi Direksi Succession Policy of Board of Directors

Kebijakan suksesi Direksi diantaranya mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER- 03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara. Hal tersebut dikarenakan status PJB sebagai anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penunjukan calon anggota Direksi dilakukan melalui serangkaian proses yaitu penjangkaran, penilaian calon Direksi dan penetapan. Bakal Calon Direksi harus memenuhi persyaratan formal, persyaratan materiil dan persyaratan lain yang telah ditetapkan.

The succession policy of Board of Directors, among others, refers to SOE Ministerial Regulation No. PER-03 / MBU / 2012 concerning Guidelines for Appointment of Members of the Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries of State-Owned Enterprises. That is because PJB's status as a subsidiary of a State-Owned Enterprise (BUMN). The appointment of prospective members of the Board of Directors is carried out through a series of processes, namely the selection, evaluation of candidates for Directors and determination. Prospective Directors must meet the formal requirements, material requirements and other requirements that have been set.

Mekanisme Suksesi Direksi Board of Directors Succession Mechanism





Bakal Calon Direksi PJB dapat berasal dari Anggota Direksi Anak Perusahaan BUMN yang sedang menjabat; Pejabat internal Anak Perusahaan BUMN setingkat di bawah Direksi; Pejabat internal BUMN serendah-rendahnya dua tingkat dibawah Direksi, atau jabatan yang lebih rendah sesuai dengan tingkatan Anak Perusahaan yang bersangkutan dalam struktur organisasi BUMN yang bersangkutan, yang ditetapkan oleh Direksi, sumber lain yang telah memiliki reputasi yang baik, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Bakal Calon Direksi diusulkan melalui Dewan Komisaris, setelah dilakukan penilaian dengan *assessment scoring system* yang dimiliki Perusahaan termasuk melakukan pengecekan latar belakang dan referensi. Bakal Calon Anggota Direksi PJB akan ditetapkan menjadi Calon Anggota Direksi setelah dinyatakan lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan yang dilakukan oleh Pemegang saham. Pengangkatan kembali Anggota Direksi pada posisi jabatan yang sama dapat dilakukan apabila dinilai mampu melaksanakan tugasnya dengan baik selama masa jabatannya. Untuk mendapatkan kandidat terbaik, PJB selalu mengedepankan aspek profesionalisme dan *governance*, baik untuk kandidat yang berasal dari internal Perseroan (*talent management system*) maupun dari pihak eksternal. Kandidat yang terpilih melalui mekanisme tersebut kemudian diajukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham untuk dimintai persetujuannya.

PJB's director candidates can come from members of the Board of Directors of the currently holding SOE Subsidiaries; Internal Officials of SOE Subsidiaries are one level below the Board of Directors; SOE internal officials are no less than two levels below the Board of Directors, or a lower position in accordance with the level of the Subsidiary concerned in the organizational structure of the relevant SOE, which is determined by the Directors, other sources that have a good reputation, are relevant and can be accounted for. Candidates for the Board of Directors are proposed through the Board of Commissioners, after an assessment using the Company's assessment scoring system, including background checks and references. Prospective Members of the Board of Directors of the PJB will be determined to become Candidates for the Members of the Board of Directors after passing the Feasibility and Compliance Test conducted by the Shareholders. Reappointment of Members of the Board of Directors in the same position can be done if it is considered capable of carrying out their duties properly during their tenure. To get the best candidates, PJB always puts forward aspects of professionalism and governance, both for candidates from the Company (talent management system) or from external parties. Candidates who are elected through this mechanism are then submitted to the General Meeting of Shareholders for approval.

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

SECRETARY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Sekretariat Dewan Komisaris merupakan organ pendukung Dewan Komisaris yang bertugas membantu dan mendukung kelancaran kegiatan dan tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam melakukan pengurusan perusahaan. Sekretariat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris dan bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Sekretaris Dewan Komisaris diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris PJB dibantu oleh 2 (dua) orang staf Sekretariat Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugasnya.

The Secretariat of the Board of Commissioners is a supporting organ of the Board of Commissioners tasked to assist and support the activities and duties of the Board of Commissioners in supervising and providing advice to the Board of Directors in company management. The Secretariat of the Board of Commissioners is led by a Secretary of the Board of Commissioners who is appointed by the Board of Commissioners and responsible directly to the Board of Commissioners.

The Secretary of the Board of Commissioners is appointed and tasked to report directly to the Board of Commissioners. PJB's Board of Commissioners Secretary is assisted by 2 (two) Secretariat members of the Board of Commissioners in carrying out their duties.

Profil Ringkas Sekretaris Dewan Komisaris

Profile of the Board of Commissioners' Secretary



Endang Sugiarto

Warga Negara Indonesia, 59 tahun, berdomisili di Jakarta.

Menjabat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris sejak tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 004/DK/PJB/2017 tanggal 19 Juli 2017.

Pendidikan

Menyelesaikan pendidikan S1 Komputer dari Universitas Budiluhur pada tahun 1981.

Riwayat Pekerjaan

Mengawali karir sejak tahun 1990 di PLN KJB. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Sekretariat Direksi (2001 - 2008) di PLN Pusat, Sekretaris Perusahaan PLN Enjiniring (2012 - 2014), Manajer Senior Pengembangan *Project Management Office* PLN Pusat (2014 - 2016), Ketua Tim Pembinaan Kinerja Direktorat Konstruksi (2014 - 2016), Ketua Tim *Assessment Malcolm Baldrige* (2014 - 2016) dan Ketua Tim Penyusunan Proses Bisnis dan Ketua Tim Manajemen Risiko pada PLN Enjiniring (2016 - 2017).

Indonesian citizen, 59 years old, based in Jakarta.

Appointed as Secretary of the Board of Commissioners since 2017 based on the Decree of the Board of Commissioners Number: 004 / DK / PJB / 2017 on July 19, 2017.

Education

He earned a Bachelor of Computer Science from Budiluhur University in 1981.

Work Experiences

He has started his career since 1990 at PLN KJB. He was appointed as Head of the Board of Directors Secretariat (2001 - 2008) at PLN Central, PLN Enjiniring Corporate Secretary (2012 - 2014), Senior Manager of PLN Head Office Project Management Development (2014 - 2016), Head of Construction Directorate Performance Development Team (2014 - 2016), Head of the Malcolm Baldrige Assessment Team (2014 - 2016) and Head of the Business Process Preparation Team and Head of the Risk Management Team at PLN Enjiniring (2016 - 2017).

Pedoman Kerja dan Tugas Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Work Guidelines and Tasks of the Board of Commissioners' Secretary

Sekretaris Dewan Komisaris dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris harus memiliki pengetahuan yang cukup terkait Undang-Undang dan peraturan lain yang berhubungan dengan Dewan Komisaris, administrasi, komunikasi serta *managerial skill* yang dibutuhkan. Untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Dewan Komisaris mengacu pada *Board Manual* dalam mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

Board Manual tersebut mengatur mengenai tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris dalam membantu Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan dan implementasi GCG, sebagai berikut:

1. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan di bidang kesekretariatan dalam lingkungan Dewan Komisaris yang rincian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Dewan Komisaris.
2. Mengoordinasikan penyediaan informasi yang dibutuhkan Dewan Komisaris dan Komite-Komite Dewan Komisaris, seperti monitoring tindak lanjut hasil keputusan/rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris, laporan berkala dari Direksi (Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, Laporan Tahunan, Laporan Hasil Pemeriksaan SPI) serta laporan/informasi lainnya mengenai pengelolaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi.
3. Menyusun dan memfinalisasi laporan dan dokumen yang menjadi kewajiban Dewan Komisaris, antara lain Laporan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris.
4. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris, penyiapan dan pengiriman undangan, penyampaian materi rapat serta pembuatan risalah rapat, serta tugas-tugas lain yang terkait.
5. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Komite Komisaris.
6. Mengumpulkan data-data teknis yang berasal dari Komite-Komite Dewan Komisaris untuk keperluan Dewan Komisaris.
7. Menyusun dan mengadministrasikan risalah rapat dan dokumen Dewan Komisaris lainnya serta mengirimkan hasil-hasil keputusan rapat kepada pihak - pihak yang berkepentingan.
8. Menetapkan prosedur teknis kunjungan kerja Dewan Komisaris.
9. Menjadi penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain.
10. Dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris dan wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan tersebut.
11. Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan tugasnya.

The Secretary of the Board of Commissioners in supporting the implementation of the Board of Commissioners' supervisory duties must have sufficient knowledge about the legal and other regulations concerning the Board of Commissioners, administration, communication, and managerial skills. To assist the duties, the Secretary of the Board of Commissioners refers to the Board Manual in supporting the supervisory function of the Board of Commissioners.

The Board Manual regulates the duties and responsibilities of the Secretary of the Board of Commissioners in assisting the Board of Commissioners carry out the functions of supervision and implementation of GCG, as follows:

1. Leading and organizing activities in the secretarial sector of the Board of Commissioners in which the job details are further regulated by the Board of Commissioners.
2. Coordinating the provision of information needed by the Board of Commissioners and the Board of Commissioners' committees, such as follow-up monitoring of the decisions/recommendations and instructions of the Board of Commissioners, periodic reports from Directors (Monthly Reports, Quarterly Reports, Annual Reports, IAU Inspection Reports) and other reports/information regarding the management of the Company by the Board of Directors.
3. Compiling and finalizing reports and documents that are the obligations of the Board of Commissioners, including the Board of Commissioners Supervisory Report and Board of Commissioners Work Plan and Budget.
4. Organizing Board of Commissioners meetings, preparing and sending invitations, delivering meeting material and preparing minutes of meetings, as well as other related tasks.
5. Coordinating and facilitating the activities of the Commissioner Committee.
6. Collecting technical data from the Board of Commissioners' committees for the Board of Commissioner needs.
7. Arranging and administering minutes of meetings and other documents of the Board of Commissioners and delivering the results of the meeting to the stakeholders.
8. Establishing the technical procedures for the work visit conducted by the Board of Commissioners.
9. Acting as the Board of Commissioners liaison officer with other parties.
10. Capable of accessing records or information about employees, funds, assets, and other resources owned by the Company which are related to the implementation of their tasks based on the letter of assignment from the Board of Commissioners and must report the results of the assignment.
11. Secretary and Staff of the Secretariat of the Board of Commissioners must maintain the confidentiality of the Company's documents, data, and information, both from internal and external parties, and only used for their tasks.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris Implementation of the Duties of the Secretary of the Board of Commissioners

Sekretaris Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan Perusahaan oleh Direksi melalui pemberian informasi, review, kajian, dan laporan kepada Dewan Komisaris agar fungsi pengawasan Dewan Komisaris berjalan efektif selama tahun 2019, yang secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Membantu menyusun Rencana Kerja Dewan Komisaris Tahun 2020 dan Realisasi Rencana Kerja Dewan Komisaris 2019.
2. Membantu penyusunan draft laporan Dewan Komisaris yang merupakan kewajiban Dewan Komisaris sesuai ketentuan regulator yang berlaku antara lain:
 - a. Laporan pengawasan Dewan Komisaris.
 - b. Laporan kunjungan kerja Dewan Komisaris.
3. Memantau, mereview dan menginformasikan perkembangan peraturan perundang-undangan terbaru untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris, termasuk pembuatan, pembaharuan/penyesuaian Surat Keputusan Dewan Komisaris serta piagam komite-komite di bawah Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris termasuk mempersiapkan jadwal rapat, materi rapat, menyusun dan mengadministrasikan risalah rapat Dewan Komisaris, menyampaikan saran dan pendapat Dewan Komisaris berdasarkan hasil rapat Dewan Komisaris kepada Direksi serta melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut saran dan pendapat Dewan Komisaris tersebut.
5. Membantu dan mendukung pelaksanaan tugas Komite-komite di bawah Dewan Komisaris sebagai bagian dari tugas Dewan Komisaris berdasarkan peraturan yang berlaku, antara lain:
 - a. Mengkoordinasikan pembagian tugas komite-komite di bawah Dewan Komisaris.
 - b. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan rapat komite-komite di bawah Dewan Komisaris termasuk mempersiapkan materi rapat, menyusun dan mengadministrasikan risalah rapat, serta menyampaikan saran dan pendapat hasil evaluasi dan rapat Komite kepada Dewan Komisaris sebagai masukan.
 - c. Memantau pelaksanaan Rencana Kerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris.
 - d. Memastikan penyelesaian Laporan komite-komite di bawah Dewan Komisaris.

The Secretary of the Board of Commissioners has carried out his task of supporting the implementation of the duties of the Board of Commissioners in carrying out supervision of the implementation of the management of the Company by the Board of Directors through the provision of information, reviews, studies and reports to the Board of Commissioners so that the supervisory function of the Board of Commissioners runs effectively during 2019, which generally covers: things as follows:

1. Assisting in the preparation of the Board of Commissioners Work Plan for 2020 and the realization of the Board of Commissioners Work Plan for 2019.
2. Assisting in the preparation of the Board of Commissioners report draft as the responsibility of the Board of Commissioners following applicable regulatory provisions, including:
 - a. Board of Commissioners supervision report.
 - b. Report on the work visit of the Board of Commissioners.
3. Monitoring, reviewing, and informing the development of the latest laws and regulations to be submitted to the Board of Commissioners, including the establishment, update, and/or adjustment of the Decree of the Board of Commissioners and the charter of the committees under the Board of Commissioners based on the applicable laws and regulations.
4. Coordinating and conducting Board of Commissioners meetings including preparing meeting schedules, meeting materials, preparing and administering minutes of Board of Commissioners meetings, submitting suggestions and opinions of the Board of Commissioners based on the results of the Board of Commissioners meeting to the Board of Directors and monitoring the follow up of the Board of Commissioners' suggestions and opinions.
5. Assisting and supporting the implementation of the duties of the Committees under the Board of Commissioners as part of the duties of the Board of Commissioners based on applicable regulations, including:
 - a. Coordinating the distribution of duties of the committees under the Board of Commissioners.
 - b. Coordinating and conducting committee meetings under the Board of Commissioners including preparing meeting materials, compiling and administering minutes of meetings, and submitting suggestions and opinions on the results of evaluations and Committee meetings to the Board of Commissioners as input.
 - c. Monitoring the implementation of the Work Plan of the committees under the Board of Commissioners.
 - d. Ensuring the completion of reports of the committees under the Board of Commissioners.

6. Melaksanakan tugas administratif terkait kelancaran tugas Komisaris, yaitu pengelolaan, penyimpanan dan administrasi dokumen/surat-menyurat Komisaris termasuk mempersiapkan surat-surat persetujuan serta masukan/saran Dewan Komisaris yang bersifat strategis yang disampaikan kepada Direksi.

6. Performing administrative tasks related to the effective functioning of the Commissioners, namely management, storage, and administration of Commissioners' documents or correspondence including preparing approval letters and strategic Board of Commissioners' input/recommendation submitted to the Board of Directors.

Penilaian Kinerja Sekretaris Dewan Komisaris Performance Assessment of the Board of Commissioners' Secretary

Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris senantiasa dievaluasi secara internal dalam lingkup organ Dewan Komisaris 1 (satu) kali dalam setahun. Penilaian yang dilakukan oleh Dewan Komisaris mengacu kepada Fungsi Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris serta peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

The task implementation of the Board of Commissioners is always assessed internally and annually within the scope of the Board of Commissioners' organs. The assessment conducted by the Board of Commissioners refers to the Function of the Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners' Secretary as well as the regulations set by the Board of Commissioners.

Remunerasi Sekretaris Dewan Komisaris Remuneration of the Board of Commissioners' Secretary

Dewan Komisaris menetapkan penghasilan Sekretaris Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan. Besaran dan jenis penghasilan Sekretaris Dewan Komisaris terdiri dari honorarium, Fasilitas dan Tunjangan.

The Board of Commissioners determines the income for its Secretary by considering the Company's current condition. The amount and type of income for the Secretary of the Board of Commissioners consists of an honorarium, facilities, and benefits.



SEKRETARIS PERUSAHAAN

CORPORATE SECRETARY

Sekretaris Perusahaan sebagai organ pendukung dalam struktur organ tata kelola Perusahaan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu, Sekretaris Perusahaan berperan dalam memfasilitasi komunikasi antara organ Perusahaan, bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan, perencanaan serta memastikan efektivitas dan transparansi komunikasi perusahaan, hubungan kelembagaan, hubungan investor dengan tetap memperhatikan prinsip standar etika Perusahaan, prinsip tata kelola Perusahaan, dan nilai-nilai Perusahaan.

The Corporate Secretary as a supporting organ in the structure of the corporate governance organ has an important role in ensuring that the company complies with regulations regarding disclosure requirements in line with the principles of good corporate governance. Additionally, the Corporate Secretary plays a role in facilitating communication between Company organs, is responsible for policymaking, planning and ensuring the effectiveness and transparency of corporate communications, institutional relations, investor relations while taking into account the principles of the Company's ethical standards, corporate governance principles, and values Company.

Dasar pembentukan dan pelaksanaan fungsi Sekretaris Perusahaan mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN No: PER- 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan PER-09/MBU/2012, Undang-undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Anggaran Dasar PJB.

The basis for the formation and the functions of the Corporate Secretary is according to SOE Ministerial Regulation No: PER-01 / MBU / 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, as amended in PER-09/MBU/2012, Law No.19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises and PJB's Articles of Association of.

Profil Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary Profile



Muhammad Bardan

Warga Negara Indonesia, 54 tahun, dan berdomisili di Surabaya.

Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak 2016 melalui Surat Keputusan Direktur Utama No. P.148/440/ PJB/2016 tanggal 21 Juni 2016.

Pendidikan

Menyelesaikan pendidikan S1 Hukum dari Universitas Gadjah Mada (1990) dan Magister Management Administrasi Teknologi dari Institut Teknologi Bandung (2002).

Riwayat Pekerjaan

Pernah menjabat sebagai Senior Manajer Hukum Perusahaan (2012-2014) dan Kepala Satuan Pelayanan Hukum Perusahaan (2014-2016).

Indonesian, Aged 54, and domiciled in Surabaya.

Served as Corporate Secretary since 2016 through the Decree of the President Director No.P.148/440/PJB/2016 on June 21, 2016.

Education

He completed his Bachelor of Law from Gadjah Mada University (1990) and Master of Technology Administration Management from ITB (2002).

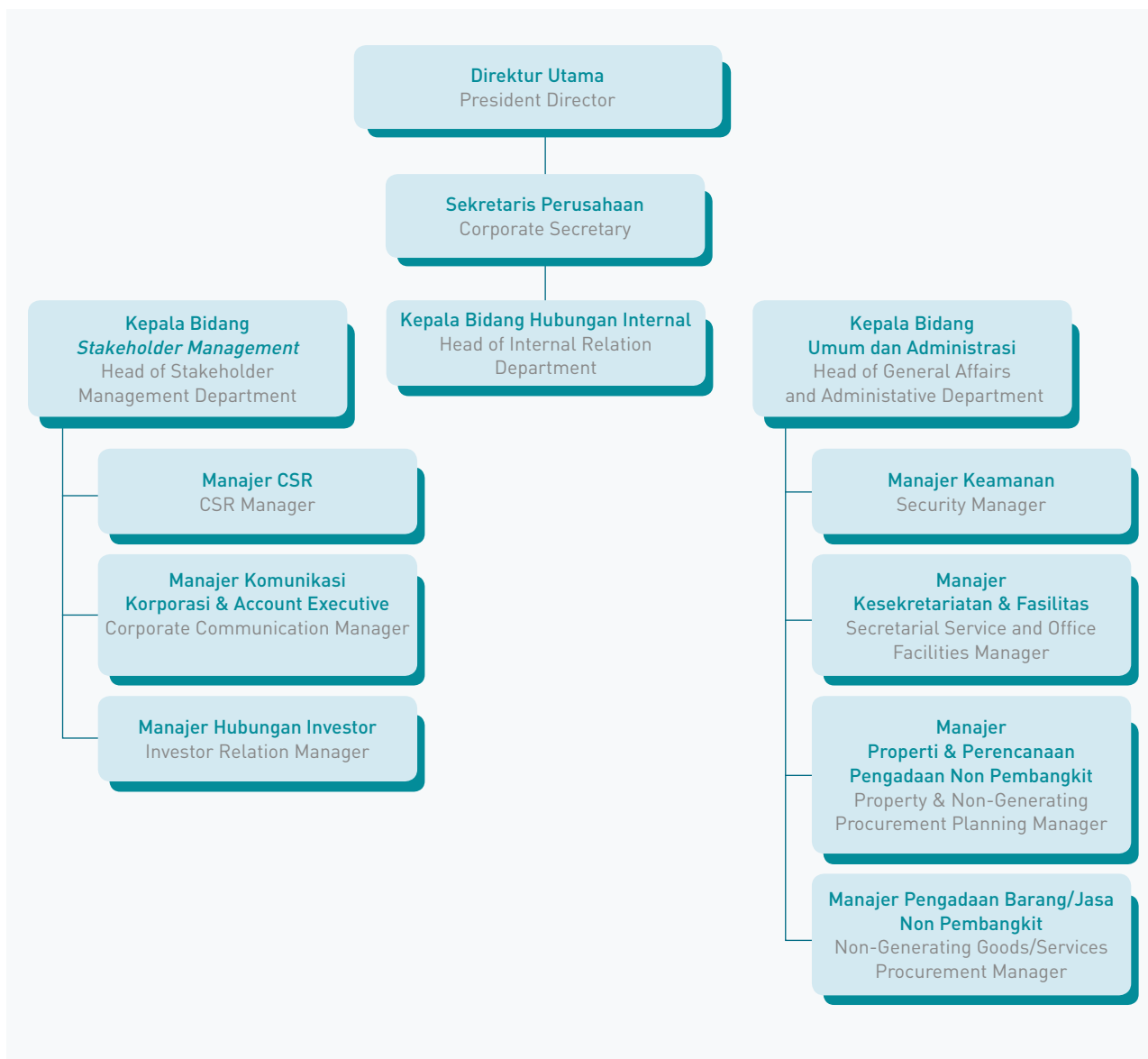
Work Experiences

He once served as the Company's Senior Legal Manager at PJB (2012-2014) and Head of the Corporate Legal Services Unit (2014-2016).

Struktur Organ Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary Organizational Structure

Organ Sekretaris Perusahaan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 010.P/019/DIR/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PJB, membawahi tiga bidang, yaitu Bidang *Stakeholder Management*, Bidang Hubungan Internal dan Bidang Umum dan Administrasi.

The organs of Corporate Secretary which are formed based on the Board of Directors' Decree No. 010.P/019/DIR/2019 concerning the Organization and Work Procedure of PT PJB, supervise three fields: Stakeholder Management, Internal Relations, and General Affairs and Administration.



Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan Tasks and Responsibilities of the Corporate Secretary

Lingkup pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya Sekretaris Perusahaan mengacu pada Surat Keputusan Direksi No. 010.P/019/DIR/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PJB. Selain itu, Perusahaan juga telah menyusun *Corporate Secretary Manual* yang menjadi pedoman kerja bagi Sekretaris Perusahaan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Sekretaris Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a) Bertanggung jawab dalam hal membangun, meningkatkan serta menjaga citra Perusahaan melalui kegiatan *corporate social responsibility* dan komunikasi aktif dengan para stakeholder, guna mendukung *sustainability* dan pertumbuhan Perusahaan.
- b) Memastikan pengelolaan *Corporate Image* dan *Corporate Branding* dapat berjalan secara optimal, sinergis dan terintegrasi dengan program-program pengembangan korporasi untuk mendukung arah pengembangan bisnis.
- c) Menjamin bahwa kebijakan, program, sasaran maupun proses-proses selalu mutakhir (*up-to-date*) sesuai kebutuhan perusahaan terkait pemenuhan standar *Good Corporate Governance* (GCG) yang diimplementasikan.
- d) Memastikan bahwa persyaratan standar sistem manajemen ditetapkan, diimplementasikan dan dipelihara sesuai standar terbaru guna pemenuhan terhadap persyaratan proses-proses terkait standar *Good Corporate Governance* (GCG) yang diimplementasikan.
- e) Memastikan tersedianya perencanaan tindak lanjut perbaikan temuan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan persyaratan standar *Good Corporate Governance* (GCG) yang diimplementasikan, terkait proses audit dan asesmen kinerja.
- f) Melaporkan kepada Direksi terkait kinerja *Good Corporate Governance* (GCG) yang diimplementasikan dan berbagai kebutuhan perbaikan serta promosi kepedulian atas persyaratan di seluruh Organisasi.
- g) Memastikan penyelenggaraan program kehumasan, baik internal maupun eksternal Perusahaan.
- h) Memastikan penyelenggaraan kegiatan protokoler.
- i) Menjalankan fungsi mediator dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Perusahaan.
- j) Memastikan pengelolaan komunikasi korporasi serta menginventarisasi dan mengatur kanal-kanal komunikasi yang ada di Perusahaan.
- k) Menjalankan fungsi seleksi (penyortiran, perumusan, klasifikasi, daftar prioritas, pemilihan kanal komunikasi dan persetujuan publikasi) atas seluruh materi informasi yang akan dipublikasikan.
- l) Memastikan pengelolaan penyelenggaraan *Board & Committee Meeting*, Rapat Tinjauan Manajemen, Rapat rutin skala korporat lainnya dan Kunjungan Manajemen,

The scope of the implementation of functions, duties, and responsibilities of the Corporate Secretary refers to the Decree of the Board of Directors No. 010.P / 019 / DIR / 2019 concerning the Organization and Work Procedure of PT PJB. Additionally, the Company has also prepared a Corporate Secretary Manual that serves as a working guideline for the Corporate Secretary. Based on these provisions, the Corporate Secretary has the following duties and responsibilities:

- a) Creating, improving, and maintaining the Company's image through corporate social responsibility activities and active communication with stakeholders, to support the Company's sustainability and growth.
- b) Ensuring the management of Corporate Image and Corporate Branding can run optimally, synergistically, and integrated with corporate development programs to support the direction of business development.
- c) Ensuring that policies, programs, targets, and processes are always up-to-date according to the company's needs related to the fulfillment of Good Corporate Governance (GCG) standards that are implemented.
- d) Ensuring that management system standard requirements are established, implemented, and maintained according to the latest standards to meet the requirements of processes related to the implemented Good Corporate Governance (GCG) standards.
- e) Ensure the availability of follow-up planning to improve the findings of non-compliance with the fulfillment of the requirements of the Good Corporate Governance (GCG) standard implemented, related to the audit process and performance assessment.
- f) Reporting to the Board of Directors regarding the performance of Good Corporate Governance (GCG) implemented and various needs for improvement and promotion of concern for requirements throughout the Organization.
- g) Ensuring the implementation of public relations programs, both internal and external of the Company.
- h) Ensuring the implementation of protocol activities.
- i) Carry out the function of the mediator in solving problems faced by the Company.
- j) Ensuring the management of corporate communications and inventorying and managing communication channels in the Company.
- k) Performing the selection function (sorting, formulation, classification, priority list, selection of communication channels, and approval of publication) of all information material to be published.
- l) Ensuring the management of the implementation of Board & Committee Meetings, Management Review Meetings, other regular corporate scale meetings, and Management Visits,

- termasuk pengelolaan pendokumentasian kegiatan.
- m) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan pengarsipan dokumen korporat.
 - n) Memastikan pengelolaan pemeliharaan kantor/gedung, keamanan, kegiatan kesekretariatan, administrasi perkantoran, fasilitas kerja, kebersihan lingkungan kerja, untuk mendukung kelancaran aktivitas kerja serta proses bisnis.
 - o) Memastikan pengelolaan sistem otomatisasi kesekretariatan kantor dan tata laksana surat & kearsipan.
 - p) Melayani pelanggan eksternal & internal perusahaan, Mitra, Unit/Anak Perusahaan/Perusahaan Asosiasi dan memenuhi kebutuhan perusahaan serta pemegang saham, melalui dukungan terhadap implementasi Budaya Perusahaan (PJB Way) dan Sistem Manajemen yang diterapkan sejalan dengan Visi & Misi Perusahaan.
 - q) Bertanggungjawab penuh atas perencanaan program kerja, anggaran dan monitoring realisasi program kerja dan anggaran pada Sekretariat Perusahaan secara prudent dengan mempertimbangkan kajian kelayakan dan risiko.
 - r) Melakukan identifikasi risiko dan mitigasi risiko terkait program-program yang menjadi kewenangan Sekretariat Perusahaan.
 - s) Mengevaluasi dan mengembangkan kebijakan-kebijakan internal bidang.

- including managing documentation of activities.
- m) Managing the preparation of corporate documents.
 - n) Ensuring management of office/building maintenance, security, secretarial activities, office administration, work facilities, cleanliness of the work environment, to support the smooth running of work activities and business processes.
 - o) Ensuring the management of the office secretarial automation system and the administration of letters & archives.
 - p) Serving the company's external & internal customers, Partners, Units / Subsidiaries / Associated Companies and meet the needs of the company and shareholders, through support for the implementation of the Corporate Culture (PJB Way) and Management System that is implemented in line with the Company's Vision & Mission.
 - q) Ensuring the work program planning, budgeting, and monitoring the realization of work programs and budgets at the Company Secretariat prudently by taking into account feasibility and risk studies.
 - r) Identifying risks and mitigating risks related to programs that are the authority of the Corporate Secretariat.
 - s) Evaluating and developing internal policies.

Laporan Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2019

Corporate Secretary Task Implementation Report In 2019

Sebagai wujud akuntabilitas atas pelaksanaan fungsi dan program kerja yang ditetapkan, Sekretaris Perusahaan telah menyusun dan menyampaikan laporan dalam bentuk Laporan Sekretaris Perusahaan 2019 sesuai dengan pembagian bidang dalam struktur organisasi meliputi:

1. Bidang Hubungan Internal
 - a. Melaksanakan Rapat Koordinasi Direksi, yang selama 2019 telah terselenggara sebanyak 34 kali;
 - b. Koordinasi pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris- Direksi (Konsultasi dan Pengawasan), yang selama 2019 telah terselenggara sebanyak 14 (empat belas) kali;
 - c. Koordinasi pelaksanaan RUPS Tahunan Perusahaan yang selama 2019 terlaksana sebanyak 2 (dua) kali, yaitu RUPS Pengesahan RKAP 2019 pada 9 Januari 2019 dan RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Bukun 2018 pada tanggal 14 Juni 2019;
 - d. Melakukan *self assessment* GCG tahun 2019 yang dilaksanakan pada awal Oktober sampai Minggu ke-3 Desember 2019;
 - e. Melakukan *monitoring* atas tindak lanjut keputusan RUPS tahun 2018 dan 2019;

As a manifestation of accountability for the implementation of the specified functions and work programs, the Corporate Secretary has compiled and submitted a report in the form of the 2019 Corporate Secretary Report based on the task division in the organizational structure including:

1. Internal Relations
 - a. Conducting Directors' Coordination Meetings, which in 2019 have been held 34 times;
 - b. Coordinating the Board of Commissioners-Directors Meeting (Consultation and Supervision), which in 2019 has been held 14 (fourteen) times;
 - c. Coordinating the implementation of the Company's Annual General Meeting of Shareholders which in 2019 was held 2 (two) times, namely the GMS 2019 concerning ABOP's Approval on January 9, 2019, and the Annual General Meeting of Financial Statements' Approval and Ratification of the 2018 Financial Statements on June 14, 2019;
 - d. Conducting a GCG self-assessment in 2019 which was carried out from the beginning of October to the 3rd week of December 2019;
 - e. Monitoring the follow-up to the resolutions of GMS 2018 and 2019;



- f. Menyelenggarakan Rapat Kerja tahun 2019 dalam 2 tahap yaitu Workshop Pemantapan Program Kerja Korporat Tahun 2019 pada tanggal 10 -12 Februari 2019 dan Forum Bisnis pada tanggal 25 – 26 Februari 2019;
- g. Melaksanakan Induksi Dewan Komisaris selama tahun 2019 sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 27 Februari 2019, 5 April 2019 dan 4 Oktober 2019.
- h. Menyusun perencanaan Agenda Korporat tahun 2019.

2. Bidang *Stakeholder Management*

- a. Menerbitkan Laporan Kinerja Bulanan, yang selama 2019 terbit sebanyak 8 (delapan) kali;
- b. Menyusun Laporan Manajemen Perusahaan yang diterbitkan dan disampaikan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris. Laporan tersebut terdiri atas:
 - 1) Laporan Manajemen Tahunan tahun 2018.
 - 2) Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2019;
 - 3) Laporan Manajemen Triwulan II tahun 2019;
 - 4) Laporan Manajemen Triwulan III tahun 2019;
- c. Menyusun Laporan Tahunan 2018 (*Annual Report* dan *Sustainability Report*) yang telah didistribusikan kepada *stakeholder* PJB serta telah diunggah di *website* PJB;
- d. Memberikan pelayanan data dan informasi kepada para pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan yaitu Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi serta pihak ketiga lainnya;
- e. Menyusun *Corporate Presentation* Tahun 2019 untuk setiap triwulan;
- f. Menyusun Kaleidoskop Tahun 2018;
- g. Menyusun buku Statistik Perusahaan Tahun 2018;
- h. Melakukan koordinasi pelaksanaan benchmark tahun 2019 dari eksternal sebanyak 37 kali;
- i. *Media Relation : Press Release & Press Conference*;
- j. *Monitoring Media* Koran Cetak dan *Online*;
- k. *Stakeholder Mapping*;
- l. Bertindak sebagai pelaksana kegiatan *sponsorship* dan iklan sebagai bentuk partisipasi Perusahaan kepada *stakeholders* agar tercipta hubungan yang baik di antara kedua belah pihak. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut terdiri atas lima kategori, yaitu: Olahraga, Sosial, Seni dan budaya, Agama serta Pendidikan;
- m. Melaksanakan fungsi kehumasan eksternal dengan memanfaatkan media sosial PJB, yang terdiri atas akun Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube;
- n. Media Informasi Korporat meliputi Video *Company Profile*, TV Plasma, E-Kiosk, Portal, dan Mengelola majalah Info PJB yang merupakan majalah korporat Perusahaan;
- o. Pengelolaan *Website* sebagai wadah untuk memberikan informasi kepada *stakeholder* mengenai perusahaan. Pada tahun 2019, juga dilakukan rejuvenation pada tampilan website serta konten yang dimuat;

- f. Organizing a Work Meeting in 2019 in 2 stages, namely the Workshop on the Stimulation of the Corporate Work Program in 2019 on February 10 -12, 2019 and the Business Forum on February 25-26, 2019;
- g. Establishing the Induction Program for the Board of Commissioners which in 2019 was held three times, namely on February 27, 2019; April 5, 2019; and October 4, 2019.
- h. Arranging the Corporate Agenda planning for 2019.

2. Stakeholder Management

- a. Publishing Monthly Performance Reports, which in 2019 were published 8 (eight) times;
- b. Preparing Corporate Management Reports published and submitted to the Shareholders and the Board of Commissioners. The report consists of:
 - 1) Annual Management Report 2018.
 - 2) Quarter-I Management Report of 2019;
 - 3) Quarter-II Management Report of 2019;
 - 4) Quarter-III Management Report of 2019;
- c. Preparing the 2019 Annual Report (Annual Report and Sustainability Report) which have been distributed to PJB stakeholders and have been uploaded on PJB's website;
- d. Providing data and information services to all parties interested in the Company, namely Shareholders, Board of Commissioners, Directors and other third parties;
- e. Developing Corporate Presentation in 2019 for each quarter;
- f. Developing a Kaleidoscope of 2018;
- g. Compiling the Company's Statistics Book of 2018;
- h. Coordinating the implementation of the 2019 external benchmark 37 times;
- i. Media Relations: Press Release & Press Conference;
- j. Monitoring Print and Online Media;
- k. Stakeholder Mapping;
- l. Conducting sponsorship and advertising activities as a form of Company participation to stakeholders to create a good relationship between the two parties. The implementation of these activities consists of five categories, namely: Sports, Social, Arts, and Culture, Religion and Education;
- m. Establishing external public relations functions by utilizing PJB social media, which consists of Facebook, Twitter, Instagram and Youtube accounts;
- n. Corporate Information Media include Video Company Profile, Plasma TV, E-Kiosk, Portal, and Managing PJB Info magazine which is the Company's corporate magazine;
- o. Website Management as a place to provide information to stakeholders about the company. In 2019, rejuvenation will also be carried out on the website interface and contents;

- p. Koordinator Kegiatan Protokol Perusahaan, seperti: *Coffee Morning*, Rapat Kerja/Koordinasi Tahun 2019, Safari Ramadhan Tahun 2019, HUT PJB Tahun 2019, dan Pelaksanaan Upacara;
 - q. Koordinator CSR Perusahaan, PJB melaksanakan program CSR di 19 (sembilan belas) unit kerja. Aktivitas CSR tersebut diklasifikasikan dalam 4 (empat) bidang yaitu: *Empowerment, Capacity Building, Infrastruktur, dan Charity*;
 - r. Mengukur tingkat keberhasilan program CSR dengan mengukur indeks kepuasan pada masyarakat.
3. Bidang Administrasi & Umum
- a. Perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa non pembangkit.
 - b. Penyelenggaraan pembinaan ketatausahaan.
 - c. Perencanaan, penyediaan dan pengelolaan kebutuhan operasional seperti ATK, dan penggunaan ruang kantor termasuk fasilitas dan perlengkapannya.
 - d. Pengelolaan keamanan lingkungan kantor sesuai dengan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP), Manajemen Perkantoran (5S) dan Manajemen Gedung.
 - e. Pengelolaan pemeliharaan gedung kantor.
 - f. Pengelolaan sarana pemadam kebakaran.
 - g. Pengelolaan keperluan kesekretariatan.
 - h. Perencanaan dan pengembangan sistem otomatisasi kesekretariatan kantor, tata laksana surat dan tata laksana kearsipan.
 - i. Pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan protokoler kedinasan dan protokoler rapat.
 - j. Pengelolaan pelayanan umum.

- p. Acting as a Coordinator of Corporate Protocol Activities, such as *Coffee Morning*, Work Meeting / Coordination in 2019, Safari Ramadan in 2019, PJB Anniversary in 2019, and Ceremony Implementation;
- q. Acting as the CSR Coordinator, PJB implements CSR programs in 19 (nineteen) work units. The CSR activities are classified in 4 (four) fields, namely: *Empowerment, Capacity Building, Infrastructure, and Charity*;
- r. Measuring the success rate of CSR programs by measuring the satisfaction index in the community.

3. Administration & General Affairs

- a. Planning and implementing the procurement of non-generator goods and services.
- b. Conducting coaching administration.
- c. Planning, providing, and managing operational needs such as stationery, and the use of office space including facilities and equipment.
- d. Managing office environment security following the Security Management System (SMP), Office Management (5S), and Building Management.
- e. Managing maintenance of office buildings.
- f. Managing Fire extinguisher.
- g. Management of secretarial needs.
- h. Planning and developing office secretarial automation systems, letter management, and archival management.
- i. Fostering and organizing official protocol and meeting protocol activities.
- j. Managing public services.

Program Pengembangan Kompetensi Personel Sekretaris Perusahaan

Competency Development Program for the Corporate Secretary Staff

Perusahaan mengembangkan kompetensi sumber daya manusia dalam lingkup organ Sekretaris Perusahaan untuk menunjang pelaksanaan tugas fungsi Sekretaris Perusahaan. Program pengembangan kompetensi Sekretaris Perusahaan PJB sepanjang tahun 2019 dapat dilihat pada uraian terkait Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Kepala SPI. Selain itu, program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh staf pada Organ Sekretaris Perusahaan sepanjang tahun 2019 adalah sebagai berikut:

The Company develops human resource competencies within the scope of the Corporate Secretary's organs to support the Corporate Secretary's functions. The competency development program for PJB's Corporate Secretary in 2019 can be seen in the description related to the Education and Training of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Head of IAU. Additionally, the competency development programs participated by staff at the Corporate Secretary Organ in 2019 are as follows:



No.	Jabatan Position	Nama Sertifikasi/Pelatihan Certification/Training Name	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date
1	Kepala Bidang Hubungan Internal Head of Internal Relations (1 Orang) (1 person)	Pencegahan Tipikor Corruption Prevention	29 Maret 2019 March 29, 2019
2	Manajer dan <i>Assistant</i> Hubungan Investor Manager and Assistant Investor Relations (3 orang) (3 person))	<i>Workshop</i> AR berbasis Kriteria ARA 2018 AR Workshop based on the 2018 ARA Criteria	4 – 6 April 2019 March 4-6, 2019
3	<i>Assistant Officer</i> Hubungan Investor Assistant Investor Relations Officer (1 Orang) (1 person)	Pelatihan Penyusunan Infografis 2019 Training on Developing Infographics 2019	2 – 3 Mei 2019 May 2-3,, 2019
4	<i>Assistant Officer</i> Hubungan Internal dan <i>Assistant Officer</i> CSR Assistant Officer Internal Relations and CSR Assistant Officer (2 Orang) (2 person)	Manajemen Risiko ISO 31000 ISO 31000 Risk Management	26 Juni 2019 June 26, 2019
5	Manajer CSR CSR Manager (1 Orang) (1 person)	<i>Malcolm Baldrige</i>	3 Juli 2019 July 3, 2019
6	<i>Assistant Officer Account Executive & Assistant</i> Komunikasi Korporasi Assistant Account Executive Officer & Corporate Communication Assistant (2 Orang) (2 person)	<i>Capacity Building</i>	22 – 25 Juli 2019 July 22-25, 2019
7	<i>Assistant Officer</i> Hubungan Investor Assistant Investor Relations Officer (1 Orang) (1 person)	<i>Refreshment & Capacity Building PJB Transformation Agent Tahun 2019 Batch VII</i> Refreshment & Capacity Building PJB Transformation Agent Tahun 2019 Batch VII	21 – 23 Juli 2019 July 21-23, 2019
8	<i>Assistant Officer CSR</i> CSR Assistant Officer (1 Orang) (1 person)	<i>Business Community Management System</i>	Agustus 2019 August, 2019
9	<i>Assistant Officer Account Executive & Assistant</i> Komunikasi Korporasi Assistant Account Executive Officer & Corporate Communication Assistant (2 Orang) (2 person)	<i>Social Media Mastery</i>	10 – 11 Oktober 2019 October 10-11, 2019
10	<i>Assistant Officer Account Executive</i> (1 Orang) (1 person)	<i>Effective Communication and Negotiation Skill</i>	6 November 2019 November 6, 2019
11	<i>Assistant Officer Account Executive & Assistant</i> Komunikasi Korporasi Assistant Account Executive Officer & Corporate Communication Assistant (2 Orang) (2 person)	Mobilisasi dan Orkestrasi Mobilization and Orchestration	7 – 8 November 2019 November 7-8, 2019
12	<i>Assistant Officer</i> Hubungan Investor Assistant Investor Relations Officer (1 Orang) (1 person)	<i>Workshop</i> Finalisasi Dokumen Aplikasi <i>Baldrige</i> Tahun 2019 Workshop on Finalization of 2019 Baldrige Application Documents	11 – 13 November 2019 November 11-13, 2019
13	Sekper, Kepala Bidang <i>Stakeholder Management</i> dan Seluruh Tim Komunikasi Korporasi Corporate Secretary, Head of Stakeholder Management and the entire Corporate Communication Team	<i>Workshop Integrated Communication Strategy</i> <i>Workshop on Integrated Communication Strategy</i>	10 Desember 2019 December 10, 2019
14	Manajer dan <i>Assistant</i> Hubungan Investor Manager and Assistant Investor Relations (3 Orang) (3 person)	<i>Sustainability Reporting Training 2019</i>	11 – 12 Desember 2019 December 11-12, 2019
15	Manajer Hubungan Investor Investor Relations Manager (1 Orang) (1 person)	<i>Training Effective Partnership & Empowering Leadership Training</i> <i>Effective Partnership & Empowering Leadership Training</i>	13 Desember 2019 December 13, 2019
16	Manajer dan <i>Assistant</i> Hubungan Investor Manager and Assistant Investor Relations Head of Internal Relations (3 Orang) (3 person)	Pelatihan <i>Report Writing</i> Report Writing Training	18 – 19 Desember 2019 December 18-19, 2019

Penilaian Kinerja Sekretaris Perusahaan Performance Assessment of The Corporate Secretary

Indikator pencapaian target pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan disusun menjadi *key performance indicator* yang disepakati sebagai dasar dalam menilai kinerja pelaksanaan fungsi Sekretaris Perusahaan. Sekretaris Perusahaan juga melaksanakan tugas-tugas yang secara khusus diberikan oleh Direksi.

Penilaian kerja Sekretaris Perusahaan PJB dilakukan oleh Direktur Utama dengan berdasarkan parameter kriteria Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan. Penilaian Sekretaris Perusahaan PJB dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun. Capaian tugas Sekretaris Perusahaan tahun 2019 telah mencapai target Perusahaan sebesar 106% dari rencana kerja yang disusun.

The target achievement towards the Corporate Secretary's duties can be indicated by key performance indicators that have been agreed as a basis for assessing the performance of the Corporate Secretary function. The Corporate Secretary is also tasked directly by the Board of Directors.

The work assessment of PJB Corporate Secretary is carried out by the President Director based on the parameters of the Completeness and Implementation of the Corporate Secretary's Duties. Assessment of PJB Corporate Secretary is conducted 2 (two) times a year. The achievement of the tasks of the Corporate Secretary in 2019 has reached the Company's target of 106% of the work plans prepared.



UP Gresik
Gresik GU



Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan Audit
Audited Financial Statements



Referensi Kriteria AR
ARA Criteria Reference

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

INTERNAL CONTROL SYSTEM

Aspek penting dalam menunjang keberhasilan implementasi tata kelola perusahaan yang baik adalah pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal yang efektif dan konsisten. Sistem Pengendalian Internal harus diterapkan sebagai suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Perseroan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

An important aspect to support the implementation of Good Corporate Governance is the implementation of an effective and consistent Internal Control System. The Internal Control System must be implemented as an integral process of actions and activities carried out continuously by all leaders and staff to ensure the achievement of organizational goals through effective and efficient activities, reliability of financial reporting, the Company's assets protection, and compliance with the laws and regulations.

Kebijakan Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System Policies

Komitmen penerapan sistem pengendalian internal PJB salah satunya diwujudkan dengan merancang landasan hukum internal yang menjadi pondasi bagi setiap elemen yang ada di lingkungan Perseroan. Implementasi Sistem Pengendalian Internal PJB telah didukung dengan kebijakan Direksi No. 036.K/010/DIR/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Sistem Pengendalian Internal. Kebijakan tersebut dirancang agar Sistem Pengendalian Internal PJB sejalan dengan prinsip-prinsip Internal *Control-Integrated Framework* yang ditetapkan COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) yang mencakup lima komponen penunjang efektivitas pengendalian internal sebagai berikut:

One of the commitments to implement internal control system by PJB is to be realized by designing an internal legal basis that guides every element in the Company's environment. The implementation of the PJB Internal Control System has been supported by Directors' policy No. 036.K/010/DIR/2010 on December 20, 2010, concerning the Internal Control System. The policy is designed so that PJB's Internal Control System is in line with the principles of the Internal Control-Integrated Framework established by the COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) which includes five components supporting the effectiveness of internal control as follows:

1. Lingkungan Pengendalian

Perseroan membangun sikap dan kesadaran akan pentingnya pengendalian internal yang diimplementasikan melalui :

- Budaya Perusahaan.
- Penerapan GCG (*Good Corporate Governance*) PJB, melalui pemberian buku saku *Code of Conduct* yang sudah disosialisasikan dan dibagikan kepada Dewan Komisaris, Komite-komite, Direksi, semua insan PJB.
- Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi pada lingkungan pengendalian.
- Penandatanganan Pakta Integritas.
- Kompetensi karyawan, pengorganisasian dan pengembangan sumberdaya manusia.

1. Control Environment

The Company builds attitude and awareness of the importance of internal control implemented through:

- Corporate Culture.
- Implementation of PJB GCG (*Good Corporate Governance*), through the provision of a *Code of Conduct* pocketbook that has been socialized and distributed to the Board of Commissioners, Committees, Directors, all PJB employees.
- Attention and direction by the Board of Directors in the control environment.
- The Integrity Pact signing.
- Employee competence, organization, and development of human resources.

2. Penilaian Risiko

Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan melakukan kajian terhadap pengelolaan risiko usaha yaitu mengidentifikasi, menganalisis & evaluasi, menilai serta mengelola risiko usaha yang relevan.

2. Risk Assessment

The Risk Management and Compliance Unit conducts a study of business risk management namely identifying, analyzing & evaluating, assessing, and managing relevant business risks.

3. Prosedur Pengendalian

Perseroan menetapkan standarisasi proses kerja yang mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan Perusahaan pada setiap tingkat dan unit kerja dalam struktur organisasi Perusahaan. Terkait dengan aktivitas pengendalian, PJB telah diterapkan diantaranya:

3. Control Procedures

The Company determines the standardization of work processes that include actions taken in a process of controlling the activities of the Company at every level and work unit within the Company's organizational structure. Related to control activities, PJB has been implemented including:

- Penggunaan wewenang secara tepat untuk melakukan suatu kegiatan.
- Pembagian tugas dan tanggung jawab untuk kegiatan terkait.
- Pemisahan fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi (pencatatan)
- Pembuatan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai. Pendokumentasian dan pencatatan Laporan Keuangan *Audited* Tahunan, telah dilakukan pengendalian fisik atas aktiva dan catatan, serta dilakukan pemeriksaan kinerja secara independen, oleh Internal Audit maupun eksternal Audit (Kantor Akuntan Publik).

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi merupakan elemen-elemen yang penting dari pengendalian internal perusahaan. Informasi tentang lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian dan monitoring diperlukan oleh manajemen, pedoman operasional dan menjamin ketaatan dengan pelaporan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku pada Perseroan. Terkait informasi dan komunikasi PJB telah menyediakan media diantaranya melalui Rapat Kerja, Rapat Koordinasi, sosialisasi, mail moderator, *Website* Perseroan, intranet, Portal dan media lain lainnya.

5. Pemantauan (*Monitoring*)

Pemantauan dilakukan secara berkala melalui performance check oleh Pembina Teknis, Audit Internal oleh Divisi Pengawasan Internal & *Quality Assurance* dan Audit oleh eksternal (BPK, BPKP, KAP).

Selain itu, PJB juga menetapkan Pedoman Umum *Three Lines of Defense* melalui Surat Keputusan Direksi No.002.K/020/DIR/2017 tahun 2017. Kebijakan sistem pengendalian *Three Lines of Defense* merupakan sistem pengendalian yang dirancang melalui pembagian peran dan tanggung jawab menjadi 3 (tiga) lapis dalam organisasi yang melibatkan *process owner (first line)*, fungsi pembina unit (*second line*) dan fungsi evaluasi efektivitas sistem pengendalian yang dilakukan oleh first line dan second line (*third line*).

PJB telah menunjuk unit yang secara khusus memastikan penerapan pengendalian internal berjalan dengan baik yaitu Bidang *Quality Assurance* (QA). Bidang *Quality Assurance* (QA) merupakan Unit dibawah pejabat setingkat Manajer yang melaksanakan tugas current audit. Pelaksanaan *current audit* berpedoman pada Pedoman Operasional Kepatuhan Unit (POKU).

- Proper use of authority to carry out an activity.
- The division of tasks and responsibilities for related activities.
- Separation of operating and storage functions from accounting functions (recording)
- Creation and use of adequate documents and records. Documenting and recording the Annual Audited Financial Statements, physical control of assets and records has been carried out, as well as an independent performance check, by Internal Audit and External Audit (Public Accountant Office).

4. Information and Communication

Information and communication are important elements of the company's internal control. Information about the control environment, risk assessment, control, and monitoring procedures is needed by management, operational guidelines, and ensures compliance with legal and regulatory reporting that applies to the Company. Regarding information and communication, PJB has provided media such as through Work Meetings, Coordination Meetings, outreach, mail moderators, the Company's Website, intranet, Portal, and other media.

5. Monitoring

Monitoring is carried out periodically through a performance check by the Technical Advisor, Internal Audit by the Internal Supervision & Quality Assurance Division, and by external auditors (BPK, BPKP, KAP).

Additionally, PJB also stipulates the General Guidelines of Three Lines of Defense through Directors Decree No.002.K / 020 / DIR / 2017 2017. The Three Lines of Defense control system policy is a control system designed through the division of roles and responsibilities into 3 (three) layers in the organization involving the process owner (first line), the unit supervisory function (second line) and the evaluation function of the effectiveness of the control system carried out by the first line and second line (third line).

PJB has appointed a unit that specifically ensures the implementation of internal control runs well, namely the Quality Assurance (QA) Field. Quality Assurance (QA) is a unit under the manager's level that performs current audit tasks. The current audit is guided by the Unit's Compliance Operational Guidelines (POKU).



Mekanisme Kerja Pengendalian Internal Internal Control Mechanism

Sistem Pengendalian Internal PJB melibatkan seluruh jenjang organisasi mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, manajemen, sampai dengan karyawan tingkat bawah. Secara khusus Satuan Pengawasan Internal (SPI) bekerjasama dengan Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan serta berkoordinasi dengan Komite Audit dan Komite Manajemen risiko yang secara rutin memberikan laporan atas penerapan sistem pengendalian internal kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Setiap individu dan unit memastikan aktivitas operasional yang dijalankan sesuai dengan program kerja dan *job desk* yang telah ditetapkan. SPI melakukan audit terkait kesesuaian prosedur dan penerapannya khususnya terkait kegiatan operasional PJB serta Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan menyusun dan melakukan *update* atas profil risiko PJB khususnya risiko yang berkaitan dengan kegiatan operasional yang secara triwulanan dilaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan. Selain itu, Dewan Komisaris secara rutin melakukan kunjungan ke unit-unit bisnis untuk memastikan kegiatan operasional berjalan dengan baik. Setiap unit telah dilengkapi dengan prosedur proses bisnis sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan operasional di lingkungan PJB.

Sistem Pengendalian Internal PJB telah dilengkapi dengan ICoFR yang berada dibawah pengawasan pimpinan Perseroan serta unit kerja terkait. Proses tersebut dilaksanakan secara berjenjang oleh Direksi, Manajemen, dan personil lainnya dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai mengenai kehandalan pelaporan keuangan dan penyusunan laporan keuangan untuk pihak eksternal, telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Terdapat 4 (empat) tahapan proses implementasi dan pengembangan sistem pengendalian internal sebagai berikut :

1. Penetapan kebijakan dan memberikan pemahaman atas penerapannya.
2. Membuat desain sistem pengendalian internal.
3. Penerapan atas desain sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dan melaksanakan reviu secara berkala.
4. Peningkatan keandalan sistem pengendalian internal.

Internal Control System of PJB involves all levels of the organization from the Board of Commissioners, the Board of Directors, management, to the lower-level employees. Specifically, the Internal Audit Unit (IAU) cooperates with the Risk Management and Compliance Unit and coordinates with the Audit Committee and the Risk Management Committee which routinely reports on the implementation of the internal control system to the Directors and Board of Commissioners.

Each individual and unit ensures operational activities carried out following work programs and job desks that have been set. SPI audits related to the suitability of procedures and their implementation, especially related to PJB operational activities and the Risk and Compliance Management Unit compiles and updates PJB risk profiles, especially risks related to operational activities that are quarterly reported to the Directors and Board of Commissioners through the Audit Committee and Risk Management Committee and compliance. Also, the Board of Commissioners regularly visits business units to ensure that operational activities are running well. Each unit has been equipped with business process procedures as a guide in carrying out operational activities within the PJB.

Internal Control System of PJB has been equipped with ICoFR which is under the supervision of the leadership of the Company and related work units. The process is carried out in stages by the Directors, Management, and other personnel to provide adequate confidence regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external parties, following generally accepted accounting principles.

There are 4 (four) stages of the process of internal control system implementation and development, as follows:

1. Establishing policy and provide an understanding of its application.
2. Creating an internal control system design.
3. Implementing the design of an internal control system that has been established and periodically reviewing it.
4. Increasing the reliability of the internal control system.



Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Operasional

Implementation of the Operational Internal Control System

Proses penerapan Sistem Pengendalian Internal salah satunya bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan operasional Perusahaan dalam rangka memastikan tercapainya tujuan perusahaan, terpercayanya informasi, dan terjaganya aset-aset perusahaan. Setiap unit melakukan aktivitas operasional sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, menganalisis risiko dan melakukan upaya mitigasi di level unit masing-masing serta memastikan pelaksanaannya berjalan secara optimal berdasarkan ketersediaan sumber daya dan hasil yang diperoleh. SPI melakukan audit pada unit dalam rangka memastikan aktivitas operasional berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan dan prosedur yang telah ditetapkan. Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan melakukan update profil risiko dan monitoring atas upaya mitigasi yang dijalankan pada aktivitas operasional Perusahaan. Setiap unit melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direksi melalui rapat dan laporan tertulis. SPI dan Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan secara khusus menyampaikan laporan berkala kepada Direksi dan Dewan komisaris serta berkoordinasi dengan Komite Audit dan Komite Manajemen risiko. Selain itu, Direksi memberikan laporan tertulis melalui laporan manajemen dan membahas kinerja serta pelaksanaan operasional melalui rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris.

The process of implementing the Internal Control System is one of which aims to improve the effectiveness and efficiency of the Company's operational activities to ensure the achievement of company goals, the reliability of the information, and the preservation of company assets. Each unit carries out operational activities following established procedures, analyzes risks, and carries out mitigation efforts at the respective unit level and ensures that their operations run optimally based on the availability of resources and the results. IAU conducts audits on units to ensure operational activities run following company objectives and established procedures. The Risk Management and Compliance Unit updates the risk profile and monitors the mitigation efforts undertaken in the Company's operational activities. Each unit reports the implementation of its duties to the Directors through meetings and written reports. The IAU and the Risk Management and Compliance Unit specifically submit periodic reports to the Board of Directors and Board of Commissioners and coordinate with the Audit Committee and the Risk Management Committee. Also, the Directors provide written reports through management reports and discuss operational performance and implementation through joint meetings of the Directors and Board of Commissioners.

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Keuangan

Implementation of the Financial Internal Control System

Internal Controls Over Financial Reporting (ICoFR) dilakukan untuk memastikan efektivitas dan pelaksanaan dari pengendalian internal dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai terhadap kehandalan pelaporan keuangan.

Internal Controls Over Financial Reporting (ICoFR) is carried out to ensure the effectiveness and implementation of internal control to provide adequate confidence in the reliability of financial reporting.

Sesuai dengan tahapan dalam implementasi dan pengembangan ICoFR terdapat 3 (tiga) tahapan proses ICoFR yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Following the stages in the implementation and development of ICoFR, there are 3 (three) stages of the ICoFR process which can be described as follows:

1. Penyusunan Pedoman dan Rancangan Pengendalian.
2. Pengujian dan Pemutakhiran Rancangan Pengendalian.
3. Pelaksanaan Penyusunan Pernyataan Berjenjang.

1. Preparing Control Guidelines and Designs.
2. Testing and Updating Control Designs.
3. Implementation of Tiered Statement Formation.

Selain itu, PJB juga menunjuk Auditor Eksternal, yakni Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melaksanakan audit keuangan guna memastikan integritas penyajian laporan keuangan Perusahaan pada setiap tutup buku.

Additionally, PJB appoints an External Auditor, a Public Accounting Firm (PAF) for financial audits to ensure the integrity of the presentation of the Company's financial statements in every closing.

Evaluasi Atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Evaluation of the Internal Control System Effectiveness

Sistem pengendalian internal PJB senantiasa dievaluasi dalam rangka memastikan efektifitas penerapannya. Pengendalian internal merupakan bagian yang terintegrasi dalam sistem dan prosedur di setiap kegiatan pada unit kerja sehingga apabila terjadi penyimpangan maka dapat diketahui secara dini dan dilakukan langkah perbaikan oleh unit kerja yang bersangkutan. Proses evaluasi atas penerapan sistem pengendalian internal dilakukan secara berkala diantaranya melalui pengumpulan dan *review* dokumen, survei persepsi, *interview* dan observasi serta *review* analitis.

Evaluasi terhadap efektivitas sistem pengendalian internal dilakukan pada tingkat entitas dan operasional oleh auditor Internal maupun eksternal sesuai prosedur audit yang berlaku. Satuan Pengawasan Internal (SPI) melakukan *review* dan evaluasi pada Bagian-Bagian yang diaudit yang ditetapkan dalam Program Kerja Audit Tahunan (PKAT). Sedangkan secara entitas *review* dan evaluasi dilakukan oleh Auditor Eksternal, yakni Kantor Akuntan Publik (KAP) pada saat pelaksanaan general audit pada setiap tutup buku. Hasil audit atas efektivitas sistem pengendalian internal dituangkan dalam Laporan Auditor Independen atas Kepatuhan terhadap Perundang-undangan dan Pengendalian Internal. Untuk menjaga dan meningkatkan efektivitas sistem pengawasan dan pengendalian internal, Perseroan melakukan *review* dan evaluasi sistem pengendalian internal secara berkala.

PJB melakukan asesmen pengendalian internal berdasarkan COSO 2013 dalam memastikan penerapannya sesuai dengan prinsip-prinsip *Internal Control-Integrated Framework*. Asesmen pengendalian internal tahun 2019 dilakukan terhadap seluruh elemen pengendalian. Asesmen dilakukan secara korporat melibatkan sebagian Unit antara lain UP Muara Karang, UPHB, UP Cirata, UBJOM Rembang, UBJOM Tanjung Awar Awar, PJB *Academy*, dan Divisi Kantor Pusat Berdasarkan survei persepsi melalui *vote* dan kuesioner diperoleh hasil bahwa pengendalian internal di PT PJB secara umum sudah ada (*present*) dan berfungsi (*function*). Selain itu diberikan rekomendasi terhadap prinsip-prinsip atas elemen pengendalian internal agar terjadi peningkatan atas prinsip pengendalian tersebut. Selain itu, berdasarkan Laporan Auditor Independen atas kepatuhan terhadap perundang-undangan dan pengendalian internal tahun buku 2019 menunjukkan bahwa **PJB mematuhi, dalam semua hal yang material.**

Internal control system of PJB is always evaluated to ensure the effectiveness of its application. Internal control is an integrated part of the system and procedures in every activity in the work unit to indicate early violations as well as to take corrective steps by the relevant work unit. The process of evaluating the application of the internal control system is carried out periodically including through the collection and review of documents, perception surveys, interviews, and observations as well as analytical reviews.

An evaluation of the effectiveness of the internal control system is carried out at the entity level and operational by internal and external auditors following applicable audit procedures. The Internal Audit Unit (IAU) reviews and evaluates the Audited Sections determined in the Annual Audit Work Program (PKAT). Whereas entity review and evaluation are carried out by the External Auditor, the Public Accounting Firm (PAF) at the time of the general audit at each book closing. Audit results on the effectiveness of the internal control system are outlined in the Independent Auditor's Report on Compliance with Legislation and Internal Control. To maintain and improve the effectiveness of the internal control and control system, the Company periodically reviews and evaluates the internal control system.

PJB conducts internal control assessment based on COSO 2013 in ensuring its implementation is following the principles of the Internal Control-Integrated Framework. Internal control assessment in 2019 is carried out on all elements of control. The corporate assessment was carried out involving several Units, including Muara Karang GU, UPHB, Cirata GU, Rembang OMSBU, Tanjung Awar Awar OMSBU, PJB *Academy*, and Head Office Division based on the survey of perceptions through votes and questionnaires, the results show that comprehensive internal control in PT PJB is already present and functional. Additionally, recommendations were given for the principles of the internal control element so that there would be an increase in the control principle. Also, based on the Independent Auditor's Report of compliance with laws and internal controls for the fiscal year 2019, it shows that **PJB complies, in all material respects.**

AUDIT INTERNAL

INTERNAL AUDIT

Audit Internal merupakan bagian penting dari sistem pengendalian internal khususnya terkait pengendalian di level operasional Perusahaan. Pelaksana fungsi Audit Internal PJB dijalankan oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI) yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menjalankan audit (*assurance*) dan konsultasi secara independen dan obyektif. Hal tersebut bertujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengendalian internal dan proses *corporate governance* serta memastikan keseluruhan proses operasional Perusahaan berjalan sesuai dengan prosedur dan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Dasar pembentukan dan pelaksanaan fungsi Audit Internal mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN No: PER- 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan PER-09/MBU/2012, Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Anggaran Dasar PJB.

Internal Audit is an important part of the internal control system, especially related to controlling at the operational level of the Company. The PJB Internal Audit function is carried out by an Internal Audit Unit (SPI), which is tasked with and responsible for conducting audits (*assurance*) and consulting independently and objectively. It aims to evaluate and improve the effectiveness of internal control and corporate governance processes and ensure that the entire operational process of the Company runs according to established procedures and work plans.

The basis for the formation and implementation of the Internal Audit function refers to the Regulation of the Minister of State Enterprises No: PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, as amended by PER-09 / MBU / 2012, Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises and the Articles of Association of the PJB.

Profil Kepala Satuan Pengawasan Internal

Profile of the Head of the Internal Audit Unit



R. Efin Febriantoro

Warga Negara Indonesia, 47 tahun.

Menjabat sebagai KSPI sejak tahun 2015 sesuai Keputusan Direksi PT PJB No. P.135/440/PJB/2015 tanggal 27 Juli 2015.

Pendidikan

Menyelesaikan pendidikan S1 Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya pada tahun 1996.
Sertifikasi yang dimiliki dan pelatihan audit yang telah diikuti diantaranya adalah *Qualified Internal Auditor* (QIA).

Riwayat Pekerjaan

Pernah menjabat sebagai Auditor BPK RI (1997-2001), Auditor SPI PJB (2001-2008), Asisten Manajer Pengembangan Akuntansi Sub Direktorat Akuntansi PT PJB (2008-2010), Manajer Pengembangan Akuntansi Sub Direktorat Akuntansi PT PJB (2010-2012) dan Senior Manajer Akuntansi Sub Direktorat Akuntansi PT PJB (2012-2015).

Indonesian Citizen, 47 years old

He has served as the Head of IAU since 2015 based on the Decree of PJB's Board of Directors No. P.135/440 / PJB/2015 on July 27, 2015.

Education

He completed his Bachelor of Economics from the Faculty of Economics, the University of Brawijaya in 1996. The audit certification and training include *Qualified Internal Auditors* (QIA).

Work Experiences

He had served as Indonesia's BPK Auditor (1997-2001), PJB IAU Auditor (2001-2008), PJB Accounting Development Manager Assistant, Sub Directorate of Accounting (2008-2010), PJB Accounting Development Manager, Sub-Directorate of Accounting (2010-2012), and PJB Senior Accounting Manager, Sub-Directorate of Accounting (2012-2015).



Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan Audit
Audited Financial Statements



Referensi Kriteria ARK
ARK Criteria Reference

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Satuan Pengawasan Internal Appointment and Dismissal of the Head of Internal Audit Unit

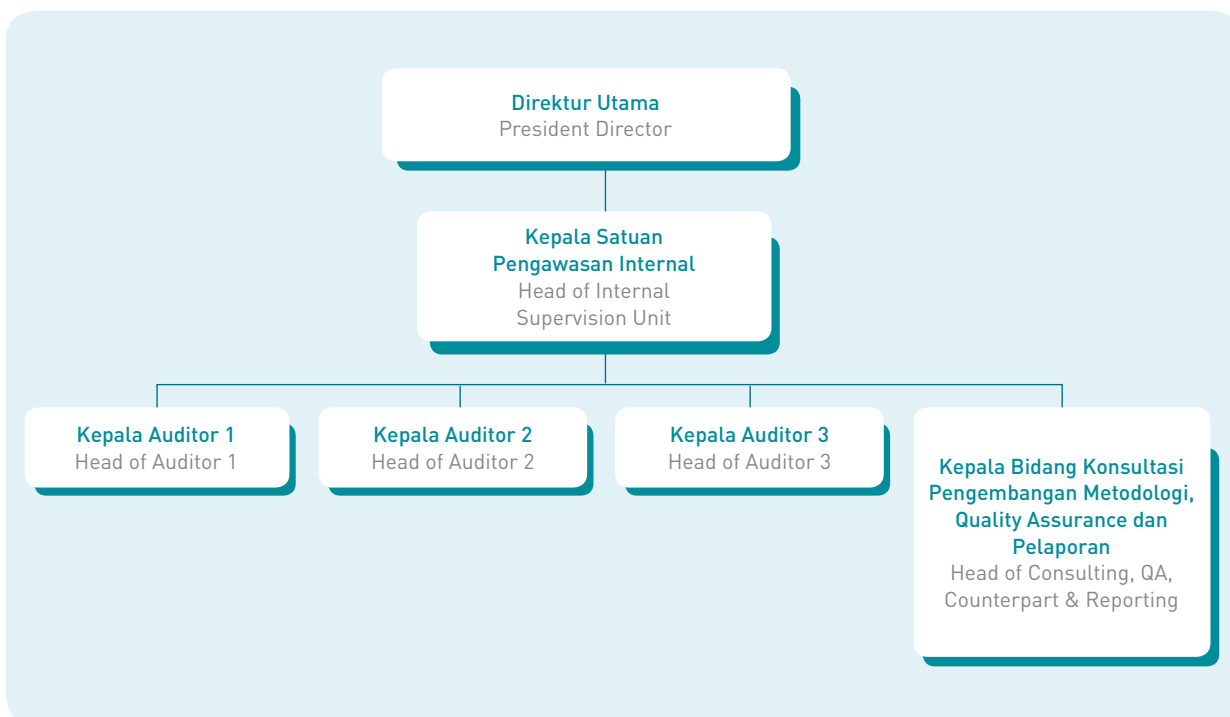
Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Piagam Audit Internal yang telah mutakhirkan pada 10 Mei 2017.

The Head of IAU is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners following the provisions of the Internal Audit Charter which was updated on May 10, 2017.

Kedudukan dan Struktur Organ Satuan Pengawasan Internal Position and Structure of the Internal Audit Unit Organ

Satuan Pengawasan Internal (SPI) secara struktural memberikan pelaporan dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan secara fungsional memiliki akses komunikasi langsung kepada Komite Audit untuk berkoordinasi dan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan dan hasil audit. Kedudukan dan Struktur Organ Satuan Pengawasan Internal PJB ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 010.P/019/DIR/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PJB.

The Internal Audit Unit (IAU) structurally reports and subordinates the President Director as well as functionally coordinates directly to the Audit Committee to coordinate and inform the audit implementation and findings. Position and Organ Structure of PJB's Internal Audit Unit is determined based on the Board of Directors Decree No. 010.P/019/DIR/2019 concerning the Organization and Work Procedure of PT PJB.





Jumlah dan Kualifikasi Auditor Satuan Pengawasan Internal

Number and Qualification of Internal Audit Unit Auditors

Formasi pada Satuan Pengawasan Internal sampai dengan Desember 2019 berjumlah 33 (tiga puluh tiga) pegawai dengan komposisi dan kualifikasi sebagai berikut:

The formation in the Internal Audit Unit as of December 2019 is occupied by 33 (thirty three) employees with the following composition and qualifications:

No.	Nama Name	Jabatan Position	Riwayat Pendidikan Educational Background
1	R. Efin Febriantoro	Kepala Satuan Pengawasan Internal Head of Internal Audit Unit	- S1 Ekonomi dari Universitas Brawijaya (1992-1996) - Bachelor of Economy from Universitas Brawijaya (1992-1996)
2	Sulistyo Utomo	Kepala Auditor 1 Head of Auditor 1	- S1 Fisika dari ITS Surabaya (1988-1992) - S2 Bidang Manajemen dari ITB (2000-2002) - Program Profesi Insinyur dari UGM (Sep-Des 2019) - Bachelor of Physics from ITS Surabaya (1992-1996) - Master of Management from ITB (2000-2002) - Professional Engineer Program from UGM (Sep-Dec 2019)
3	Mochamad Triyono	Kepala Auditor 2 Head of Auditor 2	- S1 Teknik Industri dari ITS Surabaya (1988-1992) - S2 Master of Business Administration dari Universitas Tenaga Nasional Malaysia (2003-2005) - Bachelor of Industrial Engineering from ITS Surabaya (1988-1992) - Master of Business Administration Universitas Tenaga Nasional Malaysia (2003-2005)
4	Kasbullah Subekti	Kepala Auditor 3 Head of Auditor 3	- S1 Teknik Fisika dari ITB Bandung (1985-1992) - S2 Magister Management Bisnis Admintrasi Teknologi dari ITB (2000-2001) - Bachelor of Physics Engineering from ITB Bandung (1985-1992) - Master of Technology Admintrasi Business Management from ITB (2000-2001)
5	Edy Hartono	Kepala Bidang Konsultasi, QA, Counterpart & Reporting Head of Consulting, QA, Counterpart & Reporting	- S1 Mesin dari ITS Surabaya (1988-1992) - S2 Manajemen dari ITB (2000-2002) - Bachelor of Mechanical Engineering from ITS Surabaya (1988-1992) - Master of Management from ITB (2000-2002)
6	Sugito	Senior Spesialis I Konsultasi Senior Consulting Specialist I	- S1 Mesin dari STT YPK PT PLN (Persero) (1996-2000) - Bachelor of Mechanical Engineering from STP YKP PT PLN (Persero) (1996-2000)
7	Agus Budi Santoso	Senior Spesialis I Auditor Senior Audit Specialist I	- S1 Mesin dari STT YPK PT PLN (Persero) (1995-1999) - Bachelor of Mechanical Engineering from STP YKP PT PLN (Persero) (1995-1999)
8	Ali Umar Sjafi'i	Senior Spesialis II Auditor Senior Audit Specialist II	- S1 Informatika dari STT Nurul Jadid (2009-2013) - Bachelor of Informatics from STT Nurul Jadid (2009-2013)
9	Ahmad Fajar Ridlo	Senior Spesialis II Auditor Senior Audit Specialist III	- S1 Elektro dari ITS Surabaya (1996-2000) - S2 Magister Manajemen Teknik dari ITS Surabaya - Bachelor of Electrical Engineering from ITS Surabaya (1996-2000) - Master of Engineering Management from ITS Surabaya
10	Rita Kartika	Senior Spesialis II Auditor Senior Audit Specialist II	- S1 Hukum dari Universitas 17 Agustus Surabaya (1986-1991) - Bachelor of Law from Universitas 17 Agustus Surabaya (1987-1991)
11	Suherman	Analyst Auditor Audit Analyst	- S1 Elektro dari Sekolah Tinggi Teknik Malang (2000-2004) - Bachelor of Electrical Engineering from STT Malang (2000-2004)
12	Uun Tri Sunuhadi	Analyst Auditor Audit Analyst	- SMA Biologi dari SMA PGRI Caruban Madiun (1984-1987) - High-School Graduate, Biology, from Caruban Madiun PGRI High School (1984-1987)

No.	Nama Name	Jabatan Position	Riwayat Pendidikan Educational Background
13	Budi Purwono	<i>Analyst Auditor</i> Audit Analyst	• S1 Ekonomi Manajemen dari Universitas Airlangga (2000-2005) • S2 Magister Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada (2013-2017) • Bachelor of Economic Management from Airlangga University (2000-2005) • Master of Accounting from Gadjah Mada University (2013-2017)
14	Lisna Mery T	<i>Analyst Auditor</i> Audit Analyst	• S1 Manajemen dari Universitas Airlangga (1997-2003) • S2 Magister Manajemen dari Universitas Airlangga (2014-2016) • Bachelor of Management from Airlangga University (1997-2003) • Master of Management from Airlangga University (2014-2016)
15	Ahmad Syaiful Zuhri	<i>Analyst Auditor</i> Audit Analyst	• S1 Teknik Industri dari Universitas Islam Indonesia (2006-2010) • S2 Bidang Manajemen dari Universitas Diponegoro (2013-2015) • Bachelor of Industrial Engineering from Indonesian Islamic University (2006-2010) • Master of Management from Diponegoro University (2013-2015)
16	Therry Widya Laksmi	<i>Assistant Analyst Auditor</i> Assistant Audit Analyst	• S1 Teknik Elektro dari Universitas Semarang (2000-2004) • Bachelor of Electrical Engineering from Semarang University (2000-2004)
17	Rina Febyanasari	<i>Assistant Analyst Auditor</i> Assistant Audit Analyst	• S1 Teknik Kimia dari ITS Surabaya (2002-2006) • S2 Teknik Mesin dari ITS Surabaya (2012-2014) • Bachelor of Chemical Engineering from ITS Surabaya (2002-2006) • Master of Mechanical Engineering from ITS Surabaya (2012-2014)
18	Achmad Hatta Wiyata	<i>Assistant Analyst Auditor</i> Assistant Audit Analyst	• S1 Teknik Elektro dari Institut Teknik PLN (2009-2014) • Bachelor of Electrical Engineering from PLN Institute of Engineering (2009-2014)
19	Fadianto Mirza	<i>Assistant Analyst Auditor</i> Assistant Audit Analyst	• S1 Teknik Elektro dari Universitas Brawijaya (2011-2015) • Bachelor of Electrical Engineering from Brawijaya University (2011-2015)
20	Fitratu Shiddiq S.P.	<i>Assistant Analyst Auditor</i> Assistant Audit Analyst	• S1 Hukum dari Universitas Katholik Atma Jaya Jakarta (2008-2013) • Bachelor of Laws from Atma Jaya Catholic University Jakarta (2008-2013)
21	Dendi Mahawarman	<i>Assistant Analyst Auditor</i> Assistant Audit Analyst	• D4 Teknik Elektronika dari Politeknik Negeri Bandung (2012-2016) • Associate Degree (Diploma-4) of Electronical Engineering from Politeknik Negeri Bandung (2012-2016)
22	Alex Munandar	<i>Assistant Analyst Auditor</i> Assistant Audit Analyst	• S1 Teknik Elektro dari Universitas Lampung (2011-2016) • Bachelor of Electrical Engineering from Lampung University (2011-2016)
23	Achmad Farizal I.	<i>Assistant Analyst Auditor</i> Assistant Audit Analyst	• S1 Teknik Industri dari Universitas Diponegoro (2012-2016) • Bachelor of Industrial Engineering from Diponegoro University (2012-2016)
24	Lahmsa Alkautsa H.	<i>Assistant Analyst Auditor</i> Assistant Audit Analyst	• S1 Manajemen dari Universitas Diponegoro (2009-2013) • Bachelor of Management from Diponegoro University (2009-2013)
25	Ricardo Pasaribu	<i>Assistant Analyst Auditor</i> Assistant Audit Analyst	• S1 Manajemen dari Universitas Indonesia (2012-2016) • Bachelor of Management from Indonesia University (2012-2016)
26	Okky Gati	<i>Assistant Analyst Auditor</i> Assistant Audit Analyst	• S1 Teknik Elektro dari Institut Teknik PLN (2009-2014) • Bachelor of Electrical Engineering from the PLN Technical Institute (2009-2014)
27	Malinda Dinna Auliya	<i>Assistant Analyst Auditor</i> Assistant Audit Analyst	• S1 Teknik Elektro dari Universitas Brawijaya (2011-2015) • Bachelor Electrical Engineering from Brawijaya University (2011-2015)
28	Ridho Adhie Hernowo	Staf Konsultasi, QA, <i>Counterpart & Reporting</i> Consulting, QA, Counterpart & Reporting Staff	• S1 Manajemen dari Universitas Padjajaran (2012-2016) • Bachelor of Management from Padjadjaran University (2012-2016)
29	Elvira Saris Virmania	Staf Konsultasi, QA, <i>Counterpart & Reporting</i> Consulting, QA, Counterpart & Reporting Staff	• S1 Akuntansi dari Universitas Gajah Mada (2011-2015) • Bachelor of Accounting from Gajah Mada University (2011-2015)



No.	Nama Name	Jabatan Position	Riwayat Pendidikan Educational Background
30	Rachmatika Anjani K.	Staf Konsultasi, QA, <i>Counterpart & Reporting</i> Consulting, QA, Counterpart & Reporting Staff	- S1 Manajemen dari Universitas Padjajaran (2012-2016) - Bachelor of Management from Padjadjaran University (2012-2016)
31	Riyo Hussain Muhammad	Staf Konsultasi, QA, <i>Counterpart & Reporting</i> Consulting, QA, Counterpart & Reporting Staff	- S1 Teknik Fisika dari ITS Surabaya (2010-2015) - Bachelor of Physics Engineering from ITS Surabaya (2010-2015)
32	Bima Surya Sofhananda	Staf Konsultasi, QA, <i>Counterpart & Reporting</i> Consulting, QA, Counterpart & Reporting Staff	- S1 Teknik Industri dari ITS Surabaya (2012-2016) - Bachelor of Industrial Engineering from ITS Surabaya (2012-2016)
33	Arizky Aryantio	Staf Konsultasi, QA, <i>Counterpart & Reporting</i> Consulting, QA, Counterpart & Reporting Staff	- S1 Teknik Industri dari Telkom University (2014-2018) - Bachelor of Industrial Engineering from Telkom University (2012-2016)

SPI PJB telah didukung oleh tenaga audit profesional yang telah memiliki sertifikasi profesi dalam mendukung pelaksanaan fungsi audit internal. Jumlah Auditor yang telah memiliki sertifikasi sampai dengan desember 2019 adalah sebagai berikut:

PJB IAU has been supported by professional auditors with professional certification to perform the internal audit function. The number of certified auditors as of December 2019 is as follows:

Sertifikasi Profesi Professional Certification	Jumlah Auditor Total Auditors
<i>Qualified Internal Auditor</i> (QIA)	7
<i>Certified Internal Auditor</i> (CIA)	-
<i>Qualified Risk Management Officer</i> (QRMO)	2

Selain itu, terdapat auditor yang telah mengikuti jenjang pelatihan dalam rangka mendapatkan sertifikasi profesi yang mendukung fungsi audit internal sepanjang tahun 2019 sebagai berikut:

Besides that, some auditors have participated in training programs to obtain professional certification that supports the internal audit function in 2019 as follows:

Jenjang Sertifikasi Profesi Auditor Internal Level of Internal Auditor Professional Certification	Jumlah Auditor Total Auditors
Internal Audit Tingkat Pra Manajerial Internal Audit for Pre-Managerial Level	3
Internal Audit Tingkat Lanjutan II Internal Audit for Advanced Level II	-

Pedoman Kerja Satuan Pengawasan Internal Internal Audit Unit Work Guidelines

Sebagai bagian dalam mendukung pelaksanaan fungsi Audit Internal, SPI PJB telah dilengkapi dengan pedoman yang menjadi acuan pelaksanaan tugasnya. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

1. *International Professional Practices Framework* (IPPF)
IPPF adalah kerangka kerja konseptual yang mengatur pedoman resmi praktik auditor internal yang dikeluarkan oleh *Institute of Internal Auditor*. Pedoman dalam IPPF meliputi Pedoman Wajib (*Mandatory Guidance*) dan Pedoman yang Disarankan (*Strongly Recommended Guidance*).

As part of supporting the implementation of the Internal Audit function, the SPI PJB has been equipped with guidelines that serve as a reference for the implementation of its duties. The guidelines are as follows:

1. *International Professional Practices Framework* (IPPF)
IPPF is a conceptual framework that regulates official guidelines for internal auditor practices issued by the Institute of Internal Auditors. Guidelines in the IPPF include *Mandatory Guidance* and *Strongly Recommended Guidance*.

2. Piagam Satuan Pengawasan Internal

Piagam Audit Internal yang telah dilakukan pembaharuan pada 10 Mei 2017 dengan ditandatangani dan disahkan oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama sejalan dengan perkembangan standar audit dan kondisi Perusahaan. Piagam Audit Internal mengatur antara lain komitmen Komisaris Utama dan Direktur Utama. Selain itu Piagam Audit Internal juga mencakup visi dan misi, struktur dan kedudukan, mengatur ruang lingkup, wewenang, tanggung jawab, standar audit dan kode etik, pelaporan, independensi dan objektivitas, larangan perangkap tugas, jasa konsultasi dan evaluasi atas piagam audit internal. SPI PJB akan meninjau Piagam Audit Internal secara periodik dan melakukan penyesuaian dengan situasi dan kondisi perusahaan.

3. Standar Profesi Satuan Pengawasan Internal ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PJB No.098.K/020/DIR/2017. Standar ini mengatur tentang kode etik, standar perilaku, standar profesi, standar atribut dari auditor.

4. Pedoman Umum Satuan Pengawasan Internal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PJB No.098.K/020/DIR/2017 yang merupakan panduan umum untuk pelaksanaan penugasan audit internal yang meliputi kegiatan assurance dan consulting, sehingga pelaksanaan penugasan dapat berjalan dengan efektif dan konsisten sesuai dengan kode etik dan standar profesi audit internal yang berlaku.

5. Pedoman Teknis Audit Internal Berbasis Risiko yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PJB No.098.K/020/DIR/2017 yang merupakan pedoman teknis bagi SPI dalam melakukan setiap tahapan proses audit dimulai dari perencanaan audit tahunan, perencanaan penugasan, pelaksanaan penugasan, komunikasi hasil penugasan, pemantauan tindakan perbaikan dan evaluasi penugasan audit dengan selalu mempertimbangkan risiko pada setiap tahapan tersebut.

6. Pedoman Pengembangan Audit Program yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PJB No.098.K/020/DIR/2017 yang merupakan pedoman teknis bagi SPI untuk menyusun audit program yang berisikan seperangkat prosedur analisis atau langkah-langkah pengumpulan dan pengujian bukti-bukti audit.

2. Internal Audit Unit Charter

The Internal Audit Charter, which was renewed on May 10, 2017, was signed and endorsed by the President Commissioner and President Director in line with developments in the audit standards and the condition of the Company. The Internal Audit Charter regulates, among others, the commitment of the President Commissioner and the President Director. Additionally, the Internal Audit Charter also covers the vision and mission, structure and position, regulates the scope, authority, responsibilities, audit standards and code of conduct, reporting, independence and objectivity, the prohibition of concurrent position, consulting and evaluation services on the internal audit charter. SPI PJB will periodically review the Internal Audit Charter and consider the situation and condition of the company.

3. Professional Standards of the Internal Audit Unit are set based on the Decree of the Directors of PJB No.098.K / 020 / DIR / 2017. This standard regulates the code of conduct, standards of behavior, professional standards, attribute standards from auditors.

4. General Guidelines for Internal Audit Unit based on PJB Board of Directors Decree No.098.K / 020 / DIR / 2017 which are general guidelines for the implementation of internal audit assignments that include assurance and consulting activities, so that the implementation of the assignment can run effectively and consistently following applicable ethical codes and internal audit professional standards.

5. Technical Guidelines for Risk-based Internal Audit determined based on the Decree of the Directors of PJB No.098.K / 020 / DIR / 2017 which is a technical guideline for IAU in conducting every stage of the audit process starting from the annual audit planning, assignment planning, assignment implementation, assignment reports, corrective action monitoring and audit assignment evaluation by always considering the risks of every stage.

6. Program Audit Development Guidelines established based on PJB Directors Decree No.098.K / 020 / DIR / 2017 which is a technical guideline for SPI to compile a program audit containing a set of analytical procedures or steps for collecting and testing audit evidence.



Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pengawasan Internal

Tasks and Responsibilities of Internal Audit Unit

Satuan Pengawasan Internal sebagai pelaksanaan fungsi audit internal berperan memastikan bahwa seluruh proses bisnis yang dijalankan Perusahaan dilakukan sesuai dengan kaidah, peraturan dan ketentuan yang berlaku guna mendukung sustainability dan pertumbuhan Perusahaan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Memastikan penyusunan, evaluasi, pengembangan kebijakan dan prosedur satuan pengawasan internal.
- Memastikan Perusahaan dikelola dengan prinsip niaga yang sehat dan berdasarkan GCG melalui pelaksanaan audit dan menjadi *counterpart* dari auditor eksternal (BPK/KAP).
- Memberikan rekomendasi perbaikan pengelolaan perusahaan berdasarkan hasil audit yang dilakukan dan melakukan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi.
- Melakukan kegiatan pelaporan kepada *external auditor*/ pihak regulator/ internal manajemen Perusahaan.
- Menjalankan peran sebagai *third line of defense* dalam melakukan kegiatan pengendalian internal melalui pelaksanaan audit berdasarkan hasil inputan dari *first line of defense* (Satuan/ Divisi/ Bidang/ Unit Kerja Perusahaan) dan *second line of defense* (Bidang Kepatuhan) sehingga pengendalian internal perusahaan berjalan dengan optimal.
- Melakukan penyempurnaan secara berkelanjutan atas kebijakan, pedoman, dan prosedur Pengawasan Internal serta pemanfaatan aplikasi *Audit Management System* (AMS) untuk mendukung mekanisme kerja Satuan Pengawasan Internal.
- Menjalankan fungsi pembinaan, supervisi, pengendalian, dan koordinasi terhadap program-program pengawasan, baik di Kantor Pusat maupun seluruh Unit Kerja Perusahaan.
- Melayani pelanggan eksternal & internal perusahaan, Mitra, Unit/AP/PA dan memenuhi kebutuhan perusahaan dan pemegang saham, melalui dukungan terhadap implementasi Budaya Perusahaan (PJB Way) dan Sistem Manajemen yang diterapkan perusahaan (SIT, GCG, PJB IMS, PAS 55, Kriteria *Baldrige*, SMK3, *Maturity Level* Proses Bisnis) sejalan dengan Visi & Misi Perusahaan.
- Bertanggungjawab penuh atas perencanaan program kerja, anggaran dan monitoring realisasi program kerja dan anggaran pada Satuan Pengawasan Internal secara *prudent* dengan mempertimbangkan kajian kelayakan dan risiko.
- Melakukan identifikasi risiko dan mitigasi risiko terkait program-program yang menjadi kewenangan fungsi Satuan Pengawasan Internal.
- Mengevaluasi dan mengembangkan kebijakan-kebijakan internal di Satuan Pengawasan Internal.

The Internal Audit Unit as the implementation of the internal audit function has the role of ensuring that all business processes carried out by the Company are carried out following the rules, rules, and regulations that apply to support the Company's sustainability and growth with the following duties and responsibilities:

- Ensure the preparation, evaluation, development of policies, and procedures of the internal audit unit.
- Ensuring that the Company is managed with sound trading principles and based on GCG through conducting audits and becoming a counterpart of the external auditor (BPK / PAF).
- Provide recommendations for improving company management based on the results of audits conducted and monitoring follow-up recommendations.
- Conduct reporting activities to the external auditor/ regulator/internal management of the Company.
- Performing the role of the third line of defense in carrying out internal control activities through conducting audits based on input from the first line of defense (Unit / Division / Field / Company Work Unit) and second line of defense (Compliance Field) so that the company's internal control runs optimally.
- Improving the policies, guidelines, and procedures of Internal Control and the use of the Audit Management System (AMS) application continuously to support the working mechanism of the Internal Audit Unit.
- Performing the functions of guiding, supervising, controlling, and coordinating the supervision programs, both at the Head Office and all Company Work Units.
- Serving external & internal customers of the company, Partners, Units / AP / PA and meet the needs of the company and shareholders, through support for the implementation of the Corporate Culture (PJB Way) and Management Systems that are applied by the company (SIT, GCG, PJB IMS, PAS 55, Baldrige Criteria, OHSMS, Business Process Maturity Level) in line with the Company's Vision & Mission.
- Fully responsible for work program planning, budgeting, and monitoring of work program and budget realization in the Internal Audit Unit prudently by considering the feasibility and risk assessment.
- Identifying risks and mitigating risks related to programs that are the authority of the Internal Audit Unit.
- Evaluating and developing internal policies in the Internal Audit Unit.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Satuan Pengawasan Internal Tahun 2019 Activity Report of Internal Audit Unit 2019

Sesuai dengan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) SPI tahun 2019, program-program utama SPI mencakup kegiatan sebagai berikut :

1. Audit Internal dengan objek audit Unit Pembangkitan (UP), Unit Pelayanan Pemeliharaan (UPHAR), Unit Bisnis Jasa Operation and Maintenance (UBJOM), Divisi/ Bidang/ Satuan Kerja PJB Kantor Pusat, Badan Pengelolaan Waduk Cirata (BPWC), dan Anak Perusahaan;
2. Peningkatan kompetensi SDM;
3. Pelaksanaan koordinasi dengan Komite Audit dan counterpart eksternal auditor;
4. Peran sebagai *consultant* dan *catalyst*.

Berdasarkan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) SPI tahun 2019 sampai dengan akhir tahun 2019, SPI telah merealisasikan seluruh program-program utama yang mencakup kegiatan sebagai berikut:

1. Audit Rutin

Audit Internal pada Tahun 2019 telah dilakukan pada beberapa obyek audit sebagai berikut:

Based on the 2019 IAU Annual Audit Work Program (PKAT), the main programs of SPI include the following activities:

1. Internal Audit with audit object of Generating Unit (UP), Maintenance Service Unit (UPHAR), Operation and Maintenance Services Business Unit (OMSBU), Division/ Field/Work Unit of PJB Head Office, Cirata Reservoir Management Unit (CRMU), and Subsidiaries Company;
2. Enhancing HC competencies;
3. Carry out coordination with the Audit Committee and the external counterpart of auditors;
4. Role as a consultant and catalyst.

Based on the SPI Annual Audit Work Program (PKAT) from 2019 until the end of 2019, SPI has realized all the main programs that cover the following activities:

1. Routine Audit

Internal Audit in 2019 has been conducted on several audit objects as follows:

No.	Obyek Audit Audit Objects	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date
Triwulan I 1st Quarter		
1	Unit Pembangkitan Muara Karang Muara Karang GU	18 Februari - 1 Maret 2019 February 18 - March 1, 2019
2	Unit Bisnis Jasa Operasi dan Pemeliharaan (O&M) PLTU Pacitan Pacitan CFPP O&M Services Business Unit	18 Februari - 1 Maret 2019 February 18 - March 1, 2019
3	Unit Bisnis Jasa Operasi dan Pemeliharaan (O&M) Luar Jawa 2 (UJLJ 2) Outside Java 2 (UJLJ 2) O&M Services Business Unit	18 Februari - 1 Maret 2019 February 18 - March 1, 2019
4	Unit Pembangkitan Muara Tawar Muara Tawar GU	8 - 27 Maret 2019 March 8-27, 2019
5	Unit Bisnis Jasa Operasi dan Pemeliharaan (O&M) PLTU Tanjung Awar-Awar Tanjung Awar-Awar CFPP O&M Services Business Unit	8 - 27 Maret 2019 March 8-27, 2019
6	Unit Bisnis Jasa Operasi dan Pemeliharaan (O&M) PLTU Kaltim Teluk East Kalimantan Bay CFPP O&M Services Business Unit	8 - 27 Maret 2019 March 8-27, 2019
7	Unit Pembangkitan Gresik Gresik GU	25 Maret - 10 April 2019 March 25 - April 10, 2019
8	Unit Pembangkitan Cirata Cirata GU	25 Maret - 10 April 2019 March 25 - April 10, 2019
Triwulan II 2nd Quarter		
9	Unit Pembangkitan Paiton Paiton GU	29 April - 16 Mei 2019 April 29 - May 16, 2019
10	Unit Bisnis Jasa Operasi dan Pemeliharaan (O&M) PLTU Paiton Paiton CFPP O&M Services Business Unit	29 April - 17 Mei 2019 April 29 - May 17, 2019
11	Unit Bisnis Jasa Operasi dan Pemeliharaan (O&M) PLTU Rembang Rembang CFPP O&M Services Business Unit	29 April - 16 Mei 2019 April 29 - May 16, 2019
12	Unit Bisnis Jasa Operasi dan Pemeliharaan (O&M) PLTU Indramayu Indramayu CFPP O&M Services Business Unit	29 April - 16 Mei 2019 April 29 - May 16, 2019
14	Unit Pembangkitan Brantas Brantas GU	25 Juni - 11 Juli 2019 June 25 - July 11, 2019

No.	Obyek Audit Audit Objects	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date
15	Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah Timur (UPHT) Maintenance Service Unit of Eastern Area (MSUEA)	25 Juni - 11 Juli 2019 June 25 - July 11, 2019
16	Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah Barat (UPHB) Maintenance Service Unit of Western Area (MSUWA)	25 Juni - 11 Juli 2019 June 25 - July 11, 2019
Triwulan III 3rd Quarter		
17	Badan Pengelola Waduk Cirata (BPWC) Cirata Reservoir Management Unit (CRMU)	5 - 20 Agustus 2019 August 5-20, 2019
18	Unit Bisnis Jasa Operasi dan Pemeliharaan (O&M) PLTU Pulang Pisau Pulang Pisau CFPP O&M Services Business Unit	5 - 20 Agustus 2019 August 5-20, 2019
19	Unit Bisnis Jasa Operasi dan Pemeliharaan (O&M) PLTU Arun Arun CFPP O&M Services Business Unit	5 - 20 Agustus 2019 August 5-20, 2019
20	Unit Bisnis Jasa Operasi dan Pemeliharaan (O&M) PLTU Tenayan Tenayan CFPP O&M Services Business Unit	5 - 20 Agustus 2019 August 5-20, 2019
21	Unit Pengembangan Usaha dan Pembangunan Business Development Unit	16 September - 1 Oktober 2019 September 16 - October 1, 2019
22	PT Rekadaya ElektriKa	16 September - 1 Oktober 2019 September 16 - October 1, 2019
23	PT PJB Services	16 September - 1 Oktober 2019 September 16 - October 1, 2019
Triwulan IV 4th Quarter		
24	PJB Academy	11 - 19 November 2019 November 11-19, 2019
25	Direktorat Operasi-1 Directorate of Operations-1	11 - 22 November 2019 November 11-22, 2019
26	Direktorat Operasi-2 Directorate of Operations-2	11 - 22 November 2019 November 11-22, 2019
27	PT PLN Suku Cadang	12 - 20 November 2019 November 12-20, 2019
28	PT PJB Investasi	12 - 20 November 2019 November 12-20, 2019
29	Direktorat Niaga Directorate of Commerce	2 - 13 Desember 2019 December 2-13, 2019
30	Direktorat Sumber Daya Manusiadan Administrasi Directorate of Human Capital & Administration	2 - 13 Desember 2019 December 2-13, 2019
31	Direktorat Keuangan Directorate of Finance	2 - 13 Desember 2019 December 2-13, 2019
32	Satuan Teknologi & Enjiniring Technology Unit	2 - 13 Desember 2019 December 2-13, 2019
33	Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan Risk and Compliance Management Unit	17 - 27 Desember 2019 December 17-27, 2019
34	Satuan Perencanaan & Transformasi Korporat Corporate Planning & Transformation Unit	17 - 27 Desember 2019 December 17-27, 2019

2. Program Pengembangan Auditor Satuan Pengawasan Internal

Auditor SPI mengikuti program pengembangan diantaranya pendidikan berjenjang, pelatihan, seminar dan lokakarya Internal Audit sebagai bagian dari program pengembangan sumber daya manusia PJB. Selama tahun 2019, kegiatan pelatihan yang diikuti oleh auditor SPI adalah sebagai berikut:

2. Internal Audit Unit's Auditor Development Program

IAU auditors attend development programs including tiered education, training, seminars and Internal Audit workshops as part of PJB's human resource development program. During 2019, the training activities participated by SPI auditors were as follows:

No.	Pelatihan Training	Jumlah Auditor Total Auditors	Tanggal Date
Triwulan I Quarter 1			
1	Seminar FKSPI : Peran Auditor dalam Mendukung Tujuan Perusahaan FKSPI Seminar : The Role of Auditor in Supporting the Company Objectives	1	27 Maret 2019 March 27, 2019
2	Seminar FKSPI : Tantangan Peluang Auditor dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0 di Era Digital FKSPI Seminar : Auditor Opportunities Challenge in Facing 4.0 Industrial Revolution in Digital Era	1	28-30 Maret 2019 March 28-30, 2019
3	Pembelajaran Uji Kualitas dan Kuantitas Batubara Coal Quality and Quantity Test Learning	4	28 Maret – 5 April 2019 01-12 April 2019 March 28 – April 5, 2019 April 1-12, 2019
4	Benchmark Strategy to Optimize of Millenial Generation and My Integrity Telkom Indonesia Benchmark of Strategy to Optimize of Millennial Generation and My Integrity Telkom Indonesia	1	23 Januari 2019 January 23, 2019
5	Program Sertifikasi QIA, Audit Intern Tingkat Dasar QIA Certification Program, Basic Internal Audit		18 Feb s.d 2 Mar 2019 February 18 Until March 2, 2019
Triwulan II Quarter 2			
1	Refresh Training Risk Management ISO 31000:2018 Refresh Training Risk Management ISO 31000:2018	3	25-26 Juni 2019 June 25-26, 2019
2	Workshop TOD dan TOE ICOFR PT PJB PT PJB TOD and TOE ICOFR Workshop	6	18-19 Juni 2019 June 18-19, 2019
3	Seminar Nasional Internal Audit 2019 Palembang National Seminar of Palembang 2019 Internal Audit	3	24-25 April 2019 April 24-25, 2019
4	Training Asesor Kompetensi Pembangkit Power Plants Competence Assessors Training	1	19-22 Juni 2019 6-8 Agustus 2019 June 19-22, 2019 August 6-8, 2019
Triwulan III Quarter 3			
1	Sertifikasi Business Continuity Management Certified Professional Business Continuity Management Certified Professional Certification	2	19-23 Agustus 2019 26-30 Agustus 2019 August 19-23, 2019 August 26-30, 2019
2	Sertifikasi Asesor Bidang Pembangkit Tenaga Listrik Certification of Power Plants Assessors	2	6-8 Agustus 2019 August 6-8, 2019
3	Workshop Skema & Strategi Akuisisi Unit Jasa O&M PT PJB Workshop on Acquisition Scheme & Strategy of PT PJB O&M Service Business Unit	2	13 September 2019 September 13, 2019
4	Refresh Training Manajemen Risiko ISO 31000:2018 Refresh Training of Risk Management ISO 31000:2018	2	15-16 Juli 2019 July 15-16, 2019
Triwulan IV Quarter 4			
1	Pelatihan dan Sertifikasi Bussiness Continuity Management Certified Professional Training and Certification of Business Continuity Management Certified Professional.	1	9-13 Desember 2019 December 9-13, 2019
2	Workshop Dampak Perpajakan atas Implementasi PSAK 71, 72 dan 73 di PT PJB Workshop on Taxation Impacts on the Implementation of SFAS 71, 72 and 73 in PT PJB	2	16-18 Desember 2019 December 16-18, 2019
3	Workshop Penyusunan Dokumen untuk Sertifikasi ISO 22301 BCMS Workshop on Preparation of Documents for ISO 22301 BCMS Certification	1	Batch I: 9-11 Juli 2019 Batch II: 16-18 Juli 2019 1 st Batch : July 9-11, 2019 2 nd Batch : July 16-18, 2019
4	Workshop Risk Fraud Assessment Workshop on Risk Fraud Assessment	3	14-15 Oktober 2019 October 14-15, 2019
5	Undang – Undang Lingkungan Hidup Environment Law	1	19-20 November 2019 November 19-20, 2019
6	Undang – Undang Lingkungan Hidup Program Sertifikasi QIA, Audit Intern Tingkat Lanjutan QIA Certification Program, Advance Internal Audit	1	14-26 Oktober 2019 October 14-26, 2019

3. Kegiatan Koordinasi dengan Komite Audit

Pelaksanaan pertemuan bersama Komite Audit dilakukan secara rutin setiap triwulan sebagai bagian dari fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris. Tahun 2019, SPI telah melakukan Rapat Koordinasi dengan Komite Audit dengan realisasi sebagai berikut:

- Tanggal 1 Februari 2019 dengan agenda pembahasan Laporan Kegiatan Satuan Pengawasan Internal (LKSPI) Triwulan IV 2018;
- Tanggal 10 Mei 2019 dengan agenda pembahasan Laporan Kegiatan Satuan Pengawasan Internal (LKSPI) Triwulan I 2019;
- Tanggal 30 Juli 2019 dengan agenda pembahasan Laporan Kegiatan Satuan Pengawasan Internal (LKSPI) Triwulan II 2019;
- Tanggal 19 November 2019 dengan agenda pembahasan Laporan Kegiatan Satuan Pengawasan Internal (LKSPI) Triwulan III 2019;

4. Fungsi *Counterparting* terhadap Eksternal Auditor

SPI melakukan Fungsi *Counterparting* terhadap Eksternal Auditor sepanjang tahun 2019 antara lain sebagai berikut :

- Triwulan I tahun 2019, BPK RI telah melaksanakan Audit Subsidi Listrik Tahun 2018 di PT PJB yang dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas No.1/PDTSSubsidi/ PT/01/2019 tanggal 04 Januari 2019, perihal Pemberitahuan Pemeriksaan dan Permintaan Data Subsidi TA 2018 pada anak perusahaan PT PLN (Persero) yaitu PT Pembangkitan Jawa-Bali yang dilaksanakan mulai tanggal 02 – 12 Februari 2019.
- Triwulan I tahun 2019, Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (KAP RSM-AAJ) ditunjuk oleh PT PLN (Persero) untuk melakukan audit kepatuhan dan revidi laporan kinerja PT Pembangkitan Jawa-Bali dan entitas anak perusahaan tahun 2019, yang dilaksanakan melalui Surat Perintah Mulai Kerja No.1497/KEU.02.02/010504/2019 tanggal 9 Oktober 2019. Audit dilaksanakan mulai tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan 31 Maret 2020.
- Triwulan III tahun 2019, SPI PLN Kantor Pusat telah melaksanakan Audit Operasional Berbasis Resiko pada PT Pembangkitan Jawa-Bali yang dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas berikut :
 - No.061/PO AUDIT 24/SPI.01.01/011513/2019 tanggal 11 September 2019. Audit dilaksanakan tanggal 17 September 2019 sampai dengan 16 Oktober 2019.
 - No. 063/PO AUDIT TI/SPI.01.04/011513/2019 tanggal 13 September 2019. Audit dilaksanakan tanggal 17 September 2019 sampai dengan 16 Oktober 2019.

5. Peran sebagai Konsultan dan Katalis

Pelaksanaan program kerja SPI terkait Peran sebagai Konsultan dan Katalis sepanjang tahun 2019 antara lain sebagai berikut:

3. Coordination Activities with the Audit Committee

The meeting with the Audit Committee is held routinely every quarter as part of the supervisory function by the Board of Commissioners. In 2019, SPI held a Coordination Meeting with the Audit Committee with the realization as follows:

- February 1, 2019, with the agenda of the discussion of the Quarterly Internal Audit Unit Activity Report 2018;
- May 10, 2019, with the agenda for discussion of the Quarterly Internal Audit Unit Activity Report 2019;
- July 30, 2019, 2019 with the agenda for discussion of the Quarterly Internal Audit Unit Activity Report 2019;
- November 19, 2019, with the agenda for discussion of Quarterly Internal Audit Unit Activity Reports 2019;

4. Counterpart Functions of External Auditors

IAU performs Counterpart Functions to External Auditors throughout 2019, among others as follows:

- Quarter I of 2019, the Republic of Indonesia has conducted the 2018 Electricity Subsidy Audit at PT PJB which was carried out based on Assignment No.1/PDTSSubsidi/ PT/0/2019 on January 4, 2019, regarding Notification of Examination and Request for Subsidized Data for TA 2018 to PT PLN (Persero) subsidiary, PT Pembangkitan Jawa-Bali, which will be held from February 02-12, 2019.
- In the first quarter of 2019, Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (KAP RSM-AAJ) Public Accountant Firms were appointed by PT PLN (Persero) to conduct a compliance audit and review the performance reports of PT Pembangkitan Jawa-Bali and its subsidiary in 2019, conducted through Initial Assignment Order No.1497 / KEU.02.02 / 010504/2019 on October 9, 2019. The audit was carried out from October 9, 2019 to March 31, 2020.
- Quarter III of 2019, PLN IAU Head Office has conducted a Risk-Based Operational Audit of PT Pembangkitan Jawa-Bali which was carried out based on the following Assignment Letter:
 - No. 061 / PO AUDIT 24 / SPI.01.01 / 011513/2019 on September 11, 2019. The audit was carried out on September 17, 2019 until October 16, 2019.
 - No. 063 / PO AUDIT IT / SPI.01.04 / 011513/2019 on September 13, 2019. The audit was carried out on September 17, 2019 until October 16, 2019.

5. Acting as Consultant and Catalyst

The implementation of the IAU work program related to the role of Consultant and Catalyst throughout 2019 includes the following:



1. Peran SPI sebagai konsultan diharapkan dapat memberikan manfaat berupa saran dalam pengelolaan sumber daya (*resources*) organisasi sehingga dapat membantu tugas manajemen serta meyakinkan bahwa organisasi telah memanfaatkan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisien dan efektif (3E) serta telah menjalankan aktivitas organisasi yang mengarah pada tujuannya.
2. Peran SPI sebagai katalis diharapkan SPI dapat membantu manajemen dalam mengidentifikasi risiko-risiko yang mengancam pencapaian tujuan organisasi.

6. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit

SPI melakukan pemantauan dan melaporkan tindak lanjut temuan audit secara berkala Direksi dan Komite Audit. Rekapitulasi atas pemantauan tindak lanjut hasil audit tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. The role of IAU as a consultant is expected to provide benefits in the form of suggestions in managing the organization's resources so that it can help the task of management and ensure that the organization has utilized organizational resources economically, efficiently and effectively (3E) and has carried out organizational activities that lead on its purpose.
2. The role of SPI as a catalyst is expected that SPI can assist management in identifying risks that threaten the achievement of organizational goals.

6. Monitoring of Audit Follow-Up Results

IAU regularly monitors and reports on the follow-up on audit findings from the Directors and Audit Committee. The recapitulation of the follow-up monitoring of the 2019 audit results is as follows:

Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Audit Signifikan

Summary of Significant Audit Follow-up Results

Tahun Period	Status Awal Initial status		Status Akhir Final status		Persentase Penyelesaian Percentage of Completion	
	Temuan Findings	Rekomendasi Recommendations	Temuan Findings	Rekomendasi Recommendations	Temuan Findings	Rekomendasi Recommendations
2016	87	216	0	0	100%	100%
2017	98	271	0	0	100%	100%
2018	86	259	0	0	100%	100%
2019	85	283	19	43	78%	85%

Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Audit Eksternal

Summary of External Audit Follow-up Results

No.	Rekomendasi External Auditors	Temuan Findings	Rekomendasi Recommendations	Temuan Findings	Rekomendasi Recommendations
1	BPK-RI BPK-RI	0	0	0	0
2	KAP KAP	0	0	0	0
3	SPI PLN SPI PLN	10	23	23	0

Sistem Informasi Audit Internal

Information System of Internal Audit

Sebagai upaya mendukung pelaksanaan fungsi audit internal, SPI telah dilengkapi dengan sistem informasi berupa Audit Manajemen Sistem (AMS) yang penerapannya dilakukan secara menyeluruh mulai tahapan perencanaan audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit dan monitoring tindak lanjut hasil audit. Melalui sistem AMS, secara internal SPI dapat mengetahui perkembangan pelaksanaan audit dan permasalahan yang menjadi prioritas penanganan. Selain untuk mendukung integritas data, sistem AMS juga berdampak langsung pada efektivitas dan efisiensi sumber daya.

To support the implementation of the internal audit function, IAU has been equipped with an information system in the form of an Audit Management System (AMS) whose implementation is carried out comprehensively starting from the stages of audit planning, conducting audits, reporting audit results and monitoring the follow-up of audit results. Through the AMS system, internally the SPI can find out the progress of the implementation of the audit and issues that are priority priorities for handling. In addition to supporting data integrity, AMS systems also have a direct impact on the effectiveness and efficiency of resources.

Quality Assurance Review Audit Internal

Quality Assurance Review for Internal Audit

Perangkat fungsi audit internal senantiasa *dimonitoring* dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaannya. Oleh karena itu, PJB berupaya memenuhi ketentuan *International Professional Practices Framework* (IPPF) sebagai salah satu pedoman pelaksanaan fungsi audit internal di PJB. Berdasarkan IPPF Standar 1300 ditetapkan bahwa pelaksanaan *Quality Assurance Review* internal terhadap program jaminan kualitas dan peningkatan fungsi audit internal secara keseluruhan harus dilakukan setiap tahun melalui *self assessment*, sedangkan secara eksternal harus dilakukan setiap 5 (lima) tahun oleh asesor yang independen.

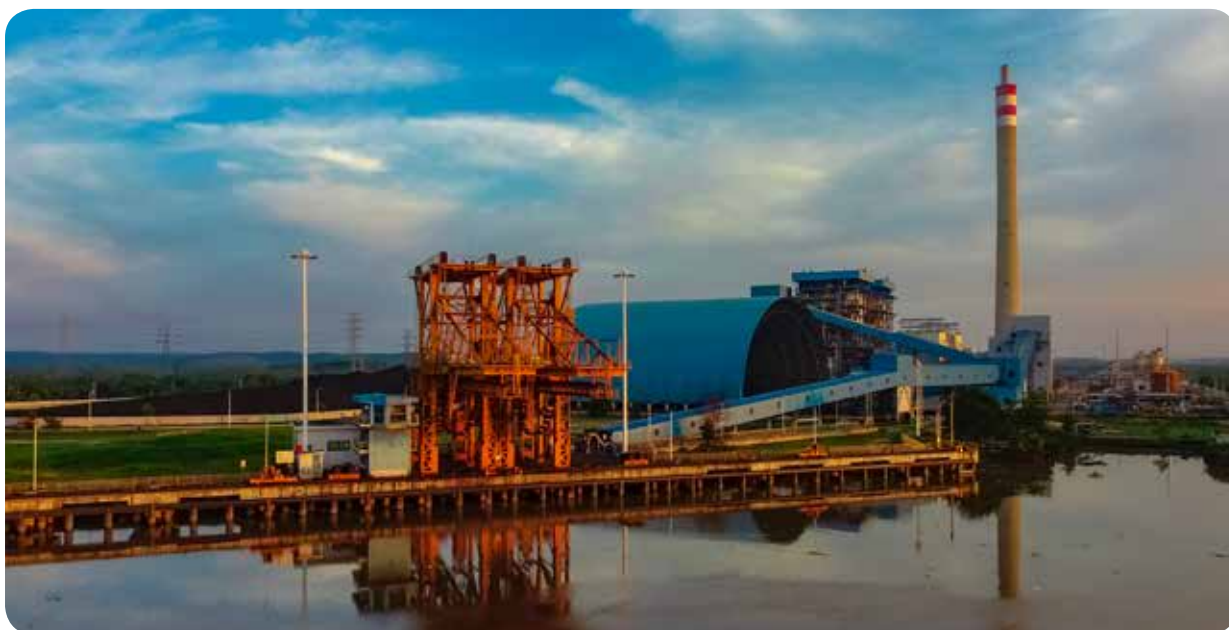
Quality Assurance Review pada tahun 2018 dilaksanakan oleh asesor eksternal dalam hal ini PT Bina Audita Indonesia (BAI). PT BAI ditunjuk dan ditetapkan untuk melaksanakan *Quality Assurance Review* berdasarkan Surat Perintah Kerja dari Kepala Bidang Umum dan Administrasi Nomor: 347.SPK/061/BMUM/2018 tanggal 24 Oktober 2018.

Sedangkan untuk tahun 2019, pelaksanaan *Quality Assurance Review* dilakukan secara *self assessment*, disimpulkan dan diselesaikan pada tanggal 31 Januari 2020. Hasil observasi dan evaluasi atas 4 (empat) aspek dari praktik-praktik audit internal, yaitu aspek tatakelola, manajemen audit internal, pengelolaan staf auditor dan pelaksanaan aktivitas audit internal berdasarkan standar IPPF 2017 menunjukkan bahwa secara keseluruhan SPI PJB telah memenuhi Standar dan Kode Etik *The Institute of Internal Auditors* (IPPF 2017) dengan beberapa catatan yang memerlukan perbaikan.

The internal audit function tool is constantly monitored to improve the effectiveness of its implementation. Therefore, PJB seeks to fulfill the provisions of the *International Professional Practices Framework* (IPPF) as one of the guidelines for the implementation of the internal audit function at PJB. Based on the IPPF Standard 1300 it is stipulated that the implementation of an internal *Quality Assurance Review* of the quality assurance program and improvement of the overall internal audit function must be carried out annually through self-assessment, while externally it must be conducted every 5 (five) years by an independent assessor.

Quality Assurance Review in 2018 was carried out by an external assessor in this case PT Bina Audita Indonesia (BAI). PT BAI was appointed and determined to carry out a *Quality Assurance Review* based on Assignment Letter from the Head of General Affairs and Administration No: 347.SPK/061/BMUM/2018 on October 24, 2018.

While for 2019, the implementation of *Quality Assurance Review* is carried out by self-assessment, concluded, and completed on January 31, 2020. The results of observation and evaluation of 4 (four) aspects of internal audit practices, namely aspects of governance, internal audit management, staff management auditors and the implementation of internal audit activities based on the 2017 IPPF standard shows that overall the PJB IAU has met The Institute of Internal Auditors (IPPF 2017) Standards and Code of Conduct with some notes that need improvement.



PLTU Tenayan
Tenayan CFPP

AUDITOR EKSTERNAL

EXTERNAL AUDITOR

Sebagai bagian dari pelaksanaan sistem pengendalian internal, PJB secara berkala melakukan audit menggunakan pihak eksternal yang independen. Pelaksanaan audit oleh auditor eksternal diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai mengenai akuntabilitas pelaporan keuangan dan kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penunjukan Auditor Eksternal

External Auditor Appointment

Auditor Eksternal untuk pemeriksaan laporan keuangan PJB adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditetapkan melalui RUPS Tahunan dengan mempertimbangkan rekomendasi Dewan Komisaris dan Komite Audit. Proses pemilihan dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa di lingkungan PJB. Untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan, Auditor Eksternal yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan PJB.

Menindaklanjuti hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun buku 2018 tanggal 14 Juni 2019, Dewan Komisaris menetapkan KAP RSM Indonesia sebagai auditor eksternal dalam melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan PJB dan Laporan Lainnya tahun buku 2019. Tahun buku 2019 merupakan periode tahun audit ke-4 bagi RSM Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 Tanggal 5 Februari 2008 tentang Jasa Akuntan Publik pada pasal 3 ayat 1 disebutkan Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Biaya, Jasa dan Opini Audit

Audit Fees, Services and Opinions

Biaya audit untuk KAP RSM Indonesia dalam melakukan audit terhadap laporan keuangan keuangan tahun buku 2019 sebesar Rp1.507.900.000 belum termasuk PPN 10%. Audit yang dilaksanakan sebagai lingkup jasa yang diberikan selama 5 (lima) tahun terakhir meliputi audit Laporan Keuangan, Evaluasi Kinerja dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal. Opini yang dihasilkan dari audit selama 5 (lima) tahun terakhir menyatakan bahwa laporan keuangan Perusahaan telah disajikan secara "Wajar Tanpa Pengecualian" dalam semua hal yang material berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku 2015 sampai dengan 2019 dilakukan oleh Akuntan dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai berikut:

As part of the internal control system, PJB periodically conducts audits supported by independent external parties. The audit by the external auditor is intended to ensure the accountability of financial reporting and its compliance with generally accepted accounting principles and compliance with laws and regulations.

The External Auditor for PJB's financial statements auditing is a Public Accounting Firm (KAP) determined through the Annual GMS by considering the recommendations of the Board of Commissioners and the Audit Committee. The selection process is conducted through the mechanism of procurement of goods and services within the PJB. To guarantee the independence and quality of the audit results, the appointed External Auditor may not have a conflict of interest with PJB.

Following up on the resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS) for the 2018 fiscal year on June 14, 2019, the Board of Commissioners appointed RSM Indonesia Public Accounting Firm as an external auditor to audit PJB Financial Statements and Other Reports for the 2019 fiscal year. The 2019 fiscal year was the 4th audit period for Indonesia RSM.

In accordance with the Ministry of Finance Regulation No.17/PMK.01/2008 on February 5, 2008, concerning Public Accounting Services in article 3 paragraph 1, it is mentioned that the service of audit in general for the financial statements by a Public Accounting Firm is no more than 6 (six) consecutive fiscal years and by a Public Accountant no more than 3 (three) consecutive fiscal years.

The audit fee for RSM Indonesia Public Accounting Firm for auditing the 2019 Financial Statements is Rp 1,507,900,000 excluding 10% VAT. Audits are conducted as a scope of services provided during the last 5 (five) years including audits of Financial Statements, Performance Assessment and Compliance as well as Internal Controls. Opinion from the audit for the past 5 (five) years states that the Company's financial statements have been presented as "Unqualified" in all material respects based on generally accepted accounting principles in Indonesia. The Audit of the Company's Financial Statements for the fiscal year 2015 to 2019 is carried out by the Accountant and Public Accounting Firm (KAP) as follows:



Tahun Buku Fiscal Year	Akuntan Accountants	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firms	Biaya Audit Audit Fee	Jasa yang Diberikan Services	Jasa Lain Other Services	Opini Audit Audit Opinion
2019	Dedy Sukrisnadi	RSM Indonesia	Rp 1.507.900.000	Laporan Keuangan Konsolidasi Consolidated Financial Statements	- Laporan Evaluasi Kinerja - Laporan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal. - Performance Assessment Report. - Compliance Report on law and Internal Control.	Wajar Tanpa Pengecualian Unqualified
2018	Saptoto Agustomo	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	Rp 1.200.500.000			
2017	Saptoto Agustomo	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners	Rp 675.400.000			
2016	Saptoto Agustomo	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Rp 675.400.000			
2015	Haryanto Sahari	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners	Rp1.749.791.120			

Audit Eksternal Lainnya Other External Audits

Pada Tahun 2019 telah dilaksanakan audit oleh pihak auditor eksternal Satuan Pengawasan Internal PT PLN Persero (SPI PLN), BPK-RI dan KAP sebagai berikut:

- Pada Triwulan III tahun 2019, SPI PLN Kantor Pusat telah melaksanakan Audit Operasional Berbasis Resiko pada PT Pembangkitan Jawa-Bali yang dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas berikut :
 - No.061/PO AUDIT 24/SPI.01.01/011513/2019 tanggal 11 September 2019. Audit dilaksanakan tanggal 17 September 2019 sampai dengan 16 Oktober 2019.
 - No. 063/PO AUDIT TI/SPI.01.04/011513/2019 tanggal 13 September 2019. Audit dilaksanakan tanggal 17 September 2019 sampai dengan 16 Oktober 2019.
- Pada Triwulan I tahun 2019, BPK - RI telah melaksanakan Audit Subsidi Listrik Tahun 2018 di PJB yang dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas No.1/PDTSubsidi/PT/01/2019 tanggal 04 Januari 2019, perihal Pemberitahuan Pemeriksaan dan Permintaan Data Subsidi Tahun Anggaran 2018 pada anak perusahaan PT PLN (Persero) yaitu PT Pembangkitan Jawa-Bali yang dilaksanakan mulai tanggal 2 sampai dengan 12 Februari 2019.
- Pada Triwulan I tahun 2019, Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (KAP RSM-AAJ) ditunjuk oleh PT PLN (Persero) untuk melakukan audit kepatuhan dan rewiu laporan kinerja PT Pembangkitan Jawa-Bali dan entitas anak perusahaan tahun 2019, yang dilaksanakan melalui Surat Perintah Mulai Kerja No.1497/KEU.02.02/010504/2019 tanggal 9 Oktober 2019. Audit dilaksanakan mulai tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan 31 Maret 2020.

In 2019, the audit was carried out by PT PLN Persero's Internal Audit Unit (PLN IAU), BPK-RI and PAF as the external auditors or as follows:

- In Quarter III of 2019, PLN IAU Head Office has carried out a Risk-Based Operational Audit in PT Pembangkitan Jawa-Bali based on the following Assignment Letter:
 - No. 061 / PO AUDIT 24 / SPI.01.01 / 011513/2019 on September 11, 2019. The audit was carried out from September 17, 2019, to October 16, 2019.
 - No. 063 / PO AUDIT IT / SPI.01.04 / 011513/2019 on September 13, 2019. The audit was carried out from September 17, 2019, to October 16, 2019.
- In Quarter I of 2019, the BPK - RI has conducted the 2018 Electricity Subsidy Audit in PJB which was carried out based on Assignment Letter No.1 / PDTSubsidi/PT/01/2019 on January 4, 2019, concerning Notification of Examination and Request for Subsidized Data for Fiscal Year 2018 in a subsidiary of PT PLN (Persero), PT Pembangkitan Jawa-Bali, held from February 2, 2019, to February 12, 2019.
- In Quarter I of 2019, Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners's Public Accounting Firm (RSM-AAJ) was appointed by PT PLN (Persero) to conduct an audit on compliance and the performance review of PT Pembangkitan Jawa-Bali and its subsidiaries of 2019, which was carried out through Assignment Letter No.1497 / KEU.02.02 / 010504/2019 on October 9, 2019. The audit was carried out from October 9, 2019, to March 31, 2020.

Pengawasan Atas Auditor Eksternal Supervision of External Audits

Penunjukan KAP telah melalui proses telaah dan diawasi oleh Komite Audit termasuk dalam hal penetapan biaya audit atas dasar kewajaran. Komite Audit melakukan pengawasan dan koordinasi selama pelaksanaan proses audit eksternal melalui pertemuan secara rutin dengan Kantor Akuntan Publik untuk membahas seluruh temuan dan perkembangan selama pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik, membantu dan memastikan bahwa tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan audit serta melakukan evaluasi atas kualitas proses audit, memastikan pelaksanaan audit telah sesuai ketentuan dan standar yang berlaku.

The appointment of the Public Accounting Firm has been through a review process and overseen by the Audit Committee including in determining audit fees on a fair basis. The Audit Committee supervises and coordinates during the implementation of the external audit process through regular meetings with the Public Accounting Firm to discuss all findings and developments during the examination carried out by the Public Accountant Office, assist and ensure that there are no obstacles in conducting the audit and evaluate the quality of the process audit, ensuring that the audit complies with applicable provisions and standards.

Efektivitas Pelaksanaan Audit Oleh Akuntan Publik Audit Effectiveness Implementation by Public Accountants

Pelaksanaan audit eksternal dievaluasi oleh Komite Audit yang berkoordinasi dengan Satuan Pengawasan Internal untuk melakukan kajian atas efektivitas audit eksternal serta memastikan bahwa seluruh temuan dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang ditetapkan dan meningkatkan kinerja baik dari segi keuangan maupun operasional. PJB berupaya menindaklanjuti setiap temuan pelaksanaan audit eksternal baik yang dilakukan oleh SPI PLN, BPK-RI dan KAP maupun audit eksternal lainnya dalam rangka meminimalisir temuan-temuan ditahun berikutnya.

The implementation of the external audit is evaluated by the Audit Committee in coordination with the Internal Audit Unit to review the effectiveness of the external audit and ensure that all findings can be followed up according to the established authority and improve performance both financially and operationally. PJB seeks to follow up on any findings of the implementation of external audits conducted by PLN IAU, BPK-RI, and PAF as well as other external audits to minimize the findings in the following years.



PLTD Suppa
Suppa DEPP

MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT

Perkembangan sektor ketenagalistrikan dan kondisi perekonomian yang semakin dinamis pada beberapa tahun sebelumnya dan yang akan datang menyebabkan PJB harus memahami peluang dan risiko yang harus dikelola dalam rangka menjaga *sustainability* PJB. Pengelolaan risiko menjadi aspek strategis dalam upaya PJB mencapai tujuan jangka pendek sesuai Kontrak Manajemen Tahun 2019 dan jangka panjang berdasarkan RJPP PJB tahun 2017-2021. Penerapan manajemen risiko PJB mengacu pada ISO 31000:2018 (*Risk management — Guidelines*) yang diharapkan dapat meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan, memperbaiki identifikasi peluang dan ancaman secara efektif serta mengalokasikan dan menggunakan sumber daya untuk mengelola risiko yang terjadi. Unit yang bertugas dalam mengkoordinasikan pengelolaan risiko PJB adalah Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang membawahi Bidang Manajemen Risiko dan Asuransi serta Bidang Kepatuhan.

The development of the electricity sector and the increasingly dynamic economic conditions in the previous and future years have led PJB to understand the opportunities and risks that must be managed to maintain the sustainability of PJB. Risk management is a strategic aspect in the effort of PJB to achieve short-term goals according to the 2019 Management Contract and long-term In accordance with the PJB's 2017-2021 Corporate Long-term Plan. The implementation of PJB's risk management refers to ISO 31000: 2018 (*Risk management - Guidelines*) which is expected to increase the target achievement, improve the identification of opportunities and threats effectively and allocate and utilize resources to manage the potential risks. The unit in charge of coordinating PJB's risk management is the Risk and Compliance Management Unit which oversees the Risk Management and Insurance Sector as well as the Compliance Sector.

Profil Kepala Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Profile of the Head of the Risk Management and Compliance Unit



Purwono Jati Agung

Warga Negara Indonesia, 46 tahun.

Menjabat sebagai Kepala Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan sejak tahun 2018 sesuai Keputusan Direksi PT PJB No. P.072/440/PJB/2018 tanggal 20 Maret 2018.

Pendidikan

Menyelesaikan pendidikan S1 Mesin dari Universitas Diponegoro tahun 1997 dan pendidikan Profesi Insinyur dari Universitas Gadjah Mada tahun 2019.

Pelatihan dan sertifikasi yang telah diikuti diantaranya *Enterprise Risk Management Associate Professional* (ERMAP), *Certified Risk Governance Professional* (CRGP), dan *Certified Human Resources Professional* (CHRP).

Riwayat Pekerjaan

Pernah menjabat sebagai GM PJB Academy (2016-2018), Kepala Divisi Ren-Val Operasi & Pemeliharaan (2016), Senior Manajer Kinerja Jasa O&M (2014-2016), GM UBJOM Rembang (2013-2014), Manajer Enjiniring & QA UP Gresik (2012-2013), Manajer Engineering UP Gresik (2012) dan Manajer O&M Services (2010).

Indonesian, 46 years old.

Appointed as Head of the Risk Management and Compliance Unit since 2018 In accordance with Decree of the Board of Directors of PT PJB No. P.072/440/PJB/2018 on March 20, 2018.

Education

Earned a Bachelor of Mechanical Engineering from Diponegoro University in 1997 and a Professional Engineer from Gadjah Mada University in 2019.

The training and certifications that have been attended include Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP), Certified Risk Governance Professional (CRGP), and Certified Human Resources Professional (CHRP).

Work Experiences

He had served as GM of PJB Academy (2016-2018), Head of Ren-Val Operations & Maintenance Division (2016), Senior Manager of O&M Services Performance (2014-2016), GM of Rembang OMSBU (2013-2014), Engineering & QA Manager of Gresik GU (2012-2013), Engineering Manager of Gresik GU (2012) and O&M Services Manager (2010).



Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan Audit
Audited Financial Statements



Referensi Kriteria ARK
ARK Criteria Reference

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan Appointment and Dismissal of the Head of the Risk Management and Compliance Unit

Sesuai dengan Keputusan Direksi No. 044.K/010/DIR/2013 tentang Wewenang Kepegawaian, Kepala Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.

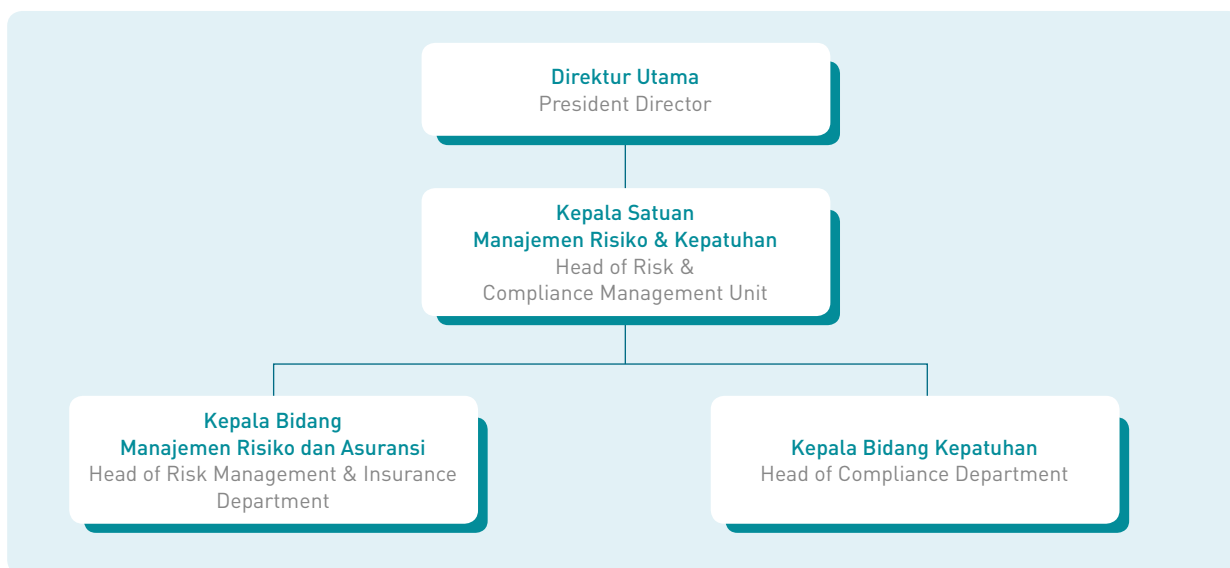
In accordance with the Board of Directors Decree No. 044.K/010/DIR/2013 concerning Employee Authority, Head of Risk Management and Compliance Unit is appointed and dismissed by the President Director.

Kedudukan dan Struktur Organ Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan Position and Organizational Structure of the Risk Management and Compliance Unit

Kedudukan dan Struktur Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan terakhir kali ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 010.P/019/DIR/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PJB.

The Position and Structure of the Risk Management and Compliance Unit were last determined in accordance with the Board of Directors Decree No. 010.P/019/DIR/2019 concerning PT PJB Organization and Work Procedure.

Struktur Organisasi Manajemen Risiko PJB PJB Risk Management Organizational Structure



Komposisi Karyawan Unit Kerja Manajemen Risiko Risk Management Unit Composition

Unit Kerja Manajemen Risiko PJB berada di bawah Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan yaitu Bidang Manajemen Risiko dan Asuransi. Sampai dengan Desember 2019, formasi pada Unit Kerja Manajemen Risiko adalah 11 (sebelas) pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

PJB's Risk Management Unit is under the Risk and Compliance Management Unit, namely the Risk Management and Insurance Division. As of December 2019, the formation of the Risk Management Work Unit is 11 (eleven) employees with the following composition:

No.	Nama Nama	Jabatan Jabatan	Riwayat Pendidikan Riwayat Pendidikan
1	M. Agustian	Kepala Bidang Manajemen Risiko & Asuransi Head of Risk Management & Insurance Department	• S1 Elektro dari ITB (1995-2000) • S2 Bidang Manajemen dari ITS (2004-2006) • S2 Magister Bisnis dan Teknologi Kelistrikan ITB (2008-2009) • Bachelor of Electrical Engineering from ITB (1995-2000) • Master of Management from ITS (2004-2006) • Master of Electrical and Business Technology from ITB (2008-2009)
2	Andrie Darma Nugroho	Manajer Manajemen Risiko Risk Management Manager	• S1 Informatika dari ITS (1996-2001) • S2 Magister Bisnis dan Teknologi Kelistrikan ITB (2008-2009) • Bachelor of Informatics from ITS (1996-2001) • Master of Electrical and Business Technology from ITB (2008-2009)
3	Rusminto	Manajer Klaim & Asuransi Claims & Insurance Manager	• S1 Teknik Industri dari Universitas Wijaya Putra (2012-2016) • S2 Magister Manajemen dari Universitas Wijaya Putra (2016-2018) • Bachelor of Industrial Engineering from Wijaya Putra University (2012-2016) • Master of Management from Wijaya Putra University (2016-2018)
4	Dwi Handoko	Analyst Manajemen Risiko Risk Management Analyst	• S1 Ekonomi Perusahaan / Manajemen dari Universitas Panca Marga (2010-2014) • Bachelor of Corporate / Management Economics from Panca Marga University (2010-2014)
5	Riana Pratiwiningrum	Assistant Analyst Manajemen Risiko Risk Management Assistant Analyst	• S1 Teknik Industri dari Universitas Diponegoro (2008-2012) • Bachelor of Industrial Engineering from Diponegoro University (2008-2012)
6	Adhitya Sapta Adhitama	Senior Specialist II Manajemen Risiko Senior Specialist II	• S1 Teknik Mesin dari ITB (1996-2001) • S2 Magister Administrasi Bisnis SBM dari ITB (2004-2006) • S2 Magister Bisnis dan Teknologi Kelistrikan ITB (2008-2009) • Bachelor of Mechanical Engineering from ITB (1996-2001) • Master of Business Administration in SBM from ITB (2004-2006) • Master of Electrical and Business Technology from ITB (2008-2009)
7	Abie Rezanto	Assistant Officer Klaim & Asuransi Claims & Insurance Assistant Officer	• S1 Administrasi Fiskal dari Universitas Indonesia (2008-2012) • S2 Magister Manajemen dari Universitas Airlangga (2015 – 2020) • Bachelor of Fiscal Administration from the University of Indonesia (2008-2012) • Master of Management from Airlangga University (2015-2020)
8	Bimo Hani Basuki	Officer Klaim & Asuransi Claims & Insurance Officer	• S1 Elektro dari ITS Surabaya (1999 – 2004) • Bachelor of Electrical Engineering from ITS Surabaya (1999 – 2004)
9	Diah Aryani H	Officer Klaim & Asuransi Claims & Insurance Officer	• SMA Fisika dari SMA Pirngadi (1988-1991) • High-School Graduate of Physics from Pirngadi High School (1988-1991)
10	Trio Suryono	Officer Klaim & Asuransi Claims & Insurance Officer	• S1 Elektro dari Institut Sains & Teknologi Nasional Jakarta (1998-2002) • S2 Manajemen dari Universitas Mercu Buana (2015-2017) • Bachelor of Electrical Engineering from the Jakarta National Institute of Science & Technology (1998-2002) • Master of Management from Mercu Buana University (2015-2017)
11	Leni Khairani	Assistant Analyst Manajemen Risiko Risk Management Assistant Analyst	• S1 Teknik Industri dari Universitas Sumatera Utara (2013-2017) • Bachelor of Industrial Engineering from the University of North Sumatra (2013-2017)



Sampai dengan Desember 2019, Bidang Manajemen Risiko dan Asuransi PJB telah didukung oleh tenaga profesional yang telah memiliki sertifikasi profesi sebagai berikut:

As of December 2019, PJB's Risk Management and Insurance Division has been supported by professionals who already have the following professional certifications:

Jenis Sertifikasi Profesi Type of Professional Certification	Jumlah Total
Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP)	5
Enterprise Risk Management Certified Professional (ERMCP)	2
Certified Risk Governance Professional (CRGP)	2
Certified Risk Management Officer (CRMO)	1
Certified Risk Management Professional (CRMP)	2
Quality Risk Management & Operations (QRMO)	1

Struktur dan Tanggung Jawab dalam Manajemen Risiko Structure and Responsibilities in Risk Management

Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang secara khusus dijalankan oleh Bidang Manajemen Risiko dan Asuransi sebagai fungsi utama pengelolaan risiko di PJB terintegrasi dengan setiap level organisasi mulai dari unit kerja sebagai pemilik risiko sampai dengan Dewan Komisaris beserta Komite sebagai pelaksanaan fungsi Pengawasan. Adapun pembagian tugas pengawasan dan pengelolaan manajemen risiko di PJB dilakukan sebagai berikut:

The Risk Management and Compliance Unit which is specifically carried out by the Risk Management and Insurance Sector as the main function of risk management in PJB are integrated with each level of the organization starting from the work unit as a risk owner to the Board of Commissioners and the Committee as the Supervision function. The task division of supervisory and risk management in PJB is as follows:

No.	Pengelola Manager	Tugas & Tanggung Jawab	The assignment of responsibilities
1.	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Melakukan pengawasan dan tuntunan (saran dan nasihat) terhadap Direksi dan Manajemen. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa RJP dan RKAP telah mengandung pendekatan manajemen risiko terhadap berbagai risiko Perseroan.	Supervise and guide (advice and recommendation) to the Board of Directors and Management. The Board of Commissioners is responsible for ensuring that the Short-term Plan and ABOP have included a risk management approach to the Company's various risks.
2.	Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee	Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem dan kebijakan manajemen risiko, evaluasi manajemen risiko, pemantauan kesesuaian potensi risiko di Perseroan dan pengawasan kepatuhan Perseroan terhadap regulasi.	Assist the implementation of the duties and functions of the Board of Commissioners in overseeing the implementation of risk management systems and policies, evaluating risk management, monitoring the suitability of potential risks in the Company and overseeing the Company's compliance with regulations.
3.	Komite Audit Audit Committee	Pengawasan terhadap pelaksanaan audit internal secara efektif, proaktif dan berkesinambungan, termasuk pengawasan keberlangsungan pengelolaan risiko.	Monitor the implementation of internal audit in an effective, proactive, and continuous manner, including monitoring the sustainability of risk management.
4.	Direksi Board of Directors	- Membentuk satuan kerja Manajemen Risiko Kantor Pusat dibawah Direksi yang bertugas sebagai <i>framework owner</i> dalam implementasi manajemen risiko di lingkungan perusahaan. - Menetapkan kebijakan penerapan manajemen risiko di lingkungan Perusahaan, termasuk didalamnya adalah penetapan matriks risiko yang digunakan di Perusahaan beserta <i>risk appetite</i>. - Menetapkan, mengelola dan memantau risiko-risiko utama (<i>key risks</i>) yang dihadapi perusahaan dalam pencapaian sasaran strategis perusahaan.	- Establish a Head Office Risk Management work unit under the Board of Directors who has the duty as a framework owner in implementing risk management in the corporate environment. - Establish a policy for implementing risk management within the Company, including determining the risk matrix used in the Company and risk appetite. - Determine, manage, and monitor key risks faced by the company in achieving the company's strategic goals.

No.	Pengelola Manager	Tugas & Tanggung Jawab	The assignment of responsibilities
		- Menciptakan lingkungan internal Perusahaan yang kondusif untuk penerapan dan peningkatan <i>risk maturity</i> secara berkelanjutan, dan untuk menanamkan budaya manajemen risiko perusahaan. - Menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam penerapan manajemen risiko.	- Create a corporate internal environment that is conducive to implementing and increasing risk maturity on an ongoing basis, and to instilling a corporate risk management culture. - Provide the resources needed during risk management.
5.	Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan Risk Management and Compliance Unit	- Menyusun dan meninjau kebijakan dan pedoman manajemen risiko (termasuk di dalamnya <i>maturity framework</i>) serta memastikan penerapannya di perusahaan. - Memastikan tersedianya infrastruktur risiko korporat dan data manajemen risiko pada setiap aktivitas strategis perusahaan. - Menyusun profil risiko korporat termasuk di dalamnya memberikan peringatan dini (<i>early warning</i>) kepada Direksi. - Memastikan keselarasan penerapan manajemen risiko secara keseluruhan dengan kebijakan, strategi perusahaan maupun peraturan yang berlaku. - Memantau risiko-risiko utama (<i>key risks</i>) perusahaan dan efektifitas pengelolaannya oleh pemilik risiko. - Menyusun road map manajemen risiko perusahaan berdasarkan <i>strategic objective</i> perusahaan. - Memantau <i>risk maturity</i> perusahaan dan memfasilitasi perbaikan-perbaikannya menuju tujuan sesuai road map Manajemen Risiko Perusahaan. - Memfasilitasi pemilik risiko dalam implementasi Manajemen Risiko Perusahaan. - Memfasilitasi pembangunan kompetensi (<i>capacity building</i>) Manajemen Risiko di Perusahaan. - Melakukan asesmen <i>risk maturity</i> unit kerja/ anak perusahaan/perusahaan afiliasi.	- Develop and review risk management policies and guidelines (including the maturity framework) and ensure their application in the company. - Ensure the availability of corporate risk infrastructure and risk management data in each of the company's strategic activities. - Compiling a corporate risk profile including providing an early warning to the Directors. - Ensure the alignment of the implementation of overall risk management with the policies, corporate strategies, and applicable regulations. - Monitor the main risks (key risks) of the company and the effectiveness of its management by the risk owner. - Develop a company risk management road map In accordance with the company's strategic objectives. - Monitor the company's risk maturity and facilitate improvements to its goals according to the Company's Risk Management road map. - Facilitate risk owners in implementing Corporate Risk Management. - Facilitate risk management capacity building in the Company. - Conduct a risk maturity assessment of the work unit/subsidiary / affiliated company.
6.	Satuan Pengawas Internal Internal Audit Unit	- Berperan sebagai fungsi independent <i>assurance provider</i> yang bertugas sebagai filter akhir atas seluruh pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh <i>risk owner</i> sesuai mekanisme <i>three lines of defense</i>. - Merencanakan dan melaksanakan Audit Berbasis Risiko untuk memastikan fokus pada risiko utama Perusahaan. - Memberikan penilaian terhadap efektifitas penanganan risiko utama perusahaan oleh pemilik risiko dan memberikan rekomendasi perbaikannya sesuai mekanisme <i>three lines of defense</i>. - Melakukan evaluasi penerapan manajemen risiko di lingkungan perusahaan secara berkala.	- Act as an independent assurance provider function as the final filter for all risk management activities carried out by the risk owner following the three lines of defense mechanism. - Plan and conduct Risk-Based Audit to ensure focus on the Company's main risks. - Provide an assessment of the effectiveness of the company's main risk management by risk owners and provide recommendations for improvement according to the three lines of defense mechanism. - Evaluate periodically the application of risk management in the Company.



No.	Pengelola Manager	Tugas & Tanggung Jawab	The assignment of responsibilities
7.	Kepala Satuan/ Kepala Divisi atau Bidang Head of Unit / Head of Division or Department	- Bertanggung jawab terhadap penerapan manajemen risiko di satuan/ divisi/ bidang dengan cara menunjukkan komitmen penerapan manajemen risiko, mengidentifikasi risiko utama dan mengelola proses mitigasi sesuai divisi atau bidangnya. - Membangun <i>risk awareness</i> di lingkungan kerjanya. - Melakukan pembinaan dan pengendalian risiko pada divisi atau bidangnya.	- Responsible for the implementation of risk management in units/divisions/fields by demonstrating a commitment to implementing risk management, identifying key risks, and managing mitigation processes according to their divisions or fields. - Encourage risk awareness in the work environment. - Encompass and control risk in its divisions or fields.
8.	General Manager/ Kepala Unit General Manager/ Head of Unit	- Bertanggung jawab terhadap penerapan manajemen risiko di unit dengan cara menunjukkan komitmen, memberikan arahan, serta memastikan terlaksananya proses pengelolaan risiko di unitnya. - Membangun <i>risk awareness</i> dan memastikan pemenuhan kompetensi <i>risk owner</i> di lingkungan kerjanya. - Menyusun dan meninjau aturan pelaksanaan manajemen risiko di unit kerjanya serta memastikan penerapannya. - Menyusun profil risiko unit kerja termasuk di dalamnya memberikan <i>early warning</i> kepada Direksi. - Memastikan keselarasan penerapan manajemen risiko di unit kerjanya secara keseluruhan dengan kebijakan, strategi perusahaan maupun peraturan yang berlaku. - Memantau risiko unit kerja dan efektifitas pengelolaannya. - Menyusun laporan manajemen risiko secara berkala dan disampaikan kepada Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan dan Satuan Pengawasan Internal.	- Responsible for implementing risk management in the unit by showing commitment, giving direction, and ensuring the implementation of risk management processes in the unit. - Encourage risk awareness and ensuring the fulfillment of risk owner competencies in the work environment. - Compile and review the rules for implementing risk management in their work units and ensure their application. - Compile work unit risk profiles including providing early warnings to the Directors. - Ensure the alignment of the implementation of risk management in the work unit as a whole with the company's policies, strategies, and regulations. - Monitor work unit risks and the effectiveness of their management. - Prepare risk management reports regularly and submit them to the Risk Management and Compliance Unit and the Internal Supervisory Unit.
9.	Pemilik Risiko Risk Owner	- Menyusun dan menetapkan kajian risiko dalam posisinya sebagai inisiator atau penanggungjawab atas suatu inisiatif kegiatan. - Melakukan pengelolaan risiko pada bidang atau lingkup kerjanya secara berkelanjutan, termasuk di dalamnya merencanakan (<i>assessment risk</i>) dan menindaklanjuti mitigasi risiko. - Mendokumentasikan proses bisnis yang ada di bidang atau lingkup kewenangannya, permasalahan yang telah terjadi dan risiko yang berpotensi terjadi beserta pengendaliannya. - Mempersiapkan sumberdaya yang diperlukan dalam pengelolaan risiko di bidang kerjanya. - Memastikan manajemen risiko dipahami dan diimplementasikan oleh bidang kerjanya.	- Compile and set a risk assessment in its position as the initiator or the person in charge of an activity initiative. - Conduct risk management in the field or scope of work on an ongoing basis, including planning (risk assessment) and following up on risk mitigation. - Record existing business processes in the area or scope of their authority, problems that have occurred, and potential risks and their control. - Prepare the resources needed for risk management in their field of work. - Ensure risk management is understood and implemented by its line of work.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Unit Kerja Manajemen Risiko Tahun 2019 Risk Management Unit Activity Report of 2019

Sampai dengan akhir tahun 2019, Unit Manajemen Risiko telah merealisasikan seluruh Program Kerja Tahun 2019. Realisasi kegiatan Unit Manajemen Risiko tahun 2019 adalah sebagai berikut:

As of the end of 2019, the Risk Management Unit has implemented all of the 2019 Work Programs. The implementation of the activities of the Risk Management Unit in 2019 is as follows:

No.	Program Kegiatan Activity Program	Periode Period	Realisasi pelaksanaan Date of Implementation	Dokumen Document
1	Penetapan Profil Risiko Korporat Tahun 2019 Determination of the Corporate Risk Profile for 2019	Tahunan Annual	Februari 2019 February 2019	Draft Profil Risiko Korporat Tahun 2019 Draft Corporate Risk Profile 2019
2	Pelaksanaan Program Sisting ERM kepada Anak Perusahaan PT PLN (Persero) Implementation of ERM Sisting Program to Subsidiaries of PT PLN (Persero)	Triwulan Quarterly	Triwulan I s/d IV 2019 Q1 to QIV/2019	Dokumen Laporan Program <i>Sisting</i> ERM Anak Perusahaan PT PLN (Persero) Report on the Report of the ERM Sisting Program of PT PLN (Persero)
3	Penyusunan Draft Profil Risiko Korporat Tahun 2020 Preparation of the Corporate Risk Profile 2020	Tahunan Annual	Tahun 2019 2019	Draft Profil Risiko 2020 Risk Profile 2020 Draft
4	<i>Review</i> dan <i>Update</i> Pedoman Manajemen Risiko Review and Update on Risk Management Guidelines	Tahunan Annual	Tahun 2019 2019	Draft Pedoman Manajemen Risiko Draft Risk Management Guidelines
5	Pengembangan <i>Tool Monitoring</i> Manajemen Risiko Development of a Risk Management Monitoring Tool	Tahunan Annual	Desember 2019 December 2019	Dokumen Pengembangan aplikasi Manajemen Risiko Risk Management Application Development Document
6	Penyusunan <i>risk appetite</i> , <i>risk capacity</i> dan <i>risk tolerance</i> Preparation of risk appetite, risk capacity, and risk tolerance	Tahunan Annual	Tahun 2019 2019	Draft <i>risk appetite</i> , <i>risk capacity</i> dan <i>risk tolerance</i> Draft risk appetite, risk capacity, and risk tolerance
7	Penyiapan dokumen untuk klaim gangguan Generator Transformer STG 1.0 PT PJB UP Muara Karang Preparation of documents for the claim for problems in Generator Transformer STG 1.0 PT PJB's Muara Karang GU	Tahun 2019 2019	13 September 2019 September 13, 2019	Bukti Pembayaran Klaim Claim Payment Receipt
8	Pengadaan asuransi aset operasional PT PLN Grup (PLN, IP, PJB, PLN Batam) 2018-2020 Procurement of PT PLN Group operational assets insurance (PLN, IP, PJB, PLN Batam) 2018-2020	Tahunan Annual	Mei 2019 Mei 2019	Dokumen Polis dan PKS Asuransi aset operasional PT PJB Policy Documents and VFD Insurance for operational assets of PT PJB
9	Sertifikasi <i>Business Continuity Management System</i> (BCMS) ISO 22301 ISO 22301 Business Continuity Management System (BCMS) Certification	Tahun 2019 2019	16 September 2019 September 16, 2019	Sertifikat ISO 22301 <i>Business Continuity Management System</i> yang dikeluarkan oleh BSI ISO 22301 Business Continuity Management System certificate issued by BSI

No.	Program Kegiatan Activity Program	Periode Period	Realisasi pelaksanaan Date of Implementation	Dokumen Document
10	<i>Assessment Maturity Level</i> Pengelolaan Manajemen Risiko Korporat oleh Pihak Eksternal Assessment Maturity Level of Corporate Risk Management by External Parties	Tahunan Annual	Tahun 2019 2019	Dokumen Hasil <i>Assessment Maturity Level</i> Document of Maturity Level Assessment Results
11	<i>Update</i> Formulir Dokumen Manajemen Risiko (DMR) Update on the Risk Management Document Form (DMR)	Tahun 2019 2019	Tahun 2019 2019	Dokumen Formulir DMR dan DMRK DMR and DMRK Form Documents
12	Melakukan pendampingan penyusunan kajian kelayakan program kerja korporat yang dilakukan oleh <i>risk owner</i> masing-masing proyek Assist the preparation of a feasibility study of corporate work programs conducted by the risk owner of each project	Setiap saat Not specified	Tahun 2019 2019	Dokumen DMRK DMRK document

Kebijakan Manajemen Risiko Risk Management Policy

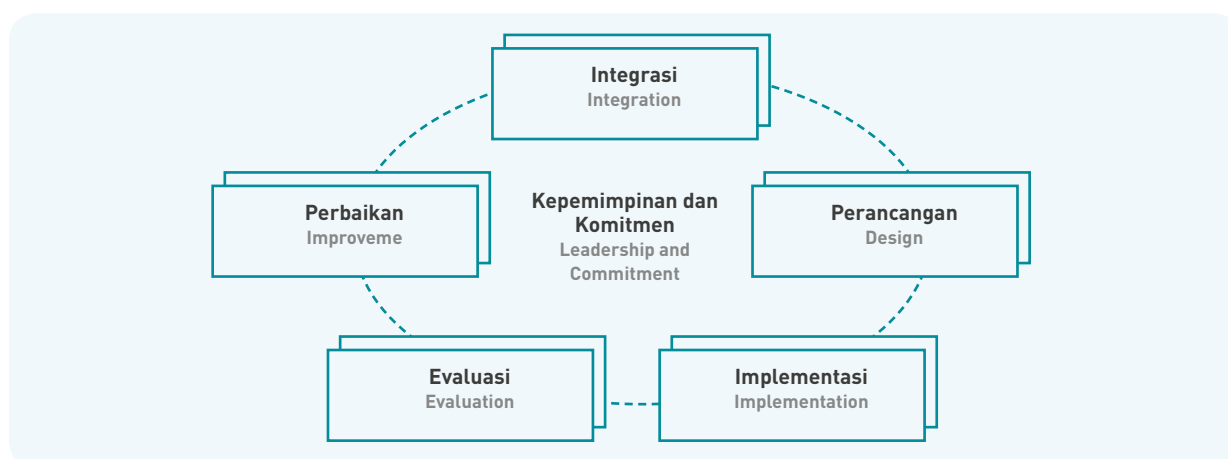
Komitmen pengelolaan risiko PJB didukung dengan Kebijakan Manajemen Risiko yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 128.K/010/DIR/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan PT Pembangkitan Jawa Bali. Surat Keputusan Direksi tersebut memuat Pedoman Umum Manajemen Risiko sebagai acuan dalam implementasi pengelolaan risiko PJB. Pedoman Manajemen Risiko berisikan ketentuan-ketentuan yang disyaratkan dalam pengelolaan risiko. Kebijakan Manajemen Risiko ditinjau ulang secara berkala dalam rangka memastikan sesuai dengan kebijakan dan best practices serta skala organisasi dan bisnis yang dijalankan PJB.

The commitment to PJB risk management is supported by a Risk Management Policy established through Directors Decree No. 128.K / 010 / DIR / 2014 concerning the Implementation of Risk Management in the Environment of PT Pembangkitan Jawa Bali. The Directors' Decree contains the General Guidelines for Risk Management as a reference in the implementation of PJB risk management. The Risk Management Guidelines contain the requirements required in risk management. The Risk Management Policy is regularly reviewed to ensure that it is in line with the policies and best practices as well as the scale of the organization and business carried out by the PJB.

Sistem Manajemen Risiko Risk Management System

Sistem Manajemen Risiko PJB merupakan kerangka kerja dalam pengelolaan risiko yang bersifat dinamis, terstruktur, terintegrasi dan perbaikan berkesinambungan yang mencerminkan siklus *Plan, Do, Check, Act* (PDCA). Kerangka kerja tersebut menjadi acuan dalam mengintegrasikan pengelolaan risiko kepada keseluruhan manajemen sehingga PJB mampu menerapkan manajemen risiko secara efektif.

PJB's Risk Management System is a framework for risk management that is dynamic, structured, integrated, and continuous improvement that reflects the Plan, Do, Check, Act (PDCA) cycle. The framework becomes a reference in integrating risk management into overall management so that PJB can implement risk management effectively.



Enterprise Risk Management berbasis ISO 31000 merupakan pendekatan yang digunakan PJB dalam melakukan identifikasi dan penilaian risiko. Proses manajemen risiko dilakukan oleh *Risk Owner* yang dibantu oleh *Risk Officer* masing-masing Unit Kerja yang difasilitasi oleh Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan. Pengelolaan risiko aset pembangkit dilakukan selaras dengan sistem manajemen aset PAS 55 – ISO 55000. Beberapa teknik *assessment* risiko untuk aset pembangkit seperti *Risk Evaluation and Prioritization* (REAP), *Failure Mode Effect Analysis* (FMEA), *Root Cause Failure Analysis* (RCFA), dan *Life Cycle Cost* (LCC) yang digunakan sebagai bahan pertimbangan investasi.

ISO 31000-based Enterprise Risk Management is the approach used by PJB in identifying and assessing risk. The risk management process is carried out by a Risk Owner assisted by the Risk Officer of each Work Unit facilitated by the Risk Management and Compliance Unit. Risk management of generating assets is carried out in harmony with the PAS 55 – ISO 55000 asset management system. Several risk assessment techniques for generating assets such as Risk Evaluation and Prioritization (REAP), Failure Mode Effect Analysis (FMEA), Root Cause Failure Analysis (RCFA), and Life Cycle Cost (LCC) which is used as an investment consideration.

Aplikasi Manajemen Risiko Terintegrasi Integrated Risk Management Application

Kebijakan manajemen risiko salah satunya direalisasikan dalam bentuk perangkat lunak (*Software*) yang disebut Aplikasi Manajemen Risiko yang terintegrasi. Aplikasi ini dapat diakses oleh seluruh karyawan karena tidak ada pembatasan jumlah pengguna. Adapun konten pada aplikasi Manajemen Risiko yaitu risiko-risiko yang ada di PJB baik Kantor Pusat maupun Unit Kerja yang terdiri dari Penetapan *Scope*, Identifikasi Risiko sampai dengan penentuan Program Mitigasi Risiko (*Action Plan*).

One of the risk management policies is realized in the form of software called Software Integrated Risk Management Application. This application can be accessed by all employees because there are no restrictions on the number of users. The content in the Risk Management application is the risks that exist in the PJB both the Head Office and Work Units consisting of Scope Determination, Risk Identification to the determination of the Risk Mitigation Program (Action Plan).

Aplikasi manajemen risiko mengelompokkan risiko menjadi tiga yaitu risiko strategis, risiko proyek dan risiko operasional. Risiko strategis adalah risiko yang terkait dengan perencanaan/ pelaksanaan strategi bisnis atau perubahan regulasi maupun lingkungan bisnis, yang dapat mempengaruhi Perusahaan dalam skala luas dan berjangka panjang. Risiko proyek adalah risiko yang timbul pada usaha pembangunan aset Perusahaan, pengadaan maupun kegiatan lainnya yang bersifat proyek. Sedangkan risiko operasional adalah risiko yang timbul terkait proses operasional Perusahaan baik pada fungsi pembangkitan dan fungsi pendukung lainnya.

The risk management application groups risk into three namely strategic risks, project risk, and operational risk. Strategic risk is the risk associated with planning / implementing business strategies or changing regulations and the business environment, which can affect the Company on a broad and long-term scale. Project risk is the risk that arises in the Company's asset development, procurement, and other project activities. While operational risk is the risk that arises related to the Company's operational processes both in the generation function and other supporting functions.

Aplikasi Manajemen Risiko dievaluasi dan dikembangkan setiap tahun untuk disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan risiko.

The Risk Management application is evaluated and developed annually to suit risk management needs.

Profil dan Mitigasi Risiko Risk Profile and Mitigation

Perusahaan secara rutin menyusun profil risiko sebagai bagian tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Risiko Utama Perusahaan diperoleh dari pendekatan bottom up yaitu dari entitas/unit perusahaan melalui Aplikasi Manajemen Risiko dan pendekatan *top down*, dimana Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan akan terlebih dahulu memfasilitasi Direksi dalam mengidentifikasi dan memahami risiko strategis perusahaan, sebelum kemudian diinformasikan kepada seluruh entitas/unit Perusahaan hingga tingkat direktorat, agar dapat mengetahui dan memahami risiko pada tingkatan masing-masing. Berdasarkan identifikasi dan analisis risiko PJB, terdapat 19 risiko utama yang dapat menghambat pencapaian sasaran terkait program kerja yang telah ditetapkan. Profil dan mitigasi risiko korporat tahun 2019 adalah sebagai berikut :

The company routinely compiles risk profiles as an inseparable part of the Company's Work Plan and Budget (ABOP). The Company's Major Risks are obtained from the bottom-up approach, which is from the entity/unit of the company through the Risk Management Application and top-down approach, where the Risk Management and Compliance Unit will first facilitate the Directors in identifying and understanding the company's strategic risks, before then being informed to all entities/units Companies up to directorate level, to know and understand risks at each level. In accordance with the identification and analysis of PJB risks, 19 main risks can affect the achievement of targets related to work programs that have been set. The profile and mitigation of corporate risk in 2019 are as follows:

No.	Risiko dan Mitigasi	Risk and Mitigation
1.	Risiko : Permasalahan K3L masih berpotensi terjadi. Mitigasi : 1) Pelaksanaan <i>Assessment Fire Protection Unit</i> Pembangkit. 2) <i>Improvement Fire Protection System</i> Unit Pembangkit. 3) Penguatan kompetensi Sumber Daya Manusia K3. 4) Penguatan kompetensi personil struktural Unit Kerja terkait K3 dituangkan dalam Bagan Struktur Jabatan. 5) Merancang budaya organisasi PJB Raya terutama terkait K3 PJB. 6) Usulan restrukturisasi dan penguatan fungsi & bidang K3 Unit. 7) Penguatan K3 di fungsi Project UPHB dan UPHT, sebagai pelaksanaan OH. 8) Penguatan pembinaan <i>Crisis Management Unit</i> dan penguatan pengelolaan <i>Crisis Management</i> Korporat. 9) Penguatan PM dan PaM dari hasil ECP Unit. 10) Pengembangan CSMS, dengan dukungan dari SCM dan Perencanaan Pemeliharaan. 11) Deliverable Output berdasarkan asesmen dari <i>Fire-Engineer</i> dan K3. 12) Penerapan Program <i>dust control</i>, <i>wet cleaning</i> dan penerapan prosedur <i>hotwork</i>. 13) Penerapan dan penegakan <i>safety golden rules</i>. 14) Pengembangan aplikasi <i>zero accident assistant</i> untuk mendukung kegiatan operasional K3 Unit. 15) Pengembangan sistem informasi pelaporan lingkungan online PJB korporat (SIPLAH) untuk memantau kualitas lingkungan. 16) Pengurusan izin penimbunan dan <i>alternative</i> pemanfaatan FABA untuk UBJOM Luar Jawa. 17) Sertifikasi peralatan pembangkit (<i>asset</i> PLN). 18) <i>Set-up working permit system maximo</i> di luar jawa dan penguatan peran <i>competent person</i>. 19) Penyusunan dokumen <i>Pre-Incident Planning</i> sebagai mitigasi risiko kebakaran di Unit Pembangkit. 20) Implementasi <i>process safety management</i> berbasis <i>Risk Based Process Safety</i> di setiap unit pembangkit.	Risk : Potential HSE issues. Mitigation : 1) Implementation of the Fire Protection Assessment on Generation Unit. 2) Improvement of Fire Protection System for Generating Unit. 3) Strengthening the competency of Human Resources OHS. 4) Strengthening the competence of structural personnel in Work Units related to OHS is outlined in the Position Structure Chart. 5) Designing the organizational culture of PJB Raya, especially related to PJB OHS. 6) Proposed restructuring and strengthening of OHS functions & fields of the Unit. 7) Strengthening OHS in the UPHB and UPHT Project functions, as OH implementation. 8) Strengthening the development of the Crisis Management Unit and strengthening the management of Corporate Crisis Management. 9) Strengthening PM and PaM from ECP Unit results. 10) Development of CSMS, with support from SCM and Maintenance Planning. 11) Deliverable Output In accordance with assessment from Fire-Engineer and OHS. 12) Application of dust control, wet cleaning, and hot work procedures. 13) Implementation and enforcement of golden safety rules. 14) Development of the zero-accident assistant application to support OHS Unit operational activities. 15) Development of a corporate environmental online information reporting system for PJB (SIPLAH) to monitor environmental quality. 16) Arrangement of hoarding permit and alternative utilization of FABA for OMSBU Outside Java. 17) Certification of generating equipment (PLN assets). 18) Set-up a working permit Maximo system outside of Java and strengthen the role of competent people. 19) Preparation of Pre-Incident Planning documents as fire risk mitigation in the Generating Unit. 20) Implementation of Process Safety Management with Risk-based process safety in every generating unit.

No.	Risiko dan Mitigasi	Risk and Mitigation
2.	Risiko : Ketidaksiapan pembangkit jasa O&M karena percepatan <i>failure</i> dan percepatan <i>ageing</i> yang belum terselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Mitigasi : 1) Pemutakhiran C&RLA mesin pembangkit. 2) Pelaksanaan <i>assessment</i> peralatan oleh tim Pengujian & Inspeksi Peralatan. 3) Perluasan <i>coverage</i> REMDO. 4) Kajian Modifikasi/<i>Upgrade/Life Extension</i> pada <i>Parts/Equipment</i> untuk memperpanjang interval pemeliharaan. 5) Pembinaan penyusunan RCFA pada gangguan yang terjadi untuk <i>equipment</i> yang menyebabkan unit trip/<i>derating</i>, <i>monitoring</i> dan evaluasi eksekusi. 6) Penyusunan Sistem <i>Forensic Engineering- Equipment & Machinery Breakdown</i>. 7) Penyesuaian Siklus OH untuk pelaksanaan program <i>Upgrade</i>. 8) <i>Review</i> dan Standarisasi <i>Fail Save</i> dan <i>Design</i> berdasarkan <i>standard</i> internasional. 9) Pemenuhan kecukupan <i>strategic sparepart</i>. 10) Peningkatan kualitas OH dengan skema integrasi <i>resources</i>. 11) Optimasi PM dan Pdm untuk mengurangi <i>failure rate</i> dan FO/MO. 12) Perencanaan jadwal pemeliharaan yang menyesuaikan dengan agenda politik (Pilpres dan Pileg 2019). 13) Optimalisasi <i>plant assessment</i>, prediktif dan preventif <i>maintenance</i> untuk menghindari MO dan FO. 14) Pengembangan pusat teknologi dan enjiniring pembangkit (riset, desain & <i>feasibility study</i>). 15) Implementasi <i>Life Cycle Cost Management</i>.	Risk : Immature O&M service plants due to the acceleration of failure and acceleration of aging that has not been resolved completely and thoroughly.. Mitigation: 1) Update C & RLA generator engine. 2) Carrying out an equipment assessment by the Equipment Testing & Inspection team. 3) Expansion of REMDO coverage. 4) Review Modifications / Upgrades / Life Extensions on Parts / Equipment to extend maintenance intervals. 5) Fostering the preparation of RCFA on disruptions that occur for equipment that causes unit trip/derating, monitoring, and evaluation of execution. 6) Compilation of a Forensic Engineering-Equipment & Machinery Breakdown System. 7) Adjustment of the OH Cycle for implementing the Upgrade program. 8) Review and Standardization of Fail Save and Design In accordance with international standards. 9) Fulfillment of the adequacy of strategic spare parts. 10) Improving the quality of OH with a resource integration scheme. 11) Optimization of PM and PDM to reduce failure rate and FO / MO. 12) Planning a maintenance schedule that adjusts to the political agenda (Pilpres and Pileg 2019). 13) Optimization of plant assessment, predictive, and preventive maintenance to avoid MO and FO. 14) Development of a technology center and plant engineering (research, design & feasibility study). 15) Implementation of Life Cycle Cost Management.
3.	Risiko : Potensi penundaan program investasi dan proyek ketenagalistrikan. Mitigasi : 1) Mengimplementasikan <i>market intelligence</i> di dalam pemilihan proyek dan pemilihan partner dengan mempertimbangkan kapabilitas partner di pasar internasional. 2) Menyusun tata kelola pengembangan bisnis pembangkit listrik untuk pengembangan proyek IPP & non IPP. 3) Menggunakan parameter-parameter keuangan berstandar internasional di dalam menyusun proposal penawaran kepada PLN.	Risk: Potential delays in investment programs and electricity projects. Mitigation : 1) Implementing market intelligence in project selection and partner selection by considering the capabilities of partners in the international market. 2) Arranging governance of power plant business development for the development of IPP & non-IPP projects. 3) Using international standard financial parameters in preparing bid proposals to PLN.
4.	Risiko : Pembangkit eksisting tidak kompetitif. Mitigasi : 1) Pemutakhiran C&RLA mesin pembangkit PLTU 1, 2, 3 Gresik, PLTG 1-2 Gresik, PLTU 4-5 Muara Karang. 2) Implementasi <i>Life Cycle Cost Management</i>. 3) Pelaksanaan <i>assessment</i> mesin pembangkit oleh tim Inspeksi & Pengujian. 4) Pengkajian pada unit pembangkit PLTU 1, 2, 3 Gresik, PLTG 1-2 Gresik, PLTU 4-5 Muara Karang: a) <i>Keep</i> b) <i>Rehab</i> c) <i>Demolish</i> (<i>Replace</i>, <i>relokasi</i>, <i>scrap</i>)	Risk : Uncompetitive existing power plants. Mitigation : 1) C & RLA Update of Gresik CFPP 1, 2, 3 engines, 1-2 Gresik GTPP, Muara Karang CFPP 4-5. 2) Implementation of Life Cycle Cost Management. 3) Implementation of assessment of generator engines by the Inspection & Testing team. 4) Assessment on CFPP 1, 2, 3 Gresik GTPP, 1-2 Gresik GTPP, Muara Karang CFPP 4-5: a) <i>Keep</i> b) <i>Rehabilitation</i> c) <i>Demolish</i> (<i>Replace</i>, <i>relocation</i>, <i>scrap</i>)

No.	Risiko dan Mitigasi	Risk and Mitigation
	5) <i>Enforcement</i> penggunaan <i>spare part</i> Non-OEM dan <i>reverse engineering</i> yang paling ekonomis. 6) Negosiasi ulang kontrak <i>supply energy primer</i> hingga nilai yang ekonomis pada BPP. 7) Evaluasi dan perampingan BSO/ BSJ dan FTK Unit-unit pembangkit eksisting. 8) Memperpanjang jarak antar <i>Overhaul</i> dan memperpendek durasi <i>Overhaul</i> . 9) Optimalisasi <i>plant assessment</i> , prediktif dan preventif <i>maintenance</i> untuk menghindari MO dan FO. 10) Perencanaan jadwal pemeliharaan yang menyesuaikan dengan agenda politik (Pilpres dan Pileg 2019). 11) Pengembangan pusat teknologi dan enjiniring pembangkit (riset, desain & <i>feasibility study</i>).	5) Enforcement of the most economical use of Non-OEM and reverse engineering parts. 6) Negotiation of the primary energy supply contract to an economical value at the CES. 7) Evaluation and streamlining of BSO / BSJ and FTK Existing generating units. 8) Extend the distance between Overhaul and shorten the duration of Overhaul. 9) Optimization of plant assessment, predictive, and preventive maintenance to avoid MO and FO. 10) Planning maintenance schedules that adjust to the political agenda (Pilpres and Pileg 2019). 11) Development of a technology center and plant engineering (research, design & feasibility study).
5.	Risiko : Pengelolaan kapasitas <i>human capital</i> tidak bisa dilakukan secara leluasa dalam mendukung strategi PJB khususnya dalam pengembangan bisnis dan <i>expertise</i> . Mitigasi : 1) Integrasi <i>Resource</i> melalui perencanaan kebutuhan SDM dengan melibatkan seluruh AP. 2) Melakukan koordinasi lintas bidang dalam rangka evaluasi produktivitas unit yang bertujuan untuk optimalisasi <i>resource</i> antar unit. 3) Integrasi <i>resource</i> pemenuhan kebutuhan SDM bersama seluruh AP & PLN. 4) Strategi Rekrutmen dan Optimalisasi <i>Resource</i> untuk mendukung PLN SOLID.	Risk : Human capital capacity management cannot be done freely in supporting the PJB strategy especially in business development and expertise. Mitigation : 1) Resource integration through planning HC needs by involving all APs. 2) Conduct cross-sectoral coordination in the context of evaluating unit productivity aimed at optimizing resources between units. 3) Integration of resources to meet HC needs with all AP & PLN. 4) Resource Recruitment and Optimization Strategies to support PLN SOLID.
6.	Risiko : Kegagalan pengembangan bisnis dan memperluas <i>market share</i> . Mitigasi : 1) Pemetaan definisi operasional dari budaya <i>business mindset</i> untuk masing-masing fungsi kerja 2) Menyusun <i>Do's & Don't</i> perilaku budaya <i>business mindset</i> . 3) Pengoptimalan media –media komunikasi internal dalam rangka mengembangkan wawasan bisnis ketenagalistrikan. 4) Membuat program-program budaya untuk mengkampanyekan pembiasaan <i>cost-benefit analysis & business impact</i> pada penyusunan program kerja 5) Menentukan leader untuk menjadi Role Model budaya <i>business mindset</i> . 6) Peningkatan maturitas implementasi budaya perusahaan dan <i>digital Mindset Awareness</i> . 7) Pengembangan <i>Work Life Balance Organization Culture</i> . 8) Peningkatan kesiapan dan efektivitas organisasi untuk mendukung penugasan PLN dan pengembangan bisnis	Risk : Failure of business development and expanding market share. Mitigation : 1) Mapping the operational definition of the business mindset culture for each work function 2) Compose Do's & Don't's cultural business mindset behavior. 3) Optimization of internal communication media - media to develop electricity business insight. 4) Creating cultural programs to campaign for cost-benefit analysis & business impact habituation in the preparation of work programs 5) Determine leaders to become Role Models of the business mindset culture. 6) Increasing the maturity of the implementation of corporate culture and digital Mindset Awareness. 7) Development of Work-Life Balance Organization Culture. 8) Increased organizational readiness and effectiveness to support PLN assignments and business development
7.	Risiko : Penurunan penjualan tenaga listrik. Mitigasi : 1) Repowering PLTU 1-4 Gresik 600 MW 2) Repowering PLTU 4.5 Muara Karang 400	Risk : Penurunan penjualan tenaga listrik. Mitigation : 1) CFPP Repowering 1-4 Gresik 600 MW 2) CFPP 4.5 Repowering Muara Karang 400
8.	Risiko : Ketidakmampuan menjadi <i>price setter</i> di bisnis ketenagalistrikan. Mitigasi : 1) Peningkatan implementasi standarisasi produk dan <i>review stream</i> manajemen aset dengan didasarkan 3 model pembangkit	Risiko : Price-setter inadequacy in the electricity business. Mitigation : 1) Improved product standardization implementation and asset management stream review In accordance with 3 generating models

No.	Risiko dan Mitigasi	Risk and Mitigation
	2) Pendetailan <i>Product Standard</i> 2.0 termasuk didalamnya jumlah FTK, kompetensi yang dibutuhkan dan proses bisnisnya. 3) Peningkatan fungsi dan kompetensi <i>market intelligence</i>	2) Detailed Product Standard 2.0 including the number of FTKs, required competencies, and business processes. 3) Increased market intelligence functions and competencies
9.	Risiko : Pengembalian investasi yang tidak sesuai proyeksi keuangan. Mitigasi : 1) Melakukan Evaluasi rutin atas pencapaian <i>progress</i> proyek di masing-masing APPA, kondisi keuangan dari masing-masing APPA serta rencana investasi/ pengembangan di APPA agar memberikan <i>return</i> yang optimal bagi PJB. 2) Melakukan Evaluasi atas posisi investasi PJB di APPA dengan <i>output harvest/invest/divest</i> . 3) Mengarahkan AP untuk lebih agresif mencari <i>market share</i> diluar PLN Group. 4) Mendorong APPA untuk turut serta melakukan efisiensi	Risk : Unexpected financial projections to Investment returns. Mitigation : 1) Conduct regular evaluation of the project progress in each APPA, the financial condition of each APPA, and investment/development plans in APPA to provide an optimal return for PJB. 2) Evaluate the investment position of PJB in APPA with harvest/invest/divest output. 3) Direct the AP to be more aggressive in seeking market share outside the PLN Group. 4) Encourage APPA to participate in carrying out efficiency
10.	Risiko : Potensi inefisiensi <i>Asset Management Contract</i> (AMC) dan produk bisnis jasa lainnya. Mitigasi : 1) Peningkatan maturitas implementasi manajemen aset pembangkit. 2) Peningkatan kedisiplinan penyusunan laporan penyelesaian pekerjaan yang tepat waktu. 3) Pembuatan <i>Business Management Systems</i> (BMS) PLN - PJB - AP sebagai petunjuk teknis pelaksanaan kontrak AMC. 4) Program <i>Shared Service</i> untuk penghematan biaya O&M Pembangkit. 5) Optimalisasi penggunaan SIT <i>Ellipse</i> untuk pengelolaan anggaran di seluruh unit UBJOM. 6) Penyusunan kajian skema bisnis Sewa Aset atau Pengalihan Aset PLTU FTP-1.	Risk : Potential inefficiencies in Asset Management Contracts (AMC) and other service business products. Mitigation : 1) Increasing the maturity of the implementation of generator asset management. 2) Increasing discipline in preparing work completion reports on time. 3) Making PLN - PJB - AP Business Management Systems (BMS) as a technical guide for implementing the AMC contract. 4) Shared Service Program for saving O&M costs for Generators. 5) Optimizing the use of Ellipse SIT for budget management in all UBJOM units. 6) Preparation of the study of the business scheme for Leasing Assets or Transfer of Assets of CFPP FTP-1.
11.	Risiko : Investasi strategis berpotensi terkendala. Mitigasi : 1) Melakukan implementasi pengembangan usaha sesuai dengan tahapan-tahapan dalam tata kelola agar memberikan nilai terbaik bagi PLN & PJB. 2) Penyusunan kamus kompetensi SDM untuk mendukung pengembangan usaha. 3) Peningkatan kompetensi SDM untuk mendukung eksekusi pengembangan usaha. 4) Menyusun kebijakan investasi.	Risk : Potential issues in Strategic investment. Mitigation : 1) Implement business development following the stages in governance to provide the best value for PLN & PJB. 2) Preparation of HC competency dictionary to support business development. 3) Increased HC competencies to support business development execution. 4) Develop investment policies.
12.	Risiko : Ketidaksiapan infrastruktur pembangkit dalam memenuhi regulasi yang makin ketat. Mitigasi : 1) <i>Assessment</i> dan pembuatan peta kesehatan instalasi WWTP. 2) Revitalisasi WWTP 3) Perencanaan pembangunan <i>landfill</i> dan pengurusan izin penimbunan untuk UBJOM Luar Jawa. 4) Perencanaan <i>alternative</i> pemanfaatan FABA untuk UBJOM Luar Jawa. 5) Koordinasi dengan bidang <i>engineering</i> dan bidang energi primer dalam hal pemenuhan baku mutu udara emisi unit pembangkit. 6) <i>Monitoring</i> dan evaluasi pola pembebanan dan operasional pembangkit listrik.	Risk : Immature generation infrastructure to the more intensive regulation. Mitigation : 1) Assessment and making of WWTP installation health map. 2) Revitalizing WWTP 3) Landfill development planning and landfill permit management for UBJOM Outside Java. 4) Planning for alternative use of FABA for UBJOM Outside Java. 5) Coordination with the engineering and primary energy fields in terms of meeting the emission air quality standards of the generating unit. 6) Monitoring and evaluation of power plant loading and operation patterns.

No.	Risiko dan Mitigasi	Risk and Mitigation
13.	Risiko : Kapabilitas <i>human capital</i> belum merata untuk mendukung strategi PJB dalam penguatan kompetensi bisnis dan O&M, pengembangan <i>expertise</i> dan membangun <i>mindset digital worker</i>. Mitigasi : 1) Penguatan kelembagaan PJB <i>Academy</i> 2) Penguatan pembelajaran bidang OME & Asset Management melalui Pembelajaran intensif OME dengan metode 70:20:20; program pembelajaran <i>refresh</i> secara berkala kepada seluruh operator CCR untuk masuk <i>simulator</i> pembangkit; program akselerasi kompetensi; mencetak <i>expert</i> (kerjasama dengan manufaktur, contoh : <i>Technical Advisor</i> MHPS). 3) Penguatan pembelajaran kompetensi business <i>excellence</i> dan <i>project management</i> melalui pelaksanaan <i>training</i> paket <i>business excellence</i> dan materi pendukung lainnya; serta pelaksanaan <i>training project management</i> (utamanya PJB sebagai pengawas proyek). 4) Pelaksanaan sertifikasi teknik maupun non teknik pada karyawan level nasional & internasional. 5) Penguatan pembelajaran etos kerja unggul melalui pembelajaran mental disiplin untuk <i>key person safety operation & maintenance</i>; Pembelajaran etos kerja unggul (nilai2 etika – contoh integritas & spiritual) untuk karyawan non teknik. 6) Implementasi <i>Knowledge Loss Risk Assessment</i> untuk menghasilkan dokumen <i>expert</i> dan pemberdayaan <i>expert</i> sebagai tenaga pengajar melalui Validasi penentuan <i>expert</i> sebelum <i>knowledge capturing</i>; dibentuk tim verifikasi dokumen <i>expert</i> sebelum dicetak dan diedarkan; Penyusunan standar penulisan dokumen <i>expert</i>. 7) Pelaksanaan <i>Knowledge Sharing</i> secara intensif dan terstruktur melalui Perencanaan & Pelaksanaan PGD secara <i>massive</i> dan terstruktur untuk berbagai bidang, khususnya OME (dengan mendatangkan <i>expert</i>); Pelaksanaan <i>Parenting & Sistering</i>	Risk : Human capital capability is not evenly distributed to support the PJB strategy in strengthening business and O&M competencies, developing expertise, and building a digital mindset of employees. Mitigation : 1) Institutional strengthening of PJB Academy 2) Strengthening the learning of the OME & Asset Management fields through OME intensive learning with the 70:20:20 method; the learning program is refreshed periodically to all CCR operators to enter the generator simulator; competency acceleration program; print expert (collaboration with manufacturing, for example, MHPS Technical Advisor). 3) Strengthening business excellence and project management competency learning through conducting business excellence package training and other supporting materials; and the implementation of project management training (mainly PJB as project supervisor). 4) Implementation of technical and non-technical certification at national & international level employees. 5) Strengthening superior work ethic learning through mental discipline learning for key person safety operation & maintenance; Learning a superior work ethic (ethical values - examples of integrity & spiritual) for non-technical employees. 6) Implementation of Knowledge Loss Risk Assessment to produce expert documents and expert empowerment as teaching staff through Validation of expert determination before knowledge capturing; an expert document verification team was formed before it was printed and circulated; Preparation of expert document writing standards. 7) Implementation of intensive and structured Knowledge Sharing through PGD Planning & Implementation on a massive and structured basis for various fields, especially OME (by bringing in experts); Implementation of Parenting & Sistering
14.	Risiko : Anak Perusahaan tidak kompetitif dalam harga dan kualitas untuk mendukung strategi bisnis korporat. Mitigasi : 1) Standarisasi dan Pengembangan Produk Jasa O&M. 2) <i>Parenting</i> dan <i>Sistering</i> jasa O&M. 3) Kontrak Pengadaan Jangka Panjang dengan Pabrikan.	Risk : Uncompetitive subsidiaries in terms of price and quality to support corporate business strategies. Mitigation : 1) O&M Service Product Standardization and Development. 2) Parenting and Sistering of O&M services. 3) Long-term Procurement Contracts with Manufacturers.
15.	Risiko : Kegagalan eksekusi program strategis Perusahaan. Mitigasi : 1) Optimalisasi program CMC untuk pengembangan <i>leader</i> di PT PJB. 2) Membuat KAK program pembinaan <i>leader</i> lebih detail sebagai referensi bagi <i>provider</i>. 3) <i>Human Resource Analytic</i> berbasis HRIS (<i>Human Resource Integrated System</i>).	Risk : Kegagalan eksekusi program strategis Perusahaan. Mitigation : 1) Optimizing the CMC program for leader development at PT PJB. 2) Make the KAK leader training program more detailed as a reference for providers. 3) Human Resource Analytic In accordance with HRIS (Human Resource Integrated System).
16.	Risiko : Peningkatan biaya pokok penyediaan. Mitigasi : 1) <i>Improvement</i> peralatan dan metode pembongkaran batubara.	Risiko : The increased cost of goods supplied. Mitigasi : 1) Improvement of coal equipment and dismantling methods.

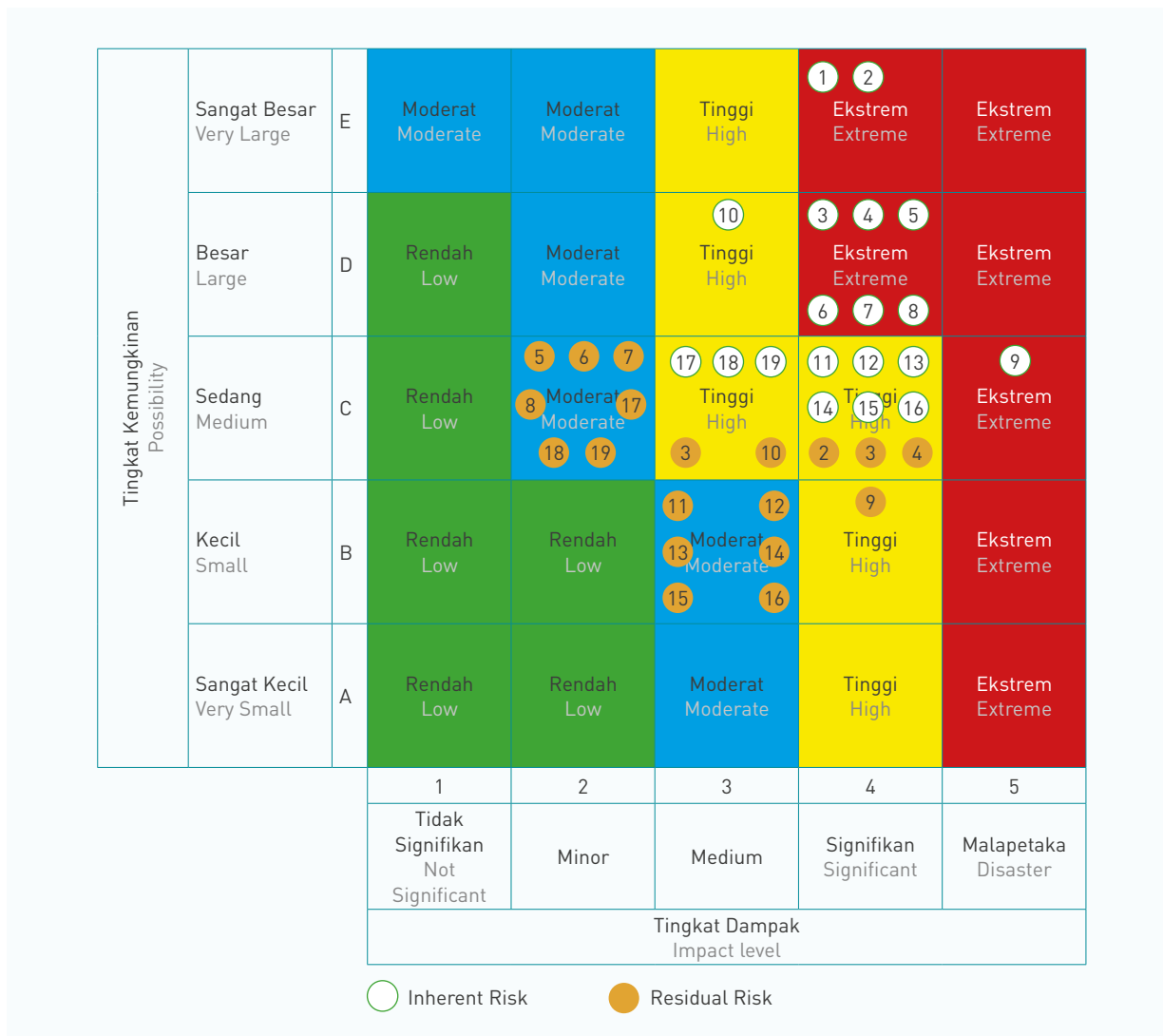
No.	Risiko dan Mitigasi	Risk and Mitigation
	2) Pemilihan moda transportasi yang aman dan biaya rendah. 3) Penggunaan Batu Bara dengan harga yang lebih murah (<i>low rank</i>) melalui <i>program coal switching</i> .	2) Selection of safe and low-cost transportation modes. 3) The use of coal at a lower price (low rank) through the coal switching program
17.	Risiko : Potensi terhambatnya proses bisnis dan GCG tidak terpenuhi secara optimal. Mitigasi : 1) Melakukan identifikasi regulasi korporat yang dibutuhkan dalam mencapai sasaran perusahaan (pemetaan regulasi) 2) Pengembangan sistem <i>on line monitoring</i> kepatuhan terhadap regulasi. 3) Melengkapi dan membuat regulasi korporat untuk mendukung sasaran perusahaan dan merespon regulasi eksternal. 4) Meningkatkan fungsi kelembagaan bidang kepatuhan. 5) Melakukan penguatan aktifitas <i>review</i> kesesuaian konsep regulasi korporat dengan regulasi eksternal dan kebutuhan perusahaan. 6) Meningkatkan kuantitas dan kualitas Legal Info terkait implikasi regulasi eksternal terhadap perusahaan. 7) Meningkatkan kerjasama kelembagaan dengan instansi terkait di bidang hukum.	Risk : Potential issues in business processes and nonoptimal GCG Implementation. Mitigation : 1) Identifying the corporate regulations needed in achieving company goals (regulatory mapping) 2) Development of an online system for monitoring compliance with regulations. 3) Completing and making corporate regulations to support company goals and respond to external regulations. 4) Improve the institutional function in the field of compliance. 5) Strengthening the review activities of the conformity of the concept of corporate regulations with external regulations and company needs. 6) Increase the quantity and quality of Legal Info related to the implications of external regulations on the company. 7) Increasing institutional cooperation with related institutions in the legal field.
18.	Risiko : Pemenuhan energi primer tidak aman. Mitigasi : 1) Memastikan keamanan <i>supply</i> batubara di pembangkit eksisting. 2) Memastikan kualitas bahan bakar. 3) Memastikan keamanan <i>supply</i> gas di Pembangkit <i>existing</i> dan <i>embedded</i> . 4) Pengaturan alokasi pembebanan P2B sesuai dengan mampu pasok gas. 5) Melakukan Kajian Implementasi <i>Coal Upgrading (Drying, Desulphurisation, De-ash)</i> . 6) Penyempurnaan <i>coal handling facility</i> , pembangunan fasilitas <i>jetty</i> (penggunaan <i>vessel</i> untuk pengangkutan batubara UP Paiton).	Risk : Risky Fulfillment of primary energy. Mitigation : 1) Ensuring the security of coal supply in existing plants. 2) Ensure the quality of the fuel. 3) Ensuring the safety of gas supply in existing and embedded plants. 4) Arrangement of P2B loading allocation following gas supply capacity. 5) Conduct a Study on the Implementation of Coal Upgrading (Drying, Desulphurisation, De-ash). 6) Improving coal handling facilities, construction of jetty facilities (using vessels to transport UP Paiton coal).
19.	Risiko : Pengembangan Bisnis EBT mengalami kendala. Mitigasi : 1) Penyusunan <i>Longlist partner</i> bisnis EBT untuk mendapatkan <i>partner strategic</i> untuk pasar IPP maupun pasar non IPP. 2) Berperan aktif dalam penyusunan SOP PLN tentang kerjasama dalam rangka pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. 3) Pengurusan IUJPTL berserta perijinan lainnya untuk pengembangan bisnis EBT non IPP. 4) Implementasi Program " <i>small scale manufacturing</i> modul surya" sebagai inisiasi deversifikasi portofolio bisnis baru (<i>go to market</i>) non IPP. 5) Melakukan kajian-kajian kelayakan (<i>feasibility study</i>) Pembangkit EBT (PV, <i>Wind</i>), dan proyek-proyek EBT di unit PJB, sebagai <i>repository</i> portofolio proyek untuk dieksekusi ketika regulasi telah memungkinkan 6) Mencari peluang bisnis di luar PLN Group (<i>Go To market</i>) beserta menyusun mekanisme eksekusinya.	Risk : Issues in Renewable Energy Business Development Mitigation : 1) Preparation of Renewable Energy business partner Longlist to get a strategic partner for the IPP market and non-IPP market. 2) Having an active role in the preparation of the PLN SOP on cooperation in the framework of electricity infrastructure development. 3) Arrangement of IUJPTL along with other licenses for non-IPP Renewable Energy business development. 4) Implementation of the "small-scale manufacturing solar module" program as an initiation of the non-IPP business portfolio diversification. 5) Conduct feasibility studies of Renewable Energy (PV, Wind), and Renewable Energy Projects in the PJB unit, as repositories of project portfolios to be executed when regulation is possible 6) Look for business opportunities outside the PLN Group (Go To market) and develop their execution mechanism.

Level dari masing-masing risiko utama korporat dapat dilihat pada peta risiko tahun 2019 sebagai berikut :

The level of each major corporate risk can be seen on the 2019 risk map as follows:

Gambar Pemetaan Risiko 2019

Picture of Risk Mapping 2019



Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat *inherent risk* dan *residual risk*. *Inherent risk* adalah risiko yang melekat karena karakteristik dan *residual risk* adalah risiko yang menjadi *target level* risiko yang ingin dicapai oleh PJB. Pada gambar diatas masih ada risiko yang *level residual risk*-nya berada di atas *risk appetite* (selera risiko) PJB dikarenakan pelaksanaan mitigasi risikonya yang bersifat *multi years*.

In accordance with the mapping above, it can be indicated that there are inherent risks and residual risks. Inherent risk is an inherent risk due to the characteristics and residual risk are risks that are the target level of risk that PJB targets. In the mapping above, there is still a risk that the residual risk level is above the risk appetite (risk appetite) of the PJB due to the implementation of risk mitigation that is multi-years.

Risk Survey

Risk survey dilakukan sebagai bentuk kegiatan loss prevention untuk mencegah kerugian perusahaan dalam pengelolaan risiko aset dan untuk memastikan bahwa perusahaan telah melakukan upaya *best practice* sesuai standar global (NFPA dan *Factory Mutual Standards/FM*) secara berkala yaitu setiap satu tahun sekali. Di tahun 2019, kegiatan *Risk Survey* tidak dilaksanakan dikarenakan rekomendasi tahun-tahun sebelumnya sedang dalam proses tindak lanjut, sehingga unit didorong untuk lebih fokus dalam menyelesaikan rekomendasi tersebut. PJB akan membuat konsep baru dalam pelaksanaan *Risk Survey* di tahun 2020.

Risk survey is carried out as a form of loss prevention activity to prevent the company's losses in managing asset risk and to ensure that the company has made best practice efforts according to global standards (NFPA and *Factory Mutual Standards / FM*) regularly, which is once every year. In 2019, the *Risk Survey* activity was not carried out because the recommendations of previous years were in the process of follow-up, so the unit was encouraged to focus more on completing those recommendations. PJB will create a new concept in the implementation of the *Risk Survey* in 2020.

Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Bidang Manajemen Risiko

Competency Training and Development Program in Risk Management

Program pengembangan terkait manajemen risiko tahun 2019 yang dilaksanakan baik berupa public training yang diselenggarakan oleh lembaga profesional maupun in house training yang bekerjasama dengan narasumber dan pelatih berpengalaman di dalam Manajemen Risiko. Program pengembangan kompetensi terkait manajemen risiko tahun adalah sebagai berikut:

The development program related to risk management in 2019 is carried out either in the form of public training organized by professional institutions or in-house training in collaboration with experienced speakers and trainers in Risk Management. The competency development programs related to year risk management are as follows:

No.	Pelatihan Training	Jumlah Peserta Number of Participant	Tanggal Date
1	<i>Certified Risk Management Assurance</i>	2	8-12 April 2019 April 8-12, 2019
2	<i>Workshop</i> Penyusunan Dokumen Untuk Sertifikasi ISO 22301:2012 BCMS Batch I Workshop on Making Documents for ISO 22301: 2012 BCMS Batch I Certification	13	9-11 Juli 2019 July 9-11, 2019
3	<i>Knowledge Sharing</i> Implementasi GCG BUMN Knowledge Sharing Implementation of BUMN GCG	26	12 Juli 2019 July 12, 2019
4	<i>Workshop</i> Penyusunan Dokumen Untuk Sertifikasi ISO 22301:2012 BCMS Batch II Workshop on Making Documents for ISO 22301: 2012 BCMS Batch II Certification	24	16-18 Juli 2019 July 16-18, 2019
5	<i>Workshop</i> Penyusunan Dokumen Untuk Sertifikasi ISO 22301:2012 BCMS Batch III Workshop on Making Documents for ISO 22301: 2012 BCMS Batch III Certification	14	24-26 Juli 2019 July 24-26, 2019
6	Pelatihan <i>Risk Based Budget Management</i> Risk-Based Budget Management Training	2	7-9 Agustus 2019 August 7-9, 2019
7	Pelatihan dan Sertifikasi <i>Business Continuity Management Certified Professional (BCMP)</i> Business Continuity Management Certified Professional (BCMP) Training and Certification	18	19-23 Agustus 2019 August 19-23, 2019
8	Pelatihan dan Sertifikasi <i>Business Continuity Management Certified Professional (BCMP) Batch 2</i> Batch 2 Business Continuity Management Certified Professional (BCMP) Training and Certification	22	26-30 Agustus 2019 August 26-30, 2019

No.	Pelatihan Training	Jumlah Peserta Number of Participant	Tanggal Date
9	Pelatihan Pembekalan Supervisor Senior Manajemen Risiko dan Kepatuhan Training on Supervision of Senior Risk Management and Compliance Training	18	16-20 September 2019 September 16-20, 2019
10	<i>Workshop Fraud Risk Assessment</i>	45	14-15 Oktober 2019 October 14-15, 2019
11	Forum Manajemen Risiko Anak Perusahaan PT PLN (Persero 2019) Risk Management Forum of Subsidiaries of PT PLN (Persero 2019)	5	21-22 November 2019 November 21-22, 2019
12	Pelatihan Perizinan Ketenagalistrikan Electricity Licensing Training	47	27-29 November 2019 November 27-29, 2019
13	<i>International Conference: Risk Beyond 2019</i>	3	5-6 Desember 2019 December 5-6, 2019
14	Pelatihan dan Sertifikasi CRMO <i>Batch 2</i> CRMO Batch 2 Certification and Training	19	9-12 Desember 2019 December 9-12, 2019
15	Pelatihan dan Sertifikasi <i>Business Continuity Management Certified Professional (BCMP)</i> Business Continuity Management Certified Professional (BCMP) Training and Certification	15	9-13 Desember 2019 December 9-13, 2019

Sosialisasi Manajemen Risiko Risk Management Socialization

Sosialisasi terkait manajemen risiko baik sosialisasi internal kantor pusat, sosialisasi untuk unit-unit maupun anak perusahaan bertujuan meningkatkan budaya manajemen risiko di PJB. Sepanjang tahun 2019 sosialisasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Information disclosure related to risk management both internal head office socialization, socialization for units, and subsidiaries aim to improve the culture of risk management in PJB. Throughout 2019 the socialization that has been carried out is as follows:

No.	Sosialisasi Socialization	Jumlah Peserta Number of participants	Tanggal Date
1	Sosialisasi Dokumen Manajemen Risiko 2019 Risk Management Document Socialization 2019	30	11 Februari 2019 February 11, 2019
2	Sosialisasi Kontrak Kinerja <i>Enterprise Risk Management</i> Tahun 2019 Promulgation of 2019 Enterprise Risk Management Performance Contract	30	25 Maret 2019 March 25, 2019

Assessment Maturity Level ERM ERM Maturity Level Assessment

Assessment Maturity Level ERM dilakukan di PJB baik Kantor Pusat maupun Unit Kerja. Pelaksanaan *Assessment Maturity Level ERM* di Kantor Pusat dilakukan setahun sekali dengan hasil *assessment maturity level ERM* menunjukkan tingkat kematangan sistem manajemen risiko PJB sebesar 3,36.

Assessment Maturity Level ERM pada unit yang dikelola PJB dilakukan satu semester sekali oleh asesor yang ditunjuk oleh bidang kinerja korporat. Pada akhir tahun 2019 telah dilakukan *self assessment maturity* oleh unit di lingkungan PT PJB dengan hasil sebagai berikut :

ERM Maturity Level Assessment is conducted at the PJB both the Head Office and Work Units. The ERM Maturity Level Assessment at the Head Office is conducted once a year with the results of the ERM maturity level assessment showing the maturity level of the PJB risk management system at 3.36.

ERM Maturity Level Assessment in the units managed by PJB is conducted once a semester by assessors appointed by the field of corporate performance. At the end of 2019 a self-assessment of maturity was carried out by the unit within PT PJB with the following results:

No.	Unit Pembangkitan Generation Unit	Pencapaian ERM 2019 Achievement of ERM 2019
1	UP Paiton Paiton GU	4.04
2	UP Brantas Brantas GU	3.76
3	UP Gresik Gresik GU	3.90
4	UPHT MSUEA	3.91
5	UP Muara Karang Muara Karang GU	3.88
6	UP Muara Tawar Muara Tawar GU	4.11
7	UPHB MSUWA	3.92
8	UP Cirata Cirata GU	4.00
9	UBJO&M Indramayu Indramayu O&M Services Business Unit	4.00
10	UBJO&M Rembang Gresik O&M Services Business Unit	4.00
11	UBJO&M Tanjung Awar-Awar Tanjung Awar-Awar O&M Services Business Unit	3.90
12	UBJO&M Paiton Paiton O&M Services Business Unit	3.51
13	UBJO&M Pacitan Pacitan O&M Services Business Unit	3.52
14	BPWC Cirata Reservoir Management Unit	3.00
15	UBJO&M Luar Jawa Outer Java O&M Services Business Unit	2.81
16	UBJO&M Arun Arun O&M Services Business Unit	2.87
17	UBJO&M Pulang Pisau Pulau Pisang O&M Services Business Unit	3.09
18	UBANG Development Unit	3.77
19	UBJO&M Kaltim Teluk Kaltim Teluk O&M Services Business Unit	3.32
20	UBJO&M Tenayan Tenayan O&M Services Business Unit	3.20
21	PJB Academy	2.76

Hasil *assessment maturity level* ERM menunjukkan bahwa tingkat kematangan sistem manajemen risiko PJB bahwa:

1. Budaya sadar risiko cukup melekat pada pemilik risiko, hal ini ditandai dengan upaya dilakukannya kajian risiko dan *self assessment* risiko.
2. Manajemen risiko telah menjadi dasar dalam pengambilan keputusan.
3. Manajemen risiko telah menjadi bagian dari seluruh proses bisnis perusahaan.
4. Infrastruktur manajemen risiko telah disiapkan baik berupa sumber daya manusia yang tersertifikasi, *tools* berupa aplikasi manajemen risiko, dan kebijakan serta pedoman penerapan manajemen risiko perusahaan.

ERM maturity-level assessment results show that the maturity level of the PJB risk management system that:

1. Risk awareness culture is inherent enough to the risk owner, this is indicated by efforts to carry out a risk assessment and risk self-assessment.
2. Risk management has become the basis for decision making.
3. Risk management has become part of the entire business process of the company.
4. Risk management infrastructure has been prepared in the form of certified human resources, tools in the form of risk management applications, and policies and guidelines for implementing enterprise risk management.

STANDAR ETIKA PERUSAHAAN

CODE OF CONDUCT

Komponen penting dalam menjalankan Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah adanya Standar Etika Perusahaan atau *Code of Conduct* (COC). COC mengidentifikasi standar perilaku yang harus ditaati (perintah) dan dihindari (larangan). Penyusunan *Code of Conduct* bertujuan untuk memberikan panduan dalam berperilaku bagi Insan Perusahaan dan menjadi standar untuk menilai apakah seorang Insan Perusahaan telah mematuhi atau melakukan penyimpangan. Penerapan COC dalam jangka panjang secara konsisten diharapkan akan mendorong perbaikan kinerja Perusahaan dan meningkatkan citra Perusahaan.

Standar Etika Perusahaan PJB telah ditinjau dan dimutakhirkan pada tahun 2019 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa-Bali Nomor 002.K/021/DIR/2019 dan 005.K/DK/PJB/2019 tentang Standar Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) PT Pembangkitan Jawa-Bali. Perusahaan juga menyusun ringkasan Code of Conduct dalam bentuk buku saku yang dapat mempermudah pemahaman penerapannya dalam kegiatan sehari-hari.

One of the fundamentals to implement Good Corporate Governance is the Company's Code of Conduct (COC). The COC identifies the standard of behavior that must be obeyed and prohibited. The drafting of the Code of Conduct aims to maintain individual behavior and become a standard for assessing whether a Company's Individual has complied with or made an irregularity. Long-term implementation of COC is expected to drive improvements in the Company's performance and enhance the Company's image.

PJB's Code of Conduct has been reviewed and updated in 2019 as determined based on the Joint Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa-Bali No. 002.K/021/DIR/2019 and 005.K/DK/PJB/ 2019 concerning PT Pembangkitan Jawa-Bali Code of Conduct. The company also compiles a summary of the Code of Conduct in the form of a pocketbook to support the application in day-to-day activities.

Budaya Perusahaan

Corporate Culture

Budaya Perusahaan PJB merupakan nilai-nilai yang menjadi dasar dalam penerapan perilaku utama *Code of Conduct*. Budaya Perusahaan PJB terdiri atas 3 elemen yakni Spirit, Tata Nilai Inti, dan Perilaku Utama dengan uraian sebagai berikut:

PJB's corporate culture is the values as fundamentals for implementing the key behaviors of the Code of Conduct. PJB Corporate Culture consists of 3 elements: Spirit, Core Values, and Key Behavior with the following description:

SPIRIT SPIRIT	TATA NILAI INTI CORE VALUES	PERILAKU UTAMA KEY BEHAVIORS
Berkarya, Mengabdikan, Beribadah Work, Dedicate, Pray	Integrity Menjunjung tinggi etika, jujur, dan amanah memegang teguh kaidah tata kelola perusahaan yang baik (<i>Good Corporate Governance</i>) Integrity Upholding ethics, honest, and trusted in maintaining Good Corporate Governance	• Etis bertindak sesuai dengan standard, aturan, dan etika. • Jujur Keselarasan antara perkataan dengan perbuatan dalam menyampaikan kebenaran. • Amanah Menjaga kepercayaan dengan selalu bersikap transparan, adil, akuntabel, dan loyal. • Ethics Acting based on standards, regulation, and ethics. • Honest Harmony between words and actions in conveying the truth • Trusted Maintaining trust by always being transparent, fair, accountable, and loyal.

SPIRIT SPIRIT	TATA NILAI INTI CORE VALUES	PERILAKU UTAMA KEY BEHAVIORS
	Professional Bertanggungjawab terhadap tugas dan wewenang dengan mengutamakan keselamatan dan keharmonisan lingkungan, serta senantiasa percaya diri dengan terus mengembangkan kompetensi. Professional Responsible for duties and authorities by prioritizing safety and environmental harmony, and always being confident by keeping developing competencies.	• Bertanggungjawab Melaksanakan kewajiban berdasarkan jabatan atau peran dalam organisasi. • Mengutamakan Keselamatan dan Lingkungan Berorientasi terhadap keselamatan dan keharmonisan lingkungan. • Kompeten Percaya pada kemampuan diri, berpikir secara holistik, serta senantiasa mengembangkan kompetensi bidang pekerjaan dan tanggungjawab. • Responsible Carrying out obligations based on positions or roles in the organization • Safety & Environment Oriented Safety and environmental harmony-oriented in carrying out duties and roles. • Competent Believing in self-competent, thinking holistically, and constantly improving competencies in the scope of works and responsibilities.
	Join Collaboration Melakukan kerjasama melalui integrasi, membangun jejaring, dan sinergi dengan berbagai pihak untuk bersama-sama meningkatkan skala bisnis PJB Group dan PLN Group Join Collaboration Collaborating through integration, building networks, and synergy with multiple parties to expand the business scale of PJB Group and PLN Group.	• Integrasi Saling menyelaraskan sistem, menyederhanakan proses, dan aktivitas PJB Group dan PLN Group. • Membangun Jejaring Memperluas relasi internal & eksternal untuk membangun kemitraan demi pencapaian tujuan PJB Group secara berkesinambungan. • Sinergi Menciptakan nilai tambah bagi PJB Group dan PLN Group dengan mengelola interaksi internal maupun eksternal. • Integration Aligning systems, simplifying processes, and activities within the scope of PJB Group and PLN Group • Networking Extending internal and external relations to develop a partnership for the achievement of PJB Group goals continuously. • Synergy Creating added-values for PJB Group and PLN Group by managing both internal and external interactions.
	Business Excellence Menerapkan praktik bisnis terbaik dalam mengelola dan mencapai tujuan PJB Group secara berkesinambungan dengan senantiasa berorientasi pada pelanggan, berpikir bisnis & mengambil risiko terukur, inovatif, gesit, simpel, dan adaptif.	• Berorientasi Pelanggan Fokus mewujudkan kepuasan, hubungan jangka panjang, serta loyalitas para <i>stakeholders</i> internal maupun eksternal PJB Group. • Berpikir Bisnis & Mengambil Risiko Terukur Jeli menangkap peluang serta mengambil risiko yang terukur dalam melaksanakan proses bisnis. • Inovatif Kreatif menciptakan nilai tambah dan perbaikan berkelanjutan. • Gesit, Simpel, dan Adaptif Bergerak gesit melalui proses bisnis serta mampu beradaptasi dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis dan teknologi.



SPIRIT SPIRIT	TATA NILAI INTI CORE VALUES	PERILAKU UTAMA KEY BEHAVIORS
	Business Excellence Implementing the best business practices in managing and achieving PJB Group goals continuously by constantly being customer-oriented, having a business mindset, and taking calculated risks, innovative, agile, simple, and adaptive.	• Customer Driven Focusing on the efforts to provide satisfaction, long-term relations, and loyalty of the internal and external PJB Group's stakeholders. • Business Mindset & Calculated Risk Taking Sharp in seizing opportunities and taking calculated risks in conducting business processes. • Innovative Creative to create added-value and continuous improvement. • Agile, Simple, and Adaptive Agile through business process simplification and able to adapt to face the changes in business and technology environment.



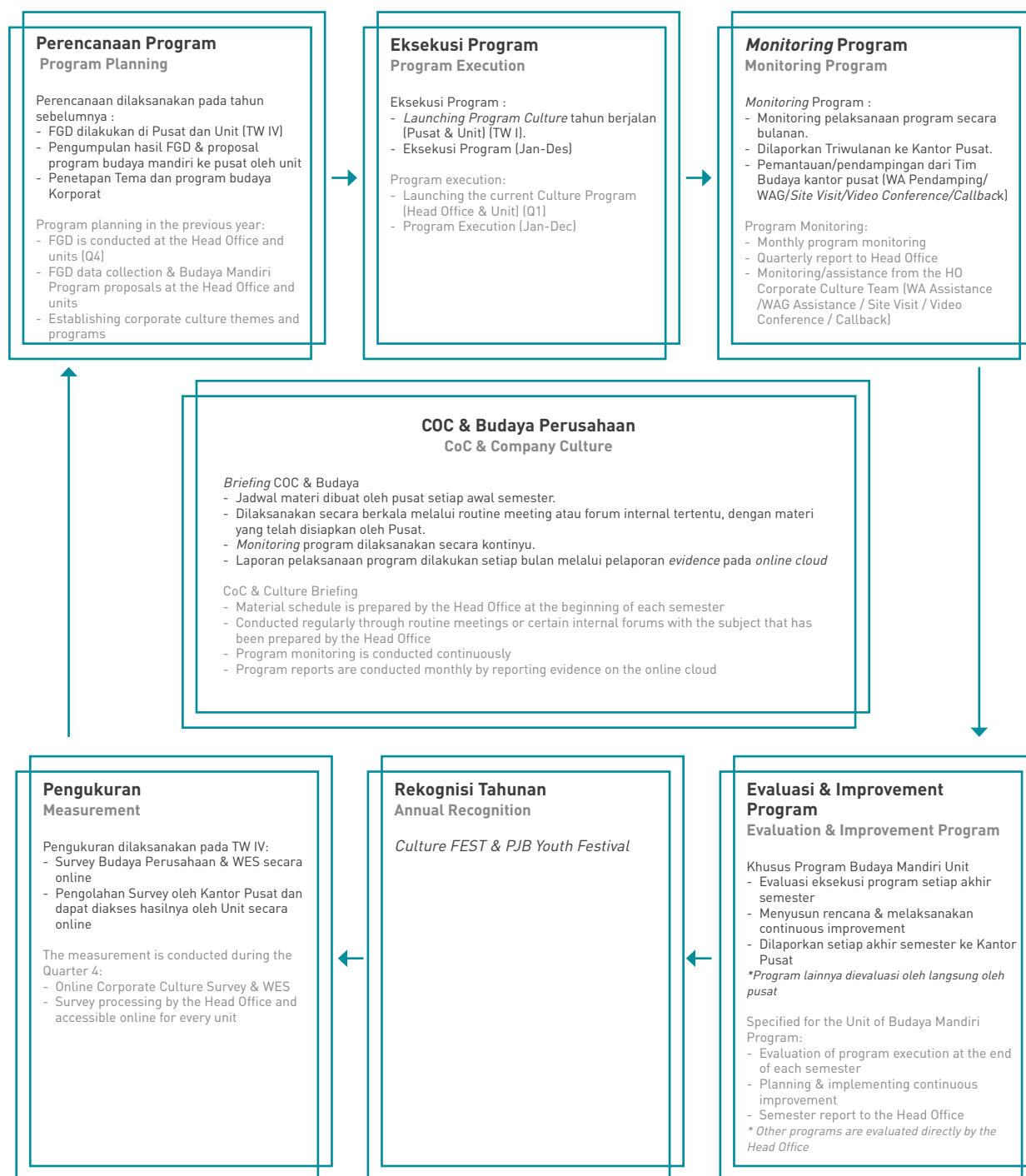
UP Paiton
Paiton GU



Internalisasi Budaya Perusahaan (PJB WAY) Internalization of Corporate Culture (PJB WAY)

Sebagai panduan budaya perusahaan, PJB WAY merupakan spirit, nilai, dan perilaku yang melekat di seluruh Insan PJB dalam melaksanakan Misi untuk mencapai Visi. Program-program internalisasi budaya perusahaan PJB dijalankan sesuai dengan rangkaian siklus pengelolaan PJB WAY yang dilaksanakan secara berkala setiap tahun seperti berikut :

As guideline of the corporate culture, PJB WAY is a spirit, values, and behaviors upheld by all PJB Individuals in undertaking the Mission to achieve the Vision. The internalization programs of PJB's corporate culture are conducted following a series of PJB WAY management cycles annually as follows:



1. Perencanaan Program

Perencanaan program merupakan tahap penyusunan program-program sosialisasi dan internalisasi PJB WAY berdasarkan hasil survey budaya perusahaan dan *Workshop Engagement Survey* (WES) yang dilakukan pada Triwulan IV. Tahap perencanaan program terdiri atas kegiatan:

- Penyusunan dan pendistribusian panduan penggalan kualitatif melalui *Focus Group Discussion* (FGD) oleh fungsi Budaya Organisasi – Divisi Sistem *Human Capital* & Organisasi (DIVSHC) untuk masing-masing Unit dan Kantor Pusat berdasarkan hasil *survey*.
- Pelaksanaan penggalan kualitatif melalui FGD oleh masing-masing Unit dan Kantor Pusat.
- Pengumpulan hasil FGD & proposal program budaya mandiri unit kepada fungsi Budaya Organisasi-DIVSHC.
- Penetapan tema dan program budaya perusahaan untuk dijalankan secara korporat pada Januari-Desember tahun mendatang.

2. Eksekusi Program

Eksekusi program merupakan tahap yang terdiri atas kegiatan :

- Launching* program-program sosialisasi dan internalisasi budaya perusahaan (*Launching* dilaksanakan pada awal tahun).
- Pelaksanaan program-program sosialisasi dan internalisasi budaya perusahaan sepanjang tahun berjalan.

3. Monitoring Program

Monitoring program merupakan tahap pemantauan selama eksekusi program berlangsung. Tahap ini terdiri atas kegiatan:

- Fungsi Budaya Organisasi-DIVSHC selaku pembina, akan melakukan monitoring secara bulanan baik secara formal maupun informal.
- Unit akan menyampaikan laporan triwulanan *monitoring* dan kontrol progres pelaksanaan program menggunakan form yang telah disiapkan fungsi Budaya Organisasi-DIVSHC.
- Pemantauan atau pendampingan dari fungsi Budaya Organisasi-DIVSHC secara adanya pembagian PIC Pendamping dari tim budaya untuk masing-masing unit, *Whatsapp Group*, *Site Visit*, *Video Conference*, dan *Callback*.

4. Evaluasi & Improvement Program

Evaluasi & *Improvement* Program merupakan tahap evaluasi dari eksekusi program yang telah dijalankan, yang terdiri atas kegiatan :

- Penyusunan instrumen evaluasi efektivitas program oleh fungsi Budaya Organisasi-DIVSHC.
- Pelaksanaan evaluasi efektivitas program melalui *survey* baik di unit maupun kantor pusat.

1. Program Planning

Program planning is the stage of the preparation of the socialization programs and internalization of PJB WAY based on the results of a corporate culture survey and Workshop Engagement Survey (WES) conducted in Quarter IV. The program planning phase consists of activities:

- Arrangement and distribution of qualitative observation guidance through Focus Group Discussion (FGD) by Organization Culture function- Human Capital & Organization System Division (DIVSHC) for each Unit and Head Office based on survey results.
- Implementation of qualitative observation through FGD by each Unit and Head Office in November
- Collection of the FGD results to Organization Culture Function – DIVSHC
- The stipulation of corporate culture themes and programs in December to be applied at a corporate level in JanuariDecember of the next year.

2. Program Execution

Program Execution refers to a stage consisting of the following activities:

- The launch of PJB WAY socialization and internalization programs (*Launching* is held at the beginning of each year.
- The implementation of PJB WAY socialization and internalization programs throughout the year.

3. Program Monitoring

Program monitoring is a monitoring stage during the process of program execution. This stage consists of the following activities:

- Organization Culture Function – DIVSHC as a coach, will monitor monthly, both formally and informally
- Units will submit a quarterly monitoring and progress control reports of program implementation using the forms prepared by Organization Culture Function – DIVSHC.
- Monitoring or accompaniment of the Organizational Culture function of the DIVSHC in the presence of PIC Assistance sharing from the cultural team for each unit, *Whatsapp Group*, *Site Visit*, *Video Conference*, and *Callback*.

4. Program Evaluation & Improvement

Program Evaluation & Improvement is an evaluation phase of program execution that has been carried out, which consists of activities:

- Formulation of program effectiveness evaluation instrument by Organization Culture function-DIVSHC
- Implementation of the program effectiveness evaluation through survey both at units and Head Office

- c. Pengolahan hasil evaluasi efektivitas hingga penyusunan laporan evaluasi efektivitas yang terdiri atas analisa efektivitas program dan rencana *continuous improvement* program untuk dijalankan pada semester selanjutnya.
- d. Penyampaian laporan evaluasi efektivitas oleh seluruh unit dan kantor pusat kepada fungsi Budaya Organisasi-DIVSHC setiap akhir semester.

5. Rekognisi Tahunan

Penghargaan sebagai bentuk rekognisi dan apresiasi implementasi budaya perusahaan yang dikemas melalui acara tahunan dengan kategori penghargaan (dapat berubah menyesuaikan kebijakan yang berlaku saat tahun berjalan) :

- a. Insan PJB Terbaik.
- b. Unit dengan eksekusi program budaya terbaik.
- c. Change Agent terbaik.
- d. Rekognisi untuk *Millennials*.

6. Pengukuran

Pengukuran merupakan tahap pelaksanaan Survey Budaya Perusahaan & *Workforce Engagement Survey* (WES) untuk menilai indeks implementasi budaya perusahaan oleh insan PJB serta indeks *Employee Engagement & Satisfaction* insan PJB, yang dilakukan secara online pada TW IV. Output dari pengukuran ini menjadi input untuk tahap Perencanaan Program dan seterusnya sehingga berupa siklus.

- c. Processing the results of the effectiveness evaluation to compile an effectiveness evaluation report consisting of an analysis of program effectiveness and recommendations for continuous improvement for the program.
- d. Submission of the effectiveness evaluation report by all units and Head Offices to the Organization Culture Function-DIVSHC at the end of every semester.

5. Annual Recognition

Awards as a form of recognition and appreciation of the implementation of corporate culture are packaged through annual events in the category of awards (may change following the applicable policy):

- a. Best PJB Personnel
- b. Unit with best culture program execution
- c. Best Change Agent
- d. Millennial Recognition

6. Measurement

The measurement is the stage of the implementation of the Corporate Culture Survey & Workforce Engagement Survey (WES) to assess the implementation of the index of corporate culture by PJB employees as well as the Employee Engagement & Satisfaction index of PJB people, conducted online in TW IV. The output from this measurement becomes the input for the Program Planning stage and so on so that it takes the form of a cycle.

Pokok Muatan Standar Etika Perusahaan

Core Contents of the Code of Conduct

Pokok muatan Standar Etika Perusahaan menjabarkan secara spesifik terkait penerapan Budaya Perusahaan dalam kegiatan bisnis yang dijalankan. Secara fundamental, *Code of Conduct* PJB mengatur mengenai standar etika perilaku dan bisnis dalam membangun hubungan dengan para pemangku kepentingan, yaitu karyawan, pelanggan, rekanan, kompetitor, mitra kerja, pemerintah, dan masyarakat. Agar mudah diingat cakupan muatan *Code of Conduct* secara sederhana dikenal dengan akronim "PEMBANGKIT". Penjelasan mengenai cakupan muatan yang diatur dalam *Code of Conduct* adalah sebagai berikut:

The contents of the Code of Conduct specifically describe the application of Corporate Culture in the conduct of business activities. Fundamentally, PJB's Code of Conduct regulates ethical standards of behavior and business in building relationships with stakeholders, namely employees, customers, partners, competitors, business partners, government, and society. To make it easy to remember the contents of the Code of Conduct content is simply known as the "GENERATOR" acronym. An explanation of the scope of the contents stipulated in the Code of Conduct is as follows:

Cakupan Muatan Aspects	Penjelasan Description
Kegiatan Politik dan Sosial Perusahaan Company's Political and Social Activities	Perusahaan mempertahankan sikap netral terhadap partai politik sesuai dengan tata nilai integrity dan perilaku utama etis . Oleh karena itu, Perusahaan tidak memberikan bantuan dana ke partai politik, politis, ataupun calon pejabat manapun. Namun hal ini tidak berarti PJB melarang hak karyawannya sebagai warga negara untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik.
	The Company maintains the political neutrality with the integrity value and ethic key behavior. Therefore, the Company does not give any financial support to any political party, politician, or prospective official candidate. However, it does not mean that PJB prohibits the personnel's right as citizens to participate in political activities.

Cakupan Muatan Aspects	Penjelasan Description
	Perusahaan juga berkomitmen untuk mengutamakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat terutama di sekitar pusat kegiatan operasi. Pengembangan dan pemberdayaan tersebut diutamakan dalam bidang ekonomi sosial budaya dan keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Insan Perusahaan yang berwenang dilarang untuk melakukan diskriminasi dan bersifat subjektif dalam menjalankan program CSR seperti mendahulukan program CSR di wilayah tempat asal Insan Perusahaan tersebut. Hal ini didasari oleh sesuai dengan tata nilai integrity dan perilaku utama amanah The company also commits to prioritizing community development and empowerment especially in the surrounding of the operational center. Those development and empowerment are prioritized in the economy, social, culture, religion, education, health, and environment. The authorized Company Personnel are not allowed to perform discrimination and must be subjective in conducting CSR programs such as implementing the CSR programs in the origin of the Company Personnel, in advance. It is based on the integrity value and responsibility of key behavior.
Etika Bekerja Insan Perusahaan Work Ethic of the Company's Personnel	Setiap Insan Perusahaan berkomitmen untuk tumbuh dan berkembang bersama dengan Perusahaan. Oleh karena itu, dirancang aturan-aturan untuk menjaga komitmen Insan Perusahaan terhadap pengembangan diri Insan Perusahaan serta Perusahaan secara keseluruhan. Komitmen yang dimaksud yaitu : 1. Komitmen pengembangan diri 2. Komitmen kemajuan & perkembangan perusahaan 3. Komitmen anti diskriminasi Company Personnel is committed to grow and improve together with the Company. Therefore, regulations are designed to protect the Company Personnel's commitment towards their and the overall Company's self-development. The referred commitments are: 1. Commitment to self-development 2. Commitment to company's advancement and development 3. Commitment to anti-discrimination
Perlindungan Informasi, Hak Kekayaan Intelektual dan Penggunaan Media Sosial Protection of Information, Intellectual Property Right, and the Use of Social Media	Sesuai dengan tata nilai integrity dengan perilaku utama jujur dan amanah, setiap Insan Perusahaan berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan sesuai klasifikasinya. Pengungkapan informasi kepada Publik dan Stakeholder lainnya harus dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi informasi, kepentingan Perusahaan, dan kebutuhan pihak yang berkepentingan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Aligned with integrity value with honest and trusted as main behaviors, every Company's Personnel must protect the confidentiality of the Company's information corresponding to its classifications. The information disclosed to the Public and other Stakeholders must be conducted by paying attention to the information classification, Company's interest, and the stakeholders' needs under the applicable regulation.
	Perusahaan tidak mentolerir adanya praktik penjualan informasi dari orang dalam (<i>insider trading</i>) dan Perusahaan akan melakukan tindakan hukum terhadap pelaku <i>insider trading</i> sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, seluruh insan Perusahaan dilarang melakukan praktik penjualan informasi dari orang dalam The Company will not tolerate insider trading and the Company will take legal action against the suspect of insider trading based on the applicable rules. Therefore, all Company's Personnel is prohibited to perform insider trading.
	Perusahaan menghargai Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak lain, oleh karena itu Insan Perusahaan dilarang untuk menggunakan HAKI milik pihak lain tanpa izin dan prosedur yang sudah diatur karena dapat mengakibatkan Perusahaan menanggung gugatan hukum. The Company is aware of other's Intellectual Property Rights (IPR). Therefore, the Company's Personnel is prohibited to use others' IPR without any regulated permission and procedure because it might cause the Company to receive a lawsuit.
	Di sisi lain, Perusahaan dan seluruh Insan Perusahaan juga wajib melindungi HAKI milik Perusahaan karena HAKI adalah <i>intangible asset</i> yang sangat bernilai untuk Perusahaan. On the other hand, the Company and its personnel also need to protect the Company's IPR because it is a valuable intangible asset for the Company.

Cakupan Muatan Aspects	Penjelasan Description	
	Media sosial yang mengatasnamakan Perusahaan hanya boleh dikelola oleh pihak yang diberi hak oleh Perusahaan. Unit dan bagian lain dilarang membuat media sosial sendiri yang mengatasnamakan Perusahaan. Insan Perusahaan dilarang mengunggah pernyataan di media sosial yang mengatasnamakan Perusahaan, kecuali pihak yang telah diberi kewenangan oleh Perusahaan. Perusahaan menghormati kebebasan Insan Perusahaan untuk menyampaikan pikirannya dalam bentuk lisan maupun tulisan di dalam media sosial pribadi Insan Perusahaan, selama konten yang diunggah bukan hal yang merugikan perusahaan.	Social Media on behalf of the Company may only be managed by rights granted by the Company. Units and other sectors are prohibited to create their social media on behalf of the Company. The Company's Personnel is not allowed to post a statement in social media on behalf of the Company, except for the rights granted by the Company. The Company appreciates the Company's personnel to express their thought either spoken or written in their social media if the uploaded contents do not harm the Company
Benturan Kepentingan Conflict of Interest	Aturan mengenai benturan kepentingan dibuat sesuai dengan tata nilai integrity dan perilaku utama etis, jujur dan amanah. Benturan kepentingan terjadi apabila Insan Perusahaan: 1. Terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan perusahaan pesaing atau dengan Mitra Usaha Perusahaan. 2. Bekerja di perusahaan pesaing atau dengan Mitra Usaha Perusahaan. 3. Mempunyai hubungan keluarga langsung dengan pemilik atau pengambil keputusan Mitra Usaha Perusahaan. Apabila terjadi benturan kepentingan tersebut maka Insan Perusahaan harus mengundurkan diri dari proses pengambilan keputusan sesuai ketentuan berlaku.	The policy on conflict of interest is established according to integrity value and ethic, honest, and trusted as key behaviors. Conflict of interest occurs when the Company personnel: 1. Involve directly or indirectly in the competitor's company or Company's Business Partner 2. Work in the competitor's company or Company's Business Partner 3. Own a direct relationship with the owner or decision-maker of the Company's Business Partner. If those conflicts of interest happen, then the Company's personnel should resign from the decision-making process as stated in the applicable terms.
Perlindungan Aset Perusahaan Protection of the Company's Assets	Harta/Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan digunakan untuk pencapaian tujuan Perusahaan. Sesuai dengan tata nilai integrity dan perilaku utama etis, disusunlah pedoman perilaku yang bertujuan untuk memelihara keutuhan dan keselamatan Aset Perusahaan.	Wealth/Asset is a resource owned by the Company and used to achieve its goals. According to integrity value, and ethic key behavior, Code of Conduct is created to sustain integrity and security of the Company's Assets
Networking dengan <i>Stakeholder</i> Networking with the Stakeholders	Setiap Insan Perusahaan wajib untuk menjaga hubungan baik dengan seluruh <i>Stakeholder</i> Perusahaan sesuai dengan nilai-nilai Perusahaan. Pedoman dalam hubungan ini diatur dalam bentuk kewajiban dan larangan yang harus dipenuhi oleh seluruh Insan Perusahaan.	All Company's personnel are tasked to maintain good relationships with all Stakeholders following the Company's values. Guidelines of this relation are regulated in the form of obligations and prohibitions that should be fulfilled by all Company's personnel.
Gratifikasi Gratification	Setiap Insan Perusahaan senantiasa menaati aturan terkait Gratifikasi sebagai pencerminan dari salah satu tata nilai Perusahaan, yaitu integrity dengan perilaku utama etis, jujur dan amanah yang bertujuan untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat dan bersih di Perusahaan. Setiap Insan Perusahaan wajib mengetahui perkembangan aturan terkini mengenai Gratifikasi dan mematuhi aturan yang berlaku tersebut. Aturan-aturan tersebut harus disosialisasikan ke seluruh Insan Perusahaan untuk menghindari terdinya Gratifikasi di lingkungan Perusahaan.	Every Company's personnel follow the rules concerning Gratification as a reflection of a Company's value, that is integrity with ethical, honest, and trusted key behavior, to create a clean and healthy competition in the Company. Every Company's personnel are required to know the current regulation development about Gratification and comply with the applicable rules. Those rules should be disseminated to all Company's personnel to avoid Gratification in the Company's environment



Cakupan Muatan Aspects	Penjelasan Description
Kepedulian terhadap K3, serta Pelestarian Lingkungan Concern for Occupational Health and Safety, and Environmental Conservation	Komitmen Perusahaan terhadap pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta pelestarian lingkungan tercermin dari nilai professional dengan perilaku utama mengutamakan keselamatan dan lingkungan yang ada di dalam tata nilai Perusahaan. Aktivitas di Perusahaan berorientasi terhadap keselamatan dan keharmonisan lingkungan. Perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan kepedulian dan menanamkan nilai-nilai Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta pelestarian lingkungan hidup terhadap seluruh Insan Perusahaan. The Company's commitment to the Health, Safety, and Environment (HSE) is reflected from the professional value with a key behavior of "prioritize safety and environment" stated in the Company's values. Activities in the Company are oriented towards environmental safety and harmony. The Company is committed to improve its concern and internalize OHS and environmental conservation values to all Company personnel.
Integritas Proses dan Data Pelaporan Keuangan Integrity in the Process and Data of Financial Reporting	Seluruh transaksi bisnis Perusahaan harus digambarkan dalam bentuk laporan keuangan. Hal ini tercermin dari nilai integrity dengan perilaku utama jujur dan nilai professional dengan perilaku utama bertanggung jawab. Perusahaan wajib membuat laporan keuangan secara tepat dan akurat untuk mendukung integritas dan reputasi Perusahaan. Semua proses pencatatan dibuat dengan memastikan bahwa seluruh berkas lengkap, akurat, tepat waktu dan dapat dilacak bukti transaksinya. All Company's business transaction should be described in the form of financial statements. It is reflected from integrity value with key behavior honest and professional value with key behavior of responsible. The Company is required to make financial statements properly and accurately to support the integrity and reputation of the Company. All listing processes are made by ensuring that all files are completed, accurate, on-time, and the proofs of transactions can be tracked.

Pemberlakuan Standar Etika Bagi Seluruh Level Organisasi Code of Conduct Enforcement for All Organizational Levels

Standar Etika Perusahaan PJB berlaku bagi seluruh karyawan yang mempunyai hubungan kerja langsung baik karyawan tetap maupun kontrak, termasuk Direksi dan Dewan Komisaris. Sebagai bentuk pemberlakuan dan komitmen kepatuhan seluruh Insan PJB terhadap *Code of Conduct* dilakukan penandatanganan Surat Pernyataan Kepatuhan terhadap *Code of Conduct* setiap tahun oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan seluruh karyawan.

PJB's Code of Conduct applies to all employees, both permanent and contract employees, including the Board of Directors and the Board of Commissioners. As a form of compliance and commitment of all PJB Individuals to the Code of Conduct; the Board of Directors, Board of Commissioners, and all employees annually sign a Statement of Compliance with the Code of Conduct.

Sosialisasi Standar Etika Perusahaan Code of Conduct Socialization

Sebagai upaya memberikan pemahaman dan mendorong sikap peduli seluruh insan PJB untuk menaati dan menerapkan *Code of Conduct* di setiap kegiatan usaha Perusahaan maka perlu dilakukan sosialisasi. *Code of Conduct* PJB dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada seluruh karyawan, dari *level operasional* sampai *top management*. Sosialisasi *Code of Conduct* dilakukan melalui saluran media di seluruh Unit Kerja Perusahaan, meliputi BOD Talk, sosialisasi tatap muka, email, *website*, intranet, visual manajemen, dan forum internal. Bagi karyawan baru, sosialisasi dilakukan oleh tim GCG pada saat pembekalan *Code of Conduct* PJB, Budaya Perusahaan dan nilai-nilai GCG. Selain itu, CoC juga dijadikan salah satu target kinerja unit di dalam aspek OCR. Guna memastikan sosialisasi terlaksana secara efektif, PJB melakukan evaluasi dan pengukuran terhadap proses pelaksanaan dan hasil/output mengenai pemahaman karyawan terhadap *Code of Conduct*.

To provide an understanding and motivate awareness of all PJB employees to obey and implement the Code of Conduct for every business activity, it is necessary to conduct socialization. PJB's Code of Conduct is discussed and socialized to all employees, from the operational level to top management. Code of Conduct socialization is carried out through media channels throughout the Company's Work Units, including BOD Talk, face-to-face socialization, e-mail, website, intranet, visual management, and internal forums. For new employees, the socialization was carried out by the GCG team during the Introduction Program to PJB's Code of Conduct, Corporate Culture, and GCG values. Additionally, CoC is also one of the unit performance targets in the OCR aspect. To ensure effective outreach, PJB conducts evaluations and measurements of the implementation process and results/output regarding employee understanding of the Code of Conduct.



Penegakan Standar Etika Perusahaan Code of Conduct Enforcement

Perusahaan melakukan pemantauan secara berkala atas implementasi *Code of Conduct* PJB dan menindak tegas setiap pelaku pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bentuk penegakan disiplin terhadap *Code of Conduct*. Perusahaan juga menyediakan fasilitas pengaduan atas pelanggaran *Code of Conduct*. Terdapat dua saluran pengaduan yang disediakan yaitu melalui laporan kepada atasan langsung dan mekanisme *Whistleblowing System* (WBS).

Fasilitas pengaduan tersebut merupakan upaya dalam mendorong karyawan PJB menaati *Code of Conduct* dan kebijakan lainnya. Setiap karyawan berperan aktif dan wajib melaporkan jika menemukan atau mengetahui perbuatan serta tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap *Code of Conduct*. Karyawan yang terbukti melakukan pelanggaran diperiksa oleh Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Karyawan, dan yang bersangkutan dijatuhi sanksi sesuai jenis dan tindakan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku di PJB.

The Company conducts periodic monitoring of the implementation of PJB's Code of Conduct and takes firm action on each violator following the provisions that have been established as a form of disciplinary enforcement of the Code of Conduct. The company also provides complaints facilities for violations of the Code of Conduct. There are two complaint channels provided through reports to the direct supervisor and the Whistleblowing System (WBS) mechanism.

This complaint facility is an effort to motivate PJB employees to obey the Code of Conduct and other policies. Every employee plays an active role and is required to report for any finding of actions categorized as violations against the Code of Conduct. Employees who are proven violating are examined by the Employee Disciplinary Investigation Team, and those concerned are subject to sanctions based on the type and act of violation following the applicable PJB provisions.

Sanksi Pelanggaran Standar Etika Perusahaan Sanctions for Code of Conduct Violation

Perusahaan menindak tegas dan memberikan sanksi kepada setiap pelaku pelanggaran *Code of Conduct* untuk memberikan efek jera sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No.113 Tahun 2010 pasal 4 ayat 2 berupa:

The company takes firm action and sanctions every violation against the Code of Conduct to provide a deterrent effect based on the Board of Directors' Decree No.113 of 2010 article 4 paragraph 2 in the form of:

Jenis Hukuman Type of Penalty	Jenis Peringatan Type of Warning	Sanksi Sanctions	
		Pokok Principal	Tambahan Additional
Ringan Light Penalty	Peringatan tertulis I (pertama) 1 st (first) Written warning	- Penundaan kenaikan grade apabila karyawan memenuhi syarat kenaikan grade atau Pemotongan Tunjangan Posisi (P2) sebesar 50%, apabila karyawan belum waktunya naik grade - Pemotongan hak atas Insentif Prestasi Kinerja (IPK) satu semester sebesar 25% - Delayed promotion if the employee has fulfilled the requirements for grade promotion or P2 50% reduction yet eligible for the promotion. 25% reduction of Performance Incentive (IPK) for one semester	-
Sedang Moderate Penalty	- Peringatan tertulis I (pertama) - Peringatan tertulis II (kedua) - Peringatan tertulis II (kedua) dan terakhir atau - Peringatan tertulis III (ketiga) dan terakhir	- Penundaan kenaikan grade apabila karyawan memenuhi syarat kenaikan grade atau Pemotongan Tunjangan Posisi (P2) sebesar 100%, apabila karyawan belum waktunya naik grade - Penghapusan hak atas Insentif Prestasi Kinerja (IPK) satu semester	- Rotasi - Demosi - Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Jenis Hukuman Type of Penalty	Jenis Peringatan Type of Warning	Sanksi Sanctions	
		Pokok Principal	Tambahan Additional
	1st (first) Written warning 2nd (Second) Written warning 2nd (second) written warning and the last warning, or 3rd (third) written warning and the last warning	- Delayed promotion if the employee has fulfilled the requirements for grade promotion or P2 100% reduction yet eligible for the promotion. - Performance Incentive (IPK) Write-off for one semester	- Rotation - Demotion - Claim
Berat Severe Penalty	-	Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Dismissal	Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Claim

Selain itu, PJB juga memberikan sanksi pelanggaran CoC bagi stakeholder eksternal berupa :

1. Apabila pelanggaran dilakukan oleh pihak eksternal (pemasok, mitra bisnis atau pemangku kepentingan lainnya), maka akan dikenakan ketentuan yang tertuang dalam kontrak dan prosedur Perusahaan yang relevan. Apabila ada indikasi tindak pidana dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib.
2. Mitra kerja PJB yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan dan keputusan Perusahaan.
3. Apabila terdapat kondisi yang melibatkan pelanggaran hukum maka akan diteruskan kepada pihak yang berwajib.

Additionally, PJB also imposes sanctions on CoC violations for external stakeholders in the form of:

1. If the violation is committed by an external party (suppliers, business partners, or other stakeholders), then the provisions imposed in the contract and relevant Company procedures will be subject. If it is indicated as a criminal act, it can be forwarded to the authorities.
2. PJB partners proven to violate will be imposed a sanction based on Company regulations and decisions.
3. If there are conditions involving violations of the law, they will be forwarded to the authorities.

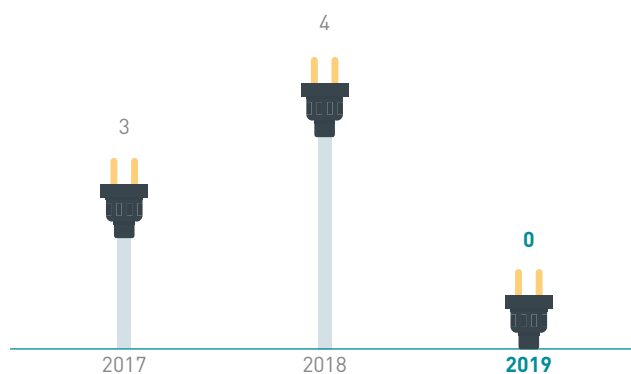
Jumlah dan Sanksi Pelanggaran Standar Etika Tahun 2019

Number of Cases and Sanctions for Code of Conduct Violation in 2019

Selama tahun 2019, terdapat 0 (nol) pelanggaran terhadap *Code of Conduct*. Kualitas penerapan dan penegakan *Code of Conduct* di PJB selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

During 2019, there were 0 (zero) violations against the Code of Conduct. The quality of implementation and enforcement of the Code of Conduct in PJB for the past three years can be seen in the graph as follows:

Penegakan Pelanggaran *Code Of Conduct* Tahun 2017-2019
Enforcement of Code of Conducts Violations in 2017-2019



Bentuk pelanggaran dan sanksi atas pelanggaran *Code of Conduct* yang telah dikeluarkan PJB tahun 2019 adalah sebagai berikut :

The manifestations of sanctions for violations against the Code of Conduct issued by PJB in 2019 are as follows:

Jumlah dan Sanksi Pelanggaran Standar Etika Tahun 2019

Number of Cases and Sanctions for Code of Conduct Violation of 2019

Jumlah Karyawan Terkena Sanksi Disiplin Total Employees to disciplinary Sanction	Bentuk Pelanggaran Violation Category	Jenis Sanksi Sanction Type	Hukuman Penalty
-	-	-	-

Evaluasi Kualitas Penerapan Standar Etika Perusahaan

Quality Assessment of the Code of Conduct Application

Perusahaan secara berkala melakukan evaluasi terhadap kualitas penerapan *Code of Conduct* yang bertujuan untuk mengukur seberapa jauh efektifitas implementasi *Code of Conduct* PJB dalam menekan potensi penyimpangan yang terjadi pada setiap kegiatan Perusahaan. Evaluasi terhadap efektivitas kualitas pelaksanaan *Code of Conduct* salah satunya juga melihat dari pelanggaran *Code of Conduct* dan pengaduan yang masuk dari stakeholders secara langsung atau melalui *Whistleblowing System* serta penindakan tegas melalui sanksi yang diberikan.

The company periodically evaluates the quality of the application of the Code of Conduct which aims to measure the effectiveness of PJB's Code of Conduct implementation in suppressing potential irregularities that occur in each of the Company's activities. Evaluation of the effectiveness of the quality of the implementation of the Code of Conduct one of which also looks at violations of the Code of Conduct and complaints that come from stakeholders directly or through the Whistleblowing System as well as firm action through sanctions given.

Sebagai pedoman yang bersifat dinamis, *Code of Conduct* PJB dikaji secara berkala dan berkelanjutan sesuai dengan dinamika lingkungan usaha yang terjadi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang ada pada Budaya Perusahaan. Selain itu, PJB juga mengevaluasi strategi sosialisasi dan kegiatan dalam rangka meningkatkan kesadaran terhadap penerapan *Code of Conduct* serta perangkat pendukung lainnya untuk mendorong kualitas penerapan dan penegakan *Code of Conduct*.

As a dynamic guideline, PJB's Code of Conduct is reviewed periodically and continuously by the dynamics of the business environment that occurs while still considering the values that exist in the Corporate Culture. Also, PJB evaluates socialization strategies and activities to increase awareness of the application of the Code of Conduct and other supporting tools to encourage the quality of the application and enforcement of the Code of Conduct.



PJB BERSIH

PJB BERSIH

PJB Bersih merupakan bagian dari upaya Perusahaan dalam mendukung Pemerintah terkait program anti korupsi dengan mencegah adanya aktivitas yang mengandung unsur-unsur penyimpangan, seperti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan PJB. Perusahaan berkomitmen untuk senantiasa menjalankan kegiatan bisnis secara jujur, bersih, dan berintegritas. Komitmen tersebut diwujudkan dengan ditetapkan Pedoman Program PJB Bersih melalui Surat Keputusan Direksi No. 092.K/010/DIR/2014.

Pedoman PJB Bersih disosialisasikan kepada seluruh Insan PJB melalui media saluran informasi yang dimiliki PJB. Penyusunan pedoman PJB Bersih turut memperhatikan kesesuaian terhadap peraturan/perundang-undangan yang berlaku, serta kondisi lingkungan dan kegiatan bisnis yang dijalankan PJB.

PJB Bersih is part of the Company's efforts to support the Government related to anti-corruption programs by preventing activities of fraud, such as Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN) within PJB. The company is committed to always conducting business activities by upholding honest, clean, and integrity characteristics. This commitment is realized by the stipulation of PJB Bersih Program Guidelines through the Board of Directors Decree No. 092.K / 010 / DIR / 2014.

PJB Bersih Guidelines are socialized to all PJB Individuals through the media of information channels owned by PJB. The preparation of the PJB Bersih guidelines also considers the compliance with applicable laws/regulations, as well as environmental conditions and business activities carried out by PJB.

Program PJB Bersih

PJB Bersih Program

Program PJB Bersih menjadi salah satu wujud tanggung jawab Perusahaan dalam menciptakan perusahaan yang bersih dan terhindar dari tindak penyimpangan serta menjaga iklim bisnis yang sehat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Program PJB Bersih yang telah dijalankan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. *Collective Action* terhadap mitra kerja
2. Pelayanan informasi;
3. Program pencegahan *fraud*
4. *Multi Stakeholders Forum* (MSF)
5. Program pengendalian gratifikasi.

PJB Bersih Program is a form of the Company's responsibility in creating a clean company and avoiding irregularities and maintaining a healthy business climate in supporting sustainable development. PJB Bersih Program that has been implemented in 2019 is as follows:

1. *Collective Action* against work partners
2. Information services;
3. Fraud prevention program
4. *Multi Stakeholders Forum* (MSF)
5. Gratification control program.

Selain itu, untuk menumbuhkan budaya PJB Bersih kepada *stakeholders* Perusahaan, pada tahun 2019 telah dilakukan sosialisasi PJB Bersih kepada Karyawan di Kantor Pusat dan Unit yang rutin dilaksanakan oleh tim transformasi *agent stream* serta dalam kegiatan *Supplier Gathering*.

Besides fostering the culture of PJB Bersih to the stakeholders of the Company, in 2019, PJB Bersih socialization was carried out to employees at the Head Office and Units which are routinely carried out by the agent stream transformation team as well as in *Supplier Gathering* activities.

Pengendalian Gratifikasi

Gratification Control

Pengendalian gratifikasi menjadi bagian dalam implementasi Pedoman PJB Bersih berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 092.K/010/DIR/2014. Kebijakan pengendalian gratifikasi juga telah diuraikan dalam *Code of Conduct* PJB. Sebagai langkah nyata Perusahaan terhadap pengendalian gratifikasi, telah diterbitkan Surat Edaran Direksi Nomor 008.K/012/DIR/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelaporan dan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Pembangkitan Jawa-Bali.

Gratification control is part of the implementation of PJB Bersih Guidelines based on Directors Decree No. 092.K / 010 / DIR / 2014. Gratification control policies have also been described in the PJB Code of Conduct. As a concrete step towards the control of gratification, the Board of Directors' Circular Letter Number 008.K / 012 / DIR / 2016 has been issued concerning Guidelines for Reporting and Controlling Gratification in PT Pembangkitan Jawa-Bali.

Dewan Komisaris PJB turut mendukung program pengendalian gratifikasi dengan menyempurnakan kebijakan tersebut melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Direksi dan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa-Bali Nomor 005.K/021/DIR/2017 dan Nomor 013.K/DK-PJB/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelaporan dan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Pembangkitan Jawa-Bali. Penerbitan SKB tersebut juga menjadi dasar pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di PJB.

Ketentuan Pemberian Gratifikasi Gratification Conditions

Sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Pelaporan dan Pengendalian Gratifikasi, ketentuan jenis-jenis gratifikasi adalah sebagai berikut:

1. Gratifikasi Yang Wajib Dilaporkan
 - a. Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, serta merupakan penerimaan dalam bentuk apapun yang diperoleh Insan PJB dari pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan jabatan penerima atau tidak sah secara hukum.
 - b. Penerimaan Gratifikasi harus ditolak, namun dapat diterima dalam hal:
 - 1) Gratifikasi tidak diterima secara langsung.
 - 2) Pemberi Gratifikasi tidak diketahui.
 - 3) Penerima ragu dengan kualifikasi Gratifikasi yang diterima.
 - 4) Gratifikasi diberikan dalam rangka kegiatan adat istiadat atau upacara keagamaan.
 - 5) Adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, yaitu penolakan yang dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan penerima dan/atau mengancam jiwa/harta atau pekerjaan Karyawan.
 - c. Penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib dilaporkan kepada UPG paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak penerimaan Gratifikasi dan diteruskan kepada KPK.
 - d. Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a antara lain, namun tidak terbatas pada:
 - 1) Penerimaan Gratifikasi dari pihak ketiga / mitra kerja sebelum, selama dan setelah proses pengadaan barang dan jasa.
 - 2) Penerimaan Gratifikasi pada proses pelayanan pelanggan.
 - 3) Penerimaan Gratifikasi sebelum, selama dan setelah proses pemeriksaan, audit, *monitoring* dan/atau evaluasi.
 - 4) Penerimaan Gratifikasi dari Mitra Kerja, pelanggan termasuk Anak Perusahaan yang diketahui atau patut diduga diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatan penerima atau karena dapat mempengaruhi keputusan.

PJB's Board of Commissioners also supports the gratification control program by perfecting the policy through a Joint Decree (SKB) of the Directors and the Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa-Bali Number 005.K / 021 / DIR / 2017 and Number 013.K / DK-PJB / 2017 concerning Guidelines for the Implementation of Gratification Reporting and Control in the PT Pembangkitan Jawa-Bali Environment. The issuance of the Joint Decree was also the basis for the formation of the Gratification Control Unit (UPG) at PJB.

As explained in the Guidelines for Reporting and Gratification Control, the provisions for the types of gratification are as follows:

1. Gratification that must be reported
 - a. Gratification related to the position and contrary to obligations or duties, and constitutes acceptance in any form obtained by PJB Individuals from parties suspected of having a connection with the position of the recipient or not legally valid.
 - b. Gratification must be rejected but can be accepted in a condition that:
 - 1) Rewards are not received directly.
 - 2) The grantor of gratification is unknown.
 - 3) Recipients are unsure of the Gratification qualifications received.
 - 4) Rewards are given in the context of religious activities or ceremonies.
 - 5) Certain conditions cannot be rejected, namely, the rejection that can result in damage to good relations of the institution, endanger the recipient, and/or threaten the life/property or work of the Employee.
 - c. Gratification receipts as referred to in letter 'b' must be reported to UPG no later than 10 (ten) working days from the receipt of rewards and forwarded to the KPK.
 - d. Gratification, as referred to in the letter, includes but is not limited to:
 - 1) Receiving Gratification from third parties/business partners before, during, and after the process of procurement of goods and services.
 - 2) Receiving Gratification in the customer service process.
 - 3) Acceptance of Gratuities before, during, and after the inspection, audit, monitoring, and/or evaluation process.
 - 4) Receiving Gratification from Partners, customers including Subsidiaries that are known or reasonably suspected to be granted because of authority related to the position of the recipient or because they can influence decisions.

- 5) Penerimaan tidak resmi dalam bentuk uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima petugas/pejabat panitia pengadaan barang/jasa dari Mitra Kerja penyedia barang dan jasa terkait proses pengadaan barang dan jasa yang sedang dijalankan.
- 6) Penerimaan Gratifikasi oleh keluarga Insan PJB dari Mitra Kerja dan/atau Pihak Ketiga.
- 7) Penerimaan fasilitas *entertainment*, wisata, *voucher*, dalam kegiatan yang terkait pelaksanaan tugas dan kewajiban di Perusahaan dari Mitra Kerja dan/atau Pihak Ketiga yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima dari Perusahaan.
- 8) Penerimaan berupa potongan harga khusus pada saat Insan PJB membeli barang dari Mitra Kerja dan/atau Pihak Ketiga.
- 9) Penerimaan parcel pada hari raya keagamaan atau hari besar lainnya yang berasal dari Mitra Kerja dan/atau Pihak Ketiga yang mempunyai hubungan bisnis dengan Perusahaan dan/ atau berhubungan dengan jabatan.
- 10) Penerimaan sumbangan berupa *catering* atau fasilitas pendukung lainnya dari Mitra Kerja dan/ atau Pihak Ketiga pada saat karyawan/pejabat Perusahaan melaksanakan kegiatan terkait agama/adat/tradisi.
- 11) Penerimaan uang saku, uang pengganti *transport* dan/atau fasilitas akomodasi (penginapan) oleh Insan PJB ditempat penugasan dimana yang diketahui atau patut diduga diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatan penerima atau karena dapat mempengaruhi keputusan.
- 12) Penerimaan hadiah berupa uang/barang atau fasilitas lainnya kepada Insan PJB yang memiliki kewenangan dan/atau yang patut diduga diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatan penerima atau karena dapat mempengaruhi keputusan penerimaan/penempatan/promosi karyawan.
- 13) Penerimaan hadiah berupa uang/barang atau fasilitas lainnya kepada Insan PJB yang memiliki kewenangan dan/atau yang patut diduga diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatan penerima atau karena dapat mempengaruhi keputusan penilaian kinerja karyawan atau Unit Perusahaan.
- 14) Penerimaan uang/barang dari pihak yang memiliki hubungan jabatan dan potensi benturan kepentingan kepada Insan PJB dalam suatu kegiatan seperti pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, upacara agama/adat/ tradisi lainnya yang melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang dalam setiap kegiatan.
- 5) Unofficial receipts in the form of money, goods, facilities, or accommodations received by officers/ officials of the procurement committee of goods/ services from the partners providing goods and services related to the process of procurement of goods and services that are being carried out.
- 6) Receiving Gratification by PJB Insurance Company families from Work Partners and / or Third Parties.
- 7) Receiving Gratification in the form of entertainment facilities, tours, vouchers, in activities related to the implementation of duties and obligations in the Company from Business Partners and / or Third Parties that are not relevant to the assignments received from the Company.
- 8) Receiving Gratification in the form of special price discounts when PJB Individuals purchase goods from Work Partners and / or Third Parties.
- 9) Receiving Gratification in the form of parcels on religious holidays or other holidays originating from Business Partners and/or Third Parties that have business relations with the Company and/or are related to the position.
- 10) Receiving Gratification in the form of catering or other supporting facilities from Business Partners and/or Third Parties when Company employees/ officials carry out activities related to religion/ customs/traditions.
- 11) Receiving Gratification in the form of allowance, replacement money for transportation and / or accommodation facilities (lodging) by the PJB Individuals in the assignment place where what is known or reasonably suspected is given because of authority related to the recipient's position or because it can influence decisions.
- 12) Receiving Gratification in the form of money/goods or other facilities to the PJB Insurance Agency that has the authority and/or that is supposed to be given due to authority related to the position of the recipient or because it can influence the decisions on the acceptance/placement/promotion of employees.
- 13) Receiving Gratification in the form of money/goods or other facilities to the PJB Entities who have the authority and/or who is reasonably suspected of being given because of authority related to the position of the recipient or because it can affect the performance appraisal decisions of employees or Company Units.
- 14) Receiving Gratification of money/goods from parties who have a position relationship and potential conflict of interest to the PJB Insurer in an activity such as marriage, birth, aqiqah, baptism, circumcision, tooth-cutting ceremony, religious/ customary activities or other ceremonies that exceed Rp 1,000,000, 00 [one million rupiah] per gift per person in each activity.

- 15) Penerimaan uang/barang dari pihak yang memiliki hubungan jabatan dan potensi benturan kepentingan dengan penerima terkait musibah/ bencana yang dialami oleh Insan PJB yang melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang.
 - 16) Penerimaan honor, insentif, penghasilan lain dalam bentuk uang atau setara uang sebagai kompensasi atas pelaksanaan tugas sebagai pembicara/ narasumber/ konsultan atau fungsi serupa lainnya yang diterima Insan PJB dari instansi/ lembaga lain yang berpotensi memiliki benturan kepentingan.
2. Gratifikasi Yang Tidak Wajib di Laporkan
- a. Gratifikasi yang berlaku umum, tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, dipandang sebagai wujud ekspresi keramahan/ penghormatan dalam hubungan sosial dalam batasan nilai yang wajar serta pemberian yang berada dalam ranah adat-istiadat, kebiasaan dan norma yang ada dalam masyarakat dalam nilai batas yang wajar.
 - b. Karakteristik Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan adalah sebagai berikut:
 - 1) Berlaku Umum, yaitu suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan;
 - 2) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) Dipandang sebagai wujud ekspresi, keramahan, penghormatan dalam hubungan sosial antar sesama dalam batasan nilai yang wajar; atau
 - 4) Merupakan bentuk pemberian yang berada dalam ranah adat istiadat, kebiasaan, dan norma yang hidup di masyarakat dalam batasan nilai yang wajar.
 - c. Penerimaan Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, dapat diterima dan dinikmati (dimiliki pemanfaatannya) oleh penerima tanpa ada kewajiban pelaporan kepada UPG.
 - d. Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas antara lain:
 - 1) Pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/ bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat benturan kepentingan.
 - 2) Pemberian dalam bentuk hidangan atau sajian yang Berlaku Umum.
 - 3) Pemberian berupa keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang Berlaku Umum.
 - 4) Manfaat dari koperasi, organisasi kearyawanan atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang Berlaku Umum.
- 15) Receiving Gratification of money/goods from parties who have a position relationship and a potential conflict of interest with the recipient related to disasters / disasters experienced by the PJB Insurance Agency more than Rp 1,000,000.00 (one million rupiah) per gift per person.
 - 16) Receipt of honorarium, incentives, other income in the form of money or cash equivalents as compensation for carrying out duties as speaker / resource person / consultant or other similar function received by PJB Individuals from other agencies / institutions that have the potential for conflict of interest.
2. Gratification that is not required to be reported
- a. Gratification that is generally accepted, does not conflict with applicable laws, is seen as an expression of hospitality / respect in social relations within the limits of reasonable values and gifts that are in the realm of customs, habits and norms that exist in society within the reasonable boundary values.
 - b. The characteristics of gratification that is not required to be reported are as follows:
 - 1) Generally Applicable, which is a condition of giving which is applied equally in terms of type, form, requirements or value, for all participants and meets the principle of fairness or propriety;
 - 2) Does not conflict with applicable laws and regulations;
 - 3) Be seen as a form of expression, hospitality, respect in social relationships between people within the limits of reasonable values; or
 - 4) It is a form of giving which is in the realm of customs, habits and norms that live in the community within reasonable limits.
 - c. Gratification receipts that are not required to be reported, can be received and enjoyed (owned by them) by the recipient without any reporting obligations to UPG.
 - d. Gratification, as referred to in 'a' and 'b' above, includes:
 - 1) Family reward as grandfather/grandmother, father/mother/father-in-law, husband/wife, child/ son-in-law, adopted children/legal guardians, grandchildren, in-laws, uncle/aunt, brother/sister/ brother-in-law, cousin and niece, throughout no conflict of interest.
 - 2) Giving in the form of dishes or offerings that are generally accepted.
 - 3) Giving in the form of profits or interest from the placement of funds, investments or ownership of private shares that are generally valid.
 - 4) Benefits from cooperatives, employment organizations or similar organizations based on membership that is generally accepted.

- 5) Seminar kit yang berbentuk seperangkat modul, alat tulis, plakat, sertifikat, tas dan pakaian dengan logo atau informasi terkait instansi yang berlaku umum, yang diterima dalam seminar/pelatihan/*workshop*/konferensi atau kegiatan sejenis.
- 6) Hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan.
- 7) Penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8) Hadiah langsung/undian, diskon/rabat, *voucher*, *point rewards*, atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait kedinasan.
- 9) Kompensasi atau honor atas profesi diluar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat benturan kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik Pejabat/Karyawan yang bersangkutan.
- 10) Kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan di internal Perusahaan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku di Perusahaan sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda dan tidak terdapat benturan kepentingan.
- 11) Karangan bunga dengan nilai yang wajar yang berlaku secara umum.
- 12) Pemberian terkait dengan penyelenggaraan pesta pertunangan, pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang dalam setiap kegiatan.
- 13) Bingkisan/cinderamata/souvenir atau benda sejenis yang diterima Insan PJB sebagai tamu/undangan dalam penyelenggaraan pesta sebagaimana dimaksud pada butir 12 (dua belas) di atas paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian dalam setiap kegiatan.
- 14) Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri Penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima Gratifikasi dalam setiap peristiwa yang tidak berpotensi memiliki benturan kepentingan.
- 15) Pemberian sesama karyawan dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak dalam bentuk setara uang yang tidak berpotensi memiliki benturan kepentingan.
- 16) Pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau tidak dalam bentuk setara uang yang tidak berpotensi memiliki benturan kepentingan.
- 5) Seminar kits in the form of a set of modules, stationery, placards, certificates, bags and clothing with logos or information related to generally accepted agencies, which are accepted in seminars/training/workshops/conferences or similar activities.
- 6) Prizes, appreciation or awards from championships, races or competitions followed at their own expense and not related to service.
- 7) Awards in the form of money or goods related to the improvement of work performance provided by the government following applicable laws and regulations.
- 8) Direct prizes / sweepstakes, discounts / rebates, vouchers, point rewards, or souvenirs that are generally valid and not related to service.
- 9) Compensation or honorarium for professions outside of official activities that are not related to duties and obligations, as long as there are no conflicts of interest and do not violate the rules / code of ethics of the Officer / Employee concerned.
- 10) Compensation received related to official activities within the Company such as honorarium, transportation, accommodation and financing that has been stipulated in the applicable provisions of the Company as long as there is no double financing and there is no conflict of interest.
- 11) Wreaths of reasonable value generally accepted.
- 12) Gifts relating to the implementation of engagement parties, weddings, births, aqiqah, baptism, circumcision, tooth cutting, or other traditional / religious ceremonies at most Rp 1,000,000.00 (one million rupiah) per gift per person in each activity.
- 13) Gifts / souvenirs / souvenirs or similar objects received by PJB Individuals as guests / invitations in the party as referred to in item 12 (twelve) above at most Rp 1,000,000.00 (one million rupiah) per gift in each activity .
- 14) Gifts relating to disasters or disasters experienced by the Gratification recipient, husband, wife, child, father, mother, father-in-law, and / or son-in-law of the recipient of Gratification in any event that does not have a potential conflict of interest.
- 15) Giving fellow employees to separate greetings, pensions, promotions, and birthdays that are not in the form of money or not in the form of cash equivalents that do not have the potential for a conflict of interest.
- 16) Provision of co-workers who are not in the form of money or not in the form of money equivalent that does not have the potential for a conflict of interest.

3. Gratifikasi Yang Terkait Kedinasan

- a. Gratifikasi yang diterima oleh Insan PJB dan ditujukan atau diperuntukkan kepada Perusahaan, bukan kepada personal yang mewakili Perusahaan.
- b. Karakteristik Gratifikasi dalam kedinasan adalah sebagai berikut:
 - 1) Diperoleh secara sah dalam penugasan resmi;
 - 2) Diberikan secara terbuka dalam rangkaian acara kedinasan, yaitu dapat dimaknai terbuka dihadapan peserta lain atau adanya tanda terima atas pemberian yang diberikan;
 - 3) Berlaku umum, yaitu suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk persyaratan dan nilai yang wajar yang berlaku secara umum untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda; dan
 - 4) Selain bentuk-bentuk Gratifikasi yang dinyatakan tidak wajib dilaporkan dalam rangka kegiatan kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 huruf d.
- c. Penerimaan Gratifikasi dalam kedinasan harus dilaporkan kepada UPG paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak penerimaan/penolakan Gratifikasi terjadi untuk kemudian dilakukan penilaian oleh UPG.
- d. Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b antara lain, namun tidak terbatas pada:
 - 1) Penerimaan cinderamata dalam kegiatan yang terkait pelaksanaan tugas, dan kewajiban di perusahaan dari Mitra Kerja berdasarkan penunjukan dan penugasan resmi dari PJB sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda dan dengan nilai yang wajar yang berlaku secara umum.
 - 2) Penerimaan hadiah pada waktu kegiatan kontes/ kompetisi terbuka yang diselenggarakan oleh instansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukan atau penugasan resmi.
- e. Pemanfaatan penerimaan Gratifikasi terkait kedinasan dilakukan setelah mendapatkan penilaian oleh UPG dan penetapan oleh KPK, dengan cara:
 - 1) Digunakan oleh penerima untuk menunjang kinerja.
 - 2) Dimanfaatkan oleh perusahaan untuk kegiatan operasional, sebagai barang *display*, atau perpustakaan.

Adapun untuk pemberian gratifikasi yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Pelaporan dan Pengendalian Gratifikasi dibagi dalam:

1. Pemberian Dengan Tujuan Suap/Dianggap Suap Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam hubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya dilarang untuk dilakukan oleh setiap Insan PJB, antara lain:

3. Gratification Related to Service

- a. Gratification received by the PJB Individuals and addressed or intended for the Company, not for the persons representing the Company.
- b. The characteristics of gratuities in service are as follows:
 - 1) Legally obtained in official assignments;
 - 2) Openly given in a series of official events, which can be interpreted openly in front of other participants or a receipt for the gift given;
- 3) Generally applies, i.e. a condition of granting that is applied equally in terms of type, form of requirements and reasonable value that applies generally to all participants and meets the principle of fairness or propriety, as long as there is no double financing; and
- 4) In addition to the forms of Gratification which are declared not required to be reported in the framework of official activities as referred to in Article 5 number 2 letter d.
- c. Acceptance of rewards in service must be reported to the UPG no later than 10 (ten) working days from the receipt / rejection of Gratuities to be assessed by the UPG.
- d. Gratification, as referred to in 'a' and 'b', includes but is not limited to:
 - 1) Souvenir receipts in activities related to the implementation of duties and obligations in the company from the Work Partner based on the official appointment and assignment of the PJB as long as there is no double financing and with a reasonable value generally accepted.
 - 2) Receiving prizes during open contest / competition activities organized by other agencies or institutions based on official appointment or assignment.
- e. Utilization of Gratification receipts related to official services is carried out after obtaining an assessment by the UPG and stipulation by the KPK, by:
 - 1) Used by the receiver to support performance.
 - 2) Used by companies for operational activities, as display goods, or libraries.

While for presenting gratification regulated in the Guidelines for Reporting and Gratification Control are divided into:

1. Rewarding in the Purpose of Bribery / Considered Bribery Giving to civil servants or state administrators concerning their position and contrary to their duties and obligations is prohibited to be carried out by any PJB service officer, including:



- a. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang karena jabatannya dapat mempengaruhi keputusan.
- b. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang karena jabatannya untuk melakukan perbuatan/tidak melakukan perbuatan dalam rangka kepentingan Perusahaan.
- c. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang karena jabatannya untuk mempengaruhi pihak lain untuk melakukan perbuatan/tidak melakukan perbuatan dalam rangka kepentingan Perusahaan.

2. Pemberian Gratifikasi Kepada Pihak Ketiga Pemberian Gratifikasi kepada Pihak Ketiga dapat dilakukan dengan syarat memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemberian Gratifikasi kepada instansi pemerintah, antara lain:
 - 1) Pemberian ditujukan langsung kepada instansi.
 - 2) Pemberian tidak boleh dalam bentuk uang atau setara uang, kecuali atas kerjasama kemitraan antar instansi dan Perusahaan, dengan menyalurkan ke rekening kas instansi yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - 3) Penerima pemberian dapat melalui wakil instansi yang sah berdasarkan penunjukan dari instansi penerima.
 - 4) Pemberian tidak bertentangan dengan aturan penerimaan Gratifikasi yang berlaku di instansi penerima.
 - 5) Pemberian tidak untuk tujuan suap/Gratifikasi yang dianggap suap.
- b. Pemberian Gratifikasi kepada korporasi/perusahaan, pemberian sebagaimana dimaksud bersifat resmi dan berlaku umum dalam kaitan hubungan bisnis sebagai Mitra Kerja, antara lain:
 - 1) Pemberian akomodasi atau fasilitas kepada korporasi/perusahaan sebagai *counterparty* yang memiliki hubungan bisnis dengan Perusahaan, sesuai dengan anggaran yang ditetapkan oleh Perusahaan dan tidak bertentangan dengan aturan penerimaan Gratifikasi yang berlaku di korporasi/perusahaan penerima.
 - 2) Pemberian akomodasi atau fasilitas kepada Mitra Kerja penyedia barang dan jasa dengan syarat tercantum dalam kontrak sesuai dengan anggaran yang ditetapkan oleh Perusahaan dan tidak bertentangan dengan aturan penerimaan Gratifikasi yang berlaku di perusahaan Mitra Kerja penyedia barang dan jasa.
 - 3) Pemberian dalam rangka kegiatan pemasaran termasuk promosi, sponsorship dan sumbangan.

- a. Rewarding to civil servants or state administrators whose position may affect the decision.
- b. Rewarding to civil servants or state administrators who because of their position to carry out acts / not commit acts in the interests of the Company.
- c. Rewarding to civil servants or state administrators whose position is to influence other parties to commit acts / not commit acts in the interests of the Company.

2. Gratification Rewarding to Third Parties Gratification Rewarding to Third Parties can be done with conditions that meet the following conditions:

- a. Gratification Rewarding to government insitutions, including:
 - 1) The gift is addressed directly to the agency.
 - 2) The gift may not be in the form of money or cash equivalents, except for partnership partnerships between agencies and companies, by channeling it to the accountable cash of an agency that can be accounted for.
 - 3) The recipient of the gift can be through the authorized agency representative based on the appointment of the receiving agency.
 - 4) Rewarding does not conflict with the rules of receiving Gratification in force at the receiving agency.
 - 5) Rewarding is not for bribery / Gratification which is considered bribe.
- b. Gratification Rewarding to corporations / companies, the giving as intended is official and is generally applicable concerning business relationships as Business Partners, including but not limited to:
 - 1) Providing accommodations or facilities to the corporation / company as a counterparty that has a business relationship with the Company, following the budget set by the Company and does not conflict with the rules of Gratification receiving applicable in the recipient corporation/company.
 - 2) Providing accommodation or facilities to the Partner of the goods and services provider with the conditions listed in the contract following the budget set by the Company and does not conflict with the rules of acceptance of Gratification in force at the Partner's company providing goods and services.
 - 3) Rewarding for marketing activities including promotions, sponsorships and donations.

- c. Pemberian Gratifikasi kepada individu antara lain:
 - 1) Pemberian kepada Mitra Kerja perorangan baik pegawai negeri maupun non pegawai negeri sipil dalam bentuk hadiah, fasilitas dan akomodasi dalam rangka kegiatan bisnis, *sponsorship* dan kegiatan lainnya yang bersifat resmi (dapat melalui surat, MoU, kerjasama lainnya).
 - 2) Pemberian kepada Mitra Kerja pegawai negeri merupakan pemberian Gratifikasi yang berlaku umum dan diberikan kepada setiap mitra kerja.
 - 3) Pemberian kepada Mitra Kerja pegawai negeri merupakan pemberian Gratifikasi dalam hubungan sebagai mitra kerja bukan dalam hubungan dengan jabatannya.
 - 4) Pemberian diatas termasuk pemberian dalam rangka kegiatan pemasaran, promosi, *sponsorship*, sumbangan dan pemberian lainnya yang bersifat resmi dan berlaku umum dalam kaitan hubungan bisnis sebagai Mitra Kerja.
- d. Pemberian berdasarkan *underlying transaction* dalam rangkaian hubungan bisnis dengan pihak ketiga yang bersifat resmi dan berlaku umum serta tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
- e. Pemberian telah dianggarkan oleh Perusahaan.
- f. Pemberian dalam kegiatan *sponsorship* dan sumbangan harus memenuhi kelengkapan dokumen (proposal pengajuan pemberian dari penerima, bukti penggunaan pemberian, tanda terima Gratifikasi).
- g. Pemberian tidak diperbolehkan dalam bentuk yang melanggar kesusilaan dan hukum.
- h. Insan PJB wajib melaporkan kepada UPG dalam hal terjadi pemberian Gratifikasi kepada pihak ketiga yang tidak sesuai dengan ketentuan di atas.
- i. Segala bentuk pemberian kepada pihak ketiga harus memenuhi aspek efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

- c. Gratification Rewarding to individuals includes:
 - 1) Rewarding to individual Work Partners both civil servants and non civil servants in the form of gifts, facilities and accommodations in the context of business activities, sponsorships and other official activities (can be through letters, MoUs, other collaborations).
 - 2) Rewarding to Public Work Partners is a gratification that is generally accepted and given to each working partner.
 - 3) Rewarding to Civil Servants Work Partners is granting Gratuities in relations as partners not concerning their positions.
 - 4) Rewarding above includes gifts in the context of marketing activities, promotions, sponsorships, donations and other gifts that are official and generally accepted concerning business relationships as Business Partners.
- d. Gifts based on underlying transactions in a series of business relationships with third parties that are official and generally accepted and do not violate applicable regulations.
- e. Rewarding has been budgeted by the Company.
- f. Rewarding in sponsorship activities and donations must meet the completeness of the document (proposal for submission of the gift from the recipient, proof of use of the gift, receipt of Gratuities).
- g. Rewarding is not allowed in a form that violates decency and the law.
- h. The PJB individuals is obliged to report to UPG in the event of gratification giving to third parties that are not following the provisions above.
- i. All forms of Rewarding to third parties must fulfill aspects of efficiency, effectiveness, transparency and accountability.

Mekanisme Pelaporan Reporting Mechanism

Pelaporan gratifikasi disampaikan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan terkait pengendalian gratifikasi. Mekanisme pelaporan atas gratifikasi sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Pelaporan dan Pengendalian Gratifikasi adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan, penolakan dan pemberian Gratifikasi wajib dilaporkan oleh Insan PJB kepada UPG dengan mengisi formulir yang akan diatur dalam prosedur kerja, disertai dokumen pendukung paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan.

Gratification Reports are submitted to the Gratification Control Unit (UPG) and follows the stipulated provisions related to gratification control. The mechanism for reporting gratuities as explained in the Guidelines for Reporting and Gratification Control is as follows:

1. Acceptance, rejection and gratification must be reported by the PJB Individuals to UPG by filling out the form that will be regulated in the work procedure, accompanied by supporting documents no later than 10 (ten) working days after the date of receipt.

2. Penerimaan Gratifikasi dalam bentuk barang yang mudah busuk/rusak/cepat kadaluarsa dalam batas kewajaran, Insan PJB wajib melaporkan kepada UPG paling lama 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penerimaan dan disertai tanda bukti penyerahan barang. Selanjutnya UPG melaporkan ke KPK bukti penyerahan barang yang telah diserahkan kepada yayasan/panti sosial kemasyarakatan.
3. Insan PJB dilarang menerima/memberi Gratifikasi yang tidak diperbolehkan atau berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang/jabatan dan apabila Insan PJB dimaksud tidak melaporkannya maka dapat dilaporkan melalui mekanisme *Whistle Blowing System*.
4. UPG melaporkan penerimaan Gratifikasi yang wajib dilaporkan disertai dengan dokumen pendukung kepada KPK paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan laporan Gratifikasi.
5. KPK akan melakukan analisa, verifikasi dan klasifikasi serta memberikan penetapan status Gratifikasi atas laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh UPG paling lama selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
6. UPG membuat laporan implementasi penerapan pedoman ini kepada Direktur Utama secara periodik setiap semester.
7. UPG membuat rekapitulasi laporan penerimaan, penolakan dan pemberian Gratifikasi serta melaporkannya kepada KPK secara periodik setiap semester.

2. Receipt of Gratuities in the form of goods which are easily rotten / damaged / quickly expires within the fairness limit, the PJB Individuals must report to UPG no later than 2 (two) working days after the date of receipt and accompanied by proof of delivery of the goods. Furthermore, UPG reports to the KPK the evidence of delivery of the goods which have been submitted to the foundation / social community institution.
3. The PJB Individuals is prohibited from receiving / giving gratuities that are not allowed or the potential for abuse of authority / position and if the PJB individual does not report it can be reported through the Whistle Blowing System mechanism.
4. UPG reports the receipt of Gratification which must be reported along with supporting documents to the KPK no later than 20 (twenty) working days from the date of receipt of the Gratification report.
5. The Corruption Eradication Commission will analyze, verify and classify and determine the gratification status of the Gratification report submitted by the UPG for a maximum of 30 (thirty) working days.
6. UPG reports periodically the implementation of this guideline to the President Director every semester.
7. UPG recapitulates reports of acceptance, rejection and gratification and reports them to the KPK periodically every semester.

Sanksi Atas Pelanggaran Pedoman Gratifikasi Sanctions for Violating the Gratification Policy

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini akan dikenakan sanksi disiplin karyawan berdasarkan Peraturan Disiplin Karyawan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Violations of the provisions in the Gratification Control Guidelines will be subject to employee discipline sanctions based on the Employee Discipline Rules and applicable laws and regulations.

Laporan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Report on the Implementation of Gratification Control

Perusahaan secara konsisten melakukan kegiatan pengendalian gratifikasi yang dilaksanakan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi. Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi PJB adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Laporan Penolakan, Penerimaan dan Pemberian Gratifikasi oleh Insan PJB.
2. Dukungan UPG dalam Sosialisasi Pencegahan Gratifikasi kepada karyawan di Unit-Unit PT Pembangunan Jawa-Bali sebagai salah satu *Program Transformation Agent Stream GCG*.
3. Sosialisasi Pencegahan Gratifikasi kepada Mitra Kerja PJB.
4. Sosialisasi Pencegahan Gratifikasi kepada Siswa OJT rekrutmen tingkat S-1, D3 dan SMK.
5. Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi oleh KPK kepada *Senior Leader* di Kantor Pusat

The Company consistently carries out gratification control activities carried out by the Gratification Control Unit. The activities that have been carried out by the PJB Gratification Control Unit are as follows:

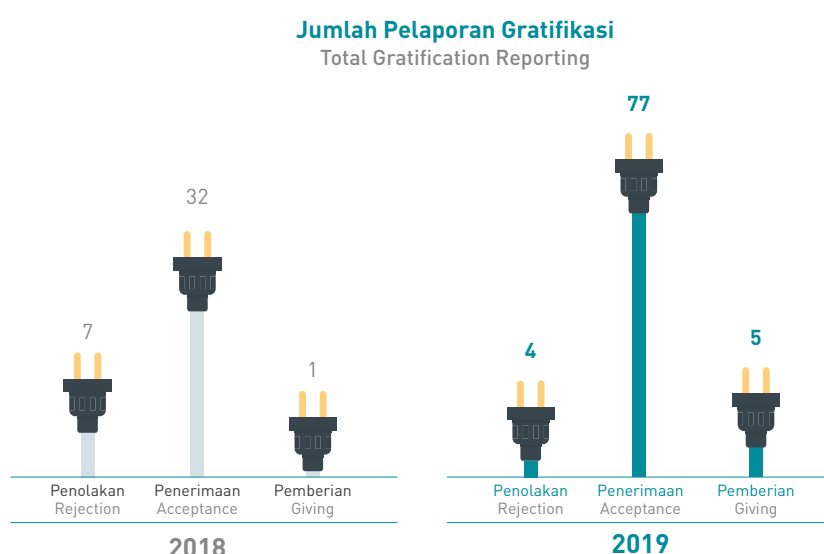
1. Management of Refusal, Acceptance and Gratification Reports by People of PJB.
2. UPG Support in Promoting Gratification Prevention to employees in PT Pembangunan Jawa Bali Units as one of the GCG Stream Transformation Agent Programs.
3. Promoting Gratification Prevention to PJB Partners.
4. Promoting Gratification Prevention to OJT Students for S-1, D3 and Vocational High School recruitment levels.
5. The Corruption Eradication Prevention Socialization by the KPK to the Senior Leader at the Head Office

6. Himbauan Internalisasi Program Pencegahan Gratifikasi
7. Pemberitahuan Larangan Menerima Parcel/Bingkisan atau hadiah lainnya
8. Keikutsertaan dalam kegiatan Seminar Nasional GCG PT PLN (Persero) dan Anak Perusahaan PT PLN (Persero)
9. Pelaksanaan *Survey* Pemahaman Gratifikasi PT PJB
10. Implementasi Pelaporan Gratifikasi secara Online di PJB.

Sampai dengan akhir tahun 2019, jumlah laporan gratifikasi yang diterima UPG PJB dari seluruh unit dan anak perusahaan berjumlah 86 laporan. Laporan ini terdiri dari 4 Laporan Penolakan Gratifikasi, 77 Laporan Penerimaan dan 5 Laporan Pemberian Gratifikasi.

6. Call for Internalization of the Gratification Prevention Program
7. Notification of Prohibition of Receiving Parcel / Gift or other prizes
8. Participation in PT PLN (Persero) GCG National Seminar activities and PT PLN (Persero) Subsidiaries
9. Implementation of PT PJB Gratification Understanding Survey
10. Implementation of Online Gratification Reporting at PJB.

As of the end of 2019, the number of gratification reports received by UPG PJB from all units and subsidiaries amounted to 86 reports. This report consists of 4 Gratification Rejection Reports, 77 Accepted Reports and 5 Gratification Reports.



Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Reporting of State Officials Assets

Pelaksanaan LHKPN merupakan bagian dari penerapan program anti korupsi sebagai wujud komitmen PJB dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan PJB. Pelaksanaan LHKPN sesuai dengan ketentuan Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Peraturan Direksi PT PLN Nomor 0074.P/DIR/2017 tentang Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan PT PLN (Persero). Selain itu, sebagai wujud kesungguhan dalam pelaksanaan LHKPN, PJB secara internal menetapkan kebijakan LHKPN melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Direksi dan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa-Bali Nomor 004.K/021/DIR/2017 tentang Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan PT Pembangkitan Jawa-Bali.

The implementation of LHKPN is part of the implementation of anti-corruption program as a form of PJB's commitment in implementing Good Corporate Governance (GCG) within the PJB. The implementation of LHKPN is following the provisions of KPK Regulation Number 7 of 2016 concerning Procedures for Announcement and Examination of State Administration Assets (LHKPN) and PT PLN Board of Directors Regulation Number 0074.P / DIR / 2017 concerning Guidelines for Reporting State Property Assets (LHKPN) in the environment PT PLN (Persero). Also, as a form of seriousness in the implementation of LHKPN, PJB internally established the LHKPN policy through a Joint Decree (SKB) between the Directors and the Board of Commissioners of PT Pembangkit Jawa-Bali Number 004.K / 021 / DIR / 2017 concerning Guidelines for Assets Asset Report (LHKPN) in PT Pembangkitan Jawa-Bali.

Fungsi Pengelola LHKPN LHKPN Management Function

Perusahaan telah menetapkan fungsi Pengelola LHKPN berdasarkan SKB Nomor 004.K/021/DIR/2017 dijalankan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Fungsi Pengelola LHKPN di lingkungan PLN sebagai Admin Instansi yang mempunyai wewenang khusus terhadap pengelolaan LHKPN yaitu Bidang Resiko Legal dan Kepatuhan pada Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan.
2. Fungsi Pengelola LHKPN di lingkungan Perusahaan sebagai Admin Unit e-LHKPN yang mempunyai wewenang khusus terhadap pengelolaan LHKPN yaitu Bidang Kepatuhan Kantor Pusat PJB.
3. Tugas dan tanggung jawab dan Admin Instansi adalah:
 - a. Mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengelolaan LHKPN;
 - b. Mensosialisasikan pemahaman tentang pedoman LHKPN, meng-update data Wajib LHKPN, menerima *form* aktivasi LHKPN, dan memfasilitasi penerusan *form* aktivasi LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - c. Melakukan koordinasi, konsultasi dan surat-menyurat kepada KPK atas nama PLN *Group* dalam pelaksanaan Pelaporan LHKPN;
 - d. Memantau kepatuhan Wajib LHKPN dalam pelaporan LHKPN;
 - e. Memfasilitasi pengumuman LHKPN;
 - f. Memberikan rekomendasi tindak lanjut terkait kepatuhan pelaporan LHKPN;
 - g. Melakukan *monitoring* dan evaluasi atas efektivitas dari Pelaporan LHKPN;
 - h. Sebagai admin tertinggi di Lingkungan PLN, mengkoordinasikan alur kerja dari semua Admin Unit e-LHKPN, dan memonitor pelaksanaannya.
4. Tugas dan tanggung jawab dari Admin Unit e-LHKPN adalah:
 - a. Mensosialisasikan pemahaman serta teknik pelaporannya sesuai pedoman LHKPN kepada Wajib LHKPN, di lingkungan Perusahaan;
 - b. Meng-*update* data Wajib LHKPN, menerima *form* aktivasi LHKPN, dan memfasilitasi penerusan *form* aktivasi LHKPN ke Admin Instansi;
 - c. Melakukan koordinasi, konsultasi dan surat-menyurat kepada Admin Instansi atas nama Perusahaan dalam pelaksanaan laporan LHKPN;

The company has established the LHKPN Management function based on SKB Number 004.K / 021 / DIR / 2017, which is carried out following the following provisions:

1. The function of Reporting of State Officials Assets Manager in PLN circumstances is as Admin of Agency who has special authority towards Reporting of State Officials Assets Management, that is Legal Risk and Compliance Division within the unit of Risk Management and Compliance.
2. The function of Reporting of State Officials Assets Manager in the Company's circumstances is as e-LHKPN Admin of Unit who has special authority towards Reporting of State Officials Assets management, that is Compliance Division of PJB Head Office
3. Duties and responsibilities for Agency Admin are as follows:
 - a. Preparing rules, technical instructions, and other similar requirements to support the implementation of Reporting of State Officials Assets management;
 - b. Socializing the understanding of Reporting of State Officials Assets manual, updating mandatory data for Reporting of State Officials Assets, receiving Reporting of State Officials Assets activation form, and facilitating the forwarding of Reporting of State Officials Assets activation form to KPK
 - c. Performing coordination, consultation, and correspondence to KPK on behalf of PLN Group in the Reporting of State Officials Assets.
 - d. Monitoring the mandatory compliances for Reporting of State Officials Assets in Reporting of State Officials Assets reporting;
 - e. Facilitating Reporting of State Officials Assets announcement
 - f. Giving follow-up recommendations related to Reporting of State Officials Assets reporting compliance
 - g. Monitoring and evaluating the effectiveness of Reporting of State Officials Assets Reporting
 - h. As the top admin in PLN, coordinating workflow from all e-LHKPN Admin of Unit and monitoring the execution
4. Duties and responsibilities from e-LHKPN Unit Admin are as follows:
 - a. Socializing the understanding on Reporting of State Officials Assets and reporting techniques according to Reporting of State Officials Assets the Mandatory for LHKPN, in the Company;
 - b. Updating mandatory data for Reporting of State Officials Assets, accepting the Reporting of State Officials Assets activation form, and facilitating the forwarding of Reporting of State Officials Assets activation form to Admin of Agency;
 - c. Performing coordination, consultation, and correspondence with Admin of Agency on behalf of the Company in Reporting of State Officials Assets Reporting;

- d. *Monitoring* dan evaluasi kepatuhan Wajib LHKPN pada Perusahaan dalam pelaporan LHKPN;
- e. Membuat laporan implementasi pedoman ini kepada Direktur Utama secara periodik;
- f. Menerima konsultasi dan memfasilitasi pengumuman LHKPN Wajib LHKPN di Perusahaan.

Bidang kepatuhan kantor pusat berkoordinasi dengan Fungsi Kepatuhan unit dan anak perusahaan dan perusahaan asosiasi (AP/PA) untuk membantu kelancaran pelaksanaan pelaporan LHKPN di masing-masing Unit.

- d. Monitoring and evaluating the mandatory compliances for Reporting of State Officials Assets to the Company in Reporting of State Officials Assets reporting;
- e. Preparing the guidelines implementation report to President Director periodically;
- f. Open to consultation and facilitating Reporting of State Officials Assets announcement in the Company

The Head Office Compliance Division coordinated with the Compliance Function of Units, Subsidiaries, and Associates (AP/PA) to assist the Reporting of State Officials Assets in each unit.

Pejabat Wajib LHKPN

Officials Liable for Reporting of State Officials Assets

Pejabat Wajib Laport LHKPN sebagaimana diatur dalam SKB Nomor 004.K/021/DIR/2017 pasal 4 antara lain:

1. Dewan Komisaris Perusahaan
2. Direksi Perusahaan;
3. Wakil Perusahaan yang ditugaskan sebagai Direksi atau Komisaris di Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi;
4. Karyawan Perusahaan pada jenjang jabatan struktural yang meliputi Manajemen Atas, Manajemen Menengah, Manajemen Dasar dan *Supervisor* Atas;
5. Karyawan Perusahaan pada jenjang jabatan fungsional yang meliputi Fungsional 1, Fungsional 2, dan Fungsional 3; dan
6. Pejabat Perencana Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Pengadaan.

Jumlah Wajib LHKPN PJB mengalami pergerakan yang dinamis. Bidang Kepatuhan melakukan *monitoring* untuk mengetahui perubahan jumlah Wajib LHKPN. Daftar wajib LHKPN PJB sampai dengan akhir tahun 2019 berjumlah 779 dengan rincian sebagai berikut:

Officials liable for Reporting of the State Officials Assets as stipulated in SKB Number 004.K / 021 / DIR / 2017 article 4, including:

1. Board of Commissioners of the Company
2. Directors of the Company;
3. Company representatives assigned as Directors or Commissioners in Subsidiaries and Affiliated Companies;
4. Employees of the Company at structural levels which include Top Management, Middle Management, Basic Management, and Top Supervisor;
5. Employees of the Company at functional levels that include Functional 1, Functional 2, and Functional 3; and
6. Procurement Planning Officer and Procurement Implementing Officer.

The number of PJB's Officials liable for Reporting of the State Officials Assets shows dynamic changes. The Compliance Division monitors to identify changes in the number of those liable officials. At the end of 2019, the number of Liable Officials is 779 with the following details:

No.	Jenjang Jabatan Position Level	Jumlah Total
1	Komisaris PJB PJB Commissioners	6
2	Direktur PJB PJB Directors	6
3	Komisaris Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi Commissioners from Subsidiaries and Affiliates	3
4	Direktur Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi Directors from Subsidiaries and Affiliates	25
5	Manajemen Atas Top Management	2
6	Manajemen Menengah Middle-level Management	56
7	Manajemen Dasar Basic-level Management	151
8	Supervisor Atas Top Supervisor	408
9	Fungsional 1, 2, 3, 4 dan 5 Functional 1, 2, 3, 4 dan 5	122



Monitoring Pelaporan Wajib LHKPN Monitoring of Reporting of State Officials Assets

Bidang Kepatuhan melakukan *monitoring* melalui *e-filing* untuk memastikan pemenuhan akan kepatuhan PJB terhadap pelaporan LHKPN. Penyampaian LHKPN Tahun 2019 kepada KPK telah dilakukan secara tepat waktu oleh 779 Wajib LHKPN melalui *e-filing* atau telah mencapai 100% dari total Wajib LHKPN.

The Compliance Division carries out monitoring through *e-filing* to ensure compliance with PJB compliance with Official Asset reporting. The Report Submission in 2019 to KPK has been carried out timely by 779 officials through *e-filing* or has reached 100% of the total Liable Officials.

Benturan Kepentingan Conflict of Interest

Pengelolaan Benturan Kepentingan (*conflict of interest*) menjadi salah satu aspek penting dalam menekan potensi pelanggaran dalam kegiatan usaha Perusahaan. Benturan Kepentingan adalah sebuah situasi atau kondisi dimana seseorang dihadapkan pada perbedaan kepentingan yaitu ketika seseorang yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi/golongan atas setiap penggunaan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.

Conflict of interest management is an important aspect of suppressing potential violations in the Company's business activities. Conflict of Interest is a situation or condition where a person is faced with differences in interests, that is when someone who gets power and authority has or is suspected of having a personal / group interest in each use of power and authority he has so that it can affect the quality and performance that should be.

Sejalan dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011, Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan Perusahaan yang bersangkutan selain penghasilan yang sah. Perusahaan telah mengatur lebih lanjut ketentuan terkait benturan kepentingan dalam *Code of Conduct* PJB.

In line with SOE Ministry Regulation Number: PER-01 / MBU / 2011, Directors are prohibited from taking actions that have a conflict of interest and take personal benefits, either directly or indirectly from the decision-making and activities of the company concerned other than legitimate income. The company has further regulated the provisions related to conflicts of interest in the PJB Code of Conduct.

Ketentuan Terkait Benturan Kepentingan Policy on Conflict of Interest

Perusahaan mengelola potensi benturan kepentingan dari Insan PJB yang berpihak akibat pengaruh, hubungan dekat, ketergantungan, dan/atau pemberian gratifikasi melalui ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian izin, rekomendasi dan/atau persetujuan dari Insan PJB yang diskriminatif.
2. Pengangkatan Insan PJB berdasarkan hubungan dekat/ balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari Insan PJB lainnya atau pihak lainnya yang melanggar prosedur.
3. Pemilihan Mitra Bisnis oleh Insan PJB berdasarkan keputusan yang tidak profesional.
4. Menggunakan aset Perusahaan dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi.
5. Melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai norma, standar, dan prosedur.

Hal-hal yang harus dihindari karena menimbulkan benturan kepentingan, antara lain:

The Company manages the potential conflict of interest of the PJB Individuals who take sides due to influence, close relations, dependency, and / or gratification through the following provisions:

1. Granting permission, recommendations, and/or approval from discriminatory PJB Individuals.
2. PJB Individuals appointment based on close relationships/ remuneration/ recommendations/influence from other PJB Individuals or other parties who violate the procedure.
3. Business Partner selection by PJB Individuals is based on unprofessional decisions.
4. Using Company assets and confidential information for personal gain.
5. Assessment of the influence of other parties and not following norms, standards, and procedures.

The matters to avoid since they create a conflict of interest include:

1. Memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada dirisendiri, keluarga, kerabat maupun pihak lain atas beban Perusahaan.
2. Melakukan aktivitas luar dinas/tugas yang dapat mengurangi atau mempengaruhi independensi atau objektivitas pribadi maupun rekan kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
3. Berpartisipasi dalam setiap kegiatan pengadaan barang dan jasa dimana yang bersangkutan atau keluarganya mempunyai kepentingan finansial pada perusahaan penyedia/pembeli barang dan jasa tersebut.

1. Position Misconduct to receive special treatment to the relevant individual, family, relatives, or other parties at the expense of the Company.
2. External activities that can reduce or affect the independence or objectivity of personal and coworkers in carrying out work.
3. Involvement in the procurement of goods and services where the person concerned or his family has a financial interest in the company providing/buying the related goods and services.

Mekanisme Pelaporan Benturan Kepentingan Conflict of Interest Reporting Mechanism

Pengelolaan atas potensi benturan kepentingan menjadi tanggung jawab bersama insan Perusahaan. Apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan, maka Insan PJB wajib melaporkan hal tersebut melalui:

1. Atasan Langsung
Pelaporan melalui atasan langsung dilakukan apabila pelapor adalah Insan PJB yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi Benturan Kepentingan. Pelaporan dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada atasan langsung.
2. Sistem Pelaporan Pelanggaran/*Whistle Blowing System*
Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran *Whistleblowing System* dilakukan apabila pelapor adalah Insan PJB atau pihak-pihak lainnya (Pelanggan, Mitra Kerja dan Masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan di Perusahaan.

The management of potential conflicts of interest is the joint responsibility of all company individuals. If a Conflict of Interest situation occurs, the PJB Insurance Officer is obliged to report the matter through:

1. Direct Supervisor
Reporting through direct superiors is done if the reporter is a PJB member who is involved or has the potential to be directly involved in a conflict of interest situation. Reporting is carried out by submitting a Potential Conflict of Interest Statement to the direct supervisor.
2. Whistle Blowing Reporting System
Reporting through the Whistleblowing System Violation Reporting System is carried out if the reporter is a PJB Incident or other parties (Customers, Working Partners and the Community) who do not have direct involvement, but are aware of or potential Conflicts of Interest in the Company.

Sanksi Atas Pelanggaran Benturan Kepentingan Sanctions for Violation on Conflict of Interest

Perusahaan menindak tegas setiap pelanggaran akibat benturan kepentingan yang berpotensi merugikan PJB. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pedoman Benturan Kepentingan akan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

The company takes firm action on every violation due to a conflict of interest that has the potential to harm PJB. Violations of the provisions in the Conflict of Interest Guidelines will be subject to sanctions based on the provisions in force in the Company.

Pernyataan Tidak Memiliki Benturan Kepentingan Statement of No Conflict of Interest

Direksi dan Dewan Komisaris sebagai organ utama tata kelola Perusahaan memiliki wewenang yang besar dalam menentukan arah Perusahaan melalui proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan Perusahaan. Oleh karena itu, Direksi dan Dewan Komisaris harus membuat pernyataan bebas benturan kepentingan yang diperbaharui secara berkala setiap tahun. Pada tahun 2019, seluruh Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat telah menandatangani pernyataan bebas benturan kepentingan pada bulan Januari 2019.

The Board of Directors and the Board of Commissioners as the main organs of corporate governance have great authority in determining the direction of the Company through the decision-making process related to the management of the Company. Therefore, the Board of Directors and the Board of Commissioners must make a statement free of conflicts of interest which are updated regularly every year. In 2019, all Directors and Board of Commissioners in office have signed a statement free of conflicts of interest in January 2019.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Perusahaan telah membangun *Whistleblowing System* (WBS) sebagai salah satu perangkat dalam menopang pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. *Whistleblowing System* (WBS) merupakan suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama terkait penyampaian, pengelolaan dan tindak lanjut atas laporan mengenai dugaan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Insan PJB. Hal tersebut mempertegas komitmen Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha secara profesional dengan berlandaskan pada perilaku insan perusahaan yang sejalan dengan *Code of Conduct* dan budaya Perusahaan, guna mewujudkan pengelolaan bisnis yang berkelanjutan.

The company has established the Whistleblowing System (WBS) as a tool to support the implementation of Good Corporate Governance. Whistleblowing System (WBS) is a unit consisting of components or elements that are linked together related to the submission, management, and follow-up of reports regarding alleged violations committed by PJB Individuals. This affirms the Company's commitment to carrying out business activities in a professional manner in accordance with the behavior of the company's people in line with the Code of Conduct and the Company's culture, to achieve sustainable business management.

Kebijakan *Whistleblowing System*

Whistleblowing System Policy

Penerapan *Whistleblowing System* (WBS) telah didukung dengan kebijakan internal yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: 069.K/010/DIR/2010. Pada Tahun 2012, PJB melakukan revisi atas kebijakan WBS berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Direksi dan Dewan Komisaris Nomor: 095.K/010/DIR/2012 dan Nomor: 007.K/DK/PJB/2012.

The implementation of the Whistleblowing System (WBS) has been supported by internal policies determined in accordance with Directors' Decree Number: 069.K / 010 / DIR / 2010. In 2012, PJB revised the WBS policy in accordance with a Joint Decree (SKB) between the Board of Directors and the Board of Commissioners Number: 095.K / 010 / DIR / 2012 and Number: 007.K / DK / PJB / 2012.

Ruang lingkup kebijakan WBS mencakup antara lain 1). Latar Belakang, 2). Tujuan, Sasaran dan Manfaat, 3). Daftar Istilah yang Digunakan, 4). Proses Penanganan Laporan Pengaduan Pelanggaran, 5). Perlindungan Kepada Pelapor, 6). Pemberian Insentif, 7). Laporan Palsu, 8). Batas Waktu Pelaporan/ Pengaduan Pelanggaran, 9). Hubungan Antar Proses dalam WBS, 9) Dasar Hukum, 10). Referensi Hukum.

The scope of the WBS policy includes, among others 1). Background, 2). Objectives, Targets, and Benefits, 3). Glossary of Terms Used, 4). Process for Handling Reports of Violation Complaints, 5). Protection for the Reporting Party, 6). Providing Incentives, 7). Fake Reports, 8). Deadline for Reporting / Reporting Violations, 9). WBS Processes Interconnection, 9) Legal Basis, 10). Legal Reference.

Pengelola Pelaporan Pengaduan Pelanggaran

Whistleblowing Management

Perusahaan membentuk Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran dan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Karyawan (TP2DK) untuk penanganan lebih lanjut atas laporan pelanggaran khususnya yang dilakukan oleh Karyawan.

The Company established the Whistleblowing Management Committee and the Employee Discipline Violation Inspection Team for further handling of violation reports, especially those conducted by Employees.

1. Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran

Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran dibentuk dan diperbarui dengan Surat Keputusan Direksi Nomor: 037.K/020/DIR/2019 yang beranggotakan perwakilan dari Pengawasan Internal, Sumber Daya Manusia, Hukum, Keuangan dan fungsi lain yang diperlukan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya.

Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran bertugas untuk mengelola pelaporan/ pengaduan pelanggaran, antara lain:

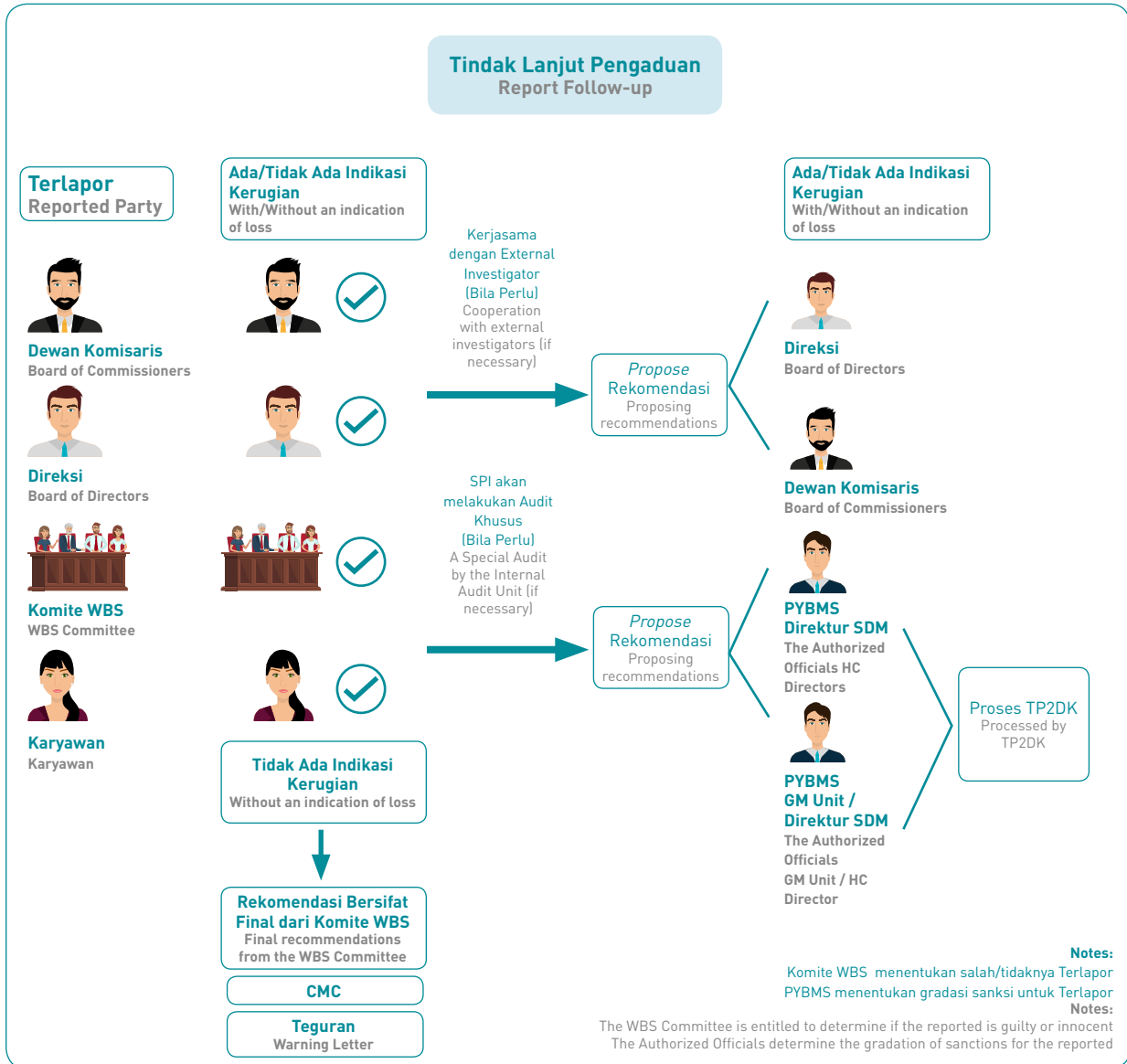
- Menerima pelaporan pelanggaran
- Menganalisa kecukupan bukti pendukung
- Menganalisa dan menyeleksi laporan pelanggaran untuk diproses lebih lanjut

1. Whistleblowing Management Committee

The Violation Complaints Management Committee was formed and updated with the Board of Directors Decree Number: 037.K / 020 / DIR / 2019 which consists of representatives from Internal Supervision, Human Resources, Law, Finance, and other functions required in accordance with their competence and expertise.

The Violation Complaints Management Committee must manage reporting/complaints of violations, including:

- Receive violation reporting
- Analyze the adequacy of supporting evidence
- Analyze and select reports of violations for further processing



Prosedur Pelaporan Pengaduan Pelanggaran Reporting Procedure for Violation Complaints

Indikasi pelanggaran yang dilaporkan melalui saluran media komunikasi WBS dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Perusahaan wajib menerima dan menyelesaikan pengaduan pelanggaran dari pelapor pihak internal maupun eksternal, baik yang mencantumkan identitas maupun yang tidak (anonim)
2. Pengaduan pelanggaran harus dilengkapi bukti pendukung.
3. Apabila pengaduan pelanggaran diajukan oleh badan hukum/ lembaga, maka selain dokumen diatas juga diserahkan dokumen lainnya, yaitu:
 - a. Fotokopi bukti identitas badan hukum/lembaga
 - b. Dokumen yang menyatakan bahwa pihak yang mengajukan pengaduan berwenang untuk mewakili lembaga atau badan tersebut.

The indication of violations reported through the WBS media channel passes through the following procedures:

1. The company is obliged to accept and resolve complaints of violations from internal and external parties, both those who include their identities or those who are not (anonymous)
2. Complaints must be followed by supporting evidence.
3. If the violation complaint is filed by a legal entity/institution, other documents above are also submitted other documents, namely:
 - a. Photocopy of proof of legal entity/institution identity
 - b. A document stating that the party filing the complaint is authorized to represent the agency or body.

4. Saluran pelaporan yang tersedia untuk melaporkan pelanggaran antara lain sebagai berikut:
 - a. Surat menyurat dengan alamat:
Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran
PT Pembangkitan Jawa Bali
Jalan Ketintang Baru Nomor 11 Surabaya 60231 Indonesia
 - b. Kotak Pengaduan di lobby utama gedung PT Pembangkitan Jawa-Bali Kantor Pusat
 - c. *Website* dengan alamat www.ptpjb.com/wbs
 - d. *Email* dengan alamat pengaduan@ptpjb.com
 - e. Telepon/*WhatsApp*/SMS dengan nomor: 08113388448

- 4) Reporting channels available to report violations include the following:
 - a. Mail:
Whistleblowing Management Committee
PT Pembangkitan Jawa Bali
Jalan Ketintang Baru No. 11 Surabaya 60231 Indonesia
 - b. Complaints Box in the main lobby of PT Pembangkit Jawa-Bali Head Office
 - c. Website: www.ptpjb.com/wbs
 - d. Email: complaint@ptpjb.com
 - e. Telephone / WhatsApp / SMS: 08113388448

Verifikasi Laporan Pengaduan

Report Verification

Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran melakukan verifikasi atas laporan pengaduan yang diterima dan akan memutuskan perlu tidaknya dilakukan investigasi lebih lanjut atas laporan pengaduan pelanggaran dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa laporan pengaduan tidak benar dan tidak ada bukti permulaan yang cukup maka tidak akan diproses lebih lanjut. Namun, bila hasil verifikasi menunjukkan adanya indikasi pelanggaran yang disertai bukti permulaan yang cukup, maka pengaduan dapat diproses ke tahap investigasi.

The Violation Complaints Management Committee verifies the reports of complaints received and will decide whether further investigation of the violations complaint report is required within 30 (thirty) days and can be extended for a maximum of 30 (thirty) days.

If the verification results show that the complaint report is incorrect and there is not enough preliminary evidence then it will not be processed further. However, if the verification results show an indication of a violation accompanied by sufficient preliminary evidence, then the complaint can be processed into the investigation stage.

Tindak Lanjut Laporan Pengaduan

Report Follow-up

Anggota Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran mendapatkan akses pelaporan langsung kepada Direktur Utama dan Komisaris Utama. Dalam menganalisa dan menyeleksi laporan pelanggaran untuk diproses lebih lanjut, Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran harus memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. Apabila yang dilaporkan melakukan pelanggaran adalah Dewan Komisaris maka Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran melaporkan ringkasan kasus, hasil investigasi awal serta usulan rekomendasi kepada Direksi untuk proses lebih lanjut. Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran dapat bekerjasama dengan Investigator Eksternal bila diperlukan.
- b. Apabila yang dilaporkan melakukan pelanggaran adalah anggota Direksi, maka Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran melaporkan ringkasan kasus, hasil investigasi awal serta usulan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk proses lebih lanjut. Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran dapat bekerjasama dengan *Investigator* Eksternal bila diperlukan.

Members of the Violation Complaints Management Committee have access to reporting directly to the President Director and President Commissioner. In analyzing and selecting violation reports for further processing, the Violation Complaints Management Committee must pay attention to the following:

- a. If the Board of Commissioners is reported to have committed violations, the Violation Complaints Management Committee reports a summary of the case, the results of the initial investigation, and the recommendation recommendations to the Board of Directors for further proceedings. The Violation Complaints Management Committee can work with an External Investigator if necessary.
- b. If the violator is reported to be a member of the Board of Directors, the Violation Complaints Management Committee reports a summary of the case, the results of the initial investigation, and proposed recommendations to the Board of Commissioners for further proceedings. The Violation Complaints Management Committee can work with an External Investigator if necessary.

c. Apabila yang dilaporkan melakukan pelanggaran adalah anggota Organ Pendukung Dewan Komisaris maka Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran melaporkan ringkasan kasus, hasil investigasi awal serta usulan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk proses lebih lanjut.

d. Apabila yang dilaporkan melakukan pelanggaran adalah Karyawan PJB maka Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran melaporkan ringkasan kasus, hasil investigasi awal serta usulan rekomendasi kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Sanksi (PYBMS) (Direksi atau *General Manajer* di Unit), dan selanjutnya Direksi/*General Manajer* (GM) menugaskan TP2DK untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apabila berdasarkan pertimbangan jenis pelanggaran bersifat kompleks, rumit dan memerlukan analisa bukti-bukti yang lebih mendalam maka Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran dapat meminta kepada Direksi untuk dilakukan audit khusus terlebih dahulu (yang dilakukan oleh Auditor Internal maupun eksternal), sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh TP2DK sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Apabila yang dilaporkan melakukan pelanggaran adalah Anggota Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran maka yang bersangkutan harus dinon-aktifkan untuk sementara sampai menunggu hasil verifikasi dan Investigasi. Apabila tidak terbukti, maka yang bersangkutan akan diaktifkan kembali, namun apabila terbukti maka Direksi dapat melakukan pergantian keanggotaan Komite.

c. If the reported violator is a member of the Board of Commissioners' Supporting Organs, the Violation Complaints Management Committee reports a summary of the case, the results of the initial investigation as well as the proposed recommendations to the Board of Commissioners for further proceedings.

d. If the reported violation is a PJB Employee then the Violation Complaints Management Committee reports a summary of the case, the results of the initial investigation and proposed recommendations to the Authorized Authority (PYBMS) (Directors or General Managers in the Unit), and subsequently Directors / General Managers (GMs) assign TP2DK to carry out further inspection. If in accordance with the consideration of the types of violations that are complex, complex and require a more in-depth analysis of the evidence, the Violation Complaints Management Committee may ask the Board of Directors for a special audit first (conducted by Internal and External Auditors), before further examination by TP2DK according to the current arrangement.

e. If the reported violator is a Member of the Violation Complaints Management Committee, the concerned must be temporarily deactivated until awaiting the results of verification and investigation. If it is not proven, then the person concerned will be reactivated, but if it is proven, the Directors can change the Committee's membership.

Investigasi Laporan Pelanggaran Report Investigation

Pada proses Investigasi, TP2DK melakukan investigasi lebih lanjut terhadap substansi pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan. dalam hal investigasi terbukti adanya pelanggaran, maka TP2DK memberikan rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan untuk diputuskan oleh PYBMS dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang peraturan disiplin karyawan perusahaan. Akan tetapi bila tidak terbukti, maka proses investigasi dihentikan dan laporan pelanggaran tidak dilanjutkan.

Laporan atas indikasi pelanggaran yang berdasarkan hasil Audit Khusus oleh Auditor Internal maupun eksternal dan atau investigasi oleh TP2DK apabila ditemukan bukti tambahan yang menyebabkan terjadinya penambahan terlapor dari pihak Direksi dan atau Dewan Komisaris, maka investigasi lebih lanjut dapat dilakukan oleh Eksternal Investigator bila diperlukan untuk menjaga independensi investigasi.

Apabila hasil investigasi terbukti adanya pelanggaran yang mengarah ke tindak pidana, maka dapat ditindaklanjuti proses hukum yang berlaku kepada lembaga penegak hukum dengan Direksi atau Dewan Komisaris sebagai pejabat penyerah perkara.

In the Investigation process, TP2DK conducts further investigations on the substance of violations committed by employees. in case the investigation is proven to be a violation, TP2DK provides a recommendation for sanctions against violations committed to being decided by PYBMS in accordance with the provisions governing the disciplinary rules of the company's employees. However, if it is not proven, the investigation process is then stopped and the violation report is not continued.

Reports on indications of violations in accordance with the results of Special Audits by Internal and External Auditors and or investigations by TP2DK if additional evidence is found that causes additional reports from the Board of Directors and / or Board of Commissioners, then further investigations can be carried out by an External Investigator (if necessary) to prevent conflict of interest during investigation.

If the results of the investigation prove to be a violation that leads to a criminal offense, then the legal process can be followed up with the applicable law enforcement agencies with the Board of Directors or the Board of Commissioners as case surrender officials.

Sosialisasi *Whistleblowing System* Whistleblowing System Socialization

Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman dan mendorong kesadaran mengenai kebijakan dan penerapan WBS kepada pihak internal maupun eksternal Perusahaan. Untuk pihak internal, sosialisasi dilakukan melalui berbagai media antara lain forum tatap muka, *website*, dan Laporan Tahunan. Sedangkan sosialisasi kepada pihak eksternal melalui *website*, Laporan Tahunan dan *Supplier Gathering* atau forum lainnya.

The socialization was carried out to provide the understanding and encourage awareness about the policies and implementation of WBS to the internal and external parties of the Company. For internal parties, socialization is carried out through various media including face-to-face forums, websites, and Annual Reports. While socialization to external parties through the website, Annual Report and Supplier Gathering, or other forums.

Perlindungan Terhadap Pelapor Whistleblower Protection

Perusahaan mendorong siapa saja untuk menyampaikan pengaduan atas indikasi pelanggaran yang terjadi dan berupaya meminimalisir potensi adanya intimidasi atau perlakuan tidak baik kepada pelapor. Oleh karena itu, PJB mengatur kebijakan perlindungan terhadap pelapor yang meliputi aspek sebagai berikut:

1. Menjamin perlindungan kerahasiaan atas identitas dari pelapor dan akan menggunakan berbagai cara untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong pelaporan pelanggaran yang terjadi di PJB dan menjamin keamanan pelapor maupun keluarganya.
2. Semua laporan pelanggaran akan dijamin kerahasiaan dan keamanannya oleh Perusahaan. Bila pelapor menyertakan identitasnya secara jelas ia juga dijamin haknya untuk memperoleh informasi mengenai tindak lanjut atas laporannya. Hal ini sebagai bukti komitmen Perusahaan dalam melindungi pelapor.
3. Perlindungan catatan yang merugikan dalam file data pribadinya.
4. Pemecatan yang dilakukan secara tidak adil.
5. Penurunan jabatan atau pangkat.
6. Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuk.
7. Catatan yang merugikan dalam dokumen data pribadi pelapor (*personal file record*).

Selain itu, mengacu pada Pasal 5 PP No.57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, perlindungan diberikan kepada pelapor berupa:

1. Perlindungan dari tuntutan pidana dan/atau perdata.
2. Perlindungan atas keamanan pribadi, dan/atau keluarga Pelapor dari ancaman fisik dan/atau mental.
3. Perlindungan terhadap harta Pelapor.
4. Perahasiaan dan penyamaran identitas Pelapor.
5. Pemberian keterangan tanpa bertatap.

Pelapor juga dapat meminta bantuan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sesuai UU No.13 tahun 2006.

The company supports public complaint submission on violation indications as well as minimizes the potential for intimidation or mistreatment to the Whistleblower. Therefore, PJB regulates the policy of protection for whistleblowers covering the following aspects:

1. Ensure the protection of confidentiality of the Whistleblower's identity and use various means to maintain the confidentiality of the Whistleblower's identity. This is intended to support the violations reporting within PJB and protect the Whistleblower and his/her family.
2. All reports of violations will be guaranteed confidentiality and security by the Company. If the Whistleblower includes his/her identity clearly, he/she is also guaranteed the right to obtain information about the follow-up on his/her report. This is proof of the Company's commitment to Whistleblower protection.
3. Protection of adverse records in his/her personal data file.
4. Unfair dismissal.
5. Demotion or rank.
6. Harassment or discrimination in any form.
7. Adverse records in the Whistleblower's data document (*personal file record*).

Additionally, referring to Article 5 PP No.57 of 2003 concerning Procedures for Special Protection for Whistleblowers and Witnesses in Money Laundering, protection is given to Whistleblowers in the form of:

1. Protection from criminal and/or civil claims.
2. Protection of personal safety, and / or family of the Reporting Party from physical and / or mental threats.
3. Protection of the Whistleblower's assets.
4. Confidentiality of the Whistleblower's identity.
5. Indirect information disclosure.

Reporting parties can also request assistance from the Witness and Victim Protection Agency (LPSK), following Law No.13 of 2006.

Kebijakan perlindungan dan jaminan kerahasiaan tidak diberikan kepada Pelapor yang terbukti melakukan pelaporan palsu dan/atau fitnah. Apabila hasil investigasi menyimpulkan Pelaporan Pelanggaran yang disampaikan merupakan laporan palsu, fitnah, tanpa dasar yang jelas, maka Pelapor dapat digugat balik atau dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau peraturan internal Perusahaan.

A policy of protection and guarantee of confidentiality is not provided to Whistleblowers who are proven to state falsely and/or defamation reporting. If the investigation results conclude that the Whistleblower is a false, defamatory report without clear proof, then the Whistleblower may be sued back or subject to sanctions in accordance with the applicable laws and regulations or internal regulations of the Company.

Insentif Bagi Pelapor Incentives for Whistleblowers

Perusahaan dapat memberikan penghargaan/ insentif kepada Pelapor atas pelanggaran yang dapat dibuktikan sehingga aset/ keuangan Perusahaan dapat diselamatkan. Bentuk dan besarnya penghargaan yang diberikan ditetapkan berdasarkan kebijakan Direksi.

The Company grants the Whistleblower rewards/incentives for the proven violations since the Company's assets/finances can be secured. The form and amount of the reward given are in accordance with the Board of Directors' policy.

Pengaduan dan Penanganan Pelaporan Complaints and Reporting Handling

Sampai dengan akhir tahun 2019, jumlah pengaduan WBS yang masuk sebanyak 4 (empat) dan berdasarkan verifikasi yang masuk ke tahap tindak lanjut sebanyak 4 (empat) laporan pelanggaran. Pengaduan dan penanganan pelaporan sepanjang tahun 2019 adalah sebagai berikut :

As of the end of 2019, the number of WBS complaints received was 4 (four) and after verified, the complaints in the follow-up stage were 4 (four) reports. Complaints and handling of reports in 2019 are as follows:

Pengaduan dan Penanganan Pelaporan Complaints and Reports Handling

No	Pelapor Whistleblower	Kategori Laporan Pelanggaran Violation Category	Penanganan Report Handling	Sanksi/Tindak Lanjut Pengaduan yang telah Selesai Sanctions/Finished Follow-up
1	Vendor	Pelanggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa Violations in the process of procurement of goods and services	1. Komite WBS menghubungi Pelapor untuk melakukan verifikasi laporan dan meminta Pelapor mengirimkan bukti-bukti; 2. Komite WBS menerima bukti dari Pelapor dan melakukan pembahasan pada rapat Komite WBS tanggal 15 Maret 2019 dengan hasil perlu dilakukan pemanggilan kepada Pelapor dan Terlapor untuk konfirmasi dan klarifikasi; 3. Komite WBS memanggil Pelapor, Terlapor dan beberapa pihak terkait untuk konfirmasi dan klarifikasi.	1. Komite WBS meminta atasan Terlapor untuk melakukan rekonsiliasi dengan vendor terkait pengadaan tersebut dan menuangkan hasilnya dalam Berita Acara Rekonsiliasi; 2. Komite WBS memberi rekomendasi kepada atasan Terlapor untuk berkoordinasi dengan Tim Pemeriksa Kualitas Barang dan Jasa untuk segera menerbitkan BAPB atas pengadaan dimaksud berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi sebagai dasar memproses tagihan pembayaran. 3. Atasan Terlapor telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan dengan menerbitkan BAPB atas pengadaan dimaksud berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi sebagai dasar memproses tagihan pembayaran, sehingga Komite WBS menyatakan status pengaduan adalah 'selesai'.

No	Pelapor Whistleblower	Kategori Laporan Pelanggaran Violation Category	Penanganan Report Handling	Sanksi/Tindak Lanjut Pengaduan Pengaduan yang telah Selesai Sanctions/Finished Follow-up
			- The WBS Committee receives evidence from the Whistleblower and conducts a discussion at the WBS Committee meeting on March 15, 2019 with the result that requires to call the Whistleblower and the Reported Party for confirmation and clarification; - The WBS Committee discusses with the Whistleblower, the Reported Party and several related parties for confirmation and clarification.	- The WBS Committee asked the Reported Party's supervisor to reconcile with the vendor related to the procurement and put the results in the Minutes of Reconciliation; - The WBS Committee recommends that the Reported Party's superiors coordinate with the Goods and Services Quality Inspection Team to immediately issue the BAPB for the procurement referred to in accordance with the Minutes of Reconciliation as the basis for processing payment bills. - The Reported Party's superior has followed up on the recommendation by issuing a BAPB for the procurement referred to in the Minutes of Reconciliation as the basis for processing payment bills, so that the WBS Committee stated the status of the complaint as 'finished'.
2	Vendor	Pelanggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa Violations in the process of procurement of goods and services	- Komite WBS menghubungi Pelapor untuk melakukan verifikasi laporan dan meminta Pelapor mengirimkan bukti-bukti; - Komite WBS menerima bukti dari Pelapor serta melakukan konfirmasi, klarifikasi dan reviu; - The WBS Committee contacts the Whistleblower to verify the report and asks the Reporting Party to send evidence; - The WBS Committee receives evidence from the Whistleblower and confirms, clarifies and reviews;	- Berdasarkan hasil konfirmasi, klarifikasi dan reviu yang dilakukan oleh Komite WBS, diketahui bahwa Terlapor telah memproses tagihan tersebut hingga terbayar. - Sehubungan dengan hal tersebut maka Komite WBS menyatakan status pengaduan adalah 'selesai'. - In accordance with the results of the confirmation, clarification and review conducted by the WBS Committee, it is known that the Reported Party has processed the bill until it has been paid. - Therefore, the WBS Committee stated the status of the complaint as finished'.
3	Vendor	Pelanggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa Violations in the process of procurement of goods and services	- Komite WBS menghubungi Pelapor untuk melakukan verifikasi laporan dan meminta Pelapor mengirimkan bukti-bukti; - Komite WBS menerima bukti dari Pelapor serta melakukan konfirmasi, klarifikasi dan reviu; - The WBS Committee contacts the Whistleblower to verify the report and asks the Reporting Party to send evidence; - The WBS Committee receives evidence from the Whistleblower and confirms, clarifies and reviews;	- Berdasarkan hasil konfirmasi, klarifikasi dan reviu yang dilakukan oleh Komite WBS, diketahui bahwa bukti pendukung yang ada tidak cukup menunjukkan adanya pelanggaran. - Sehubungan dengan hal tersebut maka Komite WBS menyatakan status pengaduan adalah 'tidak dapat ditindaklanjuti'. - In accordance with the results of the confirmation, clarification and review conducted by the WBS Committee, it is known that the supporting evidence is insufficient to indicate a violation. - Therefore, the WBS Committee stated that the status of the complaint as 'not actionable'.



No	Pelapor Whistleblower	Kategori Laporan Pelanggaran Violation Category	Penanganan Report Handling	Sanksi/Tindak Lanjut Pengaduan yang telah Selesai Sanctions/Finished Follow-up
4	Perorangan	Suap/ Gratifikasi Bribery/Gratuity	1. Komite WBS menghubungi Pelapor untuk melakukan verifikasi laporan dan meminta Pelapor mengirimkan bukti-bukti; 2. Komite WBS menerima bukti dari Pelapor dan melakukan pembahasan pada rapat Komite WBS tanggal 23 Oktober 2019 dengan hasil perlu dilakukan pemanggilan kepada Pelapor dan Terlapor untuk konfirmasi dan klarifikasi; 3. Komite WBS memanggil Pelapor, Terlapor dan beberapa pihak terkait untuk konfirmasi dan klarifikasi. 1. The WBS Committee contacts the Whistleblower to verify the report and asks the Whistleblower to send evidence; 2. The WBS Committee receives evidence from the Whistleblower and conducts a discussion at the WBS Committee meeting on October 23, 2019, with the result that requires to call the Whistleblower and the Reported Party for confirmation and clarification; 3. The WBS Committee discusses with the Whistleblower, the Reported Party and several related parties for confirmation and clarification.	1. Komite WBS memberi rekomendasi kepada GM Unit selaku Pihak yang Berwenang Memberikan Sanksi (PYBMS) untuk: a. Menugaskan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Karyawan (TP2DK) Unit untuk memproses Terlapor atas pelanggaran yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku; b. Menyampaikan kepada manajemen Anak Perusahaan untuk memproses 2 (dua) staf yang merupakan karyawan organik Anak Perusahaan tersebut atas pelanggaran yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku; c. Memberikan surat teguran kepada vendor yang terbukti memberikan gratifikasi berupa komisi/fee kepada Pihak Terlapor; d. Mereview kembali posisi seluruh pejabat kunci terkait pada pengadaan tersebut serta melakukan reposisi jika terbukti memiliki keterkaitan; 2. Sehubungan dengan proses tindak lanjut rekomendasi tersebut oleh GM Unit, maka status pengaduan dinyatakan 'proses tindak lanjut'. 1. The WBS Committee provides recommendations to the GM Unit as the Authorized Officer to Give Sanctions (PYBMS) to: a. Assign the Employee Discipline Violation Inspection Team to process the Reported Party for violations committed in accordance with applicable provisions; b. Tell the management of the Subsidiary to process 2 (two) staff who are organic employees of the Subsidiary for violations committed in accordance with applicable regulations; c. Provide reprimand letters to vendors proven to provide gratuities in the form of commissions/fees to the Reported Party; d. Reviewing the position of all key officials involved in the procurement and repositioning if proven relevant; 2. In connection with the process of following up the recommendation by the GM Unit, the status of the complaint is stated as 'follow-up process'.

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Whistleblowing System

Monitoring and Evaluation of the Whistleblowing System

Perusahaan memastikan efektivitas penerapan *Whistleblowing System* dengan melakukan monitoring secara berkala. Selain itu, dilakukan evaluasi penerapan *Whistleblowing System* paling sedikit satu tahun sekali untuk meningkatkan kualitas seluruh perangkat pendukung dan penerapannya. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Direksi melalui Satuan Pengawasan Intern atau dapat menggunakan pihak luar yang independen. Hasil monitoring dan evaluasi dituangkan dalam bentuk laporan kepada Direktur Utama.

The company ensures the effectiveness of the *Whistleblowing System* by periodic monitoring. Also, an evaluation for the *Whistleblowing System* is conducted at least once a year to improve the quality of all supporting matters. Monitoring and evaluation are run by the Board of Directors through the Internal Audit Unit or independent external parties. The results of monitoring and evaluation are compiled in the form of a report to the President Director.

PERKARA PENTING IMPORTANT CASES

Perusahaan menyelesaikan setiap perkara penting yang dihadapi yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan. Perkara penting yang dimasuk adalah permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat. PJB berupaya meminimalisir potensi munculnya permasalahan hukum serta menyelesaikan setiap permasalahan hukum yang dihadapi Perusahaan.

The Company resolves every important case that involves the Company's business activities. The important cases are legal issues faced by companies, subsidiaries, as well as the current members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors. PJB seeks to minimize the potential for legal issues and resolve any legal issues involving the Company.

Perkara Penting yang sedang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang Sedang Menjabat Important Cases Faced by Current Commissioners and Directors

Selama tahun 2019, tidak terdapat permasalahan hukum yang dihadapi oleh Dewan Komisaris maupun Direksi PJB yang sedang menjabat, baik perdata maupun pidana.

During 2019, there were no legal issues, both civil and criminal, faced by the current PJB's Board of Commissioners and Board of Directors.

Perkara Hukum Perusahaan Corporate Legal Cases

Perkara hukum yang dihadapi oleh PJB dibedakan menjadi beberapa hal, yaitu: permasalahan hukum yang timbul sejalan dengan proses perijinan yang ada di Perusahaan, permasalahan hukum yang timbul karena adanya sengketa perdata dan permasalahan hukum yang timbul sebagai akibat dari adanya dugaan tindak pidana yang terkait dengan proses bisnis Perusahaan. Berikut ini adalah kasus hukum yang dihadapi PJB selama tahun 2019:

Legal cases faced by PJB can be divided into 4 categories: legal issues that arise in line with the existing licensing processes in the company, legal issues that arise due to civil disputes, and legal issues that arise as a result of alleged criminal acts related to the process Company business. The following are legal cases in 2019:

Jenis Perkara Case Type	Total	Selesai (Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap) Settled (Has Permanent Legal Force)	Proses Penyelesaian In the Settlement Process
Perkara Perdata/ Arbitrase Civil / Arbitration	4	3	1
Kasus Korupsi Corruption	-	-	-
Kasus Hubungan Industrial Industrial Relations	-	-	-
Kasus Lain-lain Other Cases	-	-	-



Berikut ini adalah penjelasan kasus hukum yang dihadapi PJB selama tahun 2019:

The following describes the explanation of the legal cases faced by PJB in 2019:

Para Pihak Parties	Pokok Perkara Lawsuits	Status Perkara Case Status	Upaya Manajemen Corporate Actions	Pengaruh/ Risiko Terhadap Perusahaan Impact/Risks on the Company
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum No. 382/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel (Muara Tawar) Penggugat: 1. Ahli Waris Tjotjong Tergugat: 1. PT PLN (Persero) 2. PT Pembangunan Jawa-Bali Turut Tergugat: 1. Ahli Waris Soleh 2. Bupati Bekasi 3. BPN 4. Camat Tarumajaya 5. Kades Segara Jaya 6. KPK	PLN melakukan pembebasan tanah untuk keperluan PLTU Muara Tawar. Para Penggugat merasa tanah yang digunakan oleh PLN dan PJB untuk keperluan PLTU Muara Tawar adalah milik para penggugat seluas 21.160 M2 dan 19.800 M2. Atas dasar hal tersebut Para Penggugat menuntut ganti kerugian kepada PLN dan PJB. Saat ini Tanah digunakan oleh PT PJB untuk operasional unit PLTU Muara Tawar.	Selesai, sidang putusan per tgl 12 Maret 2020 memenangkan PJB/PLN dengan menolak gugatan para penggugat.	1. Berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) terkait persiapan alat bukti. 2. Manajemen menjalankan seluruh rangkaian proses persidangan.	Apabila Gugatan Penggugat diterima / dimenangkan, maka PT PJB harus membayar ganti kerugian kepada para penggugat senilai Rp54.196.000.000,- (lima puluh empat milyar seratus sembilan puluh enam juta rupiah)
Lawsuit Against Law No. 382 / Pdt.G / 2018 / PN Jkt.Sel (Muara Tawar) Plaintiff: 1. Heirs of Tjotjong Defendant: 1. PT PLN (Persero) 2. PT Pembangunan Jawa-Bali Co-Defendant: 1. Soleh's heir 2. Bekasi Regent 3. BPN 4. Head of Tarumajaya District 5. Head of Segara Jaya 6. KPK	PLN conducts land acquisition for the needs of Muara Tawar CFPP. The Plaintiffs claimed that the land used by PLN and PJB for Muara Tawar CFPP was owned by the plaintiffs covering 21,160 M2 and 19,800 M2. Based on this, the Plaintiffs demanded compensation from PLN and PJB. At present the land is used by PT PJB for the operation of the Muara Tawar CFPP unit.	Completed, the verdict hearing on March 12, 2020, won the PJB / PLN by rejecting the plaintiff's claim.	1. Coordinate with PT PLN (Persero) regarding the preparation of evidence. 2. Management runs the entire set of court proceedings.	If the Plaintiff's Lawsuit is accepted/won, PT PJB must pay compensation to the plaintiffs of Rp54,196,000,000 (fifty-four billion one hundred ninety-six million rupiah)
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum No. 72/Pdt.G/2019/PN Ckr (Muara Tawar) Penggugat: 1. Ahli Waris Ganeng Tergugat: 1. PT PJB 2. BPN Kab. Bekasi 3. PT PLN (Persero) Turut Tergugat: 1. Kementerian BUMN	PLN melakukan pembebasan tanah untuk keperluan PLTU Muara Tawar. Pada saat pembebasan, Para Penggugat merasa PLN tidak melakukan pembebasan tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan karena PLN tidak pernah melakukan musyawarah. PLN juga dianggap belum melakukan pembayaran ganti kerugian kepada Para Penggugat. Saat ini Tanah digunakan oleh PT PJB untuk operasional Add On Unit PLTGU Muara Tawar.	Selesai, sidang putusan memenangkan PJB/PLN dengan gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima/ Niet Ontvankelijke Veerkhard	1. Berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) terkait persiapan alat bukti. 2. Manajemen menjalankan seluruh rangkaian proses persidangan.	Apabila Gugatan Penggugat diterima / dimenangkan, maka PT PJB harus membayar ganti kerugian kepada para penggugat senilai Rp19.182.000.000,- (sembilan belas milyar seratus delapan puluh dua juta rupiah)

Para Pihak Parties	Pokok Perkara Lawsuits	Status Perkara Case Status	Upaya Manajemen Corporate Actions	Pengaruh/ Risiko Terhadap Perusahaan Impact/Risks on the Company
Lawsuit Against Law No. 72 / Pdt.G / 2019/PNCkr (Muara Tawar) Plaintiff: 1. Heirs of Ganeng Defendant: 1. PT PJB 2. BPN Kab. Bekasi 3. PT PLN (Persero) Co-Defendant: 1. SOE Ministry	PLN conducts land acquisition for the needs of the Muara Tawar power plant. At the time of the acquisition, the Plaintiffs claimed that PLN did not acquire the land based on the provisions of the law since PLN had never held deliberations. PLN is also deemed not to have made compensation payments to the Plaintiffs. Currently, the land is used by PT PJB for the operation of the Muara Tawar GTPP Add-On Unit.	Completed, the court decision to win PJB / PLN with the Plaintiff's claim was declared Unacceptable / Niet Ontvankelijk Veerkland	1. Coordinate with PT PLN (Persero) regarding the preparation of evidence. 2. Management runs the entire set of court proceedings.	If the Plaintiff's Lawsuit is accepted/won, PT PJB must pay compensation to the plaintiffs of Rp.19,182,000,000 (nineteen billion one hundred eighty-two million rupiah)
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum No. 21/Pdt.G/2019/PN Ckr (Muara Tawar) Penggugat: 1. Ir. Ronald Manurung dkk. Tergugat: 1. Budiawan Susantio 2. PT PLN (Persero) cq. PT Pembangkitan Jawa-Bali Turut Tergugat: 1. BPN Kab. Bekasi 2. Pemda Bekasi 3. Pemerintah Desa Segara Jaya 4. Ahli Waris H. Serih Bin Madang 5. PPAT Sementara	PLN melakukan pembebasan tanah untuk membangun proyek pipa gas guna keperluan supply gas PLTGU Muara Tawar sepanjang 7,2 km seluas 11.918 M2; Dari sebagian tanah yang dibebaskan tersebut terdapat gugatan dari penggugat (Ir. Ronald Manurung dkk) yang pada intinya menyatakan bahwa tanah tersebut tidak dialihkan haknya atau dijual kepada siapapun termasuk PLN.	Pada Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Menolak Gugatan Penggugat. Kemudian Penggugat Mengajukan Tahapan Banding kepada Pengadilan Tinggi Jawa Barat	Manajemen menjalankan seluruh rangkaian proses persidangan pada tingkat Pertama dan Banding, serta saat ini terus berkoordinasi dengan Panitera Pengadilan setempat sampai dengan keluarnya putusan banding.	Apabila Gugatan Penggugat diterima, maka PT PJB harus membayar ganti kerugian kepada para penggugat senilai Rp 33.836.000.000,- (tiga puluh tiga milyar delapan ratus tiga puluh enam juta rupiah)
Lawsuit Against Law No. 21 / Pdt.G / 2019 / PN Ckr (Muara Tawar) Plaintiff: 1. Ir. Ronald Manurung et al. Defendant: 1. Budiawan Susantio 2. PT PLN (Persero) cq. PT Pembangkitan Jawa-Bali Co-Defendant: 1. BPN Kab. Bekasi 2. Bekasi Local Government 3. Segara Jaya Village Government 4. Heir of H. Serih Bin Madang 5. PPAT (Temporary)	PLN undertakes land acquisition to build a gas pipeline project to supply gas supplies for the Muara Tawar GTPP of 7.2 km covering an area of 11,918 M2; From the part of the acquired land, there was a lawsuit from the plaintiff (Ir. Ronald Manurung) which stated that the land was not transferred or sold to anyone including PLN.	At the Court of First Instance, the Assembly Refused the Plaintiff's Lawsuit. Then the Plaintiff Filed an Appeal Stage to the West Java High Court	The management carries out the entire set of proceedings at the First and Appeal levels and currently continues to coordinate with the local Court Clerk until the decision of the appeal is issued.	If the Plaintiff's Lawsuit is accepted, PT PJB must pay compensation to the plaintiffs of Rp 33,836,000,000 (thirty-three billion eight hundred thirty-six million rupiah)



Para Pihak Parties	Pokok Perkara Lawsuits	Status Perkara Case Status	Upaya Manajemen Corporate Actions	Pengaruh/ Risiko Terhadap Perusahaan Impact/Risks on the Company
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Tanah Area Konstruksi PLTA Penggugat 1. Ahli Waris Emad bin Uci Tergugat 1. Perum Perhutani (Tergugat I) 2. PT PJB (Tergugat II) 3. BPN (Tergugat III)	Proses Gugatan di PN, PT & MA telah berkekuatan hukum tetap sesuai Putusan MA No. 737.PK/PDT/2010 1 Agustus 2012, dg amar putusan : - Menghukum Tergugat I (Perum Perhutani) untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.8.890.000.000, -Menghukum Tergugat I (Perum Perhutani) untuk membayar ganti rugi tegakan sebesar Rp. 465.600.000,-	Sampai saat ini Tergugat I (Perum Perhutani) Tidak Menjalankan Putusan/ Tidak membayar Ganti Rugi kepada Ahli Waris (Penggugat) sehingga pada 28 Okt 2013 Tanah PT PJB disita eksekusi oleh PN Purwakarta dan PT PJB tidak dapat melakukan perpanjangan / pembaruan HGB.	1. Manajemen telah melakukan permintaan Legal Opinion (LO) kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) 2. Berkoordinasi dengan PT PLN untuk dapat meminta Kementerian BUMN memfasilitasi pembahasan penyelesaian permasalahan dengan Perhutani	Terganggunya operasional Unit Pembangkit PLTA Cirata akibat dari aksi unjuk rasa Ahli Waris/ Penggugat PT PJB tidak dapat melakukan perpanjangan / pembaruan HGB.
Lawsuit Against Land Law in HPP's Construction Area Plaintiff 1. Heirs of Emad bin Uci Defendant 1. Perum Perhutani (Defendant I) 2. PT PJB (Defendant II) 3. BPN (Defendant III)	The lawsuit process in PN, PT & MA has a permanent legal force according to MA Decision No. 737.PK/PDT/2010 August 1, 2012, with a ruling: - Punishing Defendant I (Perum Perhutani) to pay compensation amounting to Rp.8,890,000,000, - Punish Defendant I (Perum Perhutani) for paying compensation in the amount of Rp. 465,600,000.	Currently, Defendant I (Perum Perhutani) Not Carrying Out Decision / Not paying Compensation to Heirs (Plaintiff) so that on Oct. 28, 2013, PT PJB's land was confiscated by execution by Purwakarta District Court and PT PJB cannot extend/renew the HGB.	1. Management has made a request for Legal Opinion (LO) to the Vice Chairperson Attorney General for Civil and State Administration (Jamdatun) 2. Coordinate with PT PLN to request the SOE Ministry to facilitate discussion of problem resolution with Perhutani	The disruption of the operation of the Cirata HPP is a result of the action of the Heir / Plaintiff demonstration PT PJB cannot extend/renew the HGB.

Perkara Hukum Anak Perusahaan Legal Cases of Subsidiary

Selama tahun 2019, tidak terdapat permasalahan hukum yang dihadapi oleh Anak Perusahaan PJB baik perdata maupun pidana.

During 2019, there were no legal problems faced by PJB Subsidiaries, both civil and criminal.

Sanksi Administrasi Kepada Perusahaan, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota Direksi oleh Otoritas Terkait Administrative Sanctions by the Related Authority on the Company, the Board of Commissioners, and the Board of Directors

Selama tahun 2019, tidak terdapat permasalahan hukum yang dihadapi oleh Anak Perusahaan PJB baik perdata maupun pidana.

During 2019, there were no administrative sanctions imposed on PJB, members of the Board of Commissioners, and members of the Board of Directors by the Related Authority.

PENGADAAN BARANG DAN JASA

GOODS AND SERVICES PROCUREMENT

Pengadaan barang dan jasa perlu dikelola dengan baik agar dapat menunjang kinerja operasional dan keuangan secara optimal. Perusahaan berupaya menjalankan kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kompetitif, transparan, akuntabel serta adil dan wajar. senantiasa dikelola dengan baik sebagai salah satu bentuk komitmen pelaksanaan prinsip GCG. Kegiatan pengadaan harus dilaksanakan dengan prosedur yang berlaku serta dikerjakan secara disiplin. Hal tersebut dilakukan Perusahaan untuk meminimalisasi terjadinya risiko-risiko *fraud* dalam proses yang dapat mencederai implementasi GCG di lingkungan Perusahaan seperti praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta persaingan usaha tidak sehat.

The procurement of goods and services is required to be managed properly to support optimal operational and financial performance. The company conducts activities in the procurement of goods and services by considering aspects of efficiency, effectiveness, competitive, transparent, accountable, fair, reasonable, as well as consistently well-managed as one form of commitment to the implementation of GCG principles. The procurement must follow and comply with applicable procedures. This is done by the Company to minimize the risks of fraud in the process that can harm the implementation of GCG in the Company's environment such as Corruption, Collusion, and Nepotism practices as well as unfair business competition.

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

Goods and Services Procurement Policy

Kegiatan pengadaan di lingkungan PJB telah diatur secara internal dengan Kebijakan Barang dan Jasa yang ditetapkan antara lain melalui Surat Keputusan Direksi No.100.K/010/DIR/2017 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa PT Pembangkitan Jawa-Bali, Surat Keputusan Direksi No.101.K/010/DIR/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT Pembangkitan Jawa-Bali serta Surat Keputusan Direksi No.102.K/010/DIR/2017 tentang Kewenangan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa PT Pembangkitan Jawa-Bali. Kebijakan tersebut merupakan penyempurnaan atas peraturan yang dikeluarkan sebelumnya serta menjadi pedoman dan teknis bagi Unit Kerja atau fungsi yang menjalankan tugas pengadaan barang dan jasa.

Procurement activities in PJB have been regulated internally by the Goods and Services Policy stipulated through the Board of Directors Decree No.100.K/010/DIR/2017 concerning General Guidelines for Procurement of Goods and Services of PT Pembangkitan Jawa-Bali, the Board of Directors Decree No.101.K/010/DIR/2017 concerning Technical Guidelines for Procurement of Goods and Services of PT Pembangkitan Jawa-Bali, and the Board of Directors Decree No.102.K/010/DIR/2017 concerning the Authority for the Procurement of Goods / Services of PT Pembangkitan Jawa-Bali. These policies are the refinement of the regulations issued previously as well as a guideline and technical for the Work Unit or function that carries out the task of procurement of goods and services.

Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa

Goods and Services Procurement Principles

Aktivitas pengadaan barang dan jasa Perusahaan menerapkan prinsip pentingnya *Value for Money*, yaitu kombinasi optimum dari 6 (enam) *rights* (6 Rs) yang terdiri dari tepat kualitas, kuantitas, waktu, tempat, tujuan sosial ekonomi, dan harga, sesuai kebutuhan dari pengguna, dan tidak selalu merupakan opsi harga awal paling murah (*lowest initial price option*), tetapi merupakan pengembalian tertinggi (*best return*) dari investasi yang mempertimbangkan kriteria evaluasi yang sudah ditentukan.

The Company's procurement of goods and services applies the principle of the importance of Value for Money, namely the optimum combination of 6 (six) rights (6 Rs) consisting of the right quality, quantity, time, place, socio-economic goals, and prices, based on the needs of users, and is not always the lowest initial price option, but it is the best return from an investment that considers predetermined evaluation criteria.



Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan Audit
Audited Financial Statements



Referensi Kriteria AR
AR Criteria Reference

Fungsi Pengadaan Barang dan Jasa Goods and Services Procurement Function

Perusahaan menetapkan fungsi yang bertugas mengelola pengadaan barang dan jasa PJB sesuai dengan Keputusan Direksi No 101.K/010/DIR/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Perseroan. Berdasarkan keputusan tersebut, pejabat yang berwenang adalah Direksi atau Kepala Divisi *Supply Chain Management*. *General Manager*/Kepala BPWC dimana kewenangannya diatur lebih lanjut dalam SK Kewenangan. Fungsi pengadaan di Kantor Pusat dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk Direksi sedangkan untuk Unit ditunjuk oleh *General Manager*/Kepala BPWC.

Selain itu, PJB memiliki *Value for Money Committee* sebagai organ yang memberikan arahan terkait proses pengadaan barang dan jasa. Komite tersebut bertugas melakukan review dan rekomendasi atas strategi Pengadaan Barang/Jasa yang disiapkan oleh fungsi Perencanaan Pengadaan untuk memastikan strategi pengadaan telah memenuhi prinsip *value for money* serta melakukan *review* dan rekomendasi atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh Fungsi Pelaksana Pengadaan untuk memastikan pelaksanaan pengadaan telah memenuhi prinsip *value for money* dan selanjutnya dilakukan penandatanganan Perjanjian/ Kontrak. Pada Kantor Pusat *Value for Money Committee* dilaksanakan melalui Rapat Direksi untuk pengadaan yang memerlukan persetujuan Direksi dan Rapat Manajemen Divisi *Supply Chain Management* untuk pengadaan yang menjadi kewenangan Divisi *Supply Chain Management*. Sedangkan di Unit fungsi *Value for Money Committee* dilaksanakan melalui Rapat Manajemen.

The company determines the function in charge of managing the procurement of PJB goods and services based on the Board of Directors' Decree No. 101.K/010/DIR/2017 concerning Technical Guidelines for Procurement of Goods and Services of the Company. Based on this decision, the authorized officer is the Director or Head of the Supply Chain Management Division. General Manager/ Head of CRMU where his authority is further regulated in the Decree of Authority. The procurement function at the Head Office is carried out by Officers appointed by the Directors while for the Unit appointed by the General Manager/Head of the CRMU.

Additionally, PJB has a Value for Money Committee as an organ that provides direction related to the procurement of goods and services. The committee is tasked with reviewing and recommending the Goods/Services Procurement strategy prepared by the Procurement Planning function to ensure that the procurement strategy meets the principle of value for money and reviewing and recommending the implementation of the Goods/ Services Procurement carried out by the Procurement Executing Function to ensure the procurement has fulfilled the principle of value for money and subsequently signed an agreement/contract. At the Head Office Value for Money Committee is carried out through a Board of Directors Meeting for procurement that requires the approval of the Board of Directors and Management Meeting of the Supply Chain Management Division for procurement which is under the authority of the Supply Chain Management Division. Whereas the Value for Money Committee function unit is carried out through a Management Meeting.

Proses Pengadaan Barang dan Jasa Process of Procurement of Goods and Services

Perusahaan memastikan proses pengadaan barang dan jasa memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Proses pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam kebijakan pengadaan barang dan jasa mencakup beberapa aspek sebagai berikut :

1. Dokumen Rencana Pengadaan (DRP)

Dokumen Rencana Pengadaan adalah daftar umum yang meliputi kebutuhan Kantor Pusat dan Unit PJB atas barang dan jasa, lengkap dengan kuantitas/ *volume*, waktu kebutuhan/waktu penyerahan, estimasi anggaran, strategi pengadaan, metode pengadaan, pelaksana pengadaan dan sistem pemaketan/*grouping/joint procurement*/sentralisasi/desentralisasi. Penyusunan DRP meliputi:

The company ensures that the process of procuring goods and services meets the stipulated conditions. The process of procuring goods and services as stipulated in the policies for the procurement of goods and services includes the following aspects:

1. Procurement Plan Document (PPD)

Procurement Plan Document is a general list that covers the needs of the Head Office and PJB Unit for goods and services, complete with quantity/volume, time of need/delivery, budget estimation, procurement strategies, procurement methods, procurement implementers and the packaging system/ grouping or joint /centralized/decentralized procurement. The PPD preparation includes:

- a. Melakukan indentifikasi dan kajian kebutuhan barang/jasa meliputi kelengkapan spesifikasi, Kerangka Acuan Kerja (KAK), kepastian ketersediaan anggaran, ruang lingkup pekerjaan, kepastian kuantitas/*volume*, waktu penyerahan/kebutuhan serta kajian risiko.
- b. Melakukan kajian strategi pengadaan yang tepat (paketan/*grouping/joint procurement*) dan metode pengadaan termasuk rencana pengadaan yang ditangani bersama oleh Direktorat yang menangani pengadaan.
- c. Melakukan pemukhtahiran atas riset pasar.
- d. Meminta *review* dan rekomendasi *Value for Money Committee* atas hasil perencanaan.

2. Dokumen Pelelangan/RKS

Dokumen Pelelangan/RKS disusun berdasarkan Dokumen Rencana Pengadaan yang telah disahkan oleh Pejabat Yang Berwenang. Penyiapan Dokumen Pelelangan/ RKS merupakan tugas dan tanggung jawab Fungsi Perencana Pengadaan yang dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh Pengguna Barang/Jasa atau pihak lain sesuai keahlian baik internal maupun eksternal PJB dan disahkan oleh Pejabat yang Berwenang.

3. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) disusun berdasarkan Dokumen Rencana Pengadaan dan Dokumen Pelelangan/ RKS. HPS merupakan alat untuk melihat kewajaran harga penawaran dan tidak wajib diumumkan serta tidak dapat dijadikan dasar sebagai satu-satunya penggugur penawaran. HPS dibuat oleh Fungsi Pelaksana Pengadaan dan disahkan oleh Pejabat Yang Berwenang.

4. Metode Pengadaan Barang/Jasa

Metode pelelangan terbagi atas pelelangan terbatas, pelelangan terbuka dan penunjukan langsung.

- a. Pelelangan Terbatas
Pelelangan Terbatas dilakukan dengan mengundang Penyedia Barang/Jasa yang terdapat dalam Daftar Penyedia Terseleksi (DPT). Pelelangan Terbatas dapat berupa pelelangan internasional, nasional, dan lokal. Pelelangan Terbatas dengan DPT merupakan strategi utama Pengadaan Barang/Jasa.
- b. Pelelangan Terbuka
Pelelangan Terbuka dilakukan dengan cara mengundang Penyedia Barang/Jasa, yang diumumkan secara luas guna memberi kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi kualifikasi melalui proses prakualifikasi maupun pascakualifikasi, untuk mengikuti pelelangan.
- c. Pengecualian dari Kompetisi:
 - Penunjukan Langsung : Penunjukan Langsung dilakukan secara langsung dengan menunjuk satu Penyedia Barang/Jasa, berdasarkan Riset Pasar, *Due Diligence* atau dari DPT.

- a. Identifying and reviewing goods/services needs, including specification readiness, Terms of Reference (ToR), the certainty of budget availability, the scope of work, certainty of quantity/volume, time of delivery/need, and risk assessment.
- b. Reviewing the appropriate procurement strategy (packaging/grouping / joint procurement) and procurement methods including procurement plans that are jointly handled by the Directorate in charge of procurement.
- c. Updating the market research.
- d. Requesting a Value and Money Committee review and recommendation on the results of the planning.

2. Auction Documents (AD)

Auction Documents (AD) are prepared based on the Procurement Plan Document that has been approved by the Authorized Officer. Preparation of Auction Documents (AD) is the duty and responsibility of the Procurement Planner Function which in its implementation can be assisted by Goods / Services Users or other parties according to the expertise of both internal and external PJB and authorized by the Authorized Official.

3. Self-Estimated Price (SEP)

Self-Estimated Price (SEP) is prepared based on Procurement Plan Documents and Tender Documents. SEP is a tool to see the reasonableness of the bid price and is not mandatory to be announced and cannot be used as the basis for the only operator of the offer. SEP is made by the Procurement Executing Function and authorized by the Authorized Officer.

4. Method of Procurement of Goods / Services

The auction method is divided into limited auctions, open auctions, and direct appointments.

- a. Limited Auction
Limited auction is conducted by inviting Goods and Services Providers which is listed in Selected Providers List (SPL). The limited bidding can be conducted internationally, nationally, or locally. Limited bidding with SPL is the main strategy of the procurement of goods and services.
- b. Open Auction
The Open Tender is carried out by inviting Goods / Services Providers, who are widely announced to provide opportunities for Goods / Services Providers who meet the qualifications through the pre-qualification and post-qualification process, to take part in the auction.
- c. Exemption from Competition:
 - Direct Appointment: Direct Appointment is carried out directly by appointing a Goods / Service Provider, based on Market Research, Due Diligence, or from the SPL.



- Pengadaan Langsung : Pengadaan Langsung yaitu Pengadaan Barang/Jasa yang ada di pasaran untuk memenuhi kebutuhan operasional yang diyakini bahwa harga tersebut merupakan hasil persaingan di pasar, berteknologi sederhana dan berisiko kecil dengan nilai maksimal 500 juta.
- Penunjukan Langsung dengan Metode *Open Book*: Pengadaan dengan pola *Open Book* dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan harga yang kompetitif tanpa melalui proses Pelelangan Terbatas/ Pelelangan Terbuka, dengan tetap menjaga kualitas/ mutu dan memenuhi ketepatan waktu pengadaan di lingkungan PJB.

5. Joint Procurement

Joint Procurement dilakukan dengan Metode Pelelangan Terbatas atau Pelelangan Terbuka, dilaksanakan oleh 1 (satu) Pengguna Barang/Jasa yang mewakili beberapa Pengguna Barang/Jasa lainnya.

6. Metode Penawaran

- a. *Request for Quotation* (RFQ)
RFQ digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang termasuk kategori Rutin, dengan spesifikasi yang mudah ditemui di pasar.
- b. *Initiation to Bid* (ITB)
ITB dapat digunakan untuk Pengadaan Barang/ Jasa yang termasuk kategori *Leverage* atau *Critical/Bottleneck*, di mana spesifikasi, kualitas dan kuantitasnya dapat dibuat secara jelas dan lengkap, serta penunjukan pemenang dilakukan berdasarkan penawaran biaya terendah, sepanjang secara kualitas, kuantitas, waktu, tempat, Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), telah memenuhi persyaratan.
- c. *Request for Proposals* (RFP)
RFP digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang termasuk kategori Strategis (seperti EPC) atau jasa konsultasi atau pekerjaan yang memerlukan inovasi serta keahlian tertentu.

7. Jangka Waktu Pengadaan barang/Jasa

Perencanaan dan penyusunan jangka waktu pengadaan barang/jasa harus memperhatikan dan menyesuaikan waktu kebutuhan barang/jasa, sehingga penyerahan barang/jasa sesuai yang direncanakan. Jangka waktu pelaksanaan untuk setiap tahapan proses pengadaan barang/jasa menyesuaikan dengan kompleksitas pengadaan barang/jasa. Penayangan Pengumuman sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja di papan pengumuman dan/ atau portal e-Procurement PJB, kecuali yang dilaksanakan melalui surat kabar minimal dilakukan 1 (satu) kali (untuk Pelelangan Terbuka).

- Direct Procurement: Direct Procurement, namely Procurement of Goods / Services on the market to meet operational needs, which are believed to be the result of competition in the market, simple technology, and low risk with a maximum value of 500 million.
- Direct Appointment using the Open Book Method: Procurement with the Open Book pattern is carried out to obtain competitive prices without going through the Limited Tender / Open Tender process while maintaining quality and meeting the timeliness of procurement within the PJB environment.

5. Joint Procurement

Joint Procurement is carried out by the Limited Tender Method or the Open Tender, carried out by 1 (one) Goods / Service User who represents several other Goods / Services Users.

6. Offering Method

- a. Request for Quotation (RFQ)
RFQ is used for Procurement of Goods / Services that are included in the Routine category, with specifications that are easily found in the market.
- b. Initiation to Bid (ITB)
ITB can be used for Procurement of Goods / Services that are categorized as Leverage or Critical / Bottleneck, where specifications, quality, and quantity can be made clearly and completely, and the appointment of winners is based on the lowest cost bid, as long as in terms of quality, quantity, time, place, The Domestic Content Level (TKDN), has fulfilled the requirements.
- c. Request for Proposals (RFP)
RFP is used for the Procurement of Goods / Services that fall into the Strategic category (such as EPC) or consultancy services or jobs that require innovation and certain expertise.

7. Goods/services Procurement Period

The planning and development period for goods/service procurement must observe and adjust the time of goods/ service needs so that the delivery will be based on the plan. The period of execution for each procurement process stage is adjusted regarding the goods/service procurement complexity. Its announcement must be at least 3 (three) weekdays in the announcement board and/or portal of Procurement of PJB unless those executed through news at least once (for Open Auction).

8. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terbagi atas beberapa tahapan yaitu:



Pengadaan Khusus Special Procurement

Selain pengadaan barang dan jasa, PJB juga memiliki ketentuan pengadaan khusus dalam rangka menunjang kegiatan operasional yang terdiri dari:

1. Pengadaan Gas Bumi/LNG/CNG

Penyusunan perencanaan kebutuhan LNG, CNG, dan Gas Bumi dalam rangka kebutuhan bahan bakar untuk pembangkit tenaga listrik berbahan bakar gas mengacu pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan/atau kebutuhan lain yang mendesak, dengan terlebih dahulu PJB meminta persetujuan kepada PLN.

2. Pengadaan Batubara

Daftar Penyedia Terseleksi Batubara yang selanjutnya disebut DPT Batubara adalah daftar Penyedia Batubara yang lulus penilaian kualifikasi yang dimutakhirkan secara periodik berdasarkan kinerja Penyedia Batubara. Seleksi DPT Batubara adalah pemilihan Penyedia Batubara yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Batubara untuk masuk dalam DPT Batubara PJB.

8. Implementation of the Procurement of Goods / Services

The procurement of goods and services is divided into several stages as follows.

Besides the procurement of goods and services, PJB also has special procurement provisions to support operational activities consisting of:

1. Procurement of Natural Gas/LNG/CNG

The planning of LNG, CNG, and Natural Gas needs in the context of fuel requirements for gas-fired power plants refers to the Company's Work Plan and Budget (RKAP) and/or other urgent needs, with the PJB first requesting approval from PLN.

2. Coal Procurement

List of Selected Coal Supplier (Coal SPL) is Coal Supplier passing the qualification assessment which is updated periodically based on the Coal Supplier performance. Coal SPL selection is the election of Coal Supplier followed by all Coal Supplier to be registered in the Coal SPL of PJB.

3. Sewa Menyewa/Sewa Beli

Sewa menyewa adalah aktivitas Pengguna Barang/Jasa yang saling mengikatkan diri dengan Penyedia Barang/ Jasa untuk menggunakan suatu barang, baik barang bergerak dan/atau tidak bergerak, selama waktu tertentu dengan pembayaran yang disepakati. Sewa Beli adalah aktivitas Pengguna Barang/Jasa yang saling mengikatkan diri dengan Penyedia Barang/Jasa untuk menggunakan suatu barang, baik barang bergerak dan/atau tidak bergerak dengan hak kepemilikan akan beralih dari Penyedia barang/Jasa kepada Pengguna Barang/Jasa setelah diselesaikannya seluruh pembayaran.

4. Sewa Guna Usaha

Sewa Guna Usaha terdiri dari:

a. *Financial Lease*

Penyewa Guna (*Lessee*) pada akhir masa Perjanjian/ Kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli obyek sewa guna dari pihak yang menyewa gunakan (*Lessor*) berdasarkan nilai sisa (*residual value*) yang disepakati bersama.

b. *Operating Lease*

Adalah obyek sewa guna usaha yang dioperasikan sendiri oleh *Lessee* namun kepemilikan obyek sewa guna usaha tidak beralih kepada *Lessee*.

5. Alih Daya.

6. Pengadaan Jasa Konsultasi Perorangan.

7. Pengadaan Asuransi.

8. Pengadaan parts Pembangkit *Reverse Engineering* dan *Re-Engineering*.

3. Rent-Buy/Lease

A lease is an activity of Goods/Service User which binds them to Goods/Service Provider to utilize goods, both movable and/ or immovable, during a specific time with the agreed payment. Rent-Buy is the activity of Goods/Services users to bind themselves with Goods/Services Provider to utilize goods, both movable and/or immovable with ownership right, which will be transferred from goods/services providers to goods/ services user after all payments are settled.

4. Lease

Lease consists of:

a. Financial Lease

Lessee, at the end of the term of Agreement/ Contract, has the option right to buy a business lease object from Lessor based on residual value agreed together.

b. Operating Lease

A business lease is operated by Lessee but the ownership of such object is not transferred to Lessee

5. Outsourcing.

6. Procurement of Individual Consulting Services.

7. Procurement of Insurance.

8. Procurement of Reverse Engineering and Re-Engineering Generation parts.

Transparansi dan Akuntabilitas Proses Pengadaan Transparency and Accountability of the Procurement Process

Sejalan dengan prinsip pengadaan barang dan jasa, PJB menerapkan beberapa ketentuan untuk menjaga dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa sebagai berikut:

1. Pembuatan dan Penerbitan Rencanana Umum Pengadaan (RUP)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) merupakan dokumen yang dibuat oleh pengguna berkoordinasi dengan Pelaksana Pengadaan, untuk kemudian disahkan oleh pejabat yang berwenang. Direksi mengumumkan rencana umum Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas untuk pengadaan yang pelaksanaannya melalui pelelangan setelah Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan disetujui oleh RUPS sebelum pengumuman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa oleh Pelaksana Pengadaan. Pengumuman RUP dilakukan melalui media Papan Pengumuman resmi Perusahaan dan atau *website* Perusahaan (www.ptpjb.com).

In line with the principles of procurement of goods and services, PJB applies several provisions to maintain and increase transparency and accountability in the process of procurement of goods and services as follows:

1. Preparation and Publication of Public Procurement Plan (PPP)

The Public Procurement Plan (PPP) is a document made by the user in coordination with the Procurement Implementer, to then be approved by the authorized official. The Board of Directors publicly announces the general plan for the Procurement of Goods / Services to the public at large for procurement which is carried out through auctions after the Work Plan and Corporate Budget are approved by the GMS before the announcement of the implementation of the Procurement of Goods / Services by the Procurement Implementer. The announcement of the RUP is made through the media of the Company's official Announcement Board and or the Company's website (www.ptpjb.com).

2. Pemanfaatan Media Pengumuman Pengadaan berbasis *Web* Pengumuman Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya wajib dilakukan secara terbuka untuk umum dengan pengumuman secara luas antara lain melalui *web* Perusahaan.

3. Penerapan Masa Sanggah

Peserta kualifikasi yang keberatan atas penetapan hasil kualifikasi dapat mengajukan sanggahan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal pengumuman hasil kualifikasi, dengan memberikan jaminan sanggah sebesar 2‰ (dua perseribu) dari nilai total HPS atau setinggi-tingginya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).

Sanggahan hanya diajukan terhadap adanya penyimpangan pelaksanaan prosedur kualifikasi yang diatur dalam Dokumen Kualifikasi Pelelangan Pekerjaan bersangkutan, KKN dan atau pelanggaran persaingan yang sehat. Masa sanggah hasil prakualifikasi diberikan 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi dan Jawaban atas sanggahan diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya sanggahan dari peserta prakualifikasi. Surat sanggahan diajukan kepada Pejabat yang berwenang menetapkan pemenang disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan kepada Kepala Satuan Pengawasan Internal.

4. Menyediakan Media Pengaduan Pengadaan melalui Komite WBS

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PJB No. 095.K/010/DIR/2012 dan No. 007.K/DK/PJB/2012 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) PT Pembangunan Jawa-Bali, Perusahaan menyediakan sarana pengaduan atas Pelanggaran dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa.

5. Pendampingan Lembaga Independen

- a. BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan).
- b. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
- c. ITS (Institut Teknologi Sepuluh Nopember) Surabaya.

2. Web-based Procurement on Announcement Media
Announcement of Procurement of Goods/Construction Works/Other Services shall be made transparently to the community with a public announcement through, for example, the Company's website.

3. Application of Objection Period

Participants of qualification who have an objection to the establishment of qualification results may submit their objection in writing no later than 3 (three) weekdays after the date of announcement of the results, by providing guarantees by 2 ‰ (two thousandths) of the total HPS value or a maximum of Rp50,000,000.00 (fifty million Rupiah).

The objection may only be submitted towards irregularities in the implementation of qualification procedures set out in the Documents of Work Tender Qualifications, CCN, and/or violation of fair competition. The objection period of prequalification results is provided by 3 (three) weekdays after the announcement of the qualification results and the Answer to the objection is provided no later than 7 (seven) weekdays after the acceptance of objection from the pre-qualification participant; Notice of objection is addressed to the Officer authorized in determining the winner, accompanied by evidence of irregularities, with a copy submitted to the Head of Internal Audit Unit.

4. Provide Procurement Complaints Media through the WBS Committee

Based on the Joint Decision Letter of PJB's Board of Directors and Board of Commissioners No. 095.K/010/DIR/2012 and No. 007.K/DK/PJB/2012 on Whistleblowing System at PJB, the Company provides a media for complaints on violations in Goods and Services Procurement Process.

5. Independent Institution Assistance

- a. BPKP (Financial and Development Supervisory Agency).
- b. East Java's High Court.
- c. ITS (Sepuluh Nopember Institute of Technology) Surabaya.



Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Goods and Services Procurement Activities

Sebagai bagian dari kegiatan penunjang operasional PJB, Kegiatan pengadaan barang dan jasa yang telah dilakukan oleh PJB sepanjang tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah paket pengadaan barang dan jasa yang telah diselesaikan untuk memenuhi kebutuhan operasi Perusahaan pada tahun 2019, baik yang menggunakan metode Pelelangan Terbatas, Pelelangan Terbuka dan Penunjukan Langsung adalah sebagai berikut:

No.	Metode Method	Jumlah Total
1	Pelelangan Terbatas Limited Auction	16
2	Pelelangan Terbuka Open Auction	104
3	Penunjukan Langsung Direct Appointment	158

2. Pengelolaan Pergudangan

Pengelolaan pergudangan merupakan salah satu bagian dari proses manajemen material yang didalamnya terdapat kegiatan pengelolaan atau maintenance seluruh transaksi barang persediaan yang meliputi penerimaan, penyimpanan, perawatan, pengamanan, pemindahan/mutasi, pengendalian persediaan, pengeluaran, pengembalian/return barang/material, *stock opname*, serta penghapusan material.

Salah satu upaya yang dilakukan gudang dalam mencapai misi SCM PJB adalah metode *delivery service*. Metode ini merupakan salah satu contoh pelayanan eksten dari gudang untuk memaksimalkan nilai *service level*.

3. Pengelolaan Supplier

Perusahaan senantiasa berupaya untuk menjaga hubungan baik dengan *Supplier*. Salah satu kegiatan yang menjadi sarana komunikasi antara PJB dengan *Supplier* adalah *Supplier Gathering*. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membina hubungan baik dengan cara menyampaikan kebijakan program pendukung proses pengadaan, penilaian PJB atas kinerja *Supplier* selama 1 (satu) tahun dan penilaian *Supplier* atas PJB melalui catatan dalam angket yang dibuat oleh PJB. Kegiatan *Supplier Gathering* tahun 2019 dilaksanakan di semua unit pembangkit PJB, adapun garis besar agenda acara adalah:

1. Laporan Pengadaan Tahun 2019
2. Sosialisasi kebijakan baru mengenai proses pengadaan di PJB
3. Pengumuman *Supplier* terbaik
4. Penandatanganan Pakta Integritas antara direksi PJB dengan *Supplier*.

As part of PJB operational support activities, the activities of procurement of goods and services carried out by PJB throughout 2019 are as follows:

1. Procurement Management

The number of goods and services procurement packages that have been completed to meet the needs of the Company's operations in 2019, both using the Limited Auction, Open Auction and Direct Appointment methods are as follows:

2. Warehouse Management

Warehousing management is one part of the material management process in which there are management activities or maintenance of all inventory transactions including receipt, storage, care, security, transfer/mutation, inventory control, expenditure, goods/materials return, stock taking, and material removal.

One of the efforts made by the warehouse in achieving the SCM PJB mission is the delivery service method. This method is one example of excellent service from a warehouse to maximize the value of service level.

3. Supplier Management

The company always strives to maintain good relations with Suppliers. One of the activities that become a means of communication between PJB and Supplier is Supplier Gathering. The activity aims to foster good relations by conveying policies supporting the procurement process program, PJB's assessment of Supplier's performance for 1 (one) year, and Supplier's assessment of PJB through notes in a questionnaire prepared by PJB. The activities of the Supplier Gathering for the year were carried out in all PJB generation units, while the outline of the agenda was:

1. 2019 Procurement Report
2. Dissemination of new policies regarding the procurement process in PJB
3. Best Supplier Announcement
4. The signing of the Integrity Pact by PJB's Board of Directors and the Supplier.

Selain itu, PJB juga melakukan survei kepuasan *supplier* sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas proses pengadaan di lingkungan PJB. Survei dilakukan terhadap responden *supplier* di masing-masing unit. Hasil survei menunjukkan tingkat rata-rata kepuasan *supplier* sebesar 95,71% atau masuk kategori *level excellent*.

4. Pengelolaan Pengaduan Tindakan Penyimpangan Proses Pengadaan Barang dan Jasa
Sepanjang tahun 2019, tidak terdapat pengaduan atas indikasi penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui *Whistleblowing System* (WBS) Perusahaan. Perusahaan berupaya menindaklanjuti setiap pengaduan penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa demi mendorong kualitas proses pengadaan barang dan jasa.

Additionally, PJB also conducts a supplier satisfaction survey as an effort to improve the quality of the procurement process in the PJB environment. The survey was conducted on supplier respondents in each unit. The survey results showed an average level of supplier satisfaction of 95.71% or included in the excellent level category.

4. Complaint Management on Violation during the Procurement Process of Goods and Services
Throughout 2019, there were no complaints of indications of irregularities in the process of procurement of goods and services through the Company's Whistleblowing System (WBS). The company seeks to follow up on any complaints of irregularities in the process of procurement of goods and services to encourage the quality of the process of procurement of goods and services.

Evaluasi Aktivitas Pengadaan Barang dan Jasa Evaluation of Goods and Services Procurement Activities

Perusahaan secara berkala melakukan evaluasi atas aktivitas pengadaan barang dan jasa sebagai upaya mendorong peningkatan kualitas proses pengadaan barang dan jasa. Keseluruhan proses pengadaan barang dan jasa perusahaan di tahun 2019 berjalan dengan baik.

The company regularly evaluates the procurement of goods and services to encourage improvement in the quality of the procurement of goods and services. The entire process of procurement of company goods and services in 2019 is well implemented.



PLTU Rembang
Rembang CFPP

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

CORPORATE INFORMATION AND DATA ACCESS

Pengelolaan informasi merupakan upaya dalam rangka membangun citra Perusahaan di mata publik khusus para *stakeholder* PJB. Perusahaan berkomitmen memenuhi standar penerapan tata kelola perusahaan yang baik terkait prinsip transparansi, diantaranya dengan menyediakan akses informasi baik secara internal maupun eksternal. Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Perusahaan dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sesuai dengan ketentuan internal terkait pengelolaan informasi. PJB berupaya memberikan informasi yang memadai, bermanfaat dan aktual dengan memperhatikan ketentuan terkait data Perusahaan yang tergolong dalam informasi rahasia Perusahaan. Pengungkapan informasi tersebut dilakukan oleh pejabat atau unit kerja sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya yang dalam hal ini adalah Sekretaris Perusahaan.

Information management is an effort to build the image of Company in the eyes of the public, specifically for PJB stakeholders. The company is committed to meeting the good corporate governance implementation standards related to the principle of transparency, including by providing access to information both internally and externally. Public Information Transparency is a facility in optimizing public supervision of the Company operation and everything that results in the public interest in accordance with internal provisions related to information management. PJB seeks to provide adequate, useful and actual information by taking into account the provisions relating to Company data classified in confidential Company information. Information disclosure is implemented by officials or work units in accordance with the duties, authorities and responsibilities, in this case is the Corporate Secretary.

Kebijakan Akses Informasi dan Data Perusahaan

Corporate Information and Data Access Policy

Perusahaan memastikan ketersediaan akses informasi publik dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan sesuai dengan kebijakan perusahaan mengenai kerahasiaan informasi perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 152.K/010/DIR/2010 tanggal 4 Desember 2010, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Klasifikasi Informasi meliputi informasi sangat rahasia, terbatas dan biasa.
2. Pengungkapan Informasi meliputi prinsip dasar pengungkapan informasi, pengelola, juru bicara, dan akses terhadap pengungkapan informasi.
3. Mekanisme pemberian informasi, baik internal dan eksternal (publik).
4. Pengamanan Informasi, meliputi tugas dan tanggungjawab keamanan informasi, pengendali dan administrasi informasi, data dan dokumen Perusahaan, tanggungjawab pihak lain atas informasi sangat rahasia dan informasi rahasia, rumor, hubungan dengan komunitas investasi dan media.
5. Sanksi.
6. Panduan teknis.

Kebijakan tersebut juga mengatur mengenai standar etika yang harus diterapkan oleh setiap insan PJB terkait pengelolaan informasi sebagai berikut :

1. Setiap Insan PJB tidak diijinkan untuk membicarakan, membocorkan atau menyebarkan informasi mengenai Perusahaan yang dianggap sebagai rahasia kepada siapapun (kecuali rekan kerja yang perlu mengetahui hal tersebut).
2. Insan PJB tidak diijinkan untuk memberikan data dan informasi yang tergolong rahasia Perusahaan kepada pihak lain, baik yang menyangkut keuangan, teknologi, kepegawaian dan data lainnya yang diyakini dan dianggap akan dapat merugikan PJB kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan/atau disyaratkan oleh lembaga yang berwenang.

The Company ensures the access to public information availability by taking into account the interests of the Company in accordance with policies regarding the confidentiality of company information according to Directors' Decree Number: 152.K / 010 / DIR / 2010 dated December 4, 2010, which regulates the following:

1. Information classification including the top secret, limited and regular information
2. Information disclosure including the basic principal revelation of information, manager, spoken person, and access toward information revelation.
3. Information provision mechanism, including the internal and external (public).
4. Information Security, including the task and responsibility of information security, controller and administration of information, data and company document, other parties responsibility toward very classified information and top secret information, rumors, relationship with investment community and media.
5. Sanctions
6. Technical guideline

Those policies also regulate about ethical standard that should be applied by every person in PJB as follows :

1. Every PJB personnels are not allowed to discuss, leak, or disseminated the information about company considered as confidential to anyone (except the working partner who is necessary to acknowledge the issue)..
2. PJB personnels are not allowed to give any classified data nor information toward other parties, both concerning finance, technology, employment, and any other data which believed and considered to be detrimental toward PJB except otherwise specified by legislation rules or required by regulatory authorities.

3. Insan PJB yang tidak bekerja lagi di Perusahaan wajib untuk tetap menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama yang bersangkutan bekerja di Perusahaan, dan tidak diperkenankan mengambil dan/atau menyebarkan informasi rahasia Perusahaan kepada siapapun kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan/atau disyaratkan oleh lembaga yang berwenang.

Kebijakan kerahasiaan informasi disusun untuk melindungi keamanan informasi dan memastikan pengungkapan informasi PJB kepada pihak-pihak yang berkepentingan berlangsung secara wajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. PJB Personnels who are no longer working at the Company shall protect the information confidentiality obtained during the working period, nor allowed to take nor spread the confidential information to anyone except otherwise specified by legislation rule or required by regulatory authorities.

Information confidentiality policy is prepared to protect information security and ensuring PJB information disclosure to the interest parties in a transparent way and fair in accordance with the applicable legislations.

Mekanisme Pemberian Informasi bagi Internal Perusahaan Internal Information Disclosure Mechanism

Perusahaan memastikan ketersediaan akses informasi bagi internal perusahaan dalam rangka menunjang kegiatan operasional perusahaan dan menghormati hak-hak stakeholder internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui mekanisme sebagai berikut:

1. PJB *M-Office*, yang merupakan aplikasi smartphone yang dapat digunakan untuk mengakses informasi Perusahaan. Aplikasi ini berisikan informasi antara lain kegiatan korporat, berita korporat, data ke karyawan (gaji, absensi, perjalanan dinas, dan informasi pelatihan), dan contact seluruh karyawan PJB.
2. Fasilitas Info PJB, merupakan media internal yang berfungsi sebagai sarana informasi, edukasi dan sosialisasi kebijakan manajemen untuk seluruh pegawai yang terbit setiap dua bulan.
3. Intranet, *Office Automation* (OA), dan *Email Serentak* (*Email Blast*). Pengelolaan isi dan *update* dari Intranet dan OA dilakukan bersama antara Sekretaris Perusahaan dan Bagian Teknologi Informasi serta pihak terkait. Email serentak berisi informasi terkait keperluan pekerjaan dan Perusahaan atau *sharing knowledge* mengenai hal-hal yang bersifat manajerial, tidak mengandung unsur SARA dan politik, serta tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, khususnya yang dapat menimbulkan keresahan di lingkungan internal maupun eksternal Perusahaan.
4. Pendokumentasian Kegiatan PJB, dilakukan melalui koordinasi dengan Bidang Komunikasi Korporasi & CSR (Kantor Pusat) atau bidang Humas (Unit Pembangkitan (UP), Unit Pelayanan Pemeliharaan (UPH), Unit Bisnis (UB) dan Unit lain/Badan). Bentuk dokumentasi kegiatan PJB bisa berbentuk tulisan seperti artikel, bentuk visual foto atau video, bentuk audio seperti rekaman dan bisa juga kombinasi dari dua atau ketiga bentuk tersebut.

The company ensures the access to information availability for internal company in order to support the operational activities of Company and respect the rights of internal stakeholders in accordance with applicable regulations through the following mechanisms:

1. PJB *M-Office*, a smartphone application that is used to access Corporate Information. This application contains information, among others, corporate activity, corporate news, employment data (salary, attendance, business trip and training information), and contacts of all PJB's employees.
2. "Info PJB" facility, an internal media which function as information, education and socialization media for the management's policy to all employees published regularly every two months.
3. Intranet, *Office Automation* (OA) and electronic mail blast (*E-mail blast*). Management on content and update of the Intranet and OA is implemented altogether by Corporate Secretary and Information Technology Unit, and other related parties. The electronic mail blast contains information related to job and the Company requirements or sharing knowledge concerning about managerial issues and not containing Tribe, Religion Group Race and political elements, particularly that may cause anxiety in the Company's internal and external circumstances.
4. PJB Activity documentation, is implemented through coordination with Corporate Communication & CSR Unit (Head Office) or Public Relation Unit (Generation Unit (GU), Maintenance Service Unit, Business Unit and Other Units/Entities). The PJB Activity documentation may be recorded in written format such as article, visual format such as photo or video, audio format such as recording as well as combination of those two or three formats.



Mekanisme Pemberian Informasi bagi Publik External (Public) Information Disclosure Mechanism

Perusahaan mengelola dan memastikan ketersediaan akses informasi bagi publik dalam rangka memenuhi prinsip transparansi, membangun citra perusahaan dan menghormati hak-hak stakeholder eksternal sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui mekanisme sebagai berikut:

1. *Sponsorship* & Iklan *Non-Media*, partisipasi sponsor ataupun iklan pada kegiatan atau materi cetakan tertentu diupayakan semaksimal mungkin untuk kegiatan atau materi cetakan yang memiliki ruang lingkup promosi, publikasi dan cakupan kegiatan yang berskala nasional, atau kegiatan yang bersifat edukasi bagi banyak pihak.
2. *Events*, partisipasi acara/pameran/events diupayakan memiliki ruang lingkup promosi, publikasi, dan cakupan kegiatan yang berskala nasional, atau acara/ pameran/ events kedaerahan yang memiliki keterkaitan erat dengan wilayah operasi, atau kegiatan atau rencana pengembangan PJB dimasa depan, atau yang bersifat *career expo* sesuai dengan kebutuhan SDM PJB.
3. Media Massa (cetak dan elektronik). Setiap proses wawancara pihak internal PJB dengan media cetak ataupun media elektronik harus didampingi oleh perwakilan dari Sekretaris Perusahaan (Kantor Pusat), atau bidang Humas (Unit Pembangkitan (UP)), Unit Pelayanan Pemeliharaan (UPHAR), Unit Bisnis (UB) dan Unit lain/Badan).
4. *Website*, dokumen-dokumen untuk kepentingan publik dan tidak bersifat rahasia tersedia dalam *website* Perusahaan dan Sekretaris Perusahaan bertanggungjawab untuk memastikan bahwa informasi yang tercantum pada website adalah akurat, lengkap dan terkini.
5. Surat elektronik (*email*), Perusahaan menyediakan alamat email yaitu info@ptpjb.com sebagai sarana komunikasi elektronik yang dikelola oleh bagian Teknologi Informasi. Komunikasi Korporasi memonitor, mengidentifikasi email yang masuk untuk selanjutnya memberikan respon yang memadai.

The company manages and ensures the access to information availability for the public in order to fulfill the principles of transparency, build the image of company and respect the rights of external stakeholders in accordance with applicable regulations through the following mechanisms:

1. Sponsorship & Non-Media Advertising, participation as sponsor or advertising in particular event or printed media is attempted as optimum as possible for the activity or printed media with scope of promotion, publication and activity at national level, or educative activity for many parties
2. Events, participation in activity/exhibition/events attempted to have national-scale scope of promotions, publications and activities, or regional activity/exhibition/events which has close relation with operational area, or PJB development activity/plan in the future, or career expo in accordance with PJB Human Capital requirement;
3. Mass Media, (printed and electronic). Every interview process between PJB's internal party with printed or electronic media shall be conducted with assistance by representative from Corporate Secretary (Head Office) or Public Relation Unit (Generation Unit (GU), Maintenance Service Unit, Business Unit and Other Units);
4. Website, non-confidential documents for public interest are available at the Company's website and Corporate Secretary who is responsible to ensure that the information published at the website has been accurate, complete and updated.
5. Electronic mail (email). The Company provides electronic mail address, info@ptpjb.com as an electronic communication channel managed by Information Technology unit. Corporate communication monitors, identifies every incoming electronic mail and give appropriate response.

Media Informasi Perusahaan Information Media of Company

Perusahaan memiliki media yang berfungsi sebagai saluran dalam memastikan ketersediaan akses dan pengungkapan informasi secara update, transparan, *fair* dan berimbang kepada *stakeholders* dan *shareholders* diantaranya *Website*, Media Cetak, Media Elektronik Interaktif, Media Sosial dan Media internal. Selain itu, linformasi tentang PJB dapat pula diperoleh pada Sekretaris Perusahaan yang beralamat di:

PJB has a media that serves as a channel to encourage information disclosure updates, transparent, fair and balance to stakeholders and shareholders including Website, Printed Media, Interactive Electronic Media, Social Media, and Internal Media. Moreover, information about PJB is also accessible via Corporate Secretary at:

PT Pembangkitan Jawa Bali
Jl. Ketintang Baru No.11,
Surabaya 60231 Indonesia
Telepon : (62-31) 8283180 (Hunting)
Faksimili: (62-31) 8283183

Website

Shareholders dan *stakeholders* dapat mengakses informasi mengenai PJB di situs www.ptpjb.com yang memuat informasi cukup lengkap dan komprehensif mengenai kegiatan operasional dan kinerja Perusahaan. Website PJB disajikan secara bilingual yaitu dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Website PJB menyediakan informasi terkait Perusahaan, peristiwa di lingkungan Perusahaan, kliping berita media, *soft copy* Info PJB, *soft copy* data Perusahaan (*Annual Report*, *Sustainability Report*, statistik, Laporan Keuangan), pengumuman pelelangan dan beberapa informasi lain yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat dimanapun mereka.

Shareholders and stakeholders can access the information about PJB at www.ptpjb.com that containing fairly complete and comprehensive information toward the operational activity and performance of the Company. The PJB website is presented bilingually in Indonesian and English.

PJB website provides information of companies, events in the corporate environment, media clippings, soft copy of PJB info, soft copy of company data (*Annual Report*, *Sustainability Report*, statistics, Finance Report), the auction announcement and some other information that could be easily accessed by people everywhere.

Informasi Pada Situs Web Resmi Perusahaan

Detail Information at Corporate Website

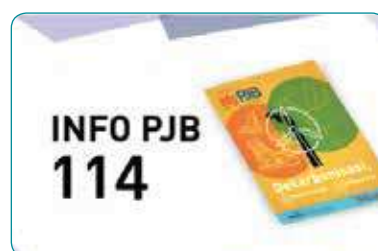
Kategori Category	Halaman Arsip Archive Page	Keterangan Description
Halaman Muka Front Page	• <i>Highlight</i> • <i>Menu Bar</i> • Link Prosedur terkait Pengadaan • Link Informasi terkait Energi Terbarukan yang Dikelola Perusahaan • Link Saluran WBS • Link Kesempatan Berkarir • Sekilas Profil • Penghargaan dan Sertifikasi • Ringkasan Berita • Hubungi Kami	• Highlight • Menu Bar • Procurement Related Procedures Link • Information Link regarding Renewable Energy Managed by the Company • WBS Channel Link • Career Opportunities Link • Profile Overview • Awards and Certification • News Summary • Contact us
Profil Profile	• Tentang Kami • PJB Group • Struktur Organisasi • Perjalanan PJB • Pemegang Saham • Dewan Komisaris • Direksi • Penghargaan • Sertifikasi • Budaya Perusahaan • Capaian dan Prospek Perusahaan • LK3 dan CSR	• About Us • PJB Group • Organization Structure • PJB Milestones • Share Ownership Structure • Board of Commissioners • Board of Directors • Awards • Certification • Corporate Culture • Company Achievements and Prospects • HSE & CSR
Lini Bisnis Business Line	• Unit Pembangkitan • Jasa Operasi dan Pemeliharaan • Pendanaan Investasi • <i>Engineering, Procurement & Construction</i> • Layanan Suku Cadang	• Power Generation Business • Operation & Maintenance • Investment Funding • EPC Services • Spareparts Procurement

Kategori Category	Halaman Arsip Archive Page		Keterangan Description
Tata Kelola Corporate Governance	- Whistle Blowing System - Pedoman Kerja Direksi dan Dekom - Pedoman Tata Kelola Perusahaan - Standar Etika Perusahaan - PJB Bersih - Informasi RUPS - Penilaian Tata Kelola Perusahaan - Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa - Piagam Internal Audit	- Whistle Blowing System - Work Guidance of BOD and BOC - Corporate Governance Guidelines (GC Code) - Code of Conducts - PJB Bersih - GMS Information - GCG Assessment - General Guidelines of Goods and Services Procurement - Internal Audit Charter	Pada bagian ini pengakses dapat memperoleh informasi-informasi penting mengenai penerapan GCG dan metode pengelolaan Perusahaan. In this section, the user can obtain important information related to GCG implementation and management method of Company.
Pengadaan Procurement	- E- Procurement - Pendaftaran Daftar Penyedia Perusahaan (DPP)	- E- Procurement - New Registration and Extension Registration of Company Provider List	Pada bagian ini pengakses memperoleh informasi dan melakukan pendaftaran terkait proses pengadaan barang dan jasa. In this section, the users obtain information and register on the procurement process of goods and services.
Hubungan Investor Investor Relation	- Laporan Tahunan - Laporan Keberlanjutan - Ikhtisar Data Keuangan - Publikasi Posisi Keuangan - Laporan Keuangan Tahunan - Statistik Perusahaan	- Annual Report - Sustainability Report - Financial Overview - Financial Position Publication - Annual Financial Report - Corporate Statistic	Pada bagian ini pengakses dapat memperoleh informasi-informasi penting yang dibutuhkan oleh investor terkait rekam jejak Perusahaan beserta laporan terkait kinerja perusahaan. In this section, the user can obtain important information required by the investors related to the Company's track record and reports related to performance of the Company
Media	- MACO PJB - Info PJB - Flash News dan Event - Press Release	- MACO PJB - Info PJB - Flash News & Event - Press Release	Pada bagian ini pengakses dapat memperoleh informasi mengenai berita-berita aktual dan kegiatan yang dilaksanakan PJB. In this section, the user can obtain information on actual news and activities carried out by PJB

Media Cetak Print Media

Media cetak PJB terdiri dari *company profile*, *leaflet*, majalah korporat/buletin Info PJB, buku statistik, Laporan Tahunan (*Annual Report*) serta Laporan Berkelanjutan (*Sustainability Report*) yang mencakup seluruh kegiatan internal Perusahaan yang perlu diketahui oleh shareholders dan stakeholders maupun publik. Selama tahun 2019, PJB telah mengeluarkan Info PJB sebanyak 3 (tiga) majalah. Laporan Tahunan (*Annual Report*), Laporan Berkelanjutan (*Sustainability Report*) serta Buletin tersebut dapat diakses melalui <https://www.ptpjb.com/info-pjb/> baik untuk laman berbahasa Indonesia maupun laman yang berbahasa Inggris. Buletin info PJB yang diterbitkan selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

PJB print media consists of company profile, leaflets, PJB info corporate magazines, and statistical books, Annual Report, also Sustainability Report covering all the internal activities of Company required to be known by shareholders and stakeholders and the public. During 2019, PJB has issued 3 (three) editions of PJB Magazine. The Annual Report, Sustainability Report, and bulletin can be accessed through www.ptpjb.com/info-pjb/ both in Indonesian and English page. List of PJB info bulletin published during 2019 is as follow:





Media Elektronik Interaktif

Interactive Electronic Media

Perusahaan juga menggunakan media elektronik dalam menyediakan informasi bagi Pemegang Saham dan *Stakeholders* antara lain *email*, Kiosk, CD profile, LCD TV, PJB TV di kantor pusat & unit. Alamat email PJB adalah info@ptpjb.com. Tujuan dibuatnya email PJB berguna untuk memberikan kemudahan bagi publik yang ingin menanyakan berbagai hal yang berhubungan dengan PJB. Kiosk merupakan media informasi interaktif yang dapat dimanfaatkan oleh tamu PJB untuk mengakses *company profile* dan pengumuman lelang PJB. Sarana komunikasi lainnya yaitu CD *profile* dan *display* LCD TV di kantor pusat & unit yang menayangkan *company profile*, informasi terbaru terkait PJB dalam bentuk foto dan video dan informasi lain yang perlu diketahui oleh karyawan dan tamu PJB. Media tersebut dapat diakses oleh masyarakat yang datang ke kantor PJB.

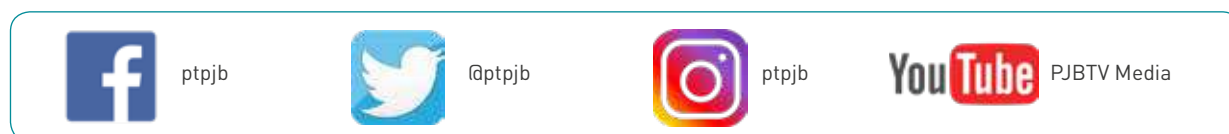
The company also uses electronic media in providing information for Shareholders and Stakeholders including e-mail, Kiosk, CD profile, LCD TV, PJB TV at the headquarter & units. PJB email address is info@ptpjb.com. The purpose of PJB e-mail made is to provide convenience for the public who wish to ask everything related to PJB. The Kiosk is an interactive information media that can be used by PJB guests to access the company profile and PJB auction announcements. Other communication facilities are the profile CD and LCD TV display at the head office and unit that shows company profile, the latest information related PJB in the form of photos and video and other information that needs to be known by employees and guests. Media can be accessed by public

Media Sosial

Social Media

Perusahaan juga menyediakan saluran informasi tentang PJB serta untuk berkomunikasi kepada publik dengan memanfaatkan media sosial melalui akun Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube.

The company also provides information channels regarding PJB as well as to communicate to the public by utilizing social media through Facebook, Twitter, Instagram and Youtube accounts.



Media internal

Internal Media

Perusahaan menyediakan saluran informasi dan media komunikasi internal dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas seluruh karyawan yang dilakukan secara formal melalui rapat harian khusus di unit (*daily meeting*), rapat mingguan (*weekly meeting*), rapat bulanan, rapat kerja, upacara bendera, pesan Direksi, dan pertemuan manajemen dengan Serikat Pekerja. Sedangkan secara informal komunikasi dilakukan melalui majalah "Info PJB", *visibility board display* kegiatan, *email*, portal, *BoD Talk*, *Plant Walkdown*, *Briefing* dan Safari Ramadhan.

The company provides information channels and internal communication media in order to support the implementation of all tasks of employees carried out formally through special daily meetings, weekly meetings, monthly meetings, work meetings, flag ceremonies, directors' messages, and management meeting with the Trade Unions in the unit. While informally the communication is implemented through the "PJB Info" magazine, activity visibility board display, e-mail, portals, *BoD Talk*, *Plant Walkdown*, *Briefing* and Safari Ramadhan.

Pertemuan dengan Stakeholder Meeting with Stakeholder

Penyediaan akses informasi juga dilakukan melalui pertemuan langsung dengan *stakeholders*. Selama tahun 2019, PJB telah melakukan beberapa pertemuan dengan para *stakeholder* yaitu sebagai berikut:

Provision of access to information is also implemented through direct meetings with stakeholders. During 2019, PJB has conducted several meetings with stakeholders, as follows:

Stakeholder	Jenis Pertemuan Type of Meeting	Jumlah Total
Pemegang Saham Shareholders	Forum Bisnis Business Forum	1 kali One time
Karyawan Employees	BoD Talk Employee Gathering	3 kali Three times Kantor pusat dan Unit masing-masing 1 kali Head office and Units each one time
	Serikat Pekerja Trade Unions	2 kali Two times
Pelanggan Customers	Customer Gathering	Kantor pusat dan Unit masing-masing 1 kali Head office and Units each one time
Pemasok Supplier	Supplier Gathering	Kantor pusat dan Unit masing-masing 1 kali Head office and Units each one time
Media Massa Mass Media	Media Gathering	1 kali One time

Publikasi dan Pemberitaan Perusahaan Company Publication and News

Perusahaan melakukan monitoring publikasi dan pemberitaan terkait Perusahaan baik melalui media internal maupun media eksternal. Publikasi melalui media internal, PJB telah menerbitkan informasi berupa 3 (tiga) edisi Info PJB (edisi 112, 113 dan 114) dan *press release* sebanyak 24 (dua puluh empat). Selain itu, pemberitaan oleh media eksternal sebanyak 200 dengan 183 tonasi positif, 10 dengan tonasi negatif, 1 dengan tonasi netral, dan 6 dengan tonasi sensitif.

Company has monitored publication and news related to the Company both through internal media and external media. Through internal media, PJB has published information 3 (three) publications in the form of Info PJB (editions 112, 113 and 114) and 24 (twenty four) press releases. Moreover, news by external media is 200 with 183 positive tonnages, 10 with negative tonnage, 1 with neutral tonnage, and 6 with sensitive tonnage.



PLTU Tenayan
Tenayan CFPP



Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan Audit
Audited Financial Statements



Referensi Kriteria ARK
ARK Criteria Reference



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY



Pendahuluan
Introduction



Laporan Manajemen
Management Report



Profil Perusahaan
Company Profile



Tinjauan Pendukung Bisnis
Business Support Review



Analisis dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis



Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan Audit
Audited Financial Statements



Referensi Kriteria ARS
ARS Criteria Reference

TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GOVERNANCE

Komitmen PJB terhadap perlindungan hak seluruh pemangku kepentingan diterapkan melalui program Tanggung Jawab Sosial. PJB menciptakan sinergi yang baik dan tumbuh bersama para Pemangku Kepentingan dalam rangka mewujudkan keseimbangan antara harapan pemangku kepentingan dan tujuan perusahaan menjadi “most trusted and preferred company”.

PJB's commitment to the protection of stakeholder rights is implemented through the Corporate Social Responsibility program. PJB establishes a good synergy and grows with the Stakeholders to balance the stakeholder expectations and the company's mission to be the “most trusted and preferred company”.

Komitmen Pada Tanggung Jawab Sosial

Commitment on CSR

Pemangku kepentingan berperan penting dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan sehingga PJB senantiasa menjaga hubungan baik dengan para pemangku kepentingan dengan menerapkan program tanggung jawab sosial. Kegiatan operasional PJB yang berpotensi menimbulkan risiko pada aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial juga mendorong PJB untuk memberikan manfaat yang nyata kepada para pemangku kepentingan dengan program tanggung jawab sosial. Selain itu, penerapan tanggung jawab sosial secara berkesinambungan juga merupakan wujud komitmen PJB untuk berkontribusi terhadap *sustainable development goals* (SDGs) serta menjamin keberlangsungan usaha jangka panjang.

PJB melaksanakan program tanggung jawab sosial secara terintegrasi dengan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Salah satu prinsip tata kelola perusahaan yang baik adalah responsibilitas yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program tanggung jawab sosial yang mencerminkan bahwa PJB tidak hanya mementingkan kepentingan Pemegang Saham, tetapi juga memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Sinergi dengan para pemangku juga menjadi bagian manifestasi budaya Perusahaan.

Program tanggung jawab sosial diterapkan oleh PJB sesuai dengan Standar Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) yang ditetapkan dalam Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris No.002.K/021/DIR/2019 dan 005.K/DK/PJB/2019 serta Keputusan Direksi No.065.K/010/DIR/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR). Kebijakan tersebut disusun dengan mengacu pada Undang-Undang No. 40 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Peraturan Pemerintah No.47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta standar Internasional yaitu ISO 26000.

The stakeholder is a key determinant in supporting the achievement of company goals so that PJB can maintain good relations with stakeholders by implementing corporate social responsibility programs. PJB operational activities that have the potential to pose risks to environmental, economic, and social aspects also encourage PJB to provide tangible benefits to stakeholders with the corporate social responsibility programs. Also, the continued implementation of corporate social responsibility is a form of PJB's commitment to the contribution to sustainable development goals (SDGs) and to ensure long-term business continuity.

PJB implements corporate social responsibility programs integrated with the application of the principles of Good Corporate Governance. One of the principles of Good Corporate Governance is Responsibility which is implemented through the implementation of a corporate social responsibility program that reflects that PJB does not only prioritize the interests of the Shareholders but also focuses on the interests of all stakeholders. Synergy with stakeholders is also a part of the manifestation of the Company's culture.

The corporate social responsibility program is implemented by PJB following the Company's Code of Conduct stipulated in the Joint Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners No.002.K/021/DIR/ 2019 and 005.K/DK/PJB/2019 and the Board of Directors Decree No.065.K/010/DIR/ 2013 concerning Guidelines for the Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR). The policy was prepared by referring to Law No. 40 concerning Limited Liability Company article 74 concerning Social and Environmental Responsibility, Government Regulation No.47 of 2012 concerning Corporate Social and Environmental Responsibility as well as International Standards, ISO 26000.

Oleh karena itu, program tanggung jawab sosial PJB mencakup kegiatan-kegiatan yang tidak terbatas pada filantropi sebagai wujud adopsi standar ISO 26000 yaitu terdiri dari beberapa aspek antara lain:

1. Tata Kelola Organisasi

PJB menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, khususnya terkait hubungan Perusahaan dengan pemangku kepentingan seperti Pemegang Saham, masyarakat, dan pihak-pihak internal dalam upaya meningkatkan nilai dan citra Perusahaan sehingga keberlanjutan usaha terjamin.

2. Hak Asasi Manusia

Dalam menjalankan aktivitas operasional dan bisnisnya, PJB memenuhi tanggung jawab terkait hak asasi manusia, mulai dari hak-hak dasar pribadi hingga sosial, hukum, dan ekonomi untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran nilai-nilai hak asasi manusia.

3. Praktik Ketenagakerjaan

PJB memperhatikan aspek-aspek ketenagakerjaan yang mencakup pemenuhan hak karyawan serta kesehatan dan keselamatan kerja. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penciptaan lingkungan kerja yang kondusif dan mencapai zero accident.

4. Lingkungan

PJB memperhatikan dan meminimalisasi dampak operasional terhadap lingkungan serta memberikan kontribusi yang berkesinambungan terkait pelestarian lingkungan hidup. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Perusahaan untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan seiring dengan meningkatkan operasional Perusahaan yang ekselen.

5. Praktik Operasi yang Adil

Program CSR yang dijalankan PJB melingkupi aspek operasional secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir. Dengan praktik operasi yang adil, maka Perusahaan telah berupaya mengatasi risiko kemungkinan terjadinya praktik pelanggaran terhadap pengadaan yang tidak sesuai dengan regulasi.

6. Isu-Isu Konsumen

Agar dapat memberikan kepuasan dan meningkatkan keterikatan bagi konsumen, maka PJB menjalankan aktivitas pemasaran yang terbuka serta berkomitmen melindungi keselamatan dan kesehatan konsumen. Selain itu, PJB melakukan pengelolaan yang efektif atas layanan konsumen, termasuk layanan keluhan disertai perlindungan atas privasi konsumen.

7. Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat

Sebagai bentuk kontribusi Perusahaan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, PJB menekankan keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan usaha pemberdayaan dan pengembangan masyarakat

Therefore, PJB's corporate social responsibility program includes activities that are not limited to philanthropy as a form of adoption of the ISO 26000 standard which consists of several aspects including:

1. Organizational Governance

PJB implements good corporate governance, especially related to the Company's relationship with stakeholders such as Shareholders, society, and internal parties to improve corporate values and image so that the business continuity can be guaranteed.

2. Human rights

In performing the operations and business activities, PJB fulfills the responsibilities related to human rights, from individual to social, legal, and economic rights to prevent violations against Human Rights.

3. Employment Practices

PJB considers labor aspects which include fulfilling employee rights as well as occupational health and safety. This is conducted as a form of an establishment of a conducive operational environment.

4. Environment

PJB considers and minimizes operational impacts on the environment and provides sustainable contributions related to environmental conservation. This initiative is conducted in the form of the Company's commitment to preserving the environmental sustainability in line with the improvement of the Company's excellent operations.

5. Fair Operation Practices

The CSR program that is run by PJB covers overall operational aspects, from upstream to downstream. With the practice of fair operation, the Company has attempted to handle the risk of potential violations against procurements which are non-compliance with the regulation.

6. Customer Issues

To provide satisfaction and enhance the engagement of customers, PJB implements an open marketing activity and commits to protect consumer's health and safety. Also, PJB performs effective management of customer services, including customer care with consumer privacy protection.

7. Community Involvement and Development

As a form of the Company's contribution to the community's welfare, PJB emphasizes community involvement in the entire community's empowerment and development activities.

PJB juga melengkapi panduan pelaksanaan program tanggung jawab sosial dengan menyusun visi, misi, *roadmap* dan strategi CSR yang senantiasa disempurnakan untuk mendukung strategi korporasi, khususnya dalam pencapaian *strategy objective* “*Most Trusted and Preferred Company*”. Pihak manajemen terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan maupun perangkat pendukungnya seperti *roadmap* dan strategi CSR Perusahaan yang disahkan oleh Direktur Utama pada tahun 2018.

PJB also enhances the guidelines for implementing corporate social responsibility programs by developing a vision, mission, roadmap, and CSR strategy that is constantly being refined to support corporate strategy, especially in achieving the objective strategy of “*Most Trusted and Preferred Company*”. Management is directly involved in the formulation of policies and supporting tools such as the Company’s CSR roadmap and strategy which was endorsed by the President Director in 2018.

Visi Misi CSR PJB Vision and Mission of PJB’s CSR

VISI CSR PJB PJB’S CSR VISION



Menjadi Perusahaan Energi yang memiliki kinerja tinggi dalam pengelolaan dampak lingkungan, sosial, ekonomi, dengan memperhatikan keseimbangan antara harapan pemangku kepentingan dan tujuan perusahaan untuk menjadi “*most trusted and preferred company*”.

Becoming a high-performance electricity company in managing environmental, social and economic impacts by considering the synergy between the expectation of stakeholders and the objective of the Company to be the most trusted and private company

MISI CSR PJB PJB’S CSR MISSION

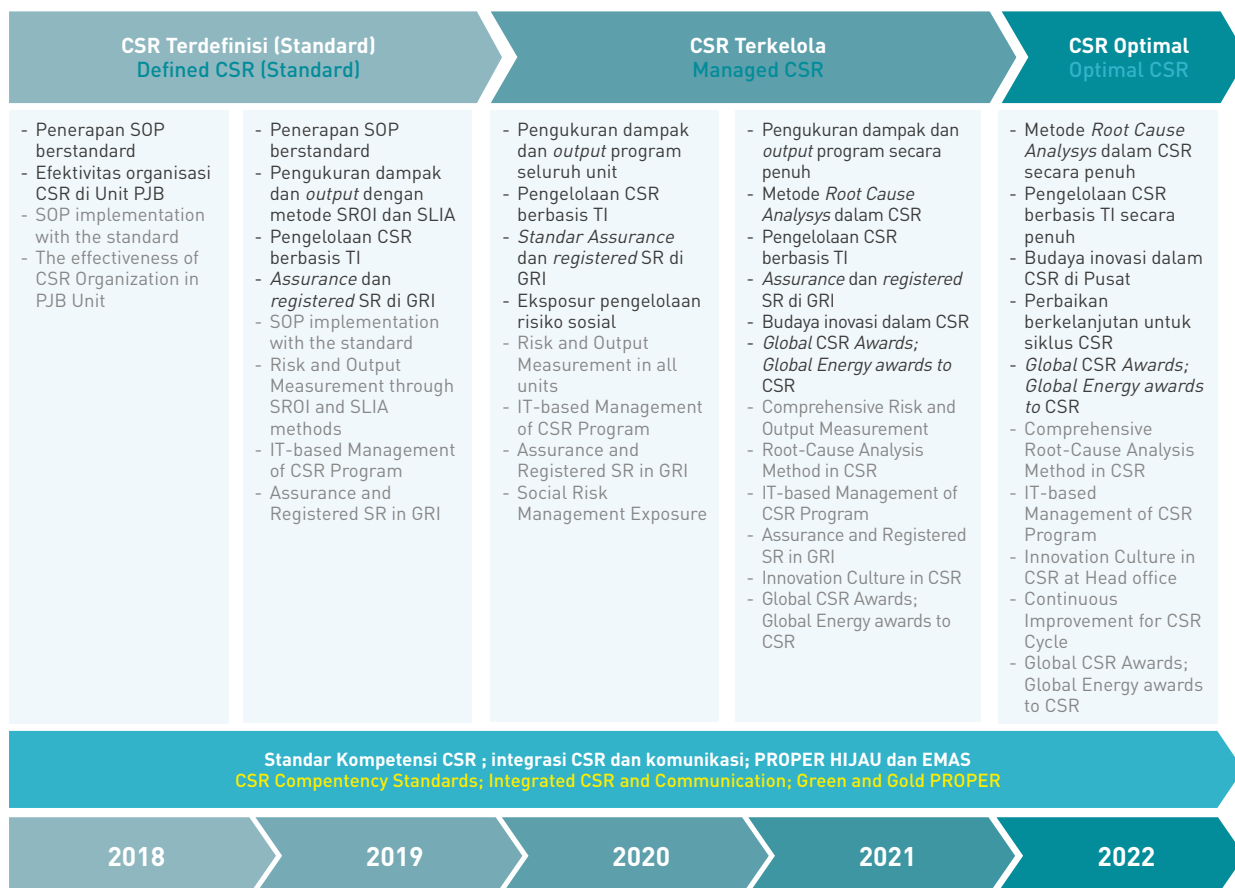


- Meningkatkan reputasi perusahaan melalui peningkatan kinerja lingkungan, sosial, dan ekonomi dengan program-program CSR yang lebih berkualitas dan akuntabel.
- Meningkatkan orientasi pengelolaan program yang terukur dampaknya.
- Meningkatkan dukungan terhadap operasi PJB melalui peningkatan penerimaan para pemangku kepentingan terhadap eksistensi PJB sebagai bagian dari masyarakat (*corporate citizenship*).
- Meningkatkan konsistensi komitmen terhadap keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat melalui pelibatan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan program-program CSR relevan dan unik.
- Meningkatkan kualitas hubungan yang luas dengan para pemangku kepentingan melalui strategi komunikasi yang elegan mempromosikan tema CSR yang kokoh, sesuai dengan tujuan perusahaan dan harapan para pemangku kepentingan.
- Improving the Company’s reputation through the improvement in environmental, social and economic performance with high-quality and accountable CSR programs
- Enhancing the orientation of program introduction with measured impacts
- Enhancing the support for PJB operations by increasing the number of stakeholders towards the existence of PJB as a part of the community (*corporate citizenship*)
- Improving the consistency of commitment to the sustainable community’s welfare through discussions among stakeholders in managing the relevant and unique CSR Programs
- Improving the quality of wide relationship with the stakeholders through a communication strategy which is elegant to promote the solid theme of CSR, in accordance with the Company’s objectives and Stakeholder’s expectations.



Roadmap CSR 2018-2022

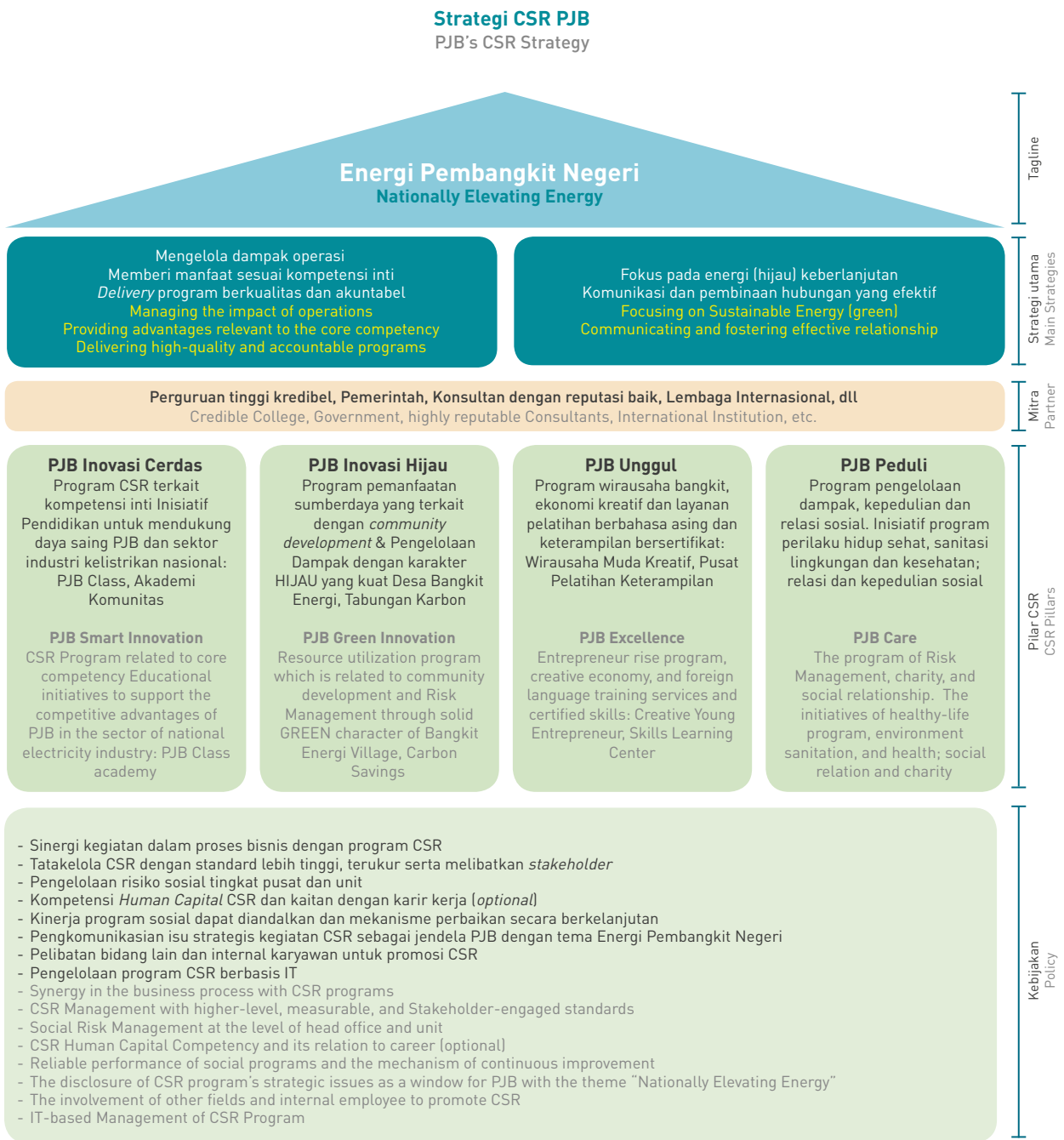
CSR Roadmap 2018-2022



Selain *roadmap* CSR, PJB juga memiliki dan menerapkan strategi untuk mewujudkan pelaksanaan program CSR yang terorganisasi dengan baik sehingga diharapkan menghasilkan dampak yang terukur dan nyata bagi pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

In addition to the CSR Roadmap, PJB also develops and implements strategies to realize the establishment of a well-organized CSR program that provides measurable and tangible impacts for community development and environmental preservation.





PJB terus berupaya meningkatkan kualitas pelaksanaan CSR serta mengembangkan cakupan pelaksanaan agar manfaat yang dihadirkan dapat dirasakan oleh lebih banyak pihak. Upaya ini diharapkan dapat menurunkan dampak dari berbagai keputusan dan kegiatan Perusahaan guna memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh pemangku kepentingan yang telah diidentifikasi sebelum program diimplementasikan.

PJB continues to improve the quality of CSR programs and expand the scope of implementation to spread the benefits for all parties. This effort is expected to reduce the impact of various decisions and activities of the Company to provide maximum benefits to all stakeholders identified before the program is implemented.

Struktur Pengelola Management Structure

PJB membentuk pengelola program CSR yang dibagi berdasarkan area pelaksanaan. Di kantor pusat, program CSR PJB dikelola oleh Bidang *Stakeholder Management* (BSHM) yang berada di bawah koordinasi Sekretaris Perusahaan. Sementara itu, Bidang Umum dan CSR bertanggung jawab atas pengelolaan program CSR di Unit Pembangkitan.

BSHM memiliki peran sebagai organ penghubung komunikasi antara Perusahaan dan masyarakat. Tugas dan tanggung jawab BSHM sebagai pengelola CSR PJB antara lain melakukan pemetaan sosial, menyusun perencanaan, eksekusi program, pemantauan, serta evaluasi berkala terhadap efektivitas program. Tiap pemimpin dalam organ BSHM bertugas dan bertanggung jawab dalam memastikan pengelolaan hubungan baik Perusahaan dengan masyarakat dan Pemerintah, khususnya melalui pelaksanaan program CSR.

Secara struktural, Kepala Bidang SHM membawahi Manajer CSR. Di Unit Pembangkitan, pengelolaan CSR PJB dipimpin oleh General Manager yang membawahi Manajer Keuangan dan Administrasi. Dalam mengelola pelaksanaan CSR, Manajer Keuangan dan Administrasi membawahi Supervisor Umum dan CSR serta Staf CSR.

PJB forms CSR program management that is divided based on the area of implementation. At the head office, the PJB CSR program is managed by Stakeholder Management (BSHM) under the coordination of the Corporate Secretary. Meanwhile, General Affairs and CSR Division are responsible for managing CSR programs in the Generation Unit.

Stakeholder Management Division acts as a liaison between the Company and the community. The tasks and responsibilities of the Stakeholder Management Division as the manager of CSR PJB include social mapping, compiling plans, program execution, monitoring, and periodic evaluations of program effectiveness. Each leader of the Stakeholder Management Division is tasked and responsible for ensuring the management of the Company's good relations with the community and the Government, especially through the implementation of CSR programs.

Structurally, the Head of the SHM Division supervises the Manager of CSR. In the Generation Unit, the management of PJB CSR is led by the General Manager who supervises the Finance and Administration Manager. In managing the implementation of CSR, the Finance and Administration Manager and supervises General Affairs and CSR Supervisors and CSR Staff.

Metode Perumusan Program Tanggung Jawab Sosial Corporate Social Responsibility Planning Method

Social mapping dilaksanakan oleh PJB sebagai pendekatan dalam merumuskan isu-isu penting pada tanggung jawab sosial untuk memastikan agar program yang dibuat tepat sasaran sesuai dengan risiko, dampak yang akan muncul, hingga ekspektasi dari *stakeholder* tersebut. Aktivitas *social mapping* dimulai dengan pemetaan wilayah dan demografi di sekitar unit pembangkitan, kemudian PJB mengidentifikasi pihak-pihak penerima manfaat, potensi dan masalah yang terjadi di wilayah tersebut.

PJB melakukan kerjasama dengan pihak independen seperti Universitas dan Lembaga Independen dalam kegiatan *social mapping*. *Focus Group Discussion* dengan pemangku kepentingan seperti Pemerintah, masyarakat, LSM, maupun perusahaan lain yang berada di sekitar Unit Pembangkitan untuk mengidentifikasi sasaran dan masalah sosial yang terjadi. PJB juga melakukan pemetaan risiko terhadap aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial, kemudian mempersiapkan tindakan penanggulangannya. Hasil *Social mapping* memberikan gambaran untuk menentukan kegiatan tanggung jawab sosial yang diperlukan serta lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut agar setiap program yang dilaksanakan oleh PJB dapat menjawab kebutuhan para pemangku kepentingan sehingga menciptakan reputasi yang baik bagi PJB.

Social mapping is carried out by PJB as an approach in formulating important issues on social responsibility to ensure that programs are made on target following risks, potential impacts, to the expectations of these stakeholders. The social mapping begins with mapping the area and demographics around the generation unit, then the PJB identifies the beneficiaries, potential, and problems that occur in the area.

PJB cooperates with independent parties such as universities and independent institutions in social mapping activities. Focus Group Discussion with stakeholders such as the Government, the community, NGOs, and other companies in the vicinity of the Generating Unit to identify targets and social problems that occur. PJB also maps risks to environmental, economic, and social aspects, then prepares mitigation actions. The results of the social mapping provide an overview to determine the required social responsibility activities and the location of the implementation of these activities so that each program implemented by PJB can answer the needs of stakeholders to create a good reputation.



Pemangku Kepentingan Penting Key Stakeholders

PJB melaksanakan pemetaan pemangku kepentingan (*stakeholder mapping*) sebagai upaya untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang berperan signifikan terhadap keberlanjutan bisnis Perusahaan. Proses identifikasi dilakukan dengan mengumpulkan informasi mengenai pengaruh pihak-pihak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap PJB. Selain itu, PJB juga mengumpulkan informasi mengenai harapan pihak-pihak terkait terhadap PJB. Hasil dari *stakeholder mapping* yaitu PJB mendapatkan data pemangku kepentingan yang paling berkepentingan secara timbal balik, serta isu penting yang relevan antara kedua belah pihak sebagai berikut.

PJB carries out stakeholder mapping to identify parties who have a significant role in the Company's business continuity. The identification process is by gathering information about the influence of related parties both directly and indirectly on PJB. Additionally, PJB collects information regarding the expectations of related parties towards PJB. The result of stakeholder mapping is that the PJB receives the data of the most valuable stakeholders mutually, as well as the relevant important issues between the two parties as follows.

Pemangku Kepentingan Stakeholders	Keterlibatan Involvement	Topik Topics
Pihak Internal Internal Parties		
Pemegang Saham Shareholders	RUPS, Rapat Kerja, Laporan GMS, Work Meetings, Reports	Peningkatan Kinerja Perusahaan dan Dukungan Pada Kepentingan Pemegang Saham Company's Performance Improvement and Shareholder's Interest Support
Karyawan Employees	Serikat Pekerja dan Perjanjian Kerja Bersama dan Pendidikan dan Pelatihan Workers Union and Joint Work-Agreement and Education and Training	Terjaminnya Kesejahteraan Pekerja Beserta Keluarganya; Suasana kerja yang kondusif, sehat, dan aman; Jenjang karir dan penilaian kinerja yang jelas, setara, dan tidak terdapat praktik diskriminasi Guarantee of Workers Welfare and their families; conducive, healthy and safe work atmosphere; transparent, fair, and non-discriminative career path and performance assessment.
Pihak Eksternal External Parties		
Pelanggan Customers	Survei Kepuasan Pelanggan, Rapat Koordinasi; Komunikasi melalui media yang tersedia (telepon dan tertulis) Customer Satisfaction Survey, Joint Meetings; Communication through available media (telephone and letter)	Kontinuitas dan keandalan pasokan energi listrik; Harga jual yang bersaing dan efisien Continuity and reliability of electricity supply; Competitive and efficient sale prices.
Pemasok Suppliers	Kontrak dan Perjanjian; <i>Supplier Gathering</i> ; Penilaian Kinerja Pemasok; Kuesioner dan survei Contracts and Agreements; Supplier Gathering; Supplier Performance assessment; Questionnaires and surveys.	Proses pengadaan yang adil dan Transparan; Pembayaran Tepat Waktu; Proses evaluasi yang objektif; Hubungan yang harmonis Fair and transparent procurement process; On-time payment; Objective evaluation process; Harmonious relationship.
Pemerintah Government	Kepatuhan terhadap Peraturan; Kesehatan Perusahaan; Kontribusi ekonomi pada Pemerintah (pajak dan pengurangan subsidi) Compliance with Regulation; Company's Sound Level; Economic contribution to the Government (tax and subsidy reduction).	Kepatuhan terhadap Peraturan; Kesehatan Perusahaan; Kontribusi ekonomi pada Pemerintah (pajak dan pengurangan subsidi) Compliance with Regulation; Company's Sound Level; Economic contribution to the Government (tax and subsidy reduction).
Masyarakat Society	Kegiatan <i>Corporate Social Responsibility</i> ; Program Kemitraan; Pelatihan Masyarakat; Forum tatap muka Corporate Social Responsibility program; Partnership Program; Social Training; Face-to-face forum.	Dapat tumbuh dan berkembang selaras dengan tumbuh dan berkembangnya Perusahaan; Hubungan yang harmonis tanpa konflik; Dampak negatif terhadap lingkungan yang minimal Able to grow and develop in line with Company's growth and development; Harmonious relationship without conflict; Minimum negative impact on environment.
Media Massa Mass media	Konferensi pers; <i>Media gathering</i> ; <i>Media visit</i> Press conference; Media gathering; Media visit	Memperoleh akses informasi yang luas Gaining access to wider information

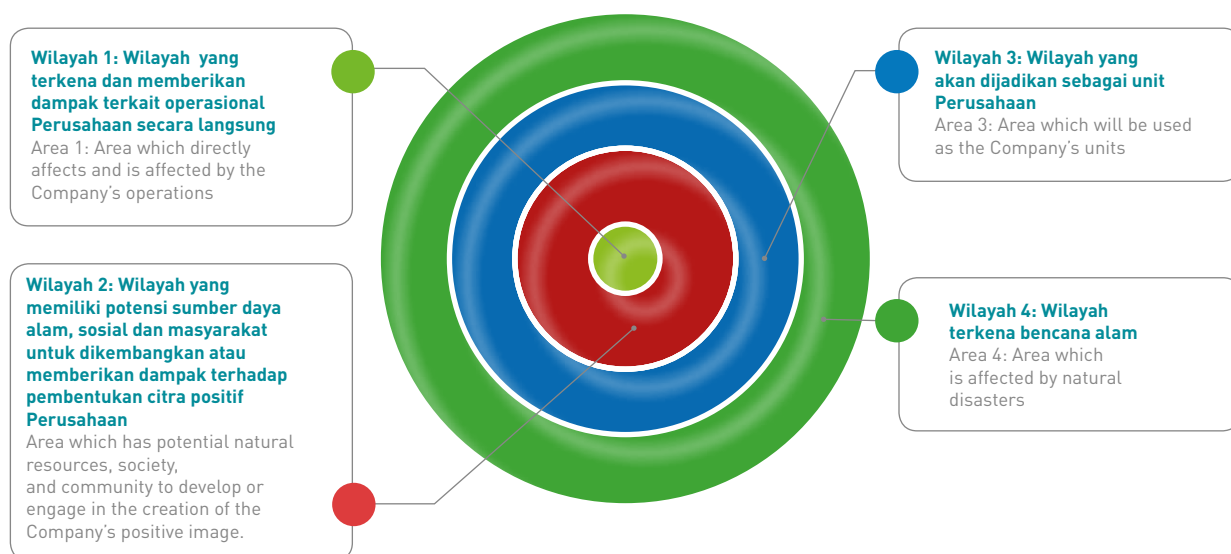
Lingkup Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Corporate Social Responsibility Scope

Hasil *social* dan *stakeholder mapping* menjadi landasan penyusunan program tanggung jawab sosial PJB berdasarkan prioritas utama dengan mempertimbangkan hubungan dua arah yang baik antara Perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan. Program tanggung jawab sosial PJB diklasifikasikan ke dalam beberapa tipologi yaitu pemberdayaan, pengembangan kapasitas, infrastruktur, dan donasi yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, keagamaan dan lingkungan. Penerapan program tersebut telah memenuhi kewajiban PJB sebagai perusahaan yang menjalankan aktivitas operasional dengan potensi menimbulkan masalah lingkungan bagi masyarakat sekitar area operasional Perusahaan.

PJB juga melakukan klasifikasi terhadap lokasi pelaksanaan program tanggung jawab sosial. Lokasi dikelompokkan menjadi empat wilayah berdasarkan prioritas area yang berhubungan dengan kegiatan operasional Perusahaan sebagai berikut.

The social and stakeholder mapping results become the basis for PJB's Corporate Social Responsibility program planning based on top priorities by considering a good two-way relationship between the Company and all stakeholders. PJB's Corporate Social Responsibility program is classified into several typologies: empowerment, capacity building, infrastructure, and donations covering the fields of education, health, economic, social, cultural, religious, and environmental. The implementation of the program has fulfilled PJB's obligations as a company that carries out operational activities with the potential to cause environmental problems for the communities surrounding the Company's operational areas.

PJB also classifies the location of the programs. The locations are spread into four regions based on priority areas related to the Company's operational activities as follows.



PJB menerapkan beberapa program tanggung jawab sosial dalam rangka memenuhi kewajibannya sebagai perusahaan pembangkit diantaranya pengelolaan dan pemantauan lingkungan melalui pengukuran emisi gas buang, kualitas udara, ambien, dan kebisingan serta pengelolaan air sesuai dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pengelolaan limbah berdasarkan Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas; program pemenuhan hak-hak karyawan sesuai Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta perlindungan hak pelanggan sesuai Undang-Undang No.8 Tahun 1999 dan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Program tanggung jawab sosial yang dilaksanakan PJB juga sudah menerapkan aspek-aspek yang melebihi kewajiban diantaranya pemberian upah di atas UMR sebagai cerminan program tanggung jawab kepada karyawan; pengembangan *green power plant* dalam program tanggung jawab sosial terhadap lingkungan; pembuatan desa wisata *binor harmony*, kampung setrum (sentra energi terbarukan untuk masyarakat), daun *sustainable village*, dan program pijar berdaya dalam program tanggung jawab terhadap pengembangan sosial dan kemasyarakatan; dan lain-lain.

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 065.K/010/CIR/2013, untuk meningkatkan kredibilitas terhadap inisiatif CSR, Manajemen PJB ikut terlibat untuk mereview segala kegiatan CSR yang dilaporkan dalam Laporan CSR, Laporan Manajemen, Laporan Tahunan, dan Laporan Keberlanjutan.

Melalui penerapan program tanggung jawab sosial, PJB berkomitmen untuk turut mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan antara lain pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, serta kesehatan dan kesejahteraan yang baik; membangun infrastruktur yang kuat, mendukung industrialisasi yang inklusif dan membantu perkembangan inovasi serta memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan; menjaga ekosistem laut dan darat; memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua. Peran PJB dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pelaksanaan sejumlah program diuraikan lebih lanjut dalam sub bab Tanggung Jawab Sosial Terhadap Lingkungan, Karyawan, Pelanggan, dan Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan. Selain itu, PJB juga telah menyusun Laporan Keberlanjutan yang mengacu pada Pedoman Pelaporan Keberlanjutan (*Sustainability Reporting Guidelines*) yang disusun oleh *Global Reporting Initiative (GRI) Standards*. Laporan ini memuat kinerja keberlanjutan PJB pada aspek lingkungan, sosial dan ekonomi.

PJB establishes several Corporate Social Responsibility programs to fulfill its obligations as a power plant company including environmental management and monitoring through measurement of exhaust emissions, air quality, ambient, and noise as well as water management under Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Conservation and Management and Waste Management based on Government Regulation No.101 of 2014 concerning Management of Hazardous and Toxic Waste; community development program under Government Regulation No.47 of 2012 concerning Corporate Social Responsibilities of Limited Liability Companies; employee's rights fulfillment program under Law No. 13 of 2003 concerning Manpower and protection of customer rights under Law No. 8 of 1999 and Law No.5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.

The Corporate Social Responsibility program established by PJB has also applied aspects that exceed the obligations including providing wages above the minimum standard (UMR) as a reflection of Corporate Social Responsibility program to employees; the development of a green power plant as Corporate Social Responsibility program to the environment; Binor Harmony tourism village, Setrum Village (public renewable energy center) as Corporate Daun Sustainable Village, and Pijar Berjaya program as Social Responsibility programs to social development and welfare; and others.

By the Board of Directors Decree No. 065.K /010/CIR/2013, to enhance the credibility of CSR initiatives, PJB Management is involved in reviewing all CSR activities reported in CSR Reports, Management Reports, Annual Reports and Sustainability Reports.

Through the implementation of Corporate Social Responsibility programs, PJB is committed to supporting sustainable development objectives including decent work and economic growth, as well as good health and welfare; building strong infrastructure, supporting inclusive industrialization, and supporting innovation, and ensuring sustainable consumption and production patterns; safeguarding marine and land ecosystems; ensuring access to energy that is affordable, reliable, sustainable, and modern for the public. The role of PJB in supporting sustainable development objectives through the establishment of several programs is stated further in the sub-section of Corporate Social Responsibility to the Environment, Employees, Customers, and Social and Community Development. Also, PJB has compiled a Sustainability Report that refers to the Sustainability Reporting Guidelines compiled by the Global Reporting Initiative (GRI) Standards. This report consists of PJB's sustainable performance on environmental, social, and economic aspects.

Pengelolaan Dampak Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Social, Economic and Environmental Impacts Management

PJB telah melakukan pemetaan risiko dan pengelolaan dampak yang ditimbulkan dari aktivitas operasional terhadap aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial sebagai berikut:

PJB has conducted risk mapping and management of operational activities on the environmental, economic, and social aspects as follows:

Aspek Aspects	Risiko dan Dampak Risks and Impacts	Tindakan Penanggulangan Countermeasures
Lingkungan Environmental	Pencemaran Udara Air pollution	Pengelolaan Emisi Udara dengan menggunakan alat pengendali seperti <i>electronic presipitator</i> (ESP); pengukuran emisi gas buang, kualitas udara ambien dan kebisingan; serta penggunaan bahan bakar gas yang termasuk ramah lingkungan. Air Emission Management using control devices such as electronic precipitators (ESP); exhaust emissions measurement, ambient, air quality, and noise; and the use of green gas fuel
	Pencemaran Air Water pollution	Program Konservasi air Water Conservation Program
	Pencemaran Limbah Waste pollution	Pengelolaan Limbah Cair, Limbah B3, dan Limbah Padat Non B3 Management of Liquid Waste, toxic and hazardous Waste, and Non-toxic and hazardous Solid Waste
	Kerusakan Terumbu Karang Corral reef damage	Perlindungan Keanekaragaman hayati dengan sejumlah upaya pelestarian seperti konservasi terumbu karang di UP Gresik, UP Paiton, dan UP Muara Tawar Biodiversity protection with a number of conservation efforts such as coral reef conservation in Gresik, Paiton, and Muara Tawar Generation Unit
Ekonomi Economic	Kecemburuan masyarakat terkait ekonomi Social Envy in economical aspects	Kerjasama dengan pemasok lokal Cooperation with local suppliers
	Anggapan terdapat penurunan tingkat produktivitas hasil budidaya (pertanian, perkebunan, dan perikanan) warga akibat operasional pembangkit Assumed there is a level decrease in the results of residents cultivation (agriculture, plantation, and fisheries) due to plant operations	Merumuskan program-program CSR untuk menjawab produktivitas hasil budidaya warga sekitar. Contohnya adalah <i>Program Organic Integrated System</i> , Desa Wisata Binor Harmoni. Planning CSR programs to resolve the productivity of the resident's cultivation. For example is the Organic Integrated System Program, Binor Harmoni Tourism Village
Sosial Social	Kesenjangan pemerataan penerima program CSR Gaps in CSR program classification	Pemerataan wilayah cakupan program CSR yang menyasar ke setiap Ring Perusahaan dengan memperhatikan prioritas kebutuhan masyarakat dan kondisi Perusahaan. The equal distribution of CSR programs coverage that targets every Company Ring by considering the priority needs of the community and the condition of the Company.
	Isu perekrutan tenaga kerja lokal Issues of local workforce recruitment	Perekrutan tenaga lokal sebagai karyawan non-organik dan alternatif lainnya melalui program pemberdayaan masyarakat, contohnya adalah program Desa Wisata Binor <i>Harmony</i> Recruitment of local workforces as non-organic employees and other alternatives through community empowerment programs; in example, Binor Harmony tourism village program



Rencana dan Realisasi Program Tanggung Jawab Sosial Corporate Social Responsibility Program Plan and Realization

PJB telah mengalokasikan dana sebesar Rp34,09 miliar untuk pelaksanaan program tanggung jawab sosial tahun 2019. Anggaran tersebut untuk kegiatan-kegiatan CSR di bidang pemberdayaan, pengembangan kapasitas, infrastruktur dan donasi. Anggaran CSR bersumber dari internal Perusahaan. Realisasi biaya pelaksanaan program CID PJB selama tahun 2019 mencapai Rp32,23 miliar atau 94,5% dari RKAP dan mengalami peningkatan sebesar 36,74% dibandingkan tahun 2018.

PJB has budgeted Rp34.09 billion for the Corporate Social Responsibility Program in 2019. The budget is for CSR activities in the aspect of empowerment, capacity building, infrastructure, and donations. The CSR budget is from the Company's internal resources. The realization of the cost of PJB's CID program in 2019 reached Rp32.23 billion or 94.5% from the ABOP, 36.74% higher compared to 2018.

Anggaran CSR Tahun 2017-2019 (Rp Miliar)

CSR Budget for 2017-2019 (Rp. Billion)

No.	Tipologi Typology	2017		2018		2019	
		RKAP ABOP	Realisasi Realization	RKAP ABOP	Realisasi Realization	RKAP ABOP	Realisasi Realization
1.	Pemberdayaan Empowerment	10,98	7,69	6,49	7,74	13,13	14,79
2.	Pengembangan Kapasitas Capacity Building	5,84	4,64	9,61	9,03	13,33	5,92
3.	Infrastruktur Infrastructure	2,25	4,13	3,63	3,58	4,63	7,34
4.	Donasi Donation	3,37	3,74	3,26	3,22	2,99	4,17
Jumlah Total		22,16	20,19	22,99	23,57	34,09	32,23

Pengukuran Capaian Program CSR Measurement of CSR Program Achievements

Dalam mengukur dampak dan *output* capaian maka perusahaan melakukan *review* melalui Laporan CSR yang juga melibatkan manajemen. Selain itu, dilakukan pula pendekatan berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pendekatan IKM dilakukan secara berkala setiap tahunnya yang merupakan bentuk dari pemantauan dan evaluasi. IKM akan menunjukkan seberapa besar tingkat kepuasan masyarakat terhadap program CSR yang dilaksanakan oleh Perusahaan. Beberapa komponen penilaiannya berupa tingkat kepuasan terhadap keseluruhan program CSR, tingkat kepuasan terhadap manajemen program CSR, serta tingkat kepuasan pelayanan dan penyaluran program CSR. Selain itu, beberapa Unit Pembangkitan pun mengukur dampak kebermanfaatn program CSR terhadap pengembangan masyarakat yang terjadi melalui studi *Multiplayer Effect* (MPE). Dengan demikian, General Manager dari masing-masing unit terlibat untuk menentukan langkah berikutnya atas tindak lanjut terhadap capaian program CSR.

In measuring the impact and output, the company reviews through CSR reports that also involve management. Also, an approach is in the form of the Community Satisfaction Index (CSI). CSI approach is conducted regularly every year which is a form of monitoring and evaluation. CSI will show the level of community satisfaction with CSR programs established by the Company. Some components of the assessment are the level of satisfaction with the overall CSR program, with the CSR management, and with the service and the CSR distribution. Besides that, several Generation Units measure the impact of the benefits of CSR programs on community development that occur through the Multiplayer Effect (MPE) study. Thus, the General Manager of each unit is involved to determine the next steps for the follow-up on the achievements of the CSR program.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT HAK ASASI MANUSIA (HAM) CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TO THE HUMAN RIGHTS

Komitmen dan Kebijakan Commitment and Policy

PJB memiliki komitmen untuk melaksanakan kegiatan operasional secara bertanggung jawab dengan menjunjung nilai-nilai Perusahaan, selaras pada prinsip penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). PJB mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dalam praktik ketenagakerjaan diantaranya tindakan anti diskriminasi, kebebasan berserikat, pencegahan tenaga kerja anak dan praktik kerja paksa, pemberian akses kesehatan dan keselamatan kerja sebagai upaya menghormati hak-hak karyawan. Selain itu, PJB juga menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan masukan yang membangun kepada Perusahaan.

Code Of Conduct dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) menjadi pedoman penerapan prinsip-prinsip HAM di lingkungan PJB. Komitmen anti diskriminasi dan nilai-nilai lainnya telah dimuat dalam *Code Of Conduct*. Sedangkan hak-hak karyawan PJB diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disahkan berdasarkan Keputusan Bersama antara PT PJB dengan Serikat Pekerja PJB Nomor PT PJB: 003.K/021/DIR/2019 dan No. SP PJB: 067.K/SP-DPP/2019. PKB disusun mengacu pada Undang Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.

Penerapan prinsip HAM di lingkungan PJB diharapkan dapat mendukung keberlanjutan bisnis ke depan. Salah satu manfaat bagi PJB ketika menerapkan prinsip HAM diantaranya produktivitas dan tingkat retensi karyawan meningkat seiring dengan lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif sehingga PJB dapat lebih diminati di pasar lapangan kerja. Penerapan prinsip HAM secara konsisten juga turut berkontribusi terhadap citra positif PJB.

Rencana Program 2019 Program Plan 2019

PJB melaksanakan beberapa kegiatan bersama karyawan untuk memperoleh tanggapan mengenai isu-isu praktik ketenagakerjaan sebagai salah satu proses dalam penyusunan rencana penerapan prinsip HAM. Kegiatan tersebut diantaranya Forum Tatap Muka antara Manajemen dengan seluruh karyawan setiap bulan dan perumusan maupun pembahasan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang melibatkan Serikat Pekerja sebagai perwakilan karyawan dengan Manajemen. Selain itu, seluruh jajaran Direksi memberikan arahan langsung dalam perumusan PKB tersebut.

PJB is committed to carrying out operational activities responsibly by upholding the Company's values, in line with the principles of respect and protection of human rights. PJB integrates human rights principles in labor practices including anti-discrimination acts, freedom of association, prevention of child labor and forced labor practices, access to health and safety as an effort to respect the rights of employees. PJB also respects the community's right to deliver any recommendation to the Company.

The Code of Conduct and Collective Labor Agreement (CLA) serves as a guideline for the application of human rights principles in the PJB. Anti-discrimination commitments and other values have been included in the Code of Conduct. While the rights of PJB employees are regulated in a Joint Work Agreement (PKB) which is ratified based on a Joint Decree between PT PJB and PJB's Workers Union Number: 003.K/021/DIR/2019 and No. SP PJB: 067.K/SP-DPP/2019. CLA is prepared by referring to Law No. 13 of 2003 concerning Manpower and Minister of Manpower Regulation No.28 of 2014 concerning Procedures for Preparing and Ratifying Company Regulations and the Registration of Collective Labor Agreements.

The application of human rights principles in the PJB environment is expected to support business sustainability in the future. One of the benefits of human rights application for PJB is that productivity and employee engagement increase along with a safe, harmonious, and conducive work environment; therefore, PJB can attract more in the job market. The consistent application of human rights also contributes to the positive image of PJB.

PJB conducts several activities with employees to obtain responses on labor practice issues as one of the processes in preparing plans to implement the human rights principles. These activities include a Face-to-Face Forum between Management and all employees every month and the formulation and discussion of the Collective Labor Agreement (CLA) which involves Trade Unions as employee representatives with Management. Also, all levels of the Board of Directors provide direct direction in the formulation of the CLA.



Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan Audit
Audited Financial Statements



Referensi Kriteria ARS
ARS Criteria Reference

Sejumlah isu terkait praktik ketenagakerjaan seperti jenjang karir dan penilaian kinerja yang jelas, setara dan tidak ada praktik diskriminasi; jaminan kesejahteraan karyawan beserta keluarga; serta suasana kerja yang kondusif, sehat, dan aman dibahas dalam kegiatan tersebut sebagai upaya perlindungan hak-hak karyawan termasuk prinsip HAM. Oleh karena itu, PJB menyusun rencana program tanggung jawab sosial PJB terkait HAM meliputi kesetaraan dalam kesempatan kerja dan pengembangan kompetensi, keadilan dalam pengupahan dan penghapusan diskriminasi, serta perlindungan penyaluran aspirasi dan pengaduan karyawan yang disertai dengan sosialisasi kebijakan baik *Code of Conduct* maupun PKB secara berkala untuk meningkatkan pemahaman seluruh pihak.

PJB memandang program tanggung jawab sosial terkait HAM menjadi salah satu langkah mitigasi terhadap dampak dan risiko pelanggaran HAM oleh Perusahaan berupa tidak adanya hak kebebasan berserikat, tidak dihormatinya hak dasar pekerja, dan mempekerjakan anak di bawah umur. Risiko reputasi dan gangguan operasional dapat terjadi apabila penerapan prinsip HAM tidak dilakukan secara konsisten, sehingga PJB memberlakukan pemberian sanksi bagi seluruh karyawan yang melakukan tindakan pelanggaran ketentuan Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.113 Tahun 2010 Bab III Pasal 4 ayat 2 tentang Peraturan Disiplin Karyawan. Sanksi dibagi ke dalam tiga jenis hukuman yaitu Disiplin Ringan, Disiplin Sedang, dan Disiplin Berat sebagai berikut.

Some issues related to employment practices such as career path as well as transparent and equal performance assessment and anti-discrimination acts; employee and family welfare guarantee; and a conducive, healthy, and safe working atmosphere discussed in the activity as an effort to protect the rights of employees including human rights principles. Therefore, PJB prepares PJB's social responsibility program plans related to human rights including equality in employment opportunities and competency development, fairness in wages and elimination of discrimination, as well as protection of employee aspirations and complaints accompanied by the socialization of policies both Code of Conduct and CLA regularly to increase understanding of all parties.

PJB believes the corporate social responsibility program related to human rights as one of the mitigation measures against the impact and risk of human rights violations by the company such as violation against rights to freedom of association, principle rights of workers, and child labor. Reputational risk and operational disruption can occur if the application of the human rights principle is not carried out consistently; therefore, PJB imposes sanctions on all employees who violate the Company's provisions based on the Board of Directors Decree No.113 of 2010 Chapter III Article 4 paragraph 2 concerning Employee Discipline Regulations. Sanctions are divided into three types of punishment: Light Discipline, Moderate Discipline, and Severe Discipline as follows.

Sanksi Disiplin Ringan Light Discipline Sanction

Peringatan tertulis sebanyak satu kali
Written warning once

Penundaan kenaikan *grade* atau pemotongan Tunjangan Posisi sebesar 50%
Postponement of grade promotion or deduction of Position Allowance by 50%

Pemotongan hak atas Insentif Prestasi Kerja dalam satu semester sebesar 25%
Deduction of rights for Work Achievement Incentives in one semester by 25%

Sanksi Disiplin Sedang Moderate Discipline Sanction

Peringatan tertulis hingga tiga kali
Written warning up to three times

Penundaan kenaikan *grade* atau pemotongan Tunjangan Posisi sebesar 100%
Postponement of grade promotion or deduction of Position Allowance by 100%

Penghapusan atas insentif prestasi kerja dalam satu semester
Deduction of rights for Work Achievement Incentives in one semester

Tambahan sanksi berupa rotasi, demosi, hingga tuntutan ganti rugi
Additional sanction in the form of rotation, demotion, and compensation claims

Sanksi Disiplin Berat Severe Discipline Sanction

Pemutusan hubungan kerja
Work termination

Tambahan sanksi berupa tuntutan ganti rugi
Additional sanctions in the form of compensation claims



Inisiatif Penerapan HAM

Human Rights Enforcement Initiatives

PJB telah melaksanakan sejumlah kegiatan sebagai wujud penerapan HAM dalam program tanggung jawab sosial diantaranya kepada karyawan antara lain:

1. Penghormatan Hak Dasar Pekerja (Penghapusan Diskriminasi, Standar Pengupahan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Pengembangan Kompetensi)

PJB menghormati hak asasi manusia dengan melaksanakan praktik ketenagakerjaan yang melarang segala bentuk diskriminasi dan menghargai perbedaan baik gender, usia, suku, ras, agama, asal-usul, maupun hambatan fisik. *Code Of Conduct* menjadi panduan etika karyawan dalam komitmen anti diskriminasi diantaranya karyawan dilarang mengeluarkan pernyataan yang mengejek, menyinggung dan memojokkan suatu gender, suku, ras, agama, asal usul dan hambatan fisik seseorang serta menghasut pihak lain untuk melakukan tindakan diskriminatif.

Karyawan PJB mendapatkan kesempatan yang sama dalam meniti jenjang karir sesuai potensi dan kinerjanya serta dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Kompensasi yang layak juga diberikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab jabatan serta kinerja karyawan. Hak-hak karyawan tersebut diatur dalam PKB.

Penerapan prinsip-prinsip HAM dalam kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan terutama kepada karyawan diharapkan dapat meningkatkan loyalitas karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis seiring dengan terjalinnya interaksi antar Insan Perusahaan yang adil, sopan, dan penuh rasa hormat. Selain itu, implementasi program tanggung jawab terhadap karyawan dalam bidang HAM mencerminkan peran dan kontribusi PJB dalam tujuan pembangunan berkelanjutan berupa pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, serta kesehatan dan kesejahteraan yang baik. Uraian lebih lanjut mengenai implementasi prinsip-prinsip HAM dijelaskan dalam Bab Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Praktik Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

2. Hak Kebebasan Berserikat

PJB membentuk Serikat Pekerja untuk memenuhi hak berserikat dan berkumpul bagi karyawan sebagaimana mengacu pada Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 104 dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Serikat Pekerja Pembangunan Jawa Bali (SP PJB) telah berdiri sejak 25 September 2002 dan telah terdaftar pada Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia No.KEP.539/M/BW/1999 tanggal 30 Desember 1999 dan No.02/SP/DPPINDP/ IV/09/2002 tanggal 25 September 2002.

PJB has conducted some activities as a manifestation of the application of human rights through corporate social responsibility programs including to employees as follows:

1. Principal Rights for Employees Tribute (Elimination of Discrimination, Salary Standard, Occupational Health and Safety, and Competence Development)

PJB respects human rights by implementing labor practices that prohibit all forms of discrimination and respect for differences in gender, age, ethnicity, race, religion, origin, and physical barriers. The Code of Conduct serves as an employee ethics guide in anti-discrimination commitments such as employees are prohibited from issuing statements that mock, offend and discredit a person's gender, ethnicity, race, religion, origin, and physical barriers and incite others to commit discriminatory actions.

PJB employees get the same opportunity in pursuing career paths according to their potential and performance and can attend education and training following applicable terms and conditions. Appropriate compensation is also provided following the duties and responsibilities of the position as well as employee performance. The employee's rights are regulated in the Collective Labor Agreement.

The application of human rights principles in corporate social responsibility activities, especially to employees, is expected to be able to increase employee loyalty, create a harmonious work environment along with the establishment of fair, polite, and respectful interactions among Company Personnel. Also, the implementation of the responsibility program for employees in the field of human rights reflects the role and contribution of PJB in the goals of sustainable development in the form of decent work and economic growth, as well as expected health and wealth. Further details regarding the implementation of human rights principles are explained in the Corporate Social Responsibility Chapter on Labor, Health, and Safety Practices.

2. Right for Freedom of Association

PJB forms a Workers Union to fulfill the right of association and assembly for employees as referred to in Law No. 13 of 2003 concerning Labor Article 104 and Law No. 21 of 2000 concerning Trade Unions. Pembangunan Jawa Bali's Workers Union was established on September 25, 2002, and was registered with the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia No. KEP.539 / M / BW / 1999 on December 30, 1999 and No.02 /SP/DPPINDP/IV/09/2002 on 25 September 2002. PJB's labor union is spread in all work units through management called the Unit Management Board (DPU).

SP PJB tersebar di semua unit kerja melalui kepengurusan yang bernama Dewan Pimpinan Unit (DPU). DPU ini mendapat arahan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP), pengurus pusat di Kantor Pusat PJB.

Karyawan PJB dapat menyampaikan aspirasi mengenai praktik ketenagakerjaan di Perusahaan melalui SP PJB. Selain itu, SP PJB berperan dalam proses penyelesaian masalah ketenagakerjaan sehingga mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.

3. Pencegahan Tenaga Kerja Anak dan Kerja Paksa

Definisi anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang No.13 tentang Ketenagakerjaan. PJB tidak mempekerjakan anak di bawah umur sebagaimana amanat Pasal 68 dan 69 Undang-Undang No.13 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur larangan mempekerjakan anak. Sampai dengan tahun 2019, karyawan aktif PJB didominasi oleh karyawan yang berada pada usia 26-30 tahun dengan jumlah 1.106 orang atau 35% dari jumlah karyawan PJB 2019. Sedangkan, karyawan dengan usia 18-20 tahun berjumlah 26 orang atau 1% dari jumlah karyawan PJB 2019.

PJB mengatur waktu kerja sebagai upaya pencegahan praktik kerja paksa di lingkungan Perusahaan. Waktu kerja karyawan PJB mengacu pada SK 098.K/010/DIR/2014 tentang Ketentuan Masuk Kerja Karyawan PJB. Selain itu, PKB juga memuat waktu kerja dan hari libur dalam Pasal 27 dan Kerja Lebih dalam Pasal 28. PJB melaksanakan kedua kebijakan tersebut secara konsisten, sehingga tidak terjadi insiden kerja paksa yang dialami oleh karyawan PJB.

4. Hak Penyaluran Aspirasi Politik

PJB melindungi hak karyawan dalam kegiatan politik dengan batasan tertentu yang dimuat di *Code of Conduct*. Aspirasi dan pandangan politik atau isu-isu kebijakan publik dapat disampaikan oleh karyawan PJB kepada Pemerintah dan *Stakeholder* dengan tidak menggunakan nama dan aset Perusahaan. Karyawan PJB juga dilarang memberikan dana Perusahaan kepada partai politik atau politisi. Selain itu, bagi karyawan PJB yang menduduki jabatan tertentu dalam partai politik atau menjadi calon legislatif atau calon eksekutif dari partai politik dalam Pemilihan Umum maka karyawan PJB tersebut mewajibkan untuk mengundurkan diri dari Perusahaan.

5. Sosialisasi Terhadap Etika Bekerja Insan Perusahaan

PJB melaksanakan sosialisasi kebijakan internal yang berlaku termasuk *Code of Conduct* dan PKB untuk meningkatkan pemahaman karyawan dan mendorong penerapan kebijakan secara berkelanjutan. Sosialisasi kebijakan tersebut dipandang sebagai langkah preventif dalam menghadapi risiko pelanggaran terhadap HAM yang diharapkan melahirkan kesadaran untuk patuh pada setiap ketentuan dalam kebijakan.

This DPU receives direction from the Central Board of Management (DPP), the central board at the PJB Head Office.

PJB employees can express their aspirations regarding labor practices in the Company through PJB's labor union. Also, PJB's labor union plays a role in the process of solving labor problems to create harmonious and fair industrial relations.

3. Prevention of Child Labor and Forced Labor

The definition of a child is any person under the age of 18 as outlined in Law No. 13 on Employment. PJB does not employ minors as mandated by Articles 68 and 69 of Act No. 13 concerning Manpower which regulates the prohibition of employing children. Until 2019, active PJB employees are dominated by employees who are aged 26-30 years with a total of 1,106 people or 35% of the total PJB 2019 employees. Meanwhile, the number of employees in the range of 18-20 years is 26 persons or 1% of the total number of employees PJB 2019.

PJB regulates working time as an effort to prevent forced labor practices within the Company. PJB employee working time refers to Board of Directors Decree 098.K / 010 / DIR / 2014 concerning Provisions for Employment of PJB Employees. CLA also includes work hours and days off in Article 27 and Overtime Job in Article 28. PJB implements both policies consistently, so there are no incidents of forced labor experienced by PJB employees.

4. Rights to Political Aspirations

PJB protects employees' rights in political activities with certain restrictions contained in the Code of Conduct. Political aspirations and views or public policy issues can be conveyed by PJB employees to the Government and Stakeholders by not using the Company's name and assets. PJB employees are also prohibited from giving Company funds to political parties or politicians. Also, for PJB employees who occupy certain positions in political parties or become legislative candidates or executive candidates for political parties in the Election, the PJB employees are required to resign from the Company.

5. Socialization of the Work Ethics of Company Personnel

PJB conducts socialization of applicable internal policies including the Code of Conduct and CLA to increase employee understanding and encourage the application of policies sustainably. The socialization of the policy is seen as a preventive measure in dealing with the risk of violation of human rights which is expected to create awareness to comply with every provision in the policy.

Code of Conduct yang memuat aspek Etika Bekerja Insan Perusahaan yang mencakup komitmen pengembangan diri, kemajuan & perkembangan perusahaan, dan komitmen anti diskriminasi disosialisasikan secara langsung melalui kegiatan *Coffee Morning*. Buku saku *Code of Conduct* juga dibagikan kepada seluruh insan Perusahaan. Sosialisasi PKB juga dilaksanakan secara berkala dengan pembagian buku saku ke seluruh karyawan oleh Dewan Pengurus Unit di unit-unit terkait.

Seluruh Jajaran Perusahaan terlibat dalam pelaksanaan program-program tersebut, termasuk Direksi yang melaksanakan pemantauan dan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap inisiatif program. Direksi juga bertanggung jawab secara penuh untuk setiap pelaporan dari inisiatif program yang tertuang di dalam Laporan Keberlanjutan. Selain itu, Direksi/Manajemen dengan SP PJB sepakat melakukan pertemuan secara berkala untuk membahas implementasi dari PKB dan mendiskusikan permasalahan yang ada di PJB, sebagaimana diatur dalam PKB Pasal 92. Adapun pada tahun 2019 telah dilakukan pertemuan berkala Direksi/Manajemen dengan SP PJB pada tanggal 23 Juli 2019 dan 19 Desember 2019.

Biaya Yang Dikeluarkan Program Cost

Salah satu inisiatif penerapan HAM dalam program tanggung jawab sosial PJB yaitu pemberian hak cuti kepada karyawan. Selama tahun 2019 realisasi biaya cuti tahunan sebesar Rp21,24 miliar menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp26,57 miliar. Sedangkan realisasi biaya cuti besar sebesar Rp4,03 miliar menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp12,68 miliar.

Prosedur Dalam Menghadapi Konflik Terkait HAM Procedure in Resolving Conflicts on Human Rights

PJB telah memiliki kebijakan internal sebagai upaya mitigasi keadaan darurat dan konflik ketenagakerjaan baik terkait HAM maupun permasalahan lainnya SK No.113.K/010/DIR/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Peraturan Disiplin Karyawan. Mekanisme pengendalian konflik ketenagakerjaan yang diterapkan di lingkungan PJB dilaksanakan sesuai prosedur Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Karyawan sebagai berikut:

The Code of Conduct which contains aspects of the Company's Work Ethics that includes commitments for personal development, company progress & development, and anti-discrimination commitments are directly socialized through Coffee Morning activities. The Code of Conduct pocketbook is also distributed to all Company people. CLA socialization is also carried out periodically by distributing pocketbooks to all employees by the Unit Management Board in the related units.

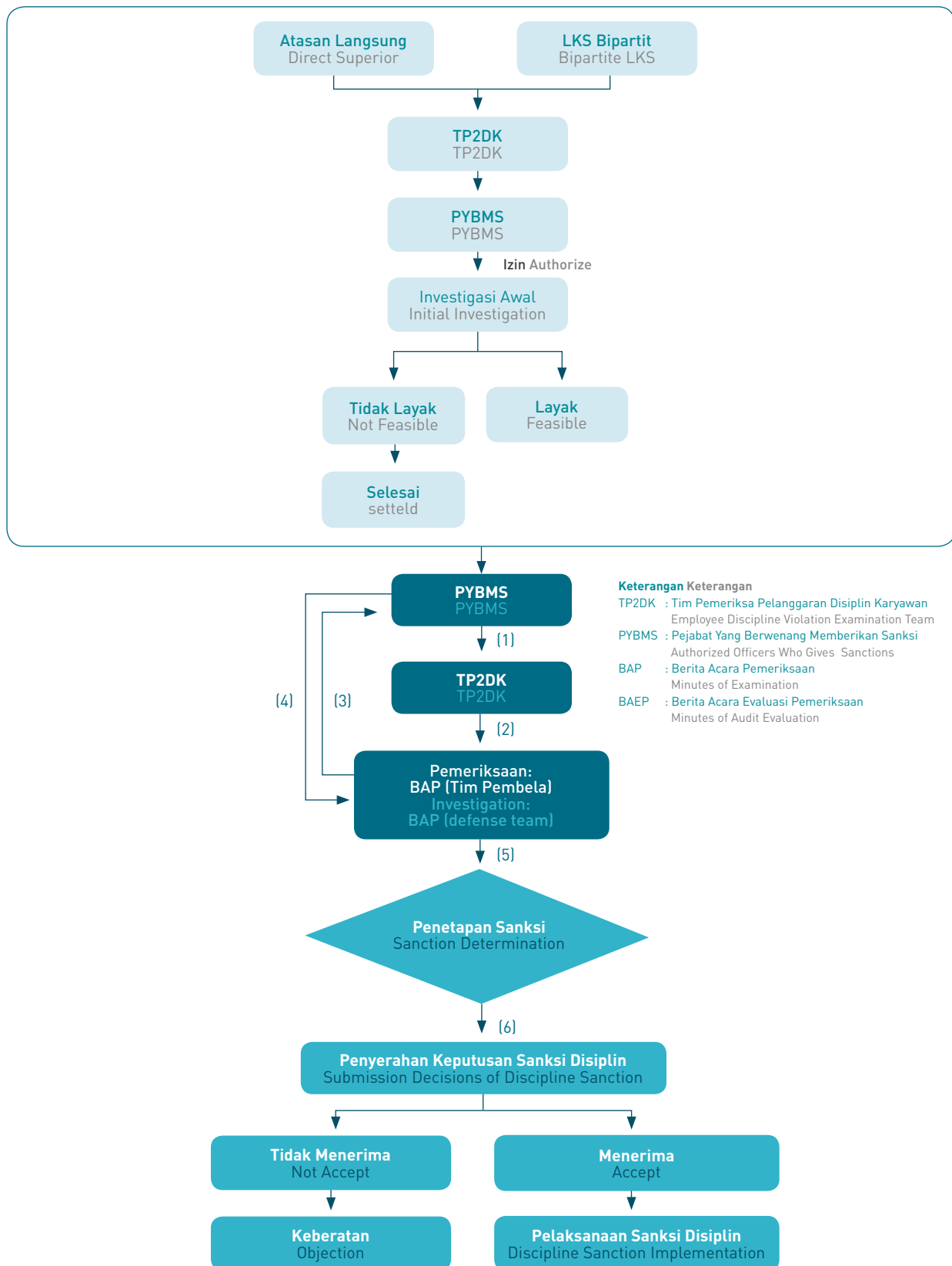
All levels of the Company are involved in the implementation of these programs, including the Directors who carry out direct and indirect monitoring and supervision of the program initiatives. The Board of Directors is also fully responsible for every report of the program initiatives contained in the Sustainability Report. Also, the Board of Directors/Management and PJB's labor union agree to hold regular meetings to discuss the implementation of the CLA and discuss the problems that exist in the PJB, as stipulated in CLA Article 92. As for the year 2019, a Board of Directors / Management meeting with the PJB SP was held on the date July 23, 2019, and December 19, 2019.

One of the initiatives in implementing human rights in the corporate social responsibility program of PJB is the granting of leave rights to employees. In 2019, the realization of annual leave costs was Rp.21.24 billion, lower than in the previous year of Rp.26.57 billion. While the realization of the cost of large leave was Rp4.03 billion, lower than in the previous year of Rp12.68 billion.

PJB has an internal policy as an effort to mitigate emergencies and labor conflicts related to human rights and other issues based on Decree No.113.K/010/DIR/2010 on September 1, 2010, regarding Employee Discipline Regulations. The labor conflict control mechanism implemented in the PJB is implemented according to the Employee Discipline Investigation procedure as follows:



Mekanisme Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Karyawan Investigation of Employee Discipline Violation Mechanism



Capaian yang Diperoleh Achievements

PJB senantiasa mengedepankan aspek HAM dalam praktik ketenagakerjaan berdasarkan kebijakan internal yang mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku. Selama tahun 2019 PJB tidak mendapatkan atau menerima pengaduan terkait pelanggaran HAM seperti pengaduan tindakan diskriminasi, insiden pelanggaran maupun pengaduan mengenai kebebasan berserikat di lingkungan PJB serta insiden kerja paksa yang dialami pekerja.

Penerapan aspek HAM dalam program tanggung jawab sosial kepada karyawan telah memberikan sejumlah manfaat diantaranya terciptanya lingkungan kerja yang kondusif, aman, dan nyaman sehingga meningkatkan loyalitas karyawan dan membentuk citra positif Perusahaan serta mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Bahkan, Kondisi tersebut merupakan wujud konsistensi PJB dalam menerapkan aspek HAM dalam program tanggung jawab sosial kepada karyawan telah dilaksanakan dengan baik oleh seluruh jajaran Perusahaan.

Penghargaan Terkait HAM Awards in the Human Rights Category

Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) Jawa Timur memberikan apresiasi atas komitmen PJB dalam memenuhi kebutuhan dan hak karyawan wanita, khususnya ibu menyusui. Semua unit PJB telah memiliki fasilitas ruang laktasi sehingga memberikan kemudahan bagi karyawan yang menyusui bayi, sehingga membawa PJB untuk dinobatkan sebagai *Breastfeeding Friendly Workplace*.

Komitmen PJB untuk senantiasa menghormati hak-hak karyawan dengan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, aman, dan nyaman sehingga meningkatkan loyalitas karyawan dibuktikan dengan predikat “*Best companies to work for in Asia*” pada *HR Asia Awards 2019*. Penghargaan ini menunjukkan bahwa PJB lebih transparan, suportif terhadap pertumbuhan dan peningkatan kualitas karyawan termasuk gaji yang sepadan. Hal ini menjadi faktor tingginya tingkat *engagement* karyawan terhadap perusahaan. Selain itu, juga menunjukkan bahwa PJB memperkuat *branding* Perusahaan dengan melakukan *improvement* yang baik atas proses bisnisnya.

PJB always prioritizes aspects of human rights in labor practices based on internal policies that refer to the provisions of the applicable legislation. In 2019, PJB did not receive complaints related to human rights violations such as complaints of discrimination, incidents of violations, or complaints about freedom of association in the PJB environment and incidents of forced labor experienced by workers.

The application of human rights aspects in the corporate social responsibility program to employees has provided some benefits including the establishment of a conducive, safe, and comfortable work environment to increase employee loyalty and company image as well as sustainable development goals namely decent work and economic growth. This condition is a form of PJB's consistency in implementing aspects of human rights in the corporate social responsibility program for employees which has been well implemented by all levels of the Company.

The Association of Indonesian Breastfeeding Mothers of East Java (AIMI) expressed appreciation for PJB's commitment to meeting the needs and rights of female employees, especially nursing mothers. All PJB units already have lactation room facilities to ease the nursing employees, thus bringing PJB to be named the Breastfeeding Friendly Workplace.

PJB's commitment to always respect employees' rights by creating a conducive, safe, and comfortable work environment to increase employee loyalty is evidenced by the title “Best companies to work for in Asia” at the HR Asia Awards 2019. This award shows that PJB is more transparent, supportive of employee growth, and quality improvement including a commensurate salary. This is a factor in the high level of employee engagement with the company. Also, it shows that PJB strengthens the Company's branding by making good improvements to its business processes.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT OPERASI YANG ADIL CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TO THE FAIR OPERATION

Komitmen dan Kebijakan Commitment and Policy

PJB memandang kelancaran kegiatan operasional membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Hak para pemangku kepentingan yang tidak diperhatikan dapat menimbulkan risiko gangguan operasional. Hal ini mendorong PJB untuk menerapkan kegiatan operasional yang adil dengan memperhatikan hak para pemangku kepentingan secara seimbang. Wujud kegiatan operasional yang adil meliputi praktik bebas dari korupsi dan suap, netralitas dalam isu-isu politik, menghormati kekayaan intelektual, berkompetisi dengan adil serta patuh pada hukum dan regulasi.

PJB mengatur acuan pelaksanaan kegiatan operasional yang adil dalam Pedoman Pelaksanaan Pelaporan dan Pengendalian Gratifikasi, Pedoman *Whistleblowing System*, *Code Of Conduct*, Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa. Kebijakan tersebut senantiasa ditinjau secara berkala untuk memastikan bahwa setiap ketentuan relevan dengan kondisi dan pertumbuhan bisnis Perusahaan. Kebijakan tersebut selanjutnya diterapkan dalam program yang diinisiasi oleh Perusahaan antara lain PJB Bersih sebagai upaya anti korupsi melalui penandatanganan Pakta Integritas baik secara internal maupun eksternal seperti dalam penerapan praktik pengadaan barang dan jasa mewajibkan setiap pimpinan perusahaan atau pihak yang diberi kuasa oleh pimpinan perusahaan untuk menandatangani pakta integritas pada saat pengajuan dokumen pengadaan. Selain itu, PJB juga mendukung Hak Kekayaan Intelektual dari para *supplier* sesuai dengan yang tertuang pada Rencana Kerja dan Syarat-syarat serta Surat Pernyataan Pengadaan, dimana salah satunya terdapat ketentuan *blacklist* bagi pihak pemasok yang melakukan pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual.

PJB believes that successful operational activity requires the support of all stakeholders. The rights of stakeholders that are not considered can pose a risk of operational disruption. This encourages PJB to implement equitable operational activities by considering the rights of the stakeholders equally. Fair operational activities include practices that are free from corruption and bribery, neutrality in political issues, respect for intellectual property, compete fairly, and compliance with law and regulation.

PJB regulates the reference for the implementation of fair operational activities in the Guidelines for Reporting and Gratification Control, Guidelines for Whistleblowing System, Code of Conduct, Guidelines for Procurement of Goods and/or Services. The policy is regularly reviewed to ensure that every provision is relevant to the conditions and growth of the Company's business. The policy was subsequently applied in programs initiated by the Company including PJB Bersih as an anti-corruption effort through the signing of Integrity Pacts both internally and externally as in the implementation of goods and services procurement practices requiring every company leader or party authorized by the company's leadership to sign the integrity pact at the time of submission of procurement documents. Also, PJB supports the Intellectual Property Rights of the suppliers following what is stated in the Work Plan and Requirements and Procurement Statement, where one of them is a blacklist provision for suppliers who violate the Intellectual Property Rights.

Rencana Program 2019 Program Plan 2019

PJB melaksanakan *stakeholder mapping* sebagai acuan penyusunan rencana program tanggung jawab sosial terhadap praktik operasi yang adil. Berdasarkan hasil *stakeholder mapping* tersebut diketahui bahwa pemangku kepentingan yang relevan dengan praktik operasi yang adil adalah pelanggan dan pemasok. Hubungan PJB dengan pelanggan dibangun dengan komunikasi melalui media yang tersedia (telepon dan tertulis) sekurang-kurangnya satu bulan sekali sebagai upaya penanganan isu harga jual yang bersaing dan efisien. Sementara itu, hubungan PJB dengan pemasok mencakup penanganan empat isu yaitu:

PJB implements stakeholder mapping as a reference for the preparation of social responsibility program plans for fair operating practices. Based on the results of stakeholder mapping, it is known that relevant stakeholders with fair operating practices are customers and suppliers. The PJB relationship with customers is built by communicating through available media (telephone and written) at least once a month as an effort to handle competitive and efficient selling price issues. Meanwhile, the relationship between PJB and suppliers includes handling four issues, namely:

1. Penerapan proses pengadaan yang adil dan transparan melalui kontrak dan perjanjian sesuai kaidah tata kelola pengadaan
2. Pembayaran tepat waktu dan pemenuhan klausul-klausul dalam kontrak atau perjanjian
3. Proses evaluasi yang objektif dengan penilaian kinerja pemasok setiap kontrak pekerjaan yang telah diselesaikan
4. Proses mendapatkan masukan timbal balik dari pemasok melalui kuesioner dan survei setiap tahun

Sejumlah program sebagai cerminan penerapan praktik operasi yang adil di lingkungan PJB tahun 2019 diantaranya peningkatan implementasi program PJB Bersih serta pengendalian gratifikasi dan anti korupsi yang menjadi program rutin. Penerapan program tersebut adalah wujud komitmen PJB dalam menjalankan kegiatan bisnis secara jujur, bersih, dan berintegritas sehingga risiko penyimpangan seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dapat diantisipasi. Implementasi program tersebut sesuai dengan kebijakan internal yang senantiasa ditinjau secara berkala oleh Direksi PJB. Pemangku kepentingan pun dilibatkan dalam program tersebut sebagai wujud penerapan nilai integritas melalui *Multi Stakeholders Forum* (MSF) untuk program PJB Bersih dan sejumlah sosialisasi dalam *supplier gathering* untuk program pengendalian gratifikasi.

PJB juga memiliki mekanisme dan prosedur dalam menghadapi konflik terkait operasi yang adil untuk pemasok melalui sistem *blacklist* sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi No.101.K/010/DIR/2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang Perubahan Keputusan Direksi No.025.K/020/DIR/2016 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT Pembangunan Jawa Bali. Biaya yang dikeluarkan untuk program *Supplier Gathering* tahun 2019 pada unit eksisting maupun UBJOM sebesar Rp1,29 miliar. *Supplier gathering* merupakan cara PJB untuk berkomunikasi dengan para *supplier* secara dua arah yang diadakan setiap tahun. Sebanyak 21 unit PJB termasuk Kantor Pusat melaksanakan *Supplier Gathering* setiap tahun, dengan tingkat kehadiran *supplier* sebanyak 80%.

Inisiatif Penerapan Operasi Yang Adil Initiatives for Fair Operational

Penerapan praktik operasi yang adil dalam kegiatan bisnis PJB tercermin dalam inisiatif-inisiatif program diantaranya:

1. Pengendalian Gratifikasi dan Anti-Korupsi

PJB menjalankan kegiatan operasional dengan menerapkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG). Sebagai perusahaan yang profesional, independen, berintegritas dan berkelanjutan, tindakan anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) menjadi salah satu prioritas sehingga Manajemen PJB terus berupaya menjalankan aktivitas bisnis yang bersih dari praktik KKN termasuk pengendalian praktik gratifikasi. Upaya PJB untuk mencapai tujuan tersebut diterapkan melalui program pengendalian gratifikasi dan anti korupsi.

1. Implementation of a fair and transparent procurement process through contracts and agreements following procurement governance rules
2. Payment on time and fulfillment of clauses in contracts or agreements
3. An objective evaluation process with supplier performance appraisal of each completed work contract
4. The process of getting reciprocal input from suppliers through questionnaires and surveys every year

Some programs reflect the implementation of fair operating practices in the 2019 PJB environment, including an increase in the implementation of the PJB Bersih program and gratification and anti-corruption controls that become routine programs. The implementation of the program is a form of PJB's commitment to conducting business activities honestly, cleanly, and with integrity so that the risk of irregularities such as Corruption, Collusion, and Nepotism can be anticipated. Implementation of the program is following internal policies that are regularly reviewed by the PJB Directors. Stakeholders were also involved in the program as a form of implementing the value of integrity through the Multi Stakeholders Forum (MSF) for the PJB Bersih program and some socialization in the supplier gathering for gratuity control programs.

PJB also has mechanisms and procedures for dealing with conflicts related to fair operations for suppliers through the blacklist system as stipulated in the Board of Directors Decree No.101.K/010/DIR/2017 on December 15, 2017, concerning Amendment to the Board of Directors Decree No.025.K/ 020/ DIR/2016 Regarding Technical Guidelines for Procurement of Goods/Services of PT Pembangunan Jawa Bali. Costs incurred for the 2019 Supplier Gathering program for existing units and OMSBU are Rp1.29 billion. Supplier gathering is a way for PJB to communicate with suppliers in two directions every year. As many as 21 units of PJB including the Head Office carry out Supplier Gathering every year, with the ratio of supplier attendance of 80%.

The application of fair operating practices in PJB's business activities is reflected in program initiatives including:

1. Gratification and Anti-Corruption Control

PJB carries out operational activities by applying the principles of good corporate governance (Good Corporate Governance (GCG)). As a professional, independent, integrity, and sustainable company, anti-corruption, collusion, and nepotism actions become one of the priorities so that PJB management continues to strive to carry out business activities that are clean from corruption, collusion, and nepotism practices, including controlling gratification practices. PJB's efforts to achieve these objectives are implemented through gratification and anticorruption control programs.

Setiap insan PJB meliputi Direksi/Manajemen/Karyawan didorong untuk senantiasa menaati aturan terkait gratifikasi sebagai pencerminan dari salah satu tata nilai Perusahaan, yaitu *integrity* dengan perilaku utama etis, jujur dan amanah yang agar iklim persaingan yang sehat dan bersih tercipta di Perusahaan. Setiap Insan PJB wajib mengetahui perkembangan aturan terkini mengenai Gratifikasi dan mematuhi aturan yang berlaku tersebut. Aturan-aturan tersebut disosialisasikan ke seluruh Insan PJB untuk menghindari terjadinya praktik gratifikasi di lingkungan Perusahaan. PJB juga melarang karyawan dan/atau keluarga menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi, dalam bentuk apapun serta meminta atau menerima secara langsung ataupun tidak langsung Gratifikasi dari pihak pemangku kepentingan sebagaimana diatur dalam *Code Of Conduct* dan Pedoman Gratifikasi yang telah ditinjau secara berkala oleh Manajemen. Sedangkan praktik anti korupsi dilaksanakan melalui program PJB Bersih yang penerapannya telah diuraikan dalam bab Tata Kelola Perusahaan sub bab PJB Bersih.

2. Keterlibatan Dalam Politik yang Bertanggung Jawab

PJB telah mengatur ketentuan terkait keterlibatan karyawan dalam berpolitik dalam *Code of Conduct*. Dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial, PJB tidak memberikan bantuan dana ke politisi, ataupun calon pejabat manapun sebagai perwujudan nilai Perusahaan yaitu integritas. Selain itu, PJB juga menerapkan kegiatan berikut antara lain:

- Insan PJB berhak menyampaikan aspirasi dan pandangan kepada pemerintah dan *stakeholder* lainnya terhadap aspek operasional yang mempengaruhi aktivitas bisnis dan operasional Perusahaan. Namun, proses penyampaian aspirasi harus dilakukan di luar jam kerja dan tidak menggunakan atribut PJB.
- Insan PJB dilarang menggunakan nama dan aset Perusahaan untuk kepentingan politik serta memberikan dana PJB kepada partai politik atau politisi.
- Insan PJB dilarang membawa, memperlihatkan, dan memasang simbol partai politik di lingkungan Perusahaan.
- Insan PJB dilarang melakukan kampanye dan aktivitas politik lain di lingkungan Perusahaan.
- PJB mewajibkan seluruh Insan PJB yang menduduki jabatan tertentu dalam partai politik atau menjadi calon legislatif atau eksekutif dari partai politik dalam Pemilu untuk mengundurkan diri dari Perusahaan.

3. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

PJB mendorong setiap karyawan untuk merealisasikan ide inovasi hingga membuahkan hasil. Hal ini diwujudkan dengan pelaksanaan lomba karya inovasi baik di tingkat PJB maupun di PLN Grup setiap tahun agar budaya inovasi dapat diterapkan untuk mendukung kinerja PJB.

Every PJB employee including the Board of Directors/ Management/Employees is encouraged to always obey the regulation concerning gratification as a reflection of one of the Company's values, integrity with ethical, honest, and trustworthy so that a healthy and clean competitive climate is established within the Company. Every PJB employee is tasked to know the latest regulation concerning Gratification and comply with the applicable regulations. These regulations are socialized to all PJB Individuals to avoid the occurrence of gratification practices within the Company. PJB also prohibits employees and/or families to engage with bribery, gratification, in any form and requesting or receiving directly or indirectly Gratification from stakeholders as stipulated in the Code of Conduct and Gratification Guidelines that have been regularly reviewed by Management. While anti-corruption practices are implemented through the 'PJB Bersih' program in which the implementation has been described in the Corporate Governance chapter, the PJB Bersih sub-chapter.

2. Engagement in Responsible Politics

PJB has regulated provisions related to employee engagement in politics in the Code of Conduct. In implementing the Corporate Social Responsibility program, PJB does not provide financial assistance to politicians or political candidates as a manifestation of the Company's value, integrity. Also, PJB applies the following activities, including:

- PJB employees have the right to express their aspirations and perspective to the government and other stakeholders on operational aspects that affect the Company's business activities and operations. However, the process of delivering aspirations must be conducted outside work hours while not using PJB attributes.
- PJB Employees are prohibited from using the Company name and assets for political purposes as well as providing PJB funds to political parties or politicians.
- PJB Employees are prohibited from carrying, showing, and applying symbols of political parties within the Company.
- PJB Employees are prohibited from conducting campaigns and other political activities within the Company.
- PJB requires all PJB Employees who occupy certain positions in political parties or their legislative or executive candidates in elections to resign from the Company

3. Protection of Intellectual Property Rights

PJB encourages every employee to realize the idea of successful innovation. This is reflected by the implementation of annual innovation competitions both at the PJB level and the whole PLN Group so that the culture of innovation can be applied to support PJB's performance.

Karya inovasi tersebut merupakan *intangible asset* yang sangat bernilai untuk Perusahaan. Oleh karena itu, PJB telah melakukan pendaftaran hak cipta atau hak paten atas karya-karya inovasi tersebut ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai upaya melindungi hak karyawan dari kemungkinan pihak lain menggunakan karya tersebut tanpa izin. Sampai dengan tahun 2019, PJB telah mendaftarkan 21 Hak Kekayaan Intelektual. PJB juga telah mengatur bahwa Perusahaan dan seluruh Insan Perusahaan wajib melindungi HAKI dan melarang menggunakan HAKI milik pihak lain tanpa izin karena dapat mengakibatkan Perusahaan menanggung gugatan hukum sebagaimana dimuat dalam *Code Of Conduct*.

4. Persaingan Usaha yang Sehat

PJB senantiasa menjunjung etika berbisnis dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat. Insan PJB wajib menerapkan kaidah persaingan usaha yang sehat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; menjadikan pesaing sebagai acuan/ pembandingan untuk meningkatkan kinerja Perusahaan; dan menjaga informasi sangat rahasia, rahasia, dan terbatas ke pesaing. Selain itu, PJB melarang insan PJB dalam hal merusak nama baik pesaing dan menyebarkan isu tidak benar mengenai pesaing; menunjukan sifat konfrontatif; dan memiliki kepemilikan dan kepengurusan di perusahaan pesaing yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

5. Promosi Tanggung Jawab Sosial dalam Rantai Pemasok

Kegiatan tanggung jawab sosial dilaksanakan untuk memberikan manfaat bagi seluruh *stakeholder* termasuk pemasok. PJB melaksanakan proses pemilihan pemasok dengan menerapkan prinsip transparan, terbuka, adil, dan kompetitif. Pemasok diseleksi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Rencana Kerja dan Syarat untuk setiap pengadaan. Meskipun demikian, PJB berupaya untuk melakukan kerjasama dengan pemasok lokal sebagaimana diatur dalam SK Direksi No.087.K/010/2012 mengenai Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa PJB. Upaya ini ditempuh untuk memberikan kesempatan kerjasama dengan perusahaan dalam negeri sehingga PJB dapat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain itu, upaya tersebut juga memberikan manfaat bagi PJB berupa efisiensi biaya operasional dan potensi jangka waktu pengadaan pun dapat dipersingkat. PJB mendefinisikan pemasok lokal adalah perusahaan yang berada di provinsi yang sama dengan lokasi unit pembangkit milik Perusahaan. Sedangkan pemasok nasional berarti perusahaan yang berada di luar provinsi unit pembangkit. Selama tahun 2019 nilai pengadaan barang dan jasa PJB mencapai Rp 48.484.542.808 meningkat dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp 61.087.179.727. Jumlah pemasok lokal dan nasional mencapai 99% dari seluruh jumlah pemasok PJB.

The innovation is a valuable intangible asset for the Company. Therefore, PJB has registered the copyright or patent for the innovation works to the General Directorate of Intellectual Property Rights to protect employee rights from the possibility of copyright violation. As of 2019, PJB has registered 21 Intellectual Property Rights. PJB has also stipulated that the Company and its employees must protect IPR and prohibit the use of IPR belonging to other parties without permission since it can cause the Company to bear legal claims as stated in the Code Of Conduct.

4. Fair Business Competition

PJB always upholds business ethics in creating fair business competition. PJB Individuals are required to apply the rules of the fair business competition following applicable laws; make competitors as a reference/comparison to improve the Company's performance; and keep information highly confidential, confidential, and limited to competitors. Besides, PJB prohibits PJB people in the case of damaging the good reputation of competitors and spreading false rumors about competitors; showing confrontational nature; and has ownership and management in a competitor's company which could lead to a conflict of interest.

5. Promotion of Social Responsibility in the Supplier Chain

Social responsibility activities are carried out to provide benefits for all stakeholders including suppliers. PJB implements the supplier selection process by applying the principles of transparent, open, fair, and competitive. Suppliers are selected based on the provisions stipulated in the Work Plan and Conditions for each procurement. Nevertheless, PJB always collaborates with local suppliers as stipulated in the Decree of the Board of Directors No.087.K/010/2012 concerning Guidelines for Procurement Procedures for PJB Goods/Services. This effort was taken to provide opportunities for cooperation with domestic companies so that PJB can contribute to national economic development. These efforts also provide benefits for PJB in the form of operational cost efficiencies and the potential procurement period can be shortened. PJB defines a local supplier as a company in the same province as the location of the Company's generating units. Whereas a national supplier means a company that is outside the provincial generating unit. During 2019 the value of PJB goods and services procurement reached Rp 48,484,542,808 compared to 2018 which was Rp61,087,179,727. The number of local and national suppliers reaches 99% of the total PJB suppliers.



Keterangan Description	Jumlah Pemasok Total Suppliers			Jenis Barang Yang Dipasok Types of Goods Supplied
	2017	2018	2019	
Lokal (dalam satu provinsi) Local (the same province)	949	686	787	<i>Safety Valve, Condensate Polishing. Motor BFP</i>
Nasional (lintas provinsi) National (cross-province)	431	371	507	Batubara, Trafo, Rotor, Generator, Turbin, Jasa Konsultan Coal, Transformer, Rotor, Generator, Turbine, Consultant Services
Luar Negeri International	82	9	17	<i>Original Equipment Manufacturer</i>
Jumlah Total	1.462	1.066	1.311	

Capaian yang Diperoleh Achievements

Selama tahun 2019 PJB tidak memiliki kasus indikasi korupsi dan suap yang dihadapi oleh anggota Dewan komisaris, anggota Direksi serta karyawan serta tidak berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada partai politik. Hal ini dipengaruhi oleh penerapan *Code Of Conduct* yang baik serta partisipasi pemangku kepentingan yang turut mendukung penerapan program tanggung jawab sosial terhadap operasi yang adil. Pencapaian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung dan tidak langsung bagi *stakeholder* berupa hubungan kerja yang harmonis sehingga mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis jangka panjang serta menjadi wujud kontribusi PJB dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu membangun infrastruktur yang kuat, mendukung industrialisasi yang inklusif dan membantu perkembangan inovasi serta memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.

In 2019, PJB did not have any indications of corruption and bribery by members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and employees and did not participate either directly or indirectly to political parties. This is influenced by the excellent implementation of the Code of Conduct and the participation of stakeholders who also support the implementation of social responsibility programs for equitable operations. This achievement is expected to provide benefits both directly and indirectly for stakeholders in the form of a harmonious working relationship to support long-term business growth and sustainability as well as a form of PJB contribution in supporting sustainable development goals namely building strong infrastructure, supporting inclusive industrialization and fostering development innovation and ensuring sustainable consumption and production patterns.

Sertifikasi Certification

PJB telah memiliki sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015. Hal ini mencerminkan bahwa PJB menerapkan kegiatan operasi secara adil, diantaranya proses pengadaan yang dilaksanakan secara transparan serta mengacu pada regulasi dan prosedur yang ditetapkan.

PJB already has an ISO 9001: 2015 certification on the quality management system. This reflects that PJB's fair operating activities, including the procurement process that is carried out transparently and refers to the regulations and established procedures.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TO THE ENVIRONMENT

Komitmen dan Kebijakan Commitment and Policy

PJB melaksanakan program tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sebagai wujud kontribusi terhadap pelestarian lingkungan. Upaya ini juga ditempuh untuk mengelola dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan operasional PJB sebagai penyedia tenaga listrik. PJB juga membentuk Divisi K3 dan Lingkungan untuk memastikan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan baik dalam aktivitas operasional pembangkit yang ramah lingkungan maupun program tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitar (masyarakat) berjalan secara konsisten.

Komitmen PJB dalam pelaksanaan program-program tersebut mengacu pada sejumlah kebijakan internal yang ditetapkan. Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di PJB dimuat dalam Keputusan Direksi No.029.K/020/DIR/2018 tentang Kebijakan Sistem Manajemen PT Pembangkitan Jawa-Bali yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta ISO 14001 tentang Sistem Manajemen Lingkungan. Kebijakan tersebut mengatur penggunaan sumber daya energi dan sumber daya alam dalam kegiatan operasional dan pemeliharaan unit pembangkit secara efisien. Kebijakan ini menjadi penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi No.063.K/020/DIR/2015 Tentang Kebijakan Sistem Manajemen. Hal ini menunjukkan bahwa PJB senantiasa meninjau kebijakan secara berkala agar senantiasa sesuai dengan regulasi terkait lingkungan hidup. Penerapan program-program yang mengacu pada kebijakan tersebut mencerminkan kesungguhan PJB dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup secara terus-menerus.

Rencana Program 2019 Program Plan 2019

PJB menyusun rencana pengelolaan/pemantauan lingkungan dan program tanggung jawab sosial terhadap lingkungan untuk memastikan bahwa kelestarian lingkungan sekitar tetap dijaga dengan baik berdasarkan hasil studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Rencana tersebut terbagi dalam dua aspek sasaran yaitu lingkungan operasional bisnis dan lingkungan sekitar (masyarakat). Rencana pengelolaan/pemantauan lingkungan disusun sebagai program kerja Divisi K3 dan Lingkungan, sedangkan program tanggung jawab sosial terhadap lingkungan menjadi program kerja Bidang *Stakeholder Management* (BSHM) untuk Kantor Pusat dan Bidang Umum dan CSR untuk Unit Pembangkitan yang dimuat dalam RKAP 2019.

PJB implements social responsibility programs to the environment as a form of a contribution to environmental preservation. This effort was also taken to manage environmental impacts arising from the operational activities of PJB as a provider of electricity. PJB has also formed the HSE Division to ensure the implementation of environmental management programs both in the operational activities of generators that are environmentally friendly as well as social responsibility programs for the surrounding environment (community) to run consistently.

PJB's commitment to implementing these programs refers to several established internal policies. The environmental management policy in PJB is contained in Directors Decree No.029.K/020/DIR/2018 concerning the Management System Policy of PT Pembangkitan Jawa-Bali which refers to Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and ISO 14001 concerning Environmental Management System. The policy regulates the use of energy and natural resources in operational activities and maintenance of generating units efficiently. This policy is an improvement from the previous policy stipulated in the Decree of the Board of Directors No.063.K / 020 / DIR / 2015 Regarding Management System Policy. This shows that PJB always reviews policies periodically so that they are always following environmental regulations. The implementation of programs that refer to these policies reflects the seriousness of the PJB in continuously improving the quality of the environment.

PJB has prepared an environmental management/monitoring plan and a social responsibility program for the environment to ensure that the preservation of the surrounding environment is well maintained based on the results of the Environmental Impact Assessment study. The plan is divided into two target aspects, namely the operational area and the surrounding environment (community). The environmental management/monitoring plan is prepared as a work program for the HSE Division, while the corporate social responsibility program for the environment becomes a work program for Stakeholder Management Department (BSHM) for the Head Office and the General Affairs and CSR for the Generating Unit contained in the 2019 ABOP.



Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan Audit
Audited Financial Statements



Referensi Kriteria ARS
ARS Criteria Reference

PJB melakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan terkait dan ketentuan Rencana Pengelolaan/Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL/RPL) yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) maupun Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi dan Daerah yang harus dipenuhi oleh masing-masing Unit.

Beberapa kegiatan yang direncanakan yaitu pemantauan kualitas lingkungan baik di seluruh lingkungan operasional PJB, pengelolaan limbah B3, peringatan Hari Lingkungan Hidup, dan kajian dan pemanfaatan limbah B3. Kegiatan yang direncanakan tersebut meliputi:

1. Pemantauan dan analisis air laut, plankton, dan benthos serta air sungai per triwulan
2. Pemantauan kualitas limbah cair
3. Pengangkutan limbah domestik
4. Pemantauan udara emisi dan ambien serta kebisingan
5. Pemeliharaan alat *continuous emission monitoring system* (CEMS)
6. Pemantauan sumur pantau, TCLP, dan kualitas FABA di seluruh unit PJB yang memiliki fasilitas penimbunan limbah B3 FABA
7. Pengomposan sampah domestik
8. Pemantauan indeks keanekaragaman hayati flora dan fauna di sekitar unit pembangkit
9. Penanaman dan perawatan mangrove
10. Penghijauan di unit PJB
11. Perawatan alat pengendali pencemaran seperti IPAL dan ESP
12. Pengangkutan limbah B3 kepada pihak pemanfaat berizin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan/atau Dinas Lingkungan Hidup daerah melalui pengangkut yang berizin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Perhubungan
13. Pemanfaatan limbah B3 FABA di antaranya di unit Paiton 1-2, UBJOM Paiton 9, UBJOM Rembang, dan UBJOM Indramayu.

PJB mengalokasikan biaya sebesar Rp16.464.680 miliar untuk kegiatan pengelolaan lingkungan baik di unit eksisting dan unit FTP-1 yang dirincikan dalam tabel berikut.

PJB carries out environmental monitoring and management following relevant regulations and provisions of the Environmental Management / Monitoring Plan issued by the Ministry of Environment and the Provincial and Regional Environmental Offices that must be met by each Unit.

Some planned activities are monitoring the quality of the environment in all PJB operational environments, toxic and hazardous waste management, commemoration of Environmental Day, and the study and utilization of toxic and hazardous waste. The planned activities include:

1. Monitoring and analyzing seawater, plankton, and benthos as well as river water for each quarter
2. Monitoring the quality of liquid waste
3. Transporting domestic waste
4. Monitoring air emissions, ambient, and noise
5. Continuous Emission Monitoring System (CEMS) tool maintenance
6. Monitoring of monitoring pool, TCLP, and FABA quality in all PJB units that have landfills for toxic and hazardous FABA.
7. Composting domestic waste
8. Monitoring the index of flora and fauna biodiversity around power plant units
9. Mangrove plantation and conservation
10. Greening in the PJB unit
11. Maintenance of pollution control devices such as WWTP and ESP
12. Transporting toxic and hazardous waste to licensed users of the Ministry of Environment and Forestry and/or regional Environmental Services through transports licensed from the Ministry of Environment and Forestry and the Ministry of Transportation
13. Utilization of FABA toxic and hazardous waste includes Paiton 1-2 units, Paiton 9 OMSBU, Rembang OMSBU, and Indramayu OMSBU.

PJB reserved the budget as much as Rp16,464,680 billion for environmental management programs in both the existing unit and FTP-1 unit particularly presented in the following table

No.	Jenis Kegiatan Pengelolaan Types of Management Program	Jumlah Anggaran 2018 (Rp Ribu) Total Budget 2018 (Rp Thousand)	Jumlah Anggaran 2019 (Rp Ribu) Total Budget 2019 (Rp Thousand)
1.	Pemantauan Kualitas Lingkungan Environment Quality Monitoring	8.599.000	8.770.980
2.	Pengelolaan Limbah B3 Toxic and Hazardous Waste Management	5.435.000	5.543.700
3.	Peringatan Hari Lingkungan Hidup World Environment Day	1.650.000	1.650.000
4.	Kajian dan Pemanfaatan Limbah B3 Analysis and Utilization of toxic and hazardous Waste	500.000	500.000
Sub Jumlah Sub-total		16.184.000	16.464.680

Perencanaan kegiatan pengelolaan/pemantauan lingkungan serta program tanggung jawab sosial terhadap lingkungan yang dilakukan setiap tahun menunjukkan komitmen dan upaya PJB dalam memitigasi risiko dan meminimalkan dampak lingkungan diantaranya potensi pencemaran udara emisi dan potensi penumpukan faba unit luar Jawa yang melebihi masa simpan yang diperbolehkan yaitu 1 tahun. PJB juga melibatkan *stakeholder* dalam berbagai kegiatan lingkungan diantaranya kegiatan reklamasi lahan bekas tambang pasir di daerah Wajak, Kabupaten Malang. PJB bersama warga sekitar, Pemerintah Daerah, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saling bekerjasama dalam program tersebut melalui penanaman berbagai macam jenis pohon sebanyak kurang lebih 5000 pohon sehingga area tersebut hijau kembali. Disamping itu, PJB bersama KLHK dan PT PLN (Persero) terus berkomitmen dalam memerangi sampah plastik. Komitmen ini diwujudkan dengan tidak adanya penggunaan minuman kemasan dalam aktivitas di perkantoran. Bahkan di beberapa unit sudah tidak menggunakan sedotan plastik di masing-masing kantin. Banyak unit PJB yang memiliki program CSR berupa bank sampah di antaranya UP Gresik dan UP Muara Karang sehingga program 3R untuk sampah plastik dapat berjalan dengan baik. Selain itu, komitmen PJB untuk mengurangi dampak negatif dari kegiatan operasional dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kadar sulfur atas batubara yang akan dipakai dari pemasok. Hal ini sesuai dengan prinsip *life cycle assessment* (LCA) yaitu suatu produk dipertimbangkan mulai dari bahan baku hingga menjadi limbah buangan.

Kegiatan dan Dampaknya Activities and Impacts

PJB melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk mengantisipasi dampak dan risiko lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan operasional. Pencemaran udara yang ditimbulkan dari sebaran debu batubara (FABA), pencemaran air laut dan/atau sungai, limbah B3, dan kebisingan mesin pembangkit merupakan beberapa dampak dan risiko lingkungan yang dikelola melalui AMDAL di masing-masing unit PJB. Selain itu, Manajemen PJB melakukan rapat manajemen di unit pembangkitan yang melibatkan berbagai pihak terkait untuk membahas isu-isu lingkungan dan pencapaian program lingkungan sebagai tindakan penanggulangan isu tersebut serta menetapkan target lingkungan. Rapat tersebut dilaksanakan secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan isu di unit pembangkitan. Kegiatan tersebut mencerminkan upaya PJB untuk menjadi *Green and Clean Power Plant* serta bentuk kontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Environmental management planning/monitoring programs as well as corporate social responsibility programs to the environment annually established to represent the commitment and efforts of PJB in mitigating risks and minimizing environmental impacts including the potential for emissions of air pollution due to tightened air-emissions quality standards proclaimed by the Ministry of Environment and Forestry and the potential for accumulation of non-Java FABA units that exceed the allowable shelf-life is one year. PJB also involves stakeholders in a variety of environmental activities including land reclamation activities of the former sand mine in Wajak, Malang Regency. PJB together with residents, the Regional Government, and the Ministry of Environment and Forestry cooperate in the program by planting various kinds of trees of around 5000 trees so that the area is green again. Besides that, PJB together with the Ministry of Environment and Forestry and PT PLN (Persero) continues to be committed in the fight against plastic waste. This commitment is realized by the absence of the use of packaged drinks in office activities. Even in some units no longer use plastic straws in each canteen. Many PJB units have CSR programs in the form of garbage banks, including Gresik GU and Muara Karang GU so that the 3R program for plastic waste can run well. Also, PJB's commitment to reduce the negative impact of operational activities is carried out by considering aspects of the sulfur content of coal to be used from suppliers. This is following the principle of life cycle assessment (LCA), in which a product is considered to start from raw materials to waste.

PJB carries out environmental management and monitoring to anticipate environmental impacts and risks arising from operational activities. Air pollution caused by the distribution of coal dust (FABA), pollution of sea and/or river water, toxic and hazardous waste, and engine noise are several impacts and risks the environment is managed through AMDAL in each unit of PJB. In addition, PJB Management holds management meetings in the generation unit involving various related parties to discuss environmental issues and the achievement of environmental programs as measures to overcome these issues and set environmental targets. The meeting is held periodically and adjusted to the issues development in the generation unit. The activity reflects efforts of PJB to become a Green and Clean Power Plant and a manifestation of contribution to the Sustainable Development Goals.



Pemantauan Kualitas Lingkungan Environmental Quality Monitoring

PJB melaksanakan kegiatan pemantauan kualitas lingkungan melalui sejumlah program untuk mengelola risiko dan dampak lingkungan. Program tersebut antara lain:

- **Pengelolaan Emisi Udara**

Salah satu bentuk pengelolaan emisi udara yang dilakukan oleh PJB yaitu penggunaan alat pengendali seperti *electronic presipitator* (ESP). Alat ini digunakan terutama untuk mengontrol partikulat yang dihasilkan dari pembakaran batubara. Beberapa pembangkit PJB pun menggunakan bahan bakar gas yang termasuk bahan bakar ramah lingkungan. PJB juga melakukan pengukuran emisi gas buang yang dihasilkan dari kegiatan operasional. Emisi gas buang untuk seluruh PLTU/PLTGU minyak dan gas serta PLTU Batubara baik unit eksisting maupun Unit Bisnis Jasa *Operation & Maintenance* (UBJOM) FTP-1 diukur secara berkala. Hasil pengukuran emisi gas buang tersebut menunjukkan bahwa emisi gas buang berada di bawah ambang batas sebagaimana dirincikan dalam tabel berikut.

PJB conducts environmental quality monitoring activities through several programs to manage environmental risks and impacts. The program includes:

- **Management of Air Emissions**

One form of PJB's air-emission management is the use of controlling devices such as electronic precipitators (ESP). These devices are mainly used to control particulates produced from coal combustion. Some PJB plants also use gas fuel which includes green fuels. PJB also measures exhaust gas emissions resulting from operational activities. Exhaust gas emissions for all oil and gas SPP/ GTTP and Coal SPP which are existing units and Operation & Maintenance Service Business Units (OMSBU) of FTP-1 units which are measured regularly. The results of the measurement of exhaust gas emissions indicate that exhaust emissions are below the threshold as detailed in the following table.

Unit Eksisting

Existing Unit

Tabel Emisi Gas Buang PLTU/PLTGU Minyak dan Gas (Per.Men.LHK. No. 15 / 2019)

Table of Exhaust Gas Emissions of Oil and Gas SPP/GTTP (Decree of the Ministry of Environment No.15/2019)

Parameter	Satuan Unit	Baku Mutu Quality Standards	Gresik (PLTGU) Gresik (CCPP)		Muara Karang (PLTGU) Muara Karang (CCPP)		Muara Tawar	
			Max	Min	Max	Min	Max	Min
SO ₂	mg/Nm ³	150	28,60	21,30	12,00	6,02	2,00	2,00
NO _x	mg/Nm ³	400	249,00	145,00	105,00	62,00	169,00	1,60
Total Partikulat Total Particulate	mg/Nm ³	30	1,30	1,30	10,00	3,00	3,60	1,20

Tabel Emisi Gas Buang PLTU Batubara (Per.Men.LHK. No. 15 / 2019)

Table of Exhaust Gas Emissions of Coal SPP (Decree of the Ministry of Environment No.15/2019)

Parameter	Satuan Unit	Baku Mutu Quality Standards	Paiton	
			Max	Min
SO ₂	mg/Nm ³	550	302,00	254,00
NO _x	mg/Nm ³	550	158,00	128,00
Total Partikulat Total Particulate	mg/Nm ³	100	27,40	23,30
Merkuri (Hg)	mg/Nm ³	0,3	0,16	0,04



Unit FTP-1

Unit FTP-1

Tabel Emisi Gas Buang PLTU Batubara (Per.Men.LH.K No.P15/ 2019)

Table of Exhaust Gas Emissions of Coal SPP (Decree of the Ministry of Environment no.15/2019)

Parameter	Satuan Unit	Baku Mutu Quality standards	Indramayu		Rembang		Tj. Awar-Awar		Paiton 9		Pacitan	
			Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min
SO ₂	mg/Nm ³	750	335,02	335,02	494,9	275,4	20	20	114	114	13,99	13,99
NO _x	mg/Nm ³	750	390,43	390,43	265,8	201	199	199	197	197	173,96	173,96
Debu Dust	mg/Nm ³	100	84,75	84,75	13,9	3,5	59,4	59,4	3	3	9,12	9,12
Opasitas Opacity	%	20	10	10	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20

Selain emisi gas buang, PJB juga mengukur kualitas udara ambien dan kebisingan untuk unit eksisting dan UBJOM FTP-1. Hasil pengukuran tersebut menunjukkan bahwa kualitas udara *ambient* dan kebisingan unit eksisting dan UBJOM FTP-1 berada di bawah ambang batas. Unit PJB melakukan beberapa upaya untuk mengendalikan kebisingan baik terhadap paparan ke pekerja serta sebaran kebisingannya melalui penambahan tanaman sebagai peredam kebisingan kompresor dan penggunaan alat pelindung diri di area kompresor. Rincian hasil pengukuran kualitas udara ambien dan kebisingan unit eksisting dan unit FTP-1 ditunjukkan dalam tabel berikut. Udara ambien di sekitar pembangkit menunjukkan hasil memenuhi standar. Ini menunjukkan PJB telah berhasil mengelola kualitas udara emisi yang keluar dari cerobong dengan cara menggunakan alat pengendali partikulat ESP serta pengendalian kualitas bahan bakar yang digunakan.

In addition to exhaust emissions, PJB also measures ambient air quality and noise for existing units and OMSBU FTP-1. The measurement results show that the ambient air quality and noise of the existing units and OMSBU FTP-1 are below the threshold. The PJB unit made several efforts to control noise both to workers' exposure and the distribution of noise through the addition of plants as compressor noise dampers and the use of personal protective equipment in the compressor area. Details of the results of measurements of ambient air quality and noise of existing units and FTP-1 units are shown in the following table. The ambient air around the plant shows the results meet the standard. This shows that PJB has managed to manage the quality of air emissions coming out of the chimney by using ESP particulate control devices and controlling the quality of the fuel used.

Unit Eksisting

Existing Unit

Tabel Kualitas Udara Ambient Dan Kebisingan (SK.Gub. Jawa Timur No. 10 / 2009, SK.Gub. DKI No. 551 / 2001, dan PP. RI. No. 41 / 1999, dan Kep Men LH No.48/11/1966)

Table of Air Quality, Ambient, and Noise (Decree of the Governor of East Java No. 10/2009, Decree of the Governor of Greater Jakarta No. 551/2001, and PP. RI No. 41/1999, and the Ministry of Forestry No.48 / 11 / 1966)

Parameter	Satuan Unit	Baku Mutu Quality standards	Gresik (PLTGU) Gresik (CCPP)		Paiton		Muara Karang (PLTGU) Muara Karang (CCPP)		Muara Tawar	
			Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min
SO ₂	µg/Nm ³	365	<7,50	<7,50	<7,50	<7,50	<5,00	<5,00	26,00	26,00
NO _x	g/Nm ³	150	9,07	7,83	22,13	8,63	<5,00	<5,00	10,00	10,00
Debu Dust	ug/Nm ³	230	0,14	0,09	0,20	0,06	194,00	143,00	46,00	35,00
Kebisingan Noise	dBA	55-70	61,30	47,70	61,83	45,53	61,00	56,00	53,00	51,00

Unit FTP-1

Unit FTP-1

Tabel Kualitas Udara Ambient dan Kebisingan (SK.Gub. Jawa Timur No. 10/2009 tentang Baku Mutu Ambien dan Emisi Sumber Tidak Bergerak)

Table of Air Quality, Ambient, and Noise (Decree of the Governor of East Java No. 10/2009 concerning Ambient Quality Standards and Emissions from Immovable Sources)

Parameter	Satuan Unit	Baku Mutu Quality standards	Pacitan		Paiton		Tj. Awar-Awar	
			Max	Min	Max	Min	Max	Min
SO ₂	µg/Nm ³	262	28,7	8,28	33	25	33,2	<8,28
NO _x	µg/Nm ³	92,5	21,8	6,5	52	44	7,95	5,41
Debu Dust	mg/Nm ³	0,26	0,44	0,02	0,4	0,2	0,22	0,06
Kebisingan Noise	dBA	55-85	67,9	47,9	59,8	47,8	68,6	50,1

Tabel Kualitas Udara Ambient dan Kebisingan untuk PLTU Indramayu (Peraturan Pemerintah No. 41/1999 tentang Baku Mutu Kualitas Udara Ambient Nasional)

Table of Air Quality, Ambient, and Noise of Indramayu CFPP
(Government Regulation No. 41/1999 concerning National Ambient Air Quality Standards)

Parameter	Satuan Unit	Baku Mutu Quality standards	Indramayu	
			Max	Min
SO ₂	mg/Nm ³	365	54,98	14,85
NO _x	mg/Nm ³	150	50,13	12,66
Debu Dust	mg/Nm ³	230	130,6	50,98
Kebisingan Noise	dBA	55-85	65,8	49,5

Tabel Kualitas Udara Ambient dan Kebisingan untuk PLTU Rembang (SK Gub. Jateng No. 08/2001 tentang Baku Mutu Udara Ambien di Provinsi Jawa Tengah)

Table of Air Quality, Ambient, and Noise of Rembang CFPP
(Decree of the Governor of Central Java No. 08/2001 concerning Ambient Air Quality Standards in Central Java Province)

Parameter	Satuan Unit	Baku Mutu Quality standards	Rembang	
			Max	Min
SO ₂	mg/Nm ³	365	3,5	1,1
NO _x	mg/Nm ³	150	0,64	0,23
Debu Dust	mg/Nm ³	230	102	25,2
Kebisingan Noise	dBA	55-85	82,3	45,3

• Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca

PJB berupaya melakukan efisiensi energi terutama dalam proses produksi listrik yang dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca (CO₂) dan zat pengikis ozon (CFC, HCFC). Pemantauan terhadap emisi gas rumah kaca dilakukan melalui pengukuran komposisi emisi gas rumah kaca secara berkala sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

• Reduction of Greenhouse Gas Emissions

PJB attempts to perform energy efficiency, especially in the process of electricity production which can produce greenhouse gas (CO₂) and ozone scraper (CFC, HCFC) emissions. The monitoring of greenhouse gas emissions is conducted through periodic measurements of the composition of greenhouse gas emissions as described in the following table

**Tabel Emisi Gas Rumah Kaca PJB Tahun 2017-2019**

Table of PJB Greenhouse Gas Emission in 2017-2019

Komposisi Emisi GRK PJB The composition of PJB's Greenhouse Gas Emissions				
Emisi GRK Green House Gas Emissions	Satuan Unit	2017	2018	2019
Paiton	Ton CO ₂	5.057.186,94	5.490.261,67	5.592.634,76
Muara Karang	Ton CO ₂	3.675.852,64	3.605.052,64	3.185.413,83
Gresik	Ton CO ₂	3.834.534,91	4.027.047,02	3.345.679,14
Muara Tawar	Ton CO ₂	1.852.654,48	3.147.292,75	2.933.960,28
Indramayu	Ton CO ₂	5.699.366,28	8.088.062,35	6.461.518,21
Rembang	Ton CO ₂	3.815.123,45	4.273.331,61	4.339.112,87
Paiton 9	Ton CO ₂	4.803.704,14	3.626.053,15	4.358.338,07
Pacitan	Ton CO ₂	3.313.977,85	2.619.467,08	3.999.191,44
Tj.Awar-Awar	Ton CO ₂	3.452.214,04	4.600.571,51	5.128.835,23
Total	Ton CO₂	35.504.614,73	39.477.139,78	39.344.683,83

Unit Eksisting**Existing Unit****Tabel Komposisi Emisi Gas Rumah Kaca**

Table of Greenhouse Gas Emission Composition

Emisi Gas Rumah Kaca Greenhouse Gas Emission	Paiton (Ton)	Muara Karang (Ton)	Gresik (Ton)	Muara Tawar (Ton)
CO ₂	5.564.100,31	3.181.807,91	3.341.698,58	2.931.225,17
CH ₄	58,85	68,82	74,26	51,71
N ₂ O	88,06	6,97	7,81	5,32

Unit FTP-1**FTP-1 Unit****Tabel Komposisi Emisi Gas Rumah Kaca**

Table of Greenhouse Gas Emission Composition

Emisi Gas Rumah Kaca Greenhouse Gas Emission	Indramayu (Ton)	Rembang (Ton)	Tj. Awar-Awar (Ton)	Paiton 9 (Ton)	Pacitan (Ton)
CO ₂	6.430.040,28	4.069.414,3	5.102.466,08	4.337.675,82	3.979.920,99
CH ₄	64,83	42,6	54,35	42,55	39,75
N ₂ O	97,15	63,82	81,38	63,77	59,47

PJB melakukan beberapa upaya untuk mengurangi dampak lingkungan yang bersumber dari emisi gas rumah kaca dan zat perusak lapisan ozon. Upaya tersebut diantaranya penggantian trafo klontong dengan trafo daya yang lebih rendah, pemasangan lampu *solar cell* di area pembangkit, instalasi *drain bypass cascade* HPH, Gasifikasi motor roda tiga (tossa), dan Pembangkit listrik tenaga mikro hidro. Emisi gas rumah kaca tahun 2019 turun dibandingkan tahun 2018.

PJB has made several efforts to reduce the environmental impact of greenhouse gas emissions and ozone-depleting substances. These efforts include replacing the grocery transformer with a lower power transformer, installing solar cell lights in the power plant area, installing an HPH cascade drain bypass, gasification of a three-wheeled motorcycle (Tossa), and a micro-hydropower plant. Greenhouse gas emissions in 2019 decreased compared to 2018.

Hal ini karena adanya upaya-upaya atau inovasi-inovasi pada mekanisme pembangkitan sehingga pembangkit menjadi lebih efisien dan mengurangi beban emisi yang dikeluarkan. Namun, tetap dilakukan beberapa upaya yang menjadi wujud kontribusi PJB terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi.

Pengelolaan Limbah Waste Management

Kegiatan operasional PJB tidak hanya menghasilkan listrik tetapi juga limbah yang berpotensi menimbulkan masalah bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Hal ini mendorong PJB untuk senantiasa melaksanakan pengelolaan limbah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Sebagai Perusahaan yang berupaya menjadi *Green and Clean Power Plant*, PJB mengelola limbah cair dan padat baik yang termasuk Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) maupun Non B3.

• Limbah Cair

PJB melakukan pengelolaan air limbah sebelum dibuang ke badan air baik itu laut maupun sungai untuk mencegah potensi pencemaran akibat aktivitas operasional pembangkit. PJB juga memiliki unit instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di setiap unit pembangkitan. Secara umum, IPAL terdiri dari proses fisik (sedimentasi & *oil separator*), kimia (penambahan koagulan dan flokulan), serta filtrasi (media pasir). Ketiga metode ini digunakan untuk mengontrol parameter kontaminan agar tidak melebihi baku mutu yang dipersyaratkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2009 seperti pH, TSS, minyak dan lemak, sisa klor, dan lain-lain. Selain itu, PJB melakukan pengukuran kualitas air limbah di unit eksisting dan unit FTP-1 sebagai berikut.

This is due to efforts or innovations in the generation mechanism so that power plants become more efficient and reduce the burden of emissions released. However, several efforts are still being made to embody PJB's contribution to the goal of sustainable development, namely building resilient infrastructure, supporting inclusive and sustainable industrialization, and fostering innovation.

PJB's operational activities not only produce electricity but also waste which has the potential to cause problems for the environment and surrounding communities. This leads PJB to always conduct waste management following applicable procedures and conditions. As a green and clean Company, PJB manages both liquid and solid waste, including toxic and hazardous and Non-toxic and hazardous Materials.

• Liquid Waste

PJB manages wastewater before being discharged into water bodies both sea and river to prevent potential pollution due to power plant operational activities. PJB also has a wastewater treatment plant (WWTP) in each power plant unit. In general, WWTP consists of physical processes (sedimentation and oil separator), chemistry (the addition of coagulants and flocculants), and filtration (sand media). The three methods are used to control the parameters of contaminants that do not exceed the quality standards required in the Regulation of the Minister of Environment No.8 of 2009 such as pH, TSS, oil and fat, residual chlorine, and others. Additionally, PJB measures the quality of wastewater in the existing unit and FTP-1 unit as follows.





Unit Eksisting

Existing Unit

Tabel Kualitas Air Limbah Proses/WWTP (Kep.Men.LH. No. 04.29.12/2014, Kep.Men.LH. No. 04.5.03/2015, Kep.Men.LHK. 04.23.10/2014, dan SK 321/Menlhk/Setjen/PKL.1/5/2019)

Table of Wastewater Treatment Plan Quality/WWTP (Ministry Of Environment and Forestry Decree No. 04.29.12 / 2014, Ministry Of Environment and Forestry Decree No. 04.5.03/2015, Ministry Of Environment and Forestry Decree 04.23.10/2014, and SK 321/Menlhk/Setjen/PKL.1/5/2019)

Parameter	Satuan Unit	Baku Mutu Quality Standards	Gresik (PLTGU) Gresik (CCPP)		Paiton		Muara Karang		Muara Tawar	
			Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min
pH	-	6 – 9	8,40	6,40	7,71	7,31	8,70	8,50	8,37	7,96
TSS	mg/l	100	22,00	2,20	22,00	10,20	27,00	1,00	10,00	10,00
Minyak dan Lemak Oil and Fat	mg/l	20	3,60	0,40	0,59	0,59	1,00	0,54	2,00	2,00
Chlorine (Cl2)	mg/l	0,5	-	-	0,004	0,004	-	-	0,12	0,01
Cr Total	mg/l	0,5	0,0107	0,0107	0,027	0,027	0,02	0,03	0,01	0,01
Tembaga (Cu) Copper (Cu)	mg/l	1	0,03	0,007	0,011	0,011	0,02	0,02	0,01	0,01
Besi (Fe) Besi (Fe)	mg/l	3	0,28	0,0029	0,047	0,042	0,06	0,08	0,94	0,02
Seng (Zn) Zinc (Zn)	mg/l	1	0,09	0,0141	0,01	0,01	0,03	0,02	0,11	0,01
Phosphate (PO4)	mg/l	10	3,17	0,02	0,06	0,06	0,10	0,03	1,61	0,06

Tabel Kualitas Air Limbah Bahang/ Air Laut Pendingin (Kep.Men.LH. No. 04.29.12/2014, Kep.Men.LH. No. 04.5.03/2015, Kep.Men.LHK. 04.23.10/2014, dan SK.321/Menlhk/Setjen/PKL.1/5/2019)

Table of Cooling Wastewater Quality/Cooling Seawater (Ministry Of Environment and Forestry Decree No. 04.29.12 / 2014, Ministry Of Environment and Forestry Decree No. 04.5.03 / 2015, Ministry Of Environment and Forestry Decree 04.23.10/2014, and SK.321/Menlhk/Setjen/PKL.1/5/2019)

Parameter	Satuan Unit	Baku Mutu Quality Standards	Gresik		Paiton		Muara Karang		Muara Tawar	
			Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min
Suhu Temperature	°C	40	24,30	35,00	37,10	35,90	36,40	30,50	39,90	32,10
Chlorin	mg/l	0,5	0,20	0,01	0,08	0,02	0,06	0,01	0,28	0,03

Kualitas air limbah Proses dan Air Limbah Bahang (Air Laut Pendingin) masih di bawah ambang batas.

The processed wastewater quality and cooling wastewater are still below the threshold.

Unit FTP-1

FTP-1 Unit

Tabel Kualitas Air Limbah Proses/ WWTP (Kep.Men.LHK. No. SK 434/Menlhk/ Setjen/ PKL/ 1/7/2019, Kep.Men. LHK No. SK.284/ Menlhk/ Setjen/PKL.1/6/2017, Kep.Men.LHK. No. SK.213/ Menlhk/ Setjen/ PKL.1/5/2018, KepMenLHK No. SK.443/ Menlhk/ Setjen/ PKL.1/6/2016, KepMenLHK No. SK.328/ Menlhk/ Setjen/ PKL.1/7/2017)

Table of Processed Wastewater Quality/WWTP (Ministry of Environment and Forestry Decree No. SK 434/Menlhk/Setjen/PKL/ 1/7/, Ministry of Environment and Forestry Decree No. SK.284/ Menlhk/ Setjen/PKL.1/6/2017, Ministry of Environment and Forestry Decree No. SK.213/Menlhk/Setjen/PKL.1/5/2018, Ministry of Environment and Forestry Decree No. SK.443/Menlhk/ Setjen/PKL.1/6/2016, Ministry of Environment and Forestry Decree No. SK.328 Menlhk/Setjen/PKL.1/7/2017)

Parameter	Satuan Unit	Baku Mutu Quality standards	Indramayu		Rembang		Tj. Awar-Awar		Paiton 9		Pacitan	
			Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min
pH	-	6 – 9	8,22	8,12	7,6	6,6	*	*	*	*	*	*
TSS	mg/l	100	40	36	9,5	5,5	*	*	*	*	*	*
Minyak dan Lemak Oil and Fat	mg/l	0,5	<1	<1	4,5	1,28	*	*	*	*	*	*
Chlorine (Cl2)	mg/l	0,5			#	#	*	*	*	*	*	*
Cr Total	mg/l	1	<0,007	<0,007	#	#	*	*	*	*	*	*
Tembaga [Cu] Copper [Cu]	mg/l	3	<0,02	<0,007	0,0187	0,0187	*	*	*	*	*	*
Besi [Fe] Besi [Fe]	mg/l	1	0,35	0,29	0,0316	0,024	*	*	*	*	*	*
Seng [Zn] Zinc	mg/l	10	0,16	0,14	0,0288	0,0071	*	*	*	*	*	*
Phosphate (PO4)	mg/l	10	<0,06	<0,06	#	#	*	*	*	*	*	*

* Tanjung Awar-Awar & Pacitan, tidak memiliki kewajiban penataan pada titik outlet WWTPSK Izin Pembuangan Limbah Cair ke Laut

Parameter yang dimaksud tidak Dipersyaratkan dalam SK Izin Pembuangan Limbah Cair ke Laut yang dimiliki Unit yang bersangkutan

* Tanjung Awar-Awar & Pacitan, do not have compliance obligations at the outlet point WWTPSK Permit for Disposal of Liquid Waste into the Sea

The parameters referred to are not required in the Decree of Permit for Disposal of Liquid Waste to the Sea owned by the Unit concerned

Tabel Kualitas Air Limbah Bahang/ Air Laut Pendingin (Kep.Men.LHK. No. SK 434/Menlhk/ Setjen/ PKL 1/7/2019, KepMenLHK No. SK.284/Menlhk/ Setjen/ PKL.1/6/2017, KepMenLHK No. SK.213/ Menlhk/ Setjen/ PKL.1/5/2018, KepMenLHK No. SK.443/ Menlhk/ Setjen/ PKL.1/6/2016, KepMenLHK No. SK.328/ Menlhk/ Setjen/ PKL.1/7/2017)

Table of Wastewater Quality/Cooling Sea Water (Ministry Of Environment and Forestry Decree No. SK 434/Menlhk Setjen/PKL 1/7/2019, Ministry Of Environment and Forestry Decree No. SK.284/Menlhk/Setjen/PKL.1/6/2017, Ministry Of Environment and Forestry Decree No. SK.213 Menlhk/Setjen/PKL.1/5/2018, Ministry Of Environment and Forestry Decree No. SK.443/Menlhk/ Setjen/PKL.1/6/2016, Ministry Of Environment and Forestry Decree No. SK.328/Menlhk/Setjen/PKL.1/7/2017)

Parameter	Satuan Unit	Baku Mutu Quality standards	Indramayu		Rembang		Tj. Awar-Awar		Paiton 9		Pacitan	
			Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min
Suhu Temperature	°C	40	36,8	35,8	34,8	30	40	30	27,5	25,5	32	31,3
Chlorin	mg/l	0,5	0,22	0,07	0,21	0,18	0,36	0,01	0,06	0,05	0,27	0,23

• Limbah B3

Mekanisme pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan operasional PJB dilaksanakan dengan menyimpan semua limbah B3 (non FABA) di tempat penyimpanan sementara berizin dari Walikota/Bupati masing-masing unit. Sebelum masa simpan yang diizinkan berakhir, limbah-limbah tersebut diserahkan kepada pihak ketiga berizin untuk dikelola lebih lanjut. Selain itu, PJB juga menerapkan dua mekanisme dalam pengelolaan limbah B3 FABA. Pertama, Limbah tersebut diserahkan langsung kepada pihak ketiga berizin untuk dikelola lebih lanjut seperti perusahaan semen dan/atau beton.

• Toxic and Hazardous Waste

The mechanism of toxic and hazardous waste management from PJB operational activities is conducted by storing all toxic and hazardous waste (non-FABA) waste in local licensed temporary storage areas of each unit. Before the permitted shelf life expires, these wastes handed over to third parties licensed to be further managed. Also, PJB implements two mechanisms for managing FABA toxic and hazardous waste. Firstly, the waste is submitted directly to licensed third parties for further management such as cement companies and/or concrete.

Kedua, PJB menimbun FABA yang dihasilkan di *landfill* yang sudah memiliki izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) seperti di UP Paiton 1-2 & 9, UBJOM Pacitan, UBJOM Indramayu, UBJOM Rembang, dan lain-lain. Disamping itu, PJB melaksanakan program Pemanfaatan *fly ash* dan oli bekas, purifikasi minyak pelumas, dan *resize* majun sebagai wujud kontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.

• Limbah Padat Non B3

PJB menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam mengelola limbah padat non B3. Unit-unit PJB telah menjalankan berbagai program dan inovasi sebagai upaya pengelolaan limbah tersebut diantaranya penambahan prefilter *air intake* pada gas turbine di UP Muara Tawar, program inovasi *upgrade combustor extendor* dan *advance gas path turbin* GTG 1.3 untuk mengurangi durasi pemeliharaan unit serta program Ayo Kurangi Sampah Plastik (Akustik) di UP Muara Karang, program *paperless* untuk mengurangi sampah kertas melalui implementasi aplikasi IZAT (Aplikasi *Zero Accident Assistant*) di UP Gresik, dan Program inovasi pemanfaatan *belt conveyor* bekas sebagai *rubber dust barrier telescopic chute* pada UP Paiton.

Program penggunaan *prefilter* di UP Muara Tawar dapat mengurangi timbulan sampah non B3 yang dihasilkan sebesar 9 ton bahkan lebih setiap tahunnya. Hingga Juni 2019, perusahaan mengurangi timbulan sampah sebesar 14.58 ton sehingga menghemat pengeluaran sebesar Rp 1.323.034.959. UP Muara Karang dapat mengurangi *spare part* berupa logam/metal yang dapat menumpuk menjadi sampah melalui penerapan program inovasinya, sehingga dapat mengurangi limbah padat non B3 berupa logam/metal sebesar 2,26 ton/tahun dan penghematan sebesar Rp. 1.692.000. Adapun program lainnya yang diterapkan di semua unit termasuk UP Muara Karang yaitu AKUSTIK (Ayo Kurangi Sampah Plastik) yang telah dicanangkan oleh PJB. Sebagai contoh di Unit Muara Karang, program AKUSTIK ini telah mengurangi timbulan sampah sebesar 1.37 ton dan dapat menghemat biaya pengangkutan sampah sebesar Rp 17.118.000 dan selisih pembelian air mineral gelas sehingga total penghematan sebanyak Rp 263.849.000. Implementasi aplikasi IZAT (Aplikasi *Zero Accident Assistant*) di UP Gresik selain dapat meningkatkan kinerja K3 juga mampu menggantikan catatan manual yang semula digunakan untuk pengecekan rutin K3 menjadi menggunakan *gadget* android yang dilengkapi dengan sensor NFC (*Near Field Communication*), sehingga tidak lagi memerlukan kertas. Program ini mampu menghemat penggunaan kertas sebanyak 12 rim/tahun atau setara dengan 0,02 ton sampah kertas dan penghematan sebesar Rp376.000 hingga Juni 2019. Program IZAT ini nantinya akan diimplementasikan untuk semua Unit PJB sehingga program *monitoring* K3 berjalan efisien dan lebih meningkatkan penghematan bagi perusahaan.

Secondly, PJB placed FABA produced in landfills that already have permits from the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) such as Paiton 1-2 & 9 GU, Pacitan OMSBU, Indramayu OMSBU, Rembang OMSBU, and others. Additionally, PJB implements the program of Utilizing fly ash and used oil, purified lubricating oil, and *resize* majun as a form of a contribution to the goal of sustainable development which is to ensure sustainable consumption and production patterns

• Non-toxic and hazardous Solid Waste

PJB applies the 3R principle (*Reduce, Reuse, and Recycle*) in managing non-toxic and hazardous solid waste. PJB units have carried out various programs and innovations as a waste management effort including the addition of air intake prefilter to the gas turbine at Muara Tawar GU, an innovative combustor extender upgrade program and advance gas path turbine GTG 1.3 to reduce the duration of maintenance of the unit and the Ayo Reduce Trash program Plastics (Acoustics) at Muara Karang GU, a paperless program to reduce paper waste through the implementation of the IZAT application (*Zero-Accident Assistant Application*) at Gresik GU, and an innovative program on the use of used conveyor belts as a rubber dust barrier telescopic chute at Paiton GU.

The prefilter usage program at Muara Tawar GU can reduce nontoxic and hazardous waste produced by 9 tons each year. As of June 2019, the company reduced waste generation by 14.58 tons, thereby saving expenses by Rp 1,323,034,959. Muara Karang GU can reduce metal spare parts that can accumulate into rubbish through the application of its innovation program to reduce non-toxic and hazardous solid waste in the form of metal by 2.26 tons/year and savings of Rp. 1,692,000. Other programs implemented in all units, including Muara Karang GU, namely AKUSTIK (Ayo Kurangi Sampah Plastik), have been launched by PJB. For example, in the Muara Karang Unit, the AKUSTIK program has reduced waste generation by 1.37 tons and can save on transportation costs of Rp. 17,118,000 and the difference in purchases of glass mineral water so that the total savings is Rp. 263,849,000. The implementation of the IZAT application (*Zero Accident Assistant Application*) at Gresik GU, in addition to improving OHS performance, it is also capable of replacing manual records that were originally used for routine checking OHS to use android gadgets equipped with NFC (*Near Field Communication*) sensors, so they no longer need paper. This program can save paper use of 12 reams/year or equivalent to 0.02 tons of paper waste and savings of Rp376,000 until June 2019. The IZAT program will be implemented for all PJB Units so that the OHS monitoring program runs efficiently and further increases savings for the company.



UP Paiton pada tahun 2019 melakukan inovasi pemanfaatan *belt conveyor* bekas sebagai *rubber dust barrier telescopic chute*. Secara umum pemanfaatan limbah karet telah banyak dilakukan, namun PT PJB memanfaatkan limbah karet berupa *belt conveyor* bekas menjadi *rubber dust barrier telescopic chute* sehingga debu batubara tidak menyebar ketika proses unloading ke *stock pile*. Program ini bukan merupakan praktek umum yang biasa dilakukan. Program ini juga dapat memanfaatkan limbah karet sebesar 366 kg dan menghemat Rp2.860.000. Secara keseluruhan penerapan program 3R limbah padat non B3 di UP Muara Tawar, UP Muara Karang, UP Gresik, dan UP Paiton mencapai puluhan hingga ratusan ton sampah.

Selain itu, PJB juga menerapkan program-program lainnya untuk mengelola jumlah timbulan sampah yang didaur ulang antara lain pengurangan kertas dengan program *Office Automation* (OA), program biopori, pengurangan sampah plastik, *composting*, pemanfaatan limbah logam untuk keperluan unit, pemanfaatan limbah karet untuk sandal dan *furniture*, pemanfaatan limbah kayu untuk *furniture*, pemanfaatan kabel tray bekas sebagai dinding dan media tanam, transplantasi terumbu karang dengan cacahan plastik untuk campuran beton, dan pemanfaatan material bekas untuk keramba apung. Implementasi program ini merupakan bentuk kontribusi PJB terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.

Paiton GU in 2019 innovated the use of used conveyor belts as a rubber dust barrier telescopic chute. In general, the utilization of rubber waste has been done a lot, but PT PJB utilizes rubber waste in the form of used conveyor belts into a rubber dust barrier telescopic chute so that coal dust does not spread when unloading into the stockpile. This program is not a common practice. The program can also utilize rubber waste of 366 kg and save Rp2,860,000. Overall, the application of the 3R non-toxic and hazardous solid waste program in Muara Tawar GU, Muara Karang GU, Gresik GU, and Paiton GU reached tens to hundreds of tons of waste.

Additionally, PJB implements other programs to manage the amount of recycled waste including paper reduction with Office Automation (OA) programs, biopore programs, reduction of plastic waste, composting, utilization of metal waste for unit purposes, utilization of rubber waste for sandals and furniture, utilization of wood waste for furniture, utilization of used tray cables as walls and planting media, transplantation of coral reefs with plastic counts for concrete mixtures, and utilization of used materials for floating cages. The implementation of this program is a form of a contribution of PJB to sustainable development goals which is to ensure sustainable consumption and production patterns.

Konservasi Air Water Conservation

PJB melaksanakan program konservasi air untuk turut berperan dalam kelestarian lingkungan sekitar. PJB melakukan daur ulang terhadap air yang dikonsumsi melalui upaya *reduce*, *reuse*, *recycle*, dan *redesign* di beberapa Unit Pembangkit Perusahaan seperti UP Muara Karang, UP Gresik, UP Muara Tawar, dan UP Paiton. Beberapa program konservasi air yang telah dilaksanakan antara lain:

- Program evaluasi standar nilai parameter pembukaan *blowdown* yang dapat mengurangi penggunaan air proses
- Program penggantian *Line Drain Superheater* untuk mengurangi kebocoran steam
- Program pengurangan losses dari CBD (*continuous blow down*) dengan metode pengaturan frekuensi bukaan *valve*
- Program resirkulasi *dump* desalinasi, sehingga dapat mengurangi debit air yang terbuang dengan persyaratan tertentu

Penerapan program tersebut di UP Muara Karang, UP Muara Tawar, UP Gresik, dan UP Paiton dapat menghasilkan efisiensi air mencapai 252.224,63 m³.

PJB implements a water conservation program to play a role in the preservation of the surrounding environment. PJB recycles water consumed through efforts to reduce, reuse, recycle, and redesign in several Generation Units such as Muara Karang, Gresik, Muara Tawar, and Paiton GU. Some water conservation programs that have been implemented include:

- Standard evaluation program values for the open blowdown parameters that can reduce the use of processed water
- Replacement program for Superheater Line Drain to reduce steam leakage
- Loss reduction program from CBD (continuous blowdown) with the method of valve open frequency setting
- Recirculation of desalination dump program, to reduce the discharge of water used with certain requirements.

The implementation of the program at Muara Karang GU, Muara Tawar GU, Gresik GU, and Paiton GU can provide water efficiency reaching 252,224.63 m³.

Selain itu, PJB melakukan pemanfaatan air bekas wudu untuk menyiram tanaman, efisiensi injeksi hidrazi pada *feedwater* untuk konservasi air dan energi, dan pemanfaatan kembali air bekas *drain gland seal* turbin ke kondensor sebagai bentuk kontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua.

Efisiensi Energi Energy Efficiency

PJB berkomitmen melaksanakan efisiensi energi melalui penerapan sejumlah program pada seluruh kegiatan operasional Perusahaan. PJB menggunakan energi primer yaitu Bahan Bakar Minyak, Diesel, Batubara, dan Gas/LPG/CNG untuk produksi listrik. Beberapa inisiatif program efisiensi energi yang diterapkan pada pembangkit dalam proses produksi listrik antara lain:

- Retrofit unit pembangkit PLTGU
- Penggantian lampu *Tubular Lamp* (TL) ke lampu *Light Emitting Diode* (LED)
- Penggantian *valve* bocor
- Kalibrasi dan penormalan *system* pembakaran batubara
- Penggantian PLTD menjadi PLTMH
- Pemasangan PLTS

Komitmen dalam penerapan inisiatif efisiensi khususnya energi primer berpengaruh terhadap penurunan jumlah konsumsi energi primer tahun 2019 menjadi 246.413.374,70 Gigajoule dari tahun 2018 sebesar 265.737.036,65 Gigajoule, yang dirincikan dalam tabel berikut.

Tabel Konsumsi Energi Primer Tahun 2017-2019 (Gigajoule)
Table of Primary Energy Consumption For 2017-2019 (Gigajoule)

Jenis Energi Primer Types of Primary Energy	2016	2017	2018	2019
HSD	1.768.977,01	147.605,69	8.801.391,24	973.707,14
MFO	477.427,23	1.077.537,62	4.628.676,47	1.350.198,13
Batubara Coal	70.925.388,46	77.910.386,00	94.311.299,96	96.537.798,33
Gas Gas	177.795.902,17	150.294.816,32	157.995.668,99	147.551.671,10
Jumlah Total	250.967.694,87	229.430.345,62	265.737.036,65	246.413.374,70

Selain itu, PJB juga telah menyusun inisiatif untuk penerapan efisiensi pada bangunan kantor diantaranya:

- Bekerja sama dengan Divisi Energi Primer 1 dan 2, dalam implementasi efisiensi energi di PJB Kantor Pusat
- Memformulasikan rencana implementasi program penghematan energi yang jelas dan berguna.
- Mengembangkan panduan/pedoman efisiensi untuk gedung PJB Kantor Pusat

Additionally, PJB utilizes ablution water for watering plants, hydrazine injection efficiency in feedwater for water and energy conservation, and reuse of drain gland seal turbines into condensers as a contribution to sustainable development goals, to ensure the availability and management of clean water sustainable and sanitation for all.

PJB is committed to implementing energy efficiency through the implementation of some programs in all the Company's operational activities. PJB utilizes primary energy such as Oil, Diesel, Coal, and Gas/LPG/CNG for electricity production. Some energy efficiency program-initiatives that are applied to power plants in the electricity production process include:

- CCPP retrofit
- Replacement of Tubular Lamp (TL) lamps to Light Emitting Diode (LED) lamps
- Leaking valve replacement
- Calibration and normalization of the coal combustion system
- Replacement of DEPP becomes MHPP
- SPP installation

Commitments in implementing efficiency initiatives, especially primary energy, have an effect reduce the primary energy consumption in 2019 to 246,413,374.70 Gigajoule, from 2018 which was 265,737,036.65 Gigajoule, described in the following table.

In Addition, PJB has developed initiatives for implementing efficiency in office buildings including

- Cooperating with Division of Primary Energy 1 and 2 in implementing energy efficiency at PJB Head Office
- Formulating a plan for implementing a clear and useful energy-saving program.
- Developing efficiency guideline for Head Office PJB buildings

- Memantau penghematan energi melalui instalasi peralatan sistem monitoring yang dapat merekam konsumsi energi di gedung dan menampilkan rincian konsumsi energi di sistem pengkondisian udara (AC), sistem penerangan, dan beban listrik peralatan lainnya.

Penerapan program tersebut efektif dalam menurunkan konsumsi energi listrik untuk bangunan kantor sebagai berikut.

- Monitoring energy savings through the installation of monitoring-system equipment that can record energy consumption in the building and show details of energy consumption in air conditioning systems (AC), lighting systems, and other equipment electrical loads.

The implementation of the program is effective in reducing electricity consumption for office buildings which is as follows.

Tabel Konsumsi Listrik Untuk Bangunan Kantor Tahun 2017-2019 (Gigajoule)
Table of Electricity Consumption of Office Buildings 2017-2019 (Gigajoule)

2017	2018	2019
3.820.140	3.944.196	3.271.968

Green Power Plant

Green Power Plant

Komitmen PJB dalam menjaga dan melestarikan lingkungan salah satunya diwujudkan melalui program pengembangan *green power plant*. Penerapan program ini merupakan bentuk sinergi bisnis pembangkitan dengan pelestarian lingkungan. PJB telah meluncurkan program *Green Power Plant* Cirata yang mempunyai potensi alam yang baik. Green Power Plant Cirata meliputi Agroforestri dengan varian tanaman endemik dan buah-buahan sebagai bagian dari upaya melindungi keanekaragaman hayati, Gedung *Dam Control Centre* yang menjadi pusat kontrol dan monitoring Bendungan Cirata, Pembangkit Listrik Tenaga Air dengan *underground power house* terbesar di dunia dan *Photovoltaic* atau Pembangkit Listrik Tenaga Surya dengan kapasitas 1 MW yang terbesar di pulau Jawa. PJB terus mengembangkan sejumlah program untuk menjadi perusahaan yang terdepan dalam pengelolaan pembangkitan yang mempertimbangkan aspek lingkungan.

PJB's commitment to maintaining and preserving the environment is realized through the green power plant development program. The implementation of this program is a form of the synergy of power plant business with environmental conservation. PJB has established Cirata Green Power Plant program which has promising natural potential. Cirata Green Power Plant includes Agroforestry with endemic and fruit plant variants as part of efforts to protect biodiversity, Dam Control Center Building which is the center of control and monitoring of Cirata Dam, Hydroelectric Power Plant with the world's largest underground powerhouse and Photovoltaic or Power Plant 1 MW solar electricity as the largest one in Java. PJB continues to develop several programs to become a leading company in power plant management that considers environmental aspects.



Inisiatif CSR terkait Lingkungan Hidup CSR Initiatives on Environment

PJB melaksanakan program tanggung jawab sosial terhadap lingkungan hidup sebagai bentuk kontribusi kepada masyarakat dalam melindungi keanekaragaman hayati serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi peningkatan kualitas lingkungan secara berkelanjutan. Beberapa program yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2019 antara lain:

PJB implements social responsibility programs for the environment as a form of contribution to the community in protecting biodiversity and providing wider benefits for improving environmental quality in a sustainable manner. Some programs that were implemented in 2019 including:

Perlindungan Keanekaragaman Hayati Biodiversity Protection

PJB melaksanakan program perlindungan keanekaragaman hayati sebagai bentuk tanggung jawab atas potensi dampak yang ditimbulkan dari kegiatan operasional. Habitat flora dan fauna di sekitar wilayah kerja PJB berpotensi mengalami dampak dari kegiatan operasional. Oleh karena itu, PJB melaksanakan upaya pelestarian flora dan fauna yang dilindungi di sekitar unit pembangkit secara berkelanjutan sebagai berikut.

PJB implements a biodiversity protection program as a manifestation of responsibility for the potential impacts resulted from operational activities. Flora and fauna habitat around the PJB work area have the potential to experience impacts of operational activities. Therefore, PJB conducts efforts to conserve protected flora and fauna around the generating unit in a sustainable manner as follows:

Unit	Lokasi Perlindungan Conservation Location	Flora dan Fauna yang Dilindungi Protected Flora and Fauna	Upaya Pelestarian Conservation Efforts
UP Gresik Gresik GU	Pulau Bawean dan Desa Kramat Inggil Bawean Island and Kramat Inggil Village	Mangrove, Terumbu Karang, Ikan Lele, Burung Hantu Mangroves, coral reefs, catfish, owls	Konservasi mangrove, konservasi terumbu karang, budidaya ikan lele, serta konservasi burung hantu dengan membangun rumah burung hantu Mangrove conservation, coral reef conservation, catfish farming and owl conservation by building the owl houses
UP Muara Karang Muara Karang GU	Ecomarine Kali Adem, Jakarta Ecomarine kali adem, Jakarta	Mangrove, Mamalia, Burung, dan lain-lain Mangroves, mammals, birds, etc.	Konservasi mangrove, pembangunan alat pemecah ombak, Conservation of mangroves, construction of breakwaters,
UP Paiton Paiton GU	Perairan Bhinor, Unit Pembangkit, Dan Pesisir Bhinor Bhinor waters, power plants, and the coast of Bhinor	Capung, Kupu-Kupu, Burung, Pohon, Terumbu Karang, Mangrove, Herpetofauna, Mamalia Dragonflies, butterflies, birds, trees, coral reefs, mangroves, herpetofauna, mammals	Konservasi terumbu karang dan mangrove, menjaga habitat fauna dan flora, dan penghijauan rutin Conservation of coral reefs and mangroves, maintaining habitat for fauna and flora, and routine greening
UP Muara Tawar Muara Tawar GU	Area Pembangkit Power plant area	Burung Bangau Bluwok, Burung Pecuk Ular Asia, Mengkudu, Gandaria, Nam- Nam, Kecik dan Srikaya, Mangrove serta beberapa mamalia dan Hewan Lainnya Bluwok Stork, Asian Snake Bird, Noni, Gandaria, Nam-Nam, Kecik and Srikaya, mangroves and several other mammals and animals	Konservasi terumbu karang, menjaga habitat fauna dan flora, Conservation of coral reefs, maintaining habitat for fauna and flora,

Implementasi program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi diversifikasi hayati dan habitat yang dilindungi sehingga mata rantai ekosistem di sekitar area operasional Perusahaan dapat dilestarikan. Selain itu, program ini menjadi wujud partisipasi PJB untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu menjaga ekosistem laut dan darat.

The implementation of this program is expected to have a positive impact on biodiversity and protected habitats so that the ecosystem links around the Company's operational areas can be preserved. Also, this program is a representation of PJB's participation to support sustainable development goals, namely maintaining marine and terrestrial ecosystems.

Penanaman Pohon Forestation

PJB melaksanakan penanaman pohon di seluruh unit pembangkitan sebagai salah satu program *Green and Clean Power Plant*. Program ini merupakan wujud peran PJB untuk mengatasi emisi karbondioksida yang berasal dari proses produksi listrik. Penanaman pohon dapat membuat proses produksi listrik lebih aman dan bersih karena karbondioksida dapat terserap.

Selama tahun 2019 PJB telah menanam sebanyak 247.587 pohon. Beberapa pohon yang ditanam pun adalah tanaman buah seperti Kelapa, Durian, Alpukat, Kelengkeng dan lain-lain yang dikelola oleh masyarakat sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk menambah pendapatan masyarakat. Manajemen PJB juga ikut berpartisipasi langsung dalam program ini untuk meningkatkan komitmen seluruh pihak untuk dapat turut berkontribusi terhadap upaya-upaya pelestarian lingkungan.

PJB conducts forestation in all generation units as one of the Green and Clean Power Plant programs. This program is a form of the role of PJB to overcome carbon dioxide emissions from the electricity production process. Planting trees can make the electricity production process safer and cleaner because carbon dioxide can be absorbed.

During 2019 PJB has planted 247,587 trees. Some of the trees planted are fruit trees such as Coconut, Durian, Avocado, Longan, and others that are managed by the community so that the results can be used to increase community income. PJB management also participated directly in this program to increase the commitment of all parties to be able to contribute to environmental preservation efforts.

Tabel Jumlah Pohon Yang Ditanam Tahun 2017-2019
Table of Trees Planted in 2017-2019

2017	2018	2019
700.966	649.238	247.587

Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan Environmental Complaints Mechanism

PJB berkomitmen dalam melindungi hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat sehingga pengelolaan perusahaan berbasis lingkungan diterapkan secara konsisten. Upaya tersebut dilaksanakan sebagai wujud kepedulian PJB terhadap lingkungan agar dampak lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan operasional dapat dikelola. PJB juga mengelola pengaduan dari masyarakat terkait masalah lingkungan di sekitar wilayah operasional yang dapat disampaikan kepada Perusahaan melalui surat resmi. Selama tahun 2019, PJB tidak mendapat denda atau sanksi berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap undang-undang yang berkaitan dengan masalah lingkungan.

PJB is committed to protecting the community's right to obtain good and healthy environment so that the management of environmentally-based companies is implemented consistently. These efforts are implemented as a manifestation of PJB's concern for the environment so that environmental impacts that may arise from operational activities can be managed. PJB also manages complaints from the public regarding environmental issues surrounding the operational area which can be submitted to the Company through official letters. In 2019, PJB received no penalties or sanctions related to non-compliance with laws relating to environmental issues.

Sertifikasi dan Penghargaan Certification and Award



PJB dan Anak Perusahaan memiliki sejumlah sertifikasi lingkungan antara lain ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan, ISO 5001:2011 tentang Sistem Manajemen Energi, dan ISO 55001:2014 tentang Sistem Manajemen Aset. PJB juga membekali karyawan dengan beragam sertifikasi terkait lingkungan diantaranya penanggung jawab Pengendalian dan Pencemaran Air (PPPA), penanggung jawab Pengendalian dan Pencemaran Udara (PPPU), operator Pengendalian dan Pencemaran Air (PPA), operator Pengendalian dan Pencemaran Udara (PPU), dan Pengendalian Limbah B3 (PLB3).

Konsistensi PJB dalam pengelolaan perusahaan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan membawa Perusahaan memperoleh apresiasi dan penghargaan dari sejumlah pihak. Pada tahun 2019 PJB menerima penghargaan dari Gubernur Jawa Timur atas pengelolaan PLTU Paiton unit 1 dan 2 yang dinilai sangat baik dalam implementasi pengelolaan perusahaan berbasis lingkungan hidup pada kategori PLTU. Pada ajang Subroto Award 2019, PJB kembali memperoleh penghargaan bidang efisiensi energi. PJB meraih penghargaan Indonesia Green Award (IGA) tahun 2019 untuk kategori pengembangan keanekaragaman hayati. PJB juga mendapatkan apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atas kontribusi dan aksi mitigasinya dalam upaya menurunkan emisi gas ruang kaca. Selain itu, dua unit pemangkitan PJB yaitu UP Paiton dan UP Gresik meraih peringkat emas dalam PROPER 2019 oleh KLHK. Pelaksanaan program PROPER ini memberikan penghematan yang signifikan dalam proses bisnis perusahaan dan menjadi wujud partisipasi PJB dalam program pengurangan Biaya Pokok Produksi (BPP) yang dicanangkan oleh PT PLN (Persero).

PJB and its Subsidiaries are already environmentally certified with ISO 14001: 2015 certification on Environmental Management Systems, ISO 5001 on Energy Management Systems, and ISO 55001 on Asset Management Systems. PJB also has various certifications for employees in the environmental sector: certification Water Control and Pollution Patron (PPPA), Air Pollution and Control Patron (PPPU), Water Pollution and Control Operator (PPA), Air Pollution and Control Operator (PPU), and toxic and hazardous Waste Control.

The consistency of PJB in managing the company by considering the environmental environment has led to the Company getting appreciation and appreciation from some parties. In 2019 PJB received an award from the Governor of East Java for the management of Paiton CFPP units 1 and 2 which were considered very good in the implementation of environmental-based company management in the CFPP category. At the 2019 Subroto Award, PJB again received an award in the field of energy efficiency. PJB won the Indonesia Green Award (IGA) in 2019 in the category of biodiversity development. PJB also received appreciation from the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) for its contribution and mitigation actions in efforts to reduce greenhouse gas emissions; also, two PJB generation units which are Paiton GU and Gresik GU were awarded gold in the 2019 PROPER by KLHK. The implementation of the PROPER program provides significant savings in the company's business processes and is a form of PJB participation in the Cost of Electricity Supply (CES) reduction program launched by PT PLN (Persero).

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PRAKTIK KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TO LABOR PRACTICES AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Komitmen dan Kebijakan Commitment and Policy

Keberhasilan eksekusi strategi dan kualitas layanan yang diberikan PJB sangat bergantung pada ketersediaan karyawan berkualitas dan berintegritas. PJB senantiasa menjamin hak-hak karyawan melalui penerapan program-program tanggung jawab perusahaan terhadap praktik ketenagakerjaan serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam rangka menjaga loyalitas karyawan untuk mendukung percepatan pengembangan dan keberlangsungan bisnis Perusahaan jangka panjang.

PJB telah membentuk unit kerja pengelola ketenagakerjaan dan aspek K3 yaitu Divisi Lingkungan dan K3-1 dan 2. Selain itu, PJB telah memiliki ketentuan internal sebagai acuan pengelolaan ketenagakerjaan dan aspek K3 dalam beberapa kebijakan diantaranya *Code of Conduct* (CoC), Sistem Manajemen K3 yang disusun dengan mengacu pada PP No. 50 Tahun 2012, *Safety Golden Rules*, dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Etika bekerja Insan Perusahaan yang meliputi komitmen terhadap pengembangan diri, komitmen terhadap kemajuan dan perkembangan Perusahaan, dan komitmen anti diskriminasi diatur dalam CoC. Sejalan dengan budaya PJB yaitu mengutamakan keselamatan dan lingkungan, CoC juga mengatur aspek kepedulian terhadap K3 serta pelestarian lingkungan. Seluruh Insan Perusahaan termasuk Direksi wajib mengisi Lembar Pernyataan Kepatuhan Tahunan. Direksi juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa CoC dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh Insan Perusahaan.

Safety Golden Rules disusun sebagai instruksi yang memberikan panduan lebih rinci bagi seluruh unit dalam melaksanakan ketetapan yang berlaku dan mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja.

PKB, dalam hal ini adalah PKB PT PJB Periode 2019 – 2021, sebagai salah satu panduan pengelolaan terhadap praktik ketenagakerjaan yang disusun mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku diantaranya UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.

The successful execution of the strategy and the quality of services provided by PJB largely depends on the availability of qualified and integrity employees. PJB always guarantees the rights of employees through the implementation of corporate responsibility programs for labor practices and Occupational Health and Safety (OHS) to maintain employee loyalty to support the acceleration of the Company's long-term business development and sustainability.

PJB has established a work unit for managing labor and OHS aspects, namely Division of Environment and OHS -1 and 2. Also, PJB has internal provisions as a reference for labor management and OHS aspects in several policies including Code of Conduct (CoC), OHS Management System prepared by referring to PP No. 50 of 2012, Safety Golden Rules, and Collective Labor Agreement (CLA).

The work ethics of Company Personnel include commitments to personal development, commitment to the progress and development of the Company, and anti-discrimination commitments set out in the CoC. In line with the PJB culture of prioritizing safety and the environment, the CoC also regulates aspects of concern for OHS and environmental preservation. All Company Persons including Directors must complete the Annual Compliance Statement Sheet. The Board of Directors is also responsible for ensuring that the CoC is understood and implemented by all Company Personnel.

The Golden Safety Rules are prepared as instructions which provide more detailed guidance for all units in carrying out applicable regulations and knowing what to do and what should not be done in terms of occupational safety and health.

The CLA, in this case, the PT PJB's CLA for the Period of 2019 - 2021, as one of the management guidelines for labor practices compiled refers to the applicable laws and regulations including Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, Minister of Manpower Regulation No. 28 of 2014 concerning Procedures for Making and Ratification of Company Regulations and the Formulation and Registration of Collective Labor Agreements.

Seluruh jajaran Direksi melalui perwakilan Serikat Pekerja (SP) dan Manajemen Perusahaan yang menjadi bagian dari Tim Perunding dan Tim Perumus melaksanakan peninjauan dan persetujuan terhadap PKB. PKB yang berlaku telah didaftarkan ke Kementerian Ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran No B.130/PHIJSK-PK/PP&PKB/V/2019 tanggal 28 Mei 2019.

Pembentukan unit pengelola disertai penyusunan perangkat kebijakan internal yang mengacu pada hukum dan regulasi yang berlaku mencerminkan komitmen dan kesungguhan PJB dalam melaksanakan program tanggung jawab perusahaan terhadap praktik ketenagakerjaan dan K3 hingga membawa PJB memperoleh sejumlah apresiasi dari pihak eksternal selama tahun 2019.

Rencana Progam 2019 Program Plan 2019

PJB menyusun rencana program tanggung jawab terhadap ketenagakerjaan dan K3 setiap awal tahun. Beberapa kegiatan sebagai wujud tanggung jawab terhadap ketenagakerjaan yang direncanakan di tahun 2019 antara lain:

1. Penguatan Budaya K3 melalui *On Site Training*, Pelaksanaan Bulan K3, dan *Safety Campaign*.
2. Penguatan *Contractor Safety Management System* (SCMS).
3. *Set Up* Implementasi Aplikasi *Zero Accident Assistant*.
4. *Set Up* Implementasi PTW Luar Jawa.
5. Implementasi ITM FPS berbasis CMMS.
6. Penormalan FPS dan FACP.
7. *Set Up* dan pendampingan Audit Eksternal SMK3.
8. *Workshop* dan Standarisasi PIP.
9. *Monitoring Risk Survey*.
10. *Emergency Preparedness*.

PJB juga merencanakan sejumlah kegiatan maupun program yang mencerminkan wujud tanggung jawab terhadap aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja diantaranya:

1. Program pemeriksaan kesehatan berkala
2. Program pemantauan lingkungan kerja
3. Program kesiagaan dan penanggulangan keadaan darurat
4. Pelaksanaan kegiatan peringatan bulan K3 nasional antar Unit PJB

Seluruh kegiatan yang telah direncanakan selanjutnya akan diimplementasikan dan dievaluasi untuk memastikan adanya manfaat bagi pihak internal Perusahaan serta *stakeholder* lainnya

All members of the Board of Directors, through representatives of the Trade Unions (SP) and Company Management who are part of the Negotiating Team and the Formulating Team, conduct a review and approval of the Collective Labor Agreement. The applicable CLA has been registered with the Ministry of Manpower with Registration Number No B.130 / PHIJSK-PK / PP & PKB / V / 2019 on May 28, 2019.

The formation of the management unit is accompanied by the preparation of internal policy sets that refer to the applicable laws and regulations reflecting the commitment and seriousness of PJB in implementing the company's responsibility program for labor and OHS practices to bring PJB to receive some appreciations from external parties during 2019.

PJB prepares a plan of responsibility for employment and OHS programs at the beginning of the year. Some of the activities as a form of responsibility for employment planned for 2019 include:

1. Enriching OHS Culture through On-Site Training, OHS Month Implementation, and Safety Campaign.
2. Enhancing the Contractor Safety Management System (SCMS).
3. Setting Up Zero-Accident Assistant Application Implementation.
4. Setting Up the Implementation of PTW Outside Java.
5. Implementing CMMS-based FPS ITM.
6. Normalizing FPS and FACP.
7. Setting up and assisting the OHSMS External Audit.
8. Workshop and PIP Standardization.
9. Monitoring Risk Survey.
10. Emergency Preparedness.

PJB also plans some activities and programs that reflect the manifestation of responsibility towards aspects of Occupational Health and Safety including:

1. The periodic health check program
2. Work environment monitoring program
3. Emergency preparedness and response program
4. Implementation of national OHS Month Commemoration activities among PJB Units

All planned activities will then be implemented and evaluated to ensure benefits for the internal parties of the Company and other stakeholders



Kegiatan dan Dampaknya Activities and Impacts

Kelancaran kegiatan operasional, pencapaian target kinerja baik operasional maupun keuangan, eksekusi inisiatif strategis, dan pengembangan bisnis Perusahaan ke depan sangat bergantung pada ketersediaan karyawan berkualitas. PJB melakukan sejumlah program tanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan sebagai upaya mitigasi risiko-risiko ketenagakerjaan antara lain ketidakpuasan karyawan hingga tuntutan hukum kepada Perusahaan.

Ketidakpuasan karyawan dapat berasal dari beberapa faktor diantaranya kesejahteraan karyawan dan keluarganya belum terjamin; lingkungan kerja yang tidak kondusif dalam hal kesehatan, dan keselamatan kerja; jenjang karir yang tidak jelas; dan praktik diskriminasi. Ketidakpuasan karyawan berpengaruh pada penurunan produktivitas kerja, potensi tindakan kecurangan bahkan dapat melahirkan permasalahan hukum bagi Perusahaan. Oleh karena itu, PJB senantiasa menerapkan program tanggung jawab sosial ketenagakerjaan melalui pengelolaan sumber daya manusia secara komprehensif sebagai berikut.

The smooth operation of operations, the achievement of operational and financial performance targets, execution of strategic initiatives, and future business development of the Company are highly dependent on the availability of qualified employees. PJB conducts some responsibility programs in the field of employment as an effort to mitigate employment risks including employee dissatisfaction and legal claims to the Company.

Employee dissatisfaction can come from several factors including the welfare of employees and their families have not been guaranteed; a work environment that is not conducive to health and safety; unclear career path; and discriminatory practices. Employee dissatisfaction affects decreasing work productivity, the potential for fraud can even lead to legal problems for the Company. Therefore, PJB always implements the corporate social responsibility program to the employment aspect through comprehensive human resource management as follows.

Pengembangan Kompetensi Competency Development

PJB berkomitmen meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam hal keahlian ketenagalistrikan, manajerial dan wawasan bisnis serta kemampuan menggerakkan organisasi kini dan masa mendatang dengan membentuk unit PJB Academy. Komitmen tersebut didukung dengan upaya penguatan unit PJB Academy dengan menempatkan Direktur Utama sebagai Dean dan anggota Direksi sebagai Vice Dean serta Kepala Divisi, General Manager dan Kepala Satuan sebagai learning steering committee agar pihak-pihak tersebut dapat berperan langsung dalam program PJB Academy. Sepanjang tahun 2019 PJB Academy memberikan pembelajaran terhadap 12.024 karyawan atau 112,45% dari target 10.693 karyawan. Jenis pembelajaran yang diberikan ditunjukkan dalam tabel berikut.

PJB is committed to improving the competence of Human Resources in terms of electricity, managerial, and business insight expertise as well as the ability to move the organization now and in the future by forming a PJB Academy unit. This commitment is supported by efforts to strengthen the PJB Academy unit by placing the President Director as Dean and members of the Board of Directors as Vice Dean and Head of Divisions, General Manager and Unit Head as learning steering committee so that these parties can play a direct role in the PJB Academy program. Throughout 2019 PJB Academy provided learning of 12,024 employees or 112.45% of the target of 10,693 employees. The types of learning provided are shown in the following table.

Tabel Pembelajaran PJB Academy Tahun 2019
Learning Table of PJB Academy in 2019

No.	Jenis Pembelajaran Types of Learning	Jumlah Peserta Total Participants
1	Pelatihan Training	
	- Teknik Engineering	3.118
	- Non Teknik Non-engineering	1.876
2	Sertifikasi Certification	
	- Teknik Engineering	1.554
	- Non Teknik Non-engineering	239



No.	Jenis Pembelajaran Types of Learning	Jumlah Peserta Total Participants
3	Workshop	
	- Teknik Engineering	1.156
	- Non Teknik Non-engineering	1.810
4	Program Pendukung Supporting Program	
	- Teknik Engineering	277
	- Non Teknik Non-engineering	557
5	Program Purna Full Program	81
6	<i>Soft Leadership</i>	472
7	PGD	884

Penerapan program pembelajaran telah mendukung pencapaian target dan tujuan PJB yang tercermin dalam salah satu indikator KPI PJB yaitu *Human Capital Readiness* (HCR). Kesiapan kapasitas dan kapabilitas SDM dalam mendukung implementasi strategi perusahaan merupakan HCR. Pada tahun 2019 realisasi HCR mencapai 4,45 sehingga capaian terhadap target sebesar 100%.

The implementation of the learning program has supported the achievement of the goals and objectives of the PJB reflected in one of the indicators of the PJI KPI, namely Human Capital Readiness (HCR). HR capacity and capability readiness in supporting the implementation of company strategy is the HCR. In 2019 the realization of HCR reached 4.45 so that the achievement of the target of 100%.

Kesetaraan Dan Kesempatan Kerja Equality and Fair Job Opportunities

Seluruh karyawan PJB mendapatkan kesempatan dan peluang yang sama untuk mengembangkan potensi yang dimiliki untuk berkarya dan berkontribusi tanpa dibedakan agama, etnik, ras atau *gender*. PJB menerapkan peraturan yang berlaku secara konsisten dan setara untuk semua karyawan. Etika bekerja terkait komitmen anti diskriminasi telah diatur dalam *Code of Conduct* (Standar Etika Perusahaan) yang perlu dipatuhi oleh seluruh Insan Perusahaan. Selain itu, informasi peluang karir di PJB senantiasa mencantumkan kriteria yang dibutuhkan sebagai calon SDM PJB sebagai wujud penerapan prinsip keterbukaan dalam proses rekrutmen. Sejak tahun 2018 PJB melaksanakan proses rekrutmen secara terpusat melalui *Joint Recruitment* PLN Group dalam rangka penyamaan standar seleksi dan mendukung program PLN SOLID.

All PJB employees get the same opportunities and opportunities to develop their potential to work and contribute regardless of religion, ethnicity, race, or gender. PJB applies the rules that apply consistently and equally to all employees. Work ethics related to anti-discrimination commitments are regulated in the Code of Conduct that all Company Personnel must comply with. Also, information on career opportunities in PJB always includes the criteria needed as a candidate for PJB HR as a form of applying the principle of openness in the recruitment process. Since 2018 PJB has carried out a centralized recruitment process through the PLN Group's Joint Recruitment in the framework of equalizing selection standards and supporting the PLN SOLID program.



Komitmen PJB dalam hal kesetaraan gender terlihat melalui peningkatan persentase jumlah karyawan perempuan dari tahun ke tahun. Jumlah karyawan perempuan tahun 2019 tercatat 415 orang atau 13,02% dari keseluruhan jumlah karyawan sebanyak 3.186 orang. Sedangkan pada 2018 jumlah karyawan perempuan sebanyak 388 orang atau 12,57% dari keseluruhan jumlah karyawan. Disamping itu, salah satu kriteria calon SDM PJB yang dicantumkan dalam iklan lowongan kerja yaitu usia. Hal ini menunjukkan komitmen PJB untuk tidak mempekerjakan anak di bawah umur sesuai pasal 68 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

PJB's commitment in terms of gender equality is seen through an increase in the percentage of female employees from year to year. The number of female employees in 2019 recorded 415 persons or 13.02% of the total number of employees of 3,186 persons. Whereas in 2018 there were 388 female employees or 12.57% of the total number of employees. Besides that, one of the criteria for the PJB HR candidates listed in the job advertisement is age. This shows the commitment of PJB not to conduct child-labor following article 68 of Law No. 13 of 2003 concerning Manpower.

Pengaturan Waktu Kerja Working Time Management

PJB telah mengatur waktu kerja bagi karyawan dalam PKB Periode 2019-2021 Bab V Waktu Kerja dengan cakupan diantaranya waktu kerja dan hari libur pada Pasal 27 serta kerja lebih pada pasal 28. Selain itu, PKB juga mengatur tentang cuti dan tidak masuk kerja dalam Bab VI Pasal 33. Ketentuan pengaturan waktu kerja tersebut berlaku bagi setiap karyawan baik laki-laki maupun perempuan. Namun, PJB mendukung partisipasi kerja bagi karyawan perempuan melalui beberapa pilihan cuti seperti cuti bersalin, cuti gugur kandungan dan cuti haid.

PJB has set working hours for employees in the CLA of 2019-2021 Chapter V Working Time with coverage including working hours and days off in Article 27 and more work in article 28. Also, CLA regulates leave and absence from work in Chapter VI Article 33. Provisions for the regulation of working hours apply to all employees, both men, and women. However, PJB supports work participation for female employees through several leave options such as maternity leave, maternity, and maternity leave.

Penyediaan Fasilitas Bagi Pekerja Difabel atau Ibu Menyusui Facilities for Workers with Disabilities or Lactating Mothers

PJB mengelola aksesibilitas di tempat kerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung untuk memenuhi hak penyandang disabilitas. Selain itu, PJB juga menyediakan fasilitas ruang laktasi yang dapat digunakan oleh karyawan perempuan yang menjadi ibu menyusui. Fasilitas ini dikelola sesuai dengan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surabaya No.6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak pada pasal 17 dan Permenkes No.15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu.

PJB manages accessibility in the workplace by referring to Minister of Public Works and Public Housing Regulation number 14 / PRT / M / 2017 concerning the Ease Requirements for Buildings to fulfill the rights of persons with disabilities. Also, PJB provides lactation room facilities that can be used by female employees who are breastfeeding mothers. This facility is managed following the Surabaya City Government Regulation No.6 of 2011 concerning Implementation of Child Protection in article 17 and Permenkes No.15 of 2013 concerning Procedures for Providing Special Facilities for Breastfeeding and/or Expressing Breast Milk.

Kesetaraan Remunerasi Remuneration Fairness

PJB memberikan remunerasi kepada karyawan dengan tidak membedakan jumlah dan komponen remunerasi berdasarkan gender, melainkan status kepegawaian, jenjang jabatan, masa kerja, dan hasil penilaian kinerja. Remunerasi bagi pekerja waktu tidak tertentu (karyawan tidak tetap / siswa OJT) meliputi perawatan kesehatan, insentif dan tunjangan, dan program pensiun. Sedangkan pekerja waktu tertentu mendapatkan remunerasi sesuai dengan kesepakatan antara PJB dengan karyawan bersangkutan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

PJB provides remuneration for employees by not distinguishing the number and components of remuneration based on gender, but rather the employment status, position levels, years of service, and performance assessment results. Remuneration for indefinite time workers (temporary employees/OJT students) includes health care, incentives and benefits, and pension plans. Whereas certain time workers get remuneration following the agreement between the PJB and the relevant employee as stipulated in a Specific Time Work Agreement.

Komponen Remunerasi Remuneration Component	Karyawan Tetap Permanent employees	Karyawan Tidak tetap (Siswa OJT) Non-permanent employees (OJT students)
a. Kompensasi Tetap Fixed compensation Pay for Person (P1)		
b. Kompensasi Tidak Tetap Non-permanent compensation	Ada Yes	Ada (Uang Saku OJT) Yes (OJT Allowance)
1. Kompensasi Jangka Pendek terdiri atas Short-term compensation:		
a) Pay for Position (P2)	Ada Yes	Tidak Ada None
b) Pay for Performance (P3)	Ada Yes	Tidak Ada None
c) Insentif Kinerja/Bonus Performance / Bonus incentives	Ada Yes	Tidak Ada None
d) THR Religious Holiday Allowance	Ada Yes	Ada Yes
e) Tunjangan Cuti Tahunan Annual Leave Allowance	Ada Yes	Tidak Ada None
2. Kompensasi Jangka Panjang terdiri atas Long-term compensation:		
a) Tunjangan Cuti Besar Mass Leave Allowance	Ada Yes	Tidak Ada None
b) Penghargaan Kesetiaan Kerja (winduan) Loyalty Reward (per eight years)	Ada Yes	Tidak Ada None
c) Bantuan Ganti Rugi/Peristiwa Luar Biasa Compensation / Extraordinary Assistance	Ada Yes	Tidak Ada None
d) BPJS BPJS	Ada Yes	Ada Yes
e) Penghargaan Pensiun Pension awards	Ada Yes	Tidak Ada None

Kesejahteraan karyawan dan keluarganya menjadi perhatian PJB sehingga imbal jasa terhadap hasil kinerja karyawan diberikan dalam bentuk kompensasi yang layak dan adil. Setiap tahun PJB melaksanakan penyesuaian upah. Gaji seluruh karyawan baik wanita maupun laki-laki telah sesuai dengan ketentuan upah minimum yang ditetapkan Pemerintah. Selain itu, PJB juga memberikan sejumlah insentif berdasarkan kinerja karyawan sebagai bentuk apresiasi sehingga karyawan dapat senantiasa meningkatkan produktivitas dan loyalitasnya.

The welfare of employees and their families is a concern of PJB; therefore, the compensation for employee performance results is given in the form of appropriate and fair compensation. Annually, PJB carries out wage adjustments. The salaries of all female and male employees are following the minimum wage provisions set by the Government. Also, PJB provides some incentives based on employee performance as a form of appreciation so that employees can always increase their productivity and loyalty.

Program Pensiun Pension Program

Karyawan yang mencapai batas usia pensiun yaitu 56 tahun mendapatkan manfaat pensiun dari PJB. Beberapa program jaminan sosial dan hari tua yang diterapkan oleh PJB antara lain:

- **Program Pensiun Manfaat Pasti**

Program ini diselenggarakan untuk karyawan yang diangkat sebelum tahun 2012 yang memasuki masa pensiun. Dana Pensiun PLN (Persero) atau DP-PLN menjadi pengelola program ini. Pendanaan DP-PLN berasal dari iuran Peserta sebesar 6% dari Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) dan iuran Pemberi Kerja (Perusahaan) sebesar 15,45% dari PhDP. Hal ini sesuai dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Selaku Pendiri Dana Pensiun PT PLN (Persero) Nomor 0047.K/DIR/2019 tanggal 17 Mei 2019.

- **Program Pensiun Iuran Pasti**

Program ini diselenggarakan bagi karyawan yang diangkat mulai tahun 2012 ke atas yang memasuki masa pensiun sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi Nomor 074.K/010/DIR/2013 tanggal 18 September 2013 tentang Peraturan Dana Pensiun melalui Program Pensiun Iuran Pasti (PDP – PPIP). Iuran Pasti dikelola Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), dengan iuran Peserta sebesar 6% x Pay for Person (P1) dan iuran Pemberi Kerja sebesar 4% x P1. DPLK yang ditunjuk untuk mengelola program pensiun ini yaitu DPLK – BNI, DPLK – BRI, DPLK – Jiwasraya, dan DPLK – AIA.

- **Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun oleh BPJS Ketenagakerjaan**

PJB telah mengikutsertakan karyawannya pada BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana Sertifikat Kepesertaan Nomor: 1500000007781 tanggal 10 Februari 2015, yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Iuran program jaminan hari tua dihitung sebesar 5,7% dari upah dengan komposisi terdiri atas 2% iuran pekerja dan 3,7% iuran pemberi kerja (Perusahaan). Sedangkan, iuran program jaminan pensiun dihitung sebesar 3%, yang terdiri atas 2% iuran pemberi kerja (Perusahaan) dan 1% iuran pekerja. Selain itu, untuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dihitung sebesar 1,27% dari upah dengan ditanggung oleh perusahaan, sedangkan Jaminan Kematian dihitung sebesar 0,3% dari upah dengan ditanggung oleh perusahaan.

- **Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pensiunan**

Pensiunan dan keluarganya mendapatkan bantuan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 039.K/010/DIR/2017 tentang Bantuan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Karyawan Yang Telah Berhenti Bekerja (Pensiunan) di PJB.

Employees approaching the retirement age of 56 years are granted pension benefits from PJB. Some social security and old age programs implemented by PJB include:

- **Fixed-Benefit Pension Program**

This program is held for employees appointed before 2012 who is retiring. Pension Fund PLN (Persero) or DP-PLN is the manager of this program. DP-PLN funding comes from Participants' contributions of 6% of Basic Pension Income (PhDP) and Employer (Company) contributions of 15.45% of PhDP. This is following the Decree of the Directors of PT PLN (Persero) As the Founder of the Pension Fund of PT PLN (Persero) Number 0047.K / DIR / 2019 on May 17, 2019.

- **Fixed-Contribution Pension Program**

This program is held for employees appointed starting from 2012 onwards who are entering retirement as stipulated in Board of Directors Decree Number 074.K / 010 / DIR / 2013 on September 18, 2013, concerning the Pension Fund Regulation through the Fixed-Contribution Pension Program (PDP – PPIP). The Fixed-Contribution is managed by the Financial Institution Pension Fund (FIPF), with Participant contributions of 6% x Pay for Person (P1) and Employer contribution of 4% x P1. FIPF appointed to manage this pension program are FIPF – BNI, FIPF – BRI, FIPF – Jiwasraya, and FIPF – AIA.

- **Retirement Insurance and Pension Insurance by BPJS Ketenagakerjaan**

PJB has included its employees to participate in BPJS Ketenagakerjaan as a Membership Certificate No. 1500000007781 on February 10, 2015, which includes Occupational Accident Insurance (OAI), Life Assurance (JKM), and Retirement Insurance (JHT). Retirement benefit program contributions are calculated at 5.7% of wages, with a composition consisting of 2% of employee contributions and 3.7% of employer contributions (companies). Meanwhile, pension guarantee contributions are calculated at 3%, consisting of 2% of employer contributions (the Company) and 1% of employee contributions. Also, for Work Accident Insurance (WAI) is calculated at 1.27% of wages borne by the company, while Life Insurance is calculated at 0.3% of wages on the company.

- **Health Care for Retirees**

Pensioners and their families are granted health care assistance based on the Board of Directors Decree No. 039.K / 010 / DIR / 2017 concerning Health Care Assistance for PJB's Retired Employees.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Occupational Health and Safety

PJB memprioritaskan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam setiap kegiatan operasional sebagai salah satu wujud tanggung jawab terhadap karyawan. Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diterapkan untuk mitigasi risiko terhadap potensi kecelakaan kerja karena kelengkapan dan kesiapan resources dan infrastruktur. Beberapa program K3 yang diterapkan untuk karyawan PJB antara lain:

Program Pemeriksaan Kesehatan Berkala

PJB menyediakan fasilitas pemeriksaan kesehatan berkala bagi seluruh karyawan. Kegiatan ini mencakup penyediaan fasilitas P3K, penyediaan fasilitas tanggap darurat kecelakaan dan pelaksanaan *medical check up* berkala untuk seluruh karyawan. Implementasi program ini juga merupakan upaya untuk meningkatkan produktivitas karyawan.

Program Kesiagaan dan Penanggulangan Keadaan Darurat

PJB melaksanakan program kesiagaan dan penanggulangan keadaan darurat untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja antara lain pelaksanaan simulasi tanggap darurat dan peringatan Bulan K3 antar PJB. Implementasi program ini telah berhasil meningkatkan kesiapan personil di Unit PJB untuk menghadapi keadaan darurat yang terjadi.

Program Peningkatan K3 di Tempat Kerja

PJB melaksanakan program pemantauan lingkungan kerja melalui kegiatan pengukuran faktor fisika, kimia, biologi, ergonomik dan psikologi di lingkungan kerja. Implementasi program ini dapat meningkatkan kinerja personil dalam melaksanakan pekerjaan.

Selain itu, PJB juga melaksanakan menerapkan beberapa program terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja yang dilaksanakan oleh Divisi LK3-1 antara lain:

1. Pelatihan K3

PJB melaksanakan pelatihan K3 yang diikuti oleh karyawan organik sepanjang tahun 2019. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi pekerja di bidang operasional terkait K3 serta meningkatkan kewaspadaan pekerja terhadap penerapan K3 di lingkungan PJB. Pelatihan K3 tersebut meliputi pelatihan pemadam kebakaran, pelatihan P3K, sertifikasi personil AK3 umum, sertifikasi AK3 Spesialis, sertifikasi operator angkat-angkut dan alat berat.

PJB prioritizes aspects of Occupational Health and Safety (OHS) in every operational activity as a form of responsibility towards employees. Occupational Health and Safety Program implemented to mitigate risks to potential workplace accidents due to the completeness and readiness of resources and infrastructure. Some OHS programs implemented for PJB employees include:

Periodic Health Check Program

PJB provides periodic health check facilities for all employees. These activities include the provision of first aid facilities, provision of emergency response facilities, and the implementation of periodic medical check-ups for all employees. The implementation of this program is also an effort to increase employee productivity.

Emergency Preparedness Program

PJB carries out emergency preparedness and response programs to prevent work accidents, including the implementation of emergency response simulations and OHS warnings between PJB. The implementation of this program has succeeded in increasing the readiness of personnel in the PJB Unit to deal with emergencies.

OHS Improvement Office Program

PJB implements a work environment monitoring program through the measurement of physical, chemical, biological, ergonomic, and psychological factors in the work environment. Implementation of this program can improve personnel performance in carrying out work.

Also, PJB implements several programs related to occupational safety and health carried out by the Environment and OHS -1 Division, including:

1. OHS Training

PJB carries out OHS training participated in by organic employees throughout 2019. The program aims to increase workers' knowledge and competencies in OHS-related operational areas and increase workers' awareness of OHS implementation in the PJB environment. The OHS training includes fire fighting training, first aid training, general OHS personnel Professional certification, OHS Specialist Professional certification, Lift Operator certification, and heavy equipment.



2. Awareness K3

PJB melaksanakan awareness K3 yang diikuti oleh seluruh karyawan organik dan *stakeholder* PJB sepanjang tahun 2019. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pekerja di bidang operasional terkait K3 serta meningkatkan kewaspadaan pekerja terhadap penerapan K3 di lingkungan PJB. Pelatihan K3 tersebut meliputi *on site training* implementasi budaya K3, *safety induction*, *safety briefing*, *safety meeting*, *toolbox meeting*.

3. Coaching, Mentoring, Counseling (CMC) kepada K3 Unit

PJB melaksanakan proses CMC kepada K3 Unit dalam penerapan K3 di Unit, dengan melakukan Sosialisasi Kontrak Kinerja maturity level K3 terbaru kepada seluruh Unit PJB, Penguatan implementasi K3 dan 5S dalam kegiatan overhaul, Penyusunan dan sosialisasi *safety golden rules*, Pelaksanaan *workshop* NFPA 850, 654 sebagai tindak lanjut pencegahan kebakaran, Pelaksanaan Audit Internal SMK3 dan pendampingan resertifikasi SMK3 Unit.

2. OHS Awareness

PJB implements OHS awareness that is followed by all organic employees and PJB stakeholders throughout 2019. This program aims to increase workers' knowledge in operational areas related to OHS and increase workers' awareness of OHS implementation in the PJB environment. The OHS training includes on-site training on OHS culture implementation, safety induction, safety briefing, safety meeting, toolbox meeting.

3. Coaching, Mentoring, Counseling (CMC) to OHS Unit

PJB carries out the CMC process to the OHS Unit in applying OHS to the Unit, by conducting the Socialization of the latest OHS Level Maturity Performance Contract to all PJB Units, Strengthening the OHS and 5S implementation in overhaul activities, Preparation and socialization of golden safety rules, Implementation of the NFPA 850, 654 workshops follow up on fire prevention, Implementation of OHSMS Internal Audit and OHSMS recertification assistance.

Biaya Yang Dikeluarkan Program Costs

PJB mengeluarkan biaya untuk program tanggung jawab perusahaan terhadap ketenagakerjaan sebesar Rp1.701 miliar yang meliputi gaji dan tunjangan; bonus dan insentif karyawan; imbalan kerja; pendidikan dan pelatihan; tunjangan kesehatan; serta biaya kepegawaian lainnya. Realisasi biaya tersebut naik 5,9% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.606 miliar. Peningkatan biaya tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya biaya Pendidikan dan pelatihan karyawan. Namun realisasi biaya ini mencapai 106,18% dari target yang dimuat dalam RKAP 2019 sebesar Rp1.602 miliar.

PJB incurred a cost of Rp1,701 billion in the corporate social responsibility to employment programs which included salaries and benefits; employee bonuses and incentives; employee benefits; education and training; health benefits; and other staffing costs. The realization of these costs increase 5.9% compared to the previous year of Rp1,606 billion. The increase in costs was influenced by the increased costs of employee education and training. However, the realization of these costs reached 106.18% of the target contained in the 2019 ABOP of Rp1,602 billion.

Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan Employment Complaint Reporting Mechanism

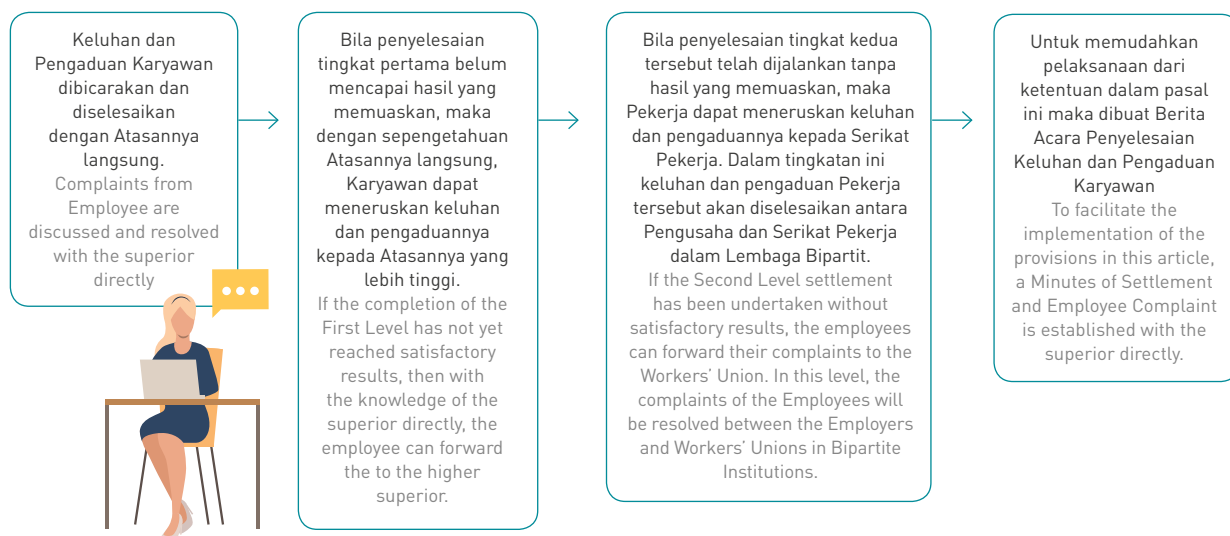
PJB memiliki mekanisme pengaduan bagi karyawan yang ingin menyampaikan keluhan, ketidakpuasan, atau keberatan yang dirasa mengganggu pelaksanaan tugasnya. Pengaduan dapat disampaikan secara tertulis oleh karyawan dengan lingkup perlakuan tidak adil atau tidak wajar serta hal-hal yang bertentangan dengan isi PKB. Mekanisme pengaduan bagi karyawan yang diterapkan di lingkungan PJB sebagai berikut.

PJB has a complaint mechanism for employees who want to submit complaints, dissatisfaction, or objections that are felt to interfere with the implementation of their duties. Complaints can be submitted in writing by employees with the scope of unfair or unfair treatment and matters that are contrary to the contents of the Collective Labor Agreement. The complaints mechanism for employees implemented in the PJB is as follows.



Tata Cara Dan Tingkatan Penyelesaian Keluhan dan Pengaduan

Complaint and Report Settlement Procedures and Stages



Selama tahun 2019 PJB tidak menerima pengaduan dari karyawan mengenai masalah ketenagakerjaan. Kondisi ini mencerminkan kepuasan karyawan terhadap penerapan pengelolaan SDM di PJB.

Throughout 2019, PJB did not receive any complaints from employees concerning labor issues. This condition reflects employee satisfaction with PJB's HR management.

Mekanisme Pengaduan Keadaan Darurat

Emergency Report Mechanism

PJB telah mengatur mekanisme pengaduan keadaan darurat yang dimuat dalam Pedoman Tanggap Darurat Nomor IPM 08-2.4 Pengendalian Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat tanggal 1 September 2015. Pengaduan untuk keadaan darurat di lingkungan PJB telah mengacu pada pedoman tersebut. Proses penanganan pengaduan keadaan darurat diterapkan melalui pengendalian sistem komunikasi tanggap darurat.

PJB menerapkan sistem komunikasi tanggap darurat yang terdiri atas komunikasi umum, komunikasi tim tanggap darurat, dan komunikasi eksternal pada kondisi darurat. Sistem komunikasi umum dilakukan untuk berkomunikasi dengan seluruh stakeholder melalui telepon internal, tanda peringatan, alarm, sirine atau alat bantu pagging sebagai media dalam menyampaikan informasi yang perlu diketahui ketika terjadi kondisi darurat. Tim tanggap darurat berkomunikasi dua arah dalam pelaksanaan pengendalian kondisi darurat dengan media alat bantu HT. Selanjutnya, tim tanggap darurat melakukan komunikasi dengan pihak-pihak eksternal yang berkepentingan seperti instansi keamanan, PMI, PMK, Muspika, Pertamina wartawan, dan masyarakat luas lainnya.

PJB has established the emergency report mechanism included in the Emergency Response Guidelines Number IPM 08-2.4 Control of Preparedness and Emergency Response on September 1, 2015. The emergency reporting in PJB has referred to these guidelines. The emergency complaint handling process is implemented by controlling the emergency response communication system.

PJB implements an emergency response communication system consisting of general communication, emergency response team communication, and external communication in an emergency. A general communication system is carried out to communicate with all stakeholders through internal telephone, warning signs, alarms, sirens, or pagging as a medium in conveying information that needs to be known when an emergency occurs. The emergency response team communicates both ways in the implementation of emergency control with HT media. Furthermore, the emergency response team communicates with external stakeholders such as security agencies, PMI, PMK, Muspika, Pertamina journalists, and other public at large.

Capaian yang Diperoleh Achievements

Sejumlah program tanggung jawab sosial terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja telah dilaksanakan oleh PJB. Beberapa indikator keberhasilan pengelolaan program tersebut sebagai berikut.

Several corporate social responsibility programs related to labor and occupational health and safety practices have been implemented by PJB. Some indicators of the success of the management of the program are as follows.

Tingkat Keterikatan dan Kepuasan Karyawan Employee Engagement and Satisfaction Index

Setiap tahun PJB melaksanakan PJB Group Workforce Engagement Survey (WES) sebagai salah satu media untuk mendengar ekspektasi karyawan. Faktor-faktor *employee engagement* karyawan PJB yang diukur menggunakan WES antara lain:

1. *Brand Reputation and Culture*
2. *Career Management*
3. *Performance Management*
4. *Reward and Recognition*
5. *Working Environment and Infrastructure*
6. *Compensation and Benefit*
7. *Kepemimpinan (Leadership)*
8. *Kerjasama Tim (Teamwork)*
9. *Pengembangan Karyawan (Learning and Development)*
10. *Nilai Kerja Karyawan (Employee Value Proposition)*

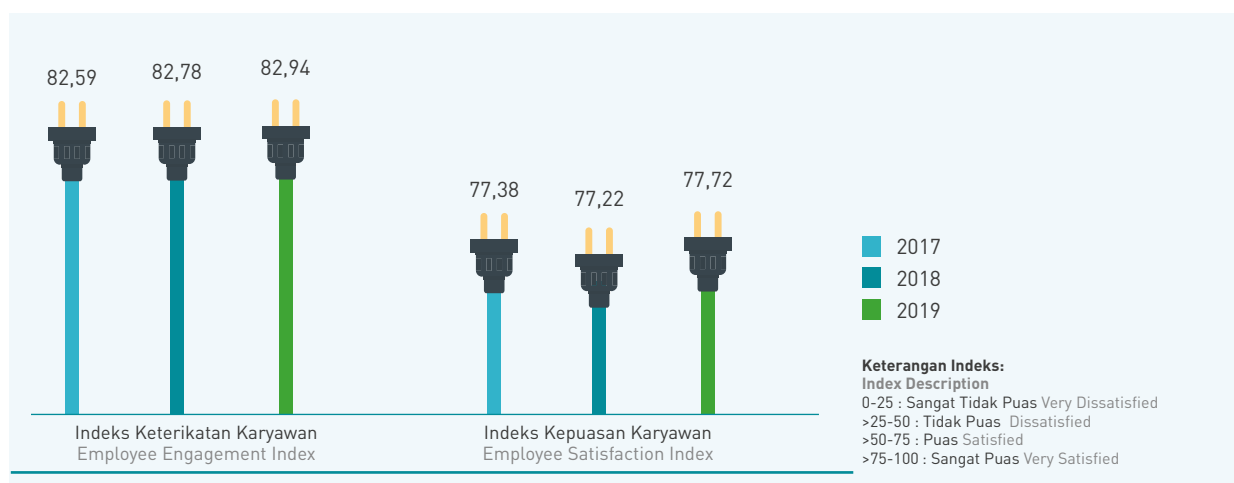
Annually, PJB conducts PJB Group's Workforce Engagement Survey (WES) as one of the media to notice employee's expectations. Employee engagement factors for PJB's employees are measured using WES include:

1. Brand Reputation and Culture
2. Career Management
3. Performance Management
4. Reward and Recognition
5. Working Environment and Infrastructure
6. Compensation and Benefits
7. Leadership
8. Teamwork
9. Employee Development (Learning and Development)
10. Employee Value Proposition

Dalam tiga tahun terakhir indeks keterikatan dan kepuasan karyawan PJB terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 indeks keterikatan karyawan mencapai 82,94% dan indeks kepuasan karyawan mencapai 77,72%. Pencapaian tersebut termasuk dalam kategori sangat engage dan sangat puas. Hal sesuai dengan predikat "*Best Companies to Work for in Asia*" yang diraih PJB melalui ajang HR Asia Awards 2019 yang diselenggarakan oleh Business Media International Sdn Bhd.

In the last three years, the PJB employee engagement and satisfaction index has continued to increase. In 2019 the employee engagement index reached 82.94% and the employee satisfaction index reached 77.72%. This achievement is included in the category of very engaged and very satisfied. This is in line with the title of "*Best Companies to Work for in Asia*" won by PJB through the HR Asia Awards 2019 event organized by Business Media International Sdn Bhd.

Grafik Indeks Keterikatan dan Kepuasan Karyawan Tahun 2017-2019
Chart of Employee Engagement and Satisfaction Index for 2017-2019



Tingkat Turnover Karyawan Employee Turnover Rates

PJB senantiasa berupaya menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif serta program-program ketenagakerjaan yang diwujudkan berdasarkan masukan karyawan. Hal ini merupakan upaya Perusahaan dalam memberikan kepuasan kepada karyawan yang memilih PJB sebagai tempat berkarya. Tingkat *turnover* karyawan PJB tahun 2019 mencapai 7,31%.

PJB always strives to create a safe, comfortable, and conducive work environment and employment programs that are realized based on employee recommendations. This is an effort of the Company in providing satisfaction to employees who choose PJB as a place to work. The turnover rate of PJB employees in 2019 reached 7.31%.

Tabel Tingkat Turnover Karyawan Tahun 2017-2019

Table of Employee Turnover Rate for 2017-2019

Penyebab Reasons	Tahun Year		
	2017	2018	2019
Pengangkatan Hired	303	53	152
Pensiun Retired	92	93	72
Berhenti Resigned	8	4	6
Meninggal Dunia Passed Away	4	3	3

Tingkat Kecelakaan Kerja Workplace Accident Rate

Aspek kesehatan, dan keselamatan kerja merupakan prioritas utama dalam setiap kegiatan operasional di PJB. Penerapan aspek K3 mampu mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di lingkungan PJB. Selama tahun 2019 tidak terjadi kecelakaan kerja di seluruh unit eksisting. Jumlah jam kerja tanpa kecelakaan kerja pun mengalami peningkatan sebesar 107,28% dari tahun sebelumnya. Selain itu, tidak terdapat kejadian tertentu yang menyebabkan penyakit akibat kerja di seluruh unit PJB.

Health and safety aspects are PJB's main priorities in every operational activity. The application of OHS aspects can prevent workplace accidents and injuries in the PJB environment. In 2019, there were no work accidents in all existing units. The number of hours worked without work accidents also increased by 107.28% from the previous year. Also, there were no specific events that caused workplace injuries in all PJB units.

Tabel Tingkat Kecelakaan Kerja Unit Eksisting, Unit Pemeliharaan, Kantor Pusat, dan BPWC Tahun 2019

Table of Work Accident Rate in Existing Units, Maintenance Units, Headquarters and CRMU in 2019

Unit	Angka Kecelakaan Kerja Total Workplace Accident Case	Jumlah Orang Korban Kecelakaan Kerja Total Workplace Accident's Victim				Jam Kerja Tanpa Kecelakaan Kerja (jam) Safety Working Hours (Hours)
		Meninggal Passed Away	Cidera Berat Severe Injury	Cidera Sedang Moderate Injury	Cidera Ringan Minor Injury	
Gresik	0	0	0	0	0	19.171.232
Paiton	0	0	0	0	0	15.858.566
Brantas	0	0	0	0	0	22.264.951
Muara Karang	0	0	0	0	0	21.686.616
Muara Tawar	0	0	0	0	0	18.791.634

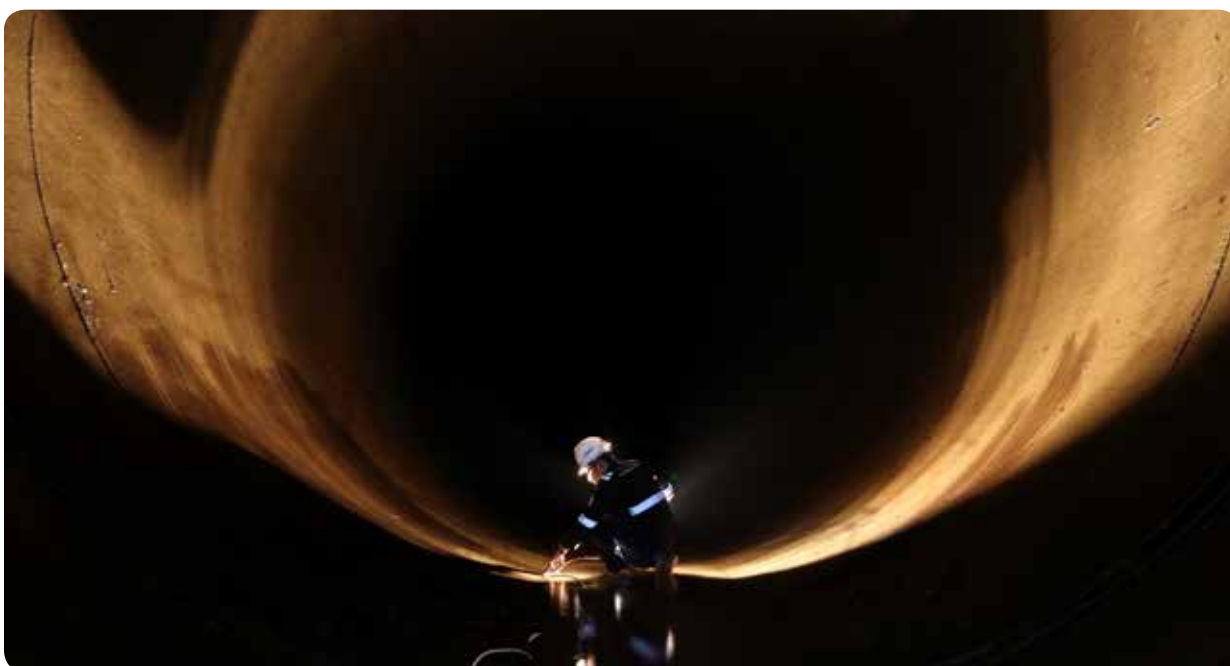


Unit	Angka Kecelakaan Kerja Total Workplace Accident Case	Jumlah Orang Korban Kecelakaan Kerja Total Workplace Accident's Victim				Jam Kerja Tanpa Kecelakaan Kerja (jam) Safety Working Hours (Hours)
		Meninggal Passed Away	Cidera Berat Severe Injury	Cidera Sedang Moderate Injury	Cidera Ringan Minor Injury	
Cirata	0	0	0	0	0	10.793.314
UPHB MSUWA	0	0	0	0	0	11.130.339
UPHT MSUTA	0	0	0	0	0	15.025.004
Unit Kantor Pusat/ Head Office Unit	0	0	0	0	0	11.976.846
BPWC/ CRMU	0	0	0	0	0	4.147.033
Jumlah Total						150.845.535

Tabel Tingkat Kecelakaan Kerja Unit FTP-1 Tahun 2019

Table of Workplace Accident Rate at FTP-1 Unit in 2019

Unit	Angka Kecelakaan Kerja Total Workplace Accident Case	Jumlah Orang Korban Kecelakaan Kerja Total Workplace Accident's Victim				Jam Kerja Tanpa Kecelakaan Kerja (jam) Safety Working Hours (Hours)
		Meninggal Passed Away	Cidera Berat Severe Injury	Cidera Sedang Moderate Injury	Cidera Ringan Minor Injury	
UBJOM Paiton 9 Paiton 9 OMSBU	0	0	0	0	0	13.814.880
UBJOM Pacitan Pacitan OMSBU	0	0	0	0	0	4.707.515
UBJOM Tj.Awar-awar Tj. Awar-awar OMSBU	1	0	1	0	0	1.222.060
UBJOM Rembang Rembang OMSBU	0	0	0	0	0	5.925.812
UBJOM Indramayu Indramayu OMSBU	0	0	0	0	0	14.017.137
Jumlah Total						38.587.404



Sertifikasi dan Penghargaan Certifications and Awards

Selama tahun 2019 PJB memperoleh sejumlah penghargaan atas pengelolaan sumber daya manusia di ajang yang diselenggarakan baik dalam lingkup nasional maupun internasional sebagai berikut:

Throughout 2019, PJB received more than one awards for human resource management in the event held both nationally and internationally which are as follows:

HR Excellence Award



PJB memperoleh penilaian terbaik dengan RATING AA di ajang Human Resource (HR) Excellence Award 2019 yang diselenggarakan oleh SWA Media bekerjasama dengan Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LMFE-UI). Rating AA diberikan untuk tiga kategori, yaitu:

- Learning & Development Strategy.
- HR Transformation Strategy.
- HR Technology Strategy.

PJB received the best rating of RATING AA at the 2019 Human Resource Excellence Award event held by SWA Media in collaboration with the Management Institute of the Faculty of Economics, University of Indonesia (LMFE-UI). The AA rating is granted in three categories, namely:

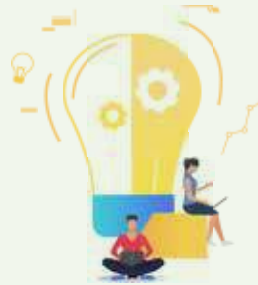
- Learning & Development Strategy.
- HR Transformation Strategy.
- HR Technology Strategy.



Human Resources Asia Awards

PJB dinobatkan sebagai Best Companies to Work For in Asia pada ajang Human Resources (HR) Asia Awards 2019 yang diselenggarakan oleh Business Media International Sdn Bhd. Dalam ajang ini PJB bersaing dengan 280 perusahaan dari berbagai negara di Asia.

PJB was named 'the Best Companies to Work For in Asia' at the 2019 Asian Human Resources (HR) event organized by Business Media International Sdn Bhd. In this event, PJB competed with 280 companies from various countries in Asia.



Karya Inovasi Regional PLN 2019 PLN Regional Innovation Works 2019

PJB Grup menunjukkan keunggulannya dalam ajang Apresiasi Karya Inovasi Regional PLN 2019 dan meraih beberapa juara yang antara lain:

1. Juara 1 dalam kategori Non Technical Supporting (NTS) melalui karya inovasi berjudul "Meningkatkan Efektifitas Cleaning Clogged Nozzle Furnace dengan 'puzzle' untuk Mempercepat Durasi Overhaul dan Forced Outage" (UBJOM Tenayan).
2. PT PJBS yg merupakan anak usaha PJB mendapatkan gelar sebagai juara umum melalui 3 penghargaan yaitu
 - Juara 1 dan 3 dalam bidang pembangkitan untuk UBJOM Tenayan dan UBJOM Rembang
 - Juara 2 bidang NTS untuk PT PJBS Kantor Pusat.

PJB Group showed its excellence in the 2019 PLN Regional Innovation Work Appreciation event and won several championships including:

1. The first winner in the category of Non-Technical Supporting (NTS) through an innovative work entitled "Increasing the Effectiveness of Cleaning Clogged Nozzle Furnace with 'puzzle' to Accelerate Overhaul Duration and Forced Outage" (UBJOM Tenayan).
2. PT PJBS which is a subsidiary of PJB won the title as overall champion through 3 awards namely
 - First and third winner in the field of generation for Tenayan OMSBU and Rembang OMSBU
 - 2nd winner in the NTS field for PT PJBS Head Office.



PLN International Conference and LIKE 2019 (Learning, Innovation, Knowledge, and Exhibition)

PJB berhasil mempertahankan posisi Juara Umum dan mencetak hattrick pada tahun 2017, 2018, dan 2019 di kompetisi inovasi di tingkat PLN Group. PJB meraih penghargaan yang antara lain:

1. Juara 1 Inovasi kategori Pembangkitan dari UBJOM Tenayan dengan judul GPS CFB Boiler (Guideline Pengendalian Hotspot Sealpot) CFB Boiler PLTU Tenayan
2. Juara 1 Inovasi kategori Technical Supporting dari UPHT dengan judul STADIC (Special Tools Diassembly dan Assembly Impeller CWP PLTGU Gresik)
3. Juara 1 Inovasi kategori Non-Technical Supporting dari DIVOSK-2 dengan judul MODEL (Implementasi Metoda Variance Analysis pada Monitoring BPP Pembangkit AMC Jawa)
4. Juara Favorit 2 International Conference kategori Policy dari UBANG dengan judul Implementation of Risk Analysis using Monte Carlo Simulation on Electricity Investment Decision Making.

PJB successfully defended the position of General Champion and scored a hat trick in 2017, 2018, and 2019 in the innovation competition at the PLN Group level. PJB won the following awards:

1. First Winner of Innovation in the Power Plant category from Tenayan OMSBU with the title GPS CFB Boiler (Guideline for Hotspot Sealpot Control) CFB Boiler for Tenayan CFPP
2. The first winner in the Technical Supporting Innovation category from MSUTA with the title STADIC (Special Tools Assembly and Assembly Impeller CWP Gresik CCPP)
3. The first winner in the Non-Technical Supporting Innovation category from DIVOSK-2 with the title MODEL (Implementation of Variance Analysis Method in Monitoring CES Pembangkit AMC Jawa)
4. Consolation-2 winner of International Conference Policy category from UBANG with the title Implementation of Risk Analysis using Monte Carlo Simulation on Electricity Investment Decision Making.



Culture Leap Promotion PLN 2019

PJB meraih Juara III Best Implementator Culture Leap dan Juara III Best Promotor Culture Leap dalam ajang Culture Leap Promotion PLN Tahun 2019 yang diadakan oleh Divisi Change Management Office PLN bersama 56 unit kerja dan 10 Anak Perusahaan serta utilitas HAPUA.

PJB won 3rd place in the Best Leap Culture Leap and 3rd place in the Best Leap Culture Promoter in the 2019 PLN Culture Leap Promotion event held by PLN's Change Management Office Division with 56 work units and 10 Subsidiaries and HAPUA utilities.

Selain itu, PJB juga mendapatkan sejumlah sertifikasi dan penghargaan K3 sebagai berikut:

In addition, PJB also received some OHS certifications and awards as follows:

Unit	Penghargaan K3 Tahun 2019 OHS Awards 2019
UP Gresik Gresik GU	Zero Accident Award
UP Paiton Paiton GU	SMK3 dan Zero Accident Award OHSMS and Zero Accident Award
UP Brantas Brantas GU	Zero Accident Award
UP Muara Karang Muara Karang GU	Zero Accident Award
UP Muara Tawar Muara Tawar GU	Zero Accident Award
UP Cirata Cirata GU	Zero Accident Award
UPHT MSUTA	Zero Accident Award
UPHB MSUWA	Zero Accident Award
BPWC CRMU	Zero Accident Award
Unit Kantor Pusat Head office Unit	Zero Accident Award
UBJOM Indramayu Indramayu OMSBU	SMK3 dan Zero Accident Award OHSMS and Zero Accident Award
UBJOM Paiton Paiton OMSBU	Zero Accident Award
UBJOM Tanjung Awar-Awar Tanjung Awar-awar OMSBU	Zero Accident Award
UBJOM Rembang Rembang OMSBU	Zero Accident Award
UBJOM Kaltim Teluk Kaltim Teluk OMSBU	Zero Accident Award
UBJOM Pacitan Pacitan OMSBU	Zero Accident Award
UBJOM Arun Arun OMSBU	SMK3 OHSMS
UBJOM Tenayan Tenayan OMSBU	SMK3 OHSMS
UBJOM Bangka Bangka OMSBU	SMK3 OHSMS
UBJOM Belitung Belitung OMSBU	SMK3 OHSMS



Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan Audit
Audited Financial Statements



Referensi Kriteria AR
ARA Criteria Reference

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PELANGGAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TO CUSTOMERS

Komitmen dan Kebijakan Commitment and Policy

PJB mendukung program utama Pemerintah dalam pembangunan infrastruktur energi dengan menjalankan bisnis pembangkitan yang berkualitas dan menawarkan harga yang kompetitif bagi pelanggan. PJB berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan sehingga kualitas layanan yang dihasilkan diupayakan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati oleh pelanggan. Oleh karena itu, PJB menerapkan sejumlah ketentuan sebagai pedoman dalam pemberian layanan terbaik kepada pelanggan antara lain:

- Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Jawa-Madura-Bali tahun 2007 yang mencakup manajemen jaringan, operasi, perencanaan dan pelaksanaan operasi, *settlement*, dan pengukuran (*metering*);
- Aturan Transaksi Pembangkitan 2010 yang mengatur komunikasi transaksi jual-beli tenaga listrik, mengatur *ancillary services*;
- Protap Deklarasi Kondisi Pembangkit dan Indeks Kinerja Pembangkit tahun 2017, yang mengatur status kondisi pembangkit, tata cara komunikasi operasi, dan perhitungan kinerja pembangkit;
- Pedoman Operasi Baku Komunikasi Pengelolaan Tenaga Listrik tahun 2019.

PJB juga mengatur standar pelayanan berupa kesiapan operasi dan energi listrik serta jasa *Operation & Maintenance* (O&M) dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBT) dan Kontrak Perjanjian Jasa O&M antara PT PLN (Persero) dan PJB. Faktor-faktor yang menjadi indikator tingkat kualitas layanan pun dijadikan target KPI Korporat setiap tahun antara lain *Equivalent Availability Factor* (EAF) sebagai indikator faktor kesiapan pembangkit untuk beroperasi, *Scheduled Outage Factor* (SOF) sebagai indikator ketepatan jadwal pemeliharaan dan Efisiensi *Thermal* Pembangkit.

Upaya yang ditempuh PJB dalam menyediakan layanan berkualitas seiring dengan harga yang kompetitif diwujudkan melalui pelaksanaan program tanggung jawab terhadap pelanggan secara rutin. Program ini mencakup beberapa kegiatan diantaranya pengelolaan mutu layanan, menjalin komunikasi yang efektif dengan pelanggan, penanggulangan pengaduan pelanggan, serta survei kepuasan pelanggan.

PJB supports the Government's main program in the development of energy infrastructure by running a quality generating business and offering competitive prices to customers. PJB is committed to providing the best service for customers so that the quality of services produced is strived according to the specifications agreed upon by the customer. Therefore, PJB applies some provisions as guidelines in providing the best service to customers, including:

- Regulation for Java-Madura-Bali Electric Power System Network 2007 that covers network management, operations, planning and implementation of operations, settlement, and measurement (*metering*);
- Regulation for Power Plant Transactions 2010 which regulates the communication of electricity sales transactions, regulating ancillary services;
- Power Plant Condition Declaration and Power Plant Performance Index Permanent Procedure of 2017 that regulates power plant condition status, operation communication procedure, and power plant performance calculation;
- Standard Operating Procedure of Electricity Power Management Communication of 2019.

PJB also regulates service standards in the form of operational and electrical energy availability and Operation & Maintenance (O&M) services in the Power Purchase Agreement (PPA) and O&M Service Agreement between PT PLN (Persero) and PJB. The factors that indicate the level of service quality are used as targets for Annual Corporate KPI, including Equivalent Availability Factor (EAF) as an indicator of power plant readiness factors to operate, Scheduled Outage Factor (SOF) as an indicator of the accuracy of maintenance schedules and Power Plant Thermal Efficiency.

PJB's efforts in providing quality services along with competitive prices are realized through routine customer responsibility programs. The programs include several activities such as service quality management, establishing effective communication with the customer, resolving customer complaints, as well as customer satisfaction surveys.

Rencana Program 2019

Program Plan 2019

Program tanggung jawab terhadap pelanggan disusun berdasarkan hasil *stakeholder mapping* yang dilakukan oleh PJB. Selain itu, PJB juga melaksanakan survei kepada pelanggan setiap tahun untuk mengukur faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan, ketidakpuasan dan keterikatan pelanggan. Survei ini dipandang sebagai salah satu media efektif untuk memperoleh *feedback* dari pelanggan atas layanan yang diberikan terutama dalam upaya mengelola operasional bisnis demi menjaga kontinuitas dan keandalan pasokan energi listrik serta harga jual yang bersaing dan efisien. Selanjutnya PJB menyusun rencana program tanggung jawab terhadap pelanggan untuk mendukung setiap program pengembangan bisnis sehingga meningkatkan loyalitas pelanggan dan daya saing Perusahaan. Rencana tersebut disusun sebagai program kerja Divisi OSK yang dimuat dalam RKAP 2019. Beberapa kegiatan yang direncanakan antara lain Diskusi Operasi bersama pelanggan dan Survei Kepuasan Pelanggan.

Kegiatan dan Dampaknya

Activities and Impacts

PJB melaksanakan beberapa program tanggung jawab terhadap pelanggan untuk memenuhi hak dan harapan pelanggan berupa keandalan pasokan energi listrik dengan harga yang terjangkau dan efisien. Program tersebut juga diterapkan dengan tujuan untuk mengantisipasi dampak dan risiko bisnis PJB salah satunya kalah bersaing di sistem Jawa Bali serta sebagai wujud kontribusi terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs). Beberapa program tanggung jawab PJB terhadap pelanggan diantaranya:

Sistem Manajemen Mutu

Kualitas layanan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini mendorong PJB untuk memberikan layanan terbaik bagi seluruh pelanggan dengan menerapkan sistem manajemen mutu yang mencakup beberapa program dan kegiatan terkait pelanggan antara lain memenuhi persyaratan yang terdapat dalam kontrak manajemen, memastikan kepuasan pelanggan tercapai, dan mengesahkan hasil survei ke dalam Pedoman Penilaian Kontrak Kinerja Unit. PJB pun membentuk Bidang Kinerja Korporat (BKKO) yang berada di bawah Satuan Kinerja Korporat dan Pengembangan Sistem Manajemen. BKKO bertanggung jawab dalam memastikan sistem manajemen mutu untuk setiap operasional bisnis terlaksana dengan baik dan konsisten. Pelaksanaan sistem manajemen mutu pun dievaluasi secara berkala melalui proses audit mutu oleh lembaga independen. Mekanisme monitoring dan evaluasi

The customer-responsibility program is prepared based on the results of stakeholder mapping conducted by PJB. Also, PJB conducts surveys to customers every year to measure the factors that influence the level of satisfaction, dissatisfaction, and customer attachment. This survey is seen as one of the effective media to obtain feedback from customers on the services provided, especially in the effort to manage business operations to maintain the continuity and reliability of electricity supply as well as competitive and efficient selling prices. Furthermore, PJB plans a program of responsibility to customers to support each business development program to increase customer loyalty and Company competitiveness. The plan was prepared as a work program for the Operational System and Contract Control Division which was contained in the 2019 ABOP. Some of the planned activities included Operation Discussion with customers and a Customer Satisfaction Survey.

PJB conducts several programs of customer responsibility to fulfill the rights and expectations of customers in the form of reliable electricity supply at an affordable and efficient price. The program was also implemented to anticipate the impact and risks of PJB business, one of which was unable to compete in the Java-Bali system and as a form of a contribution to Sustainable Development Goals (SDGs). Some PJB responsibility programs for customers include:

Quality Management System

Service quality is one of the factors that influence customer satisfaction. This encourages PJB to provide the best service for all customers by implementing a quality management system that includes several customer-related programs and activities including meeting the requirements contained in the management contract, ensuring customer satisfaction is achieved, and validating the survey results in the Unit Performance Contract Assessment Manual. PJB also formed the Corporate Performance Department (BKKO) which is under the Corporate Performance Unit and Management System Development. BKKO is responsible for ensuring the quality management system for each business operation is carried out properly and consistently. The quality management system is also regularly evaluated through a quality audit process by an independent institution. Another monitoring and evaluation mechanism is a management review meeting involving the



lainnya yaitu rapat tinjauan manajemen yang melibatkan Direksi dengan karyawan terkait untuk membahas isu-isu terkini pada proses pengelolaan mutu di lingkungan PJB dan meninjau sejumlah kebijakan internal agar senantiasa sesuai dengan perkembangan regulasi eksternal yang ditetapkan oleh Pemegang Saham dan regulator. Penerapan sistem manajemen mutu di lingkungan PJB diharapkan memberikan kontinuitas dan keandalan pasokan energi listrik. Sistem manajemen mutu yang diterapkan juga menjadi upaya PJB dalam melindungi hak pelanggan untuk mendapatkan layanan terbaik sesuai dengan kesepakatan. Program ini tidak hanya menjadi wujud komitmen terhadap pelanggan, tetapi juga bagian dari kontribusi PJB dalam mendukung salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua.

Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan

PJB berkomitmen melaksanakan proses produksi listrik sesuai dengan standar operasional dengan menjadikan aspek kesehatan dan keselamatan pelanggan sebagai prioritas utama. Proses pendistribusian energi listrik dilaksanakan melalui jaringan transmisi yang diatur pelanggan PJB yaitu PT PLN (Persero) UI P2B yang selanjutnya disalurkan kepada PT PLN (Persero) Distribusi sebagai penyalur ke konsumen. Keseluruhan proses tersebut dijalankan oleh PJB secara konsisten sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan memenuhi ketentuan yang berlaku, sehingga selama tahun 2019 PJB tidak mengalami insiden ketidakpatuhan tentang dampak keselamatan dan kesehatan dalam pendistribusian listrik kepada pelanggan serta PJB tidak mendapat pengaduan mengenai ketidaknyamanan pelanggan.

Informasi Pelayanan

PJB menyediakan berbagai sarana komunikasi pemasaran yang memadai dengan pelanggan agar kualitas produk dan layanan PJB senantiasa dapat memenuhi harapan pelanggan. Kegiatan komunikasi pemasaran juga menjadi salah satu upaya untuk melindungi hak pelanggan untuk memperoleh informasi yang akurat, jelas, dan dapat dipercaya. Komunikasi yang berjalan secara efektif selaras dengan layanan yang sesuai dengan harapan pelanggan dapat menciptakan loyalitas pelanggan dan hubungan bisnis jangka panjang. Beberapa sarana komunikasi pemasaran dengan pelanggan antara lain:

1. Rapat alokasi energi bulanan;
2. Diskusi Operasi Bersama Pelanggan
3. Rapat Komite Grid Code tahunan;
4. Rapat non-rutin/rapat khusus;
5. Kunjungan kerja dua arah dan forum diskusi bersama pelanggan secara bulanan;
6. Survei kepuasan pelanggan tahunan;

Directors and related employees to discuss current issues in the quality management process in the PJB environment and review some internal policies so that they are always consistent with the development of external regulations determined by the Shareholders and regulators. The implementation of a quality management system in the PJB environment is expected to provide continuity and reliability of the electrical energy supply. The quality management system implemented is also an effort of PJB in protecting the customer's right to get the best service following the agreement.

This program is not only a form of commitment to customers but also part of the contribution of PJB in supporting one of the goals of sustainable development, namely ensuring access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all.

Customer Health and Safety

PJB is committed to carrying out the electricity production process following operational standards by making customer health and safety aspects a top priority. The process of distributing electricity is carried out through a transmission network regulated by PJB customers, namely PT PLN (Persero) UI P2B, which is then channeled to PT PLN (Persero) Distribusi as a distributor to consumers. The entire process is performed by PJB consistently following the agreement of both parties and meets the applicable provisions; therefore, the incidents of non-compliance regarding the safety and health impacts in distributing electricity to customers and complaints on customer inconveniences were not experienced by PJB during 2019.

Service Information

PJB provides various marketing communication activities that are adequate for customers so that the quality of PJB products and services can always meet customer expectations. Marketing communication activities are also one of the efforts to protect customers' rights to obtain accurate, clear, and reliable information. Communication that runs effectively aligns with services that meet customer expectations to optimize customer loyalty and long-term business relationships. Some marketing communication activities with customers include:

1. Monthly energy allocation meeting;
2. Operation Discussion with Customers;
3. Annual Grid Code Committee Meeting;
4. Non-Regular/Special Meeting;
5. Monthly two-way work visit and discussion forum with customers;
6. Annual customer satisfaction survey;

7. Komunikasi melalui *website* khusus;
8. Telepon, *email*, SMS, dan media sosial;
9. Sarana penyediaan informasi pembangkit secara *realtime* (Lapuskit).

Komunikasi pemasaran dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan *stakeholders* dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, sehingga kegiatan ini tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi pihak atau lingkungan tertentu serta tidak terdapat denda atau sanksi terkait insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan prinsip-prinsip komunikasi pemasaran.

Sarana, Jumlah Dan Penanggulangan Pengaduan Pelanggan

PJB menyediakan sarana yang dapat digunakan oleh pelanggan untuk menyampaikan pengaduan atas layanan yang diberikan. Informasi dari pelanggan tersebut ditindaklanjuti oleh PJB untuk meningkatkan kualitas layanan. Pusat informasi dan pengaduan pelanggan PJB bernama SIMACO (Sistem *Management Complaint*) yang dilengkapi dengan kebijakan dan standar operasional yang komprehensif dan profesional. Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan melalui beberapa sarana berikut:

7. Communication via a specific website;
8. Phone, e-mail, SMS, and social media;
9. Facilities for providing real-time power plant information (Lapuskit)

Marketing communication is performed by considering the interests of stakeholders and regarding applicable regulations to prevent adverse impacts on certain parties or environments and charges or sanctions related to incidents of non-compliance with regulations and marketing communication principles.

Channels, Amounts, and Settlements of Customer Complaints

PJB provides channels for customer's complaints on services provided. It is also one of PJB's efforts to obtain information that can be followed up to improve service quality. PJB's customer information and complaint center is called SIMACO (Complaint Management System) which is equipped with comprehensive and professional operational policies and standards. Customers can submit complaints through the following channels:



Telepon Telephone 
031-8283180 pesawat 417

Fax 
031-8283192

Email 
sdme@ptpjb.com

Surat Mail 

Jl. Ketintang Baru No. 11 Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, 60231

Situs Resmi Official Website 
<http://maco.ptpjb.com> (intranet PJB)
<https://maco.ptpjb.com> (internet)

Setiap pengaduan pelanggan yang diterima akan ditindaklanjuti oleh Divisi OSK. Pengaduan atau keluhan yang masuk akan dikelompokkan berdasarkan dimensi kepuasan pelanggan untuk setiap produk sebagaimana ditetapkan dalam PJB IMS IPM-06.2.3 Mengelola Keluhan Pelanggan. Mekanisme pengaduan pelanggan dan tindaklanjutnya diuraikan dalam skema berikut.

Every customer complaint received will be followed up by the OSK Division. Reports or complaints received are then categorized based on the level of customer satisfaction for each product as stipulated in the PJB-IMS IPM-06.2.3 on Managing Customer Complaints. The customer complaint mechanism and follow-up are described in the following scheme.



Pada tahun 2019 hanya terdapat beberapa pengaduan yang diterima oleh PJB pada aplikasi MACO, selain aplikasi MACO untuk mengelola keluhan pelanggan PJB juga memiliki aplikasi MAPS yang bersumber dari dokumen SKP dan seluruhnya telah ditindaklanjuti. Hal ini menunjukkan komitmen tinggi PJB dalam melindungi hak pelanggan untuk didengar pendapat dan keluhannya sehingga layanan yang diperoleh dapat sesuai dengan kontrak perjanjian. Selain itu, PJB berhasil memberikan solusi terbaik melalui tindak lanjut pengaduan secara tepat sasaran sehingga tidak terjadi konflik yang dapat merusak citra Perusahaan.

In 2019, there were only a few complaints received by PJB on the MACO application. Besides MACO application that manages customer complaints, PJB also has developed a MAPS application that originated from SKP documents and all of them had been followed up. This shows the high commitment of PJB to the customer's right protection so that the services provided can be aligned with the contract agreement. Also, PJB has succeeded in providing the best solution through following up complaints on target so that no conflict can damage the Company's image.

Kunjungan dan *Gathering* Pelanggan

PJB berupaya menjaga hubungan baik dengan pelanggan untuk mempertahankan dan meningkatkan loyalitas. Upaya ini diterapkan melalui kegiatan kunjungan dan *gathering* dengan pelanggan. Dalam kegiatan ini pelanggan dapat menyampaikan saran dan harapannya terhadap layanan yang diberikan oleh PJB sehingga terjalin komunikasi dua arah. Berikut kunjungan dan *gathering* pelanggan selama tahun 2019.

Customer Visits and Gathering

PJB always maintains good relations with customers to maintain and increase their loyalty. This effort is implemented through visits and gatherings with customers. During this activity, customers can submit their suggestions and expectations for the services provided by PJB to establish two-way communication. The following are customer visits and gatherings during 2019.

Tabel Kunjungan Pelanggan

Table of Customer Visits

Lokasi Pelanggan Customer Location	Unit	Tanggal Date
PLN P2B Gandul (Jakarta)	UP Muaratawar Muaratawar GU	8 Mei 2019 May 8, 2019
	UP Paiton Paiton GU	27 Juni 2019 June 27, 2019
PLN P2B APB Jawa Barat (Bandung)	UBJOM Indramayu Indramayu OMSBU	Gel. 1 = 29 April 2019 April 29, 2019 Gel. 2 = 3 Mei 2019 May 3, 2019
	UP Cirata Cirata GU	30 April 2019 April 30, 2019
	UBJOM Rembang Rembang OMSBU	5-9 Juli 2019 July 5-9, 2019
P2B, APB DKI, APP Duri Kosambi	UP Muara Karang Muara Karang GU	9 Mei 2019 May 9, 2019
PLN P2B APB Jawa Timur (Surabaya)	UBJOM Tj Awar-awar	23 Agustus 2019
	Tj Awar-awar OMSBU	August 23, 2019

**Tabel Gathering Pelanggan**

Table of Customer Gathering

Lokasi Pelanggan Customer Location	Unit	Tanggal Date
P2B, APB Jatim, APP Probolinggo	UP Paiton Paiton GU	27-29 November 2019 November 27-29, 2019
P2B, APB DKI, APP Duri Kosambi	UP Muara Karang Muara Karang GU	2-3 Agustus 2019 August 2-3, 2019
PLN P2B APB Jawa Barat (Bandung)	UP Cirata Cirata GU	Gel. 1 = 6 - 7 Juli 2019 July 6-7, 2019 Gel. 2 = 13- 14 Juli 2019 July 13-14, 2019
P2B, APB Jawa Timur, APP Surabaya, GITET, PLTGU & PLTU	UP Gresik Gresik GU	28-29 juni 2019 June 28-29, 2019
P2B, APB jatim, APP Madium	UBJOM Tanjung Awar- awar Tanjung Awar- awar OMSBU	23 November 2019 November 23, 2019
P2B, APB Jabar, APP Cirebon	UBJOM Indramayu Indramayu OMSBU	26 Oktober 2019 October 26, 2019
P2B, APB Jatim, APP Probolinggo	UBJOM Paiton 9 Paiton 9 OMSBU	29-30 Oktober 2019 October 29-30, 2019

Survei Kepuasan Pelanggan

PJB melaksanakan survei kepuasan, ketidakpuasan, dan keterikatan pelanggan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan dengan mengidentifikasi saran, keluhan, dan harapan pelanggan terhadap layanan jasa yang telah diberikan. Survei tersebut dilakukan melalui metode SERVQUAL, meliputi dimensi *Tangibles* (SDM dan peralatan komunikasi), *Empathy* (rasa empati selama melayani pelanggan), *Responsiveness* (daya tanggap dalam melayani pelanggan), *Reliability* (keandalan dalam pelayanan), dan *Assurance* (jaminan atas kualitas pelayanan). Setiap tahun survei dilakukan melalui berbagai tahapan, meliputi tahap identifikasi, pengumpulan data (pengisian kuesioner dan wawancara), pengolahan data, analisis, dan pembuatan kesimpulan. Pada tahun 2019, PJB melakukan survei atas kepuasan pelanggan dengan menggunakan jasa surveyor independen. Hasil dari survei tersebut dalam tiga tahun terakhir sebagai berikut:

Customer Satisfaction Survey

PJB conducts customer satisfaction, dissatisfaction, and customer engagement surveys to improve service quality by identifying customer suggestions, complaints, and expectations for the services that have been provided. The survey was conducted through the SERVQUAL method, covering the dimensions of Tangible (HR and communication equipment), Empathy, Responsiveness, Reliability, and Assurance. Annually, the survey is conducted through various stages, including the stages of identification, data collection (filling out questionnaires and interviews), data processing, analysis, and making conclusions. In 2019, PJB conducted a survey of customer satisfaction by using the services of an independent surveyor. The results of the survey in the last three years are as follows:

Tabel Nilai Kepuasan, Ketidakpuasan, dan Keterikatan Pelanggan Tahun 2017-2019

Table of Customer Satisfaction, Dissatisfaction, and Engagement Index for 2017-2019

Jenis Survei Survey Categories	Nilai (%) Score (%)		
	2017	2018	2019
Kepuasan Pelanggan Customer Satisfaction	84,76	86,09	84,23
Ketidakpuasan Pelanggan Customer Dissatisfaction	14,52	13,7	14,91
Keterikatan Pelanggan Customer Engagement	96,03	98,36	94,27

PJB terus berupaya memperbaiki kualitas layanan yang diberikan agar senantiasa mampu memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan.

PJB continuously improves the quality of services to meet the needs and expectations of customers.

Biaya Yang Dikeluarkan Program Cost

Selama tahun 2019 PJB mengeluarkan biaya untuk program tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pelanggan sebesar Rp1,2 miliar, menurun dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp1,5 miliar.

In 2019, PJB incurred cost for corporate social responsibility programs to customers of Rp1.2 billion, lower than in 2018 which was Rp1.5 billion.

Capaian yang Diperoleh Achievements

Penerapan pengelolaan mutu secara konsisten membawa PJB untuk mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015 mengenai Sistem Manajemen Mutu. Selain itu, PJB juga telah memperoleh penghargaan di ajang *Service Quality Award* sebagai apresiasi atas komitmen PJB dalam memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. Hal ini juga dibuktikan dengan skor yang tinggi kategori *customer expectations* dan *customer engagement* pada IQAF's *Assessment* berdasarkan *Baldrige Excellence Framework* 2019-2020.

The quality management practice consistently brings PJB to achieve ISO 9001: 2015 certification on Quality Management Systems. Also, PJB has received an award at the Service Quality Award as an appreciation for PJB's commitment to the best services for customers. This is also represented by the high score of customer expectations and customer engagement categories in IQAF's Assessment based on the 2019-2020 Baldrige Excellence Framework.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TO SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

Komitmen dan Kebijakan Commitment and Policy

Program tanggung jawab sosial terhadap pengembangan sosial dan kemasyarakatan telah dilaksanakan oleh PJB secara berkesinambungan. Kesungguhan PJB dalam pelaksanaan program ini didorong oleh beberapa faktor diantaranya kesadaran untuk mematuhi ketentuan, standar, dan peraturan perundangan yang berlaku; kepedulian terhadap hak pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) yang mungkin bersinggungan dengan potensi risiko yang ditimbulkan dari kegiatan operasional perusahaan; serta kebutuhan untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar dalam jangka panjang.

PJB telah menetapkan Surat Keputusan Direksi No. 065.K/010/CIR/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai panduan penerapan program tanggung jawab sosial terhadap pengembangan sosial dan kemasyarakatan. Kebijakan ini disusun dengan mengacu pada Undang-Undang No. 40 tentang Perseroan Terbatas yang tercantum pada pasal 74 terkait Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan serta Peraturan Pemerintah No.47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Selain itu, ISO 26000 juga menjadi rujukan implementasi program kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan terutama pengembangan sosial dan kemasyarakatan.

Konsep *triple bottom line* (*Planet, People, dan Profit*) diadopsi oleh PJB dalam menjalankan kegiatan operasional sebagai komitmen untuk bertanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan. Program tanggung jawab sosial menjadi wujud kontribusi PJB dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat terutama di sekitar wilayah operasi. Dalam jangka panjang PJB berupaya menciptakan sinergi yang baik dan tumbuh bersama para pemangku kepentingan sebagai modal sosial dalam menjamin keberlanjutan Perusahaan.

Program tanggung jawab sosial terhadap pengembangan sosial dan kemasyarakatan dilaksanakan sesuai dengan rencana program dan anggaran yang ditetapkan dalam RKAP setiap tahun. PJB juga telah memiliki mekanisme pengelolaan program tanggung jawab sosial untuk memastikan seluruh kegiatan dilaksanakan dengan tepat sasaran dan diharapkan memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh pemangku kepentingan sebagai berikut.

The Corporate Social Responsibility program to social and community development has been continuously established by PJB. The commitment of PJB to the program is driven by several factors including awareness to comply with the provisions, standards, and regulations that apply; awareness of the rights of stakeholders (*stakeholders*) that may be in contact with potential risks arising from the company's operational activities; and the need to maintain good relations with the surrounding community in the long run.

PJB has stipulated the Board of Directors Decree No. 065.K/010/CIR/2013 concerning Guidelines for the Implementation of Corporate Social Responsibility as a guide for implementing social responsibility programs for social and community development. This policy was prepared by referring to Law No. 40 regarding Limited Liability Companies listed in article 74 relating to Social and Environmental Responsibility and Government Regulation No.47 of 2012 concerning Corporate Social and Environmental Responsibility. Also, ISO 26000 is a reference for implementing corporate social responsibility programs, especially social and community development.

The triple bottom line concept (*Planet, People, and Profit*) was adopted by PJB to its operational activities as a responsibility to all stakeholders. The corporate social responsibility program is a form of PJB's contribution to community development and empowerment, especially surrounding operational areas. In the long run, PJB plans to create good synergy and grow with stakeholders as social capital in ensuring the sustainability of the Company.

The corporate social responsibility program to social and community development is established following the program plan and budget in the Annual Budget and Operational Plan. PJB also has a mechanism for managing corporate social responsibility programs to ensure all activities are carried out on target to provide tangible benefits for all stakeholders as follows.



Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



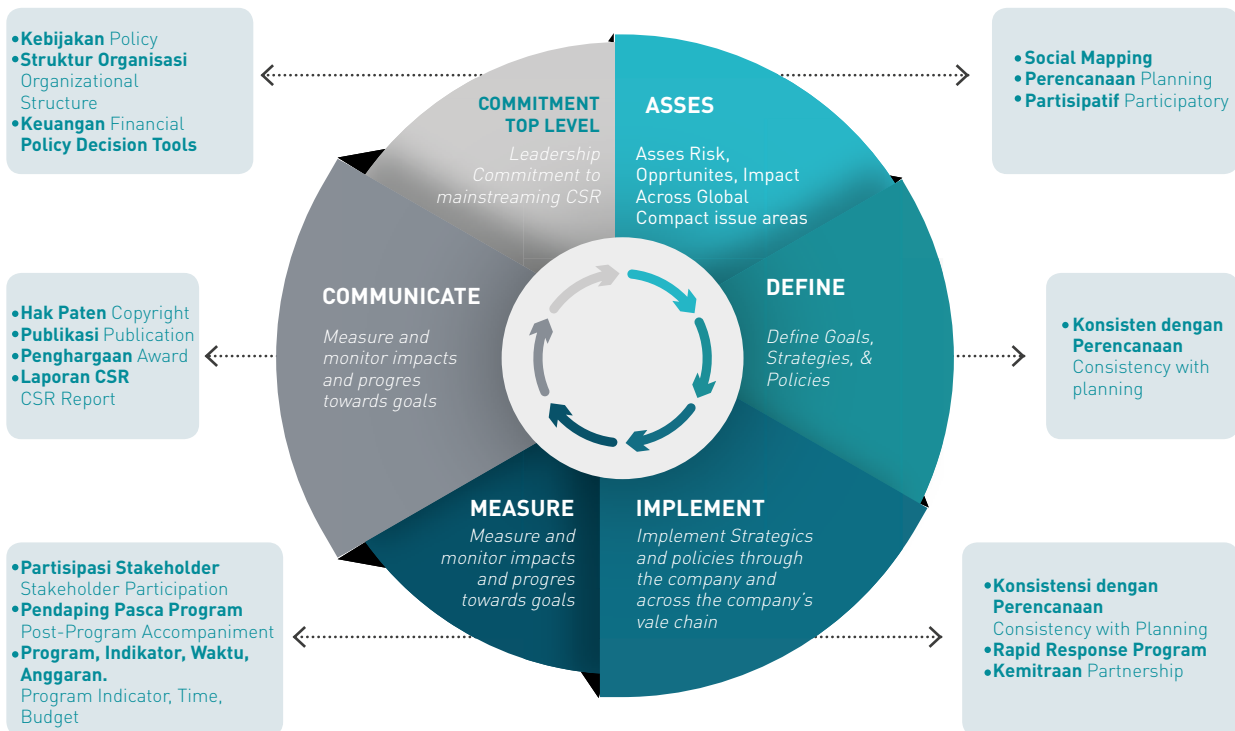
Laporan Keuangan Audit
Audited Financial Statements



Referensi Kriteria ARS
ARS Criteria Reference

Mekanisme Pengelolaan Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat

Mechanisms for Community Engagement and Development Program Management



Rencana Program 2019

Program Plan 2019

PJB menyusun rencana program tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pengembangan sosial dan kemasyarakatan berdasarkan hasil *social mapping* dan pemetaan risiko. Program tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pengembangan sosial dan kemasyarakatan diterapkan sebagai kontribusi PJB dalam menghadapi dampak atas risiko lingkungan, ekonomi, dan sosial yang berpotensi terjadi di masyarakat.

Isu-isu yang dikelola oleh PJB melalui program tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pengembangan sosial dan kemasyarakatan mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Isu terkait aspek sosial yaitu kesenjangan pemerataan penerima program CSR, perekrutan tenaga kerja lokal, dan konflik antar kelompok. Isu terkait aspek ekonomi yaitu kecemburuan ekonomi masyarakat terhadap karyawan PJB yang berasal dari luar daerah dan menurunnya tingkat produktivitas hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan warga. Isu terkait aspek lingkungan yaitu kerusakan terumbu karang, pencemaran air, udara, serta limbah. Dalam pengelolaan isu

PJB compiles a corporate social responsibility program plan for social and community development based on the results of social mapping and risk mapping. The corporate social responsibility program to social and community development is implemented as a contribution of PJB in overcoming impacts on potential environmental, economic, and social risks in the community.

Issues managed by PJB through corporate social responsibility programs to social and community development include social, economic, and environmental aspects. Issues related to social aspects are the gaps in the distribution of CSR program recipients, the recruitment of local workers, and conflicts between groups. Issues related to economic aspects are community economic jealousy towards PJB employees from outside the region and the decreasing level of productivity of agricultural products, plantations, and fisheries. Issues related to environmental aspects are damage to coral reefs, water pollution, air pollution, and waste. In managing the issue, the

tersebut, PJB melakukan identifikasi kemungkinan penyebab isu-isu untuk setiap aspek sehingga mampu menciptakan program-program sebagai bentuk tindakan penanggulangan terhadap isu-isu tersebut.

Rencana program tanggung jawab sosial perusahaan menjadi program kerja bidang CSR yang dimuat dalam RKAP 2019. Beberapa kegiatan yang direncanakan mencakup empat program antara lain program pemberdayaan (*empowerment*), pengembangan kapasitas (*capacity building*), infrastruktur (*infrastructure*) dan donasi (*charity*). *Empowerment* merupakan program CSR PJB untuk memberikan perubahan kapasitas masyarakat melalui metode pendampingan secara berkala dan berkelanjutan hingga menjadi masyarakat yang mandiri. Program CSR PJB yang memberikan pengetahuan/keterampilan kepada masyarakat masuk dalam *Capacity Building*. Program Infrastruktur mencakup kegiatan CSR PJB yang memberikan bantuan fisik atau barang yang diharapkan memiliki kebermanfaatan dalam waktu lama kepada masyarakat seperti bantuan perbaikan dan pembangunan fasilitas umum. *Charity* merupakan program CSR PJB untuk memberikan uang atau barang sebagai bentuk partisipasi perusahaan dalam rangka menjalin hubungan sosial dengan masyarakat.

Anggaran untuk pelaksanaan keempat program tersebut pada tahun 2019 mencapai Rp34,09 miliar yang terdiri dari *program empowerment* sebesar Rp13,13 miliar, *program capacity building* sebesar Rp13,33 miliar, *program infrastruktur* sebesar Rp4,64 miliar, dan *program charity* sebesar Rp2,99 miliar.

Program CSR PJB ini dilaksanakan di lokasi yang ditetapkan berdasarkan hasil *social mapping* yang meliputi empat wilayah. Wilayah pertama adalah daerah yang terkena dampak operasional Perusahaan secara langsung yang dibagi menjadi empat ring, yaitu:

- Ring I: wilayah desa atau kelurahan dimana aset PJB berlokasi.
- Ring II: wilayah kecamatan dimana aset PJB berlokasi.
- Ring III: wilayah kabupaten atau kota dimana aset PJB berlokasi.
- Ring IV: wilayah provinsi dimana aset PJB berlokasi.

Wilayah kedua yaitu lokasi yang memiliki potensi sumber daya alam, sosial, dan masyarakat untuk dikembangkan atau memberi dampak terhadap pembentukan citra positif Perusahaan. Wilayah ketiga yaitu lokasi yang akan dijadikan sebagai unit Perusahaan dan wilayah keempat adalah lokasi yang terkena bencana alam.

PJB identifies the possible causes of the issues for each aspect to be able to create programs as a form of countermeasures against these issues.

The corporate social responsibility program plan is a work program for CSR contained in the 2019 ABOP. Some of the planned activities include four programs: empowerment, capacity building, infrastructure, and charity. Empowerment is one of PJB's CSR programs to improve community capacity through periodic and continued mentoring methods to make an independent community. PJB's CSR programs that provide knowledge/skills to the community are included in Capacity Building. The Infrastructure Program includes PJB CSR activities with services or goods assistance that are expected to have long-term benefits for the community such as assistance in the construction and reconstruction of public facilities. Charity is a PJB CSR program to aid material goods as a form of company participation to establish social relations with the community.

The budget for the implementation of the four programs in 2019 reached Rp34.09 billion consisting of the empowerment program of Rp13.13 billion, the capacity building program of Rp13.33 billion, the infrastructure program of Rp4.64 billion, and the charity program of Rp2.99 billion.

The PJB CSR program is established in a location determined based on the results of the social mapping that covers four regions. The first area is the area directly affected by the Company's operations which is divided into four rings, namely:

- Ring I: the area of a village where the PJB assets are located.
- Ring II: sub-district area where PJB assets are located.
- Ring III: the area of district or city where PJB assets are located.
- Ring IV: the area of the province where the PJB assets are located.

The second area is the location that has the potential of natural, social, and community resources to be developed or has an impact on the formation of a positive Corporate Image. The third area is the location that will be used as the Company's unit and the fourth area is the location affected by natural disasters.



Kegiatan dan Dampaknya Activities and Impacts

Selama tahun 2019, PJB telah melaksanakan program tanggung jawab sosial terhadap pengembangan sosial dan kemasyarakatan pada 19 unit kerja yang meliputi Kantor Pusat, UP Muara Tawar, UP Muara Karang, UP Cirata, UP Gresik, UP Brantas, UP Paiton, UBJOM Indramayu, UBJOM Rembang, UBJOM Tanjung Awar-awar, UBJOM Pacitan, UBJOM Paiton 9, UBJOM Arun, UBJOM Pulang Pisau, UBJOM Kaltim Teluk, UBJOM Tenayan, BPWC, UJLJ dan SUPPA yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Program tanggung jawab sosial terhadap pengembangan sosial dan kemasyarakatan diterapkan sesuai tipologi yang ditetapkan yaitu *Empowerment*, *Capacity Building*, *Infrastruktur*, dan *Charity*. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 berikut dampak yang ditimbulkan adalah sebagai berikut:

In 2019, PJB has carried out social responsibility programs towards social and community development in 19 working units that include Head Office, Muara Tawar GU, Muara Karang GU, Cirata GU, Gresik GU, Brantas GU, Paiton GU, Indramayu GU, Rembang OMSBU, Tanjung Awar-awar OMSBU, Pacitan OMSBU, Paiton 9 OMSBU, Arun OMSBU, Pulang Pisau OMSBU, Teluk Kalimantan OMSBU, Tenayan OMSBU, CRMU, OMSBU and SUPPA spread throughout Indonesia. The program of social corporate responsibility to social and community development is implemented based on the typology specified, namely Empowerment, Capacity Building, Infrastructure, and Charity. Some of the activities carried out in 2019 and the following impacts are as follows:

Kampung Setrum (Sentra Energi Terbarukan untuk Masyarakat) Setrum Village (Public Renewable Energy Center)

Salah satu program *empowerment* UP Paiton yang mendukung perolehan PROPER Emas untuk ketiga kalinya di tahun 2019 yaitu Kampung Setrum yang dilaksanakan di Desa Andung Biru, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo. Sumber air yang melimpah dari aliran sungai baik pada musim penghujan maupun musim kemarau menjadi potensi yang dimanfaatkan oleh penduduk desa untuk membuat Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dengan dukungan dari UP Paiton. Kegiatan ini dilaksanakan karena desa ini sebelumnya belum mendapatkan akses listrik yang dipengaruhi oleh letak geografisnya yang sulit dijangkau yaitu berada di kaki gunung Argopuro. Selanjutnya, kegiatan tersebut dikembangkan menjadi Program Desa Mandiri Energi yang memiliki tiga tujuan yaitu (1) memberikan akses listrik untuk masyarakat Desa Andungbiru, sebagian Desa Sumber Duren, dan sebagian Desa Tiris; (2) memanfaatkan energi listrik untuk kegiatan produksi kopi; dan (3) memanfaatkan energi listrik untuk kegiatan penggemukan sapi. Program Desa Mandiri Energi pun menjadi wujud kontribusi PJB untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu memastikan akses terhadap energy yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua.

Pada tahun 2019, UP Paiton memberikan bantuan fasilitas infrastruktur maupun memberikan pelatihan pemeliharaan dan standar operasional bagi kelompok mesyarakat pengelola PLTMH Andungbiru. Pemberian pelatihan tersebut berdampak pada kehandalan proses produksi PLTMH, sehingga masyarakat kelompok rentan yang mendapatkan manfaat semakin meningkat. Selain itu, adanya aliran listrik memberikan dampak pada perubahan perilaku masyarakat. Masyarakat yang melakukan penebangan liar untuk dijadikan kayu bakar, kini beralih menggunakan *rice cooker* sehingga mampu menyelamatkan 1.800 pohon perbulan atau sama dengan 8,7 Ha lahan per tahun. Dampak dari pelaksanaan program ini dari segi sosial, ekonomi dan lingkungan sebagai berikut.

One of the Paiton GU empowerment programs that leads the achievement of Gold PROPER for the third time in 2019 is Setrum Village which is carried out in Andung Biru Village, Tiris District, Probolinggo Regency. The abundant water source from the river that flows both in the rainy season and the dry season becomes a potential that is utilized by villagers to create a Micro Hydro Power Plant (MHPP) with the support of Paiton GU. This activity was carried out since the village had no electricity access due to it is a remote location which is at the foot of Mount Argopuro. Subsequently, the activity was developed into Desa Mandiri Energi Program which has three objectives: (1) providing electricity access to the people of Andungbiru Village, part of Sumber Duren Village, and part of Tiris Village; (2) utilizing electricity for coffee production; and (3) utilizing electricity for cattle fattening activities. The Energy Independent Village Program has also become a manifestation of PJB's contribution to supporting sustainable development goals, namely ensuring access to affordable, reliable, sustainable, and modern energy for all.

In 2019, Paiton GU provided infrastructure as well as maintenance training and operational standards for the community group managing Andungbiru MHPP. The provision of the training has an impact on the reliability of the MHPP's production process that results in increased benefits for vulnerable communities. Also, the existence of electricity has an impact on changes in people's behavior. People who are doing illegal logging to use as firewood, now use a rice cooker so that they can save 1,800 trees per month or equal to 8.7 hectares of land per year. The impact of implementing this program in terms of social, economic, and environmental are as follows.



612 KK mendapat akses listrik 204
warga miskin gratis akses listrik
612 households have access to
electricity 204 poor citizens have
free access to electricity



Mencegah penebangan 1.800
pohon/bulan atau 8,7 Ha/ tahun
Saving 1,800 trees/month
or 8.7 Ha/ year



6 Fasilitas Pendidikan gratis
6 Free Learning Facilities



12 tempat ibadah gratis
12 free places of worship



Listrik murah Rp600/kwh
Affordable electricity Rp.600 / kWh

UP Paiton mengembangkan program ini menjadi dua kegiatan selama tahun 2019 yaitu pembangunan kandang Sapi Komunal untuk penggemukan sapi dengan memanfaatkan limbah kulit kopi dan pembangunan bank bibit di empat titik pembibitan serta satu titik pusat untuk pembibitan benih tanaman pohon (kopi, duren, cengkeh, dan lain-lain). Dampak dari pelaksanaan program ini dari segi ekonomi dan lingkungan sebagai berikut.

Paiton GU divided this program into two activities during 2019, namely the construction of Communal Cow pens for fattening cows by utilizing coffee waste and the construction of seed banks in four nursery points and one central point for tree seedlings (coffee, durian, cloves, and others). The benefits of implementing this program in terms of economy and environment are as follows.



Pemanfaatan 52,5 ton
Limbah Kulit Kopi
52.5 tons of Coffee Skin
Waste are recycled



Pendapatan Kelompok
meningkat 53% menjadi
Rp1,8 juta/bulan
Community's income
increased 53% to Rp1.8
million / month



Jumlah penerima manfaat
meningkat menjadi 650 KK
The number of beneficiaries
increased to 650 households

Desa Wisata Binor Harmony Binor Harmony Tourism Village

UP Paiton melaksanakan program wisata bahari di Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Program ini dilaksanakan dengan melihat potensi Desa Binor yang memiliki surga bawah laut yang eksotis. Keberadaan PLTU Paiton ternyata tidak berdampak buruk bagi biota laut ataupun menyebabkan kerusakan ekosistem di sekitarnya. Hal ini dibuktikan dengan ekosistem terumbu karang yang terus terjaga. Ikan - ikan di pantai Binor juga tergolong banyak

Paiton GU conducts a marine tourism program in Binor Village, Paiton District, Probolinggo Regency. This program is established by focusing on the potential of Binor Village which has an exotic underwater paradise. The existence of Paiton CFPP has no negative impact on marine life or cause damage to the surrounding ecosystem. This is evidenced by the continued coral reef ecosystem. There are some types of fish on the beach in Binor; moreover, it was found a Clown Fish



jenisnya, bahkan dapat ditemukan ikan berjenis *Clown Fish* atau yang lebih dikenal dengan ikan Nemo. Ikan ini biasanya dijumpai di perairan yang memiliki karang yang bagus.

or known as Nemo fish. This fish is usually found in waters that have good coral.

Program ini diharapkan dapat mendukung pelestarian terumbu karang di pesisir pantai Binor, meningkatkan edukasi masyarakat terhadap *sustainable fishing*, meningkatkan perekonomian warga Binor, serta menjadikan desa Binor sebagai wisata unggulan di Kabupaten Probolinggo. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai pengembangan program ini diantaranya pembangunan pusat pelatihan, pembuatan Kantor BUMdes dan ruang serba guna serta Bazaar Semarak Tahun Baru. Sejumlah kegiatan tersebut memberikan dampak terhadap peningkatan dan perbaikan dari segi ekonomi dan lingkungan sebagai berikut.

The program is expected to support the preservation of coral reefs on the coast of Binor, increase public education on sustainable fishing, improve the economy of Binor residents, and make the village of Binor a leading tourist attraction in Probolinggo Regency. Some of the activities that have been carried out as the development of this program include the construction of a training center, the creation of Village-owned Enterprises Office and multipurpose room, and the Lively New Year Bazaar. These activities have resulted in improvements in terms of the economy and the environment.



Pemanfaatan 30 kg
sampah plastik
Use of 30 kg of
plastic waste



Pendapatan Kelompok meningkat
menjadi Rp2,3 miliar/tahun
Community's income increased to
Rp.2.3 billion/year



Jumlah penerima
manfaat sebanyak 185 orang
Total beneficiaries is 185
persons

Pesisir Budaya Kelompok Nelayan Desa Banyuglugur **Coastal Cultivation of Banyuglugur Village's Fishermen**

Desa Banyuglugur terletak di sebelah timur UP Paiton sehingga termasuk dalam kelompok desa ring I PJB. Di desa ini terdapat kelompok rentan yang sering bersinggungan dengan Perusahaan yaitu para nelayan. Salah satu masalah yang dihadapi kelompok nelayan di desa ini yaitu ikan di sekitar pesisir desa merupakan jenis ikan yang murah di pasaran sehingga mereka harus mencari ikan ke arah tengah laut. Hal ini mempengaruhi biaya melaut yang lebih besar daripada hasil yang diperoleh. Oleh karena itu, UP Paiton berupaya menjawab permasalahan yang dihadapi para nelayan dengan membuat apartment fish atau rumah ikan sebagai upaya untuk mendatangkan ikan untuk mendekat ke pesisir Banyuglugur dan membuat ikan-ikan mudah mencari makan dan berkembang biak. Program-program yang dilaksanakan bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menangkap ikan yang ramah lingkungan dan meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan.

Banyuglugur Village is in the east of Paiton GU so that it belongs to the PJB ring-I village group. This village has vulnerable groups that often intersect with the Company, namely fishermen. One of the problems faced by the fishing groups in this village is that fish around the village coast are common fish species (cheaper) on the market so they have to hunt fish to the middle of the sea. This affects the cost of fishing that is greater than the results earned. Therefore, Paiton GU seeks to address the problems faced by making fishponds or fish houses to bring fish closer to the coast of Banyuglugur to find food and breed. The program implemented aims to build public awareness of the importance of fishing that is environmentally friendly and improve the economy of fishing communities.

Selama tahun 2019, UP Paiton melakukan empat kegiatan pengembangan program di desa Banyuglugur yaitu:

1. Pelatihan dan Pembuatan Kubus Berongga
Pada tanggal 3 Juli 2019 pelatihan ini dilakukan di area trumix timur PLTU Paiton oleh Ketua Kelompok Usaha

During 2019, Paiton GU conducted four program development activities in Banyuglugur village:

1. Training and Making Hollow Cubes
On July 3, 2019, the training was conducted in the eastern trumix area of Paiton CFPP by the Head of Putra Pesisir

Bersama Putra Pesisir. Pelatihan ini diikuti oleh kelompok Tirta Samudera yang ditargetkan menyelesaikan 200 unit kubus berongga.

2. Pelatihan dan Penyusunan Apartemen *Fish*

Apartemen fish merupakan modul modul Polycarbonat yang ramah lingkungan untuk ditenggelamkan di dasar laut sebagai tempat tumbuhnya lumut dan Biota Laut. Apartemen fish yang ditumbuhi biota laut diharapkan memancing ikan untuk mencari makan di tempat tersebut. Kelompok nelayan Taruna Jaya yang didampingi oleh ketua KUB Putra Pesisir melakukan penyusunan 30 modul apartemen fish.

3. Serah Terima Apartemen *Fish* dan Rumah Ikan

General Manager UP Paiton melakukan serah terima 200 kubus berongga dan 30 modul apartemen fish kepada ketua kelompok Tirta Samudra dan ketua kelompok Taruna Jaya di dusun pesisir desa Banyuglugur pada tanggal 30 Juli 2019 yang dihadairi oleh Camat Banyuglugur.

4. Pelepasan Kubus Berongga

Kubus berongga sebanyak 200 dan 30 modul apartemen *fish* dilepaskan secara berkala sampai dengan pertengahan bulan Agustus 2019.

Kegiatan tersebut memberikan dampak dari segi lingkungan dan sosial sebagai berikut:

Joint Business Group. The training was followed by Tirta Samudera Group targeted to complete 200 units of hollow cubes.

2. Training and Arrangement of Fish Apartments

The fish apartment is an environmentally friendly Polycarbonat module to be submerged on the seabed as a place for moss and marine life. Fish apartments that are overgrown with marine life are expected to fish for food in that place. Taruna Jaya Fishing Group, accompanied by the Head of Putra Pesisir Group, compiled 30 fish apartment modules.

3. Handover of Fish Apartments and Fish Houses

General Manager of Paiton GU handed over 200 hollow cubes and 30 fish apartment modules to the head of Tirta Samudra Group and the head of Taruna Jaya Group in Banyuglugur on July 30, 2019, attended by Banyuglugur's Sub-District Head.

4. Release of the Hollow Cube

200 hollow cubes and 30 fish apartment modules are released periodically until the middle of August 2019.

These activities have the following environmental and social impacts:



200 kubus rongga dan 30 modul apartemen *fish* terbangun
200 cubes and 30 fish apartment modules are ready to use



Jumlah penerima manfaat sebanyak 47 nelayan
The number of beneficiaries is 47 fishermen



Daun Sustainable Village Daun Sustainable Village

Program *empowerment* ini membawa UP Gresik memperoleh PROPER Emas di tahun 2019. Kepedulian UP Gresik terhadap masyarakat sekitar yang mengalami kerugian akibat abrasi yang terjadi pada tahun 2004 diwujudkan dalam program ini. Abrasi menyebabkan 43 hektar lahan termasuk lahan sawah petani terendam air laut sehingga tidak bisa dikelola. Selain itu, masyarakat masih melakukan kegiatan penangkapan ikan di sekitar perairan hutan bakau dengan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti potas, tuba dan obat-obat berbahaya lainnya. Namun, keadaan tersebut memicu munculnya kesadaran kelompok masyarakat untuk melestarikan pesisir pantai. Kelompok masyarakat ini melakukan gerakan untuk mengatasi masalah yang terjadi dengan melarang penebangan hutan mangrove, menjaga hutan mangrove yang masih tersisa dan melakukan penanaman kembali yang dibantu oleh masyarakat. Selanjutnya, kelompok masyarakat tersebut secara resmi menjadi komunitas yang disahkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dan diberi nama Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas) Hijau Daun yang didukung oleh Kepala Desa beserta aparatnya dan tokoh masyarakat.

Sejak awal tahun 2016 UP Gresik mendukung upaya pelestarian pesisir Desa Daun dengan melaksanakan program mangrove, penanaman cemara udang, pembangunan infrastruktur gapura jalan titian dan lainnya yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga perkembangannya sesuai *roadmap* terbentuk program Daun *Sustainable Village*. Selama tahun 2019 kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi empat pilar yaitu:

1. Social Sustainability

Kegiatan edukasi konservasi secara rutin dilaksanakan di Ekowisata Mangrove Hijau Daun karena kelalaian masyarakat yang sebelumnya terjadi karena pemahaman yang kurang memadai. Selain itu, pendekatan kebijakan juga dilaksanakan melalui pelibatan Pemerintah Desa kepada kegiatan konservasi maupun pengelolaan sampah. Upaya tersebut diharapkan dapat menggerakkan masyarakat secara massal sehingga kegiatan dapat berdampak signifikan.

2. Ecological Sustainability

Kegiatan pengelolaan sampah terpadu dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan sampah di desa ini. Sejak lama masyarakat mengumpulkan sampah secara individu kemudian dibakar, meskipun memunculkan potensi bahaya seperti gas yang dikeluarkan dari pembakaran yang tidak sempurna tersebut akibat belum adanya TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sampah maupun TPS (Tempat Pembuangan Sementara) sampah.

This empowerment program led Gresik GU to achieve the Gold PROPER in 2019. Gresik GU's concern for the surrounding community that suffered losses due to abrasion that occurred in 2004 was realized in this program. Abrasion caused 43 hectares of land including farmers' paddy fields to be submerged in seawater so that it could not be managed. Moreover, the community still conducts fishing activities around the waters of the mangrove forest by using non-environmentally friendly fishing gear such as potassium, tuba, and other dangerous devices. However, this situation triggered the emergence of an awareness of community groups to preserve the coast. This community group fought to overcome the problem that occurred by banning the cutting down of mangrove forests, preserving the remaining mangrove forests and replanting those that were helped by the community. Furthermore, the community group officially became a community authorized by the East Java Provincial Maritime and Fisheries Body and was named Hijau Daun Community Watch Group supported by the Village Head and the officials and community leaders.

Since the beginning of 2016, Gresik GU has supported the efforts to preserve Daun Village's coast by implementing a mangrove program, planting pine shrimp, developing a roadway infrastructure and other roads aimed at improving the welfare of the community so that its development is in line with the roadmap of Daun Sustainable Village program. In 2019, the activities carried out included four pillars, namely:

1. Social Sustainability

Conservation education activities are routinely carried out in the Green Leaf Mangrove Ecotourism because of community negligence that previously occurred due to inadequate understanding. Also, the policy approach is implemented through the involvement of the Village Government in conservation and waste management activities. The effort is expected to be able to move the community en masse so that activities can have a significant impact.

2. Ecological Sustainability

Integrated waste management activities are carried out to overcome the waste problem in this village. For a long time, the community collected individual waste and then burned it, despite the hazardous potential such as gas released from incomplete combustion since there are no final disposal and temporary disposal landfills.

3. *Economic Sustainability*

Ekowisata Mangrove Hijau Daun membuka peluang kegiatan pengembangan usaha baru yang memberikan dampak besar bagi perekonomian masyarakat di sekitarnya. Usaha-usaha tersebut yang masih sejalan dan bersinergi dengan program ekowisata seperti *Homestay*, *Olahan Ikan*, dan *Garam Bawean*.

4. *Energy Sustainability*

Kegiatan pengelolaan sampah terpadu di desa ini menghasilkan inovasi untuk mengubah sampah organik menjadi *pellet* yang bisa mengganti gas. Kegiatan ini berhasil mengatasi masalah mahalnya harga beli gas. Selain itu, kebutuhan listrik sehari-hari di Ekowisata Mangrove Hijau Daun belum terpenuhi. Jadi, inovasi pembangunan fasilitas PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) dilakukan sebanyak 1 unit dengan kapasitas 400 WP untuk dijadikan sumber listrik di dalam area ekowisata.

Program Daun *Sustainable Village* yang dilaksanakan merupakan bagian kontribusi PJB dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu perlindungan dan perbaikan ekosistem laut dan daratan secara berkelanjutan. Selain itu, sejumlah kegiatan tersebut memberikan dampak terhadap peningkatan dan perbaikan dari segi ekonomi dan lingkungan sebagai berikut.

3. Economic Sustainability

Green Leaf Mangrove Ecotourism opens opportunities for new business development activities that have a major impact on the economy of the surrounding community. These efforts are still in line and synergize with ecotourism programs such as *Homestay*, *Processed Fish*, and *Bawean Salt*.

4. Energy Sustainability

Integrated waste management activities in this village produce innovations to turn organic waste into pellets that can substitute for gas. This activity succeeded in overcoming the problem of high gas purchase prices. Also, daily electricity needs in the Green Leaf Mangrove Ecotourism have not been met. Therefore, the innovation of SPP (Solar Power Plant) facility development is conducted to 1 unit with a capacity of 400 WP for the electricity source of the ecotourism area.

Daun *Sustainable Village* program is part of the PJB's contribution to supporting sustainable development goals, namely the protection and improvement of marine and terrestrial ecosystems in a sustainable manner. Also, this activity has the following impact on economic and environmental improvements and improvements.





7 Ha Lahan Sawah
dikelola kembali
Rehabilitation of 7-Ha
rice fields



Area Konservasi Pantai
mencapai 16 Ha
The Coastal Conservation
Area of 16 Ha



Jumlah Penanaman Mangrove
2015-2019 sebanyak 31.850 pohon
Mangrove planted in 2015-2019
was 31,850 trees



Luas Terumbu Karang yang
terlindungi mencapai 2.376,15 m²
Coral reefs conservation area of
2,376.15 m²



Pendapatan Kelompok Tahun
2019 mencapai Rp72,5 juta
Community's income in 2019
reached Rp72.5 million



Jumlah Peserta Edukasi
mencapai 1.510 orang
The number of Learning
Participants reached 1,510 people

Pijar Berdaya Pijar Berdaya

Selain program Daun *Sustainable Village*, program *empowerment* yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan ini oleh UP Gresik turut berkontribusi terhadap capaian PROPER Emas yang diraih tahun 2019. Program Pijar Berdaya dilaksanakan di Desa Kramatinggil, Kabupaten Gresik dengan sub-sub program antara lain:

1. Bank Sampah

Program bank sampah ini bertujuan agar masyarakat terbiasa untuk *reduce*, *reuse*, dan *recycle* (3R) dengan teknik 3R, menjadikan sampah bernilai ekonomis, serta merubah pola pikir masyarakat serta kebiasaan sebagian masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Saat ini Bank Sampah tidak hanya tersebar di Desa Kramatinggil, tetapi juga di dua desa yang termasuk ring 1 lainnya yaitu Desa Sidorukun, dan Desa Pulo Pancikan. Program ini berkontribusi terhadap 972 orang sebagai penerima manfaat dari tiga desa tersebut.

2. KB Intan Permata

Sebagai pengembangan dari program bank sampah, KB Intan Permata diharapkan dapat menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan yang ditanamkan sejak dini. Program ini ditujukan untuk mengajarkan siswa-siswi yang peduli lingkungan sejak dini serta mengedukasi dan melatih wali murid PAUD untuk mengelola sampah. Program ini berkontribusi terhadap 27 siswa yang mendapat pengetahuan mengenai lingkungan.

In addition of the Daun *Sustainable Village* program, this continued empowerment program by Gresik GU also contributed to the achievement of the Golden PROPER in 2019. Pijar Berdaya Program was implemented in Kramatinggil Village, Gresik Regency with sub-programs including:

1. Waste Bank

This waste bank program aims to make the community used to reduce, reuse, and recycle (3R) with the 3R technique, make waste economically valuable, and change the mindset and the habits of the community on the environmental awareness. Currently, the Waste Bank is not only spread in Kramatinggil Village but also two other villages including Ring 1, namely Sidorukun Village and Pulo Pancikan Village. This program contributed 972 persons as beneficiaries of the three villages.

2. Intan Permata Kindergarten

With the development of the waste bank program, Intan Permata Kindergarten is expected to foster the environmental awareness that is instilled at the very beginning. This program is intended to teach students who care about the environment from an early age and educate and train Preschool students' parents to manage waste. This program contributed to 27 students who gained knowledge about the environment.

3. Bank Tanaman

Program ini hadir sebagai solusi karena Desa Kramatinggil memiliki potensi pencemaran udara yang tinggi. Lahan desa yang sempit dan tingginya kepadatan penduduk maka program dilaksanakan melalui sistem "Tabulampot organik". Kegiatan Kampung Hijau Produktif menghasilkan aneka buah dan sayuran yang perlu diolah dan dikembangkan manfaatnya sehingga diharapkan dapat memenuhi gizi dan meningkatkan pendapatan rumah tangga masyarakat serta membuka peluang pengembangan usaha baru dengan memaksimalkan peran perempuan di desa ini dalam perubahan sosial dan ekonomi menuju desa berdaya. Program ini berkontribusi terhadap 146 orang sebagai penerima manfaat.

4. Pelatihan Menabung Air

Program ini bertujuan agar masyarakat melakukan penghematan air dan dapat menabung air di sekitar rumahnya. Hal ini dilaksanakan dalam mengatasi masalah bahwa jumlah dan kualitas air tanah di sekitar desa ini semakin rendah, sehingga perlu dilaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran warga dan memberikan informasi mengenai cara menghemat dan menabung air. Program ini berkontribusi terhadap 40 orang sebagai penerima manfaat.

5. Bina Keluarga Balita

Pertumbuhan balita seharusnya diimbangi dengan pengetahuan tentang pemenuhan gizi pada balita serta peningkatan keterampilan dan kesadaran ibu dan anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya. Oleh karena itu, program ini bertujuan untuk optimalisasi taman prosyandu, memonitor pertumbuhan anak, tumbuh kembang anak, dan juga pendidikan anak, serta memaksimalkan fungsi keluarga. Kegiatan ini memberikan dampak dari segi ekonomi dan lingkungan sebagai berikut.

3. Plant Bank

This program is a solution since Kramatinggil Village has a high potential for air pollution. The narrow village land and high population density then the program is conducted through the "Organic Tabulampot" system. The Productive Green Village activity produces various fruits and vegetables to processing and development that are expected to meet nutrient requirements and to increase household income and open opportunities for new business development by maximizing the women's role in this village for the social and economic improvement towards empowered villages. This program contributed 146 persons as beneficiaries.

4. Water-Saving Training

This program aims to make the community save water and save water around their homes. This was carried out in overcoming the problem that the quantity and quality of groundwater around the village were getting lower, so training was needed to raise awareness and provide information on how to conserve and save water. This program contributes to 40 people as beneficiaries.

5. Toddler Parenting

The growth of toddlers should be balanced with knowledge about fulfilling nutrition in toddlers as well as increasing the skills and awareness of mothers and other family members in fostering their toddler growth and development. Therefore, this program aims to optimize the Integrated Healthcare Center, monitor children's growth, children's development, children's education, as well as optimizing family functions. This activity has the following economic and environmental impacts.



39 unit Bank Sampah di Desa
Pulopancikan, Kramatinggil,
dan Sidorukun
39 units of Waste Banks in
Pulopancikan, Kramatinggil and
Sidorukun Villages



Pendapatan Kelompok Bank
Sampah Tahun 2019 Rp12,2 juta
Community's Income from the
Waste Bank in 2019 reached Rp
12.2 million



Jumlah Kader Lingkungan
sebanyak 119 Kader Wanita
The number of Environmental
Cadres is 119 Female Cadres



Jumlah Nasabah Bank
Sampah sebanyak 772 KK
The number of Waste Bank
Customers is 772 households



Pendapatan Kelompok Bank
Tanaman 2019 Rp10,3 juta
Community's income from Plant Bank
in 2019 reached Rp10.3 million



Tingkat Keterlibatan
Perempuan 92%
Female engagement
rate is 92%

Kampung Hijau Asri (Kampung Mang Jasri) Hijau Asri Village (Kampung Mang Jasri)

UP Muara Karang melaksanakan program Kampung Hijau Asri (Kampung Mang Jasri) untuk mengatasi sejumlah masalah yang dihadapi masyarakat sekitar yaitu abrasi pantai, air bersih yang belum mencukupi mempengaruhi kesehatan dan kebersihan, minimnya penghijauan yang membuat daerah sekitar menjadi gersang dan panas. Selama tahun 2019 kegiatan yang dilakukan di antaranya:

1. Pengembangan Budidaya Ikan Air Payau

Kegiatan ini mulai dirintis kembali setelah terahir kali panen pada tahun 2018. Hasil panen terakhir yang kurang maksimal mendorong kelompok untuk memperbaiki teknik dalam budidaya ikan air payau sehingga hasilnya bisa lebih maksimal. Pengembangan usaha budidaya ikan air payau ini bekerjasama dengan Anak Perusahaan BUMN lainnya sebagai bentuk sinergi antar perusahaan dan menunjuk konsultan independen sebagai instansi pelaksana dan pelatih bagi kelompok penerima manfaat.

2. Perawatan Ekosistem Mangrove

UP Muara Karang bekerjasama dengan Komunitas Mangrove Muara Angke (KOMMA) untuk memastikan pertumbuhan bibit hutan mangrove yang ditanam. Tanaman Mangrove di kawasan Eco-marine Mangrove Muara Angke dipantau dan dirawat secara rutin. Komunitas ini juga melakukan pembuatan jalan baru sehingga jalan setapak bisa memutar seluruh kawasan Eco-Marine Mangrove Muara Angke.

3. Pelatihan Peningkatan Mutu dan Umur Simpan Produk

Pengembangan keberadaan *Eco-Marine* Mangrove Muara Angke didukung dengan pemanfaatan buah Pidada. Selama ini buah Pidada sudah berhasil diolah menjadi sirup, dodol dan selai. Untuk meningkatkan kualitas dan variasi produk yang sudah ada maka diadakan pelatihan yang bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor. Pelatihan meliputi pemahaman penggunaan bahan pengawet, produksi pangan higienis dan inovasi produk olahan baru seperti permen, *cookies* dan kue bolu.

Kegiatan-kegiatan tersebut memberikan dampak terhadap peningkatan dan perbaikan dari segi ekonomi dan lingkungan sebagai berikut.

Muara Karang GU implemented the Hijau Asri Village (Kampung Mang Jasri) program to overcome some problems faced by the surrounding community: coastal abrasion, insufficient clean water affecting health, and cleanliness, lack of greening that leads surrounding area to be arid and hot. In 2019, the activities conducted including:

1. Development of brackish water fish cultivation

This activity began to reoperate after the last harvest in 2018. The last yields that were less than optimal motivated the group to improve techniques in brackish-water fish cultivation for the more optimal. The development of the brackish water cultivation business in collaboration with other SOE's subsidiaries is a form of synergy between companies and appoints independent consultants as implementing agencies and trainers for the beneficiary groups.

2. Mangrove Ecosystem Conservation

Muara Karang GU collaborates with Muara Angke Mangrove Community (KOMMA) to ensure the growth of planted mangrove seeds. Mangroves in the Muara Angke Mangrove Eco-marine area are routinely monitored and maintained. This community also constructs new roads so that the trail can access the entire Eco-Marine Mangrove area of Muara Angke.

3. Training on Quality Improvement and Storage Life of Products

The development of Muara Angke's Mangrove Eco-Marine is supported using Pidada fruit. To date, Pidada fruit has been successfully processed into syrup, dodol, and jam. To improve the quality and variety of existing products, training was conducted in collaboration with Institut Pertanian Bogor. The training covers the knowledge of preservative use, hygienic food production, and innovation of new processed products such as candy, cookies, and sponge cakes.

This activity provides some improvements in economic and environmental terms.



Pendapatan Kelompok meningkat menjadi Rp17.290.000
Community's income increased to Rp.17,290,000



Jumlah penerima manfaat sebanyak 40 KK
The number of beneficiaries was 40 households



275 Pohon Bakau, Pidada, dan Api-api tertanam
275 Mangroves, Pidada, and Gray Mangroves were planted



Kampung Mang Jasri
Mang Jasri Village



Pelatihan Peningkatan Mutu dan Umur Simpan Produk
Training on Quality Improvement and Storage Life of Products



kawasan Eco-Marine Mangrove Muara Angke
Eco-Marine Mangrove Area of Muara Angke



Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



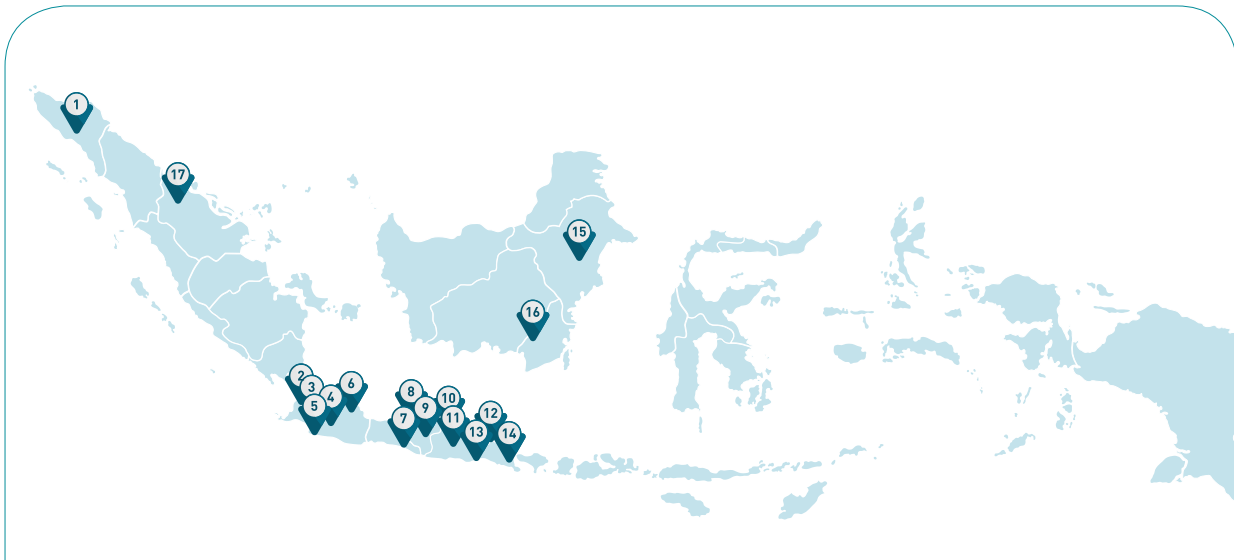
Laporan Keuangan Audit
Audited Financial Statements



Referensi Kriteria ARS
ARS Criteria Reference

Program Unggulan Setiap Unit Berdasarkan Peta Wilayah

Featured programs for each unit based on regional map



1 UBJOM Arun Arun OMSBU • Agrowisata Hidroponik Hydroponic Agrotourism • PJB Saweu Sikula	6 UBJOM Indramayu Indramayu OMSBU • Pertanian Organik Sumuradem Sumuradem Organic Farm • Wisata Pantai Pletong Pletong Beach Tourism	13 UP Brantas Brantas GU • Budidaya Porang Porang Cultivation • Program Kesehatan Masyarakat Public Healthcare Program • Batik Sengguruh Sengguruh Batik
2 UP Muara Tawar Muara Tawar GU • Kampung Si Mandra (Bersih, Mandiri, & Sejahtera Si Mandra Village [Clean, Independent, & Prosperous]) • Budidaya Lele Catfish Cultivation • Kampung Bahari Sembilangan Bahari Sembilangan Village • Ekowisata Sungai Jingkem Jingkem River Ecotourism • Ekowisata Sungai Rindu Rindu River Ecotourism	7 UBJOM Pacitan Pacitan OMSBU • Cagak Tilu • Batik Sendang Arum	14 UBJOM Paiton 9 Paiton 9 OMSBU • Taman Pemandian Kembar SBK Kembar SBK Baths • Konservasi Terumbu Karang Coral Reef Conservation • Program Proklm Desa Binor Binor Village Proklm Program
3 UP Muara Karang Muara Karang GU • Kampung hijau Asri (Mang Jasril) Hijau Asri Village [Mang Jasril] • Rumah Jahit Sewing House • Rumah Lipat (Kerajinan Cangkang Kerang Hijau) Crafting House [Green Shell Crafting]	8 UBJOM Rembang Rembang OMSBU • Pengembangan Kapasitas ODGJ ODGJ Capacity Building • Budidaya Kambing KWT Melati KWT Melati Goat Cultivation • Pengolahan Makanan Laut Seafood Processing	15 UBJOM Kaltim Teluk Kaltim Teluk OMSBU • UJKT Mengajar UJKT Teaching • Budidaya Ikan Lele Catfish Cultivation • Bank Sampah Bestari Bestari Waste Bank • Kampung STBM STBM Village • Bina Usaha Kripik Spandusa Business Empowerment for Spandusa Chips
4 BPWC CRMU • Kerajinan Eceng Gondok Water Hyacinth Crafts • Biogas Eceng Gondok Water Hyacinth Biogas • TK Elektrika Elektrika Kindergarten • Bioflok Lele Catfish Biofloc • Ekowisata TRIPA Catfish Biofloc	9 UBJOM Tj. Awar-Awar Tj. Awar-Awar OMSBU • Pengolahan Tepung Sukun Breadfruit Flour Processing • Taman Edukasi Berintegrasi Budaya Cultural Integrated Education Park	16 UBJOM Pulang Pisau Pulang Pisau OMSBU • Pelatihan Menjahit Sewing Training • Pelatihan Pembuatan Furniture Furniture Crafting Training
5 UP Cirata Cirata GU • Budidaya Lele Catfish Biofloc • Ternak Kambing Medal Saluyu Medal Saluyu Goat Farm • Bank Sampah Mentari Mentari Waste Bank • UMKM Simping Mekar Rasa Simping Mekar Rasa MSME	10 UP Gresik Gresik GU • Pijar Berjaya • Daun Sustainable Village • Agrowisata Edukasi Coffee Cocoa Center (3C) Coffee-Cocoa Center (3C) Educational Agrotourism	17 UBJOM Tenayan Tenayan OMSBU • Pengembangan Taman Bunga Okura Okura Garden Development • Budidaya Ternak Cacing Muda Small Worm Farming
	11 Kantor Pusat Head Office • ECO Mobile	
	12 UP Paiton Paiton GU • Organic Integrated System • Bank Tanaman Alam Hijau Green Nature Bank • Kampung Setrum Setrum Village • Dewi Harmoni	

Biaya Yang Dikeluarkan Program Cost

PJB mengeluarkan biaya untuk program tanggung jawab sosial terhadap pengembangan sosial dan kemasyarakatan sebesar Rp32,23 miliar yang melingkupi bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya dan keagamaan, serta lingkungan dengan rincian yang diklasifikasikan berdasarkan tipologi sebagai berikut:

PJB incurred a cost of Rp.32.23 billion for corporate social responsibility and social empowerment programs covering education, health, economic, socio-cultural, religious, and environmental aspects with details classified based on typologies as follows:

Tabel Anggaran dan Realisasi Biaya CSR Tahun 2019 (Rp miliar)

Table of Budget and Realization of CSR Costs in 2019 (Rp billion)

No	Tipologi Typology	RKAP 2019 2019 ABOP	Realisasi 2019 2019 Realization	Pencapaian Terhadap RKAP (%) Achievement Toward ABOP (%)
1	Empowerment	13,13	14,79	112,6
2	Capacity Building	13,33	5,92	44,4
3	Infrastruktur	4,63	7,34	158,5
4	Charity	2,99	4,17	139,5
Jumlah Total		34,09	32,23	94,5

Realisasi biaya CSR tahun 2019 mencapai 94,5% dari anggaran yang ditetapkan dalam RKAP 2019. Biaya tersebut telah digunakan untuk melaksanakan program CSR di masing-masing unit PJB sebagai berikut.

The realization of CSR costs in 2019 reached 94.5% of the budget specified in the 2019 ABOP. This cost has been reserved to establish CSR programs in each PJB unit as follows.

Berikut rincian pelaksanaan CSR tahun 2019 untuk masing-masing unit dalam tiap tipologi adalah sebagai berikut:

The following are the details of CSR Programs in 2019 for each unit in each typology.

No	Unit Unit	Realisasi CSR Tahun 2019 (Rp juta) CSR Realization in 2019 (Rp Million)				Total
		Empowerment	Capacity Building	Infrastruktur Infrastructure	Charity	
1.	Kantor Pusat Head Office	2.204	989	872	629	4.694
2.	UP Gresik Gresik GU	2.039	411	988	50	3.488
3.	UP Paiton Paiton GU	2.241	836	398	204	3.679
4.	UP Brantas Brantas GU	486	388	569	214	1.657
5.	UP Muara Karang Muara Karang GU	2.208	222	437	255	3.122
6.	UP Muara Tawar Muara Tawar GU	1.382	451	1.249	688	3.770
7.	UP Cirata Cirata GU	879	389	385	90	1.743
8.	BPWC CRMU	985	331	477	236	2.029
9.	UBJOM Indramayu Indramayu OMSBU	438	214	145	196	993
10.	UBJOM Kaltim Teluk Kaltim Teluk OMSBU	92	153	97	39	381
11.	UBJOM Pacitan Pacitan OMSBU	82	119	316	187	704
12.	UBJOM Paiton 9 Paiton 9 OMSBU	410	52	218	103	783
13.	UBJOM Rembang Rembang OMSBU	321	100	233	310	964

No	Unit Unit	Realisasi CSR Tahun 2019 (Rp juta) CSR Realization in 2019 (Rp Million)				Total
		Empowerment	Capacity Building	Infrastruktur Infrastructure	Charity	
14.	UBJOM Tanjung Awar-awar Tanjung Awar-awar OMSBU	473	122	215	167	977
15.	UBJOM Tenayan Tenayan OMSBU	104	160	0	76	340
16.	UBJOM Arun Arun OMSBU	0	109	79	52	240
17.	UBJOM Pulang Pisau Pulang Pisau OMSBU	46	63	104	114	327
18.	UBJOM Luar Jawa Outside Java OMSBU	403	815	557	563	2.338
Jumlah Total		14.793	5.924	7.339	4.173	32.230

Penghargaan Awards

PJB menerima sejumlah penghargaan dan apresiasi atas program-program CSR yang berhasil dilaksanakan secara berkesinambungan. Penghargaan dan apresiasi yang diterima PJB sepanjang tahun 2019 yaitu:

PJB received some awards and appreciation for CSR programs that were successfully implemented continuously. Awards and appreciation received by PJB in 2019 are as follows.



Tingkat Internasional International Level

Asia Responsible Entrepreneurship Awards (AREA) 2019

PJB menjadi juara untuk kategori Social Empowerment selama tiga tahun berturut-turut
PJB won the Social Empowerment category for three years in a row





Tingkat Nasional National Level



CSR Indonesia Award 2019

PJB kembali meraih penghargaan tanggung jawab sosial perusahaan untuk kategori Didaktika Pratama Unggul sebagai apresiasi atas partisipasi dalam membantu masyarakat di bidang edukasi, melalui TK Elekrika binaan

PJB won back the award on corporate social responsibility in the category of Superior Primary Didactic as an appreciation for participation in helping the community in the field of education, through the fostered Kindergarten, Elekrika Kindergarten



Indonesia Sustainable Development Goals Awards (ISDA) 2019

PJB menerima 11 penghargaan 2 buah Platinum Award, 5 Gold Award, 3 Silver Award, dan 1 gelar terbaik kategori Perorangan tingkat lapangan

PJB received 11 awards 2 pieces Platinum Award, 5 Gold Award, 3 Silver Award, and 1 best degree category Individual in the technical level



PROPER KLHK 2019

The Ministry of Environment and Forestry's PROPER 2019

PROPER Emas UP Paiton dan UP Gresik
Gold PROPER for Paiton GU and Gresik GU

Apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Appreciation from the Ministry of Environment and Forestry (KLHK)

PJB menerima apresiasi atas keberhasilan melakukan evakuasi satwa hiu paus yang terjebak dalam kanal inlet unit 2 PLTU Paiton pada September 2019

PJB received appreciation for the success in evacuating whale sharks trapped in the Paiton CFPP Unit 2 in the inlet channel in September 2019



Tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota Regional Level



Penghargaan Gubernur Jawa Timur
East Java Governor Award



Penghargaan Handep Hapakat dari Bupati Pulang Pisau untuk program CSR terkait pendidikan, peningkatan ketrampilan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur bagi masyarakat sekitar

Handep Hapakat Award from the Pulang Pisau Regent for CSR programs related to education, skills improvement, health, and infrastructure development for the surrounding community



Penghargaan Provinsi Jawa Barat memberikan dua penghargaan atas komitmen PJB dalam bersinergi membangun Provinsi Jawa Barat melalui Program CSR

The West Java Province Award presented two awards for PJB's commitment to the collaboration in developing the West Java Province through its CSR Program



Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan Audit
Audited Financial Statements



Referensi Kriteria ARS
ARS Criteria Reference



Pendahuluan
Introduction



Laporan Manajemen
Management Report



Profil Perusahaan
Company Profile



Tinjauan Pendukung Bisnis
Business Support Review



Analisis dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis

LAPORAN KEUANGAN AUDIT

AUDITED FINANCIAL STATEMENTS



Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan Audit
Audited Financial Statements



Referensi Kriteria ARK
ARK Criteria Reference



PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

**Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018**

***Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018***

**PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Daftar Isi	Halaman/ <u>Pages</u>	Table of Contents
Surat Pernyataan Direksi		Directors' Statement Letter
Laporan Auditor Independen		Independent Auditor's Report
Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018		Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1	<i>Consolidated Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3	<i>Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	5	<i>Consolidated Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	6	<i>Consolidated Statements of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	7	<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>



Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan Audit
Audited Financial Statements



Referensi Kriteria ARA
ARA Criteria Reference



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

**DIRECTOR'S STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY
ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019 AND 2018**

Kami yang bertandatangan dibawah ini/ *We, the undersigned:*

1. Nama/ <i>Name</i> Alamat kantor/ <i>Office address</i> Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/ <i>Domicile as stated in ID Card</i> Nomor telepon/ <i>Phone number</i> Jabatan/ <i>Position</i>	: Iwan Agung Firstantara : PT Pembangkitan Jawa Bali : Jalan Ketintang Baru No.11 Surabaya : Suryodiningratan MJ 2/700 : Mantrijeron, Yogyakarta : (031) 8283180 : Direktur Utama/ : <i>President Director</i>
2. Nama/ <i>Name</i> Alamat kantor/ <i>Office address</i> Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/ <i>Domicile as stated in ID Card</i> Nomor telepon/ <i>Phone number</i> Jabatan/ <i>Position</i>	: Tjutju Kurnia S. : PT Pembangkitan Jawa Bali : Jalan Ketintang Baru No.11 Surabaya : Jl. H. Usman No. 59 RT 002 RW 006 : Kel. Rempoa Kec. Ciputat Timur, Tangerang Selatan : (031) 8283180 : Direktur Keuangan/ : <i>Finance Director</i>

menyatakan bahwa/ *state that:*

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian;	1. <i>We are responsible for the preparation and presentation of the Consolidated Financial Statements;</i>
2. Laporan Keuangan Konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;	2. <i>The Consolidated Financial Statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;</i>
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar;	3. a. <i>All information contained in the Consolidated Financial statements is complete and correct;</i>
b. Laporan Keuangan Konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;	b. <i>The Consolidated Financial Statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information or facts;</i>
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian Intern Perusahaan dan entitas anak.	4. <i>We are responsible for the internal control system of the Company and its subsidiary.</i>

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

The statement letter is made truthfully.

Surabaya, 31 Maret 2020 / March, 31 2020

IWAN AGUNG FIRSTANTARA
Direktur Utama/
President Director

TJUTJU KURNIA S.
Direktur Keuangan/
Finance Director



PT PEMBANGKITAN JAWA - BALI

Jl. Ketintang Baru 11 Surabaya 60231 - Indonesia, Telp : 62-31- 8283180 (hunting) Fax : 62-31 - 8283183 E-mail : info@ptpjb.com website : www.ptpjb.com



Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340
F +62 21 5140 1350

www.rsm.id

Nomor/Number : 00380/2.1030/AU.1/02/0645-1/1/III/2020

Laporan Auditor Independen/ Independent Auditor's Report

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi/
The Shareholders, Board of Commissioners, and Directors

PT Pembangkitan Jawa-Bali

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Pembangkitan Jawa-Bali ("Perusahaan") dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Pembangkitan Jawa-Bali ("the Company") and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2019, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan is a member of the RSM network. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

License: KMK No 477/KM.1/2015
Registered at the Indonesia
Financial Services Authority (OJK)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Pembangkitan Jawa-Bali dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan satu hal

Kami membawa perhatian pada Catatan 38 atas laporan keuangan konsolidasian yang menjelaskan tentang dampak pandemi Covid-19 terhadap bisnis dan operasi PT Pembangkitan Jawa-Bali dan entitas anaknya serta asesmen manajemen bahwa tidak terdapat dampak negatif dalam jangka pendek. Meskipun demikian terdapat ketidakpastian dampak dari situasi ini dalam jangka panjang. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Pembangkitan Jawa-Bali and its subsidiaries as of December 31, 2019, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Emphasis of matter

We draw attention to Note 38 to the consolidated financial statements which describes impact of the Covid-19 pandemic on the business and operations PT Pembangkitan Jawa-Bali and its subsidiaries and the management assessment that there were no negative impacts in the short term. However there is uncertainty in the impact of this situation in the longer term. Our opinion is not modified in respect of this matter.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Dedy Sukrisnadi

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0645/
Public Accountant License Number: AP.0645

Jakarta, 31 Maret / March 31, 2020

**PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2019 Rp	2018 Rp	
ASET				ASSETS
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Aset tetap	6	130,956,129	131,965,057	Property, plant and equipment
Properti investasi	7	1,493,375	1,463,273	Investment properties
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	8	7,880,576	7,445,759	Investments in associate and joint ventures
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	9	94,223	68,297	Restricted cash in bank and time deposit
Aset pajak tangguhan - bersih	30	2,212,070	5,019,595	Deferred tax assets - net
Piutang kepada ventura bersama	10	785,639	827,957	Receivables from joint ventures
Piutang lain-lain		41,955	40,988	Other receivables
Aset tidak lancar lain	11	1,170,704	282,990	Other non-current assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		144,634,671	147,113,916	Total Non-current Assets
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	12	1,838,858	1,688,004	Cash and cash equivalents
Deposito berjangka	13	326,901	1,204,511	Time deposits
Piutang usaha	14			Trade receivables
Pihak berelasi		22,111,180	20,102,799	Related parties
Pihak ketiga		29,498	43,657	Third parties
Piutang lain-lain		362,755	356,827	Other receivables
Persediaan - bersih	15	1,833,195	2,078,944	Inventories - net
Pajak dibayar di muka	16	2,006,508	1,689,076	Prepaid taxes
Biaya dibayar di muka dan uang muka		79,799	113,173	Prepaid expenses and advances
Jumlah Aset Lancar		28,588,694	27,276,991	Total Current Assets
JUMLAH ASET		173,223,365	174,390,907	TOTAL ASSETS

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole



**PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
(Continued)**

December 31, 2019 and 2018

(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2019 Rp	2018 Rp	
EKUITAS DAN LIABILITAS				EQUITY AND LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - nilai nominal				Capital stock - par value of
Rp500 (nilai penuh) per saham				Rp500 (full amount) per share
Modal dasar - 24.000 juta saham				Authorized - 24,000 million shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh				Subscribed and fully paid-up
- 6.000 juta saham	17	3,000,000	3,000,000	- 6,000 million shares
Tambahan modal disetor	18	2,915,205	2,915,205	Additional paid-in capital
Selisih transaksi dengan kepentingan non-pengendali	19	(62,725)	(62,725)	Difference in transaction with non-controlling interest
Saldo laba				Retained earnings
Ditentukan penggunaannya		1,429,875	1,429,875	Appropriated
Tidak ditentukan penggunaannya		30,754,064	33,515,140	Unappropriated
Penghasilan komprehensif lain		125,560,989	126,046,528	Other comprehensive income
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada				Equity attributable to
Pemilik entitas induk		163,597,408	166,844,023	Owners of the parent
Kepentingan non-pengendali	19	175,687	164,664	Non-controlling interests
Jumlah Ekuitas		163,773,095	167,008,687	Total Equity
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	30	44,538	45,275	Deferred tax liabilities - net
Liabilitas kepada pemegang saham	34	1,668,986	209,272	Liability to shareholder
Liabilitas imbalan kerja - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	33	2,680,414	2,265,183	Employee benefits liabilities - net of current maturities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		4,393,938	2,519,730	Total Non-current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang usaha	20			Trade payables
Pihak berelasi		1,290,009	1,592,915	Related parties
Pihak ketiga		2,141,185	1,902,065	Third parties
Utang lain-lain	21	870,744	467,180	Other payables
Utang pajak	22	182,166	289,423	Taxes payable
Biaya masih harus dibayar		399,925	435,114	Accrued expenses
Liabilitas imbalan kerja yang jatuh tempo dalam satu tahun	33	172,303	175,793	Current maturities of employee benefits liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		5,056,332	4,862,490	Total Current Liabilities
JUMLAH EKUITAS DAN LIABILITAS		173,223,365	174,390,907	TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2019 Rp	2018 Rp	
PENDAPATAN USAHA				REVENUES
Penjualan tenaga listrik	23	33,681,317	34,757,316	Sale of electricity
Pendapatan usaha lainnya	24	6,076,633	6,063,710	Other operating revenues
Jumlah Pendapatan Usaha		39,757,950	40,821,026	Total Revenues
BEBAN USAHA				OPERATING EXPENSES
Bahan bakar dan pelumas	25	18,830,297	22,323,942	Fuel and lubricants
Pemeliharaan	27	4,798,897	4,761,927	Maintenance
Penyusutan	6	3,699,338	3,938,110	Depreciation
Kepegawaian	28	1,701,177	1,606,814	Personnel
Pembelian tenaga listrik	26	332,016	--	Purchased electricity
Lain-lain	29	1,701,167	1,703,388	Others
Jumlah Beban Usaha		31,062,892	34,334,181	Total Operating Expenses
LABA USAHA		8,695,058	6,486,845	OPERATING INCOME
Penghasilan keuangan		115,096	65,446	Financial income
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih		(46,799)	37,301	Gain (loss) on foreign exchange - net
Bagian laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama	8	891,393	1,064,508	Share in net income of associate and joint ventures
Lain-lain - bersih		(41,410)	6,584	Others - net
LABA SEBELUM PAJAK		9,613,338	7,660,684	INCOME BEFORE TAX
BEBAN PAJAK	30	(2,950,016)	(1,743,252)	TAX EXPENSE
LABA TAHUN BERJALAN		6,663,322	5,917,432	INCOME FOR THE YEAR

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these
consolidated financial statements as a whole





**PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME**

(Continued)
For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2019 Rp	2018 Rp	
LABA TAHUN BERJALAN		6,663,322	5,917,432	INCOME FOR THE YEAR
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan				Other comprehensive income for the year
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that may be reclassified subsequently to profit or loss:
Bagian penghasilan (beban) komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama	8	(266,053)	247,000	Share of other comprehensive income (expense) from associate and joint ventures
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will not be reclassified to profit or loss:
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	33	(208,812)	194,647	Remeasurement on defined benefit plans
Surplus (defisit) revaluasi aset tetap	6	(74,511)	(29,212,914)	Property, plant and equipment revaluation surplus (deficit)
Manfaat pajak terkait		58,528	7,683,043	Related income tax benefits
		(224,795)	(21,335,224)	
Penghasilan (beban) komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak		(490,848)	(21,088,224)	Other comprehensive income (expenses) for the year after tax
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		6,172,474	(15,170,792)	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
Laba tahun berjalan				Income for the year
diatribusikan kepada:				attributable to:
Pemilik entitas induk		6,645,392	5,904,512	Owners of the parent
Kepentingan non-pengendali		17,930	12,920	Non-controlling interests
LABA TAHUN BERJALAN		6,663,322	5,917,432	INCOME FOR THE YEAR
Jumlah penghasilan komprehensif berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				Total comprehensive income for the year
Pemilik entitas induk		6,159,853	(15,190,703)	attributable to:
Kepentingan non-pengendali		12,621	19,911	Owners of the parent
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		6,172,474	(15,170,792)	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA PER SAHAM DASAR (Dalam Rupiah penuh)	31	1,108	984	BASIC EARNING PER SHARE (In full Rupiah amount)

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY For The Years Ended December 31, 2019 and 2018 (In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ Subscribed and paid-up capital stock	Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital	Saldo laba/Retained earnings		Surplus revaluasi aset tetap/ Property, plant and equipment revaluation surplus	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income		Selisih transaksi non-pengendali/ Difference in transaction with non-controlling interest	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ Equity attributable to the owner of the parent	Kepentingan non-pengendali/ non-controlling interests	Jumlah ekuitas/ Total equity	Balance as of December 31, 2017
			Ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Tidak ditentukan penggunaannya/ Unappropriated		Pengukuran kembali atas program imbalan pasti/ Remeasurement on defined benefit plan	Bagian penghasilan (beban) komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama/ Share of other comprehensive income (expenses) from associate and joint ventures					
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo per 31 Desember 2017	3,000,000	2,915,205	1,429,875	31,279,075	147,288,612	(614,989)	469,826	(62,725)	165,704,679	145,103	165,849,802	
Dividen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Penyerahan saham kepentingan non-pengendali	--	--	--	--	--	--	--	--	(3,668,635)	(350)	(3,668,985)	
Reklasifikasi penyusutan dipercepat aset tetap ke saldo laba	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Reklasifikasi surplus aset tetap ke saldo laba	--	--	--	--	--	--	--	--	(1,518)	--	(1,518)	
Reklasifikasi surplus aset tetap ke saldo laba	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	--	--	--	--	(1,706)	146,701	232,498	--	(15,190,703)	19,911	(15,170,792)	
Saldo per 31 Desember 2018	3,000,000	2,915,205	1,429,875	33,515,140	125,812,492	(468,288)	702,324	(62,725)	166,844,023	164,664	167,008,687	
Dividen	--	--	--	--	--	--	--	--	(9,406,468)	(1,588)	(9,408,056)	
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	--	--	--	--	(74,511)	(151,379)	(259,649)	--	6,159,853	12,621	6,172,474	
Saldo per 31 Desember 2019	3,000,000	2,915,205	1,429,875	30,754,064	125,737,981	(619,667)	442,675	(62,725)	163,597,408	175,687	163,773,095	

Dividends
Additional shares in non-controlling interest
Reclassification of accelerated depreciation of property, plant and equipment to retained earnings
Reclassification of property, plant and equipment revaluation surplus to retained earnings
Total comprehensive income for the year

Balance as of December 31, 2018
Dividends
Total comprehensive income for the year

Balance as of December 31, 2019

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole





**PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2019 Rp	2018 Rp	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	12,743,949	11,355,985	Cash receipts from customers
Pembayaran kas kepada pemasok, karyawan dan lainnya	(11,430,192)	(8,222,738)	Cash paid to suppliers, employees and others
Kas diperoleh dari operasi	1,313,757	3,133,247	Cash provided by operations
Penerimaan bunga	115,096	65,446	Interest received
Pembayaran pajak penghasilan	(233,088)	(449,871)	Income tax paid
Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Operasi	1,195,765	2,748,822	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan dividen dari entitas asosiasi dan ventura bersama	216,678	195,998	Proceeds from dividend of associate and joint ventures
Penempatan investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	(26,291)	(541,141)	Additional of investments in associate and joint ventures
Penempatan pinjaman kepada ventura bersama	--	(822,375)	Placement loan to joint ventures
Penerimaan kembali dari pinjaman ventura bersama	5,582	5,582	Receipt of payments from loan to joint ventures
Penempatan deposito	(14,096)	(902,130)	Placement of time deposits
Penarikan deposito	203,390	--	Withdrawal of time deposits
Penempatan rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	(25,926)	(40,268)	Placement of restricted cash in banks and time deposits
Perolehan aset tetap dan aset tidak lancar lainnya	(2,882,853)	(2,049,559)	Acquisition of property, plant and equipment and other non-current assets
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(2,523,516)	(4,153,893)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan pinjaman pemegang saham	1,482,492	209,912	Proceed of shareholder loan
Pembayaran dividen oleh entitas anak kepada kepentingan non-pengendali	(1,598)	(350)	Payment of dividend by subsidiary to non-controlling interest
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	1,480,894	209,562	Net Cash Provided By (Used In) Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	153,143	(1,195,509)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	1,688,004	2,879,830	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	(2,289)	3,683	Effect of changes in foreign currency
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	1,838,858	1,688,004	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE YEAR

Tambahan informasi aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas disajikan dalam Catatan 39.

Additional information on activities that does not affect the activity of cash flows are presented in Note 39.

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. Umum

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Pembangkitan Jawa-Bali ("Perusahaan") didirikan di Jakarta berdasarkan akta notaris No. 16 tanggal 3 Oktober 1995 dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-12495-HT.01.01.Th.95 tanggal 3 Oktober 1995 serta diumumkan dalam Berita Negara No. 90 tanggal 10 November 1995, Tambahan No. 9299.

Anggaran dasar Perusahaan terakhir diubah berdasarkan akta notaris No. 14 tanggal 13 Oktober 2017 dari Lenny Janis Ishak, S.H., notaris di Jakarta, terkait perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan. Akta perubahan ini telah diterima dan dicatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.03-0180957 tanggal 16 Oktober 2017.

Perusahaan berdomisili di Surabaya dan memiliki unit-unit pelaksana yang berlokasi di Jawa, Kalimantan dan Sumatera. Kantor pusat Perusahaan beralamat di Jl. Ketintang Baru No. 11, Surabaya.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah untuk menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan berdasarkan prinsip industri dan niaga yang sehat yang mencakup aktivitas-aktivitas sebagai berikut:

- a. Penyediaan tenaga listrik yang ekonomis bermutu tinggi dan dengan keandalan yang baik;
- b. Pembangunan dan/ atau pemasangan peralatan ketenagalistrikan;
- c. Pemeliharaan dan/ atau pengoperasian peralatan ketenagalistrikan;
- d. Melakukan usaha yang berkaitan dengan kegiatan Perseroan dalam rangka memanfaatkan secara maksimal potensi yang dimiliki Perseroan.

1. General

a. Establishment and General Information

PT Pembangkitan Jawa-Bali (the "Company") was established in Jakarta based on notarial deed No. 16 dated October 3, 1995 of Mrs. Poerbaningsih Adi Warsito S.H., notary in Jakarta. The deed of establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. C2-12495-HT.01.01.Th.95 dated October 3, 1995 and was published in State Gazette No. 90 dated November 10, 1995, Supplement No. 9299.

The articles of association of the Company were recently amended by notarial deed No. 14 dated October 13, 2017 of Lenny Janis Ishak, S.H., notary in Jakarta, related to changes of Company's Board of Commissioners composition. This change was received and recorded in the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with letter No. AHU-AH.01.03-0180957 dated October 16, 2017.

The Company is domiciled in Surabaya and its business units located in Java, Kalimantan and Sumatera. The Company's head office is located at Jl. Ketintang Baru No. 11, Surabaya.

In accordance with article 3 of the Company's articles of association, the scope of its activities is to engage in electric power industry business, based on the principles of competitive industry and commerce, which consist of the following activities:

- a. Provide cost-efficient and high-quality electric power;
- b. Provide construction and/ or installations of electricity equipment;
- c. Provide maintenance and/ or operation of electricity equipment;
- d. Provide services related to the Company's operations to maximize the potential benefits of its resources.





PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah karyawan Perusahaan dan entitas anak masing-masing sebanyak 9.639 karyawan (tidak diaudit) dan 9.854 karyawan (tidak diaudit).

As of December 31, 2019 and 2018, the Company and its subsidiaries had total number of employees of 9,639 (unaudited) and 9,854 (unaudited), respectively.

b. Susunan Pengurus dan Informasi Lain Susunan Dewan Komisaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

b. Management and Other Information The composition of the Company's Board of Commissioners as of December 31, 2019 and 2018 are as follows:

	2019	2018	
Komisaris Utama	Sriyono D. Siswoyo	Sriyono D. Siswoyo	President Commissioner
Komisaris	Defy Indiyanto Budiyo	Defy Indiyanto Budiyo	Commissioners
Komisaris	Sunarsip	Sunarsip	Commissioners
Komisaris	-	Alihudin Sitompul	Commissioners
Plt Komisaris	Benny MM Marbun	Benny MM Marbun	Acting as Commissioners
Plt Komisaris	Hendra Iswahyudi	Hendra Iswahyudi	Acting as Commissioners
Plt Komisaris	Jisman Hutajulu*)	-	Acting as Commissioners

*) Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Secara Sirkuler tanggal 11 Maret 2019.

*) Based on decision of the shareholders at the Circular General Shareholders Meeting of the Company dated March 11, 2019.

Susunan Direksi pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's Board of Directors as of December 31, 2019 and 2018 are as follows:

Direktur Utama	Iwan Agung Firsiantara	President Director
Direktur Operasi 1	Sugiyanto	Director of Operation 1
Direktur Operasi 2	Miftahul Jannah	Director of Operation 2
Direktur Sumber Daya Manusia dan Administrasi	Suharto	Director of Human Resources and Administration
Direktur Pengembangan dan Niaga	Henky Heru Basudewo	Director of Development and Commerce
Direktur Keuangan	Tjutju Kurnia Sutjningsih	Director of Finance

Susunan Komite Audit pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's Audit Committee as of December 31, 2019 and 2018 are as follows:

Ketua	Sunarsip	Chairman
Wakil Ketua	Defy Indiyanto Budiarto	Vice Chairman
Sekretaris/ Anggota	Sigit Djalu Prakoso	Secretary/ Members
Anggota	Andar Sudiar Sukma	Members

2. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") Baru dan Revisi, serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK")

Pengesahan amandemen dan penyesuaian atas PSAK dan ISAK yang telah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI"), berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019, adalah sebagai berikut:

2. New and Revised Statements of Financial Accounting Standard ("SFAS") and Interpretation of Statement of Financial Accounting Standards ("ISFAS")

Ratification of amendments and improvements of SFAS and ISFAS issued by the Financial Accounting Standard Board of the Indonesian Institute of Accounting ("DSAK-IAI"), effective for the year beginning on January 1, 2019, are as follows:

**PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

- PSAK 22 (Penyesuaian 2018): Kombinasi Bisnis;
- PSAK 24 (Amandemen 2018): Imbalan Kerja tentang Amandemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program;
- PSAK 26 (Penyesuaian 2018): Biaya Pinjaman;
- PSAK 46 (Penyesuaian 2018): Pajak Penghasilan;
- PSAK 66 (Penyesuaian 2018): Pengaturan Bersama;
- ISAK 33: Transaksi Valuta Asing dan Imbalan Dimuka;
- ISAK 34: Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan.

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

Standar dan amandemen standar berikut berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020, dengan penerapan ini diperkenankan yaitu:

- PSAK 15 (Amandemen 2017): Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama;
- PSAK 62 (Amandemen 2017): Kontrak Asuransi - Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi;
- PSAK 71: Instrumen Keuangan;
- PSAK 71 (Amandemen 2018): Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif;
- PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan;
- PSAK 73: Sewa;
- PSAK 1 (Amandemen 2019): "Penyajian Laporan Keuangan tentang Judul Laporan Keuangan";
- PSAK 1 (Penyesuaian Tahunan 2019): "Penyajian Laporan Keuangan";

Standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021, dengan penerapan ini diperkenankan yaitu:

- PSAK 112: Akuntansi Wakaf.

- SFAS 22 (Improvement 2018): Business Combination;
- SFAS 24 (Amendment 2018): Employee Benefit regarding Plan Amendment, Curtailment or Settlement;
- SFAS 26 (Improvement 2018): Borrowing Cost;
- SFAS 46 (Improvement 2018): Income Tax;
- SFAS 66 (Improvement 2018): Joint Arrangement;
- ISFAS 33 : Foreign Currency Transactions and Advance Consideration;
- ISFAS 34: Uncertainty Over Income Tax Treatments.

The implementation of the above standards had no significant effect on the amounts reported for the current period or prior financial year.

Standards and amendment to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2020, with early adoption is permitted, are as follows:

- SFAS 15 (Amendment 2017): Investments in Associates and Joint Ventures: Long-term Interest in Associate and Joint Ventures;
- SFAS 62 (Amendment 2017): Insurance Contract - Applying SFAS 71: Financial Instruments with SFAS 62: Insurance Contracts;
- SFAS 71: Financial Instruments;
- SFAS 71 (Amendment 2018): Financial Instruments: Prepayment Features with Negative Compensation;
- SFAS 72: Revenue from Contracts with Customers;
- SFAS 73: Leases;
- SFAS 1 (Amendment 2019): "Presentation of Financial Statements regarding Title of Financial Statements";
- SFAS 1 (Improvement 2019): "Presentation of Financial Statements";

Standard effective for periods beginning on or after January 1, 2021, with early application is permitted are:

- SFAS 112: Wakaf Accounting.



PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pada saat penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan dan entitas anak masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amandemen standar, dan interpretasi atas standar serta pengaruhnya pada laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak.

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

As of the authorization date of these consolidated financial statements, the Company and its subsidiaries are still evaluating the potential impact of these new standards, amendments, and interpretations of standards to the Company and its subsidiaries' consolidated financial statements.

3. Kebijakan Akuntansi Penting

a. Pernyataan Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan ("SAK")

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang meliputi PSAK dan ISAK yang diterbitkan oleh DSAK-IAI.

b. Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian adalah dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah ("Rp"), yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan entitas anak. Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha dan dengan pengukuran nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

c. Dasar Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan Perusahaan dan entitas anak (termasuk entitas bertujuan khusus) yang dikendalikan oleh Perusahaan atau entitas anak. Pengendalian dianggap ada ketika Perusahaan memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan suatu entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut.

3. Significant Accounting Policies

a. Compliance with the Financial Accounting Standards ("FAS")

The financial statements were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include SFAS and ISFAS issued by the DSAK – IAI.

b. Basis of Preparation

The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, are prepared on the accrual basis of accounting. The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is the Indonesian Rupiah ("Rp"), which is also the functional currency of the Company and its subsidiaries. The preparation and presentation of the consolidated financial statements are based on going concern assumption and measurement basis is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

c. Basis of Consolidation

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and its subsidiaries (including special purpose entities) controlled by the Company or its subsidiaries. Control is achieved when the Company is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity.

**PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Hasil entitas anak yang diakuisisi atau dijual selama periode berjalan termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sejak tanggal efektif akuisisi dan sampai dengan tanggal efektif penjualan.

Jika diperlukan, penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi yang digunakan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Perusahaan.

Seluruh transaksi antar perusahaan, saldo, penghasilan dan beban dieliminasi pada saat konsolidasi.

Perubahan dalam bagian kepemilikan Perusahaan dan entitas anak pada entitas anak masing-masing yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Nilai tercatat kepentingan Perusahaan dan entitas anak dan kepentingan non-pengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan bagian kepemilikannya atas entitas anak. Setiap perbedaan antara jumlah kepentingan non-pengendali disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diberikan atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik Perusahaan.

Jika Perusahaan kehilangan pengendalian atas entitas anak, maka Perusahaan:

- (a) Menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;
- (b) Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan non-pengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan non-pengendali);
- (c) Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima, jika ada, dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;

The results of subsidiaries acquired or disposed of during the period are included in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income from the effective date of acquisition or up to the effective date of disposal, as appropriate.

When necessary, adjustments are made to the financial statements of the subsidiaries to bring the accounting policies used in line with those used by the Company.

All intra-group transactions, balances, income and expenses are eliminated on consolidation.

Changes in the Company's and its subsidiaries' interests in the respective subsidiaries that do not result in a loss of control are accounted for as equity transactions. The carrying amount of the Company and its subsidiaries' interest and the non-controlling interests are adjusted to reflect the changes in their relative interests in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to the owners of the Company.

If the Company loses control over the subsidiary, the Company:

- (a) *Derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts at the date when control ceases;*
- (b) *Derecognizes the carrying amounts of any non-controlling interests in the former subsidiary at the date when control ceases (including any components of other comprehensive income attributable to them);*
- (c) *Recognizes the fair value of the consideration received, if any, from the transaction, event or circumstance that resulted in the cessation of control;*



Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan Audit
Audited Financial Statements



Referensi Kriteria AR
AR Criteria Reference



PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

- (d) Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
- (e) Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak;
- (f) Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

d. Kombinasi Bisnis

Kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain dimana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh Perusahaan dan entitas anak, liabilitas yang diakui oleh Perusahaan dan entitas anak kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan dan entitas anak dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui di dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih diakui pada nilai wajar kecuali untuk aset dan liabilitas tertentu yang diukur sesuai dengan standar yang relevan.

Kepentingan non-pengendali yang menyajikan bagian kepemilikan dan memberikan mereka hak atas bagian proposional dari aset neto entitas dalam hal terjadi likuidasi pada awalnya diukur baik pada nilai wajar ataupun pada bagian proporsional kepemilikan kepentingan non-pengendali atas aset neto teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi. Pilihan dasar pengukuran dilakukan atas dasar transaksi. Kepentingan

- (d) Recognizes any investment retained in the former subsidiary at its fair value at the date when control ceases;
- (e) Reclassifies to profit or loss, or directly transfer to retained earnings if required by other Financial Accounting Standards, the amounts recognized in other comprehensive income in relation to the former subsidiary;
- (f) Recognizes any resulting difference as a gain or loss attributable to the owners of the parent.

d. Business Combinations

Business combination is a transaction or other events in which an acquirer obtains control of one or more businesses. Business combination is accounted for using the acquisition method. The consideration transferred in a business combination is measured at fair value, which is calculated as the sum of the acquisition-date fair values of the assets transferred by the Company and its subsidiaries, liabilities incurred by the Company and its subsidiaries to the former owners of the acquiree and the equity interests issued by the Company and its subsidiaries in exchange for control of the acquiree. Acquisition-related costs are recognized in profit or loss as incurred.

At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are recognized at their fair value except for certain assets and liabilities that are measured in accordance with the relevant standards.

Non-controlling interests that are present ownership interests and entitles their holders to a proportionate share of the entity's net assets in the event of liquidation may be initially measured either at fair value or at the non-controlling interests' proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. The choice of measurement basis is made on a transaction-by-transaction basis. Other types of non-controlling interests are

**PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

non-pengendali jenis lain diukur pada nilai wajar atau, jika berlaku, pada dasar pengukuran lain yang ditentukan oleh standar akuntansi lain.

Bila imbalan yang dialihkan oleh Perusahaan dan entitas anak dalam suatu kombinasi bisnis termasuk aset atau liabilitas yang berasal dari pengaturan imbalan kontingen (*contingent consideration arrangement*), imbalan kontingen tersebut diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan termasuk sebagai bagian dari imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis. Perubahan dalam nilai wajar atas imbalan kontingen yang memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran disesuaikan secara retrospektif, dengan penyesuaian terkait terhadap *goodwill*. Penyesuaian periode pengukuran adalah penyesuaian yang berasal dari informasi tambahan yang diperoleh selama periode pengukuran (yang tidak melebihi satu tahun sejak tanggal akuisisi) tentang fakta-fakta dan kondisi yang ada pada tanggal akuisisi.

Perubahan selanjutnya dalam nilai wajar atas imbalan kontingen yang tidak memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran tergantung pada bagaimana imbalan kontingen tersebut diklasifikasikan. Imbalan kontingen yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali pada tanggal sesudah tanggal pelaporan dan penyelesaian selanjutnya dicatat dalam ekuitas. Imbalan kontingen yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas diukur kembali setelah tanggal pelaporan sesuai dengan standar akuntansi yang relevan, dengan diakui keuntungan atau kerugian terkait dalam laba rugi atau dalam penghasilan komprehensif lain.

Bila suatu kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, kepemilikan terdahulu Perusahaan dan entitas anak atas pihak terakuisisi diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal akuisisi dan keuntungan atau kerugiannya, jika ada, diakui di dalam laba rugi. Jumlah yang berasal dari kepemilikan sebelum tanggal akuisisi yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba

measured at fair value or, when applicable, on the basis specified in another accounting standard.

When the consideration transferred by the Company and its subsidiaries in a business combination includes assets or liabilities resulting from a contingent consideration arrangement, the contingent consideration is measured at its acquisition-date fair value and included as part of the consideration transferred in a business combination. Changes in the fair value of the contingent consideration that qualify as measurement period adjustments are adjusted retrospectively, with corresponding adjustments against goodwill. Measurement period adjustments are adjustments that arise from additional information obtained during the measurement period (which cannot exceed one year from the acquisition date) about facts and circumstances that existed at the acquisition date.

The subsequent accounting for changes in the fair value of the contingent consideration that do not qualify as measurement period adjustments depends on how the contingent consideration is classified. A contingent consideration that is classified as equity is not remeasured at subsequent reporting dates and its subsequent settlement is accounted for within equity. A contingent consideration that is classified as an asset or liability is remeasured subsequent to the reporting dates in accordance with the relevant accounting standards, as appropriate, with the corresponding gain or loss being recognized in profit or loss or in other comprehensive income.

When a business combination is achieved in stages, the Company and its subsidiaries' previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date and the resulting gain or loss, if any, is recognized in profit or loss. Amounts arising from interests in the acquiree prior to the acquisition date that have previously been recognized in other comprehensive income are



Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan Audit
Audited Financial Statements



Referensi Kriteria AR
ARA Criteria Reference



PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

rugi dimana perlakuan tersebut akan sesuai ketika kepemilikannya dilepas/dijual.

reclassified to profit or loss where such treatment would be appropriate when those interests were disposed of.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Perusahaan dan entitas anak melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran, pihak pengakuisisi menyesuaikan, aset atau liabilitas tambahan yang diakui, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berdampak pada jumlah yang diakui pada tanggal tersebut.

If the initial accounting for a business combination is incompleted by the end of the reporting period in which the combination occurs, the Company and its subsidiaries report provisional amounts for the items for which the accounting is incompleted. Those provisional amounts are adjusted during the measurement period, or additional assets or liabilities are recognized, to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date that, if known, would have affected the amount recognized as of that date.

e. Penjabaran Mata Uang Asing

Pembukuan Perusahaan dan entitas anak, diselenggarakan dalam mata uang Rupiah, mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsionalnya). Transaksi-transaksi selama periode berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal pelaporan, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi komprehensif, kecuali selisih kurs mata uang asing yang dikapitalisasi sebagai biaya pinjaman.

e. Foreign Currency Transactions

The accounts of the Company and its subsidiaries, are maintained in Indonesian Rupiah, the currency of the primary economic environment in which the entity operates (its functional currency). Transactions during the period involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the rates of exchange prevailing at that date. The resulting gains or losses are credited or charged to profit or loss, except those foreign exchange differences which are capitalized as borrowing costs.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, kurs konversi yang digunakan Perusahaan dan entitas anak untuk mata uang Dolar Amerika Serikat adalah masing-masing Rp13.901 dan Rp14.481.

The conversion rates used by the Company and its subsidiaries on December 31, 2019 and 2018 for United States Dollar are Rp13,901 and Rp14,481, respectively.

f. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan dan entitas anak (entitas pelapor):

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;

f. Transactions with Related Parties

A related party is a person or entity that is related to the Company and its subsidiaries (the reporting entity):

- a. *A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:*
 - i. *Has control or joint control over the reporting entity;*

**PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- ii. Memiliki pengaruh signifikan atas pelapor atau entitas pelapor; atau
 - iii. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
- i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain).
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a); atau
 - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

- ii. Has significant influence over the reporting entity; or
 - iii. Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- b. An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:
- i. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
 - ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
 - iii. Both entities are joint ventures of the same third party.
 - iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
 - v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
 - vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a); or
 - vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).



Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan Audit
Audited Financial Statements



Referensi Kriteria ARK
ARK Criteria Reference



PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

viii. Entities, or members of the Company to which the entity is part of the Company, providing services to the entity's key management personnel or to the parent entity of the reporting entity.

Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

A government related entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by a government. Government refers to government, government agencies and similar bodies whether local, national or international.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan Pemegang Saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagai kuasa pemegang saham.

Government related entity can be an entity which is controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance being the shareholders of the entity or an entity controlled by the Government of Republic of Indonesia, represented by the Ministry of State Owned Enterprise as shareholder's representative.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes.

g. Aset Keuangan Pengakuan dan Pengukuran Awal

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

g. Financial Assets Initial Recognition and Measurement

All financial assets are recognized and derecognized on the trade date where the purchase or sale of a financial asset is under a contract whose terms require delivery of the financial asset within the time frame established by the market concerned and are initially measured at fair value plus transaction costs, except for those financial assets classified as a fair value through profit or loss, which are initially measured at fair value.

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Aset keuangan Perusahaan dan entitas anak diklasifikasikan sebagai berikut: aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, dan yang tersedia untuk dijual.

Subsequent Measurement of Financial Assets

The Company and its subsidiaries' financial assets are classified into the following specified categories: financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, and available-for-sale.

**PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

i. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi ("FVTPL")

Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

ii. Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- (a) pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- (b) pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual;
- (c) atau pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman.

Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

i. Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss ("FVTPL")

Financial assets at FVTPL are financial assets held for trading or upon initial recognition it is designated as at fair value through profit or loss. Financial asset classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling and repurchasing it in the near term, or it is a part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is a designated and effective hedging instrument.

After initial recognition, financial assets at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value of financial assets are recognized in profit or loss.

ii. Loans and Receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than:

- (a) those that intends to sell immediately or in the near term and upon initial recognition designated as at fair value through profit or loss;
- (b) those that upon initial recognition designated as available for sale;
- (c) or those for which the holder may not recover substantially all of its initial investment, other than because of credit deterioration.

After initial recognition, loans and receivables are measured at amortized cost using the effective interest method.



PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

iii. Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual ("AFS")

AFS aset keuangan adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan baik sebagai AFS atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan pada FVTPL.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut diukur sebesar nilai wajar, dimana keuntungan atau kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Perusahaan mengukur nilai wajar instrumen ekuitas yang tidak tercatat di pasar aktif dengan menggunakan teknik penilaian berdasarkan asumsi yang wajar. Dalam keadaan tertentu dimana kisaran estimasi nilai wajar yang realistis cukup signifikan dan probabilitas berbagai estimasi tidak dapat dinilai secara wajar, maka Perusahaan mengukur nilai wajar instrumen AFS tersebut pada biaya perolehan dikurangi penurunan nilai.

Dividen atas instrumen ekuitas AFS, jika ada, diakui pada laba rugi pada saat hak Perusahaan dan entitas anak untuk memperoleh pembayaran dividen ditetapkan.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain

iii. Available-for-Sale Financial Assets ("AFS")

AFS financial assets are non-derivative financial assets that are either designated as AFS or are not classified as loans and receivables, held to maturity investments or financial assets at FVTPL.

On subsequent measurement, the AFS are carried at fair value, with gains or losses recognized in other comprehensive income, except for impairment losses and foreign exchange gain and losses, until they are derecognized. At that time, the cumulative gain or losses previously recognized in other comprehensive income shall be reclassified from equity to profit or loss as reclassification adjustment.

The Company measures the fair value of non-listed equity instruments by applying valuation techniques based on reasonable assumptions. In the limited case where the range of reasonable fair value measurements is significantly wide and the probabilities of the various estimates cannot be reasonably assessed, the Company records such AFS instruments at cost less impairment.

Dividends on AFS equity instruments, if any, are recognized in profit or loss when the Company and its subsidiaries' rights to receive the dividends are established.

Effective Interest Method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial instrument and of allocating interest income over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts (including all fees and other forms paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts)

**PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium atau diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Aset keuangan dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Untuk investasi ekuitas AFS yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan yang signifikan atau jangka panjang pada nilai wajar dari investasi ekuitas di bawah biaya perolehannya dianggap sebagai bukti objektif penurunan nilai.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti objektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- i. kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- ii. pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- iii. terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.
- iv. Terdapat data yang dapat diobservasi yang mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset, seperti memburuknya status pembayaran pihak peminjam atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan gagal bayar.

through the expected life of the financial instrument, or, where appropriate, a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Income is recognized on an effective interest basis for financial instruments.

Impairment of Financial Assets

Financial assets are assessed for indicators of impairment at each reporting date. Financial assets are impaired where there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset, the estimated future cash flows of the investment have been impacted.

For listed and unlisted equity investments classified as AFS, a significant or prolonged decline in the fair value of the security below its cost is considered to be objective evidence of impairment.

For all other financial assets, objective evidence of impairment could include:

- i. significant financial difficulty of the issuer or counterparty; or*
- ii. breach of contract, such as default or delinquency in interest or principal payments; or*
- iii. it becomes probable that the borrower will enter bankruptcy or financial re-organisation.*
- iv. Observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a group of financial assets since the initial recognition, such as adverse changes in the payment status of borrowers or economic condition that correlate with defaults.*



PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, aset yang dinilai tidak akan diturunkan secara individual tetapi penurunan secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Perusahaan dan entitas anak atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan default atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Perubahan nilai tercatat akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang diakui dalam laba rugi.

Jika aset keuangan AFS dianggap menurun nilainya, keuntungan kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas dicatat ke laba rugi.

Pengecualian dari instrumen ekuitas AFS, jika, pada periode berikutnya, jumlah penurunan nilai berkurang dan penurunan dapat dikaitkan secara objektif dengan sebuah peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan melalui laba rugi hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai tidak melebihi biaya

For certain categories of financial asset, such as receivables, assets that are assessed not to be impaired individually are, in addition, assessed for impairment on a collective basis. Objective evidence of impairment for a portfolio of receivables could include the Company and its subsidiaries past experiences of collecting payments, an increase in the number of delayed payments in the portfolio past the average credit period, as well as observable changes in national or local economic conditions that correlate with default on receivables.

For financial assets carried at amortised cost, the amount of the impairment is the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the financial asset's original effective interest rate.

The carrying amount of the financial asset is reduced by the impairment loss directly for all financial assets with the exception of receivables, where the carrying amount is reduced through the use of an allowance account. When a receivable is considered uncollectible, it is written off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the allowance account. Changes in the carrying amount of the allowance account are recognized in profit or loss.

When an AFS financial asset is considered to be impaired, cumulative gains previously recognized in equity are recognized in profit or loss.

With the exception of AFS equity instruments, if, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed through profit or loss to the extent that the carrying amount of the investment at the date the impairment is reversed does not

**PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

Dalam hal efek ekuitas AFS, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam laba rugi tidak boleh dipulihkan melalui laba rugi. Setiap kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui secara langsung ke penghasilan komprehensif lain.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Perusahaan dan entitas anak menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Perusahaan dan entitas anak mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Perusahaan dan entitas anak tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Perusahaan dan entitas anak mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Perusahaan dan entitas anak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Perusahaan dan entitas anak masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Saat penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas diakui dalam laba rugi.

Saat penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika Perusahaan dan entitas anak masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer), Perusahaan dan entitas anak mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut

exceed what the amortised cost would have been had the impairment not been recognized.

In respect of AFS equity investments, impairment losses previously recognized in profit or loss are not reversed through profit or loss. Any increase in fair value subsequent to an impairment loss is recognized directly in other comprehensive income.

Derecognition of Financial Assets

The Company and its subsidiaries derecognize a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when they transfer the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Company and its subsidiaries neither transfer nor retain substantially all the risks and rewards of ownership and continue to control the transferred asset, the Company and its subsidiaries recognize their retained interest in the asset and an associated liability for amounts they may have to pay. If the Company and its subsidiaries retain substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Company and its subsidiaries continue to recognize the financial asset and also recognize a collateralized borrowing for the proceeds received.

On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the assets carrying amount and the sum of the consideration received and receivable and the cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income and accumulated in equity is recognized in profit or loss.

On derecognition of a financial asset other than in its entirety (e.g., when the Company and its subsidiaries retain an option to repurchase part of a transferred asset), the Company and its subsidiaries allocate the previous carrying amount of the financial asset between the part they continue to recognize under continuing



PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.

Reklasifikasi

Perusahaan dan entitas anak tidak mereklasifikasi instrumen derivatif dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selama derivatif tersebut dimiliki atau diterbitkan dan tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur melalui laba rugi jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Perusahaan dan entitas anak sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Perusahaan dan entitas anak dapat mereklasifikasi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika aset keuangan tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset keuangan tersebut dalam waktu dekat. Perusahaan dan entitas anak tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal.

Jika, karena perubahan intensi atau kemampuan Perusahaan dan entitas anak, instrumen tersebut tidak tepat lagi diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, maka investasi tersebut direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual dan diukur kembali pada nilai wajar. Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi atas investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan, maka sisa investasi dimiliki hingga jatuh tempo

involvement and the part they no longer recognize on the basis of the relative fair values of those parts on the date of the transfer. The difference between the carrying amount allocated to the part that is no longer recognized and the sum of the consideration received for the part no longer recognized and any cumulative gain or loss allocated to it that had been recognized in other comprehensive income is recognized in profit or loss. A cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income is allocated between the part that continues to be recognized and the part that is no longer recognized on the basis of the relative fair values of those parts.

Reclassification

The Company and its subsidiaries shall not reclassify a derivative instrument out of the fair value through profit or loss category while it is held or issued and not reclassify any financial instrument out of the fair value through profit or loss category if upon initial recognition it was designated by the Company and its subsidiaries as at fair value through profit or loss. The Company and its subsidiaries may reclassify the financial asset out of the fair value through profit or loss category if it is no longer held for the purpose of selling or repurchasing it in the near term. The Company and its subsidiaries shall not reclassify any financial instrument into the fair value through profit or loss category after initial recognition.

If, as a result of a change in the Company and its subsidiaries' intention or ability, it is no longer appropriate to classify an investment as held-to-maturity investments, it shall be reclassified to available-for-sale investments and remeasured at fair value. Whenever sales or reclassification of more than insignificant amount of held-to-maturity investments, any remaining held-to-maturity investments shall be reclassified as available for sale, other than sale or reclassification that are

**PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual, kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali, terjadi setelah seluruh jumlah pokok telah diperoleh secara substansial sesuai jadwal pembayaran atau telah diperoleh pelunasan dipercepat; atau terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar.

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengukuran dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

- (i) Harga kuotasi (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1);
- (ii) Input selain harga kuotasi yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2);
- (iii) Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Perusahaan dan entitas anak sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Perusahaan dan entitas anak menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

so close to maturity or the financial asset's call date, occur after all the financial asset's original principal has been collected substantially through scheduled payments or prepayments, or are attributable to an isolated event that is beyond control, non-recurring, and could not have been reasonably anticipated.

Fair Value Measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The fair value of financial assets and financial liabilities is estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

Fair values are categorized into different levels in a fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the measurement are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety:

- (i) Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date (Level 1);
- (ii) Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly (Level 2);
- (iii) Unobservable inputs for the assets or liabilities (Level 3).

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Company and its subsidiaries use market observable data to the extent possible. If the fair value of an asset or a liability is not directly observable, the Company and its subsidiaries use valuation techniques that are appropriate in the circumstances and maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.



PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Perpindahan antara level hirarki nilai wajar diakui oleh Perusahaan dan entitas anak pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

Transfers between levels of the fair value hierarchy are recognized by the Company and its subsidiaries at the end of the reporting period during which the change occurred.

h. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Klasifikasi Sebagai Liabilitas atau Ekuitas
Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan dan entitas anak diklasifikasikan sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

h. Financial Liabilities and Equity Instruments

Classification as Liabilities or Equity
Financial liabilities and equity instruments issued by the Company and its subsidiaries are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Perusahaan dan entitas anak setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Equity Instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of the Company and its subsidiaries after deducting all of its liabilities. Equity instruments are recorded as the proceeds received, net of direct issue costs.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dengan beban bunga diakui berdasarkan metode suku bunga efektif.

Financial Liabilities

Financial liabilities are initially recognized at fair value, net of transaction costs and are subsequently measured at amortized cost, using the effective interest rate method, with interest expense recognized on an effective interest rate.

Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Perusahaan dan entitas anak menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Perusahaan dan entitas anak telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

Derecognition of Financial Liabilities

The Company and its subsidiaries derecognize financial liabilities, if and only if the Company's and its subsidiaries obligations are discharged, cancelled or expires. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable is recognized in profit or loss.

i. Saling Hapus antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan Perusahaan dan entitas anak saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika:

- saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan

i. Netting of Financial Assets and Financial Liabilities

The Company and its subsidiaries only offset financial assets and liabilities and present the net amount in the statement of financial position where they:

- currently have a legal enforceable right to set off the recognized amount; and

**PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

- berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

j. Aset Tetap - Pemilikan Langsung

Pada tanggal 31 Desember 2015, Perusahaan dan entitas anak melakukan perubahan kebijakan akuntansi atas kelas-kelas aset berikut ini dari model biaya menjadi model revaluasi:

- Tanah;
- Bangunan umum, waduk dan prasarana;
- Instalasi dan mesin pembangkit;
- Perlengkapan transmisi;
- Perlengkapan distribusi;
- Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik;
- Material cadangan utama.

Perubahan kebijakan akuntansi tersebut diterapkan secara prospektif sesuai dengan PSAK 25 (Revisi 2015).

Kelas aset di atas, disajikan sebesar nilai wajar, dikurangi penyusutan dan penurunan nilai. Tanah tidak disusutkan. Penilaian terhadap aset-aset tersebut dilakukan oleh penilai independen eksternal yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai tercatatnya. Akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi dieliminasi terhadap nilai tercatat bruto aset, dan nilai netonya disajikan kembali sebesar nilai revaluasi aset tetap.

Aset tetap lainnya disajikan sebesar harga perolehan dikurangi dengan penyusutan dan kerugian penurunan nilai. Harga perolehan termasuk pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset tersebut.

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi aset tetap yang menggunakan model revaluasi dikreditkan pada "surplus revaluasi aset" sebagai bagian dari

- intend either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

j. Property, Plant and Equipment - Direct Acquisitions

On December 31, 2015, the Company and its subsidiaries changed their accounting policy for the following classes of assets from the cost model to the revaluation model:

- Land;
- Buildings, reservoir and infrastructure;
- Installations and power plant;
- Transmission equipment;
- Distribution equipment;
- Telecommunication and data processing equipment used for electricity supply;
- Major spare parts.

That change in accounting policy is applied prospectively in accordance with SFAS 25 (Revised 2015).

The classes of asset above, are shown at fair value less subsequent depreciation and impairment losses. Land is not depreciated. Valuation of those assets is performed by external independent valuers which are registered with the Financial Services Authority ("FSA"). Valuations are performed with sufficient regularity to ensure that the fair value of a revalued asset does not differ materially from its carrying amount. Any accumulated depreciation at the date of revaluation is eliminated against the gross carrying amount of the asset and the net amount is restated to the revalued amount of the property, plant and equipment.

All other property, plant and equipment are stated at historical cost less depreciation and impairment losses. Historical cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the items.

Increases in the carrying amount arising on revaluation of property, plant and equipment that use revaluation model are credited to "asset revaluation surplus" as



PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

penghasilan komprehensif lainnya. Penurunan yang menghapus nilai kenaikan sebelumnya atas aset yang sama dibebankan terhadap "surplus revaluasi aset" sebagai bagian dari penghasilan komprehensif; penurunan lainnya dibebankan pada laba rugi.

part of other comprehensive income. Decreases that offset previous increases of the same asset are debited against "asset revaluation surplus" as part of other comprehensive income; all other decreases are charged to profit or loss.

Biaya awal untuk mendapatkan hak atas tanah diakui sebagai bagian biaya akuisisi tanah, biaya-biaya tersebut tidak disusutkan. Aset, kecuali tanah, disusutkan hingga mencapai estimasi nilai sisa dengan menggunakan metode garis lurus hingga mencapai estimasi nilai sisa selama masa manfaatnya sebagai berikut:

Initial costs incurred to obtain land are recognized as part of the acquisition cost of the land and these costs are not depreciated. Assets, except land, are depreciated to their residual value using the straight-line method to their residual values over their expected useful lives as follows:

	(Tahun/ Years)	
Bangunan umum, waduk dan prasarana	10 - 50	Buildings, reservoir and infrastructure
Instalasi dan mesin pembangkit	12 - 40	Installations and power plant
Perlengkapan transmisi dan distribusi	40	Transmission and distribution equipment
Perlengkapan pengolahan data		Telecommunication and data
dan telekomunikasi	10	processing equipment
Perlengkapan umum	5	General equipment
Kendaraan bermotor	5	Motor vehicles

Masa manfaat ekonomis, nilai sisa dan metode penyusutan dievaluasi setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each year end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

The costs of maintenance and repairs are charged to profit or loss as incurred. Other costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service an item of property, plant and equipment, are recognized as assets if and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual nilai tercatatnya dikeluarkan dari kelompok aset tetap. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laba rugi.

When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values are removed from the accounts. Any resulting gain or loss is reflected in profit or loss.

Aset yang untuk sementara waktu tidak digunakan dalam operasi dicatat sebagai bagian dari aset tetap. Aset yang sementara waktu tidak digunakan dalam

Assets that are temporarily not used in operations are recorded as part of property, plant and equipment. Assets not used in operations are depreciated using

**PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

operasi disusutkan dengan metode dan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset tetap.

the same method and based on the economic useful lives of the property, plant and equipment.

k. Pekerjaan dalam Pelaksanaan

Pekerjaan dalam pelaksanaan merupakan biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan pembangunan aset tetap. Pekerjaan dalam pelaksanaan dinyatakan sebesar biaya perolehan, termasuk biaya pinjaman selama masa pembangunan dari pinjaman yang digunakan untuk pembangunan, beban penyusutan aset tetap yang digunakan dalam pekerjaan pembangunan dan biaya pengujian ketika aset dapat berfungsi setelah dikurangi penjualan listrik ketika masa uji coba. Pekerjaan dalam pelaksanaan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

k. Construction in Progress

Construction in progress represents costs directly related to the construction of property, plant and equipment. Construction in progress is stated at cost, which includes borrowing costs during construction on debts incurred to finance the construction, depreciation of property and equipment that were used in the construction and cost of testing whether the asset is functioning properly after deducting sales of electricity during commissioning period. Construction in progress is transferred to the respective property, plant and equipment account when completed and ready for use.

l. Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan

Aset yang diamortisasi atau disusutkan dikaji untuk penurunan nilai jika terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat kemungkinan tidak dapat dipulihkan. Kerugian penurunan nilai diakui sebesar kelebihan jumlah tercatat aset atas jumlah terpulihkannya. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Dalam rangka menguji penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah (unit penghasil kas). Aset non-keuangan yang mengalami penurunan nilai, ditelaah untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pembalikan penurunan nilai, pada setiap tanggal pelaporan.

l. Impairment of Non-Financial Assets

Assets that are subject to amortisation or depreciation are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognised for the amount by which the asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs to sell and its value-in-use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest level for which there are separately identifiable cash flows (cash generating units). Non-financial assets that have suffered an impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

Pembalikan rugi penurunan nilai, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi. Pembalikan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset melebihi biaya perolehan yang didepresiasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pembalikan dilakukan.

Reversal on impairment loss for assets would be recognised if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment test was carried out. Reversal on impairment losses will be immediately recognised in profit or loss. The reversal will not result in the carrying amount of an asset that exceeds what the depreciated cost would have been had the impairment not been recognised at the date at which the impairment was reversed.



PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

m. Sewa

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset kepada lessee. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi kriteria tersebut, diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Sebagai lessor

Sewa di mana Perusahaan dan entitas anak tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Sebagai lessee

Pembayaran sewa harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pengurangan dari liabilitas sewa sehingga mencapai suatu tingkat bunga konstan atas saldo liabilitas. Rental kontinjen dibebankan pada periode terjadinya.

Pembayaran sewa operasi (dikurangi dengan insentif yang diterima dari lessor) diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Rental kontinjen diakui dalam sewa operasi sebagai beban di dalam periode terjadinya.

Dalam hal insentif diperoleh dalam sewa operasi, insentif tersebut diakui sebagai liabilitas. Keseluruhan manfaat dari insentif diakui sebagai pengurangan dari beban sewa dengan dasar garis lurus, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat yang dinikmati pengguna.

n. Kas dan Setara Kas

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan tidak dijamin serta tidak dibatasi penggunaannya.

m. Leases

Leases are classified as finance leases whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee. All other leases are classified as operating leases.

As lessor

Lessee where the Company and its subsidiaries does not transfer substantially all the risks and rewards of the asset ownership are classified as operating leases.

As lessee

Lease payments are apportioned between finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Contingent rents are recognized as expenses in the periods in which they are incurred.

Operating lease payments (net of any incentives received from the lessor) are recognized as expenses on a straight-line basis over the lease term, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed. Contingent rents arising under operating leases are recognized as expenses in the period in which they are incurred.

In the event that lease incentives are received when entering into operating leases, such incentives are recognized as a liability. The aggregate benefit of incentives is recognized as a reduction of rental expense on a straight-line basis, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed.

n. Cash and Cash Equivalents

For cash flow presentation purposes, cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks and all unrestricted investments with maturities of three months or less from the date of placement.

**PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Untuk kebijakan akuntansi pinjaman yang diberikan dan piutang, lihat Catatan 3g.

o. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata bergerak.

Di dalam penentuan nilai realisasi bersih, Perusahaan dan entitas anak tidak menurunkan nilai persediaan yang digunakan untuk produksi tenaga listrik apabila Perusahaan dan entitas anak mampu memperoleh pendapatan penjualan tenaga listrik di atas biaya perolehan persediaan tersebut.

p. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomik masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas anak; dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung (biaya jasa hukum, pajak pengalihan properti, dan biaya transaksi lain). Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut.

Setelah pengakuan awal, Perusahaan dan entitas anak memilih menggunakan model nilai wajar dan mengukur seluruh properti

Restricted cash in banks and time deposits are classified as loans and receivable. Refer to Note 3g for the accounting policy on loans and receivables.

o. Inventories

Inventories are stated at cost or net realizable value, whichever is lower. Cost is determined using the weighted moving average method.

In determining the net realizable values, the Company and its subsidiaries do not write down inventories held in use for production of electricity below their costs when the Company and its subsidiaries are able to sell electricity above the costs of inventories.

p. Investment properties

Investment properties are properties (land or a building or part of a building or both) held by the owner or the lessee under a finance lease to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes; or sale in the daily business activities.

Investment property is recognized as an asset when, and only when it is probable that the future economic benefits that are associated with the investment property will flow to the entity; and the cost of the investment property can be measured reliably.

An investment property shall be measured initially at its cost, comprises its purchase price and any directly attributable expenditure (professional fees for legal services, property transfer taxes and other transaction costs). Transaction costs are included in the initial measurement.

After initial recognition, the Company and its subsidiaries chooses to use fair value model and measure all of its investment



PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

investasi berdasarkan nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar properti investasi diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.

Penentuan nilai wajar investasi didasarkan pada penilaian oleh penilai independen yang mempunyai kualifikasi profesional yang telah diakui dan relevan serta memiliki pengalaman terkini di lokasi dan kategori properti investasi yang dinilai.

Pengalihan ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik dan dimulainya sewa operasi kepada pihak lain.

Pengalihan dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik dan dimulainya pengembangan untuk dijual.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

q. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Investasi pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah seluruh entitas dimana Perusahaan dan entitas anak memiliki pengaruh signifikan namun bukan pengendalian, biasanya melalui kepemilikan hak suara antara 20% dan 50%. Investasi entitas asosiasi dicatat dengan metode ekuitas. Sesuai metode ekuitas, investasi pada awalnya dicatat pada biaya, dan nilai tercatat akan meningkat atau menurun untuk mengakui bagian investor atas laba rugi. Di dalam investasi Perusahaan dan entitas anak

property at fair value. Any gain or loss arising from a change in the fair value of investment property is recognized in profit or loss for the period in which it arises.

The fair value of investment property is based on a valuation by an independent valuer who holds a recognized and relevant professional qualification and has recent experience in the location and category of the investment property being valued.

Transfer to investment property made when, and only when, there is a change in use, evidenced by end of owner-occupation and commencement of an operating lease to another party.

Transfer from investment property made when, and only when, there is a change in use, evidenced by commencement of owner-occupation and commencement of development with a view to sale.

An investment property is derecognized on disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from its disposal. Gains or losses arising from the retirement or disposal are determined as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset, and are recognized in profit or loss in the period of the retirement or disposal.

q. Investments in Associates and Joint Venture

Investments in Associates

Associates are all entities over which the Company and its subsidiaries have significant influence but not control, generally accompanying a shareholding of between 20% and 50% of the voting rights. Investments in associates are accounted for using the equity method of accounting. Under the equity method, the investment is initially recognized at cost and the carrying amount is increased or decreased to recognize the investor's share of the profit or the loss of the investee after the date of

**PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

atas entitas asosiasi termasuk *goodwill*
yang diidentifikasi ketika akuisisi.

Penghasilan dan aset dan liabilitas dari entitas asosiasi digabungkan dalam laporan keuangan konsolidasian dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, kecuali ketika investasi diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, sesuai PSAK 58 (Revisi 2009), Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan. Dalam menerapkan metode ekuitas, bagian Perusahaan dan entitas anak atas laba rugi atas entitas asosiasi setelah perolehan diakui dalam laba rugi, dan bagian Perusahaan atas penghasilan komprehensif lainnya setelah tanggal perolehan diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya. Perubahan dan penerimaan distribusi dari entitas asosiasi setelah tanggal perolehan disesuaikan terhadap nilai tercatat investasi. Bagian Perusahaan dan entitas anak atas kerugian entitas asosiasi yang melebihi nilai tercatat dari investasi (yang mencakup semua kepentingan jangka panjang, secara substansi, merupakan bagian dari Perusahaan dan nilai investasi bersih entitas anak dalam entitas asosiasi) diakui hanya sebatas bahwa Perusahaan dan entitas anak telah mempunyai kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif atau melakukan pembayaran atas kewajiban entitas asosiasi.

Keuntungan yang belum direalisasi atas transaksi antara Perusahaan dan entitas anak dengan entitas asosiasi dieliminasi sebesar bagian Perusahaan dan entitas anak dalam entitas asosiasi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti penurunan nilai atas aset yang ditransfer. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi akan disesuaikan, apabila diperlukan, agar konsisten dengan kebijakan akuntansi Perusahaan dan entitas anak.

Pada setiap tanggal pelaporan Perusahaan dan entitas anak menentukan apakah ada bukti objektif bahwa terdapat indikasi penurunan nilai untuk menentukan apakah perlu untuk mengakui penurunan nilai sehubungan dengan investasi pada

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

acquisition. The Company and its subsidiaries investment in associates includes goodwill identified on acquisition.

The results of operations and assets and liabilities of associates are incorporated in these consolidated financial statements using the equity method of accounting, except when investment is classified as held for sale, in which case, it is accounted for in accordance with SFAS 58 (Revised 2009), Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations. In applying the equity method of accounting, the Company and its subsidiaries' share of its associate's post-acquisition profits or losses is recognized in profit or loss and its share of post-acquisition other comprehensive income is recognized in other comprehensive income. These post-acquisition movements and distributions received from an associate are adjusted against the carrying amounts of the investment. Losses of the associates in excess of the Company and its subsidiaries' interests in those associates (which includes any long-term interests that, in substance, form part of the Company and its subsidiaries' net investment in the associate) are recognized only to the extent that the Company and its subsidiaries have incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate.

Unrealized gains on transactions between the Company and its subsidiaries and associate are eliminated to the extent of the Company and its subsidiaries interests in the associate. Unrealized losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of impairment of the assets transferred. The accounting policies of the associate have been changed when necessary to ensure consistency with the accounting policy adopted by the Company and its subsidiaries.

The Company and its subsidiaries determine at each reporting date whether there is any objective evidence that impairment indicators exist to determine whether it is necessary to recognize any impairment loss with respect to the





PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada

Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED

FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For The Years Ended

December 31, 2019 and 2018

(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

entitas asosiasi Perusahaan dan entitas anak. Jika terdapat indikasi penurunan nilai, jumlah tercatat investasi yang tersisa (termasuk *goodwill*) diuji penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48 (Revisi 2014), Penurunan Nilai Aset, sebagai suatu aset tunggal dengan membandingkan antara jumlah terpulihkan (mana yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual) dengan jumlah tercatatnya. Rugi penurunan nilai yang diakui pada keadaan tersebut tidak dialokasikan pada setiap aset yang membentuk bagian dari nilai tercatat investasi pada entitas asosiasi. Setiap pembalikan dari penurunan nilai diakui sesuai dengan PSAK 48 (Revisi 2014) sepanjang jumlah terpulihkan dari investasi tersebut kemudian meningkat.

Perusahaan dan entitas anak menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal ketika investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi sebagai berikut:

- investasi menjadi entitas anak;
- sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan, maka Perusahaan dan entitas anak mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar;
- Perusahaan dan entitas anak menghentikan penggunaan metode ekuitas, Perusahaan dan entitas anak mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan investasi tersebut menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika *investee* telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas terkait.

Ketika Perusahaan dan entitas anak melakukan transaksi dengan entitas asosiasi, keuntungan dan kerugian dieliminasi sebesar kepentingan mereka dalam entitas asosiasi.

Bagian partisipasi dalam ventura bersama
Menurut PSAK 66 (Revisi 2015), pengaturan bersama diklasifikasikan sebagai operasi bersama atau ventura bersama bergantung pada hak dan kewajiban kontraktual para investor. Perusahaan dan entitas anak telah menilai

Company and its subsidiaries' investment in an associate. If impairment indicators exist, the entire carrying amount of the investment (including goodwill) is tested for impairment in accordance with SFAS 48 (Revised 2014), Impairment of Assets, as a single asset by comparing its recoverable amount (higher of value in use and fair value less costs to sell) with its carrying amount. Any impairment loss recognized forms part of the carrying amount of the investment. Any reversal of that impairment loss is recognized in accordance with SFAS 48 (Revised 2014) to the extent that the recoverable amount of the investment subsequently increases.

The Company and its subsidiaries discontinue the use of the equity method from the date when its investment ceases to be an associate as follows:

- the investment becomes a subsidiary;*
- the retained interest in the former associate is a financial asset, the Company and its subsidiaries measure the retained interest at fair value;*
- the Company and its subsidiaries discontinue the use of the equity method, the Company and its subsidiaries account for all amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that investment on the same basis as would have been required if the investee had directly disposed of the related assets or liabilities.*

When the Company and its subsidiaries transact with an associate, profits and losses are eliminated to the extent of their interest in the relevant associate.

Interest in joint ventures

Under SFAS 66 (Revised 2015), investments in joint arrangements are classified as either joint operations or joint ventures depending on the contractual rights and obligations of each investor. The Company and its subsidiaries have

**PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

sifat dari pengaturan bersama dan menentukan pengaturan tersebut sebagai ventura bersama.

Hasil operasi, aset dan liabilitas dari ventura bersama disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian menggunakan metode ekuitas. Dalam menerapkan metode ekuitas, bagian Perusahaan dan entitas anak atas laba rugi atas ventura bersama setelah perolehan diakui dalam laba rugi, dan bagian Perusahaan atas penghasilan komprehensif lainnya setelah tanggal perolehan diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya. Perubahan dan penerimaan distribusi dari ventura bersama setelah tanggal perolehan disesuaikan terhadap nilai tercatat investasi.

Jika bagian Perusahaan dan entitas anak atas rugi ventura bersama sama dengan atau melebihi kepentingannya pada ventura bersama, termasuk piutang tidak lancar tanpa jaminan, maka Perusahaan dan entitas anak menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi lebih lanjut, kecuali Perusahaan dan entitas anak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atau telah melakukan pembayaran atas nama ventura bersama.

Penyesuaian dibentuk terhadap laporan keuangan konsolidasian untuk mengeliminasi bagian Perusahaan dan entitas anak atas keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi atas transaksi antara Perusahaan dan entitas anak dan ventura bersama. Ventura bersama dicatat dengan menggunakan metode ekuitas sampai dengan tanggal dimana Perusahaan dan entitas anak kehilangan pengaturan bersama atas entitas yang diatur bersama.

Kebijakan akuntansi ventura bersama telah diubah jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dari kebijakan yang diterapkan oleh Perusahaan dan entitas anak.

Perusahaan dan entitas anak mengukur dan mengakui sisa investasi pada nilai wajar setelah hilangnya pengendalian dan ventura bersama tidak menjadi entitas anak atau entitas asosiasi. Selisih antara

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

assessed the nature of its joint arrangements and determined them to be joint ventures.

The result of operations and assets and liabilities of a joint venture are incorporated in these consolidated financial statements using the equity method. In applying the equity method of accounting, the Company and its subsidiaries' share of its joint venture's post-acquisition profits or losses is recognized in profit or loss and its share of post-acquisition other comprehensive income is recognized in other comprehensive income. These post-acquisition movements and distributions received from a joint venture are adjusted against the carrying amount of the investment.

When the Company and its subsidiaries share of the losses of a joint venture equals or exceeds its interest in joint venture, including any other unsecured non-current receivables, the Company and its subsidiaries does not recognise further losses, unless it has obligations to make or has made payments on behalf of the joint venture.

Adjustments are made in the consolidated financial statements to eliminate the Company and its subsidiaries' share of unrealized gains and losses on transactions between the Company and its subsidiaries and the joint ventures. The joint ventures are carried at equity method until the date on which the Company and its subsidiaries cease to have joint arrangements over the joint ventures.

Accounting policies of the joint ventures have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the the Company and its subsidiaries.

The Company and its subsidiaries measure and recognize the remaining investment at fair value upon loss of control, provided the joint ventures do not become subsidiaries or associates. Any



Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan Audit
Audited Financial Statements



Referensi Kriteria AR
ARA Criteria Reference



PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

nilai tercatat atas hilangnya ventura bersama dengan agregat nilai wajar sisa investasi dan hasil pelepasan diakui pada laba rugi. Ketika sisa investasi mempunyai pengaruh yang signifikan, investasi tersebut dicatat sebagai investasi pada entitas asosiasi.

difference between the carrying amount of the joint ventures upon loss of control and the aggregate of the fair value of the remaining investment and proceeds from disposal is recognized in profit or loss. When the remaining investment constitutes significant influence, it is accounted for as investment in an associate.

r. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Penjualan tenaga listrik

Pendapatan penjualan tenaga listrik diakui berdasarkan energi listrik (kWh) yang dipasok kepada PT PLN (Persero) dengan menggunakan formula tarif yang ditetapkan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik. Formula tarif mencakup perhitungan komponen harga kapasitas, harga tetap operasi dan pemeliharaan, harga bahan bakar, tingkat pasokan energi serta variabel lainnya.

r. Revenue and Expense Recognition

Sale of electricity

Sale of electricity is recognized based on the supply of electricity energy (kWh) to PT PLN (Persero) using tariff formula stipulated in the power purchase agreements. The tariff formula includes calculation of capacity component, fixed cost for operations and maintenance components, fuel costs, power supply levels and other variables.

Penjualan jasa

Pendapatan jasa pemeliharaan dan operasi serta kontrak perbaikan dan pembangunan pembangkit tenaga listrik, bila dapat diestimasi dengan andal, diakui dengan acuan pada Berita Acara Bulanan atau tingkat penyelesaian kontrak pada tanggal pelaporan.

Rendering of services

Revenue on maintenance and operation services and power plant repair construction contracts, when they can be estimated reliably, are recognized by reference to Monthly Memorandum or the percentage of completion of the contract at reporting date.

Bila hasil transaksi jasa atau kontrak tidak dapat diestimasi dengan andal, pendapatan diakui hanya yang berkaitan dengan beban kontrak yang terjadi yang dapat dipulihkan.

Where the outcome of the service or contract can not be estimated reliably, revenue is recognized to the extent of contract costs incurred that is probable to be recovered.

Pendapatan bunga

Pendapatan bunga diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual, dengan acuan jumlah pokok terutang dan tingkat bunga yang berlaku.

Interest revenue

Interest revenue is recognized as incurred on an accrual basis, by reference to the principal outstanding and at the applicable interest rate.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.

Expenses

Expenses are recognized as incurred on an accrual basis.

s. Imbalan Kerja

Imbalan Pascakerja

Perusahaan dan entitas anak menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk semua karyawan tetap yang memenuhi syarat. Perusahaan dan entitas anak juga memberikan imbalan pascakerja lain tanpa pendanaan kepada karyawan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebijakan Perusahaan dan entitas anak.

s. Employee Benefits

Post-employment Benefits

The Company and its subsidiaries have established a defined benefit pension plan covering all of their eligible permanent employees. The Company and its subsidiaries also provide other unfunded defined post-employment benefit plans for their qualifying employees based on the Company and its subsidiaries' policies.

**PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Sehubungan dengan program imbalan pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris yang independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga Obligasi Pemerintah (dikarenakan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi perusahaan yang berkualitas tinggi) yang didenominasikan dalam mata uang dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui penghasilan komprehensif lainnya pada saat terjadinya.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laba rugi.

Imbalan Kerja Jangka Panjang

Perhitungan imbalan kerja jangka panjang ditentukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Biaya jasa lalu diakui segera dalam laba rugi. Perusahaan dan entitas anak mengakui keuntungan dan kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan pasti ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi. Keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian program manfaat pasti diakui di laba rugi ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui penghasilan komprehensif lain periode terjadinya.

Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan kerja jangka panjang di laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan nilai kini liabilitas imbalan kerja pasti.

The liability recognized in the statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the Projected Unit Credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of Government Bonds (considering currently there is no deep market for high-quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating to the terms of the related pension obligation.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise.

Past-service costs are recognized immediately in profit or loss.

Long-term Benefits

Long-term benefits are determined using the Projected Unit Credit method. Past service costs are recognized immediately in profit or loss. The Company and its subsidiaries recognized gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan when the curtailment or settlement occurs. The gain or loss on a curtailment or settlement of a defined benefit plan is recognized in profit or loss when the curtailment or settlement occurs.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions charged to other comprehensive income in the period in which they occur.

The long-term employee benefits liabilities recognized in the consolidated statement of financial position represents the present value of the defined benefit liabilities.



PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

t. Provisi

Provisi diakui ketika Perusahaan dan entitas anak memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Perusahaan dan entitas anak diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi merupakan estimasi terbaik dari pertimbangan yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

u. Pajak Penghasilan

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang berasal dari transaksi atau kejadian yang diakui, diluar laba rugi (baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laporan laba rugi atau yang timbul dari akuntansi awal atau kombinasi bisnis. Dalam kasus kombinasi bisnis, pengaruh pajak termasuk dalam akuntansi kombinasi bisnis.

t. Provisions

Provisions are recognized when the Company and its subsidiaries have a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event and it is probable that the Company and its subsidiaries will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the present obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.

When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, a receivable is recognized as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can be measured reliably.

u. Income Tax

Tax expense is the aggregate amount included in the determination of profit or loss for the period in respect of current tax and deferred tax. Current tax expense is determined based on the taxable profit for the year computed using the prevailing tax rates.

Current and deferred taxes are recognized as an expense or income in profit or loss, except when they relate to items that are recognized outside profit or loss (whether in other comprehensive income or directly in equity), in which case the tax is also recognized outside profit or loss, or where they arise from the initial accounting for a business combination. In the case of a business combination, the tax effect is included in the accounting for the business combination.

**PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Untuk pendapatan yang menjadi subjek pajak penghasilan final, beban pajak diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan akuntansi yang diakui dan disajikan dalam sebagai bagian dari akun beban operasional pada tahun berjalan dikarenakan pajak tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai pajak penghasilan.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihanannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

- a) pengakuan awal *goodwill*; atau
- b) pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut

For income which is subject to final tax, tax expenses are recognized proportionally with the accounting revenue recognized and presented as part of the operating expenses account in the current year as such tax does not satisfy the criteria of income tax.

Current tax for current and prior periods shall, to the extent unpaid, be recognized as a liability. If the amounts already paid in respect of current and prior periods exceed the amounts due for those periods, the excess shall be recognized as an asset. Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Tax benefits relating to tax loss that can be carried back to recover current tax of a previous periods is recognized as an asset. Deferred tax asset is recognized for the carry forward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.

A deferred tax liability shall be recognized for all taxable temporary differences, except to the extent that the deferred tax liability arises from:

- a) *the initial recognition of goodwill; or*
- b) *the initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not a business combination and at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).*

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to differences between the consolidated financial



PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan dan entitas anak ekspektasikan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus, jika dan hanya jika, ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan ketika liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama serta Perusahaan dan entitas anak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

statement carrying amounts of assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable income will be available in future periods against which the deductible temporary differences can be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realized, based on the tax rates (and tax laws) that have been enacted, or substantively enacted, by the end of the reporting period.

The measurement of deferred tax assets and deferred tax liabilities reflects the consequences that would follow from the manner in which the Company and its subsidiaries expect, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of their assets and liabilities.

The carrying amount of deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.

Deferred tax assets and liabilities are offset, if and only if, when there is legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities and when they relate to income taxes levied by the same taxation authority and the Company and its subsidiaries intend to settle their current tax assets and current tax liabilities on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

**PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

v. Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

Aset Pengampunan Pajak dan Liabilitas Pengampunan Pajak diakui pada saat Surat Keterangan Pengampunan Pajak ("SKPP") diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan tidak diakui secara neto (saling hapus). Selisih antara Aset Pengampunan Pajak dan Liabilitas Pengampunan Pajak diakui sebagai Tambahan Modal Disetor.

Aset Pengampunan Pajak pada awalnya diakui sebesar nilai yang disetujui dalam SKPP.

Liabilitas Pengampunan Pajak pada awalnya diakui sebesar nilai kas dan setara kas yang masih harus dibayarkan oleh Perusahaan sesuai kewajiban kontraktual atas perolehan Aset Pengampunan Pajak.

Uang tebusan yang dibayarkan oleh Perusahaan untuk memperoleh pengampunan pajak diakui sebagai beban pada periode dimana SKPP diterima oleh Perusahaan.

Setelah pengakuan awal, Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak diukur sesuai dengan SAK yang relevan sesuai dengan klasifikasi masing-masing Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak.

Sehubungan dengan Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak yang diakui, Perusahaan telah mengungkapkan dalam laporan keuangannya:

- a. Tanggal SKPP.
- b. Jumlah yang diakui sebagai Aset Pengampunan Pajak sesuai SKPP.
- c. Jumlah yang diakui sebagai Liabilitas Pengampunan Pajak.

w. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Laba per saham dilusian dihitung dengan menyesuaikan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif yang dimiliki perusahaan. Perusahaan tidak memiliki efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

v. Tax Amnesty Assets and Liabilities

Tax Amnesty Assets and Liabilities are recognized upon the issuance of Tax Amnesty Approval Letter ("TAAL") by the Minister of Finance of Republic of Indonesia, and they are not recognized as net amount (offset). The difference between Tax Amnesty Assets and Tax Amnesty Liabilities are recognized as Additional Paid-in Capital.

Tax Amnesty Assets are initially recognized at the value stated in TAAL.

Tax Amnesty Liabilities are initially measured at the amount of cash or cash equivalents to be settled by the Company according to the contractual obligation with respect to the acquisition of respective Tax Amnesty Assets.

The redemption money paid by the Company to obtain the tax amnesty is recognized as expense in the period in which the Company receives TAAL.

After initial recognition, Tax Amnesty Assets and Liabilities are measured in accordance with respective relevant SAKs according to the classification of each Tax Amnesty Assets and Liabilities.

With respect to Tax Amnesty Assets and Liabilities recognized, the Company has disclosed the following in its financial statements:

- a. The date of TAAL.
- b. Amount recognized as Tax Amnesty Assets in accordance with TAAL.
- c. Amount recognized as Tax Amnesty Liabilities.

w. Earnings per Share

Basic earnings per share are computed by dividing income for the year attributable to the owners of the Company by the weighted average number of shares outstanding during the year.

Diluted earnings per share are calculated by adjusting the weighted average number of ordinary shares outstanding to assume conversion of all dilutive potential ordinary shares owned by the Company. The Company does not have any dilutive potential ordinary shares.



Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan Audit
Audited Financial Statements



Referensi Kriteria AR
AR Criteria Reference



PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. Pertimbangan Akuntansi dan Estimasi Akuntansi yang Signifikan

Dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan dan entitas anak, sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 3, manajemen diharuskan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang nilai aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari direvisi secara berkelanjutan. Revisi terhadap estimasi akuntansi akan diakui pada periode dimana estimasi tersebut direvisi, jika revisi tersebut hanya berpengaruh terhadap periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode berikutnya jika revisi tersebut mempengaruhi periode tersebut.

Pertimbangan dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan 3, Perusahaan telah menentukan hal-hal berikut yang memerlukan pertimbangan signifikan:

Kepentingan dalam pengaturan bersama

Pertimbangan diperlukan untuk menentukan ketika Perusahaan dan entitas anak memiliki pengendalian bersama, yang membutuhkan penilaian mengenai aktivitas yang relevan dan ketika keputusan yang berkaitan dengan aktivitas tersebut membutuhkan persetujuan dengan suara bulat. Perusahaan dan entitas anak menentukan bahwa aktivitas yang relevan untuk pengaturan bersama adalah aktivitas yang berkaitan dengan operasi dan pengambilan keputusan dalam pengaturan tersebut.

Pertimbangan juga diperlukan untuk mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai pengendalian bersama atau ventura bersama. Pengklasifikasian pengaturan tersebut mengharuskan Perusahaan dan entitas anak untuk menilai hak dan kewajiban yang timbul dari pengaturan tersebut. Secara khusus, Perusahaan dan entitas anak mempertimbangkan:

4. Significant Accounting Judgements and Estimates

In the application of the Company and its subsidiaries accounting policies, which are described in Note 3, the management is required to make judgements, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the period which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

Judgements in Applying Accounting Policies

In the process of applying the accounting policies described in Note 3, the Company has identified the following matters under which significant judgments are made:

Joint Arrangement

Judgement is required to determine when the Company and its subsidiaries has joint control, which requires an assessment of the relevant activities and when the decisions in relation to those activities require unanimous consent. The Company and its subsidiaries has determined that the relevant activities for its joint arrangements are those relating to the operating and capital decisions of the arrangement.

Judgement is also required to classify a joint arrangement as either a joint operation or joint venture. Classifying the arrangement requires the Company and its subsidiaries to assess its rights and obligations arising from the arrangement. Specifically, it considers:

**PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

- Struktur dari pengaturan bersama - apakah dibentuk melalui kendaraan terpisah
- Ketika pengaturan tersebut terstruktur melalui kendaraan terpisah, Perusahaan dan entitas anak juga mempertimbangkan hak dan kewajiban yang timbul dari:
 - Bentuk legal dari kendaraan terpisah;
 - Persyaratan dari perjanjian kontraktual; dan
 - Fakta dan kondisi lain (ketika relevan).

Penilaian ini sering membutuhkan pertimbangan yang signifikan, dan kesimpulan yang berbeda mengenai pengendalian bersama dan apakah pengaturan tersebut merupakan operasi bersama atau ventura bersama, dapat memiliki dampak material terhadap akuntansi.

Perusahaan dan entitas anak memiliki pengaturan bersama yang terstruktur melalui ventura bersama, yaitu PT Bajradaya Sentranusa, PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali, PT Bukit Pembangkit Innovative, PT Rekind Daya Mamuju, PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali, PT Guohua Taidian Pembangkitan Jawa Bali, PT North Sumatera Hydro Energy dan PT Sumbagsel Energi Sakti Pewali. Struktur dan persyaratan dari perjanjian kontraktual mengindikasikan bahwa Perusahaan dan entitas anak memiliki hak atas aset bersih dari pengaturan bersama tersebut. Perusahaan dan entitas anak menilai fakta dan kondisi lain yang berkaitan dengan pengaturan ini dan kesimpulan final dari penilaian yang dilakukan adalah pengaturan tersebut merupakan ventura bersama (Catatan 8).

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini:

Rugi Penurunan Nilai Pinjaman Diberikan dan Piutang

Perusahaan dan entitas anak menilai penurunan nilai pinjaman diberikan dan piutang pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah ada penurunan nilai, kami

- The structure of the joint arrangement - whether it is structured through a separate vehicle
- When the arrangement is structured through a separate vehicle, the Company and its subsidiaries also considers the rights and obligations arising from:
 - The legal form of the separate vehicle;
 - The terms of the contractual arrangement; and
 - Other facts and circumstances (when relevant).

This assessment often requires significant judgement and a different conclusion on joint control and also whether the arrangement is a joint operation or a joint venture, may materially impact the accounting.

The Company and its subsidiaries have joint arrangements which are structured through joint ventures, namely PT Bajradaya Sentranusa, PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali, PT Bukit Pembangkit Innovative, PT Rekind Daya Mamuju, PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali, PT Guohua Taidian Pembangkitan Jawa Bali, PT North Sumatera Hydro Energy and PT Sumbagsel Energi Sakti Pewali. These structure and the terms of the contractual arrangement indicate that the Company and its subsidiaries have rights to the net assets of the arrangements. The Company and its subsidiaries also assessed the other facts and circumstances relating to these arrangements and the final conclusions were that the arrangement was joint ventures (Note 8).

Key Sources of Estimation Uncertainty

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation at the end of the reporting period, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are discussed below:

Impairment Loss on Loans and Receivables

The Company and its subsidiaries assess their loans and receivables for impairment at each reporting date. In determining whether an impairment loss should be recorded in profit or



PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

dicatat dalam laba rugi, manajemen membuat penilaian, apakah terdapat bukti objektif bahwa kerugian telah terjadi. Manajemen juga membuat penilaian atas metodologi dan asumsi untuk memperkirakan jumlah dan waktu arus kas masa depan yang direvisi secara berkala untuk mengurangi perbedaan antara estimasi kerugian dan kerugian aktualnya. Nilai tercatat pinjaman diberikan dan piutang diungkapkan dalam Catatan 14.

Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap dan Properti Investasi

Nilai tercatat aset tetap dan properti investasi diungkapkan dalam Catatan 6 dan 7.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan nilai tercatat aset tetap.

Nilai Wajar Aset Tetap dan Properti Investasi yang Menggunakan Model Revaluasi

Pada tanggal 31 Desember 2015, Perusahaan dan entitas anak melakukan perubahan kebijakan akuntansi dari model biaya menjadi model revaluasi untuk kelas aset tertentu. Pelaksanaan revaluasi aset tetap tersebut dilakukan oleh penilai publik independen.

Dalam proses penilaian, manajemen, dengan bantuan penilai publik independen, menentukan data dan asumsi, menelaah metode penilaian serta berdiskusi dengan penilai. Pendekatan dan metode yang digunakan dalam melakukan revaluasi tergantung pada kelas aset. Walaupun data dan asumsi Perusahaan dan entitas anak dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada data input atau asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap nilai aset yang menggunakan model revaluasi.

Rincian dari pendekatan dan data input signifikan yang digunakan dalam melakukan revaluasi aset tetap dan properti investasi diungkapkan dalam Catatan 6 dan 7.

Imbalan Pascakerja

Penentuan liabilitas imbalan pascakerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam

loss, management makes a judgement as to whether there is an objective evidence that the loss event has occurred. Management also makes judgement as to the methodology and assumptions for estimating the amount and timing of future cash flows which are reviewed regularly to reduce any difference between loss estimate and actual loss. The carrying amount of loans and receivables are disclosed in Note 14.

Estimated Useful Lives of Property, Plant and Equipment and Investment Properties

The carrying amounts of property, plant and equipment and investment properties are disclosed in Notes 6 and 7, respectively.

A change in the estimated useful life of any item of property, plant and equipment would affect the recorded depreciation expense and the carrying values of property, plant and equipment.

Fair Value of Property, Plant and Equipment and Investment Properties That Use Revaluation Model

On December 31, 2015, the Company and its subsidiaries changed their accounting policy from cost model to revaluation model for certain class of assets. The assets revaluation was performed by an independent public valuer.

Management, with the assistance of independent public valuer, determines the data inputs and assumption, assesses valuation method and hold discussions with the valuers as part of the valuation process. The approaches and methods used in the revaluation depend on the assets class. While it is believed that the Company and its subsidiaries' data and assumptions are reasonable and appropriate, significant changes in data inputs or significant changes in assumptions may materially affect the value of assets that use revaluation model.

Detail of valuation approach and significant data input used in the revaluation Property, Plant and Equipment and Investment Properties are disclosed in Notes 6 and 7, respectively.

Post-employment Benefits

The determination of the post-employment benefits obligation is dependent on the selection of certain assumptions used by

**PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Realisasi yang berbeda dari asumsi Perusahaan dan entitas anak diakumulasi dan diamortisasi selama periode mendatang dan akibatnya akan berpengaruh terhadap jumlah biaya serta liabilitas yang diakui di masa mendatang. Walaupun asumsi Perusahaan dan entitas anak dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada kenyataannya atau perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap liabilitas imbalan pascakerja Perusahaan dan entitas anak.

Asumsi yang digunakan untuk perhitungan liabilitas imbalan pascakerja diungkapkan dalam Catatan 33.

Pajak Penghasilan

Perhitungan beban pajak penghasilan Perusahaan memerlukan pertimbangan dan asumsi dalam menentukan pengurangan beban tertentu selama proses pengestimasian. Semua pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen dapat dipertanyakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan pajak. Resolusi posisi pajak yang diambil oleh Perusahaan, melalui negosiasi dengan otoritas pajak yang relevan dapat berlangsung bertahun-tahun dan sangat sulit untuk memprediksi hasil akhirnya. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam tahun dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari perbedaan temporer, diakui apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa mereka dapat diterima kembali, dimana hal ini tergantung pada kecukupan pembentukan laba kena pajak di masa depan. Asumsi atas pembentukan laba kena pajak sangat dipengaruhi oleh estimasi dan asumsi manajemen atas tingkat penjualan dan biaya-biaya terkait yang terdapat risiko ketidakpastian, sehingga ada kemungkinan perubahan estimasi dan asumsi tersebut akan mengubah proyeksi laba kena pajak di masa mendatang.

actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rate and rate of salary increase. Actual results that differ from the Company and its subsidiaries' assumptions are accumulated and amortized over future periods and therefore, generally affect the recognized expense and recorded obligation in such future periods. While it is believed that the Company and its subsidiaries' assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual experience or significant changes in assumptions may materially affect the Company and its subsidiaries' post-employment benefit liabilities.

Assumptions used in the calculation of post-employment benefit liabilities are disclosed in Note 33.

Income taxes

The calculations of income tax expense for the Company require judgements and assumptions in determining the deductibility of certain expenses during the estimation process. All judgement and estimates made by management may be challenged by the Directorate General of Taxation. As a result, the ultimate tax determination becomes uncertain. The resolution of tax positions taken by the Company, through negotiations with the relevant tax authorities can take several years to complete and in some cases it is difficult to predict the ultimate outcome. Where the final outcome of these matters is different from the amounts initially recorded, such differences will have an impact on the income tax and deferred income tax provision in the year in which this determination is made.

Deferred tax assets, including those arising from temporary differences, are recognized only where it is considered more likely than not that they will be recovered, which is dependent on the generation of sufficient future taxable profits. The assumptions about the generation of future taxable profits are heavily affected by management's estimates of the expected sales level and the associated costs which are subject to uncertainty risk, and hence there is a possibility that changes in circumstances will alter the projected future taxable profits.



PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada

Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For The Years Ended

December 31, 2019 and 2018

(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

5. Entitas Anak

Perusahaan memiliki saham entitas anak baik langsung maupun tidak langsung sebagai berikut:

5. Subsidiaries

The Company has ownership interests, directly or indirectly in the following subsidiaries:

Entitas anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Jenis usaha/ Nature of business	Persentase pemilikan/ Percentage of ownership		Tahun operasi komersial/ Year commercial operations	Jumlah aset sebelum eliminasi/ Total assets before elimination	
			2019 %	2018 %		2019 Rp	2018 Rp
PT Pembangkitan Jawa-Bali Services (PJBS) dan entitas anak/ and subsidiaries	Surabaya	Jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik dan pembangunan (pemasangan) peralatan ketenagalistrikan/ Operation and maintenance of power plant and construction (installation) of electricity equipment	98.00	98.00	2001	1,184,693	1,261,798
PT Mitra Karya Prima (MKP) *)	Surabaya	Jasa/ Service	92.00	92.00	2013	105,213	92,186
PT Sertifikasi Kompetensi Pembangkit Tenaga Listrik (SKP) *)	Jakarta	Sertifikasi kompetensi tenaga teknik, konsultasi dibidang ketenagalistrikan/ Certification competency technician, consultation in power producer	95.00	95.00	2015	8,136	5,954
PT Rekadaya ElektriKA (RE) dan entitas anak/ and subsidiaries	Jakarta	Enjiniring, pengadaan dan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sektor ketenagalistrikan/ Engineering, procurement and construction, operation and maintenance in the electricity sector	98.90	98.90	2004	2,135,156	1,476,213
PT Rekadaya ElektriKA Consult (REC) *)	Jakarta	Supervisi dan konsultasi/ Supervision and consultation	99.80	99.80	2010	156,266	188,675
PT Navigat Innovative Indonesia (NII)	Palembang	Perdagangan, konstruksi, pertambangan dan pertanian/ Trade, construction, mining and agriculture	72.97	72.97	2002	304,642	307,590
PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI)	Jakarta	Investasi ketenagalistrikan/ Investment in electricity	100.00	100.00	2015	4,650,954	4,444,433
PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang (PLN SC)	Jakarta	Perdagangan barang dan jasa, enjiniring, supply chain, dan konsultasi di bidang ketenagalistrikan/ Operation and services trading, engineering, supply chain, consultation in the electricity sector	51.00	51.00	2018	236,493	188,675

*) Pemilikan tidak langsung

*) Indirect ownership

Pada tahun 2019, Perusahaan melakukan penambahan penyeteran modal sebesar Rp51.805 sehingga nilai penyertaan pada PJBI menjadi Rp4.183.092 atau setara 100,00%. Pada tahun 2018, Perusahaan melakukan penambahan penyeteran saham sebesar Rp1.114.234 sehingga nilai penyertaan pada PJBI menjadi Rp4.131.287 atau setara 100,00%.

In 2019, the Company made additional investment amounting to Rp51,805 thus the investment amount in PJBI changed into Rp4,183,092 equivalent of 100.00%. In 2018, the Company made additional investment amounting to Rp1,114,234 thus the investment amount in PJBI changed into Rp4,131,287 equivalent of 100.00%.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan mendapatkan pembagian atas dividen atas sebagian laba bersih tahun buku 2018 dari PJBS sebesar Rp62.646.

On December 31, 2019, the Company received dividend distributable from PJBS retained earnings in 2018 amounted to Rp62,646.

**PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. Aset Tetap

6. Property, Plant and Equipment

	2019					
	Saldo awal/ Beginning balance Rp	Penambahan/ Additions Rp	Pengurangan/ Deductions Rp	Reklasifikasi/ Reclassifications Rp	Selisih penilaian kembali/ Difference arising on revaluation Rp	Saldo akhir/ Ending balance Rp
Biaya perolehan						Acquisition cost
<u>Pemilikan langsung</u>						<u>Direct acquisition</u>
Tanah	17,303,524	--	--	(2,267)	--	17,301,257
Bangunan umum, waduk dan prasarana	8,703,273	42,917	--	55,859	--	8,802,049
Instalasi dan mesin pembangkit	97,195,925	659,484	--	24,042	--	97,879,451
Perlengkapan transmisi dan distribusi	4,899,094	69,289	--	4,432	--	4,972,815
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	12,059	571	--	(2,892)	--	9,738
Perlengkapan umum	947,236	77,694	--	(9,701)	--	1,015,229
Kendaraan bermotor	133,799	5,851	--	(400)	--	139,250
Material cadang	2,593	--	--	--	--	2,593
Subjumlah	129,197,503	855,806	--	69,073	--	130,122,382
Pekerjaan dalam pelaksanaan	2,233,388	1,973,042	--	(138,452)	--	4,067,978
Aset tidak digunakan dalam operasi	1,866,923	--	(11,820)	67,112	--	1,922,215
Jumlah	133,297,814	2,828,848	(11,820)	(2,267)	--	136,112,575
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
<u>Pemilikan langsung</u>						<u>Direct acquisition</u>
Bangunan umum, waduk dan prasarana	--	803,546	--	97	--	803,643
Instalasi dan mesin pembangkit	--	2,649,946	--	1,583	--	2,651,529
Perlengkapan transmisi dan distribusi	--	133,039	--	(102)	--	132,937
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	--	1,604	--	(251)	--	1,353
Perlengkapan umum	655,257	104,654	--	(12,486)	--	747,425
Kendaraan bermotor	82,588	6,479	--	(400)	--	88,667
Material cadang	--	70	--	--	--	70
Subjumlah	737,845	3,699,338	--	(11,559)	--	4,425,624
Aset tidak digunakan dalam operasi	589,603	63,650	(11,820)	84,080	--	725,513
Jumlah	1,327,448	3,762,988	(11,820)	72,521	--	5,151,137
Penyisihan penurunan nilai	(5,309)	--	--	--	--	(5,309)
Jumlah Tercatat	131,965,057					130,956,129
						Net carrying value





PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2018						
	Saldo awal/ Beginning balance Rp	Penambahan/ Additions Rp	Pengurangan/ Deductions Rp	Reklasifikasi/ Reclassifications Rp	Selisih penilaian kembali/ Difference arising on revaluation Rp	Saldo akhir/ Ending balance Rp	
Biaya perolehan							Acquisition cost
Pemilikan langsung							<u>Direct acquisition</u>
Tanah	15,562,440	--	--	--	1,741,084	17,303,524	Land
Bangunan umum, waduk dan prasarana	9,016,913	20,235	--	(1,827)	(332,048)	8,703,273	Buildings, reservoir and infrastructure
Instalasi dan mesin pembangkit	139,000,464	239,999	--	43,544	(42,088,082)	97,195,925	Installation and power plant
Perlengkapan transmisi dan distribusi	4,998,895	161,474	--	(70,993)	(190,282)	4,889,094	Transmission and distribution equipment
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	10,326	3,955	--	(13)	(2,209)	12,059	Telecommunication and data processing equipment
Perlengkapan umum	784,629	160,008	--	2,599	--	947,236	General equipment
Kendaraan bermotor	133,538	3,775	--	(3,514)	--	133,799	Motor vehicles
Material cadang	--	--	--	3,783	(1,190)	2,593	Spare parts
Subjumlah	169,507,205	589,446	--	(26,421)	(40,872,727)	129,197,503	Subtotal
Pekerjaan dalam pelaksanaan	101,417	2,208,922	--	(76,951)	--	2,233,388	Construction in progress
Aset tidak digunakan dalam operasi	2,028,837	--	(108,929)	(52,985)	--	1,866,923	Asset not used in operations
Jumlah	171,637,459	2,798,368	(108,929)	(156,357)	(40,872,727)	133,297,814	Total
Akumulasi penyusutan							Accumulated depreciation
Pemilikan langsung							<u>Direct acquisition</u>
Bangunan umum, waduk dan prasarana	642,626	197,501	--	(15,670)	(824,457)	--	Buildings, reservoir and infrastructure
Instalasi dan mesin pembangkit	6,949,447	3,508,254	--	(1,670)	(10,456,031)	--	Installation and power plant
Perlengkapan transmisi dan distribusi	249,534	127,561	--	(5,226)	(371,869)	--	Transmission and distribution equipment
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	2,316	1,370	--	(13)	(3,673)	--	Telecommunication and data processing equipment
Perlengkapan umum	564,901	95,209	--	(4,853)	--	655,257	General equipment
Kendaraan bermotor	78,134	8,215	--	(3,761)	--	82,588	Motor vehicles
Material cadang	--	--	--	3,783	(3,783)	--	Spare parts
Subjumlah	8,486,958	3,938,110	--	(27,410)	(11,659,813)	737,845	Subtotal
Aset tidak digunakan dalam operasi	785,651	41,961	(108,929)	(129,080)	--	589,603	Asset not used in operations
Jumlah	9,272,609	3,980,071	(108,929)	(156,490)	(11,659,813)	1,327,448	Total
Penyisihan penurunan nilai	--	--	--	--	(5,309)	(5,309)	Provision for impairment
Jumlah Tercatat	162,364,850					131,965,057	Net carrying value

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expense was allocated to the following:

	2019 Rp	2018 Rp	
Beban usaha	3,699,338	3,938,110	Operating expenses
Beban lain-lain	63,650	41,961	Other expenses
Jumlah	3,762,988	3,980,071	Total

Perusahaan dan entitas anak memiliki beberapa bidang tanah dengan hak legal berupa Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan ("HGB"). Hak Pakai tidak mempunyai jangka waktu. HGB Perusahaan jatuh tempo antara tahun 2018 sampai dengan 2040, tetapi dapat diperpanjang. Perusahaan dan entitas anak juga mempunyai beberapa bidang tanah yang sedang dalam proses perpanjangan HGB dan pengurusan balik nama menjadi atas nama Perusahaan dan entitas anak.

The Company and its subsidiaries own several pieces of land with Rights to Use and Building Use Rights ("HGB"). Rights to Use have no expiration date while HGB will expire from 2018 to 2040, but they are renewable by the Company. The Company and its subsidiaries also have several pieces of land rights, which are still in an extension process and in the process of transfer of certificate to the name of the Company and its subsidiaries.

**PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Aset tetap Perusahaan, kecuali tanah dan kendaraan bermotor, diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan kemungkinan risiko lainnya (termasuk *machinery breakdown*) kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), pihak berelasi, dengan nilai pertanggungan sebesar US\$5.548 juta pada 31 Desember 2019. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kerugian aset yang dipertanggungkan.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah tercatat bruto aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan sebesar Rp793.326 dan Rp679.953.

Perolehan aset tetap melalui utang usaha pada tahun 2018 telah di lunasi selama tahun 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan dan entitas anak melakukan penilaian kembali atas nilai wajar aset tetap, yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid & Rekan ("KJPP RHR") dalam laporan No. 00073/2.0012-00/PI/02/0006/1/III/2019 tanggal 4 Maret 2019, penilai independen yang telah terdaftar di Kementerian Keuangan dengan nomor izin usaha No. 2.09.0012 dan OJK.

Standar Penilaian yang digunakan adalah Standar Penilaian Indonesia edisi VI - 2015, dengan menggunakan pendekatan penilaian berikut ini:

1. Pendekatan Pasar

Pendekatan ini mempertimbangkan penjualan dari aset sejenis atau pengganti dan data pasar yang terkait, serta menghasilkan estimasi nilai melalui proses perbandingan. Pada dasarnya, properti yang dinilai (obyek penilaian) dibandingkan dengan properti yang sebanding, baik dari transaksi yang telah terjadi maupun properti yang masih dalam tahap penawaran penjualan dari suatu proses jual beli.

Pendekatan pasar digunakan untuk kelas aset tanah.

Property, plant and equipment, except land and motor were insured againsts fire and other possible risks (including machinery breakdown) with PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), related party, with coverage amounting to US\$5,548 million at December 31, 2019. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.

As of December 31, 2019 and 2018, gross carrying value of property, plant and equipment that have been fully depreciated and still in used amounted to Rp793,326 and Rp679,953.

Acquisition of property, plant and equipment through trade payables in 2018 has been fully paid during 2019.

On December 31, 2018, the Company and its subsidiaries performs revaluation of the fair value of its property, plant, and equipment which is performed by Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid & Rekan ("KJPP RHR") in the report No. 00073/2.0012-00/PI/02/0006/1/III/2019 dated March 4, 2019, an independent valuer registered in the Ministry of Finance, with license permit No. 2.09.0012 and FSA.

The valuation standard used is Indonesian Valuation Standards edition VI - 2015, with following valuation approaches:

1. Market Approach

This approach considers the sales of similar assets or replacement assets and related market information, which provides value estimation by a comparison process. Basically, the properties being valued (object being appraised) are compared to other similar properties that either have been transacted or offered for sale in a sale and purchase transaction.

The market approach is applied to the asset class of land rights.



Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan Audit
Audited Financial Statements



Referensi Kriteria AR
ARA Criteria Reference



PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. Pendekatan Pendapatan

Pendekatan ini mempertimbangkan pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan aset yang dinilai dan mengestimasi nilai melalui proses kapitalisasi. Kapitalisasi menghubungkan pendapatan (umumnya pendapatan bersih) dengan suatu definisi jenis nilai melalui konversi pendapatan menjadi estimasi nilai. Proses ini dapat menggunakan metode kapitalisasi langsung atau metode arus kas terdiskonto, atau keduanya.

Pendekatan pendapatan digunakan untuk kelas aset tanah dengan peruntukan komersial atau tanah dengan skala pengembangan.

3. Pendekatan Biaya

Pendekatan ini berdasarkan prinsip bahwa harga dimana pembeli di pasar akan membayar atas aset yang sedang dinilai tidak akan lebih dari biaya untuk membeli atau mengkonstruksi aset modern yang ekuivalen, tanpa mempertimbangkan biaya akibat penundaan waktu dan biaya keterlambatan. Untuk aset yang tidak baru, pendekatan biaya memperhitungkan estimasi depresiasi termasuk penyusutan fisik dan keusangan lainnya (fungsional dan eksternal). Biaya konstruksi dan depresiasi ditentukan oleh hasil analisis dari perkiraan biaya konstruksi dan depresiasi sesuai dengan kelaziman yang ada di pasar atau dalam praktek penilaian.

Pendekatan biaya digunakan untuk kelas aset bangunan umum, waduk dan prasarana, instalasi dan mesin pembangkit, perlengkapan transmisi, perlengkapan distribusi, material cadangan utama, perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik.

Informasi mengenai penilaian kembali aset tetap pada tanggal 31 Desember 2018 untuk Kelompok Aset yang Direvaluasi adalah sebagai berikut:

2. Income Approach

This approach considers the income and costs related to the assets being valued and estimates value through a capitalization process. Capitalization connects income (generally net income) with certain definition of value through conversion of income into the estimated value. This process uses the direct capitalization method or the discounted cash flow method or both.

The income approach is applied to the asset class of commercial land rights or land rights with development scale.

3. Cost Approach

This approach is based on a principle that the price that a buyer in the market would pay for the asset being valued would not be more than the cost to purchase or construct a modern equivalent asset, without taking into consideration undertime and overtime charges. For assets which are not new, the cost approach includes depreciation estimation including physical depreciation and other obsolescence (functional and external). Construction cost and depreciation should be determined from analysis of the construction cost and estimation of depreciation according to the prevalence in the market or in valuation practice.

The cost approach is applied to asset classes of buildings, reservoir and infrastructure, installation and power plants, transmission equipments, distribution equipments, major spare parts and telecommunications and data processing equipments used for electricity supply.

Information on the revaluation of assets as at December 31, 2018 for Class of Revalued Assets is as follows:

**PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Jumlah tercatat sebelum revaluasi/ <i>Net carrying value before revaluation</i> 31 Desember/ December 31, 2018 Rp	Surplus (rugi) revaluasi/ <i>Profit (loss) revaluation</i> Rp	Nilai wajar/ <i>Fair value</i> 31 Desember/ December 31, 2018 Rp	
Nilai revaluasi				Revalued amount
<u>Pemilikan langsung</u>				<u>Direct acquisition</u>
Tanah	15,562,440	1,741,084	17,303,524	Land
Bangunan umum, waduk dan prasarana	9,035,321	(332,048)	8,703,273	Buildings, reservoir and infrastructure
Instalasi dan mesin pembangkit	139,284,007	(42,088,082)	97,195,925	Installation and power plant
Perlengkapan transmisi dan distribusi	5,089,376	(190,282)	4,899,094	Transmission and distribution equipment
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	14,268	(2,209)	12,059	Telecommunication and data processing equipment
Material cadang	3,783	(1,190)	2,593	Spare parts
Subjumlah	<u>168,989,195</u>	<u>(40,872,727)</u>	<u>128,116,468</u>	Subtotal
Akumulasi penyusutan				Accumulated depreciation
<u>Pemilikan langsung</u>				<u>Direct acquisition</u>
Bangunan umum, waduk dan prasarana	(824,457)	824,457	--	Buildings, reservoir and infrastructure
Instalasi dan mesin pembangkit	(10,456,031)	10,456,031	--	Installation and power plant
Perlengkapan transmisi dan distribusi	(371,869)	371,869	--	Transmission and distribution equipment
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	(3,673)	3,673	--	Telecommunication and data processing equipment
Material cadang	(3,783)	3,783	--	Spare parts
Subjumlah	<u>(11,659,813)</u>	<u>11,659,813</u>	<u>--</u>	Subtotal
Jumlah Tercatat	<u>157,329,382</u>	<u>(29,212,914)</u>	<u>128,116,468</u>	Net carrying value

Secara total penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi Kelompok Aset yang Direvaluasi dicatat sebagai "defisit revaluasi aset tetap" adalah sebesar Rp29.212.914

Defisit revaluasi, dikurangi dengan penghasilan pajak tangguhan terkait dan pajak final atas revaluasi aset tetap dikreditkan pada penghasilan komprehensif lain dan disajikan sebagai defisit revaluasi aset tetap pada penghasilan komprehensif lain.

Analisa aset non-keuangan yang dicatat pada Nilai Wajar berdasarkan Hirarki Nilai Wajar sesuai dengan PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar.

Tidak terdapat aset tetap yang bisa digolongkan ke dalam Nilai Wajar level 1.

In total, decrease in the carrying amounts of the class of Revalued Assets is recorded as "property, plant and equipment revaluation deficit" amounting to Rp29,212,914.

The revaluation deficit, net of applicable deferred income taxes and final tax on property, plant and equipment revaluation, is credited to other comprehensive income and presented in property, plant and equipment revaluation deficit in other comprehensive income section.

Analysis non-financial assets recorded at fair value, based on Fair Value Hierarchy in SFAS 68: Fair Value Measurement.

There were no property, plant and equipment which could be classified as the level 1 Fair Value.

**PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada

Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2019 and 2018

(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Nilai Wajar level 2 dari tanah dihitung dengan menggunakan pendekatan pasar dan pendekatan pendapatan, sedangkan untuk bangunan menggunakan pendekatan biaya. *Input* yang diperoleh dari pasar yaitu antara lain:

- a. Harga jual atau harga sewa per meter persegi;
- b. Tingkat hunian;
- c. Tingkat pertumbuhan;
- d. Tingkat diskonto dan kapitalisasi;
- e. Biaya pembuatan baru per meter persegi;
- f. Depresiasi, keusangan fungsional dan eksternal.

The level 2 Fair Value of land rights is calculated using the market approach and income approach, while building value is calculated using the cost approach. Data inputs were obtained from the market that consists of among others:

- a. Sale or rental price per square meter;
- b. Occupancy rate;
- c. Growth rate;
- d. Discount and capitalization rate;
- e. Replacement cost new per square meter;
- f. Depreciation, functional and external obsolescence.

Pengukuran nilai wajar 31 Desember 2018 menggunakan/
Fair value measurement at December 31, 2018 using

	Level 1 Rp	Level 2 Rp	Level 3 Rp	Jumlah/ Total Rp	
Pengukuran nilai wajar berulang					Fair value measurement
Tanah	--	339,938	16,963,586	17,303,524	Land
Bangunan, waduk dan prasarana	--	89,372	8,613,901	8,703,273	Building, reservoir and infrastructure
Instalasi dan mesin Pembangkit	--	--	97,195,925	97,195,925	Installation and power plant
Perlengkapan transmisi dan distribusi	--	--	4,899,094	4,899,094	Transmission and distribution equipment
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	--	--	12,059	12,059	Telecommunication and data processing equipment
Material cadang	--	--	2,593	2,593	Spare parts
Jumlah	--	429,310	127,687,158	128,116,468	Total

Penyesuaian dilakukan berdasarkan ukuran, lokasi, bentuk dan spesifikasi, hak atas tanah dan elemen perbandingan lainnya.

Adjustments were made based on size, location, shapes and specifications, land rights and other comparison elements.

Nilai Wajar level 3 dihitung dengan menerapkan pendekatan pasar, pendekatan pendapatan dan pendekatan biaya dengan menggunakan *input* yang tidak dapat diobservasi.

The level 3 Fair Value is calculated through the market approach, income approach and cost approach by using unobservable inputs.

Selain menggunakan *input* yang berasal dari pasar, KJPP RHR juga menggunakan *input* yang tidak dapat diobservasi dari pasar dan menggunakan asumsi khusus terkait dengan jenis aset yang tergolong sebagai properti khusus, seperti pembangkit listrik, jaringan transmisi dan distribusi, gardu listrik dan lainnya.

Other than the data inputs observed from the market, KJPP RHR also used unobservable market data inputs and used special assumptions related to the assets classified as specialized property, such as power plants, transmission and distribution networks, substations and others.

Penyesuaian dilakukan berdasarkan ukuran, kapasitas, usia, lokasi, bentuk dan spesifikasi, hak atas tanah dan elemen perbandingan lainnya.

Adjustments were made based on size, capacity, age, location, shapes and specifications, land rights and other comparison elements.

**PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Informasi mengenai pengukuran nilai wajar yang menggunakan informasi signifikan yang tidak dapat diobservasi (Level 3) adalah sebagai berikut:

Information about fair value measurements using significant unobservable inputs (Level 3) are as follows:

	Nilai wajar pada 31 Desember 2018/ Fair value at December 31, 2018	Teknik penilaian/ Valuation technique	Informasi yang tidak dapat diobservasi / Unobservable input	Kisaran input yang tidak dapat diobservasi/ Range or unobservable input	Hubungan informasi yang tidak dapat diobservasi terhadap nilai wajar/ Relationship or unobservable inputs to fair value	
Tanah	16,963,586					Land
Tanah kantor	13,643,688	Pendekatan pendapatan dengan metode pendekatan lahan / Income approach with the land approach method	-Perubahan peruntukan/ Zoning changes -Penyesuaian parameter pengembangan/Adjustment of parameter development	0,3 - 3,0	Semakin tinggi koefisien luas bangunan ("KLB") maka semakin tinggi nilai wajar / The higher the KLB, the higher fair value	Land for office building
Tanah pembangkit	3,319,898	Pendekatan pendapatan dengan metode pendekatan lahan / Income approach with the land approach method	-Perubahan peruntukan/ Zoning changes -Penyesuaian parameter pengembangan/Adjustment of parameter development	0,3 - 3,0	Semakin tinggi koefisien luas bangunan ("KLB") maka semakin tinggi nilai wajar / The higher the KLB, the higher fair value	Land for power plant
Bangunan	8,613,901					Building
Bangunan umum	1,772,851	Pendekatan biaya / Cost approach	Penyusutan fisik / Physical depreciation	0% - 90%	Semakin besar penyusutan fungsional maka semakin rendah nilai wajar / The higher the functional depreciation, the lower the fair value	Buildings
Waduk dan prasarana	6,841,050	Trending / Trending	Penyusutan fisik / physical depreciation	0% - 6%	Semakin besar penyusutan fisik maka semakin rendah nilai wajar / The higher the physical depreciation, the lower the fair value	Reservoir and infrastructure
			Indeks / Index	1,00	Semakin besar tingkat indeks maka semakin besar nilai wajar / The higher the index rate, the higher fair value	
Instalasi dan mesin pembangkitan	97,195,925	Pendekatan biaya / Cost approach	Penyusutan ekonomis / Functional depreciation	1% - 10%	Semakin besar penyusutan fungsional maka semakin rendah nilai wajar / The higher the functional depreciation, the lower the fair value	Installation and power plant
			Indeks / Index	1,005 - 3,866	Semakin besar tingkat indeks maka semakin besar nilai wajar / The higher the index rate, the higher fair value	
Perlengkapan transmisi dan distribusi	4,899,094	Pendekatan biaya / Cost approach	Penyusutan fungsional / Functional depreciation	1%-10%	Semakin besar penyusutan fungsional maka semakin rendah nilai wajar / The higher the functional depreciation, the lower the fair value	Transmission and distribution equipment
			Indeks / Index	1,00-1,66	Semakin besar tingkat indeks maka semakin besar nilai wajar / The higher the index rate, the higher fair value	
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	12,059	Pendekatan biaya / Cost approach	Indeks / Index	1,00 - 1,49	Semakin besar tingkat indeks maka semakin besar nilai wajar / The higher the index rate, the higher fair value	Telecommunication and data processing equipments
Material cadang	2,593	Pendekatan biaya / Cost approach	Indeks / Index	1,00 - 1,16	Semakin besar tingkat indeks maka semakin besar nilai wajar / The higher the index rate, the higher fair value	Spare parts

Pada tanggal 31 Desember 2019, manajemen Perusahaan dan entitas anak berpendapat bahwa nilai wajar aset tetap tidak berbeda secara material dengan jumlah tercatatnya sehingga tidak melakukan revaluasi aset tetap.

As of December 31, 2019, the Company's and its subsidiaries' management believe that the fair value of property, plant and equipment is not materially different with its carrying amount, hence did not revalue its property, plant and equipment.

Selain yang menggunakan model revaluasi, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai wajar aset tetap dengan nilai tercatatnya.

There is no significant difference between the fair value and carrying value of property, plant, and equipment other than assets that have applied the revaluation model.

Pekerjaan dalam Pelaksanaan

Akun ini merupakan biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan pembangunan dan renovasi/ perbaikan sarana kelistrikan, sebagai berikut:

Construction in Progress

This account represents costs incurred in relation to the construction and renovation/ betterment of power supply facilities, as follows:



PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2019 Rp	2018 Rp	
Pembangkit listrik			Power plants
Tenaga gas uap (PLTGU)	3,970,288	2,170,347	Steam gas power plant (PLTGU)
Tenaga air (PLTA)	44,534	4,713	Hydro power plant (PLTA)
Tenaga gas (PLTG)	23,991	19,401	Gas power plant (PLTG)
Tenaga uap (PLTU)	14,050	6,321	Steam power plant (PLTU)
Fungsi pendukung	15,115	32,606	Supporting function
Jumlah	4,067,978	2,233,388	Total

Aset Tidak Digunakan dalam Operasi

Aset tidak digunakan dalam operasi meliputi aset tetap yang akan direlokasi, yang sementara belum digunakan dalam operasi dan aset tetap akan diperbaiki.

Penyusutan atas aset yang tidak digunakan dalam operasi sebesar Rp63.650 tahun 2019 dan Rp41.961 tahun 2018 dicatat sebagai bagian dari beban lain-lain.

Manajemen berpendapat bahwa percepatan penyusutan atas aset yang tidak digunakan dalam operasi memadai untuk menutup risiko kerugian penurunan nilai yang mungkin timbul dari aset tersebut.

Assets Not Used in Operations

Assets not used in operations comprised of those to be relocated, those temporarily not in use in operations, and those to be repaired.

Depreciation on assets not used in operations amounting to Rp63,650 in 2019 and Rp41,961 in 2018 are recorded as part of other expenses.

Management believes that accelerated depreciation on assets not used in operations is adequate to cover possible loss on impairment on the value of such assets.

7. Properti Investasi

Akun ini merupakan tanah milik Perusahaan yang terletak di Paiton - Jawa Timur, Bekasi - Jawa Barat, Pluit - Jakarta Utara, Cipeundeuy-Bandung Barat dan Asahan - Sumatera Utara dengan hak legal berupa Hak Guna Bangunan ("HGB") berjangka waktu dari 32 sampai 40 tahun, jatuh tempo pada 2032, yang disewakan kepada PT PLN (Persero), PT Paiton Energy, PT Jawa Power, PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero), PT Anugerah Mega Energi, PT Pertamina Hulu Energi ONWJ, PT Nusantara Regas, PT Cirata Karya Lestari dan PT Bajradaya Sentranusa.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perusahaan melakukan penilaian kembali atas nilai wajar properti investasi, yang dilakukan oleh KJPP RHR, penilai independen yang telah terdaftar di Kementerian Keuangan dan OJK.

Nilai wajar properti investasi diklasifikasikan sebagai level 2 dalam hirarki nilai wajar.

7. Investment Properties

This account pertains to pieces of land owned by the Company located in Paiton - East Java, Bekasi - West Java, Pluit - North Jakarta, Cipeundeuy - West Bandung and Asahan - North Sumatera with Building Use Rights ("HGB") for periods between 32 to 40 years until 2032, which are leased to PT PLN (Persero), PT Paiton Energy, PT Jawa Power, PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero), PT Anugerah Mega Energi, PT Pertamina Hulu Energi ONWJ, PT Nusantara Regas, PT Cirata Karya Lestari and PT Bajradaya Sentranusa.

As of December 31, 2019 and 2018, the Company performs revaluation of the fair value of its investment properties which is performed by KJPP RHR, an independent valuer registered in the Ministry of Finance and FSA.

The fair values of investment properties are within level 2 of the fair value hierarchy.

**PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Nilai wajar properti investasi pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp1.493.375 dan Rp1.463.273, dan menghasilkan keuntungan revaluasi masing-masing sebesar Rp27.205 dan Rp34.847 pada tahun 2019 dan 2018. Pada tahun 2019 terdapat penambahan properti investasi sebesar Rp2.897.

The fair value of the investment properties as of December 31, 2019 and 2018 amounting to Rp1,493,375 and Rp1,463,273, respectively, resulted to a gain on revaluation amounted to Rp27,205 and Rp34,847 in 2019 and 2018, respectively. In 2019, there are addition of investment properties amounting to Rp2,897.

8. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Rincian investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama adalah sebagai berikut:

8. Investments in Associate and Joint Ventures

Details of investments in associate and joint ventures are as follows:

Entitas/ <i>Entity</i>	Domisili/ <i>Domicile</i>	Jenis usaha/ <i>Nature of business</i>	Tahun operasi	Persentase penyertaan/ <i>Percentage of ownership</i>	
			komersial/ <i>Commercial operations</i>	2019	2018
				%	%
<u>Investasi pada entitas asosiasi/</u> <u><i>Investment in associate</i></u>					
PT Sumber Segara Primadaya	Cilacap	Pembangkit listrik tenaga uap/ <i>Steam gas electricity power plant</i>	2006	49.00	49.00
<u>Investasi pada ventura bersama/</u> <u><i>Investment in joint ventures</i></u>					
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali	Jepara	Operasi dan pemeliharaan/ <i>Operational and maintainance</i>	2010	49.00	49.00
PT Bajradaya Sentranusa	Asahan	Pembangkit listrik tenaga air/ <i>Hydro electricity power plant</i>	2011	36.61	36.61
PT Bukit Pembangkit Innovative	Palembang	Pembangkit listrik tenaga uap/ <i>Steam gas electricity power plant</i>	2015	37.25	37.25
PT Rekind Daya Mamuju	Jakarta	Pembangkit listrik/ <i>Power plant</i>	2018	10.00	10.00
PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali	Jakarta	Pembangkit listrik/ <i>Power plant</i>	2019	30.00	30.00
PT Guohua Taidian Pembangkitan Jawa Bali	Jakarta	Operasi dan pemeliharaan/ <i>Operational and maintainance</i>	2019	30.00	30.00
PT North Sumatera Hydro Energy	Jakarta	Pembangkit listrik/ <i>Power plant</i>	*)	25.00	25.00
PT Sumbagsel Energi Sakti Pewali	Jakarta	Pembangkit listrik/ <i>Power plant</i>	*)	10.00	0.00

*) Dalam tahap pengembangan

*) Under development stage



PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Mutasi investasi pada entitas asosiasi dan
ventura bersama adalah sebagai berikut:

The changes in investments in associate and
joint ventures are as follows:

2019							
Jumlah tercatat 31 Desember 2018/ Carrying amount December 31, 2018	Penambahan (pengurangan)/ Additions (deductions)	Bagian atas laba bersih/ Share of profit	Penyesuaian translasi/ Translation adjustment	Jumlah tercatat 31 Desember 2019/ Carrying amount December 31, 2019			
Asosiasi					Associate		
PT Sumber Segara Primadaya	2,388,685	(145,542)	388,865	--	2,632,008	PT Sumber Segara Primadaya	
Ventura Bersama					Joint Ventures		
PT Bajradaya Sentranusa	796,052	(47,448)	116,012	(69,729)	794,887	PT Bajradaya Sentranusa	
PT Bukit Pembangkit Innovative	1,292,688	--	82,207	(92,895)	1,282,000	PT Bukit Pembangkit Innovative	
PT Komipo Pembangkitan						PT Komipo Pembangkitan	
Jawa Bali	38,509	(23,824)	18,796	--	33,481	Jawa Bali	
PT Rekind Daya Mamuju	57,375	--	1,329	--	58,704	PT Rekind Daya Mamuju	
PT Shenhua Guohua						PT Shenhua Guohua	
Pembangkitan Jawa Bali	1,837,497	--	284,173	(79,937)	2,041,733	Pembangkitan Jawa Bali	
PT Guohua Taidian						PT Guohua Taidian	
Pembangkitan Jawa Bali	2,022	--	11	(88)	1,945	Pembangkitan Jawa Bali	
PT North Sumatera Hydro Energy	1,032,931	--	--	(23,404)	1,009,527	PT North Sumatera Hydro Energy	
PT Sumbagselenergi Sakti Pewali	--	26,291	--	--	26,291	PT Sumbagselenergi Sakti Pewali	
Subjumlah	5,057,074	(44,981)	502,528	(266,053)	5,248,568	Subtotal	
Jumlah	7,445,759	(190,523)	891,393	(266,053)	7,880,576	Total	
2018							
Jumlah tercatat 31 Desember 2017/ Carrying amount December 31, 2017	Penambahan (pengurangan)/ Additions (deductions)	Bagian atas laba bersih/ Share of profit	Penyesuaian translasi/ Translation adjustment	Jumlah tercatat 31 Desember 2018/ Carrying amount December 31, 2018			
Asosiasi					Associate		
PT Sumber Segara Primadaya	1,881,670	(135,633)	642,648	--	2,388,685	PT Sumber Segara Primadaya	
Ventura Bersama					Joint Ventures		
PT Bajradaya Sentranusa	687,856	(45,665)	94,613	59,248	796,052	PT Bajradaya Sentranusa	
PT Bukit Pembangkit Innovative	1,095,535	--	81,008	116,145	1,292,688	PT Bukit Pembangkit Innovative	
PT Komipo Pembangkitan						PT Komipo Pembangkitan	
Jawa Bali	41,313	(26,628)	23,824	--	38,509	Jawa Bali	
PT Rekind Daya Mamuju	54,604	--	2,771	--	57,375	PT Rekind Daya Mamuju	
PT Shenhua Guohua						PT Shenhua Guohua	
Pembangkitan Jawa Bali	1,291,950	254,294	219,642	71,611	1,837,497	Pembangkitan Jawa Bali	
PT Guohua Taidian						PT Guohua Taidian	
Pembangkitan Jawa Bali	2,024	--	2	(4)	2,022	Pembangkitan Jawa Bali	
PT North Sumatera Hydro Energy	746,084	286,847	--	--	1,032,931	PT North Sumatera Hydro Energy	
Subjumlah	3,919,366	468,848	421,860	247,000	5,057,074	Subtotal	
Jumlah	5,801,036	333,215	1,064,508	247,000	7,445,759	Total	

Seluruh entitas asosiasi dan ventura bersama dicatat oleh Perusahaan dengan menggunakan metode ekuitas. Seluruh entitas asosiasi dan ventura bersama yang dimiliki Perusahaan merupakan perusahaan swasta tertutup dan tidak terdapat harga pasar kuotasi yang tersedia untuk saham-saham tersebut.

All associate and joint ventures are recorded by the Company using equity method. All associate and joint ventures owned by the Company are private companies and there is no quoted market price available for its shares.

Per 31 Desember 2019 dan 2018, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat pembatasan dan risiko signifikan yang terkait dengan investasi pada asosiasi dan ventura bersama.

As of December 31, 2019 and 2018, management believes that there is no significant restriction and risk regarding the investment in associate and joint ventures.

**PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Berikut ini adalah ringkasan informasi keuangan entitas asosiasi dan ventura bersama pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.

The following table contains the summarized financial information for associate and joint ventures as of December 31, 2019 and 2018, which are accounted for using the equity method.

Entitas asosiasi/ Associate
PT Sumber Segara Primadaya

	2019 Rp	2018 Rp	
<u>Lancar</u>			<u>Current</u>
Kas dan setara kas	685,351	1,532,408	Cash and cash equivalents
Aset lancar lainnya	2,765,852	1,578,546	Other current assets
Jumlah aset lancar	3,451,203	3,110,954	Total current assets
Liabilitas keuangan	(2,512,421)	(2,002,295)	Financial liabilities
Utang usaha	(2,278,407)	(2,763,956)	Trade payables
Jumlah liabilitas lancar	(4,790,828)	(4,766,251)	Total current liabilities
<u>Tidak lancar</u>			<u>Non-current</u>
Aset	23,121,443	21,335,882	Assets
Liabilitas keuangan	(7,179,540)	(7,566,323)	Financial liabilities
Liabilitas lainnya	(11,691,649)	(9,497,591)	Other liabilities
Jumlah liabilitas tidak lancar	(18,871,189)	(17,063,914)	Total non-current liabilities
Aset bersih	2,910,629	2,616,671	Net assets
% kepemilikan efektif	49.00%	49.00%	% of effective ownership
Bagian atas aset bersih			Share of the net assets
entitas asosiasi	1,426,208	1,282,169	of associate
Penyesuaian metode ekuitas	1,205,800	1,106,516	Adjustment of equity method
Jumlah tercatat	2,632,008	2,388,685	Total carrying value
Pendapatan	6,432,671	6,880,312	Revenue
Beban operasi	(4,439,814)	(5,110,366)	Operating expenses
Pendapatan keuangan	15,120	680,758	Interest income
Beban keuangan	(1,148,378)	(687,815)	Interest expense
Beban pajak penghasilan	(65,996)	(451,738)	Income tax expense
Laba tahun berjalan	793,603	1,311,151	Income for the year
Rugi komprehensif lain	(471)	376	Other comprehensive income
Jumlah penghasilan komprehensif	793,132	1,311,527	Total comprehensive income
Dividen yang diterima dari entitas asosiasi	(145,542)	(135,633)	Dividend received from associate





PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Ventura bersama/ Joint ventures

2019										
	PT Bukit Pembangkit Innovative	PT Bajradaya Sentranusa	PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali	PT Rekind Daya Mamuju	PT Shenhua Guohua PJB	PT Guohua Taidian PJB	PT North Sumatera Hydro Energy	PT Sumbagsel Energi Sakti Pewali	Jumlah/ Total	
Lancar										Current
Kas dan setara kas	183.883	451.788	50.104	1.516	369.430	19.380	930.315	--	2.008.416	Cash and cash equivalents
Aset lancar lainnya	236.446	196.677	48.048	271.780	1.321.838	10.556	8.589	--	2.093.934	Other current assets
Jumlah aset lancar	420.329	648.465	98.152	273.296	1.691.268	29.936	938.904	--	4.100.350	Total current assets
Liabilitas keuangan	(125.548)	(239.934)	(33.817)	(137.455)	(1.529.111)	(16.249)	--	--	(2.082.114)	Financial liabilities
Utang usaha	(829.185)	(173.017)	(34.519)	(80.103)	(1.067.689)	(8.350)	(180.505)	--	(2.373.368)	Trade payable
Jumlah liabilitas lancar	(954.733)	(412.951)	(68.336)	(217.558)	(2.596.800)	(24.599)	(180.505)	--	(4.455.482)	Total current liabilities
Tidak lancar										Non-current
Aset	5.558.163	5.476.554	40.423	1.470.082	22.799.710	1.655	3.454.726	--	38.801.313	Assets
Liabilitas keuangan	(1.113.770)	(2.302.046)	(4.317)	(815.995)	(11.790.209)	--	--	--	(16.016.337)	Financial liabilities
Liabilitas lainnya	(896.234)	(869.111)	--	(47.802)	(3.190.537)	--	(21.604)	--	(4.825.288)	Other liabilities
Jumlah liabilitas tidak lancar	(1.810.004)	(3.171.157)	(4.317)	(863.797)	(14.970.746)	--	(21.604)	--	(20.841.625)	Total non-current liabilities
Aset bersih	3.213.755	2.540.911	65.922	662.023	6.923.432	6.992	4.191.521	--	17.604.556	Net assets
% kepemilikan efektif	40.25%	36.61%	49.00%	10.00%	30.00%	30.00%	25.00%	10.00%		% of effective ownership
Bagian atas aset bersih										Share of net assets
ventura bersama	1.293.536	930.227	32.301	66.202	2.077.028	2.098	1.047.880	--	5.449.272	of joint ventures
Penyesuaian metode ekuitas	(11.536)	(135.340)	1.180	(7.498)	(35.295)	(153)	(38.353)	26.291	(200.704)	Adjustment of equity method
Jumlah tercatat	1.282.000	794.887	33.481	58.704	2.041.733	1.945	1.009.527	26.291	5.248.568	Total carrying value
Pendapatan	1.028.801	666.916	230.105	298.537	6.570.114	142.537	--	--	8.937.010	Revenue
Harga pokok penjualan	(449.341)	(42.955)	(150.954)	(200.029)	(4.326.619)	--	--	--	(5.169.898)	Cost of goods sold
Depresiasi dan amortisasi	(1.008)	(406)	(1.108)	--	--	--	--	--	(2.522)	Depreciation and amortization
Beban operasi	(131.947)	(29.354)	(26.286)	(22.522)	(901.098)	(140.319)	--	--	(1.251.506)	Operating expense
Pendapatan keuangan	2.497	3.994	3.805	60	--	83	--	--	10.439	Interest income
Beban keuangan	(151.348)	(216.179)	(1.470)	(58.271)	--	(470)	--	--	(427.738)	Interest expense
Beban pajak penghasilan	(93.414)	(65.157)	(15.754)	(4.481)	(395.150)	(1.797)	--	--	(575.753)	Income tax expense
Laba tahun berjalan	204.240	316.859	38.358	13.294	947.247	34	--	--	1.520.032	Income for the year
Laba(rugi) komprehensif lain	--	--	(392)	--	--	--	--	--	(392)	Other comprehensive income/loss
Jumlah penghasilan komprehensif	204.240	316.859	37.966	13.294	947.247	34	--	--	1.519.640	Total comprehensive income
Dividen yang diterima dari ventura bersama	--	(47.448)	(23.824)	--	--	--	--	--	(71.272)	Dividend received from joint ventures

2018										
	PT Bukit Pembangkit Innovative	PT Bajradaya Sentranusa	PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali	PT Rekind Daya Mamuju	PT Shenhua Guohua PJB	PT Guohua Taidian PJB	PT North Sumatera Hydro Energy	Jumlah/ Total		
Lancar										Current
Kas dan setara kas	287.206	381.296	42.018	19.926	56.431	5.129	1.198.864	--	1.990.870	Cash and cash equivalents
Aset lancar lainnya	915.128	187.297	71.650	236.420	224.800	7.320	11.860	--	1.854.475	Other current assets
Jumlah aset lancar	1.202.334	568.593	113.668	256.346	281.231	12.449	1.210.724	--	3.645.345	Total current assets
Liabilitas keuangan	(677.470)	(81.537)	(14.814)	--	--	--	(14.481)	--	(768.302)	Financial liabilities
Utang usaha	(694.291)	(70.883)	(56.906)	(73.910)	(1.047.812)	(6.374)	(19.016)	--	(1.969.192)	Trade payable
Jumlah liabilitas lancar	(1.371.761)	(132.420)	(71.720)	(73.910)	(1.047.812)	(6.374)	(33.497)	--	(2.737.494)	Total current liabilities
Tidak lancar										Non-current
Aset	5.136.458	5.860.342	36.768	1.802.300	18.325.944	1.173	3.185.452	--	34.148.437	Assets
Liabilitas keuangan	(1.166.144)	(2.851.963)	(2.141)	(1.055.390)	(11.125.623)	--	--	--	(16.201.261)	Financial liabilities
Liabilitas lainnya	(855.400)	(864.030)	--	(30.373)	(191.095)	--	--	--	(1.749.898)	Other liabilities
Jumlah liabilitas tidak lancar	(1.821.544)	(3.715.993)	(2.141)	(1.094.763)	(11.316.718)	--	--	--	(17.951.159)	Total non-current liabilities
Aset bersih	3.145.487	2.580.522	76.575	689.973	6.242.645	7.248	4.362.679	--	17.105.129	Net assets
% kepemilikan efektif	37.25%	36.61%	49.00%	10.00%	30.00%	30.00%	25.00%			% of effective ownership
Bagian atas aset bersih										Share of net assets
ventura bersama	1.171.694	944.729	37.521	68.997	1.872.793	2.174	1.090.670	--	5.188.578	of joint ventures
Penyesuaian metode ekuitas	120.994	(148.677)	12.916	(11.622)	(35.296)	(152)	(57.739)	--	(119.576)	Adjustment of equity method
Jumlah tercatat	1.292.688	796.052	50.437	57.375	1.837.497	2.022	1.032.931	--	5.068.002	Total carrying value
Pendapatan	972.887	641.395	223.386	252.561	9.763.842	64.594	--	--	11.918.665	Revenue
Harga pokok penjualan	(325.552)	(5.539)	(163.264)	(135.531)	(8.311.425)	--	--	--	(8.941.311)	Cost of goods sold
Depresiasi dan amortisasi	(672)	(379)	(953)	(156)	--	--	--	--	(2.160)	Depreciation and amortization
Beban operasi	--	(54.204)	(30.856)	(9.280)	(49.699)	(64.789)	--	--	(208.828)	Operating expense
Pendapatan keuangan	13.053	717	44.181	122	566	204	--	--	58.843	Interest income
Beban keuangan	(312.146)	(237.437)	(4.913)	(73.275)	(499.027)	(1)	--	--	(1.126.799)	Interest expense
Beban pajak penghasilan	(146.307)	(86.138)	(18.962)	(6.727)	(172.119)	(2)	--	--	(430.255)	Income tax expense
Laba tahun berjalan	201.263	258.415	48.619	27.714	732.138	6	--	--	1.268.155	Income for the year
Laba(rugi) komprehensif lain	--	--	--	--	--	--	--	--	--	Other comprehensive income/loss
Jumlah penghasilan komprehensif	201.263	258.415	48.619	27.714	732.138	6	--	--	1.268.155	Total comprehensive income
Dividen yang diterima dari ventura bersama	--	(45.665)	(26.628)	--	--	--	--	--	(72.293)	Dividend received from joint ventures

**PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Investasi pada entitas diatas diperoleh terutama untuk tujuan potensi pertumbuhan jangka panjang, karena seluruh entitas tersebut bergerak dalam industri ketenagalistrikan yang sama dengan industri Perusahaan.

The investments in the above entities are held primarily for long-term growth potential, since these entities are engaged in the same electricity industry as the Company.

PT Sumber Segara Primadaya ("S2P")

Pada tahun 2019 dan 2018, Perusahaan memperoleh dividen dari S2P masing-masing sebesar US\$10.192.000 dan US\$9.212.002 (ekuivalen Rp145.542 dan Rp135.633).

PT Sumber Segara Primadaya ("S2P")

In 2019 and 2018, the Company received dividend from S2P amounting to US\$10,192,000 and US\$9,212,002, respectively (equivalent to Rp145,542 and Rp135,633).

PT Bajradaya Sentranusa ("BDSN")

Pada tahun 2019 dan 2018, Perusahaan memperoleh dividen dari BDSN masing-masing sebesar US\$3.333.442 dan US\$3.163.479 (ekuivalen Rp47.448 dan Rp45.665).

PT Bajradaya Sentranusa ("BDSN")

In 2019 and 2018, the Company received dividend from BDSN amounting to US\$3,333,442 and US\$3,163,479, respectively (equivalent to Rp47,448 and Rp45,665).

PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali ("KPJB")

Pada tahun 2019 dan 2018, Perusahaan memperoleh dividen dari KPJB masing-masing sebesar Rp23.824 dan Rp26.628. Selama tahun 2019, Perusahaan telah menerima dividen tunai sebesar Rp23.688 (termasuk pelunasan piutang dividen tahun 2018 sebesar Rp11.928) dan mencatat piutang dividen sebesar Rp12.064.

PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali ("KPJB")

In 2019 and 2018, the Company received dividend from KPJB amounting to Rp23,824 and Rp26,628, respectively. During 2019, the Company received cash dividends amounting to Rp23,688 (including payment of dividend receivables 2018 amounting to Rp11,928) and recorded as dividend receivables amounting to Rp12,064.

PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali ("SGPJB")

Pada tahun 2018, PJBI, entitas anak, melakukan penambahan penysetoran saham sebesar US\$17.033.467 (ekuivalen Rp254.294) tanpa mengubah persentase kepemilikan.

PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali ("SGPJB")

In 2018, PJBI, a subsidiary, made additional investment amounting to US\$17,033,467 (equivalent to Rp254,294) without percentage changes in ownership.

PT North Sumatera Hydro Energy ("NSHE")

Pada tahun 2018, PJBI melakukan penambahan penysetoran saham sebesar US\$20.831.307 (ekuivalen Rp286.847) tanpa mengubah persentase kepemilikan.

PT North Sumatera Hydro Energy ("NSHE")

In 2018, PJBI made additional investment amounting to US\$20,831,307 (equivalent to Rp286,847) without percentage changes in ownership.

PT Sumbagsel Energi Sakti Pewali ("SS Pewali")

Pada tahun 2019, PJBI, entitas anak, melakukan investasi pada SS Pewali dengan melakukan penyertaan saham sebesar US\$1.860.000 (ekuivalen Rp26.291) setara dengan kepemilikan saham sebesar 10%.

PT Sumbagsel Energi Sakti Pewali ("SS Pewali")

In 2019, PJBI made investment to SS Pewali through purchase of shares amounting to US\$1,860,000 (equivalent to Rp26,291) equivalent to 10% ownership share.



PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

9. Rekening Bank dan Deposito Berjangka Dibatasi Penggunaannya

9. Restricted Cash in Bank and Time Deposit

	2019 Rp	2018 Rp	
Jaminan bank garansi			Bank guarantee
Rekening bank			Cash in bank
Bank CIMB Niaga - pihak ketiga			Bank CIMB Niaga - third party
Rupiah	94,223	68,297	Rupiah

10. Piutang Kepada Ventura Bersama

10. Receivables from Joint Ventures

	2019 Rp	2018 Rp	
PT Shenhua Guohua PJB (SGPJB)	785,639	822,375	PT Shenhua Guohua PJB (SGPJB)
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali (KPJB)	--	5,582	PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali (KPJB)
Jumlah	785,639	827,957	Total

PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali ("SGPJB")

Pada tanggal 20 November 2018, PJBI, entitas anak, memberikan pinjaman jangka panjang sebesar US\$56.516.733 kepada SGPJB dengan suku bunga LIBOR 6 bulan + 4%. Pinjaman akan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2033. Pelunasan pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal 15 Januari dan 15 Juli dan cicilan pertama pokok piutang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2021.

PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali ("SGPJB")

On November 20, 2018, PJBI, a subsidiary, granted a long-term loan amounting to to SGPJB amounted US\$56,516,733 with interest rate of LIBOR 6 month + 4%. The loan will mature on December 15, 2033. The interest will be due every January 15 and July 15 and the first installment of principal payment will be on December 15, 2021.

PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali ("KPJB")

Pada tanggal 29 Desember 2010, Perusahaan menyetujui untuk memberikan pinjaman kepada Komipo PJB dalam bentuk *shareholder loan* dengan suku bunga 14% per tahun. Pinjaman ini bertujuan untuk memberikan Komipo PJB dana cadangan untuk memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Pengembangan Operasi dan Pemeliharaan dengan PJB, dimana Komipo PJB berkewajiban untuk memiliki dana cadangan selama berlakunya perjanjian untuk enam bulan operasi dan pemeliharaan pembangkit. Pada tanggal 29 Desember 2014, Perusahaan melakukan amandemen atas pinjaman yang diberikan kepada Komipo PJB sehingga jangka waktu pinjaman akan jatuh tempo pada tanggal 29 Desember 2019. Pelunasan pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal 29 Desember dan cicilan pertama pokok piutang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2012. Pinjaman telah dilunasi pada 29 Desember 2019.

PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali ("KPJB")

On December 29, 2010, the Company agreed to provide loans to Komipo PJB, in the form of a *shareholder loan* with annual interest of 14% per annum. The purpose of this loan is to provide cash reserves for Komipo PJB in order to comply with the contractual obligations stipulated in the Expansion Operation and Maintenance Agreement with the Company, which requires Komipo PJB to, at any time of the contract term, maintain the cash reserves for six-months operation and maintenance of power plant. On December 29, 2014, the Company made an amendment on loan agreement to Komipo PJB to extend the due date to December 29, 2019. The interest will be due every December 29 and the first installment of principal payment was on December 29, 2012. The loan has been fully paid on December 29, 2019.

**PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

11. Aset Tidak Lancar Lain

11. Other Non-Current Assets

	2019 Rp	2018 Rp	
Deposito jangka panjang			Long-term time deposits
Bank Rakyat Indonesia			Bank Rakyat Indonesia
US\$	655,271	--	US\$
Biaya ditangguhkan	441,609	229,863	Deferred charges
Aset takberwujud			Intangible assets
Piranti Lunak	24,755	20,559	Software
Biaya legal terkait perpanjangan hak atas tanah	49,069	32,568	Legal costs for renewal landrights
Jumlah	1,170,704	282,990	Total
Tingkat bunga deposito jangka panjang per tahun			Interest rates per annum on long-term time deposits
US\$	3.10%	-	US\$
Jangka waktu	24 Bulan/Months	-	Due date

Deposito jangka panjang merupakan deposito dari entitas anak (PJBI) yang bergerak di bidang investasi ketenagalistrikan. Deposito ini digunakan untuk pembiayaan proyek PLTA Batang Toru di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Long-term time deposits represent time deposits of subsidiary (PJBI) which engage in investment in electricity. The time deposits are intended to project financing of PLTA Batang Toru in Kabupaten Tapanuli Selatan.

12. Kas dan Setara Kas

12. Cash and Cash Equivalents

	2019 Rp	2018 Rp	
Kas	2,676	3,006	Cash on hand
Bank			Cash in banks
Pihak berelasi (Catatan 34)			Related parties (Note 34)
Bank Mandiri			Bank Mandiri
Rupiah	377,090	803,863	Rupiah
US\$	141,601	27,699	US\$
Bank Negara Indonesia			Bank Negara Indonesia
Rupiah	454,486	319,979	Rupiah
US\$	29,382	5,035	US\$
Bank Rakyat Indonesia			Bank Rakyat Indonesia
Rupiah	69,447	181,097	Rupiah
US\$	435,872	24,227	US\$
Jumlah pihak berelasi	1,507,878	1,361,900	Total related parties
Pihak ketiga			Third parties
Bank Bukopin			Bank Bukopin
Rupiah	77,402	72,979	Rupiah
Bank CIMB Niaga			Bank CIMB Niaga
Rupiah	120,509	38,019	Rupiah
US\$	126	198	US\$
Bank International Indonesia			Bank International Indonesia
US\$	--	3	US\$
Lain-lain (masing-masing dibawah 5% dari jumlah)			Others (each below 5% of total)
Rupiah	3,725	854	Rupiah
Jumlah pihak ketiga	201,762	112,053	Total third parties
Subjumlah	1,709,640	1,473,953	Subtotal



**PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2019 Rp	2018 Rp	
Setara kas - deposito berjangka			Cash equivalents - time deposits
Pihak berelasi (Catatan 34)			Related parties (Note 34)
Bank Rakyat Indonesia			Bank Rakyat Indonesia
Rupiah	22,000	95,000	Rupiah
Bank Negara Indonesia			Bank Negara Indonesia
Rupiah	60,000	94,241	Rupiah
US\$	24,327	--	US\$
Bank Mandiri			Bank Mandiri
Rupiah	10,103	11,692	Rupiah
Jumlah pihak berelasi	116,430	200,933	Total related parties
Pihak ketiga			Third parties
Bank Bukopin			Bank Bukopin
Rupiah	10,000	10,000	Rupiah
Bank CIMB Niaga			Bank CIMB Niaga
Rupiah	112	112	Rupiah
Jumlah pihak ketiga	10,112	10,112	Total third parties
Subjumlah	126,542	211,045	Subtotal
Jumlah kas dan setara kas	1,838,858	1,688,004	Total cash and cash equivalents
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun			Interest rates per annum on time deposits
Rupiah	5.43%-6.04%	4.50%-7.25%	Rupiah
US\$	1.00%-2.60%	-	US\$

13. Deposito Berjangka

13. Time Deposits

	2019 Rp	2018 Rp	
Pihak berelasi (Catatan 34)			Related parties (Note 34)
Bank Rakyat Indonesia			Bank Rakyat Indonesia
Rupiah	293,000	293,620	Rupiah
US\$	--	890,891	US\$
Bank Negara Indonesia			Bank Negara Indonesia
US\$	13,901	--	US\$
Bank Mandiri			Bank Mandiri
Rupiah	20,000	20,000	Rupiah
Jumlah	326,901	1,204,511	Total
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun			Interest rates per annum on time deposits
Rupiah	5.94% - 6.75%	6.00% - 6.75%	Rupiah
US\$	2.50%	2.50%	US\$
Jangka waktu	6-12 Bulan/ Months	6-12 Bulan/ Months	Maturity

**PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. Piutang Usaha

14. Trade Receivables

a. Berdasarkan langganan

a. By debtor

	2019 Rp	2018 Rp	
Pihak berelasi (Catatan 34)			Related parties (Note 34)
PT PLN (Persero)	22,073,022	20,065,224	PT PLN (Persero)
PT Indonesia Power	38,158	37,575	PT Indonesia Power
Jumlah	22,111,180	20,102,799	Total
Pihak ketiga	29,498	43,657	Third parties
Jumlah	22,140,678	20,146,456	Total

b. Berdasarkan umur

b. By age

	2019 Rp	2018 Rp	
Belum jatuh tempo	7,051,907	7,002,005	Not yet due
Sudah jatuh tempo			Past due
1 s/d 90 hari	5,667,717	2,379,999	1 to 90 days
91 s/d 360 hari	5,884,898	6,460,593	91 to 360 days
Lebih dari 360 hari	3,536,156	4,303,859	More than 360 days
Jumlah	22,140,678	20,146,456	Total

Berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan dan PT PLN (Persero), piutang usaha Perusahaan diperhitungkan terhadap utang usaha dan dividen (Catatan 32).

Based on the agreement between the Company and PT PLN (Persero), trade receivables of the Company was offset with account payable and dividend (Note 32).

Perusahaan tidak membentuk penyisihan piutang karena manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang dapat tertagih.

The Company does not provide allowance for doubtful accounts as management believes that all receivables are collectible.

15. Persediaan – bersih

15. Inventories - net

	2019 Rp	2018 Rp	
Bahan bakar dan pelumas	1,453,875	1,683,883	Fuel and lubricants
Material pemeliharaan	399,073	412,437	Maintenance materials
Jumlah	1,852,948	2,096,320	Total
Penyisihan penurunan nilai	(19,753)	(17,376)	Provision for impairment
Bersih	1,833,195	2,078,944	Net
Mutasi penyisihan penurunan nilai			Changes in allowance for decline in value
Saldo awal tahun	(17,376)	(12,897)	Balance at beginning of year
Penambahan	(2,377)	(4,479)	Additions
Saldo akhir tahun	(19,753)	(17,376)	Balance at end of year

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan persediaan memadai untuk menutup kerugian penurunan nilai persediaan.

Management believes that the allowance for decline in value of inventories is adequate to cover possible losses on decline in value of inventories.



PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

16. Pajak Dibayar Di muka

16. Prepaid Taxes

	2019 Rp	2018 Rp	
Pajak penghasilan badan			Corporate income taxes
Perusahaan			The Company
2017	--	62,949	2017
2018	556,907	676,942	2018
2019	396,285	--	2019
Anak Perusahaan			Subsidiaries
2018	2,585	2,591	2018
2019	4,179	--	2019
Pajak pertambahan nilai	1,046,552	946,594	Value added tax
Jumlah	2,006,508	1,689,076	Total

17. Modal Saham

17. Capital Stock

	2019 dan/ and 2018			
	Jumlah saham/ Number of shares	Persentase pemilikan/ Percentage of ownership %	Jumlah modal disetor/ Total paid-up capital	
Nama pemegang saham				Name of stockholders
PT PLN (Persero)	5,999,999,999	100.00	3,000,000	PT PLN (Persero)
Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero)	1	--	--	Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero)
Jumlah	6,000,000,000	100	3,000,000	Total

18. Tambahan Modal Disetor

18. Additional Paid-in Capital

Tambahan modal disetor berasal dari nilai pengalihan aset tetap, termasuk dana rehabilitasi PLTU Gresik Unit 1 dan 2 (berdasarkan Surat Direktur Utama PT PLN (Persero) No. 1311/533/DIRUT/2001 tanggal 19 Maret 2001), dan material pemeliharaan sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2000 yang diterima dari PT PLN (Persero), pemegang saham.

Additional paid-in capital represents transferred of property, plant and equipment, including fund provided for rehabilitation of Gresik PLTU Unit 1 and 2 (based on the Letter No. 1311/533/DIRUT/2001 dated March 19, 2001 from the President Director of PT PLN (Persero)), and maintenance materials from 1996 to 2000 that were received from PT PLN (Persero), the shareholder.

Pengampunan Pajak

Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan No. 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2016 dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-18/PJ/2016 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Uang Tebusan dalam Rangka Pengampunan Pajak, Perusahaan berpartisipasi dalam pengampunan pajak ini.

Tax Amnesty

In connection with the implementation of Regulation of the Minister of Finance No. 118/PMK.03/ 2016 on the Implementation of Law No. 11 year 2016 on Tax Amnesty, as amended by Regulation of the Minister of Finance No. 141/PMK.03/2016 and Directorate General of Tax Regulation No. PER-18/PJ/2016 on Redemption Payment of Excess Refund in the framework of Tax Amnesty. The Company participated in this tax amnesty.

**PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak ("SKPP") yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KET-777/PP/WPJ.19/2016 tanggal 4 Oktober 2016, aset Perusahaan yang dilaporkan adalah sebesar Rp44.207. Pada 31 Desember 2016, nilai tersebut dicatat sebagai tambahan modal disetor.

Based on Tax Amnesty Approval Letter ("TAAL") issued by the Minister of Finance of Republic of Indonesia No. KET-777/PP/WPJ.19/2016 dated October 4, 2016, the Company declared assets amounted to Rp44,207. As of December 31, 2016, such amount are recorded as additional paid-in capital.

19. Kepentingan Non-pengendali

19. Non-controlling Interests

2019					
	Jumlah tercatat 31 Desember 2018/ Carrying amount December 31, 2018	Penambahan (dividen)/ Additions (dividend)	Bagian atas laba bersih/ Equity in net income	Jumlah tercatat 31 Desember 2019/ Carrying amount December 31, 2019	
PT Pembangkitan					PT Pembangkitan
Jawa-Bali Services	18,465	(1,598)	4,047	20,914	Jawa-Bali Services
PT Navigat Innovative					PT Navigat Innovative
Indonesia	68,911	--	(598)	68,313	Indonesia
PT Rekadaya ElektriKA	1,369	--	764	2,133	PT Rekadaya ElektriKA
PT Pembangkitan					PT Pembangkitan
Jawa Bali Investasi	2	--	--	2	Jawa Bali Investasi
PT Prima Layanan Niaga					PT Prima Layanan Niaga
Suku Cadang	75,917	--	8,408	84,325	Suku Cadang
Jumlah	164,664	(1,598)	12,621	175,687	Total
2018					
	Jumlah tercatat 31 Desember 2017/ Carrying amount December 31, 2017	Penambahan (dividen)/ Additions (dividend)	Bagian atas laba bersih/ Equity in net income	Jumlah tercatat 31 Desember 2018/ Carrying amount December 31, 2018	
PT Pembangkitan					PT Pembangkitan
Jawa-Bali Services	13,811	(350)	5,004	18,465	Jawa-Bali Services
PT Navigat Innovative					PT Navigat Innovative
Indonesia	57,891	--	11,020	68,911	Indonesia
PT Rekadaya ElektriKA	(199)	--	1,568	1,369	PT Rekadaya ElektriKA
PT Pembangkitan					PT Pembangkitan
Jawa Bali Investasi	2	--	--	2	Jawa Bali Investasi
PT Prima Layanan Niaga					PT Prima Layanan Niaga
Suku Cadang	73,598	--	2,319	75,917	Suku Cadang
Jumlah	145,103	(350)	19,911	164,664	Total

Pada tanggal 23 April 2014, Perusahaan membeli kepemilikan PT Indonesia Power dan PT PLN Batam di RE sebesar masing-masing Rp38.500 dan Rp2.500. Selisih dari nilai pembelian dan kepentingan non-pengendali yang dibeli, dicatat pada selisih transaksi dengan kepentingan non-pengendali.

As of April 23, 2014, the Company purchase the ownership of RE from PT Indonesia Power and PT PLN Batam amount Rp38,500 and Rp2,500. The difference from the purchase amount and non-controlling interest purchased is recorded in difference in transaction with non-controlling interest.

Pada tanggal 16 Juni 2017, Perusahaan dan PT Indonesia Power mendirikan PLN SC. PT Indonesia Power selaku pemilik kepentingan non-pengendali melakukan penysetoran modal sebesar Rp73.500 atau setara dengan 49% kepemilikan saham.

In June 16, 2017, the Company and PT Indonesia Power established PLN SC. PT Indonesia Power as the owner of non-controlling interest made an investment through capital injection amounted to Rp73,500 or equivalent to 49% of the ownership share.



PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

20. Utang Usaha

Akun ini merupakan liabilitas sehubungan dengan pembelian bahan bakar, barang dan jasa sebagai berikut:

	2019 Rp	2018 Rp
Pihak berelasi (Catatan 34)		
PT Pertamina (Persero)	479,320	760,677
PT Nusantara Regas	423,998	463,175
PT Perusahaan Gas Negara (Persero)	289,166	219,300
Perum Jasa Tirta	56,379	71,533
PT PLN (Persero)	41,146	25,812
PT Indonesia Power	--	52,418
Jumlah pihak berelasi	1,290,009	1,592,915
Pihak ketiga	2,141,185	1,902,065
Jumlah	3,431,194	3,494,980

20. Trade Payables

This account represents payables arising from purchases of fuel, goods and services as follows:

Related parties (Note 34)
PT Pertamina (Persero)
PT Nusantara Regas
PT Perusahaan Gas Negara (Persero)
Perum Jasa Tirta
PT PLN (Persero)
PT Indonesia Power
Total related parties
Third parties
Total

21. Utang Lain-lain

	2019 Rp	2018 Rp
Pihak berelasi (Catatan 34)		
PT PLN (Persero)	9,887	17,751
PT Indonesia Comnets Plus	6,868	8,094
PT Halyora Power	4,647	--
PT Indonesia Power	3,835	682
Jumlah pihak berelasi	25,237	26,527
Pihak ketiga	845,507	440,653
Jumlah	870,744	467,180

21. Other Payables

Related parties (Note 34)
PT PLN (Persero)
PT Indonesia Comnets Plus
PT Halyora Power
PT Indonesia Power
Total related parties
Third parties
Total

22. Utang Pajak

	2019 Rp	2018 Rp
Pajak kini (Catatan 30)		
Perusahaan	--	--
Entitas anak	193	5,015
Pajak penghasilan		
Pasal 4 (2)	56,255	49,277
Pasal 15	--	162
Pasal 21	41,312	64,484
Pasal 22	9,472	23,084
Pasal 23	11,011	13,984
Pajak pertambahan nilai	63,681	131,622
Lainnya	242	1,795
Jumlah	182,166	289,423

22. Taxes Payable

Current tax (Note 30)
The Company
Subsidiaries
Income taxes
Article 4 (2)
Article 15
Article 21
Article 22
Article 23
Value added tax
Others
Total

**PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

23. Penjualan Tenaga Listrik

Akun ini merupakan penjualan tenaga listrik kepada PT PLN (Persero) (Catatan 34).

23. Sale of Electricity

This account represents sale of electricity to PT PLN (Persero) (Note 34).

24. Pendapatan Usaha Lainnya

Akun ini merupakan pendapatan jasa pemeliharaan dan konstruksi yang diperoleh dari pihak berelasi (Catatan 34) dan pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut:

24. Other Operating Revenues

This account represents operating revenues from maintenance services and constructions, which was obtained from related parties (Note 34) and third parties, with details as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Jasa operasi dan pemeliharaan	4,422,238	4,255,967	Operation and maintenance services
Konstruksi	1,396,106	1,492,640	Construction
Lainnya	258,289	315,103	Other
Jumlah	6,076,633	6,063,710	Total

25. Bahan Bakar dan Pelumas

	2019 Rp	2018 Rp	
Bahan bakar minyak			Fuel
Residu	255,211	794,001	Residue
Solar High Speed Diesel	245,747	1,809,392	Solar High Speed Diesel
Subjumlah	500,958	2,603,393	Subtotal
Bahan bakar non-minyak			Non-fuel
Gas alam	15,700,397	17,065,881	Natural gas
Batubara	2,386,964	2,390,952	Coals
Air	141,803	178,927	Water
Bahan kimia dan bahan lainnya	41,164	29,380	Chemical and other materials
Pajak air permukaan	16,882	18,364	Surface water tax
Subjumlah	18,287,210	19,683,504	Subtotal
Minyak pelumas	42,129	37,045	Lubricants
Jumlah	18,830,297	22,323,942	Total

26. Pembelian Tenaga Listrik

Akun ini merupakan biaya pemakaian tenaga listrik dari *auxiliaries equipment* mesin pembangkit.

26. Purchased Electricity

This account represents the cost of using electricity from auxiliaries equipment of generating machinery.

27. Pemeliharaan

Akun ini merupakan beban yang timbul dari pemakaian material dan jasa borongan untuk keperluan pemeliharaan. Rinciannya adalah sebagai berikut:

27. Maintenance

This account represents spare parts used and contractor fees for maintenance purposes. The details are as follows:



PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2019 Rp	2018 Rp	
Pemakaian material pemeliharaan	1,717,984	1,839,883	Maintenance materials used
Jasa borongan:			Contracted services:
Mesin pembangkit dan perlengkapan	2,362,259	2,235,784	Machine generator and equipment
Perlengkapan umum	592,530	551,185	General equipment
Kendaraan bermotor, peralatan umum dan lain-lain	83,890	83,135	Motor vehicles, general equipment and others
Tanah, bangunan dan infrastruktur	42,234	51,940	Land, building and infrastructure
Jumlah	4,798,897	4,761,927	Total

28. Kepegawaian

28. Personnel

	2019 Rp	2018 Rp	
Gaji dan tunjangan	753,049	728,339	Salaries and allowances
Bonus dan insentif karyawan	390,676	396,254	Employee bonus and incentives
Imbalan kerja (Catatan 33)	352,010	296,174	Employee benefits (Note 33)
Pendidikan dan pelatihan	111,628	91,315	Education and trainings
Tunjangan kesehatan	60,704	58,058	Medical allowances
Lain-lain (dibawah Rp20.000)	33,110	36,674	Others (below Rp20,000)
Jumlah	1,701,177	1,606,814	Total

29. Lain-lain

29. Others

	2019 Rp	2018 Rp	
Beban kontrak	1,213,598	1,291,076	Contract expense
Asuransi (Catatan 34)	88,878	70,633	Insurance (Note 34)
Honorarium	86,590	78,386	Honorarium
Pajak dan retribusi lainnya	80,392	84,253	Taxes and other retribution
Perjalanan dinas	60,305	48,471	Business travelling
Sewa bangunan dan tanah	31,946	10,635	Rent building and land
Jasa profesional	29,309	21,645	Professional fees
Konsumsi	24,109	23,966	Meals consumption
Pos dan telekomunikasi	15,774	11,853	Postage and telecommunication
Lain-lain (dibawah Rp10.000)	70,266	62,470	Others (below Rp10,000)
Jumlah	1,701,167	1,703,388	Total

30. Beban Pajak

30. Tax Expense

Beban pajak penghasilan Perusahaan dan entitas anak terdiri dari:

Tax expense of the Company and its subsidiaries consist of the following:

	2019 Rp	2018 Rp	
Kini	84,700	75,367	Current
Tangguhan	2,865,316	1,667,885	Deferred
Jumlah beban pajak penghasilan	2,950,016	1,743,252	Total tax expenses

**PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan dengan taksiran penghasilan kena pajak Perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The reconciliations of profit before income tax expense and the estimated taxable income of the Company for the years ended December 31, 2019 and 2018 are as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Laba konsolidasian sebelum pajak	9,613,338	7,660,684	Income before tax per consolidated
Laba sebelum pajak			Income before tax of
penghasilan - entitas anak	(89,194)	(86,987)	the subsidiaries
Laba sebelum pajak Perusahaan	9,524,144	7,573,697	Income before tax of the Company
Perbedaan waktu:			Timing differences:
Beban penurunan nilai aset tidak			Impairment in value of assets
digunakan dalam operasi	26,925	--	not used in operations
Beban imbalan karyawan lainnya	(68,819)	33,936	Other short-term benefit
Beban imbalan kerja	185,191	105,871	Provision for employee benefits
Penambahan (pemulihan)			Addition (recovery) of decline
penurunan nilai persediaan	2,377	4,480	in value of inventories
			Allowance for impairment of property, plant
Penyisihan penurunan nilai aset tetap	--	5,309	and equipment
			Depreciation of property, plant
Penyusutan aset tetap	(5,388,563)	(5,077,508)	and equipment
Perbedaan tetap:			Permanent differences:
Kesejahteraan karyawan, sumbangan,			Employee welfare, donation, medical
pengobatan dan beban lainnya	104,900	116,699	and other expenses
Bagian laba bersih entitas asosiasi	(1,056,448)	(1,314,626)	Equity in net income of associate
Penghasilan yang telah dikenakan			Income already subjected to
pajak final	(44,453)	(50,845)	final tax
Penyesuaian nilai wajar			Adjustment on fair value
properti investasi	(29,765)	(34,847)	of investment properties
Beban lain yang tidak dapat diperhitungkan	216,628	235,677	Other nondeductible expenses
Laba kena pajak	3,472,117	1,597,843	Taxable income
Laba (rugi) fiskal tahun:			Fiscal income (losses) year:
2018	1,597,843	--	2018
2017	(1,655,016)	(1,655,016)	2017
2016	(10,860,818)	(10,860,818)	2016
Penyesuaian rugi fiskal 2016	150,984	150,984	Fiscal loss adjustments 2016
Akumulasi rugi fiskal Perusahaan	(7,294,890)	(10,767,007)	Accumulated fiscal losses of the Company
Beban pajak kini:			Current tax expense:
Perusahaan	--	--	The Company
Entitas anak	84,700	75,367	Subsidiaries
Jumlah	84,700	75,367	Total
Pembayaran pajak dimuka			Prepaid taxes
Perusahaan	396,285	676,942	The Company
Entitas anak	84,507	70,352	Subsidiaries
Jumlah	480,792	747,294	Total
Taksiran kurang (lebih bayar) pajak			Estimated under (over) payment
penghasilan badan:			of corporate income tax:
Perusahaan	(396,285)	(676,942)	The Company
Entitas Anak	193	5,015	Subsidiaries
Jumlah	(396,092)	(671,927)	Total



PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2019 Rp	2018 Rp	
Utang pajak kini (Catatan 22)			Current tax payable (Note 22)
Perusahaan	--	--	The Company
Entitas Anak	193	5,015	Subsidiaries
Jumlah utang pajak kini	193	5,015	Total current tax payable

Pajak penghasilan kini dihitung berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak. Nilai tersebut mungkin disesuaikan pada saat Surat Pemberitahuan Pajak Badan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak.

Current income tax computations are based on estimated taxable income. The amounts may be adjusted when Annual Tax Returns are filed to the Tax Office.

Rugi fiskal dapat dikompensasikan dengan laba fiskal pada masa lima tahun mendatang sejak kerugian fiskal terjadi. Manajemen memperkirakan bahwa kerugian fiskal dapat dikompensasikan dengan laba fiskal dimasa mendatang. Sehingga per 31 Desember 2019 dan 2018, Perusahaan mengakui aset pajak tangguhan dari rugi fiskal masing-masing sebesar Rp1.123.723 dan Rp2.691.752.

The fiscal loss can be compensated against the taxable income for a period of five years subsequent to the year the fiscal loss was incurred. Management believes that it is probable future taxable profits will be available to be utilized fiscal losses. Therefore as of December 31, 2019 and 2018, the Company recognized deferred tax assets from fiscal losses amounted to Rp1,123,723 and Rp2,691,752, respectively.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan

Rincian dari aset dan liabilitas pajak tangguhan Perusahaan dan entitas anak adalah sebagai berikut:

Deferred tax assets and liabilities

The details of the Company and its subsidiaries deferred tax assets and liabilities are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2018 Rp	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited (charged) to income Rp	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi komprehensif lain/ Credited (charged) to other comprehensive income Rp	Penyesuaian/ Adjustment Rp	31 Desember/ December 31, 2019 Rp	
Aset (liabilitas) pajak tangguhan						Deferred tax asset (liabilities)
Perusahaan						The Company
Liabilitas imbalan kerja	594,804	46,296	50,263	--	691,363	Employee benefit liabilities
Imbalan karyawan lainnya	96,501	(17,205)	--	--	79,296	Other short-term benefit
Persediaan	4,344	594	--	--	4,938	Inventory
Aset tetap	1,591,237	(1,340,409)	--	--	250,828	Property, plant and equipment
Akumulasi rugi fiskal	2,691,752	(868,029)	--	(700,000)	1,123,723	Accumulated fiscal losses
Jumlah	4,978,638	(2,178,753)	50,263	(700,000)	2,150,148	Total
Aset pajak tangguhan						Deferred tax assets
Entitas anak - bersih	40,957	11,452	1,861	7,652	61,922	Subsidiaries - net
Jumlah aset pajak tangguhan - bersih	5,019,595	(2,167,301)	52,124	(692,348)	2,212,070	Total of deferred tax assets - net
Entitas anak - bersih	(45,275)	(5,667)	6,404	--	(44,538)	Subsidiaries - net
Jumlah liabilitas pajak tangguhan - bersih	(45,275)	(5,667)	6,404	--	(44,538)	Total of deferred tax liabilities - net
Beban pajak tangguhan		(2,172,968)		(692,348)		Deferred tax expense

**PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2017 Rp	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited (charged) to income Rp	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ komprehensif lain/ Credited (charged) to other comprehensive income Rp	Penyesuaian/ Adjustment Rp	31 Desember/ December 31, 2018 Rp	
Aset (liabilitas) pajak tangguhan						Deferred tax asset (liabilities)
Perusahaan						The Company
Liabilitas imbalan kerja	608,428	26,468	(40,092)	--	594,804	Employee benefit liabilities
Imbalan karyawan lainnya	88,017	8,484	--	--	96,501	Other short-term benefit
Persediaan	3,224	1,120	--	--	4,344	Inventory
Aset tetap	(4,879,213)	(1,268,050)	7,738,500	--	1,591,237	Property, plant and equipment
Akumulasi rugi fiskal	3,128,959	(399,461)	--	(37,746)	2,691,752	Accumulated fiscal losses
Jumlah	(1,050,585)	(1,631,439)	7,698,408	(37,746)	4,978,638	Total
Aset pajak tangguhan						Deferred tax assets
Entitas anak - bersih	41,429	6,740	(7,356)	144	40,957	Subsidiaries - net
Jumlah aset pajak tangguhan - bersih	(1,009,156)	(1,624,699)	7,691,052	(37,602)	5,019,595	Total of deferred tax assets - net
Entitas anak - bersih						Subsidiaries - net
Jumlah liabilitas pajak tangguhan - bersih	(31,682)	(5,584)	(8,009)	--	(45,275)	Total of deferred tax liabilities - net
Beban pajak tangguhan						Deferred tax expense
		(1,630,283)		(37,602)		

Rekonsiliasi antara jumlah (manfaat) beban pajak dan hasil perkalian laba (rugi) sebelum pajak dengan tarif pajak efektif adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the total tax (benefit) expense and the amounts computed by applying the effective tax rates to the profit (loss) before tax is as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	9,613,338	7,660,684	Profit before tax per consolidated statements of comprehensive income
Beban pajak dengan tarif pajak yang berlaku	2,403,335	1,915,171	Tax expenses at prevailing tax rate
Pendapatan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:			Nondeductible income (nontaxable income):
Penghasilan bunga telah dikenakan pajak final	(11,113)	(12,711)	Finance income subject to final tax
Penghasilan lain tidak dapat dikurangkan	(134,554)	(159,208)	Other nondeductible income
Total beban pajak - Perusahaan	2,257,668	1,743,252	Total expenses taxes - Company
Penyesuaian atas deferred tax assets	(7,652)	--	Deferred tax assets adjustment
Penyesuaian atas penurunan nilai akumulasi rugi fiskal	700,000	--	Impairment on fiscal loss adjustment
Beban pajak penghasilan konsolidasian	2,950,016	1,743,252	Consolidated income tax expense

Lain-lain

1. Pada tanggal 28 Desember 2016, Perusahaan menerima surat keputusan Direktorat Jenderal Pajak No.KEP-73/WPJ.19/KP.03/2016 mengenai diterimanya permohonan Perusahaan atas perubahan metode depresiasi fiskal dari metode saldo menurun menjadi metode garis lurus. Keputusan ini berlaku efektif semenjak tanggal 1 Januari 2017.

Others

1. On December 28, 2016, the Company received decision letter from Directorate General of Taxation No.KEP-73/WPJ.19/KP.03/2016 on the acceptance of the Company request for changing its fiscal depreciation method from declining method into straight line method. This decision has been applied effectively since January 1, 2017.



PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

- Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan No.118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.141/PMK.03/2016 dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-18/PJ/2016 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Uang Tebusan Dalam Rangka Pengampunan Pajak. Perusahaan berpartisipasi dalam pengampunan pajak ini.

Berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KET-777/PP/WPJ.19/2016 tanggal 4 Oktober 2016, aset Perusahaan yang dideklarasikan adalah sebesar Rp44.207.

- Pada tanggal 25 April 2018, Perusahaan menerima surat ketetapan pajak lebih bayar pajak penghasilan badan untuk tahun fiskal 2016 No. 0028/406/16/051/18 dan menyatakan bahwa rugi fiskal Perusahaan untuk tahun 2016 adalah sebesar Rp10.709.834. Berdasarkan surat ketetapan tersebut, Perusahaan telah melakukan penyesuaian atas aset pajak tangguhan dari akumulasi rugi fiskal sebesar Rp37.746.

- In connection with the implementation of Regulation of the Minister of Finance No. 118/PMK.03/2016 on the Implementation of Law No. 11 year 2016 on Tax Amnesty, as amended by Regulation of the Minister of Finance No. 141/PMK.03/2016 and Directorate General of Tax Regulation No. PER-18/PJ/2016 on Redemption Payment of Excess Refund in the framework of Tax Amnesty. The Company participated in this tax amnesty.

Based on Tax Amnesty Approval Letter issued by the Minister of Finance of Republic of Indonesia No. KET-777/PP/WPJ.19/2016 dated October 4, 2016, the Company declared assets amounted to Rp44,207.

- On April 25, 2018, the Company has received the tax assessment letter of overpayment of corporate income tax for fiscal year 2016 No. 0028/406/16/051/18 and stated that the Company's fiscal losses for fiscal year 2016 amounting to Rp10,709,834. Based on the tax assessment letter, the Company has adjusted the deferred tax assets from accumulated fiscal losses amounting to Rp37,746.

31. Laba Per Saham Dasar/ Dilusian

Laba bersih

Laba bersih untuk tujuan perhitungan laba per saham dasar adalah Rp6.645.392 tahun 2019 dan Rp5.904.512 tahun 2018.

Lembar saham

Rata-rata tertimbang saham untuk tujuan perhitungan laba per saham dasar masing-masing sebanyak 6.000 juta saham.

Perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi dilusi saham, sehingga laba per saham dasar sama dengan laba per saham dilusian.

31. Basic/ Diluted Earnings Per Share

Net income

Net income for the computation of basic earnings per share amounted to Rp6,645,392 in 2019 and Rp5,904,512 in 2018.

Number of shares

The weighted average number of shares for the computation of basic earnings per share was 6,000 million shares.

The Company did not have potential dilutive ordinary shares, thus basic earnings per share is similar to diluted earnings per share.

**PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

32. Dividen dan Cadangan Umum

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 14 Juni 2019, pemegang saham memberi kuasa kepada pemegang saham mayoritas untuk menetapkan saldo laba, cadangan umum dan tujuan serta dividen atas laba Perusahaan tahun 2018. Berdasarkan surat PT PLN (Persero) tanggal 1 Juli 2019, pembagian dividen untuk tahun buku 2018 ditetapkan sebesar Rp5.904.512 atau Rp984 (nilai penuh) per lembar saham.

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler tanggal 30 Oktober 2019, pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai dari saldo laba Perseroan sampai dengan tahun buku 2017 yang tidak ditentukan penggunaannya kepada PLN selaku pemegang saham mayoritas sebesar Rp3.501.956 melalui mekanisme set-off terhadap piutang komponen A Perseroan kepada PLN yang senilai atau setara dengan 25,8% dari saldo piutang komponen A per 31 Desember 2018.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 14 Mei 2018, pemegang saham memberi kuasa kepada pemegang saham mayoritas untuk menetapkan saldo laba, cadangan umum dan tujuan serta dividen atas laba Perusahaan tahun 2017. Berdasarkan surat PT PLN (Persero) tanggal 15 Agustus 2018, pembagian dividen untuk tahun buku 2017 ditetapkan sebesar Rp3.668.635 atau Rp611 (nilai penuh) per lembar saham.

Pada tahun 2019 dan 2018, pembayaran dividen kepada PT PLN (Persero) diperhitungkan terhadap piutang usaha pihak berelasi (Catatan 14 dan 34).

32. Dividend and General Reserve

Based on Annual General Meeting of Stockholders dated June 14, 2019 the stockholders granted authority to the majority stockholder to determine the Company's retained earnings, appropriation of general reserves and dividends for the 2018 net income. Based on letter from PT PLN (Persero) dated July 1, 2019 the distribution of dividends for the year 2018 amounted to Rp5,904,512 or Rp984 (full amount) per share.

Based on decision of the Circular General Meeting of Stockholders dated October 30, 2019, stockholders approved the distribution of cash dividends from the Company's unappropriated retained earnings up to the 2017 financial year by PLN as the majority shareholder amounted to Rp3,501,956 through a set-off mechanism for the Company's component A receivables to PLN or equal to 25,8% of the balance of accounts receivable component A as of December 31, 2018.

Based on Annual General Meeting of Stockholders dated May 14, 2018 the stockholders granted authority to the majority stockholder to determine the Company's retained earnings, appropriation of general reserves and dividends for the 2017 net income. Based on letter from PT PLN (Persero) dated August 15, 2018 the distribution of dividends for the year 2017 amounted to Rp3,668,635 or Rp611 (full amount) per share.

In 2019 and 2018, the dividend payment to PT PLN (Persero) was made through offset the trade receivable from related parties (Notes 14 and 34).

33. Liabilitas Imbalan Kerja

	2019 Rp	2018 Rp
Liabilitas diakui di laporan posisi keuangan:		
Program pensiun	13,205	54,268
Imbalan pascakerja lainnya	925,675	791,942
Imbalan pemeliharaan kesehatan	1,821,162	1,523,202
Imbalan jangka panjang lainnya	92,675	71,564
	<u>2,852,717</u>	<u>2,440,976</u>

33. Employee Benefits Liabilities

Liabilities recognized on statements of financial position:

Pension plan

Other post-employment benefits

Health care benefits

Other long-term benefits



PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2019 Rp	2018 Rp	
Beban diakui di			Expense recognized in
laba rugi (Catatan 28):			profit or loss (Note 28):
Program pensiun	9,110	4,973	Pension plan
Imbalan pascakerja lainnya	140,427	123,046	Other post-employment benefits
Imbalan pemeliharaan kesehatan	169,615	144,296	Health care benefits
Imbalan jangka panjang lainnya	32,858	23,859	Other long-term benefits
	352,010	296,174	
Pengukuran kembali program imbalan			Remeasurement on defined benefit plan
pasti diakui di penghasilan komprehensif lain:			recognized in other comprehensive income:
Program pensiun	(40,375)	36,396	Pension plan
Imbalan pascakerja lainnya	78,516	(83,609)	Other post-employment benefits
Imbalan pemeliharaan kesehatan	170,671	(147,434)	Health care benefits
Imbalan jangka panjang lainnya	--	--	Other long-term benefits
	208,812	(194,647)	

Program Pensiun Imbalan Pasti

Perusahaan dan entitas anak menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk semua karyawan tetap yang memenuhi syarat. Program pensiun ini memberikan imbalan berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja karyawan.

Dana pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun PLN ("DP-PLN"), pihak berelasi, yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. KEP-284/KM.17/1997 tanggal 15 Mei 1997.

DP-PLN telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam surat keputusan No. KEP-8/NB.1/2016 tanggal 11 Februari 2016 atas peningkatan imbalan pasti pensiun yang disediakan Perusahaan dan entitas anak dalam program dana pensiun.

Pendanaan DP-PLN terutama berasal dari iuran karyawan dan pemberi kerja masing-masing sebesar 6,00% dan 13,41% dari Penghasilan Dasar Pensiun.

Imbalan Pascakerja Lain

Selain dari program dana pensiun dan imbalan pemeliharaan kesehatan, Perusahaan dan entitas anak menyediakan imbalan pesangon dan penghargaan purna jabatan tanpa pendanaan bagi pegawai yang memenuhi syarat.

PJBS melakukan pendanaan dana pensiun yang dikelola bank swasta sebesar 4% dari penghasilan dasar.

Defined Benefit Pension Plan

The Company and its subsidiaries established a defined benefit pension plan covering all of its eligible permanent employees. This plan provides benefits based on basic pension income and the period of employment.

The pension plan is managed by Dana Pensiun PLN ("DP-PLN"), a related party, whose deed of establishment was approved by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. KEP-284/KM.17/1997 dated May 15, 1997.

DP-PLN has obtained an approval from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. KEP-8/NB.1/2016 dated on February 11, 2016 in relation to the increase in pension benefits provided by the Company and its subsidiaries' pension plan.

DP-PLN is mainly funded by contributions from both the employees and the employer which are 6.00% and 13.41% from basic pension income, respectively.

Other Post-employment Benefits

In addition to the pension plan and health care benefits, the Company and its subsidiaries also provide unfunded severance benefits and completion of employment award for eligible employees.

PJBS provide pension fund funding that managed by private bank at 4% of the basic income.

**PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

MKP serta RE dan entitas anak, memberikan imbalan pascakerja imbalan pasti tanpa pendanaan kepada karyawan yang memenuhi syarat yang didasarkan pada Undang-Undang No. 13/2003.

MKP and RE and subsidiary, provided the unfunded post-employment benefits for their qualifying employees which is based on Labor Law No. 13/2003.

Imbalan Pemeliharaan Kesehatan

Selain program pensiun DP-PLN dan imbalan pascakerja lain, Perusahaan juga menyediakan imbalan program kesehatan tanpa pendanaan bagi pensiunan dan keluarganya yang memenuhi persyaratan.

Health Care Benefits

In addition to DP-PLN pension plan and other post-employment benefits, the Company provides unfunded defined health care plans for their pensioners and its eligible dependents.

Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Perusahaan memberikan imbalan kerja jangka panjang tanpa pendanaan berupa uang cuti besar, tunjangan kecelakaan dinas, bantuan kematian dan pemakaman dan penghargaan winduan bagi karyawan yang memenuhi persyaratan.

Other Long-Term Benefits

The Company provides unfunded long-term benefits such as long service leave, work accident, death and funeral allowances and eight years service award for its qualifying employees.

Asumsi yang Digunakan dalam Perhitungan Liabilitas Imbalan Kerja.

Assumption Used in the Calculations of Employment Benefit Liabilities.

Tabel mortalita	CSO-58	Mortality table
Tingkat Pengunduran Diri		Resignation rate
Usia 18 s.d 49 Tahun	0.27%	Age 18 up to 49 years old
Usia 50 s.d 55 Tahun	0.01%	Age 50 up to 55 years old
Usia pensiun normal	56 Tahun/Years	Normal retirement age

Asumsi yang berhubungan dengan pengalaman mortalitas masa depan ditentukan berdasarkan saran aktuaris menurut statistik yang telah diterbitkan dan pengalaman setiap wilayah. Asumsi mortalitas yang digunakan adalah tabel mortalita CSO-58 yang diterapkan dalam penghitungan liabilitas kerja jangka panjang yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Assumptions regarding future mortality experience are set based on actuarial advice in accordance with published statistics and experience by the Company and its subsidiaries. The mortality assumptions used are based on the CSO-58 mortality table which applied in calculating the long term benefits liability recognized within the consolidated statement of financial position.

Penilaian aktuaria atas program pensiun, imbalan pascakerja lainnya, imbalan pemeliharaan kesehatan dan imbalan kerja jangka panjang lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, dilakukan oleh perusahaan konsultan aktuaria terdaftar, PT Binaputera Jaga Hikmah.

The actuarial calculations of pension plan, other post-employment benefits, health care benefits and other long-term benefits for the years ended December 31, 2019 and 2018 were prepared by a registered actuarial consulting firm, PT Binaputera Jaga Hikmah.

Pada tahun 2015, Perusahaan dan entitas anak melakukan studi untuk melihat tabel mortalitas mana yang paling sesuai dengan profil mortalitas pegawai dan pensiunan Perusahaan dan entitas anak. Dalam melakukan studi, Perusahaan dan entitas anak telah mempertimbangkan CSO-58, CSO-58 modifikasi, TMI 1 1993, TMI 2 1999, TMI 3

In 2015, the Company and its subsidiaries conducted a study to determine which mortality tables that suits most with the Company and its subsidiaries' employee and pensioners' mortality profile. In the study, the Company and its subsidiaries have considered CSO-58, CSO-58 modified, TMI 1 1993, TMI 2 1999, TMI 3 2011, and Taspen Mortality Table 2012.



PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2011, dan Tabel Mortalita Taspen 2012. Dari studi tersebut, Perusahaan dan entitas anak menemukan bahwa tabel mortalitas yang paling sesuai dengan profil mortalitas pegawai dan pensiunan Perusahaan dan entitas anak adalah CSO-58. Perusahaan dan entitas anak menerapkan CSO-58 secara retrospektif.

Based on the study, the Company and its subsidiaries found that mortality table that suits most with mortality profile of the Company and its subsidiaries' employees and pensioners is CSO-58. The Company and its subsidiaries apply CSO-58 retrospectively.

(i) Program Pensiun

Jumlah yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian ditentukan sebagai berikut:

(i) Pension Plan

The amounts recognized in the consolidated statement of financial position are determined as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Nilai kini kewajiban yang didanai	(450,003)	(413,223)	Present value of funded obligations
Aset program yang tidak diakui	--	--	Plan asset not recognized
Nilai wajar aset program	436,798	358,955	Fair value of plan assets
Defisit program yang didanai	(13,205)	(54,268)	Deficits of funded plans
Nilai kini kewajiban yang tidak didanai	--	--	Present value of unfunded obligations
Liabilitas pada laporan posisi keuangan	(13,205)	(54,268)	Liability in the statement of financial position

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Movement of present value of defined benefit obligation during the year is as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Pada awal tahun	413,223	394,713	At beginning of the year
Dibebankan ke laba rugi			Charged to profit or loss
Biaya jasa kini	8,326	7,429	Current service cost
Biaya bunga	34,792	27,750	Interest expense
	43,118	35,179	
Pengukuran kembali:			Remeasurement:
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi demografik	--	--	Loss from change in demographic assumptions
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	11,413	(17,231)	Loss from change in financial assumptions
Keuntungan aktuarial yang timbul dari kombinasi perubahan asumsi	--	--	Gain from combination of change in assumptions
Kerugian dari penyesuaian atas pengalaman	12,547	28,664	Loss from experience adjustment
	480,301	441,325	
Pembayaran manfaat	(30,298)	(28,102)	Benefit payment
Pada akhir tahun	450,003	413,223	At end of the year

**PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Mutasi nilai wajar aset program selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Movement of fair value of plan assets during the year is as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Pada awal tahun	358,955	373,511	<i>At beginning of year</i>
Pengukuran kembali:			<i>Remeasurements:</i>
Imbal hasil aset program	30,625	26,637	<i>Return on plan assets</i>
luran pemberi kerja			<i>Employers and employees</i>
dan pekerja	13,181	11,871	<i>contribution</i>
Kerugian aktuarial yang diakui	64,335	(24,962)	<i>Recognized actuarial losses</i>
Pembayaran manfaat	(30,298)	(28,102)	<i>Benefit payment</i>
Pada akhir tahun	436,798	358,955	<i>At end of the year</i>

Aset program terdiri dari:

Plan assets comprise the following:

	2019			2018			
	Tidak memiliki kuotasi harga/ Unquoted price Rp	Jumlah/ Total Rp	%	Tidak memiliki kuotasi harga/ Unquoted price Rp	Jumlah/ Total Rp	%	
Instrumen ekuitas	88,103	88,103	20.17	70,170	70,170	19.55	<i>Equity instruments</i>
Instrumen utang	179,083	179,083	41.00	177,860	177,860	49.55	<i>Debt instruments</i>
Properti	45,371	45,371	10.39	37,890	37,890	10.55	<i>Properties</i>
Kas dan setara kas	37,594	37,594	8.61	21,429	21,429	5.97	<i>Cash and cash equivalents</i>
Lain-lain	86,647	86,647	19.83	51,606	51,606	14.38	<i>Others</i>
Jumlah	436,798	436,798	100.00	358,955	358,955	100.00	<i>Total</i>

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used were as follows:

	2019	2018	
Tingkat diskonto	7.80%	8.74%	<i>Discount rate</i>
Tingkat kenaikan gaji per tahun	5.00%	5.00%	<i>Salary increase rate per annum</i>

Kontribusi yang diharapkan untuk program imbalan pascakerja untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah Rp8.910.

Expected contributions to post-employment benefit plans for the year ended December 31, 2020 are Rp8,910.

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the defined benefit obligation to changes in the weighted principal assumptions is as follows:

	Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ Impact on defined benefit obligation			
	Perubahan Asumsi/ Change in Assumption	Kenaikan Asumsi/ Increase in Assumption	Penurunan Asumsi/ Decrease in Assumption	
Tingkat diskonto	1%	Penurunan sebesar/ Decrease by 2.69%	Kenaikan sebesar/ Increase by 3.02%	<i>Discount rate</i>
Tingkat kenaikan gaji	1%	Kenaikan sebesar/ Increase by 3.14%	Penurunan sebesar/ Decrease by 2.83%	<i>Salary increase rate</i>
Tingkat mortalitas	1%	Penurunan sebesar/ Decrease by 0.03%	Kenaikan sebesar/ Increase by 0.03%	<i>Mortality rate</i>



PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Analisa sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam prakteknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Imbalan perhitungan sensitivitas liabilitas kerja jangka panjang atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini liabilitas imbalan kerja jangka panjang dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* di akhir periode) telah diterapkan seperti dalam perhitungan liabilitas imbalan kerja jangka panjang yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

The sensitivity analysis are based on a change in a single assumption while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the long-term benefits liabilities to significant actuarial assumptions, the same method (present value of the long-term benefits liabilities calculated with the *Projected Unit Credit* method at the end of the reporting period) has been applied as when calculating the long-term benefits liabilities recognized in the consolidated statement of financial position.

(ii) Imbalan Pascakerja Lainnya

Mutasi kewajiban imbalan pascakerja lainnya selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

(ii) Other Post-Employment Benefits

Movement of post-employment benefits obligation during the year is as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Pada awal tahun	791,942	863,294	At beginning of the year
Dibebankan ke laba rugi			Charged to profit or loss
Biaya jasa kini	71,110	62,582	Current service cost
Biaya bunga	69,317	60,464	Interest expense
	140,427	123,046	
Pengukuran kembali:			Remeasurement:
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi demografik	--	--	Loss from change in demographic assumptions
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	73,914	(115,924)	Loss from change in financial assumptions
(Keuntungan)/kerugian aktuarial yang timbul dari kombinasi perubahan asumsi	(9,962)	(16,738)	(Gain)/loss from combination of change in assumptions
Kerugian dari penyesuaian atas pengalaman	14,564	49,053	Loss from experience adjustment
	1,010,885	902,731	
Pembayaran manfaat	(85,210)	(110,789)	Benefit payment
Pada akhir tahun	925,675	791,942	At end of the year

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used were as follows:

	2019	2018	
Tingkat diskonto	7.77%	8.57%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji per tahun	7.20%	7.20%	Salary increase rate per annum

**PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the defined benefit obligation to changes in the weighted principal assumptions is as follows:

Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ Impact on defined benefit obligation				
	Perubahan Asumsi/ Change in Assumption	Kenaikan Asumsi/ Increase in Assumption	Penurunan Asumsi/ Decrease in Assumption	
Tingkat diskonto	1%	Penurunan sebesar/ Decrease by 7.47%	Kenaikan sebesar/ Increase by 8.64%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	1%	Kenaikan sebesar/ Increase by 8.94%	Penurunan sebesar/ Decrease by 7.87%	Salary increase rate
Tingkat mortalitas	1%	Penurunan sebesar/ Decrease by 0.01%	Kenaikan sebesar/ Increase by 0.01%	Mortality rate

(iii) Imbalan Pemeliharaan Kesehatan

Perusahaan dan entitas anak memiliki beberapa skema imbalan pemeliharaan kesehatan pascakerja. Metode akuntansi, asumsi dan frekuensi penilaian adalah sama dengan yang digunakan dalam skema pensiun imbalan pasti.

(iii) Health Care Benefits

The Company and its subsidiaries operate a number of post-employment health care benefit schemes. The accounting method, assumptions and the frequency of valuations are similar to those used for defined benefit pension schemes.

Mutasi kewajiban imbalan pasti selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Movement of defined benefit obligation over the year is as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Pada awal tahun	1,523,202	1,561,939	At beginning of the year
Dibebankan ke laba rugi			Charged to profit or loss
Biaya jasa kini	38,337	31,728	Current service cost
Biaya bunga	131,278	112,568	Interest expense
	169,615	144,296	
Pengukuran kembali:			Remeasurement:
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi demografik	--	--	Loss from change in demographic assumptions
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	237,886	(80,844)	Loss from change in financial assumptions
Kerugian aktuarial yang timbul dari kombinasi perubahan asumsi	--	(68,111)	Loss from combination of change in assumptions
Kerugian dari penyesuaian atas pengalaman	(67,215)	1,521	Loss from experience adjustment
	1,863,488	1,558,801	
Pembayaran manfaat	(42,326)	(35,599)	Benefit payment
Pada akhir tahun	1,821,162	1,523,202	At end of the year



PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Asumsi aktuarial utama yang digunakan
adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used
were as follows:

	2019	2018	
Tingkat diskonto	7.80%	8.74%	Discount rate
Tingkat kenaikan biaya kesehatan jangka panjang	7.00%	7.00%	Long-term increase in health cost

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti
terhadap perubahan asumsi aktuarial
utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the defined benefit
obligation to changes in the weighted
principal assumptions is as follow:

Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ Impact on defined benefit obligation				
	Perubahan Asumsi/ Change in Assumption	Kenaikan Asumsi/ Increase in Assumption	Penurunan Asumsi/ Decrease in Assumption	
Tingkat diskonto	1%	Penurunan sebesar/ Decrease by 13.11%	Kenaikan sebesar/ Increase by 16.43%	Discount rate
Tingkat kenaikan biaya kesehatan di masa depan	1%	Kenaikan sebesar/ Increase by 13.35%	Penurunan sebesar/ Decrease by 10.94%	Health cost increase rate in the future
Tingkat mortalitas	1%	Penurunan sebesar/ Decrease by 0.62%	Kenaikan sebesar/ Increase by 0.62%	Mortality rate

(iv) Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Mutasi kewajiban imbalan pasti selama
tahun berjalan adalah sebagai berikut:

(iv) Other Long-term Employee Benefits

Movement of defined benefit obligation
during the year is as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Pada awal tahun	71,564	65,476	At beginning of the year
Dibebankan ke laba rugi			Charged to profit or loss
Biaya jasa kini	27,572	25,315	Current service cost
Biaya bunga	5,655	4,100	Interest expense
	33,227	29,415	
Pengukuran kembali:			Remeasurement:
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi demografik	--	--	Loss from change in demographic assumptions
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	2,037	(2,985)	Loss from change in financial assumptions
Keuntungan aktuarial yang timbul dari kombinasi perubahan asumsi	--	--	Gain from combination of Change in assumptions
kerugian dari penyesuaian atas pengalaman	(2,406)	(2,571)	Loss from experience adjustment
	104,422	89,335	
Pembayaran manfaat	(11,747)	(17,771)	Benefit payment
Pada akhir tahun	92,675	71,564	At end of the year

Asumsi aktuarial utama yang digunakan
adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used
were as follows:

	2019	2018	
Tingkat diskonto	8.57%	8.57%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji per tahun	7.20%	7.20%	Salary increase rate per annum

**PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the defined benefit obligation to changes in the weighted principal assumptions is as follow:

Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ Impact on defined benefit obligation				
Perubahan Asumsi/ Change in Assumption		Kenaikan Asumsi/ Increase in Assumption	Penurunan Asumsi/ Decrease in Assumption	
Tingkat diskonto	1%	Penurunan sebesar/ Decrease by 3.00%	Kenaikan sebesar/ Increase by 3.19%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	1%	Kenaikan sebesar/ Increase by 3.15%	Penurunan sebesar/ Decrease by 3.01%	Salary increase rate
Tingkat mortalitas	1%	Penurunan sebesar/ Decrease by 0.01%	Kenaikan sebesar/ Increase by 0.01%	Mortality rate

Perusahaan dan entitas anak terekspos dengan beberapa risiko melalui program imbalan pasti dan program kesehatan pascakerja. Risiko yang paling signifikan adalah sebagai berikut:

The Company and its subsidiaries are exposed to a number of risks through its defined benefit pension plans and post-employment medical plans. The most significant risks are as follows:

Volatilitas aset

Liabilitas program dihitung menggunakan tingkat diskonto yang merujuk kepada tingkat imbal hasil surat utang negara. Jika imbal hasil aset program lebih rendah, maka akan menghasilkan defisit program.

Assets volatility

The plan liabilities are calculated using a discount rate set with reference to government bond yields. If the yield of plan assets is lower, it will generate a deficit program.

Harapan umur hidup

Sebagian besar dari liabilitas program menyediakan manfaat seumur hidup, sehingga kenaikan harapan umur hidup akan mengakibatkan kenaikan liabilitas program.

Life expectancy

The majority of the plans' obligations are to provide lifetime benefit, so that the increase in life expectancy will result in an increase in the plans' liabilities.

Investasi didiversifikasi dengan baik, sehingga kinerja buruk satu investasi tidak akan memberikan dampak material bagi seluruh kelompok aset. Proporsi terbesar aset investasi ditempatkan pada instrumen utang, meskipun Perusahaan dan entitas anak juga berinvestasi pada properti, obligasi, reksadana dan kas. Perusahaan dan entitas anak meyakini bahwa instrumen ekuitas memberikan imbal hasil yang paling baik dalam jangka panjang pada tingkatan risiko yang dapat diterima.

Investments are well-diversified, such that the failure of any single investment would not have a material impact for the entire class of assets. The largest proportion of assets is invested in debt instruments, although the Company and its subsidiaries also invest in property, bonds, mutual funds and cash. The Company and its subsidiaries believe that equities offer the best returns over the long term with an acceptable level of risk.

Rata-rata ekspektasi sisa masa kerja adalah 3,06 tahun.

Average expected remaining service year is 3.06 year.

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lainnya yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted post-employment benefits and other long-term benefit are as follows:

**PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Kurang dari 1 tahun/ Less than a year Rp	1 sampai 2 tahun/ Between 1 - 2 years Rp	2 sampai 5 tahun/ Between 2 - 5 years Rp	Lebih dari 5 tahun/ Over 5 years Rp	Jumlah/ Total Rp	
Program pensiun	25,169	26,849	31,661	614,456	698,135	Pension plan
Imbalan pascakerja lainnya	83,608	67,250	191,508	11,450,750	11,793,116	Other post- employment benefits
Imbalan pemeliharaan kesehatan	47,248	52,780	72,670	5,556,713	5,729,411	Health care benefits
Imbalan jangka panjang lainnya	16,278	31,722	115,889	99,590	263,479	Other long-term benefits
Jumlah	172,303	178,601	411,728	17,721,509	18,484,141	Total

Jumlah liabilitas dan beban imbalan kerja pada dan untuk tahun 2019 dan 2018 diestimasi berdasarkan perhitungan aktuaris PT Binaputera Jaga Hikmah.

Total liabilities and expenses of employee benefits as of and for years 2019 and 2018 were estimated based on calculation of actuary PT Binaputera Jaga Hikmah.

34. Sifat Dan Transaksi Dengan Pihak Berelasi

**34. Nature of Relationship and Transactions
With Related Parties**

Sifat Hubungan Berelasi

- a. Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang saham PT PLN (Persero) dan Badan Usaha Milik Negara ("BUMN").
- b. PT PLN (Persero) dan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) merupakan pemegang saham Perusahaan.
- c. PT Sumber Segara Primadaya, PT Bajradaya Sentranusa, PT Bukit Pembangkit Innovative, PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali, PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali, PT Guohua Taidian Pembangkitan Jawa Bali, dan PT Sumbagsel Energi Sakti Pewali merupakan entitas asosiasi dan ventura bersama.
- d. PT Indonesia Power, PT Pelayanan Listrik Nasional Batam ("PLN Batam"), PT Pengembang Listrik Nasional Geothermal ("PLN Geothermal"), PT PLN Batubara, PT Indonesia Comnets Plus dan PT Haleyora Power merupakan perusahaan yang pemegang sahamnya sama dengan pemegang saham utama Perusahaan dan atau sebagian pengurusnya sama dengan Perusahaan.
- e. Dewan Komisaris dan Direksi merupakan personil manajemen kunci Perusahaan dan entitas anak.

Nature of Related Parties

- a. Government of the Republic of Indonesia is the Stockholder of PT PLN (Persero) and State-Owned Enterprises ("SOE").
- b. PT PLN (Persero) and Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) are the stockholders of the Company.
- c. PT Sumber Segara Primadaya, PT Bajradaya Sentranusa, PT Bukit Pembangkit Innovative, PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali, PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali, PT Guohua Taidian Pembangkitan Jawa Bali and PT Sumbagsel Energi Sakti Pewali are the Company's associate and joint ventures.
- d. PT Indonesia Power, PT Pelayanan Listrik Nasional Batam ("PLN Batam"), PT Pengembang Listrik Nasional Geothermal ("PLN Geothermal"), PT PLN Batubara, PT Indonesia Comnets Plus, and PT Haleyora Power are companies which have the same principal stockholder and or management as the Company.
- e. Board of Commissioners and Directors are the key management personnel of the Company and its subsidiaries.

**PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Transaksi Pihak Berelasi

Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang
memiliki transaksi dengan Perusahaan:

Transactions with Related Parties

Below is the list of related parties with which
the Company has transactions:

Pihak-pihak berelasi/ Related parties	Sifat hubungan/ Nature of relationship	Sifat transaksi/ Nature of transaction
PT PLN (Persero)	Pemegang saham Perusahaan/ Stockholders of the Company	Transaksi pembelian tenaga listrik/ Purchase of electricity
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("Bank Rakyat Indonesia")	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ SOE owned by Minister of Finance	Penempatan rekening bank dan deposito berjangka/ Placement of bank and time deposit
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ SOE owned by Minister of Finance	Penempatan rekening bank dan deposito berjangka/ Placement of bank and time deposit
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Bank Negara Indonesia")	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ SOE owned by Minister of Finance	Penempatan rekening bank dan deposito berjangka/ Placement of bank and time deposit
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("Bank Tabungan Negara")	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ SOE owned by Minister of Finance	Penempatan rekening bank/ Placement of bank
PT Pertamina (Persero)	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ SOE owned by Minister of Finance	Transaksi pembelian bahan bakar dan minyak pelumas/ Purchase of fuel and lubricants transaction
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ SOE owned by Minister of Finance	Transaksi pembelian bahan bakar dan minyak pelumas/ Purchase of fuel and lubricants transaction
PT Nusantara Regas	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ SOE owned by Minister of Finance	Transaksi pembelian gas untuk IP dan PJB/ Gas purchase transaction for IP and PJB
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ SOE owned by Minister of Finance	Asuransi bangunan, instalasi dan mesin pembangkit, dan peralatan transmisi milik Perusahaan/ Insurance of buildings, installation and power plant and transmission equipment of the Company
Perum Jasa Tirta	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ SOE owned by Minister of Finance	Transaksi pengelolaan sumber daya air/ Water resources management transaction

Saldo dan Transaksi dengan Pihak Berelasi

Balance and Transactions with Related Parties

	2019		2018		
	Rp	%)	Rp	%)	
Kas dan setara kas					Cash and cash equivalents
Bank Negara Indonesia	568,195	0.33	419,255	0.24	Bank Negara Indonesia
Bank Mandiri	528,794	0.31	843,254	0.48	Bank Mandiri
Bank Rakyat Indonesia	527,319	0.30	300,324	0.17	Bank Rakyat Indonesia
Bank Tabungan Negara	--	0.00	--	0.00	Bank Tabungan Negara
Subjumlah	1,624,308	0.61	1,562,833	0.65	Subtotal
Deposito jangka panjang					Long-term time deposits
Bank Rakyat Indonesia	655,271	0.38	--	0.00	Bank Rakyat Indonesia
Deposito berjangka					Time deposits
Bank Rakyat Indonesia	293,000	0.17	1,184,511	0.68	Bank Rakyat Indonesia
Bank Mandiri	20,000	0.01	20,000	0.01	Bank Mandiri
Bank Negara Indonesia	13,901	0.01	--	0.00	Bank Negara Indonesia
Subjumlah	326,901	0.19	1,204,511	0.69	Subtotal
Piutang usaha					Trade receivables
PT PLN (Persero)	22,073,022	12.74	20,065,224	11.51	PT PLN (Persero)
PT Indonesia Power	38,158	0.02	37,575	0.02	PT Indonesia Power
Subjumlah	22,111,180	12.76	20,102,799	11.53	Subtotal



PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2019		2018		
	Rp	%*)	Rp	%*)	
Piutang kepada ventura bersama					Receivables from joint ventures
PT Shenhua Guohua PJB	785,639	0.45	822,375	0.47	PT Shenhua Guohua PJB
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali	—	0.00	5,582	0.00	PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali
Subjumlah	785,639	0.45	827,957	0.47	Subtotal
Utang usaha					Trade payables
PT Pertamina (Persero)	479,320	5.07	760,677	10.30	PT Pertamina (Persero)
PT Nusantara Regas	423,998	4.49	463,175	6.27	PT Nusantara Regas
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	289,166	3.06	219,300	2.97	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
Perum Jasa Tirta	56,379	0.60	71,533	0.97	Perum Jasa Tirta
PT PLN (Persero)	41,146	0.44	25,812	0.35	PT PLN (Persero)
PT Indonesia Power	—	0.00	52,418	0.71	PT Indonesia Power
Subjumlah	1,290,009	13.64	1,592,915	21.57	Subtotal
Utang lain-lain					Other payables
PT PLN (Persero)	9,887	0.10	17,751	0.24	PT PLN (Persero)
PT Indonesia Comnets Plus	6,868	0.07	8,094	0.11	PT Indonesia Comnets Plus
PT Haleyora Power	4,647	0.05	—	0.00	PT Haleyora Power
PT Indonesia Power	3,835	0.04	682	0.01	PT Indonesia Power
Subjumlah	25,237	0.27	26,527	0.36	Subtotal
Penjualan tenaga listrik					Revenue from sale of electricity
PT PLN (Persero)	33,681,317	84.72	34,757,316	85.15	PT PLN (Persero)
Pendapatan usaha lainnya					Other operating revenues
PT PLN (Persero)	5,678,466	14.28	5,701,540	13.97	PT PLN (Persero)
PT Indonesia Power	261,156	0.66	165,925	0.41	PT Indonesia Power
Subjumlah	5,939,622	14.94	5,867,465	14.38	Subtotal
Pembelian bahan bakar dan pelumas					Purchases of fuel and lubricants
PT Pertamina (Persero)	5,697,142	18.34	5,734,568	16.70	PT Pertamina (Persero)
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	4,154,323	13.37	2,331,901	6.79	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
PT Nusantara Regas	1,845,031	5.94	4,437,172	12.92	PT Nusantara Regas
Perum Jasa Tirta	141,803	0.46	178,927	0.52	Perum Jasa Tirta
PT PLN Batubara	711,240	2.29	611,125	1.78	PT PLN Batubara
Subjumlah	12,549,539	40.39	13,293,693	38.71	Subtotal
Beban usaha					Operating expenses
PT Haleyora Power	18,704	0.06	17,663	0.05	PT Haleyora Power
PT Indonesia Comnets Plus	11,057	0.04	10,609	0.03	PT Indonesia Comnets Plus
PT PLN Enjiniring	2,167	0.01	—	0.00	PT PLN Enjiniring
PT PLN Tarakan	480	0.00	—	0.00	PT PLN Tarakan
Subjumlah	32,408	0.11	28,272	0.08	Subtotal
Beban usaha lain-lain					Other operating expenses
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	88,878	0.29	70,633	0.21	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)

*) Persentase terhadap jumlah aset/liabilitas/pendapatan/beban yang bersangkutan

*) Percentage to related total assets/liabilities/revenues/expenses

a. Liabilitas kepada pemegang saham

Pinjaman dari Pemegang Saham PT PLN (Persero)

Pada tanggal 20 Maret 2018, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan PT PLN (Persero). Pinjaman sebesar US\$280.000.000 (dalam jumlah penuh)

a. Liability to shareholder

Shareholder loan PT PLN (Persero)

On March 20, 2018, the Company signed a loan agreement with PT PLN (Persero). The loan amounted to US\$280,000,000 (full amount) with an interest rate of LIBOR USD six

**PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

dengan tingkat bunga LIBOR USD enam bulan dan margin 0,98% per tahun. Pinjaman ditujukan untuk mendanai proyek *add-on* PLTGU Muara Tawar Blok 2, 3 dan 4. Jangka waktu perjanjian efektif sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan berakhir saat semua kewajiban pokok maupun bunga telah dibayar penuh oleh Perusahaan.

Saldo pinjaman ini per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp1.668.986 dan Rp209.272.

b. Kompensasi manajemen kunci

Jumlah kompensasi Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp12.744 dan Rp9.648.

Jumlah kompensasi Direksi Perusahaan untuk tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp20.607 dan Rp18.810.

Seluruh kompensasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan merupakan imbalan kerja jangka pendek.

month and 0.98% margin annually. The loan will be used to fund the add-on project of PLTGU Muara Tawar Block 2, 3 and 4. The term of this agreement effective since the loan is signed and ended when all the outstanding principle and interest has fully paid by the Company.

Outstanding balance of these loans as of December 31, 2019 and 2018 are amounting to Rp1,668,986 and Rp209,272, respectively.

b. Key management compensation

Total remuneration of the Company's Board of Commissioners in 2019 and 2018 amounted to Rp12,744 and Rp9,648, respectively.

Total remuneration of the Company's Directors in 2019 and 2018 amounted to Rp20,607 and Rp18,810, respectively.

All the compensation to the Company's Board of Commissioners and Directors are short-term employee benefit.

35. Aset dan Liabilitas Moneter dalam Mata Uang Asing

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perusahaan dan entitas anak mempunyai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

	2019 US\$ *)	2018 US\$ *)
Aset moneter		
Kas dan setara kas	45,414,558	3,947,379
Deposito jangka panjang	47,138,390	--
Deposito berjangka	--	61,521,373
Jumlah aset moneter	92,552,949	65,468,752
Liabilitas moneter		
Liabilitas kepada pemegang saham	120,062,254	14,451,488
Utang usaha	107,217,203	122,984,283
Jumlah liabilitas moneter	227,279,457	137,435,771
Liabilitas moneter bersih	(134,726,509)	(71,967,019)
Ekuivalen Rupiah (dalam jutaan)	(1,872,834)	(1,042,154)
Jumlah dalam Rupiah	(1,872,834)	(1,042,154)

*) Dalam jumlah penuh
Aset dan liabilitas dalam mata uang asing lainnya disajikan setara US\$ dengan menggunakan kurs pada tanggal pelaporan

**35. Monetary Assets and Liabilities
Denominated In Foreign Currencies**

As of December 31, 2019 and 2018, the Company and its subsidiaries had monetary assets and liabilities in foreign currencies as follows:

Monetary assets
Cash and cash equivalents
Long-term time deposits
Time deposits
Total monetary assets
Monetary liabilities
Liability to shareholder
Trade payables
Total monetary liabilities
Net monetary liabilities
Rupiah equivalent (in millions)
Total in Rupiah

*) In full amount
Assets and liabilities denominated in other foreign currencies are presented as US\$ equivalent using the exchange rate prevailing at the reporting date



PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Sehubungan dengan fluktuasi kurs mata uang Rupiah terhadap mata uang asing, Perusahaan dan entitas anak mencatat kerugian kurs mata uang asing bersih sebesar Rp46.799 untuk tahun 2019 dan keuntungan kurs mata uang asing bersih sebesar Rp37.301 untuk tahun 2018.

In relation to the fluctuation of the Rupiah against foreign currencies, the Company and its subsidiaries recorded net loss on foreign exchange of Rp46,799 for 2019 and net gain on foreign exchange Rp37,301 for 2018.

Apabila aset dan liabilitas dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2019 dijabarkan dengan menggunakan kurs penutupan mata uang asing pada tanggal 31 Maret 2020, maka liabilitas bersih dalam mata uang asing Perusahaan dan entitas anak akan naik sebesar Rp332.236.

If assets and liabilities in foreign currencies as of December 31, 2019 had been translated using the closing rates at issuance of March 31, 2020, the total net foreign currency liabilities of the Company and its subsidiaries would have been increase by Rp332,236.

36. Ikatan dan Kontinjensi

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan dan entitas anak memiliki perikatan penting dan kontinjensi sebagai berikut:

36. Commitments and Contingencies

As of December 31, 2019, the Company and its subsidiaries have significant commitments and contingencies as follows:

a. Perjanjian Pengadaan Bahan Bakar

a. Fuel Supply Agreements

i. Batubara

i. Coal

Pemasok/ Supplier	No. kontrak/ Contract no.	Satuan/ Unit of measure	Jumlah/ Quantity	Periode/ Period
PT PLN Batubara	007.Kjs/040/DIR/2010	Metrik ton/ Metric ton	2,800,000	Jan 2019 - Dec 2020
PT Oktasan Baruna Persada	089.PJ/061/2017	Metrik ton/ Metric ton	1,080,000	Dec 2017 - Nov 2020
PT Kaltim Prima Coal	070.PJ/061/2018	Metrik ton/ Metric ton	3,120,000	Jan 2019 - Dec 2020
PT Arutmin Indonesia	071.PJ/061/2018	Metrik ton/ Metric ton	2,400,000	Jan 2019 - Dec 2020
PT Adaro Indonesia (Spot)	059.PJ/061/2019	Metrik ton/ Metric ton	380,000	Nov 2019 - Apr 2020

Pada tanggal 9 Maret 2018, Kementerian ESDM menerbitkan surat keputusan No. 1395 K/30/MEM/2018 mengenai harga jual batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang berlaku surut sejak 1 Januari 2018. Sesuai surat keputusan tersebut, harga batubara ditetapkan sebesar US\$70/ metrik ton dengan acuan pada kalori 6.322 kcal/kg. Surat keputusan tersebut juga mengatur formula untuk menghitung harga dengan spesifikasi yang berbeda seperti yang tercantum dalam keputusan tersebut. Melalui surat keputusan No. 1410 K/30/MEM/2018 tanggal 12 Maret 2018, masa berlaku surat keputusan No. 1395 K/30/MEM/2018 tersebut diubah menjadi berlaku sejak mulai tanggal 12 Maret 2018.

On March 9, 2018, the Ministry of Energy and Mineral Resources issued Decree No. 1395 K/30/MEM/2018 regarding coal selling price for electricity supply for public interest which was retroactively valid from January 1, 2018. According to the decree, the coal price was regulated at a price of US\$70/ metric ton with referenced to coal calories for 6,322 kcal/kg. The decree also regulate the formula to calculate price with differ specification as listed in the decree. Through the Decree No. 1410 K/30/MEM/2018 dated March 12, 2018, the validity period of the decree No. 1395 K/30/MEM/2018 was amended to became enacted starting from March 12, 2018.

**PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Harga dasar batubara di tempat penyerahan *stockpile* unit berkisar antara Rp600.417 (nilai penuh) sampai dengan Rp805.212 (nilai penuh) per ton, yang disesuaikan terhadap nilai kalori, kadar abu, sulfur, air, AFT dan HGI serta ukuran butiran.

The stockpile price of coal ranges from Rp600,417 (full amount) to Rp805,212 (full amount) per ton, which is adjusted against calorific value, ash content, sulphur, water, AFT, HGI and coal size.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 07 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara, seluruh harga dasar kontrak diatas akan ditinjau secara periodik setiap 3 (tiga) bulanan untuk disesuaikan dengan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang US\$, dan harga dasar bahan bakar minyak HSD untuk industri.

Based on Minister of Energy and Mineral Resources of Indonesia's letter No. 07 year 2017 regarding Procedures of Coal and Metal Sales Pricing, the base price in all contracts above will be reviewed quarterly to justify the price with the exchange rate from Rupiah to US\$ and HSD basic price for industries.

Sehubungan dengan perjanjian jual beli batubara, pemasok diwajibkan untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan.

In relation to coal buy and sell agreement, suppliers are obliged to submit their performance guarantee.

ii. Gas

ii. Gas

Sektor/ Sector	Pemasok/ Supplier	No./Tgl kontrak/ Contract no./Date	Periode/ Periods	Satuan/Unit of measure	Jumlah/ Quantity
Gresik	PT Pertamina Hulu Energi WMO	Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dan Kesepakatan Bersama (KB)	1987 - 2020	TBTU	720
Gresik	PGN SAKA (SIPL)	Amandemen GSA 8 Nov 2011	2011 - 2026	BSCF	330
Gresik	Kangean Energy Indonesia	462.PJ AMDI/041/DIR/2010 beserta Amandemen dan	2012 - 2028	TBTU	369
Gresik	Inti Alasindo Energi (Interruptible IAE)	058.PJ/061/2017 beserta Amandemen/Addendum dan	2017 - 2020	BBTU	10,260
Gresik	Santos (Madura Offshore) Pty Ltd/Ophir	079.PJ/041/DIR/2013 beserta Amandemennya	2014 - 2019	TBTU	49,88
Gresik	PT Petrogas Jatim Utama	061.PJ/061/2013	2016 - 2020	MMSCF	41,475
Muara Karang	PT Pertamina Hulu Energi ONWJ	0198-2.PJ/EPI.03.02/DITDAN/2017	2017 - 2022	TBTU	185,872
Muara Karang	PT Perusahaan Gas Negara	0295-2.PJ/EPI.03.02/DIR/2018	2018 - 2019	BBTU	1,825
Muara Tawar	PT Perusahaan Gas Negara	0508-1.PJ/EPI.03.02/DIR/2018	2018 - 2019	BBTU	7,740
Muara Tawar	JOB PT JM (Swap)	Perubahan dan Pernyataan Kembali PJBG 28 Oktober 2011	2011 - 2019	BBTUD	15
Muara Tawar	PT Perusahaan Gas Negara (LNG)	0505-1.PJ/EPI.03.02/DIR/2018	2019 - 2019	LNG Terminal Use Agreement	
Muara Tawar	PT Pertamina EP	0103-2.PJ/EPI.01.02/DIR/2019	2018 - 2024	TBTU	29,24
Muara Karang & Muara Tawar	PT Nusantara Regas	PLN.273.PJ/041/DIR/2012	2012 - 2022	Kargo/ Cargo	191
Muara Karang & Muara Tawar	PT Tangguh PSC	0237.PJ/EPI.01.02/DIR/2016	2012 - 2034	Kargo/ Cargo	732
Muara Karang & Muara Tawar	PT Pertamina (Persero)	0592.PJ/EPI.01.02/DITDAN-2/2017	2017 - 2022	Kargo/ Cargo	5

Harga pembelian gas pipa pada titik penyerahan berkisar antara US\$2,39 sampai dengan US\$12,80 per *Million British Thermal Unit* ("MMBTU").

Gas pipe purchase price at point of delivery ranges from US\$2.39 to US\$12.80 per Million British Thermal Unit ("MMBTU").

iii. Bahan Bakar Minyak ("BBM")

Perusahaan melalui PT PLN (Persero) ("PLN") dan Pertamina mengadakan Perjanjian induk Jual Beli Bahan Bakar Minyak No. 071.PJ/060/DIR/2001 tanggal 8 Oktober 2001. Perjanjian ini telah diadendum tanggal 16 Mei 2007 dimana PLN dan Pertamina menyepakati antara lain: (i) penggunaan harga bahan bakar bulanan yang ditetapkan oleh Pertamina untuk periode 1 Januari

iii. Fuel

The Company through PT PLN (Persero) ("PLN") and Pertamina entered into a Fuel Sell and Purchase Agreement No. 071.PJ/060/DIR/2001 dated October 8, 2001. This agreement has been amended on May 16, 2007, wherein, PLN and Pertamina agreed among others: (i) the monthly fuel price to be used for the period January 1 until April 30, 2007 is determined by Pertamina and,





PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

sampai dengan 30 April 2007 dan harga bahan bakar 109,5% dari *Mid Oil Platts Singapore* (MOPS) ditambah Pajak Pertambahan Nilai untuk periode 1 Mei 2007 sampai dengan 31 Desember 2007; (ii) harga bahan bakar setelah tanggal 31 Desember 2007 akan ditetapkan oleh kedua belah pihak setiap tahun; (iii) jangka waktu pembayaran berikut pengenaan denda keterlambatan pembayaran sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia bulanan ditambah 1,3%; (iv) efektif mulai 1 Mei 2007, saldo utang yang belum dibayar atas pembelian bahan bakar sampai dengan 30 April 2007 dikenakan bunga sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia per tahun ditambah 1,3%, sampai diselesaikan dengan menerbitkan obligasi PLN selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2007; (v) utang kepada Pertamina, termasuk obligasi yang akan diterbitkan maksimum sebesar Rp18 triliun (angka penuh); (vi) perjanjian ini berlaku untuk 5 tahun sejak 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2011; (vii) PT Sucofindo (Persero) ditunjuk sebagai surveyor independen.

Berdasarkan Addendum III Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak tanggal 7 November 2011, Perusahaan melalui PLN dan Pertamina menyepakati dalam tahun 2011 sebagai berikut:

1. *High Speed Diesel* ("HSD")
 - Harga pembelian HSD sampai dengan 2.537.161 kilo liter (kl) di 18 titik penyerahan Pertamina adalah 105% dari MOPS,
 - Harga pembelian HSD sampai dengan 480.487 kl di titik penyerahan Pertamina Terminal Transit Manggis adalah 108% dari MOPS,
 - Harga pembelian HSD sampai dengan 2.978.360 kl di titik penyerahan Instalasi Tanjung Priok dan Instalasi Surabaya Group adalah 108,5% dari MOPS,

the fuel price of 109.5% from Mid Oil Platts Singapore (MOPS) plus Value Added Tax for the period May 1, 2007 until December 31, 2007; (ii) the fuel price subsequent to December 31, 2007 will be determined by both parties every year; (iii) the terms of payment and penalty charges on late payment with a rate of monthly Certificate of Bank Indonesia plus 1.3%; (iv) effective on May 1, 2007, the unpaid balance of payable for the purchases of fuel until April 30, 2007 will bear an interest with a rate per annum of Certificate of Bank Indonesia plus 1.3%, until settled by issuance of PLN Bonds, which is no later than August 31, 2007; (v) the maximum payable to Pertamina, includes bonds which will be issued amounting to Rp18 trillion (full amount); (vi) this agreement is valid for 5 years from January 1, 2007 until December 31, 2011; (vii) PT Sucofindo (Persero) is assigned as an independent surveyor.

Based on the amendment III of Fuel Sell and Purchase Agreement dated November 7, 2011, the Company through PLN and Pertamina agreed in 2011 on the following:

1. *High Speed Diesel* ("HSD")
 - *The price of HSD for purchase of up to 2,537,161 kilo liter (kl) in 18 supply points of Pertamina is 105% from MOPS,*
 - *The price of HSD for purchase of up to 480,487 kl in supply points of Pertamina Terminal Transit Manggis is 108% from MOPS,*
 - *The price of HSD for purchase of up to 2,978,360 kl in supply points Instalasi Tanjung Priok and Instalasi Surabaya Group is 108.5% from MOPS,*

**PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Harga pembelian HSD diatas 5.996.008 kl atau yang diserahkan diluar 21 titik penyerahan yang ditetapkan Pertamina adalah 109,5% dari MOPS.
- 2. Harga pembelian *Industrial Diesel Oil* ("IDO") sampai dengan 3.933 kl di titik penyerahan Kilang Plaju adalah 105% dari MOPS dan pembelian diatas 3.933 kl atau yang diserahkan diluar titik penyerahan Kilang Plaju adalah 109,5% dari MOPS.
- 3. Harga pembelian MFO sampai dengan 1.193.166 kl di titik penyerahan Kilang Cilacap adalah 105% dari MOPS dan pembelian diatas 1.193.166 kl atau yang diserahkan diluar titik penyerahan Kilang Cilacap adalah 109,5% dari MOPS.

Pada tahun 2013, PLN dan Pertamina sepakat untuk menggunakan harga tahun 2011, karena amandemen Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak belum diselesaikan.

Berdasarkan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-74/MK.02/2015 kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai rekomendasi penetapan harga jual beli HSD dan MFO antara PLN dan Pertamina tahun 2014 tanggal 30 Januari 2015 tersebut diatas, pokok-pokok kesepakatan antara Pertamina dan PLN antara lain:

- a. Harga jual tahun 2014 menggunakan harga berdasarkan reviu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan sebesar HSD: MOPS + 9,19% dan MFO: MOPS + 11,94%;
- b. Dalam rangka efisiensi biaya pembelian di tahun 2015, PLN dan anak perusahaan diperkenankan untuk mencari sumber BBM selain Pertamina, dengan tetap menjaga keamanan pasokan BBM.

Perusahaan telah mencatat pembelian HSD dan MFO tahun 2014 berdasarkan harga tersebut.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

- The price of HSD in excess of 5,996,008 kl or supplied from supply points other than the 21 supply points specified by Pertamina is 109.5% from MOPS.
- 2. The price of *Industrial Diesel Oil* ("IDO") for purchases of up to 3,933 kl in supply point Kilang Plaju is 105% from MOPS and for purchases in excess of 3,933 kl or supplied from supply point other than Kilang Plaju supply point is 109.5% from MOPS.
- 3. The price of MFO for purchases of up to 1,193,166 kl in supply point Kilang Cilacap is 105% from MOPS and for purchases in excess of 1,193,166 kl or supplied from supply point other than Kilang Cilacap supply point is 109.5% from MOPS.

In 2013, PLN and Pertamina agreed to use the 2011 price, since the Fuel Sale Purchase Agreement amendment has not been finalized.

Based on Minister of Finance of Republic of Indonesia's letter No. S-74/MK.02/2015 to Minister of Energy and Mineral Resources regarding recommendation of sales and purchase price of HSD and MFO between PLN and Pertamina for 2014 dated January 30, 2015 above, term of the agreement between Pertamina and PLN are as follows:

- a. Sales price for 2014 are using price based on review of Board of Finance and Development Supervision as follow: for HSD: MOPS + 9.19% and for MFO: MOPS + 11.94%;
- b. For the efficiency of purchase cost in 2015, PLN and its subsidiaries is allowed to acquire from other source of fuel other than Pertamina, whilst maintaining security of fuel supply.

The Company has recorded purchase of HSD and MFO for the year 2014 based on that prices.





PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada

Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Dalam rangka penyelesaian harga jual BBM (HSD dan MFO) Pertamina kepada PLN, telah dilakukan pembahasan harga jual beli bahan bakar minyak (HSD dan MFO) antara Pertamina dan PLN tahun 2015 di Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara ("BUMN"), difasilitasi oleh Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN, untuk menentukan harga transaksi BBM di tahun 2015.

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Harga Jual Beli Bahan Bakar Minyak (HSD dan MFO) antara Pertamina dan PLN tanggal 9 Februari 2016 dengan hasil sebagai berikut:

- a. Harga transaksi HSD tahun 2015:
 - Januari sampai dengan September 2015 adalah 107% dari MOPS
 - Oktober sampai dengan Desember 2015 adalah 105% dari MOPS
- b. Harga transaksi MFO tahun 2015 adalah 109,5% dari MOPS.

Perusahaan telah mencatat pembelian HSD dan MFO tahun 2015 berdasarkan harga tersebut.

Pasokan Bahan Bakar Minyak ke unit pembangkit di lingkungan Perusahaan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak antara Pertamina dengan PLN No: 528/C0000/2007-SB dan 066-1.PJ/040/DIR/2007 tanggal 16 Mei 2007 beserta addendumnya, harga keekonomian BBM 2017 untuk pembangkit di lingkungan PLN/PJB adalah:

MFO = Rp4.760 – Rp5.751 per liter
HSD = Rp5.916 – Rp7.237 per liter

Berdasarkan Addendum IV Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak tanggal 16 Mei 2017, PLN dan Pertamina menyepakati perpanjangan jangka waktu pasokan hingga tahun 2020.

Berdasarkan Addendum V, kesepakatan harga jual beli bahan bakar minyak (HSD dan MFO) antara Pertamina dan Perusahaan tanggal 17 Oktober 2017, adalah sebagai berikut:

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For The Years Ended

December 31, 2019 and 2018

(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

In settlement of the fuel sales price of Pertamina's fuel (HSD and MFO) to PLN, discussions on selling price of fuel (HSD and MFO) has been conducted between Pertamina and PLN in 2015 in the Ministry of State Owned Enterprises ("SOE") office, facilitated by a deputy in energy business logistics and tourism, to determine the selling price of fuel in 2015.

Based on the Sales and Purchase Price Agreement for Fuel (HSD and MFO) between Pertamina and PLN dated on February 9, 2016 the results are:

- a. *HSD transaction price for 2015:*
 - *January until September 2015 is 107% from MOPS*
 - *October until December 2015 is 105% from MOPS*
- b. *MFO transaction price for 2015 is 109.5% from MOPS.*

The Company has recorded purchases of HSD and MFO for the year 2015 based on those prices.

Supply of fuel to the Company's power plant unit under the Fuel Sale and Purchase Agreement between Pertamina and PLN No: 528/C0000/2007-SB and 066-1.PJ/040/DIR/2007 dated May 16, 2007 along with the addendum, the 2017 fuel economy price for PLN/PJB power plant is: MFO = Rp4,760 – Rp5,751 per liter HSD = Rp5,916 – Rp7,237 per liter

Based on Amendment IV of the Fuel Sale and Purchase Agreement dated May 16, 2017, PLN and Pertamina agreed to extend the period of supply until 2020.

Based on Amendment V, sales and purchase price agreement for fuel (HSD and MFO) between Pertamina and the Company dated on October 17, 2017, the result are:

**PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

- a. Harga transaksi HSD tahun 2017:
- Januari sampai dengan Juni 2017 adalah 107% dari MOPS.
 - Juli sampai dengan Desember 2017 adalah 104,58% dari MOPS
- b. Harga transaksi MFO tahun 2017:
- Januari sampai dengan Juni 2017 adalah 109,5% dari MOPS.
 - Juli sampai dengan Desember 2017 adalah 109,1% dari MOPS.

Berdasarkan Addendum VI, kesepakatan harga jual beli bahan bakar minyak (HSD dan MFO) tahun 2018 sampai dengan 2020 antara Pertamina dan PLN tanggal 20 Mei 2018, adalah sebagai berikut:

- a. Harga rata-rata transaksi HSD semester I tahun 2018 adalah 104,77% dari MOPS
- b. Harga rata-rata transaksi MFO semester I tahun 2018 adalah 106,34% dari MOPS

Perusahaan telah mencatat pembelian HSD dan MFO tahun 2018 berdasarkan harga tersebut.

Perusahaan telah mencatat pembelian HSD dan MFO tahun 2019 berdasarkan formulasi harga berikut melalui penetapan dari Divisi GBM PT PLN (Persero).

- a. Harga minyak solar dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Alpha} \times (100\% \times \text{MOPS Gasoil } (0,25\%S)) \times \text{JISDOR}}{158,9}$$

Dengan formulasi Alpha sebagai berikut:

$$\text{Alpha} = 3,2099 \times \text{MOPS-1} + 0,0058908$$

- b. Harga MFO 180 dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Alpha} \times (100\% \times \text{MOPS HSFO 180 Cst}) \times \text{JISDOR}}{1,009,015}$$

- a. HSD transaction price for 2017:
- January until June 2017 is 107% from MOPS.
 - July until December 2017 is 104.58% from MOPS.
- b. MFO transaction price for 2017:
- January until June 2017 is 109.5% from MOPS.
 - July until December 2017 is 109.1% from MOPS.

Based on Amendment VI, sales and purchase price agreement for fuel (HSD and MFO) 2018 until 2020 between Pertamina and PLN dated on May 20, 2018, the result are:

- a. Average HSD transaction price for Semester I 2018 is 104,77% from MOPS
- b. Average MFO transaction price for Semester I 2018 is 106,34% from MOPS

The Company has recorded purchase of HSD and MFO for the year 2018 based on those prices.

The Company has recorded purchase of HSD and MFO for the year 2019 based on price formula as noted below through approval from GBM Division of PT PLN (Persero).

- a. HSD price are calculated by formula as follow:

With Alpha formula as follow:

$$\text{Alpha} = 3.2099 \times \text{MOPS-1} + 0.0058908$$

- b. MFO 180 price are calculated by formula as follow:





PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Dengan formulasi Alpha sebagai berikut:

$$\text{Alpha} = 22,109 \times \text{MOPS-1} + 0,0058908$$

Realisasi harga keekonomian BBM 2019 untuk pembangkit di lingkungan PLN/PJB adalah:

MFO = Rp4.347,2 – Rp7.058,7 per liter
HSD = Rp7.153,3 – Rp8.493,1 per liter

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, estimasi liabilitas atas utang pembelian bahan bakar kepada Pertamina masing-masing Rp479.320 dan Rp760.677 yang dicatat sebagai utang usaha (Catatan 20).

b. Ikatan Pengadaan dan Pemeliharaan

- i. Sejalan dengan reorganisasi PLN yang membubarkan PLN Unit Pembangkitan Jawa-Bali (PLN UPJB), maka fungsi pengelolaan aset untuk pembangkit FTP 1 Jawa dilaksanakan oleh Perusahaan. Pada tanggal 7 Maret 2016 Perusahaan dan PLN menandatangani Perjanjian Induk Pengelolaan Aset Pembangkit PLTU dan PLTGU di Jawa. Perjanjian ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Pengelolaan Aset yang terdiri atas:

- Pengelolaan Aset PLTGU Blok II Muara Karang antara Perusahaan dan PLN Regional Jawa Bagian Barat pada tanggal 8 Maret 2016.
- Pengelolaan Aset PLTU Indramayu, PLTU Rembang dan PLTGU Blok V Muara Tawar antara Perusahaan dan PLN Regional Jawa Bagian Tengah pada tanggal 8 Maret 2016.
- Pengelolaan Aset PLTU Paiton 9, PLTU Pacitan dan PLTU Tanjung Awar-Awar antara Perusahaan dan PLN Regional Jawa Bagian Timur dan Bali pada tanggal 8 Maret 2016.
- Amandemen ke tiga Perjanjian Pengelolaan Aset PLTU Paiton 9, PLTU Pacitan, PLTU Tanjung Awar-Awar antara Perusahaan dan PLN Regional Jawa Bagian Timur dan Bali tanggal 15 Maret 2018.
- Amandemen ke tiga Perjanjian Pengelolaan Aset PLTGU Blok II Muara Karang antara Perusahaan dan PLN Regional Jawa Bagian Barat tanggal 26 Maret 2018.

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

With Alpha formula as follow:

$$\text{Alpha} = 22.109 \times \text{MOPS-1} + 0.0058908$$

The 2019 fuel economy price for PLN/PJB power plant is:

MFO = Rp4,347.2 – Rp7,058.7 per liter
HSD = Rp7,153.3 – Rp8,493.1 per liter

As of December 31, 2019 and 2018 estimated liabilities for payable on purchase of fuel from Pertamina amounted to Rp479,320 and Rp760,677, respectively which are recorded as trade payables (Note 20).

b. Supply and maintenance agreements

- i. In line with the reorganization of PLN which dissolve PLN Unit Pembangkitan Jawa-Bali (PLN UPJB), the function of Asset Manager of FTP 1 Jawa handled by the Company. On March 7, 2016 the Company and PLN entered into Asset Management Services Master Agreement of PLTU and PLTGU in Java. This agreement followed by Asset Management Contract consisting of:

- Asset Management of PLTGU Block II Muara Karang between the Company and PLN Region West Java on March 8, 2016.
- Asset Management of PLTU Indramayu, Rembang and Block V Muara Tawar between the Company and PLN Region Central Java on March 8, 2016.
- Asset Management of PLTU Paiton 9, PLTU Pacitan and PLTU Tanjung Awar-Awar between the Company and PLN Region East Java and Bali on March 8, 2016.
- Third amendment of Asset Management Contract for PLTU Paiton 9, PLTU Pacitan, PLTU Tanjung Awar-Awar between the Company and PLN Region East Java and Bali on March 15, 2018.
- Third amendment of Asset Management Contract for PLTGU Block II Muara Karang between the Company and PLN Region West Java on March 26, 2018.

**PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Amandemen ke tiga Perjanjian Pengelolaan Aset PLTU Indramayu, PLTU Rembang dan PLTGU Blok V Muara Tawar antara Perusahaan dan PLN Regional Jawa Bagian Tengah pada tanggal 26 Maret 2018.
- Amandemen keempat Perjanjian Pengelolaan Aset PLTGU Blok II Muara Karang antara Perusahaan dan PLN Regional Jawa Bagian Barat tanggal 22 Februari 2019.
- Amandemen keempat Perjanjian Pengelolaan Aset PLTU Indramayu, PLTU Rembang dan PLTGU Blok V Muara Tawar antara Perusahaan dan PLN Regional Jawa Bagian Tengah pada tanggal 22 Februari 2019.
- Amandemen keempat Perjanjian Pengelolaan Aset PLTU Paiton 9, PLTU Pacitan, PLTU Tanjung Awar-Awar antara Perusahaan dan PLN Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara tanggal 22 Februari 2019.

Sehubungan dengan adanya pengalihan Fungsi Aset Manager dan Aset Operator Pembangkit dari PLN Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Utara (PLN UIKSBU) dan PLN Unit Induk Wilayah Bangka Belitung (PLN UIW BABEL) kepada Perusahaan. Pada tanggal 26 Maret 2018 Perusahaan dan PLN menandatangani Perjanjian Induk Pengelolaan Aset Pembangkit di Sumatera. Perjanjian ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Pengelolaan Aset yang terdiri atas:

- Pengelolaan Aset PLTMG Arun antara Perusahaan dan PLN UIKSBU pada tanggal 11 April 2018.
- Amandemen Pengelolaan Aset PLTMG Arun antara Perusahaan dan PLN UIKSBU pada tanggal 3 Desember 2018.
- Amandemen Kedua Perjanjian Pengelolaan Aset PLTMG Arun antara Perusahaan dan PLN UIKSBU pada tanggal 28 Mei 2019.
- Pengelolaan Aset PLTU Air Anyir Bangka dan PLTU Suge Belitung antara Perusahaan dan

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

- Third amendment of Asset Management Contract for PLTU Indramayu, Rembang and Block V Muara Tawar between the Company and PLN Region Central Java on March 26, 2018.
- Fourth amendment of Asset Management Contract for PLTGU Block II Muara Karang between the Company and PLN Region West Java on February 22, 2019.
- Fourth amendment of Asset Management Contract for PLTU Indramayu, Rembang and Block V Muara Tawar between the Company and PLN Region Central Java on February 22, 2019.
- Fourth amendment of Asset Management Contract for PLTU Paiton 9, PLTU Pacitan, PLTU Tanjung Awar-Awar between the Company and PLN Region East Java, Bali and Nusa Tenggara on February 22, 2019.

Regarding transfer function of Asset Manager and Asset Operator Power plant from the PLN Unit Induk Pembangkitan North Sumatera (PLN UIKSBU) and PLN Region Bangka Belitung (PLN UIW BABEL) to the Company. On March 26, 2018 the Company and PLN entered into Asset Management Services Master Agreement of Power Plant in Sumatera. This agreement followed by Asset Management Contract consisting of:

- Asset Management of PLTMG Arun between the Company and PLN UIKSBU on April 11, 2018.
- Amendment of Asset Management of PLTMG Arun on December 3, 2018.
- Second Amendment of Asset Management Contract of PLTMG Arun on May 28, 2019.
- Asset Management of PLTU Air Anyir Bangka and PLTU Suge Belitung between the Company



PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

- PLN UIW BABEL pada tanggal 11 April 2018.
- Amandemen Perjanjian Pengelolaan Aset PLTU Air Anyir Bangka dan PLTU Suge Belitung antara Perusahaan dan PLN UIW BABEL pada tanggal 19 Agustus 2019.
 - Pengelolaan Aset PLTU Tenayan antara Perusahaan dan PLN UIKSBU pada tanggal 3 Desember 2018.
 - Amandemen Perjanjian Pengelolaan Aset PLTU Tenayan antara Perusahaan dan PLN UIKSBU pada tanggal 28 Mei 2019.
 - Perjanjian Pengelolaan Aset PLTU Tembilahan antara Perusahaan dan PLN UIKSBU pada tanggal 18 Oktober 2018.

Sehubungan dengan telah ditetapkan sebagai Perusahaan sebagai Aset Manager dan Aset Operator Pembangkit oleh PLN Regional Jawa Bagian Barat (JBB), Regional Jawa Bagian Tengah (JBT), dan Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara (JBNT). Pada tanggal 29 November 2019 Perusahaan dan PLN menandatangani Perjanjian Induk Pengelolaan Aset Pembangkit. Perjanjian ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Pengelolaan Aset yang terdiri atas:

- Perjanjian Pengelolaan Aset CNG Plant Gresik antara Perusahaan dan PLN Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara (JBNT) pada tanggal 11 Desember 2019.

Untuk pengembangan bisnis di Luar Jawa, Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Jasa Operasi dan Pemeliharaan, diantaranya:

- Perjanjian induk PLTMG Arun (19x9,7 MW) pada tanggal 29 Juli 2015.
- PLTMG Arun tahap *supporting* (19x9,7 MW) pada tanggal 30 September 2016.
- Perjanjian jasa operasi dan pemeliharaan tahap *supporting* PLTU Tenayan (2x110 MW) tanggal 21 Desember 2015.

- and PLN UIW BABEL on April 11, 2018.
- Amendment of Asset Management Contract of PLTU Air Anyir Bangka and PLTU Suge Belitung between the Company and PLN UIW BABEL on August 19, 2019.
 - Asset Management of PLTU Tenayan between the Company and PLN UIKSBU on December 3, 2018.
 - Amendment of Asset Management Contract of PLTU Tenayan on May 28, 2019.
 - Asset Management Contract of PLTU Tembilahan between the Company and PLN UIKSBU on October 18, 2018.

In connection with the stipulation of the Company as an Asset Manager and Asset Operator for Generators by PLN Region West Java, Region Central Java, and Region East Java, Bali and Nusa Tenggara. On November 29, 2019 the Company and PLN entered into Asset Management Contract Master Agreement of power plant. This agreement followed by Asset Management Contract consisting of:

- Asset Management Contract of CNG Plant Gresik between the Company and PLN Region East Java, Bali and Nusa Tenggara on December 11, 2019.

Regarding the expansion in outside Java, the Company has entered an agreement O&M:

- Main agreement PLTMG Arun (19x9.7 MW) on July 29, 2015.
- PLTMG Arun supporting phase (19x9.7 MW) on September 30, 2016.
- Operation and maintenance agreement PLTU Tenayan (2x110 MW) supporting phase on December 21, 2015.

**PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Amandemen kesatu PLTU Tenayan Tahap *Supporting* pada tanggal 20 Juni 2016.
- Amandemen kedua PLTU Tenayan Tahap *Supporting* pada tanggal 12 Desember 2017.
- Amandemen ketiga PLTU Tenayan Tahap *Supporting* pada tanggal 19 November 2018.
- Adendum ketiga perjanjian PLTU 3 Babel Desa Air Anyir, Bangka tahap *supporting* pada tanggal 3 Oktober 2016.
- PLTU Belitung (2x16,5 MW) tahap *supporting* pada tanggal 1 Juni 2015.
- Amandemen Kesatu PLTU Belitung (2x16,5 MW) tahap *supporting* pada tanggal 29 Maret 2017.
- Amandemen Kedua PLTU Belitung (2x16,5 MW) tahap *supporting* pada tanggal 15 November 2017.
- Perjanjian PLTU Tembilahan Tahap *Supporting* pada tanggal 8 Maret 2018.
- Amandemen kesatu PLTU Tembilahan Tahap *Supporting* pada tanggal 3 Desember 2018.
- Amandemen ketiga PLTG Duri pada tanggal 27 Juni 2016.
- Amandemen keempat PLTG Duri pada tanggal 23 Maret 2017.
- Amandemen kelima PLTG Duri pada tanggal 28 Juni 2018.
- Amandemen keenam PLTG Duri pada tanggal 25 Januari 2019.
- Amandemen ketujuh PLTG Duri pada tanggal 8 Maret 2019.
- Perjanjian Induk PLTU Teluk Balikpapan (2 x 110 MW) pada tanggal 17 Juli 2014.
- Perjanjian PLTU Teluk Balikpapan (2x110 MW) tahap *supporting* (Pra COD) pada tanggal 5 Mei 2015.
- Adendum perjanjian PLTU Teluk Balikpapan (2x10 MW) tahap *supporting* (Pre COD) pada tanggal 24 Juli 2015.
- PLTU Teluk Balikpapan (2x110 MW) periode setelah *Commercial Operation Date* (COD) sampai dengan *Final Acceptance Certificate* (FAC) tanggal 28 Juli 2017.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

- *First Amendment PLTU Tenayan Supporting Based on June 20, 2016.*
- *Second Amendment PLTU Tenayan Supporting Based on December 12, 2017.*
- *Third Amendment PLTU Tenayan Supporting Based on November 19, 2018.*
- *The third amendment agreement PLTU 3 Babel Desa Air Anyir, Bangka supporting phase on October 3, 2016.*
- *PLTU Belitung (2x16.5 MW) supporting phase on June 1, 2015.*
- *The first amendment agreement PLTU Belitung (2x16.5 MW) supporting phase on March 29, 2017.*
- *The second amendment agreement PLTU Belitung (2x16.5 MW) supporting phase on November 15, 2017.*
- *Agreement PLTU Tembilahan Supporting Based on March 8, 2018.*
- *First Amendment PLTU Tembilahan Supporting Based on December 3, 2018.*
- *Third Amendment PLTG Duri on June 27, 2016.*
- *Fourth Amendment PLTG Duri on March 23, 2017.*
- *Fifth Amendment PLTG Duri on June 28, 2018.*
- *Sixth Amendment PLTG Duri on January 25, 2019.*
- *Seventh Amendment PLTG Duri on March 8, 2019.*
- *Main agreement PLTU Teluk Balikpapan (2x110 MW) on July 17, 2014.*
- *Agreement of PLTU Teluk Balikpapan (2x110 MW) supporting (Pre COD) phase on May 5, 2015.*
- *Amendment agreement of PLTU Teluk Balikpapan (2x10 MW) supporting (Pre COD) phase on July 24, 2015.*
- *PLTU Teluk Balikpapan (2x110 MW) period after Commercial Operation Date (COD) until Final Acceptance Certificate (FAC) on July 28, 2017.*



PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Amandemen kesatu PLTU Teluk Balikpapan (2x110 MW) tahap *Supporting* (COD-FAC) pada tanggal 7 Maret 2018.
- Amandemen kedua PLTU Teluk Balikpapan (2x110 MW) tahap *Supporting* (COD-FAC) pada tanggal 4 September 2018.
- Amandemen ketiga PLTU Teluk Balikpapan (2x110 MW) tahap *Supporting* (COD-FAC) pada tanggal 27 Maret 2019.
- Perjanjian PLTU Pulang Pisau (2x60 MW) tahap *supporting* pada tanggal 30 Juni 2016.
- Amandemen PLTU Pusang Pisau (2x60 MW) tahap *supporting* pada tanggal 23 November 2016.
- Amandemen Kedua PLTU Pulang Pisau (2x60 MW) tahap *supporting* pada tanggal 28 April 2017.
- Adendum Ketiga PLTU Pulang Pisau (2x60 MW) tahap *supporting* pada tanggal 22 Juni 2017.
- Amandemen Keempat PLTU Pulang Pisau (2x60 MW) tahap *supporting* pada tanggal 28 Desember 2017.
- Amandemen Peralihan PLTU Pulang Pisau (2x60 MW) pada tanggal 29 Maret 2018.
- Amandemen Kelima PLTU Pulang Pisau (2x60 MW) tahap *supporting* pada tanggal 4 September 2018.
- Amandemen Keenam PLTU Pulang Pisau (2x60 MW) pada tanggal 13 Juni 2019.
- PLTU Ketapang (2x10 MW) tahap *supporting* pada tanggal 28 September 2016.
- Amandemen kesatu PLTU Ketapang pada tanggal 29 September 2017.
- Amandemen kedua PLTU Ketapang pada tanggal 28 Februari 2018.
- Amandemen ketiga PLTU Ketapang pada tanggal 26 April 2018.
- Amandemen keempat PLTU Ketapang (2x10 MW) tahap *supporting* pada tanggal 4 September 2018.
- Amandemen ketiga PLTU Amurang (2x25 MW) tahap *supporting* pada tanggal 30 Maret 2015.

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

- *The First Amendment PLTU Teluk Balikpapan (2x110 MW) Supporting Based (COD-FAC) on March 7, 2018.*
- *Second Amendment PLTU Teluk Balikpapan (2x110 MW) Supporting Based (COD-FAC) on September 4, 2018.*
- *Third Amendment of PLTU Teluk Balikpapan (2x110 MW) Supporting (COD-FAC) phase on March 27, 2019.*
- *Agreement of PLTU Pulang Pisau (2x60 MW) supporting phase on June 30, 2016.*
- *Amendment agreement of PLTU Pulang Pisau (2x60 MW) supporting phase on November 23, 2016.*
- *Second Amendment of PLTU Pulang Pisau (2x60 MW) supporting phase on April 28, 2017.*
- *Third Amendment PLTU Pulang Pisau (2x60 MW) supporting phase on June 22, 2017.*
- *Fourth Amendment PLTU Pulang Pisau (2x60 MW) supporting phase on December 28, 2017.*
- *Turnover Amendment of PLTU Pulang Pisau (2x60 MW) supporting phase on March 29, 2018.*
- *Fifth Amendment of PLTU Pulang Pisau (2x60 MW) supporting phase on September 4, 2018.*
- *Sixth Amendment of PLTU Pulang Pisau (2x60 MW) supporting phase on June 13, 2019.*
- *PLTU Ketapang (2x10 MW) supporting phase on September 28, 2016.*
- *The first amendment of agreement PLTU Ketapang on September 29, 2017.*
- *The second amendment of agreement PLTU Ketapang on February 28, 2018.*
- *The third amendment of agreement PLTU Ketapang on April 26, 2018.*
- *The fourth amendment of agreement PLTU Ketapang (2x10 MW) supporting phase on September 4, 2018.*
- *The third amendment agreement PLTU Amurang (2x25 MW) supporting phase on March 30, 2015.*

**PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- PLTU Amurang (2x25 MW) tahap *performance based* pada tanggal 30 April 2015.
- Adendum perjanjian PLTU Amurang (2x25 MW) tahap *performance based* pada tanggal 30 Desember 2015.
- Adendum kedua perjanjian PLTU Amurang (2x25 MW) tahap *performance based* pada tanggal 30 Juni 2016.
- PLTU Amurang (2x25 MW) tahap *performance based* kontrak 5 tahun pada tanggal 16 Januari 2017.
- Amandemen kesatu PLTU Amurang (2x25 MW) tahap *performance based* kontrak 5 tahun pada tanggal 10 Juli 2018.
- Perjanjian Induk PLTU Kendari (2x10 MW) tanggal 19 September 2013.
- PLTU Kendari (2x10 MW) tahap *supporting* tanggal 30 Desember 2013.
- Amandemen kesatu PLTU Kendari (2x10 MW) Tahap *Supporting* pada tanggal 29 Desember 2014.
- Adendum kedua perjanjian PLTU Nii Tanasa Kendari (2x10 MW) tahap *supporting* pada tanggal 29 Juni 2015.
- Adendum ketiga perjanjian PLTU Nii Tanasa Kendari (2x10 MW) tahap *supporting* pada tanggal 18 Desember 2015.
- Adendum keempat perjanjian PLTU Nii Tanasa Kendari (2x10 MW) tahap *supporting* pada tanggal 28 Juni 2016.
- Adendum kelima perjanjian PLTU Nii Tanasa Kendari (2x10 MW) tahap *supporting* pada tanggal 28 September 2016.
- Amandemen keenam perjanjian PLTU Nii Tanasa Kendari (2x10 MW) tahap *supporting* pada tanggal 27 Maret 2017.
- Amandemen ketujuh perjanjian PLTU Nii Tanasa Kendari (2x10 MW) tahap *supporting* pada tanggal 22 Juni 2017.
- Amandemen kedelapan perjanjian PLTU Nii Tanasa Kendari (2x10 MW) tahap *supporting* pada tanggal 26 Februari 2018.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

- PLTU Amurang (2x25 MW) *performance based phase* on April 30, 2015.
- Amendment agreement PLTU Amurang (2x25 MW) *performance based phase* on December 30, 2015.
- The second amendment agreement PLTU Amurang (2x25 MW) *performance based phase* on June 30, 2016.
- PLTU Amurang (2x25 MW) *performance based five years contract phase* on January 16, 2017.
- The First Amendment PLTU Amurang (2x25 MW) *performance based five years contract phase* on July 10, 2018.
- PLTU Kendari Unit (2x10 MW) Master of Agreement on September 19, 2013.
- Agreement of PLTU Kendari (2x10 MW) *supporting phase* on December 30, 2013.
- First Amendment of PLTU Kendari (2x10 MW) *Supporting Based* on December 29, 2014.
- Second amendment agreement PLTU Nii Tanasa Kendari (2x10 MW) *supporting phase* on June 29, 2015.
- Third amendment agreement PLTU Nii Tanasa Kendari (2x10 MW) *supporting phase* on December 18, 2015.
- Fourth amendment agreement PLTU Nii Tanasa Kendari (2x10 MW) *supporting phase* on June 28, 2016.
- Fifth amendment agreement PLTU Nii Tanasa Kendari (2x10 MW) *supporting phase* on September 28, 2016.
- Sixth amendment agreement PLTU Nii Tanasa Kendari (2x10 MW) *supporting phase* on March 27, 2017.
- Seventh amendment agreement PLTU Nii Tanasa Kendari (2x10 MW) *supporting phase* on June 22, 2017.
- Eighth amendment agreement PLTU Nii Tanasa Kendari (2x10 MW) *supporting phase* on February 26, 2018.



Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan Audit
Audited Financial Statements



Referensi Kriteria AR
ARA Criteria Reference



PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Amandemen kesembilan perjanjian PLTU Nii Tanasa Kendari (2x10 MW) tahap *supporting* pada tanggal 24 April 2018.
- Amandemen kesepuluh perjanjian PLTU Nii Tanasa Kendari (2x10 MW) tahap *supporting* pada tanggal 26 Desember 2018.
- Amandemen kesebelas perjanjian PLTU Nii Tanasa Kendari (2x10 MW) tahap *supporting* pada tanggal 31 Desember 2019.
- Perjanjian Induk PLTU Kendari Unit #3 (1x10 MW) tanggal 13 April 2015.
- Perjanjian PLTU Kendari unit #3 (1x10 MW) tahap *supporting* tanggal 23 November 2018.
- Amandemen kesatu PLTU Kendari unit #3 Tahap *Supporting* pada tanggal 24 April 2018.
- Perjanjian Induk PLTU Anggrek tanggal 12 September 2018.
- Perjanjian PLTU Anggrek tahap *supporting* (Pra COD) pada tanggal 1 April 2019.
- Adendum perjanjian PLTU Anggrek tahap *supporting* (Pre COD) pada tanggal 1 Juli 2019.
- PLTU Anggrek periode setelah *Commercial Operation Date* (COD) sampai dengan *Final Acceptance Certificate* (FAC) tanggal 30 September 2019.
- Perjanjian Induk PLTU Ampana tanggal 12 September 2018.
- Perjanjian PLTU Ampana tahap *supporting* (Pra COD) pada tanggal 17 Oktober 2019.
- PLTU Ampana periode setelah *Commercial Operation Date* (COD) sampai dengan *Final Acceptance Certificate* (FAC) tanggal 1 November 2019.
- Adendum perjanjian PLTU Bolok (2x16,5 MW) tahap *supporting* pada tanggal 17 Oktober 2016.
- Amandemen kedua PLTU Bolok (2x16,5 MW) tahap *supporting* pada tanggal 31 Mei 2017.
- Amandemen ketiga PLTU Bolok (2x16,5 MW) tahap *supporting* pada tanggal 29 Desember 2017.

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

- Ninth amendment agreement PLTU Nii Tanasa Kendari (2x10 MW) *supporting phase* on April 24, 2018.
- Tenth amendment agreement of PLTU Nii Tanasa Kendari (2x10 MW) *supporting phase* on December 26, 2018.
- Eleventh amendment agreement of PLTU Nii Tanasa Kendari (2x10 MW) *supporting phase* on December 31, 2019.
- PLTU Kendari Unit #3 (1x10 MW) Master of Agreement on April 13, 2015.
- Agreement of PLTU Kendari Unit #3 (1x10 MW) *supporting phase* on November 23, 2018.
- First Amendment PLTU Kendari Unit #3 *Supporting Based on April 24, 2018*.
- PLTU Anggrek Master of Agreement on September 12, 2018.
- Agreement of PLTU Anggrek *supporting* (Pre COD) phase on April 1, 2019.
- Amendment agreement of PLTU Anggrek *supporting* (Pre COD) phase on July 1, 2019.
- PLTU Anggrek period after *Commercial Operation Date* (COD) until *Final Acceptance Certificate* (FAC) on September 30, 2019.
- Master Agreement of PLTU Ampana dated September 12, 2018.
- Agreement of PLTU Ampana *supporting* (Pre COD) phase on October 17, 2019.
- PLTU Ampana period after *Commercial Operation Date* (COD) until *Final Acceptance Certificate* (FAC) on November 1, 2019.
- Amendment agreement PLTU Bolok (2x16.5 MW) *supporting phase* on October 17, 2016.
- Second Amendment PLTU Bolok (2x16.5 MW) *supporting phase* on May 31, 2017.
- Third Amendment PLTU Bolok (2x16.5 MW) *supporting phase* on December 29, 2017.

**PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Amandemen keempat PLTU Bolok (2x16,5 MW) tahap *supporting* pada tanggal 29 Desember 2017.
- Perjanjian PLTU Ropa tahap *supporting* tanggal 28 Oktober 2014.
- PLTU Tidore (2x7 MW) tahap *supporting* tanggal 12 Januari 2015.

Untuk pengembangan bisnis di Jawa, Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Jasa Operasi dan Pemeliharaan, diantaranya:

- Amandemen dan Pernyataan Kembali PLTA Wonorejo pada tanggal 30 Desember 2015.
- Amandemen keempat PLTA Wonorejo pada tanggal 17 Mei 2018.
- Amandemen kelima PLTA Wonorejo pada tanggal 23 Mei 2019.
- Amandemen dan Pernyataan kembali PLTA Ampel Gading pada tanggal 3 Juli 2017.

c. Perjanjian Konsorsium

Pada tanggal 12 Juli 2017 telah ditandatangani Perjanjian Konsorsium antara Perusahaan dengan PT Gama Energi Negeri. Perjanjian konsorsium tersebut mengenai kerjasama dalam pengembangan PLTU Sumut 2 2x300 MW di Medan, Sumatera Utara, dengan porsi penyertaan Perusahaan sebesar 51%. Sampai tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan belum melakukan *share subscription* di *Project Company*.

Pada tanggal 14 November 2019 telah ditandatangani Perjanjian Konsorsium antara Perusahaan (melalui PT PJB Investasi) dengan Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – MASDAR. Perjanjian Konsorsium tersebut mengenai Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik Terapung 145 MWac Beserta Gardu Induk Evakuasi Daya di Cirata, dengan porsi penyertaan Perusahaan sebesar 51%. Sampai tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan belum melakukan *share subscription* di *Project Company*.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

- *Fourth Amendment PLTU Bolok (2x16,5 MW) supporting phase on December 29, 2017.*
- *Agreement of PLTU Ropa supporting phase on October 28, 2014.*
- *PLTU Tidore (2x7 MW) supporting phase on January 12, 2015.*

Regarding the expansion in Java, the Company has entered an agreement O&M:

- *Amendment and Restatement PLTA Wonorejo on December 30, 2015.*
- *Fourth Amendment PLTA Wonorejo on May 17, 2018.*
- *Fifth Amendment PLTA Wonorejo on May 23, 2019.*
- *Amendment and Restatement PLTA Ampel Gading on July 3, 2017.*

c. Consortium Agreements

On July 12, 2017, the Company entered into Consortium Agreement with PT Gama Energi Negeri. This project development agreement is about cooperation in the development of Sumut 2 Coal Power Project (PLTU) 2x300 MW in Medan, North Sumatera, and the portion of the Company's participating interest is 51%. As of the issuance date of the consolidated financial statements, the Company has not done the share subscription of Project Company yet.

On November 14, 2019 the Company entered into Consortium Agreement (through PT PJB Investasi) with Abu Dhabi Future Energy Company PJSC - MASDAR. The Consortium Agreement regarding the Development of 145 MWac Floating Photovoltaic Solar Power Plants along with the Power Evacuation Main Station in Cirata, the Company's participating interest of 51%. As of the issuance date of the consolidated financial statements, the Company has not done the share subscription of Project Company yet.



PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

d. Perolehan barang modal

Pada tanggal 19 Desember 2017 telah ditandatangani perjanjian novasi antara PT PLN (Persero) dan PT Pembangkitan Jawa-Bali dan Konsorsium Doosan Heavy Industries and Construction Co. Ltd dan PT Utama Karya (Persero) sehubungan dengan Perjanjian Kontrak No. 0125.PJ/DAN.02.01/DIR/2017, tertanggal 29 Maret 2017 untuk proyek add on Pusat Listrik Tenaga Gas Uap Muara Tawar Blok 2,3 dan 4.

e. Litigasi

Pada tahun 2018, Ahli waris Tjotjong Bin Runah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas tanah yang telah dipergunakan oleh PT PLN (Persero) dan PT PJB Unit Pembangkit Muara Tawar seluas 4,096 hektar sebesar Rp54,196 milyar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasi, perkara ini masih dalam proses persidangan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pada tahun 2019, Ronald manurung dan rekan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Cikarang atas tanah seluas 11.918 m² yang telah dipergunakan oleh PT PLN (Persero) dan PT PJB Unit Pembangkit Muara Tawar dengan meminta pembayaran ganti rugi sebesar Rp33,836 milyar. Dari hasil persidangan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Cikarang, gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasi, perkara ini masih dalam proses banding oleh Penggugat pada Pengadilan Tinggi Bandung.

d. Capital expenditures

On December 19, 2017, signed an novation agreement between PT PLN (Persero) and PT Pembangkitan Jawa-Bali and the Heavy Industry and Construction Consortium of Doosan Co. Ltd and PT Utama Karya (Persero) which entered into an agreement with Trade Agreement No. 0125.JP / DAN. 02.01 / DIR / 2017, dated March 29, 2017 for the add on project of Muara Tawar Steam Gas Electric Power Plant Block 2,3 and 4.

e. Litigation

In 2018, the heirs of Tjotjong Bin Runah filed claims for compensation for the land that has been used by PT PLN (Persero) and PT PJB Muara Tawar power plant covering an area of 4,096 hectares amounting Rp54,196 billion in the District Court of South Jakarta. As of the issuance date of the consolidated financial statements, the case is still in progress in the District Court of South Jakarta.

In 2019, Ronald Manurung and partners a filed claims for compensation in Cikarang District Court over a land area of 11,918 sqm that has been used by PT PLN (Persero) and PT PJB Muara Tawar Unit by asking for compensation payment of Rp33,836 billion. From the results of the Cikarang District Court, the Plaintiff's claim was rejected in its entirety. As of the issuance date of the consolidated financial statements, this case is still in the process of being appealed by the Plaintiff at the Bandung High Court.

37. Instrumen Keuangan, Manajemen Risiko Modal dan Risiko Keuangan

a. Kategori dan klasifikasi instrumen keuangan

Tabel berikut ini mengungkapkan rincian instrumen keuangan Perusahaan dan entitas anak berdasarkan klasifikasi instrumen keuangan:

37. Financial Instruments, Capital Risk and Financial Risk Management

a. Categories and classes of financial instruments

The following table disclosed the details of the Company and its subsidiaries financial instruments based on financial instruments classification:



**PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2019											
	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ Loans and receivables Rp	Tersedia untuk dijual/ Available- for-sale Rp	Nilai wajar melalui laba rugul/ Fair value through profit or loss Rp	Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities at amortized cost Rp	Nilai wajar melalui laba rugul/ Fair value through profit or loss Rp	Jumlah aset dan liabilitas keuangan/ Total financial assets and liabilities Rp					
Aset keuangan							Financial assets				
Aset keuangan tidak lancar							Non-current financial assets				
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	94,223	--	--	--	--	94,223	Restricted cash in banks and time deposits				
Piutang kepada ventura bersama	785,639	--	--	--	--	785,639	Receivables from joint ventures				
Piutang lain-lain	41,955	--	--	--	--	41,955	Other receivables				
Aset tidak lancar lain	1,170,704	--	--	--	--	1,170,704	Other non-current asset				
Jumlah aset keuangan tidak lancar	2,092,521	--	--	--	--	2,092,521	Total non-current financial assets				
Aset keuangan lancar							Current financial assets				
Kas dan setara kas	1,838,858	--	--	--	--	1,838,858	Cash and cash equivalents				
Deposito berjangka	326,901	--	--	--	--	326,901	Time deposits				
Piutang usaha	22,140,678	--	--	--	--	22,140,678	Trade receivables				
Piutang lain-lain	362,755	--	--	--	--	362,755	Others receivables				
Jumlah aset keuangan lancar	24,669,192	--	--	--	--	24,669,192	Total current financial assets				
Jumlah aset keuangan	26,761,713	--	--	--	--	26,761,713	Total financial assets				
Liabilitas keuangan							Financial liabilities				
Liabilitas keuangan tidak lancar							Non-current financial liabilities				
Liabilitas kepada pemegang saham	--	--	--	1,668,986	--	1,668,986	Liability to shareholder				
Liabilitas keuangan jangka pendek							Current financial liabilities				
Utang usaha	--	--	--	3,431,194	--	3,431,194	Trade payables				
Utang lain-lain	--	--	--	870,744	--	870,744	Other payables				
Biaya masih harus dibayar	--	--	--	399,925	--	399,925	Accrued expenses				
Jumlah liabilitas keuangan jangka pendek	--	--	--	4,701,863	--	4,701,863	Total current financial liabilities				
Jumlah liabilitas keuangan	--	--	--	6,370,849	--	6,370,849	Total financial liabilities				
2018											
	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ Loans and receivables Rp	Tersedia untuk dijual/ Available- for-sale Rp	Nilai wajar melalui laba rugul/ Fair value through profit or loss Rp	Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities at amortized cost Rp	Nilai wajar melalui laba rugul/ Fair value through profit or loss Rp	Jumlah aset dan liabilitas keuangan/ Total financial assets and liabilities Rp					
Aset keuangan							Financial assets				
Aset keuangan tidak lancar							Non-current financial assets				
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	68,297	--	--	--	--	68,297	Restricted cash in banks and time deposits				
Piutang kepada ventura bersama	827,957	--	--	--	--	827,957	Receivables from joint ventures				
Piutang lain-lain	40,988	--	--	--	--	40,988	Other receivables				
Aset tidak lancar lain	282,990	--	--	--	--	282,990	Other non-current asset				
Jumlah aset keuangan tidak lancar	1,220,232	--	--	--	--	1,220,232	Total non-current financial assets				
Aset keuangan lancar							Current financial assets				
Kas dan setara kas	1,688,004	--	--	--	--	1,688,004	Cash and cash equivalents				
Deposito berjangka	1,204,511	--	--	--	--	1,204,511	Time deposits				
Piutang usaha	20,146,456	--	--	--	--	20,146,456	Trade receivables				
Piutang lain-lain	356,827	--	--	--	--	356,827	Others receivables				
Jumlah aset keuangan lancar	23,395,798	--	--	--	--	23,395,798	Total current financial assets				
Jumlah aset keuangan	24,616,030	--	--	--	--	24,616,030	Total financial assets				
Liabilitas keuangan							Financial liabilities				
Liabilitas keuangan tidak lancar							Non-current financial liabilities				
Liabilitas kepada pemegang saham	--	--	--	209,272	--	209,272	Liability to shareholder				
Liabilitas keuangan jangka pendek							Current financial liabilities				
Utang usaha	--	--	--	3,494,980	--	3,494,980	Trade payables				
Utang lain-lain	--	--	--	467,180	--	467,180	Other payables				
Biaya masih harus dibayar	--	--	--	435,114	--	435,114	Accrued expenses				
Jumlah liabilitas keuangan jangka pendek	--	--	--	4,397,274	--	4,397,274	Total current financial liabilities				
Jumlah liabilitas keuangan	--	--	--	4,606,546	--	4,606,546	Total financial liabilities				

b. Manajemen risiko modal

Perusahaan dan entitas anak mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan kelangsungan usaha dan untuk memastikan pemenuhan batasan rasio kecukupan modal. Struktur modal Perusahaan terdiri dari ekuitas pemegang saham induk, yang terdiri dari modal saham (Catatan 17), tambahan modal disetor (Catatan 18) dan saldo laba.

b. Capital risk management

The Company and its subsidiaries manages capital risk to ensure that they will be able to continue as going concern and to ensure compliance with covenants of capital adequacy ratio. The Company capital structure consist of equity shareholders that consist of capital stock (Note 17), additional paid-in capital (Note 18) and retained earnings.



PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Direksi Perusahaan dan entitas anak secara berkala melakukan tinjauan struktur permodalan. Sebagai bagian dari tinjauan ini, Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

Directors of the Company and its subsidiaries periodically review the Company capital structure. As part of this review, the Directors consider the cost of capital and related risks.

Perusahaan dan entitas anak berusaha untuk meminimalkan biaya modal sehingga dapat memaksimalkan nilai Perusahaan. Oleh karena itu, kebijakan Perusahaan dan entitas anak dalam mencari pendanaan akan selalu memperhitungkan risiko keuangan yang mungkin timbul di masa depan.

The Company and its subsidiaries seeks to minimize the cost of capital, in order to maximize their value. Therefore, the Company and its subsidiaries policy to seek funding that will always take into account the financial risk that may arise in the future.

c. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan dan entitas anak adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko keuangan, antara lain risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Perusahaan dan entitas anak beroperasi dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Direksi.

c. Financial risk management objectives and policies

The Company and its subsidiaries overall financial risk management and policies is to ensure that adequate financial resources are available for operation and development of their business, while managing their exposure to financial risk, which are market risk (including foreign currency risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risks. The Company and its subsidiaries operate within the defined policy that are approved by the Directors.

Dalam melaksanakan aktivitas manajemen risiko, Perusahaan dan entitas anak telah memiliki panduan dalam bentuk Pedoman Operasional Manajemen Risiko. Pedoman ini mengatur keseimbangan antara fungsi operasional bisnis dengan pengelolaan risiko keuangan.

In performing the risk management, the Company and its subsidiaries have established a guidance in the form of Risk Management Operational Manual. This manual provides guidance to managed harmonization between business operational function and financial risk management.

Risiko keuangan utama Perusahaan dan entitas anak adalah pada risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Manajemen menelaah dan mengeluarkan kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko. Perusahaan dan entitas anak menerapkan kebijakan manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalisasi pengaruh ketidakpastian risiko keuangan terhadap kinerja keuangan Perusahaan dan entitas anak. Berikut ini ringkasan kebijakan dan pengelolaan manajemen risiko tersebut:

The main financial risks of the Company and its subsidiaries are market risk (including foreign currency risk and interest rate risk) credit risk and liquidity risk. The management evaluate and established policies for managing each of these risks. The Company and its subsidiaries applies the financial risk management policies to minimize the impact of the unpredictability of financial risk on the Company and its subsidiaries financial performance. The summary of the financial risk management policies are as follows:

**PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

i. Manajemen risiko mata uang asing

Perusahaan dan entitas anak memiliki eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar yang timbul dari transaksi dengan pelanggan maupun pemasok yang didenominasi dalam mata uang asing, sehingga Perusahaan dan entitas anak terekspos terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing.

Kebijakan Perusahaan dan entitas anak untuk mengelola eksposur mata uang asing dalam batas yang dapat diterima.

Sensitivitas mata uang asing

Tabel di bawah ini memaparkan rincian sensitivitas Perusahaan dan entitas anak untuk setiap 10% kenaikan dan penurunan Rupiah terhadap mata uang asing yang relevan. 10% kenaikan dan penurunan menggambarkan penilaian manajemen terhadap perubahan yang rasional pada nilai tukar setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini. Analisis sensitivitas ini hanya mencakup saldo item moneter setelah pajak dalam mata uang asing dan menyesuaikan translasi pada akhir tahun untuk 10% perubahan dalam nilai tukar mata uang asing.

Dampak pada laba setelah pajak/ Effect of profit after tax					
USD					
2019			2018		
+10%	-10%		+10%	-10%	
Aset Keuangan					Financial Assets
Kas dan setara kas	47,348	(47,348)	4,287	(4,287)	Cash and cash equivalents
Deposito jangka panjang	49,145	(49,145)	--	--	Long-term time deposits
Deposito berjangka	--	--	66,817	(66,817)	Time deposits
Subjumlah laba (rugi)	96,493	(96,493)	71,104	(71,104)	Subtotal profit (loss)
Liabilitas Keuangan					Financial Liabilities
Liabilitas kepada pemegang saham	(125,174)	125,174	(15,695)	15,695	Liability to shareholder
Utang usaha	(111,782)	111,782	(133,570)	133,570	Trade payables
Subjumlah laba (rugi)	(236,956)	236,956	(149,265)	149,265	Subtotal profit (loss)
Jumlah	(140,463)	140,463	(78,161)	78,161	Total

ii. Manajemen risiko tingkat suku bunga

Per tanggal 31 Desember 2019, manajemen percaya risiko tingkat suku bunga adalah minimal dikarenakan Perusahaan dan entitas anak hanya terekspos risiko tingkat suku bunga melalui saldo kas di bank dan tidak memiliki pinjaman yang berbunga pada tanggal tersebut.

i. Foreign currency risk management

The Company and its subsidiaries have foreign currency exposures arising from transactions with customers and suppliers which are denominated in foreign exchange, therefore the Company and its subsidiaries are exposed to exchange rate fluctuations.

The Company and its subsidiaries' policies is to maintain foreign currency exposure within acceptable limits.

Foreign currency sensitivity

The following table explains the details of the Company and its subsidiaries' sensitivity to a 10% increase and decrease in Rupiah against the relevant foreign currencies. The 10% increase or decrease represents the management's assessment of the reasonably possible changes in foreign currency rates after considering the current economic conditions. The sensitivity analysis includes only after tax outstanding foreign denominated monetary items and adjusts their translation at the end of the year for a 10% change in foreign currency rates.

ii. Interest rate risk management

As of December 31, 2019, management believes that the exposure from interest rate risk is minimal because the Company and its subsidiaries are exposed interest rate risk from cash in bank and have no interest bearing borrowing on such date.



PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Profil suku bunga

Profil suku bunga Perusahaan dan entitas anak terhadap aset dan liabilitas keuangan adalah sebagai berikut:

Interest rate profile

The interest rate profile of the Company and its subsidiaries financial assets and liabilities are as follows:

2019					
	Tingkat bunga mengambang/ Floating rate	Tingkat bunga tetap/Fixed rate	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing	Jumlah/ Total	
Aset keuangan					Financial assets
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	—	—	94,223	94,223	Restricted cash in banks and time deposits
Piutang kepada ventura bersama	785,639	—	—	785,639	Receivables from joint ventures
Piutang lain-lain tidak lancar	—	—	41,955	41,955	Other receivable non-current
Aset tidak lancar lainnya	—	655,271	515,433	1,170,704	Other non-current assets
Kas dan setara kas	1,709,640	126,542	2,676	1,838,858	Cash and cash equivalents
Deposito berjangka	—	326,901	—	326,901	Time deposits
Piutang usaha	—	—	22,140,678	22,140,678	Trade receivables
Piutang lain-lain	—	—	362,755	362,755	Other receivables
Jumlah aset keuangan	2,495,279	1,108,714	23,157,720	26,761,713	Total financial assets
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Liabilitas kepada pemegang saham	1,668,986	—	—	1,668,986	Liability to shareholder
Utang usaha	—	—	3,431,194	3,431,194	Trade payables
Utang lain-lain	—	—	870,744	870,744	Other payables
Biaya masih harus dibayar	—	—	399,925	399,925	Accrued expenses
Jumlah liabilitas keuangan	—	—	4,701,863	6,370,849	Total financial liabilities
2018					
	Tingkat bunga mengambang/ Floating rate	Tingkat bunga tetap/Fixed rate	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing	Jumlah/ Total	
Aset keuangan					Financial assets
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	—	—	68,297	68,297	Restricted cash in banks and time deposits
Piutang kepada ventura bersama	827,957	—	—	827,957	Receivables from joint ventures
Piutang lain-lain tidak lancar	—	—	40,988	40,988	Other receivable non-current
Aset tidak lancar lainnya	—	—	282,990	282,990	Other non-current assets
Kas dan setara kas	1,473,953	211,045	3,006	1,688,004	Cash and cash equivalents
Deposito berjangka	—	1,204,511	—	1,204,511	Time deposits
Piutang usaha	—	—	20,146,456	20,146,456	Trade receivables
Piutang lain-lain	—	—	356,827	356,827	Other receivables
Jumlah aset keuangan	2,301,910	1,415,556	20,898,564	24,616,030	Total financial assets
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Liabilitas kepada pemegang saham	209,272	—	—	209,272	Liability to shareholder
Utang usaha	—	—	3,494,980	3,494,980	Trade payables
Utang lain-lain	—	—	467,180	467,180	Other payables
Biaya masih harus dibayar	—	—	435,114	435,114	Accrued expenses
Jumlah liabilitas keuangan	209,272	—	4,397,274	4,606,546	Total financial liabilities

Sensitivitas tingkat suku bunga

Analisis sensitivitas berikut telah ditentukan berdasarkan eksposur Perusahaan dan entitas anak terhadap tingkat suku bunga untuk saldo instrumen keuangan terutang setelah pajak pada tanggal pelaporan. Analisis ini disusun dengan mengasumsikan jumlah saldo aset dan liabilitas terutang pada akhir periode pelaporan, terutang sepanjang tahun.

Interest rate sensitivity

The sensitivity analysis below has been determined based on the Company and its subsidiaries' exposure to interest rates for financial instruments after tax outstanding at the reporting date. The analysis is prepared assuming the amount of assets and liabilities outstanding at the end of the reporting period was outstanding for the whole year.

**PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

iii. Manajemen risiko kredit

Risiko kredit mengacu pada risiko bahwa pihak ketiga akan gagal dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan dan entitas anak. Eksposur risiko kredit Perusahaan dan entitas anak timbul terutama dari piutang usaha. Perusahaan dan entitas anak meminimalisasi risiko kredit dengan melakukan penempatan pada lembaga keuangan dengan reputasi baik (Catatan 12).

Tujuan Perusahaan dan entitas anak adalah untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan dengan meminimalkan kerugian yang dapat terjadi karena meningkatnya eksposur risiko kredit. Pendapatan usaha Perusahaan dan entitas anak terutama berasal pihak berelasi, yaitu 99,43% dan 99,52% dari jumlah pendapatan masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018. Oleh karena itu, Perusahaan dan entitas anak memiliki risiko konsentrasi kredit yang signifikan terhadap pihak berelasi tersebut.

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan konsolidasian setelah dikurangi dengan penyisihan untuk kerugian mencerminkan eksposur Perusahaan dan entitas anak terhadap risiko kredit.

Kualitas kredit aset keuangan

Tabel berikut ini menunjukkan kualitas aset keuangan Perusahaan dan entitas anak:

iii. Credit risk management

Credit risk refers to the risk that the counterparties will default on its contractual obligations resulting in a loss to the Company and its subsidiaries. The Company and its subsidiaries' exposure to credit risk mainly arises from accounts receivable from its customers. The Company and its subsidiaries minimises the credit risk by placing the funds with credible financial institutions (Note 12).

The Company and its subsidiaries' objective is to seek continual revenue growth while minimizing losses incurred due to increase of credit risk exposure. The Company and its subsidiaries' revenues are mainly from related parties, which are 99.43% and 99.52% of total revenues for the years ended December 31, 2019 and 2018, respectively. Therefore, the Company and its subsidiaries have a significant concentration of credit risk to the related parties.

The carrying amount of financial assets recorded in the consolidated financial statements, net of any allowance for losses represents the Company and its subsidiaries' exposure to credit risk.

Credit quality of financial assets

The following table shows the quality of the Company and its subsidiaries' financial assets:

	2019				
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ Neither past due nor impaired	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ Past due but not impaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired	Jumlah/ Total	
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	94,223	--	--	94,223	Restricted cash in banks and time deposits
Aset tidak lancar lainnya	1,170,704	--	--	1,170,704	Other non-current assets
Piutang kepada ventura bersama	785,639	--	--	785,639	Receivables from joint ventures
Piutang lain-lain tidak lancar	41,955	--	--	41,955	Other receivable non-current
Kas dan setara kas	1,838,858	--	--	1,838,858	Cash and cash equivalents
Deposito berjangka	326,901	--	--	326,901	Time deposits
Piutang usaha	22,140,678	--	--	22,140,678	Trade receivables
Piutang lain-lain	362,755	--	--	362,755	Other receivables
Jumlah	26,761,713	--	--	26,761,713	Total



PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2018				
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ Neither past due nor impaired	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ Past due but not impaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired	Jumlah/ Total	
Rekening bank dan deposito berjangka					Restricted cash in banks and time deposits
dibatasi penggunaannya	68,297	--	--	68,297	and time deposits
Aset tidak lancar lainnya	282,990	--	--	282,990	Other non-current assets
Piutang kepada ventura bersama	827,957	--	--	827,957	Receivables from joint ventures
Piutang lain-lain tidak lancar	40,988	--	--	40,988	Other receivable non-current
Kas dan setara kas	1,688,004	--	--	1,688,004	Cash and cash equivalents
Deposito berjangka	1,204,511	--	--	1,204,511	Time deposits
Piutang usaha	20,146,456	--	--	20,146,456	Trade receivables
Piutang lain-lain	356,827	--	--	356,827	Other receivables
Jumlah	24,616,030	--	--	24,616,030	Total

iv. Manajemen risiko likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko bahwa Perusahaan dan entitas anak akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban terkait dengan liabilitas keuangan yang diselesaikan dengan pembayaran kas atau aset keuangan lainnya. Tanggung jawab utama manajemen risiko likuiditas terletak pada Direksi, yang telah membangun kerangka manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk persyaratan manajemen likuiditas dan pendanaan Perusahaan dan entitas anak. Perusahaan dan entitas anak mengelola risiko likuiditas dengan menjaga kecukupan kas dan cadangan fasilitas pinjaman dengan terus menerus memonitor perkiraan dan realisasi arus kas aktual dan mencocokkan profil jatuh tempo liabilitas keuangan.

Tabel berikut ini memberikan rincian tanggal jatuh tempo kontraktual untuk liabilitas keuangan dengan pembayaran yang telah disepakati pada periode 31 Desember 2019 dan 2018:

iv. Liquidity risk management

Liquidity risk is defined as the risk that the Company and its subsidiaries will encounter difficulty in meeting its obligations associated with financial liabilities that are settled by delivering cash or another financial asset. Ultimate responsibility for liquidity risk management rests with the Directors, which has built an appropriate liquidity risk management framework for the management of the Company and its subsidiaries' funding and liquidity management requirements. The Company and its subsidiaries manage liquidity risk by maintaining adequate cash and reserve borrowing facilities by continuously monitoring forecast and actual cash flows and matching the maturity profiles of financial liabilities.

The following table details the Company and its subsidiaries remaining contractual maturity for its financial liabilities with agreed repayment period as of December 31, 2019 and 2018:

	2019				
	Dalam satu Tahun/Within one year	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari tiga tahun/ Over one year but not longer than three years	Lebih dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun/ Over three year but not longer than five years	Lebih dari lima tahun/Over five years	
Liabilitas kepada pemegang saham	--	--	--	1,668,986	Liability to shareholder
Utang usaha	3,431,194	--	--	--	Trade payables
Utang lain-lain	870,744	--	--	--	Other payables
Biaya masih harus dibayar	399,925	--	--	--	Accrued expenses
Jumlah	4,701,863	--	--	1,668,986	Total

**PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2018				
	Dalam satu Tahun/Within one year	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari tiga tahun/ Over one year but not longer than three years	Lebih dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun/ Over three year but not longer than five years	Lebih dari lima tahun/Over five years	Jumlah/ Total
Liabilitas kepada pemegang saham	--	--	--	209,272	209,272
Utang usaha	3,494,980	--	--	--	3,494,980
Utang lain-lain	467,180	--	--	--	467,180
Biaya masih harus dibayar	435,114	--	--	--	435,114
Jumlah	4,397,274	--	--	209,272	4,606,546

Tabel tersebut telah disusun berdasarkan arus kas liabilitas keuangan yang tidak didiskontokan berdasarkan tanggal paling awal dimana Perusahaan dan entitas anak diwajibkan untuk membayar. Untuk liabilitas keuangan yang didenominasi dengan mata uang asing, jumlah yang tidak didiskontokan ditranslasi dengan kurva nilai tukar *forward* yang relevan pada akhir periode pelaporan. Tanggal jatuh tempo kontraktual berdasarkan pada tanggal paling awal dimana Perusahaan dan entitas anak diwajibkan untuk membayar.

The table has been drawn up based on the undiscounted cash flow of financial liabilities based on the earliest date on which the Company and its subsidiaries can be required to pay. For foreign currency denominated financial liabilities, the undiscounted amortization is translated using the relevant forwards exchange curve at the end of the reporting period. The contractual maturity is based on the earliest date on which the Company and its subsidiaries may be required to pay.

d. Nilai wajar instrumen keuangan

Kecuali dijabarkan pada tabel berikut ini, manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan konsolidasian mendekati nilai wajarnya baik yang jatuh tempo dalam jangka pendek, instrumen tersebut dijamin penuh atau mempunyai tingkat suku bunga pasar:

d. Fair value of financial instruments

Except as detailed in the following table, the management considers that the carrying amounts of financial assets and financial liabilities recorded at amortized cost in the consolidated financial statements approximate their fair values either because of their short-term maturities, because the instruments are fully collateralized or because they carry a market interest rate:

	2019		2018		
	Nilai tercatat/ Carrying amount Rp	Nilai wajar/ Fair value Rp	Nilai tercatat/ Carrying amount Rp	Nilai wajar/ Fair value Rp	
Pinjaman diberikan dan piutang					Loans and receivables
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	94,223	94,223	68,297	68,297	Restricted cash in banks and time deposits
Piutang kepada ventura bersama	785,639	785,639	827,957	827,957	Receivables from joint ventures
Piutang lain-lain tidak lancar	41,955	41,955	40,988	40,988	Other receivable non-current
Aset tidak lancar lain	1,170,704	1,170,704	282,990	282,990	Other non-current asset
Kas dan setara kas	1,838,858	1,838,858	1,688,004	1,688,004	Cash and cash equivalents
Deposito berjangka	326,901	326,901	1,204,511	1,204,511	Time deposits
Piutang usaha	22,140,678	22,140,678	20,146,456	20,146,456	Trade receivables
Piutang lain-lain	362,755	362,755	356,827	356,827	Other receivables
Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi					Liabilities at amortized cost
Pinjaman kepada pemegang saham	1,668,986	1,668,986	209,272	209,272	Liability to shareholder
Utang usaha	3,431,194	3,431,194	3,494,980	3,494,980	Trade payables
Utang lain-lain	870,744	870,744	467,180	467,180	Other payables
Biaya masih harus dibayar	399,925	399,925	435,114	435,114	Accrued expenses



PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nilai wajar instrumen keuangan diatas
diklasifikasikan sebagai tingkat dua dalam
hirarki nilai wajar.

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

The fair values of the above financial
instruments are within level two of the fair
value hierarchy.

38. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

- Pada awal tahun 2020 Pemerintah mengumumkan "status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona". Hal tersebut berdampak pada penurunan ekonomi dalam negeri, yaitu melemahnya nilai tukar rupiah dan penurunan harga sekuritas di pasar modal. Manajemen telah menilai dampak peristiwa tersebut terhadap operasi Perusahaan dan percaya bahwa tidak ada dampak negatif yang signifikan dalam jangka pendek meskipun dampak jangka panjang sulit diprediksi pada saat ini. Manajemen akan terus memantau ini dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko dan ketidakpastian pada masa yang akan datang.

- Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2020 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 ("Peraturan") telah diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2020.

Peraturan ini mengatur mengenai kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Peraturan ini salah satunya mengatur penyesuaian tarif PPh Badan dalam negeri menjadi sebesar 22% pada tahun pajak 2020 dan tahun pajak 2021, dan 20% pada tahun pajak 2022.

Peraturan tersebut tidak berdampak kepada pengukuran aset dan kewajiban pajak kini maupun tangguhan, termasuk beban terkait, yang dilaporkan pada laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2019 dan baru berdampak pada pelaporan keuangan setelah tahun 2019. Jika Perusahaan dan entitas anak menggunakan tarif pajak 22% untuk tahun 2019, aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan yang dilaporkan oleh Perusahaan dan entitas anak pada tanggal 31 Desember 2019 akan turun sebesar Rp66.362 dan Rp1.336.

38. Events After Reporting Period

- In early 2020 the Government announced "the status of a specific state of emergency from the corona virus". This has an impact on the decline in the domestic economy, namely the weakening of the rupiah and the decline in prices of securities on the capital market. Management has assessed the impact of these events on the Company's operations and believes that there are no significant negative impacts in the short term even though long-term impacts are difficult to predict at this time. Management will continue to monitor this and take action as needed to overcome risks and uncertainties in the future.

- Government Regulation No. 1 Year 2020 Government Regulation in Lieu of Law No. 1 Year 2020 ("the Regulation") has been issued on March 31, 2020.

The Regulation is concerning the state financial policy and financial system stability in response of the COVID-19 pandemic and/or the threats that endanger the national economy and/or financial system stability. The Regulation, among others, regulates the adjustment of Corporate Income Tax rate for domestic company to become 22% in the fiscal years of 2020 and 2021 and 20% in 2022 fiscal year.

The Regulation does not affect the measurement of the current and deferred tax assets and liabilities, including its related expenses, which were reported in the consolidated financial statements of December 31, 2019 and would only impact the financial reporting after 2019. Had the Company and its subsidiaries used the 22% tax rate in 2019, the deferred tax assets and liabilities reported by the Company and its subsidiaries as of December 31, 2019 would have decreased by Rp66,362 and Rp1,336, respectively.

**PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

39. Transaksi Non-Kas

39. Non-Cash Transaction

Tabel di bawah ini menjelaskan perubahan dalam liabilitas Perusahaan yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas dan perubahan non-kas. Liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah liabilitas yang arus kas, atau arus kas masa depannya, diklasifikasikan dalam laporan arus kas konsolidasian Perusahaan sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan.

The table below details changes in the Company's liabilities arising from financing activities, including both cash and non-cash changes. Liabilities arising from financing activities are those for which cash flow were, or future cash flows will be, classified in the Company's consolidated statement of cash flows as cash flows from financing activities.

	Arus kas dari aktivitas pendanaan/ Cash flow from financing activities		Perubahan transaksi non kas/ Non-cash changes			
	2018	Penambahan/ Additional	Penambahan aset tetap/ Addition of fixed assets	Efek selisih kurs yang belum terrealisasi dan yang lainnya/ Unrealized foreign exchange and others	Jumlah/ Total	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Liabilitas kepada pemegang saham	209,272	1,482,492	32,107	(54,885)	1,668,986	Liability to shareholder

Pengungkapan tambahan atas aktivitas
investasi dan pendanaan non-kas:

Supplemental disclosures on non-cash
investing and financing activities:

	2019 Rp	2018 Rp	
Aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi arus kas:			Non-cash investing and financing activities:
Piutang usaha diperhitungkan dengan utang usaha	15,606,552	22,493,051	Offsetting trade receivable with trade payable
Pembayaran dividen dengan memperhitungkan piutang usaha	9,406,468	3,668,635	Dividend payment through trade receivables offset
Perolehan aset tetap melalui:			Additions to fixed assets through:
Utang usaha	482,623	747,824	Trade payable
Kapitalisasi biaya pinjaman	32,107	985	Capitalization of borrowing cost
Kerugian penurunan nilai aset tetap	--	5,309	Impairment on property, plant and equipment
Penambahan properti investasi yang berasal dari reklasifikasi aset tetap	2,897	--	Addition of investment property from reclassification of property, plant and equipment
Penambahan nilai aset melalui hasil revaluasi dan kenaikan nilai wajar properti investasi	27,205	34,847	Addition of value of assets through revaluation and increase of fair value of investment properties
Penurunan nilai aset melalui hasil revaluasi	--	29,212,914	Impairment of fixed assets through revaluation
Dividen dari ventura bersama yang belum diterima	12,064	11,928	Dividend from joint venture that has not been paid



PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

40. Tanggung Jawab Manajemen dan Persetujuan atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2020.

40. Managements Responsibility and Approval of Consolidated Financial Statements

The preparation and fair presentation of the consolidated financial statements were the responsibilities of the management, and were approved by the Directors for issuance on March 31, 2020.



Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan Audit
Audited Financial Statements



Referensi Kriteria AR
ARA Criteria Reference

Halaman ini Sengaja Dikosongkan
This page is intentionally left blank



REFERENSI KRITERIA ARA

ARA CRITERIA REFERENCE



Pendahuluan
Introduction



Laporan Manajemen
Management Report



Profil Perusahaan
Company Profile



Tinjauan Pendukung Bisnis
Business Support Review



Analisis dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis



Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Laporan Keuangan Audit
Audited Financial Statements



Referensi Kriteria ARA
ARA Criteria Reference

KRITERIA PENILAIAN ARA TAHUN 2019

ASSESSMENT CRITERIA OF ARA 2019

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
I. Umum Umum			
1.	Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris. The annual report is presented in proper and correct Bahasa Indonesia and is recommended to be presented in English as well.		✓
2.	Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca. The annual report is printed in fine quality, with easy-to-read font types and sizes.		✓
3.	Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas. The annual report presents clear identity of the company.		✓
4.	Nama perusahaan dan tahun Annual Report. Company's name and the year of Annual Report.	Nama perusahaan dan tahun annual report ditampilkan di: 1. Sampul muka; 2. Samping; 3. Sampul belakang; dan 4. Setiap halaman. Company's name and the year of Annual Report are shown in: 1. Front cover; 2. Side margin; 3. Back cover; and 4. Every page.	✓
5.	Laporan tahunan ditampilkan di website perusahaan. The annual report is available on the company's website.	Mencakup laporan tahunan terkini dan paling kurang 4 tahun terakhir. Includes the current annual report and at the very least the last 4 years.	✓
II. Ikhtisar Data Keuangan Penting Important Financial Data Highlights			
1.	Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun. Information on the Company's operational results with comparisons of 3 (three) fiscal years or since the establishment of the company if the business activities have run for less than 3 (three) years.	Informasi memuat antara lain: 1. Penjualan/pendapatan usaha; 2. Laba (rugi): a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan b. Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali; 3. Penghasilan komprehensif periode berjalan: a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan b. Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali; dan 4. Laba (rugi) per saham. Catatan: Apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, perusahaan menyajikan laba (rugi) dan penghasilan komprehensif periode berjalan secara total. The information contains, among others: 1. Sales/revenues; 2. Profit (loss): a. Attributable to the owner of the parent entity; and b. Attributable to the non-controlling interest; 3. Comprehensive income for the period: a. Attributable to the owner of the parent entity; and b. Attributable to the non-controlling interest; and 4. Profit (loss) per share. Remark: If the company does not have any subsidiary, the company presents profit (loss) and comprehensive income for the period in total.	27-28

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
2.	Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun. Information on the Company's financial position with comparisons of 3 (three) fiscal years or since the establishment of the company if the business activities have run for less than 3 (three) years.	Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah investasi pada entitas asosiasi; 2. Jumlah aset; 3. Jumlah liabilitas; dan 4. Jumlah ekuitas. The information contains, among others: 1. Total investments in associates; 2. Total assets; 3. Total liabilities; and 4. Total equity.	26-27
3.	Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun. Financial ratios in the form of comparisons throughout 3 (three) fiscal years or since the establishment of the company if the business activities have run for less than 3 (three) years.	Informasi memuat 5 (lima) rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan. The information encloses 5 (five) financial ratios that are common and relevant to the company's industry.	30-33
4.	Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik. Information on stock price in tables and charts.	Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah saham yang beredar; 2. Informasi dalam bentuk tabel yang memuat: a. Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; b. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan c. Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. 3. Informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang: a. Harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan b. Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kapitalisasi pasar, informasi harga saham, dan volume perdagangan saham, agar diungkapkan. The information contains, among others: 1. Number of outstanding shares; 2. The information in tables covers: a. Market capitalization based on the Stock Exchange price where the shares were listed; b. The highest, lowest, and closing price of shares based on the Stock Exchange where the shares were listed; and c. Share trading volume on the Stock Exchange where the shares were listed. 3. Information in charts contains at least: a. The closing price of shares based on the Stock Exchange where the shares were listed; and b. Share trading volume on the Stock Exchange where the shares were listed for every quarter in the last 2 (two) years. Remark: if the company does not have market capitalization, information on shares price, and share trading volume, explanation shall be given.	33



No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
5.	Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir. Information on outstanding bonds, sukuk, or convertible bonds of the last 2 (two) fiscal years.	Informasi memuat: 1. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (outstanding); 2. Tingkat bunga/imbalan; 3. Tanggal jatuh tempo; dan 4. Peringkat obligasi/sukuk tahun 2015 dan 2018. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki obligasi/sukuk/obligasi konversi, agar diungkapkan. The information covers: 1. Number of outstanding bonds/sukuk/convertible bonds; 2. Interest rate/yield; 3. Maturity date; and 4. Bonds/sukuk rating in 2015 and 2018. Remark: if the company does not have bonds/sukuk/convertible bonds, explanation shall be given.	33

III. Laporan Dewan Komisaris dan Direksi Reports of the Board of Commissioners and Board of Directors

1.	Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners' Report	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan dan dasar penilaiannya; 2. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya; 3. Pandangan atas penerapan/pengelolaan whistleblowing system (WBS) di perusahaan dan peran Dewan Komisaris dalam WBS tersebut; dan 4. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya Contains the following: 1. Assessment on the Board of Directors' performance on the company's management and the basis for the assessment; 2. Perspective on the company's business prospects set by Board of Directors and its basic consideration; 3. Assessment on the whistleblowing system (WBS) implementation/management in the company, and the Board of Commissioners' role in the WBS; and 4. Changes in the Board of Commissioners' composition and the reason behind the change (if any).	60-71
2.	Laporan Direksi Board of Directors' Report	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Analisis atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain: a. Kebijakan strategis; b. Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; dan c. Kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dan langkah-langkah penyelesaiannya; 2. Analisis tentang prospek usaha; 3. Perkembangan penerapan tata kelola perusahaan pada tahun buku; dan 4. Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya. Contains the following: 1. Analysis of the company's performance, which among others covers: a. Strategic policies; b. Comparisons between realizations and targets; and c. Challenges faced by the company, and the steps for solving them; 2. Analysis of business prospects; 3. Development of good corporate governance implementation on the fiscal year; and 4. Changes in Board of Directors' composition and the reason behind the change (if any).	72-88

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
3.	Tanda tangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Signatures of members of Board Of Commissioners and Board of Directors	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri; 2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan; 3. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya; dan 4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani Laporan Tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan. Contains the following: 1. Signatures are given on separate sheets; 2. Statement on full accountability by the Board of Commissioners and Board of Directors on the truthfulness of the Annual Report's contents; 3. Signed by all members of Board of Commissioners and Board of Directors by stating names and positions; and 4. Written explanation in separate letter from the person(s) concerned in the event that a member of Board of Commissioners or Board of Directors fail to sign the annual report; or written explanation in separate letter from the other member(s) in the event that the person(s) concerned fails to provide a written explanation.	89-90

IV. Profil Perusahaan Company Profile			
1.	Nama dan alamat lengkap perusahaan Name and complete address of the company	Informasi memuat antara lain: nama dan alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, email, dan website. The information contains, among others: name and address, postcode, telephone number, facsimile number, email, and website.	94-95
2.	Riwayat singkat perusahaan Company's brief history	Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan. Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan. Includes, among others: date/year of establishment, name, changes in the company's name and the effective date of changes on the company's name (if any). Remark: explanation shall be given in the event that the entity has never conducted name changes	96-99
3.	Bidang usaha Business sector	Uraian mengenai antara lain: 1. Kegiatan usaha perusahaan menurut Anggaran Dasar terakhir; 2. Kegiatan usaha yang dijalankan; dan 3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan. Description of, among others: 1. Company's business activities in accordance with the updated Articles of Association; 2. Business activities conducted; and 3. The outcome of products and/or services.	100-107
4.	Struktur Organisasi Organizational Structure	Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah Direksi. In the form of chart, consists of names and positions, at least until the position reporting directly to the Board of Directors.	114-115
5.	Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan Vision, Mission, and Corporate Culture	Mencakup: 1. Visi perusahaan; 2. Misi perusahaan; 3. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah direviu dan disetujui oleh Direksi/ Dewan Komisaris pada tahun buku; dan 4. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (corporate culture) yang dimiliki perusahaan. Includes: 1. Corporate vision; 2. Corporate mission; 3. Information that the vision and mission have been reviewed and approved by the Board of Directors/Board of Commissioners in the fiscal year; and 4. Statement on the Company's corporate culture.	109-113



No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
6.	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris Identity and brief CV of members of Board of Commissioners	Informasi memuat antara lain: 1. Nama; 2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Domisili; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan 7. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk. The information contains, among others: 1. Name; 2. Position and tenure (including position in the company or other institutions); 3. Age; 4. Domicile; 5. Educations (Field of Study and Educational Institution); 6. Work experience (Position, Institution, and Tenure); and 7. Appointment history (period and tenure) as the member of Board Of Commissioners in the Company since first appointed.	116-121
7.	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi Identity and brief CV of members of the Board of Directors	Informasi memuat antara lain: 1. Nama; 2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Domisili; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan 7. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Direksi di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk. The information contains, among others: 1. Name; 2. Position and tenure (including position in the company or other institutions); 3. Age; 4. Domicile; 5. Educations (Field of Study and Educational Institution); 6. Work experience (Position, Institution, and Tenure); and 7. Appointment history (period and tenure) as the member of Board Of Directors in the Company since first appointed.	122-127
8.	Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan data pengembangan kompetensi karyawan yang mencerminkan adanya kesempatan untuk masing-masing level organisasi. Total number of employees (2 years' comparison) and description of competency development which reflects the opportunity for each level of organization.	Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi; 2. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan; 3. Jumlah karyawan berdasarkan status kepegawaian; 4. Data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan pada tahun buku yang terdiri dari pihak (level jabatan) yang mengikuti pelatihan, jenis pelatihan, dan tujuan pelatihan; dan 5. Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan pada tahun buku. The information contains, among others: 1. Number of employees on each organizational level; 2. Number of employees on each educational level; 3. Number of employees by employment status; 4. Data of employee competence development conducted on the fiscal year, which includes the employee (position) attended training, type of training, and the purposes of training; and 5. Incurred costs for employee competency development on the fiscal year.	138-154

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
9.	Komposisi Pemegang Saham. Shareholders Composition.	Mencakup antara lain: 1. Rincian nama pemegang saham yang meliputi 20 pemegang saham terbesar dan persentase kepemilikannya; 2. Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikannya meliputi: a. Nama Pemegang Saham yang memiliki 5% atau lebih saham; dan b. Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%. 3. Nama Direktur dan Komisaris serta persentase kepemilikan sahamnya secara langsung dan tidak langsung. Catatan: apabila Direktur dan Komisaris tidak memiliki saham langsung dan tidak langsung, agar diungkapkan. Includes, among others: 1. Detailed name of shareholders comprises of 20 largest shareholders and their shareholding percentage; 2. Details of shareholders and their shareholding percentage include: a. Name of shareholders with 5% or more percent of shares; and b. Community shareholding groups with their respective shareholding of less than 5%. 3. Name of Director and Commissioner as well as their shareholding percentage, directly or indirectly. Remark: if Director and Commissioner do not have direct and indirect share, explanation shall be given.	155-156
10.	Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi. List of subsidiaries and/or associates.	Dalam bentuk tabel memuat informasi antara lain: 1. Nama entitas anak dan/atau asosiasi; 2. Persentase kepemilikan saham; 3. Keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi; dan 4. Keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi). In the form of table, covers information: 1. Name of subsidiaries and/or associates; 2. Shareholding percentage; 3. Explanation on the subsidiaries and/or associates' field of business; and 4. Explanation of the operational status of the subsidiaries and/or associates (in operation or has not yet operate).	160-174
11.	Struktur grup perusahaan. Company's group structure.	Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas induk, entitas anak, entitas asosiasi, joint venture, dan special purpose vehicle (SPV). Company's group structure in the form of chart, describing the parent entity, subsidiaries, associates, joint ventures, and special purpose vehicles (SPVs).	157-159
12.	Kronologi penerbitan saham (termasuk private placement) dan/atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku. Chronologies of shares issuance (including private placement) and/or listing of shares from the issuance date until the end of fiscal year.	Mencakup antara lain: 1. Tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, dan harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (corporate action); 2. Jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (corporate action); dan 3. Nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi pencatatan saham, agar diungkapkan. Includes, among others: 1. Year of share issuance, number of shares, shares' nominal value, and shares price for each corporate action; 2. Shares number listed after each corporate action; and 3. Name of stock exchange where the shares are listed. Remark: if the company does not have share listing chronologies, explanation shall be given.	183



No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
13.	Kronologi penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku. Chronologies of issuance and/or listing of other securities from the issuance date until the end of fiscal year.	Mencakup antara lain: 1. Nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalan efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya; 2. Nilai penawaran efek lainnya; 3. Nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan; dan 4. Peringkat efek. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi penerbitan dan pencatatan efek lainnya, agar diungkapkan. Includes, among others: 1. Name of other securities, year of other securities issuance, interest rate/exchange for other securities, and other securities maturity date; 2. Offer value of other securities; 3. Name of stock exchange where the other securities are listed; and 4. Other securities rating. Remark: if the company does not have other securities issuance and listing chronologies, explanation shall be given.	183
14.	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang. Names and addresses of supporting institutions and/or professions.	Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan; 2. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik; dan 3. Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek. The information contains, among others: 1. Name and address of Securities Administration Bureau (BAE)/parties administrating company's securities; 2. Name and address of Public Accounting Firm; and 3. Name and address of rating agency.	181-183
15.	Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional. Awards received in the current fiscal year and/or certification that is still valid in the current fiscal year, both national and international scale.	Informasi memuat antara lain: 1. Nama penghargaan dan/atau sertifikasi; 2. Tahun perolehan penghargaan dan/atau sertifikasi; 3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikasi; dan 4. Masa berlaku (untuk sertifikasi). The information contains, among others: 1. Name of the award and/or certification; 2. Year of the achievement of awards and/or certification; 3. The agency appreciator and/or certificates; and 4. Validity period (for certification).	34-47
16.	Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada). Name and address for subsidiaries and/or branch offices or representative office (if any).	Memuat informasi antara lain: 1. Nama dan alamat entitas anak; dan 2. Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, kantor cabang, dan kantor perwakilan, agar diungkapkan. The information encloses, among others: 1. Names and addresses of subsidiaries; and 2. Names and addresses of branch/representative offices. Remark: explanation shall be given in the event that the company does not have any subsidiaries/branches/representatives.	178-180

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
17.	Informasi pada Website Perusahaan. Information on the Company's Website.	Meliputi paling kurang: 1. Informasi Pemegang Saham sampai dengan pemilik akhir individu; 2. Isi Kode Etik; 3. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan; 4. Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir); 5. Profil Dewan Komisaris dan Direksi; dan 6. Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal. Covers at least: 1. Information on Shareholders to last individual owner; 2. Code of Conducts; 3. Information on General Meeting of Shareholders (GMS) at least covers the agenda discussed in the GMS, Minutes of GMS, and important dates, i.e. announcement of GMS date, summoning date for GMS, date of GMS, date of announcement for Minutes of GMS; 4. Separate annual financial statements (the last 5 years); 5. Board Of Commissioners and Board of Directors' Profile; and 6. Charters of Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, and Internal Audit Unit.	184-185
18.	Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal. Education and/or training for Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit.	Meliputi paling kurang informasi (jenis dan pihak yang relevan dalam mengikuti): 1. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Dewan Komisaris; 2. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Direksi; 3. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Audit; 4. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Nominasi dan Remunerasi; 5. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Lainnya; 6. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Sekretaris Perusahaan; dan 7. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Unit Audit Internal, yang diikuti pada tahun buku. Catatan: apabila tidak terdapat pendidikan dan/atau pelatihan pada tahun buku, agar diungkapkan Covers at least information (type and party relevant in attending): 1. Education and/or training for Board of Commissioners; 2. Education and/or training for the Board of Directors; 3. Education and/or training for Audit Committee; 4. Education and/or training for Nomination and Remuneration Committee; 5. Education and/or training for other Committee; 6. Education and/or training for Corporate Secretary; and 7. Education and/or training for Internal Audit Unit, attended on the fiscal year. Remark: if there is no education and/or training on the fiscal year, explanation shall be given.	128-137
V. Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan Management Discussion and Analysis of Company's Performance			
1.	Tinjauan operasi per segmen usaha. Operational review per business segment.	Memuat uraian mengenai: 1. Penjelasan masing-masing segmen usaha. 2. Kinerja per segmen usaha, antara lain: a. Produksi; b. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi; c. Penjualan/pendapatan usaha; dan d. Profitabilitas. Contains descriptions of: 1. Explanation of each business segment. 2. Performance of each business segment, among others: a. Productions; b. Increase/decrease in productions capacity; c. Sales/revenues; and d. Profitability.	240-265



No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
2.	Uraian atas kinerja keuangan perusahaan. Description of the company's financial performance.	Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/penurunan suatu akun (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai: 1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; 2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas; 3. Ekuitas; 4. Penjualan/pendapatan usaha, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan penghasilan komprehensif periode berjalan; dan 5. Arus kas. Analysis of financial performance containing comparisons between current financial performance and previous year's financial performance and causes for the increase/decrease (in narration and tables), among others concerning: 1. Current assets, non-current assets, and total assets; 2. Short-term liabilities, long-term liabilities, and total liabilities; 3. Equity; 4. Sales/revenues, expenses, profit (loss), other comprehensive incomes, and total comprehensive profit of the current period; and 5. Cash flow.	266-297
3.	Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan. Discussion and analysis of the company's solvency and liquidity by presenting ratios that are relevant to the company's industry.	Penjelasan tentang: 1. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan 2. Tingkat kolektibilitas piutang. Explanation on: 1. Solvency for short-term and long-term debts; and 2. Collectability Level of Receivables.	298-306
4.	Bahasan tentang struktur modal (<i>capital structure</i>) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure policy</i>). Discussion on capital structure and capital structure policy.	Penjelasan atas: 1. Rincian struktur modal (<i>capital structure</i>) yang terdiri dari utang berbasis bunga/sukuk dan ekuitas; dan 2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure policies</i>); dan 3. Dasar pemilihan kebijakan manajemen atas struktur modal. Explanation on: 1. Capital structure, consists of interest/sukuk-based debt and equity; and 2. Management policy on capital structure policies; and 3. The management basis for the capital structure policy chosen.	307-308
5.	Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal (bukan ikatan pendanaan) pada tahun buku terakhir. Discussion on material commitments for capital investments (not funding investment) in the current fiscal year.	Penjelasan tentang: 1. Nama pihak yang melakukan ikatan; 2. Tujuan dari ikatan tersebut; 3. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut; 4. Mata uang yang menjadi denominasi; dan 5. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait. Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan. Explanation on: 1. Name of the party involved in the commitments; 2. The purpose of the commitments; 3. Sources of funds expected to meet these commitments; 4. Currency used; and 5. Planned measures to protect the company from risks arising from relevant currency. Remark: explanation shall be given in the event that the company does not have any commitments relating to capital investments in the current fiscal year.	309-321

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
6.	Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir. Discussion on capital expenditures realized in the current fiscal year.	Penjelasan tentang: 1. Jenis investasi barang modal; 2. Tujuan investasi barang modal; dan 3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan. Explanation on: 1. Type of capital expenditure; 2. Purposes of the capital expenditures; and 3. Investment value of capital expenditures spent in the current fiscal year. Remark: explanation shall be given in the event that there were no capital expenditures realizations.	322-324
7.	Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, dan lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan. Information on comparisons between the fiscal year's targets and realizations, and expected targets or projection for the coming year relating to revenue, profit, capital structure, and other matters considered important to the company.	Informasi memuat antara lain: 1. Perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi); dan 2. Target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun mendatang. The information contains, among others: 1. Comparisons between the fiscal year's targets and realizations; and 2. Expected targets or projection for the coming year.	325-333
8.	Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan. Material fact and information after the accounting reporting date.	Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang. Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan. Material information and facts occurring after the date of the accountant's report and its impact on future performance and business risks. Remark: explanation shall be given in the event that there were no significant events after	352
9.	Uraian tentang prospek usaha perusahaan. Description of company's business prospect.	Uraian mengenai prospek perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya. Description of business prospect related to the industry and economy in general, followed by quantitative supporting data from reliable sources.	363-369
10.	Uraian tentang aspek pemasaran. Description of marketing aspects.	Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar. Description of marketing aspect on company products and/or services, among other marketing strategies and market share.	360-362
11.	Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir. Description of dividend policy and amount of cash dividends per share and amount of dividends per year announced or paid for the last 2 (two) fiscal years.	Memuat uraian mengenai: 1. Kebijakan pembagian dividen; 2. Total dividen yang dibagikan; 3. Jumlah dividen kas per saham; 4. <i>Payout ratio</i> ; dan 5. Tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas. untuk masing-masing tahun. Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya. Contains descriptions of: 1. Policy on distribution of dividends; 2. Total dividends distributed; 3. Amount of cash dividends per share; 4. Payout ratio; and 5. Date of announcement and payment of cash dividends for each year. Remark: explanation shall be given in the event that any distribution of dividends is nonexistent.	334-335



No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
12.	Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP) yang masih ada sampai tahun buku. Employee and/or Management Stock Ownership Plan (ESOP/MSOP) carried out by the company until the fiscal year.	Memuat uraian mengenai: 1. Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya; 2. Jangka waktu; 3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan 4. Harga exercise. Catatan: apabila tidak memiliki program dimaksud, agar diungkapkan. Contains descriptions of: 1. Total ESOP/MSOP shares and its realization; 2. Term; 3. Requirements for entitled employees and/or management; and 4. Exercise price. Remark: explanation shall be given in the event that there is no program concerned.	337
13.	Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana). Realization of the use of proceeds from public offering (in the event that the company still has the obligation to report the proceed use realization).	Memuat uraian mengenai: 1. Total perolehan dana; 2. Rencana penggunaan dana; 3. Rincian penggunaan dana; 4. Saldo dana; dan 5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPU atas perubahan penggunaan dana (jika ada). Catatan: apabila tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, agar diungkapkan. Contains descriptions of: 1. Total proceeds; 2. Planned use of the proceeds; 3. Detailed use of the proceeds; 4. Balance of proceeds; and 5. Date of GMS/GMB approval on changes in the use of proceeds (if any). Remark: If there is no information on realization of the use of proceeds from public offering, explanation shall be given.	337
14.	Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi. Information on material transactions with conflict of interest and/or transactions with affiliated or related parties.	Memuat uraian mengenai: 1. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi; 2. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; 3. Alasan dilakukannya transaksi; 4. Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir; 5. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme review atas transaksi; dan 6. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait. Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan. Contains descriptions of: 1. Name of affiliates and the nature of affiliation; 2. Explanation of the fairness of transaction; 3. Reason behind the transaction; 4. Realization of transactions in the current fiscal year; 5. Company policy relating to review mechanism on transactions; and 6. Compliance with relevant regulations and provisions. Remark: explanation shall be given in the event that there is no transaction concerned.	338
15.	Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir. Description of regulatory changes having significant impact on the company in the current fiscal year.	Uraian memuat antara lain: 1. Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan; dan 2. Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan. Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan. The descriptions contain, among others: 1. Name of the law changed; and 2. Its impacts (quantitative and/or qualitative) on the company (if significant) or statement that the impact was not significant. Remark: explanation shall be given in the event that there was no regulatory change on the current fiscal year.	348-351
16.	Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir. Description of changes in accounting policies applied by the company in the current fiscal year.	Uraian memuat antara lain: 1. Perubahan kebijakan akuntansi; 2. Alasan perubahan kebijakan akuntansi; dan 3. Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan. Catatan: apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan. The descriptions contain, among others: 1. Amendment to accountancy policy; 2. The reasons for the amendment; and 3. Its impact quantitatively towards financial statement. Remark: explanation shall be given in the event that there are no changes in accounting policies.	346-347

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
17.	Informasi kelangsungan usaha. Business continuity information.	Pengungkapan informasi mengenai: - Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir; <i>Assessment</i> manajemen atas hal-hal pada angka 1; dan - Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan <i>assessment</i>. Catatan: apabila tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir. Disclosure of information includes: - Potential matters that may significantly affect the business continuity on the current fiscal year; - Management assessment on matters in point 1; and - Management assumption in carrying out the assessment. Remark: if there were no issues that would affect Company's business continuity in the current fiscal year, the Management's assumption as the base to ensure that there were no potential issues that would significantly affect the business continuity on the current fiscal year shall be disclosed.	355

VI. Good Corporate Governance

1.	Uraian Dewan Komisaris. Board of Commissioners' description.	Uraian memuat antara lain: - Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris; - Penilaian atas kinerja masing-masing komite yang berada di bawah Dewan Komisaris dan dasar penilaiannya; dan - Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris). The descriptions contain, among others: - Description of responsibilities of the Board of Commissioners; - Assessment on performance of each committee reporting directly to the Board of Commissioners and the basis of assessment; and - Disclosure of the Board Charter (guidelines and codes of conduct of the Board of Commissioners).	408-427
2.	Komisaris Independen (jumlahnya minimal 30% dari total Dewan Komisaris). Independent Commissioners (the number is minimum 30% from the total of Board of Commissioners).	Meliputi antara lain: - Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan - Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen. Includes, among others: - The criteria of Independent Commissioner appointment; and - Statement of independence from each Independent Commissioner.	410
3.	Uraian Direksi. Board of Directors' descriptions.	Uraian memuat antara lain: - Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; - Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Direksi (jika ada); dan - Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Direksi). The descriptions contain, among others: - Scopes of work and responsibilities of each Board of Directors' member; - Assessment on performance of committees reporting directly to the Board of Directors (if available); and - Disclosure of the Board Charter (guidelines and codes of conduct of Board of Directors).	428-445
4.	Penilaian Penerapan GCG untuk tahun buku 2019 yang meliputi paling kurang aspek Dewan Komisaris dan Direksi. Assessment on GCG Implementation for the fiscal year of 2019 consisting of the very least aspects on the Board of Commissioners and Directors.	Memuat uraian mengenai: - Kriteria yang digunakan dalam penilaian; - Pihak yang melakukan penilaian; - Skor penilaian masing-masing kriteria; - Rekomendasi hasil penilaian; dan - Alasan belum/tidak diterapkannya rekomendasi. Catatan: apabila tidak ada penilaian penerapan GCG untuk tahun buku 2018, agar diungkapkan. Contains descriptions of: - The criteria utilized in assessment; - Assessing party; - Assessment score on each criterion; - Assessment result recommendation; and - Reasons on why recommendations are not/have not yet implemented. Remark: If there is no assessment on GCG implementation for the fiscal year of 2018, it shall be disclosed.	379-385, 427, 445



No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
5.	Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi. Description of remuneration policy for the Board of Commissioners and Directors.	Mencakup antara lain: 1. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Dewan Komisaris; 2. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Direksi; 3. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Dewan Komisaris; 4. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Direksi; 5. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi; dan 6. Pengungkapan bonus kinerja, bonus non kinerja, dan/atau opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi (jika ada). Catatan: apabila tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja, dan opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, agar diungkapkan. Includes, among others: 1. Disclosure of remuneration procedure, from nomination to determination of remuneration for Board of Commissioners; 2. Disclosure of remuneration procedure, from nomination to determination of remuneration for Board of Directors; 3. Remuneration structure that indicates components of remuneration and nominal amount of each component for each Board of Commissioners' member; 4. Remuneration structure that indicates components of remuneration and nominal amount of each component for each Board of Directors' member; 5. Disclosure of indicators for the determination of Board of Directors' remuneration; and 6. Disclosure of performance bonus, non-performance bonus, and/or stock option that are received by each Board of Commissioners and Directors' member (if available). Remark: If there is no performance bonus, non-performance bonus, and/or stock option that are received by each Board of Commissioners and Directors' member, it shall be disclosed.	453-458
6.	Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat yang dihadiri mayoritas anggota pada rapat Dewan Komisaris (minimal 1 kali dalam 2 bulan), Rapat Direksi (minimal 1 kali dalam 1 bulan), dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi (minimal 1 kali dalam 4 bulan). Frequency and Meeting Attendance Rate that is attended by the majority of members on Board of Commissioners' meeting (at least once in two months), Board of Directors' meeting (at least once in a month), and Joint Meeting between Board of Commissioners and Directors (at least once in four months).	Informasi memuat antara lain: 1. Tanggal Rapat; 2. Peserta Rapat; dan 3. Agenda Rapat. untuk masing-masing rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan rapat gabungan. The information contains, among others: 1. Meeting Date; 2. Meeting Participants; and 3. Meeting Agenda. for each meeting of Board of Commissioners, Board of Directors, and Joint Meetings.	418-423, 437-442
7.	Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu. Information on major and controlling shareholders, both directly and indirectly, to individual holders.	Informasi dimuat dalam bentuk skema atau diagram yang memisahkan Pemegang Saham utama dengan pemegang saham pengendali. Catatan: yang dimaksud pemegang saham utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan, tetapi bukan pemegang saham pengendali. Informal education must be disclosed in the form of a scheme or diagram that separates major Shareholders from controlling shareholders. Remark: what referred to as major shareholders are the party that, both directly and indirectly, has at least 20% (twenty percent) of voting right from the total of shares that are published by a company, but is not the controlling shareholders.	390

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
8.	Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali. Disclosure of affiliations between members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and the Major and/or Controlling Shareholders.	Mencakup antara lain: 1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya; 2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; 3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali; 4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan 5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali. Catatan: apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan. Includes, among others: 1. Affiliate relationship between fellow members of the Board of Directors; 2. Affiliate relationship between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners; 3. Affiliate relationship between members of the Board of Directors and the Major and/or Controlling Shareholders; 4. Affiliation between fellow members of Board of Commissioners; and 5. Affiliation between fellow members of the Board of Commissioners and the Major and/or Controlling Shareholders. Remark: If there is no aforementioned affiliation, it shall be disclosed.	446-447
9.	Komite Audit. Audit Committee.	Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan periode jabatan anggota komite audit; 2. Riwayat pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan) dan pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat) anggota komite audit; 3. Independensi anggota komite audit; 4. Uraian tugas dan tanggung jawab; 5. Uraian pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku; dan 6. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit. Includes, among others: 1. The name, position, and work period of audit committee members; 2. Education history (field of study and education institution) and work experience (position, institution, and work period) of audit committee members; 3. Independence of audit committee members; 4. Description of duties and responsibilities; 5. Description of audit committee activities implementation on the fiscal year; and 6. Meeting frequency and attendance of audit committee.	459-470
10.	Komite Nominasi dan/atau Remunerasi. Nomination and/or Remuneration Committee.	Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite nominasi dan/atau remunerasi; 2. Independensi komite nominasi dan/atau remunerasi; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan/atau remunerasi pada tahun buku; 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite nominasi dan/atau remunerasi; 6. Pernyataan adanya pedoman komite nominasi dan/atau remunerasi; dan 7. Kebijakan mengenai suksesi direksi. Includes, among others: 1. Names, positions, and brief life history of nomination and/or remuneration committee members; 2. Independence of nomination and/or remuneration committee; 3. Description of duties and responsibilities; 4. Description of nomination and/or remuneration committee activities implementation on the fiscal year; 5. Meeting frequency and attendance of nomination and/or remuneration committee; 6. Statements about the existence of guidelines for nomination and/or remuneration committee; and 7. Policy relating to the board of directors' succession.	496-497
11.	Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh Perusahaan. Other committees reporting directly to the Board of Commissioners that are owned by Company.	Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain; 2. Independensi komite lain; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain pada tahun buku; dan 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain. Includes, among others: 1. Names, positions, and brief life history of other committee members; 2. Independence of other committee; 3. Description of duties and responsibilities; 4. Description of other committee activities implementation on the fiscal year; and 5. Meeting frequency and attendance of others committee.	470-495



No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
12.	Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan. Description of duties and functions of Corporate Secretary.	Mencakup antara lain: 1. Nama, dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan; 2. Domisili; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; dan 4. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku. Includes, among others: 1. Name, and brief CV of corporate secretary; 2. Domicile; 3. Description of duties and responsibilities; and 4. Description of corporate secretary's duties implementation on the fiscal year.	502-509
13.	Uraian mengenai unit audit internal. Description of internal audit unit.	Mencakup antara lain: 1. Nama ketua unit audit internal; 2. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal; 3. Sertifikasi sebagai profesi audit internal; 4. Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan; 5. Uraian pelaksanaan kegiatan unit audit internal pada tahun buku; dan 6. Pihak yang mengangkat dan memberhentikan ketua unit audit internal. Includes, among others: 1. Name of head of internal audit unit; 2. The number of employee (internal auditor) on internal audit unit; 3. Certification as internal audit profession; 4. The position of internal audit unit within organizational structure; 5. Description of internal audit unit activities implementation on the fiscal year; and 6. Parties appointing and discharging head of internal audit unit.	515-527
14.	Akuntan Publik. Public Accountant.	Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 2. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 3. Besarnya fee untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir; dan 4. Jasa lain yang diberikan Kantor Akuntan Publik dan akuntan publik selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan. The information contains, among others: 1. The name and year of public accountant that performs audit on annual financial statements for the past 5 years; 2. The name and year of Public Accountants Firm that performs audit on annual financial statements for the past 5 years; 3. The amount of fee for each type of service that is provided by Public Accountants Firm on the last fiscal year; and 4. Other service provided by Public Accountants Firm and public accountant other than auditing service on annual financial statement on the current fiscal year. Remark: explanation shall be given in the event that there is no service aforementioned.	528-530
15.	Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan. Description of the company's risk management.	Mencakup antara lain: 1. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan; 2. Penjelasan mengenai hasil revidu yang dilakukan atas sistem manajemen risiko pada tahun buku; 3. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan; dan 4. Upaya untuk mengelola risiko tersebut. Includes, among others: 1. Explanation of risk management system implemented by the company; 2. Explanation of review result carried over risk management system on the fiscal year; 3. Explanation of risks experienced by the company; and 4. Efforts implemented in managing those risks.	531-549

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
16.	Uraian mengenai sistem pengendalian intern. Description of internal control system.	Mencakup antara lain: 1. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional; 2. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional (COSO – internal control framework); dan 3. Penjelasan mengenai hasil reviu yang dilakukan atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pada tahun buku. Includes, among others: 1. Brief explanation of internal control system, among them are financial and operational control. 2. Explanation of compliance between applied internal control system and regulated framework that is acknowledged internationally (COSO-internal control framework); and 3. Explanation of review result carried out over internal control system implementation on the fiscal year.	510-514
17.	Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan tanggung jawab sosial. Description of corporate social responsibility that is related to social responsibilities.	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Informasi komitmen pada tanggung jawab sosial. 2. Informasi mengenai methoda dan lingkup <i>due diligent</i> terhadap dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari aktifitas perusahaan. 3. Informasi tentang <i>stakeholder</i> penting yang terdampak atau berpengaruh pada dampak dari kegiatan perusahaan. 4. Informasi tentang isu-isu penting sosial ekonomi dan lingkungan terkait dampak kegiatan perusahaan. 5. Informasi tentang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan baik yang merupakan kewajiban maupun yang melebihi kewajiban. 6. Informasi tentang strategi dan program kerja perusahaan dalam menangani isu isu sosial, ekonomi dan lingkungan dalam upaya <i>stakeholders engagement</i> dan meningkatkan <i>value</i> untuk <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i>. 7. Informasi tentang berbagai program yang melebihi tanggung jawab minimal perusahaan yang relevan dengan bisnis yang dijalankan. 8. Informasi tentang pembiayaan dan anggaran tanggung jawab sosial. Includes information on: 1. Information on commitment to social responsibility 2. Information on methods and scope of due diligence on social, economic, and environmental impacts of the company activities 3. Information on important stakeholders affected or influenced by the impact of company activities 4. Information on important socio-economic and environmental issues related to the impact of company activities 5. Information on the scope of corporate social responsibility that is both an obligation or more than obligation 6. Information on the company's strategies and work programs in handling social, economic, and environmental issues in stakeholders' engagement, and increasing value for stakeholders and shareholders 7. Information on various programs that exceed the company's minimum responsibilities that are relevant to the business implementation 8. Information about financing and budgets of social responsibility	608-618
18.	Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait <i>core subject</i> Hak Azasi Manusia Description of corporate social responsibility related to the core subject of Human Rights	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Informasi tentang komitmen dan kebijakan tanggung jawab sosial <i>core subject</i> Hak Azasi Manusia. 2. Informasi tentang rumusan perusahaan lingkup tanggung jawab sosial <i>core subject</i> Hak Azasi Manusia. 3. Informasi tentang perencanaan <i>corporate social responsibility</i> bidang Hak Azasi Manusia. 4. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR bidang Hak Azasi Manusia. 5. Informasi tentang capaian dan penghargaan inisiatif CSR bidang Hak Azasi Manusia. Includes information on: 1. Information on the commitment and policies of the core subject of social responsibility, i.e. Human Rights 2. Information on the formulation on the core subject of social responsibility, i.e. Human Rights 3. Information on the planning of the core subject of social responsibility, in Human Rights 4. Information on the CSR initiatives implementation in Human Rights 5. Information on the CSR awards and achievement in Human Rights	619-625



No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
19.	Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait <i>core subject</i> Operasi yang adil. Description of corporate social responsibility related to the core subject, i.e. fair operations	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Informasi tentang komitmen dan kebijakan tanggung jawab sosial <i>core subject</i> Operasi yang adil. 2. Informasi tentang rumusan perusahaan lingkup tanggung jawab sosial <i>core subject</i> operasi yang adil. 3. Informasi tentang perencanaan <i>corporate social responsibility</i> bidang operasi yang adil. 4. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR bidang operasi yang adil. 5. Informasi tentang capaian dan penghargaan inisiatif CSR bidang operasi yang adil. Includes information on: 1. Information on the commitment and policies of the core subject of social responsibility, i.e. fair operations 2. Information on the formulation on the core subject of social responsibility, i.e. fair operations 3. Information on the planning of the core subject of social responsibility, in fair operations 4. Information on the CSR initiatives implementation in fair operations 5. Information on the CSR awards and achievement in fair operations	626-630
20.	Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan lingkungan hidup. Description of corporate social responsibility related to environment.	Mencakup antara lain: 1. Informasi tentang komitmen dan kebijakan lingkungan. 2. Informasi tentang dampak dan resiko lingkungan penting yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan perusahaan. 3. Informasi tentang target/rencana kegiatan pada tahun 2018 yang ditetapkan manajemen. 4. Informasi tentang kegiatan yang dilakukan dan terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan. 5. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR terkait lingkungan hidup. 6. Informasi tentang capaian dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut; dan, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, mekanisme pengaduan masalah lingkungan, pertimbangan aspek lingkungan dalam pemberian kredit kepada nasabah, dan lain-lain. 7. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki. Includes, among others: 1. Information on environmental commitments and policies 2. Information on important environmental impacts and risks that are directly or indirectly related to the company 3. Information about the target/plan of activities in 2018 set forth by management; 4. Information about activities carried out in relation to the environmental programs related to the company's operational activities 5. Information on CSR initiatives related to environment 6. Information related to the quantitative impacts of such programs; and material utilization that is environment-friendly and recyclable, company's waste processing system, environmental issues complaint mechanism, considerations on credit grants to customer related to environmental aspects, etc. 7. Certification acquired in the environmental field.	631-647
21.	Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Description of corporate social responsibility that is related to employment, health, and work safety	Mencakup antara lain: 1. Kebijakan dan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan <i>core subject</i> ketenagakerjaan. 2. Informasi lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang ketenagakerjaan. 3. Informasi terkait target/rencana kegiatan pada tahun 2018 yang ditetapkan manajemen; dan 4. Kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut. 5. Informasi terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan <i>gender</i> dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat <i>turnover</i> karyawan, tingkat kecelakaan kerja, remunerasi, mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan, dan lain-lain. Includes, among others: 1. Corporate social responsibility commitment and policies related to employment 2. Information on the scope and formulation of social responsibility in the field of employment 3. Information about the target/plan of activities in 2018 set forth by management; and 4. Activities that have been carried out and quantitative effects out of those activities 5. Information related to employment, occupational health, and safety practices, such as gender equality and equal work opportunity, occupational facilities and safety, employee turnover rate, workplace accidents, remuneration, whistleblowing mechanism on employment, etc.	648-663

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
22.	Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen. Description of corporate social responsibility that is related to responsibilities to consumers.	Mencakup antara lain: 1. Target/rencana kegiatan yang pada tahun 2018 ditetapkan manajemen; dan 2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut 3. Terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanganan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain. Includes, among others: 1. Goals/activity plan in the year 2018 that was established by management; and 2. Activities that have been carried out and effects from those activities 3. Related to product responsibility, such as consumer's health and safety, product information, facilities, number and response on customers' complaints, etc.	664-670
23.	Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan. Description of corporate social responsibility that is related to social and community development	Mencakup antara lain: 1. Kebijakan dan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan <i>core subject</i> pengembangan sosial dan kemasyarakatan. 2. Informasi tentang isu sosial yang relevan dengan perusahaan. 3. Informasi tentang resiko sosial yang dikelola perusahaan. 4. Informasi lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan. 5. Target/rencana kegiatan pada tahun 2018 yang ditetapkan manajemen. 6. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut; dan 7. Biaya yang dikeluarkan. 8. Terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi, pelatihan mengenai anti korupsi, dan lain-lain. Includes, among others: 1. Core corporate social responsibility policies and commitments, the core subject of social and community development 2. Information on social issues that are relevant to the company 3. Information about social risks managed by the company 4. Information on the scope and formulation of social responsibility in the field of social and community development 5. Goals/activity plan in the year 2018 that was established by management; 6. Activities that have been carried out and effects from those activities; and 7. Expenditure 8. Related to social and community development, such as the use of local workforce, empowerment of surrounding communities, reparation of social facilities and infrastructure, other forms of donations, dissemination on anti-corruption policies and procedures, training on anti-corruption, etc.	671-688
24.	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan. Significant cases currently faced by the company, subsidiaries, Board of Directors and/or Board of Commissioners member(s) serving during the period of the annual report	Mencakup antara lain: 1. Pokok perkara/gugatan; 2. Status penyelesaian perkara/gugatan; 3. Risiko yang dihadapi perusahaan dan nilai nominal tuntutan/gugatan; dan 4. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi). Catatan: dalam hal perusahaan, entitas anak, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi tidak memiliki perkara penting, agar diungkapkan. Includes, among others: 1. Principle case/lawsuit; 2. Dispute/lawsuit settlement status; 3. Risks faced by the company and nominal value of dispute/lawsuit; and 4. Administrative sanctions imposed to Entity, Board of Commissioners and Board of Directors members, by relevant authorities (capital market, banking, and others) on the current fiscal year (or statement confirming no imposition of administrative sanction exists). Remark: explanation shall be given in the event that the company, subsidiaries, or member of the Board of Commissioners and Board of Directors do not have any disputes.	585-588
25.	Akses informasi dan data perusahaan. Access to information and corporate data.	Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, mailing list, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya. Description of the availability of company information and data to the public, such as through website (in Bahasa Indonesia and English), mass media, mailing list, bulletin, analyst meeting, etc.	598-605



No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
26.	Bahasan mengenai kode etik. Discussion on code of ethics.	Memuat uraian antara lain: 1. Pokok-pokok kode etik; 2. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi; 3. Penyebarluasan kode etik; 4. Sanksi untuk masing-masing jenis pelanggaran yang diatur dalam kode etik (normatif); dan 5. Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan. The descriptions contain, among others: 1. Code of ethics basis; 2. Disclosure that the code of ethics applies to all levels of organization; 3. Dissemination of the code of ethics; 4. Sanctions on each type of violations that are regulated on the code of ethics (normative); and 5. Number of code of ethics violation with the sanctions given on current fiscal year. Remark: explanation shall be given in the event that there is no code of ethics violation in the current fiscal year.	550-561
27.	Pengungkapan mengenai <i>whistleblowing system</i> . Disclosure on whistleblowing system.	Memuat uraian tentang mekanisme <i>whistleblowing system</i> antara lain: 1. Penyampaian laporan pelanggaran; 2. Perlindungan bagi <i>whistleblower</i> ; 3. Penanganan pengaduan; 4. Pihak yang mengelola pengaduan; dan 5. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir; dan 6. Sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah selesai diproses pada tahun buku. Catatan: apabila tidak terdapat pengaduan yang masuk dan telah selesai diproses pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan. Consists of the description of whistleblowing system, i.e.: 1. Submission of violation reports; 2. Whistleblower protection; 3. Handling of complaints; 4. Parties handling the complaints; and 5. Number of complaints received and processed in the current fiscal year; and 6. Sanctions/follow up on the complaints when the process is finished on fiscal year. Remark: Explanation shall be given in the event that there are no complaints received and processed until finish on the current fiscal year.	576-584
28.	Kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. Diversity policy for the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors.	Uraian kebijakan tertulis Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin. Catatan: apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya. Description of Company's policy on composition diversity of Board of Commissioners and Board of Directors by education (field of study), work experience, age, and gender. Remark: explanation and consideration shall be given in the event that concerned policy is nonexistent.	450-452

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
VII. Informasi Keuangan Financial Information			
1.	Surat Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan. Statements from the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the Accountability of Financial Statements.	Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan. Compliance with related regulations on the Accountability of Financial Statements.	694
2.	Opini auditor independen atas laporan keuangan. Independent auditor's opinion on financial statements.		696
3.	Deskripsi Auditor Independen di Opini. Independent auditor's description of the opinion.	Deskripsi memuat tentang: 1. Nama dan tanda tangan; 2. Tanggal Laporan Audit; dan 3. Nomor izin KAP dan nomor izin Akuntan Publik. The description consists of: 1. Names and signatures; 2. Dates of audit report; and 3. Public Accountants Firm's and Public Accountant's license numbers.	695-696
4.	Laporan keuangan yang lengkap. Comprehensive Financial Statements.	Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan: 1. Laporan posisi keuangan; 2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; 3. Laporan perubahan ekuitas; 4. Laporan arus kas; 5. Catatan atas laporan keuangan; 6. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya; dan 7. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan). Consists comprehensively of elements of financial statements: 1. Statements of financial position; 2. Statements of profit or loss and other comprehensive income; 3. Statements of changes in equity; 4. Statements of cash flows; 5. Notes on financial statements; 6. Comparative information regarding previous period; and 7. Statements of financial position at the beginning of comparative period presented when an entity applies an accounting policy retrospectively or makes statements of post-financial statements, or when an entity reclassifies posts in the financial statements (if relevant).	697-804
5.	Perbandingan tingkat profitabilitas. Comparison of profitability level.	Perbandingan kinerja/laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Comparison of performance/profit (loss) between current year and previous year.	699-700
6.	Laporan Arus Kas. Statements of Cash Flow.	Memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan; 2. Penggunaan metode langsung (<i>direct method</i>) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi; 3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan 4. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan. Fulfills the following regulations: 1. Classification in three categories of activity: operation, investment, and funding; 2. The use of direct method in cash flow reporting from operational activities; 3. Separation of presentation between cash receipts and/or cash expenses for the current year in operation, investment, and funding activities; and 4. Disclosure of non-cash transaction must be included in the notes to the financial statements.	702

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
7.	Ikhtisar Kebijakan Akuntansi. Accountancy Policy Highlights.	Meliputi sekurang-kurangnya: 1. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK; 2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan; 3. Pajak penghasilan; 4. Imbalan kerja; dan 5. Instrumen Keuangan. Consists at least: 1. Statement of compliance with Financial Accounting Standards (SAK); 2. Basis for the measurement and preparation of financial statements; 3. Income tax; 4. Employee benefits; and 5. Financial instruments.	704-739
8.	Pengungkapan transaksi pihak berelasi. Disclosure of transactions with related parties.	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi; 2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan 3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas terkait. Matters to be disclosed are as follows: 1. Names of related parties and the nature of relationship with these parties; 2. Transactional value and its percentage against total revenue and relevant expenses; and 3. Total balance and its percentage against total assets or liabilities related.	776-779
9.	Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan. Disclosure of matters relating to taxation.	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini; 2. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi; 3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan tahun 2016; 4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan 5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak. Matters to be disclosed: 1. Fiscal reconciliation and current tax expense calculation; 2. Explanation of relationship between tax expense (income) and accounting profit; 3. Statement acknowledging that Taxable Profits (LKP) from the reconciliation serves as the basis for Corporate Income Tax's Annual Tax Returns (SPT) year 2016; 4. Details of assets and deferred tax liabilities recognized in the financial position statement for each presenting period, and the amount of deferred tax (income) expenses recognized in the income statements if the amount is not visible in the total assets or liabilities of deferred tax recognized in the statements of financial position; and 5. Disclosure of any tax disputes.	762-766
10.	Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap. Disclosure of matters relating to fixed assets.	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Metode penyusutan yang digunakan; 2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya; 3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan 4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi. Matters to be disclosed: 1. Depreciation method used; 2. Description of accounting policy selected, either revaluation or cost model; 3. Methods and significant assumptions used to estimate fixed assets' fair value (for revaluation model) or disclosure of fixed assets' fair value (for cost model); and 4. Reconciliation of the gross carrying amount and accumulated depreciation of fixed assets at the beginning and the end of period by presenting: addition, reduction, and reclassification.	741-748

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
11.	Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi. Disclosure of matters relating to operational segment.	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan; 2. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan; 3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan 4. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama. Matters to be disclosed: 1. General information covering the factors used to identify unreported segment; 2. Information regarding profit and loss, assets, and liabilities of the reported segment; 3. Reconciliation of total revenue, profit and loss, assets, liabilities of the reported segment, and material elements of the other segments against relevant amount in the entity; and 4. Disclosure at the level of entity, covering information on products and/or services, geographical area, and main customer.	699, 703, 761
12.	Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan. Disclosure related to financial instruments.	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya; 2. Nilai wajar dan hirarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan; 3. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas; 4. Kebijakan manajemen risiko; dan 5. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif. Matters to be disclosed: 1. Details on financial instruments that are owned along with the classifications; 2. Fair value of each group of financial instruments; 3. Explanation on risks related to financial instruments; market risk, credit risk, and liquidity risk; 4. Risk management policy; and 5. Quantitative risk analysis relating to financial instruments.	794-802
13.	Penerbitan laporan keuangan. Publication of financial statements.	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan 2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan. Matters to be disclosed are as follows: 1. Authorization date of publication of the financial statements; and 2. Party responsible for authorizing financial statements.	694, 804





PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB)

Jl. Ketintang Baru No. 11
Surabaya (60231)
Jawa Timur, Indonesia

Phone : +62 31 8283 180

Fax : +62 31 8283 183

Email : info@ptpjb.com

www.ptpjb.com

